BUMN UNTUK INDONESIA

PLN Indonesia Power

Expanding Sustainable Business to be the Leader in the Energy Solutions Industry



Laporan Tahunan **2023** Annual Report

Tema dan Kesinambungan Tema
Theme and Theme Continuity



Expanding Sustainable Business to be the Leader in the Energy Solutions Industry

Ekspansi Bisnis merupakan salah satu strategi dan program utama PLN Indonesia Power di tahun 2023 terutama di bidang *Beyond* kWh *Business Development* dan berkaitan erat juga dengan bidang *Low Carbon Energy Development*. Sejalan dengan transformasi *Holding Subholding*, PLN Indonesia Power terus berkomitmen untuk memperkuat aset-aset inti pembangkit Kami dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna mencapai kinerja pembangkit berstandar dunia.

Pengembangan usaha Perusahaan untuk *Beyond* kWh dan Energi Baru Terbarukan (EBT) diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan di luar segmen penjualan tenaga listrik. Pengembangan usaha dengan implementasi program utama *Beyond* kWh *Business Development* diawali dengan tahap persiapan secara komprehensif, mencakup kajian *Cost Benefit Analysis* dari suatu proyek yang didukung kajian kelayakan operasional, kelayakan finansial, kajian lingkungan dan kajian legal hingga dieksekusi menjadi potensi pendapatan di kemudian hari. Pengembangan usaha ditujukan untuk memberikan manfaat bagi PLN Indonesia Power dengan menciptakan nilai dan pertumbuhan kinerja secara berkesinambungan. Selain itu, Kami terus melakukan penguatan dan menyempurnakan proses bisnis Perusahaan pasca transformasi *Holding Subholding* dalam mendukung tercapainya target kinerja Perusahaan dan sejalan dengan Misi Portofolio SOLID PLN.

Pengembangan usaha *Beyond* kWh merupakan kegiatan bisnis baru yang telah diinisiasi sejak tahun 2021. Untuk itulah, PLN Indonesia Power berupaya memenuhi kebutuhan SDM dan pengembangan kompetensi *business development* yang relevan bagi personil pengembangan usaha ini. Termasuk juga pengembangan kompetensi untuk fungsi *marketing* dengan kompetensi produk *Beyond* kWh. Selain itu, pemasaran terhadap produk *Beyond* kWh terus dilakukan baik di dalam maupun ke luar negeri. Mulai tahun ini PLN Indonesia Power menargetkan pembangunan pabrik solar PV berkapasitas mencapai 1 GWp setiap tahunnya.

Di tahun 2023, PLN Indonesia Power telah berhasil melakukan *groundbreaking* pabrik Sel Surya dan Panel Surya berkapasitas 1 GWp per tahun di Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah seluas 2200 Hektar dan meresmikan 12 *Green Hydrogen Plant* (GHP) di pembangkit Listrik PLN Indonesia Power yang tersebar di seluruh Indonesia. PLN Indonesia Power juga telah melakukan inisiatif kerja sama dalam bentuk penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara PLN Indonesia Power dengan sejumlah mitra bisnis telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Expanding business becomes a strategy and key program for PLN Indonesia Power for 2023, particularly in relation to Beyond kWh Business Development and Low Carbon Energy Development. In the spirit of Holding-Subholding transformation, PLN Indonesia Power remains committed to strengthening our core generation assets while optimizing the potential at hand in order to deliver world-class power plant performance.

The Company's business expansion beyond kWh as well as in the NRE sector is directed towards boosted revenues from non-electricity sales. With Beyond kWh Business Development as the key program, our business expansion starts with a comprehensive preparation that covers project cost benefit analysis supported by operational feasibility study, financial feasibility, environmental study, and legal study, to be followed by an execution that turns into potential revenues in the future. This business expansion is aimed at delivering benefits for PLN Indonesia Power through value creation and performance growth on an ongoing basis. We also strengthen and refine our business processes following the Holding-Subholding transformation in order to meet our performance target and keep up with SOLID PLN Portfolio Mission.

Beyond kWh business development is our latest endeavor which was initiated in 2021. This is the reason why PLN Indonesia Power makes a serious effort to provide the required human resources and business competency development that are relevant for the personnel in this area. Competency development also includes the marketing of Beyond kWh products. Beyond kWh products are marketed both nationally and internationally. Starting this year, PLN Indonesia Power targets the construction of solar PV manufacturing facilities at a minimum capacity of 1 GWp per year.

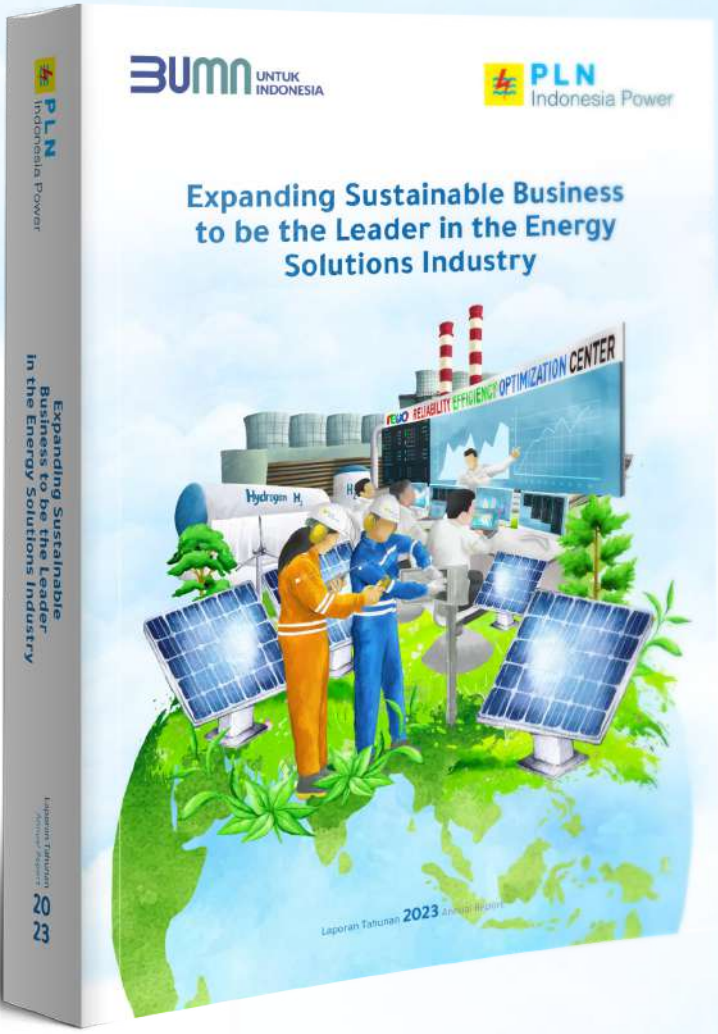
In 2023, PLN Indonesia Power held a groundbreaking ceremony for a solar cell and solar panel manufacturing facility at a capacity of 1 GWp per year in Kendal Industrial Park, Central Java, which spans 2,200 hectares. The Company also inaugurated 12 Green Hydrogen Plants (GHPs) in PLN Indonesia Power's power plants across Indonesia. Various collaboration initiatives through the execution of Memorandums of Understanding (MOUs) between PLN Indonesia Power and business partners were made both nationally and internationally.



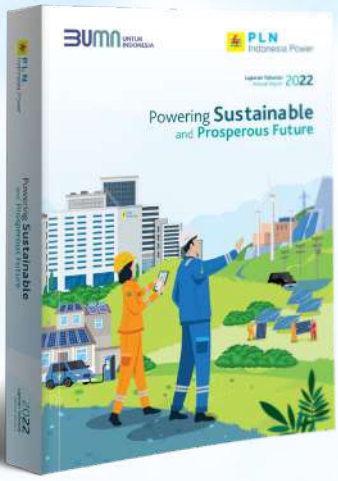
Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2023

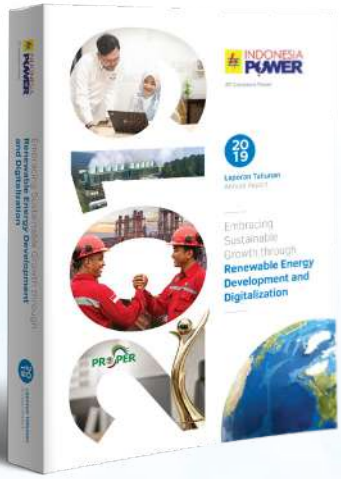
Expanding Sustainable Business to be the Leader in the Energy Solutions Industry



2022
Powering Sustainable and Prosperous Future







2019

Embracing Sustainable Growth through Renewable Energy Development and Digitalization



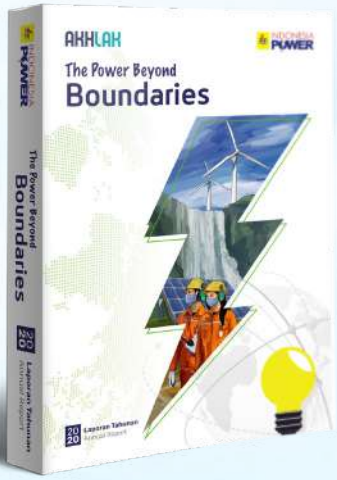
2021

Raising Future Energy, Strengthening Sustainability



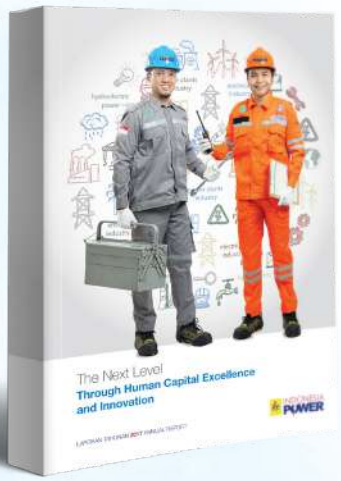
2018

Optimization Performance and Growth Toward Sustainable Business Excellence



2020

The Power Beyond Boundaries



2017

The Next Level Through Human Capital Excellence and Innovation

Subholding Pembangkitan Mengoptimasi Pengelolaan Pembangkit untuk Menciptakan *Value Creation* serta Mendukung Transisi Energi

Sebelum *Subholding*
Before Subholding

PT Indonesia Power



Unit Pembangkit Milik PLN Indonesia Power
Generation Business Unit (GBU)

Daya Terpasang: 9.124,72 MW
Installed Capacity: 9,124.72 MW

Unit Jasa O&M
O&M Services Unit

Daya Terpasang: 7.947,7 MW
Installed Capacity: 7,947.7 MW

Anak Perusahaan
Subsidiaries

Daya Terpasang: 373 MW
Installed Capacity: 373 MW

- Memiliki aset sebesar 9.124,72 MW dan mengelola aset PLN sebesar 7.947,7 MW.
- Memiliki tata kelola pembangkit dan proses bisnis yang sudah terstandardisasi secara nasional maupun internasional.
- Profesional dalam pengelolaan pembangkit dengan *skill set* yang lengkap dan siap bersaing di kancah global.

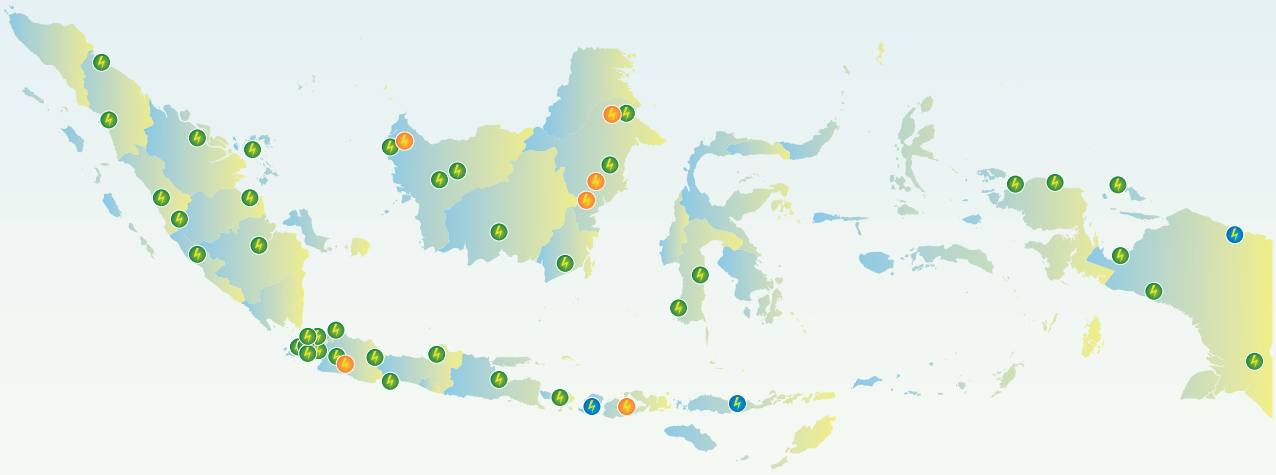
- Owning 9,031.41 MW of assets and managing 8,177.7 MW of PLN's assets.
- Owning nationally and internationally standardized power plant governance and business process.
- Professionals in managing power plants with complete skill sets and readiness to compete in the global market.



Power Generation Subholding Optimizes Power Plant Management for Value Creation and Energy Transition

Sesudah *Subholding*
After Subholding

PT PLN Indonesia Power



Unit Bisnis Pembangkit (UBP)
Generation Business Unit (GBU)

Daya Terpasang: 19.936,82 MW
Installed Capacity: 19,936.82 MW

Unit Jasa O&M
O&M Services Unit

Daya Terpasang: 124 MW
Installed Capacity: 124 MW

Anak Perusahaan
Subsidiaries

Daya Terpasang: 373 MW
Installed Capacity: 373 MW

- Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan aset sebesar 19.936,82 MW.
- Satu-satunya *Subholding* pembangkitan PLN yang memiliki pembangkit *geothermal.*
- Sebaran pembangkit di seluruh Indonesia sehingga menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis *beyond* kWh.
- Tantangan untuk menstandardisasi proses bisnis dan tata kelola aset untuk seluruh unit alih aset.

- Southeast Asia's largest power company with 19,936.82 MW of generation assets.
- The only PLN's power generation subholding with geothermal power plants.
- The power plants are spread across Indonesia, creating an opportunity for beyond kWh business development.
- The challenge to standardize asset governance and business process for all asset transfer units.



Daftar Isi
Contents

Pendahuluan
Introduction

2 Tema dan Kesinambungan Tema
Theme and Theme Continuity

6 *Subholding* Pembangkitan Mengoptimasi Pengelolaan Pembangkit untuk Menciptakan *Value Creation* serta Mendukung Transisi Energi
Power Generation Subholding Optimizes Power Plant Management for Value Creation and Energy Transition

8 Daftar Isi
Contents

12 Keunggulan PLN Indonesia Power
PLN Indonesia Power's Advantage

14 Capaian Penting PLN Indonesia Power Tahun 2023
PLN Indonesia Power's 2023 Milestones

18 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

27 Ikhtisar Saham
Share Overview

27 Ikhtisar Obligasi
Bonds Overview

27 Aksi Korporasi
Corporate Actions

28 Terkini dari PLN Indonesia Power
What's New from PLN Indonesia Power

28 *Subholding* Terbaik di Lingkungan PT PLN (Persero)
The Best PT PLN (Persero) Subholding

29 Komitmen PLN Indonesia Power dalam Pengembangan *Green Hydrogen* untuk mendukung Penyediaan Energi Bersih
PLN Indonesia Power's Commitment to Developing Green Hydrogen in Promoting Clean Energy Provision

30 Pionir di Indonesia, PLN Indonesia Power Sukses Operasi Kontinyu 100% *Biomass Firing*
The Pioneer for Indonesia, PLN Indonesia Power Successfully Ran 100% Biomass Firing Continuously

31 Komitmen PLN Indonesia Power untuk Akselerasi Pengembangan Panas Bumi dengan Kapasitas Mencapai 1 GWp per tahun
PLN Indonesia Power's Commitment to Accelerating Geothermal Energy Development with up to 1 GWp per year

32 Pembangunan Pabrik Solar PV Dengan Kapasitas 1 GWp
Construction of Solar PV Manufacturing Plant of 1 GWp

33 Testimoni
Testimonials

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
Report to Shareholders and Stakeholders

38 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

56 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners

68 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Indonesia Power
Statement from the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Accountability for PT PLN Indonesia Power Annual Report 2023

Profil Perusahaan
Company Profile

72 Identitas Perusahaan
Company Identity

74 Riwayat Singkat dan Rebranding Perusahaan
Company Timeline and Rebranding

77 Maksud dan Tujuan
Purpose and Objectives

79 Visi, Misi, Motto dan Kompetensi Inti
Vision, Mission, Motto, and Core Competencies

82 Tata Nilai dan Budaya
Our Values and Culture

85 Bidang Usaha
Line of Business

86 Produk dan Layanan
Products and Services

91 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Structure and Composition

93 Struktur Organisasi
Organizational Structure

96 Informasi Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 dan Setelah Tahun Buku 2023
Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year 2023 and After the Financial Year 2023

97 Profil Direksi
Board of Directors Profile

106 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

116 Statistik Jumlah Pegawai PT PLN Indonesia Power
Employee Statistics

120 Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure

123 Daftar Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi
List of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates

127 Informasi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Afiliasi
Composition of Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries, Joint Ventures, Associates, and Affiliates

131 Ringkasan Informasi Kinerja Keuangan pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Afiliasi
Financial Highlights of Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates

132 Peta Wilayah Operasi
Map of Operational Areas

134 Daftar Alamat Unit
List of Unit Addresses

136 Informasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)
Public Accounting Firms and Public Accountants

138 Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Company-Supporting Professional Agencies

143 Kronologis Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

143 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

144 Informasi Situs *Website* Perusahaan
Company Website

145 Keanggotaan Asosiasi
Membership in Associations

146 Peristiwa Penting Tahun 2023
Important Events in 2023

150 Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2023
Awards and Certifications in 2023

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review

160 Sumber Daya Manusia
Human Capital

184 Teknologi Informasi (TI)
Information Technology

194 Sistem Manajemen Terintegrasi PLN Indonesia Power (PLN IP-IMS)
PLN Indonesia Power Integrated Management System (PLN IP-IMS

197 Pengembangan dan Inovasi Teknologi Pembangkitan
Power Generation Technology Development and Innovation

203 Aset Pembangkit
Power Generation Assets

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

206 Tinjauan Industri
Industry Overview

211 Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing Aspect and Market Share

213 Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen
Operational Performance Overview by Segment

224 Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

225 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review

225 Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

238 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

242 Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statements of Cash Flows

245 Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya
Solvency, Collectability, and Other Financial Ratios

253 Struktur Modal
Capital Structure

254 Kontribusi kepada Negara
Contribution to the Country

256 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2023
Comparison of Target and Realization in 2023
262 Pencapaian KPI
KPI Achievement
265 Proyeksi dan Target Tahun 2024
Projection and Target for 2024
269 Kebijakan Dividen
Dividend Policy
270 Informasi Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Investment
275 Investasi Barang Modal
Capital Investment
277 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Material Information on Conflict-of-Interest Transactions and/or Transactions with Affiliates/Related Parties
283 Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and/or Restructuring
287 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Actual Use of Proceeds from Public Offering
287 Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts after Accountant's Report Date
287 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impacts on the Company
289 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Significant Regulatory Changes and Their Impacts on the Company
290 Informasi Material yang Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Material Information on Extraordinary and Rare Events
292 Dampak Perubahan Harga Terhadap Kinerja Perusahaan
Impact of Price Change on the Company's Performance
299 Prospek Usaha ke Depan
Business Outlook

Governansi Perusahaan
Corporate Governance

304 Pendahuluan
Introduction
305 Komitmen Perusahaan Terhadap Penerapan Tata Kelola (Governansi) Unggul dan Berkelanjutan
Commitment to Implementing Sustainable and Good Corporate Governance
306 Landasan dan Kebijakan Penerapan Governansi Korporat
Foundation and Policy for Implementing Corporate Governance
309 Struktur Organ Governansi Korporat
Corporate Governance Organ Structure
310 Strategi Perusahaan Dalam Memperkuat Governansi Perusahaan yang Berkelanjutan
Company Strategy for Consolidating a Sustainable Corporate Governance
314 Penilaian dan Evaluasi Penerapan Governansi Korporat
Assessment and Evaluation of Corporate Governance Implementation
314 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
320 Direksi
Board of Directors
332 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
353 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Work Relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors
353 Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners
358 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Policy on Provision of Long-Term Compensation Based on Perform
359 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Compositions
360 Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris
Committees under the Board of Commissioners
360 Komite Audit
Audit Committee
370 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
377 Komite Lain
Other Committees
377 Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee

386 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

388 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

392 Audit Internal
Internal Audit

405 Manajemen Risiko
Risk Management

419 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

422 Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi
Legal Disputes Faced by the Company, Subsidiaries, Board of Commissioners, and Board of Director

424 Sanksi Administratif
Administrative Sanctions

424 Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct

427 Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Suap
Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy

432 Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
Gratuity Control Management

433 Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Officials Wealth Report (LHKPN) Policy

434 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

439 Akses Informasi dan Komunikasi bagi Para Pemangku Kepentingan
Access to Information and Communication for Stakeholders

443 Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa
Supply Chain Management and Goods & Services Procurement

446 Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Kreditur
Policy on the Protection of Creditor's Rights

447 Kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*
Insider Trading Prevention Policy

448 Pernyataan Tidak Melakukan Praktik *Bad Corporate Governance*
Statement of Good Corporate Governance Practices

448 Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan SK-16/S-MBU/2012
Corporate Governance Implementation Assessment Based on Decree No. SK-16/S-MBU/2012

453 ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
ASEAN Corporate Governance Scorecard

455 Evaluasi Tata Kelola Berdasarkan Standar Otoritas Jasa Keuangan
Evaluation of Governance According to Financial Services Authority Standards

456 Evaluasi Penerapan GCG Berdasarkan PUG-KI
Evaluation of GCG Implementation According to PUG-KI

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Environmental and Social Responsibility

468 Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy

474 Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

479 Membangun Budaya Keberlanjutan
Developing Cultural Sustainability

480 Kinerja Ekonomi
Economic Performance

483 Kinerja Lingkungan Hidup
Environmental Performance

497 Kinerja Sosial Aspek Pelanggan
Social Performance Related to Customers

506 Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan
Social Performance Related to Employment

516 Kinerja Sosial Aspek Masyarakat
Social Performance Related to Public

521 Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

Laporan Keuangan Audit 2023
Audited Financial Statements 2023

524 Laporan Keuangan Audit 2023
Audited Financial Statements 2023

Keunggulan PLN Indonesia Power
PLN Indonesia Power's Advantage

Portofolio Pembangkit Terlengkap
The Most Comprehensive Power Plant Portfolio

- *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara dengan total kapasitas terpasang **21,08 GW.**
- Memiliki portofolio pembangkit paling lengkap yang terdiri dari: PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD, PLTA, PLTP, PLTS, PLT *Hybrid.*
- Lokasi pembangkit yang **tersebar luas di seluruh Indonesia.**
- Southeast Asia's largest generation company at **21.08 GW** installed capacity.
- Owning the most comprehensive power generation portfolio, covering: Steam Power Plants (SPP), Gas Turbine Power Plants (GTPP), Combined Cycle Power Plants (CCPP), Diesel Power Plants (DPP), Hydro Power Plants (HPP), Geothermal Power Plants (GPP), Solar Power Plants (SoPP), Hybrid Power Plants.
- The power plants are **located across Indonesia**.

Digital Services Ecosystem

- Standarisasi pengelolaan seluruh pembangkit dengan aplikasi **REOC** (*Realibility Efficiency Optimization Center*) sehingga tercapai ***Integrated Strategic Asset Management.***
- **VIRPOP** (*virtual reality connected by real-time power plant's sensor*) untuk mendukung kompetensi bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit secara *virtual reality* yang terintegrasi dengan parameter sensor pembangkit secara *real-time.*
- Standardizing the management of all power plants using Reliability Efficiency Optimization Center (REOC) application to create an Integrated Strategic Asset Management.
- VIRPOP (virtual reality connected by real-time power plant's sensor) supports the competency in power plant operations and maintenance simulation using virtual reality. It has real-time integration with power plant sensor parameters.







Kompetensi Jasa Operasi & Pemeliharaan Pembangkit
Competency of Power Plant Operations & Maintenance Services

- Penguasaan Kompetensi Jasa Operasi & Pemeliharaan dengan berbagai jenis pembangkit.
- Perluasan layanan Jasa Operasi & Pemeliharaan ke luar negeri.
- Mastery of Operations & Maintenance Services competency for different types of power plant.
- Expansion of Operations & Maintenance Services abroad.

Pengembangan Pembangkit
Power Plant Development

Pengembangan Pembangkit *Low Carbon*
Low Carbon Power Plant Development

- Pembangkit yang dimiliki perusahaan sudah dilengkapi dengan *Co-firing Biomass* untuk PLTU dan *Hydrogen* untuk sebagian PLTGU.
- The Company's existing power plants are equipped with biomass cofiring for Steam Power Plants (SPP) and hydrogen co-firing for some of the Gas Turbine Power Plants (GTPP).

Pengelola Pembangkit *Geothermal*
Geothermal Power Plant Manager

- Satu-satunya *Subholding* pembangkitan PLN yang memiliki pembangkit *geothermal.*
- *Rebranding* Anak Perusahaan untuk fokus pengembangan *geothermal.*
- The only PLN's power generation subholding with geothermal power plants.
- Subsidiary re-branding with focus on geothermal development.

Pengembangan Pembangkit EBT Lainnya
Development of Other NRE-Based Power Plants

- Menginisiasi pengembangan pembangkit EBT di luar penugasan.
- Membangun pabrik solar PV terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 1 GWp pertahun.
- Initiating NRE-based power plant development beyond assignments.
- Constructing Indonesia's largest solar PV manufacturing plant at the capacity of 1 GWp per annum.



Capaian Penting PLN Indonesia Power Tahun 2023
PLN Indonesia Power's 2023 Milestones

Commercial Operation Date (COD)

- PLTG Pesanggaran Unit 6 eks relokasi Grati (100 MW) tanggal 18 April 2023
- PLTM Cileunca (2x0,5 MW) tanggal 26 Juni 2023
- The Pesanggaran Gas Power Plant Unit 6, formerly relocated from Grati (100), on April 18, 2023
- The Cileunca Micro Hydro Power Plant 2x0.5 MW, on June 26, 2023

Penjualan Listrik
Electricity Sales

121,69%

79.664,84 GWh

Daya Terpasang
Installed Capacity

120,75%

19.936,82 GWh

Produksi Listrik
Electricity Productions

124,47%

84.199,86 GWh

Produksi Energi Listrik, Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT)
Electrical Energy Production, New Renewable Energy Generation (EBT)

34,99%

10.061,05 GWh

Pendapatan Usaha
Revenue

27,61%

Rp103.480.111
Juta Million

Aset
Assets

3,15%

Rp386.200.863
Juta Million

Laba Tahun Berjalan
Profit for The Year

74,85%

Rp8.189.314
Juta Million

Laba Usaha
Operating Income

147,90%

Rp19.927.009
Juta Million

Pencapaian KPI
KPI Achievement

2,13%

103,40



Total *Fly Ash and Bottom Ash* (FABA)

1.548,18%

1.772.864,37 Ton

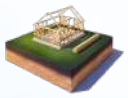
Pemanfaatan FABA, sebagai bentuk komitmen PLN Indonesia Power menjalankan prinsip *Environmental, Social & Governance* (ESG) dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

FABA utilization, to prove PLN Indonesia Power's commitment to implementing the Environmental, Social & Governance (ESG) principles and meeting Sustainable Development Goals.

Pemanfaatan FABA
FABA Utilization



Jalan Beton
Concrete Road
7,87 Km



***Subgrade*/Stabilisasi Lahan**
Subgrade/Land Stabilization
497.367 Ton



***Subbase*/Lapisan Pondasi**
Subbase/Foundation Layer
260.034 Ton



Kansteen
Curbing
4.260 Pcs



Paving & Batako
Pavement & Paving Blocks
1.069.885 Pcs



Tetrapod
654 Pcs

Great Place to Work

PLN Indonesia Power menjadi Perusahaan pertama di Sektor Energi, BUMN kedua dan satu-satunya dari PLN *Group* yang meraih predikat *Great Place to Work* 2023.

PLN Indonesia Power becomes the first company in the Energy Sector, the second State-Owned Enterprise (BUMN), and the only one from the PLN Group to achieve the Great Place to Work 2023 award.

Kontribusi *Carbon Trading*
Contributed Carbon Trading

2.428.203 Ton CO_2

senilai amounted **Rp24.282,03 Juta** Million

PLN Indonesia Power berkomitmen mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada 2030 dan *Net Zero Emissions* 2060, dihasilkan oleh 10 unit pembangkit yaitu PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Adipala, PLTU Ombilin, PLTU Labuan, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Lontar, PLTU Palabuhan Ratu, PLTU Labuan Angin dan PLTU Teluk Sirih.

PLN Indonesia Power is committed to achieving Nationally Determined Contribution (NDC) in 2030 and Net Zero Emissions 2060, generated by 10 generating units namely SPP Suralaya, SPP Banten 1 Suralaya, SPP Adipala, SPP Ombilin, SPP Labuan, SPP Pangkalan Susu, SPP Lontar, SPP Palabuhan Ratu, SPP Labuan Angin and SPP Teluk Sirih.

Reduksi Emisi GRK
Reduction of GHG Emissions

6.404.578,32 Ton CO_2

Melalui program inisiatif peningkatan implementasi *Co-firing*, pengajuan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) unit PLTM Gunung Wugul, peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLTA, PLTS, PLTMH, PLTB, PLTBio dan Pembangkit *Hybrid.*

Under the initiative to increase co-firing operations, submission of request for Emission Reduction Certificate of PLTM Gunung Wagul Unit, expansion of New and Renewable Energy Mix through development of hydro, solar, mini hydro, biomass, and hybrid power plants.

Penilaian & Evaluasi GCG
GCG Assesment & Evaluation

BUMN UNTUK INDONESIA
SK-16/S.MBU/2012
94,76

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

KNKG
PUG-KI 2021

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
POJK 21 2015

Jumlah Pegawai
Number of Employees

5.452 Orang
People

Pelatihan Anti Korupsi
Training on Anti-corruption

889 Pegawai
Employee

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Cost

Rp81,94 Miliar
Billion

Employee Engagement Survey

84,07%

Penyaluran Dana Program INPOWER CARE
INPOWER CARE Program Fund Distribution

Rp52.760 Juta
Million

Indonesia Power Care
Community Assistance Relation Empowerment

Disalurkan melalui program pelayanan masyarakat, pembinaan hubungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Channeled through community service, relationship building, and community empowerment programs.

Pengembangan *Green Hydrogen Plant* (GHP)
Green Hydrogen Plant (GHP) Development

12 GHP

PLTU Pangkalan Susu, PLTU Suralaya 1-7, PLTU Suralaya 8, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTGU Tanjung Priok, PLTU Palabuhan Ratu, PLTGU Tambak Lorok, PLTG Pemaron, PLTU Grati, dan PLTU Adipala.
SPP Pangkalan Susu, SPP Suralaya 1-7, SPP Suralaya 8, CCPP Cilegon, SPP Labuan, SPP Lontar, CCPP Tanjung Priok, SPP Palabuhan Ratu, CCPP Tambak Lorok, GTPP Pemaron, SPP Grati, and SPP Adipala.

Total Produksi
Total Production
80
ton/tahun
ton/year

Dimanfaatkan
Utilized
51
ton/tahun
ton/year

Hydrogen Geothermal

PLTP Kamojang Penghasil Hidrogen Hijau berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara
GPP Kamojang, the first Green Hydrogen Producer based on geothermal energy in Southeast Asia





13
Proper Emas
Gold Proper

1. PLTA HPP Mrica
2. PLTGU CCPP Cilegon
3. PLTGU CCPP Priok
4. PLTGU CCPP Grati
5. PLTGU CCPP Semarang
6. PLTP GPP Gunung Salak
7. PLTP GPP Kamojang
8. PLTU SPP Lontar
9. PLTU SPP Suralaya
10. PLTU SPP Palabuhan Ratu
11. PLTU SPP Banten Suralaya 1
12. PLTDG DGPP Pesanggaran
13. PLTGU CCPP Keramasan

12
Proper Hijau
Green Proper

1. PLTA HPP Saguling
2. PLTA HPP Wonogiri
3. PLTA HPP Gilimanuk
4. PLTG GTPP Pemaron
5. PLTU SPP Labuan
6. PLTU SPP Jeranjang
7. PLTU SPP Adipala
8. PLTU SPP Barru
9. PLTU SPP Pangkalan Susu
10. PLTG GTPP Borang
11. PLTU SPP Indralaya
12. PLTP GPP Lahendong

25
Proper Biru
Blue Proper

1. PLTU SPP Tanjung Balai Karimun
2. PLTD DPP Sungai Juaro
3. PLTU SPP Teluk Sirih
4. PLTA HPP Tes
5. PLTA HPP Musi
6. PLTA HPP Maninjau
7. PLTA HPP Singkarak
8. PLTP GPP Ulu Belu
9. PLTP GPP Lahendong Unit 3 & 4
10. PLTMG GEPP Bontang
11. PLTGU CCPP Tanjung Batu
12. PLTG GTPP Samberah
13. PLTD DPP Keledang
14. PLTD DPP Karang Asam
15. PLTD DPP Kuala Kapuas
16. PLTG GTPP Trisakti
17. PLTA HPP IR PM Noor
18. PLTD DPP Kotabaru
19. PLTD DPP Kahayan
20. PLTD DPP Kumai
21. PLTD DPP Baamang
22. PLTU SPP Bengkayang
23. PLTD DPP Asam-asam
24. PLTD DPP Selayar
25. PLTDG DGPP Tello



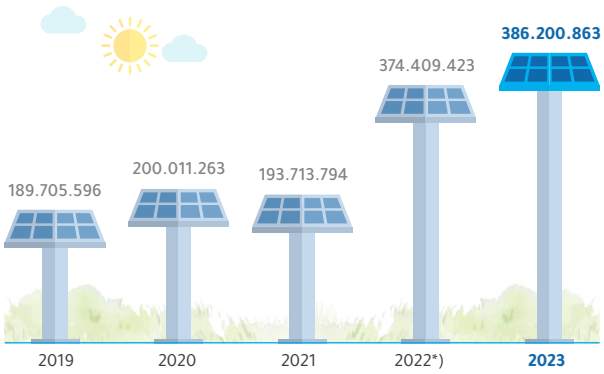
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

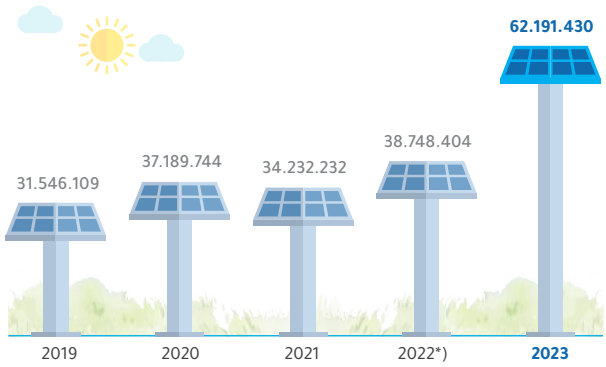
Posisi Keuangan (Rp juta) Financial Position (Rp million)	2019	2020	2021	2022*)	2023
Jumlah Aset Total Assets	189.705.596	200.011.263	193.713.794	374.409.423	386.200.863
Aset Lancar Current Assets	31.546.109	37.189.744	34.232.232	38.748.404	62.191.430
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	158.159.486	162.821.519	159.481.562	335.661.019	324.009.433
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	7.712.397	16.067.595	15.312.157	31.387.319	40.745.537
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	4.756.821	7.314.262	5.894.646	8.155.329	12.620.923
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2.955.576	8.753.333	9.417.511	23.231.990	28.124.614
Jumlah Ekuitas Total Equity	181.993.199	183.943.668	178.401.637	343.022.104	345.455.326
Modal Kerja Working Capital	26.789.288	29.875.482	28.337.592	30.593.075	49.570.507

*) Disajikan kembali As restated

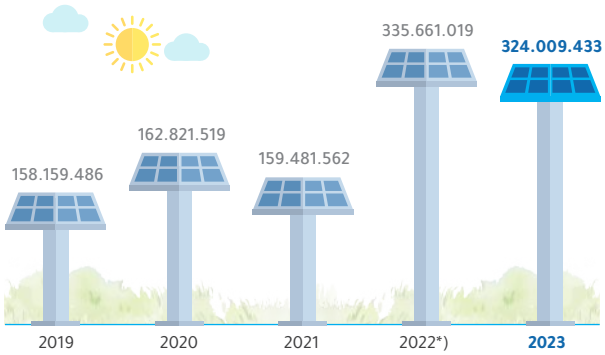
Grafik Jumlah Aset (Rp juta)
Chart of Total Assets (Rp million)



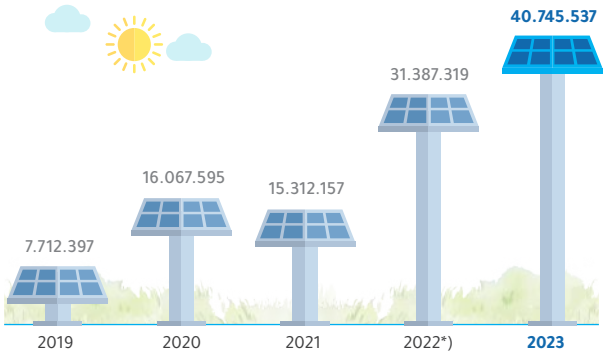
Grafik Aset Lancar (Rp juta)
Chart of Current Assets (Rp million)



Grafik Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Chart of Non-Current Assets (Rp million)



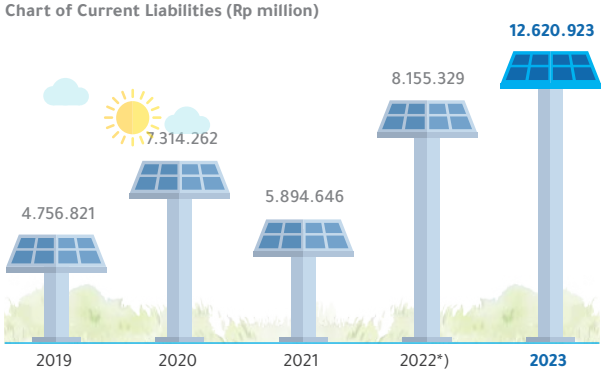
Grafik Jumlah Liabilitas (Rp juta)
Chart of Total Liabilities (Rp million)



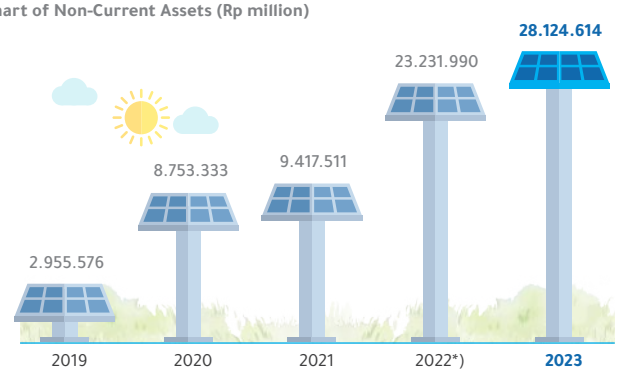
*) Disajikan kembali As restated



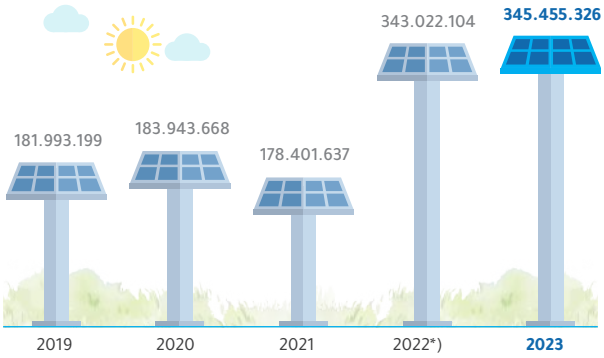
Grafik Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Chart of Current Liabilities (Rp million)



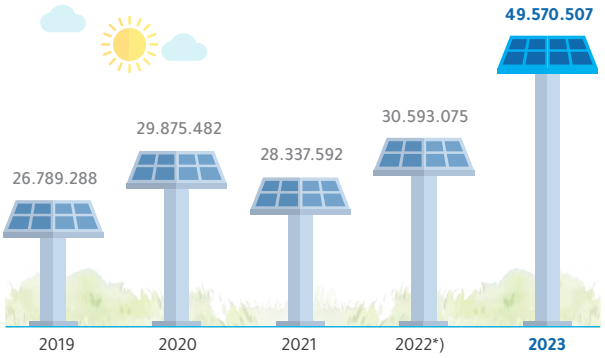
Grafik Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Chart of Non-Current Assets (Rp million)



Grafik Jumlah Ekuitas (Rp juta)
Chart of Total Equity (Rp million)



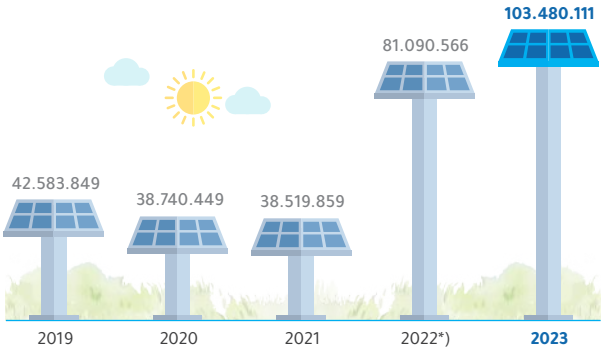
Grafik Modal Kerja (Rp juta)
Chart of Working Capital (Rp million)



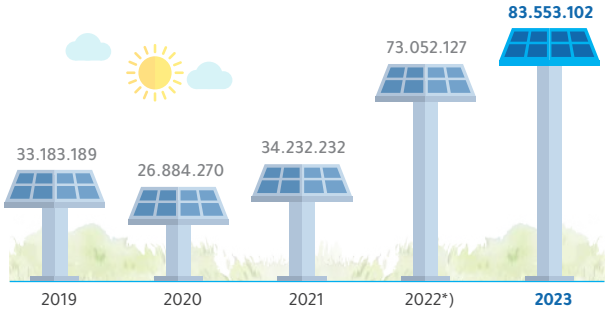
Laba Rugi (Rp juta) **Profit Loss (Rp million)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022*)**	**2023**
Pendapatan Usaha Revenue	42.583.849	38.740.449	38.519.859	81.090.566	103.480.111
Penjualan Tenaga Listrik Sale of Electricity	23.970.771	21.011.210	19.907.755	64.371.392	101.934.634
Pendapatan dari Konsesi Jasa Revenue of Service Concession	14.860.732	14.259.159	14.656.755	15.541.932	268.658
Pendapatan Jasa Service Revenue	3.752.346	3.470.080	3.955.349	1.177.242	1.276.819
Beban Usaha Operating Expenses	33.183.189	26.884.270	32.429.534	73.052.127	83.553.102
Laba Usaha Operating Income	**9.400.660**	**11.856.179**	**6.090.325**	**8.038.439**	**19.927.009**
Laba Sebelum Pajak Income before Tax	10.053.333	12.773.358	5.909.311	7.812.498	10.680.986
(Manfaat) Beban Pajak Tax (Benefit)/Expenses	(2.683.024)	(2.549.287)	(1.878.157)	(3.128.838)	(2.491.672)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**7.370.309**	**10.224.071**	**4.031.154**	**4.683.660**	**8.189.314**
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk attributable to Owners of the Parent	7.365.289	10.218.256	4.027.169	4.678.605	8.176.665
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali attributable to Non-Controlling Interest	5.020	5.815	3.985	5.055	12.649
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	(675.038)	(858.375)	646.237	1.226.472	9.055
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**6.695.271**	**9.365.696**	**4.677.391**	**5.910.132**	**8.198.369**
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk attributable to Owners of the Parent	6.690.251	9.359.881	4.673.406	5.905.077	8.185.720
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali attributable to Non-Controlling Interest	5.020	5.815	3.985	5.055	12.649
Laba per Saham (Rp penuh) **Basic Earnings per Share (in Rp full amount)**	**1.413**	**1.959**	**773**	**13**	**23**

*) Disajikan kembali As restated

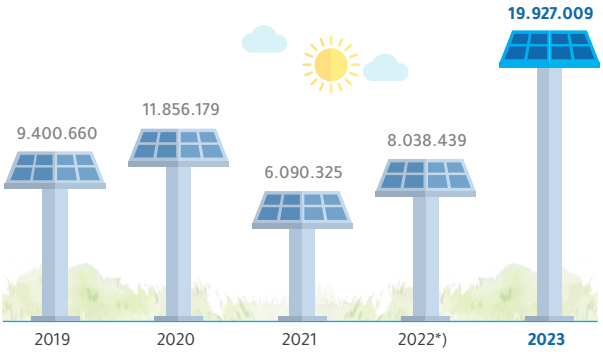
Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)
Chart of Revenue (Rp million)



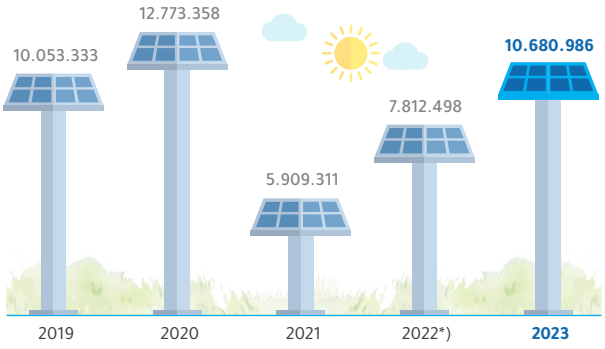
Grafik Beban Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Expenses (Rp million)



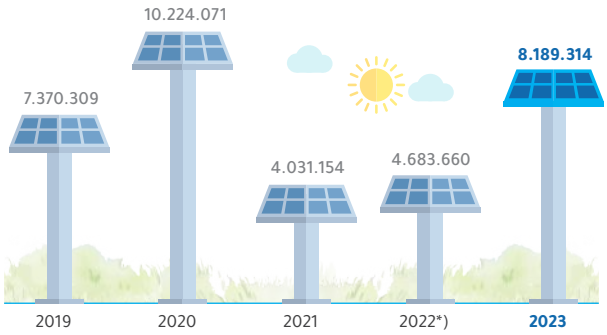
Grafik Laba Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Income (Rp million)



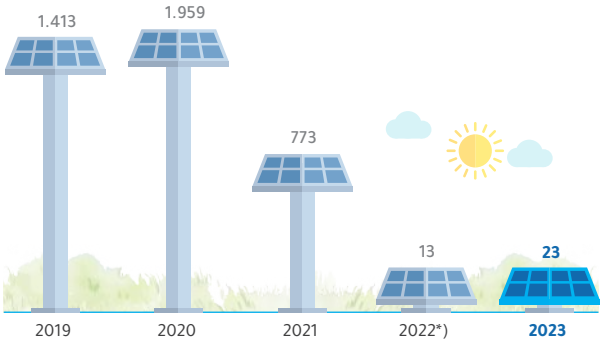
Grafik Laba Sebelum Pajak (Rp juta)
Chart of Income before Tax (Rp million)



Grafik Laba Tahun Berjalan (Rp juta)
Chart of Profit for the Year (Rp million)



Grafik Laba per Saham (Rp)
Chart of Basic Earnings per Share (Rp)



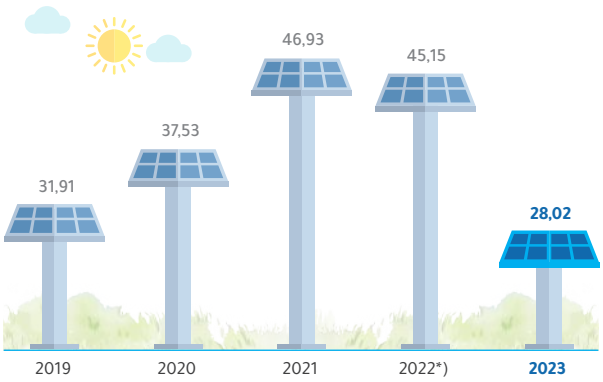
*) Disajikan kembali As restated



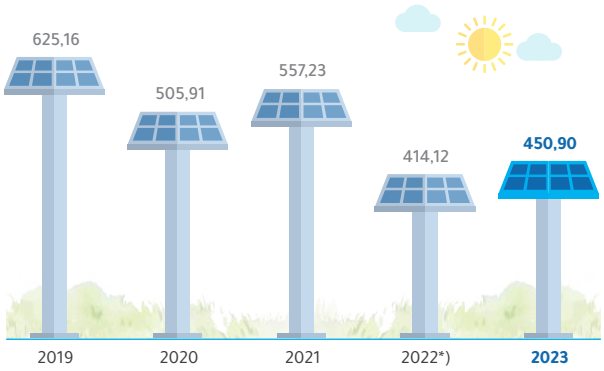
Rasio Keuangan Financial Ratios	2019	2020	2021	2022*)	2023
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios					
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	31,91	37,53	46,93	45,15	28,02
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	625,16	505,91	557,23	414,12	450,9
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	663,18	526,60	580,73	475,13	492,76
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Margin Operasi (%) Operating Profit Margin (%)	22,08	30,60	15,81	9,91	19,26
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	17,31	26,39	10,47	5,78	7,91
Tingkat Pengembalian Modal (%) Return on Equity (%)	4,22	5,89	2,31	1,38	2,43
Tingkat Pengembalian Investasi (%) Return on Investment (%)	6,60	7,55	4,80	4,74	8,12
Tingkat Pengembalian Aset (%) Return on Assets (%)	3,89	5,11	2,08	1,25	2,12
Rasio Solvabilitas Solvency Ratios					
Rasio Utang terhadap Aset (%) Debt to Total Assets Ratio (%)	4,07	8,03	7,90	8,38	10,55
Rasio Utang Terhadap Modal (%) Debt to Total Equity Ratio (%)	4,24	8,74	8,58	9,15	11,79
Rasio Aktivitas Activity Ratios					
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (day)	114,63	13,37	12,36	22,39	18,64
Periode Penagihan (hari) Collection Period (day)	231,46	262,16	275,34	130,49	141,25
Perputaran Aset (%) Asset Turnover (%)	23,04	19,87	20,51	22,17	27,43

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Rasio Kas (%)
Chart of Cash Ratio %

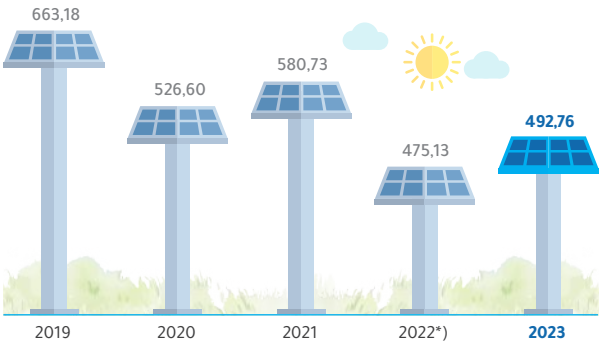


Grafik Rasio Cepat (%)
Chart of Quick Ratio (%)

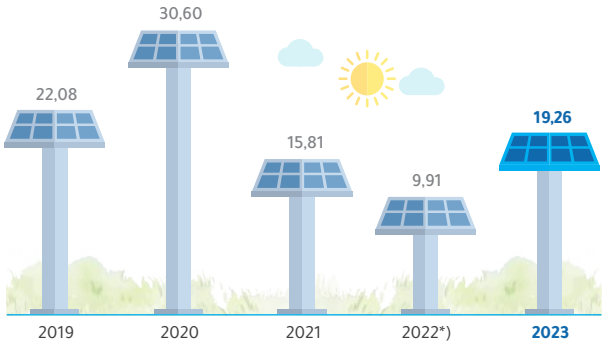


*) Disajikan kembali As restated

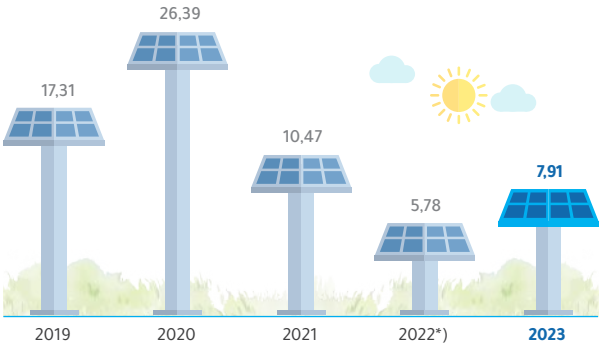
Grafik Rasio Lancar (%)
Chart of Current Ratio (%)



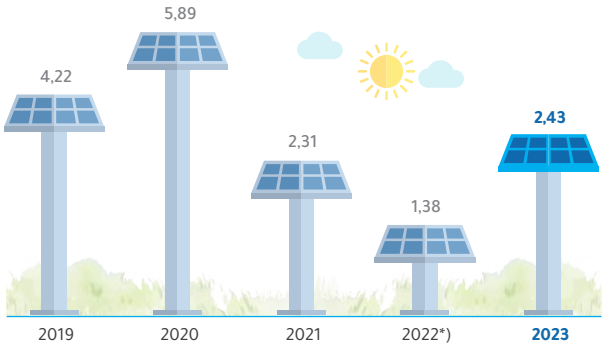
Grafik Margin Operasi (%)
Chart of Operating Profit Margin (%)



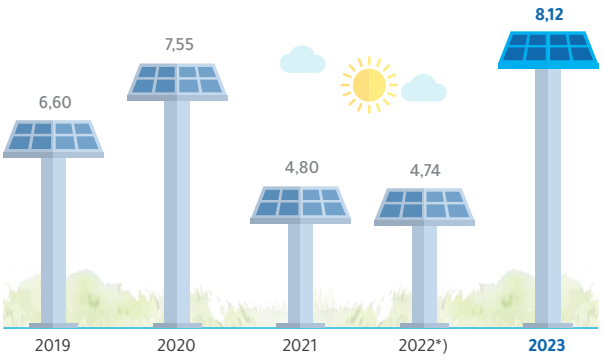
Grafik Margin Laba Bersih (%)
Chart of Net Profit Margin (%)



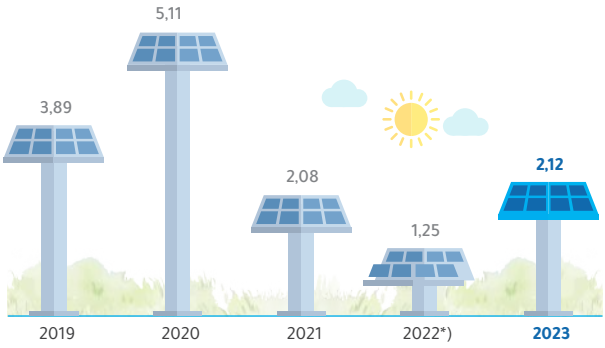
Grafik Tingkat Pengembalian Modal (%)
Chart of Return on Equity (%)



Grafik Tingkat Pengembalian Investasi (%)
Chart of Return on Investment (%)

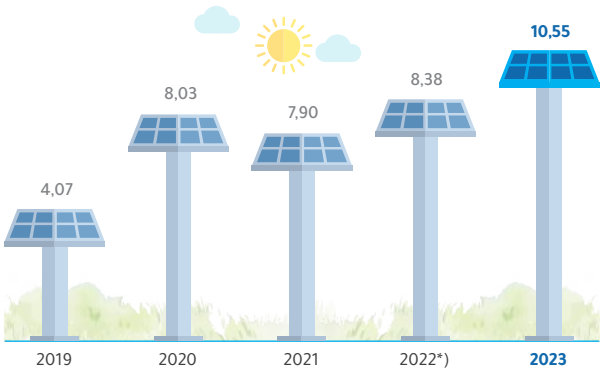


Grafik Tingkat Pengembalian Aset (%)
Chart of Return on Assets (%)

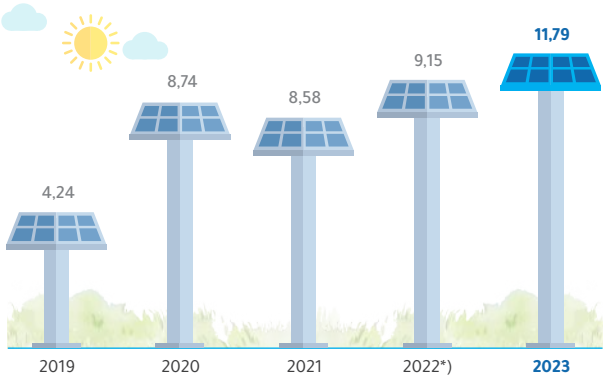


*) Disajikan kembali As restated

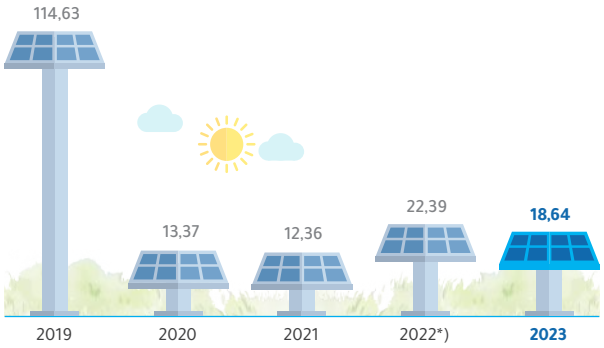
Grafik Rasio Utang terhadap Aset (%)
Chart of Debt to Total Assets Ratio (%)



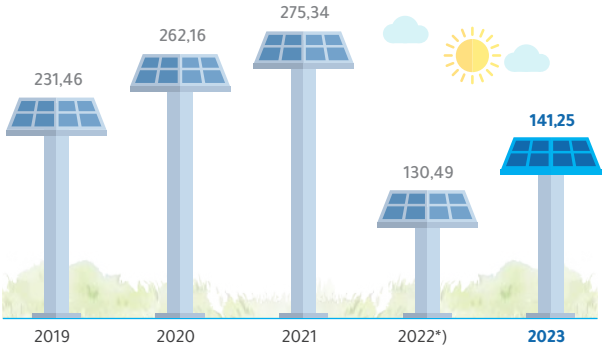
Grafik Rasio Utang terhadap Modal (%)
Chart of Debt to Total Equity Ratio (%)



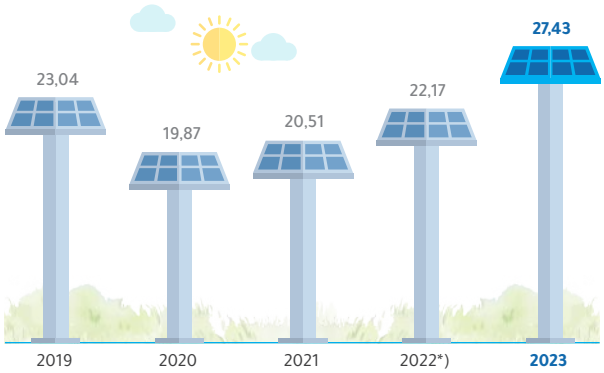
Grafik Perputaran Persediaan (hari)
Chart of Inventory Turnover (day)



Grafik Periode Penagihan (hari)
Chart of Collection Period (day)



Grafik Perputaran Aset (%)
Chart of Asset Turnover (%)



*) Disajikan kembali As restated

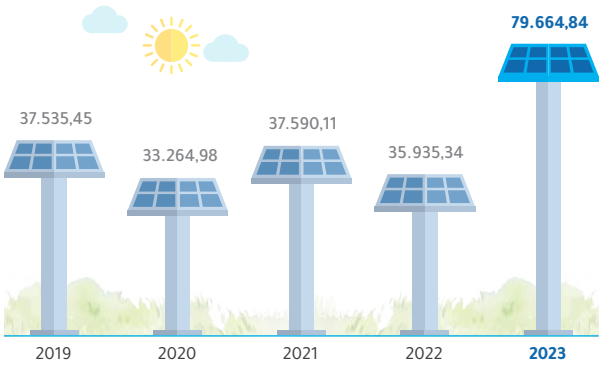
Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

Kinerja Pembangkit Power Plant Performance	2019	2020	2021	2022	2023
Penjualan Tenaga Listrik (GWh) Sale of Electricity (GWh)	37.535,45	33.264,98	37.590,11	35.935,34	79.664,84
Produksi Tenaga Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	39.112,86	34.771,54	39.230,81	37.510,12	84.199,86
Daya Terpasang Pembangkit (MW) Power Plant Installed Capacity (MW)	8.954,29	9.093,13	9.124,72	9.031,41	19.936,82
CF Pembangkit (%) Power Plant CF (%)	52,82	45,80	51,82	51,05	51,12
EAF Pembangkit (%) Power Plant EAF (%)					
EAF PLTU Batubara Jawa Bali Java-Bali Coal SPP EAF	86,91	87,30	87,10	87,74	85,66
EAF Non-PLTU Batubara Jawa Bali Java-Bali Non-Coal SPP EAF	89,86	96,57	95,62	95,28	95,09
EAF PLTU Batubara Luar Jawa Bali Outside Java-Bali Coal SPP EAF	50,39	74,75	74,75	72,38	77,72
EAF Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali* Outside Java-Bali Non-Coal SPP EAF*	-	-	-	-	91,78
EFOR Pembangkit (%) Power Plant EFOR (%)					
EFOR PLTU Batubara Jawa Bali Java-Bali Coal SPP EFOR	4,60	3,50	2,68	1,46	3,38
EFOR Non-PLTU Batubara Jawa Bali Java-Bali Non-Coal SPP EFOR	1,74	0,41	0,58	0,37	0,77
EFOR PLTU Batubara Luar Jawa Bali Outside Java-Bali Coal SPP EFOR	31,60	9,19	10,67	20,10	13,44
EFOR Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali* Outside Java-Bali Non-Coal SPP EFOR*	-	-	-	-	5,19
SFC Pembangkit** Power Plant SCF**					
SFC Pembangkit - Batubara (kg/kWh) Coal Power Plant SFC (kg/kWh)	-	-	-	0,5946	0,6278
SFC Pembangkit - Gas (MMBTU/kWh) Gas Power Plant SFC (MMBTU/kWh)	-	-	-	0,0079	0,0083
SFC Pembangkit - BBM (liter/kWh) Oil Power Plant SFC (liter/kWh)	-	-	-	0,3011	0,2900

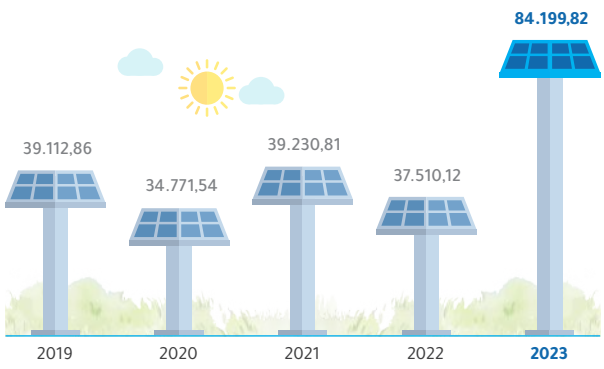
*) tahun 2019 - 2022 belum terdapat pembangkit Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali
**) tahun 2019 - 2021 belum menjadi *Key Performance Indicator*

*) in 2019 - 2022 there are no Non-Coal SPP plants outside Java Bali
**) in 2019 - 2021 it has not yet become a Key Performance Indicator

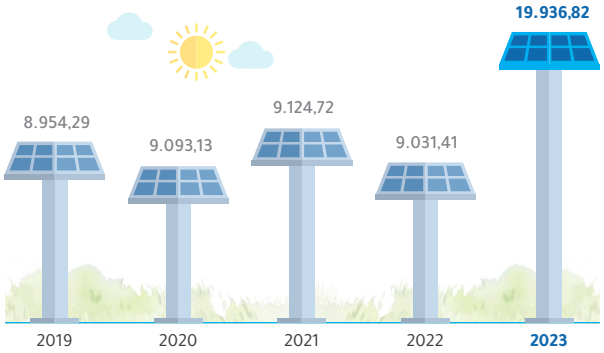
Grafik Penjualan Tenaga Listrik (GWh)
Chart of Sale of Electricity (GWh)



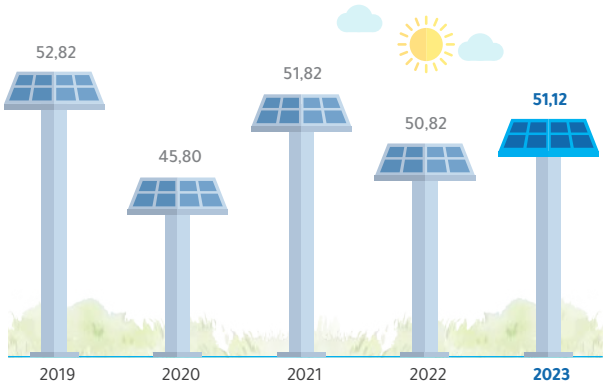
Grafik Produksi Tenaga Listrik (GWh)
Chart of Sale of Production (GWh)



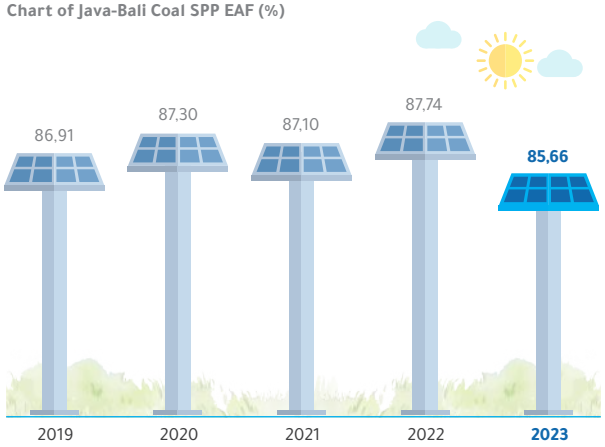
Grafik Daya Terpasang Pembangkit (MW)
Chart of Power Plant Installed Capacity (MW)



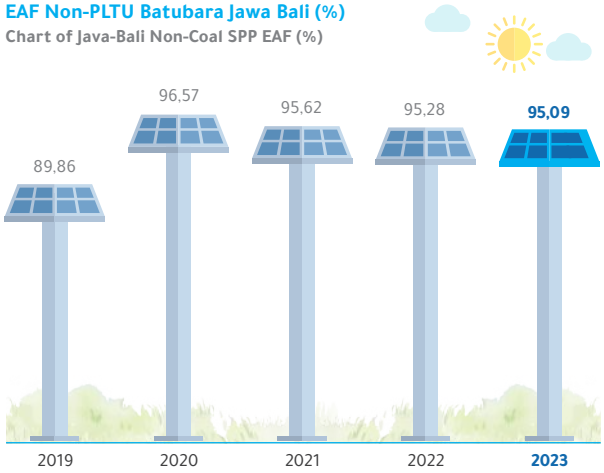
Grafik CF Pembangkit (%)
Chart of Power Plant CF (%)



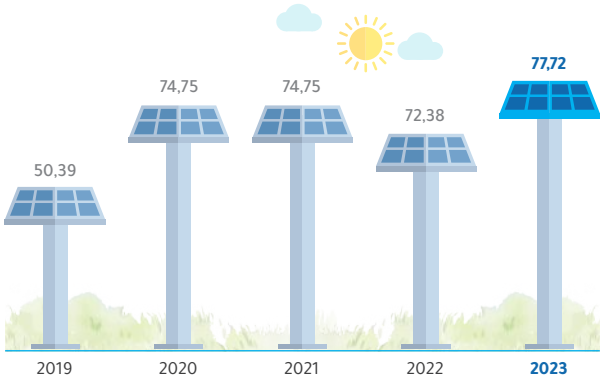
EAF PLTU Batubara Jawa Bali (%)
Chart of Java-Bali Coal SPP EAF (%)



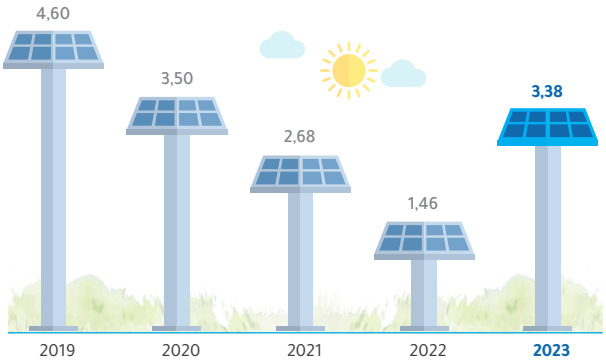
EAF Non-PLTU Batubara Jawa Bali (%)
Chart of Java-Bali Non-Coal SPP EAF (%)



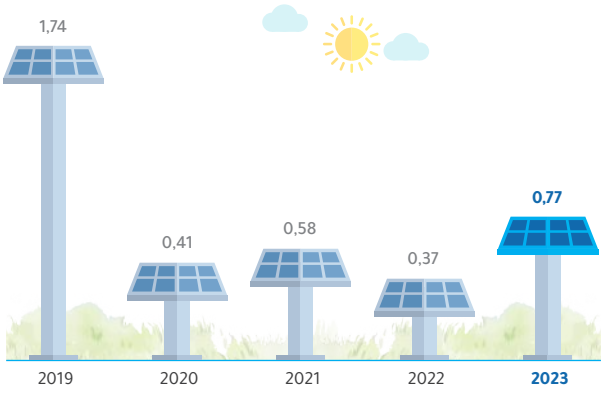
EAF PLTU Batubara Luar Jawa Bali (%)
Chart of Outside Java-Bali Coal SPP EAF (%)



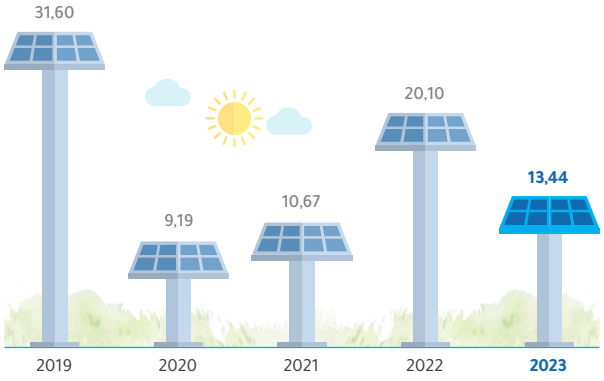
EFOR PLTU Batubara Jawa Bali (%)
Chart of Java-Bali Coal SPP EFOR (%)



EFOR Non-PLTU Batubara Jawa Bali (%)
Chart of Java-Bali Non-Coal SPP EFOR (%)

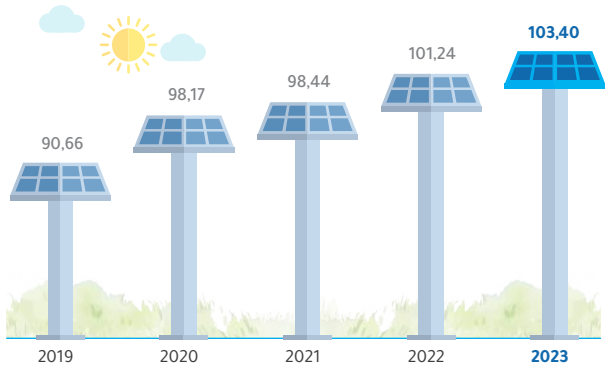


EFOR PLTU Batubara Luar Jawa Bali (%)
Chart of Outside Java-Bali Coal SPP EFOR (%)

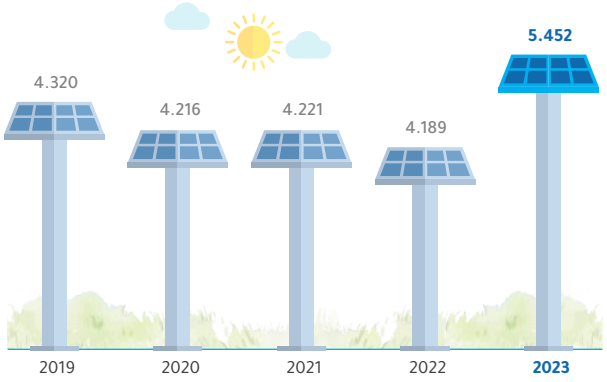


Kinerja Perusahaan Lainnya Other Performances	2019	2020	2021	2022	2023
Key Performance Indicator	90,66	98,17	98,44	101,24	103,40
Jumlah Pegawai (pegawai) Number of Employees (employee)	4.320	4.216	4.221	4.189	5.452
Skor *Assessment* GCG parameter Kementerian BUMN (%) GCG Assessment Score using Ministry of SOEs parameter (%)	93,51	94,97	95,51	93,56	94,76

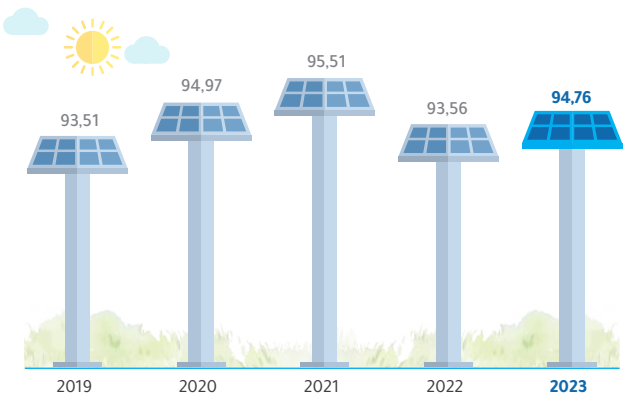
Key Performance Indicator
Key Performance Indicator



Grafik Jumlah Pegawai (pegawai)
Chart of Number of Employees (employee)



Grafik Skor *Assessment* GCG parameter Kementerian BUMN (%)
Chart of GCG Assessment Score using Ministry of SOEs parameter (%)



Ikhtisar Saham
Share Overview

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN Indonesia Power tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2023, PLN Indonesia Power had not had its shares listed and traded and therefore no information is available regarding the number of shares, market capitalization, highest share prices, lowest share prices, closing share prices, and volume of shares traded.

Jumlah saham beredar PLN Indonesia Power adalah sebanyak 357.165.633.600 lembar saham yang terdiri dari 1 lembar saham Seri 1 dan 357.165.633.599 saham Seri 2.

There is a total of 357,165,633,600 PLN Indonesia Power's outstanding shares, consisting of 1 Series 1 share and 357,165,633,599 Series 2 shares.

Ikhtisar Obligasi
Bonds Overview

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN Indonesia Power tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2018, PLN Indonesia Power had not issued any bonds, sukuks, and convertible bonds and therefore no information is available pertaining to the total bonds/sukuks/convertible bonds issued, interest rate/yield, maturity date, and ratings of the bonds/sukuks

Aksi Korporasi
Corporate Actions

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power tidak melakukan aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

In 2023, PLN Indonesia Power did not undertake any Corporate Actions related to activities affecting the number of outstanding shares, including stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.



Terkini dari PLN Indonesia Power
What's New from PLN Indonesia Power

Subholding Terbaik di Lingkungan PT PLN (Persero)
The Best PT PLN (Persero) Subholding



PLN Indonesia Power borong 3 penghargaan pada B*usiness Development and Portfolio Leadership Forum* yang diselenggarakan PT PLN (Persero) sebagai BUMN *Holding* Kelistrikan di Indonesia. Adapun penghargaan bergengsi yang diperoleh PLN Indonesia Power yaitu *Subholding* Terbaik Tahun 2023, *Subholding* Progres Penugasan Strategis Terbaik Tahun 2023, *Subholding* Progres Kontrak Luar Negeri Terbaik Tahun 2023. Semangat PLN Indonesia Power korporasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, PLN Indonesia Power memberikan *awareness* tantangan bisnis ketenagalistrikan, dan juga *to be Green Company.*

Penghargaan ini tidak lepas dari manuver PLN Indonesia Power dalam menjalankan penugasan strategis, seperti halnya keikutsertaan PLN Indonesia Power dalam industri manufaktur Solar PV dan juga pengembangan ekosistem *Green Hydrogen.* PLN Indonesia Power melalui anak usahanya PT Cogindo DayaBersama juga menjalin perjanjian kerjasama dengan EVNNPS Vietnam terkait pekerjaan *Maintenance Repair Overhaul* (MRO) serta *Pre-Assessment of Turbine, Generator and Turbine Auxiliary* di Vietnam. Disamping itu melalui anak usaha yang lain yaitu PT Artha Daya Coalindo juga menjalin Kerjasama perjanjian jual beli batubara dengan Glonex Commodities Pte. Ltd. dari Singapura.

PLN Indonesia Power brought home three (3) awards during the Business Development and Portfolio Leadership Forum hosted by PT PLN (Persero) as Indonesia's Electricity SOE Holding. These prestigious awards include the Best Subholding 2023, Subholding with the Best Strategic Secondment Progress 2023, and Subholding with the Best International Contract Progress 2023. With the spirit to grow and develop service quality, PLN Indonesia Power cultivates the awareness of challenges in the electricity business, as well as the goal to become a green company.

These awards were a result of PLN Indonesia Power's persistence in assuming its strategic roles, such as involving in the manufacture of solar PV and developing green hydrogen ecosystem. Via its subsidiary, PT Cogindo DayaBersama, PLN Indonesia Power executes a cooperation agreement with EVNNPS Vietnam for the provision of Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) as well as Turbine, Generator, and Turbine Auxiliary Pre-Assessment Services in Vietnam. Represented by another subsidiary, i.e. PT Artha Daya Coalindo, PLN Indonesia Power has also signed a Coal Purchase Agreement with Singapore's Glonex Commodities Pte. Ltd.

Komitmen PLN Indonesia Power dalam Pengembangan *Green Hydrogen* untuk mendukung Penyediaan Energi Bersih

PLN Indonesia Power's Commitment to Developing Green Hydrogen in Promoting Clean Energy Provision



Komitmen PLN Indonesia Power terhadap pengembangan energi bersih adalah langkah penting dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, terutama dalam kerangka Proyek Hijaunesia. PLN Indonesia Power telah menunjukkan keseriusannya dalam mengadopsi teknologi dan praktik ramah lingkungan dalam operasinya. PLN Indonesia Power menghasilkan 80 ton/tahun dan dimanfaatkan sebanyak 51 ton/tahun, hidrogen hijau dari 12 unit *Green Hydrogen Plant* (GHP) yang tersebar di Indonesia berkontribusi 40% dari total GHP PLN. Adapun 12 GHP milik PLN Indonesia Power terdapat di PLTU Pangkalan Susu, PLTU Suralaya 1-7, PLTU Suralaya 8, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTGU Tanjung Priok, PLTU Palabuhan Ratu, PLTGU Tambak Lorok, PLTG Pemaron, PLTU Grati, dan PLTU Adipala.

Hal ini merupakan bentuk dukungan kepada PT PLN (Persero) untuk menjadi pionir terbentuknya rantai pasok kebutuhan hidrogen hijau di masa depan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, sekaligus mendukung target Pemerintah untuk mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) tahun 2060. GHP diproduksi dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terdapat di area pembangkit. Selain dihasilkan dari PLTS yang terpasang, hidrogen hijau ini juga menggunakan *Renewable Energy Certificate* (REC) yang berasal dari beberapa pembangkit EBT di Indonesia.

PLN Indonesia Power meresmikan *Hydrogen Refueling Station* (HRS) menjadi pionir *supply chain hydrogen* untuk keperluan transportasi yang bertempat di Senayan Jakarta Selatan. HRS Senayan dilengkapi dengan mesin 350 bar, *Zero Carbon EV Charger* berbasis *Fuel Cell Generator*, dan *Hydrogen Center* sebagai pusat pelatihan hidrogen pertama di Indonesia. Selain berkelanjutan dan ramah lingkungan, bahan bakar dengan green hydrogen juga menghemat biaya operasional jika dibandingkan dengan energi fosil (BBM). PLN Indonesia Power telah melakukan berbagai upaya, diantaranya pengembangan Energi Baru Terbarukan salah satunya melalui proyek Hijaunesia.

PLN Indonesia Power's commitment to developing clean energy is a crucial step towards Indonesia Gold 2025, particularly for Hijaunesia Project. PLN Indonesia Power has demonstrated sincerity in adopting green technology and practices in its operations. PLN Indonesia Power produces 80 tons/year and utilizes 51 tons/year, green hydrogen from 12 Green Hydrogen Plant (GHP) units spread across Indonesia contributes 40% of PLN's total GHP. These 12 GHPs are located in SPP Pangkalan Susu, SPP Suralaya 1-7, SPP Suralaya 8, CCPP Cilegon, SPP Labuan, SPP Lontar, CCPP Tanjung Priok, SPP Palabuhan Ratu, CCPP Tambak Lorok, GTPP Pemaron, SPP Grati and SPP Adipala.

This demonstrates the Company's support to PT PLN (Persero) which pioneers green hydrogen supply chain as future's alternative to green fuel, while promoting the Government's Net Zero Emission (NZE) target by 2060. In their production, GHPs consume fuel from solar power plants (PLTS) within the power plant area. In addition to obtaining fuel from the installed solar power plants, green hydrogen plants also utilize Renewable Energy Certificate (REC) from some NRE power plants across Indonesia.

PLN Indonesia Power inaugurated Hydrogen Refueling Station (HRS) in Senayan, South Jakarta, which pioneers hydrogen supply chain for transportation purposes. HRS Senayan boasts 350 bar, Fuel Cell Generator-based Zero Carbon EV Charger. The facility also has a Hydrogen Center, the first of its kind in Indonesia. Sustainable and environmentally friendly, green hydrogen also costs lower compared to fossil energy. PLN Indonesia Power has established several projects for NRE development, such as the Hijaunesia Project.



Pionir di Indonesia, PLN Indonesia Power Sukses Operasi Kontinyu 100% *Biomass Firing*

The Pioneer for Indonesia, PLN Indonesia Power Successfully Ran 100% Biomass Firing Continuously



Melanjutkan *success story* pada uji coba *Co-firing* 100% biomassa pada Januari 2023, PLTU Sintang 3x7 MegaWatt (MW) berhasil menjadi pembangkit fosil pertama yang mampu beroperasi menggunakan 100% bahan bakar cangkang sawit dan *woodchips* sebagai bahan bakar pengganti batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sintang Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil riset PLTU Sintang, kalori yang dimiliki cangkang sawit sebesar 4.100 kcal/kg lebih tinggi dibandingkan kalori batubara yakni 3.700 kcal/kg. Selain itu untuk kalori bauran biomassa cangkang sawit dan *woodchips* juga masih lebih tinggi yaitu sebesar 3.732 kcal/kg. Rencananya PLTU Sintang akan beroperasi penuh menggunakan bahan bakar biomassa secara kontinyu. Dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan biomassa, PLN Indonesia Power berkolaborasi dengan *subholding* PLN Energi Primer Indonesia (EPI) dan *stakeholder* setempat.

A continuation of the 100% biomass co-firing trial success on January 2023, Sintang SPP 3x7 MW became the first fossil fuel power plant which managed to operate using only palm oil shells and wood chips as the alternative for coal in Steam Power Plant (SPP) Sintang, Sintang Regency, West Kalimantan Province.

From the research done by Sintang SPP, palm oil shells contain 4,100 kcal/kg, which is higher than coal which contains 3,700 kcal/kg. Also, the biomass mix of palm oil shells and wood chips contains 3,732 kcal/kg, which is still higher than coal's caloric content. Sintang SPP is planned to fully operate using biomass continuously. In order to maintain biomass supply, PLN Indonesia Power collaborates with subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) and local stakeholders.

Komitmen PLN Indonesia Power untuk Akselerasi Pengembangan Panas Bumi dengan Kapasitas Mencapai 1 GWp per tahun

PLN Indonesia Power's Commitment to Accelerating Geothermal Energy Development with up to 1 GWp per year



Dalam rangka eksekusi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan potensi pengembangan Panas Bumi lainnya yang telah dialokasikan ke PLN Indonesia Power dengan total kapasitas 570 MW, serta akselerasi pencapaian target *Net Zero Emission* Indonesia, pembentukan *Geo Co* merupakan wujud komitmen PLN Indonesia Power dalam menjalankan penugasan pengembangan PLTP yang memungkinkan *Geo Co* mendapatkan *green fund* dengan *rate* yang lebih kompetitif, memperkuat pasokan energi listrik yang bersumber dari EBT dalam negeri dengan mengoptimalkan potensi energi domestik, dan memberikan *agility* dalam eksekusi pengembangan panas bumi dengan membuka peluang kerjasama mitra strategis yang memiliki kapabilitas pendanaan yang kuat.

Potensi untuk mengembangkan pembangkit *geothermal* pada Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) milik PLN maupun milik swasta lainnya antara lain: Unit PLTP 1.367 MW (*existing* ++ PLTP Binary (Dieng, Lahendong, Ulubelu, Lumut Balai), PLTP Sungai Penuh, PLTP Hululais, PLTP Tulehu, PLTP Ulumbu 5-6, PLTP Tangkuban Parahu, PLTP Ungaran, PLTP Atadei, PLTP Mataloko, PLTP Songa Wayaua, PLTP Danau Ranau, PLTP Kapahiang, PLTP Oka Ile Ange, PLTP Sumbawa Bima, PLTP Gunung Sirung, PLTP Rajabasa.

For executing geothermal power plant project and developing the potential of other geothermal resources allocated to PLN Indonesia Power at a total capacity of 570 MW, as well as accelerating Indonesia's Net Zero Emission target achievement, Geo Co was established to prove PLN Indonesia Power's commitment to following up the geothermal power plant development assignment. This allows Geo Co to access green fund at a more competitive rate, strengthen domestic NRE-based electricity supply by optimizing potential energy domestically, and acquire agility in executing geothermal energy development through cooperation with strategic partners that have strong funding capabilities.

The potential to develop geothermal plants in Geothermal Working Areas (WKP) owned by PLN and other private companies include: Unit of 1,367 MW (existing ++ GPP Binary (Dieng, Lahendong, Ulubelu, Lumut Balai), GPP Sungai Penuh, GPP Hululais, GPP Tulehu, GPP Ulumbu 5-6, GPP Tangkuban Parahu, GPP Ungaran, GPP Atadei, GPP Mataloko, GPP Songa Wayaua, GPP Danau Ranau, GPP Kapahiang, GPP Oka Ile Ange, GPP Sumbawa Bima, GPP Gunung Sirung, GPP Rajabasa.

Pembangunan Pabrik *Solar* PV dengan Kapasitas 1 GWp

Construction of Solar PV Manufacturing Plant of 1 GWp



PLN Indonesia Power memberikan usaha terbaiknya dalam mendukung program PLN *Holding* untuk meningkatkan portofolio perusahaan & peningkatan pendapatan *beyond* kWh, salah satunya dengan pengembangan Manufaktur *Solar* PV melalui skema penyertaan modal pada perusahaan yang memiliki teknologi TOPCon dan termasuk *Tier*-1.

PLN Indonesia Power akan memiliki pabrik *solar* PV terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 1 GWp per tahun, dan dapat memiliki nilai TKDN di atas 60%. Modul surya dari pabrik ini akan menjadi solusi untuk mengakselerasi pengembangan PLTS di Indonesia.

PLN Indonesia Power brings its best effort to support the PLN Holding's program to expand the corporate portfolio and improve beyond kWh income, among others by developing solar PV manufacturing plant through investment in companies with TOPCon technology and included as Tier-1.

PLN Indonesia Power is on its way to have Indonesia's largest solar PV manufacturing plant that will produce 1 GWp per annum, with TKDN score above 60%. The solar module from the manufacturing plant will become the solution for accelerating Solar Power Plant development in Indonesia.

Testimoni
Testimonial



Beyond Compliance, PLN IP raih 13 Proper Emas
Beyond Compliance, PLN IP achieved 13 Proper Gold

K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia
Vice-President of the Republic of Indonesia

Selamat kepada PLN Indonesia Power penerima Anugerah Proper, karena Proper ini layaknya kompas yang mampu memandu praktik bisnis berkelanjutan dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau, bahkan mendorong capaian yang melebihi ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup.

Congratulations on receiving the Proper Awards. These awards are a compass that guides a sustainable business practice through the application of green economy principle, even promoting results beyond industry compliance towards environmental regulations.

Sumber Source
https://www.suara.com/bisnis/2023/12/25/155738/pln-indonesia-power-mendukung-masa-depan-yang-lebih-hijau-dengan-13-proper-emas



PLN Indonesia Power Amankan Sistem Kelistrikan Ambon
PLN Indonesia Power Secures Ambon's Electricity System

Darmawan Prasodjo
Direktur Utama PT PLN (Persero)
President Director of PT PLN (Persero)

Untuk melistriki wilayah Maluku membutuhkan perjuangan yang berat, sebab harus menghadapi kondisi alam yang menantang. PLN Indonesia Power telah berinovasi untuk melistriki wilayah tersebut. PLN Indonesia Power bukan hanya akan menyediakan listrik terbaik untuk Maluku, tetapi PLN Indonesia Power mendukung komitmen PLN untuk menjadi bagian integrasi mendorong kemajuan pembangunan di Maluku.

Supplying electricity to Maluku is proven difficult due to its challenging nature. PLN Indonesia Power has been innovating to supply electricity to the region. Not only providing the best electricity for Maluku, PLN Indonesia Power also supports PLN's commitment to become a part of the integration that promotes Maluku's development.

Sumber Source
hhttps://www.instagram.com/plnindonesiapower



BMPP Nusantara 1, Upaya Pemenuhan dan Pemerataan Pasokan Listrik
BMPP Nusantara 1, Efforts to Fulfill and Equalize Electricity Supply

Febry Calvin
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan
Deputy I of Presidential Head Staff

BMPP Nusantara 1 yang dibangun PLN Indonesia Power merupakan teknologi yang tepat untuk sistem kelistrikan Ambon. Dengan kondisi geografis yang menantang dan potensi wilayah yang besar, Maluku tidak boleh terabaikan dalam hal kelistrikannya. Maluku punya potensi yang sangat luar biasa tetapi satu lagi kembali saya katakan energi listrik sangat kurang padahal secara teori kita sudah *oversupply*.

Constructed by PLN Indonesia Power, BMPP Nusantara 1 is the perfect solution for Ambon's power system. Its geographically challenging nature and large potential should not deprive Maluku of adequate electricity. Maluku has a very large potential, but once again I emphasize that this region lacks electricity, although we have theoretically oversupplied the region.

Sumber Source
https://www.youtube.com/watch?v=OiNSQj9ijJo



BMPP Nusantara 1, Pembangkit Listrik Terapung
BMPP Nusantara 1, Floating Power Plant

Dr Abdul Haris, SPi, MSi
Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku
Head of Energy and Mineral Resources Department, Maluku

BMPP Nusantara 1 yang dibangun PLN Indonesia Power merupakan pembangkit listrik terapung yang dipastikan dapat memperkuat keandalan listrik di Ambon, Maluku dan secara tidak langsung meningkatkan kemandirian energi di Indonesia bagian timur.

Constructed by PLN Indonesia Power, BMPP Nusantara 1 is a floating power plant that will certainly improve Ambon, Maluku's energy reliability, which will indirectly contribute to energy independence in Eastern Indonesia.

Sumber Source
https://www.youtube.com/watch?v=OiNSQj9ijJo





Co-firing Biomassa, Menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060

Co-firing Biomass, Towards Net Zero Emission (NZE) 2060

Defiyan Cori
Ekonom Konstitusio
Constitutional Economist

PLN Indonesia Power tidak berhenti berinovasi dalam menjawab tantangan transisi energi. Pengembangan tersebut harus terus ditingkatkan hingga menjadi andalan pembangkitan listrik di Indonesia. PLN Indonesia Power telah menjadi pemain lama pengembangan energi hijau. Penerapan *Co-firing biomass* di PLTU secara masif, kerjasama pembangunan pabrik *solar* PV serta aksi-aksi lain untuk mengakselerasi transisi energi tanah air, sudah dilakukan PLN Indonesia Power. Terkait target *Net Zero Emission*, diantaranya pengembangan Energi Baru Terbarukan salah satunya melalui proyek Hijaunesia.

PLN Indonesia Power never stops innovating to answer to challenges posed by energy transitions. This development must continue until Indonesia's power generation can rely on it. PLN Indonesia Power has a lot years under its belt in developing green energy. Massive implementation of biomass co-firing in Steam Power Plants (SPP), collaborative construction of solar PV factory, and other actions have been taken to accelerate Indonesia's energy transition. To meet the Net Zero Emission target, PLN Indonesia Power has established different NRE development projects, such as the Hijaunesia Program.

Sumber Source
https://resourcesasia.id/pengamat-pln-indonesia-power-garda-terdepan-pengembangan-hydrogen-refueling-station



Co-firing Biomassa PLTU sebagai Solusi Transisi Energi

Co-firing Biomass SPP as an Energy Transition Solution

Jarot Winarno
Bupati Sintang
Sintang Regent

Saya Bupati Sintang mengucapkan selamat kepada PLN Indonesia Power atas keberhasilan uji coba 100% pembakaran biomassa dan uji coba *Co-firing* kayu cacah. Kami sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PLN Group dalam mengurangi jumlah limbah kelapa sawit yang diolah menjadi energi listrik. Kami akan selalu mendukung pelaksanaan *Co-firing* melalui Peraturan Bupati Sintang No. 82 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Biomassa sebagai Sumber Energi Terbarukan. Yang terpenting adalah energi bersih, energi hijau kita pelihara.

On behalf of Sintang Regency, congratulations to PLN Indonesia Power for the successful 100% biomass firing and wood chips co-firing trials. We highly appreciate PLN Group's efforts in reducing palm oil waste by processing it into electricity. We will continue to support the co-firing endeavor through the enforcement of the Regulation of the Head of Sintang Regency No. 82 of 2022 on the Utilization of Biomass as Renewable Energy Source. It is essential for us to maintain clean and green energy.

Sumber Source
Indonesia Power Weekly News 2023



Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Report to Shareholders and Stakeholders





Laporan Direksi
Report from the Board of Directors



Edwin Nugraha Putra
Direktur Utama
President Directors

Pasca pembentukan *Holding Subholding* pembangkitan oleh PLN dengan adanya pelimpahan aset pembangkit beserta SDM dan organisasinya, maka PLN Indonesia Power telah menjadi perusahaan pembangkit dengan kapasitas terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tentu hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang namun sekaligus juga menjadi tantangan yang harus dikelola dengan baik.

Following the establishment of Power Generation Holding-Subholding by PLN which resulted in the transfer of power generation assets and their human capitals and organization, PLN Indonesia Power has become a generation company with the largest capacity in Southeast Asia. This is an advantage for the Government for growing and developing as well as a challenge that requires proper management.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PLN Indonesia Power dapat melalui tahun 2023 dengan pencapaian kinerja positif dan membanggakan. Suatu kehormatan bagi Kami, jajaran Direksi untuk menyajikan Laporan Tahunan PLN Indonesia Power tahun buku 2023 yang memuat uraian pelaksanaan strategi yang dijalankan Direksi dalam merespon berbagai tantangan yang terjadi, analisis atas pencapaian kinerja Perusahaan, prospek usaha di masa depan, perkembangan penerapan tata kelola Perusahaan, serta perubahan komposisi Direksi dan alasan perubahannya selama tahun 2023.

Secara umum, dampak aktual yang diterima oleh PLN Indonesia Power pasca pembentukan *Holding Subholding* pembangkitan di PT PLN (Persero) selanjutnya disebut "PLN" adalah adanya pelimpahan aset pembangkit beserta SDM dan organisasinya, sehingga PLN Indonesia Power menjadi perusahaan pembangkit dengan kapasitas terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tentu hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Perusahaan untuk terus tumbuh berkelanjutan sekaligus juga tantangan yang harus dikelola dengan baik.

Our praise and gratitude are expressed to the presence of Almighty God who has bestowed His mercy and grace upon all of us, for bringing us, PLN Indonesia Power, passing through 2023 with conclusive accomplishments. It is an honor for us, the Board of Directors, to present PLN Indonesia Power Annual Report for the fiscal year 2023 which details the implementation of strategies run by the Board of Directors in responding any challenges, the analyses of the Company's performance, the outlook for our business forward, the development of corporate governance, and the changes in the Board of Directors' Composition along with the reason behind them.

The impact of the establishment of Power Generation Holding-Subholding by PT PLN (Persero) (hereinafter referred to as "PLN") on PLN Indonesia Power was a transfer of assets along with their human capital and organization, turning PLN Indonesia Power into a generation company with the largest capacity in the Southeast Asia. This is not only an advantage for the Government for growing sustainably, but also a challenge that requires proper management.

Kondisi Makroekonomi 2023
Macroeconomic Situations in 2023

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya berada di level 3,1%, sedikit melambat dibandingkan 2022 yang sebesar 3,5% dan masih menjadi tahun penuh tantangan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan ketegangan geopolitik yang memicu gangguan suplai energi dan pangan global, sehingga mendorong kenaikan inflasi. Di tahun 2023 juga terjadi kenaikan suku bunga acuan bank sentral di banyak negara di seluruh dunia yang mengakibatkan perlambatan aktivitas dan dinamika ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat menghadapi tingkat inflasi di atas target dan Tiongkok menghadapi pelemahan ekonomi pasca pandemi Covid-19 seiring dengan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh terbatas.

The global economic growth of 2023 only stood at 3.1%, a slowdown from 2022 at 3.5%. 2023 was proven to still be full of challenges. This was particularly caused by increasing geopolitical tensions that triggered disruptions in global energy and food supplies, thereby driving inflation up. In 2023, central bank benchmark interest rates increased in many countries around the world, resulting in a slowdown and economic dynamics in developed countries such as the United States and China. The United States faced inflation while China suffered from economic slowdown post-COVID-19, as household consumption and investments were stagnant.

Perekonomian Indonesia tetap tangguh di tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global. Hal tersebut terutama didorong membaiknya kinerja lapangan usaha utama diantaranya industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan serta terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,05%, sedikit melemah dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,31% atau termasuk dalam kategori baik, di tengah pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan mayoritas bank sentral lainnya di seluruh dunia. Adapun pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong oleh berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga dan investasi, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, tumbuh 4,82% di tahun 2023, sedikit lebih rendah dari 4,94% di tahun 2022. Sementara itu investasi tumbuh 4,40% atau lebih cepat dibandingkan 3,87% di tahun sebelumnya. Sementara inflasi tercatat 2,61% *year-on-year*, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun lalu sebesar 5,51% dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp15.782,- per Dolar AS.

Indonesia's economy in 2023 remained resilient amid the global slowdown, which was thanks to improvements in key business fields such as the processing, construction, and mining, steady purchasing power with low inflation, and fiscal stimuli including subsidies and social assistance. According to Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy grew 5.05% in 2023, which was lower than in the previous year of 5.31%. This was considered decent, bearing in mind that monetary tightening was imposed by Bank Indonesia and most central banks across the globe. The growth of investment was also positive, alongside the continuation of the National Strategic Projects. Household consumption and investment, which are the main drivers of Indonesia's economic growth, grew 4.82% in 2023, which was slightly lower than 4.94% in 2022. Meanwhile, investment grew 4.40%, which was higher than in the previous year at 3.87%. Inflation was 2.61% year-on-year, which was lower than last year's inflation of 5.51% at the exchange rate of Rp15,782 per US dollar.

Analisis Kinerja Tahun 2023
Analysis of Company Performance in 2023

Transformasi PLN Group dengan pembentukan *Holding Subholding* ("HSH") yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2023, telah berjalan dengan lancar. Selain mendesain ulang struktur organisasi HSH PLN Group karena perubahan proses bisnis dan jumlah aset yang dikelola, termasuk aspek terdampak lainnya yang mengalami penyesuaian. Yaitu antara lain aspek komersial, aspek operasional pembangkit, tata kelola, proses bisnis, kontrak dan perizinan maupun SDM dan organisasi. Ditetapkannya PLN Indonesia Power sebagai salah satu *Subholding* Pembangkitan PLN membawa konsekuensi besar atas peran tersebut. Selain PLN mengalihkan kepemilikan aset-aset pembangkit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia kepada *Subholding* PLN Indonesia Power, sehingga kapasitas terpasang pembangkit PLN Indonesia Power meningkat signifikan, dari 10,2 GW (164 mesin) sebelum HSH, menjadi 21,08 GW (399 mesin) pasca HSH. Masuknya unit-unit baru, yaitu Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) dan Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) beserta personil-personilnya, meningkatkan jumlah Unit PLN Indonesia Power yang semula terdiri dari 14 (empat belas) Unit eksisting bertambah menjadi 37 (tigapuluh tujuh) Unit. Untuk itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat guna menjawab tantangan dalam mencapai target dalam RKAP 2023 dan bisnis *beyond* kWh untuk menjaga kelangsungan usaha jangka panjang Perusahaan.

PLN Group transformation with the establishment of Holding-Subholding ("HSH") in early 2023 took place without a glitch. Apart from redesigning the PLN Group's HSH organizational structure due to changes in business processes and the number of assets managed, other affected aspects have been properly adjusted. These include the aspects of commerce, plant operations, governance, business process, contracts, licensing, human resources, and organization. The establishment of PLN Indonesia Power as one of PLN's Generation Subholdings ("SH") has brought major consequences. The transfer of PLN's ownership of generation assets across Indonesia to SH PLN Indonesia Power has significantly expanded PLN Indonesia Power's installed capacity from 9.8 GW (164 engines) before HSH to 21.08 GW (399 engines) after HSH. The entry of new units, i.e. Generation Implementation Unit (UPK) and Generation Control Implementation Unit (UPDK) and their personnel have increased the number of PLN Indonesia Power Units from 14 existing units to 37 units. This requires appropriate strategies and policies to answer the challenge in meeting the WP&B 2023 and business beyond kWh targets, hence maintaining the Company's business continuity in the long run.

Strategi dan Kebijakan Perusahaan 2023
Strategies and Policies in 2023

Menghadapi kondisi tahun 2023, Direksi merumuskan strategi dan kebijakan PLN Indonesia Power yang selaras dengan aspirasi Pemegang Saham dan strategi jangka Panjang Perusahaan. Guna mendukung pencapaian target kinerja dan menjaga keberlangsungan bisnisnya ke depan, PLN Indonesia Power melanjutkan strategi serta kebijakan tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan yang diperlukan dan tertuang dalam program kerja strategis Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") 2023 dan *roll over* Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang berlaku dan telah disetujui oleh Pemegang Saham. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power telah merumuskan sasaran utama ke dalam 3 (tiga) *strategic results*, yaitu (1) Kinerja Operasional di Kawasan Asia Tenggara, dengan kinerja operasional pembangkit yang andal (*reliable*

Facing the 2023 situations, the Board of Directors formulated the strategies and policies for PLN Indonesia Power that are aligned with the Shareholders' aspirations and the Company's long term strategies. In order to help meeting performance targets and maintaining business sustainability, PLN Indonesia Power continues the previous year's strategies and policies by making the necessary improvements contained in the Company's Work Plan and Budget (WP&B) 2023 and the rollover of the applicable Company Long Term Plan (RJPP) which have been approved by the Shareholders. In 2023, PLN Indonesia Power has categorized the key targets into three (3) strategic results, i.e. (1) Operational Performance in Southeast Asia, with reliable power generation operations that are indicated by EAF, EFOR, and O&M



power generation) berupa indikator EAF dan EFOR serta efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan (O&M *cost reduction*); (2) Peningkatan *Green & Clean Power Plant*, dengan tercapainya *New Renewable Energy (NRE) power plant capacity mix* dan faktor emisi dengan satuan Ton CO_2e/MWh serta (3) Penambahan Portofolio Bisnis di Luar Penjualan Tenaga Listrik melalui realisasi persentase pendapatan *beyond* kWh *sales* terhadap total pendapatan. Keseluruhan *strategic results* tersebut dijalankan untuk mendorong tercapainya target kinerja utama yakni *cost leadership* yang meliputi *operation cost saving* dan penghematan BPP tenaga listrik serta realisasi peningkatan EBITDA.

Sasaran dan Program utama PLN Indonesia Power dalam RKAP tahun 2023 dieksekusi ke dalam ketiga *strategic result* yang diselaraskan dengan *framework Environmental*, *Social and Governance* dengan fokus utama untuk meningkatkan *maturity* tata kelola pembangkit dan *value creation Subholding*. Selain itu, PLN Indonesia Power juga terus melakukan inisiasi pengembangan usaha dalam rangka mendukung transisi energi dan inovasi bisnis yang mampu meningkatkan pendapatan *beyond* KWH dan *go global*. Pada masa transisi pembentukan *HSH*, PLN Indonesia Power fokus untuk merealisasikan tujuan pembentukan *Subholding* yaitu tercapainya sentralisasi pembangkit, standarisasi tata kelola pembangkit, peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi *monitoring* kinerja pembangkit, pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendukung terwujudnya transisi energi. Selain itu, PLN Indonesia Power juga memastikan agar sasaran dan program utama dalam RKAP 2023 selaras dengan *strategic mission* SOLID PLN dan transformasi PLN. SOLID PLN adalah:

1. *Securing Business Sustainability* (menjamin keberlangsungan bisnis);
2. *Optimizing Cost Efficiency* (optimasi efisiensi biaya);
3. *Leading Industry Capabilities* (kapabilitas terdepan dalam industri);
4. *Increasing Profit Contribution* (meningkatkan kontribusi laba); dan
5. *Developing New Edge* (mengembangkan teknologi dan bisnis baru).

Implementasi *strategic result* pertama, Kinerja Operasional di kawasan Asia Tenggara terutama untuk menjadikan pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power memiliki kinerja operasional terbaik di Asia Tenggara, dengan tercapainya kepuasan pelanggan dan implementasi *integrated strategic asset management* tercapai 100%. PLN Indonesia Power mengelola 417 mesin pembangkit, bertambah 260 mesin pembangkit dari tahun sebelumnya. Untuk itu, Perusahaan terus berupaya secara optimal untuk menjaga keandalan mesin pembangkit dengan strategi *operation excellence*, antara lain dengan melakukan pemeliharaan pembangkit *Beyond* 5-ON, peningkatan utilisasi pembangkit, implementasi *cofiring*, dan penurunan emisi karbon pembangkit. Selain itu, kami juga konsisten dalam sertifikasi SMK3 di seluruh unit pembangkit dan penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS).

Pada *strategic result* kedua, Peningkatan *Green & Clean Power Plant*, dengan sasaran utama yang dicapai adalah berupa uji peningkatan *cofiring biomass* 100% untuk 2 (dua) PLTU batubara, inisiatif pengembangan pembangkit EBT sebesar 4.103 MW serta uji coba *hydrogen cofiring* pada PLTGU Priok Blok #3 dan #4 mencapai 20%. Untuk mencapai target tersebut maka PLN Indonesia Power melaksanakan program pengembangan pembangkit yang terdiri dari pembangkit termal dan pembangkit EBT, antara lain melalui pengembangan sendiri sebagai *investment company*. Adapun target rencana penambahan kapasitas pembangkit COD tahun 2023 adalah sebesar 862 MW yang terdiri dari pembangkit non-EBT 839 MW dan EBT 23 MW. Selain itu, PLN Indonesia Power juga telah mengintegrasikan program kerja Perusahaan dengan aspek pengelolaan lingkungan, sosial dan tata kelola atau *Environment, Social and Governance* (ESG).

cost optimization; (2) Green and Clean Power Plant Improvements, by meeting the targets of New-Renewable Energy (NRE) power plant capacity mix and emission factors in units of ton CO_2e/MWh; and (3) Addition to Business Portfolio beyond Electricity Sales, by meeting the target ratio of income beyond kWh sales to total income. All strategic results were carried out to encourage meeting the key performance target, namely cost leadership which includes operation cost savings and electricity production cost savings, and realizing an increase in EBITDA.

PLN Indonesia Power's key targets and programs in WP&B 2023 were executed into three strategic results that are aligned with the Environmental, Social and Governance framework with the main focus on increasing the maturity of generator governance and subholding value creation. PLN Indonesia Power also continues to initiate business development that supports the energy transition and business innovation for increasing income beyond kWh and going global. During the transition period for HSH establishment, PLN Indonesia Power was focused on meeting the goals of the Subholding establishment. It meant achieving power plant centralization, standardizing power plant governance, building human capital competency, digitalizing power plant monitoring, managing greenhouse gas (GHG) emissions, and supporting the energy transition. PLN Indonesia Power also ensured that the WP&B 2023 key targets and programs were aligned with the SOLID PLN strategic mission and PLN transformation. SOLID PLN stands for:

1. Securing Business Sustainability;
2. Optimizing Cost Efficiency;
3. Leading Industry Capabilities;
4. Increasing Profit Contribution; and
5. Developing a New Edge.

The implementation of the first strategy result, "Operational Performance in Southeast Asia", was mainly to deliver the best operational performance across Southeast Asia for power plants managed by PLN Indonesia Power, by achieving the perfect score of 100% for customer satisfaction and integrated strategic asset management. In 2023, following HSH establishment, PLN Indonesia Power managed 417 generation engines, increasing 260 units from the previous year. For this reason, the Company continues to optimally maintain the reliability of generation engines through operational excellence strategies, among others by implementing Beyond 5-ON, increasing plant utilization, implementing cofiring, and reducing plant carbon emissions. We are also consistent in procuring SMK3 certification at all generation units and implementing the Contractor Safety Management System (CSMS).

The second strategy result, Green and Clean Power Plant Improvements, met the main target of 100% biomass co-firing improvement tests for two coal SPP, NRE plant development initiative of 4,103 MW, and 20% hydrogen co-firing tests at PLTGU Priok Blocks 3 and 4. To meet these targets, PLN Indonesia Power carried out a power generation development program for thermal and NRE generators, both through independent development and in collaboration with investment companies. The COD generation capacity in 2023 was targeted to increase by 862 MW, i.e. 839 MW from non-NRE power plants and 23 MW from NRE power plants. PLN Indonesia Power has also integrated its work programs with the Environment, Social, and Governance (ESG) aspect.



Dalam hal *strategic result* ketiga, Penambahan Portofolio Bisnis di Luar Penjualan Tenaga Listrik, dengan target indikator kinerja manufaktur solar PV untuk pemenuhan TKDN serta non-PLN Group dan *overseas MRO Service Contract*. PLN Indonesia Power fokus pada penguatan proses bisnis dan organisasi untuk bisnis baru, menciptakan *value added* yang berbeda dengan pesaing dan membangun sinergi dengan berbagai pihak guna mengembangkan portofolio bisnis *beyond* kWh. PLN Indonesia Power terus berupaya melakukan pemasaran produk *Beyond KWh*, dalam dan luar negeri, baik melalui Perusahaan maupun Anak Perusahaan/Afiliasinya. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan dan Anak Perusahaan/Afiliasi telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan rencana kerja tersebut.

The third strategy result, Addition to Business Portfolio beyond Electricity Sales, targets solar PV manufacture for meeting Domestic Component Level (TKDN) compliance, as well as non-PLN Group and overseas MRO Service Contracts. PLN Indonesia Power focuses on strengthening business processes and organizations for new businesses, creating distinguished added value against competitors, and building synergies with various parties to develop business beyond kWh portfolio. PLN Indonesia Power markets Beyond kWh products domestically and internationally, both on itself and through Subsidiaries/Affiliates. Throughout 2023, the Company and Subsidiaries/Affiliates have signed cooperation agreements with a number of parties to implement the work plans.

Disamping itu, Perusahaan juga mengembangkan strategi *enabler* yang mendukung seluruh tema strategis tersebut, antara lain strategi terkait pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi K3 dan lingkungan, pemenuhan PROPER, peningkatan fungsi *engineering* untuk mendukung pengembangan bisnis melalui peningkatan kompetensi di bidang *engineering*, teknologi EBT, *marketing*, serta strategi untuk implementasi transformasi digital.

The Company also develops an enabler strategy that supports all of these strategic themes. They include complying with HSE regulations, complying with PROPER requirements, enhancing engineering functions to support business development by increasing competence in the fields of engineering, NRE technology, marketing, and digital transformation strategies.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Perusahaan
Board of Directors' Function in Formulating Company Strategies and Policies

Dalam proses perumusan program kerja Perusahaan, baik dalam RKAP yang disusun setiap tahun maupun RJPP yang disusun lima tahun sekali, Direksi telah memetakan tantangan dan risiko yang dihadapi PLN Indonesia Power. Dalam rangka menghadapi tantangan dan risiko tersebut dapat dikelola dengan baik maka Direksi menyusun strategi dan kebijakan, dengan memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang disusun tersebut telah sesuai dengan penerapan tata kelola, termasuk memperhatikan aspek keberlanjutan yang menjadi topik hangat dunia usaha saat ini.

In the process of formulating the Company's work program, both for annual WP&B and quinquennial RJPP, the Board of Directors has mapped PLN Indonesia Power's challenges and risks. In order to face and properly manage these challenges and risks, the Board of Directors formulates strategies and policies and makes sure that they are in accordance with governance implementation, including sustainability which is currently a hot topic in the business world.

Direksi merumuskan strategi dan kebijakan untuk tahun 2023 selaras dengan amanat Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam RKAP Tahun 2023 dan RJPP yang berlaku yang telah ditetapkan. Penyusunan RKAP dan RJPP dilakukan Direksi dengan pengawasan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disahkan oleh Pemegang Saham. Untuk memastikan penerapan strategi dan kebijakan berjalan efektif, Direksi memastikan strategi dan kebijakan tersebut dipahami dan diterapkan oleh seluruh fungsi dalam semua tingkatan organisasi. Direksi melakukan komunikasi secara langsung kepada *Senior Leader*, melakukan tinjauan manajemen atau rapat bersama unit terkait, serta memeriksa laporan hasil audit, internal maupun eksternal untuk meninjau efektivitas implementasi strategi dan kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

The Board of Directors formulates the strategies and policies for 2023 as mandated by the Shareholders and contained in the stipulated WP&B 2023 and RJPP. The Board of Directors prepares the WP&B and RJPP under the supervision and direction of the Board of Commissioners, the documents of which are subsequently to be ratified by the Shareholders. To ensure effective implementation, the Board of Directors makes sure that these strategies and policies are understood and implemented by all functions at all levels of the organization. The Board of Directors communicates directly with Senior Leaders, conducts management reviews or meetings with related units, and examines internal and external audit reports, so as to review the effectiveness of the implemented strategies and policies according to the goals and targets set.

Proses yang Dilakukan dalam Memastikan Penerapan Strategi dan Kebijakan
Verifying the Implementation of Strategies and Policies

Untuk memastikan penerapan strategi dan kebijakan terlaksana dengan baik, maka Direksi melakukan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan penjabaran dan pengarahan lebih lanjut yang diperlukan agar target RKAP Tahun 2023 dapat dieksekusi pencapaiannya. Direksi berperan aktif untuk memastikan bahwa seluruh bagian dalam organisasi memahami serta menerapkan strategi Perusahaan secara konsisten pada masing-masing unit kerja maupun unit bisnis.

For proper implementation of strategies and policies, the Board of Directors has made various efforts, including by providing further elaboration and direction needed to meet the WP&B 2023 targets. The Board of Directors constantly makes sure that all parts of the organization fully understand and consistently implement the Company's strategy in each work unit and business unit.



Direksi melakukan pemantauan dan analisa terhadap berbagai indikator dalam pelaksanaan proses evaluasi dan *monitoring* penerapan strategi dan kebijakan. Dalam proses penerapannya, Direksi dapat melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan apabila diperlukan. Kami juga terus merespon setiap perubahan yang terjadi dengan melakukan penyesuaian secara cepat dan efisien. Direksi terlibat langsung dalam pengawasan implementasi strategi serta memastikan bahwa seluruh bagian dalam organisasi PLN Indonesia Power memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide-ide dan inovasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

The Board of Directors monitors and analyzes numerous indicators when evaluating and monitoring the implementation of strategies and policies. In practice, the Board of Directors can make adjustments to these strategies and policies whenever necessary. We also continue to respond to every change that occurs by making adjustments quickly and efficiently. The Board of Directors is directly involved in supervising the implementation of strategies and verifying that every part of PLN Indonesia Power has equal opportunity to convey ideas and make innovations that can help meet the Company's goals.

Pencapaian Kinerja 2023 dan Perbandingan dengan Target

Actual Performances in 2023 and Comparison with Targets

Dampak positif lainnya pasca pembentukan HSH, dimana PLN Indonesia Power menjadi salah satu *Subholding* perusahaan pembangkit PLN adalah peningkatan jumlah pendapatan hampir dua kali lipat disertai peningkatan EBITDA dan *profit* Perusahaan serta *market share* Perusahaan di pasar ketenagalistrikan nasional. Pencapaian kinerja PLN Indonesia Power tahun 2023 membukukan hasil yang baik dan membanggakan, baik di bidang keuangan maupun operasional. Realisasi KPI Perusahaan di tahun 2023 mendapatkan skor sebesar 103,40 atau meningkat dibanding skor KPI Perusahaan sebelumnya sebesar 101,24.

HSH establishment has also brought another positive impact: as PLN's power generation subholding, PLN Indonesia Power experienced almost two-fold increase in revenue, along with the increase in EBITDA, profit, and market share in the national electricity market. PLN Indonesia Power recorded favorable accomplishments in 2023, both in the financial and operational fields. The Company's KPIs in 2023 scored 103.40, which was an improvement from last year's KPI score of 101.24.

Penilaian atas kinerja Direksi didasarkan pada pencapaian KPI Perusahaan 2023 yang menjadi target dalam Kontrak Manajemen dan RKAP 2023. KPI Perusahaan 2023 menjadi target indikator kinerja utama PLN Indonesia Power di tahun 2023 dengan total 33 (tiga puluh tiga) indikator, dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja telah mencapai target, 7 (tujuh) indikator hampir tercapai dengan pencapaian lebih dari 95% dari target serta 2 (dua) indikator belum mencapai target. Indikator KPI Perusahaan 2023 yang mencapai target antara lain adalah EBITDA, BPP pembangkit, ROIC, kinerja EFOR Pembangkit Jawa Bali non PLTU batubara; kinerja EFOR Pembangkit Luar Jawa Bali PLTU batubara; kinerja EFOR Pembangkit Luar Jawa Bali non PLTU batubara; kinerja EAF pembangkit Luar Jawa Bali PLTU batubara; kinerja keandalan EAF Pembangkit Luar Jawa Bali non PLTU batubara; pemakaian *specific fuel consumption* (SFC) batubara, SFC gas dan pemenuhan *Risk Management Index* (RMI); jumlah kontrak bisnis di luar negeri, sinergi antar *Sub Holding* & Anak Perusahaan lain; bauran energi EBT; *carbon emission reduction, strategic partnership GenCo*; *digital power plant implementation*; efisiensi biaya pemeliharaan pembangkit; efisiensi NPHR; jaminan penyediaan energi primer batubara; *total unit with Proper* (*beyond compliance*); *talent millennial*, perempuan dalam *nominated talent*, sertifikasi manajemen risiko pegawai; program *making digital talent* serta ketepatan penyampaian laporan dan akurasi data kinerja.

The assessment of the performance of the Board of Directors is based on the achievement of the 2023 Company KPI which is the target in the Management Contract and 2023 RKAP. The 2023 Company KPI is the main performance indicator target for PLN Indonesia Power in 2023 with a total of 33 (thirty three) indicators, and 24 (twenty four)) performance indicators have reached the target, 7 (seven) indicators have almost been achieved with more than 95% of the target and 2 (two) indicators have not yet reached the target. The 2023 KPIs that met the targets were EBITDA; power plant production cost; ROIC; EFOR of non-coal SPP in Java-Bali; EFOR of coal SPP outside Java-Bali; EFOR of non-coal SPP outside Java-Bali; EAF of coal SPP outside Java-Bali; EAF of non-coal SPP outside Java-Bali; coal specific fuel consumption (SFC); gas specific fuel consumption (SFC); Risk Management Index (RMI) compliance; number of business contracts abroad; synergy among subholdings and other subsidiaries; NRE mix; carbon emission reduction; GenCo strategic partnership; digital power plant implementation; power plant maintenance efficiency; NPHR efficiency, guarantee of coal supply as primary energy; total units with Proper (beyond compliance); millennial and female talents in nominated talents, employee risk management certification; 'making digital talent' program; and reporting timeliness & performance data accuracy.

Untuk indikator KPI Perusahaan 2023 yang pencapaiannya kurang dari 80% target, meliputi pendapatan dari luar PLN grup dan EFOR pembangkit non PLTU batubara Jawa Bali. Direksi akan terus berupaya untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran guna pencapaian seluruh target KPI Perusahaan yang ditetapkan.

The Company's 2023 KPIs which fell below 80% of the targets include earnings beyond PLN group and EFOR of non-coal SPP in Java-Bali. Directors will continue to develop more targeted policies and strategies in order to meet all the KPI targets.

Eksekusi program strategis 2023 yang disusun oleh Direksi antara lain dengan menjaga keandalan pembangkit memproduksi listrik dengan biaya rendah, berkontribusi dalam *fuel mix* EBT, transformasi *digital* dan inovasi secara berkelanjutan, pengembangan bisnis *beyond* kWh serta meningkatkan kapasitas organisasi dan kapabilitas SDM yang sejalan dengan pertumbuhan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

The 2023 strategic programs prepared by the Board of Directors among others were executed by maintaining power plant reliability at low costs, contributing to the NRE fuel mix, carrying out digital transformation and making innovations on an ongoing basis, developing business beyond kWh and enhancing organizational capacity and HC capabilities according to the Company's sustainable performance growth.



Realisasi produksi tenaga listrik tahun 2023 menjadi 84.199,86 GWh, meningkat signifikan 124,47% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 37.510,12 GWh atau 106,94% dari target RKAP 2023 sebesar 78.734,67 GWh. Hal tersebut berdampak pula pada peningkatan penjualan tenaga listrik secara signifikan menjadi sebesar 79.664,84 GWh, meningkat 121,69% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 37.510,12 GWh atau mencapai 107,07% dari target RKAP 2023 sebesar 74.403,53 GWh. Meningkatnya produksi dan penjualan tenaga listrik terutama disebabkan oleh adanya pengalihan aset pembangkit PLN ke *Subholding* PLN Indonesia Power. Selain itu, PLN Indonesia Power terus menjaga nilai BPP pembangkit sesuai target RKAP 2023 pada level Rp1.034.65,- dari target Rp1.162,30,-. Direksi berkomitmen terus menjaga dan meningkatkan kinerja BPP pembangkit serta melakukan mitigasi risiko atas faktor yang mempengaruhi tercapainya target produksi maupun penjualan tenaga listrik dengan lebih baik lagi.

The actual electricity production in 2023 was 84,199.86 GWh, increased significantly by 124.47% from 2022 realization of 37,510.12 GWh, or 106.94% of the WP&B 2023 target at 78,734.67 GWh. This also significantly affected electricity sales which increased to 79,664.84 GWh, which was an improvement by 121.69% from the previous year at 37,510.12 GWh, or at 107.07% of the WP&B 2023 target of 74,403.53 GWh. The increase in electricity production and sales was mainly due to the transfer of assets of a number of PLN power plants to PLN Indonesia Power as its subholding. PLN Indonesia Power also successfully maintained the power plant production cost at Rp1,034.65, from the target of Rp1,162.30. The Board of Directors is committed to continue maintaining and improving power plant production cost by mitigating risks on factors that may affect the achievement of production targets and electricity sales.

Kami senantiasa berkomitmen menjaga keandalan pembangkit dan meminimalisir faktor gangguan pembangkit melalui implementasi *corporate strategy overview* Perusahaan. Dilihat dari pencapaian kinerja operasional dibandingkan dengan target RKAP 2023, dimana faktor keandalan pembangkit yang ditunjukkan dengan realisasi EAF PLTU batubara eksisting, EAF pembangkit Jawa Bali untuk PLTU batubara maupun non PLTU batubara serta EAF pembangkit di luar Jawa Bali untuk PLTU batubara dan non PLTU batubara. Nilai keandalan EAF pembangkit PLTU batubara di Jawa Bali tahun 2023 mencapai sebesar 85,66% atau 98,63% dari target RKAP 86,85% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 92,03% sedangkan untuk yang non PLTU batubara mencapai 95,09% atau 99,20% dari target RKAP 95,86%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 92,03%. Untuk nilai kinerja gangguan EFOR pembangkit di Jawa Bali untuk PLTU batubara dan non PLTU batubara masing-masing mencapai sebesar 3,38% atau 62,60% dari target dan 0,77% atau 110,00% dari target dan lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 0,65% untuk pembangkit eksisting. Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya terus berupaya melakukan penanganan gangguan pembangkit dengan lebih baik lagi di masa mendatang.

We are always committed to maintaining power plant reliability and minimizing outages through corporate strategy overview of the actual operational performance compared to the WP&B targets. The reliability of power plants is indicated by the EAF of existing coal SPP, EAF of coal and non-coal SPP in Java-Bali, and the EAF of coal and non-coal SPP outside Java-Bali. The EAF of coal SPP in Java-Bali in 2023 was 86.85%, which occupied 98.63% of the WP&B target of 86.85%. This was lower than the 2022 realization of 92.03%. On the other hand, the EAF of non-coal steam power plants was 95.09%, reaching 99.20% of WP&B target of 95.86%. This was higher than in 2022 of 92.03%. The EFORs of coal and non-coal Steam Power Plants in Java-Bali were 3.38% and 0.77% respectively, or 62.60% and 110.00% of the targets, respectively. They were higher than in 2022 at 0.65%. The Board of Directors and the Management seeks to improve the outage mitigation in the future.

Perolehan pendapatan usaha tahun 2023 meningkat signifikan 27,61% menjadi sebesar Rp103,48 triliun, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp81,09 triliun, atau 106,94% dari target RKAP 2023 sebesar Rp98,39 triliun. Kontribusi perolehan pendapatan usaha didominasi dari pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar 98,51%; pendapatan jasa sebesar 1,23%, dan pendapatan dari konsesi jasa sebesar 0,26%. Realisasi beban usaha tahun 2023 mengalami kenaikan 14,37% menjadi sebesar Rp83,55 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp73,05 triliun, atau 97,55% dari target RKAP sebesar Rp85,65 triliun terutama disebabkan oleh kenaikan harga rata rata pemakaian energi primer. Capaian pertumbuhan pendapatan usaha lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban usaha mendorong terjadinya peningkatan jumlah laba tahun berjalan 2023. Laba tahun berjalan 2023 meningkat 74,85% menjadi sebesar Rp8,19 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4,68 triliun, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha atas penjualan tenaga listrik dari pembangkit yang dialihkan dari PLN.

Revenue increased significantly in 2023 by 27.61% or Rp103.48 trillion, from Rp81.09 trillion in the previous year. This was 106.94% of the WP&B 2023 target of Rp98.39 trillion. Revenue was dominated by earnings from electricity sales by 98.51%, followed by service revenue by 1.23%, and service concession by 0.26%. The actual operating expenses in 2023 increased 14.37% to Rp83.55 trillion from last year's Rp73.05 trillion. This was 97.55% of the WP&B target of Rp85.65 trillion. This was particularly due to the average increase in primary energy consumption. Higher increase in Revenue compared to Operating Expenses has helped increase the Profit for the Year 2023. The Profit for the Year 2023 increased 74.85% to Rp8.19 trillion from Rp4.68 trillion in 2022. This was mainly caused by the increase in revenue from electricity sales from power plants transferred by PLN.

Pasca pembentukan SH, PLN Indonesia Power menjadi perusahaan dengan aset pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas terpasang sebesar 20,8 GW telah berubah statusnya dari semula sebagai *asset operator* menjadi *fully asset owner*. Tentunya, hal ini perlu diantisipasi dengan beragam kebijakan, strategi maupun program kerja korporat, terutama terkait dengan sistem manajemen aset yang efektif sejalan dengan peran sebagai *fully asset owner*. Kami menjadi

Following its establishment as SH, PLN Indonesia Power has become a company with the largest power generation assets in Southeast Asia, with an installed capacity of 20.8 GW. An anticipatory measure is certainly required along with various policies, strategies, and corporate work programs, especially for delivering an effective asset management system as asset owner. We are becoming increasingly focused on maintaining power plant reliability and efficiency, developing new power



semakin fokus dalam menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit, pengembangan pembangkit baru dan pengembangan bisnis derivatif pembangkit (*beyond kWh*). Selain itu, sinergi dan perubahan *mindset* dari seluruh pegawai PLN Indonesia Power, baik yang organik maupun pindahan/tugas karya *ex.* unit transfer aset dapat berjalan dengan baik, dan disertai dengan perbaikan regulasi terkait kepegawaian serta pemenuhan kompetensi baru untuk pengembangan bisnis. Dengan luas wilayah kerja dan operasi yang tersebar di seluruh Indonesia serta lokasi-lokasi pembangkit yang tersebar menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk dikelola dengan memanfaatkan *digital power plant* secara optimal.

plants and generation derivatives business (beyond kWh). Synergy and change in mindset of all PLN Indonesia Power employees, both organic employees and secondees from the asset transfer units, are to be streamlined, coupled with regulatory improvements concerning employment and the provision of new competencies for business development. Managing such a large working and operational area with power generation units spread across Indonesia is a challenging feat for us and we tackle this issue by optimally utilizing digital power plants.

Tantangan dan Mitigasi yang Dilakukan
Challenges and their Mitigation

Tantangan terbesar yang dihadapi PLN Indonesia Power dalam produksi energi listrik adalah terkait dengan keamanan pasokan energi primer yang kelak berdampak bagi keberlangsungan operasional pembangkit. Terganggunya pasokan energi primer dalam jangka panjang, akan mengakibatkan risiko aset pembangkit menjadi tidak produktif. Untuk itulah, Direksi berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi dan kebijakan Perusahaan yang mempertajam mitigasi risiko dalam menjaga pasokan batubara (*security of supply*) sehingga dapat menjamin kontinuitas produksi tenaga listrik, dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait pengadaan batubara di dalam negeri untuk kepentingan kelistrikan nasional. PLN Indonesia Power bersama-sama dengan pemangku kepentingan aktif melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memperbaiki sistem logistik dan infrastuktur untuk memastikan kebutuhan batubara dapat terpenuhi serta mencari solusi terbaik agar krisis pasokan batubara tidak terjadi di masa mendatang. Dengan terbentuknya SH energi primer yang dilakukan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia maka diharapkan tantangan *supply and demand* energi primer teratasi serta menciptakan rantai pasokan yang efisien dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

The biggest challenge faced by PLN Indonesia Power in producing electricity is concerned about primary energy supply security which may affect the continuity of plant operations. Prolonged disruption of primary energy supply may risk generating assets becoming unproductive. For this reason, the Board of Directors is committed to continuing to develop Company strategies and policies that sharpen risk mitigation for the security of supply so as to ensure continuous electricity production, while complying with Government policies on domestic coal procurement for national electricity purposes. PLN Indonesia Power and the stakeholders actively communicate and coordinate to improve logistics and infrastructure systems so as to ensure sufficient coal supplies and find the best solutions to prevent the coal supply crisis from happening in the future. The establishment of primary energy SH, PT PLN Energi Primer Indonesia, is hoped to tackle the issue of primary energy supply and demand and create an efficient supply chain for the national energy sovereignty and security.

Tantangan lainnya adalah mengelola beberapa pembangkit Perusahaan yang sudah berumur sehingga memerlukan strategi pengelolaan khusus antara lain dengan program peremajaan dan pengelolaan berdasarkan sistem manajemen aset pembangkit.

Managing aging existing power plants also poses another challenge. We need special strategies, such as rejuvenation and management according to the power plants' management system.

Sejalan dengan strategi *Low-Carbon Energy Development*, PLN Indonesia Power melakukan serangkaian langkah dalam mengantisipasi transisi energi antara lain dengan pemanfaatan *carbon trading* dengan mempersiapkan secara komprehensif sesuai persyaratan yang berlaku serta berkoordinasi dengan PLN terutama mengenai besaran yang dapat diakui sebagai pendapatan Perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan *road map* pengembangan pembangkit hijau, *renewable energy* dan transisi energi Perusahaan.

In alignment with Low-Carbon Energy Development strategies, PLN Indonesia Power is taking a series of measures to anticipate energy transition, including by carrying out carbon trading through comprehensive preparation according to applicable provisions and coordination with PLN, especially regarding the amount that can be recognized as Company income. This is consistent with the Company's roadmap for green power plant development, renewable energy, and energy transition.

PLN Indonesia Power juga terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk menjadikan operasional pembangkit menjadi lebih andal dan efisien, dengan memproduksi kWh listrik yang lebih besar dengan biaya pokok produksi (BPP) yang lebih rendah. Direksi mengembangkan kebijakan dan strategi yang mengedepankan adanya perencanaan pemeliharaan pembangkit secara lebih teliti dan komprehensif guna menghindari kebutuhan anggaran yang lebih besar, akibat kemungkinan kerusakan peralatan yang bertambah dengan ditundanya pemeliharaan serta melakukan koordinasi dengan P2B untuk menyampaikan tanggapan terkait pemeliharaan pembangkit secara komprehensif.

PLN Indonesia Power also without fail creates various innovations to enhance the reliability and efficiency of power plant operations by increasing kWh production with lower cost. The Board of Directors develops policies and strategies that prioritize more thorough and comprehensive plant maintenance planning to avoid the need for a larger budget which may be caused by increased possibility of equipment damage due to postponement of maintenance. The Board of Directors also coordinates with P2B to provide responses regarding comprehensive plant maintenance.



Realisasi bauran energi primer EBT nasional tahun 2023 ternyata meleset dan hanya mencapai 13,1% dari target sebesar 17,9%. Berdasarkan data Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, bauran energi primer pada tahun 2023 terdiri dari Batubara (40,46%), minyak bumi (30,18%), gas bumi (18,28%), dan Energi Baru Terbarukan/ EBT (13,09%). Capaian bauran masih didominasi oleh batubara, meskipun nilainya sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 42,38%. Pentingnya meningkatkan bauran energi primer untuk mendukung program *Net Zero Emission (NZE)* Indonesia di tahun 2060. Dewan Energi Nasional (DEN) pada tanggal 18 Januari 2024 telah melakukan *adjustment* terhadap target bauran energi primer di tahun 2025 dari 23% menjadi 17%-19% yang dituangkan pada revisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

In 2023, the portion of NRE in the national primary energy mix missed the target, reaching only 13.1% from the target of 17.9%. According to the data from the Center for Budget and State Finance Accountability Analysis (PA3KN), the primary energy mix at the end the end of 2023 consisted of coal (40.46%), oil (30.18%), gas (18.28%), and NRE (13.09%). The mix was still dominated by coal, albeit declining from last year's portion of 42.38%. It is necessary to improve the primary energy mix so as to support Indonesia's Net Zero Emission (NZE) program by 2060. On January 18, 2024, the National Energy Council (DEN) made an adjustment to the primary energy mix target for 2025 for NRE, from 23% to 17%-19%, as set out in the revision of the Government Regulation No. 79 of 2014 on the National Energy Policy.

Menyikapi target pemerintah terhadap bauran EBT nasional, PLN sebagai *Holding* dari PLN Indonesia Power telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dengan salah satu targetnya antara lain terwujudnya bauran energi (*energy-mix*) pembangkit tenaga listrik yang lebih baik di akhir tahun 2025 yaitu minimal sebesar 23%. Guna mendukung hal tersebut, PLN Indonesia Power melakukan akselerasi transisi energi dengan *strategic result* adalah Peningkatan *Green and Clean Power Plant*. PLN Indonesia Power juga melakukan akselerasi pengembangan EBT dengan terus mengoptimalkan *Research and Development* pengembangan potensi dan teknologi EBT. Selain itu, PLN Indonesia Power juga melakukan akselerasi *green business development* melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit *Hybrid*, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBio). Disamping itu, *cofiring* PLTU dengan biomassa juga terus dilakukan dan telah berkontribusi besar dalam peningkatan bauran energi, mengurangi emisi karbon, sekaligus mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2023 PLN Indonesia Power berhasil meningkatkan produksi EBT pada bauran energi Perusahaan menjadi sebesar 10.175,63 GWh, meningkat 36,47% dari tahun 2022 mencapai sebesar 7.456,50 GWh, sehingga realisasi produksi EBT Perusahaan sebesar 12,09% dari total produksi listrik keseluruhan.

Responding to the Government's NRE target in the national fuel mix, PLN as the Holding of PLN Indonesia Power has in place the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2030 which among others aims to deliver a minimum of 23% NRE in energy mix for power plants by the end of 2025. To support this, PLN Indonesia Power is accelerating the energy transition with the strategic result of Green and Clean Power Plant Improvements. PLN Indonesia Power is also accelerating NRE development by continuing to optimize Research and Development for enhancing NRE potentials and technologies. Green business development is also accelerated by developing Hydro Power Plants (HPP), Geothermal Power Plants (GPP), Solar Power Plants (SoPP), Hybrid Power Plants, Mini Hydro Power Plants, Wind Power Plants (WPP), and Biomass Power Plants (PLTBio). Biomass cofiring at SPP is also continuing and has contributed greatly to increasing the energy mix, reducing carbon emissions, and supporting the community's economy. In 2023 PLN Indonesia Power managed to increase the NRE production in the Company's energy mix to 10,175.63 GWh. This was an increase by 36.47% from 2022, reaching 7,456.50 GWh. Therefore, the Company's production from NRE was 12.09% of total electricity production.

Untuk itulah, pengembangan pembangkit EBT tidak terlepas dari berbagai tantangan, selain yang telah disebutkan di atas juga memiliki tantangan lainnya seperti permasalahan perizinan, ketersediaan lahan, *feed-in tariff*, ketersediaan energi primer, teknologi, dan pendanaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN Indonesia Power melakukan berbagai strategi dan kebijakan, antara lain terkait masalah perizinan dengan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Pemerintah Daerah setempat, Kementerian Lingkungan Hidup, PLN dan *stakeholder* lainnya serta menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung. Terkait masalah ketersediaan energi primer dengan melakukan pengembangan disain teknologi yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber energi untuk pembangkit EBT serta berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan untuk menjaga ketersediaan energi primer alam sehingga tidak rusak dan tetap optimal.

Therefore, developing NRE power plants has its challenges. In addition to the above-mentioned issues, there are also issues of licensing, land availability, feed-in tariffs, primary energy availability, technology, and funding. To tackle these challenges, PLN Indonesia Power adopts numerous various strategies and policies, including those related to licensing by coordinating with local governments, the Ministry of the Environment, PLN, and other relevant stakeholders and submitting a request for approval to use the protected forest area. The issue of primary energy availability is handled by designing more efficient technologies for utilizing energy sources for NRE generation. PLN Indonesia Power is also actively involved in protecting and preserving the environment to avoid damages and maintain the optimal availability of natural primary energy.

Untuk tahun 2023 PLN Indonesia Power telah menjalankan rencana bisnis "*Business Beyond* kWh" dalam RKAP terutama untuk kegiatan yang bersifat "*quick win*" untuk meningkatkan pendapatan bagi Perusahaan termasuk dengan mengoptimalkan peran Anak Perusahaan serta berupaya melalui sinergi dengan mitra bisnis dalam hal pendanaan. Disamping itu, Kami terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk menciptakan *new market* terkait dengan bisnis *beyond* KWh untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan di masa depan.

For 2023, PLN Indonesia Power has implemented the Business Beyond kWh plan in the WP&B, especially for quick win activities, to increase revenue for the Company. This includes optimizing the role of Subsidiaries and seeking synergy with business partners to secure fundings. We continue to collaborate and synergize with a number of parties to create new markets for business beyond KWh and allow sustainable growth in the future.



Tantangan lainnya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia yang sejalan dengan kompetensi inti yang ditargetkan Indonesia Power saat Ini dan mendatang, yakni sebagai pengembang bisnis solusi energi. Implementasi *Human Experience Management System* (HXMS) menjadi solusi atas tantangan ini, dimana PLN Indonesia Power optimis dapat mencapai target tersedianya puluhan ahli pembangkitan berskala internasional dan *Senior Leaders* yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

Another challenge is concerned about human capital development to meet the core competency requirements set by PLN Indonesia Power now and in the future as an energy solutions business developer. Implementing the Human Experience Management System (HXMS) is a solution to this challenge, and PLN Indonesia Power is optimistic to meet the target of providing dozens of world-class power generation specialists and Senior Leaders who meet the specified qualifications.

Atas semua tantangan tersebut di atas, Kami terus mengembangkan kebijakan dan strategi yang mampu menjawab tantangan, kendala, dan risiko-risiko yang dihadapi guna mendukung keberlanjutan bisnis dan organisasi di masa depan. PLN Indonesia Power percaya bahwa segala perubahan yang berlangsung cepat ini tidak hanya berpengaruh negatif, namun dapat juga pengaruh positif. Untuk itulah, kami menggunakan manajemen risiko sebagai *early warning system* yang dapat menjadi *leading indicator* bagi organisasi agar mampu melewati kondisi ini dengan baik.

To answer all the challenges, obstacles, and risks, we continue to develop policies and strategies in order to support business and organizational sustainability in the future. PLN Indonesia Power believes that all these rapid changes will bring not only negative, but also positive impacts. This is the reason why we use risk management as an early warning system which can be a leading indicator for organizations to properly pass through the situations.

Prospek Usaha Tahun 2024
Business Outlook for 2024

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi didorong oleh peningkatan permintaan domestik, antara lain konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,47% (YoY), konsumsi pemerintah meningkat 2,81% (YoY) akibat meningkatnya belanja barang dan belanja pegawai serta pertumbuhan investasi secara keseluruhan mencapai sebesar 5,02% (YoY) seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Hal ini sejalan dengan asumsi makro yang dipergunakan oleh pemerintah dalam menyusun RAPBN 2024, dimana ekonomi nasional tumbuh 5,2%, dengan inflasi yang terkendali pada level 2,8%, dan lebih baik dibanding inflasi tahun 2023. Nilai tukar Rupiah berada pada nilai Rp15.000 per Dolar AS, dengan harga minyak mentah berada pada angka USD82 per barel, dan *lifting* minyak sebesar 635 ribu. Untuk itu, PLN Indonesia Power memiliki semangat optimis bahwa ke depannya kami dapat lebih mengoptimalkan peluang bisnis di bidang usaha energi listrik berikut jasa pendukung lainnya berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas.

High economic growth was supported by increasing domestic demands, among others the household consumption which grew 4.47% (YoY). Government consumption increased 2.81% (YoY) due to increased goods and employee spending. Overall, investment grew by 5.02% with the continuous infrastructure development in various regions. This is in accordance with the macro assumptions used by the Government during the preparation of the State Budget Plan (RAPBN) 2024 in which the national economy grew 5.2% with inflation controlled at 2.8%, which was better than 2023 inflation. The exchange rate was Rp15,000 per US dollar, with crude oil price US$82 per barrel and oil lifting 635 thousand BOPD. Based on the above assumptions, PLN Indonesia Power is optimistic that we will be able to optimize the business opportunities in the field of electricity as well as the supporting services.

Dengan adanya hal-hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara global maupun di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi listrik di tahun 2024 dan seterusnya. Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa proyeksi kebutuhan listrik dalam negeri di tahun 2024 akan mencapai 3,6% hingga 4,2% lebih besar dari tahun 2023, yang mencapai 283,12 tWh. Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah menetapkan target konsumsi listrik 1.408 kWh/kapita, dimana target tersebut naik dibandingkan realisasi konsumsi listrik pada tahun 2023 yaitu 1.285 kWh/kapita. Hal ini merupakan peluang bagi sektor industri kelistrikan untuk dapat meningkatkan keandalan sarana dan prasarana di bidang kelistrikan yang sudah ada saat ini, maupun pengembangan pembangkit dan transmisi baru untuk memenuhi *demand* di masa mendatang.

Armed with the matters that help encourage economic growth both globally and nationally, electricity consumption is hoped to increase in 2024 and beyond. The Ministry of Energy and Mineral Resources revealed that domestic electricity demand in 2024 is projected to reach 3.6% to 4.2%, which is higher than in 2023, reaching 283.12 tWh. Similarly, the Government has set the electricity consumption target of 1,408 kWh/capita for 2024, which increases from the actual electricity consumption in 2023, i.e. 1,285 kWh/capita. This is an opportunity for the electricity industry to be able to improve the reliability of existing facilities and infrastructure in the electricity sector, as well as develop new generators and transmission to meet future demands.

Direksi telah merumuskan strategi dan program unggulan pengembangan bisnis *renewable energy* dan inovasi produk *beyond* kWh yang disampaikan dalam *roll over* selaras dengan tujuan, visi dan misi PLN Indonesia Power yang lebih terukur serta menjadi solusi eksistensi PLN Indonesia Power di masa depan. PLN Indonesia Power berkeyakinan di tahun yang akan datang dengan didukung berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah akan berdampak pada kinerja PLN Indonesia Power menjadi lebih baik. Melalui berbagai program yang telah dijalankan, PLN Indonesia Power optimis pertumbuhan bisnis di masa depan akan semakin baik.

The Board of Directors has formulated superior strategies and programs for developing renewable energy business and innovating products beyond kWh as proposed in the roll, in line with PLN Indonesia Power's goals, vision, and mission that are more measurable. Together, they will become PLN Indonesia Power's solution to exist in the future. PLN Indonesia Power believes that in the future, with support from various economic and developmental policies set out by the Government, we will improve our performance. Through a number of programs implemented, PLN Indonesia Power is optimistic that future growth will be even better.



Transformasi Menjadi *Human Experience Management System* (HXMS)

Transformation into Human Experience Management System (HXMS)

Pasca pembentukan *Subholding* dan sejalan dengan transformasi organisasi PLN, PLN Indonesia Power menerapkan *Human Experience Management System* (HXMS) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 228.K/010/IP/2022. Sistem HXMS dikembangkan dalam rangka pengelolaan pegawai dengan menerapkan 4 (empat) sasaran, yaitu tepat ukuran (*right size*), tepat kompetensi *(right skill*), tepat pembiayaan (*right spend*) dan tepat sistem informasi (*right system*). Guna menghadapi tantangan bisnis dan menjamin keberlangsungan usaha ketenagalistrikan, PLN Indonesia Power menetapkan *Roadmap* HXMS 2023-2027 dengan penyiapan tenaga kerja yang profesional, kompeten dan berintegritas tinggi yang dilandasi tata nilai untuk mencapai Visi perusahaan dengan tema HXMS: *Electrifying the Future: Enabling Organization Through Transformative Human Experience Management.*

Following the subholding establishment and in line with PLN's organizational transformation, PLN Indonesia Power has adopted the Human Experience Management System (HXMS) as stipulated by the Decree of the Board of Directors No. 228.K/010/IP/2022. The HXMS was developed for managing the employees based on four (4) targets, i.e. right size, right skill, right spend, and right system. To face business challenges and guarantee electricity business sustainability, PLN Indonesia Power has established the 2023-2027 HXMS Roadmap by preparing professional and competent employees with high integrity to achieve the Company's vision, with the HXMS theme, Electrifying the Future: Enabling Organization through Transformative Human Experience Management.

PLN Indonesia Power menyadari bahwa pegawai merupakan aset terpenting bagi PLN Indonesia Power yang akan terus dikelola secara profesional, adil dan transparan mulai dari proses rekrutmen selektif dengan berorientasi pada talenta dan karakter, pendampingan *self improvement* dengan berbagai program pengembangan hingga membangun lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif bagi pegawai. Jumlah pegawai PLN Indonesia Power sampai akhir tahun 2023 adalah 5.452 orang, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 23,17%. Unsur penting yang menjadi syarat utama terciptanya *Human Capital*, berupa *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan/keahlian), dan *experience* (pengalaman/jam terbang) yang akan menjadi karakter perusahaan menuju keunggulan bersaing. PLN Indonesia Power meyakini bahwa semua hal tersebut kelak dapat meningkatkan produktivitas, daya saing dan loyalitas pegawai untuk memberikan dampak positif bagi kelangsungan jangka panjang Perusahaan.

PLN Indonesia Power is aware that employees are the most important asset and they need to be managed professionally, fairly and transparently from the selective recruitment that focuses on talent and character, to self-improvement assistance with various development programs and building a harmonious and favorable work environment for employees. As of the end of 2023, PLN Indonesia Power had been supported by 5,452 employees, which was an increase by 23.17% from 2022. The important elements required for creating Human Capitals are knowledge, skill, and experience that shape a Company's character towards competitive advantage. PLN Indonesia Power believes that all of these things will help improve employee productivity, competitiveness, and loyalty while bringing a positive impact on the Company's sustainability.

Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, berdaya saing, dan memberdayakan, PLN Indonesia Power telah merintis perjalanan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Perusahaan yang meraih sertifikasi "*Great Place to Work* atau GPTW". Perjalanan PLN Indonesia Power mulai dari awal yang penuh tantangan hingga berhasil meraih sertifikasi *Great Place to Work* pada Bulan Oktober 2023. Dengan perusahaan Indonesia yang memiliki responden *survey* terbanyak yaitu lebih dari 80% jumlah pegawai PLN Indonesia Power dengan jumlah responden *survey* 4.640. PLN Indonesia Power menjadi perusahaan energi pertama di Indonesia yang meraih prestasi ini. Selain itu, PLN Indonesia Power adalah satu-satunya PLN Group yang telah memperoleh sertifikasi GPTW dan merupakan BUMN kedua yang memperoleh sertifikasi ini setelah PT Telkom (Persero) Tbk. "*Great Place to Work*" dimaknai sebagai tempat kerja yang luar biasa dimana pegawai mempercayai *Top Leader*, bangga dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan orang-orang yang berada di tempat kerja. Tempat kerja yang luar biasa menjadikan setiap pegawai mampu memaksimalkan potensi mereka melalui kepemimpinan yang efektif, nilai-nilai yang bermakna, dan dasar kepercayaan yang kuat. Semua pegawai saling terhubung dan semua orang dapat memberikan yang terbaik untuk PLN Indonesia Power.

In an effort to create an inclusive, competitive, and empowering work environment, PLN Indonesia Power has received the "Great Place to Work" (GPTW) certification in October 2023. With the largest number of survey respondents of more than 80% of PLN Indonesia Power employees at a total of 4,640 respondents, PLN Indonesia Power became the first Indonesian energy company in Indonesia to earn this accomplishment. PLN Indonesia Power was also the only PLN Group member and the second SOE to obtain the certification after PT Telkom (Persero) Tbk. A Great Place to Work is defined as an extraordinary workplace where the employees trust the Top Leaders, are proud with their works, and have extraordinary relationships with the people at work. An extraordinary workplace allows every employee to maximize their potential through effective leadership, meaningful values, and a strong foundation of trust. All employees are interconnected and everyone can contribute their best for PLN Indonesia Power.



Dengan meraih sertifikasi *Great Place to Work*, PLN Indonesia Power telah membuktikan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari kinerja finansial semata, tetapi juga dari komitmen terhadap pegawai dan komunitas di sekitarnya. Semangat perubahan yang ditampilkan oleh PLN Indonesia Power bukan hanya prestasi, namun juga cerminan dari visi yang inklusif dan tanggung jawab sosial Perusahaan dalam menciptakan dampak positif yang lebih luas, sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi.

Earning the Great Place to Work certification proves that PLN Indonesia Power's business success is not only measured by financial performance, but also by commitment to employees and the surrounding community. The spirit of change demonstrated by PLN Indonesia Power is not only an accomplishment, but also a reflection of its inclusive vision and social responsibility in creating a wider positive impact, as an effort to realize a supportive and motivating work environment.

Di tahun 2023 PLN Indonesia Power memperoleh ISO 30413:2018 *Human Resources Management* standar praktik terbaik internasional dalam manajemen sumber daya manusia, yang diterbitkan oleh WQA dan Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) pada tanggal 26 Juli 2023. Tujuan diperolehnya standar ini adalah sebagai salah satu pilar dalam sertifikasi *Great Place to Work* untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia serta organisasi secara efektif.

In 2023, PLN Indonesia Power obtained ISO 30413:2018 Human Resources Management, an international best practice standard for human resource management, which was published by WQA and the Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) on July 26 2023. We obtained the certification as a prerequisite for Great Place to Work certification to increase efficiency, consistency, and quality and support human capital and organization development and management effectively.

Selama tahun 2023, PLN Indonesia Power telah melaksanakan program pelatihan kepada 8.440 pegawai dengan jumlah jam pelatihan mencapai 480.944 jam sehingga rata-rata jam pelatihan mencapai 53 jam per pegawai. Selain itu, PLN Indonesia Power memfasilitasi pegawai melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 adalah sebanyak 92 orang, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan adalah 76% dari total pegawai O&M atau sebanyak 1.062 pegawai. Guna meningkatkan efektivas pelatihan pegawai, secara berkala PLN Indonesia Power melaksanakan *assessment Human Capital Readiness* (HCR), meningkat 2,01% dibanding tahun sebelumnya menjadi level 4,57 dari skala maksimum 5 yang menunjukkan tingkat kematangan proses pembelajaran.

In 2023, PLN Indonesia Power had provided training programs to 8,440 employees, at a total of 480,944 training hours, making the average of 53 training hours/employee. PLN Indonesia Power also facilitated 92 employees pursuing higher education at Master's and Doctoral levels. 76% of the total O&M employees or 1,062 employees are certified electrical engineering personnel. In order to increase the effectiveness of employee training, PLN Indonesia Power periodically carries out assessments Human Capital Readiness (HCR), whose score increased 2.01% from the previous year to 4.57 from the maximum score of 5 which indicates the maturity of the learning process.

Penerapan Governansi Korporat, Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Implementation of Corporate Governance, Internal Control, and Risk Management

Kami tetap meyakini bahwa keberhasilan Perusahaan dalam meraih pencapaian kinerja pada tahun 2023 tidak lepas dari komitmen untuk senantiasa meningkatkan praktik tata kelola perusahaan selanjutnya disebut "Governansi Korporat" atau GCG secara berkelanjutan. Kami terus berupaya menyempurnakan penerapan tata kelola perusahaan selaras dengan peraturan perundang-undangan maupun *best practice* tata kelola baik dalam skala nasional maupun internasional. Kami terus mendorong agar implementasi GCG ditingkatkan untuk mencapai standar praktik terbaik sejalan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Hasil atas komitmen dalam penerapan dan penyempurnaan tata kelola (GCG) terlihat dari pencapaian kinerja PLN Indonesia Power selama tahun 2023 dengan meraih pertumbuhan yang positif. Peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan dilakukan antara lain dengan mengadopsi perkembangan standar penerapan GCG yang berlaku di tingkat nasional maupun global. Standar penerapan GCG tersebut meliputi Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Pedoman GCG berdasarkan Standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

We continue to believe that the Company's success in securing performance achievements in 2023 cannot be separated from the commitment to continuously improve corporate governance practices or GCG on an ongoing basis. We constantly seek to fine-tune the corporate governance implementation according to the laws and regulations and the good corporate governance best practices in national and international scales. We continue to encourage the improvement of GCG implementation to deliver the best practice standards according to the Company's business requirements. The commitment to implementing and fine tuning GCG is proven by PLN Indonesia Power's achievements throughout 2023 with positive growth. Sustainable improvement of GCG implementation quality is among others carried out by adopting GCG implementation standards applicable nationally and globally. These standards include the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), and GCG Guidelines based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).



Penilaian implementasi GCG dilakukan setiap tahun dan untuk tahun 2023 PLN Indonesia Power menggunakan 4 standar penilaian GCG, yaitu berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, walaupun sudah dicabut namun belum terdapat peraturan penggantinya dan masih dipergunakan dalam lingkungan PLN *Group*; ASEAN *Corporate Governance Scorecard*; evaluasi tata kelola berdasarkan standar Otoritas Jasa Keuangan yang diatur Peraturan OJK Nomor: 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK Nomor: 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan evaluasi penerapan GCG berdasarkan PUG-KI yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Untuk Hasil penilaian GCG tahun 2023 berdasarkan kedua parameter SK-16/S.MBU/2012 mendapat skor sebesar 94,766 dari total nilai maksimal sebesar 100,00 yang setara dengan 94,766% sehingga secara *overall* hasil *assessment GCG* mendapatkan predikat "Sangat Baik". Sedangkan hasil penilaian GCG berdasarkan parameter ACGS mencapai skor 96,32 dari nilai maksimal sebesar 130, secara *overall* termasuk kategori "*Very Good*", meningkat atau lebih baik dari capaian skor sebelumnya sebesar 95,98.

GCG implementation assessment is held every year. For 2023, PLN Indonesia Power based the assessment on four standards. The first standard is the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. Although the Decree was revoked, there has been no replacement so far and therefore it is still used within PLN Group. The remaining standards are the ASEAN Corporate Governance Scorecard; governance evaluation based on OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Guidelines for Governance in Public Companies and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Governance in Public Companies; and GCG implementation evaluation according to PUG-KI which was issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG). According to these parameters, the Company's GCG assessment under Decree No. SK-16/S.MBU/2012 in 2023 scored 94.766 out of the maximum score of 100.00. This is equivalent to 94.766%, making the overall GCG assessment outcome fall into the "Very Good" category. Based on ACGS, the GCG implementation assessment scored 96.32 out of the maximum score of 130. Overall, this belongs to the "Very Good" category and is an improvement from the previous score of 95.98.

Untuk kedua kalinya, PLN Indonesia Power melakukan evaluasi penerapan GCG berdasarkan POJK Nomor: 21/POJK.04/2015 dan SEOJK Nomor: 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan juga berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. Kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan kebijakan dan memastikan penerapan GCG sejalan dengan dinamika bisnis Perusahaan, antara lain dengan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk memperoleh masukan yang membangun dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG.

For the second time, PLN Indonesia Power evaluated the implementation of GCG based on OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Governance in Public Companies and the General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI) 2021. We are committed to constantly improve policies and ensure that the GCG implementation meets the Company's business dynamics, including by collaborating with relevant agencies to obtain constructive input in improving the GCG implementation quality.

Penerapan Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS) juga dipandang cukup efektif dalam mengantisipasi adanya potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Kebijakan WBS 2019 mengatur bahwa Tim Pengelola WBS dapat berasal dari Direksi, Dewan Komisaris sesuai dengan oknum terlapor yang dapat berasal dari oknum anggota Direksi, anggota komite Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris. Tindakan yang dapat dilaporkan dalam saluran WBS meliputi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial seperti tidak jujur, curang atau korupsi, gratifikasi yang tidak sesuai dengan kebijakan Perusahaan termasuk suap atau kegiatan lainnya, aktivitas illegal seperti pencurian, kekerasan dan diskriminasi, melanggar kebijakan Perusahaan, tindakan yang berpotensi merugikan dan membahayakan Perusahaan, penyalahgunaan wewenang, dan segala bentuk ketidakwajaran dan pelanggaran etika lainnya yang dapat mencemarkan reputasi PLN Indonesia Power. Sedangkan jika oknum yang dilaporkan melibatkan anggota Dewan Komisaris maka Pemegang Saham berwenang menjadi Tim Pengelola WBS. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan masukan/arahan terkait laporan WBS yang masuk, termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Selama tahun 2023, 10 (sepuluh) pengaduan melalui sarana pelaporan WBS yang masuk, atau turun dibandingkan jumlah pengaduan tahun sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) pengaduan dan seluruh pengaduan telah selesai ditindaklanjuti terkait dengan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan aset, aktivitas ilegal dan ada juga yang non WBS.

The Whistleblowing System (WBS) Policy adoption was considered effective to anticipate any potential violations that may damage the Company. The WBS Policy 2019 sets out that the WBS Management Team may come from the Board of Directors or the Board of Commissioners, depending on the position of the reported party in the Company, whether they are the member of the Board of Directors, Board of Commissioners' Committee, or the Board of Commissioners. The tip-offs to be submitted via the WBS channels include actions that may result in financial and non-financial damages such as dishonesty; fraud or corruption; gratuities that deviate from the Company policies, including bribery or other similar activities; illegal activities such as theft, violence, and discrimination; violation of Company policies; actions that may potentially damage and endanger the Company; abuse of authority; and all forms of impropriety and other ethical violations that could damage the Company's reputation. On the other hand, if the report involves a member of the Board of Commissioners, the authorized Shareholder will take over the role of the WBS Management Team. The Board of Commissioners also provides input/direction regarding incoming tip-offs and the necessary follow-up. In 2023, a total of 10 (ten) tip-offs were received via the WBS channels, and this number is a reduction from last year's 15 (fifteen) tip-offs. All tip-offs concerning abuse of authority, misuse of assets, and illegal activities have been followed up, including some non-relevant reports.



Guna melakukan penguatan integritas bisnis PLN Indonesia Power telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) mengacu pada ISO 37001:2016 untuk mencegah praktik korupsi, gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan. Implementasi SMAP ditujukan mampu mendorong terciptanya budaya anti suap. Di tahun 2023, PLN Indonesia Power telah memperluas Lingkup Sertifikasi SMAP kepada 9 (sembilan) Unit Pembangkit meliputi Priok PGU, Suralaya PGU, Mrica PGU, Semarang PGU, Grati PGU, Bali PGU, Saguling POMU, Kamojang POMU, dan *Maintenance Services Unit* (MSU). Guna mendukung pembelajaran berkelanjutan, PLN Indonesia Power juga telah memberikan pelatihan dan kampanye anti korupsi kepada 889 pegawai di seluruh jenjang jabatan dan unit bisnis dari total pegawai sebanyak 4.581 orang. Selain itu, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPN) secara berkala dengan tepat waktu sesuai ketentuan sebagai wujud komitmen integritas bisnis.

To strengthen business integrity, PLN Indonesia Power adopts ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) to prevent the practices of corruption and gratuity and manage conflicts of interest. The adoption of ABMS aims to encourage the creation of an anti-bribery culture. In 2023, PLN Indonesia Power has expanded the Scope of ABMS Certification to nine (9) Power Generation Units, i.e. Priok PGU, Suralaya PGU, Mrica PGU, Semarang PGU, Grati PGU, Bali PGU, Saguling POMU, Kamojang POMU, and Maintenance Services Unit (MSU). To support continuous learning, 889 employees have received anti-corruption training and campaigns. They spread at all positions and business units out of the Company's total employees of 4,581 people. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners have also submitted their State Officials' Wealth Report (LHKPN) on a periodical and timely basis as required to prove their business integrity commitment.

Penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan operasional di Perusahaan dilakukan berdasarkan kerangka kerja pengendalian internal COSO *Framework*, serta sistem manajemen risiko yang mengacu pada *Enterprise Risk Management Framework* yang telah dikembangkan sesuai standar ISO 31000:2009. Kerangka kerja ini diimplementasikan melalui pendekatan *top-down*, berbasis risiko di seluruh unit kerja dan area operasi Perusahaan. *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) Perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: 174.K/010/IP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Kebijakan Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (IcoFR). Implementasi ICoFR di Perusahaan meliputi pengendalian tingkat transaksional yang terdiri dari segmen pendapatan penjualan listrik, biaya operasi, aset tetap, persediaan, pengembangan proyek, perbendaharaan, perpajakan dan pelaporan keuangan. Pelaporan *Control Self-Assessment* (CSA) telah dilakukan secara periodik melalui Aplikasi *Online* sejak 2016. Dalam upaya memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit menilai bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah dijalankan secara memadai.

The implementation of internal control over financial and operational reporting in the Company refers to COSO Framework, as well as the risk management system that refers to Enterprise Risk Management Framework which has been developed according to ISO 31000:2009 standards. This framework is implemented through a top-down, risk-based approach across all work units and operational areas of the Company. The Company's Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) refers to the Board of Directors' Decree No. 174.K/010/IP/2016 dated August 12, 2016 on the Policy on the Implementation of Internal Control over Financial Reporting (IcoFR). ICoFR implementation in the Company includes transactional level control, which consists of revenues from electricity sales; operating cost; property, plant, and equipment; inventories; project development; treasury, taxes, and financial reporting. Control Self-Assessment (CSA) reporting has been made periodically using online application since 2016. In an effort to ensure internal control system effectiveness, the Board of Directors and Board of Commissioners through the Audit Committee vouch that the Company's internal control system has been implemented adequately.

Direksi telah melakukan penyusunan RKAP 2023 berbasis risiko, yang memetakan risiko utama Penerapan manajemen risiko di PLN Indonesia Power salah satunya dimonitor melalui pelaksanaan *assessment maturity level* manajemen risiko, yang hasilnya semakin baik setiap tahunnya. Hasil *assessment maturity level* manajemen risiko di tahun 2023 mendapatkan skor 4,28 dari skor maksimum 5, lebih baik dari target 3,63 atau lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 4,04. Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, baik terkait dengan aspek l*eadership, people, process* maupun *result* serta penerapan *Business Continuity Management System* (BCMS) sebagai strategi penanganan risiko apabila terjadi krisis penyediaan energi listrik.

The Board of Directors has prepared the risk-based WP&B 2023, which maps the key risk management implementation at PLN Indonesia Power, which among others is monitored by risk management maturity, whose results are getting better each year. The risk management maturity level assessment in 2023 scored 4.28 out of the maximum score of five. This exceeded the target of 3.63 and was better than previous year's score of 4.04.The Board of Directors is committed to always enhancing the quality of risk management implementation concerning the aspects of leadership, people, process, and result as well as the implementation of the Business Continuity Management System (BCMS) as a risk management strategy in the face of an electricity supply crisis.



Komitmen Penerapan Strategi Keberlanjutan

Commitment to Implementing Sustainability Strategy

Di tahun 2023, Direksi melanjutkan komitmennya dalam penerapan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG), dengan cara mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi, kebijakan dan kegiatan operasional PLN Indonesia Power. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan, memperkuat keterlibatan dengan masyarakat lokal, dan meningkatkan tata kelola perusahaan, serta sebagai langkah penting dalam mendukung pencapaian Visi PLN Indonesia Power menjadi "Perusahaan Listrik Terkemuka dan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara maupun Kawasan lainnya".

In 2023, the Board of Directors continued the commitment to implementing ESG principles by integrating them into the Company's strategies, policies, and operational activities. These efforts were made to mitigate environmental impacts, strengthen engagement with local communities, and improve corporate governance. They are also important in realizing PLN Indonesia Power's vision to become the "Leading and Sustainable Power Company in Southeast Asia and other Regions".

PLN Indonesia Power memastikan bahwa selain untuk menjalankan bisnisnya, keberadaan PLN Indonesia Power harus dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan, masyarakat, pegawai dan mitra bisnis kami. PLN Indonesia Power memandang penting bahwa keberlanjutan usaha, lingkungan, dan masyarakat merupakan satu kesatuan ekosistem yang sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan. PLN Indonesia Power secara konsisten melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan langkah penting dalam upaya mengimplementasikan tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*), sekaligus wujud kepedulian Perusahaan kepada masyarakat daerah tempat pembangkit beroperasi atas dukungan dan kerjasamanya. Untuk itu, PLN Indonesia Power telah mengembangkan strategi keberlanjutan yang mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola ke dalam operasional kami, yang menjadi bagian dari *operational excellence* Perusahaan dalam kontribusinya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

PLN Indonesia Power makes sure that apart from running business, its existence must have a positive impact on the environment, society, employees, and our business partners. PLN Indonesia Power considers that business, environmental, and community sustainability shape a unified ecosystem that greatly influences the continuity of its business. The Company consistently carries out social and environmental responsibility activities which are vital in sustainability governance practice, as well as a manifestation of the Company's concern for the local communities they support and cooperate with in power plant operation. Therefore, PLN Indonesia Power has developed a sustainability strategy that integrates environmental, social, and governance principles into our operations, which is part of our operational excellence in contributing to the Sustainable Development Goals (SDGs).

Penerapan strategi keberlanjutan dari aspek lingkungan dilakukan dengan konsistensi penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) berstandar internasional ISO 14001:2015 yang telah mengintegrasikan pengelolaan lingkungan ke dalam proses bisnis, dengan mempertimbangkan risiko dan peluang dari kegiatan maupun produk yang dihasilkan oleh PLN Indonesia Power. Ruang lingkup implementasi ISO 14001:2015 mencakup di Kantor Pusat, Unit Bisnis Pembangkitan (UBP), dan Unit Bisnis Pemeliharaan. Dalam perkembangannya, saat ini SML telah terintegrasi dengan PLN Indonesia Power *Integrated Management System* (PLN IP-IMS). Selain itu, PLN Indonesia Power juga senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan Rencana Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Daerah yang menjadi wilayah operasional pembangkit.

From the environmental aspect, the sustainability strategies are implemented consistently based on the international standard ISO 14001:2015 Environmental Management Systems which integrates environmental management into business processes, taking into account the risks and opportunities of activities and products generated by PLN Indonesia Power. ISO 14001:2015 is adopted at the Head Office, Generation Business Unit (UBP), and Maintenance Business Unit. In practice, the Environmental Management Systems is currently integrated with PLN Indonesia Power Integrated Management System (PLN IP-IMS). PLN Indonesia Power also always complies with the regulations and the Environmental Management/Monitoring Plan (RKL/RPL) provisions from the Ministry of Environment and the Provincial/Regional Environmental Services where the power plants operate.

Pengembangan pembangkit ramah lingkungan juga terus dilakukan, antara lain dengan melakukan uji coba *co-firing* 100% dan *co-firing woodchip* di PLTU Sintang; melakukan uji coba teknologi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) untuk bahan campuran *co-firing* PLTU; mengajukan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) bagi unit pembangkit *renewable energy* PLTM Gunung Wugul dan turut serta dalam perdagangan karbon Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) PLTU, yang menjadi surat bukti penetapan kuota emisi gas rumah kaca dalam periode tertentu bagi pelaku usaha mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

Green power plant development also continues, among other by conducting 100% co-firing and wood co-firing chip tests at Sintang SPP; testing the use of Solid Recovered Fuel in the mixture for SPP co-firing; submitting a request for Emission Reduction Certificate for NRE-based power plant of MHPP Gunung Wugul and participating in carbon trading based on the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 16 of 2022 on Procedures for Carbon Economic Value Management in Power Generation Sub-sector which sets out the greenhouse gas emission quota according to the Technical Approval for Upper Emission Limits for Business Owners (PTBAE-PU) of SPP which is valid for one year.



Dari aspek sosial, PLN Indonesia Power berkomitmen memastikan untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pegawai, didukung dengan skema remunerasi yang kompetitif, antara lain dengan mematuhi ketentuan terkait dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tanpa adanya unsur diskriminasi berdasarkan *gender*, pria dan wanita.

From the social aspect, PLN Indonesia Power is committed to ensuring that it provides a safe and comfortable workplace for employees, supported by a competitive remuneration scheme that complies with the provisions on the Provincial Minimum Wage without gender discrimination.

Dari aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan untuk meminimalkan potensi dampak negatif dan mengupayakan nihil kecelakaan pada manusia maupun lingkungan (*zero accident*) dan juga *zero fatality*. Pada tahun 2023 PLN Indonesia Power mencatat tidak terjadi kecelakaan kerja oleh pegawai, sama dengan kinerja tahun 2022, yaitu *zero accident*.

From the health, safety, security, and environment aspect, the Company seeks to minimize potential adverse impacts and strive for zero accidents and zero fatality to humans and the environment. Similar to in 2022, in 2023 PLN Indonesia Power recorded zero work accidents to employees.

Di aspek pemberdayaan masyarakat, PLN Indonesia Power menerapkan InPower CARE (Indonesia Power - *Community Assistance, Relation and Empowerment*) merupakan wujud tanggung jawab sosial Perusahaan yang mencakup tiga program utama, yaitu Pelayanan Masyarakat (*Community Assistance*), Pembinaan Hubungan (*Community Relation*) dan Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*). Ketiga pilar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, peduli lingkungan, memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan sosial yang diterapkan di seluruh wilayah operasi PLN Indonesia Power. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power telah merealisasikan program InPower CARE sebesar Rp52.760 juta untuk pelayanan masyarakat, pembinaan hubungan, dan pemberdayaan masyarakat.

From the community empowerment aspect, PLN Indonesia Power implements InPower CARE (Indonesia Power - Community Assistance, Relations, and Empowerment) as the embodiment of corporate social responsibility. It includes three main programs: Community Assistance, Community Relations, and Community. These three pillars are intended to improve the quality of education, care for the environment, empower the community's economy, improve the quality of health, as well as enhance infrastructure and social development in all PLN Indonesia Power operational areas. In 2023, PLN Indonesia Power's actual spending for the InPower CARE program was Rp52.760 million for community assistance, community relations, and community empowerment.

PLN Indonesia Power terus berupaya memperluas kapasitas pengembangan pembangkit EBT seperti pemanfaatan panas bumi, tenaga surya, angin dan sebagainya guna mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di dalam proses operasional sebagai langkah mengatasi perubahan iklim. Sampai dengan akhir tahun 2023, telah beroperasi 4 (empat) jenis pembangkit yang menggunakan EBT sebagai sumber energi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas sebesar 1.556,80 MW.

PLN Indonesia Power continues expanding NRE power plant development capacity by utilizing among others geothermal, solar, and wind power and alike in order to reduce greenhouse gas emissions during operations as a way to mitigate climate change. Until 2023, four types of this plant were operational, namely Hydro Power Plants (PLTA), Mini Hydro Power Plants (PLTM), Geothermal Power Plants (PLTP), and Solar Power Plant (PLTS) with a total capacity of 1,556.80 MW.

Tahun 2023 menjadi tahun terbaik dan membanggakan dalam pengelolaan strategi keberlanjutan sekaligus implementasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*). PLN Indonesia Power berhasil memperoleh predikat sebagai Perusahaan dengan CSR terbaik, yang meliputi penghargaan Indonesia *Best CSR Awards* 2023 5th; Indonesia *CSR Brand Equity Awards* 2023 5th, Indonesia Best CSR Awards 2023; 9 (sembilan) Unit meraih predikat *Top CSR Awards* 2023 #Star 5 sekaligus juga *Top Leader on CSR Commitment* 2023 pada ajang *Top CSR Awards* 2023; dan *Top Public Relation Leader Category Industry Vice President of Corporate Communication & CSR* kepada Sdr. Aryati serta Penghargaan Terbaik Konsistensi Pencapaian Kinerja Lingkungan Fungsi Pembangkit *Enviro Performance Award* 2023 dari PLN. Penghargaan di atas merupakan bukti dan kontribusi nyata PLN Indonesia Power dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mencapai pertumbuhan bisnis Perusahaan melalui sinergi, kolaborasi dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan.

2023 was the best and most satisfactory year in terms of sustainable strategy management and ESG implementation. PLN Indonesia Power was recognized as the Company with the best CSR, and among others brought home accolades from 5th Indonesia Best CSR Awards 2023; 5th Indonesia CSR Brand Equity Awards 2023, Indonesia Best CSR Awards 2023; nine (9) Units received Top CSR Awards 2023 #Star 5 and Top Leader on CSR Commitment 2023 Top CSR Awards 2023; as well as Top Public Relation Leader Category Industry Vice President of Corporate Communication & CSR which was awarded to Ms. Aryati, along with the Best Award for Environmental Performance Achievement in Power Plant Function at the Enviro Performance Award 2023 hosted by PLN. These awards prove PLN Indonesia Power's real contribution in supporting sustainable development by growing through synergy, collaboration, and stakeholders' support.



Perubahan Komposisi Direksi
Changes in Board of Directors Composition

Selama tahun 2023 terjadi sekali perubahan komposisi Direksi PLN Indonesia Power yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 19 September 2023. Keputusan RUPS Sirkuler tersebut menyetujui pemberhentian Sdr. Rachmad Handoko sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara, untuk selanjutnya mengangkat Sdr. M. Hanafi Nur Rifai sebagai penggantinya. Dengan demikian maka sampai dengan akhir tahun 2023, susunan komposisi Direksi PLN Indonesia Power adalah 6 (enam) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

A change in the Board of Directors composition took place in 2023, under Circular Shareholder Resolutions dated September 19, 2023. The Circular GMS Resolutions approved the dismissal of Mr. Rachmad Handoko from the position as the Director of Coal Plant Operations, and subsequently appointed Mr. M. Hanafi Nur Rifai as his replacement. Thus, as of the end of 2023, PLN Indonesia Power Board of Directors consisted of the following six (6) members:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 19 September 2023 Circular Shareholder GMS dated September 19, 2023
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 25 November 2021 Circular Shareholder GMS dated November 25, 2021
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022

Mereka semua telah mencatatkan namanya dalam sejarah perubahan besar transformasi PLN Indonesia Power. Selamat bergabung dan selamat bekerja kepada anggota Direksi yang baru, semoga dengan komposisi Direksi saat ini dapat terus memberikan kontribusi positif menumbuhkan kinerja yang lebih baik secara berkelanjutan.

They have all been involved in the major changes that come along with PLN Indonesia Power's transformation. Welcome to the new members of the Board of Directors and we wish you the best of luck. We expect that the current composition of the Board of Directors can continue making positive contributions to fostering better performance on an ongoing basis.

Alasan Perubahan
Reason for Change

Mengacu pada peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, pergantian Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham. Adapun alasan perubahan tersebut adalah sebagai upaya meningkatkan kinerja Perusahaan, khususnya dalam mendukung restrukturisasi PLN melalui *Holding* dan *Subholding*, maka Pemegang Saham memutuskan melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi setelah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Referring to applicable regulations and the Company's Articles of Association, changing the Board of Directors is within the authority of the Shareholders. A change is necessary to improve the Company's performance, especially in supporting the restructuring of PLN through Holding and Subholding. This is the foundation of the Shareholders' decision in appointing and dismissing the Board of Directors, upon obtaining approval from the Ministry of SOEs.

Komposisi Setelah Tahun Buku 2023
Composition after Fiscal Year 2023

Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, sampai dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan ini.

No further changes took place in the composition of the Board of Directors as of the signing of this Annual Report.



Apresiasi
Acknowledgment

Sebagai penutup, atas nama seluruh jajaran Direksi, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengarahan dan penasihatan yang diberikan serta seluruh pegawai atas kerja keras dan dedikasi yang konsisten selama tahun 2023 sehingga PLN Indonesia Power mencatat kinerja yang membanggakan. Penghargaan yang sama juga kami berikan kepada PLN selaku induk Perusahaan dan pemegang saham lainnya atas kepercayaan yang diberikan, serta pelanggan, mitra bisnis dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.

Kami terus melakukan penguatan dan menyempurnakan proses bisnis Perusahaan pasca transformasi *Holding Subholding* dalam mendukung tercapainya target kinerja Perusahaan dan sejalan dengan Misi Portofolio SOLID PLN. Dengan semangat optimisme, Kami meyakini dapat terus bertumbuh dengan dukungan semua pihak, termasuk oleh komitmen pemerintah di dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional yang lebih baik Dengan berbekal kekuatan wilayah operasi yang semakin luas pasca pembentukan *Subholding* PLN, sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan, serta operasional pembangkit yang handal, dan tetap mengedepankan aspek pengelolaan lingkungan, PLN Indonesia Power siap mendukung ketahanan listrik nasional. PLN Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk menjadi yang Terdepan dalam Bisnis Solusi Energi Terbaik, saat ini dan masa depan.

To conclude this report, on behalf of the entire Board of Directors, we express our appreciation and thanks to the Board of Commissioners for providing directives and advice, and to all employees for their consistent hard work and dedication throughout 2023, all of which have allowed PLN Indonesia Power deliver conclusive achievements. Our gratitude also goes to the Holding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and other shareholders for the trust given. We would also thank the customers, business partners, and all stakeholders for their support and cooperation.

We continue strengthening and refining our business process following the Holding-Subholding transformation in order to meet our performance target and keep up with SOLID PLN Portfolio Mission. With a spirit of optimism, we believe that we will continue to grow thanks to all the support we receive, including from the government who is committed to improving the effort to better meet the national electricity needs. Having the advantage of wider operational area following the establishment of PLN Subholding, solid synergy and collaboration, and reliable power plant operations, and constant prioritization of environmental management, PLN Indonesia Power is here to safeguard national electricity security. PLN Indonesia Power is always committed to being the Leader in providing Best Energy Solutions Business, now and in the future.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024

Atas Nama Direksi PT PLN Indonesia Power
On behalf of PT PLN Indonesia Power Board of Directors



Edwin Nugraha Putra
Direktur Utama
President Director



Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners



Iskandar Simorangkir
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner/ Independent Commissioner

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan dan strategi yang dijalankan Direksi, serta memberikan dukungan, saran, dan nasihat dalam rangka pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam KPI Perusahaan dan RKAP 2023 guna mendukung tercapainya tujuan Transformasi PLN mewujudkan Indonesia maju, makmur dan mendunia.

The Board of Commissioners supervises the policies and strategies implemented by the Board of Directors as well as providing support, suggestions, and advice in order to meet the Company's targets as stated in the Company's KPI and WP&B 2023. These are aimed at promoting the objective of PLN Transformation that brings forward a developed, prosperous, and global Indonesia .

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Perkenankan Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya, PLN Indonesia Power atau Perusahaan dapat melalui tahun 2023 di tengah berbagai tantangan dengan kinerja yang positif dan membanggakan. Bersyukur atas berbagai pencapaian penting yang diraih PLN Indonesia Power selama tahun 2023. Dalam Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham dan segenap pemangku kepentingan atas pelaksanaan pengawasan dan penasehatan dalam pengelolaan PLN Indonesia Power yang dijalankan oleh Direksi sepanjang tahun buku 2023.

We would like to thank and praise God the Almighty. With His mercy and grace, PLN Indonesia Power has successfully passed 2023 with positive and encouraging performance albeit many challenges. We are grateful for many significant achievements we earned throughout 2023. In this Annual Report, the Board of Commissioners presents the Supervisory Duty Report to our Shareholders and all stakeholders for the implementation of the supervisory and advisory duties in the management of PLN Indonesia Power by the Board of Directors throughout the fiscal year 2023.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini menyampaikan aspek pengawasan dan penasehatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), penilaian atas kinerja Direksi dan dasar penilaiannya serta isu strategis lainnya yang sedang dihadapi PLN Indonesia Power. Selain itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi termasuk upaya dalam merespon tantangan agar dapat terus tumbuh berkelanjutan. Kami juga menyampaikan pandangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang telah dijalankan, termasuk namun tidak terbatas pada *implementasi Whistle Blowing System* (WBS), dan informasi perubahan komposisi Dewan Komisaris selama tahun 2023 serta prospek usaha PLN Indonesia Power ke depan.

The Board of Commissioners' Supervisory Duty Report in this Annual Report conveys the supervisory and advisory aspects on the implementation of the Company's Work Plan and Budget (WP&B), Company Long Term Plan (RJPP), assessment of the Board of Directors' performance and the basis for such assessment, as well as other strategic issues currently being faced by PLN Indonesia Power. The Board of Commissioners also presents the results of the assessment of the Board of Directors' performance, including in responding to challenges for sustainable growth. Also presented our views on the corporate governance implementation, including but not limited to the Whistleblowing System (WBS) execution and information on the changes in the Board of Commissioners' composition in 2023 as well as PLN Indonesia Power's business outlook.

Tinjauan Makroekonomi 2023
2023 Macroeconomic Review

Kondisi ekonomi global tahun 2023 masih mengalami perlambatan di kisaran 3,1% atau turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,5%. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketegangan geopolitik yang memicu gangguan suplai energi dan pangan global, sehingga mendorong kenaikan inflasi. Sepanjang tahun 2023 terjadi kenaikan suku bunga acuan bank sentral di banyak negara di seluruh dunia yang diikuti dengan perlambatan aktivitas ekonomi serta dinamika ekonomi yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

The global economic conditions in 2023 was still held back by a slowdown around 3.1%. This was lower compared to the previous year of 3.5%. This was particularly influenced by increasing geopolitical tensions that triggered disruptions in global energy and food supplies, thereby driving inflation up. Throughout 2023, central bank benchmark interest rates increased in many countries around the world, followed by a slowdown in economic activity, not to mention economic dynamics that occur in developed countries such as the United States and China.

Adapun kondisi ekonomi domestik, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,31%. Angka pertumbuhan ini tergolong baik, di tengah penerapan kebijakan moneter ketat oleh Bank Indonesia dan mayoritas bank sentral lainnya di seluruh dunia. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, tumbuh 4,82% di tahun 2023, sedikit lebih rendah dari 4,94% di tahun 2022. Sementara itu investasi tumbuh 4,40% atau lebih cepat dibandingkan 3,87% di tahun sebelumnya. Untuk itulah, Dewan Komisaris menilai bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut, akan mendukung pencapaian kinerja PLN Indonesia Power dapat tumbuh berkelanjutan.

According to Indonesia Statistics (BPS), the domestic economy grew 5.05%, which was lower than the previous year's 5.31%. This was acceptable, bearing in mind that tight monetary policies are enforced by Bank Indonesia and most central banks across the globe. Household consumption, which is the main driver of Indonesia's economic growth, grew 4.82% in 2023, which was slightly lower than 4.94% in 2022. Meanwhile, investment grew 4.40%, which was higher than in the previous year at 3.87%. For these reasons, the Board of Commissioners is positive that Indonesia's economic recovery will continue and support PLN Indonesia Power in performing excellently and growing sustainably.

Penilaian Atas Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Assessment of the Board of Directors' Performance and the Basis for the Assessment

Pengelolaan Perusahaan tahun 2023 oleh Direksi menurut Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik dan membanggakan. Hal tersebut tercermin antara lain dari tingkat kesehatan Perusahaan dan realisasi atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023. Realisasi KPI Perusahaan tahun 2023 mendapatkan skor 103,40 atau meningkat dibanding skor KPI Perusahaan sebelumnya sebesar 101,24. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-02/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN dan/atau Kontrak Manajemen dan Petunjuk Teknis Tahun 2023 yang telah disepakati oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

According to the Board of Commissioners, the management of the Company in 2023 by the Board of Directors has been satisfactory. This is reflected, among other things, in the Company's soundness level and the realization of the Company's Work Plan and Budget (WP&B) 2023 targets. The Company's KPI in 2023 scored 103.40, which was an improvement from last year's KPI score of 101.24. This refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/3/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs and/or Management Contracts and Technical Instructions 2023 which have been agreed upon by the Board of Directors, Board of Commissioners and the Shareholders.

Pencapaian KPI Perusahaan tahun 2023 menjadi dasar penilaian kinerja Direksi sebagaimana target dalam Kontrak Manajemen dan RKAP tahun 2023. Indikator kinerja KPI Perusahaan di tahun 2023 ditetapkan oleh Pemegang Saham. KPI Perusahaan 2023 dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) perspektif, yakni Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia; Inovasi Model Bisnis; Kepemimpinan Teknologi; Peningkatan Investasi; Pengembangan Talenta; dan Aspek Kepatuhan. Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi Perusahaan meliputi penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi KPI Perusahaan 2023 dan RKAP tahun 2023.

The Company's KPI achievements for 2023 became the basis for assessing the performance of the Board of Directors as targeted in the Management Contract and WP&B 2023. The Company's KPIs for 2023 were determined by the Shareholders in the Shareholder Aspirations for Preparing WP&B 2023. The Company's KPIs for 2023 were grouped based on six (6) perspectives, namely Economic and Social Value for Indonesia; Business Model Innovation; Technology Leadership; Energy Investment; Unleash Talent; and Compliance. The Board of Commissioners' assessment of the Board of Directors' performance covers quantitative and qualitative aspects of the realization of the Company's 2023 KPIs and WP&B 2023.

KPI Perusahaan 2023 merupakan indikator kinerja utama yang menjadi target PLN Indonesia Power di tahun 2023, dari total 33 (tiga puluh tiga) indikator KPI, 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sudah mencapai target, 7 (tujuh) indikator hampir tercapai dan 2 (dua) indikator belum mencapai target. Untuk indikator KPI Perusahaan 2023 yang telah mencapai target, Dewan Komisaris menilai Direksi telah berhasil menjalankan *strategic result* dan sasaran utama RKAP 2023 antara lain melalui realisasi EBITDA, BPP pembangkit, ROIC, kinerja EFOR Pembangkit Jawa Bali non PLTU batubara; kinerja EFOR Pembangkit Luar Jawa Bali PLTU batubara dan non PLTU batubara; kinerja EAF pembangkit Luar Jawa Bali PLTU batubara dan non PLTU batubara; pemakaian *specific fuel consumption* (SFC) batubara maupun gas dan pemenuhan *Risk Management Index* (RMI); jumlah kontrak bisnis di luar negeri, sinergi antar Subholding & Anak Perusahaan lain; bauran energi EBT; *carbon emission reduction*, *strategic partnership GenCo*; efisiensi biaya pemeliharaan pembangkit; jaminan penyediaan energi primer batubara; *total unit with* Proper; *talent* milenial, perempuan dalam *nominated talent*, sertifikasi manajemen risiko pegawai; serta ketepatan penyampaian laporan dan akurasi data kinerja. Dewan Komisaris menilai bahwa program strategi dan langkah Direksi PLN Indonesia Power dalam mengelola kinerja-kinerja di atas telah berada pada jalur yang tepat, sehingga perlu terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

The 2023 KPIs were the targets for PLN Indonesia Power in the indicated year. Out of a total of 33 KPIs, 24 indicators have met the target, 7 indicators almost met the targets, and 2 failed to meet the target. For the 2023 KPIs meeting the targets, the Board of Commissioners declared that the Board of Directors has successfully carried out the strategic results and WP&B key targets, including through ROIC realization; EFOR of non-coal SPP in Java-Bali; EFOR of coal and non-coal SPP outside Java-Bali; EAF of coal and non-coal SPP outside Java-Bali; coal and gas specific fuel consumption (SFC); Risk Management Index (RMI) compliance; number of business contracts abroad; synergy among subholdings and other subsidiaries; NRE mix; carbon emission reduction; GenCo strategic partnership; power plant maintenance efficiency; guarantee of coal supply as primary energy; total units with Proper; millennial and female talents in nominated talents, employee risk management certification; and reporting timeliness and performance data accuracy. The Board of Commissioners sees that the strategic programs and measures taken by PLN Indonesia Power Board of Directors in managing the above performances are on the right track and that they will be needing maintenance and improvements.



Adapun terkait indikator kinerja KPI Perusahaan 2023 yang belum mencapai target atau kurang dari 95% dari target, yakni EFOR pembangkit PLTU batubara Jawa Bali dan pendapatan dari luar PLN grup. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi ke depannya dapat mengembangkan kebijakan maupun strategi yang lebih mendukung tercapainya seluruh target KPI Perusahaan yang ditetapkan.

The Company's 2023 KPIs which fell below 80% of the targets include earnings beyond PLN group and EFOR of non-coal SPP in Java-Bali. The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to develop policies and strategies that better support the achievement of all future KPI targets.

Realisasi produksi tenaga listrik tahun 2023 mencapai 106,94% dari target RKAP sebesar 78.734,67 GWh, menjadi 84.199,86 GWh, meningkat signifikan 124,47% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 37.510,12 GWh. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan produksi di PLTU Batubara, khususnya di wilayah Jawa karena kebutuhan sistem. Hal tersebut berdampak pula pada peningkatan penjualan tenaga listrik secara signifikan mencapai 107,07% dari target RKAP sebesar 74.403,53 GWh, menjadi sebesar 79.664,84 GWh, meningkat 121,69% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 37.510,12 GWh. Meningkatnya produksi dan penjualan tenaga listrik terutama disebabkan oleh adanya pengalihan aset pembangkit PLN ke *Subholding* PLN Indonesia Power. Selain itu, PLN Indonesia Power terus menjaga nilai BPP pembangkit sesuai target RKAP 2023 pada level Rp1.034,65,- dari target Rp1.162,30,-. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah Direksi untuk terus menjaga serta meningkatkan kinerja BPP pembangkit dengan melakukan mitigasi risiko atas faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian target produksi, penjualan tenaga listrik maupun BPP pembangkit dengan lebih baik lagi.

The actual electricity production in 2023 reached 106.94% from the WP&B target of 78,734.67 GWh, or at 84,199.86 GWh. This was a significant increase of 124.47% compared to last year's realization of 37,510.12 GWh. This was particularly contributed by increased production in Coal Steam Power Plants, particularly in Java, due to system demands. Its effect was also shown by significant increase in electricity sales which reached 107.07% of the WP&B target of 74,403.53 GWh. Recorded at 79,664.84 GWh, it was an increase by 121.69% from 37,510.12 GWh in 2022. The increase in electricity production and sales was mainly due to the transfer of assets of a number of PLN power plants to PLN Indonesia Power as its subholding. PLN Indonesia Power also successfully maintained the power plant production cost at Rp1,034.65, from the target of Rp1,162.30. The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' efforts to continue maintain and improve power plant production cost by mitigating risks on factors that may affect the achievement of production targets, electricity sales, and power plant production cost.

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai 106,94% dari target RKAP sebesar Rp98,39 triliun tercatat meningkat 27,61% menjadi sebesar Rp103,48 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp81,09 triliun. Perolehan pendapatan usaha berasal dari pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar 98,51%; pendapatan jasa sebesar 1,23%, dan pendapatan dari konsesi jasa sebesar 0,26%. Adapun beban usaha tahun 2023 adalah 97,55% dari target RKAP sebesar Rp85,65 triliun, mengalami kenaikan sebesar 14,37% menjadi Rp83,55 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp73,05 triliun terutama disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata pemakaian energi primer. Realisasi pertumbuhan pendapatan usaha tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan beban usaha sehingga mendorong peningkatan jumlah laba tahun berjalan 2023. Laba tahun berjalan 2023 mencapai 88,69% dari target Rp9,23 triliun atau meningkat 74,85% menjadi sebesar Rp8,19 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4,68 triliun, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha atas penjualan tenaga listrik dari pembangkit alih aset PLN.

In 2023, Revenue reached 106.94% of the WP&B target of Rp98.39 trillion. This was an increase by 27.61% to Rp103.48 trillion from Rp81.09 trillion in the previous year. Revenue covers earnings from electricity sales by 98.51%, service revenue by 1.23%, and service concession by 0.26%. Meanwhile, operating expenses in 2023 reached 97.55% from the WP&B target of Rp85.65 trillion. This was an increase by 14.37% to Rp83.55 trillion from last year's Rp73.05 trillion, which was particularly due to increase in primary energy consumption. Higher increase in Revenue compared to Operating Expenses has helped increase the Profit for the Year 2023. The Profit for the Year 2023 reached 88.69% of the target of Rp9.23 trillion. This was an increase by 74.85% to Rp8.19 trillion from Rp4.68 trillion in 2022. This was mainly caused by the increase in revenue from electricity sales from power plants transferred by PLN.

Adapun kinerja operasi pembangkit antara lain tercermin dari indikator faktor keandalan (*Equivalent Availability Factor*/EAF) dan faktor gangguan (*Equivalent Forced Outage Rate*/EFOR). Nilai keandalan EAF pembangkit PLTU batubara di Jawa Bali tahun 2023 mencapai sebesar 85,66% atau 98,63% dari target RKAP sebesar 86,85% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 92,03%. Untuk EAF pembangkit non PLTU batubara di Jawa Bali mencapai sebesar 95,09% atau 99,20% dari target 95,86% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 92,03%. Untuk nilai kinerja gangguan EFOR pembangkit PLTU batubara untuk dan non PLTU batubara di Jawa Bali masing-masing mencapai sebesar 3,38% atau 62,60% dari target dan 0,77% atau 110,00% dari target dan lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 0,65% untuk pembangkit eksisting. Dewan Komisaris memandang bahwa upaya penanganan gangguan pembangkit perlu terus ditingkatkan agar kinerja gangguan dapat tercapai.

Power plant operational performance is measured by Equivalent Availability Factor (EAF) Equivalent Forced Outage Rate (EFOR). The EAF of coal Steam Power Plants in Java-Bali in 2023 was 85.66% or 98.63% of the WP&B target of 86.85%. This was lower than in 2022 at 92.03%. The EAF of non-coal Steam Power Plants in Java-Bali in 2023 was 95.09% or 99.20% of the target of 95.86%. This was higher than in 2022 at 92.03%. The EFORs of coal and non-coal Steam Power Plants in Java-Bali were 3.38% and 0.77% respectively, or 62.60% and 110.00% of the targets, respectively. They were higher than in 2022 at 0.65% for existing power plants. The Board of Commissioners views that an improvement is needed for handling these outages so as to meet the targets for such areas.



Dewan Komisaris berpendapat bahwa eksekusi program strategis 2023 yang disusun oleh Direksi diharapkan dapat mewujudkan masa depan PLN Indonesia Power yang semakin sejahtera dan tentunya berkelanjutan. Yaitu dengan terus meningkatkan keandalan pembangkit di Sistem Jawa Bali maupun di Luar Jawa Bali, memproduksi listrik dengan biaya yang kompetitif, meningkatkan *fuel mix* EBT, implementasi d*igital power plan*t dan inovasi terus-menerus, pengembangan bisnis *beyond* kWh dan meningkatkan kapasitas organisasi dan kapabilitas SDM secara berkelanjutan.

The Board of Commissioners is of the opinion that the execution of the 2023 strategic programs prepared by the Board of Directors is expected to realize a prosperous and sustainable future for PLN Indonesia Power. This includes by continuing to enhance power plant reliability in and outside the Java-Bali system, producing electricity at competitive costs, expanding NRE fuel mix, implementing digital power plants and continuous innovation, developing business beyond kWh, and expanding organizational capacity and human capital capabilities in a sustainable manner.

Pengawasan dan Pemberian Nasehat Dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Oleh Direksi

Supervisory and Advisory Functions in Formulating and Implementing the Board of Directors' Company Strategies

Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi beserta segenap jajaran manajemen telah merespon tantangan yang dihadapi PLN Indonesia Power selama tahun 2023 dengan baik. Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi mampu menerjemahkan tantangan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2023 dengan strategi, kebijakan, maupun program inisiatif yang tepat dan mampu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

The Board of Commissioners together with the Board of Directors and all levels of Management have responded well to the challenges faced by PLN Indonesia Power in 2023. The Board of Commissioners views that the Board of Directors was capable of overcoming the challenges and obstacles faced throughout 2023 with appropriate strategies, policies, and initiative programs while encouraging improvements in the Company's overall performance.

Dalam proses perumusan serta penerapan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan, Direksi telah berkomunikasi dan meminta masukan serta arahan dari Dewan Komisaris sebagai pihak yang mengawasi jalannya strategi dan kebijakan strategis tersebut. Dewan Komisaris terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan target RKAP 2023 dan RJPP yang berlaku, mulai dari tahap perumusan hingga implementasi strategi dan kebijakannya. Proses komunikasi dan koordinasi dilaksanakan secara rutin baik melalui proses pelaporan, diskusi, maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

In the process of formulating and implementing the Company's strategies and strategic policies, the Board of Directors has communicated and requested input and directives from the Board of Commissioners as the overseer of the implementation of these strategies and strategic policies. The Board of Commissioners is directly involved in supervising the WP&B 2023 and Company Work Plan target achievement endeavors, from the formulation to the implementation of strategies and policies. The communication and coordination are regularly carried out through reports, discussions, and periodical joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Strategi dan langkah PLN Indonesia Power dalam proses transisi energi dilakukan guna mendukung tercapainya target bauran EBT di tahun 2025 sebesar 17%-19%. Dewan Komisaris mengapresiasi kebijakan dan strategi yang dijalankan Direksi, untuk terus memperkuat segmen EBT sebagai *second curve of business* Perusahaan, meningkatkan *co-firing* PLTU batubara, program pengendalian dan reduksi emisi, implementasi *carbon cap* dan c*arbon trade* antar pembangkit sebagai proses transisi energi secara berkelanjutan.

PLN Indonesia Power's strategies and measures in energy transition are to support the achievement of the NRE mix target of 17%-19% by 2025. The Board of Commissioners appreciates the policies and strategies implemented by the Board of Directors to continue strengthening the NRE segment as the Company's second curve of business, enhancing the co-firing of coal SPP, carrying out emission control and reduction program, implementing carbon cap and carbon trade among power plants as a sustainable energy transition endeavor.

Tantangan terbaru dan sekaligus paling menantang terkait dengan pembentukan *Holding Subholding* di lingkungan PT PLN (Persero), dimana PLN Indonesia Power berubah menjadi *Subholding* Pembangkitan dengan penambahan aset lebih dari 10 GW dengan kinerja pembangkit yang perlu distandarisasi dan penyempurnaan proses bisnis secara berkesinambungan, baik pada aspek pendukung maupun bisnis intinya. Sejalan dengan agenda *sustainability*, terkait dengan pencapaian target NZE di tahun 2060 mendorong PLN Indonesia Power melakukan akselerasi transisi energi terhadap seluruh pembangkitnya menjadi lebih ramah lingkungan dan sekaligus membuka peluang bisnis yang semakin luas dalam pengembangan usaha *Beyond* kWh.

The latest and most challenging issue concerns the establishment of Holding-Subholding within PT PLN (Persero), where PLN Indonesia Power transitioned into a Power Generation Subholding with the additional assets of more than 10 GW. These assets need power plant standardization and business process improvement on an ongoing basis, both for the core and supporting businesses. In line with the sustainability agenda, to meet the NZE target by 2060, PLN Indonesia Power seeks to accelerate its energy transition across its power plants. That way, in addition to becoming more environmentally friendly, the Company also opens up wider business opportunities for the Beyond kWh business.



Dalam hal pengembangan produk, terutama pada segmen *Beyond* kWh, Dewan Komisaris mendukung upaya Direksi dalam mengembangkan produk tersebut sebagai hasil inovasi secara berkelanjutan, yang kelak akan menjadi sumber pendapatan di luar penjualan tenaga listrik. Dewan Komisaris mengapresiasi pengembangan usaha *beyond boundaries* yang kian menunjukkan hasil positif, yakni adanya kerjasama di bidang operasi, pemeliharaan dan peralatan pembangkit untuk studi bersama rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), pengembangan *Captive Power* di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah serta studi dan kerja sama *Decarbonation Roadmap* di Indonesia.

Especially for the Beyond kWh segment, the Board of Commissioners supports the Board of Directors' product development efforts as the result of sustainable innovation, which will later become a source of income apart from the sale of electricity. The Board of Commissioners appreciates the business development beyond boundaries which is increasingly showing positive results. It covers cooperation in power plant Operations & Maintenance (O&M) Services with a China-based company to attend in a joint study for planning the development of Wind Power Plants (PLTB) in Indonesia and expansion of Captive Power up to 5,000 MegaWatt in Morowali Industrial Park, Central Sulawesi. The Company also collaborates with a Japan-based company for the study and cooperation on the Decarbonation Roadmap in Indonesia.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Opinion on the Business Outlook Prepared by the Board of Directors

Proyeksi perekonomian dunia tahun 2024 masih mengalami ketidakpastian dengan kisaran 3,1% menurut *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* terbitan Januari 2024, atau sama dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. IMF menyebutnya dengan istilah "*resilient but slow*", atau "tangguh meskipun lambat". Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi sebagai antitesis dari integrasi ekonomi, volatilitas harga komoditas, dan potensi ancaman perubahan iklim, serta meningkatnya harga minyak dunia.

The global economy is projected to remain shadowed by uncertainty at the range of 3.1% according to the International Monetary Fund (IMF) in the World Economic Outlook, January 2024. This figure is not different from last year's growth. The IMF calls it resilient but slow. This was particularly affected by the weakening economic growth of China and the US, geopolitical war of Ukraine-Russia and Palestine-Israel, economic fragmentation as the antithesis of economic integration, the volatility of commodity price, potential threats from climate changes, and the increase in global oil price.

Adapun pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 tumbuh optimis di kisaran 5,0% menurut IMF, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,05% di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh solidnya permintaan domestik, baik konsumsi swasta maupun. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengelola faktor eksternal dan menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi ketidakpastian global, kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, maupun pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas, diprediksi juga akan meningkatkan tingkat konsumsi listrik di Indonesia.

Meanwhile, the IMF is optimistic that amidst the global economic slowdown, the national economy will grow around 5.0% in 2024, which is slightly lower than the previous year's growth of 5.05%. This is mainly driven by strong domestic demands, both private and public consumption. The Government is also expected to successfully manage external factors and prepare anticipatory measures against the issues of global uncertainty, rising domestic interest rates, national food security, and the weakening of the Rupiah exchange rate against the US Dollar. With the projected economic growth, electricity consumption in Indonesia is also predicted to increase.

Berdasarkan asumsi-asumsi terhadap kondisi ekonomi global maupun nasional yang cukup menantang tersebut, Dewan Komisaris sependapat dengan pandangan Direksi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang positif akan mendorong konsumsi listrik nasional, termasuk penggunaan EBT yang lebih ramah lingkungan. Prospek usaha yang disampaikan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode yang berlaku dinilai telah memadai, realistis dan selaras dengan tujuan, visi dan misi PLN Indonesia Power. Pengembangan bisnis *renewable energy* dan strategi inovasi produk *beyond* kWh perlu terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, guna mendukung tercapainya target bauran energi nasional EBT 17-19% di tahun 2025, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi perlu merumuskan strategi dan program unggulan pengembangan bisnis *renewable energy* dan inovasi produk *beyond* kWh untuk menjadi solusi eksistensi PLN Indonesia Power di masa depan.

Bearing in mind the assumptions relevant to the quite challenging global and national economic situations, the Board of Commissioners agrees with the Board of Directors' opinion that a positive national economic growth will encourage national electricity consumption, including the greener NRE. The business outlook presented in the Company Long Term Plant of the current term is considered sufficient, realistic, and in accordance with PLN Indonesia Power's objectives, vision, and mission. The renewable energy business along with innovative strategies for beyond kWh products need to be developed systematically and sustainably. Still, to help meet the national NRE mix target of 17-19% by 2025, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors needs to formulate the strategies and flagship programs for NRE business and beyond kWh product innovation. Together, they will become PLN Indonesia Power's solution to exist in the future.

Pasca pembentukan *Holding Subholding* pembangkitan oleh PLN, PLN Indonesia Power mendapatkan pelimpahan aset pembangkit beserta SDM dan organisasinya. Dewan Komisaris berpendapat bahwa kekuatan SDM menjadi modal penting bagi PLN Indonesia Power untuk terus tumbuh berkelanjutan sekaligus menjadi tantangan yang harus dikelola dengan baik agar sejalan dengan tujuan transformasi yang ditetapkan oleh PLN.

Following its establishment as Power Generation Subholding by PLN, PLN Indonesia Power has been delegated with power generation assets along with their human capital and organizations. The Board of Commissioners is of the opinion that human capital's strength is an important capital for the Company to continue to grow sustainably. Conversely, they may pose a challenge that requires proper management so as to be in accordance with the transformation objectives set by PLN.



Pandangan Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Opinion on Corporate Governance Implementation

Implementasi tata kelola perusahaan di PLN Indonesia Power menjadi salah satu fokus pengawasan Dewan Komisaris. Kami terus mendorong agar implementasi GCG ditingkatkan untuk mencapai standar praktik terbaik sejalan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah dengan baik berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan, antara lain dengan mengadopsi perkembangan standar penerapan GCG yang berlaku di tingkat nasional maupun global. Standar penerapan GCG tersebut meliputi Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Pedoman GCG berdasarkan Standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Penilaian implementasi GCG dilakukan setiap tahun dan untuk tahun 2023 PLN Indonesia Power menggunakan 4 standar penilaian GCG, yaitu berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, walaupun sudah dicabut namun belum terdapat peraturan penggantinya dan masih dipergunakan dalam lingkungan PLN Group; ASEAN *Corporate Governance Scorecard*; evaluasi tata kelola berdasarkan standar Otoritas Jasa Keuangan yang diatur POJK Nomor: 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat SEOJK Nomor: 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka) dan evaluasi penerapan GCG berdasarkan PUG-KI. Untuk Hasil penilaian GCG tahun 2023 berdasarkan kedua parameter SK-16/S.MBU/2012 mendapat skor sebesar 94,766 dari total nilai maksimal sebesar 100,00 yang setara dengan 94,766% sehingga secara *overall* hasil *assessment* GCG mendapatkan predikat "Sangat Baik". Sedangkan hasil penilaian GCG berdasarkan parameter ACGS mencapai skor 95,98 termasuk dalam kategori *very Good*. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya upaya Direksi dalam meningkatkan implementasi GCG secara berkelanjutan dengan menyempurnakan kebijakan dan memastikan penerapan GCG sejalan dengan dinamika bisnis Perusahaan, termasuk bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG di PLN Indonesia Power.

Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya Direksi terkait dengan penguatan integritas bisnis dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar ISO 37001 : 2016. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap praktik korupsi, gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan sehingga mendukung terciptanya kultur anti suap di sektor ketenagalistrikan. Pada tahun 2023 PLN Indonesia Power telah melakukan perluasan lingkup sertifikasi SMAP ke 9 (sembilan) Unit Pembangkit yaitu: Priok PGU, Suralaya PGU, Mrica PGU, Semarang PGU, Grati PGU, Bali PGU, Saguling POMU, Kamojang POMU, dan *Maintenance Services Unit* (MSU). Dengan adanya perluasan lingkup sertifikasi SMAP ke unit-unit maka semakin memperkuat Komitmen PLN Indonesia Power dalam penerapan dan implementasi SMAP. Selain itu, pelatihan dan kampanye anti korupsi telah diberikan kepada 889 pegawai di seluruh jenjang jabatan dan unit bisnis PLN Indonesia Power atau mewakili 19% dari total pegawai Perusahaan sebanyak 4.581 orang.

Corporate governance implementation at PLN Indonesia Power becomes a focus of the Board of Commissioners' supervision. We continue to encourage the improvement of GCG implementation to deliver the best practice standards according to the Company's business requirements. The Board of Commissioners sees that the Board of Directors has properly and sustainably improved the GCG implementation quality, including by adopting GCG implementation standards applicable nationally and globally. These standards include the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), and GCG Guidelines based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

GCG implementation assessment is held every year. For 2023, PLN Indonesia Power based the assessment on four standards. The first standard is the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. Although the Decree was revoked, there has been no replacement so far and therefore it is still used within PLN Group. The remaining standards are the ASEAN Corporate Governance Scorecard; governance evaluation based on OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Guidelines for Governance in Public Companies and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Governance in Public Companies; and GCG implementation evaluation according to PUG-KI. According to these parameters, the Company's GCG assessment under Decree No. SK-16/S.MBU/2012 in 2023 scored 94.766 out of the maximum score of 100.00. This is equivalent to 94.766%, making the overall GCG assessment outcome fall into the "Very Good" category. Based on ACGS, the GCG implementation assessment scored 96.32 out of the maximum score of 130. Overall, this belongs to the "Very Good" category and is an improvement from the previous score of 95.98. The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' endeavor in improving GCG implementation quality on an ongoing basis by fine-tuning the policies and making sure that the GCG implementation is aligned with the Company's business dynamics. This includes through cooperation with relevant agencies to obtain constructive inputs.

The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors in strengthening business integrity by implementing the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on ISO 37001:2016. This is an endeavor to prevent corruption and gratuities while managing conflicts of interest so as to create an anti-bribery culture in the electricity sector. In 2023, PLN Indonesia Power has expanded the Scope of ABMS Certification to nine (9) Power Generation Units, namely: Priok PGU, Suralaya PGU, Mrica PGU, Semarang PGU, Grati PGU, Bali PGU, Saguling POMU, Kamojang POMU, and Maintenance Services Unit (MSU). Expanding the ABMS certification scope to units helps solidify PLN Indonesia Power's commitment to implementing ABMS. So far, 889 employees have received anti-corruption training and campaigns. They spread at all positions and business units and represent 19% of the Company's total employees of 4,581 people.



Pengawasan terhadap aspek manajemen risiko dan sistem pengendalian internal ditujukan untuk proses pengambilan keputusan Perusahaan telah berbasis pada pengelolaan risiko yang efektif. Sistem manajemen risiko telah dievaluasi secara berkala yang dikembangkan sesuai dengan SNI ISO 31000:2009 dengan mempertimbangkan risiko saat ini mencakup risiko operasional dan non operasional, risiko bisnis, dan risiko yang akan datang.

The supervision of risk management and internal control system is aimed at supporting the Company's decision making based on effective risk management. The risk management system has been regularly evaluated and developed according to SNI ISO 31000:2009 by taking into account current risks such as operational and non-operational, business, and future risks.

Secara berkala, PLN Indonesia Power melakukan *assessment maturity* level manajemen risiko, yang hasilnya semakin baik dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023 hasil *assessment maturity* level manajemen risiko mendapatkan capaian skor sebesar 4,28 dari skor maksimum 5 atau lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 4,04. Dewan Komisaris mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, baik terkait dengan aspek *leadership, people, process* maupun result serta penerapan *Business Continuity Management System* (BCMS) sebagai strategi penanganan risiko ketika terjadi krisis penyediaan energi listrik.

Periodically, PLN Indonesia Power carries out risk management maturity level assessment, the results of which are getting better from year to year. For 2023, the risk management maturity level assessment scored 4.28 out of a maximum score of 5, which was an improvement from the previous year's score of 4.04. The Board of Commissioners commends various efforts made by the Board of Directors to continue enhancing the quality of risk management implementation concerning the aspects of leadership, people, process, and result as well as the implementation of the Business Continuity Management System (BCMS) as a risk management strategy in the face of an electricity supply crisis.

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Frequency and Procedures for Providing Advice to the Board of Directors

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat memberikan berbagai masukan, saran dan nasihat kepada Direksi dalam upaya pencapaian target PLN Indonesia Power, yang disampaikan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (rapat bersama dengan anggota Direksi). Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat melakukan kunjungan lapangan ke unit bisnis bersama dengan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk mendapatkan perspektif langsung dari lokasi kerja sehingga dapat memberikan masukan dan arahan yang sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali dan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris membahas berbagai hal diantaranya tindak lanjut atas keputusan atau rekomendasi dalam rapat Dewan Komisaris sebelumnya, arahan atas strategi dan rencana bisnis dalam RKAP dan RJPP, kinerja keuangan, realisasi kontrak manajemen unit, laporan perkembangan proyek EBT dan proyek strategis lainnya, penguatan budaya K3 dan laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners may give input, suggestions, and advice to the Board of Directors in the efforts to meet PLN Indonesia Power targets. They may be delivered during the Board of Commissioners meetings by inviting the Board of Directors (i.e. joint meetings with members of the Board of Directors). The Board of Commissioners may also conduct field visits to business units together with its Committees to gain a direct picture from the work location so that they can provide input and direction as required. Throughout 2023, the Board of Commissioners held 14 (fourteen) meetings, i.e. two (2) internal meetings of the Board of Commissioners and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. The attendances of each member of the Board of Commissioners have met the provisions. In the meetings, the Board of Commissioners discussed different issues, including follow-up on the resolutions or recommendations from the previous Board of Commissioners meetings, direction on the strategies and business plans contained in the WP&B and Company Long Term Plan, financial performance, realization of unit management contracts, progress reports on NRE projects and other strategic projects, strengthening of K3 culture, and reports of Committees under the Board of Commissioners.

Di samping melalui rapat, tata cara pemberian saran dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi juga dapat dilakukan secara informal serta melalui komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dalam memberikan saran dan nasihat, Dewan Komisaris mempertimbangkan masukan dari Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap komite.

Apart from through meetings, the Board of Commissioners' suggestions and advice can also be provided to the Board of Directors informally and through the Committees under the Board of Commissioners. In providing suggestions and advice, the Board of Commissioners takes into account input from the Committees which actively supervise their respective areas.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Assessment of the Performance of the Board of Commissioners' Committees

Sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/3/2023 tentang Organ Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 23 Maret 2023, PLN Indonesia Power telah mereorganisasi Komite di bawah Dewan Komisaris dengan memiliki 3 Komite Dewan Komisaris yang terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Lainnya yaitu Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002.SK/DK-PLNIP/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Mengacu pada *Board Manual*, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam Piagam Komite dan Program Kerja Komite yang ditetapkan setiap tahun. Kinerja Komite Dewan Komisaris dievaluasi setiap triwulan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite yang mencakup aspek, yaitu kontribusi terhadap pencapaian target Komite; jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Komite; tingkat keaktifan dalam kegiatan Komite; kerjasama dalam Komite serta mutu dan kualitas konsep yang dihasilkan. Hasil penilaian komite tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas audit internal maupun audit eksternal serta mengawasi penerapan GCG sesuai dengan Piagam Komite Audit tanggal 23 Desember 2022 sebagai pembaharuan Piagam Komite Audit 2019. Selama tahun 2023 Komite Audit telah melaksanakan rapat internal komite sebanyak 14 (empat belas) kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite Audit, rapat dengan Satuan Internal Audit maupun rapat dengan auditor eksternal sesuai dengan program kerja Komite Audit. Agenda rapat antara lain membahas telaah atas informasi keuangan Perusahaan setiap bulan, menelaah program kerja audit tahunan, evaluasi kebijakan dan penerapan sistem pengendalian internal, efektivitas audit internal maupun eksternal serta monitoring terhadap penerapan GCG.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris terkait dengan perencanaan, investasi dan operasi Perusahaan serta penerapan manajemen risiko sesuai dengan Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko tanggal 18 Oktober 2023 sebagai penyesuaian nomenklatur dan penambahan aspek investasi ke dalam lingkup tugas Komite. Sepanjang tahun 2023, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite dan rapat dengan mengundang Direksi dan fungsi terkait di PLN Indonesia Power. Agenda rapat antara lain membahas terkait dengan monitoring profil risiko korporat, evaluasi dokumen manajemen risiko (DMR), pengelolaan risiko proyek EBT, evaluasi implementasi manajemen risiko selama tahun 2023, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris terkait dengan menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya, termasuk juga melakukan *review* secara berkala atas pengelolaan sistem pengelolaan

In correspondence with the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/3/2023 on Human Capital Organs at SOEs dated March 23, 2023, PLN Indonesia Power has reorganized the Committees under the Board of Commissioners by establishing three (3) Board of Commissioners Committees, namely: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and another committee, namely the Investment and Risk Management Committee according to the Decree of the Board of Commissioners No. 002.SK/DK-PLNIP/2022 dated October 17, 2022.

Referring to the Board Manual, the Board of Commissioners has carried out the assessment of the performance of the Board of Commissioners' Committees based on their duties and responsibilities in the Committee Charter and the annually-stipulated Committee Work Program. The evaluation is performed every quarter on the realization and completion of the work plans contained in the Committee's Work Plan and Budget. The evaluation covered the following aspects: contribution to meeting Committee targets; number of Committee's Studies, Analyses, and Recommendations; the activeness in Committee activities; cooperation within the Committee; and the quality of the generated concepts. The committee assessment result helps the Board of Commissioners in considering the re-appointment and/or dismissal of the Audit Committee members for the subsequent term of office.

The Audit Committee has the duties and responsibilities to evaluate the internal control system and internal/external audit implementation as well as to oversee GCG implementation in accordance with the Audit Committee Charter dated December 23, 2022 as an update to the 2019 Audit Committee Charter. During 2023, the Audit Committee held 14 (fourteen) meetings consisting of internal Audit Committee meetings, meetings with the Internal Audit Unit, and meetings with external auditors in accordance with the Audit Committee's work program. The meeting agenda includes reviewing the Company's financial information every month, reviewing the annual audit work program, evaluating policies and internal control system implementation, reviewing the effectiveness of internal and external audits, and monitoring the implementation of GCG.

The Investment and Risk Management Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners with regard to Company planning, investment, and operations as well as implementing risk management in accordance with the Investment and Risk Management Committee Charter dated October 18, 2023 which has adjusted the nomenclatures and added the aspect of investment to the scope of the Committee's duties. Throughout 2023, this Committee held 22 (twenty two) meetings consisting of internal Committee meetings and meetings with the Board of Directors and other related functions as invitees. The meeting agenda involves discussing corporate risk profile monitoring, evaluating risk management documents (DMR), managing NRE project risks, evaluating risk management implementation in 2023, and reviewing other strategic issues under the Board of Commissioners' concerns.

The Nomination and Remuneration Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in determining the criteria for selecting the Commissioner and Director candidates and determining the remuneration system. This includes periodically reviewing the



talenta (*talent management system*) Perusahaan sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 21 Desember 2023. Selama tahun 2023 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat yang terdiri dari rapat internal sebanyak 6 (enam) kali, rapat dengan Direktur MHC yang membidangi SDM sebanyak 9 (sembilan) kali dan rapat dengan BPO (*Business Process Owner*) sebanyak 1 (satu) kali. Agenda rapat antara lain membahas terkait dengan evaluasi sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (*talent classification*) yang dilakukan oleh Direksi, proses nominasi dan usulan remunerasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan KPI Perusahaan di bidang SDM, yaitu mengenai *Human Capital Readiness* (HCR), *Organization Capital Readiness* (OCR) dan *Information Capital Readiness* (ICR).

Company's talent management system in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter dated December 21, 2023. In 2023, the Nomination and Remuneration Committee held 17 (seventeen) meetings consisting of six (6) internal meetings, nine (9) meetings with the Human Capital Management Director, and one (1) meeting with the Business Process Owners (BPO). The meeting agenda discusses the evaluation of talent classification systems and procedures carried out by the Board of Directors, the nomination and remuneration proposals which require approval from the Board of Commissioners, and the Company's KPIs for Human Capital which include Human Capital Readiness (HCR), Organization Capital Readiness (OCR), and Information Capital Readiness (ICR).

Pandangan atas *Whistle Blowing System*

Opinion on the Whistleblowing System

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*/WBS) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.250.K/010/IP/2019 dan Nomor 020.SK/DEKOM-IP/2019 merupakan sarana dan jalur komunikasi bagi pegawai, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan adanya indikasi pelanggaran, terkait dengan ketidakpatuhan hukum maupun penyalahgunaan wewenang. Ruang lingkup pengaduan WBS meliputi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial seperti tidak jujur, curang atau korupsi, gratifikasi yang tidak sesuai dengan kebijakan Perusahaan termasuk suap atau kegiatan lainnya, aktivitas illegal seperti pencurian, kekerasan dan diskriminasi, melanggar kebijakan Perusahaan, tindakan yang berpotensi merugikan dan membahayakan Perusahaan, penyalahgunaan wewenang, dan segala bentuk ketidakwajaran dan pelanggaran etika lainnya yang dapat mencemarkan reputasi PLN Indonesia Power. Seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dihimbau proaktif untuk melaporkan jika terjadi indikasi kecurangan maupun pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan, Kebijakan Perusahaan, Anggaran Dasar, maupun pelanggaran yang memungkinkan melemahnya implementasi SMAP PLN Indonesia Power. Tim Pengelola WBS ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan oknum pelaku pelanggaran yang dilaporkan.

The Whistleblowing System (WBS) stipulated in the Joint Decrees of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 250.K/010/IP/2019 and No. 020.SK/DEKOM-IP/2019 provides the communication facilities and channels for employees, customers, partners, and other stakeholders to report indications of non-compliance with the law or abuse of authority. The WBS receives tip-offs on actions that may result in financial and non-financial damages such as dishonesty; fraud or corruption; gratuities that deviate from the Company policies, including bribery or other similar activities; illegal activities such as theft, violence, and discrimination; violation of Company policies; actions that may potentially damage and endanger the Company; abuse of authority; and all forms of impropriety and other ethical violations that could damage the Company's reputation. All employees and stakeholders are encouraged to proactively report any indications of fraud or violations of the Company's Code of Conduct, Company Policies, Articles of Association, or any violations that may compromise the implementation of the ABMS at PLN Indonesia Power. The WBS Management Team is assigned in stages according to the violator's level.

Peran Dewan Komisaris dalam implementasi WBS dilakukan melalui Komite Audit yang melakukan pembahasan atas efektivitas maupun tindak lanjut laporan WBS selama periode waktu tertentu dalam rapat bersama dengan Satuan Internal Audit. Dalam Kebijakan WBS, Dewan Komisaris menjadi Tim Pengelola WBS apabila yang dilaporkan melibatkan oknum anggota Direksi, dan anggota komite Dewan Komisaris. Sedangkan jika oknum yang dilaporkan melibatkan anggota Dewan Komisaris maka Pemegang Saham yang berwenang menjadi Tim Pengelola WBS tersebut. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan masukan/arahan terkait laporan WBS yang masuk, termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Kategori pelanggaran WBS yang disampaikan selama tahun 2023 terkait dengan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan aset, aktivitas ilegal dan ada juga yang non WBS. Tidak terdapat laporan yang diklasifikasikan sebagai praktik korupsi. Terdapat 10 (sepuluh) pengaduan melalui sarana pelaporan WBS yang masuk, atau turun dibandingkan jumlah pengaduan tahun sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) pengaduan dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti

The Board of Commissioners' function in implementing the WBS is carried out by the Audit Committee through discussion of effectiveness and follow-up on WBS reports during a certain period of time in joint meetings with the Internal Audit Unit. According to the 2019 WBS Policy, the Board of Commissioners will serve as the WBS Management Team if the report involves a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners' Committees. On the other hand, if the report involves a member of the Board of Commissioners, the authorized Shareholder will take over the role of the WBS Management Team. The Board of Commissioners also provides input/direction regarding incoming tip-offs and the necessary follow-up. The tip-offs submitted throughout 2023 were of the topics of abuse of authority, misuse of assets, and illegal activities. There were also some non-relevant reports submitted to the WBS channels. No tip-offs on corrupt practices were received. A total of 10 (ten) tip-offs were received via the WBS channels, and this number is a reduction from the last year's 15 (fifteen) tip-offs, all of which had been followed up.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Changes in Board of Commissioners Composition

Selama tahun 2023 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power. Komposisi anggota Dewan Komisaris PLN Indonesia Power per 31 Desember 2023 terdiri dari 7 (tujuh) orang termasuk Komisaris Utama dengan susunan dan komposisi sebagai berikut:

There were no changes in the Board of Commissioners' composition throughout 2023. As of December 31, 2023, PLN Indonesia Power Board of Commissioners consisted of seven (7) members including the President of Commissioners, as detailed in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Wiluyo Kusdwiharto	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 Circular GMS dated September 21, 2022
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler tanggal 9 Februari 2021 Circular GMS dated February 09, 2021
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler tanggal 6 Juli 2021 Circular GMS dated July 06, 2021
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 Circular GMS dated September 21, 2022
Haryanto W.S.	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 Circular GMS dated September 21, 2022
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler tanggal 18 November 2022 Circular GMS dated September 21, 2022
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 Circular GMS dated September 21, 2022

Setelah tahun buku 2023 telah terjadi perubahan nomenklatur Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Februari 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN berdasarkan Surat Nomor: SR-76/MBU/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Usulan Perubahan Anggota-anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT PLN (Persero) sebagai berikut:

1. Pengalihan nomenklatur Sdr. Wiluyo Kusdwiharto yang diangkat melalui RUPS tanggal 21 September 2022 semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris.
2. Pengalihan nomenklatur Sdr. Iskandar Simorangkir yang diangkat melalui RUPS tanggal 09 Februari 2021, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
3. Pengalihan nomenklatur Sdr. Haryanto WS yang diangkat melalui RUPS tanggal 21 September 2022 semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen.

After the end of the fiscal year 2023, nomenclatural changes took place in the Board of Commissioners as set out by the Decree of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders (GMS) dated February 29, 2024. The Decree has obtained approval from the Minister of SOEs under Letter No. SR-76/MBU/02/2024 dated February 12, 2024 on Proposal for the Changes in the Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) Subholdings as follows:

1. Nomenclatural change for Mr. Wiluyo Kusdwiharto who was appointed by GMS dated September 21, 2022 from previously President Commissioner to Commissioner.
2. Nomenclatural change for Mr. Iskandar Simorangkir who was appointed by GMS dated February 09, 2021, from previously Commissioner to President Commissioner/Independent Commissioner.
3. Nomenclatural change for Mr. Haryanto WS who was appointed by GMS dated September 21, 2022 from previously Commissioner to Independent Commissioner.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

As of the signing of this Annual Report, the Board of Commissioners is composed of the following members:

Nama Name	Jabatan Position
Iskandar Simorangkir	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner
Wiluyo Kusdwiharto	Komisaris Commissioner
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner
Haryanto W.S.	Komisaris Independen Independent Commissioner
Arief Budiman	Komisaris Commissioner
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner

Seluruh anggota Dewan Komisaris PLN Indonesia Power memiliki kompetensi, pengalaman, serta latar belakang pendidikan formal yang saling mendukung dan saling melengkapi. Dengan demikian, melalui keberagaman komposisi tersebut anggota Dewan Komisaris dapat dengan baik melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatan kepada Direksi dalam mengelola Perusahaan.

All members of the Board of Commissioners have competencies, experience, and formal educational backgrounds that support and complement each other. With such a diverse composition, the members of the Board of Commissioners can properly supervise and give advice to the Board of Directors concerning Company management.

Apresiasi
Acknowledgment

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham dan apresiasi yang tinggi kepada Direksi beserta segenap jajaran Manajemen PLN Indonesia Power yang telah menjalankan kepengurusan Perusahaan dengan baik di tahun 2023. Dewan Komisaris optimis bahwa PLN Indonesia Power dapat terus meningkatkan kinerjanya, baik operasi maupun keuangan secara berkelanjutan.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude for the trust given by the shareholders and highest appreciation to the Board of Directors and PLN Indonesia Power Management for their satisfactory performance throughout 2023. The Board of Commissioners is optimistic that PLN Indonesia Power will sustainably improve its performance, both operationally and financially.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan dan kerjasama yang terjalin selama ini kepada seluruh Insan PLN Indonesia Power, pelanggan, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya dengan hasil kinerja positif yang membanggakan. Demikianlah Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ini kami sampaikan. Ke depannya, Dewan Komisaris akan terus berupaya memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kemajuan PLN Indonesia Power. Semoga PLN Indonesia Power dapat terus memberikan manfaat terbaik bagi Pemegang Saham, pelanggan, mitra bisnis, dan segenap pemangku kepentingan saat ini dan juga di masa mendatang.

We also send our gratitude for the trust, support and cooperation from all PLN Indonesia Power personnel, customers, business partners, and other stakeholders that resulted in such a great performance. Last but not least, we would like to share our expectations. In the future, the Board of Commissioners will continue delivering the best in our supervisory and advisory functions to the Board of Directors, for PLN Indonesia Power's advancement. We are praying that PLN Indonesia Power continues to deliver the best benefits for the shareholders, customers, business partners, and all other stakeholders now and in the future.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024

Atas Nama Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power
On behalf of PT PLN Indonesia Power Board of Commissioners

Iskandar Simorangkir
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Indonesia Power

Statement of The Board of Commissioners on Accountability Over PT PLN Indonesia Power Annual Report 2023

Laporan Tahunan 2023 PT Indonesia Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

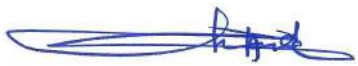
PT PLN Indonesia Power Annual Report 2023 presents the information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2023, and other information relevant to and significant for the stakeholders.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT Indonesia Power menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2023 PT Indonesia Power.

We, the undersigned, the entire Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Indonesia Power Annual Report 2023.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



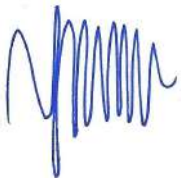
Iskandar Simorangkir
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner



Wiluyo Kusdwiharto
Komisaris
Commissioner



Djoko Siswanto
Komisaris
Commissioner



Muhammad Priharto Dwinugroho
Komisaris
Commissioner



Haryanto W.S
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Arief Budiman
Komisaris
Commissioner



Lukmanul Hakim
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Indonesia Power

Statement of the Board of Directors on Accountability Over PT PLN Indonesia Power Annual Report 2023

Laporan Tahunan 2023 PT PLN Indonesia Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT PLN Indonesia Power Annual Report 2023 presents the information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2023, and other information relevant to and significant for the stakeholders.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi PT PLN Indonesia Power menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2023 PT PLN Indonesia Power.

We, the undersigned, the entire Board of Directors of PT PLN Indonesia Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Indonesia Power Annual Report 2023.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024

Direksi
Board of Directors

Edwin Nugraha Putra
Direktur Utama
President Director

M. Hanafi Nur Rifai
Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Coal Power Plant Operations

Djoko Mulyono
Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations

Bernadus Sudarmanta
Direktur Pengembangan dan Niaga
Director of Development and Commerce

Endang Astharanti
Direktur Keuangan
Director of Finance

Wisnoe Satrijono
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Profil Perusahaan

Company Profile





Identitas Perusahaan
Company Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT PLN Indonesia Power

Nama Singkatan
Surname

PLN Indonesia Power

Status Perusahaan
Company Status

Subholding PT PLN (Persero)

Bidang Usaha
Line of Business

1. Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik, antara lain jasa investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan; konstruksi bangunan elektrikal dan lain-lain.
3. Melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

1. Electricity Generation;
2. Electricity supply-related businesses, including power plant investigation, design, operation & maintenance, and equipment rental; electrical building construction, etc.
3. Conducting trades and/or supporting business activities for optimizing resources at hand, including through assignments to Subsidiaries.

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

3 Oktober 1995 October 3, 1995

Kepemilikan Saham
Shareholding

- PT PLN (Persero) 99,99%
- Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) 0,01%

- PT PLN (Persero) 99,99%
- Foundation for Education and Welfare (YPK) PT PLN (Persero) 0,01%

Jumlah Pegawai
Employee Base

5.452 Pegawai Employees

Modal Disetor Penuh dan Ditempatkan
Issued and Paid-up Capital

Rp. 178.582.816.800.000

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp. 714.331.267.200.000

Kantor Pusat
Head Office

Kantor Pusat PT PLN Indonesia Power
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Jakarta Selatan, Kode Pos 12950
(62-21) 526 7666 (Hunting)
(62-21) 525 1923, 525 2623

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis for Establishment

1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) No. 15 tanggal 3 Oktober 1995 dibuat dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 1995 nomor: Q-12496 HT.01.01 TH.95.
2. Akta Perubahan Nama Perusahaan menjadi PT Indonesia Power tanggal 3 Agustus 2000, dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH dengan Akta Nomor 8 tanggal 3 Agustus 2000
3. Berdasarkan Permohonan Notaris Shahreza Annaz S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 16 tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power tanggal 17 April 2023.

1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) No. 15 dated October 03, 1995 made before and issued by Notary Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Based on the Resolution of the Minister of Justice dated October 03, 1995 No. Q-12496 HT.01.01 TH.95.
2. Deed of Change of Name to PT Indonesia Power dated August 03, 2000, made before Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, SH under Deed No. 8 dated August 03, 2000
3. In accordance with the Application of Notary Shahreza Annaz S.H., M.KN. according to the copy of Deed No. 16 dated April 13, 2023 on Amendments to the Articles of Association of PT PLN Indonesia Power dated April 17, 2023.



Wilayah Kerja Operasional
Operational Work Areas

Unit Bisnis Pembangkitan Generation Bussiness Unit

1. UBP GBU Suralaya (SLA);
2. UBP GBU Pangkalan Susu (PNS);
3. UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu (JPR);
4. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala (ADP);
5. UBP GBU Banten 1 Suralaya (BSLA);
6. UBP GBU Banten 2 Labuan (BLB);
7. UBP GBU Banten 3 Lontar (BL I);
8. UBP GBU Labuhan Angin (LBA);
9. UBP GBU Barru (BRU);
10. UBP GBU Sintang (STG);
11. UBP GBU Sanggau (SGU)
12. UBP GBU Berau (BEU);
13. UBP GBU Asam-Asam (ASM);
14. UBP GBU Teluk Sirih (TIR);
15. UBP GBU Ombilin (OMB);
16. UBP GBU Singkawang (SKW);
17. UBP GBU Kepulauan Riau (KRI);
18. UBP GBU Priok (PRO);
19. UBP GBU Semarang (SMG);
20. UBP GBU Grati (GRT);
21. UBP GBU Cilegon (CLG);
22. UBP GBU Saguling (SGL);
23. UBP GBU Mrica (MRC);
24. UBP GBU Bali (BU);
25. UBP GBU Kamojang (KMJ);
26. UBP GBU Mahakam (MHK);
27. UBP GBU Keramasan (KRM);
28. UBP GBU Barito (BTO};
29. UBP GBU Tello (TLO);
30. UBP GBU Bengkulu (BKL);
31. UBP GBU Jambi (JMB);
32. UBP GBU Bukittinggi (BKT);

Unit Jasa O&M O&M Services Unit

1. UBP GBU Holtekamp
2. UBP GBU Jeranjang
3. UP GU Ulumbu (Sub Unit UBP GBU Kamojang)

Anak Perusahaan
Subsidiaries

1. PT Cogindo DayaBersama (99,9%) - Saat ini bernama PT PLN Indonesia Power Services, bergerak di bidang: energi ketenagalistrikan, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.
2. PT Artha Daya Coalindo (80%), bergerak di bidang: perdagangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara.
3. PT Indo Ridlatama Power (90%), bergerak di bidang: pembangkit tenaga listrik.
4. PLN IP Renewables (PLN IPRen) 99,9%), bergerak di bidang ketenagalistrikan dan energi, dan *participating interest*.

1. PT Cogindo DayaBersama (99.9%), engaging in: electricity energy, power plant operations & maintenance, and co-generation.
2. PT Artha Daya Coalindo (80%), engaging in: coal trade, transport, loading/unloading, marketing, and agency.
3. PT Indo Ridlatama Power (90%), engaging in: power generation.
4. PLN IP Renewables (PLN IPRen) (99.9%), engaging in: electricity & energy and participating interest

Website

www.plnindonesiapower.co.id

Email

kontak-ip@indonesiapower.co.id

Social Media

PLN Indonesia Power
@plnindonesiapower
PLN Indonesia Power
pt.plnindonesiapower
@pln_ip

Riwayat Singkat dan *Rebranding* Perusahaan
Company Timeline and Rebranding

1995
Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB I).
Establishment of PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB I).

1996 2000
- Perubahan Nama PT PJB I menjadi Indonesia Power (3 Agustus 2000);
- Pendirian Anak Perusahaan:
  - PT Artha Daya Coalindo (ADC) (1997);
  - PT Cogindo Dayabersama (CDB) (1998);
  - PT Rekadaya Elektrika (RE) (2000).
- Change of name from PT PJB I to Indonesia Power (August 3, 2000);
- Establishment of Subsidiaries:
  - PT Artha Daya Coalindo (ADC) (1997);
  - PT Cogindo DayaBersama (CDB) (1998);
  - PT Rekadaya Elektrika (RE) (2000).

2001 2005
Pendirian Anak Perusahaan PT Indo Pusaka Berau (IPB) (2005).
Establishment of Subsidiary PT Indo Pusaka Berau (IPB) (2005)

2006 2010
- Pendirian Anak Perusahaan PT Indo Ridlatama Power (IRP) (2007);
- Pengembangan usaha di bidang penyediaan Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) (2009);
- Pembentukan UJP (Unit Jasa Pembangkitan) Banten 2 Labuan (2010).
- Establishment of Subsidiary PT Indo Ridlatama Power (IRP) (2007);
- Business development in Operations and Maintenance (O&M) Service provision (2009);
- Establishment of Power Generation Service Unit (UJP) Banten 2 Labuan (2010).

2018
- *Launching* IP Academy sebagai pusat pembelajaran Kompetensi Inti Perusahaan;
- Beroperasinya jasa O&M PLTGU Priok Blok 3 dan 4;
- COD PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW Unit 1 dan 2.
- Launching IP Academy as a learning center for the Company's Core Competencies;
- Operation of O&M CCPP Priok Block 3 and 4 services;
- COD SPP Muara Jawa 2x27.5 MW Unit 1 and 2.

2019
- Pendirian Anak Perusahaan yaitu PT Indo Tenaga Hijau (ITH) (2019);
- Pendirian Anak Perusahaan (Afiliasi dari PIT), yaitu PT Suralaya Indo Tenaga (2019);
- 2 Proyek COD (*Commercial Operation Date*) yaitu PLTA Rajamandala 47 MW dan PLTD Senayan 101 MW;
- Beroperasinya proyek MPP Biak 2 10 MW, MPP Merauke 2 20 MW, MPP Sorong 30 MW & MPP Sorong 20 MW.
- Establishment of Subsidiary, PT Indo Tenaga Hijau (ITH) (2019);
- Establishment of Subsidiary (Affiliate of PIT), PT Suralaya Indo Tenaga (2019);
- 2 Commercial Operation Dates (COD) of PLTA Rajamandala 47 MW and PLTD Senayan 101 MW projects;
- Operation of MPP Biak 2 10 MW, MPP Merauke 2 20 MW, MPP Sorong 30 MW, and MPP Sorong 20 MW.

2020
- Beroperasinya proyek MPP Nabire 2 10 MW dan MPP Manokwari 2 20 MW;
- COD PLTGU *Add On* Grati 183 MW;
- Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan .
- Operation of MPP Nabire 2 10 MW and MPP Manokwari 2 20 MW;
- COD of PLTGU Grati Add-on 183 MW;
- ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification.

2021
- Sukses mendukung PON XX PAPUA 2021 dengan *Mobile Power Plant* (MPP) Papua 120 MW dan PLTU Holtekamp 24 MW;
- COD PLTU Kalbar 1 2x100 MW COD PLTM Gunung Wugul 3 MW di Jawa Tengah.
- Successfully supporting PON XX PAPUA 2021 with Mobile Power Plant (MPP) Papua 120 MW and Holtekamp SPP 24 MW;
- COD of Kalbar SPP 1 2x100 MW COD of MHPP Gunung Wugul 3 MW in Central Java.

2022
- Menjadi Perusahaan pembangkitan terbesar se-Asia Tenggara dengan Total Kapasitas 22,9 GW;
- Pengendalian operasional pembangkit listrik termal, fokus pada keunggulan operasional dan optimalisasi portofolio untuk penyediaan listrik yang resilien dan terjangkau.
- Becoming Southeast Asia's largest power company at a total capacity of 22.9 GW
- Controlling thermal power plant operations, focusing on operational excellence and portfolio optimization for providing resilient and affordable electricity



2011 2013

- Transformasi menuju *Operation and Maintenance (O&M) Excellence;*
- Pendirian Anak Perusahaan PT Perta Daya Gas (PDG) (2012);
- Pendirian Anak Perusahaan PT Putra Indotenaga (PIT)(2013);
- Pendirian Anak Perusahaan (Afiliasi dari PIT), yaitu PT Rajamandala Electric Power (REP)(2012);
- Penerapan *Indonesia Power-Integrated Management System* (InPower IMS), sinergi standar: ISO; 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28001, SMP, SMK3, PAS 55 dan Kriteria Baldrige (2013).
- Transformation towards Operations and Maintenance (O&M) Excellence;
- Establishment of Subsidiary PT Perta Daya Gas (PDG) (2012);
- Establishment of Subsidiary PT Putra Indotenaga (2013);
- Establishment of Subsidiary (Affiliate of PIT), PT Rajamandala Electric Power (REP)(2012)
- Implementation of Indonesia Power-Integrated Management System (InPower IMS), standards for synergy: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28001, SMP, SMK3, PAS 55, and Baldrige criteria (2013).

2014

- Pembentukan UJP Pangkalan Susu;
- Pembentukan UPJP (Unit Pembangkitan dan Jasa Pemeliharaan):
  - UPJP Priok;
  - UPJP Kamojang;
  - UPJP Bali.
- Establishment of UJP Pangkalan Susu
- Establishment of Power Generation and O&M Service Units (UPJP):
  - UPJP Priok;
  - UPJP Kamojang;
  - UPJP Bali.

2015

- Pengoperasian PLTDG Pesanggaran 200 MW, Bal;
- Peletakan batu pertama pembangunan PLTM Lambur;
- Sertifikasi ISO 55001 dan implementasi ISO 26000.
- Operation of PLTDG Pesanggaran, Bali 200 MW;
- Groundbreaking for MHPP Lambur construction;
- ISO 55001 certification and ISO 26000 implementation.

2016

- Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan PT GCL Indo Tenaga;
- Penambahan UJP PLTGU Cilegon ke Indonesia Power;
- Sertifikasi ISO 50001.
- Establishment of Affiliate of Subsidiary PT GCL Indo Tenaga
- Addition of UJP CCPP Cilegon to Indonesia Power
- ISO 50001 certification

2017

- Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan yaitu PT Indo Raya Tenaga (IRT) dan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC);
- Sertifikasi ISO 27001 dan ISO 22301;
- Pencatatan Perdana sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) Danareksa Indonesia Power PLN1;
- *Groundbreaking* PLTU IPP Jawa 9 - 10 2.000 MW.
- Establishment of Affiliates of Subsidiaries, i.e. PT Indo Raya Tenaga (IRT) and PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC);
- ISO 27001 and ISO 22301 certifications;
- First listing of Asset-Backed Security of Indonesia Power Mutual Funds PLN1 (EBA Danareksa Indonesia Power PLN1);
- Groundbreaking of SPP IPP Jawa 9-10 2,000 MW.

2023

- **Peresmian *Legal End State Holding Subholding* PT PLN (Persero), perubahan identitas PT Indonesia Power menjadi PT PLN Indonesia Power pada 1 Januari 2023**
- **Perubahan nama PT Putra Indotenaga (PIT) menjadi PLN IP Renewables (IPRen) (2023)**
- **Perubahan nama PT Indo Tenaga Hijau (ITH) menjadi PLN IP Geothermal (IGeo) (2023)**
- ***Groundbreaking* pabrik Sel Surya dan Panel Surya berkapasitas 1 GWp**
- **Peresmian 21 *Green Hydrogen Plant* (GHP) di pembangkit Listrik tersebar di seluruh Indonesia**
- **COD PLTG Pesanggaran Unit 6 eks relokasi Grati (100 MW) tanggal 18 April 2023**
- **PLTM Cileunca (2x0,5 MW) tanggal 26 Juni 2023**
- Officiation of Legal End State Holding-Subholding of PT PLN (Persero), renaming of PT Indonesia Power into PT PLN Indonesia Power on January 01, 2023
- Renaming of PT Putra Indotenaga (PIT) into PLN IP Renewables (IPRen) (2023)
- Renaming of PT Indo Tenaga Hijau (ITH) into PLN IP Geothermal (IGeo) (2023)
- Groundbreaking of solar cell and solar panel factory at the capacity of 1 GWp
- Inauguration of 21 Green Hydrogen Plants (GHP) at power plants across Indonesia
- COD of the Pesanggaran Gas Power Plant Unit 6, formerly relocated from Grati (100), on April 18, 2023
- COD of the Cileunca Micro Hydro Power Plant 2x0.5 MW, on June 26, 2023

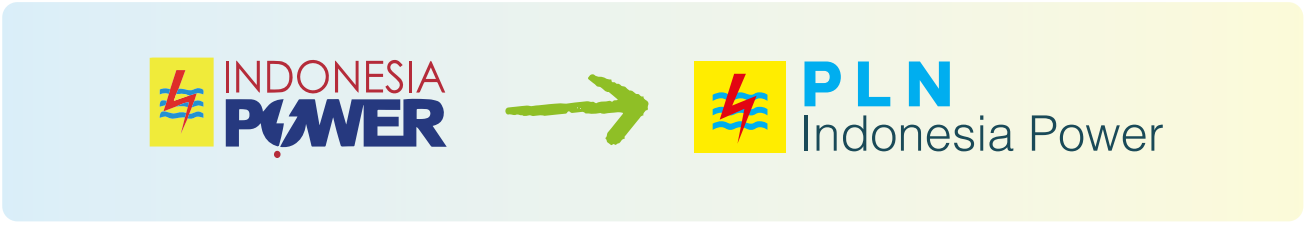


PT PLN Indonesia Power merupakan salah satu Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang sebelumnya bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I (PLN PJB I) dan didirikan pada tanggal 03 Oktober 1995 sebagai langkah untuk memulai kemandirian bisnis sektor pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Pada tanggal 03 Oktober 2000, nama PLN PJB I secara resmi berubah menjadi PT Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan Perusahaan yang menjadi Perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni. Pada tahun 2012 Indonesia Power melebarkan sayap ke seluruh Indonesia dengan mengembangkan portofolio melalui pengembangan Usaha Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) di luar sistem Jawa dan Bali serta pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan.

PT PLN Indonesia Power is a Subsidiary of PT PLN (Persero). It was established on October 03, 1995 and previously named PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I (PLN PJB I) as an endeavor to seek business independence in the power generation sector in Indonesia. On October 03, 2000, PLN PJB I officially changed into PT Indonesia Power to affirm its goal to become an independent power company with pure business orientation. In 2012, Indonesia Power expanded its influence throughout Indonesia by growing its portfolio, developing the Operations and Maintenance (O&M) Service business outside the Java-Bali system as well as constructing environmentally-friendly new and renewable energy power plants.

Tahun 2022 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan PT Indonesia Power, yaitu dilaksanakannya pembentukan *Holding Subholding* di lingkungan PLN Group, dimana PT PLN (Persero) menjadi *Holding* dan PT Indonesia Power menjadi *Subholding* Pembangkitan. Seiring dengan hal tersebut, sesuai dengan keputusan Pemegang Saham, PT Indonesia Power bertransformasi menjadi PT PLN Indonesia Power sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 21 September 2022. Melalui brand baru sebagai salah satu *Subholding* PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power yang selanjutnya disebut PLN Indonesia Power bersiap menjadi perusahaan energi ramah lingkungan yang berkelanjutan.

2022 saw an important event for PT Indonesia Power, where the establishment of Holding-Subholding in PLN Group turned PT PLN (Persero) into the Holding and PT Indonesia Power into a Power Generation Subholding. In line with the event, according to the Shareholder Resolutions, PT Indonesia Power changed into PT PLN Indonesia Power as contained in the Shareholder Resolutions dated September 21, 2022. The rebranding as a subholding of PT PLN (Persero) has prepared PT PLN Indonesia Power, afterwards called as PLN Indonesia Power, to become a sustainable and green power company.



Selain perubahan nama, langkah *rebranding* PLN Indonesia Power juga diikuti dengan perubahan logo, yang menegaskan logo PLN sebagai *Holding Company*. Setelah ditetapkan menjadi *Subholding* Pembangkitan, PLN Indonesia Power akan mengelola aset pembangkit listrik setelah alih aset WAVE 1 menjadi sebesar 21,08 GW tahun 2023, WAVE 2 menjadi sebesar 22,6 GW diasumsikan pada tahun 2025, WAVE 3 menjadi sebesar 22,9 GW diasumsikan pada tahun 2030, dan bersiap untuk menjadi perusahaan pembangkit terbesar se-Asia Tenggara.

Aside from the name change, PLN Indonesia Power's rebranding also includes the change of logo, which affirms PLN's status as the Holding Company. Following its establishment as a Power Generation Subholding, PLN Indonesia Power will manage power generation assets as follows: the asset transfer WAVE 1 increases the capacity to 21.08 GW by 2023, WAVE 2 increases the capacity to 22.6 GW by 2025 (assumption), and WAVE 2 increases the capacity to 22.9 GW (assumption). Therefore, PLN Indonesia Power must prepare to become Southeast Asia's power company.

Pada tahun 2023 total daya terpasang pembangkit yang dimiliki dan dikelola PLN Indonesia Power meningkat 10.905,41 MW menjadi 19.936,82 MW, yang sebelumnya 9.031,41 MW. Hal ini karena dengan telah dilakukannya restrukturisasi perusahaan dimana PLN Indonesia Power sebagai *subholding* PLN dan mendapat mandat untuk membawahi UPK dan UPDK di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

In 2023 the total installed capacity of power plants owned and managed by PLN Indonesia Power increased by 10,905.41 MW to 19,936.82 MW, from previously 9,031.41 MW. This was a result of the restructuring where, as a PLN Subholding, PLN Indonesia Power received the mandate to head the Power Generation Implementing Unit (GIU) and Power Generation Control Implementing Unit (GCIU) in Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi.

Selain mengelola Unit Pembangkit, PLN Indonesia Power juga memiliki 4 (empat) Anak Perusahaan, 1 (satu) Perusahaan Patungan, 2 (dua) Perusahaan Asosiasi serta 6 (enam) Perusahaan Afiliasi dari Anak Perusahaan, yang keberadaannya untuk mendukung strategi dan proses bisnis PLN Indonesia Power. Dengan mengamplifikasi semangat PLN untuk menjelma menjadi perusahaan energi masa depan menuju *The New PLN 4.0 Unleashing Energy and Beyond*, PLN Indonesia Power terus membangun keunggulan operasional dan optimalisasi portofolio bisnis Perusahaan.

In addition to managing Power Generation Units, PLN Indonesia Power also owns four (4) Subsidiaries, one (1) Joint Venture, two (2) Associates, and six (6) Affiliates of Subsidiaries to support the Company's strategies and business processes. By amplifying PLN's spirit to become the future power company towards "The New PLN 4.0 Unleashing Energy and Beyond", PLN Indonesia Power continues building operational excellence and optimizing its business portfolio.



Maksud dan Tujuan
Purpose and Objectives

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud, tujuan serta kegiatan usaha PLN Indonesia Power adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam ruang lingkup bisnis Perusahaan. Selain itu, PLN Indonesia Power dalam melakukan kegiatan tersebut di atas juga selalu berusaha untuk memenuhi harapan *stakeholder*.

According to the Company's Articles of Association, the purpose, objectives, and business activities of PLN Indonesia Power are to perform electricity business based on sound industrial and commercial principles while implementing limited liability company principles. To meet the purpose and objectives, the Company may perform the business activities within its line of business. Besides, in performing the activities, PLN Indonesia Power always seeks to meet stakeholders' expectations.

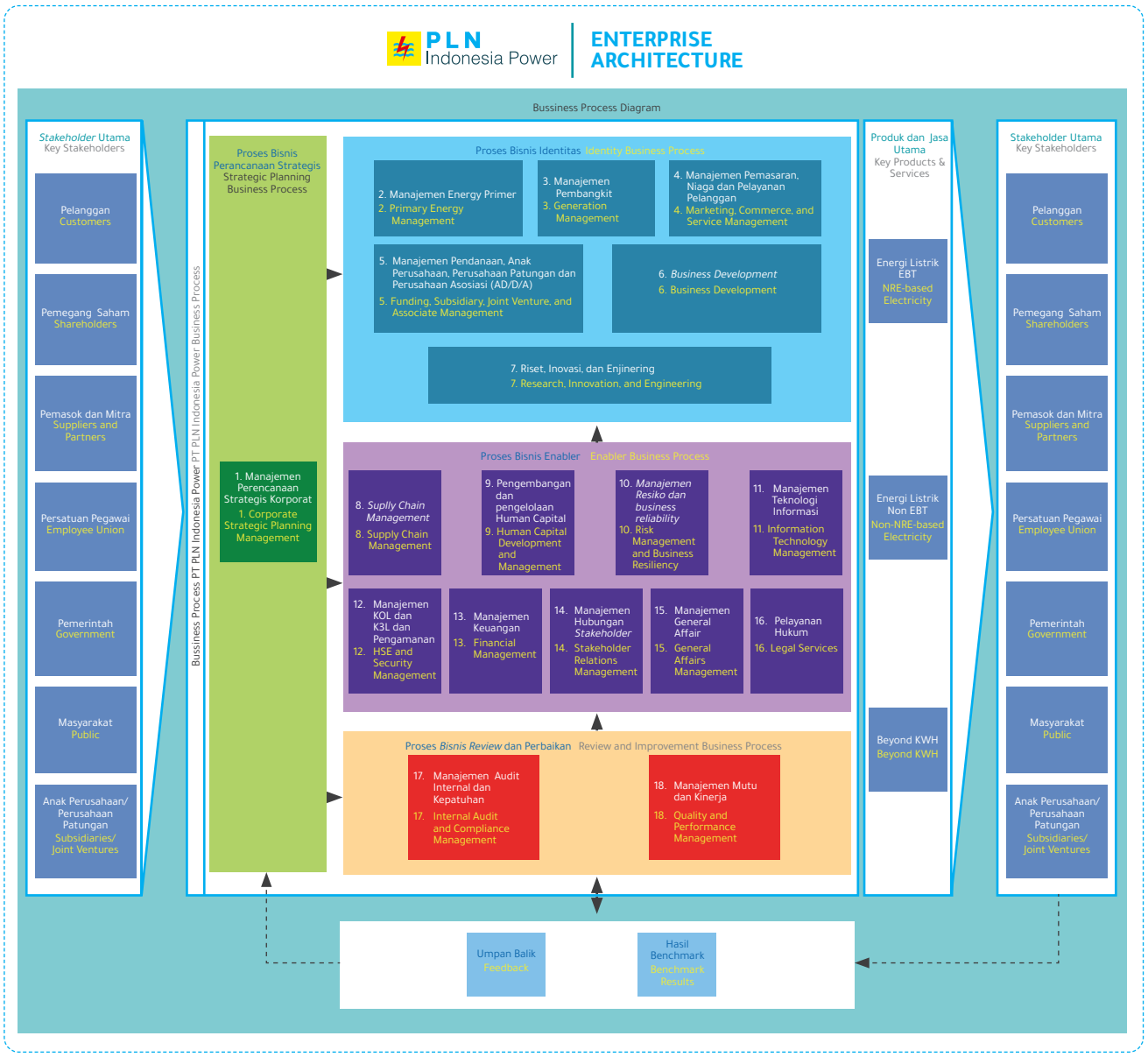
Stakeholder PLN Indonesia Power dan harapan untuk masing-masing *stakeholder* tercantum sebagaimana tabel berikut:

PLN Indonesia Power's stakeholders and their expectations are elaborated in the following table:

Kelompok *Stakeholders* Lainnya **Other stakeholder groups**	**Persyaratan dan Harapan atas Produk Utama, Dukungan Layanan dan Operasi** **Requirements and Expectations of Main Products, Service Supports, and Operations**	
Pemegang Saham (*Stakeholders* 1/S1) Shareholder (Stakeholder 1/S1)	• Pemenuhan Kontrak Manajemen • Ketepatan penyelesaian proyek • Kesehatan Perusahaan	• Management Contract Compliance • Project Completion Timeliness • Company Soundness
Pelanggan Customer	***Grid*** • Keandalan • Kesiapan pembangkit • Ketepatan jadwal pemeliharaan • Harga yang ekonomis ***Embedded*** • Harga yang ekonomis • Kontinuitas pasokan **Jasa O&M** • Tahapan *Supporting*: Pemenuhan *deployment* sebagai persyaratan dalam menjalankan O&M pembangkit • Tahapan *Performance*: Pemenuhan kinerja pembangkit sesuai kontrak (keandalan dan ketepatan waktu) *) Untuk PLN Wilayah saat ini dalam tahapan *supporting*.	***Grid*** • Reliability • Power Plant Readiness • Maintenance Schedule Timeliness • Economical Price ***Embedded*** • Economical Price • Supply Continuity **Jasa O&M** • Supporting Phase: Meeting deployment as a condition for conducting power plant O&Mt • Performance Phase: Meeting contractual requirements regarding generator performance (reliability and timeliness) *) PLN Wilayah is currently in the Supporting phase.
Pegawai Employee	Peningkatan kepuasan dan *engagement* pegawai.	Increased employee satisfaction and engagement
Pemasok Supplier	Transparansi dan fairness, kelangsungan bisnis jangka panjang.	Transparency and fairness, long-term business continuity
Pemda Regional Government	Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan dan perundangan Pemerintah.	Adherence or compliance to Government's regulations and laws
Komunitas Penduduk Sekitar Pembangkit • Masyarakat di Wilayah Binaan, • LSM Lokal & Internasional, • Tokoh Masyarakat, • Institusi/Lembaga Profesi, • Media Local Community surrounding the Power Plants • Community in the Foster Areas • Local and International NGOs • Public Figures • Professional Association/Agency • Media	• Dukungan perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan) • Bebas dari pencemaran lingkungan • Informasi mengenai proses pembangkitan listrik serta dampaknya terhadap lingkungan, • Informasi mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan. • Kebijakan peraturan dan prosedur yang berlaku • Kerjasama antar institusi • *Knowledge sharing* antar institusi	• Company's support for community empowerment (economy, education, health, and security) • Free from environmental pollution • Information on power generation process and its impact on environment • Information on good corporate governance and corporate social responsibility • Applicable policies and procedures • Cooperation among agencies • Knowledge-sharing among agencies

Skema Proses Bisnis Kantor Pusat PLN Indonesia Power

Business Process Scheme of PLN Indonesia Power Head Office



Visi, Misi, Motto dan Kompetensi Inti Perusahaan
Vision, Mission, Motto, and Core Competencies

Sejalan dengan transformasi organisasi yang dilakukan di PLN *Group*, PLN Indonesia Power sebagai *subholding* pembangkitan juga turut mendukung dan adaptif dengan perubahan tersebut. Salah satu hal yang paling mendasar adalah perubahan Visi, Misi dan Kompetensi Inti Perusahaan. Pada tahun 2022 dan 2023, PLN Indonesia Power melakukan peninjauan ulang terhadap penjelasan dan ukuran pencapaian Visi Perusahaan, yang kemudian disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2024 dalam bentuk Peraturan Direksi Nomor 0005.P/DIR/2024 tentang Visi, Misi, Motto dan Kompetensi Inti PT PLN Indonesia Power tanggal 15 Februari 2024.

Alongside the transformation within PLN Group, PLN Indonesia Power as the Power Generation Subholding also supports and adapts to the changes. The changes in the Company's Vision, Mission, and Core Competencies are particularly fundamental. In 2022 and 2023, PLN Indonesia Power performed a review of the elaboration and magnitude of the Company's Vision's achievement, which was later approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2024 under the Board of Directors' Regulation No. 0005.P/DIR/2024 on Vision, Mission, Motto, and Core Competencies of PT PLN Indonesia Power dated February 15, 2024.

Visi
Vision



Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka dan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara Maupun Kawasan Lainnya

To be a Leading and Sustainable Power Company in Southeast Asia and Beyond

Kata Kunci Keyword	Penjelasan Description	Ukuran Magnitude
Power Company	Merupakan Perusahaan penyedia solusi energi, baik di bidang ketenagalistrikan, maupun bisnis turunan dari ketenagalistrikan. A Company providing energy solution, both in electricity sector and in derivative electricity business.	Tidak diperlukan penjelasan No explanation required
Leading in Southeast Asia and Beyond	Diakui sebagai Perusahaan yang memiliki kinerja operasional pembangkit yang terkemuka di Asia Tenggara dan wilayah lainnya. Acknowledged as a Company with leading power generation operation performance in Southeast Asia and other regions.	*Performance Excellence:* 1. Top 10% NERC operation performance (EAF >90%, EFOR <3%); 2. BPP <1,200 IDR/kWh. *Performance Excellence:* 1. Top 10% NERC operation performance (EAF >90%, EFOR <3%); 2. Production Cost <Rp1,200/kWh.
Sustainable in Southeast Asia and Beyond	Menjadi Perusahaan yang tumbuh berkelanjutan melalui: 1. Menjaga keberlanjutan bisnis pembangkit yang sudah ada saat ini dan mengembangkan pembangkit baru yang rendah emisi. 2. Mengembangkan bisnis inovatif baru, tidak hanya di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara, tapi juga di kawasan strategis lainnya. To be a Company with sustainable growth by: 1. Maintaining business sustainability of existing power plants and developing new, low emission power plants. 2. Innovating new businesses, not only in Indonesia and Southeast Asia, but also in other strategic regions.	*Sustainable Power Generation:* 1. *~36 $MtCO_2$ emission reduction;* 2. *0,7 $MtCO_2$/TWh emission intensity;* 3. *18% RE energy mix;* 4. *Medium ESG ratings.* *Global Innovative Growth:* 1. *~30Tn EBITDA;* 2. *~1,3Tn IDR beyond kWh revenue;* 3. *Total 10 projects beyond Indonesia.*



Misi
Mission



Menyediakan Solusi Energi Hijau, Inovatif dan Terjangkau yang Melampaui Ekspektasi Pelanggan

Delivering Green, Innovative and Affordable Energy Solutions, that Goes Beyond Customer Expectation

Kata Kunci Keyword	Penjelasan Description
Green Energy Solutions	Perusahaan menyediakan listrik yang ramah lingkungan, serta fokus pada optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan, sebagai bagian dari SDGs dalam penurunan emisi GRK yang selaras dengan program transisi energi menuju NZE tahun 2060. The Company provides environmentally friendly electricity and focuses on optimizing the use of new and renewable energy, as part of the SDGs in reducing GHG emissions which is in line with the energy transition program towards NZE by 2060.
Innovative Energy Solutions	Perusahaan menyediakan produk solusi energi yang inovatif, dengan memanfaatkan peluang-peluang baru, serta mengikuti tren kebutuhan dan perilaku pelanggan. The Company provides innovative energy solutions by taking advantage of new opportunities and following trends in customer needs and behavior.
Affordable Energy Solutions	Perusahaan menyediakan produk solusi energi yang terjangkau oleh pelanggan. The Company provides affordable energy solutions for the customers.
Beyond Customer Expectation	Perusahaan menyediakan produk solusi energi dengan kualitas produk dan layanan yang melampaui harapan pelanggan. The Company provides energy solutions with quality and services that exceed customer expectation.



Motto Perusahaan
Motto Perusahaan

#EnergyOfThings



Definisi untuk eksternal Perusahaan
Definition for external parties

Membangun kesadaran kepada Pelanggan dan *Stakeholder* bahwa setiap aktivitas kehidupan manusia membutuhkan energi dan PLN Indonesia Power memiliki keunggulan dalam penyediaan solusi energi, baik di bisnis kWh maupun bisnis *beyond* kWh.
Building Customers and Stakeholders' awareness that every activity in human lives requires energy and that PLN Indonesia Power is excellent in providing energy solutions, both in kWh and beyond kWh businesses.

Definisi untuk internal Perusahaan
Definition for internal parties

Membangun rasa optimisme di dalam setiap insan PT PLN Indonesia Power untuk dapat selalu menyediakan solusi energi terbaik bagi pelanggan, baik di bidang penyediaan tenaga listrik (kWh) maupun *Beyond* kWh.
Building optimism in every member of PLN Indonesia Power personnel to always provide the best energy solutions for the customers, both in kWh and beyond kWh businesses.

Kompetensi Inti
Core Competence

- Pengembangan Bisnis Solusi Energi yang *End-to-End*
  End-to-End Energy Solutions Business Development
- Enjiniring dan Pengembangan Proyek
  Engineering & Project Development
- *Operation and Maintenance Excellence* Berbasis Digital
  Digital Enabled Operations and Maintenance Excellence
- Solusi Transisi Energi dan Operasi Rendah Karbon
  Energy Transition and Low Carbon Operations Solution





Tata Nilai dan Budaya
Company Values and Culture

Sejalan dengan salah satu prioritas Presiden RI tahun 2019-2021 yaitu Pengembangan SDM menuju era teknologi & informasi, BUMN telah mencanangkan *Human Capital Transformation* yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global. Dalam *Human Capital Transformation* terjadi perubahan peran BUMN yang sebelumnya *active share holder* menjadi *strategic architect*. Salah satu *architecture Human Capital* adalah penetapan AKHLAK sebagai *Core Value* BUMN pada 1 Juli 2020, bersamaan dengan acara peluncuran logo BUMN. BUMN perlu sebuah fondasi yang kuat, sebuah nilai untuk menjadi panduan BUMN untuk bergerak, termasuk PLN.

To keep up with one of the priorities set by the President of the Republic Indonesia for 2019-2021, i.e. Human Capital Development towards technology and information era, the Ministry of SOEs (BUMN) has announced the Human Capital Transformation that aims at increasing State-Owned Enterprises' (SOEs) competitiveness to be global players. In Human Capital Transformation, there is a shift in SOE roles. Previously positioning SOEs as active shareholders, the value now recognizes SOEs as strategic architect. The Human Capital architecture among others established AKHLAK as BUMN Core Value on July 01, 2020, in line with the launching of BUMN logo. BUMN needs a strong foundation, a value that guides BUMN, including PLN, to move forward.

Skema Tata Nilai AKHLAK
Scheme of AKHLAK Value



AKHLAK sebagai *Core Values* PLN *Group* telah dicanangkan pada tanggal 28 September 2020, bersamaan dengan *Performance Business Review*. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN No 7/MBU/07/2020 tentang Nilai - nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, setiap BUMN wajib menerapkan Core Values menjadi Budaya Perusahaan dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di Lingkungan BUMN, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi. Penerapan *Core Values* diimplementasikan secara utuh tanpa pengurangan atau penambahan *Core Values* lainnya pada seluruh *group* BUMN.

AKHLAK as PLN Group's Core Values was established on September 28, 2020 adjacent to the Performance Business Review. As set out in Circular of the Minister of SOEs No. 7/MBU/07/2020 on State-Owned Enterprise Human Resource Core Values, every SOE has a mandatory duty to adopt the Core Values into Corporate Culture and use them as the foundation to build human capital character within SOEs, their Subsidiaries, and Consolidated Affiliates. These Core Values must be fully adopted without any addition or omission in every SOE group.

Tata nilai merupakan salah satu bagian dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan salah satu dari *blue print* Perusahaan, RJPP dan *blue print* Perusahaan sebagaimana diatur dalam SKB Direksi No. 43.K/020/IP/2018 dan Dewan Komisaris No. 003.SK/DEKOM-IP/2018 tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT PLN Indonesia Power.

Values are an integral part of the Company Long-Term Plan as well as the Company's blueprint. Company Long-term Plan and blueprint are regulated in the Joint Decree of the Board of Directors No. 43.K/020/IP/2018 and the Board of Commissioners No. 003.SK/DEKOM-IP/2018 on the Board Manual of PT PLN Indonesia Power.

Pengukuhan tata nilai AKHLAK di PLN Indonesia Power berdasarkan Perdir PT PLN (Persero) Nomor 0073.P/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan dan SK Tata Nilai PT Indonesia Power No 22.K/010/IP/2021.

AKHLAK Values in PLN Indonesia Power is established under the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0073.P/DIR/2020 on Corporate Culture and Decree of PT Indonesia Power No. 22.K/010/IP/2021 on Values.



Tabel Definisi, Kata Kunci dan Panduan Perilaku Tata Nilai AKHLAK

Table of Definitions, Keywords, and Behavior Guidelines of AKHLAK Values

	6 Tata Nilai 6 Values	Definisi Definition	Kata Kunci Keyword	Panduan Perilaku Behavior Guideline
A	**Amanah** Trustworthy	Memegang teguh Kepercayaan yang diberikan Upholding mandated trust	Integritas, Tulus, Konsisten (*integrity, honest & consistent*), Dapat dipercaya Having Integrity, Honest, Consistent, and Trustworthy	1.Memenuhi janji dan Komitmen 2.Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan 3.Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika 1. Fulfilling promises and commitment 2. Responsible for duties, decisions, and actions taken 3. Adhering to moral and ethical values
K	**Kompeten** Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuously learning and developing capabilities	Kinerja Terbaik, Sukses, Keberhasilan, *Learning agility*, Ahli di bidangnya Best Performance, Success, Learning Agility, Expert in its field	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain Belajar 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 1. Improving competence to answer to ever-changing challenges 2. Helping others to learn 3. Finishing duties with the best quality
H	**Harmonis** Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Care for each other and respecting diversity	Peduli (*caring*), Perbedaan (*diversity*) Caring, Diversity	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif 1. Respecting others regardless of their background 2. Helpful to others 3. Building favorable work environment
L	**Loyal**	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara Dedicated and prioritizing nation's interests	Dedikasi (rela berkorban), Kontribusi Commitment, Dedication, Contribution	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika 1. Maintaining the honor of fellow employees, leaders, SOEs, and Country 2. Willing to sacrifice for the greater good 3. Obeying leaders as long as in compliance with the laws and ethics
A	**Adaptif** Adaptable	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Constantly innovating and enthusiastic in driving and facing changes	Inovasi, Antusias terhadap perubahan, Proaktif Innovation, Enthusiasm for Change, Proactive	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi 3. Bertindak proaktif 1. Easily adaptable to bettering self 2. Make continuous improvements to keep up with technological development 3. Being proactive
K	**Kolaboratif** Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building synergic cooperation	Kesediaan bekerjasama, Sinergi untuk hasil yang lebih baik Willingness to cooperate, Synergy for better outcome	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 1. Providing opportunity for other parties to contribute 2. Open to cooperation that delivers added value 3. Encouraging the utilization of various resources for common goals

Program Budaya
Culture Program

Program Budaya Perusahaan di tahun 2023 Corporate Culture Program in 2023	Penjelasan Explanation	
Corporate Culture Purpose Program (CCPP)	6 program *Corporate Culture Purpose Program* (CCPP) yang dilatarbelakangi untuk pencapaian tujuan / strategi PLN Grup, dengan program: - Standarisasi HSE Transformasi Budaya K3, dengan pelaksanaan program manajemen K3 yakni S*afety Contact, Safety/ Manajemen Walkdown, Safety Observation* dan *Self Learning Basic Safety Awareness*, diimplementasikan di seluruh unit PLN IP; - Nol Kecelakaan Kerja untuk Mendorong Pencapaian *Zero Accident* dengan membudayakan pelaporan temuan K3 menggunakan aplikasi *Nearmiss* oleh seluruh insan di Perusahaan, diimplementasikan di seluruh unit PLN IP: - *Good House Keeping* dengan fokus pada kerapihan gudang material dilakukan secara digitalisasi menggunakan aplikasi PLN IP ProInventory, program ini diimplementasikan unit pilot project di BLI PGU dan UPDK Keramasan; - Penghapusan kemubaziran dengan fokus pada pengendalian biaya BPP (Biaya Pokok Produksi) Efisiensi Pemakaian Batubara diimplementasikan unit pilot project di SLA PGU; - Kepuasan Pelanggan dengan fokus pada pengembangan bisnis *Beyond* KwH perusahaan diimplementasi unit *pilot project* di MSU; - *Wellbeing* dengan fokus untuk *wellness* dan *worklife integration* pegawai untuk mendorong pencapaian produktivitas perusahaan, dengan program-program yang dilaksanakan adalah: Seminar *Worklife Integration* (tema Kesehatan Fisik, Kesehatan Mental dan Finansial), *Medical Check Up*, program *Wellbeing Day* adalah program pengembangan komunitas olahraga, hobi dan minat melalui pengelolaan latihan-latihan olahraga yang dikelola bersama Persatuan Pegawai, sehingga pegawai dapat menyalurkan potensi dan hobi dalam berolahraga ataupun kegiatan seni dan juga senam rutin Senam Sinergi setiap minggu, program ini diimplementasikan unit pilot *project Head Office*.	Six (6) Corporate Culture Purpose Programs (CCPPs) based on the objectives/strategies of PLN Group are as follows: - HSE standardization -- Transformation of HSE culture by running HSE management programs, i.e. Safety Contact, Safety/Management Walk-down, Safety Observation, and Self-Learning Basic Safety Awareness, implemented at all PLN IP units; - Zero accident -- Achieving Zero Accident by habituating reporting using Near-miss application by all members of Company personnel, implemented at all PLN IP units; - Good housekeeping -- Focusing on material warehouse organization through digitalization using PLN IP ProInventory, currently implemented as unit pilot project at BLI PGU and UPDK Keramasan; - Redundancy elimination -- Focusing on controlling production cost and improving coal consumption efficiency, currently implemented as unit pilot project at SLA PGU; - Customer satisfaction -- Focusing on developing beyond kWh, currently implemented as unit pilot project at MSU; - Wellbeing -- Focusing on employees' wellness and work-life integration to improve Company productivity. This includes the following programs: Work-Life Integration Seminar (concerning Physical, Mental, and Financial Health), Medical Checkup, Wellbeing Day. Wellbeing Day promotes the development of sport and hobby communities and communities of interest through sport exercises that are managed jointly with the Employee Union. That way, employees can channel their potentials and hobbies in sports and arts. Employees can also regularly exercise with weekly Senam Sinergy. The program is currently implemented as unit pilot project at the Head Office.
Ranger	Pembekalan dan pendampingan *Ranger* (*Ranger Master, Ranger Leader* dan *Ranger*) sebagai Agen transformasi Perusahaan	Briefing and Assistance for Rangers (Ranger Masters, Ranger Leaders, and Rangers) as the Company's Change Agents
Culture Fest	Kompetisi Implementasi Budaya Perusahaan di seluruh Unit dan SH/AP PLN *Group*	Competition of Corporate Culture implementation across all Units in Subholdings/Subsidiaries of PLN Group
Semesta Budaya	Kompetisi Implementasi Budaya Perusahaan diseluruh Unit PLN IP	Competition of Corporate Culture implementation across all Units in PLN IP
Survei EES, CHI, GBP, *Talent* 4.0	Pengukuran implementasi budaya melalui Survei Budaya berdasarkan *guidance* PLN	Measuring corporate culture implementation through Culture Survey under PLN's guidance
Internalisasi Program Perusahaan Internalization of Company Programs	Internalisasi Tema Bulanan AKHLAK, internalisasi dilakukan menggunakan metode *sunray* diagram, dimana internalisasi dilakukan juga melalui artefak-artefak dan simbol-simbol yang dipasang diseluruh Unit. Artefak berupa *flyer, visual management*, dan lain sebagainya	Internalizing monthly theme of AKHLAK using sun ray diagram as well as artifacts and symbols installed at all units. The artifacts include pamphlets, visual managements, and other media
CoC, LEarning Day	Pelaksanaan CoC berdasarkan Tema PLN 1x dalam 1 minggu dan *sharing knowledge* dengan bentuk *story telling*	CoC is held once a week using the theme provided by PLN, while knowledge is shared through story telling



Bidang Usaha
Line of Business

Mengacu pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN Indonesia Power adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka menunjang/mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kepatutan serta Etika Bisnis pada Perseroan Terbatas, yang meliputi produk dan layanan sebagai berikut:

1. Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
   a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI;
   b. Jasa investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan;
   c. Konstruksi Bangunan Elektrikal;
   d. Instalasi/Pemasangan mesin dan Peralatan Industri;
   e. Pendidikan Teknik Swasta;
   f. Produksi, perbaikan dan perdagangan dan peralatan tenaga listrik;
   g. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI;
   h. Pertambangan Batubara;
   i. Industri Produk dari Batubara;
   j. Produksi pengolahan, pengangkutan dan perdagangan gambut, biomass dan gas alam;
   k. Pengusahaan tenaga panas bumi;
   l. Cogeneration;
   m. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.
3. Selain usaha yang disebutkan pada angka 2, PLN Indonesia Power dapat melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

Referring to Article 3 of the Company's Articles of Association, PLN Indonesia Power carries out electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying Limited Liability Company principles and performing assignments mandated by the Majority Shareholder, in order to support the Shareholders' business activities with the implementation of Good Corporate Governance principles as well as Business Propriety and Ethics of Limited Liability Companies, which include the following products and services:

1. Electricity Generation;
2. Electricity-supply related businesses, i.e.:
   a. Engineering activities and relevant technical consultancies;
   b. Power plant investigation, design, operations & maintenance, and equipment rental services;
   c. Electrical building construction;
   d. Industrial machineries and equipment installation;
   e. Private engineering education;
   f. Production, repair, and trade of electricity equipment;
   g. Wholesale of solid, liquid, and gas fuel and relevant products;
   h. Coal mining;
   i. Coal products business;
   j. Production, processing, transportation, and trade of peat, biomass, and natural gas;
   k. Geothermal energy business;
   l. Co-generation;
   m. Construction of water resource infrastructure building.
3. In addition to carrying out the businesses mentioned in point 2, PLN Indonesia Power can conduct trades and/or supporting business activities for optimizing resources at hand, including through assignments to Subsidiaries.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan
Current Business Activities

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh PLN Indonesia Power adalah:

PLN Indonesia Power currently executes the following business activities:

Pembangkitan Tenaga Listrik
Electricity power generation

Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik, *Beyond* kWh, antara lain jasa operasi dan pemeliharaan
Beyond kWh businesses, including Operations and Maintenance (O&M) Services

Terkait kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, PLN Indonesia Power dapat memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan maupun dilakukan oleh Perusahaan Patungan.

In relation to supporting business activities that optimize the utilization of existing resources, PLN Indonesia Power can give assignments to Subsidiaries and/or Joint Ventures.

Produk dan Layanan
Products and Services

Produk
Products

Dalam melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, PLN Indonesia Power mengelola 32 Unit Bisnis Pembangkitan dan 3 Unit Jasa O&M:

In carrying out the business activities of providing electricity and providing plant operation and maintenance services, PLN Indonesia Power manages 32 Generation Business Units and 3 O&M Service Units:

No	Unit	Jumlah Unit Number of Unit	Daya Terpasang Pembangkit (MW) Installed Power Plant (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
1	UBP Suralaya GBU Suralaya	7	3.400,00	PLTU SPP	Cilegon (Banten)
2	UBP Banten 1 Suralaya GBU Banten 1 Suralaya	1	625,00	PLTU SPP	Cilegon (Banten)
3	UBP Banten 2 Labuan GBU Banten 2 Labuan	2	600,00	PLTU SPP	Pandeglang, (Banten)
4	UBP Banten 3 Lontar GBU Banten 3 Lontar	3	945,00	PLTU SPP	Tangerang (Banten)
5	UBP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	3	1.050,00	PLTU SPP	Sukabumi (Jawa Barat) Sukabumi (West Java
6	UBP Jawa Tengah 2 Adipala GBU Jawa Tengah 2 Adipala	1	660,00	PLTU SPP	Cilacap (Jawa Tengah) Cilacap (Central Java)
7	UBP Pangkalan Susu GBU Pangkalan Susu	4	880,00	PLTU SPP	Langkat (Sumatera Utara) Langkat (North Sumatera)
8	UBP Labuhan Angin GBU Labuhan Angin	2	230,00	PLTU SPP	Tapanuli Tengah (Sumatera Utara) Tapanuli Tengah (North Sumatera)
9	UBP Ombilin GBU Ombilin	3	221,50	PLTU, PLTG SPP, GTPP	Sawahlunto (Sumatera Barat) Sawahlunto (West Sumatera)
10	UBP Teluk Sirih GBU Teluk Sirih	4	245,50	PLTU, PLTG SPP, GTPP	Padang (Sumatera Barat) Padang (West Sumatera)
11	UBP Kepulauan Riau GBU Kepulauan Riau	7	32,17	PLTU, PLTD SPP, DPP	Pulau Karimun (Kepulauan Riau) Karimun Island (Riau Islands)
12	UBP Asam Asam GBU Asam Asam	4	260,00	PLTU SPP	Tanah Laut (Kalimantan Selatan) Tanah Laut (South Kalimantan)
13	UBP Singkawang GBU Singkawang	2	100,00	PLTU SPP	Singkawang (Kalimantan Barat) Singkawang (West Kalimantan)
14	UBP Sanggau GBU Sanggau	2	14,00	PLTU SPP	Singkawang (Kalimantan Barat) Singkawang (West Kalimantan)
15	UBP Sintang GBU Sintang	3	21,00	PLTU SPP	Sintang (Kalimantan Barat) Sintang (West Kalimantan)
16	UBP Berau GBU Berau	2	19,00	PLTU SPP	Berau (Kalimantan Timur) Berau (East Kalimantan)
17	UBP Barru GBU Barru	2	100,00	PLTU SPP	Barru (Sulawesi Selatan) Barru (South Sulawesi)
18	UBP Priok GBU Priok	20	2.947,00	PLTGU CCPP	Tanjung Priok (Jakarta)
19	UBP Saguling GBU Saguling	29	797,36	PLTA HPP	Bandung (Jawa Barat) Bandung (West Java)
20	UBP Kamojang GBU Kamojang	13	567,00	PLTP GPP	Garut (Jawa Barat) Garut (West Java)
21	UBP Semarang GBU Semarang	11	1.238,30	PLTGU CCPP	Semarang (Jawa Tengah) Semarang (Central Java)
22	UBP Mrica GBU Mrica	34	333,79	PLTA HPP	Banjarnegara (Jawa Tengah) Banjarnegara (Central Java)
23	UBP Grati GBU Grati	9	1.258,58	PLTGU CCPP	Pasuruan (Jawa Timur) Pasuruan (East Java)
24	UBP Bali GBU Bali	50	960,11	PLTG, PLTDG, PLTD, PLTMG GTPP, DGPP, DPP, GEPP	Denpasar (Bali)
25	UBP Cilegon GBU Cilegon	3	740,00	PLTGU CCPP	Serang (Banten)

No	Unit	Jumlah Unit Number of Unit	Daya Terpasang Pembangkit (MW) Installed Power Plant (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
26	UBP Mahakam GBU Mahakam	87	410,41	PLTD, PLTMG, PLTG, PLTGU DPP, GEPP, GTPP, CCPP	Samarinda (Kalimantan Timur) Samarinda (East Kalimantan)
27	UBP Keramasan GBU Keramasan	13	328,61	PLTG, PLTGU, PLTD GTPP, CCPP, DPP	Palembang (Sumatera Selatan) Palembang (South Sumatra)
28	UBP Barito GBU Barito	54	175,07	PLTD, PLTA, PLTG DPP, HPP, GTPP	Barito (Kalimantan Selatan) Barito (South Kalimantan)
29	UBP Tello GBU Tello	19	130,57	PLTG, PLTD GTPP, DPP	Barru (Sulawesi Selatan) Barru (South Sulawesi)
30	UBP Bengkulu GBU Bengkulu	10	236,32	PLTA HPP	Bengkulu
31	UBP Jambi GBU Jambi	12	157,03	PLTMG, PLTG GEPP , GTPP	Jambi
32	UBP Bukittinggi GBU Bukittinggi	11	253,50	PLTA HPP	Bukittinggi (Sumatera Barat) Bukittinggi (West Sumatra)

Unit Jasa O&M
O&M Services Unit

No	Unit	Jumlah Unit Number of Unit	Daya Terpasang Pembangkit (MW) Installed Power Plant (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
1	UBP Holtekamp GBU Holtekamp	2	24,00	PLTU SPP	Jayapura (Papua)
2	UBP Jeranjang GBU Jeranjang	3	90,00	PLTU SPP	Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat) West Lombok Barat (West Nusa Tenggara)
3	UP Ulumbu (Sub unit UBP Kamojang) Ulumbu GU (Kamojang GBU Sub Unit)	4	10,00	PLTP PLTP	Flores, Nusa Tenggara Timur Flores, East Nusa Tenggara

Layanan
Services

Layanan di PLN Indonesia Power meliputi:

Services at PLN Indonesia Power include:



Operation & Maintenance Service (O&M)

Menyediakan layanan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik secara komperhensif meliputi layanan: *Main Plant, Balance of Plant, Coal Handling, Ash Handling, Laboratories, Engineering Support, Asset Management Setup, Power Plant Digitalization.*

Providing comprehensive operations and maintenance services for power plants, including: Main Plant, Balance of Plant, Coal Handling, Ash Handling, Laboratories, Engineering Support, Asset Management Setup, Power Plant Digitalization.



Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

Merupakan jasa solusi *Maintenance, Repair, & Overhaul* terbaik melalui Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH) dan anak usaha PLN Indonesia Power Cogindo Daya Bersama (CDB). Keberhasilan layanan MRO telah teruji dan terpercaya di Indonesia hingga negara Timur Tengah.

The best Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) solutions provided by the Maintenance Business Unit (UBH) and PLN Indonesia Power subsidiary, Cogindo DayaBersama (CDB). The MRO services' reputation has been tested and trusted across Indonesia through Middle East.



Operational Development Program

PLN Indonesia Power menyediakan program pelatihan berbasis teori dan praktik untuk menyiapkan personel yang andal, berkompeten, dan tersertifikasi termasuk pelatihan dan/ atau sertifikasi kompetensi pegawai untuk beragam jenis pembangkit.

PLN Indonesia Power provides theoretical and practical trainings to prepare reliable, competent, and certified personnel. This includes employee training and/or competency certification for various types of power plants.



Primary Energy & Port Management

PLN Indonesia Power melalui anak usahanya, Artha Daya Coalindo menyediakan bisnis pengadaan, transportasi dan pembongkaran baik batubara maupun biomas serta pengelolaan Pelabuhan. Melalui anak usaha lainnya, Perta Daya Gas menawarkan bisnis gas alam melalui transportsi Gas/LNG, terminal, regasifikasi dan distribusi.

PLN Indonesia Power, through its subsidiary, Artha Daya Coalindo, carries out procurement, transportation, and loading/unloading of both coal and biomass as well as port management. Through another subsidiary, Perta Daya Gas, the Company carries out natural gas business LNG transportation, terminals, regasification, and distribution





Digitalization Setup

Merupakan layanan transformasi digital pada proses bisnis pembangkitan agar dapat dipantau secara *real time* untuk menjaga keandalan dan meningkatkan efisiensi, melalui layanan:

- ***Reliability Efficiency Optimization Center (REOC):*** merupakan aplikasi digital terintegrasi yang memiliki fungsi utama memantau lebih dari 13 GWh berbagai teknologi pembangkit listrik di 20 lokasi unit dan lebih dari 50.000 parameter. *Big Data* dan *Artificial Intelligent* dimanfaatkan untuk merancang fitur *Automatic Failure Detection* yang berperan menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit listrik.
- ***IP-DigimonX:*** *Mobile application add-on* dari CMMS Maximo (ProHAR) untuk mendukung pilar *Work, Planning, and Control* (WPC) pada *Asset Management* khususnya pada saat *Work Order Execution* dimulai dari penunjukan *lead*, teknisi, permintaan *work permit*, pengisian *actual* WO, hingga perubahan status WO menjadi WDONE.
- ***IP-ProInventory :*** merupakan Aplikasi berbasis sistem Android dan IOS yang terintegrasi dengan ERP dan Maximo menggunakan QR *Code* sebagai pengenal, berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas *inventory* dimanapun dan kapan pun.

A digital transformation service for generation business processes that allows real-time monitoring to maintain reliability and increase efficiency, through services:

- **Reliability Efficiency Optimization Center (REOC):** An integrated digital application whose main function is to monitor more than 13 GWh of various power plant technology across 20 units and over 50,000 parameters. Big Data and Artificial Intelligence are used to design Automatic Failure Detection feature that serve to maintain the reliability and efficiency of power plants.
- **IP-DigimonX:** A mobile application add-on from CMMS Maximo (ProHAR) that supports the pillar of Work, Planning, and Control (WPC) of Asset Management, especially during Work Order Execution, from appointing leads and technicians, applying work permit, filling out actual WO, to changing WO status to WDONE.
- **IP-ProInventory:** An application on Android and iOS platforms that integrates with ERP and Maximo using QR Code as identifier. This app allows easier and faster inventory activities anytime and anywhere.



Solar PV Solution

Layanan PLN Indonesia Power untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui anak usahanya PT Indo Tenaga Hijau yang menyediakan jasa antara lain:

1. ***Engineering Consultation:*** meliputi konsultasi perencanaan mulai dari tahapan survei sampai dengan pembuatan desain gambar detail proyek.
2. ***Engineering,Procurement & Construction:*** meliputi tahap desain perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta tahap pelaksanaan konstruksi.
3. ***Operation & Maintenance:*** meliputi pengelolaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik energi baru terbarukan.

A service by PLN Indonesia Power that supports NRE development through its subsidiary Indo Tenaga Hijau, which provides:

1. **Engineering Consultation:** Includes planning consultation, from surveying to designing detailed drawing of project.
2. **Engineering,Procurement & Construction:** Includes the phases of planning design, goods and services procurement, and construction execution.
3. **Operation & Maintenance:** Includes the management of operations and maintenance services for NRE-based power plants.

Uraian Segmen Pasar
Market Segmentation

Segmen pasar PLN Indonesia Power secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Memproduksi tenaga listrik dari aset pembangkit yang dimiliki oleh PLN Indonesia Power, baik pembangkit yang telah dimiliki PLN Indonesia Power sebelum *legal end state* maupun aset yang menjadi milik PLN IP setelah menerima aset-aset pembangkit dari PLN pasca *legal end state*, yang kepemilikannya beralih demi hukum kepada PLN Indonesia Power sebagai akibat dari pemisahan tidak murni/*spin off* sebagian kegiatan usaha PLN. Selanjutnya, energi yang diproduksi akan diperjualbelikan kepada pelanggan *single buyer*, PT PLN (Persero) melalui mekanisme penjualan energi listrik dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).

Sedangkan usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yaitu jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) dilakukan kepada pembangkit milik PT PLN (Persero) yang semula melalui Kontrak *Asset Manager Contract* (AMC) telah dilakukan pengakhiran perjanjian AMC. Adapun kegiatan pengoperasian aset pembangkit PLN berdasarkan Kontrak Jasa OM tetap dilaksanakan, di mana PLN Indonesia Power melaksanakan jasa OM terhadap pembangkit-pembangkit milik PLN yang belum dan/atau tidak dialihkan kepada *Subholding* Pembangkitan. Dalam pelaksanaannya dilakukan perjanjian pinjam pakai lahan antara PLN dengan PLN Indonesia Power yang mengatur bahwa PLN Indonesia Power diberikan hak untuk menggunakan tanah milik PLN yang di atasnya terdapat aset-aset pembangkitan yang dialihkan dari PLN kepada PLN Indonesia Power. Hal ini disebabkan PLN hanya mengalihkan aset pembangkit, namun tidak mengalihkan kepemilikan atas lahan.

Energi listrik wilayah Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dipasok oleh beberapa perusahaan yaitu PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, PLN Tanjung Jati B (PLN TJB), pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) dan pembangkit milik PLN baik yang dikelola oleh Unit Induk Distribusi (UID), Unit Induk Wilayah (UIW), Unit Induk Pembangkitan (UIK) di masing - masing regional dan *Project*.

Pada tahun 2023, realisasi energi listrik di wilayah Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 291.771,74 GWh. Dari total pasokan tersebut, PLN Indonesia Power memasok sebesar 26,95% atau sebesar 78.631,61 GWh, dimana hasil produksi ini dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*.

Selain itu, PLN Indonesia Power melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan juga menjalankan diversifikasi bidang usaha energi lainnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi PLN Indonesia Power.

PLN Indonesia Power's market is generally divided into two (2) segments:

Producing electricity from power generation assets owned by PLN Indonesia Power, both those that were owned prior to the legal end-state and those that were received by PLN IP from PLN's transfer of power generation assets after the legal end-state. The asset transfer was required by the law as a part of PLN's business spin off. Further, the energy produced will be sold to single buyer customer, i.e. PT PLN (Persero), under Power Purchase Agreement (PPA).

Providing electricity supply-related services, i.e. Operations and Maintenance (O&M) services to PT PLN (Persero)'s power plants, which was previously regulated under Asset Manager Contract (AMC). The AMC has now been terminated. Meanwhile, the operations of PLN's power generation assets under OM Service Contract still continue, where PLN Indonesia Power provides OM services for PLN's power plants which have not been and/or are not transferred to the Generation Subholding. In practice, a land use loan agreement was executed between PLN and PLN Indonesia Power which stipulates that PLN Indonesia Power is given the right to use the land owned by PLN on which there are generation assets transferred from PLN to PLN Indonesia Power. This is because PLN only transferred the generating assets, but did not transfer the ownership of the land.

Electrical energy in the Java-Bali, Sumatra, Kalimantan and Sulawesi regions is supplied by several companies, namely PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, PLN Tanjung Jati B (PLN TJB), private power plants (Independent Power Producer / IPP) and PLN-owned plants both managed by the Distribution Unit (UID), Regional Unit (UIW), Generating Unit (UIK) in each region and Project.

In 2023, the realization of electrical energy in the Java-Bali, Sumatra, Kalimantan and Sulawesi regions amounted to 291,771.74 GWh. Of the total supply, PLN Indonesia Power supplied 26.95% or 78,631.61 GWh, where this production was sold to the parent company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as a single buyer.

PLN Indonesia Power through its Subsidiaries and Joint Venture Companies also seeks diversification in other energy business fields in order to realize the Vision and Mission of PLN Indonesia



Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Structure and Composition

Rincian Nama dan Komposisi Pemegang Saham
Details of Shareholders' Name and Composition

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 Tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00025.AH.02.02.TAHUN 2023, terdapat perubahan modal saham Perusahaan atas dampak pembentukan struktur *subholding* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023, setelah transaksi di atas, adalah sebagai berikut:
1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 (satu) saham Seri 1 dan Rp357.165.633.598 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh delapan) saham Seri 2 atau sebesar Rp178.582.816.799.500 (seratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus delapan puuh dua miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN, sebanyak 1 (satu) saham Seri 2 atau sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah).

Based on Notarial Deed No. 16 dated April 13, 2023 on Amendments to the Articles of Association of PT PLN Indonesia Power which obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00025.AH.02.02.TAHUN 2023, there was a change in the Company's share capital impacted from the formation of a subholding structure, effective on January 01, 2023.

Following the above transaction, the composition of the Company's shareholders as of December 31, 2023 is as follows:
1. PT PLN (Persero) holds one (1) Series 1 share and 357,165,633,598 (three hundred fifty-seven billion one hundred sixty-five million six hundred thirty-three thousand five hundred ninety-eight) Series 2 shares worth Rp178,582,816,799,500 (one hundred seventy-eight trillion five hundred eighty-two billion eight hundred sixteen million seven hundred ninety-nine thousand five hundred Rupiah);
2. Foundation for Education and Welfare (YPK) PLN holds one (1) Series 2 share worth Rp500 (five hundred Rupiah).

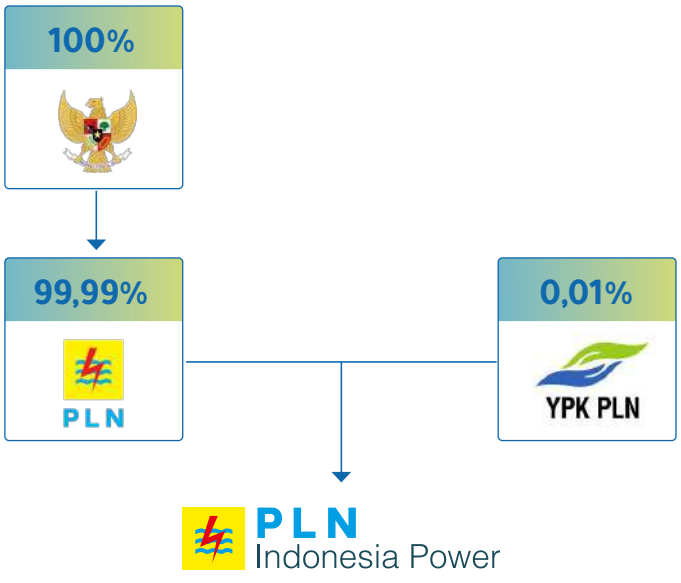
Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Entitas Induk Terakhir
Information about Majority/Controlling Shareholder and Ultimate Parent Entity

Pemegang saham utama sekaligus pemegang saham pengendali dari PLN Indonesia Power adalah PT PLN (Persero), yang memiliki saham PLN Indonesia Power sebanyak 99%. PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan kepemilikan saham seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian BUMN sebanyak 100%. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN merupakan entitas induk terakhir dari PLN Indonesia Power.

The Majority/Controlling Shareholder of PLN Indonesia Power is PT PLN (Persero), which owns 99% shares in PLN Indonesia Power. PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise (BUMN), whose shares are owned 100% by the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of SOEs. Thus, the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of SOEs becomes the ultimate parent entity of PLN Indonesia Power.

Skema struktur dan komposisi pemegang saham PLN Indonesia Power sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholder*) dapat dilihat pada skema berikut:

PLN Indonesia Power's shareholder structure and composition, up to the ultimate shareholder, can be found in the following scheme:



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Shareholding by the Board of Commissioners and the Board of Directors

Komposisi Saham PLN Indonesia Power tidak ada yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan. Namun terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan lain sebagaimana diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan.

No members of PLN Indonesia Power's Board of Commissioners and the Board of Directors hold any of the Company's shares. Nevertheless, some members of the Board of Commissioners and the Board of Directors hold some shares in other companies as explained in the Chapter of Corporate Governance.

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan >5%
Composition of Shareholders with >5% Ownership

Sampai dengan 31 Desember 2023, pemegang saham mayoritas PLN Indonesia Power adalah PT PLN (Persero). Dengan demikian maka persentase kepemilikan saham lebih 5% adalah PT PLN (Persero).

Until December 31, 2023, PT PLN (Persero) remained PLN Indonesia Power's major shareholder. Therefore, PT PLN also holds the position as the Company's 5% shareholder.

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan <5%
Composition of Shareholders with <5% Ownership

PLN Indonesia Power belum mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sehingga tidak memiliki Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

PLN Indonesia Power has not yet listed its stock with the Indonesian Stock Exchange, therefore there are no public shareholders with below 5% of shareholding.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi
Number of Shareholders and Shareholding Percentage, by Classification

Kepemilikan Saham PLN Indonesia Power seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yaitu PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) yang seluruhnya berkedudukan Indonesia.

PLN Indonesia Power's shares are fully held by local agencies, i.e., PT PLN (Persero) and Foundation for Education and Welfare (YPK) PT PLN (Persero), both of which are based in Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2023, pemegang saham berdasarkan klasifikasi
As of December 31, 2023, these are the shareholders by classification

Kepemilikan saham Shareholding	Jumlah dan Persentase kepemilikan saham Shareholding %
Kepemilikan institusi lokal Ownership by local agency	• PT PLN (Persero) dengan Saham Seri 1 atau sebesar Rp357.165.633.598 dan Saham Seri 2 atau sebesar Rp178.582.816.799.500 (99,99%) • Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN dengan Saham Seri 2 atau sebesar Rp500 (0,01%) • PT PLN (Persero) with Series 1 Shares or Rp357,165,633,598 and Series 2 Shares or Rp178,582,816,799,500 (99.99%) • Foundation for Education and Welfare (YPK) PT PLN (Persero) with Series 2 Shares or Rp500 (0.01%)
Kepemilikan institusi asing Ownership by foreign agency	nihil nihil
Kepemilikan individu lokal Ownership by local individual	nihil nihil
Kepemilikan individu asing Ownership by foreign individual	nihil nihil

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Pelaksanaan *Holding - Subholding* di lingkungan PLN Group menyebabkan terjadinya peralihan aset unit pembangkit dari PT PLN (Persero) ke PLN Indonesia Power, membuat perubahan proses bisnis di PLN Indonesia Power yang tadinya sebagian berbasis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan berbasis Jasa O&M, menjadi mayoritas berbasis PJBTL. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan struktur organisasi di PLN Indonesia Power, mulai dari perubahan nomenklatur dan pembagian Direktorat Operasi menjadi berbasis Operasi Batubara dan Operasi Gas, memperkuat fungsi pembinaan OME di HO, serta perubahan struktur organisasi unit-unit ex UPK/UPDK yang disesuaikan dengan proses bisnis unit pembangkitan.

Tahun 2022 PLN Indonesia Power melakukan perubahan struktur organisasi sesuai Keputusan Direksi Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power. Hal ini berdampak adanya perubahan pada beberapa Sebutan Jabatan dan *Position Grade* di lingkungan PT PLN Indonesia Power. Oleh karena itu, pada tanggal 24 Juli 2023 melalui Peraturan Direksi Nomor: 0077.P/DIR/2023, dilakukan penyesuaian pada lampiran 2 Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor 0097.P/DIR/2023 tentang Sistem Jabatan dan Nomenklatur Organisasi.

Selanjutnya dalam mendukung program PT PLN Indonesia Power *Transformation 2.0 (Moonshot)* yang mencakup inisiatif strategis *Expand Core, ignite Growth (GoGlobal + Beyond* kWh*), Digital Driven Operations and Maintenance Excellence, Sustainability* dan *Launchpad*, dipandang perlu dilakukan perubahan *mindset* seluruh Pegawai tentang transisi energi yang terjadi pada bisnis pembangkitan, kesadaran untuk mencapai peningkatan bisnis yang signifikan dengan kapabilitas finansial yang lebih baik dan kesadaran optimalisasi dalam menjalankan bisnis Perusahaan, serta mendukung program bisnis *beyond* kWh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2024 telah dilakukan perubahan sebutan Unit di lingkungan PT PLN Indonesia Power menjadi Unit Bisnis sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor: 0001.P/DIR/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power dengan dengan skema struktur organisasi sebagai berikut:

The establishment of Holding-Subholding within PLN Group has resulted in the transfer of power generation assets from PT PLN (Persero) to PLN Indonesia Power. This has changed PLN Indonesia Power's business scheme, from previously based on the combination of Power Purchase Agreement (PPA) and O&M Services to largely based on Power Purchase Agreement (PPA). Such change has brought impact on PLN Indonesia Power's organizational structure. This includes nomenclature change; the division of the Directorate of Operations into two, i.e. Coal Operations and Gas Operations; the strengthening of OME guidance at the Head Office, and the changes in the organizational structure of ex-UPK/UPDK units in accordance with the business process at power generation units.

In 2022, PLN Indonesia Power restructured its organization according to the Decree of the Board of Directors No. 139.K/010/IP/2022 on the Organization of PT PLN Indonesia Power. This resulted in several changes to Nomenclature of Position and Grade within PT PLN Indonesia Power. Therefore, on July 24, 2023, under the Decree of the Board of Directors No. 0077.P/DIR/2023, an adjustment was made to appendix 2 of the Decree of the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power on the Organization of PT PLN Indonesia Power, which subsequently stipulated by the Decree of the Board of Directors No. 0097.P/DIR/2023 on Position Grade System and Organization Nomenclature.

Further, to support the Transformation 2.0 (Moonshot) program that covers the strategic initiatives of Expand Core, ignite Growth (Go-Global + Beyond kWh), Digital Driven Operations and Maintenance Excellence, Sustainability and Launchpad, it was considered necessary to change the mindset of all employees concerning energy transition in generation business, to build awareness to significantly improve business with better financial capability, and to build awareness to perform optimization of business, as well as to support beyond kWh businesses. With the consideration, a change in nomenclature took place on January 19, 2024, where "Unit" was changed into "Unit Bisnis" (Business Unit), as stipulated by the Decree of the Board of Directors No. 0001.P/DIR/2024 on the Second Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power No. 139.K/010/IP/2022 on the Organization of PT PLN Indonesia Power, rendering the organizational structure as follows:







Keterangan: **Description:**
Nama Pejabat sesuai posisi hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan.
Name of Officer in accordance with the position until this Annual Report is published.

Direksi
Board of Director

Direktur Keuangan
Director of Finance
Endang Astharanti

- Bidang Corporate Finance — Corporate Finance Division — **Andri Febriyanto**
- Bidang Accounting and Insurance — Accounting and Insurance Division — **Jefri Ade Saputra**
- Bidang Treasury and Tax — Treasury and Tax Division — **Tuti Purwaningsih**
- Bidang Information Technology and Digital — Information Technology and Digital Division — **Didik Harjanto**

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administrative
Wisnoe Satrijono

- Bidang Human Capital Strategy — Human Capital Strategy Division — **Giovany**
- Bidang Human Capital Development — Human Capital Development Division — **Syahruni Rakhmawati**
- Bidang Human Capital Services — Human Capital Services Division — **Asep Yanyan H**
- Bidang Health, Safety, and Environment — Health, Safety, Environment Division — **Nugraha Septa Utama**
- Bidang General Affairs — General Affairs Division — **Sabtanto Nugroho**

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Iskandar Simorangkir	:	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
Lukmanul Hakim	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
M.P. Dwinugroho	:	Komisaris Commissioner
Haryanto W.S.	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wiluyo Kusdwiharto	:	Komisaris Commissioner
Djoko Siswanto	:	Komisaris Commissioner
Arief Budiman	:	Komisaris Commissioner

- Satuan Internal Audit — Internal Audit Unit — **Suparlan**
- Satuan, Legal, Risk, and Compliance — Legal, Risk, and Compliance Unit — **Lya Kartika Sari**
- Satuan Supply Chain Management and Procurement — Supply Chain Management and Procurement Unit — **Aliansyah**
- Satuan Project Management — Project Management Unit — **Ade Hendratno**
- Satuan Technology Development and Asset Management — Technology Development and Asset Management Unit — ***Vacant***
- Sekretariat Perusahaan — Corporate Secretary — **Agung Siswanto**

Komite Audit
Audit Committee
Ketua Head of Committee
Iskandar Simorangkir
Wakil Ketua I Deputy Head I
Wiluyo Kusdwiharto
Wakil Ketua II Deputy Head II
Lukmanul Hakim
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary and concurrent member
Denny Triyanto
Anggota Member
Linda Agustina
Leonardus Sitinjak

Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Invesment and Risk Management Committee
Ketua Head of Committee
Djoko Siswanto
Wakil Ketua Deputy Head
M. P. Dwinugroho
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary and concurrent member
Dewanto
Anggota Member
Robiatna Agus Fanhar
Ferry Triansyah

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
Ketua Head of Committee
Haryanto W.S
Wakil Ketua Deputy Head
Arief Budiman
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary and concurrent member
Sumarno
Anggota Member
Alvin Nur Widjajanti

Informasi Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 dan Setelah Tahun Buku 2023

Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year 2023 and After the Financial Year 2023

Tahun Buku 2023
Financial Year 2023

Terdapat pemberhentian Sdr. Rachmad Handoko sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara dan pengangkatan Sdr. M. Hanafi Nur Rifa'i sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler PT PLN Indonesia Power tanggal 19 September 2023. Selanjutnya, Menteri BUMN selaku RUPS PLN telah menyetujui pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan melalui Surat Nomor : SR- 460/MBU/09/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding* dan Anak Perusahaan PT PLN (Persero). Perubahan dilakukan dalam rangka kepentingan strategis Perseroan serta optimalisasi kinerja Perseroan. Adapun tahun buku 2023, tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris.

There was a dismissal of Mr. Rachmad Handoko as Director of Coal Plant Operations and the appointment of Mr. M. Hanafi Nur Rifa'i as Director of Coal Plant Operations based on the Resolution of the Circular GMS of PT PLN Indonesia Power dated September 19, 2023. Furthermore, the Minister of SOEs as the GMS of PLN has approved the dismissal and appointment of members of the Board of Directors of the Company through Letter Number: SR- 460/MBU/09/2023 dated September 18, 2023 regarding Approval of Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Sub Holding and Subsidiaries of PT PLN (Persero). The changes were made in the context of the Company's strategic interests and optimization of the Company's performance. As for the fiscal year 2023, there is no change in the composition of the Board of Commissioners.

Setelah Tahun Buku 2023
After Financial Year 2023

Setelah tahun buku 2023 tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, sampai dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan ini. Namun telah terjadi perubahan perubahan nomenklatur Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Sirkuler tanggal 29 Februari 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN berdasarkan Surat Nomor: SR-76/MBU/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Usulan Perubahan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai berikut:

1. Pengalihan nomenklatur Sdr. Wiluyo Kusdwiharto yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 21 September 2022 semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Perseroan.
2. Pengalihan nomenklatur Sdr. Iskandar Simorangkir yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 09 Februari 2021, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
3. Pengalihan nomenklatur Sdr. Haryanto WS yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 21 September 2022 semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen Perseroan.

After the 2023 financial year there were no changes in the composition of the Board of Directors, until the signing of this Annual Report. However, there has been a change in the nomenclature of the Board of Commissioners based on the Decision of Shareholders outside the General Meeting of Shareholders (GMS) Circularly dated February 29, 2024 and has received approval from the Minister of SOEs based on Letter Number: SR-76/MBU/02/2024 dated February 12, 2024 regarding Proposed Changes in the Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as follows:

1. Transfer of nomenclature of Mr. Wiluyo Kusdwiharto who was appointed by the Company's GMS dated September 21, 2022, originally as President Commissioner to become Commissioner of the Company.
2. Transfer of nomenclature of Mr. Iskandar Simorangkir who was appointed by the Company's GMS dated February 09, 2021, originally as Commissioner to become President Commissioner concurrently Independent Commissioner of the Company.
3. Transfer of nomenclature of Mr. Haryanto WS who was appointed by the Company's GMS dated September 21, 2022, originally as Commissioner to become Independent Commissioner of the Company.



Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Iskandar Simorangkir	:	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Wiluyo Kusdwiharto	:	Komisaris
Djoko Siswanto	:	Komisaris
M.P Dwinugroho	:	Komisaris
Arief Budiman	:	Komisaris
Haryanto W.S.	:	Komisaris Independen
Lukmanul Hakim	:	Komisaris Independen

Therefore, the composition of the Board of Commissioners until the signing of this Annual Report is as follows:

Iskandar Simorangkir	:	President Commissioner and concurrently Independent Commissioner
Wiluyo Kusdwiharto	:	Commissioner
Djoko Siswanto	:	Commissioner
M.P Dwinugroho	:	Commissioner
Arief Budiman	:	Commissioner
Haryanto W.S.	:	Independent Commissioner
Lukmanul Hakim	:	Independent Commissioner

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Selama tahun 2023 terdapat perubahan komposisi Direksi yaitu komposisi per 1 Januari - 19 September 2023 dan per 19 September - 31 Desember 2023.

Komposisi Direksi per 1 Januari - 19 September 2023 dijabat oleh:

Edwin Nugraha Putra	:	Direktur Utama
Rachmad Handoko	:	Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Djoko Mulyono	:	Direktur Operasi Pembangkit Gas
Bernadus Sudarmanta	:	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Endang Astharanti	:	Direktur Keuangan
Wisnoe Satrijono	:	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi

Komposisi Direksi per 19 September - 31 Desember 2023 dijabat oleh:

Edwin Nugraha Putra	:	Direktur Utama
M. Hanafi Nur Rifai	:	Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Djoko Mulyono	:	Direktur Operasi Pembangkit Gas
Bernadus Sudarmanta	:	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Endang Astharanti	:	Direktur Keuangan
Wisnoe Satrijono	:	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi

During 2023 there were changes in the composition of the Board of Directors, namely the composition as of January 1 - September 19, 2023 and as of September 19 - December 31, 2023.

The composition of the Board of Directors as of January 1 - September 19, 2023 was held by:

Edwin Nugraha Putra	:	President Director
Rachmad Handoko	:	Director of Coal Plant Operations
Djoko Mulyono	:	Director of Gas Plant Operations
Bernadus Sudarmanta	:	Director of Business Development and Commercial Affairs
Endang Astharanti	:	Director of Finance
Wisnoe Satrijono	:	Director of Human Capital Management and Administration

The composition of the Board of Directors as of September 19 - December 31, 2023 was held by:

Edwin Nugraha Putra	:	President Director
M. Hanafi Nur Rifai	:	Director of Coal Plant Operations
Djoko Mulyono	:	Director of Gas Plant Operations
Bernadus Sudarmanta	:	Director of Business Development and Commercial Affairs
Endang Astharanti	:	Director of Finance
Wisnoe Satrijono	:	Director of Human Capital Management and Administration





Bernadus Sudarmanta
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Djoko Mulyono
Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations

Edwin Nugraha Putra
Direktur Utama
President Director



Endang Astharanti
Direktur Keuangan
Director of Finance

Wisnoe Satrijono
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

M. Hanafi Nur Rifai
Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Coal Power Plant Operations



Edwin Nugraha Putra

Direktur Utama
President Director

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	54 tahun per 31 Desember 2023/ Pematang Siantar, 23 Juli 1969 54 years as of December 31, 2023 / Pematang Siantar, July 23, 1969
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Magister Information Technology dari University of Abertay Dundee Scotland (2007).
- Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Sumatera Utara (1994).

Sertifikasi

- Sertifikasi *Qualified Risk Governance* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PLN Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai Executive Vice President Perencanaan Sistem Planning PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2020 - September 2022), Senior Specialist I Pengembangan Regional PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2019 - 2020), GM PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali (2019), GM PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (2017 - 2019) dan Senior Specialist II Kinerja (PLT General Manager) di PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah (2016-2017).

Dasar hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022.

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022-2026.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Tidak ada.

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain

Tidak ada.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background

- Master Information Technology from University of Abertay Dundee Scotland (2007).
- Bachelor degree in Electrical Engineering from North Sumatra University (1994).

Certification

- Qualified Risk Governance (QRGP).certification.

Position History/Work Experience

Prior to holding a position as President Director of Indonesia Power, he also served as Executive Vice President of System Planning at PT PLN (Persero) Head Office (2020 - September 2022), Senior Specialist I Regional Development at PT PLN (Persero) Head Office (2019 - 2020), GM at PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali (2019), GM at PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (2017 - 2019) and Senior Specialist II Performance (Acting General Manager) at PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah (2016-2017).

Legal Basis for Appointment

Circular GMS dated September 21, 2022.

Term of Office

First Term, 2022-2026.

Affiliation

Not affiliated to other members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as to Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

N/A.

Concurrent Position at Other Companies

N/A.

Independence, Training and Shareholding Statement

Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report.





M. Hanafi Nur Rifai

Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Coal Power Plant Operations

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	53 tahun per 31 Desember 2023 / Sidoarjo, 21 Maret 1970 53 years as of December 31, 2023 / Sidoarjo, Maret 21, 1970
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Magister Teknik dari Institut Teknologi Bandung (2012).
- Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (1993).

Sertifikasi
- Sertifikasi *Qualified Risk Governance* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai Senior Spesialis Manajemen Pembangkitan Direktorat Manajemen Pembangkitan di PT PLN (Persero) (2022-2023), Direktur Operasi I Indonesia Power (2018-2022), dan General Manager UP Suralaya Indonesia Power (2015-2018).

Dasar hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 19 September 2023.

Periode Jabatan
Periode Pertama, 2023-2027.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power
Tidak ada.

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain
Tidak ada.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Master of Engineering from Institut Teknologi Bandung (2012).
- Bachelor of Mechanical Engineering from Institut Teknologi 10 November Surabaya (1993).

Certification
- Qualified Risk Governance (QRGP).certification.

Position History/Work Experience
Prior to holding the position as Director of Coal Plant Operations of PLN Indonesia Power, he also served as Senior Specialist in Generation Management of the Directorate of Generation Management at PT PLN (Persero) (2022-2023), Operations Director I of Indonesia Power (2018-2022), and General Manager of UP Suralaya Indonesia Power (2015-2018).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated September 19, 2023.

Term of Office
First Term, 2023-2027.

Affiliation
Not affiliated to other members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as to Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power
N/A.

Concurrent Position at Other Companies
N/A.

Independence, Training and Shareholding Statement
Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report.



Djoko Mulyono

Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	55 tahun per 31 Desember 2023/ Balikpapan, 23 November 1968 55 years as of December 31, 2023 / Balikpapan, November 23, 1968
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Magister Sumber Daya Manusia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2018).
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari STIE Bina Bangsa (2010).

Sertifikasi
- Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2021 - September 2022), Senior Specialist I Sistem Manajemen Terintegrasi (PLT General Manager) (2021), Senior Specialist II Quality Assurance dan Kinerja (Plt General Manager) (2020), Vice President Pelaksana Pengadaan Batubara PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2019 - 2020) dan Senior Manager Produksi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2018 - 2019).

Dasar hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022.

Periode Jabatan
Periode Pertama, 2022-2026.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power
Tidak ada.

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain
Tidak ada.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Master of Human Resources from Sultan Ageng Tirtayasa University (2018).
- Bachelor of Accounting from STIE Bina Bangsa (2010).

Certification
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Position History/Work Experience
Prior to holding the position as Director of Gas-Fired Power Plant Operations at Indonesia Power, he also served as General Manager at PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2021 - September 2022), Senior Specialist I of Integrated Management System (Acting General Manager) (2021), Senior Specialist II of Quality Assurance and Performance (Acting General Manager) (2020), Executive Vice President for Coal Procurement at PT PLN (Persero) Head Office (2019 - 2020) and Senior Production Manager at PT PLN (Persero) Southern Sumatra Power Generation Unit (2018 - 2019).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated September 21, 2022.

Term of Office
First Term, 2022-2026.

Affiliation
Not affiliated to other members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as to Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power
N/A.

Concurrent Position at Other Companies
N/A.

Independence, Training and Shareholding Statement
Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report.





Bernadus Sudarmanta

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	55 tahun per 31 Desember 2023/ Klaten, 4 September 1968 55 years old as of December 31, 2023 / Klaten, September 4, 1968
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung (ITB) (2001).
- Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) (1992).01).

Sertifikasi
- *Certified Risk Professional* dari Lembaga Sertifikasi Pasar Modal Indonesia.
- Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).
- Sertifikasi *Qualified Risk Governance* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT PLN Enjiniring (2021 - September 2022), Komisaris Utama PT Rekadaya Elektrika Consult (REC) (2017 -2021), Direktur Utama PT PJB Investasi (PJBI) (2015 -2016), Corporate Secretary PT PJB (2014 - 2016) dan General Manager Unit Induk Pembangkitan Sumbagut PT PLN (Persero) (2013 - 2015).

Dasar hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022

Periode Jabatan
Periode Pertama, 2022-2026.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power
Tidak ada.

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain
Tidak ada.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Master of Management from Institut Teknologi Bandung (ITB) (2001).
- Bachelor of Mechanical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) (1992).

Certification
- Certified Risk Professional from the Indonesian Capital Market Certification Institute.
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.
- Qualified Risk Governance (QRGP) certification.

Position History/Work Experience
Prior to holding a position as Director of Business Development and Commerce at Indonesia Power, he also served as Director of Marketing and Business Development at PT PLN Enjiniring (2021 - September 2022), President Commissioner at PT Rekadaya Elektrika Consult (REC) (2017-2021), President Director at PT PJB Investasi (PJBI) (2015-2016), Corporate Secretary at PT PJB (2014-2016), and General Manager of PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut (2013 - 2015).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated September 21, 2022.

Term of Office
First Term, 2022-2026.

Affiliation
Not affiliated to other members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as to Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power
N/A.

Concurrent Position at Other Companies
N/A.

Independence, Training and Shareholding Statement
Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report.





Endang Astharanti

Direktur Keuangan
Director of Finance

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	47 tahun per 31 Desember 2023/ Yogyakarta, 9 Agustus 1976 47 years old as of December 31, 2023 / Yogyakarta, August 9, 1976
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Master Business Administration (MBA) dari Nanyang Technology University, Singapore (2009)
- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1999).

Sertifikasi

- Sertifikasi *Qualified Risk Governance* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan PLN Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai Vice President Distribution Strategy Group PT Bank Mandiri (Persero) (2021), Direktur Sales and Product PT Mandiri Manajemen Investasi (2015-2021), Senior Executive Vice President (SEVP) Head of Sales Division PT Mandiri Management Investasi (2014-2015), Department Head of Marketing, Communication and Promotion PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2014).

Dasar hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 25 November 2021.

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2021-2025.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Tidak ada.

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain

Tidak ada.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background

- Master of Business Administration (MBA) from Nanyang Technology University, Singapore (2009)
- Bachelor of Accounting from Gadjah Mada University (1999).

Certification

- Qualified Risk Governance (QRGP) certification.

Position History/Work Experience

Prior to holding the position of Director of Finance at Indonesia Power, she also served as Vice President of Distribution Strategy Group at PT Bank Mandiri (2021), Director of Sales and Product at PT Mandiri Manajemen Investasi (2015-2021), Senior Executive Vice President (SEVP) of the Head of Sales Division at PT Mandiri Management Investasi (2014-2015), Department Head of Marketing, Communication and Promotion at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2014).

Legal Basis for Appointment

Circular GMS dated November 25, 2022

Term of Office

First Term, 2021-2025.

Affiliation

Not affiliated to other members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as to Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

N/A.

Concurrent Position at Other Companies

N/A.

Independence, Training and Shareholding Statement

Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report.



Wisnoe Satrijono

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	56 tahun per 31 Desember 2023/ Kediri, 21 Juni 1967 56 years old as of December 31, 2023 / Kediri, June 21, 1967
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen Bidang Lainnya dari Institut Teknologi Bandung (2002).
- Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada (1993).

Sertifikasi
- Sertifikasi Kompetensi Keinstrukturan Basic (INS) (3) Level 3 SKKNI
- Sertifikasi *Qualified Risk Governance* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai Executive Vice President Strategi Human Capital PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2021 - 2022), Executive Vice President Organization Development PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2020 -2021), Executive Vice President Change Management Office PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2019 -2020), General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) (2016 - 2018) dan Manajer Eksekutif Direksi PT PLN (Persero) (2014).

Dasar hukum Pengangkatan
- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022.

Periode Jabatan
Periode Pertama, 2022-2026.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power
Tidak ada.

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain
Tidak ada.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Master of Management from Institut Teknologi Bandung (2002).
- Bachelor of Psychology from Gadjah Mada University (1993).

Certification
- Basic Instructional Competency Certification (INS) (3) Level 3 SKKNI.
- Qualified Risk Governance (QRGP) certification.

Position History/Work Experience
Prior to holding a position as Director of Human Capital Management and Administration at Indonesia Power, he also served as Executive Vice President of Human Capital Strategy at PT PLN (Persero) Head Office (2021 - 2022), Executive Vice President of Organization Development at (2021 - 2022)(2020-2021), Executive Vice President of Change Management Office PT PLN (Persero) Head Office (2019-2020), General Manager at PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) (2016 - 2018), and Executive Manager of the Board of Directors at PT PLN (Persero) (2014).

Legal Basis for Appointment
- Circular GMS dated September 21, 2022.

Term of Office
First Term, 2022-2026.

Affiliation
Not affiliated to other members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as to Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power
N/A.

Concurrent Position at Other Companies
N/A.

Independence, Training and Shareholding Statement
Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

Selama tahun 2023 komposisi Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power adalah sebagai berikut:

During 2023 the composition of the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power is as follows:



Lukmanul Hakim
Komisaris Independen
Independent Commissioner

M.P. Dwinugroho
Komisaris
Commissioner

Haryanto W.S.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Wiluyo Kusdwiharto
Komisaris
Commissioner



Djoko Siswanto
Komisaris
Commissioner

Iskandar Simorangkir
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently as Independent Commissioner

Arief Budiman
Komisaris
Commissioner

Setelah tahun buku 2023, terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power melalui perubahan nomenklatur sebagai berikut:

After the 2023 financial year, there was a change in the composition of the PLN Indonesia Power Board of Commissioners through changes in nomenclature as follows:



Iskandar Simorangkir

Komisaris Februari 2021-Februari 2024)
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen (Sejak Februari 2024)
Commissioner (February 2021-February 2024)
President Commissioner concurrently Independent Commissioner (Since February 2024)

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	60 tahun per 31 Desember 2023/ Binjai, 4 Januari 1963 60 years as of 31 Desember 2023/ Binjai, January 4, 1963
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Doktor Ekonomi Spesialisasi Ekonomi Moneter dan Perbankan dari Universitas Indonesia (2007).
- Magister Ekonomi dari Vanderbilt University, Amerika Serikat (1997).
- Sarjana jurusan Manajemen dari Universitas Udayana (1986).

Sertifikasi

- Sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PLN Indonesia Power, menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2017-2023, Asisten Gubernur Bank Indonesia (2019-Februari 2023), Komisaris PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2019-2021), Kepala Perwakilan Bank Indonesia (2014), Kepala Departemen Bank Indonesia (2013-2014) dan Kepala Biro/Grup Riset Ekonomi Bank Indonesia (2008-2012).

Dasar hukum Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 9 Februari 2021.
- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 29 Februari 2024 dilakukan perubahan nomenklatur, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2021 - 2025.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Ketua Komite Audit.*

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain

- Badan Supervisi Bank Indonesia.
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero).

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background

- Doctor of Economics majoring in Monetary and Banking Economics from University of Indonesia (2007).
- Master of Economics from Vanderbilt University, USA (1997).
- Bachelor's Degree in Management from Udayana University (1986).

Certification

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Position History/Work Experience

Prior to serving as President Commissioner and Independent Commissioner of PLN Indonesia Power, he served as Deputy for Macroeconomic and Financial Coordination at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (2017-2023), Assistant to Bank Indonesia's Governor (2019- February 2023), Commissioner of PT Asuransi Credit Indonesia (Askindo) (2019-2021), Head of Bank Indonesia Representative (2014), Head of Bank Indonesia Representative Department (2013-2014) and Head of Bank Indonesia Economic Research Department (2008-2012).

Legal Basis for Appointment

- Circular GMS dated February 9, 2021.
- Circular GMS of Shareholders dated February 29, 2024, a change in nomenclature was made, originally as Commissioner to become President Commissioner and concurrently Independent Commissioner.

Term of Office

First Term, 2021-2025.

Affiliation

Has no affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors members as well as Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Head of the Audit Committee.*

Concurrent Position at Other Companies

- Bank Indonesia Supervision Agency.
- Member of Integrated Governance Committee of PT PLN (Persero).

Independence, Training and Shareholding Statement

Presented separately in GCG, sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report.

* Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 1 April 2024.

* Appointed under the Decree of the Board of Commissioners No. 009.SK/DK-PLNIP/2024 dated April 1, 2024.



Wiluyo Kusdwiharto

Komisaris Utama (September 2022-Februari 2024)
Komisaris (Sejak Februari 2024)
President Commissioner (February 2021-February 2024)
Commissioner (Since February 2024)

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	52 tahun per 31 Desember 2023/ Surabaya, 25 Juli 1971 52 years as of December 31, 2023 / Surabaya, July 25, 1971
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen di Universiti Tenaga Nasional Malaysia (2005) .
- Sarjana Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).

Sertifikasi
- Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, menjabat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan di PT PLN (Persero) (2020 - 2021), Direktur Bisnis Regional Sumatera di PT PLN (Persero) (2017-2020), Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera PT PLN (Persero) (2015- 2017), General Manager Unit Induk Pembangunan VIII PT PLN (Persero) (2013-2015) dan General Manager Pembangkitan Lontar PT PLN (Persero) (2012- 2013).

Dasar hukum Pengangkatan
- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022.
- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 29 Februari 2024 dilakukan perubahan nomenklatur, semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris.

Periode Jabatan
Periode Pertama, 2022-2026.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power
Wakil Ketua I Komite Audit.*

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan di PT PLN (Persero).

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

* Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 1 April 2024.

Educational Background
- Master's Degree Management from Universiti Tenaga Nasional Malaysia (2005).
- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).

Certification
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Position History/Work Experience
Prior to holding a position as Commissioner of Indonesia Power, he also served as Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan at PT PLN (Persero) (2020 - 2021), Regional Business Director of Sumatra at PT PLN (Persero) (2017-2020), Sumatra Regional Head of Construction Division at PT PLN (Persero) (2015-2017), General Manager of PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII (2013-2015), and General Manager of PT PLN (Persero) Lontar Power Generation (2012-2013).

Legal Basis for Appointment
- Circular GMS dated September 21, 2022.
- Circular GMS of Shareholders dated February 29, 2024, a change in nomenclature was made, originally as President Commissioner to become Commissioner.

Term of Office
First Term, 2022-2026.

Affiliation
Has no affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors members. However, he has an affiliation with Main and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power
Deputy Head I of the Audit Committee.*

Concurrent Position at Other Companies
Director of Project Management and New Renewable Energy Director at PT PLN (Persero).

Independence, Training and Shareholding Statement
Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report.

* Appointed under the Decree of the Board of Commissioners No. 009.SK/DK-PLNIP/2024 dated April 1, 2024.



Djoko Siswanto

Komisaris
Commissioner

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	58 tahun per 31 Desember 2023/ Jakarta, 23 Mei 1965 58 years as of December 31, 2023 / Jakarta, May 23, 1965
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Doktor dari Teknik Perminyakan ITB (2011).
- MBA Program, Edinburgh Business School dari Heriot Watt University, UK (2001).
- MBA Specialist Oil & Gas Management, Center of Energy Petroleum Mineral & Law (CEPMLP) dari Dundee University UK (2001).
- Sarjana Teknik Perminyakan dari ITB (1990).

Sertifikasi

- Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, menjabat sebagai Plt. Dirjen Migas (2019-2020), Komisaris PT Elnusa Petrofin (2019), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM (2018-2019), Pengawas Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (2018) dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (2018).

Dasar hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 6 Juli 2021.

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2021-2025

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko.*

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background

- Doctor of Petroleum Engineering from ITB (2011).
- MBA Specialist Oil & Gas Management, Center of Energy Petroleum Mineral & Law (CEPMLP) from Dundee University UK (2001).
- MBA Program, Edinburgh Business School from Herriot University Watt, UK (2001).
- Bachelor of Petroleum Engineering from ITB (1990).

Certification

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Position History/Work Experience

Prior to holding a position as an Indonesia Power's Board of Commissioners Member, he also served as an Acting Director General for Oil and Gas (2019-2020), Commissioner of PT Elnusa Petrofin (2019), Director General for Oil and Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources (2018-2019), Supervisor of Palm Oil Plantation Fund Management Agency (2018), and Commissioner of PT Pertamina Hulu Energi (2018).

Legal Basis for Appointment

Circular GMS dated July 6, 2021.

Term of Office

First Term, 2021-2025.

Affiliation

Has no affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors members as well as Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Head of Investment and Risk Management Committee.*

Concurrent Position at Other Companies

Secretary General of the National Energy Council.

Independence, Training and Shareholding Statement

Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report.

* Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 008.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 1 April 2024.

* Appointed under the Decree of the Board of Commissioners No. 008.SK/DK-PLNIP/2024 dated April 1, 2024.



M.P. Dwinugroho

Komisaris
Commissioner

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	52 tahun per 31 Desember 2023/ Surabaya, 25 Juli 1971 52 years as of December 31, 2023 / Surabaya, July 25, 1971
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007).
- Sarjana Teknik Geologi di Universitas Trisakti (1991).

Sertifikasi
Sertifikat Kompetensi Utama Pengelolaan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Pembangkitan Tenaga Listrik.

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, menjabat sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (2021 2022), Komisaris Huadian Bukit Asam Power Plant (2021-2022), Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara (2018 - 2021), Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral (2017-2018).

Dasar hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022.

Periode Jabatan
Periode Pertama, 2022 - 2026.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power
Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko.*

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Master of Economics from University of Indonesia (2007).
- Bachelor of Geological Engineering at Trisakti University (1991).

Certification
Certificate Main Competency Assessor of Electricity Environmental Management in Power Generation.

Position History/Work Experience
Prior to holding a position as an Indonesia Power Board of Commissioner Member, he also served as Secretary to Research and Development Agency of Energy and Mineral Resources (2021- 2022), Commissioner Huadian Bukit Asam Power Plant (2021-2022), Head of the Center for Human Resources Development of Geology, Mineral and Coal (2018-2021), Head of the Center for Data and Information Technology of Energy and Mineral Resources (2017-2018).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated September 21, 2022.

Term of Office
First Term, 2022-2026.

Affiliation
Has no affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors members as well as Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power
Deputy Head of the Investment and Risk Management Committee.*

Concurrent Position at Other Companies
Director of Engineering and Electricity Environment at Ministry of Energy and Mineral Resources.

Independence, Training and Shareholding Statement
Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report.

* Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 008.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 1 April 2024.

* Appointed under the Decree of the Board of Commissioners No. 008.SK/DK-PLNIP/2024 dated April 1, 2024.



Arief Budiman

Komisaris
Commissioner

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	49 tahun per 31 Desember 2023/ Surabaya, 02 Maret 1974 49 years as of December 31, 2023 / Surabaya, March 02 1974
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas dari Gadjah Mada (2010).
- Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (2002).
- Sarjana Sastra Inggris Universitas 17 Agustus 1945 (2000).

Sertifikasi

- Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, menjabat sebagai Ketua Anggota KPU RI (2017-2022), Anggota KPU RI (2012-2017), Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (2004-2012) dan Peneliti Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (2002- 2005).

Dasar hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 18 November 2022.

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022 - 2026.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.*

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain

Tidak ada.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background

- Master of Economics and Business from Gadjah Mada University (2010).
- Bachelor of International Affairs from Airlangga University (2002).
- Bachelor of English Literature from 17 Agustus 1945 University (2000).

Certification

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Position History/Work Experience

Prior to holding a position as a member of Commissioner of Indonesia Power, he also held a position as Chairman Member of General Election Commission (KPU) of the Republic of Indonesia (2017-2022), Member of General Election Commission of the Republic of Indonesia (2012-2017), Member of General Election Commission of East Java Province (2004-2012) and Researcher at Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (2002-2005).

Legal Basis for Appointment

Circular GMS dated November 18, 2022.

Term of Office

First Term, 2022-2026.

Affiliation

Has no affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors members as well as Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Deputy Head of Nomination and Remuneration Committee.*

Concurrent Position at Other Companies

N/A.

Independence, Training and Shareholding Statement

Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report.

* Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 7 Februari 2024.

* Appointed under the Decree of the Board of Commissioners No. 004.SK/DK-PLNIP/2024 dated February 7, 2024.



Haryanto W.S.

Komisaris (September 2022-Februari 2024)
Komisaris Independen (Sejak Februari 2024)
Commissioner (September 2022-February 2024)
Independent Commissioner (Since February 2024)

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	64 tahun per 31 Desember 2023/ Boyolali, 6 April 1959 64 years as of December 31, 2023 / Boyolali, April 6 1959
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen dari STIE Ekonomi (2003).
- Sarjana Listrik Arus Kuat dari ITB (1983).

Sertifikasi
- Sertifikasi Kompetensi Insinyur Profesional Utama 2023.
- Sertifikat Kompetensi Tugas Pengelolaan dan Pengembangan dan Pemasangan pembangunan dan Pemasangan Sistem Transmisi Tenaga Listrik.
- Sertifikasi ASEAN Engineer.

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris Independen PLN Indonesia Power, menjabat sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali (2019-2022), Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat (2017-2019), Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua (2015-2017), GM Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015) dan GM Distribusi Jawa Timur (2011- 2014).

Dasar hukum Pengangkatan
- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022.
- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 29 Februari 2024 dilakukan perubahan nomenklatur, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen.

Periode Jabatan
Periode Pertama, 2022 - 2026.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.*

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain
Staf Ahli Direktur Utama PT PLN (Persero).

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Master of Management from STIE Ekonomi (2003).
- Bachelor of Electrical Engineering (High Voltage) from ITB (1983).

Certification
- Certificate of Primary Professional Engineer Competency 2023.
- Certificate of Management and Development and Installation of Electric Power Transmission System Competency.
- Certificate of ASEAN Engineers.

Position History/Work Experience
Prior to holding a position as a member of Independent Commissioner of Indonesia Power, he also served as Regional Business Director for Java, Madura, and Bali (2019-2022), Regional Business Director for West Java (2017-2019), Regional Business Director for Maluku and Papua (2015-2017), General Manager of Distribution of Jakarta Raya and Tangerang (2014-2015), and GM of Distribution of East Java (2011-2014).

Legal Basis for Appointment
- Circular GMS dated September 21, 2022.
- Circular GMS of Shareholders dated February 29, 2024, a change in nomenclature was made, originally as Commissioner to become Independent Commissioner.

Term of Office
First Term, 2022-2026.

Affiliation
Has no affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors members as well as Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power
Head of the Nomination dan Remuneration Committee.*

Concurrent Position at Other Companies
Assistant of PT PLN (Persero) President Director.

Independence, Training and Shareholding Statement
Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report.

* Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 7 Februari 2024.

* Appointed under the Decree of the Board of Commissioners No. 004.SK/DK-PLNIP/2024 dated February 7, 2024.



Lukmanul Hakim

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	54 tahun per 31 Desember 2023/ Tasikmalaya, 31 Juli 1969 54 years as of December 31, 2023 / Tasikmalaya, July 31 1969
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Magister Bidang Teknologi Industri dari IPB (2005).
- Sarjana Bidang Kimia dari IPB (1993).

Sertifikasi
- Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris Independen PLN Indonesia Power, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI (2020-2025), Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) (2018-sekarang), Ketua Umum Al Ittihadiyah (2016-2022), Ketua Bidang Ekonomi Umat MUI (2015-2025) dan Ketua Lembaga Wakaf MUI (2020-2025).

Dasar hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022.

Periode Jabatan
Periode Pertama, 2022 - 2026.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power
Wakil Ketua II Komite Audit.*

Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain
- Dewan Pengawas LPPOMMUI
- President World Halal Food Council (WHFC)
- Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- Ketua Lembaga Wakaf MUI & Ketua Bidang Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia
- Ketua umum Arus Baru Indonesia (ARBI)
- Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Master for Industry Technology from IPB (2005).
- Bachelor of Chemistry from IPB (1993).

Certification
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Position History/Work Experience
Prior to holding a position as a member of Independent Commissioner of Indonesia Power, he also served as Vice Chairman of National Halal Council of MUI (2020-2025), Chairman of Arus Baru Indonesia (ARBI) (2018-present), Chairman of Al Ittiadiyah (2016-2022), Head of Economic Affairs of Indonesian Council of Ulama (2015-2025) and Chairman of Indonesian Council of Ulama's Waqf Board (2020-2025).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated September 21, 2022.

Term of Office
First Term, 2022-2026.

Affiliation
Has no affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors members as well as Major and Controlling Shareholders.

Concurrent Position at PLN Indonesia Power
Deputy Head II of the Audit Committee.*

Concurrent Position at Other Companies
- Supervisory Board of LPPOM MUI.
- President of World Halal Food Council (WHFC).
- Expert Board for Islamic Economic Society (MES) Central Management.
- Chairman of Indonesian Council of Ulama's Waqf Board and Chairman of Economics of Indonesian Council of Ulama.
- Chairman of Arus Baru Indonesia (ARBI).
- Vice Chairman of National Halal Council of Indonesian Council of Ulama, and Special staff of Vice President of Economy and Finance Affairs.

Independence, Training and Shareholding Statement
Presented separately in Corporate Governance, sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report.

* Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 1 April 2024.

* Appointed under the Decree of the Board of Commissioners No. 009.SK/DK-PLNIP/2024 dated April 1, 2024.



Statistik Jumlah Pegawai PLN Indonesia Power
PLN Indonesia Power Employee Statistics

Jumlah pegawai PLN Indonesia Power sampai akhir tahun 2023 adalah 5.452 orang, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 23,17%. Hal ini sejalan dengan pengalihan kegiatan usaha PLN kepada masing-masing *Subholding*, dimana telah dilakukan mutasi pegawai dari PLN kepada *Subholding* melalui skema tugas karya dan/atau penugasan maupun skema lainnya.

As of the end of 2023, PLN Indonesia Power had been supported by 5,452 employees, which was an increase by 23.17% from 2022. This is in line with the transfer of PLN's business activities to each subholding, in which employee transfer from PLN to subholdings also took place through secondment, assignment, and/or other arrangements.

Berikut perkembangan jumlah pegawai PLN Indonesia Power selama tahun 2021-2023:

Here is the record of PLN Indonesia Power's employee base throughout 2021-2023:

Berdasarkan Jenjang Jabatan
By Position Level

Pada tahun 2023, komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan didominasi oleh jenjang Penyelia yang mencapai 3.634 pegawai atau 66,58% dari total seluruh pegawai PLN Indonesia Power yang sebagian besarnya berada di *Head Office* sebanyak 814 pegawai.

In 2023, by position level, the employee composition was dominated by Supervisors, reaching 3,634 employees or taking up 66.58% of the total number of PLN Indonesia Power employees. Most of them (i.e. 814 employees) are posted at the Head Office.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2021-2023
Employee Composition by Position Level in 2021-2023

Jenjang Jabatan Position Level	Tahun Year			Perubahan 2022 ke 2023 Change from 2022 to 2023
	2021	2022	2023	
Direksi Board of Directors	6	6	6	0
Eksekutif Utama Chief Executive	8	8	9	1
Eksekutif Senior Senior Executive	87	91	99	8
Eksekutif Executive	283	295	310	15
Penyelia Supervisor	2.427	2.582	3.634	1.052
Pelaksana Officer	1.416	1.213	1.400	187
Jumlah* Total*	**4.227**	**4.195**	**5.458**	**1.263**

* Termasuk Direksi, namun Direksi tidak termasuk ke dalam enam kategori Jenjang Jabatan yang ada di PLN Indonesia Power
* Including the Directors, although they do not belong to any of the position levels at PLN Indonesia Power.

Berdasarkan Usia
By Age

Pada tahun 2023, komposisi pegawai PLN Indonesia Power berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia produktif yang biasa dikenal dengan generasi milenial dalam rentang usia 26-30 tahun sebanyak 31,09% dari total seluruh pegawai PLN Indonesia Power.

In 2023, the employee composition by age was dominated by those of the productive group (also known as the millennial generation) within 26-30 age range, by 31.09% out of the total number of PLN Indonesia Power employees.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2021-2023
Employee Composition by Age in 2021-2023

Usia (Tahun) Age (year old)	Tahun Year			Perubahan 2022 ke 2023 Change from 2022 to 2023
	2021	2022	2023	
19-25	222	74	95	21
26-30	1.542	1.462	1.695	233
31-35	897	1.017	1.617	600
36-40	587	643	758	115
41-45	133	175	334	159
46-50	423	367	322	-45
51-54	366	392	521	129
>55	51	59	110	51
Jumlah Total	**4.221**	**4.189**	**5.452**	**1.263**

Berdasarkan Tingkat Pendidikan
By Education Level

Di tahun 2023, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 36,17% dari total seluruh pegawai PLN Indonesia Power.

In 2023, the employee composition by education level was dominated by Bachelor's Degree holders at 36.17% of the total number of PLN Indonesia Power employees.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2023
Employee Composition by Education Level in 2021-2023

Tingkat Pendidikan Level of Education	Tahun Year			Perubahan 2022 ke 2023 Change from 2022 to 2023
	2021	2022	2023	
S3 Doctorate Degree (S3)	0	1	2	1
S2 Master's Degree (S2)	162	186	231	45
S1 Bachelor's Degree (S1)	1.565	1.599	1.972	373
Diploma	1.513	1.458	1.758	300
SLTA Senior High School	967	934	1.477	543
SLTP/SD Junior High/Primary School	14	11	12	1
Jumlah Total	**4.221**	**4.189**	**5.452**	**1.263**

Berdasarkan Jenis Kelamin
By Gender

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai PLN Indonesia Power tahun 2023 didominasi oleh pegawai pria yaitu sebanyak 89,97% dan pegawai wanita sebanyak 10,03%, dengan rinciannya sebagai berikut:

By gender, PLN Indonesia Power's employee composition in 2023 was dominated by males, at 89.97%, followed by female employees at 10.03%. The details are shown below:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
Employee Composition by Gender in 2021-2023

Jenis Kelamin Gender	Tahun Year			Perubahan 2022 ke 2023 Change from 2022 to 2023
	2021	2022	2023	
Pria Male	3.791	3.758	4.905	1.147
Wanita Female	430	431	547	116
Jumlah Total	**4.221**	**4.189**	**5.452**	**1.263**

Berdasarkan Status Kepegawaian
By Employment Status

Berdasarkan Status Kepegawaian, komposisi pegawai PLN Indonesia Power tahun 2023 didominasi oleh *outsourcing* yaitu sebanyak 11.923 meningkat 73,22%, dibanding tahun 2022.

By employment status, PLN Indonesia Power's employee composition in 2023 was dominated by outsourced employees, at a total of 11,923 people, which was an increase by 73.22% from 2022.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Pegawai Tahun 2021-2023
Employee Composition by Employment Status in 2021-2023

Status Kepegawaian Employment Status	Tahun Year			Perubahan 2022 ke 2023 Change from 2022 to 2023
	2021	2022	2023	
Pegawai Tetap Permanent Employee	**4.221**	**4.189**	**5.452**	**1.263**
Organik PLN Indonesia Power PLN Indonesia Power Organic Employee	4.074	3.989	3.919	-70
Tugas Karya PLN PLN Secondee	107	161	1.491	1.330
Tugas Karya Anak Perusahaan Subsidiary Secondee	40	39	42	3
Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employee	**33**	**33**	**33**	**0**
***Outsourcing* /Alih Daya Outsourcing**	**8.221**	**8.730**	**11.923**	**3.193**
Jumlah* Total*	**12.475**	**12.952**	**17.408**	**4.456**

* Pegawai Tetap ditambah dengan Pegawai tidak tetap dan *Outsourcing* / Alih Daya
* Permanent Employees plus Non-Permanent Employees and Outsourcing

Berdasarkan Wilayah Kerja
By Work Area

Pada tahun 2023, jumlah pegawai terbanyak berdasarkan wilayah kerja berada di urutan pertama adalah Kantor Pusat dengan komposisi pegawai sebanyak 14,93% dikarenakan adanya penambahan unit baru, ada *spin off* tenaga kontrak PLN ke PLN IP. Di urutan kedua adalah Suralaya PGU dengan komposisi pegawai sebesar 10,20%, mengingat UBP Suralaya merupakan unit dengan kapasitas terpasang terbesar dibandingkan seluruh unit yang ada.

In 2023, the Head Office was the work area with the most employees at 14.93%. This was contributed by the addition of new units and the spin-off of PLN's contract employees to PLN IP. Suralaya PGU followed with 10.20%, considering that Suralaya GBU has the largest installed capacity compared to any other units.



Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2021-2023

Employee Composition by Work Area in 2021-2023

Wilayah Kerja Working Area	Tahun Year			Perubahan 2022 ke 2023 Change from 2022 to 2023
	2021	2022	2023	
Kantor Pusat Head Office	667	683	814	131
UBP GBU Suralaya	645	610	556	-54
UBP GBU Priok	315	307	299	-8
UBP GBU Saguling	180	178	172	-6
UBP GBU Kamojang	227	222	284	62
UBP GBU Semarang	228	214	214	0
UBP GBU Mrica	152	150	137	-13
UBP Grati	191	185	182	-3
UBP GBU Bali	197	200	199	-1
Unit Bisnis Pemeliharaan Maintenance Business Unit	335	336	376	40
UBP GBU Banten 1 Suralaya	98	95	95	0
UBP GBU Banten 2 Labuan	116	114	112	-2
UBP GBU Banten 3 Lontar	153	155	147	-8
UBP GBU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu	140	136	127	-9
UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala	104	107	104	-3
UBP GBU Pangkalan Susu	186	163	157	-6
UBP GBU Cilegon	105	101	98	-3
UBP GBU Barru	54	51	58	7
UBP GBU Jeranjang	47	44	41	-3
UBP GBU Sanggau	1	1	1	0
UBP GBU Sintang	1	1	1	0
UBP GBU Holtekamp	2	1	1	0
Project Unit	76	75	0	-
UBP GBU Berau	1	1	1	0
UBP GBU Labuhan Angin	-	59	59	0
UBP GBU Kalbar 1	-	-	0	-
UBP GBU Asam-Asam	-	-	185	185
UBP GBU Teluk Sirih	-	-	92	92
UBP GBU Ombilin	-	-	86	86
UBP GBU Singkawang	-	-	104	104
UBP GBU Mahakam	-	-	157	157
UBP GBU Keramasan	-	-	137	137
UBP GBU Barito	-	-	113	113
UBP GBU Tello	-	-	68	68
UBP GBU Kepulauan Riau	-	-	46	46
UBP GBU Bengkulu	-	-	61	61
UBP GBU Jambi	-	-	77	77
UBP GBU Bukittinggi	-	-	77	77
UBP GBU Jatigede	-	-	14	14
Jumlah Pegawai Number of Employees	**4.221**	**4.189**	**5.452**	**1.263**

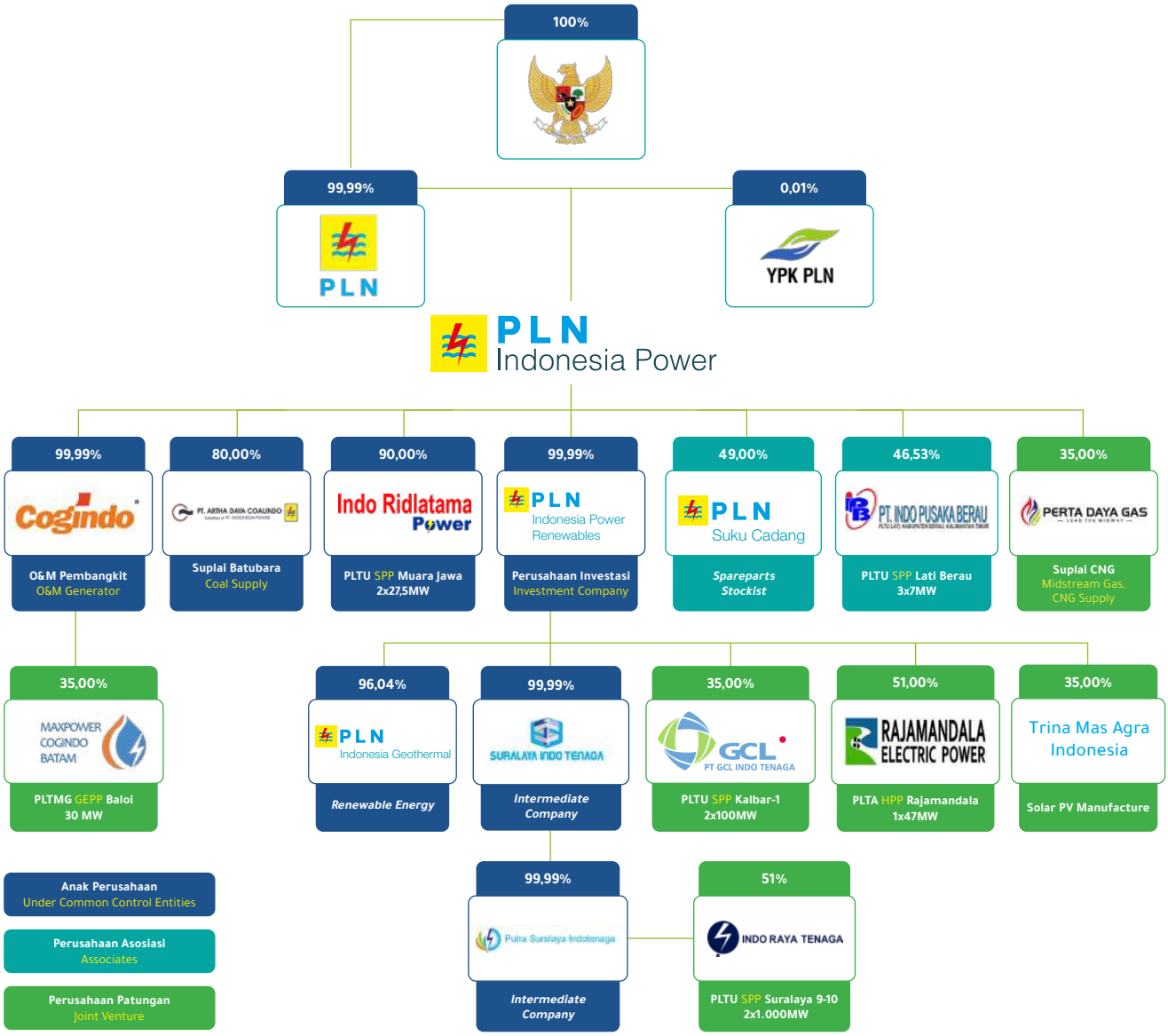
Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan portofolio usaha secara lebih sistematis dan komprehensif, PLN Indonesia Power telah membentuk Bidang Portfolio and Subsidiaries Management di bawah Direktorat Bisnis dan Niaga yang mewadahi mekanisme hubungan *parenting* terhadap Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan maupun Perusahaan Afiliasi.

Saat ini, PLN Indonesia Power memiliki struktur grup Perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) Anak Perusahaan, 1 (satu) Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*), 2 (dua) Perusahaan Asosiasi serta 5 (lima) *Special Purpose Company* (SPC) serta 1 (satu) Anak Perusahaan di bawah PT PLN Indonesia Power Renewables, sebagaimana tergambar dalam struktur di bawah ini:

To improve its portfolio management in more systematic and comprehensive manner, PLN Indonesia Power has formed the Portfolio and Subsidiaries Management Division under the Directorate of Business and Commerce which accommodates the parenting relationship mechanism for Subsidiaries, Joint Venture Companies and Affiliated Companies.

Currently, PLN Indonesia Power has a group structure consisting of 4 (four) Subsidiaries, 1 (one) Joint Venture Company, 2 (two) Associated Companies and 5 (five) Special Purpose Company (SPC) and 1 (one) Subsidiary under PT PLN Indonesia Power Renewables, as illustrated in the structure below:



* PT Cogindo DayaBersama telah melakukan rebranding nama dan logo korporat menjadi PT PLN Indonesia Power Services sejak tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT CDB No. 08 tanggal 19 April 2024 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan KEMENKUMHAM No. AHU-0025785.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 02 Mei 2024

* PT Cogindo DayaBersama has rebranded its corporate name and logo to PT PLN Indonesia Power Services since May 02, 2024 based on the Deed of Statement of Shareholders of PT CDB No. 08 dated April 19, 2024 which has been legalized based on the Decree of KEMENKUMHAM No. AHU-0025785.AH.01.02.TAHUN 2024 dated May 02, 2024.

Anak Perusahaan merupakan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh PLN Indonesia Power, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan untuk memperoleh manfaat dari aktivitas Anak Perusahaan tersebut.

A **Subsidiary** is an entity controlled by PLN Indonesia Power, in which the Company has the authority to regulate the financial and operational policies of the subsidiary to gain benefits from the activities of such subsidiary.

Perusahaan *Joint Venture* (Perusahaan Patungan) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi, dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada perusahaan ini, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

A **Joint Venture** is an entity created by two or more parties with participating interests, which is regulated under the agreement of shared control over an activity. In this type of company, the strategic financial and operational decisions that influence its activities must be made by all controlling parties through consensus.

Perusahaan Asosiasi merupakan suatu perusahaan dimana PLN Indonesia Power mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Sedangkan definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional, tetapi tidak mengendalikan maupun mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

An **Associate** is an entity under PLN Indonesia Power's significant influence. It is neither a subsidiary nor a participating interest in a joint venture. "Significant influence" here is defined as the authority to participate in the financial and operational policy decision-making, without any control or joint control over such policy.

Special Purpose Company (SPC) adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk melakukan aktivitas khusus dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini biasanya, dimiliki hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya.

A **Special Purpose Company** is an entity established to perform certain activities, with limited objective or focus. This type of company is commonly owned almost entirely by its sponsor legal entity.

PLN Indonesia Power mengelompokan portofolio Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Afiliasi sesuai dengan aktivitas, proses bisnis dan misi strategisnya agar semakin fokus dalam memberikan kinerja yang optimal. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mendorong Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Afiliasi untuk berkontribusi pada keseluruhan rantai nilai bidang usaha ketenagalistrikan, sebagai upaya mendukung penciptaan nilai Perusahaan bagi PT PLN (Persero) dan segenap pemangku kepentingan.

PLN Indonesia Power groups its portfolio of Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates according to their activities, business processes, and strategic missions, in order to gain better focus in delivering optimal performance. It aims to encourage the Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates to contribute to the entire value chain in the power industry, as an effort to support the creation of corporate value for PT PLN (Persero) and the stakeholders.



Skema Sinergi dan *Alignment* PLN Indonesia Power Group

Scheme of PLN Indonesia Power Group Synergy and Alignment

Distribusi & Transportasi Energi
Energy Supply & Transport

Up Stream

PT. ARTHA DAYA COALINDO

Coal Trading, Coal Transport, & Port Management

Mid Stream

PERTA DAYA GAS — LEAD THE MIDWAY —

LNG Terminal & CNG Plant

Down Stream

Pembangkit Listrik
Power Plant

- Batubara — Coal
- Hydro — Hydro
- Bahan Bakar — Fuel
- Gas — Gas
- Angin — Wind
- Tenaga Surya — Solar

Non IPP

- PLTA — HPP
- PLTP — GPP
- PLTU — SPP
- PLTD — DPP
- PLTG — GTPP
- PLTGU — CCPP

IPP

PLN Indonesia Geothermal

Renewable Power Plant

PLTU SPP Lati Berau 3x7 MW

Indo Ridlatama Power

PLTU SPP Muara Jawa 2x27,5 MW

Cogindo

PLTD DPP Tenau 40 MW
PLTD DPP Nusa Penida 10 MW

PLN Indonesia Power Renewables

Investment & Participating interest

- RAJAMANDALA ELECTRIC POWER — PLTA HPP Rajamandala 47 MW
- GCL — PLTU SPP Kalbar 1 2x100 MW
- INDO RAYA TENAGA — PLTU SPP Suralaya 9-10 2x1.000 MW

Operasi & Pemeliharaan
Operation & Maintenence

PLN Indonesia Power × Cogindo

Operasi & Pemeliharaan
Operation & Maintenance

MRO Diesel & Gas Services

- PLTP — GPP
- PLTU — SPP
- PLTDG — DGPP
- PLTGU — CCPP

Dukungan Teknis
Technical Support

PLN Indonesia Power

Full Package MI & Remaining Life Assessment

Cogindo

Wartsila Stockist

PT. ARTHA DAYA COALINDO

Dredging

PLN Suku Cadang

Supply Chain Management

Daftar Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi

List of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, PLN Indonesia Power melakukan konsolidasi laporan keuangan Anak Perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari:

Until December 31, 2023, PLN Indonesia Power has consolidated the financial statements from its Subsidiaries, either owned directly or indirectly, comprising the followings:

Anak Perusahaan
Subsidiary

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham Shareholding %	Bidang Usaha Line of Business
1	PT Cogindo DayaBersama (saat ini bernama PT PLN Indonesia Power Services) (saat ini bernama PT PLN Indonesia Power Services)	15 April 1998 April 15, 1998	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat** **Head Office** Gedung COGINDO Jl. Raya Pasar Minggu No.190 Jakarta 12510 (62 - 21) 217 89990 (62 - 21) 217 89990 info@cogindo.co.id http://www.cogindo.co.id/	• PLN IP: 99,99% • YPK IP: 0,01%	Energi ketenagalistrikan; operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, serta *co-generation* dengan kegiatan usaha: a. Penjualan tenaga listrik b. *Operation & Maintenance* (OM) *services* c. *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) *Service* dan *Stockiest* d. Sewa genset Electricity power, power plant operations and maintenance, and co-generation, with the following business activities: a. Electricity sales b. Operations & Maintenance (O&M) services c. Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) services and Stockist d. Power generator rental
2	PT Artha Daya Coalindo	21 Oktober 1997 October 21, 1997	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat** **Head Office** Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan (62-21) 520 3725 support@arthadayacoalindo.co.id http://www.arthadayacoalindo.co.id/	• PLN IP: 80% • PT Desira Pratama Lines: 10% • PT Arthindo Utama: 10%	Perdagangan, penambangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara, dengan kegiatan usaha: a. Penjualan Batubara b. *Port Management* c. O&M Kapal Keruk d. Penyediaan *Biomass* Coal trade, mining, transport, loading-unloading, marketing, and agency, with the following business activities: a. Coal sales b. Port management c. Dredger vessel O&M d. Biomass provision
3	PT Indo Ridlatama Power	28 September 2007 September 28, 2007	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat** **Head Office** Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 10 Jakarta Selatan 12760 (62 21) 2503 1409 - http://www.indoridlatamapower.com **Kantor Pembangkit** **Power Plant Office** Jalan Moh. Hatta RT 023 Handil II Muara Jawa Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur	• PLN IP: 90% • PT Ridlatama Bangun Mandiri: 10%	Pembangkitan tenaga listrik melalui pengusahaan PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW di Muara Jawa Kalimantan Timur. Power generation through management of Muara Jawa SPP 2x27.5 MW in Muara Jawa, East Kalimantan.

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham Shareholding %	Bidang Usaha Line of Business
4	PT PLN Indonesia Power Rewenables*	20 Desember 2013 December 20, 2013	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat** **Head Office** Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2 Jakarta Selatan (62 21) 526 7666 (62 21) 525 2623 info@putraindotenaga.co.id http://www.putraindotenaga.co.id/	• PLN IP: 99,99% • YPK IP: 0,01%	*Participating interest*, yaitu sebagai Anak Perusahaan Indonesia Power yang ditetapkan *unrestricted terhadap Indenture Covenant Global Bond*, untuk keperluan pendanaan proyek, dengan kegiatan usaha: a. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power untuk pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW b. Penyertaan pada PT GCL Indo Tenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW c. Penyertaan pada PT Suralaya Indo Tenaga sebagai *intermediate* company atas PT Indo Raya Tenaga dalam rangka pengembangan PLTU Suralaya 9-10 2x1.000 MW d. Penyertaan pada PT PLN Indonesia Geothermal (ex PT Indo Tenaga Hijau) untuk pengembangan EBT dan Pengembangan PLTP PLN Grup e. Penyertaan pada PT Trina Mas Agra Indonesia untuk pengembangan Solar Manufacture Participating interest, i.e. as a Subsidiary of PLN Indonesia Power that is defined as unrestricted to Indenture Global Bond Covenant for project funding, with the following business activities: a. Equity participation in PT Rajamandala Electric Power for development of Rajamandala HPP 47 MW b. Equity participation in PT GCL Indo Tenaga for development of Kalbar-1 SPP 2x100 MW c. Equity participation in PT Suralaya Indo Tenaga as intermediate company of PT Indo Raya Tenaga for development of Suralaya SPP 9-10 2x1,000 MW d. Equity participation in PT PLN Indonesia Geothermal (formerly PT Indo Tenaga Hijau) for development of NRE-based power plants and geothermal power plants of PLN Group e. Equity participation in PT Trina Mas Agra Indonesia for solar manufacture development

* PLN Indonesia Power Renewables (sebelumnya PT Putra Indotenaga) telah bertransformasi menjadi entitas khusus pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sejak tanggal 03 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01 tgl. 02 Agustus 2023 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan KEMENKUMHAM No. AHU-0148841.AH.01.11 tanggal 03 Agustus 2023.

* PLN Indonesia Power Renewables (formerly PT Putra Indotenaga) has been transformed into a special entity for the development of New Renewable Energy (EBT) since August 03, 2023 based on the Deed of Shareholders Resolution No. 01 dated August 02, 2023 which has been approved based on the Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0148841.AH.01.11 dated August 03, 2023.

Adapun Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi yang dimiliki PLN Indonesia Power sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the followings are the Joint Venture and Associates owned by PLN Indonesia Power as of the end of 2023:

Perusahaan Patungan
Joint Venture

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham Shareholding %	Bidang Usaha Line of Business
1	PT Perta Daya Gas	26 April 2012 April 26, 2012	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat** Head Office Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Jl. Ronggo Warsito No.1 Semarang, Jawa tengah (024) 86570237 mail@pertadayagas.co.id http://www.pertadayagas.co.id/ **Kantor Perwakilan Jakarta** **Jakarta Representative Office** Gedung The East Lt. 11 Unit 02 & 05 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1 Jakarta Selatan Kode Pos: 12950 (021) 295-270-78	• PLN IP: 35% • PT Pertamina Gas: 65%	Transportasi LNG melalui darat dan laut, penyimpanan dan regasifikasi LNG, serta usaha lain terkait industri gas bumi. Kegiatan usaha: a. CNG Plant PLTGU Tambak Lorok Semarang b. FSRU di Bali c. Gasifikasi di PLTMG Sorong Land and sea transport of LNG, LNG storage and regasification, and other businesses related to natural gas industry Business Activities: a. CNG Plant at CCPp Tambak Lorok Semarang b. FSRU in Bali c. Gasification in PLTMG Sorong



Perusahaan Asosiasi
Associate

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham PLN Indonesia Power PLN Indonesia Power's Shareholding	Bidang Usaha Line of Business
1	PT Indo Pusaka Berau	12 Januari 2005 January 12, 2005	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat Head office** Jalan Pemuda No. 356 Tanjung Redeb, Berau 77311 Kalimantan Timur (62 554) 2021672 (62 554) 2021691 (62 554) 2027003 secretary@ipb.co.id http://www.ipb.co.id/ **Kantor Perwakilan Jakarta** **Jakarta Representative Office** Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2 Jakarta Selatan (62 21) 525 0912 (62 21) 525 0912	• Pemkab Berau: 49,48% • PLN IP: 46,53% • Jasin Effrin Jaya: 3,99%	Pembangkitan tenaga listrik, melalui pengusahaan PLTU Lati 3 x 7 MW di Tanjung Redeb, Berau Kalimantan Timur. Power generation through management of Lati SPP 3x7 MW in Tanjung Redeb, Berau, East Kalimantan
2	PT PLN Suku Cadang	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat Head Office** Recapital Building Lt. 3 Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160 (62 21) 724 6184 (62 21) 739 8581 email@pln.sc.co.id www.plnsc.co.id	• PLN IP: 49% • PLN NP: 51%	a. Perdagangan barang dan jasa yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, penyediaan spare parts pembangkit b. *E-commerce* di bidang *supply chain management* c. Jasa *Reverse engineering* d. Jasa Konsultan a. Electricity-related goods and service trade, power plant spare parts provision b. E-commerce in supply chain management c. Reverse engineering service d. Consultant service

PT PLN Indonesia Power Renewables merupakan Anak Perusahaan PLN Indonesia Power yang ditetapkan sebagai *unrestricted subsidiary* terhadap *Indenture Covenant Global Bond* PT PLN (Persero). Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan pembangkit baru, PLN Indonesia Power membentuk 1 Anak Perusahaan dan 4 (empat) *Special Purpose Company* di bawah PT PLN Indonesia Power Renewables yang fokus dalam melaksanakan penugasan dalam rangka proyek pembangkitan serta pengembangan energi baru dan/atau terbarukan (EBT) sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembentukannya, yang terdiri dari:

PT Putra Indotenaga is a Subsidiary of PLN Indonesia Power that is defined as unrestricted to Indenture Global Bond Covenant of PT PLN (Persero). To support the acceleration of new power plant development, PLN Indonesia Power has established one (1) Subsidiary and five (5) Special Purpose Companies under PT PLN Indonesia Power Renewables, to focus working on the duties in the development of power plants and new and/or renewable energy (NRE) as mandated in the purpose of their establishment, which are:

Afiliasi dari Anak Perusahaan (Anak Perusahaan di Bawah PT PLN Indonesia Power Renewables)

Affiliate of Subsidiary (Subsidiary Under PT PLN Indonesia Power Renewables)

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham PLN Indonesia Power Renewables PLN Indonesia Power's Shareholding via Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business
1	PT PLN Indonesia Geothermal *	10 Desember 2019 December 10, 2019	Beroperasi In operation	Jl. Jend Gatot Subroto Kav 18 Jakarta Selatan Lt. 1 (62-21) 252 3005 - marketing.ITH@indotenagahijau.co.id https://indotenagahijau.co.id	• PLN IPRen: 96,04% • YPK IP: 3,94%	Pengusahaan energi baru dan/atau terbarukan, Jasa Penunjang ketenagalistrikan serta Perdagangan dan jasa terkait ketenagalistrikan berbasis energi dan/atau terbarukan. New and/or renewable energy (NRE) management, electricity supporting services, and NRE-based electricity-related trade and services

* PT PLN Indonesia Geothermal sebelumnya bernama PT Indo Tenaga Hijau telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 18 September 2023 dan sebelumnya PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) yang telah berubah nama lebih dulu berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 November 2017

* PT PLN Indonesia Geothermal was previously known as PT Indo Tenaga Hijau. The change of name was recorded in the Notarial Deed dated August 03, 2023. Initially, it was known as PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) and was later changed into PT Indo Tenaga Hijau under Notarial Deed dated November 07, 2017.

Special Purpose Company di Bawah PT PLN Indonesia Power Renewables

Special Purpose Company Under PT PLN Indonesia Power Renewables

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham PLN Indonesia Power Renewables PLN Indonesia Power's Shareholding via Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business
1	PT Rajamandala Electric Power	14 Februari 2012 February 14, 2012	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat Head Office** Wisma PMI Lt.2 Suite 202 Jalan Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170 **Kantor Pembangkit Power Generation Office** PLTA Rajamandala Jl. PLTA Rajamandala, Kp. Bantarcaringin, Desa Cihea, RT 4 RW 10, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat - 43283	• PLN IPRen: 51% • KPIC Netherland BV (Kansai): 49%	Pembangkit tenaga listrik melalui pengoperasian PLTA Rajamandala 1x47 MW (COD sejak 12 Mei 2019). Electricity generation via operation of PLTA Rajamandala 1x47 MW (COD on May 12, 2019
2	PT GCL Indo Tenaga	25 Februari 2016 February 25, 2016	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat Head Office** SOHO Capital Building 23rd Floor Unit 05 Jl. Letjend. S. Parman Kav 28 Jakarta Barat (62 21) 3003 3370 **Kantor Pembangkit Power Generation Office** PLTU Kalbar-1 Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat	• PLN IPRen: 35% • Taicang Harbour Golden Concord Limited (GCL): 65%	Didirikan khusus untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara PLTU Kalbar-1 2 x 100 MW Especially established to develop, operate, and maintain PLTU Kalbar-1 2x100 MW



No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham PLN Indonesia Power Renewables PLN Indonesia Power's Shareholding via Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business
3	PT Suralaya Indo Tenaga	15 November 2019 November 15, 2019	Beroperasi In operation	Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Lt. 2 Jakarta Selatan (62 21) 526 7666	• PT PIT : 99,8% • YPK PT Indonesia Power : 0,2%	*Intermediate company* dalam rangka pengembangan PLTU Jawa 9-10 kapasitas 2x1000 MW Intermediate company in the development of Jawa 9-10 SPP 2x1,000 MW
4	PT Putra Suralaya Indotenaga	15 November 2019 15 November 2019	Beroperasi In operation	Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Lt. 2 Jakarta Selatan (62 21) 526 7666	• PLN IPRen : 99,8% • PT Energi Prima Nusantara : 0,2%	*Intermediate company* dalam rangka pengembangan PLTU Jawa 9-10 kapasitas 2x1000 MW Intermediate company in the development of Jawa 9-10 SPP 2x1,000 MW
5	PT Indo Raya Tenaga	15 Maret 2017 March 15, 2017	Beroperasi In operation	**Kantor Pusat Head Office** Sentral Senayan II, 17th Floor Suite 217B Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat 10270 (62 21) 5790 0202 (62 21) 5790 0208 info@irt.co.id www.irt.co.id **Kantor Pembangkit Power Generation Office** PLTU Jawa 9-10 Jl.Yos Sudarso Kelurahan Suralaya Merak Cilegon - Banten 42439	• PT Putra Suralaya Indo Tenaga: 51% • Barito Wahana Lestari (BWL): 49%	Pembangkitan tenaga listrik melalui pengembangan PLTU Suralaya 9-10 kapasitas 2x1000 MW Power generation through development of Suralaya 9-10 SPP 2x1,000 MW
6	PT Trina Mas Agra Indonesia	09 Oktober 2023 October 09, 2023	Beroperasi In operation	Jl. Indraprasta No. 6, Kawasan Industri Kendal Desa Wonorejo, Kabupaten Kendal - 51372	• PLN IPRen : 25% • PT Trina Dian Agra Energi : 75%	Manufaktur Sel dan Modul *Solar PV* Manufacturing of solar PV cell and module

Informasi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Afiliasi

Composition of Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries, Joint Ventures, Associates, and Affiliates

Berikut adalah komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Afiliasi PLN Indonesia Power per 31 Desember 2023:

Here is the composition of the Board of Directors (BOD) and Board of Commissioners (BOC) in Subsidiaries, Joint Ventures, Associates, and Affiliates of PLN Indonesia Power as of December 31, 2023:

Anak Perusahaan
Subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 BOC Composition by December 31, 2023		Komposisi Direksi per 31 Desember 2023 BOD Composition by December 31, 2023	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT Cogindo DayaBersama (saat ini bernama PT PLN Indonesia Power Services) (saat ini bernama PT PLN Indonesia Power Services)	Komisaris Utama President Commissioner	Khusnul Mubien	Direktur Utama President Director	Ade Hendratno
	Komisaris Commissioner	Masykuri Abdillah	Direktur Bisnis Director of Business	Kukuh Pambudi
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sunandar	Direktur Operasi Director of Operations	Mulyadi Koto
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Fredy Eko Prasetyo	Direktur Keuangan Director of Finance	Hari Muhardani Nasution
	Komisaris Commissioner	M. Mursid	Direktur SDM Director of Human Capital	R. Triyono Budi P
PT Artha Daya Coalindo	Komisaris Utama President Commissioner	Derina	Direktur Utama President Director	Judi Winarko
	Komisaris Commissioner	Iwan Zulkarnain	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Kresna Siwiyati
	Komisaris Commissioner	Marco Rosihan Yacub	Direktur Operasi Director of Operations	Andi Agung Bawono
PT Indo Ridlatama Power	Komisaris Utama President Commissioner	Eri Nurcahyanto	Plt. Direktur Utama (Merangkap) Acting President Director (Concurrently serving)	Sudjilan
	Plt. Komisaris Acting Commissioner	Doddy Sumantyawan	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Sudjilan
			Direktur Operasi Director of Operations	Lukman Dahri
PT PLN Indonesia Power Renewables*	Komisaris Utama President Commissioner	Zamraliani	Direktur Utama President Director	Wiryantono Setyolaksono
	Komisaris Commissioner	Stefanus Asat Gusma	Direktur Bisnis Komersial Director of Commercial Business	M. Imaduddin
			Direktur Keuangan Director of Finance	Laila Haerani

Perusahaan Patungan
Joint Venture

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 BOC Composition by December 31, 2023		Komposisi Direksi per 31 Desember 2023 BOD Composition by December 31, 2023	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT Perta Daya Gas	Komisaris Utama Komisaris Utama	Aji Sutrisno	Direktur Utama President Director	Arief Wardono
	Komisaris Commissioner	Hadameon Aritonang	Wakil Direktur Utama Vice-President Director	Hadi Munib



Perusahaan Asosiasi
Associate

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 BOC Composition by December 31, 2023		Komposisi Direksi per 31 Desember 2023 BOD Composition by December 31, 2023	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT Indo Pusaka Berau	Komisaris Utama President Commissioner	Heru Setiawan	Direktur Utama President Director	H. Najemuddin
	Komisaris Commissioner	Kamaruddin	Direktur Operasi Director of Operations	Jefri Ade Saputra
	Komisaris Commissioner	Ivan Julianto	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Muhamad Teguh Satria
PT PLN Suku Cadang	Komisaris Utama President Commissioner	Tri Tjahjonoputro	Direktur Utama President Director	Thommi Haposan
	Komisaris Commissioner	Sapto Harjono Wahjoe Sedjati	Direktur Enjinering dan Layanan Director of Engineering and Services	Andy Adam
	Komisaris Commissioner	Najahul Imtihan	Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Miftahul Huda

Perusahaan Afiliasi dan Anak Perusahaan (Anak Perusahaan di Bawah PT PLN Indonesia Power Renewables)
Affiliate of Subsidiary (Subsidiary under PT PLN Indonesia Power Renewables)

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 BOC Composition by December 31, 2023		Komposisi Direksi per 31 Desember 2023 BOD Composition by December 31, 2023	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT PLN Indonesia Geothermal*	Presiden Komisaris President Commissioner	Hening Kyat Pamungkas	Direktur Utama President Director	Budi Wibowo
	Komisaris Commissioner	M. Idris Froyoto Sihite	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Hastini Handayani
			Direktur Proyek Director of Projects	Lambok Renaldo Siregar

* PT PLN Indonesia Geothermal (sebelumnya bernama PT Indo Tenaga Hijau telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 18 September 2023 dan sebelumnya PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) yang telah berubah nama lebih dulu berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 November 2017)

* PT PLN Indonesia Geothermal was previously known as PT Indo Tenaga Hijau. The change of name was recorded in the Notarial Deed dated August 03, 2023. Initially, it was known as PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) and was later changed into PT Indo Tenaga Hijau under Notarial Deed dated November 07, 2017.

Special Purpose Company di Bawah PT PLN Indonesia Power Renewables

Special Purpose Company under PT PLN Indonesia Power Renewables

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 BOC Composition by December 31, 2023		Komposisi Direksi per 31 Desember 2023 BOD Composition by December 31, 2023	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT Rajamandala Electric Power	Komisaris Utama President Commissioner	Takayuki Doi	Direktur Utama President Director	Del Eviondra
	Komisaris Commissioner	Cita Dewi	Direktur Keuangan Director of Finance	Masaki Kawarazaki
PT GCL Indo Tenaga	Komisaris Utama President Commissioner	Agung Siswanto	Direktur Utama President Director	Ke Zhan
	Komisaris Commissioner	Xiao Shen	Direktur Director	Luo Shouq
	Komisaris Commissioner	Sun Haoming	Direktur Director	Metty Kronika Indirawati
PT Suralaya Indo Tenaga	Komisaris Commissioner	M. Imaduddin	Direktur Director	Laila Haerani
PT Putra Suralaya Indotenaga	Komisaris Commissioner	Laila Haerani	Direktur Directo	M. Imaduddin
PT Indo Raya Tenaga	Komisaris Utama President Commissioner	Nurlely Aman	Direktur Utama President Director	Peter Wijaya
	Komisaris Commissioner	Prajogo Pangestu	Wakil Presiden Direktur Utama Vice-President Director	Arif Amiruddin
			Direktur Keuangan Director of Finance	Erwin Ardianto
			Direktur Konstruksi/Operasi/ Pemeliharaan Director of Constructions/Operations/ Maintenance	Jinyoung Jeong
			Direktur Teknis Director of Technology	Yudianto Permono
			Direktur Bisnis Director of Business	Jonny Karl
PT Trina Mas Agra Indonesia	President Komisaris President Commissioner	Bi Xiao Lei	Presiden Direktur President Director	Ooi Kok Tiong
	Wakil President Komisaris Vice-President Commissioner	Hermawan Tarjono	Wakil Presiden Direktur Vice-President Director	Lokita Prasetya
	Komisaris Commissioner	Xu Ming	Direktur Director	Zhang Yanfei
	Komisaris Commissioner	Yabes Paulus Kilis	Direktur Director	Lin Mingxing
	Komisaris Commissioner	Muhammad Imaduddin	Direktur Director	Zha Rui
			Direktur Director	Alex Sutanto
			Direktur Director	Djoko Martono



Ringkasan Informasi Kinerja Keuangan pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Afiliasi

Financial Highlights of Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan Company	Total Aset Total Assets		Pendapatan Usaha Revenue		Beban Usaha Operating Expenses		Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)		Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Anak Perusahaan Subsidiary										
PT Cogindo DayaBersama	1.199.643	1.117.351	1.752.466	1.607.653	1.539.528	1.476.553	212.938	131.100	156.455	91.097
PT Artha Daya Coalindo	667.885	735.598	2.326.669	2.304.250	2.185.722	2.201.512	102.186	98.543	78.331	76.663
PT Indo Ridlatama Power	1.548.881	1.548.881	344.126	314.132	350.366	248.446	(6.240)	65.686	(107.385)	(23.985)
PT PLN Indonesia Power Renewables*	7.257.224	8.176.387	8.508	73.491	72.247	81.819	(63.739)	(8.328)	634.279	1.046.357
Perusahaan Patungan Joint Venture										
PT Perta Daya Gas	437.192	375.685	206.281	214.098	77.167	88.542	129.114	125.556	35.674	54.660
Perusahaan Asosiasi Associate										
PT Indo Pusaka Berau	267.722	314.311	103.797	125.465	92.407	156.196	11.390	(30.731)	12.966	(25.264)
PT PLN Suku Cadang	438.440	778.247	506.510	887.976	461.944	826.998	44.566	60.978	30.691	29.264
Perusahaan Afiliasi Affiliate										
PT PLN Indonesia Geothermal**	91.956	204.335	8.508	74.955	5.064	55.371	(2,637)	37.842	(4.334)	31.787
PT Rajamandala Electric Power (Ribuan USD) (in thousand US$)	162.496	160.972	13.405	13.173	383	233	13.022	12.940	708	(1.006)
PT GCL Indo Tenaga (Ribuan USD) (in thousand US$)	436.840	423.183	106.273	109.519	58,820	63.296	47,453	46.223	25.158	22.061
PT Suralaya Indo Tenaga	5.693.557	6.444.991	533.159	940.565	0	940.565	533.159	940.565	533.159	940.565
PT Putra Suralaya Indotenaga	5.693.508	6.444.942	533.159	940.566	0	0	533.159	940.566	533.159	940.565
PT Indo Raya Tenaga (Ribuan USD) (in thousand US$)	2.307.695	2.984.272	956.757	722.138	789,980	463.937	166,777	258.201	70,299	120.893
PT Trina Mas Agra Indonesia***	-	121.902	-	-	-	2.141	-	(2.141)	-	(2.130)

*) PT PLN Indonesia Power Renewables, sebelumnya bernama PT Putra Indotenaga telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 3 Agustus 2023

**) PT PLN Indonesia Geothermal (sebelumnya bernama PT Indo Tenaga Hijau telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 18 September 2023 dan sebelumnya PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) yang telah berubah nama lebih dulu berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 November 2017)

***) PT Trina Mas Agra Indonesia, pada tahun 2022 belum ada Laporan Keuangan karena PLN IP Group baru melakukan *chip in* pada TW IV 2023.

*) PT PLN Indonesia Power Renewables was previously known as PT Putra Indotenaga. The change of name was recorded in the Notarial Deed dated August 03, 2023.

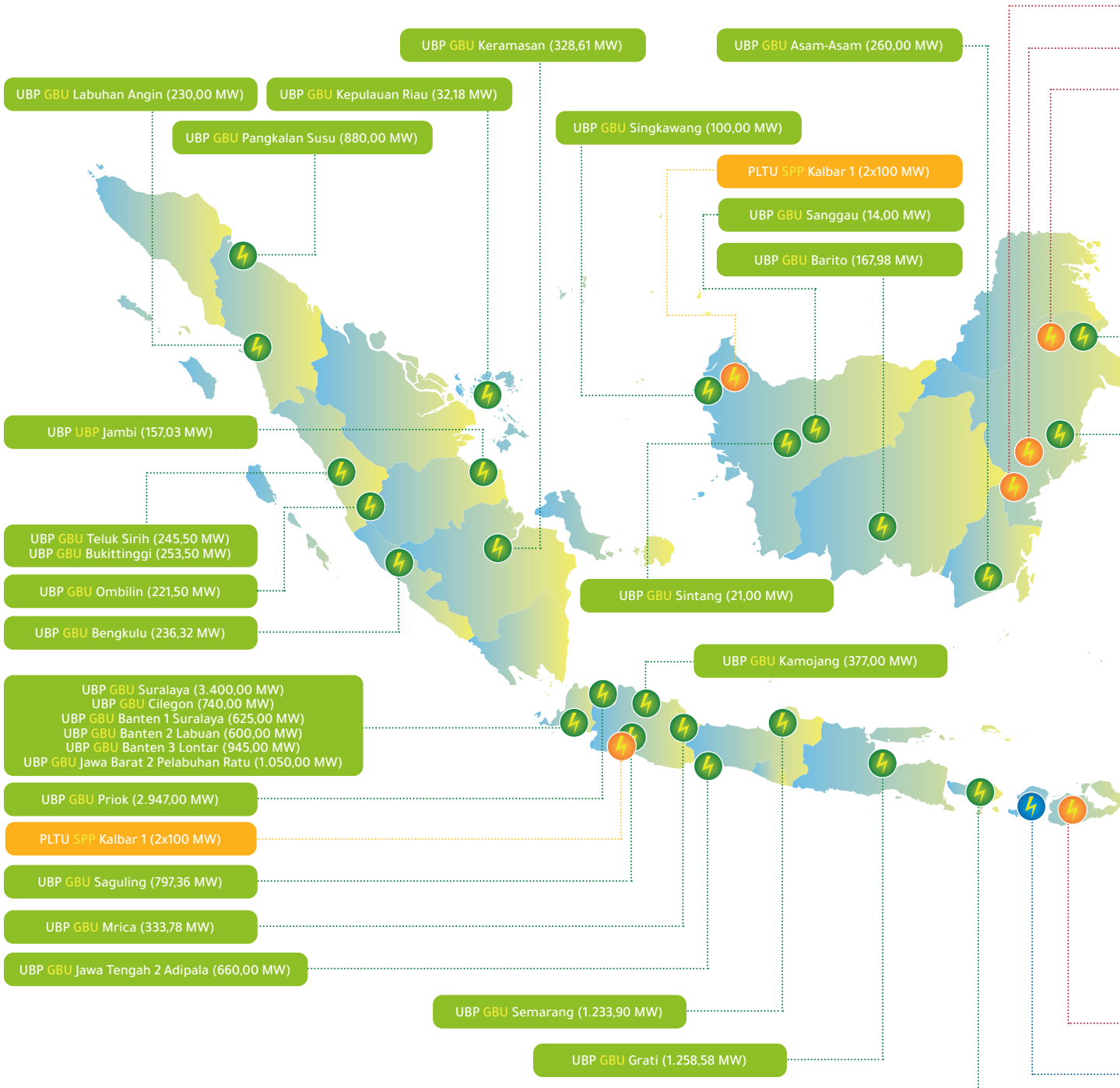
**) PT PLN Indonesia Geothermal was previously known as PT Indo Tenaga Hijau. The change of name was recorded in the Notarial Deed dated August 03, 2023. Initially, it was known as PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) and was later changed into PT Indo Tenaga Hijau under Notarial Deed dated November 07, 2017

***) The Financial Statements 2022 for PT Trina Mas Agra Indonesia was nonexistent, as PLN IP Group had just invested in Q4 2023.

Peta Wilayah Operasi
Map of Operational Areas

Wilayah operasi Perusahaan tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

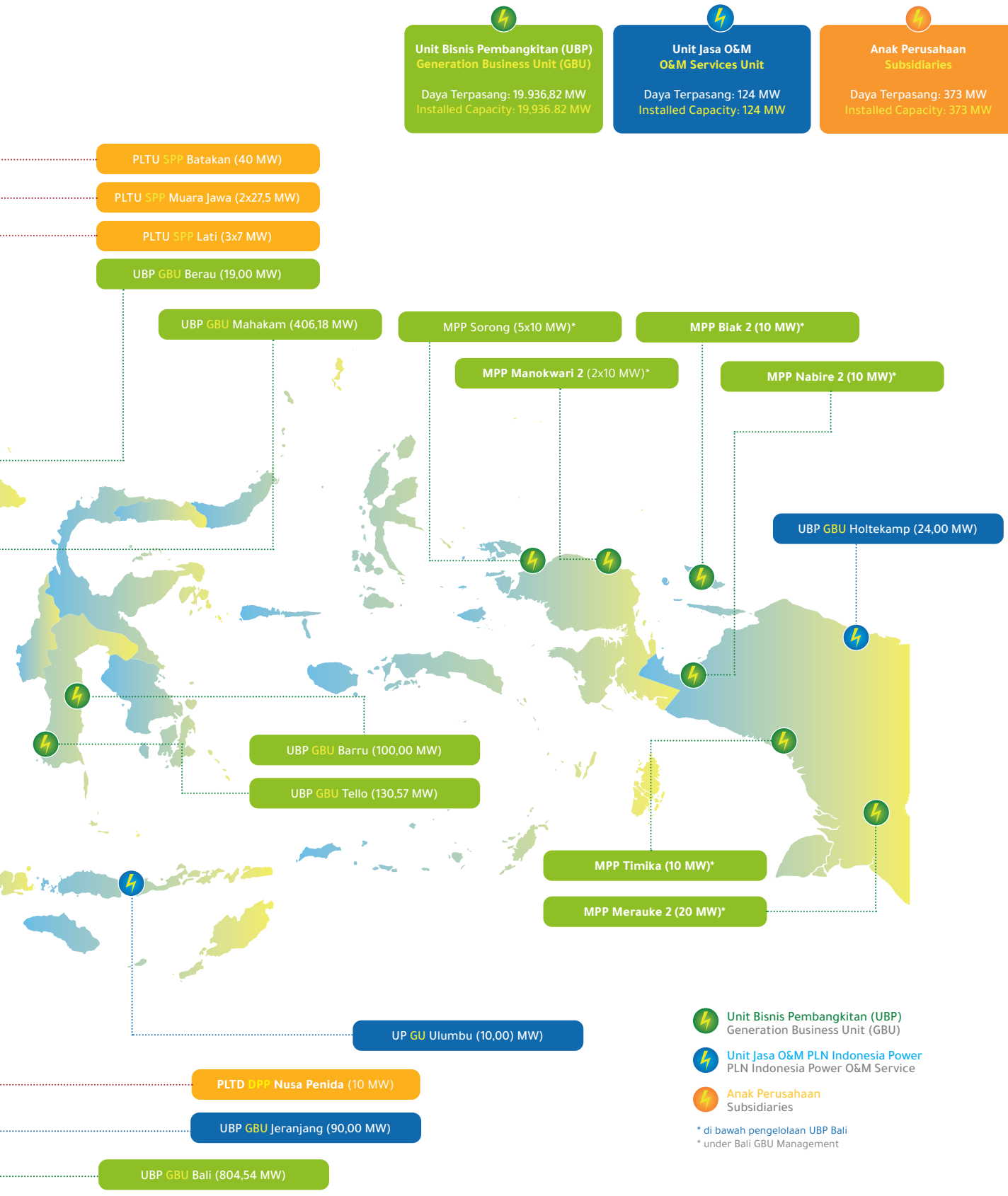
The Company's operations spread across Indonesia, including the islands of Sumatra, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, and Papua.



Unit Bisnis Pembangkitan (UBP)
Generation Business Unit (GBU)
Daya Terpasang: 19.936,82 MW
Installed Capacity: 19,936.82 MW

Unit Jasa O&M
O&M Services Unit
Daya Terpasang: 124 MW
Installed Capacity: 124 MW

Anak Perusahaan
Subsidiaries
Daya Terpasang: 373 MW
Installed Capacity: 373 MW



Unit Bisnis Pembangkitan (UBP)
Generation Business Unit (GBU)

Unit Jasa O&M PLN Indonesia Power
PLN Indonesia Power O&M Service

Anak Perusahaan
Subsidiaries

* di bawah pengelolaan UBP Bali
* under Bali GBU Management

Daftar Alamat Unit
List of Unit Addresses

Unit Bisnis Pembangkit (UBP)
Generation Business Units (GBU)

UBP GBU Suralaya
Jl. Raya PLTU Suralaya, PO BOX 15 Cilegon, Banten 42456
(62-254) 571 230, 571 240, 571 242
(62-254) 571 235

UBP GBU Ombilin
Jl. Prof M. Yamin, SH, Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah Segar, Kota Sawahlunto Sumatera Barat 27422
(0754) 410354

UBP GBU Banten 1 Suralaya
Jl. Yos Sudarso PLTU Suralaya 8, Kel. Suralaya Kec. Pulomerak, Cilegon, Banten 42439
(62-254) 570 402; (62-254) 7830 066
(62-254) 571 869

UBP GBU Teluk Sirih
Jl. Raya Padang - Painan KM 25
Kel. Teluk Kabung Tengah, Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang, Sumatera Barat 25237

UBP GBU Banten 2 Labuan
Jl. Laba Terusan Panimbang, Ds. Sukamaju Kec. Labuan, Kab. Pandeglang Banten 42246
(62-253) 803 312, 805 015

UBP GBU Kepulauan Riau
Jl. Bakar Batu No. 55 (Lantai 5) Tanjung Pinang
Kepulauan Riau 29112

UBP GBU Banten 3 Lontar
Jl. Ir Sutami, Ds. Lontar, Kec. Kemiri Kab. Tangerang, Banten 15530
(62-21) 5939 0660
(62-21) 5939 0659

UBP GBU Asam Asam
Jl. Raya Banjarmasin-Kotabaru KM 122 Ds. Sei Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut
Kalimantan Selatan 70881

UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu
Jl. Pelita, Ds. Jayanti
Kec. Palabuhan Ratu
Kab. Sukabumi, Jawa Barat

UBP GBU Singkawang
Jl. Bambang Ismoyo Singkawang Tengah, Sei Wie Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang
Kalimantan Barat 7911

UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala
Ds. Bunton, Kec. Adipala
Kab. Cilacap, Jawa Tengah 53271
(62-282) 525 9647

UBP GBU Sanggau
Jl. Parit Emas, Ds. Sungai Batu Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Kalimantan Barat 78516

UBP GBU Pangkalan Susu
PLN Pangkalan Susu, Dusun VI
Ds. Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Sumatera Utara 20858

UBP GBU Sintang
Jl. Nenak-Pelabuhan, RT 8 RW 2 Kel. Kedabang, Kec. Sintang Kalimantan Barat 78614

UBP GBU Labuhan Angin
Jl. PLTU Labuhan Angin - Desa Tapian Nauli 1
Kec. Taian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah
Sumatera Utara 22618

UBP GBU Berau
Jl. Pulau Semama No. 447
(Mess PLTU-Depan Kodim Berau) Tanjung Redeb Berau, Kalimantan Timur 77315



UBP GBU Barru
Dsn. Bawasalo, Ds. Lampoko Kec. Balusu, Kab. Barru
Sulawesi Selatan 90762

UBP GBU Priok
Jl. Laks. RE Martadinata, Jakarta Utara DKI Jakarta 14310
(62-21) 4353 9114 - 19 (Hunting)
(62-21) 4393 646

UBP GBU Saguling
Komplek PLN Cioray, Tromol Pos No. 7 Rajamandala,
Kab. Bandung 40554
(62-22) 690 3497, 690 3489
(62-22) 690 3613

UBP GBU Kamojang
Jl. Komplek Perumahan PLTP Kamojang
Kotak Pos 125, Garut 44102
(+62-22) 780 5475 - 780 4478
(62-22) 7801013 - 7805469

UBP GBU Semarang
Jl. Ronggowarsito
Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 50127
(62-24) 3518371 (Hunting)
(62-24) 3546835

UBP GBU Mrica
Jl. Raya Banyumas KM. 8, Kotak Pos 38 Banjarnegara, Jawa
Tengah 53471
(62-286) 597 081
(62-286) 597 044, 597 100

UBP GBU Grati
Jl. Raya Surabaya - Probolinggo KM. 73 PO BOX 11, Ds.
Wates, Kec. Lekok Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67184
(03-43) 413582, 413583
(03-43) 413693, 413524, 425588

UBP GBU Bali
Jl. Brigjen I.G Ngurah Rai, Pesanggaran Denpasar, Bali 80001
(+62-361) 720 421, 720 422
(+62-361) 720 519

UBP GBU Bukittinggi
Jl. Sentral No. KM 1, Padang Lua Kec. Banuhampu, Kab.
Agam Sumatera Barat 26181
(0752) 33663

UBP GBU Cilegon
Jl. Raya Bojonegoro Salira, Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel,
Kab. Serang, Banten 42454
(+62-254) 575 1555, 575 1444
(+62-254) 575 501

PLTU SPP Kalbar-1
Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya
Kepulauan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat

UBP GBU Mahakam
Jl. Ulin No. 1, Karang Anyar, Sungai Kunjang Karang Anyar,
Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kalimantan Timur 75243
(0541) 274153

UBP GBU Keramasan
Jl. Abikusno Cokrosuyoso No. 24
Kel. Kemang Agung, Kec. Kertapati Palembang
Sumatera Selatan 30259

UBP GBU Barito
Jl. P. M. Noor No. 33, Kuin Cerucuk
Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
(0511) 4366683

UBP GBU Tello
Jl. Urip Sumoharjo No. KM 5, Tello Baru Kec. Panakkukang,
Kota Makassar Sulawesi Selatan 90233
(0411) 4444 77

UBP GBU Bengkulu
Jl. Lintas Bengkulu - Curup KM 72
Ujan MAS Atas, Kec. Ujan Mas, Kab. Kepahiang
Bengkulu 39125

UBP GBU Jambi
Jl. Dokter Setia Budi No. RT 09, Kel. Rajawali Kec. Jambi
Timur, Kota Jambi, Jambi 36143
(0741) 31649 ext. 31233

UBP GBU Jatigede
Kadujaya , Kec. Jatigede, Kabupaten Sumedang
Jawa Barat 45377

Unit Jasa O&M
O&M Service Unit

UBP GBU Jeranjang
Jl. Raya PLTU Jeranjang, Dsn. Jeranjang
Ds. Taman Ayu, Kec. Gerung
Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363

UP GU Ulumbu (Sub Unit UBP GBU Kamojang)
Jl. Komplek Perumahan PLTP Kamojang
Kotak Pos 125, Garut 44102
(+62-22) 780 5475 - 780 4478/(62-22) 7801013 - 7805469

UBP GBU Holtekamp
Jl. Hanurata KM. 9, Kampung Holtekamp District
Muaratami, Kota Jayapura Papua 99311

Informasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)
Public Accounting Firms and Public Accountants

Dalam memastikan integritas penyajian Laporan Keuangan kepada pemegang saham, PLN Indonesia Power menggunakan jasa akuntan publik sebagai auditor eksternal yang bersifat independen. Perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) bersertifikat sebagai pihak independen yang bertugas menguji komponen dalam laporan keuangan untuk melihat kewajaran perhitungan dan pencatatan keuangan serta kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

To maintain the integrity of Financial Statements presentation to the shareholders, PLN Indonesia Power hires a public accountant to serve as independent external auditor. The Company benefits from the services provided by certified Public Accounting Firm, an independent party which audits the financial statements' components for the fairness of the financial calculation and bookkeeping as well as the compliance with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

Kebijakan dan Mekanisme Penunjukan KAP dan AP
Policy and Procedures for Appointing Public Accounting Firms and Public Accountants

Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2023 ditetapkan melalui RUPS Tahunan agenda keempat. Dalam rapat tersebut, RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut, PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang beralamat di WTC 3, Jl Jend Sudirman Kav. 29-31, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1290 - Indonesia, Telepon (021) 5099 2901/31192901, Faksimile (021) 5290 555/5290 5050, www.pwc.com/id untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

The External Auditor who performs audit on the Company's financial statements of the fiscal year 2023 is appointed in the Annual GMS of the fourth agenda. During the meeting, the GMS authorizes the Majority Shareholder to appoint a Public Accounting Firm as the Auditor of the Company's Financial Statements. To follow up on the Annual GMS resolutions, PT PLN (Persero) as the Majority Shareholder has appointed Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan whose address is at WTC 3, Jl Jend Sudirman Kav. 29-31, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 1290 - Indonesia, Phone (021) 5099 2901/31192901, Facsimile (021) 5290 555/5290 5050, www.pwc.com/id. to perform the audit of the Financial Statements of Fiscal Year 2023.

Ruang lingkup Audit
Audit Scope

Sejalan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 39023/KEU.02.04/F01070400/2023 ruang lingkup audit yang dilakukukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan jasa audit umum (*general audit*) dan memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PLN Indonesia Power untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

In accordance with the Start Work Order No. 39023/KEU.02.04/F01070400/2023 concerning the Audit of Financial Statements 2023, the scope of audit performed by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan is as follows:

1. General audit and providing opinion on the fairness of the presentation of PLN Indonesia Power's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2023.



2. Pekerjaan jasa pengujian dan pelaporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pengungkapan Manajemen dan pengendalian internal tertentu untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Examination and reporting of the compliance with applicable laws and regulations according to Management disclosure and certain internal control for the fiscal year ended on December 31, 2023.

Besarnya Fee Audit untuk Jasa yang Diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Pada Tahun Buku 2023

Audit Fee for the Services Provided by Public Accounting Firm in Fiscal Year 2023

Besarnya biaya jasa audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atas Laporan Audit Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk PLN Indonesia Power dan Entitas Anak adalah sebesar Rp5.213.789.000 Ketentuan *fee* audit sepenuhnya ditetapkan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas.

The amount of audit fee for the fiscal year ended on December 31, 2023 for the Financial Audit Report, Performance Evaluation Report, and Report of Compliance with the Laws and Regulations and Internal Control for PLN Indonesia Power and its Subsidiaries is Rp5,213,789.000. The audit fee is solely specified by PT PLN (Persero) as the the Company's Major Shareholder.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Ruang Lingkup Audit dan Opini Audit

Public Accounting Firm, Public Accountant, Audit Scope, and Audit Opinion

No	Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of Public Accounting Firm	Nama AP Name of Public Accountant	Periode KAP Public Accounting Firm's Service Term	Periode AP PA Service Term	Ruang Lingkup Service Term	Opini Audit Audit Opinion
1	2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Periode ke-4 4th Term	Periode ke-4 4th Term	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Audit Report	Wajar Dalam Semua Hal yang Material Qualified Opinion
2	2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Periode ke-3 3rd Term	Periode ke-3 3rd Term		
3	2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Periode ke-2 2nd Term	Periode ke-2 2nd Term		
4	2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Periode ke-1 1st Term	Periode ke-1 1st Term		
5	2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Dedy Sukrisnadi, Izin No. AP.0645	Periode ke-4 4th Term	Periode ke-1 1st Term		

Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Other Services Provided by Public Accounting Firm

Selain memberikan jasa audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan juga melaksanakan pekerjaan audit atas Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

In addition to providing audit service for the Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2023, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan also performed the audit of the Performance Evaluation Report and Compliance Report for the fiscal year ended on December 31, 2023.

Pengawasan Efektivitas Auditor Eksternal oleh Dewan Komisaris

Supervision of External Auditor's Effectiveness by the Board of Commissioners

Dalam rangka memastikan pelaksanaan audit eksternal berjalan secara efektif, Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal. Komite Audit juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Satuan Internal Audit untuk memastikan pelaksanaan audit berjalan efektif. Direksi juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan kerja terkait serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris secara berkala.

To ensure an effective external audit process, the Board of Commissioners via the Audit Committee performs the monitoring and evaluation of the External Auditor's work. The Audit Committee also coordinates and communicates with the Internal Audit Unit to make sure that the audit runs effectively. The Board of Directors also actively monitors the follow-up on the external audit findings during every coordination meeting between the Board of Directors and relevant work units, as well as regularly reporting the progress of the follow-up to the Board of Commissioners.

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Company-Supporting Professional Institutions

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

PWC Indonesia **Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan*** **AP PA: Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA**	World Trade Center (WTC 3) Jl. Jend. Sudirman No.Kav 29-31, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 +62 21 5212901 +62 21 52905555, 52905050

Konsultan Hukum
Legal Consultants

Nah'r Murdono Law Office	District 8 - Prosperity Tower 20th Floor, Unit E, SCBD Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia +6221 5030 0817 +62 21 522 0029
UMBRA Partnership	Telkom Landmark Tower, Tower 2, Lantai 49 Jl Jend Gatot Subroto kav. 52, Jakarta
Azwar Hadisupani Rum & Partners	World Capital Tower 19th floor Jl. Mega Kuningan Barat No. 3 Jakarta 12950 Indonesia +6221 50917915 +6221 50917916 office@ahrplaw.com www.ahrplaw.com
Alfonso Lawfirm	The H Tower Lt. 15 Suite G Jl. H. R. Rasuna Said No.20, RT.1/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 +6221 29555 215 +6221 29555 216
Biro Oktroi Roosseno	Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA (62)-21-576 2308, 576 2310 (hunting) (62)-21-576 2301, 576 2302, 576 2303 [65] 6826-4084
PT West Solusi Utama	Gedung Gandaria 8 office tower lt.5k unit Jl. Sultan Iskandar Munda No.10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan info@westcounsellorsatlaw.com

* Informasi lebih lanjut terkait KAP dan AP, Jasa yang diberikan, fee audit disajikan lebih lengkap pada Bab Governansi Perusahaan

* Information on Public Accounting Firms, Public Accountants, the provided services, and the audit fee is presented in more details in the Chapter of Corporate Governance.



Notaris
Notary

Lenny Janis Ishak, S.H.	Jl. Hang Lekir IX No. 1 Jakarta 12120 +62 21 7221077 +62 21 7233855
Muhammad Hanafi, S.H.	Komplek Rukan Tendean Square No.26 Jl. Wolter Monginsidi No.122-124 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170 021 72780381, 72780382 72780382
Shahreza Annaz, S.H., M.Kn	Jl. Hang Lekir IX No. 1 Jakarta 12120 +62 21 7221077 +62 21 7233855

Kantor Jasa Penilai Publik
Office of Public Appraisal Service

Rengganis, Hamid & Rekan	Jakarta Head Office Menara Kuningan 8th Floor Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. V Jakarta 12940 +6221 3001 6002 secretariat@rhr.co.id
Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants	Graha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta 10310, Indonesia +62 21 31904232 ext. 666 / 777 +62 818 717251 iai-info@iaiglobal.or.id

Lembaga Pemerintah
Government Institution

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Deputy Attorney General for Civil and State Administration Affairs (Jamdatun)	Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia +62 21 722 1269 humas.puspenkum@kejaksaan.go.id
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan - Kementerian ESDM Directorate General of Electricity Ministry of Energy and Mineral Resources	Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X 2, Kav. 7-8, Kuningan, RT.10/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 (Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan) (As regulator and permit verifier)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Capital Investment Coordinating Board (BKPM)

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
PO Box 3186, Indonesia
+62 21 5252 008 (hunting)
08071002576 atau 1500765 (Contact Center)
+62 21 520 2050
info@bkpm.go.id
satgasnasional@bkpm.go.id
(Sebagai fungsi pusat perizinan terpadu satu pintu/online single submission)
(As one-stop integrated permit center/online single submission)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia

Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti,
Jl. Gatot Subroto No.2, RT.1/RW.3,
Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
(Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan)
(As regulator and permit verifier)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ministry of Public Works and Public Housing

Kementerian PUPR Ministry of Public Works and Public Housing
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
informasi@pu.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13,
Gambir, RT.11/RW.2, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Ministry of Energy and Mineral Resources

Jl. Medan Merdeka Sel. No.18, RT.11/RW.2, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Direktorat Jenderal EBT dan Konservasi Energi - Kementerian ESDM
Directorate General of NRE and Energy Conservation - Ministry of Energy and Mineral Resources

Jl. Pegangsaan Timur No.1, RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

Sentra Mulia, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12940

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM
Directorate General of Intellectual Properties - Ministry of Law and Human Rights

Gedung Ex. Sentra Mulia
Jl H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, 12940
(021) 152
halodjki@dgip.go.id
(Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan atau kegiatan usaha)
(As a regulator and verification function of licensing or business activities)



Badan Siber dan Sandi Negara
National Cyber and Crypto Agency

Jalan Raya Muchtar 70
Bojong Sari, Depok, Jawa Barat - 16518
+6221 77973360
humas[at]bssn.go.id

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Indonesian National Board for Disaster Management (BNPB)

Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur
+62 21 298 27793
+62 21 212 81200

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan DKI Jakarta
Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) DKI Jakarta Representative Office

Jl. Pramuka No.33, Utan Kayu Utara
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur
(021) 85910031

Kementerian Ketenagakerjaan RI
Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
021-5255733
1500630

Kementerian Perhubungan RI
Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110
info151@dephub.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Ministry of Communications and Informatics

Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta 10110
(021) 3452841
humas@mail.kominfo.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency

Jalan Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
timdatin.djtr@atrbpn.go.id, pelayananpublik.djtr@gmail.com
+62 21 7264112
+62 21 7264112

Sejak menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) pada September 2017, PLN Indonesia Power telah menunjuk lembaga profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

Following the issuance of Collective Investment Contract (KIK) on Asset Backed Security in September 2017, PLN Indonesia Power has appointed the following capital market-supporting professional agencies:

Lembaga Pemeringkat
Rating Agency

Pefindo	Panin Tower Senayan City, 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot.19, Jakarta 10270 +62-21 7278 2380 +62-21 7278 2370

Manajer Investasi
Investment Manager

PT Danareksa Investment Management	Plaza BP Jamsostek Lt.11 Jl HR. Rasuna Said No.112 Blok B Jakarta 12910

Pencatatan Efek
Securities Listing

PT Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta 12190

Bank Kustodian
Custodian Bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Gedung BRI I Lt. 30 Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 (62-21) 5752354 / 5758131 (62-21) 2510316 www.bri.co.id

Konsultan Pajak
Tax Consultant

GNV Consulting	AIA Central Building 23rd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan, Indonesia 12930

Lead Arranger/Sales Agent

PT BRI Danareksa Sekuritas	Gedung BRI II Jl. Jend Sudirman, Bendungan Hilir, Jakarta 101210



Kronologis Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

Sampai dengan tahun 2023, PLN Indonesia Power belum pernah mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

Until 2023, PLN Indonesia Power has yet to list its shares on the Stock Exchange. Consequently, there is no information regarding the listing chronology, corporate action, change in the amount of shares, or the name of the stock exchange.

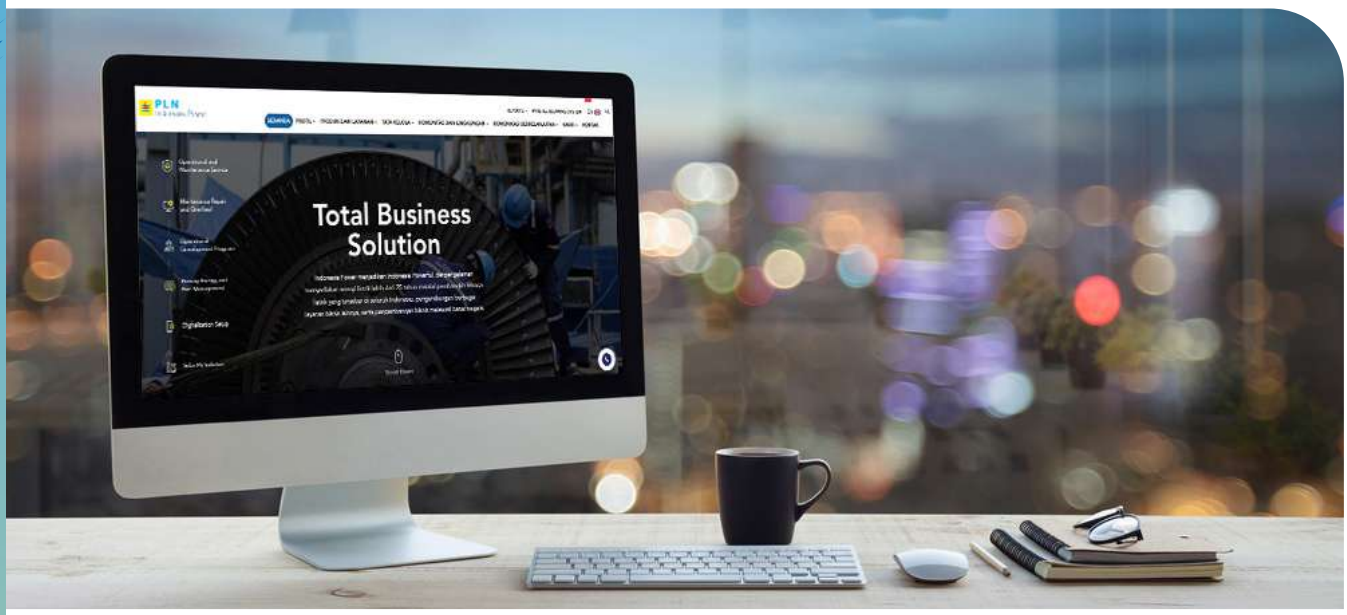
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

Pada tahun 2023, tidak terdapat pencatatan efek lainnya, mengingat sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) PLN Indonesia Power telah berakhir pada tanggal 19 September 2022.

Pada tahun 2023, tidak terdapat pencatatan efek lainnya, mengingat sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) PLN Indonesia Power telah berakhir pada tanggal 19 September 2022.



Informasi Situs *Website* Perusahaan
Information on Company Website



PLN Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh *stakeholders*, melalui situs resmi PLN Indonesia Power dengan alamat https://www.plnindonesiapower.co.id. Situs resmi PLN Indonesia Power tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menyajikan informasi secara komunikatif dan *update* bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Informasi pada *website* PLN Indonesia Power meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Profil memuat berbagai informasi Sekilas PLN Indonesia Power, Manajemen yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, Sejarah, Penghargaan & Sertifikasi yang diperoleh dalam setahun terakhir, Kamus & Istilah, Keterbukaan Informasi Publik, Pertumbuhan Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Testimoni *Stakeholder*.
2. Produk & Layanan memuat informasi terkait dengan Produk dan Layanan PLN Indonesia Power serta profil ringkas Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
3. Tata Kelola berisi informasi terkait dengan informasi Praktik Tata Kelola yang dijalankan PLN Indonesia Power, Pedoman Tata Kelola, Pedoman Perilaku, Pedoman Dewan, Mekanisme Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, WBS, LHKPN, GCG *Assessment*, Informasi Pemegang Saham, Informasi RUPS dan Tata Kelola Manajemen Risiko.
4. Komunitas & Lingkungan memuat informasi terkait dengan Program Ketaatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, *Corporate Social Responsibility*, Produk CSR, dan Program Keanekaragaman Hayati.
5. Komunikasi Berkelanjutan yang memuat Berita, Dokumentasi Video, *InPower Magz, Report*, dan *eBook*.
6. Report memuat informasi *Sustainability Report, Statistic Report* dan *Annual Report*.
7. *Whistleblowing System* Memuat informasi tentang Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
8. Karir memuat informasi terkait dengan terdiri dari informasi Peluang Karir , Rekrutmen dan IP Academy.
9. Kontak.

Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Governansi Perusahaan.

PLN Indonesia Power is always committed to providing ease of access to information for all stakeholders via its official website at https://www.plnindonesiapower.co.id. Available in Indonesian and English, PLN Indonesia Power's official website presents communicative and updated information for all stakeholders and the public at large.

The information on PLN Indonesia Power website contains the following matters:

1. Profile, covering PLN Indonesia Power Overview, Management that consists of the Board of Commissioners and the Board of Directors, History, Achievements & Certifications earned within the past year, Glossary & Terms, Public Information Disclosure, Company Growth, Company Performance, and Stakeholder Testimonials.
2. Products & Services, covering information on PLN Indonesia Power's products and services and brief profile of Subsidiaries and Joint Ventures.
3. Governance, covering information on Governance Practices carried out by PLN Indonesia Power, Code of Governance, Code of Conduct, Board Manual, Grievance/Report Procedures, Gratuity Control, Whistleblowing System (WBS), State Official Wealth Report (LHKPN), GCG Assessment, Shareholders, General Meeting of Shareholders (GMS), and Risk Management.
4. Community & Environment, covering information on Environmental Compliance Program, Occupational Health, Safety and Environment, Corporate Social Responsibility, Corporate Products, and Biodiversity Programs.
5. Sustainable Communication, covering News, Video Documentation, InPower Magz, Reports, and eBooks.
6. Reports, covering information on Sustainability Reports, Statistics Reports, and Annual Reports.
7. Whistleblowing System, covering information on the Management of Violation Report.
8. Career, covering information on Career Opportunities, Recruitment, and IP Academy.
9. Contacts.

Additional information can be found in the section of Access to Company Data and Information in the chapter of Corporate Governance.

Keanggotaan Asosiasi
Membership in Associations

PLN Indonesia Power menjalin kemitraan strategis dengan berbagai asosiasi yang bertujuan untuk mengembangkan strategi bisnis Perusahaan yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan bisnis dan memperluas relasi atau jaringan kemitraan strategis terkait bisnis pembangkitan tenaga listrik dan isu-isu keberlanjutan.

PLN Indonesia Power builds strategic partnerships with various associations, aiming at developing its business strategy alongside the development of business environment. It also aims to expand its relations and strategic partnerships that are relevant to power generation business and sustainability issues.

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI)
Indonesian Electrical Power Society

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB)
Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD)

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional (APPELIN)
National Association of Power Companies

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Komisariat Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Internal Audit Unit Communication Forum, Commissariat of Energy and Mineral Resources

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Indonesia Gas Association (IGA)
Indonesian Gas Association (IGA)

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Institute of Electrical and Electronic's Engineers (IEEE)

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Electric Power Research Institute (EPRI)

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Majelis Pembimbing Mabisaka Kalpataru (Mabisaka)
Kalpataru Advisory Council

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Mitra Pajakku

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Danareksa Sekuritas

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Justika Siar Mustika

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National

Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MeBi)
Indonesian Biomass Energy Society

Status : Anggota | Status : Member
Lingkup : Nasional | Scope : National



Peristiwa Penting Tahun 2023
Important Events in 2023

01 Januari 2023
January 01, 2023



Peresmian *Legal End State Holding Subholding* PT PLN (Persero), perubahan identitas PT Indonesia Power menjadi PT PLN Indonesia Power

Officiation of Legal End State Holding-Subholding of PT PLN (Persero), renaming of PT Indonesia Power into PT PLN Indonesia Power

06 Februari 2023
February 06, 2023



Sinergi PLN Indonesia Power dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka percepatan penguasaan teknologi Baterai Litium.

PLN Indonesia Power synergy with the National Research and Innovation Agency for accelerating lithium battery mastery

28 Februari 2023
February 28, 2023



Penyaluran bantuan PLN Indonesia Power Bersama TNI Kasdam III Siliwangi Ke Warga Sekitar PLTU Suralaya.

Distribution of assistances from PLN Indonesia Power and the Chief of Staff of the Regional Military Command III Siliwangi to the community surrounding Suralaya SPP.

25 Januari 2023
January 25, 2023



Penyaluran bantuan oleh PLN Indonesia Power melalui UPDK Bukittinggi kepada korban terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Nagari Anduring.

Distribution of relief from PLN Indonesia Power via UPDK Bukittinggi to flood and landslide victims in Nagari Anduring

23 Februari 2023
February 23, 2023



Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN Indonesia Power dengan NuScale Amerika Serikat dilakukan tentang kerja sama studi kelayakan penggunaan energi nuklir di Indonesia melalui pemanfaatan *Small Modular Reactor*

The signing of Memorandum of Understanding (MOU) between PLN Indonesia Power and NuScale Power, US, for the collaboration on feasibility study of nuclear energy utilization in Indonesia through utilization of Small Modular Reactor

29 Maret 2023
March 29, 2023



Kerjasama antara PLN Indonesia Power, PLN NP dan TNI Angkatan Darat untuk perkuat sistem penanganan batubara.

Cooperation between PLN Indonesia Power, PLN NP, and the Army of the Indonesian National Armed Forces to strengthen coal management system

05 April 2023
April 05, 2023



Penandatanganan Kerja Sama antara PLN (Persero), PLN Indonesia Power dan dengan para mitra terkait Penyediaan Listrik dengan Skema *Business to Business* untuk Mendukung Hilirisasi Mineral dan Pengembangan Kawasan Terpadu.

The signing of cooperation between PLN (Persero), PLN Indonesia Power, and partners on Electricity Supply through Business-to-Business to support Mineral Downstreaming and Integrated Area Development

17 April 2023
April 17, 2023



Penandatanganan MoU antara PLN Indonesia Power dan PT Yamaha Indonesia Motor MFG tentang *Progressive Captive Power Acquisition, Renewable Energy Certificate Purchase & PV Rooftop Provision Agreement*

The signing of MoU between PLN Indonesia Power and PT Yamaha Indonesia Motor MFG on Progressive Captive Power Acquisition, Renewable Energy Certificate Purchase, and PV Rooftop Provision Agreement

28 Agustus 2023
August 28, 2023



Peresmian *Groundbreaking* pabrik Sel Surya dan Panel Surya berkapasitas 1 GWp pertahun

Groundbreaking of solar cell and solar panel factory at the capacity of 1 Gwp per year

05 April 2023
April 05, 2023



Penandatangan MoU antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) dan PLN Indonesia Power untuk pengembangan bisnis pengolahan sampah kota menjadi bahan bakar jumputan padat.

The signing of MoU between PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) and PLN Indonesia Power on processing urban waste into Refused Derived Fuel (RDF).

21 Mei 2023
May 21, 2023



Penandatanganan MoU antara PLN Indonesia Power, China Energy Engineering Corporation (CEEC) dan Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) tentang Pengembangan *Captive Power* hingga 5000 *Megawatt* di Kawasan Industri Morowali,

The singing of MoU among PLN Indonesia Power, China Energy Engineering Corporation (CEEC), and Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) on the development of Captive Power up to 5,000 MW in Morowali Industrial Park

11 September 2023
September 11, 2023



Penanaman 500 pohon PLN Indonesia Power bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan RI dan beberapa perusahaan lain sebagai salah satu aksi dari deretan upaya korporasi dalam menekan tingginya polusi di Jakarta

The planting of 500 trees under the collaboration among PLN Indonesia Power, the Ministry of Environment and Forestry, and other companies as a corporate action to reduce pollution in Jakarta

3 Oktober 2023
October 03, 2023



Santunan kepada 7.300 Anak yatim dan dhuafa senilai Rp2.000.3555.000

Distribution of assistance to 7,300 orphans and economically weak people at a total of Rp2,000,355,000

12 Oktober 2023
October 12, 2023



Peresmian penggunaan aplikasi *Compliance Online* (COS) yang digunakan untuk mempermudah Pelaporan gratifikasi, pelaporan konflik kepentingan, pelaporan WBS dan *Awareness* SMAP

Inauguration of the use of Compliance Online (COS) application for easier gratuity reporting, conflict of interest reporting, WBS submission, and SMAP awareness reporting.

18 Oktober 2023
October 18, 2023



Penandatanganan MoU antara PLN Indonesia Power dan Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation, Ltd. (SDEPCI) dalam kemitraan terkait studi bersama rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Indonesia

the signing of MoU between PLN Indonesia Power and Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation, Ltd. (SDEPCI) on the partnership for a joint study for wind power plant development plan in Indonesia

11 Oktober 2023
October 11, 2023



Penandatanganan *Shareholders Agreement Joint Venture* antara anak usaha PLN Indonesia Power yaitu PLN Indonesia Renewables, Trina Solar Energy, perusahaan patungan Sinar Mas dan Agra Surya Energi yaitu Daya Sukses Makmur Selaras, tentang Pembangunan pabrik sel dan panel surya

The signing of Joint Venture Shareholders' Agreement among PLN Indonesia Power subsidiaries, i.e. PLN Indonesia Renewables, Trina Solar Energy and a joint venture of Sinar Mas and Agra Surya Energi, i.e. Daya Sukses Makmur Selaras, on the construction of solar cell and panel manufacture

18 Oktober 2023
October 18, 2023



Penandatanganan MoU antara PLN Indonesia Power dengan Hongkong Ocean Investment Development Co., Ltd. dalam kajian pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia

The signing of MoU between PLN Indonesia Power and Hong Kong Ocean Investment Development Co., Ltd. on the study for NRE development in Indonesia

15 November 2023
November 15, 2023



Penandatanganan MoU antara PLN Indonesia Power dan Beijing Encryo Engineering Co., Ltd tentang Kemitraan untuk Studi Pengembangan dan Kerja Sama CO_2 Cair Layak Konsumsi & Hidrogen Cair di Indonesia

The signing of MoU between PLN Indonesia Power and Beijing Encryo Engineering Co., Ltd on the partnership for a study of development and cooperation on edible liquid CO_2 and liquid hydrogen in Indonesia

15 November 2023
November 15, 2023



Penandatanganan Kemitraan antara PLN Indonesia Power dan IHI Corporation terkait Studi dan Kerjasama *Decarboization Roadmap* di Indonesia

The execution of partnership agreement between PLN Indonesia Power and IHI Corporation on study and collaboration on Decarbonization Road Map in Indonesia

20 November 2023
November 20, 2023



Peresmian 12 Unit Green Hydrogen Plant (GHP) milik PLN Indonesia Power (PLTU Pangkalan Susu, PLTU Suralaya 1-7, PLTU Suralaya 8, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTGU Tanjung Priok, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Tambak Lorok, PLTG Pemaron, PLTU Grati, dan PLTU Adipala) oleh PLN (Persero)

Inauguration of 12 Green Hydrogen Plants (GHPs) owned by PLN Indonesia Power (Pangkalan Susu SPP, Suralaya 1-7 SPP, Suralaya 8 SPP, Cilegon CCPP, Labuan SPP, Lontar SPP, Tanjung Priok CCPP, Pelabuhan Ratu SPP, Tambak Lorok CCPP, Pemaron GTPP, Grati SPP, and Adipala SPP) by PLN (Persero)

29 November 2023
November 29, 2023



Penanaman 200 pohon Tabebuya, Trembesi, Damar dan Ketapang Kencana Bersama Presiden RI Ir.Jokowi Widodo sebagai upaya menanggulangi polusi udara dan pemulihan kualitas lingkungan.

The planting of 200 tabebuia, Samanea saman, Agathis, and Terminalia mantaly trees with the President of the Republic Indonesia Ir. Jokowi Widodo to reduce air pollution and improve environmental quality

8 Desember 2023
December 08, 2023



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PLN Indonesia Power dengan PT PLN (persero) UIP JBT terkait pemanfaatan jalan akses Rajamandala-Saguling oleh Proyek PLTA Upper Cisokan *Pumped Storage*

The signing of cooperation agreement between PLN Indonesia Power and PT PLN (Persero) UIP JBT on the utilization of access road Rajamandala-Saguling by HPP Upper Cisokan Pumped Storage project

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan
Awards

"Penghargaan menjadi bentuk pengakuan pihak eksternal terhadap eksistensi PLN Indonesia Power di berbagai bidang. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa kami siap menjadi *Industry Leader* di tengah iklim usaha kelistrikan nasional yang kian kompetitif." Berbagai penghargaan yang diperoleh selama tahun 2023 antara lain:

"Awards prove external parties' acknowledgment of PLN Indonesia Power's existence across areas. They can serve as an indicator that we are ready to become the industry leader amidst the increasingly competitive national power industry." In 2023, the Company received the following awards:

Tingkat Internasional
International Awards

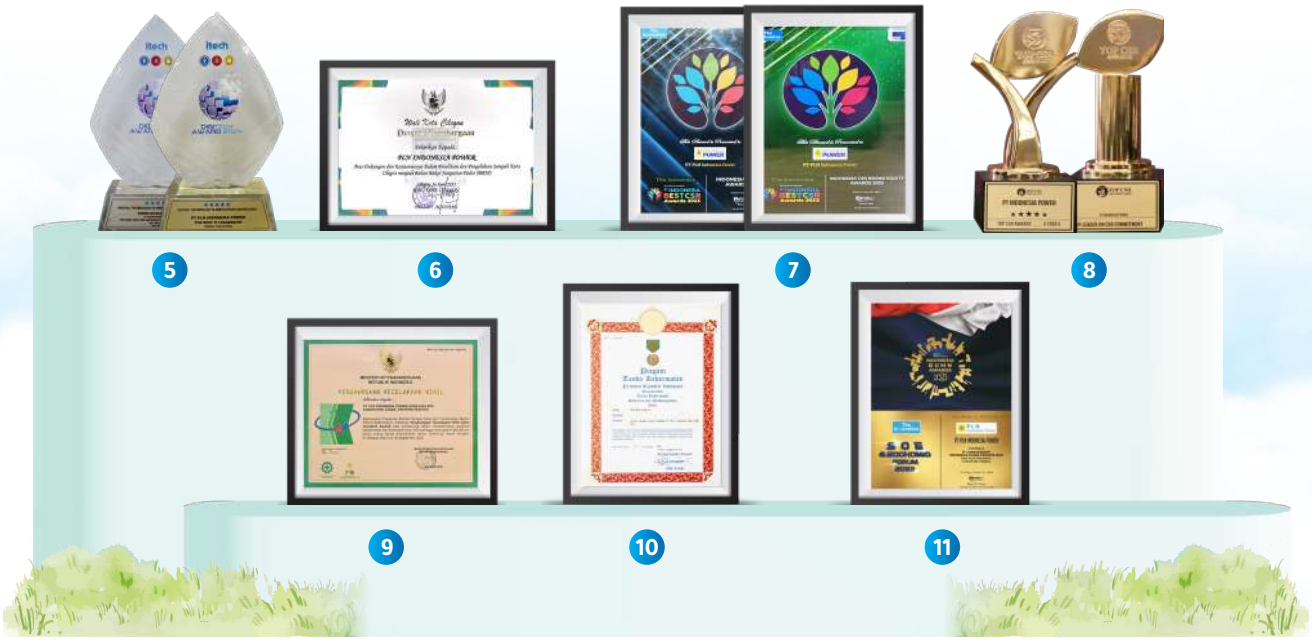


No	Tanggal Perolehan Date Obtained	Nama Penghargaan Name of Award	Acara Penghargaan Event	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
1	26 Agustus 2023 August 26, 2023	- *Winner Renewable Energy On Grid Sub Category Local Grid* Mrica PGU - *Winner CCT Utilisation for Power Generation Category Large* Lontar POMU - *1st Runner Up Renewable Energy Cogeneration* Suralaya PGU - *1st Runner Up CCT Utilisation for Power Generation Category Large* Suralaya PGU - *1st Runner Up Renewable Energy Biofuel Head Office* - *Winner CCT Utilisation for Power Generation Category Small* Jeranjang OMU - *Winner Special Submission* Pelabuhan Ratu OMU	ASEAN *Energy Prizes* 2023	ASEAN Center for Energy
2	18 September 2023 September 18, 2023	- *Winner Kategori Indonesia Technology Excellence Awards for Analytics - Energy* Priok PGU - *Winner* Kategori Indonesia *Augmented Reality and Virtual Reality - Energy* Kamojang POMU	*Asian Technology Excellence Awards* 2023	Asian Business Review
3	6 November 2023 November 06, 2023	*Platinum Rank*	*Asia Sustainability Reporting Rating*	National Center for Corporate Reporting (NCCR)

Tingkat Nasional
National Awards



No	Tanggal Perolehan Date Obtained	Nama Penghargaan Name of Award	Acara Penghargaan Event	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
1	26 Januari 2023 January 26, 2023	Terminal Terinovatif dalam *Green Port OP* Awards 2022 The Most Innovative Terminal in Green Port OP Awards 2022	OP *Awards* 2022	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tanjung Priok Main Port Authority Office, Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation
2	1 Februari 2023 February 01, 2023	- Kategori *Gold* PT PLN Indonesia Power Priok PGU CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan *Awards* - Kategori *Gold* PT PLN Indonesia Power Bali PGU CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan *Awards* - Kategori *Silver* PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan *Awards* - Gold Category - PT PLN Indonesia Power Priok PGU CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards - Gold Category - PT PLN Indonesia Power Bali PGU CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards - Silver Category - PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards	CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia
3	16 Maret 2023 March 16, 2023	- PT PLN Indonesia Power Semarang *Power Generation Best Initiative and Innovative in* CSR program ICEA 2023 - PT PLN Indonesia Power Semarang *Power Generation The Best Charitable Giving* ICEA 2023 - PT PLN Indonesia Power Semarang *Power Generation Best Environmental Excellence Award* ICEA 2023 - PT PLN Indonesia Power Semarang Power *Generation The Best Leadership Focus on CSR Program* ICEA 2023	Indonesia CSR *Excellence Award*	First Indonesia Magazine dan PT Indonesia Popular Mandiri First Indonesia Magazine and PT Indonesia Popular Mandiri
4	17 Maret 2023 March 17, 2023	- *Silver Winner* Kategori Kanal Digital Media Sosial Instagram PRIA 2023 - *Silver Winner* Kategori Program CSR *Community Based Development* Ekowisata Mangrove Batu Lumbang Bali PGU PRIA 2023 - *Bronze Winner* Kategori Laporan Tahunan *Sustainability Report* PRIA 2023 - *Silver Winner* Kategori Program *CSR Community Based Development* BRAMASTRA Suralaya PGU PRIA 2023 - *Silver Winner* Kategori *Program CSR Community Based Development* Kampung Gizi Sehat Mandiri Kamojang POMU PRIA 2023 - *Silver Winner* Kategori Program PR Sub Kategori Corporate PR PRIA 2023 - Silver Winner in the Category of Digital Canal - Social Media Instagram - PRIA 2023 - Silver Winner in the Category of Community Based Development CSR Program - Mangrove Batu Lumbang Ecotourism Bali PGU - PRIA 2023 - Bronze Winner in the Category of Annual Report/Sustainability Report - PRIA 2023 - Silver Winner in the Category of Community Based Development CSR Program - BRAMASTRA Suralaya PGU - PRIA 2023 - Silver Winner in the Category of Community Based Development CSR Program - Independent, Healthy Nutrition Village Kamojang POMU - PRIA 2023 - Silver Winner in the Category of PR Program Subcategory Corporate PR - PRIA 2023	PR Indonesia *Awards* (PRIA) 2023	PR Indonesia



No	Tanggal Perolehan Date Obtained	Nama Penghargaan Name of Award	Acara Penghargaan Event	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
5	29 Maret 2023 March 29, 2023	- *5 Star Gold The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year Digitech Award* 2023 - *5 Star Gold The Best IT Leadership (Energy Industries) Digitech Award* 2023 - *5 Star Gold The Best ICT for Corporate Digital Transformation of The Year Digitech Award* 2023 - *5 Star Gold The Best Transformation Digital & Innovation (Energy Industries) Digitech Award* 2023	*Digital Technology & Innovation Award (Digitech Award)* 2023	Itech Magazine
6	26 April 2023 April 26, 2023	- Dukungan dalam Pelaksanaan Program Mudik Gratis bagi Masyarakat Kota Cilegon tahun 2023 - Dukungan dan Kerjasama dalam Penelitian dan Pengelolaan Sampah Kota Cilegon menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) - Support during Free Homecoming Program for the People of Cilegon City in 2023 - Support and Collaboration in Research and Management of Cilegon City Waste into Refused Derived Fuel (RDF)	Penghargaan Wali Kota Cilegon Award from the Mayor of Cilegon City	Wali Kota Cilegon Mayor of Cilegon City
7	25 Mei 2023 May 25, 2023	- *Indonesia Best CSR Awards* 2023 5th Indonesia Best CSR Awards 2023 - *Indonesia CSR Brand Equity Awards* 2023 5th Indonesia Best CSR Awards 2023	5th Indonesia *Best CSR Awards 2023*	The Iconomics
8	7 Juni 2023 June 07, 2023	- 9 Unit *TOP CSR Awards* 2023 #Star 5 - 9 Units received TOP CSR Awards 2023 5 Star - 9 Unit *TOP Leader on CSR Commitment 2023 TOP CSR Awards* 2023 - 9 Units won in the Category of TOP Leader on CSR Commitment 2023 - TOP CSR Awards 2023	*TOP CSR Awards 2023*	Majalah TOP Business TOP Business Magazine
9	9 Juni 2023 June 09, 2023	26 Penghargaan Kecelakaan Nihil *(Zero Accident Award)* 26 Zero Accident Awards	Penganugerahan K3 Award 2023 K3 Awards 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia
10	2 Oktober 2023 October 02, 2023	Tanda Kehormatan Satyalancana Kementerian ESDM dan BUMN Sektor ESDM Tahun 2023 Satyalancana Honorary Medal - Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of State-Owned Enterprises, Energy and Mineral Resources Sector, 2023	Tanda Kehormatan Satyalancana Kementerian ESDM dan BUMN Sektor ESDM Tahun 2023 Satyalancana Honorary Medal - Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of State-Owned Enterprises, Energy and Mineral Resources Sector, 2023	Presiden Republik Indonesia President of the Republic of Indonesia
11	12 Oktober 2023 October 12, 2023	*Winner Best Social Reputation in Electricity Category 5th Anniversary* Indonesia BUMN *Awards* 2023 Winner of Best Social Reputation in Electricity Category - 5th Anniversary of Indonesia BUMN Awards 2023	5th *Anniversary* Indonesia BUMN *Awards* 2023	*The Iconomics*

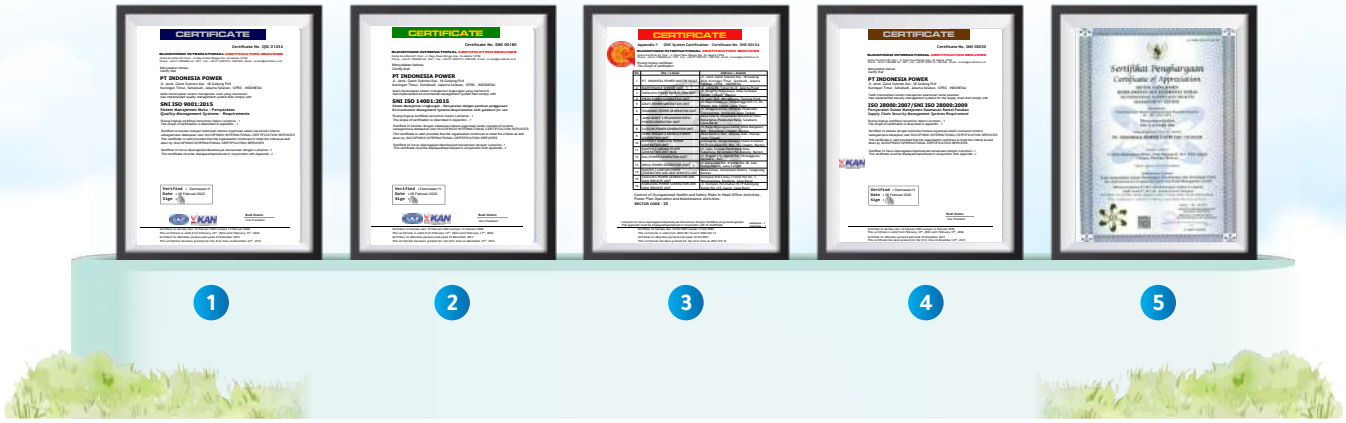


No	Tanggal Perolehan Date Obtained	Nama Penghargaan Name of Award	Acara Penghargaan Event	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
12	18 Oktober 2023 October 18, 2023	Peringkat *Gold* (Bintang 4) WSO Indonesia *Safety Culture Award* 2023 PLN Indonesia Power Semarang PGU Gold Rating (4 Star) WSO Indonesia Safety Culture Award 2023 - PLN Indonesia Power Semarang PGU	Indonesia *Safety Culture Award* 2023	*World Safety Organization* Indonesia
13	31 Oktober 2023 October 31, 2023	*Most Excellence Power Generation Company CNBC Indonesia Awards* 2023	CNBC *Indonesia Awards* 2023	CNBC Indonesia
14	1 November 2023 November 01, 2023	Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia PT PLN Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala PGU atas Penggunaan Limbah Racik Uang Kertas Terbanyak (100 Ton) sebagai Bahan Bakar *Co-firing* Pembangkit Listrik Award from the Indonesian World Records Museum (MURI) to PT PLN Indonesia Power SPP Jateng 2 Adipala PGU for the Largest Utilization of Banknote Mix Waste (100 ton) as the Fuel for Power Plant Co-firing	Rekor Indonesia MURI MURI Indonesian Record	Museum Rekor Dunia Indonesia Indonesian World Records Museum
15	9 November 2023 November 09, 2023	*Excellent for Its Outstanding Digital Innovation Indonesia Digital Ecosystem Summit* (IDES) 2023	Indonesia *Digital Ecosystem Summit* (IDES) 2023	SWA, Miota dan Mastel SWA, Miota, and MASTEL
16	9 November 2023 November 09, 2023	*Top Public Relation Leader Category Industry Vice President of Corporate Communication* & CSR Aryati	Indonesia PR *Top Leader Awards* 2023	Warta Ekonomi
17	16 November 2023 November 16, 2023	- Penghargaan Terbaik Konsistensi Pencapaian Kinerja Lingkungan Fungsi Pembangkit *Enviro Performance Award* 2023 - Penghargaan Terbaik dalam *Best Innovation Beyond Compliance* PLN Indonesia Power PLTU Lontar *Enviro Performance Award* 2023 - The Best Award for Consistency in Achieving Environmental Performance of Power Generation Function - Enviro Performance Award 2023 - The Best Award in the Best Innovation Beyond Compliance - PLN Indonesia Power Lontar SPP - Enviro Performance Award 2023	Enviro *Performance Award* 2023	PT PLN (Persero)
18	21 November 2023 November 21, 2023	*Silver Achievement* Kategori Tambang & Energi PLN Indonesia Power Priok PGU 12th Indonesia *Operational Excellence Project Competition* (OPEXCON) 2023 Silver Achievement in Mining & Energy Category - PLN Indonesia Power Priok PGU - 12th Indonesia Operational Excellence Project Competition (OPEXCON) 2023	12th Indonesia *Operational Excellence Project Competition* (OPEXCON) 2023	Majalah SHIFT Indonesia SHIFT Indonesia Magazine

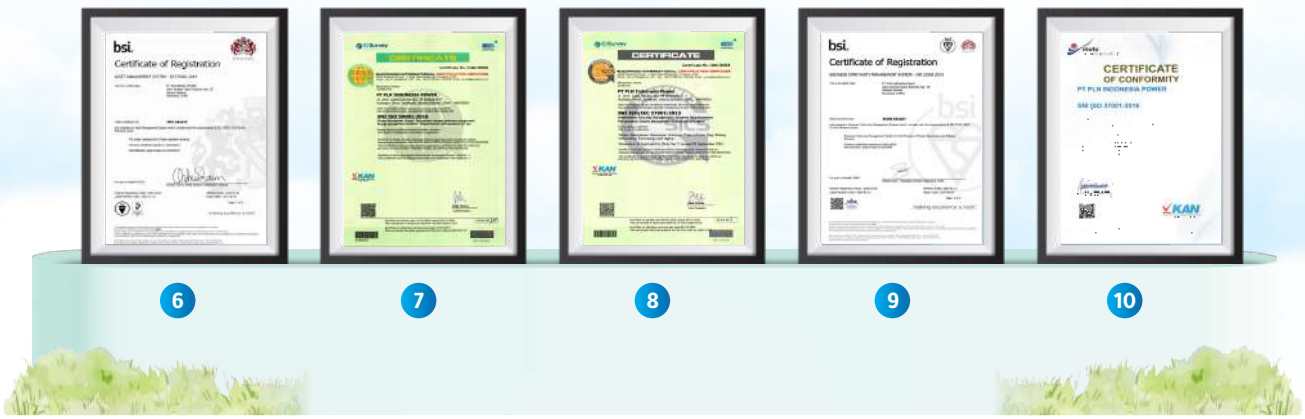


No	Tanggal Perolehan Date Obtained	Nama Penghargaan Name of Award	Acara Penghargaan Event	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
19	4 Desember 2023 December 04, 2023	- *Platinum* PLTDG Pesanggaran Indonesia *Sustainable Development Goals Awards* (ISDA) 2023 - *Platinum* Priok PGU *Indonesia CSR Award* (ICA) 2023 - Platinum for PLTDG Pesanggaran - Indonesia's Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2023 - Platinum for Priok PGU - Indonesia CSR Awards (ICA) 2023	*Indonesia's Sustainable Development Goals Awards* (ISDA) 2023	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)
21	20 Desember 2023 December 20, 2023	13 PROPER Emas Tahun 2023 13 Gold Proper in 2023	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Assessment Program of Corporate Performance Rating in Environmental Management (PROPER)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia

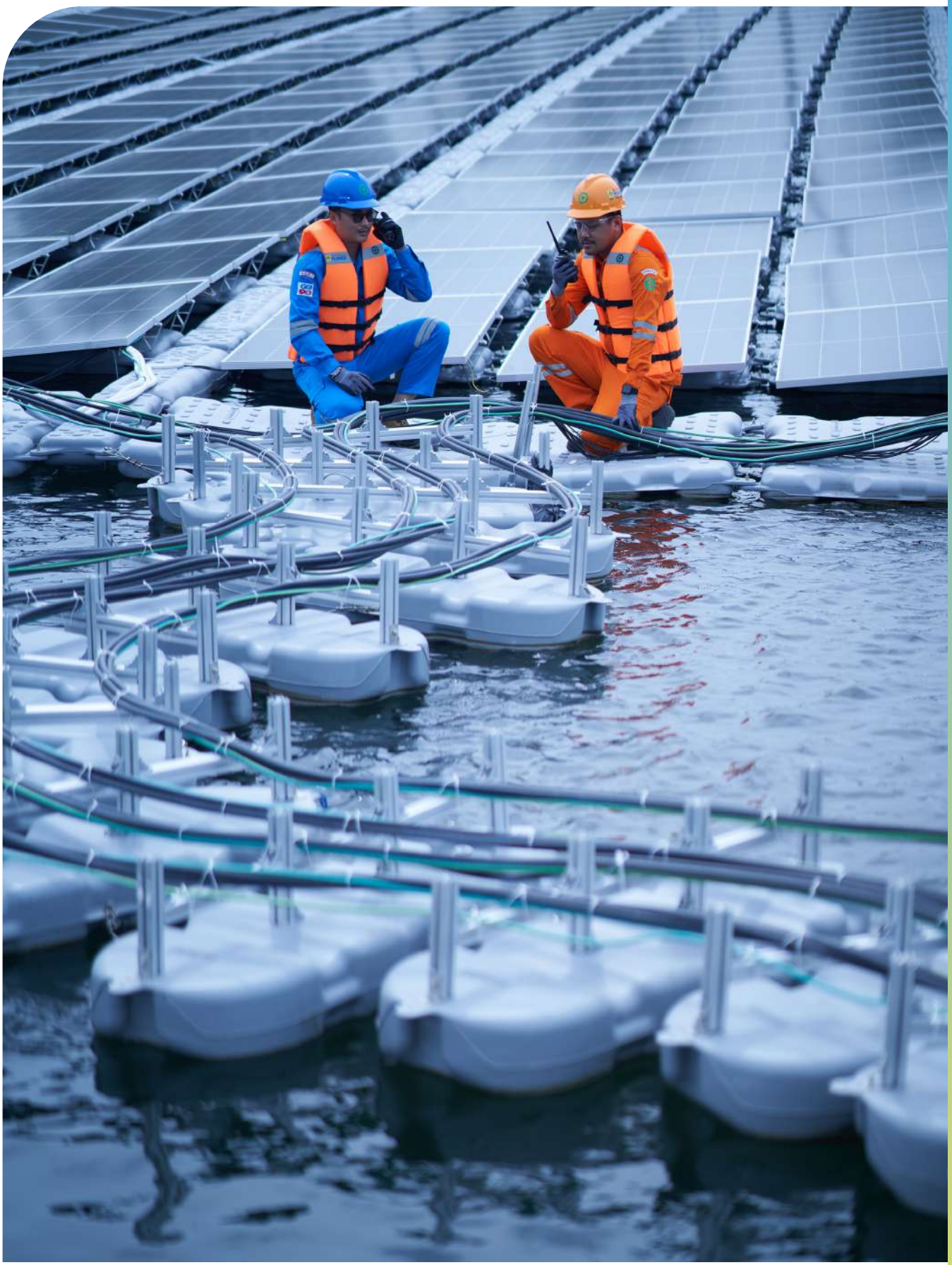
Sertifikasi
Certification



No	Nama Organisasi Organization	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Grantor	Masa Berlaku Period of Validity
1	**ISO 9001:2015** **Sistem Manajemen Mutu** Quality Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Palabuhan Ratu OMU 15. Cilegon OMU 16. Cilegon OMU	14 Februari 2020 February 14, 2020	PT Sucofindo	13 Februari 2023 February 13, 2023
2	**ISO 14001:2015** **Sistem Manajemen Lingkungan** Environmental Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Palabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	14 Februari 2020 February 14, 2020	PT Sucofindo	13 Februari 2023 February 13, 2023
3	**ISO 45001:2018** ***Occupational Health and Safety Management Systems*** 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Palabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	12 Maret 2021 March 12, 2021	PT Sucofindo	13 Februari 2023 February 13, 2023
4	**ISO 28000:2007 /SNI ISO 28000:2009** **Sistem Manajemen Keamanan Pada Rantai Pasokan** **Supply Chain Security Management System** 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. Suralaya 8 OMU 11. Labuan OMU 12. Lontar OMU 13. Palabuhan Ratu OMU 14. Adipala OMU 15. Cilegon OMU	14 Februari 2020 February 14, 2020	PT Sucofindo	13 Februari 2023 February 13, 2023
5	**Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)** **Safety and Health Management System (SMK3)** 1. Suralaya PGU 2. Priok POMU 3. Saguling POMU 4. Kamojang POMU 5. Semarang PGU 6. Mrica PGU 7. Grati POMU 8. Bali PGU 9. MSU 10. Suralaya 8 OMU 11. Labuan OMU 12. Lontar OMU 13. Palabuhan Ratu OMU 14. Adipala OMU 15. Cilegon OMU	Berbeda per unit Different for each unit	PT Sucofindo	Berbeda per unit Different for each unit



No	Nama Organisasi Organization	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Grantor	Masa Berlaku Period of Validity
6	**ISO 55001:2014** **Sistem Manajemen Asset** Asset Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Palabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	27 Oktober 2021 October 27, 2021	PT BSI Group Indonesia	26 Oktober 2024 October 26, 2024
7	**ISO 50001:2018** **Sistem Manajemen Energi** Energy Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Palabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	21 Desember 2020 December 21, 2020	PT Sucofindo	20 Desember 2023 December 20, 2023
8	**ISO 27001:2013** **Sistem Manajemen Keamanan Informasi** **Information Security Management System** Divison of Information Technology Kantor Pusat Division of Information Technology of the Head Office	9 Oktober 2020 October 09, 2020	PT Sucofindo	8 Oktober 2023 October 08, 2023
9	**ISO 22301:2019** **Sistem Manajemen Keberlanjutan Bisnis** **Business Continuity Management System** Kantor Pusat dan Priok POMU Head Office and Priok POMU	5 Februari 2021 February 05, 2021	PT BSI Group Indonesia	4 Februari 2024 February 04, 2024
10	**ISO 37001:2016** **Sistem Manajemen Anti Penyuapan** Anti-Bribery Management System Kantor Pusat Head Office	18 April 2020 April 18, 2020	PT Mutuagung Lestari	18 April 2023 April 18, 2023



Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review




PLN
Indonesia Power
ARIZONA

Sumber Daya Manusia
Human Capital

PLN Indonesia Power berupaya menghadapi tantangan bisnis dan menjamin keberlangsungan kegiatan usaha ketenagalistrikan melalui penyiapan tenaga kerja yang profesional, kompeten dan berintegritas tinggi yang dilandasi tata nilai untuk mencapai visi Perusahaan. Selaras dengan transformasi organisasi PT PLN (Persero) melalui pembentukan *subholding* pembangkitan, PLN Indonesia Power menerapkan *Human Experience Management System* (HXMS), yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. 228.K/010/IP/2022 yang berpegang pada prinsip-prinsip:

a. keselarasan dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing (*competitive advantage*) dan nilai tambah serta menjamin keberlanjutan Perusahaan;
b. keselarasan dengan tata nilai Perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing insani dalam rangka penciptaan budaya unggul;
c. kesetaraan dan keadilan baik internal maupun eksternal Perusahaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
d. mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas kerja; dan
e. memberikan pengalaman positif kepada Tenaga Kerja sehingga mampu menunjukkan potensi terbaik.

Sistem penunjang HXMS ditetapkan dalam rangka pengelolaan Tenaga Kerja yang produktif dan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan yang berlaku, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. kesetaraan *gender*, perlindungan penyandang disabilitas, perlindungan anak, dan perlindungan perempuan;
b. perlindungan waktu kerja;
c. manajemen pengetahuan (*knowledge management*);
d. wewenang kepegawaian;
e. pejabat pengganti sementara;
f. program keseimbangan hidup;
g. employee *wellbeing*;
h. employee volunteering program;
i. pencegahan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/ *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS); dan
j. keselamatan dan kesehatan kerja.

Sistem penunjang HXMS ditetapkan dengan memperhatikan 4 (empat) sasaran HXMS meliputi:

A. Tepat Ukuran (*Right Size*)

Penciptaan model operasi, desain organisasi, dan formasi Tenaga Kerja yang selaras dengan strategi Perusahaan serta dilengkapi dengan pembagian tugas yang tegas dan tata kelola yang efektif dalam rangka optimalisasi produktivitas, meliputi:

1) Strategi dan Tata kelola Tenaga Kerja

Perencanaan dan penentuan arah pengelolaan Tenaga Kerja untuk penciptaan model operasi, desain organisasi, dan formasi Tenaga Kerja yang selaras dengan strategi Perusahaan dan efektivitas tata Kelola dalam bentuk:

a) *Blueprint* Tata kelola Tenaga Kerja, yang berisi penetapan tujuan, sasaran, strategi, program kerja dan langkah-langkah implementasi yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan Tenaga Kerja guna memastikan Perusahaan tumbuh berkelanjutan; dan

PLN Indonesia Power is building a professional, competent, and high-integrity manpower aligned with the Company's vision. This focuses on employee development addresses business challenges, ensures electricity business sustainability, and adheres to the values outlined in PT PLN (Persero)'s transformation plan. One key initiative is the implementation of the Human Experience Management system, following Decree of the Board of Directors No. 228.K/010/IP/2022, which emphasizes these core principles:

a. aligning with the Company's vision, mission, and objectives to enhance competitiveness and value, ultimately ensuring long-term sustainability.
b. aligning with Corporate values to improve human capital quality and competitiveness, fostering a truly exceptional workplace environment.
c. promoting equality and fairness internally and externally to cultivate positive industrial relations.
d. encouraging the use of integrated information technology to boost work productivity.
e. providing positive experiences for the manpower to help them reach their full potential.

The HXMS support system is designed to operate within the structure of effective manpower management. It ensures adherence to relevant laws and regulations outlined in the applicable Collective Labor Agreement (CLA), which includes but is not limited to:

a. gender equality, protection of people with disability, child protection, and women protection;
b. working time protection;
c. knowledge management;
d. employment authority;
e. acting officials;
f. life balance program;
g. employee wellbeing;
h. employee volunteering program;
i. prevention and eradication of Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS); and
j. occupational health and safety.

This system specifically targets four key HXMS objectives.

A. Right size

Developing operating models, organizational structures, and core values all in alignment with the Company's strategic direction is key to successful execution.

1) Manpower Management Strategy and Governance

This process focuses on defining the direction of manpower management to develop operating models, organizational structures, and manpower compositions that directly support the Company's strategy and ensure effective Governance by:

a) Manpower Governance Blueprint serves as a road map for sustainable growth through effective manpower management. It outlines the organization's goals, supported by specific strategies and work programs. These programs then translate into actionable steps for implementation; and

b) *Road Map* Tata kelola Tenaga Kerja, merupakan rencana kerja strategis untuk periode 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Tenaga Kerja untuk mendukung implementasi *Blueprint* Tata Kelola Tenaga Kerja.

2) Manajemen Proses Bisnis
Penciptaan model, alur proses, dan desain organisasi yang memberi nilai tambah, selaras dengan strategi, visi dan misi Perusahaan, meliputi kerangka proses bisnis, pemetaan proses bisnis dan peran.

3) Manajemen Organisasi
Perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengelompokan Tenaga Kerja untuk penciptaan model operasi dan desain organisasi yang selaras dengan strategi Perusahaan, meliputi:
a) Pedoman manajemen organisasi yang terdiri atas:
i. Pedoman pengembangan organisasi;
ii. Pedoman analisis jabatan; dan
iii. Pedoman evaluasi jabatan dan pengelompokan jabatan;
b) Organisasi dan tata kerja yang terdiri atas struktur organisasi, formasi jabatan, serta tugas pokok dan fungsi jabatan;
c) Uraian jabatan;
d) Bobot jabatan; dan
e) Kompetensi organisasi dan individu.

4) Manajemen Budaya dan Perubahan
Pengelolaan tata nilai Perusahaan yang dibutuhkan untuk menunjang penciptaan model operasi dan desain organisasi yang selaras dengan strategi Perusahaan, meliputi:
a) Tata nilai Perusahaan; dan
b) Program perubahan budaya.

5) *Employee Value Proposition*
Sekumpulan makna intrinsik dan ekstrinsik yang diberikan Perusahaan kepada Pegawai atas keterampilan, kapabilitas dan pengalaman Pegawai yang menjadi pembeda dari Perusahaan pesaing, meliputi:
a) *Employer Branding*, merupakan cara Perusahaan untuk menciptakan pandangan/ persepsi positif yang meningkatkan reputasi dan citra Perusahaan sehingga kandidat Pegawai dan Pegawai melihat makna yang berbeda dibandingkan Perusahaan lainnya;
b) *Employee Retention*, merupakan cara dan upaya Perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang potensial dalam Perusahaan agar dapat mencapai tujuannya; dan
c) *Employee Engagement*, merupakan cara dan upaya Perusahaan dalam menciptakan hubungan emosional antara Pegawai dan Perusahaan dengan ditandai perasaan antusias dan terikat sehingga berpotensi memberikan dampak positif pada Perusahaan.

B. Tepat Kompetensi (*Right Skill*)

Penciptaan talenta unggul, berdaya saing, dan memiliki adaptabilitas tinggi terhadap perubahan transformatif yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja, meliputi:

1) Manajemen Sumber Tenaga Kerja
Pengelolaan strategi perencanaan tenaga kerja, penetapan sumber tenaga kerja dan analisis beban kerja untuk menunjang kebutuhan organisasi dan strategi Perusahaan baik jangka

b) Manpower Governance Road Map is a five-year strategic plan designed to operationalize the Manpower Governance Blueprint through effective manpower management.

2) Business Process Management
Focusing on designing valuable models, process flows, and organizational structures. These elements must align with the Company's strategic direction, including its vision, mission, business process frameworks, process maps, and designated roles.

3) Organization Management
Meticulously planning, directing, and controlling manpower categorization which shape operating models and organizational designs that seamlessly align with the Company's overall strategy, including:
a) Organizational management guidelines consisting of:
i. Organizational development guidelines;
ii. Role analysis guidelines; and
iii. Evaluation guidelines of the role and role categorization;
b) Organization and work order consisting of organizational structure, job formation, as well as the main tasks and functions of the office;
c) Role description;
d) Role level; and
e) Organizational and individual competence.

4) Culture and Change Management
Strong Corporate values are essential for building operating models and organizational structures that seamlessly align with our strategic goals, i.e.:
a) Corporate value; and
b) Cultural change program.

5) Employee value proposition.
It is a unique package of benefits, both tangible and intangible, that the Company provides to its Employees in exchange for their skills, experience, and capabilities. It's what sets them apart from competitors in the job market, including:
a) Employer Branding is a strategy for the Company to cultivate a positive image and reputation as a workplace. This goes beyond just attracting new talent; it aims to create a distinct employer identity that resonates with both potential and current employees, setting the Company apart from its competitors.
b) Employee Retention is all about the Company's efforts to hold onto valuable human capital to better achieve its goals.
c) Employee engagement is the Company's deliberate effort to foster positive emotional connections between its Employees and the Company. This is characterized by feelings of enthusiasm and a strong sense of belonging to create a positive impact on the Company.

B. Right Skill

Developing superior talent who are competitive and highly adaptable to transformational change that aims to creating and maintaining skilled manpower that aligns with the Company's needs and can effectively adjust to any shifts in the work environment, including:

1) Manpower Resource Management
Managing strategies for planning and identifying the right manpower resources. This helps the Company to meet its needs and achieve its short, medium, and long-term strategies.



pendek, menengah, maupun panjang. Strategi perencanaan tenaga kerja mempertimbangkan: strategi Perusahaan perubahan aset pengusahaan; produktivitas; kompetensi baru; perubahan demografi, ekonomi, dan teknologi; ketentuan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Strategi penetapan sumber tenaga kerja dalam bentuk *build, buy, borrow, bind*, atau alih daya.

2) Manajemen Akuisisi Pegawai
Pengelolaan metode rekrutmen bersumber dari internal maupun eksternal Perusahaan. Seleksi dan penempatan jabatan berdasarkan persyaratan kebutuhan jabatan, *culture fit*, kompetensi dan *employee value proposition*, agar mampu menciptakan talenta unggul, berdaya saing, dan memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap strategi Perusahaan dan kebutuhan organisasi.

3) Manajemen Talenta dan Pegawai
Pengelolaan talenta dan Pegawai agar mampu menciptakan talenta unggul, berdaya saing, dan memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan transformatif melalui: identifikasi dan penentuan posisi kunci/penting (*identify critical position*); pencarian kandidat potensial untuk masuk dalam kelompok Pegawai bertalenta/*talent pools* (*talent acquisition*); pengklasifikasian talenta berdasarkan kapasitas dan kinerja (*talent classification*); program pengembangan yang diberikan kepada talenta untuk menduduki posisi kunci/penting (*talent development*); mobilisasi talenta untuk pengembangan kapasitas (*talent mobility*); program mempertahankan talenta dengan pendekatan retensi (*talent retention*); dan pengukuran kesiapan talenta untuk ditempatkan di jabatan yang lebih tinggi/strategis.

4) Manajemen Pengembangan Pegawai
Pengelolaan pengembangan Pegawai melalui program pembelajaran yang dapat dilaksanakan secara mandiri melalui *digital learning*, *mentoring*, *coaching*, penugasan/*exposure*, dan keanggotaan komunitas profesi.

C. Tepat Pembiayaan (*Right Spend*)

Pengelolaan Tenaga Kerja yang efisien namun tetap memperhatikan kesetaraan internal dan eksternal serta berorientasi pada kinerja yang superior yang bertujuan untuk memastikan investasi dalam SDM yang mampu memberikan nilai tambah sesuai dengan tujuan Perusahaan, meliputi:

1) Manajemen Kinerja Pegawai
Pengelolaan penilaian kinerja Pegawai yang dikaitkan dengan remunerasi untuk memotivasi kinerja Pegawai yang superior. Manajemen kinerja Pegawai meliputi tahapan perencanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja Pegawai.

2) Manajemen Penghargaan Pegawai
Pengelolaan penghargaan ekstrinsik dan intrinsik secara efisien dengan tetap memperhatikan kesetaraan internal dan eksternal serta berorientasi pada kinerja superior. Penghargaan ekstrinsik berupa kompensasi yang terdiri dari kompensasi tetap dan tidak tetap, serta manfaat Pegawai yang terdiri dari manfaat umum dan manfaat khusus. Selain itu, Perusahaan juga memberikan penghargaan intrinsik yang diberikan berupa nontunai yang bermakna bagi individu Pegawai.

Effective manpower planning takes into account :the Company's overall strategy; changes in its resources; productivity; new competencies; demographic and economic shifts, relevant laws, and Collective Labor Agreements that aim to boost manpower productivity. The strategy of assigning manpower resources in the form of building, buying, borrowing, bind, or outsourcing.

2) Employee Acquisition Management
The recruitment is managed by either internal or external parties. the selection and placement of positions are based on job requirements, culture fit, competencies, and employee value proposition. These are aimed at creating superior talents with competitiveness and high adaptability to the Company's strategy and organizational needs.

3) Talent and Employee Management
Talent and employee management aims to create superior talents with competitiveness and high adaptability to transformational changes through: identifying critical positions; talent acquisition from talent pool; talent classification based on capacity and performance; talent development for critical positions; talent mobility for capacity development; talent retention; and measurement of talent readiness to be placed in higher/strategic positions.

4) Employee Development Management
Employee Development Management through learning, mentoring, and coaching programs, assignment/exposure, and professional community membership.

C. Right Spend

Efficient manpower management while prioritizing both internal and external equality as well as oriented towards rewarding superior performance. Ultimately, this aims to ensure that investments in Human Capital provide tangible value aligned with the Company's objectives.

1) Employee Performance Management
The management of employee performance assessment linked to remuneration to motivate superior employee performance. Employee performance management covers the stages of planning, monitoring and assessing employee performance.

2) Employee Recognition Management
Efficient management of extrinsic and intrinsic rewards while paying attention to internal and external equality that leads to superior performance. Extrinsic rewards include fixed and non-fixed compensations, while employee benefits cover general and special benefits. The Company also provides intrinsic rewards in the form of non-cash which is meaningful for individual employees.



3) Manajemen Hubungan Industrial
Pengelolaan interaksi antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan yang melibatkan Pegawai yang diwakili oleh Persatuan Pegawai, Perusahaan, dan Pemerintah sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan meningkatkan produktivitas usaha melalui proses yang memperhatikan kesetaraan internal dan eksternal serta berorientasi pada kinerja unggul.
4) Manajemen Pemutusan Hubungan Kerja
merupakan pengelolaan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan manajemen hubungan industrial yang telah disepakati dalam PKB dan kualifikasi pemutusan hubungan kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Tepat Sistem Informasi (*Right System*)
Pengelolaan proses dan sistem berkelanjutan dengan mengupayakan penerapan teknologi terintegrasi yang mampu meningkatkan *employee experience* dalam pengembangan tenaga kerja saat ini dan masa depan, meliputi:
1) Sistem Informasi Tenaga Kerja
dilaksanakan melalui pembenahan proses dan sistem berkelanjutan dengan prinsip *single source of truth* sesuai dengan kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan *information technology master plan* Perusahaan
2) Manajemen Administrasi dan Pelayanan Pegawai
Pengelolaan pelayanan pegawai dan/atau purnakarya dilakukan secara digital dengan bertahap dan dikelola oleh *share service unit*.

Sejalan dengan Program *Holding* dan *Sub-Holding*, per tanggal 15 Desember 2022, Perusahaan mengatur kerangka pengelolaan SDM melalui Surat Keputusan Direksi No. 228/K/010/IP/2022 tentang *Human Experience Management System* (HXMS).

3) Industrial Relations Management
Ensuring smooth interactions between all players in a Company's production process is key. This includes employees (represented by their union), the Company, and the Government. By fostering harmonious relationships among these groups, businesses can unlock greater productivity. The key lies in implementing processes that prioritize both internal and external fairness, while always striving for excellence.
4) Employee Termination Management
is the management of employment termination following the principles of industrial relations as established in the Collective Labor Agreement (CLA). This includes situations where employment ends due to reaching the mandatory retirement age (normal retirement) or through early retirement options.

D. Right System
Management of sustainable processes and systems by actively seeking to apply integrated technologies that improve the experience of employees, both in the present manpower and as they develops for the future, including:
1) Workforce Information System
Implemented through continuous process and system improvements using a single source of truth in accordance with the information technology management policy and the Company's information technology master plan.
2) Employee Service and Administration Management
The services for employees and/or retirees are managed digitally in stages by the share service unit.

In line with the Holding and Sub-holding programs, as of December 15, 2022, the Company set the HC management framework through the Board of Directors Decree No. 228/K/010/IP/2022 concerning Human Experience Management System (HXMS).

Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja
Organizational Development and Manpower Planning System

PLN Indonesia Power menyusun *Roadmap Human Experience Management System* tahun 2023-2028 berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan turunannya terhadap HR Strategi.

Roadmap Human Experience Management System PLN Indonesia Power yang memiliki tema besar "*Electrifying the Future: Enabling Organization Through Transformative Human Experience Management*" disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) pilar prioritas HXMS yang meliputi *right size, right skill, right spend*, dan *right system*.

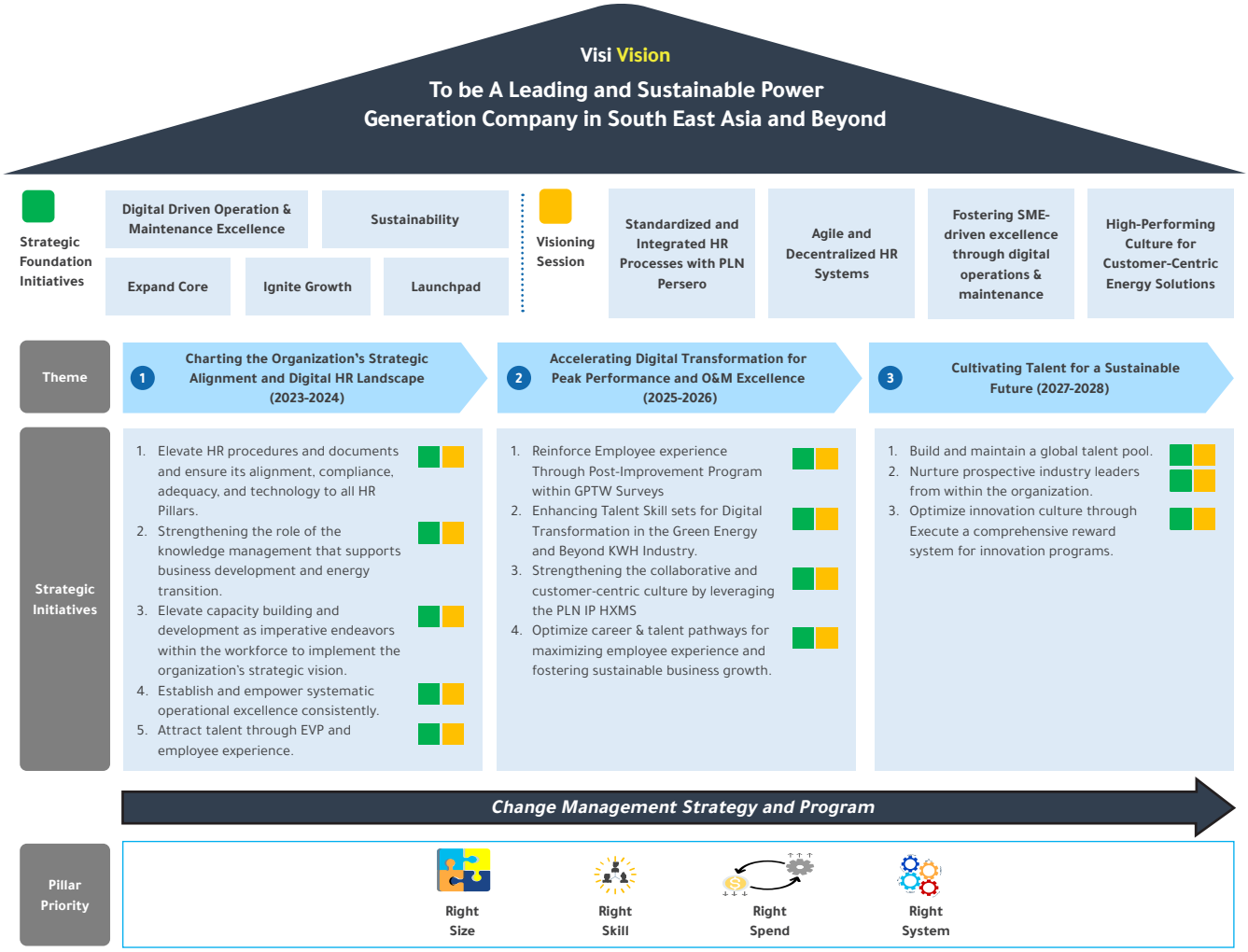
PLN Indonesia Power has prepared Human Experience Management System (HXMS) Roadmap for 2023-2028 based on the Company's Long Term Plan and its derivative towards HR Strategy.

PLN Indonesia Power Human Experience Management System Roadmap which bears the general theme of "Electrifying the Future: Enabling Organization Through Transformative Human Experience Management" was prepared by taking into account four HXMS priority pillars of the right size, right skill, right spend, and right system.



Roadmap Human Experience Management System PLN Indonesia Power

Roadmap Human Experience Management System PLN Indonesia Power



Dalam penyusunan *roadmap* tersebut di atas, Perusahaan melakukan pengukuran *Great Place To Work®* (GPTW). GPTW didefinisikan sebagai tempat kerja yang luar biasa dimana pegawai mempercayai *Top Leader*, bangga dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan orang-orang yang berada di tempat kerja melalui kepemimpinan yang efektif, nilai-nilai yang bermakna dan dasar kepercayaan yang kuat dengan semua pegawai. Semua pegawai saling terhubung dan memberikan yang terbaik dari diri mereka dan Perusahaan. Hasil pengukuran GPTW dijadikan sebagai salah satu data pendukung dalam penyusunan *roadmap* di atas dengan harapan Perusahan dapat memberikan pengalaman yang terbaik kepada seluruh pegawai dan menciptakan tempat kerja yang luar biasa. Tempat kerja yang luar biasa mampu memaksimalkan potensi pegawai.

In preparing the roadmap, the Company performs Great Place To Work® (GPTW) measurement. GPTW is defined as an extraordinary workplace where the employees trust the Top Leaders, are proud with their works, and have extraordinary relationship with the people at work under an effective leadership, along with meaningful values and a strong foundation of trust among all employees. All employees are interconnected and contribute the best of themselves and the Company. The GPTW measurement results are used as supporting data in preparing the roadmap, and the Company is expected to deliver the best experience to all employees and create an extraordinary workplace. An extraordinary workplace helps optimizing employee potentials.

PLN Indonesia Power merupakan perusahaan energi pertama di Asia Tenggara yang memiliki sertifikasi *Great Place To Work®* (GPTW) yang ditetapkan oleh *Great Place To Work® Institute*, PLN Indonesia Power juga menjadi perusahaan BUMN kedua dan satu-satu nya dari PLN Grup yang meraih predikat tersebut di tahun 2023. Bersumber dari *Great Place To Work®* 2019 *Global Employee Engagement Study*, sebanyak

PLN Indonesia Power is Southeast Asia's first power company with Great Place To Work® (GPTW) certification from the Great Place To Work® Institute. PLN Indonesia Power also becomes the second BUMN company as well as the only one from PLN Group which received the acknowledgment in 2023. The data from Great Place To Work® 2019 Global Employee Engagement Study found that 84% of PLN Indonesia

84% pegawai di PLN Indonesia Power menyatakan bahwa PLN Indonesia Power merupakan tempat yang lebih baik untuk bekerja, sedangkan hanya 53% pegawai di *typical global company* yang menyatakan bahwa perusahaan mereka adalah tempat yang lebih baik untuk bekerja. Selain itu, PLN Indonesia Power juga berkomitmen untuk menjadi penyedia energi terkemuka dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan meningkatkan budaya inovasi untuk membentuk "*the energy landscape of tomorrow*".

Power's employees stated that PLN Indonesia Power is a better place to work, whereas only 53% employees of a typical global company state that their company is a better place to work. PLN Indonesia Power is also committed to becoming the leading energy provider by leveraging recent technology and promote the culture of innovation to shape "the energy landscape of tomorrow".



Source: Great Place to Work® 2019 Global Employee Engagement Study

Source: Great Place to Work® 2019 Global Employee Engagement Study

Human Experience Management System PLN Indonesia Power (*Moment that Matter*)

Human Experience Management System PLN Indonesia Power (Moment that Matter)

Implementasi *Human Experience Management System* di PLN Indonesia Power termasuk di dalamnya *Customer Experience* dan *Employee Experience* dapat berdampak baik pada performansi unit dan Perusahaan. Hal ini dibuktikan berdasarkan *Employee Experience Reimagined, Accenture Strategy* 2017, yang menyebutkan bahwa Perusahaan dengan tingkat *engagement* yang lebih tinggi, 21% lebih *profitable* dibandingkan dengan perusahaan dengan *engagement* yang rendah. Selain itu perusahaan dengan skor *Employee Experience* yang lebih tinggi memiliki 2 (dua) kali nilai *Customer Satisfaction* dan 2 (dua) kali lebih inovatif dibandingkan perusahaan dengan skor *Employee Experience* yang rendah.

The implementation of Human Experience Management System at PLN Indonesia Power covers Customer Experience and Employee Experience, both of which may positively affect the Company and unit performance. This is evidenced by Employee Experience Reimagined, Accenture Strategy 2017, which found that a company with higher engagement level is 21% more profitable compared to companies with lower engagement. In addition, a company with higher Employee Experience score has twice the Customer Satisfaction score and twice as innovative compared to companies with lower Employee Experience score.

PLN Indonesia Power menerapkan konsep "*Moment that Matter*" untuk menciptakan pengalaman yang terbaik bagi pegawai di Perusahaan. Adapun implementasi "*Moment that Matter*" meliputi:

a. *Ongoing Moment*
   Perusahaan menanamkan nilai-nilai *touch point* di masing-masing *Employee Journey* (*from hire to fire*) meliputi HR *Strategy and Planning, Recruitment and Placement, Learning and Development, Career Management, Performance and Reward Management, Working Life Management* dan *Exit Management.*
b. *Specific Moment*
   Perusahaan membagi menjadi 2 (dua) klasifikasi bentuk keterlibatan dan *support* Perusahaan kepada pegawai, baik dalam sukacita maupun dukacita.
c. *Created Moment*
   Misalkan *Employee/Family Gathering*, Halal Bihalal Perusahaan, perayaan ulang tahun Perusahaan, PORSENI (Pekan Olah Raga dan Seni), *Women's Day*, dan lain-lain

PLN Indonesia Power delivers "Moments that Matter" to create the best experience for its employees. The "Moments that Matter" include:

a. Ongoing Moments
   The Company nurtures touchpoint values along the employee journey (from hire to fire), which cover HR Strategy and Planning, Recruitment and Placement, Learning and Development, Career Management, Performance and Reward Management, Working Life Management, and Exit Management.
b. Specific Moments
   The Company has two (2) classifications of its engagement and support for employees, both in joy and sorrow.
c. Created Moments
   This includes, for example, Employee/Family Gathering, Company Halal Bi-halal, Company anniversary celebration, Sports and Arts Week (PORSENI), Women's Day, etc.



Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Budaya Perusahaan yang berlaku selama tahun 2023 adalah **Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (**AKHLAK). Penjelasan terkait Budaya Perusahaan telah disajikan pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Corporate Culture applied during 2023 was **AKHLAK (*Amanah*/Trustworthy, *Kompeten*/Competent, *Harmonis*/Harmonious, Loyal, *Adaptif*/Adaptable,** and ***Kolaboratif*/Collaborative)**. Explanation on Corporate Culture has been presented in the Corporate Profile section of this Annual Report.

AKHLAK
AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

Analisis Kecukupan SDM
HR Adequacy Analysis

Jumlah SDM Perusahaan tahun 2023 adalah sebanyak 5.452 pegawai. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 4.189 orang.

The head count of the Company's HC in 2023 was 5,452 employees. This was an increase from 4,189 people in 2022.

Informasi lebih lanjut terkait Komposisi SDM telah dijelaskan pada bagian Profil Perusahaan Sub Bab Komposisi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Laporan Tahunan ini.

Further information regarding the composition of HC has been described in the Corporate Profile section of the Composition and Competence Development of Employees Sub-Section in this Annual Report.

Penyempurnaan Kebijakan SDM
HC Policy Improvement

Sebagai bentuk pengelolaan SDM yang berkelanjutan, PLN Indonesia Power senantiasa memperbaharui dan menyusun kebijakan secara berkala melalui Surat Keputusan (SK) Direksi dan kebijakan turunan lainnya. Pada tahun 2023, telah disahkan beberapa kebijakan baru, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi No. 0007.P/DIR/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. 102.K/010/IP/2017 tentang Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti tanggal 30 Mei 2023.
2. Peraturan Direksi No. 0081.P/DIR/2023 Direksi tentang Perlindungan, Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual tanggal 03 Agustus 2023.
3. Peraturan Direksi No. 086.P/DIR/2023 tentang *Employee Value Proposition*.
4. Peraturan Direksi No. 0090.P/DIR/2023 tentang Bantuan Kacamata.

As a form of sustainable HC management, PLN Indonesia Power continuously updates and regularly draft policies through the Board of Directors Decree and other derivative policies. Several new policies have been ratified in 2023, among others:

1. Board of Directors Regulation No. 0007.P/DIR/2023 concerning the Second Amendment to the Board of Directors Decree No. 102.K/010/IP/2017 dated May 30, 2023 concerning Post-Retirement Preparation Education and Training.
2. Board of Directors Regulation No. 0081.P/DIR/2023 concerning the Protection, Prevention and Handling of Sexual Harassment dated August 03, 2023.
3. Board of Directors Regulation No. 086.P/DIR/2023 concerning Employee Value Proposition.
4. Decree of the Board of Directors No. 0090.P/010/DIR/2023 on Eyeglasses Assistance Program.

Pengelolaan Pegawai Purna Bakti
Management of Post-Retirement Employees

Kebijakan Pengelolaan Pegawai Purna Bakti berdasarkan pada:

1. PKB Bab V Pasal 31 tentang Kepesertaan Pensiun;
2. Surat Keputusan Direksi No. 205.K/010/IP/2012 tentang Pengelolaan Manfaat Pensiun Pegawai Melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. Surat Keputusan Direksi No. 116.K/010/IP/2016 tentang Masa Persiapan Pensiun;
4. Surat Keputusan Direksi No. 146.K/010/IP/2020 tentang Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti;
5. Peraturan Direksi No. 0007.P/DIR/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 102.K/010/IP/2017 tentang Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti tanggal 30 Mei 2023.

The Policy of concerning Post-Retirement Employees is based on:

1. Collective Labor Agreement Chapter V Article 31 on Retirement Participation;
2. Decree of the Board of Directors No. 205.K/010/IP/2012 on the Management of Employee Retirement Benefits through the Financial Institution Retirement Fund;
3. Decree of the Board of Directors No. 116.K/010/IP/2016 on Retirement Preparation Period;
4. Decree of the Board of Directors No. 146.K/010/IP/2020 on Post-Retirement Preparation Education and Training;
5. Board of Directors Regulation No. 0007.P/DIR/2023 concerning the Second Amendment to the Board of Directors Decree number 102.K/010/IP/2017 dated May 30, 2023 concerning Post-Retirement Preparation Education and Training.



PLN Indonesia Power memiliki kebijakan memberikan hak kepada pegawai untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang terdiri dari Program MPP 3 (tiga) Bulan dan Program MPP 12 (dua belas) bulan sebelum memasuki usia pensiun (56 tahun).

Dalam rangka MPP, pegawai diberikan pembekalan melalui program kewirausahaan, sertifikasi, serta pembekalan rohani. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti kepada 329 pegawai.

PLN Indonesia Power maintains a policy on employees' right to enter the Retirement Preparation Period (RPP) consisting of three-month and one year RPP Program prior to the retirement age (at 56).

In the context of Retirement Preparation Period (RPP), employees are provided preparation through entrepreneurship programs, certifications, and spiritual preparation. In 2023, Post-Retirement Preparation Education and Training had been provided for 329 employees.

Sistem Rekrutmen Pegawai
Employee Recruitment System

Proses rekrutmen pegawai didasarkan pada Keputusan Direksi No. 85.K/010/IP/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Sistem Rekrutmen Pegawai. Metode perekrutan pegawai dapat dilakukan melalui metode Rekrutmen Umum dan/atau Rekrutmen Khusus:

1. Rekrutmen Umum (*regular*), diperuntukkan untuk seluruh pelamar luas yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan,
2. Rekrutmen Khusus (*direct shopping*), PLN Indonesia Power melaksanakan Rekrutmen khusus melalui *direct shopping* dimana pernah melakukan bekerjasama dengan lembaga pendidikan STT PLN, Sekolah Vokasi UGM, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Surabaya.
3. Rekrutmen Pegawai dari Sumber Internal, rekrutmen ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme mutasi jabatan yang berlaku di Perusahaan dengan tujuan salah satunya untuk mengisi formasi jabatan sesuai perencanaan tenaga kerja yang ditetapkan, salah satu sumber rekrutmen internal adalah Pegawai Tugas Karya.

Sejak tahun 2018 pelaksanaan rekrutmen terpusat (*join recruitment*)di PT PLN (Persero).

The recruitment process is based on the decision of the Board of Directors No. 85.K/010/IP/2012 dated June 19, 2012 concerning Employee Recruitment System. Recruitment methods can be done through General and/or Special Recruitment methods:

1. Regular Recruitment is aimed at all general applicants who meet the qualification as required by the Company.
2. Special Recruitment is carried out through direct shopping, including by collaborating with STT PLN, UGM Vocational School, Jakarta State Polytechnics, Malang State Polytechnics, and Surabaya State Polytechnics.
3. The Company fills open positions according to its manpower plan through internal recruitment, which follows the established rules and procedures for job transfers. One source for these internal hires are employees who currently perform the tasks associated with the open position.

Since 2018, the recruitment is performed jointly at PT PLN (Persero).

Tabel Rekrutmen Umum-Khusus Pegawai Tahun 2020 - 2023 (orang)
Table of General Employee Recruitment 2020-2023 (employee)

Tahun Year	Tingkat Pendidikan Level of Education			Jumlah Total
	S2 Master's Degree (S2)	S1 Bachelor's Degree (S1)	D3 Diploma 3 (D3)	
2023	**4**	**-**	**-**	**4**
2022*	-	-	-	-
2021*	-	-	-	-
2020	-	-	25	25

* tidak terdapat perekrutan pegawai secara umum (regular)/*direct shopping* dikarenakan adanya *freeze* rekrutmen.

* No regular recruitment/direct shopping was carried out due to hiring freeze.

Penempatan Pegawai
Employee Placement

Penempatan pegawai berdasar pada Surat Keputusan Direksi No. 85.K/010/IP/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Sistem Rekrutmen Pegawai dan Surat Keputusan Direksi No. 111.K/010/IP/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Diklat Prajabatan.

The employee placement is based on the Board of Directors Decree No. 85.K/010/IP/2012 dated June 19, 2012 on Employee Recruitment System and Decree of the Board of Directors No. 111.K/010/IP/2017 dated June 2, 2017 concerning Pre-Service Education and Training.



Setelah proses rekrutmen, calon pegawai mengikuti diklat persiapan atau OJT selama periode tertentu untuk memenuhi kompetensi minimal yang diperlukan sebagai pegawai di PLN Indonesia Power. Apabila calon pegawai dinyatakan lulus diklat persiapan, maka diusulkan untuk ditetapkan sebagai pegawai organik. Pelaksanaan diklat persiapan adalah dalam rentang waktu 6-8 bulan. Pada tahun 2023 terdapat penempatan 4 (empat) pegawai.

After the recruitment process, prospective employees follow the preparation education and training or OJT during a certain period to meet the minimum competencies required as employees at PLN Indonesia Power. Prospective employee passing such a preparation would be proposed to be designated as an organic employee. The preparation would take 6-8 months to complete. In 2023 saw the placement of four (4) employees.

Sistem Pembelajaran Pegawai
Employee Learning System

Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development

Sebagai langkah pemutakhiran dan peningkatan kemampuan serta *skill* pegawai, PLN Indonesia Power secara berkala melakukan pengembangan kepada seluruh pegawainya sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Kebijakan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan mengacu pada:

1. Surat Keputusan Direksi No. 228/K/010/IP/2022 tentang *Human Experience Management System* (HXMS),
2. Surat Keputusan Direksi No. 74.K/010/IP/2020 tentang Sistem Pembelajaran Pegawai dan keputusan turunannya,
3. Surat Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir,
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2022-2023 yang disepakati antara Manajemen dan Persatuan Pegawai (PP) dan Amandemennya, pendidikan dan pelatihan masuk ke BAB IV tentang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Pasal 22.

For updates and improvements of employee's ability and skill, PLN Indonesia Power regularly provides development program for all employees according to Company's needs and priority scale. Company policy on the implementation of training and development makes reference to:

1. Decree of the Board of Directors No. 228/K/010/IP/2022 concerning Human Experience Management System (HXMS),
2. Decree of the Board of Directors No. 74.K/010/IP/2020 about Employee Learning Systems and its derivative decrees,
3. Decree of the Board of Directors No. 144.K/010/IP/2018 on Competency and Career Development System.
4. Collective Labor Agreement (CLA) 2022-2023 between the Management and the Employee Association (PP-IP), education and training are described in CHAPTER IV on Employee Management and Development Article 22.

Realisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai
Actual Employee Competence Development

Pengembangan kompetensi pegawai PLN Indonesia Power ditetapkan selaras untuk mendukung implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020-2024 dan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai tanpa memandang gender. Ini merupakan salah satu komitmen PLN Indonesia Power untuk menghargai hak asasi manusia yang berlaku universal. Pelatihan dan Pengembangan mencakup pengenalan organisasi, visi dan misi, tata nilai dan budaya Perusahaan, kompetensi teknis yang diperlukan, serta kemampuan memimpin yang diselaraskan dengan strategi *Human Capital* dengan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai.

Competency development for PLN Indonesia Power employees is sought to support the implementation of Company Long-Term Plan (RJPP) 2020-2024 and to five equal opportunity for all employees regardless of their gender. This is among PLN Indonesia Power's commitments to respect the universally-acknowledged human rights. The Training and Development covers introduction to organization, vision and mission, corporate values and culture, required technical competencies, and leadership capability. The materials are provided in accordance with the Human Capital strategies, by emphasizing the provision of equal opportunity for all employees.

Kebijakan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai diatur dalam PKB Pasal 22 tentang Pendidikan dan Pelatihan dan Kebijakan Sistem Pembelajaran Pegawai. Selain itu, PLN Indonesia Power terus berupaya untuk memperkuat strategi sistem pengelolaan SDM, merekrut *talent* terbaik melalui serangkaian program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif.

The policy on equal opportunity for all employees to receive competency development is set out in the CLA Article 22 on Education and Training and Employee Learning System Policy. PLN Indonesia Power also strives to continuously strengthen the strategy for HR management system, recruiting the best talents through a set of comprehensive training and development programs.



IP Academy

IP Academy

Perkembangan teknologi dan tuntutan Perusahaan akan keberlangsungan dan penguatan Anak Perusahaan sebagai *supporting* dalam pengembangan usaha membuat diperlukannya *review* dan evaluasi *roadmap* IP *Academy*. Merujuk kepada rencana jangka panjang Perusahaan beserta *strategic objective* Perusahaan, maka disusunkan *roadmap* baru yang menunjang pengembangan Perusahaan.

Sejak diluncurkan tahun 2018, IP Academy sebagai *Centre of Excellence* dalam memecahkan berbagai persoalan terkait kinerja memiliki *Roadmap* sebagai grand desain pembelajaran untuk mewujudkan Kompetensi Inti Perusahaan sebagai Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit serta Pengembangan Pembangkit.

Roadmap IP Academy sebelumnya adalah periode 2018-2022 telah mengalami *review* dan penyempurnaan menjadi *Roadmap* IP *Academy* 2022-2028. Hal ini didasari perkembangan teknologi dan tuntutan Perusahaan akan keberlangsungan dan penguatan Anak Perusahaan sebagai *supporting* dalam pengembangan usaha membuat diperlukannya *review* dan evaluasi *roadmap* IP Academy. Merujuk kepada rencana jangka panjang perusahaan beserta *strategic objective* Perusahaan, maka disusunkan *roadmap* baru yang menunjang pengembangan Perusahaan.

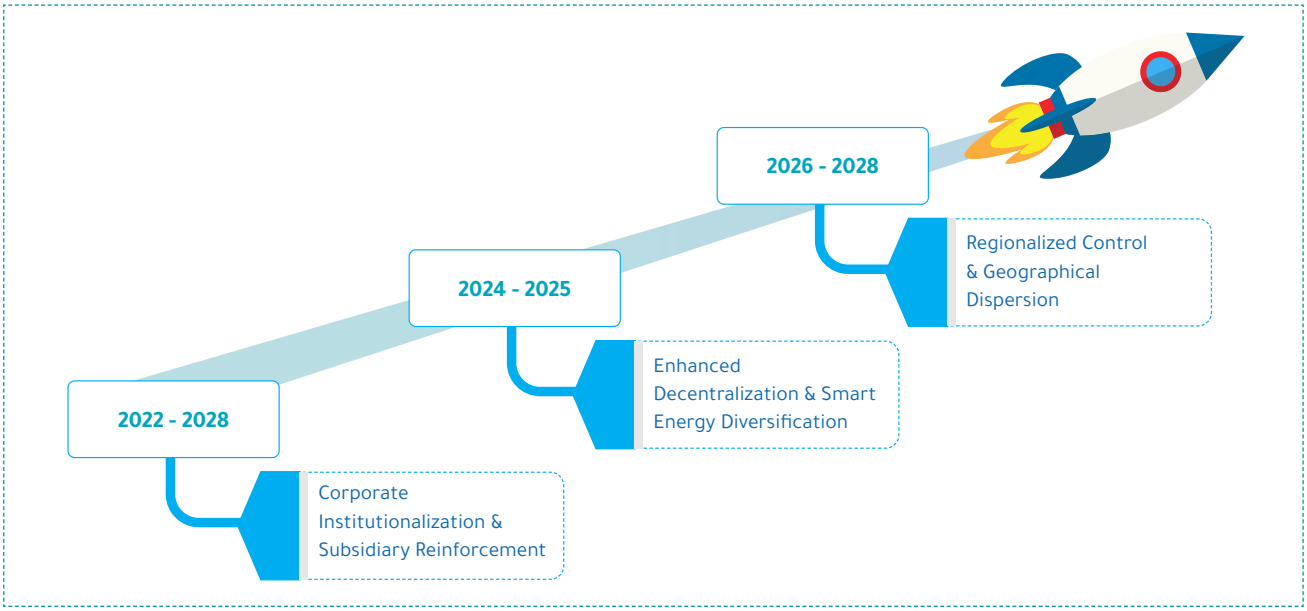
As technology advances and the Company's demand on the long-term viability and empowerment of its Subsidiaries, it becomes essential to review and assess the road map for the IP Academy. A new road map has been crafted to propel the Company's development. This road map draws upon the Company's long-term vision and its key strategic goals, ensuring all efforts are aligned for success.

Since its launch in 2018, IP Academy becomes the Center of Excellence in resolving every performance issue, having a road map as the learning grand design to achieve the Company Core Competencies of Power Plant Operations and Maintenance and Power Plant Development.

The previous IP Academy Road Map 2018-2022 has been reviewed and improved into IP Academy Road Map 2022-2028. It is based on technology advances and the Company's demand on the long-term viability and empowerment of its Subsidiaries, it becomes essential to review and assess the road map for the IP Academy. A new road map has been crafted to propel the Company's development. This road map draws upon the Company's long-term vision and its key strategic goals, ensuring all efforts are aligned for success.

***Roadmap* IP Academy 2022 - 2028**

IP Academy Roadmap of 2022 - 2028



Adapun realisasi pembelajaran di IP Academy untuk tahun 2022-2023 menitik beratkan pada aspek "*Corporate Institutionalization & Subsidiary Reinforcement*" yaitu Pembelajaran yang dilaksanakan mendukung penguatan kinerja Perusahaan melalui pembelajaran yang berdasarkan pada *business issue* dan *business concern* di Perusahaan. Selain hal tersebut, program kerja dan pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan mampu memperkuat kompetensi dan proses bisnis pengembangan kompetensi di Anak Perusahaan sehingga kinerja kinerja Anak Perusahaan yang optimal dapat mendukung kinerja PLN Indonesia Power. Berikut Realisasi pembelajaran di IP Academy untuk tahun 2023:

The realization of learning at IP Academy for 2022-2023 focused on "Corporate Institutionalization & Subsidiary Reinforcement" aspect, i.e. Learning that is implemented to support improving the Company's performance through learning based on business issues and business concerns in the Company. Along these lines, the work and learning programs that have been put in place are able to bolster the competence and business process development competence within Subsidiaries. This, in turn, allows the optimal performance of subsidiaries to contribute to PLN Indonesia Power's performance. Below are the realization of learning at IP Academy for 2023:

School	**Penjelasan** Description	**Realisasi Pelatihan 2023** Actual Training in 2023	**Realisasi Jumlah Peserta 2023** Actual Number of Participants in 2023
Asset Performance Management School I (APM I)	Pusat pembelajaran bidang Pengelolaan Pembangkit Learning Center of Power Plant Management	16	763
Asset Performance Management School II (APM II)	Pusat pembelajaran bidang pemeliharaan peralatan sistem mekanik pembangkit, instalasi Listrik Pembangkit. A learning center for power plant equipment and installation maintenance	13	426
Business Development Excellence School (BDE School)	Pusat pembelajaran di bidang Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Korporat. Learning center in the field of Corporate Business Planning and Development.	13	241
Business Enabler School (BEN School)	Pusat pembelajaran terkait dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi Penunjang Bisnis di PLN Indonesia Power. A learning center for meeting the Business Support competency requirements atPLN Indonesia Power.	12	765
Corporate Strategic Initiative School (CSI School)	Pusat pembelajaran dalam pengembangan kompetensi pegawai untuk seluruh proses bisnis yang bersifat korporat. A learning center for developing employee competency for all corporate business processes	30	1.827

Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training

Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai dapat menjalankan pekerjaannya. Yaitu memenuhi kompetensi bidang sesuai Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang diembannya sehingga mendukung produktivitas di lingkungan kerja. Adapun jenis Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan mencakup:

1. Program Pembelajaran Prajabatan
   Program pembelajaran prajabatan merupakan kegiatan proses seleksi untuk mengevaluasi kesesuaian karakter dan kompetensi peserta dengan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ), serta untuk memberikan pengenalan dan pemahaman kepada peserta mengenai bisnis inti Perusahaan dan kompetensi standar kelistrikan. Program pembelajaran prajabatan dapat terdiri atas Pembinaan Sikap Mental Disiplin, Orientasi Perusahaan, Pembidangan, dan *On the Job Training* (OJT).

Education and training for all employees is given to ensure that every employee can perform their duties. It is to meet area competency according to their Job Competency Requirements which eventually enhances productivity at work. The types of education and training provided include:

1. Pre-Service Learning Program
   This is a selection process to evaluate the character compatibility and competency of the participants with the job competency requirements (JCR), also to introduce and elaborate the Company's core business and electricity standard competency. The pre-service learning program may consist of Discipline Coaching, Corporate Orientation, Job Description, and On The Job Training (OJT).

2. Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi
   Program pembelajaran profesi dan sertifikasi diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengembangan kompetensi bidang untuk memenuhi KKJ Bidang yang dipersyaratkan pada jabatan dan sesuai dengan struktur profesi yang berlaku di Perusahaan. Materi program pembelajaran profesi dan sertifikasi mengacu pada standar KKJ dan/atau standar profesi yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan bisnis Perusahaan. Sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan untuk pegawai berupa sertifikasi mandatori, sertifikasi ekspertise dan sertifikasi keahlian.
3. Program Pembelajaran Kepemimpinan
   Program pembelajaran kepemimpinan adalah diklat kepemimpinan yang diselenggarakan Perusahaan sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi dan pembinaan karir pegawai untuk memenuhi kompetensi utama, kompetensi peran dan kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada setiap jenjang jabatan sesuai tuntutan jalur karir yang diproyeksikan bagi pegawai. Program pembelajaran kepemimpinan terdiri atas Diklat Penjenjangan, dan *Leadership Development Program (LDP) Series*.
4. Program Pembelajaran Inisiatif Strategic Korporat
   Program pembelajaran inisiatif strategik korporat merupakan program pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja Unit/Korporat dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau berbasis *Business Issue/Performance* dan *Business Concern*.
5. Program Pembelajaran Penunjang
   Pembelajaran penunjang adalah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Perusahaan di luar program pembelajaran profesi dan sertifikasi, maupun program pembelajaran kepemimpinan. Pembelajaran penunjang tidak bersifat wajib, dan dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan. Pembelajaran penunjang meliputi Pendidikan Formal, *Workshop*/Lokakarya/ Seminar dan *Knowledge Management*.
6. Program Pembekalan Masa Purna Bakti
   Diklat pembekalan masa purna bakti diselenggarakan Perusahaan untuk memberikan pembekalan dan persiapan bagi pegawai dalam menghadapi masa purna bakti yang memuat materi penyiapan sikap, mental, perilaku Pegawai dan istri/suami dalam masa pensiun. Peserta program pembekalan masa purna bakti adalah pegawai yang memiliki sisa masa kerja maksimum 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal atau pegawai yang berhak mendapat program pembekalan akibat terbitnya suatu kebijakan Direksi dengan ketentuan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai atau tidak sedang menjalani sanksi disiplin.

2. Professional and Certification Learning Program
   This program is a part of the coaching process and area competency development to meet the JCR of the corresponding position and to conform the current professional structure in the Company. The material refers to the JCR standards or applicable national or international professional standards relevant to the Company's business. The certification comprises mandatory certification, expertise certification, and skill certification.
3. Leadership Learning Program
   This takes form as a leadership training held by the Company for employee competency and career development. This program aims at meeting the main competency, role competency, and area competency required for each position level according to the career expected for the relevant employees. The leadership learning program consists of the Education and Training for Job Grading and Leadership Development Program (LDP) Series.
4. Corporate Strategic Initiative Learning Program
   This is a program to improve short- and long-term performance of the Units/Company based on Business Issue/Performance and Business Concern.
5. Supporting Learning Program
   This program provides education and training courses beyond the professional and certification programs and leadership learning program. It is an optional program held following the needs of the Company, including Formal Education, Workshop/Seminar and Knowledge Management.
6. Post-Employment Preparation Education Program
   This program is provided by the Company for retiring employees to prepare and plan their mindset, mental outlook, and conducts for them and their spouse during their retirement. It is arranged for employees with at most remaining 5 (five) years of service term prior to the normal retirement age or employees entitled to the program as specified by the policy issued by the Board of Directors so long as the corresponding employees are not under investigation of or sanctioned for disciplinary violation.

Realisasi pendidikan dan pelatihan pegawai selama tahun 2023 adalah:

All educations and trainings provided to employees throughout 2023 were as follows:

Program Latihan Training Program	Durasi (Jam) Duration (hour)			Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (person)			Rata-rata Jam Pelatihan (Durasi/Orang) Average Training Hours (duration/person)		
	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total
Diklat yang dikelola IP Academy: Education and Training managed by IP Academy:									
Diklat Seleksi Pegawai Baru (Diklat Prajabatan). Education and Training for New Employee (Pre-service).	-	528	528	-	99	99	-	5	5
Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi. Professional and Certification Learning Program.	11.848	144.240	156.088	138	2.441	2.579	86	59	61

Program Latihan Training Program	Durasi (Jam) Duration (hour)			Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (person)			Rata-rata Jam Pelatihan (Durasi/Orang) Average Training Hours (duration/person)		
	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total
Program Pembelajaran Kepemimpinan. Leadership Learning Program.	5.848	21.416	27.264	21	465	486	278	46	56
Program Pembelajaran Inisiatif Stratejik Korporat. Corporate Strategic Initiative Learning Program.	15.848	203.368	219.216	258	3.352	3.610	61	61	61
Program Pembelajaran Penunjang. Supporting Learning Program.	3.640	63.504	67.144	122	1.774	1.896	30	36	35
Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti. Post-Employment Preparation Education and Training.	896	9.808	10.704	20	309	329	45	32	33
Jumlah Total	**38.080**	**442.864**	**480.944**	**559**	**8.440**	**8.999**	**68**	**52**	**53**

Selama tahun 2023, PLN Indonesia Power telah melaksanakan program diklat kepada 8.999 pegawai dengan jumlah jam pelatihan mencapai 480.944 jam sehingga rata-rata jam pelatihan mencapai 53 jam per pegawai.

In 2023, PLN Indonesia Power had provided education and training programs to 8,999 employees, at a total of 480,944 training hours, making the average of 53 training hours/employee.

Pendidikan Formal
Formal Education

PLN Indonesia Power senantiasa memfasilitasi pegawai untuk mendapatkan kualifikasi profesional yang memadai melalui jalur pendidikan formal guna terus meningkatkan kinerja organisasi. Pegawai PLN Indonesia Power yang telah dinyatakan lulus dari berbagai lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri di tahun 2023 adalah sebanyak 103 pegawai.

PLN Indonesia Power facilitates its employees to receive proper professional qualifications via formal education in order to continuously improve organizational performance. 103 employees of PLN Indonesia Power employees have graduated from various local and international educational institutions in 2023.

Tingkat Pendidikan (S1/S2) Education Level (Bachelor's/ Master's Degree)	Universitas University	Jurusan Major	Jumlah Peserta Number of Participants
S2 Master's Degree (S2)	Delft University of Technology	Master of Mechanical Engineering	1
		Master Sustainable Energy Technology	1
S2 Master's Degree (S2)	Monash University	Master of Artificial intelligence	1
		Master of Business innovation	1
		Master of Communication	1
		Master of information Technology	1
S23 Master's Degree (S3)	The University of Adelaide	Phd of Climate Change	1
S2 Master's Degree (S2)	The University of Auckland	Master of Energy	1
S2 Master's Degree (S2)	The University of Melbourne	Master of Business Analytics	1
S2 Master's Degree (S2)	The University of New South Wales Sydney	Engineering Science Renewable Energy	1
		Master in Engineering - Renewable Energy Specialisation	1
		Master of Engineering Science (Renewable Energy)	1
S2 Master's Degree (S2)	The University of Queensland	M.Eng.Sc Civil Engineering	1
		Master of Business Psychology	1
S2 Master's Degree (S2)	The University of Sydney	Master of Sustainability	1

Tingkat Pendidikan (S1/S2) Education Level (Bachelor's/ Master's Degree)	Universitas University	Jurusan Major	Jumlah Peserta Number of Participants
S2 Master's Degree (S2)	Universitas Malaya	Master of Renewable Energy	1
S2 Master's Degree (S2)	University of Auckland	Master of Data Science	1
S2 Master's Degree (S2)	University of Leeds	Msc Energy and Environment	1
S2 Master's Degree (S2)	Universitas Indonesia University of Indonesia	Magister Teknik Elektro: Peminatan Manajemen Energi dan Ketenagalistrikan Master's Degree in Electrical Engineering: Management of Energy and Electricity Specialization	1
		Magister Teknik Elektro: Peminatan Tenaga Listrik dan Sistem Cerdas Master's Degree in Electrical Engineering: Power and Smart Systems Specialization	1
		Magister Teknik Kimia: Peminatan Teknik Energi dan Proses Berkelanjutan Master in Chemical Engineering: Sustainable Process and Energy Engineering Specialization	4
		Magister Teknik Mesin : Konversi dan Konservasi Energi Master of Mechanical Engineering: Conversion and Conservation of energy	4
		Magister Teknik Sistem Energi Master in Energy System Engineering	2
		Magister/Profesi Psikologi Master of/Professional Psychology	2
		Business and Management	1
		Data Science/Data Analytics/Big Data Analytics	2
		Manajemen Risiko Risk Management	1
S2 Master's Degree (S2)	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Magister Pada Bidang Rekayasa Energi Terbarukan dan Berkelanjutan (Teknik Mesin) Master in Renewable and Sustainable Energy Engineering (Mechanical Engineering)	1
		Magister Teknik Elektro Master of Electrical Engineering	1
		Magister Teknik Sistem dan Industri: Bidang Keahlian inventory and Asset Management (Teknik Sistem & industri) Master in Systems and Industrial Engineering: Inventory and Asset Management Specialist (System & Industrial Engineering)	2
		Teknik Elektro - Reliability Engineering and Asset Management Electrical Engineering - Engineering Reliability and Asset Management	1
		Teknik Lingkungan Environmental Engineering	1
		Teknik Mesin Mechanical Engineering	3
S2 Master's Degree (S2)	Institut Teknologi Bandung	Eksplorasi Geothermal Geothermal Exploration	7
		Logistik Logistics	3
		Material Energi Berkelanjutan Sustainable Energy Materials	5
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pembangkitan Daya Power Generation System Operation and Maintenance	7
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Tenaga Listrik Electrical Power System Operation and Maintenance	1
		Rekayasa Energi Berkelanjutan Sustainable Energy Engineering	4
		Rekayasa Energi Berkelanjutan Sustainable Energy Engineering	7
		Rekayasa Lingkungan - *Climate Change Solution* Environmental Engineering - Climate Change Solution	2
		Rekayasa Utilisasi *Geothermal* Geothermal Utilization Engineering	3
		Elektro - Elektro/Power System/Arus Kuat Electrical - Electrical/Power System/Strong Current	1
		Sains Data dan Pengelolaan Energi Listrik Data Science and Electrical Energy Management	2
		Smart Grid dan interkoneksi Smart Grid and Interconnections	1
		Teknik dan Manajemen Energi Energy Engineering and Management	1
		Teknologi Hidrogen dan *Fuel Cell* Hydrogen and Fuel Cell Technology	3
		Teknologi Pemrosesan Batubara Coal Processing Technology	8
S2 Master's Degree (S2)	Institut Teknologi PLN	Teknik Elektro Electrical Engineering	1
S2 Master's Degree (S2)	Universitas Gadjah Mada	Magister Teknik Sistem Konsentrasi Teknik Sistem Lingkungan Master in System Engineering majoring in Environmental System Engineering	1
S2 Master's Degree (S2)	Universitas Tenaga Nasional	Master of Electronic and Computer Engineering	1

Jumlah pegawai yang telah sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 76% dari total pegawai O&M yang wajib sertifikasi. Berikut tren persentase sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk pegawai O&M dalam 4 (empat) tahun terakhir:

The number of Electrical Power Engineering certified until December 31, 2023 accounts for 76% of the total O&M employees who are required to be certified. The following table shows the trend of O&M personnel competency certification for the past four (4) years:

Tabel Persentase Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk Pegawai O&M
Percentage of Electrical Engineering Personnel Competency Certification for O&M Employees

Uraian Description	2020	2021	2022	2023
Persentase Pegawai O&M Tersertifikasi Percentage of Certified O&M Employees	78%	96%	86%	76%

Dari pelaksanaan sertifikasi di atas, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan diwajibkan Perusahaan untuk setiap pegawai Operasi dan Pemeliharaan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2016 pasal 25 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan bahwa setiap tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi. Untuk pelaksanaan sertifikasi lainnya bersifat non-*mandatory*.

From the above programs, the Electrical Engineering Personnel Competency Certification is mandatory for all Operations and Maintenance employees, as stipulated by the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 206 Article 25 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification, which requires electrical engineering personnel working in electricity industry to hold Competency Certificate. Other certifications are optional.

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk Pegawai O&M
Implementation of Electrical Engineering Personnel Competency Certification for O&M Employees

Program Sertifikasi Kompetensi Competency Certification Program	Ukuran Size	2022			2023		
		Target	Realisasi Actual	Pencapaian Achievement	Target	Realisasi Actual	Pencapaian Achievement
Sertifikasi Baru New Certificate	Jumlah Pegawai Number of Employees	286	290	101%	547	647	118%
	Jumlah Unit Kompetensi Total Competency Unit	286	290	101%	547	647	118%
Sertifikasi Perpanjangan Renewal Certificate	Jumlah Pegawai Number of Employees	365	362	99%	383	415	108%
	Jumlah Unit Kompetensi Total Competency Unit	365	362	99%	383	415	108%

Community of Expertise (ComEt)

Community of Expertise (ComEt)

Community of Expertise (ComEt) diluncurkan pada tahun 2018. PLN Indonesia Power senantiasa membangun dan meningkatkan kegiatan komunitas keahlian pembangkitan di lingkungan Perusahaan, biasa dikenal dengan ComEt. ComEt diyakini menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi kelistrikan di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity*) saat ini.

The Community of Expertise (ComEt) was launched in 2018. PLN Indonesia Power has been initiating the establishment and improvement of a ComEt in the field of power generation. ComEt is believed to be a solution to answer the challenge of electricity technology development in the current VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) era.

ComEt menjadi unsur penting untuk meraih "*Second Curve*" Perusahaan sekaligus *new backbone* PLN Indonesia Power di masa mendatang. *Backbone* PLN Indonesia Power saat ini adalah sebagai pengelola dan operator aset pembangkit milik PT PLN (Persero) maupun milik sendiri. Untuk itulah standardisasi keahlian pembangkitan terus ditingkatkan mengacu pada Skema Sertifikasi Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri ESDM No. 46 Tahun 2017 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan serta berbagai direktori dan *benchmarking* dengan entitas lainnya.

ComEt is vital to achieve the "Second Curve" as well as to become PLN Indonesia Power's new backbone in the future. Acting as the manager and operator of PLN-owned and existing power plants is currently being the PLN Indonesia Power's backbone. Therefore, the standardization of power generation expertise needs to be constantly improved by referring to Indonesia's National Work Competency Standard (SKKNI) Scheme that also refers to the Presidential Regulation No. 8 of 2012, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 46 of 2017 on Electrical Engineering Personnel Competency Standardization, and various directories and benchmarking with other entities.



Sebelumnya PLN Indonesia Power menerapkan ComEt 1.0 (pengakuan dari internal) berubah menjadi ComEt 2.0 (diperluas dengan pengakuan dari pihak eksternal). ComEt 2.0 mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 17.K/010/IP/2019 tentang Sistem Ekspertise Operasi Pemeliharaan dan Enjiniring (OPHARENG), dimana pengembangan ekspertise dilakukan dengan tahapan berikut:

Previously, PLN Indonesia Power implemented ComEt 1.0 (internal acknowledgment) which now has developed into ComEt 2.0 (extended with external acknowledgment). ComEt 2.0 refers to the Decree of the Board of Directors No. 17.K/010/IP/2019 on Operations and Maintenance and Engineering Expertise System (OPHARENG) in which the expertise development was sought under the following stages:

Candidate

- Sertifikasi Level 1 - 3 KKNI	- KKNI Level 1-3 Certified
- Pembekalan Sertifikasi Level 4 - 5 KKNI	- KKNI Level 4-5 Certification Briefed
- Sertifikasi Level 1 Asosiasi / Pabrikan	- Association/Manufacturer Level 1 Certified
- Pembekalan Sertifikasi Level 2 Asosiasi / Pabrikan	- Association/Manufacturer Level 2 Certification Briefed

Persiapan Candidate:	**Candidate Preparation:**
- Pembekalan Sertifikasi Level 1 - 3 KKNI	- KKNI Level 1-3 Certification Briefed
- Pembekalan Sertifikasi Level 1 Asosiasi / Pabrikan	- Association/Manufacturer Level 1 Certi-fication Briefed

Specialist

- Pendidikan Formal S1	- Formal education: Bachelor's Degree (S1)
- Pembekalan Sertifikasi Level 6 KKNI	- KKNI Level 6 Certification Briefed
- Sertifikasi Level 2 Asosiasi / Pabrikan	- Association/Manufacturer Level 2 Certified
- Pembekalan Sertifikasi Level 3 Asosiasi / Pabrikan	- Association/Manufacturer Level 2 Certification Briefed
- Sebagai Narasumber Konferensi Nasional	- As speaker in national conferences
- *Short Course* Penulisan Ilmiah Internasional	- Internasional Short Course on scientific writing
- *Short Course* Penulisan Ilmiah Level Nasional	- National short course on scientific writing
- *Short Course* Bahasa Inggris	- English short course
- *Join Research*	- Joint research
- *Member* Komunitas *Expert* Nasional	- Member of national Expert communities

Senior Specialist

- Pendidikan Formal S2	- Formal education: Master's Degree (S2)
- Pembekalan Sertifikasi Level 7 KKNI	- KKNI Level 7 Certification Briefed
- Sertifikasi Level 3 Asosiasi / Pabrikan	- Association/Manufacturer Level 3 Certification
- Sebagai Narasumber Konferensi Internasional / Nasional	- As speaker in national/international conferences
- Member Komunitas *Expert* Internasional	- Member of international Expert communities
- *Short Course* Penulisan Ilmiah Internasional	- International short course on scientific writing
- *Short Course* Bahasa Internasional	- International short course on language
- *Join Research* Internasional	- International joint research
- Penugasan 1 - 2 Multi Sistem	- Multi-system 1-2 assignment

Expert

- Pendidikan Formal S3	- Formal education: Doctorate Degree (S3)
- Sertifikasi Level 7 KKNI	- KKNI Level 7 Certified
- Pembekalan Sertifikasi Level 8 - 9 KKNI	- KKNI Level 8-9 Certification Briefed
- Sebagai Narasumber Konferensi Internasional / Nasional	- Multi-system 3-4 assignment - As speaker in international/national conferences
- *Member* Komunitas *Expert* Internasional	- Member of international Expert communities
- *Evaluator* Jurnal Nasional	- Evaluator of national journals

Senior Expert

- Sebagai Narasumber Konferensi Internasional	- As speaker in international conferences
- Member Komunitas *Expert* Internasional	- Member of international Expert communities
- *Evaluator* Jurnal Internasional	- Evaluator of international journals

Selama tahun 2023, PLN Indonesia Power telah memiliki 4 (empat) orang Ekspertise yang memenuhi ketentuan dalam ComEt 2.0.

Throughout 2023, PLN Indonesia Power has had four (4) Experts who have met ComEt 2.0 requirements.

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development Costs

Selama tahun 2023, PLN Indonesia Power telah memiliki anggaran pendidikan dan pelatihan adalah sebesar Rp81,94 miliar, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2023. Berakhirnya pandemi COVID-19 juga membuka kesempatan pelaksanaan pembelajaran secara *offline* sehingga menaikkan jumlah pelaksanaan pembelajaran yang tentunya berkorelasi terhadap realisasi anggaran pembelajaran. Selain itu, adanya transformasi *Holding-Subholding* yang mengakibatkan adanya penambahan jumlah pegawai di PLN Indonesia Power semakin banyak akan kebutuhan pembelajaran di Perusahaan yang turut serta dalam meningkatkan realisasi anggaran pembelajaran.

Throughout 2023, PLN Indonesia Power has allocated education and training budget of Rp81,94 billion. This is an increase compared to 2023. With the ending of the COVID-19 pandemic, the possibility of returning to offline learning has emerged. This shift would allow for a greater number of learning initiatives to be implemented. These initiatives, in turn, would directly contribute to effectively utilizing the allocated learning budget. Along these lines, the Holding-Subholding transformation, which has led to a growth in the number of PLN Indonesia Power employees, will necessitate a corresponding rise in learning needs within the Company that are involved in boosting the utilization of the learning budget.

Tabel Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan (Rp miliar)
Education and Training Expense in (Rp billion)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Cost	62,04	46,05	29,5	29,8
Biaya Sertifikasi Pegawai Employee Certification Cost	19,89	4,23	3,03	5,3
Jumlah Total	**81,94**	**50,28**	**32,53**	**35,10**

Proyeksi Pengembangan SDM ke Depan
HC Development Projection

Sesuai dengan hasil *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan kompetensi di tahun 2024 adalah sebanyak 640 kali dan dengan biaya sebesar Rp40,05 miliar.

In accordance with the results of Training Need Analysis (TNA), the development of competence in 2024 was held 640 times and incurring Rp40.05 billion.

Sistem Pembinaan Karir Pegawai
Employee Career Coaching System

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam pembinaan karir pegawai, sistem pembinaan karir pegawai diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 sebagaimana diubah oleh Keputusan Direksi No. 72.K/010/IP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai.

To prove the Company's commitment, the employee career coaching system is stipulated in the Board of Directors Decree No. 144.K/010/IP/2018 as amended by the Board of Directors Decree No. 72.K/010/IP/2022 on Amendment to the Board of Directors Decree No. 144.K/010/IP/2018 on Employee Competency and Career Development System.

Pengukuran dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai
Employee Competency and Career Development Measurement

Pengukuran dalam pengembangan kompetensi dan karir pegawai dilakukan oleh Perusahaan salah satunya melalui metode asesmen. *Feedback* hasil asesmen disampaikan kepada Pegawai dan Atasan Pegawai. Asesmen Pegawai bertujuan untuk memetakan kompetensi maupun potensi pegawai agar dapat dilakukan pembinaan terhadap kompetensi dan karir pegawai.

Measurement in employee competence and career development is done by the Company, one of which is through assessment method. Feedback on the assessment result was submitted to Employee and their respective Superior. Employee Assessment aims to map employees' competency and potential for competency and career development.



Tabel Metode Pengukuran dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai
Measurement Method for Employee Competency and Career Development

Metode Pengukuran Measurement Method	Jenis Asessmen Type of Assessment	Level Proyeksi Projection level
Asesmen Pegawai Employee Assessment	SKD BUMN BUMN Board of Directors Decree	Direksi BUMN BUMN Board of Directors
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Direksi PLN PLN Board of Directors
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Manajemen Atas Top Management
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Manajemen Menengah Middle Management
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Manajemen Dasar Entry-Level Management
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Supervisori Atas Top Supervisory
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Supervisori Dasar Entry-Level Supervisory

Perencanaan Suksesi
Succession Planning

Perencanaan suksesi pegawai merupakan lanjutan dari tahap pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Suksesi Jabatan merupakan rangkaian proses penelusuran, pengidentifikasian, pembinaan dan pengembangan kompetensi dan karir Pegawai dalam mengisi jabatan saat dibutuhkan Perusahaan.

Employee succession planning is an extension of the competency development stage that has been implemented. Position Succession is a series of processes of tracing, identifying, coaching, and developing competencies as well as employee career in filling positions when needed by the Company.

Pembinaan Karir
Career Coaching

Pembinaan karir dilaksanakan melalui kegiatan mutasi jabatan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tanggal 14 September 2018 sebagaimana diubah oleh Keputusan Direksi No. 72.K/010/IP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai, Keputusan Direksi No. 051.K/010/IP/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Jalur Karir dan Keputusan Direksi No. 050.K/010/IP/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Asesmen Kompetensi.

Career coaching is carried out through the job transfer set out in the Board of Directors Decree No. 144.K/010/IP/2018 dated September 14, 2018 as amended by the Board of Directors Decree No. 72.K/010/IP/2022 on Amendment to the Board of Directors Decree No. 144.K/010/IP/2018 concerning Employee Competency and Career Development System, Decree of the Board of Directors No. 051.K/010/IP/2019 dated May 09, 2019 on Career Path and the Board of Directors Decree No. 050.K/010/IP/2021 dated June 07, 2021 concerning Competency Assessment.

Tabel Mutasi Jabatan
Transfer of Position

Jenis Mutasi Jabatan Type of Transfer	Penjelasan Description
Promosi Jabatan Promotion	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Transfer of a position to another position at one level higher.
Rotasi Jabatan Rotation	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan yang sama. Transfer of a position to another position at the same level.
Demosi Jabatan Demotion	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan yang lebih rendah dan tidak menyebabkan pegawai mengalami penurunan *grade*. Transfer of a position to another position at one level lower without down-grading.

Pelaksanaan mutasi jabatan mengutamakan pola pergerakan karir yang diatur dalam Kebijakan Jalur Karir. Dalam melaksanakan pergerakan karir, PLN Indonesia Power mempertimbangkan beberapa faktor meliputi kebutuhan organisasi, kemampuan, keahlian dan kompetensi pegawai, rencana pengembangan karir, dan program pelatihan serta rencana suksesi jabatan.

Transfer of position emphasizes on career progress pattern as set out in Career Path Policy. PLN Indonesia Power takes into account several factors in implementing career progress, such as organization needs, employee capacity, skill, and competence, career development plan, training program, and succession plan.



Tabel Pengembangan Karir Tahun 2023 (orang)
Career Development in 2023 (employee)

Keterangan Description	Jumlah Pegawai Number of Employees	Rotasi Rotation	Promosi Promotion
Jenis Kelamin Gender			
Pria Male	4.905	1.022	483
Wanita Female	547	109	58
Jumlah Total	**5.452**	**1.131**	**541**
Jenjang Jabatan Position Level			
Eksekutif Utama Top Management	9	-	-
Eksekutif Senior Senior Specialist	99	31	-
Eksekutif Executive	310	68	10
Penyelia Atas Senior Supervisor	1.082	173	22
Penyelia Dasar Junior Supervisor	2.552	498	84
Pelaksana Implementing Officer	1.400	361	425
Jumlah Total	**5.452**	**1.131**	**541**

Pendidikan dan Pelatihan Karir
Career Education and Training

Dalam rangkaian perencanaan suksesi pegawai yang memiliki kesempatan untuk pengembangan karir, diberikan diklat penjenjangan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Diklat penjenjangan merupakan salah satu bentuk diklat kepemimpinan yang diselenggarakan Perusahaan sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi dan pembinaan karir pegawai untuk memenuhi Kompetensi Utama, Kompetensi Peran dan Kompetensi Bidang yang dipersyaratkan pada setiap jenjang jabatan sesuai tuntutan jalur karir yang diproyeksikan bagi pegawai. Adapun bentuk program diklat penjenjangan adalah sebagai berikut:

1. *Executive Education* (EE) yaitu Pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan Struktural.
2. *Strategic Specialist Education* (SSE), yaitu Pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan Fungsional.

In the series of employee succession planning who have the opportunity for career development, the Company provides education and training for job grading for the intended position. This takes form as a leadership training held by the Company for employee competency and career development. This program aims at meeting the Main Competency, Role Competency, and Area Competency required for each position level according to the career expected for the relevant employees. Below are the education and training for job grading program types:

1. Executive Education (EE) aiming at meeting Main, Role, and Area Competencies required for Structural Position Level.
2. Strategic Specialist Education (SSE) aiming at meeting Main, Role, and Area Competencies required for Functional Position Level.

Realisasi diklat penjenjangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The realization of the job grading in 2023 is as follows:

Tabel Diklat Penjenjangan Tahun 2023
Education and Training for Job Grading in 2023

Jenis Diklat Penjenjangan Type of Education and Training for Job Grading	Usulan Disetujui Proposal Approved	Jumlah Peserta Diundang Number of Participants Invited	Realisasi Peserta Hadir Actual Attending Participants	*On-Progress*	Lulus di Tahun 2023 Graduated in 2023
Executive Education I	2	2	2	2	-
Executive Education II	3	2	2	2	-
Executive Education III	10	4	4	4	-
Supervisory Education I	28	2	2	2	2
Strategic Specialist Education I	-	-	-	-	-
Strategic Specialist Education II	-	-	-	-	-
Strategic Specialist Education III	7	-	-	-	-
Specialist Education I	30	-	-	-	-

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai
Employee Performance Management System

PLN Indonesia Power melakukan penilaian atas pencapaian yang telah diberikan terhadap para pegawainya untuk mengevaluasi produktivitas kinerja mereka. Sebagai dasar pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien, Perusahaan telah menetapkan Sistem Manajemen Kinerja dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP).

PLN Indonesia Power conducts assessment of employee achievement to evaluate their work performance. The Company has determined Performance Management System using Employee Performance Management System (SIMKP) as the basis for measurement of employee performance achievement in attaining Company objectives effectively and efficiently.

Penilaian Kinerja Pegawai
Employee Performance Assessment

Aturan mengenai Penilaian Kinerja Pegawai ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 145.K/010/IP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Tahapan dalam Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The regulation concerning Employee Performance Assessment is provided in the Decree of the Board of Directors No. 145.K/010/IP/2018 dated September 17, 2018 concerning Employee Performance Management System. The stages in the Employee Performance Management System are shown in the table below:

Tabel Metode Pengukuran dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai
Employment Performance Assessment Stages

Metode Pengukuran Measurement Method	Jenis Asessmen Types of Assessment	Level Proyeksi Projection Level
Perencanaan Kinerja Pegawai Employee Performance Planning	Tahap penyusunan Sasaran Kinerja pegawai yang dilakukan 1 (satu) kali pada awal tahun untuk Semester 1 dan Semester 2 yang terdiri atas: - Rencana sasaran kinerja pegawai, - Rencana Program Pengembangan Diri Pegawai.	In this stage, Employee Performance Objectives was formulated once (1 time) at the beginning of the year for Semester 1 and Semester 2, which consisted of: - Employee Performance Objective plan - Employee Self-Improvement Program plan
Pemantauan Kinerja Pegawai Employee Performance Monitoring	Tahap Pemantauan merupakan periode antara Tahap Perencanaan dan Tahap Evaluasi yang digunakan atasan langsung pegawai untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi, pemantauan *progress*/pencapaian atas kinerja pegawai.	The Monitoring Stage is a period between the Planning Stage and Evaluation Stage, in which employees' direct superior provided directive, guidance, motivation, and progress/achievement monitoring.
Evaluasi Kinerja Pegawai Employee Performance Evaluation	Tahap Evaluasi yaitu tahap dimana atasan langsung wajib memberikan pengukuran secara objektif terhadap pencapaian target sasaran kinerja pegawai dan program pengembangan diri pegawai di bawah struktur jabatan atasan tersebut pada akhir semester berjalan.	The Evaluation Stage is the stage when the direct superior must carry out objective measurement of employee performance objective target achievement and deliver self-improvement program for employees whose position are directly below the superior for the current semester.

Tabel Kompetensi yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Pegawai
Competency Assessed in Employee Performance Assessment

Jenis Kompetensi Stage	Deskripsi Description
Sasaran kinerja pegawai Employee Performance Objective	Diukur berdasarkan pencapaian Target KPI *Exact*, KPI *Proxy* dan KPI *Activity*. Measured based on the achievement of Exact KPI, Proxy KPI, and Activity KPI targets.
Kompetensi Individu Pegawai Kompetensi Individu Pegawai	Diukur melalui kuesioner kompetensi individu yang dinilai oleh atasan langsung dari pegawai. Measured based on individual competency questionnaire, as assessed by direct Supervisor of the relevant employees.
Program Pengembangan Diri Pegawai (PDP) Employee Self-Improvement Program (SIP)	Diukur melalui kuesioner kompetensi individu yang dinilai oleh atasan langsung dari pegawai. Program PDP terdiri dari *Knowledge Management* dan Inovasi. Measured based on individual competency questionnaire, as assessed by direct Supervisor of the relevant employees. Self-Improvement Program consists of Knowledge Management and Innovation.

Hasil penilaian menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian *reward* dan pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi, peningkatan remunerasi dan sebagainya, juga menjadi dasar pemberian *punishment* seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan hubungan kerja.

Assessment result will become a consideration for the granting of reward and employee career development, such as promotion, rotation, remuneration increase, and so on, in addition to the basis for punishment, such as warning, postponement of grade promotion, demotion, transfer of position, and termination of employment.



Pengukuran *Maturity* Kinerja
Measurement of Performance Maturity

Kinerja SDM diukur berdasarkan KPI aspek *Learning & Growth* telah ditetapkan melalui pencapaian nilai *Human Capital Readiness (*HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR). Formulasi yang digunakan untuk mengukur HCR dan OCR menggunakan skala Level 1-5 yang didapatkan dari hasil *assessment*, yaitu *assessment* PT PLN (Persero) terhadap Korporat dan *assessment* oleh Pembina *Head Office* kepada Unit setiap semester.

Skor HCR dan OCR tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya tantangan bisnis, maka target-target indikasi *maturity* Perusahaan harus semakin menunjukkan naik ke level yang lebih tinggi, sebagaimana juga Aspirasi Pemegang Saham, maka pencapaian skor HCR dan OCR diupayakan terus naik dengan mengidentifikasi ruang yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik di setiap aspeknya.

HC Performance measurement based on the Learning & Growth aspects in the KPI has been determined through achievement of the Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) scores. The measurement formula for HCR and OCR uses 1-5 scale as obtained from assessment result, i.e. Self-assessment by PT PLN (Persero) to the Company and assessment by the Head Office to each unit on a semester basis.

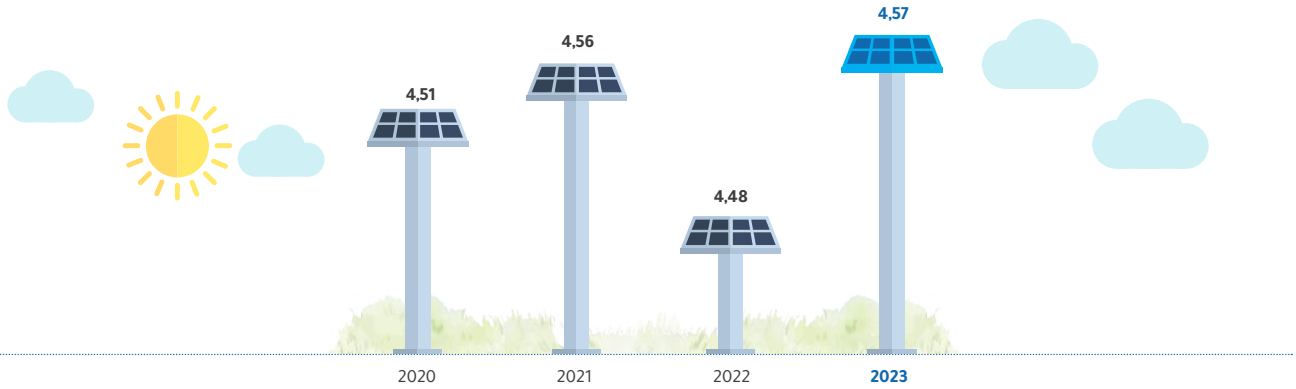
Because business challenges in 2023 led to generally higher HCR and OCR scores, the Company's maturity targets should reflect this upward trend. This aligns with Shareholder Expectations. Therefore, we should strive for continuously increasing HCS and OCR scores by pinpointing areas for improvement and achieving excellence in all aspects.

Human Capital Readiness
Human Capital Readiness

HCR adalah pengukuran kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM, yaitu dengan peningkatan kompetensi SDM yang optimal agar dapat mendukung implementasi strategi Perusahaan. Pencapaian HCR meningkat 2,01% dibandingkan tahun 2022 menjadi level 4,57 di tahun 2023.

HCR is a measurement of HC capacity and capability readiness, i.e. with the optimal improvement of HC competence in order to support the implementation of the Company strategy. HRC achievement increased 2.01% in 2022 to 4.57 in 2023.

Grafik HCR Tahun 2020 - 2023 (level)
Chart of HCR in 2020-2023 (level)



Organizational Capital Readiness
Organizational Capital Readiness

OCR merupakan kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan faktor yang mendorong perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung agenda perubahan organisasi melalui implementasi strategi perusahaan. Aspek yang diukur adalah : *Culture, Alignment, Leadership* dan *Business Ecosystem.* Capaian sasaran OCR dilakukan melalui:

OCR measures an organization's readiness to integrate and align factors that drive continuous improvement and learning to support the organization's change agenda through implementation of the Company strategies. The measured aspects are: Culture, Alignment, Leadership, and Business Ecosystem. OCR goals are achieved through:



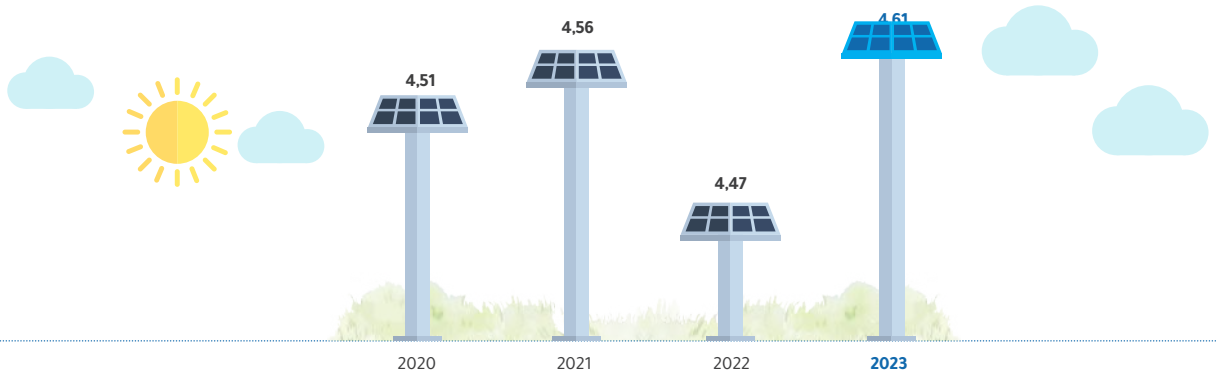
Tabel Aspek Pengukuran Kesiapan Organisasi
Organizational Readiness Measurement Aspects

Aspek Aspect	*Maturity*
Culture	4,65
Alignment	4,62
Leadership	4,57
Business Ecosystem	4,60

Pencapaian OCR meningkat 3,13% dibandingkan tahun 2022 menjadi level 4,61 di tahun 2023.

OCR achievement increased 3.13% from 2022, to 4.61 in 2023.

Grafik OCR Tahun 2020 - 2023 (level)
Grafik OCR Tahun 2020 - 2023 (level)



Sistem Penghargaan Pegawai
Employee Reward System

Employee Engagement Survey
Employee Engagement Survey

PLN Indonesia Power rutin melaksanakan *Employee Engagement Survey*. Di tahun 2023, selain mengukur kepuasan dan keterikatan pegawai, Perusahaan juga mengukur *enablement* pegawai sebagai bagian dari *Employee Effectiveness Index*.

PLN Indonesia Power regularly conducts Employee Engagement Survey. In 2023, in addition to measuring employee satisfaction and engagement, the Company also measured employee enablement as part of the Employee Effectiveness Index.

Pelaksanaan survei (EES) pada tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 14 September 2023, *response rate* pengisian 98%, dengan metode survei *online* melalui aplikasi limesurvey: survey.plnindonesiapower.co.id.

The EES survey in 2023 was implemented on September 4-14, 2023 using online survey through internal limesurvey application: survey.indonesiapower.co.id.

Aspek Penilaian Survei
Survey Assessment Aspect

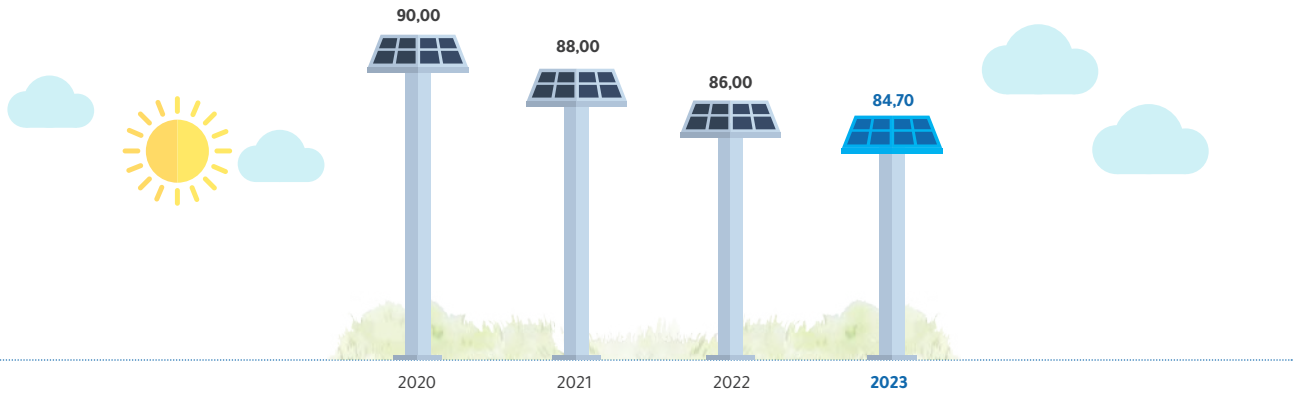
Dimensi *Engagement* Engagement Dimension	Dimensi *Enablement* Enablement Dimension
a. *Clear and promising direction,* b. *Confidence in leaders,* c. *Quality and client focus,* d. *Respect and recognition,* e. *Development opportunities,* f. *Pay and Benefits,*	a. *Performance management,* b. *Authority and empowerment,* c. *Resources,* d. *Training,* e. *Collaboration,* f. *Work, structure and process.*

Skor EES
EES Score

Merujuk pada Pedoman HCR & OCR PLN *Group*, maka untuk pengukuran EEI PLN Indonesia Power tahun 2023 menggunakan metode EES PLN. Nilai EES tahun 2023 adalah sebesar 84,70%. Pencapaian pada tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang disebabkan oleh proses transformasi Perusahaan yang masih berlangsung.

Referring to PLN Group's HCR & OCR Guidelines, PLN Indonesia Power's EEI measurement in 2023 used PLN's EES method. EES score in 2023 was 84.70%. The current year's achievement is lower than that of 2022 due to the Company's ongoing transformation process.

Grafik EES Tahun 2020 - 2023 (%)
Chart of EES in 2020-2023 (%)



Evaluasi dan Tindak Lanjut EES
EES Evaluation and Follow-Up

Dari hasil EES yang telah dilakukan, PLN Indonesia Power menindaklanjuti hasil survei dengan program sebagai berikut:
1. Pemetaan indikator dari 3 Dimensi EES terendah,
2. *Focus Group Discussion* (FGD) konfirmatori hasil survei EES,
3. Penyusunan Program kerja/*action plan* untuk peningkatan *engagement* pegawai dan penurunan *toxic culture*.

From the results of EES that have been done, PLN Indonesia Power followed up the survey results with the following programs:
1. Indicator mapping of the lowest 3 EES Dimensions,
2. Focus Group Discussion (FGD) to confirm EES survey results,
3. Preparation of a work program/action plan to increase employee engagement and decrease toxic culture.

Strategi Remunerasi
Remuneration Strategy

Strategi remunerasi diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 229.K/010/IP/2022 tentang Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai yang disusun berdasarkan PKB tahun 2023-2024 Bab VI tentang Penghargaan Pasal 55 Dasar Penghargaan.

The remuneration strategy is set out in the Board of Directors Decree No. 229.K/010/IP/2022 on Employee Reward Management System which is prepared based on the CLA 2023-2024 Chapter VI on Rewards, Article 55 on Basis for Rewards.

Dalam surat keputusan tersebut remunerasi terbagi atas Penghargaan Ekstrinsik dan Penghargaan Intrinsik:

In the Decree, remuneration is categorized into Extrinsic and Intrinsic Rewards:

A. Penghargaan Ekstrinsik
Diberikan dalam bentuk kompensasi tetap, kompensasi tidak tetap dan manfaat (*benefit*). Kompensasi tetap diberikan digunakan sebagai dasar pembayaran kompensasi tidak tetap selain *Pay for Position*. Kompensasi tidak tetap diberikan atas tanggung jawab jabatan yang diemban, lokasi kerja atau penugasan dan kinerja yang terbagi atas kompensasi jangka pendek dan kompensasi jangka Panjang. Manfaat (*benefit*) diberikan dalam bentuk uang, natura (material maupun layanan) yang memberikan nilai kepada Pegawai atas imbal jasa yang diberikan, dalam bentuk manfaat umum dan manfaat khusus.

A. Extrinsic Rewards
Provided as fixed compensation, non-fixed compensation, and benefits. Fixed compensation is provided as the basis for the payment of non-fixed compensation other than Pay for Position. Non-fixed compensation is provided for the responsibilities of the position held, work location, or assignment and performance. This compensation consists of short-term and long-term compensation. Benefits are provided as money, in-kind (materials or services) that give value to the Employees as compensation for services provided, in the form of general and special benefits.



B. Penghargaan intrinsik

Diberikan dalam bentuk non material, meliputi:

1) program pembelajaran dan sertifikasi kompetensi/profesi;
2) program keseimbangan hidup;
3) bantuan hukum;
4) pengakuan; dan
5) hak istimewa (*privilege*) sebagai bentuk kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat pegawai bangga.

B. Intrinsic Rewards

Provided as non-material rewards, including:

1) learning program and competence/professional certification;
2) life balance program;
3) legal aid;
4) acknowledgment; and
5) privilege as an opportunity to perform something that makes the employee proud.

Hubungan Industrial
Industrial Relations

Sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD) Pasal 28 E UUD 1945 ayat (3) dan Undang-undang (UU) Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 pasal 1 dan Pasal 102, PT PLN Indonesia Power memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berpendapat dan berserikat dengan membentuk Persatuan Pegawai PLN Indonesia Power (PP-IP) sebagai sarana bagi pegawai untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya yang telah terdaftar dan tercatat di Kemenakertrans RI.

As mandated by Article 28 E paragraph (3) of the 1945 Constitution and Law No. 13 of 2003 on Manpower (specifically Articles 1 and 102), PLN Indonesia Power recognizes its employees' right to discuss and associate. This right is realized through the establishment of Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP). PP-IP serves as a platform for employees to organize themselves and voice their aspirations. The association has been officially registered and documented with Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia.

Salah satu sarana hubungan industrial di PLN Indonesia Power untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yaitu melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah perjanjian tertulis yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha dengan Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB yang berlaku untuk tahun 2023 adalah PKB periode 2022-2023 beserta amandemennya yang merupakan pemutakhiran dari PKB periode sebelumnya.

One of the means of industrial relations in PLN Indonesia Power to realize harmonious, dynamic and equitable industrial relations is through the preparation of Collective Labor Agreement (CLA). CLA is a written agreement which comes about through negotiations between two parties: the Employer (PT PLN Indonesia Power) and Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP IP). Once finalized, the CLA is registered with the relevant labor agency. This agreement outlines employment requirements, rights and obligations of both parties.

Sepanjang tahun 2023 terdapat kegiatan dengan Persatuan Pegawai yaitu sebagai berikut:

1. Pertemuan Periodik Manajemen dan PP-IP setiap semester;
2. Pertemuan Manajemen dan PP-IP;
3. Pertemuan Manajemen dan PP IP (LKS Bipartit Tingkat Pusat),
4. Pertemuan Manajemen dan PP-IP (pembahasan *draft* kebijakan);
5. Audiensi Direksi bersama PP-IP tanggal 14 Februari 2023;
6. Pertemuan Audiensi dan Diskusi DIRMHC IP-NP bersama PP-IP & SP PJB;
7. *Sharing Session* Manajemen dan PP-IP;
8. LKS Bipartit Tingkat Pusat;
9. Silaturahmi Pengurus Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2023-2026 kepada Jajaran Direksi PT PLN Indonesia Power;
10. Penandatanganan PKB PT PLN Indonesia Power Tahun 2024-2025;
11. Perundingan Bipartit;
12. LKS Bipartit Tingkat Unit yang diselenggarakan masing-masing Unit di PT PLN Indonesia Power.

In 2023, the Company adheres to CLA 2022-2023 and its amendment which is the updated version of the previous CLA. The followings were activities with PP IP throughout 2023:

1. Four (4) Periodic and Semiannual Meetings between Management and and PP IP,
2. Four (4) Management and PP IP Meetings,
3. Management and PP IP Meetings (Central Level Bipartite Cooperation Institution),
4. Four (4) Management and PP IP Meetings (policy draft discussion),
5. Audience between Board of Directors and PP IP on February 14, 2023,
6. Audience and Discussion on DIRMHC IP-NP with PP IP & SP PJB,
7. Sharing Session between the Management and PP IP,
8. Central Bipartite Cooperation Institution,
9. Head Office PP IP 2023-2026 Managers Visit to the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power,
10. Signing of PT PLN Indonesia Power CLA 2024-2025,
11. Bipartite Negotiations,
12. Bipartite Cooperation Institution in Unit level is held by each Unit at PT PLN Indonesia Power every month.



Teknologi Informasi
Information Technology



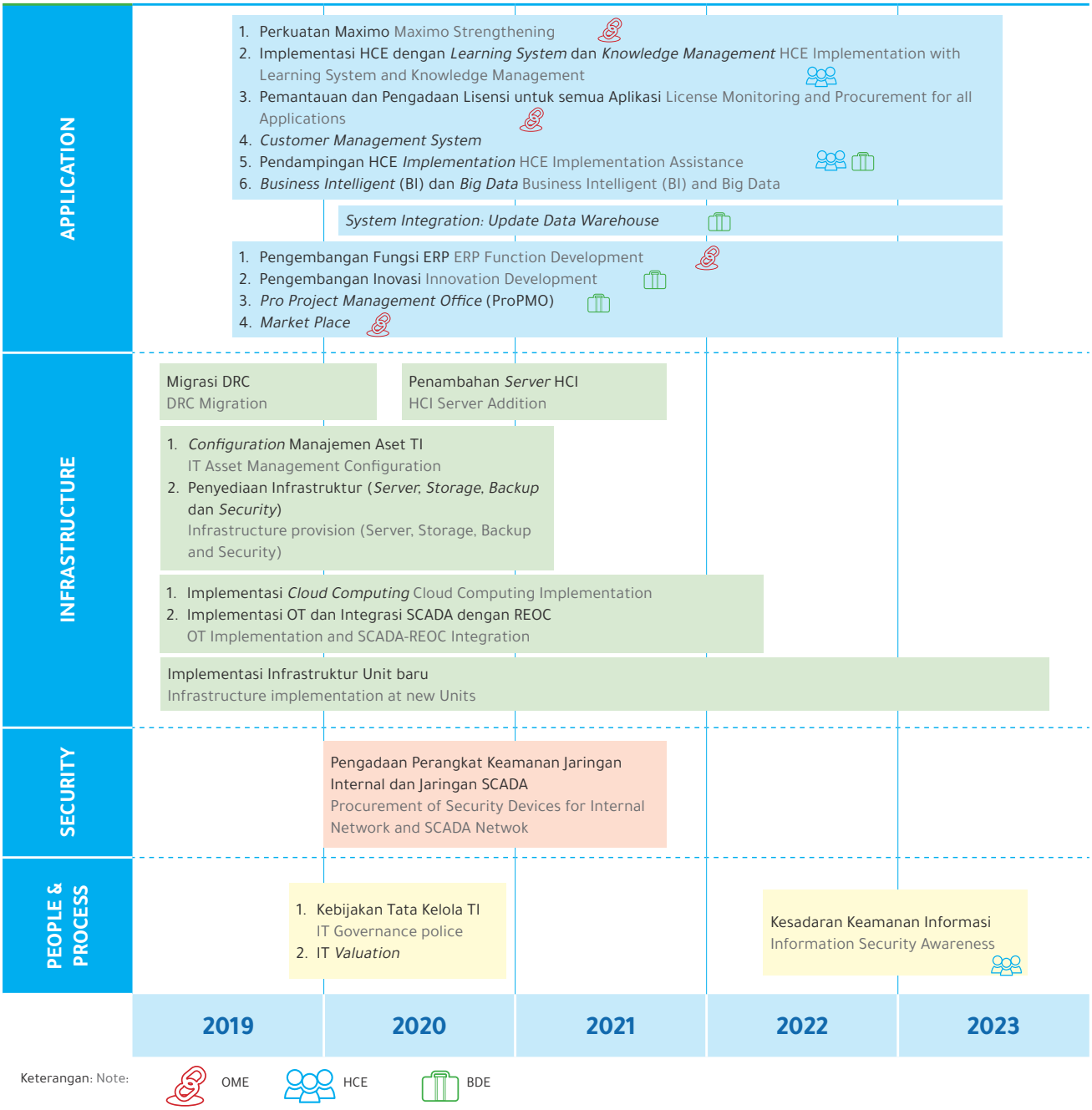
Dukungan Teknologi Informasi (TI) yang andal dapat mendukung optimasi kegiatan bisnis yang efektif dan efisien. TI PLN Indonesia Power memiliki perangkat kebijakan dan prosedur sistem informasi berupa Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan (PROGEN), *Information Technology Master Plan* (ITMP), Kebijakan Keamanan Informasi dan Kebijakan Penggunaan Hak Akses Jaringan, Email, Internet dan Aplikasi Perusahaan di lingkungan PLN Indonesia Power. Selain itu, inisiatif perbaikan senantiasa dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dan sebagai langkah preventif dalam menghadapi risiko reputasi dan operasional terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan internal Perusahaan yang berhubungan dengan IT *Governance*.

Robust and reliable Information Technology (IT) support serves as the backbone for streamlining and optimizing business activities. The IT division at PLN Indonesia Power has a set of information system policies and procedures in the form of Company Information Technology Governance (PROGEN), Information Technology Master Plan (ITMP), Information Security Policy, and Company Network, E-mail, Internet, and Application Access Privilege Policy within PLN Indonesia Power. The Company's internal IT Governance policies are constantly being improved through various initiatives. These efforts are crucial not only to maintaining the high quality of our services but also to preventing potential risks that could damage our reputation or operations.

Information Technology Master Plan
Information Technology Master Plan

PLN Indonesia Power menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam menjalankan program Teknologi Informasi. ITMP PT PLN Indonesia Power sesuai Keputusan Direksi No. 194.K/010/IP/2019 tentang *Information Technology Master Plan* tahun 2019 - 2023 tanggal 3 Oktober 2019. Saat ini sedang dilakukan proses *review* ITMP sesuai dengan RJPP 2024-2028 dan *alignment* dengan PT PLN (Persero) serta mendukung terlaksananya Transformasi 2.0. ITMP 2024-2028 bertujuan untuk memberikan panduan dan arah strategis kepada Perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya mencapai tujuan bisnis.

PLN Indonesia Power developed Information Technology Master Plan (ITMP) to guide the implementation of Information Technology programs. IT Master plan of PT PLN Indonesia Power is in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 194.K/010/IP/2019 regarding Information Technology Master Plan 2019-2023 dated October 03, 2019. Currently, we are in the process of revising the IT Master Plan. This revision is being done to ensure it aligns with the goals of the Company Long-Term Plan (RJPP) 2024-2028 and supports PT PLN (Persero)'s Transformation 2.0 initiative. ITMP 2024-2028 aims to be a compass for businesses that guides the Company in leveraging information technology strategically, thus achieving our specific business goals.



Di dalam ITMP juga mencakup inisiatif TI yang bisa mengarahkan tipe inisiatif apa saja yang bisa dilaksanakan oleh PLN Indonesia Power. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh kegiatan pengembangan TI di Perusahaan searah dan selaras dengan Visi, Misi dan Strategi Perusahaan serta tren TI di dunia. Inisiatif Teknologi Informasi tersebut yaitu:

1. Pemantauan Perangkat Pembangkit,
2. Rekomendasi Pengelolaan keamanan jaringan SCADA,
3. Pengamanan Infrastruktur dengan HSM (*Hardware Security Module*),
4. Data dan Aplikasi,
5. Digital Transformasi,
6. Tata Kelola Keamanan Informasi,
7. *Security Awareness* Perusahaan,
8. Tata Kelola TI,
9. Proses *Service Delivery* dan *Service Support*,
10. IT *Valuation*.

The ITMP also includes information technology initiatives that will direct which initiatives can be executed by PLN Indonesia Power. With this document, it is expected that all IT development activities across the organization are in accordance and aligned with the Company's Vision, Mission, and Strategy as well as global IT trend. The Information Technology initiatives are:

1. Monitoring of Power Plant Devices;
2. Recommendation of SCADA network security management;
3. Infrastructure safeguarding using HSM (Hardware Security Module);
4. Data and Application;
5. Digital Transformation;
6. Information Security Governance;
7. Corporate Security Awareness;
8. IT Governance;
9. Service Delivery and Service Support Processes;
10. IT Valuation.

Organisasi Teknologi Informasi
Information Technology Organization

Pengelola TI PLN Indonesia Power adalah Bidang Information Technology and Digital (BID ITD). Di mana lingkup pengelolaan TI untuk saat ini mencakup pengelolaan TI di lingkungan PLN Indonesia Power.

The IT area in PLN Indonesia Power is managed by the Information Technology and Digital Department. Currently, the IT management focuses on IT landscape within PLN Indonesia Power.

Pengembangan Kompetensi SDM bagian TI
IT Human Capital Competency Development

PLN Indonesia Power menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM di bidang TI untuk meningkatkan kompetensi TI yang selanjutnya dapat meningkatkan keandalan TI Perusahaan. Berikut adalah sertifikat SDM bagian TI di tahun 2023:

IT human capital trainings and development activities were carried out by PLN Indonesia Power to improve IT competency, which will in turn improve the Company's IT reliability. Below is the IT HC certificates in 2023:

Tabel Sertifikasi SDM bidang TI
IT HC Certificates

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Jabatan Title	Jumlah Pegawai Number of Employees
1.	Sertifikasi BNSP Pengelolaan Keamanan Informasi BNSP Certification of Information Security Management	Junior Officer, Officer, Senior Officer dan and Assistant Manager	9
2.	*Certified* ISO 27001:2022 *Foundation* ISMS	Officer, Senior Officer dan and Assistant Manager	12
3.	*Certified Digital Innovation and Collaboration*	Junior Officer dan and Senior Officer	3
4.	Sertifikasi BNSP Skema Pengelolaan Keamanan Informasi BNSP Certification of Information Security Management Scheme	Junior Officer, Officer, Senior Officer, Specialist dan and Vice President	11
5.	Sertifikasi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi BNSP BNSP Certification of Information Technology Services Management	Junior Officer, Officer dan and Assistant Manager	10
6.	*Certified* COBIT 2019	Senior Officer dan and Manager	4
7.	*Certified Information Systems Auditor* (CISA)	Officer dan and Senior Officer	7
8.	*Certified ITIL 4 Foundation*	Junior Officer, Officer dan and Assistant Manager	8

Program Teknologi Informasi
Information Technology Programs

Pemeliharaan rutin maupun pengembangan/investasi yang dilakukan di tahun 2023 antara lain:

The regular maintenance and development/investment activities carried out in 2023 include:

Program Pengembangan Aplikasi
Application Development Program

***Maintenance & Annual Technical Support* Aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP)**
Maintenance and Annual Technical Support for Enterprise Resource Planning (ERP) Application

Melakukan Pekerjaan untuk Pemeliharaan Aplikasi ERP dan Pembayaran *Annual Technical Support*. Aplikasi ERP yang digunakan di PLN Indonesia Power adalah ERP *Oracle E-Business Suite Modul Financial, Human Capital* dan *Supply Chain Management*. Aplikasi ERP modul *Financial* digunakan untuk transaksi keuangan dan pembuatan Laporan keuangan, modul *Human Capital* digunakan untuk mencatat data kepegawaian, pelaksanaan diklat dan melakukan transaksi penggajian, modul *Supply Chain Management* untuk melakukan transaksi pengadaan dan *inventory*.

Conducting ERP application maintenance and annual technical support payment. The ERP application used in PLN Indonesia Power is ERP Oracle E-Business Suite of Financial, Human Capital, and Supply Chain Management modules. The Financial module of ERP is used for financial transactions and preparation of financial reports; Human Capital module is used to record employment data, training and education implementation, and payroll transactions; while Supply Chain Management module is used for procurement and inventory transactions.

Maintenance Aplikasi *Enterprise Asset Management (EAM)*
Maintenance of Enterprise Asset Management (EAM) Application

Melakukan Pekerjaan untuk Pemeliharaan Aplikasi *Enterprise Asset Management* (EAM), menggunakan *tools software* Maximo. Aplikasi ini digunakan melakukan optimasi performa setiap aset sehingga dapat memberikan informasi terkait aset tersebut secara transparan untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Modul-modulnya terdiri dari *Work and Planning Control Management*, *Reliability Management*, Efisiensi Manajemen dan *Outage Management*.

Conducting Enterprise Asset Management (EAM) application maintenance using Maximo software tools. The application is used to optimize the performance of individual assets in order to provide transparent information on these assets for decision making. The modules include Work and Planning Control Management, Reliability Management, Management Efficiency, and Outage Management.

Maintenance Aplikasi *Office Automation*
Maintenance of Office Automation Application

Melakukan Pekerjaan untuk Pemeliharaan Aplikasi pendukung untuk *Office Automation*. Aplikasi ini seperti *Website*, Aplikasi *Risk Management*, Aplikasi *Innovation*, Aplikasi Pendukung *Good Corporate Governance* di Perusahaan, Aplikasi *Corporate Minutes of Meeting* dll.

Conducting maintenance of supporting applications for Office Automation. These include Website, Risk Management, Innovation, Good Corporate Governance, Corporate Minutes of Meeting support applications, and others.

Maintenance Aplikasi *Tailor Made*
Maintenance of Tailor-made Applications

Melakukan pekerjaan pemeliharaan untuk Aplikasi yang dikembangkan mandiri oleh personil TI Perusahaan. agar ketersediaan aplikasi tetap terjaga.

Conducting maintenance for applications developed independently by the Company's IT personnel in order to maintain application availability.

Maintenance Aplikasi *ECM (Enterprise Commerse Management)* ProNIA
Maintenance of ProNIA Enterprise Commerce Management (ECM) Application

Melakukan pekerjaan pemeliharaan Aplikasi untuk Produksi dan Niaga PLN Indonesia Power.

Conducting maintenance for PLN Indonesia Power's coal management application.

Maintenance Aplikasi *Project Management Office* (ProPMO)
Maintenance of Project Management Office (ProPMO) Application

Melakukan pekerjaan pemeliharaan aplikasi untuk *monitoring milestone project* dalam bentuk *dashboard* dan aktivitas detil sesuai proses bisnis pengembangan usaha pembangkit, mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pra-konstruksi, konstruksi, sampai penyelesaian.

Conducting application maintenance for monitoring project milestones through both dashboards and detailed breakdowns of activities, all aligned with the power generation business development process from initiation through planning, pre-construction, construction, and completion.

***Maintenance Big Data dan Business Inteligent* (BI)**
Maintenance of Big Data and Business Intelligence (BI)

Melakukan pekerjaan pemeliharaan *Big Data & Business Inteligent* (BI) di PLN Indonesia Power.
Conducting Big Data & Business Intelligence (BI) maintenance at PLN Indonesia Power.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur

Infrastructure Development and Management Programs

1. ***Service Support* dan EA *Product Microsoft***
   Kegiatan *maintenance support* dan *subscription* Microsoft *product*.

2. ***Maintenance* Infrastruktur**
   Melakukan pemeliharaan dan *renewal support* perangkat Infrastruktur seperti pemeliharaan *Server*, *Storage*, Perangkat *backup*, *Virtual machine*, dll agar semua peralatan infrastruktur TI terjamin keandalannya.

3. ***Maintenance Local Area Network* (LAN)/ *Wide Area Network* (WAN) dan *Bandwidth Management***
   Melakukan Pemeliharaan dan *renewal support* perangkat jaringan LAN/WAN dan *Bandwidth Management* untuk keandalan TI Perusahaan.

4. **Sewa *Location Data Center***
   Melakukan sewa lokasi *Data Center* PLN Indonesia Power ke PLN Icon Plus dikarenakan lokasi tersebut sudah memenuhi standar *tier* 3 sehingga menjamin ketersediaan dan keandalan Sistem TI Perusahaan.

5. **Pekerjaan *Helpdesk* dan *Desktop Support***
   Melakuan kegiatan *Helpdesk* Aplikasi dan *Helpdesk Desktop*, hal ini dilakukan agar operasional dan ketersediaan layanan TI tetap terjamin.

6. ***Maintenance & Support Enterprise Infrastructure Management* dan *Helpdesk System***
   Melakukan kegiatan pemeliharaan dan *renewal support* sistem *Data Center Infrastructure Management* (DCIM) termasuk *web helpdesk*, *Log Management* untuk menjaga ketersediaan dan keandalan TI Perusahaan.

7. **Sewa Jaringan WAN, internet dan VCON**
   Sewa jaringan Data, internet dan VCON untuk komunikasi data dan suara korporat Perusahaan.

8. **Sewa *Backup* Akses Internet**
   Sewa *backup* akses internet untuk ketersediaan jalur komunikasi data.

1. **Service Support and Microsoft Product EA**
   Conducting maintenance support and subscription to Microsoft products.

2. **Maintenance of Infrastructure**
   Conducting maintenance and renewal support for infrastructure devices, which include Servers, Storage, Backup devices, Virtual machines, etc. to ensure all IT devices are in a reliable condition.

3. **Maintenance of Local Area Network (LAN)/Wide Area Network (WAN) and Bandwidth Management**
   Conducting maintenance and renewal support for LAN/WAN network devices and Bandwidth Management for the Company's IT reliability.

4. **Location Data Center Lease**
   PLN Indonesia Power leases Data Center location to PLN Indonesia Comnets Plus (icon+), considering that the facility meets the Tier 3 standard which ensures the highest level of availability and reliability for Icon+'s IT systems.

5. **Help Desk and Desktop Support Works**
   Conducting Application Help Desk and Desktop Help Desk to ensure the operation and availability of IT services.

6. **Maintenance of and Support for Enterprise Infrastructure Management and Help Desk System**
   Conducting maintenance and renewal of Data Center Infrastructure Management (DCIM) system support, including web help desk and Log Management, to ensure the Company's IT availability and reliability.

7. **WAN Network, Internet, and VCON Lease**
   Data network, Internet, and VCON lease for the Company's corporate data and voice communication.

8. **Backup Internet Access Lease**
   Backup Internet Access Lease for keeping data communication line available.

Program Pengelolaan *Security*

Security Management Programs

1. **Pemeliharaan dan *License* Perangkat *Security* Jaringan**
   Kegiatan pemeliharaan dan pembayaran *support* perangkat *security* dan jaringan. Pemeliharaan ini dilakukan untuk menjamin keamanan sistem TI Perusahaan.

2. **Pemeliharaan *Disaster Recovery Center (*DRC)**
   Melakukan jasa sewa *Disaster Recovery Center*.

3. **Asesmen Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)**
   Tingkat Maturitas Penanganan Insiden untuk PLN Indonesia Power sudah dilakukan verifikasi oleh tim BSSN.

1. **Network Security Device Maintenance and Licensing**
   Maintenance and payment of security and network device support. The maintenance is performed to ensure the security of the Company's IT system.

2. **Maintenance of Disaster Recovery Center (DRC)**
   Providing Disaster Recovery Center leasing services.

3. **Incident Handling Maturity Level (TMPI) Assessment**
   The maturity level of incident handling for PLN Indonesia Power has been verified by the BSSN team.

Penyusunan IT *Master Plan* (ITMP)

Preparation of IT Master Plan (ITMP)

Melakukan tahap strategis dengan menginisiasi penyusunan *Information Technology Master Plan* (ITMP) untuk rentang waktu 2024-2028. ITMP 2024-2028 bertujuan untuk memberikan panduan dan arah strategis kepada Perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya mencapai tujuan bisnis.

The first step of the strategic phase involves the development of Information Technology Master Plan (ITMP) that guides us throughout 2024-2028. ITMP 2024-2028 aims to be a compass for businesses that guides the Company in leveraging information technology strategically, thus achieving our specific business goals.

Melakukan Sosialisasi

Conducting Dissemination

Secara rutin dan berkelanjutan Bidang Information Technology and Digital (BID ITD) PLN Indonesia Power melakukan sosialisasi Aplikasi Korporat maupun *software/tools* yang digunakan di Perusahaan kepada seluruh pegawai PLN Indonesia Power, baik Kantor Pusat maupun Unit Pembangkit. Hal ini dilakukan dalam upaya Bidang ITD meyakinkan pemanfaatan dan keandalan sistem TI untuk mendukung kebutuhan Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi terkait TI sebanyak 51 kali.

The Information Technology and Digital (ITD) Department at PLN Indonesia Power consistently and sustainably promotes Corporate Applications and software/tools used across PLN Indonesia Power to all employees, both at the Head Office and Generation Units. This was carried out to help the ITD Department ensures the utilization and reliability of IT system that support the Company's needs. In 2023, the Company has performed 51 disseminations of IT-related information.

Penyusunan Kebijakan IT

Preparation of IT Policy

1. Melakukan penyusunan SK Tim CSIRT atau tim ahli keamanan informasi yang bertanggung jawab untuk menanggapi insiden keamanan komputer dan melaksanakan tindakan pemulihan.
2. Melakukan *review* SK No. 136.K/010/IP/2017 tentang Kebijakan Keamanan Informasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
3. Melakukan penyusunan Instruksi Kerja terkait ketentuan dan standarisasi spesifikasi laptop dan PC.
4. Melakukan penyusunan Instruksi Kerja terkait penghapusan *server* IT.
5. Melakukan penyusunan Instruksi Kerja terkait *update service* katalog.
6. Melakukan penyusunan Instruksi Kerja terkait *backup* dan *restore*.

1. Preparing Decree(s) for CSIRT team or information security specialists responsible for responding to computer security incidents and carrying out recovery actions.
2. Reviewing Decree(s) on Information Security Policy in light of the ever-changing technological landscape.
3. Preparing Work Instructions related to the provisions and standardization of laptop and PC specifications.
4. Preparing Work Instructions related to IT server decommissioning.
5. Preparing Work Instructions related to service catalog updates.
6. Preparing Work Instructions related to backup and restore.

Penguatan Keamanan Dunia Maya (*Cyber Security*)
Enhancement of Cybersecurity

Dengan semakin tingginya ancaman Keamanan Teknologi Informasi/ *cyber security* yang dihadapi seperti *virus/malware, hacker, spyware*, PLN Indonesia Power melakukan kegiatan pemeliharaan dan sosialisasi keamanan *IT Security* antara lain: membangun pemahaman dan *awareness* pegawai dalam mengelola risiko terkait pengamanan siber yang berdampak pada sistem, aset, data dan bisnis Perusahaan, mengimplementasikan sistem perlindungan keamanan siber (perangkat *security*) untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis Perusahaan.

As a measure to defend against rising cybersecurity threats like viruses, malware, hacks, and spyware, PLN Indonesia Power carries out the following IT security maintenance and dissemination: Building employee awareness and understanding in managing cybersecurity risks that may affect the Company's system, assets, data, and business; and implementing cybersecurity system to ensure the continuity of the Company's business process.

PLN Indonesia Power juga telah mengimplementasikan ISO 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang mendukung prinsip *Confidentiality, Integrity* dan *Availability* dalam usaha untuk mengevaluasi, mengimplementasikan dan memelihara keamanan informasi yang dimiliki berdasarkan "*best practice*". Dalam mendukung *framework* di atas diperlukan elemen/ komponen yang saling berkaitan satu sama lain terdiri dari *People* (SDM), *Process* dan *Technology* agar dapat terhindar dan dapat melakukan pencegahan terhadap ancaman-ancaman keamanan Informasi.

PLN Indonesia Power has also adopted ISO 27001, Information Security Management Systems, that promotes the principles of Confidentiality, Integrity, and Availability in evaluating, implementing, and maintaining information security based on industry's best practices. To effectively support the framework, interconnected elements are needed, i.e. People (HC), Process, and Technology, in order to avoid and prevent threats to information security.

Dari sisi kelengkapan kebijakan terkait pengamanan informasi, PLN Indonesia Power mengacu pada SK No. 136.K/010/IP/2017 tentang Kebijakan Keamanan Informasi yang secara berkala dilakukan *review* dan penyesuaian dengan kebutuhan.

In preparing policies on information security, PLN Indonesia Power refers to Decree No. 136.K/010/IP/2017 that is periodically reviewed and adjusted to the Company's needs.

Risiko Utama dan *Disruption* serta Mitigasinya
Major Risks, Disruptions, and their Mitigation

Di dalam pengelolaan TI, PLN Indonesia Power mengidentifikasi adanya risiko-risiko didalamnya. Identifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa segala risiko yang berpotensi dapat mempengaruhi kegiatan dan pencapaian kinerja TI telah diketahui dan disiapkan mitigasinya.

PLN Indonesia Power performs identification of risks within its IT management. This measure is crucial to make sure that any potential risks against the IT activities and performance can be identified and mitigated.

Risiko yang diidentifikasi tersebut dikelompokkan menjadi kelompok risiko antara lain seperti keamanan sistem informasi, infrastruktur TI, *obsolete* TI.

The identified risks are then divided into categories, among others information security, infrastructure, and obsolescence.

Kegiatan atau program kerja yang telah dilakukan seperti rutin melakukan sosialisasi untuk *awareness* kepada seluruh pegawai terkait keamanan informasi (*cyber security*), penyediaan perangkat keamanan informasi dan anti virus serta memastikan bahwa semua perangkat kerja pegawai sudah di-*install* anti virus dan rutin dilakukan *update*-nya. Melakukan peremajaan/*upgrade* terhadap perangkat TI, rutin melakukan *security testing* serta rutin dilakukan *training* dan *update knowledge* kepada personal/pegawai pengelola TI dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam bidang TI.

The regular activities or work programs include carrying out routine dissemination for promoting employee awareness regarding information security (cybersecurity), providing information security and anti-virus devices, and ensuring that all employees' work devices have anti-virus installed and are regularly updated. The Company also regularly upgrade IT devices, conduct security testing, and provide ongoing training to both employees and IT staff to enhance their cybersecurity knowledge and skills.

Perencanaan *Disaster Recovery Plan*
Disaster Recovery Plan Planning

Dalam meningkatkan layanan sistem TI, PLN Indonesia Power telah memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan lokasi *Disaster Recovery Centre* (DRC).

PLN Indonesia Power prioritizes the reliability of its IT systems through a Disaster Recovery Plan (DRP) and a dedicated Disaster Recovery Center (DRC).



DRP ini merupakan panduan pemulihan layanan TI PLN Indonesia Power dari suatu peristiwa yang menyebabkan terhentinya layanan TI di lingkungan PLN Indonesia Power, terutama layanan-layanan TI yang bersifat kritikal bagi kelangsungan kegiatan PLN Indonesia Power secara keseluruhan. Secara rutin telah dilakukan simulasi DRP dan rutin dilakukan pemeliharaan terhadap perangkat di lokasi DRC.

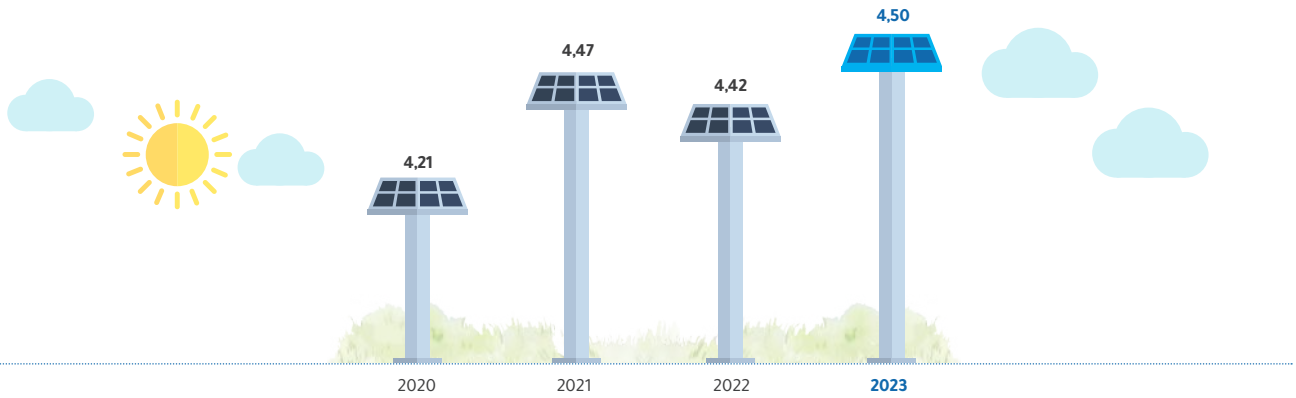
This DRP acts as a road map to restore critical IT services in the event of a shutdown, ensuring the continued smooth operation of PLN Indonesia Power's essential activities. To maintain readiness, the DRP undergoes regular simulations, and the DRC equipment receives periodical maintenance.

IT Maturity Assessment
IT Maturity Assessment

IT *Maturity Assessment* di PLN Indonesia Power menggunakan ukuran *Information Capital Readiness* (ICR) menggunakan COBIT 4.1. Nilai ICR pada tahun 2023 meningkat menjadi 4,50 Peningkatan ini terutama dikarenakan PLN Indonesia Power rutin melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk pengembangan kompetensi SDM TI dan rutin melakukan *update* penyusunan Kebijakan dan Instruksi Kerja untuk mendukung kegiatan-kegiatan rutin bidang TI.

PLN Indonesia Power relies on the Information Capital Readiness (ICR) metric based on COBIT 4.1 to assess its IT maturity. This metric saw a significant improvement in 2023, reaching a score of 4.50. This progress can be attributed to PLN Indonesia Power's commitment to regular training and certification programs that develop the IT competency of its manpower. Additionally, the Company routinely updates its policies and work instructions to ensure they effectively support everyday IT operations.

***Maturity Level* ICR Tahun 2020 - 2023 (skor)**
ICR Maturity Level in 2020-2023 (score)



Audit TI
IT Audit

Dalam rangka memastikan keandalan TI, pada tahun 2023 terdapat Audit TI dengan uraian sebagai berikut:

IT audit was conducted in 2023 to confirm the reliability of the Company's IT infrastructure:

Tabel Audit TI tahun 2023
IT Audit in 2023

No	Kegiatan Activity	Periode Term	Pelaksana Audit Auditor
1.	Audit SPI PLN Audit of PLN Internal Audit Unit	April 2021 s.d April 2023 April 2021-April 2023	Satuan Pengawas Internal PT PLN Persero Internal Audit Unit of PT PLN Persero
2.	Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Audit of Public Accountant Office (KAP)	Tahun 2023 2023	PwC
3.	Audit ISO 27001 Audit of ISO 27001	Tahun 2023 2023	PT Sucofindo

Implementasi ISO 27001

ISO 27001 Implementation

PLN Indonesia Power sebagai perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam perbaikan proses bisnis adalah terkait sistem manajemen keamanan Informasi. Setelah melalui proses implementasi dan persiapan sertifikasi, pada tanggal 18 Agustus 2017 untuk pertama kalinya PLN Indonesia Power berhasil mendapatkan sertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) 27001:2013 untuk *Information Security Management System* (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan lingkup BID ITD.

As a trusted power company, PLN Indonesia Power continually grows and makes improvement in terms of corporate governance. One of the main points of attention in business process improvement is information security management system. Through a process of certification implementation and preparation, on August 18, 2017, PLN Indonesia Power for the first time obtained the International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 for Information Security Management Systems (ISMS) in Information Technology and Digital area.

Pada tahun 2023 telah dilakukan re-sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi diperuntukkan bagi BID ITD, yang efektif berlaku sampai dengan 25 Oktober 2025.

In 2023, the Information Security Management Systems (ISMS) re-certification was sought for Information Technology (IT) and Digital area. The re-certification is effective until October 25, 2025.



IDSurvey

CERTIFICATE

Certificate No. ISMS 00008

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone : +62-21-7983666 ext. 1021; Fax : +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa
Certify that

PT PLN Indonesia Power
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Gedung PLN
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 - INDONESIA

telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang memenuhi
has implemented information security management system that comply with

SNI ISO/IEC 27001:2013
Information Security Management Systems-Requirements
Persyaratan-Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

Sistem Manajemen Keamanan Informasi Diperuntukan Bagi Bidang Information Technology and Digital.

Statement of Applicability (SoA) Ver 7 tanggal 01 September 2023.

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-008-IDN

Budi Utomo
Vice President

Sertifikat ini berlaku dari 29/02/2024 sampai 25/10/2025
This certificate is valid from 2024/02/29 until 2025/10/25
02-Rev.00
Sertifikat ini diberikan pertama kali pada 09/10/2020
This certificate has been granted for the first time on 2020/10/09

SCI-2023A

Pencapaian ISO 27001:2013 memberi arti besar bagi PLN Indonesia Power, karena standarisasi seperti ini selain mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, juga memperkuat proses bisnis dan perbaikan keberlanjutan (*continuous improvement*), serta meningkatkan pengamanan teknologi informasi. Dengan demikian, citra organisasi dan daya saing juga meningkat, sehingga membuka peluang untuk pengembangan organisasi di masa mendatang.

The success of obtaining ISO 27001:2013 is significant for PLN Indonesia Power as this standard allows for increased stakeholder trust, stronger business processes, continuous improvements, and improved information technology security. As such, the Company also gains better image and competitiveness, thus unlocking opportunities for future organizational development.

Melindungi informasi berarti menjaga kerahasiaan, yaitu memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Juga menjaga integritas, memastikan bahwa informasi tetap akurat dan lengkap, serta informasi tersebut tidak dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas. Dan terakhir, memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.

Protecting information means protecting confidentiality, i.e. making sure that information can be accessed only by authorized parties. This also means protecting integrity, making sure that information stays accurate and complete and not modified without express authorization. Lastly, this also means making sure that information is accessible to authorized parties when required.

Penghargaan di Bidang TI
IT-related Awards

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power berhasil meraih beberapa penghargaan di bidang TI sebagai berikut:

PLN Indonesia Power earned the following IT-related accolades in 2023:

Digitech Award 2023

Dalam ajang *Digitech Award* 2023 yang diselenggarakan *Digitech Award* tahun 2023 *Level Gold 5 stars:*

a. *The Best IT Leadership,*
b. *The Best Transformation and Digital Innovation,*
c. *The Best ICT Business Strategy in Energy Industries,*
d. *The Best CEO for Corporate Digital Transformation of the Year* untuk Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra.

At the Digitech Award 2023, the Company received Gold 5-star recognitions in the categories of:

a. The Best IT Leadership,
b. The Best Transformation and Digital Innovation,
c. The Best ICT Business Strategy in Energy Industries,
d. The best CEO for Corporate Digital Transformation of the Year for PLN Indonesia Power President Director, Edwin Nugraha Putra.





Indonesia *Digital Ecosystem Summit* (IDES) 2023

PLN Indonesia Power raih predikat "*Excellent*" dalam ajang Indonesia *Digital Ecosystem Summit* (IDES) 2023 yang diselenggarakan oleh SWA kolaborasi dengan Miota dan Mastel.

PLN Indonesia Power was awarded the title of "Excellent" at the Indonesia Digital Ecosystem Summit (IDES) 2023, an event held by SWA in collaboration with MIOTA and Mastel.





Asian Technology Excellence Awards 2023

Di perhelatan *Asian Technology Excellence Awards* tahun 2023 PLN Indonesia Power mendapat 2 (dua) penghargaan:

1. *Winner* Kategori Indonesia *Technology Excellence Awards for Analytics - Energy* untuk *Project* PT PLN Indonesia Power's *Index Monitoring* Priok PGU.
2. *Winner* Kategori Indonesia *Augmented Reality and Virtual Reality - Energy* untuk VIRPOP (*Virtual Power Plant*) Kamojang POMU.

At the Asian Technology Excellence Awards 2023, PLN Indonesia Power received two (2) awards:

1. Winner of the Indonesia Technology Excellence Awards for Analytics - Energy for PT PLN Indonesia Power's Index Monitoring Priok PGU Project.
2. Winner of the Indonesia Augmented Reality and Virtual Reality - Energy for Kamojang POMU VIRPOP (Virtual Power Plant).





Sistem Manajemen Terintegrasi PLN Indonesia Power (PLN IP-IMS)

PLN Indonesia Power Integrated Management System



PLN Indonesia Power - Integrated Management System (PLN IP-IMS) yang merupakan integrasi dari berbagai standar sistem manajemen, yang berlaku secara internasional. PLN IP-IMS ini telah ditetapkan sejak tahun 2012 dan diterapkan tahun 2013, dengan mengalami pengembangan ruang lingkup dan jenis sistem manajemen hingga sekarang.

PLN IP-IMS yang telah diterapkan di 32 unit kerja (UBP Suralaya, UBP Priok, UBP Saguling, UBP Kamojang, UBP Semarang, UBP Mrica, UBP Grati, UBP Bali, UBP Banten 1 Suralaya, UBP Banten 2 Labuan, UBP Banten 3 Lontar, UBP Jabar 2 Palabuhan Ratu, UBP Jateng 2 Adipala, UBP Cilegon, Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH), UBP Keramasan, UBP Bengkulu, UBP Jambi, UBP Bukittinggi, UBP Teluk Sirih, UBP Ombilin, UBP Kepulauan Riau, UBP Mahakam, UBP Barito, UBP Asam-asam, UBP Singkawang, UBP Tello, UBP Pangkalan Susu, UBP Barru, UBP Labuhan Angin, UBP Jeranjang dan Kantor Pusat. Khusus ISO 27001, ruang lingkup untuk Bidang Information Technology and Digital Kantor Pusat, sedangkan ruang lingkup ISO 22301 adalah untuk UBP Priok dan Kantor Pusat. Selain itu, PLN Indonesia Power juga telah mendapatkan Statement of Conformity ISO 30414:2018 tentang Human Capital Reporting Kantor Pusat.

Adapun Sistem Manajemen yang diintegrasikan dalam kerangka PLN IP-IMS terdiri dari:

1. ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu;
2. ISO 14001:2015 - Sistem Manajemen Lingkungan;
3. ISO 45001:2018 - Sistem Manajemen K3;
4. ISO 28000:2007 - Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok;
5. ISO 55001:2014 - Sistem Manajemen Aset;
6. ISO 50001:2018 - Sistem Manajemen Energi;
7. ISO 27001:2013 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
8. ISO 26000 - *Guideline on Social Responsibility*,
9. ISO 31000:2018 - *Risk Management-Principles and Guidelines*,
10. Kriteria *Baldrige*,
11. ISO 22301:2019 - Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis;
12. Sistem Manajemen K3 (SMK3) berbasis Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012;
13. ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
14. ISO 30414:2018 - *Human Capital Reporting*

PLN Indonesia Power dan seluruh unit bisnis senantiasa menyempurnakan proses bisnis secara terus-menerus berdasarkan standar terbaik. Pada tahun 2024 direncanakan untuk melaksanakan perluasan lingkup ISO 37001:2016 ke unit-unit yang dipilih, perluasan sertifikasi ISO 9001:2015 ke unit yang dalam penerapan operasional sehari-hari serta sertifikasi SMK3 ke seluruh unit dan sub-unit yang masuk dalam kriteria wajib penyiapan PP No. 50 tahun 2012.

Secara lebih rinci, perjalanan implementasi PLN IP-IMS dapat digambarkan sebagai berikut:

PLN Indonesia Power - Integrated Management System (PLN IP-IMS) is an integration of different globally-applicable management system standards. PLN IP-IMS was stipulated in 2012 and has been implemented since 2013. Its scope and types of management system have also been developed overtime.

PLN IP-IMS has been applied in 32 work units (UBP Suralaya, UBP Priok, UBP Saguling, UBP Kamojang, UBP Semarang, UBP Mrica, UBP Grati, UBP Bali, UBP Banten 1 Suralaya, UBP Banten 2 Labuan, UBP Banten 3 Lontar, UBP Jabar 2 Palabuhan Ratu, UBP Jateng 2 Adipala, UBP Cilegon, Maintenance Unit (UBH), UBP Keramasan, UBP Bengkulu, UBP Jambi, UBP Bukittinggi, UBP Teluk Sirih, UBP Ombilin, UBP Kepulauan Riau, UBP Mahakam, UBP Barito, UBP Asam-asam, UBP Singkawang, UBP Tello, UBP Pangkalan Susu, UBP Barru, UBP Labuhan Angin, UBP Jeranjang, and the Head Office). The ISO 27001 was implemented at the Information Technology and Digital Division of the Head Office, while the ISO 22301 was implemented at UBP Priok and the Head Office.

Below are the Management Systems integrated into PLN IP-IMS framework:

1. ISO 9001:2015 - Quality Management Systems;
2. ISO 14001:2015 - Environmental Management Systems;
3. ISO 45001:2018 - OHS Management Systems;
4. ISO 28000:2007 - Supply Chain Security Management Systems;
5. ISO 55001:2014 - Asset Management Systems;
6. ISO 50001:2018 - Energy Management Systems;
7. ISO 27001:2013 - Information Security Management Systems;
8. ISO 26000 - Guidelines on Social responsibility;
9. ISO 31000:2018 - Risk Management - Principles and Guidelines;
10. The Baldrige criteria;
11. ISO 22301:2019 - Business Continuity Management Systems;
12. Sistem Manajemen K3 (SMK3) or Indonesian OHS Management System based on Government Regulation No. 50 of 2012;
13. ISO 37001:2016 - Anti-Bribery Management System (ABMS).
14. ISO 30414:2018 - Human Capital Reporting

PLN Indonesia Power and the entire business units continuously improve the business processes in accordance with the best standards. For 2024, the plan includes extending ISO 37001:2016 compliance to specific units, broadening ISO 9001:2015 certification to encompass units involved in daily operations, and achieving SMK3 certification for all units and sub-units as mandated by Government Regulation No. 50 of 2012.

Below is more detailed description of PLN IP-IMS implementation process:



	Horizon 1: "*Set up* Pondasi Sistem Manajemen" Horizon 1: "Setting up Management System Foundation"	Horizon 2: "Penyelarasan Standar Sistem Manajemen" Horizon 2: "Alignment of Management System Standards"	Horizon 3: "Internalisasi keseluruhan sistem ke dalam seluruh elemen organisasi" Horizon 3: "Internalization of all systems into all organizational elements"	Horizon 4 : "Digitalisasi sistem manajemen dan proses bisnis" Horizon 4 : "Digitalization of management system and business processes"	Horizon 5 : "Ratifikasi proses bisnis *holding* berbasis APQC" Horizon 5 : "Ratification of APQC-based holding business processes"
	2013	**2013-2015**	**2015-2018**	**2018-2022**	**2022-2024**
Fokus Pengembangan **Development Focus**	• Menyiapkan Pedoman Kebijakan dan *Manual* PLN IP-IMS • Mengimplementasikan *Standard* Sistem Manajemen; (sesuai lingkup IMS) • Melakukan audit internal PLN IP-IMS • Melakukan Audit Sertifikasi PLN IP-IMS dengan Badan Sertifikasi • Preparing PLN IP-IMS Policy Guidelines and Manual • Implementing Management System Standards; (based on IMS scope) • Conducting PLN IP-IMS internal audit • Conducting PLN IP-IMS Certification Audits with Certification Bodies	• Tahapan Penyelarasan sistem Manajemen eksisting dengan kebutuhan pengembangan Sistem Manajemen baru sesuai dengan kebutuhan organisasi • Menyelaraskan pedoman, *Manual*, Proses Bisnis In Power dengan strategi dan kebijakan Perusahaan • Membangun dokumen *fully integrated* • Membangun sistem *support* IT untuk mengendalikan, monitor dan mengevaluasi implementasi IMS • Mendorong peran Sistem Manajemen dalam meraih WCS • Membangun budaya dalam implementasi Sistem Manajemen • Persiapan implementasi di UBOH/ UJP • Alignment Phases of the existing Management system for developing new Management System in accordance with the organization's requirements • Aligning In Power guidelines, Manuals, Business Processes with the Company strategies and policies • Preparing fully integrated documents • Developing IT support system to control, monitor, and evaluate IMS implementation • Supporting Management Systems' role in achieving WCS • Developing a culture in the Management System implementation • Preparing implementation in O&M Business Unit/OMU	• Mengintegrasikan Sistem *Support* Sistem Manajemen dengan *Dashboard Management* lainnya • Melanjutkan perbaikan Sistem Manajemen secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perusahaan • Membangun budaya dalam implementasi Sistem Manajemen • Implementasi seluruh UJP • Penambahan standar baru (ISO 26000, ISO 55001) • Kajian ISO 50001 dan ISO 45000 • Kajian Implementasi ISO 27001 • Kajian Implementasi ISO 22301 • *Update* sistem standar baru • Integrating Support System for Management System with other Dashboard Management • Continuing constant improvement of the Management System for the betterment of company performance • Developing a culture in the Management System implementation • Implementation of all OMU • Addition of new standards (ISO 26000, ISO 55001) • ISO 50001 and ISO 45000 analysis. • ISO 27001 Implementation Analysis • ISO 22301 Implementation Analysis • Update of new standard system	• Digitalisasi sistem dan proses bisnis yang menunjang maturitas implementasi IP-IMS • Integrasi proses bisnis dengan elemen program, standar & regulasi, Aplikasi, Data, Risiko, KPI. • Digitalization of systems and business processes that support IP-IMS implementation maturity • Integration of business processes with program elements, standards & regulations, Applications, Data, Risk, KPI	• Mapping proses bisnis APQC • Migrasi proses bisnis eksisting ke proses bisnis APQC • *Unit Pilot Project* pemetaan RACI + *Consume* • Integrasi Proses Bisnis dengan risiko • Implementasi standar ISO 9001 ke seluruh unit kapasitas <100 MW luar Jawa. • Mapping of APQC business processes • Migration of existing business processes to APQC business processes • RACI + Consume mapping Pilot Unit • Integration of Business Processes with risk • Implementation of ISO 9001 standard to all capacity units <100 MW outside Java
Key Enabler	• Memperkuat tim Implementor IMS • Membangun sistem BODSL sebagai *Key Sponsor* • Kepatuhan terhadap persyaratan sistem manajemen • Keberhasilan pengelolaan dokumen dan rekaman mutu yang standar • Strengthening the IMS Implementer team • Developing a BODSL system as a Key Sponsor • Compliance with management system requirements • Successful management of standard quality documents and records	• *Update* Sistem dengan kebutuhan perusahaan dan tuntutan bisnis • Sistem monitor dan evaluasi • Standarisasi dokumentasi proses bisnis dan prosedur • Meningkatkan keahlian SDM dalam implementasi • Input KPI Kinerja IMS kedalam Pejabat Struktural • Konsolidasi agen perubahan untuk PLN IP-IMS dan membangun *sponsorship* • Updating System based on company requirements and business demands • Monitoring and evaluation systems • Standardization of business process and procedure documentation • Improving Human Capital's skills in the implementation • Inputting KPI for IMS Performance for Officials • Consolidating change agents for PLN IP-IMS and building sponsorship	• Sistem yang terintegrasi • Membangun *Key Sponsor* SMT di setiap bagian • Perbaikan proses bisnis, aplikasi, sistem kebijakan dan penyelarasan ke dalam IMS • Integrated system • Developing SMT Key Sponsor at each sections • Business process, application, policy system, and alignment into IMS	• Digitalisasi Proses Bisnis • Integrasi proses bisnis dengan key elemen standar BPMN. • Digitalization of business processes • Integration of business processes with BPMN standard key elements	• Ratifikasi proses bisnis Holding • Migrasi Proses Bisnis • Implementasi Sistem Manajemen unit kapasitas <100 MW luar Jawa. • Ratification of the holding business process • Migration of business processes • Implementation of Unit Management system for <100 MW capacity outside Java



Hirarki Dokumen PLN IP-IMS
Hierarchy of PLN IP-IMS Documents

Hirarki Dokumen PLN IP-IMS dirancang berdasarkan *framework* dari *American Productivity and Quality Center* (APQC), yaitu *Process Classification Framework* (PCF). PCF merupakan framework yang digunakan untuk mengklasifikasikan proses bisnis, dimana fokusnya adalah pada proses bisnis apa yang perlu dilakukan, bukan bagaimana melaksanakannya. PCF mengelompokkan proses bisnis ke dalam lima level, yaitu:

1. Proses Bisnis Level 1 (Kategori)
2. Proses Bisnis Level 2 (Kelompok Proses)
3. Proses Bisnis Level 3 (Proses)
4. Proses Bisnis Level 4 (Aktivitas)
5. Proses Bisnis Level 5 (Tugas)

Setiap level menjelaskan detail dari level yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi levelnya, semakin umum atau generik proses bisnis yang dijelaskan. APQC tidak mengharuskan setiap level dijelaskan melalui alur proses atau prosedur kerja tertulis, karena PCF bertujuan sebagai alat untuk mendefinisikan kebutuhan proses bisnis. Namun, di PLN Indonesia Power, mulai dari level 4 dan 5, proses bisnis dijelaskan melalui prosedur tertulis untuk memastikan bahwa organisasi dapat menjalankan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan operasional. Kebijakan ini diatur dalam Manual IMS, dan Hirarki Dokumen IMS berfokus pada level 4 dan 5 dari PCF APQC.

PLN Indonesia Power secara berkala mengkaji ulang isi dokumen PLN IP-IMS setahun sekali dalam rangka memastikan kesesuaian proses kerja aktual dengan dokumentasi PLN IP-IMS yang tersedia. Kaji ulang mencakup dokumen, audit sistem dan tinjauan manajemen dengan lingkup kebijakan, sasaran dan proses-proses di dalamnya untuk menjamin efektivitas dan konsistensi kebijakan dan rencana bisnis Perusahaan, dan merespon terhadap perubahan harapan pelanggan, perundang-undangan persyaratan lainnya, tata kelola Perusahaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk relevansi dan konsistensi terhadap perencanaan strategi Perusahaan.

The hierarchy of PLN IP-IMS Documents is designed according to the Process Classification Framework (PCF) of the American Productivity and Quality Center (APQC). PCF is used to classify business process, which focuses on which business to be performed, and how to perform it. PCF categorizes business process into five levels, namely:

1. Business Process Level 1 (Category)
2. Business Process Level 2 (Process Group)
3. Business Process Level 3 (Process)
4. Business Process Level 4 (Activity)
5. Business Process Level 5 (Task)

Every level explains the detail of the higher level. Therefore, the higher the level, the more generic the business process explained. APQC does not require the explanation of each level using written work procedures or process flow, as PCF aims to serve as a tool that defines business process requirements. Nevertheless, at PLN Indonesia Power, the business process levels 4-5 are explainable in writing so as to ensure that the Organization can run its business process according to the operational requirements. This policy is set out in the IMS Manual, whereas the IMS Document Hierarchy focuses on APQC PCF levels 4 and 5.

PLN Indonesia Power regularly checks PLN IP-IMS documents every year to make sure their actual work follows the guidelines set out in those documents. The re-assessment includes document re-assessment, system audit, and management review in terms of the policies, goals, and processes contained within, in order to ensure the effectiveness and consistency of Company policies and business plans as well as to respond to changes in customer expectation, other legislative requirements, corporate governance, and science and technology development for relevance and consistency with the Company's strategy planning.

Pengembangan dan Inovasi Teknologi Pembangkitan
Power Generation Technology Development and Innovation

Pengembangan dan inovasi pembangkitan menjadi hal yang penting mengingat bidang usaha yang dijalankan Perusahaan terutama memproduksi energi listrik. Keandalan pembangkit menjadi salah satu tujuan dalam operasional PLN Indonesia Power dalam penyediaan energi listrik. Bahkan di bidang jasa, Perusahaan juga mengoperasikan dan melakukan perawatan pembangkit.

It is crucial for the Company to constantly develop and innovate, especially since it is engaged in the power-producing business. Power plant reliability comes as one of PLN Indonesia Power's operational objectives in the provision of electricity. In service sector, the Company also operates and conducts power plant maintenance.

Program Riset/ Penelitian Teknologi Pembangkit
Research/Study Programs on Power Generation Technology

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power menyusun program riset/ penelitian teknologi pembangkit di beberapa unit pembangkit diantaranya:

In 2023, PLN Indonesia Power prepared power generation research/ study programs at several power generation units, among others:



Program Pengembangan Teknologi Energi Terbarukan
Renewable Energy Technology Development Program

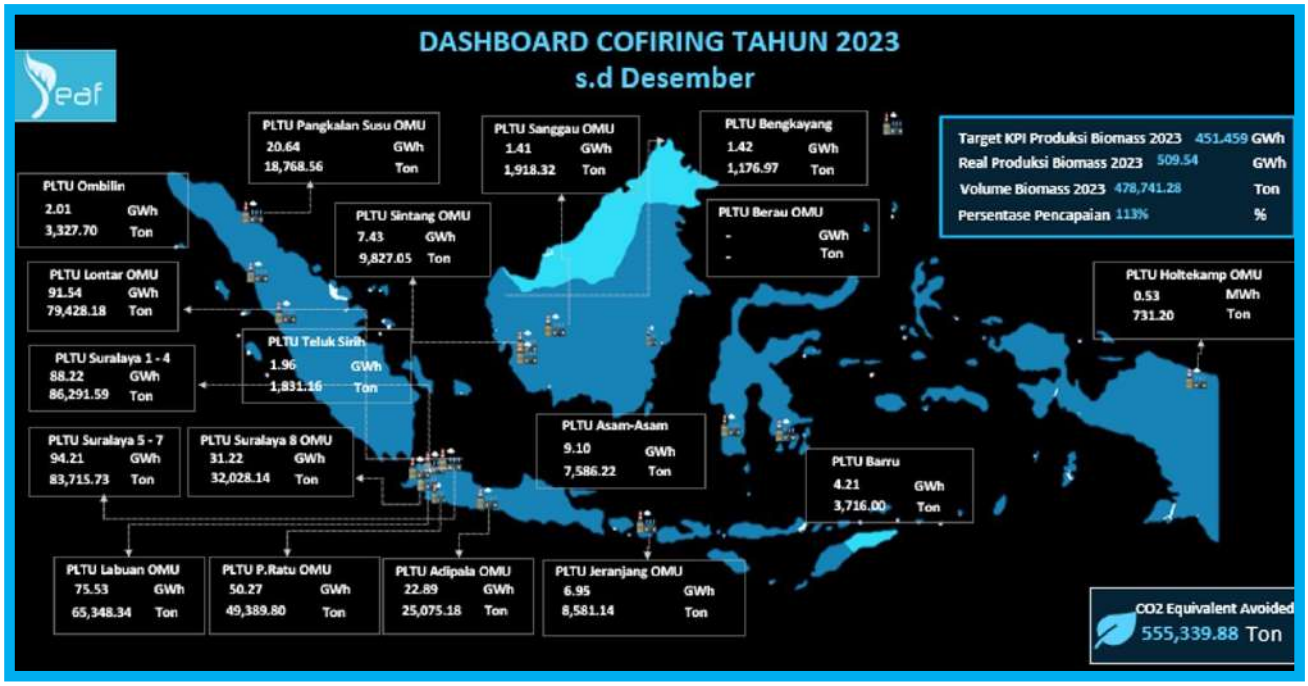
Co-firing PLTU
SPP Cofiring

Co-firing adalah kegiatan pembakaran bahan bakar yang terdiri atas campuran bahan bakar batubara dengan bahan bakar biomassa. Program *co-firing* ini sudah dilakukan hampir diseluruh PLTU yang dikelola oleh PLN Indonesia Power. Tujuan dilakukannya program *co-firing* biomassa ini adalah untuk meningkatkan realisasi energi baru dan terbarukan dan menurunkan emisi gas rumah kaca dengan penggunaan bahan bakar biomassa.

Instead of just using coal, co-firing mixes coal with biomass to create a blended fuel for burning. Almost all SPP run by PLN Indonesia Power are currently involved in this co-firing program. The biomass co-firing program is all about ramping up renewable energy use and cutting greenhouse gas emissions by utilizing biomass fuel.

Output dari program ini adalah pencapaian Kinerja *co-firing* yang terhitung sampai dengan bulan Desember 2023 di seluruh unit PLTU PLN Indonesia Power yaitu sebesar 509,54 GWh melebihi rencana produksi sampai dengan Desember 2023 sebesar 451,46 GWh (Pencapaian 113%). Volume Biomassa yang terserap sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar 478.741,28 Ton, dan setara dengan 555.339,88 Ton (CO_2 *Equivalent* Avoided).

PLN Indonesia Power achieved a co-firing performance of 509.54 GWh up to December 2023 across all steam power plants. This exceeded the production target of 451.46 GWh, or 113% of the target. By December 2023, a total of 478,741 tons of biomass was absorbed. This is equal to 555,340 tons of carbon dioxide (CO_2) avoided.



Firing 100 Biomassa
100 Biomass Firing

Peta jalan menuju *Net Zero Emissions* 2060, telah dirumuskan. Berbagai program akselerasi pengembangan energi terbarukan, telah dijalankan. Melalui PLN Indonesia Power, PLTU Sintang melakukan 100% *Firing* Biomassa secara kontinyu. *Firing* biomassa ini menjadi hal yang penting khususnya untuk mendukung kinerja unit dan mendukung transisi energi di PT PLN (Persero).

PLN Indonesia Power has mapped the plan towards Net Zero Emissions by 2060. To get there faster, the Company has started a number of programs for NRE development. Under PLN Indonesia Power, Sintang SPP has achieved continuous operation using 100% biomass firing. Biomass firing is crucial for PT PLN (Persero) to both promote unit performance and support energy transition in PT PLN (Persero).

Output dari program ini adalah PLTU Sintang melakukan program 100% *Firing Biomass* secara kontinyu dengan menggunakan bahan baku *woodchips* dan cangkang sawit dan berhasil beroperasi selama lebih dari 15 hari serta mampu menghasilkan daya penuh sebesar 2.626,21 MW.

Implementing the program, Sintang SPP has successfully operated for more than 15 consecutive days with 100% biomass firing, using wood chips and palm oil shells as the raw materials. The total full electricity produced during such operation was 2,626.21 MW.







Program Pengembangan Teknologi Lainnya
Other Technology Development Programs

Kajian *Plant Automation*
Plant Automation Study

Dengan adanya transformasi digital di PLN Indonesia Power yaitu REOC sebagai *data center*, *real time monitoring*, O&M *Engineering Tools*, dan *Integrated Management System*. Maka dengan itu dibutuhkan pengembangan digital lebih lanjut yaitu dengan teknologi P*lant Automation*.

Maksud dari kegiatan ini adalah mendapatkan kajian mengenai status siklus teknologi digital pada pembangkit dan tindakan apa saja yang disarankan dalam hal mengukur waktu keusangan, meningkatkan fungsi peralatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri *plant automation*, dan meningkatkan keandalan sehingga dapat menurunkan *downtime* pembangkit. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari Pengadaan Jasa Konsultan Kajian *Plant Automation* Pembangkit PLN Indonesia Power ini adalah mendapatkan kajian teknologi *Plant Automation* mutakhir untuk mengetahui peningkatan teknologi yang dapat diterapkan pada pembangkit PLN Indonesia Power dan untuk mendapatkan rancangan sistem *Plant Automation* pada aset PLTU di bawah PLN Indonesia Power.

Output dari program ini adalah kajian teknologi *Plant Automation* mutakhir, laporan penilaian kondisi pembangkit terkait keusangan dan keandalan, laporan rancangan arsitektur *Plant Automation*, laporan saran tahapan pengembangan teknologi *Plant Automation*.

PLN Indonesia Power is undergoing a digital transformation which includes using REOC as data center, real-time monitoring, O&M Engineering tools, and Integrated Management System. Therefore, further digital development is needed with Plant Automation technology.

This activity aims to study the status of the digital technology cycle in power plants and seek recommended actions for measuring obsolescence time, improving equipment quality to meet the needs of the plant automation industry, and increasing reliability hence reducing power plant downtime. In relation to that, the Procurement of Plant Automation Study Consultant Services for PLN Indonesia Power's Power Plants strives to study the latest Plant Automation technology and seek technological improvements that can be applied to PLN Indonesia Power's power plants while obtaining Plant Automation system design for SPP under PLN Indonesia Power.

The program results in a study of the latest Plant Automation technology, a report on power plant condition assessment for obsolescence and reliability, a report on Plant Automation architectural design, and a report on suggestions for the stages of Plant Automation technology development.

Kajian Kelayakan CCUS - Tahap 1
CCUS Feasibility Study - Stage 1

Dalam rangka menjaga aspek GCG dan pemenuhan emisi jangka panjang Negara Indonesia dengan *zero carbon* pada tahun 2060, PLN Indonesia Power berencana melakukan studi pemasangan *Carbon Capture Utilization and Storage* (CCUS). Studi Kelayakan CCUS bertujuan untuk mengetahui desain peralatan, metode penanganan, potensi pemanfaatan, lokasi penyimpanan dan potensi perdagangan karbon di lingkungan PLN Indonesia Power.

PLN Indonesia Power is looking into studying the possibility of installing Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). This comes as they prioritize both practicing good corporate governance (GCG) and ensuring Indonesia meets its long-term goal of reaching zero carbon emissions by 2060. The CCUS Feasibility Study aims to determine equipment design, handling methods, utilization potential, storage locations, and carbon trading potential within PLN Indonesia Power.



Maksud pekerjaan ini adalah untuk mengetahui kelayakan penerapan *carbon capture utilization & storage* (CCUS) di PLTU batubara milik PLN Indonesia Power. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan desain CCUS terbaik bagi pembangkit di PLN khususnya PLTU batubara dan kebutuhan keekonomian dari fasilitas tersebut. *Output* dari program ini adalah hasil tahap 1: Kajian Neraca Massa dan Energi (NME).

This project assesses the feasibility of carbon capture utilization and storage (CCUS) implementation in PLN Indonesia Power's SPP. It aims to obtain the best CCUS design for PLN's power plants, particularly coal-fired SPP, as well as to find out about the economic needs of the facility. The output of the program was results of stage 1: Mass and Energy Balance Study.

Inovasi Teknologi Pembangkitan

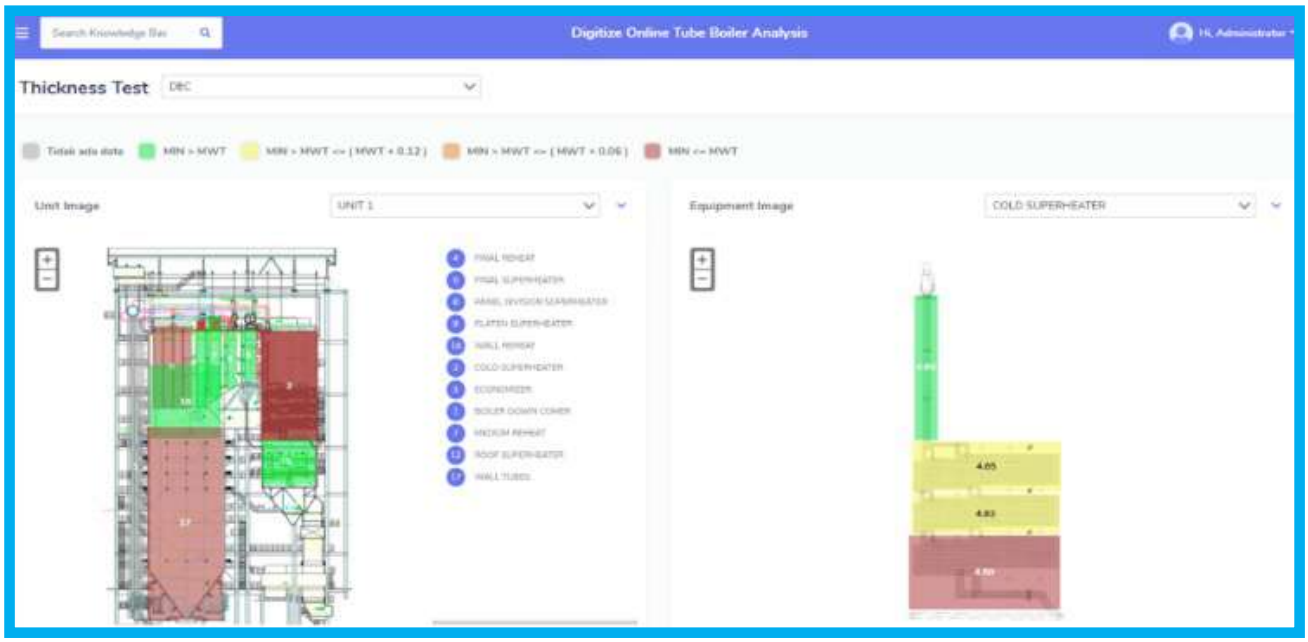
Power Generation Technology Innovation

Inovasi dalam kategori pembangkitan, *technical supporting*, dan *non-technical supporting* secara rutin dikembangkan PLN Indonesia Power untuk mengefisiensikan proses kerja guna pembangkit yang lebih andal. Beberapa inovasi unggulan di tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

PLN Indonesia Power constantly makes innovation in the fields of power generation, technical supporting, and non-technical supporting for more efficient work process and reliable power plants. The Company's top innovations in 2023 are listed as follows:

Digitalization Online Tube Boiler Analysis (DOTA)

Digitalization of Online Tube Boiler Analysis (DOTA)



Digitalization *Online Tube Boiler Analysis* (DOTA) dibuat untuk :

1. Mempermudah tim Boiler HRSG Management (BHM) dalam pemantauan pergerakan data setiap waktu.
2. Meminimalisir pengambilan data sama di titik yang sama setiap waktu.
3. Mampu memperlihatkan visualisasi data yang mudah untuk dipahami.
4. Dapat merencanakan *hidden point failure* yang belum pernah diukur sebelumnya.
5. Mempermudah dalam perencanaan material pada setiap *outage* dan *Remaining Life Assessment* (RLA) berikutnya.
6. Dapat menampilkan historical penggantian *tube* setiap *failure location equipment* tersebut.
7. Dapat menampilkan analisis terkait *Thickness Test, Replica Test* dan *Oxide Scale Test*.

Digitalization of Online Tube Boiler Analysis (DOTA) is designed for:

1. Helping the Boiler HRSG Management BHM) team in monitoring data movement all the times.
2. Minimizing repeated data collection at the same points every time.
3. Presenting easy-to-understand data visualization.
4. Planning unmeasured hidden point failure.
5. Simplifying material planning for each outage as well as the next Remaining Life Assessment (RLA).
6. Recording tube replacement history for each equipment location failure.
7. Presenting analysis results from Thickness Test, Replica Test, and Oxide Scale Test.

Setelah diimplementasikan di PLTU Banten 2 Labuan, inovasi DOTA bermanfaat untuk Perusahaan antara lain:

1. Efisiensi: dengan adanya DOTA, perbedaan waktu analisa rekomendasi data BHM sebelum dan sesudah implementasi inovasi DOTA sangat signifikan sehingga mampu mempercepat durasi overhaul selama 6 jam per metode.
2. Pendapatan: menurunnya potensi kebocoran *tube boiler* yang diakibatkan dari *failure mechanism* yang terukur oleh *thickness test*, *replica test*, *oxide scale test* serta kesalahan analisis dan rekomendasi data BHM yang mengharuskan unit *shutdown*. Sehingga hal ini berdampak terhadap keandalan *tube boiler* yang meningkat dengan ditunjukkan penurunan EFOR di tahun 2019 sebesar 14,29 menjadi rata-rata dari tahun 2020 sampai 2023 semester 1 sebesar 2,12.
3. Pelayanan Pelanggan: karena adanya efisiensi dari sisi waktu dan kualitas rekomendasi data yang baik, maka membuat perfoma *boiler* menjadi handal yang menunjukkan menurunnya potensi *boiler* bocor. Selain itu kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan keandalan sistem PLTU Labuan terutama peralatan *boiler* akan lebih baik seperti survei yang dilakukan dari PLN.

The adoption of DOTA in Banten 2 Labuan SPP has brought the following benefits for the Company:

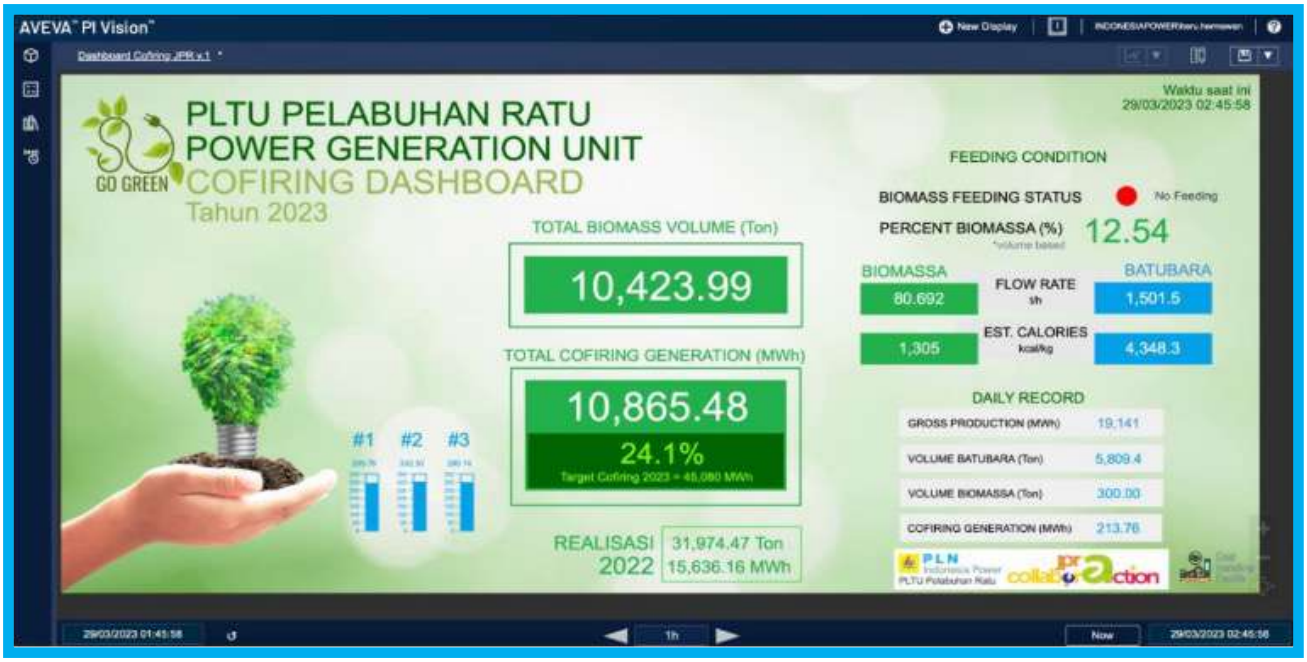
1. Efficiency: The time for BHM data recommendation analysis differs greatly before and after DOTA adoption. Using DOTA, the overhaul time is sped by 6 hours per method.

2. Revenue: Reduced potential tube boiler leakage due to mechanism failure as measured by thickness test, replica test, oxide scale test, as well as mis-analysis and BHM data recommendation that requires unit shutdown. All of these have helped improving tube boiler reliability as reflected by significant decline in EFOR, from 14.29 in 2019 to an average of 2.12 for 2020 to the first half of 2023.

3. Customer Service: Improved time efficiency and better data recommendation quality have enhanced boiler's reliability, as proven by declining potential of boiler leakage. In addition, customer satisfaction regarding the trust in Labuan SPP's system, particularly the boiler reliability, will improve as demonstrated by PLN's survey.

Akselerasi Produksi *Green Energy* dengan Metode Baru Pencampuran Batubara-Biomassa dalam Upaya Mendukung *Energy Transition*

Accelerating Green Energy Production by Novel Coal-Biomass Co-Firing to Support Energy Transition



Inovasi ini berupa perubahan metode *blending* biomassa dengan batubara di PLTU Palabuhan Ratu, di mana metode sebelumnya dilakukan *blending* di *coal yard* dengan menggunakan alat berat menjadi pengambilan (*reclaim*) biomassa langsung menggunakan peralatan *Stacker-Reclaimer* (STRE) untuk dilakukan *blending* di pertemuan *belt conveyor*, yaitu *Retractable Head Pulley* (RHP). Inovasi yang dilakukan meliputi perubahan proses operasi dan instruksi kerja. Dampak kemanfaatan dari inovasi ini adalah terjaganya kualitas *blending* antara batubara dengan biomassa sehingga meminimalisir terjadinya *blocking* pada peralatan di unit pembangkit terutama Mill. Selain itu, dalam jangka panjang, inovasi ini berdampak pada peningkatan penyerapan biomassa dan produksi MWh *Green Co-firing* dalam mendukung program pemerintah dan PT PLN (Persero) terkait Energi Baru Terbarukan (EBT).

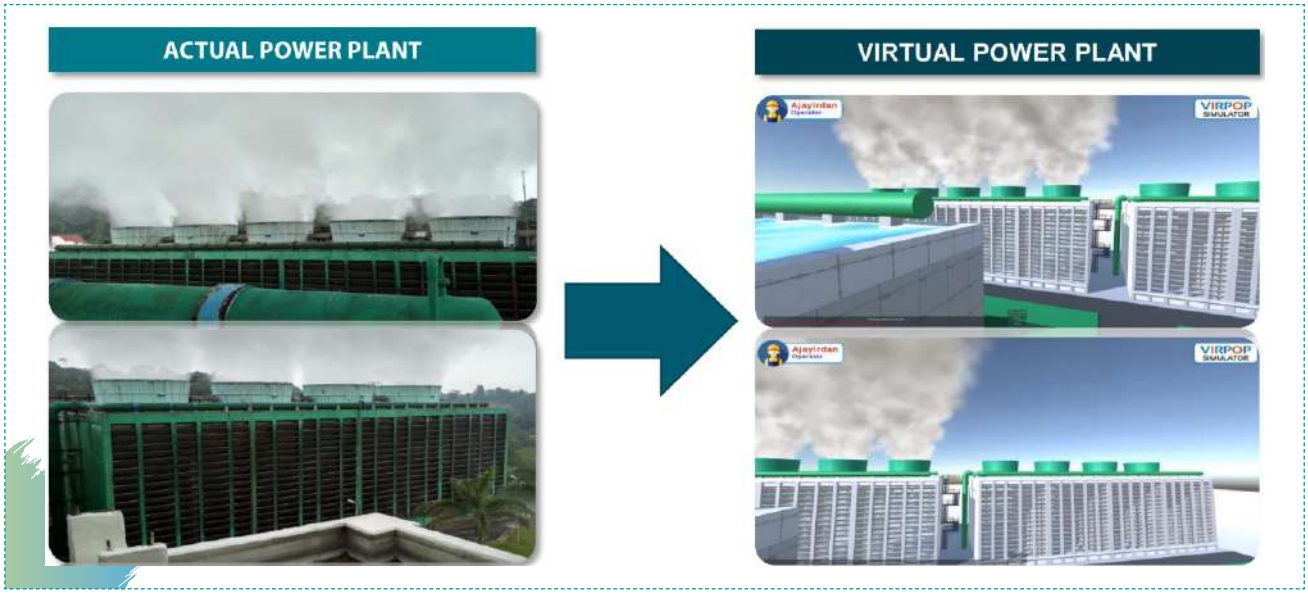
This innovation has brought a change with the biomass-coal blending method at Palabuhan Ratu SPP. Previously, the blending was carried out in the coal yard using heavy equipment to reclaiming biomass directly using Stacker-Reclaimer (STRE) for blending at the conveyor belt meeting point, i.e. Retractable Head Pulley (RHP). The innovation includes changes in operating processes and work instructions. It helps maintaining a good mix of coal and biomass that minimize blockage of power plant equipment, especially mills. In the long run, the innovation helps increasing biomass consumption and MWh production from green co-firing, hence supporting the Government and PT PLN (Persero)'s NRE programs.

Manfaat inovasi untuk Perusahaan antara lain:
1. Mendukung program pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
2. Meningkatkan pencapaian produksi kWh *Green Booster Co-firing* PLTU Palabuhan Ratu.
3. Metode hasil inovasi dapat diterapkan di unit pembangkit lainnya yang tipikal.

The benefits of innovation for the Company include:
1. Supporting the Government and PT PLN (Persero)'s NRE development programs.
2. Increasing kWh production of Green Booster Co-firing at Palabuhan Ratu SPP.
3. The method resulted from the innovation is applicable in other typical generating units.

Virtual Reality Power Plant Simulator (VIRPROP)

Virtual Reality Power Plant Simulator (VIRPROP)



Peralihan metode *training* menjadi *e-learning* menjadi standar baru untuk membangun sebuah fasilitas pelatihan berbasis *digital*. Keterbatasan fitur simulator eksisting yang saat ini ada di PLTP Gunung Salak menjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran khususnya untuk mendukung akselerasi kompetensi operator pembangkit. Perkembangan teknologi *metaverse* dapat menjadi solusi alternatif yang dapat diterapkan untuk membangun sebuah fasilitas unit pembangkit *virtual* yang dapat digunakan oleh para profesional unit pembangkit khususnya operator sebagai sarana untuk pelatihan, simulasi, akselerasi kompetensi dan berinteraksi antar anggota tim operasi.

Transformation from learning to e-learning has brought a new standard to build a digital training facility. Limited features in the existing simulator at Gunung Salak GPP becomes a challenge during learning activities, particularly in terms of improving the competency of plant operators. Metaverse technology development can become an alternative solution for building a virtual power plant facility that can be used by generating unit professionals, especially operators, for training, simulation, competency building, and interaction among operating team members.

Virtual Reality Power Plant (VIRPOP) simulator merupakan fasilitas yang sudah dibangun di Unit PLTP Gunung salak dan dikembangkan untuk *platform desktop* PC dan *Virtual Reality* sebagai sarana dalam mewujudkan transformasi digital di PLN Indonesia Power. VIRPOP menjadi akselerator dalam proses pembelajaran di bidang sistem pembangkit dan berpotensi menjadi bisnis digital baru untuk program *Beyond* kWh sebagai portal penyedia layanan pelatihan *virtual* pembangkit yang mendukung kemajuan dan perkembangan digitalisasi khususnya di bidang kelistrikan Indonesia.

The Virtual Reality Power Plant (VIRPOP) simulator was built in Gunung Salak GPP and developed for desktop PC and Virtual Reality devices as a means of realizing digital transformation at PLN Indonesia Power. VIRPOP becomes an accelerator in the process of learning about power generation system. It may also become a new digital business endeavor for Beyond kWh program as a portal providing virtual generator training that supports the progress and development of digitalization, especially in the Indonesian electricity sector.

Manfaat implementasi inovasi terhadap korporasi mengacu pada tema yang telah ditetapkan antara lain:
1. Mendukung pencapaian program transformasi digital korporat di era *industry* 5.0 dan penerapan teknologi *Metaverse*.
2. Mendukung Akselerasi Kompetensi Pegawai khususnya operator unit pembangkit.
3. Menjadi Peluang bisnis digital yang mendukung Program *Beyond* kWh Perusahaan.

By implementing innovation, the Company can achieve several goals:

1. Promoting corporate digital transformation program achievements in Industry 5.0 and adopting Metaverse.
2. Supporting employee's competency acceleration, particularly for power plant operators.
3. Providing new digital business opportunity for the Company's Beyond kWh program.

Aset Pembangkitan
Power Generation Assets

PLN Indonesia Power bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, sehingga aspek tata kelola dan pemeliharaan pembangkit menjadi hal yang sangat diperhatikan demi tercapainya keandalan pembangkit untuk memenuhi target produksi tenaga listrik yang telah ditetapkan.

PLN Indonesia Power operates in the field of electricity generation, so plant management and maintenance are very important in order to achieve generator reliability and meet the set electricity production targets.

Aset Pembangkitan *Exsisting*
Existing Generation assets

Aset Pembangkit yang dimiliki oleh PLN Indonesia Power meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Sampai dengan tahun 2023, PLN Indonesia Power memiliki pembangkit yang sudah beroperasi sebanyak 32 pembangkit *existing*.

PLN Indonesia Power's existing power generation assets include Steam Power Plants (SPP), Gas Turbine Power Plants (GTPP), Combined Cycle Power Plants (CCPP), Hydro Power Plants (HPP), Diesel Power Plants (DPP), and Geothermal Power Plants (GPP). Until 2023, PLN Indonesia Power has 32 operating existing plants.

Proyek Pengembangan Pembangkitan
Generation Development Project

Selain berfokus pada pengelolaan pembangkit *existing*, PLN Indonesia Power sampai dengan tahun 2023 melakukan pengembangan pembangkit berikut:

In addition to focusing on existing power plants, as of 2023, PLN Indonesia Power was involved in the following power generation development projects:

Progress* Proyek Pembangkit *Thermal
Progress of Thermal Power Plant Projects

No	Nama Proyek Name of Project	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Tahap Proyek di tahun 2023 Project Stage in 2023
1.	GT 5 dan 6 PLTG Pesanggaran (ex. Relokasi PLTG Grati) GT 5 and 6 Pesanggaran GTPP (ex. Relocation of Grati GTPP)	200	COD
2.	PLTGU Jawa Bali 1 (Tambak Lorok Blok 3) Jawa Bali 1 CCPP (Tambak Lorok Block 3)	779	*Construction*
3.	BMPP Kolaka I / Nusantara 1	60	*Construction*
4.	BMPP Kolaka II / Nusantara 2	60	*Construction*

Sedangkan untuk pengembangan pembangkit EBT adalah sebagai berikut:

The development of NRE plants are as follows:

Progress* Proyek Pembangkit *Thermal
Progress of NRE Power Plant Projects

No	Pengembangan Proyek Pembangkit Power Plant Project Development	Kapasitas Terpasang (MW) Capacity (MW)	Tahap Proyek di tahun 2023 Project Stage in 2023
1.	PLTMH MHPP Cileunca	2x0,5	COD
2.	PLTMH MHPP Harjosari	3x3,3	*Construction*
3.	PLTA HPP Poigar	2x15	*Feasibility Study*
4.	PLTS Terapung Floating SoPP Saguling	60	*Planning*
5.	PLTS Terapung Floating SoPP Singkarak	50	*Planning*

Pengembangan pembangkitan EBT salah satunya adalah komitmen PLN Indonesia Power dalam rangka menjaga mutu lingkungan.

PLN Indonesia Power remains committed to a sustainable future through continued investment in NRE power generation.



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis




LITY EFFICIENCY OPTIMIZATION CENTER
ver Beyond Digital Solution #IndonesiaPowerGoesToArtificialIntelligence
MAKE UP WATER (rata-rata perjam)
RELIABILITY EFFICIENCY OPTIMIZATION CENTER
PLTU SURALAYA 6 - 7
FEGT PREDICTION
PLTU SURALAYA 1 - 4
FEGT PREDICTION

Tinjauan Industri
Industry Overview

Analisis Perekonomian Dunia
Global Economic Analysis

Kondisi perekonomian dunia mengalami pertumbuhan yang stabil meskipun dengan beberapa tantangan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pertumbuhan moderat, meskipun tidak merata di seluruh negara. Beberapa negara mengalami pemulihan yang kuat setelah dampak pandemi COVID-19, sementara yang lain masih berjuang dengan ketidakpastian ekonomi.

The world economy has been growing steadily despite several challenges. In general, the global economy grew moderately, while not evenly distributed across all countries. Some countries recovered significantly following the impact of the COVID-19 pandemic, while others were still struggling with economic uncertainty.

Inflasi menjadi perhatian utama, terutama di beberapa negara maju, dimana harga-harga mengalami peningkatan. Kenaikan inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh gangguan pasokan, biaya tenaga kerja, dan kebijakan moneter yang longgar. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan potensi resesi di tahun 2023.

Inflation was a major concern, especially in several developed countries, where prices were increasing. This increase in inflation was largely due to supply disruptions, labor costs, and loose monetary policy. This gave rise to a concern about potential recession in 2023.

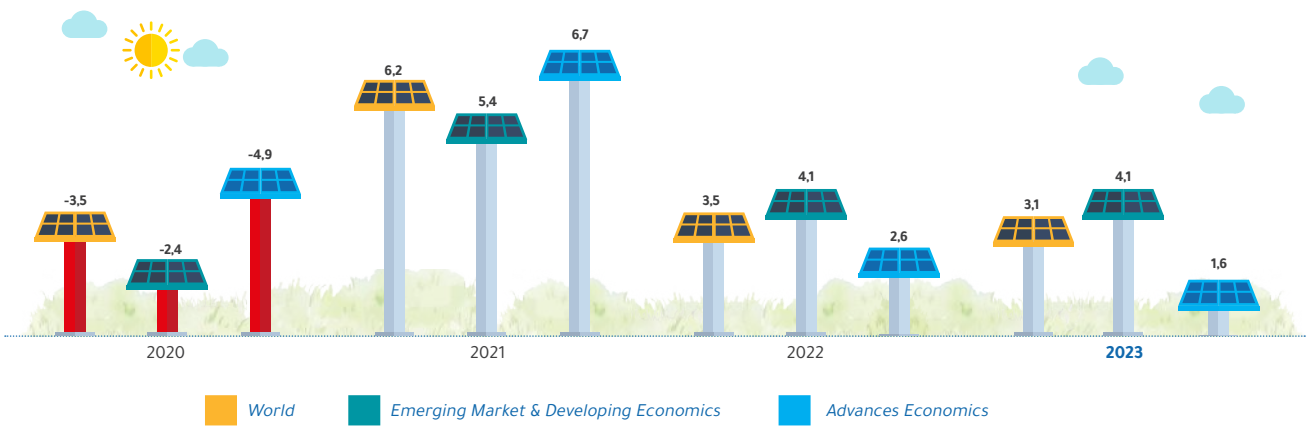
Beberapa hal yang memengaruhi perekonomian dunia pada tahun 2023, salah satunya adalah krisis energi yang melanda beberapa wilayah akibat peningkatan permintaan energi dan gangguan pasokan. Konflik geopolitik dan ketegangan perdagangan juga menjadi faktor yang memengaruhi ketidakpastian ekonomi dunia. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara juga memengaruhi kondisi ekonomi dunia secara keseluruhan.

Among the issues affecting the global economy in 2023, energy crisis arose in a number of regions due to increased energy demand and supply disruptions. Geopolitical conflicts and trade tensions were among the factors that contribute to the uncertainty in the world economy. Changes in fiscal and monetary policies in many countries also influence the overall world economic conditions.

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) *Update* Januari 2024 mencatatkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diestimasikan mencapai 3,1% yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

Data from the International Monetary Fund (IMF) in the World Economic Outlook (WEO) Update of January 2024 estimated a 3.1% growth by 2023, which was a decline from the 2022 estimate.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Trend of Global Economic Growth (%)



*estimasi
Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), Januari 2024

*estimate
Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), January 2024

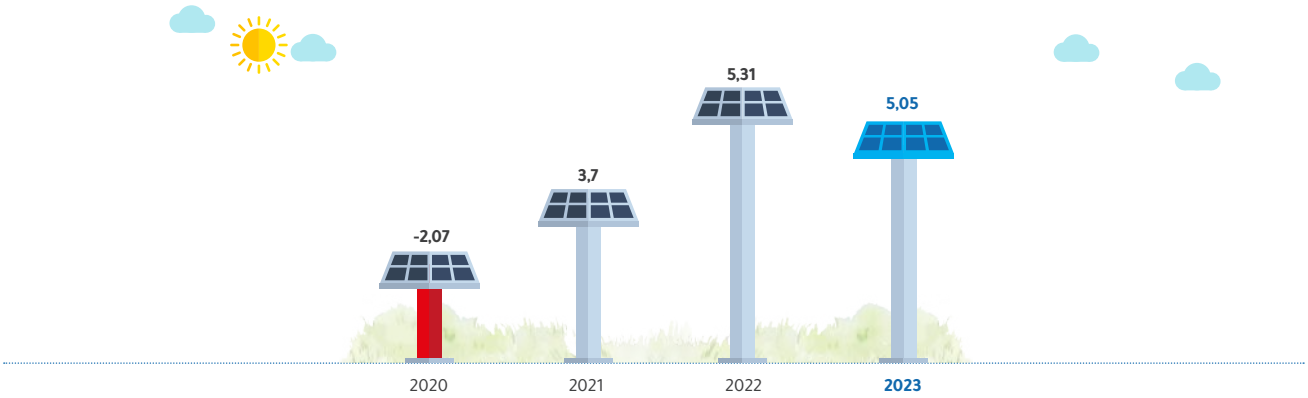
Analisis Perekonomian Indonesia

Indonesia Economic Analysis

Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US$4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Indonesia's economy calculated based on Gross Domestic Product (GDP) at current prices was Rp20,892.4 trillion and GDP per capita was Rp75.0 million or US$4,919.7. Indonesia's economy in 2023 grew 5.05%, lower than the growth in 2022 at 5.31%. In terms of production, Transportation and Warehousing had the highest growth at 13.96%. In terms of expenditure, Consumption Expenditure of Household-Serving Non-profit Institutions (PK-LNPRT) stood at 9.83%.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)
Trend of Indonesia Economic Growth (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

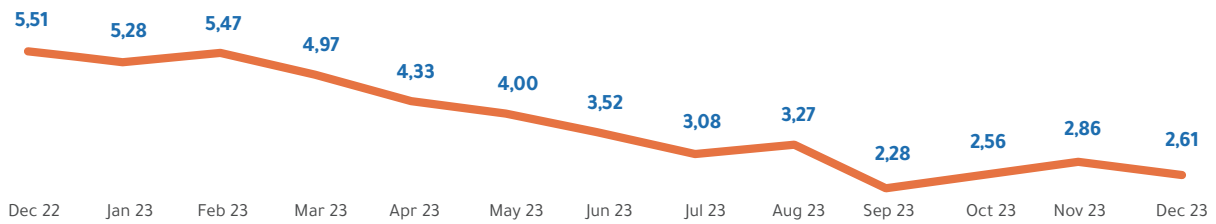
Source: Press Release, Statistics Indonesia

Pada Desember 2023 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) sebesar 2,61% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,56. Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 5,08% dengan IHK sebesar 120,82 dan terendah terjadi di Bandung sebesar 0,63% dengan IHK sebesar 116,16.

In December 2023, an inflation rose by 2.61% (yoy), whereas the Consumer Index Price (CPI) stood at 116.56. Sumenep saw the highest inflation of 5.08% and CPI of 120.82, whereas the lowest inflation happened in Bandung at 0.63% and CPI of 116.16.

Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2023 (%)
Trend of Indonesian Inflation in 2023 (%)

Tingkat Inflasi *Year-on-Year* (Y-on-Y) Gabungan 90 Kota (2018=100), Desember 2022-Desember 2023
Inflation Rate Year-on-Year (Y-on-Y) Combined of 90 City (2018=100), by December 2022-December 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

Source: Central Bureau of Statistics (BPS), Official Statistical News

Kondisi Industri Listrik Indonesia
Indonesia's Power Industry Landscape

Kondisi industri listrik Indonesia tahun 2023 didukung oleh beberapa aspek yakni politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum.

Indonesia's power industry landscape in 2023 were affected by political, economic, social, technological, environmental, and legal aspects.

Aspek Politik
Political Aspect

Industri listrik Indonesia dapat mengembangkan bisnis dari turunan jasa operasional dan pemeliharaan pembangkit, serta dapat mengembangkan area pasarnya ke luar negeri sesuai dengan arahan Menteri BUMN yang mencanangkan BUMN GO GLOBAL.

The Indonesian power industry can develop business from derivative operational and maintenance services for generators, while expanding its market outreach abroad in accordance with the directive of the Minister of State-Owned Enterprises who launched BUMN GO GLOBAL.

Aspek Ekonomi
Economic Aspect

1. Industri listrik di Indonesia berpotensi untuk dapat meningkatkan pengembangan bisnis pembangkitan EBT, dengan semakin banyaknya dukungan pendanaan *green energy*.
2. Industri listrik di Indonesia dapat mengupayakan pengembangan pembangkit baru dan meningkatkan keandalan pembangkit yang sudah ada untuk dapat memenuhi peluang *captive market* seperti *smelter*, Kawasan Ekonomi Khusus, dan listrik premium.

1. Indonesian power industry has the potential to further develop new and renewable energy (NRE) generation business, with increasing support for green energy funding.
2. Indonesian power industry can develop new generators and improve the reliability of existing generators in order to meet captive market opportunities, such as smelters, Special Economic Zones and Premium Electricity.

Aspek Sosial
Social Aspect

1. Industri listrik di Indonesia berpeluang untuk dapat meningkatkan penjualan tenaga listrik, seiring dengan meningkatnya tren elektrifikasi di kalangan masyarakat, seperti penggunaan mobil listrik, motor listrik, kompor listrik, dll.
2. Industri listrik di Indonesia dapat menerapkan konsep dan kriteria ESG (*Environment, Social and Governance*) sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan risiko keberlanjutan, dimana kini hal tersebut menjadi salah satu dasar untuk mendapatkan pendanaan

1. Indonesian power industry has the opportunity to increase electricity sales, thanks to the increasing trend of public electrification, such as the use of electric cars, electric motorbikes, electric stoves, etc.
2. Indonesian power industry can implement the Environmental, Social, and Governance (ESG) concept and criteria as an approach to reducing sustainability risks, which is now one of the bases for obtaining funding.

Aspek Teknologi
Technological Aspect

1. Industri listrik di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi pada proses bisnis melalui implementasi berbagai teknologi digital, baik di bidang pembangkitan maupun non pembangkitan
2. Industri listrik di Indonesia dapat meningkatkan pengembangan bisnis pembangkitan EBT dengan memanfaatkan teknologi baru di bidang pembangkitan, antara lain *Nuclear* SMR (*Small Modular Reactor*), BESS (*Battery Energy Storage System*), *Wind Turbine, Solar* PV (*Photo Voltaic*), *Smart Grid, Hydrogen Fuel Cell,* Teknologi CCS (*Carbon Capture & Storage*) & CCUS (*Carbon Capture, Utilization and Storage*)
3. Industri listrik di Indonesia dapat meningkatkan implementasi teknologi digital pada seluruh aspek bisnis, termasuk pembangkitan dan proses bisnis lainnya, guna meningkatkan kinerja operasional dan pemeliharaan pembangkit menuju *high quality growth*, serta untuk mencegah terjadinya ancaman *cyber security*
4. Industri listrik di Indonesia dapat mempercepat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) melalui pengembangan bisnis turunan pembangkit listrik seperti manufaktur di bidang peralatan industri kelistrikan.

1. Indonesian power industry can improve business processes efficiency by implementing digital technologies, both in the generation and non-generation sectors.
2. Indonesian power industry in Indonesia can boost the development NRE generation business by utilizing new technologies in the generation sector, including Nuclear Small Modular Reactor (SMR), Battery Energy Storage System (BESS), Wind Turbine, Solar Photovoltaic (PV), Smart Grid, Hydrogen Fuel Cell, Carbon Capture & Storage (CCS), and Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).
3. Indonesian power industry can accelerate digital technology adoption in all business aspects, including generation and other business processes, in order to boost operational performance and generator maintenance towards high quality growth, as well as to prevent cybersecurity threats.
4. Indonesia's electricity industry can accelerate the Use of Domestic Production (P3DN) through the development of power plant derivative businesses such as manufacturing in the field of electricity industry equipment.



Aspek Lingkungan
Environmental Aspect

Industri listrik di Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan peran dalam mencapai target NZE tahun 2060 melalui transisi energi, diantaranya dengan mengembangkan pembangkit listrik yang berbasis EBT, melakukan transisi energi pada pembangkit fossil diantaranya dengan memanfaatkan biomass, *hydrogen*, dan amonia sebagai bahan bakar *co-firing*, melakukan kajian pemanfaatan teknologi *Carbon Captured and Storage* (CCS) dan *Carbon, Captured, Utilization, and Storage* (CCUS), dll, serta menyediakan *green energy as a service*.

The electricity industry in Indonesia has the opportunity to increase its role in achieving the 2060 NZE target through energy transition, including by developing renewable energy-based power plants, making energy transition in fossil plants including by utilizing biomass, hydrogen, and ammonia as co-firing fuels, conducting studies on the use of Carbon Captured and Storage (CCS) and Carbon, Captured, Utilization, and Storage (CCUS) technologies, etc., and providing green energy as a service.

Aspek Hukum
Legal Aspect

1. Industri listrik di Indonesia dapat meningkatkan peran dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup, dengan menjaga baku mutu emisi pembangkit listrik agar sesuai dengan Permen KLHK No. 15 Tahun 2019.
2. Industri listrik di Indonesia dapat meningkatkan peran dalam pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana ditekankan pada beberapa regulasi antara lain, Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang NEK, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan POJK No.14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
3. Industri listrik di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi pembangkit melalui peningkatan tata kelola pembangkit yang lebih baik dengan didukung peningkatan implementasi pada digitalisasi pembangkit, guna dapat memenuhi Permen ESDM No. 9 Tahun 2020 terkait *Specific Fuel Consumption* (SFC).
4. Industri listrik di Indonesia dapat mengembangkan bisnis pembangkitan di daerah Kalimantan, seiring dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
5. Industri listrik di Indonesia dapat turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui implementasi Permen Perin No. 04/M-IND/PER/2/2017 tentang TKDN dan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang P3DN.

1. Indonesian power industry can broaden its role in protecting and managing the environment, by maintaining the quality standards for power plant emissions in accordance with the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 15 of 2019.
2. Indonesian power industry can broaden its role in reducing greenhouse gas (GHG) emissions as emphasized in several regulations, including Presidential Decree No. 98 of 2021 on Carbon Economic Value, Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations, and OJK Regulation No. 14 of 2023 on Carbon Trading via Carbon Exchange.
3. Indonesian power industry can improve generator efficiency through better generator governance with support from increased implementation of generator digitalization, in order to comply with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 9 of 2020 on Specific Fuel Consumption (SFC).
4. Indonesian power industry can develop the generation business in the island of Kalimantan, following the ratification of Law No. 3 of 2022 on National Capital.
5. Indonesian power industry can contribute to enhanced domestic economic growth by implementing The Ministry of Industry Regulation No. 04/M-IND/PER/2/2017 on Domestic Component Level (TKDN) and Presidential Instruction No. 2 of 2022 on Increased Use of Domestic Products (P3DN).

Kontribusi PLN Indonesia Power terhadap Industri Listrik Nasional
PLN Indonesia Power's Contribution to National Power Industry

PLN Indonesia Power berkontribusi dalam industri listrik nasional dalam bidang penyediaan tenaga listrik, jasa *operation and maintenance* (O&M) dan solusi energi lainnya yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Sebagai salah satu Perusahaan pengelola berbagai jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTG, PLTA, PLTM, PLTD, PLTP dan PLTS) di Indonesia menjadikan pengalaman tersebut sebagai modal dasar dalam meraih peluang. Keunggulan tersebut perlu dikelola dan diciptakan strategi yang sesuai untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat.

PLN Indonesia Power contributes to the national power industry in electricity supply, operations and maintenance (O&M) services, and other energy solutions. In the capacity of managing different types of power plants (SPP, CCPP, GTPP, HPP, MHPP, DPP, GPP, and SoPP) in Indonesia, the Company saw this as an excellent opportunity. This advantage needs to be managed and given a proper strategy to face increasingly fierce challenges and competition.

Kontribusi Pengembangan Pembangkitan
Contribution to Power Generation Development

Dalam upaya memperkuat infrastruktur kelistrikan yang mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, Perusahaan sebagai *arm length* pertumbuhan PLN, berperan dalam menambah kapasitas pembangkit dengan melakukan pengembangan pembangkit listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai

In an effort to strengthen the electricity infrastructure that supports Indonesian economic growth, the Company, which is at arm's length with PLN, has a role in increasing power capacity by developing power plants. The expansion of power generation capacity is carried out in accordance with government policies, e.g. in the development of



dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta program 35.000 MW. Peran serta pengembangan pembangkit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemanfaatan area pembangkit eksisting untuk pembangunan pembangkit baru yang akan dimiliki oleh Perusahaan,
2. Melaksanakan proyek-proyek penugasan yang dimandatkan dari PLN selaku *holding* dengan sebaik mungkin,
3. Mengikuti *tender Independent Power Producer* (IPP) yang diselenggarakan oleh PLN maupun *off taker* non PLN, bekerjasama dengan investor/ *developer* nasional maupun internasional,
4. Mencari potensi pelanggan baru non PLN yang memiliki preferensi solusi tertentu dalam penyediaan energi listrik (*demand-driven development*),
5. Mengoptimalkan peran Anak Perusahaan dalam kontribusi pengembangan pembangkit.

Pengembangan proyek dalam rangka penugasan oleh PT PLN (Persero) selaku *holding*, pada tahun 2023, *sub-holding generation corporate*, PLN Indonesia Power telah menyelesaikan pembangunan pembangkit PLTMH Cileunca hingga pembangkit tersebut beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date* - COD) dan beberapa proyek yang sedang dalam tahap pengujian.

new and renewable energy (NRE), and the 35,000 MW program. The followings are the methods to develop power plants:

1. Utilizing existing power plant area for construction of new power plants that will be owned by the Company.
2. Participating in Independent Power Producer (IPP) bidding held by PLN, in collaboration with national and international investors/ developers.
3. Participate in Independent Power Producer (IPP) tenders organized by PLN and non PLN off takers, in collaboration with national and international investors/ developers,
4. Seeking potential new non PLN customers who have certain solution preferences in the provision of electrical energy (demand-driven development),
5. Optimizing the role of subsidiaries in the contribution of power plant development.

Developing projects under secondment by PT PLN (Persero) as the holding company. In 2023, PLN Indonesia Power as the subholding companycompleted the construction of Cileunca MHPP and decided its Commercial Operation Date (COD). The Company also completed several projects that were under testing phase.

Kontribusi Energi Listrik
Electricity Contributions

Pada tahun 2023, pasokan (*supply*) energi listrik PLN Indonesia Power sebesar 78.631,6 GWh. Berbeda dengan tahun 2022 dimana pasokan dan kontribusi energi listrik terhitung hanya pada wilayah Jawa Bali, pasokan energi listrik PLN Indonesia Power tahun 2023 merupakan total produksi pembangkit yang berada di wilayah Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Total kontribusi pembangkit PLN Indonesia Power pada keempat wilayah tersebut sebesar 26,95 % dengan rincian kontribusi masing-masing wilayah sebesar 29,37% di wilayah JAMALI, 22,84% di wilayah Sumatera, 21,48% di wilayah Kalimantan dan 8,6% di Wilayah Sulawesi.

In 2023, PLN Indonesia Power's electricity supply amounted to 78,631.6 GWh. In contrast to 2022 where energy supply and contribution had been calculated only in Java-Bali, PLN Indonesia Power's energy supply in 2023 covered the total production of power plants in the Java-Bali, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi regions. The total contribution of PLN Indonesia Power generators in the four regions was 26.95%, i.e. 29.37% from Java-Bali, 22.84% from Sumatra, 21.48% from Kalimantan, and 8.6 % from Sulawesi.

Kontribusi Percepatan Bauran Energi Baru Terbarukan
Contribution to New and Renewable Energy Mix Acceleration

PLN Indonesia Power memiliki dan mengelola pembangkit dengan energi hijau dan bersih, antara lain berupa uap panas bumi pada PLTP, air pada PLTA dan PLTM dan cahaya matahari pada PLTS, sebesar 1.510 MW +5 MWp. Selanjutnya, PLN Indonesia Power memberikan kontribusi dalam percepatan bauran EBT di Indonesia melalui pengembangan pembangkit EBT dan *Co-firing* PLTU, sehingga diharapkan bauran energi baru dan terbarukan di PLN Indonesia Power mencapai 30% dari total kapasitas terpasang pembangkit yang dikelola pada tahun 2028. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah mewujudkan transisi energi lewat pengembangan pembangkit EBT dengan telah menyelesaikan pembangunan PLTM Gunung Wugul (3 MW), PLTS *Landbase* Grati (1,5 MWp), dan PLTS *Hybrid* Nusa Penida (3,5 MWp). Selain itu juga dalam pencapaian bauran EBT, di tahun 2022 PLN Indonesia Power telah melakukan komersialisasi *cofiring* di 11 PLTU yaitu PLTU Suralaya 1-4, PLTU Suralaya 5-7, PLTU Suralaya 8, PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Adipala, PLTU Sanggau, PLTU Sintang, PLTU Jeranjang dan PLTU Barru yang berdampak pada peningkatan produksi EBT dalam bauran energi.

PLN Indonesia Power owns and manages generators with green and clean energy, including geothermal steam in GPP, water in HPP and MHPP, and sunlight in SoPP, at a total of 1,510 MW + 5 MWp. PLN Indonesia Power also contributes to accelerating NRE mix in Indonesia by developing NRE generators and adopting co-firing at SPP, aiming that the NRE mix at PLN Indonesia Power reaches 30% of the total installed capacity of managed generators by 2028. Throughout 2021, the Company's energy transition effort via NRE plants development successfully completed the construction of the Gunung Wugul MHPP (3 MW), Land-based Grati SoPP (1.5 MWp), and Nusa Penida Hybrid SoPP (3,5 MWp). Still to meet the NRE mix target, in 2022 PLN Indonesia Power performed co-firing commercialization at 11 SPPs, including Suralaya 1-4 SPP, Suralaya 5-7 SPP, Suralaya 8 SPP, Labuan SPP, Lontar SPP, Pelabuhan Ratu SPP, Adipala SPP, Sanggau SPP, Sintang SPP, Jeranjang SPP, and Barru SPP. The effort has successfully increase NRE production in the energy mix.



Kontribusi kepada Pemegang Saham
Contribution to the Shareholders

Salah satu bentuk kontribusi PLN Indonesia Power kepada Pemegang Saham adalah melalui pembayaran dividen. Pembayaran dividen di tahun 2023 atas laba tahun buku 2022 adalah sebesar Rp5,76 triliun. Secara lebih rinci terkait pembayaran dividen akan diuraikan pada Sub Bab Kebijakan Dividen.

PLN Indonesia Power makes contribution to the Shareholders, among others through the dividend payment. The dividend payment for the profits from the fiscal year 2022 was Rp5.76 trillion. The details of the dividend payment can be found in the Sub-chapter of Dividend Policy.

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the Country

Setoran pajak pada tahun 2023 sebesar Rp4,21 triliun. Secara lebih rinci terkait kontribusi kepada Negara akan diuraikan pada Sub Bab Kontribusi kepada Negara.

The Company's tax contribution in 2023 amounted to Rp4.21 trillion. Details of this contribution are available in the Sub-chapter of Contribution to the Country.

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing Aspect and Market Share

Hasil produksi tenaga listrik PLN Indonesia Power dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*. Mekanisme penjualan energi listrik melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) periode 10 (sepuluh) tahunan. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Sehingga aspek pemasaran PLN Indonesia Power ditujukan untuk mengelola dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kepuasan pelanggan.

The electricity produced by PLN Indonesia Power is sold to the holding company, PT PLN (Persero) as the single buyer. This sale of electricity practice is regulated in the 10-year period Power Purchase Agreement (PPA). Under this commitment, PLN pays for the electricity supplied by the Company in the amount determined based on the payment formula. That way, PLN Indonesia Power can focus its marketing aspect on managing and improving shareholder trust and customer satisfaction.

Pangsa Pasar
Market Share

Energi listrik wilayah Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dipasok oleh beberapa perusahaan yaitu PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, PLN Tanjung Jati B (PLN TJB), pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) dan pembangkit milik PLN baik yang dikelola oleh Unit Induk Distribusi (UID), Unit Induk Wilayah (UIW), Unit Induk Pembangkitan (UIK) di masing-masing regional dan *project*.

Electricity in Java-Bali, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi is suppled by several companies, including PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, PLN Tanjung Jati B (PLN TJB), Independent Power Producers (IPP), PLN's power generators, either managed under Main Distribution Unit (UID), Regional Distribution Unit (UIW), or Main Generation Unit (UIK) in each region and project.

Realisasi pasokan untuk Jawa - Bali sebesar 217.860,15 GWh. Dari total pasokan tersebut PLN Indonesia Power berkontribusi sebesar 29,37% atau sebesar 63.977,20 GWh. Sementara itu di wilayah luar Jawa Bali (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi), realisasi pasokan energi listrik sebesar 79.911,59 GWh, dimana PLN Indonesia Power berkontribusi sebesar 19,83% atau sebesar 14.654,40 GWh.

Total realized supply for Java-Bali system was 217,860.15 GWh. Out of the total supply, PLN Indonesia Power contributed 29.37% or 63,977.20 GWh. Meanwhile, outside Java-Bali (i.e. Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi), total realized energy supply was 79,911.59 GWh, in which PLN Indonesia Power contributed 19.83% or 14,654.40 GWh.

Sehingga secara total PLN Indonesia Power berkontribusi memberikan pasokan energi sebesar 26,95% (atau sebesar 78.631,61 GWh) dari total pasokan 291.771,74 GWh di wilayah Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

In total, PLN Indonesia Power contributed 26.95% (or 78,631.61 GWh) to the total energy supply from a total of 291,771.74 GWh in Java-Bali, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi.



Tabel Pangsa Pasar Energi Listrik
Electricity Market Share

Perusahaan Company	2021*)		2022*)		2023	
	GWh	(%)	GWh	(%)	GWh	(%)
PLN Indonesia Power	37.426	18,99	35.751	17,11	78.631,61	26,95
PLN Nusantara Power	19.779	10,04	16.256	7,78	62.139,05	21,30
UB Tanjung Jati B	18.884	9,58	19.268	9,22	17.975,76	6,16
IPP	67.568	34,39	80.781	38,66	127.630,83	43,74
Unit O&M dikelola PLN Indonesia Power O&M Units managed by PLN Indonesia Power	28.709	14,57	30.351	14,53	-	-
Unit O&M dikelola PLN Nusantara Power O&M Units managed by PLN Nusantara Power	24.529	12,45	26.259	12,57	-	-
Proyek Projects	145	0,07	261	0,13	554,52	0,19
KIT PLN	-	-	-	-	4.839,97	1,66
Total	**197.039**	**100,00**	**208.929**	**100,00**	**291.771,74**	**100,00**

*) Untuk pangsa pasar tahun 2021 dan 2022 adalah pangsa pasar di sistem Jawa - Bali. Untuk tahun 2023 adalah pangsa pasar di sistem Jawa - Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

*) The market share in 2021 and 2022 covered the Java-Bali system. The market share in 2023 covered Java-Bali, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi systems.

Tabel Pangsa Pasar Energi Listrik Jawa Bali
Electricity Market Share in Java-Bali

Perusahaan Company	2021		2022		2023	
	GWh	(%)	GWh	(%)	GWh	(%)
PLN Indonesia Power	37.426	18,99	35.751	17,11	63.977,20	29,37
PLN Nusantara Power	19.779	10,04	16.256	7,78	42.304,81	19,42
UB Tanjung Jati B	18.884	9,58	19.268	9,22	17.975,76	8,25
IPP	67.568	34,39	80.781	38,66	93.079,85	42,72
Unit O&M dikelola PLN Indonesia Power O&M Units managed by PLN Indonesia Power	28.709	14,57	30.351	14,53	-	-
Unit O&M dikelola PLN Nusantara Power O&M Units managed by PLN Nusantara Power	24.529	12,45	26.259	12,57	-	-
Proyek Projects	145	0,07	261	0,13	522,53	0,24
Total	**197.039**	**100,00**	**208.929**	**100,00**	**217.860,15**	**100,00**

Tabel Pangsa Pasar Energi Listrik Luar Jawa Bali
Electricity Market Share outside Java-Bali

Perusahaan Company	2023	
	GWh	(%)
PLN Indonesia Power	14.654,40	19,83
PLN Nusantara Power Eksisting Existing	19.834,24	26,84
IPP	34.550,98	46,75
Proyek Project	31,99	0,04
KIT PLN	4.839,97	6,55
Total	**73.911,59**	**100,00**

Data Pangsa Pasar PLN Indonesia Power di luar Jawa Bali baru ada mulai tahun 2023

Data on PLN Indonesia Power's market share outside Java-Bali available starting 2023

Strategi Pemasaran
Marketing Strategies

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, pada tahun 2023 PLN Indonesia Power melakukan beberapa strategi berikut:

1. Seluruh pembangkit menjalankan program perang EFOR untuk meningkatkan keandalan;
2. Optimalisasi pengoperasian PLTGU dengan pola operasi yang lebih efisien;
3. Menjaga pola operasi PLTA dengan mengoptimalkan Tinggi Muka Air (TMA) dan ketersediaan air, serta menjalankan program Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di PLTA Saguling;
4. Renegosiasi harga uap PLTP untuk meningkatkan CF PLTP Kamojang;
5. Pemantauan dan pengendalian efisiensi dan *reliability* pembangkit secara *real time;*
6. Realokasi unit Grati ke Pesanggaran;
7. Menjaga keandalan dan pasokan unit pembangkit di sistem *isolated* melalui relokasi unit pembangkit; serta
8. Strategi menjaga nilai *merit order* PLTU Batubara agar tetap kompetitif.

To maintain and expand the market share, PLN Indonesia Power performed the following strategies in 2023:

1. All power plants executed EFOR mitigation program to improve reliability;
2. Optimization of CCPP for more efficient operations;
3. Maintaining Saguling HPP's operational model by optimizing TMA and water supply;
4. Geothermal energy price negotiation to increase Kamojang GPP's CF;
5. Real-time monitoring and controlling of power plants' efficiency and reliability;
6. Relocation of Grati Unit to Pesanggaran;
7. Maintaining generator reliability and supply in isolated system by relocating generator unit;
8. Adopting the strategy to maintain merit order of Coal Fired SPP in order to remain competitive.

Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen
Operational Performance Overview by Segment

Pengalihan Aset dalam Rangka *Subholding* Pembangkitan
Asset Transfer to Power Generation Subholding

Sejak berubahnya status Perusahaan menjadi salah satu *Subholding* Pembangkitan PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power mengalami penambahan jumlah unit pembangkitan. Unit pembangkitan PLN Indonesia Power bertambah dikarenakan pengalihan aset pembangkitan dari PT PLN (Persero) ke Perusahaan.

Sehingga, berdasarkan kejadian tersebut mulai dari tahun 2023, PLN Indonesia Power mengelola secara langsung aset pembangkitan baru berikut sebagai Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) milik Perusahaan.

Since the change in the Company's status to become one of the Generation Subholding of PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power has experienced an increase in the number of generation units. PLN Indonesia Power's generation unit increased due to the transfer of generation assets from PT PLN (Persero) to the Company.

With this event, starting 2023, PLN Indonesia Power has been directly managing the following new power plants as its Power Generation Business Asset Units (GBU).

Tabel Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) PLN Indonesia Power
Table of PLN Indonesia Power Generation Business Unit (GBU)

Unit Eksisting Existing Unit	Unit Pengalihan Aset dari PLN (Persero) Unit from PLN (Persero) Asset Transfer	
1. UBP GBU Suralaya	9. UBP GBU Banten 1 Suralaya	21. UBP GBU Berau
2. UBP GBU Priok	10. UBP GBU Banten 2 Labuan	22. UBP GBU Singkawang
3. UBP GBU Saguling	11. UBP GBU Banten 3 Lontar	23. UBP GBU Asam-Asam
4. UBP GBU Kamojang	12. UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	24. UBP GBU Barru
5. UBP GBU Mrica	13. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala	25. UBP GBU Cilegon
6. UBP GBU Semarang	14. UBP GBU Pangkalan Susu	26. UBP GBU Keramasan
7. UBP GBU Grati	15. UBP GBU Labuhan Angin	27. UBP GBU Jambi
8. UBP GBU Bali	16. UBP GBU Ombilin	28. UBP GBU Bukittinggi
	17. UBP GBU Teluk Sirih	29. UBP GBU Bengkulu
	18. UBP GBU Kepulauan Riau	30. UBP GBU Mahakam
	19. UBP GBU Sanggau	31. UBP GBU Barito
	20. UBP GBU Sintang	32. UBP GBU Tello

Kinerja Pembangkitan PLN Indonesia Power
PLN Indonesia Power's Power Generation Performance

Daya Terpasang Pembangkit (DTP)
Power Plant Installed Capacity

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) merupakan kapasitas atau daya yang tertera sesuai dengan setiap jenis pembangkit. DTP pembangkit milik PLN Indonesia Power pada tahun 2023 adalah sebesar 19.936,82 MW, yaitu mengalami peningkatan 120,75% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengalihan aset PLN kepada Perusahaan seiring dengan perubahan status Perusahaan sebagai *Subholding* PLN.

Power Plant Installed Capacity (DTP) is the capacity or power listed according to each type of plant. The DTP of PLN Indonesia Power's plants in 2023 amounted to 19,936.82 MW, which increased 120.57% compared to 2022. The increase was mainly due to the transfer of PLN assets to the Company in line with the change in the Company's status as PLN Subholding.

Tabel Daya Terpasang Unit Pembangkitan
Installed Capacity of Power Generation Unit

(dalam MW, kecuali dinyatakan lain) (in MW, unless otherwise stated)

Unit Pembangkit Generation Unit	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
UBP GBU Suralaya	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-
UBP GBU Priok	1.284,58	1.285,30	1.285,30	2.947,00	129,28%
UBP GBU Saguling	797,36	797,36	797,36	797,36	-
UBP GBU Kamojang	377	377	377	567,00	50,40%
UBP GBU Mrica	322,14	325,25	333,79	333,79	-
UBP GBU Semarang	1.238,30	1.238,30	1.238,30	1.238,30	-
UBP GBU Grati	931,32	959,08	757,58	1.258,58	66,13%
UBP GBU Bali	622,43	742,43	842,08	960,11	14,02%
UBP GBU Banten 1 Suralaya	-	-	-	625,00	-
UBP GBU Banten 2 Labuan	-	-	-	600,00	-
UBP GBU Banten 3 Lontar	-	-	-	945,00	-
UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	-	-	-	1.050,00	-
UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala	-	-	-	660,00	-
UBP GBU Pangkalan Susu	-	-	-	880,00	-
UBP GBU Labuhan Angin	-	-	-	230,00	-
UBP GBU Ombilin	-	-	-	221,50	-
UBP GBU Teluk Sirih	-	-	-	245,50	-
UBP GBU Kepulauan Riau	-	-	-	32,17	-
UBP GBU Sanggau	-	-	-	14,00	-
UBP GBU Sintang	-	-	-	21,00	-
UBP GBU Berau	-	-	-	19,00	-
UBP GBU Singkawang	-	-	-	100,00	-
UBP GBU Asam-Asam	-	-	-	260,00	-
UBP GBU Barru	-	-	-	100,00	-
UBP GBU Cilegon	-	-	-	740,00	-
UBP GBU Keramasan	-	-	-	328,61	-
UBP GBU Jambi	-	-	-	157,03	-
UBP GBU Bukittinggi	-	-	-	253,50	-
UBP GBU Bengkulu	-	-	-	236,32	-

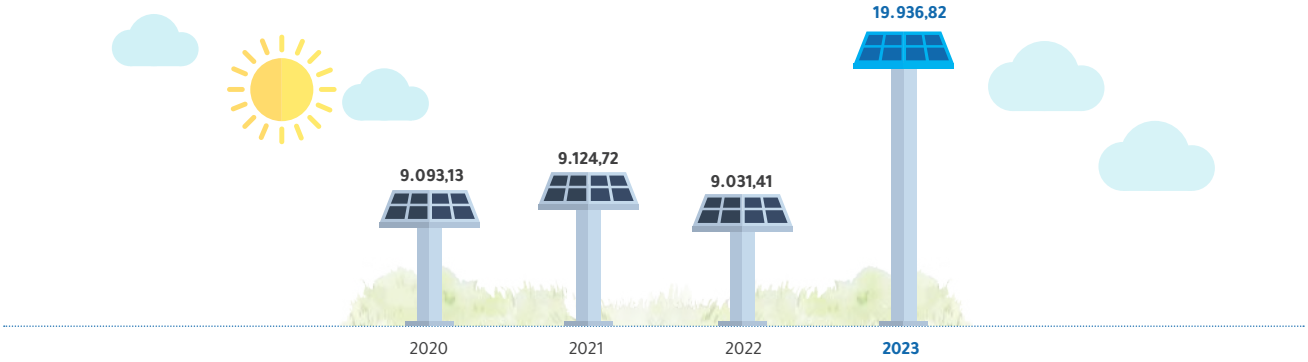


Unit Pembangkit Generation Unit	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
UBP GBU Mahakam	-	-	-	410,41	-
UBP GBU Barito	-	-	-	175,07	-
UBP GBU Tello	-	-	-	130,57	-
Jumlah Total	**9.093,13**	**9.124,72**	**9.031,41**	**19.936,82**	**120,75%**

* DTP Pembangkit Pengalihan Aset mulai dicatatkan pada tahun 2023 sejak menjadi UBP PLN Indonesia Power

* The recording of Asset Transfer Power Plant Installed Capacity started in 2023 since becoming UBP PLN Indonesia Power

Grafik Daya Terpasang Unit Pembangkitan (dalam MW)
Chart of Installed Capacity of Power Generation Unit (in MW)



Produksi Energi Listrik
Electricity Production

Jumlah produksi energi listrik PLN Indonesia Power pada tahun 2023 sebesar 84.199,86 GWh, meningkat signifikan 124,47% dari tahun 2022 yaitu sebesar 37.510,12 GWh. Peningkatan jumlah produksi tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengalihan aset beberapa pembangkit PLN ke *subholding* PLN Indonesia Power.

Total electricity production in 2023 was 84,199.86 GWh, which significantly increased by 124.47% from 2022 at 37,510.12 GWh. This was particularly due to the transfer of some of PLN's power plant assets to PLN Indonesia Power as the subholding.

Tabel Produksi Energi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit
Electricity Production by Type of Power Plant

(dalam MW, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
PLTU Batubara Jawa Bali Coal SPP in Java-Bali	22.661,32	24.058,36	23.351,60	43.978,25	88,33%
Non-PLTU Batubara Jawa Bali Non-Coal SPP in Java-Bali	12.110,23	15.172,45	14.158,54	23.414,83	65,38%
PLTU Batubara Luar Jawa Bali Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	10.508,76	-
Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali Non-Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	6.298,02	-
Jumlah Total	**34.771,54**	**39.230,81**	**37.510,12**	**84.199,86**	**124,47%**

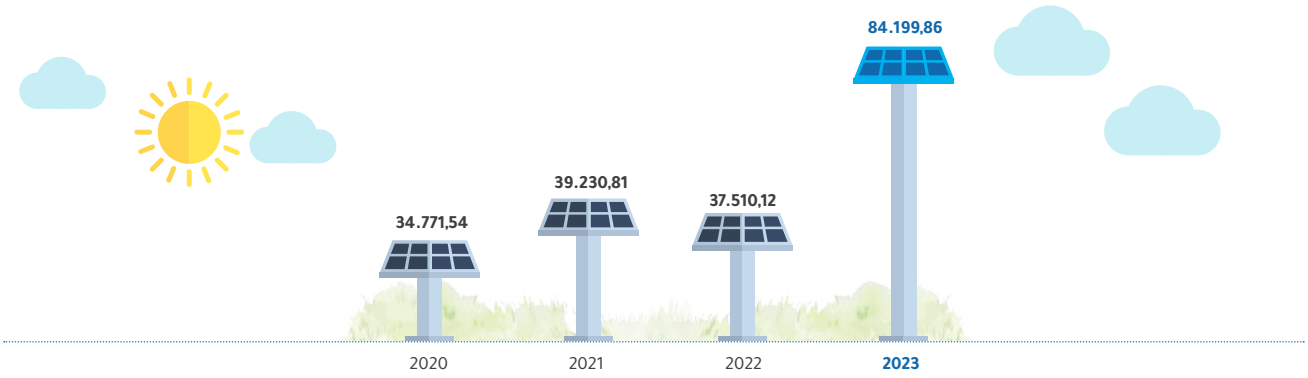
Tabel Produksi Energi Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit
Electricity Production by Power Generation Unit

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Unit Pembangkit Generation Unit	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
UBP GBU Suralaya	22.661,32	24.058,36	23.351,60	21.022,36	-9,97%
UBP GBU Priok	1.820,00	3.353,18	1.774,55	9.420,96	430,89%
UBP GBU Saguling	2.813,25	2.638,78	3.361,33	2.248,57	-33,10%
UBP GBU Kamojang	2.778,15	2.888,51	2.735,63	4.252,36	7,45%
UBP GBU Mrica	879,64	1.016,17	1.203,12	829,10	-31,09%
UBP GBU Semarang	851,1	2.240,14	2.202,68	3.248,92	47,50%
UBP GBU Grati	1.938,55	2.045,07	1.685,25	1.770,33	5,05%
UBP GBU Bali	1.029,54	990,6	1.195,98	2.066,54	-9,97%
UBP GBU Banten 1 Suralaya	-	-	-	2.458,44	
UBP GBU Banten 2 Labuan	-	-	-	4.010,51	
UBP GBU Banten 3 Lontar	-	-	-	6.426,40	
UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	-	-	-	6.987,06	
UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala	-	-	-	3.073,49	
UBP GBU Pangkalan Susu	-	-	-	4.539,71	
UBP GBU Labuhan Angin	-	-	-	634,26	
UBP GBU Ombilin	-	-	-	568,98	
UBP GBU Teluk Sirih	-	-	-	1.233,42	
UBP GBU Kepulauan Riau	-	-	-	78,65	
UBP GBU Sanggau	-	-	-	97,34	
UBP GBU Sintang	-	-	-	150,87	
UBP GBU Berau	-	-	-	73,45	
UBP GBU Singkawang	-	-	-	621,14	
UBP GBU Asam-Asam	-	-	-	1.859,37	
UBP GBU Barru	-	-	-	672,40	
UBP GBU Cilegon	-	-	-	1.173,08	
UBP GBU Keramasan	-	-	-	1.127,09	
UBP GBU Jambi	-	-	-	531,21	
UBP GBU Bukittinggi	-	-	-	1.232,11	
UBP GBU Bengkulu	-	-	-	875,14	
UBP GBU Mahakam	-	-	-	555,80	
UBP GBU Barito	-	-	-	181,91	
UBP GBU Tello	-	-	-	178,85	
Jumlah Total	**34.771,54**	**39.230,81**	**37.510,12**	**84.199,86**	**124,47%**



Grafik Produksi Energi Listrik (dalam GWh)
Chart of Electricity Production (in GWh)



Penjualan Energi Listrik
Electricity Sales

Jumlah penjualan energi listrik PLN Indonesia Power pada tahun 2023 sebesar 79.664,84 GWh, yaitu meningkat 121,69% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan jumlah penjualan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengalihan aset beberapa pembangkit PLN ke *subholding* PLN Indonesia Power.

Total electricity sales in 2023 was 79,664.84 GWh, which increased by 121.69% from 2022. This was particularly due to the transfer of some of PLN's power plant assets to PLN Indonesia Power as the subholding.

Tabel Penjualan Energi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit
Electricity Sales by Type of Power Plant

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
PLTU Batubara Jawa Bali Coal SPP in Java-Bali	21.404,79	22.752,99	22.067,66	41.403,74	87,62%
Non-PLTU Batubara Jawa Bali Non-Coal SPP in Java-Bali	11.860,20	14.837,11	13.867,68	22.748,54	64,04%
PLTU Batubara Luar Jawa Bali Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	9.376,36	-
Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali Non-Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	6.136,19	-
Jumlah Total	**33.264,98**	**37.590,11**	**35.935,34**	**79.664,84**	**121,69%**

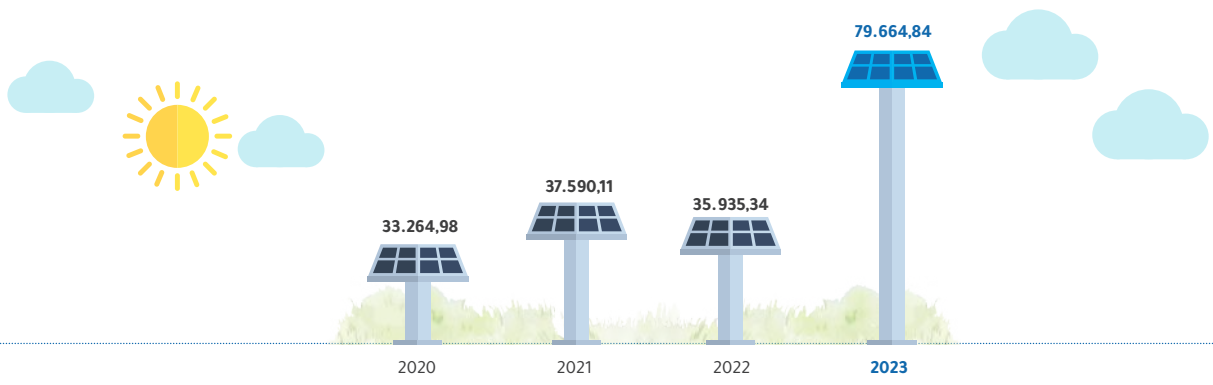
Tabel Penjualan Energi Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit
Electricity Sales by Power Generation Unit

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Unit Pembangkit Generation Unit	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
UBP GBU Suralaya	21.404,79	22.752,99	22.067,66	19.827,47	(10,15)%
UBP GBU Priok	2.808,09	2.633,31	3.355,20	9.098,81	171,19%
UBP GBU Saguling	2.635,85	2.743,96	2.592,15	2.243,58	(13,45)%
UBP GBU Kamojang	867,88	1.003,49	1.188,24	4.021,39	134,14%
UBP GBU Mrica	833,65	2.176,59	2.143,89	818,35	(61,83)%
UBP GBU Semarang	1.906,26	2.007,00	1.670,99	3.188,45	90,81%
UBP GBU Grati	1.012,52	973,12	1.176,53	1.736,32	47,58%
UBP GBU Bali	1.795,95	3.299,64	1.740,68	2.036,00	0,76%

Unit Pembangkit Generation Unit	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
UBP GBU Banten 1 Suralaya	-	-	-	2.284,26	
UBP GBU Banten 2 Labuan	-	-	-	3.763,64	
UBP GBU Banten 3 Lontar	-	-	-	6.019,82	
UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	-	-	-	6.603,83	
UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala	-	-	-	2.904,72	
UBP GBU Pangkalan Susu	-	-	-	4.111,65	
UBP GBU Labuhan Angin	-	-	-	535,43	
UBP GBU Ombilin	-	-	-	513,53	
UBP GBU Teluk Sirih	-	-	-	1.078,23	
UBP GBU Kepulauan Riau	-	-	-	68,35	
UBP GBU Sanggau	-	-	-	85,28	
UBP GBU Sintang	-	-	-	130,92	
UBP GBU Berau	-	-	-	59,58	
UBP GBU Singkawang	-	-	-	548,42	
UBP GBU Asam-Asam	-	-	-	1.674,30	
UBP GBU Barru	-	-	-	590,25	
UBP GBU Cilegon	-	-	-	1.127,02	
UBP GBU Keramasan	-	-	-	1.095,80	
UBP GBU Jambi	-	-	-	520,52	
UBP GBU Bukittinggi	-	-	-	1.224,58	
UBP GBU Bengkulu	-	-	-	861,12	
UBP GBU Mahakam	-	-	-	544,85	
UBP GBU Barito	-	-	-	176,36	
UBP GBU Tello	-	-	-	172	
Jumlah Total	**33.264,98**	**37.590,11**	**35.935,34**	**79.664,84**	**121,69%**

Grafik Penjualan Energi Listrik (dalam GWh)
Chart of Electricity Sales (in GWh)



Capacity Factor
Capacity Factor

Capacity Factor (CF) adalah persentase dari besarnya jumlah penjualan selama waktu tertentu, dibagi dengan maksimum jumlah energi yang bisa dikeluarkan pada masa periode yang sama. CF pembangkit PLN Indonesia Power adalah sebesar 51,21%, yaitu meningkat 0,32%, dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengalihan aset beberapa pembangkit PLN ke *subholding* PLN Indonesia Power.

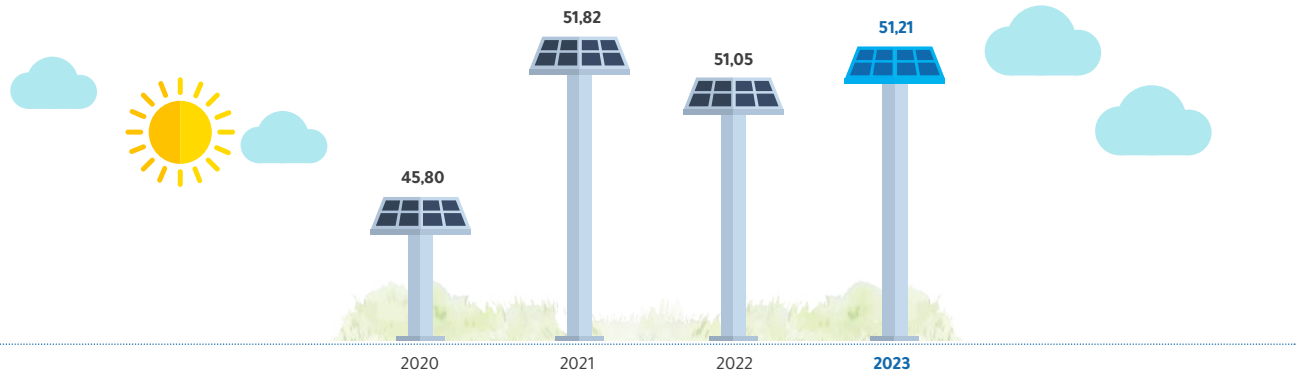
Capacity Factor (CF) is the percentage of the volume of sales within a certain period, divided by the maximum energy spent during the same period. The Company's CF was 51.21%, which was an increase by 0.32% from 2022. This was particularly due to the transfer of some of PLN's power plant assets to PLN Indonesia Power as the subholding.

Tabel CF Berdasarkan Jenis Pembangkit
CF by Type of Power Plant

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
PLTU Batubara Jawa Bali Coal SPP in Java-Bali	75,87	80,87	78,44	70,17	(10,54)%
Non-PLTU Batubara Jawa Bali Non-Coal SPP in Java-Bali	26,68	33,40	32,81	33,87	3,21%
PLTU Batubara Luar Jawa Bali Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	64,56	-
Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali Non-Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	41,27	-
Jumlah Total	**45,80**	**51,82**	**51,05**	**51,21**	**0,32%**

Grafik CF Pembangkit (dalam GWh)
Chart of Power Plant CF (in GWh)



Pemakaian Sendiri
Self-Consumption

Selain untuk disalurkan ke pembeli, ada sebagian energi listrik yang dipakai oleh Perusahaan untuk fasilitas produksi. Pemakaian Sendiri (PS) merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional pembangkit serta *losses-losses* jaringan dan trafo yang ada sebelum didistribusikan ke pembeli. Semakin rendah nilai persentase PS menunjukkan kinerja pembangkit semakin baik.

In addition to being distributed to buyer, some of the electricity generated is consumed by the Company for production facility. Self-Consumption indicates the volume of electricity used for power plant's operational activities and existing network and transformer losses prior to distributed to buyer. The lower self-consumption percentage, the better the performance of a power plant.

Pemakaian sendiri tahun 2023 adalah sebesar 4.535,02 GWh atau 5,39%, yaitu mengalami peningkatan 187,98% dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan produksi akibat pengalihan aset beberapa pembangkit PLN ke *subholding* PLN Indonesia Power.

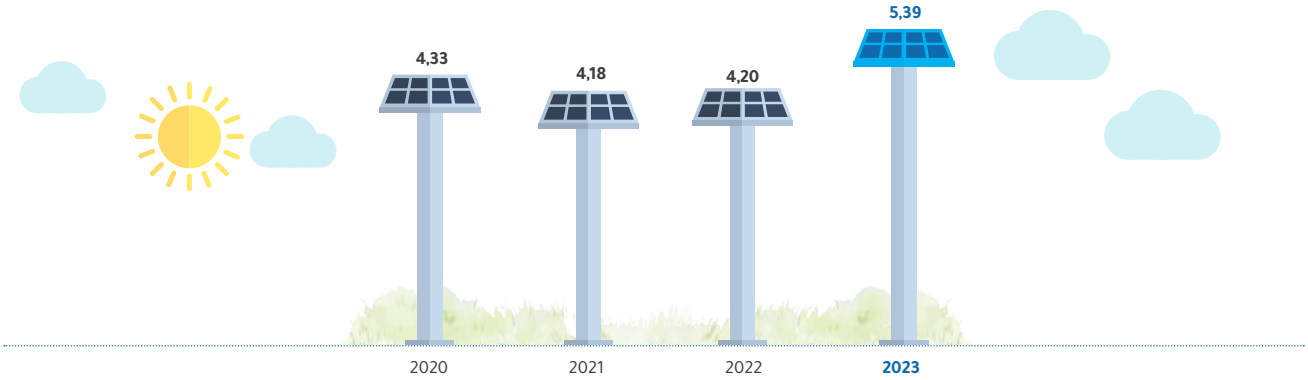
Total Self-Consumption in 2023 at 4,535.02 GWh or 5.39% was a increase by 187.98% from 2022. This was mainly due to increased production as a result of the transfer of some of PLN's power plant assets to PLN Indonesia Power as the subholding.

Total Pemakaian Sendiri Energi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit
Total Self-Consumption by Type of Power Plant

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2020		2021		2022		2023		Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	
PLTU Batubara Jawa Bali Coal SPP in Java-Bali	1.256,53	5,54%	1.305,37	5,43%	1.283,94	5,50%	2.574,52	5,85%	100,52%
Non-PLTU Batubara Jawa Bali Non-Coal SPP in Java-Bali	250,03	2,06%	335,34	2,21%	290,86	2,05%	666,29	2,85%	129,07%
PLTU Batubara Luar Jawa Bali Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	-	-	-	1.132,39	10,78%	-
Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali Non-Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	-	-	-	161,83	2,57%	-
Jumlah Total	**1.506,56**	**4,33%**	**1.640,70**	**4,18%**	**1.574,78**	**4,20%**	**4.535,02**	**5,39%**	**187,98%**

Grafik Pemakaian Sendiri Energi Listrik (%)
Chart of Electricity Self-Consumption (%)



Hubungan Produksi, Pemakaian Sendiri, dan Penjualan Energi Listrik
Relations of Electricity Sales, Self-Consumption, and Sales

Produksi energi listrik langsung disalurkan kepada pelanggan (sebagai penjualan energi listrik) setelah dikurangi pemakaian sendiri. Jumlah energi listrik yang diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem.

Produksi energi listrik tahun 2023 lebih tinggi 84.199,86 GWh, meningkat signifikan 124,47% dari tahun 2022 yaitu sebesar 37.510,12 GWh.

The produced electricity is directly distributed to customers (as electricity sales) after being reduced by self-consumption. The total of electricity produced is adjusted to the system requirements.

Total electricity production in 2023 was 84,199.86 GWh, which was a significant increase by 124.47% from 2022 at 37,510.12 GWh.

Faktor Ketersediaan: *Equivalent Availability Factor* (EAF)
Equivalent Availability Factor (EAF)

Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF). EAF menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan energi listrik. Nilai EAF berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit untuk beroperasi dengan Daya Mampu *Netto* (DMN) pada periode tertentu. Dengan demikian, semakin tinggi nilai EAF menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik. Kinerja EAF PLN Indonesia Power dibagi menjadi EAF PLTU Batubara, dan Non-PLTU Batubara.

- Nilai EAF PLTU Batubara Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 85,66%, lebih rendah 2,37% dibandingkan tahun 2022 yang terutama disebabkan oleh adanya pekerjaan inspeksi kebocoran *tube boiler*.
- Nilai EAF Non-PLTU Batubara Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 95,09%, lebih rendah 0,20% dibandingkan tahun 2022 yang terutama disebabkan *planned outage* yang lebih banyak dibandingkan tahun 2022.

The availability of power plant machineries is measured by Equivalent Availability Factor (EAF). EAF indicates the readiness of a power plant to generate electricity. EAF score functions to find out the readiness of a power plant to operate with Net Capacity in a certain period. Therefore, higher EAF score indicates better readiness of the power plant. PLN Indonesia Power EAF Performance covers the EAF for Coal and Non-Coal SPP.

- In 2023, the EAF of Coal SPP in Java-Bali was 85.66%. This was 2.37% lower than in 2022, which was mainly a result of tube boiler leakage inspection works.
- The EAF of Non-Coal SPP in Java-Bali in 2023 was 95.09%, which 0,20% lower than in 2022 mainly due to more planned outages compared to 2022.



- Nilai EAF PLTU Batubara Luar Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 77,72% lebih tinggi 7,38% dibandingkan tahun 2022 yang terutama disebabkan oleh peningkatan kesiapan pembangkit dan pelaksanaan pemeliharaan yang tepat waktu.
- Nilai EAF Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 91,78%.

- In 2023, the EAF of Coal SPP outside Java-Bali was 77.72%. This was 7.38% higher than in 2022, which was contributed by improved power plant readiness and timely maintenance works.
- The EAF of Non-Coal SPP outside Java-Bali in 2023 was 91.78%.

Tabel Nilai EAF Berdasarkan Jenis Pembangkit
EAF Score by Type of Power Plant

(dalam %) (in %)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
PLTU Batubara Jawa Bali Coal SPP in Java-Bali	87,30	87,10	87,74	85,66	(2,37)
Non-PLTU Batubara Jawa Bali Non-Coal SPP in Java-Bali	96,57	95,62	95,28	95,09	(0,20)
PLTU Batubara Luar Jawa Bali Coal SPP outside Java-Bali	74,75	74,75	72,38	77,72	7,38
Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali Non-Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	91,78	-

Faktor Gangguan: *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR)
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Untuk mengetahui faktor gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR). EFOR digunakan untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Dengan demikian, semakin rendah nilai EFOR menunjukkan keandalan unit pembangkit lebih baik dan dapat mengatasi gangguan lebih cepat. Kinerja EFOR PLN Indonesia Power dibagi menjadi EFOR PLTU Batubara, dan Non-PLTU Batubara.

- Nilai EFOR PLTU Batubara Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 3,38%, lebih tinggi 131,51% dibandingkan tahun 2022 yang terutama disebabkan oleh adanya gangguan kebocoran *tube boiler*.
- Nilai EFOR PLTU Batubara Luar Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 13,44%, lebih rendah 33,13% dibandingkan tahun 2022 yang terutama disebabkan oleh peningkatan kualitas pemeliharaan dan berkurangnya jumlah gangguan unit pembangkit.
- Nilai EFOR Non-PLTU Batubara Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 0,77%, lebih tinggi 108,11% dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan oleh adanya gangguan di PLTG Pesanggaran Unit 5 yang merupakan unit relokasi dari Grati.
- Nilai EFOR Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 5,19%

The rate of power plant machinery outage is indicated by Equivalent Forced Outage Rate (EFOR). EFOR is used to measure power plant machineries' forced outage or unreadiness to operate due to outage. Therefore, the lower EFOR, the better generation unit's reliability and the faster outages are handled. PLN Indonesia Power EFOR Performance covers the EFOR for Coal and Non-Coal SPP.

- In 2023, EFOR of Coal SPP in Java-Bali was 3.38%. This was 131.51% higher than in 2022, which was mainly caused by outages due to tube boiler leakage.
- The EFOR of Coal SPP outside Java-Bali was 13.44%. This was 33.13% lower than in 2022, which was contributed by improved maintenance quality and reduced outage frequency in power generation units.
- In 2023, the EFOR of Non-Coal SPP in Java-Bali was 0.77%, which was 108.11% higher than in 2022, caused by a disturbance at Pesanggaran GPP Unit 5, which is a relocation unit from Grati.
- The EFOR of Non-Coal SPP outside Java-Bali in 2023 was 5.19%.

Tabel Nilai EFOR Berdasarkan Jenis Pembangkit
EFOR Score by Type of Power Plant

(dalam %) (in %)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
PLTU Batubara Jawa Bali Coal SPP in Java-Bali	3,50	2,68	1,46	3,38	131,51
Non-PLTU Batubara Jawa Bali Non-Coal SPP in Java-Bali	0,41	0,58	0,37	0,77	108,11
PLTU Batubara Luar Jawa Bali Coal SPP outside Java-Bali	9,19	10,67	20,10	13,44	(33,13)
Non-PLTU Batubara Luar Jawa Bali Non-Coal SPP outside Java-Bali	-	-	-	5,19	-

Faktor Efisiensi Pembangkit: *Specific Fuel Consumption* (SFC)
Specific Fuel Consumption (SFC)

Untuk mengetahui efisiensi pembangkit diukur berdasarkan indikator *Specific Fuel Consumption* (SFC). SFC digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah pembangkit listrik dan untuk mengetahui perbandingan total konsumsi bahan bakar terhadap daya listrik yang dihasilkan (produksi bruto) dari pembangkit. Dengan demikian, semakin tinggi nilai SFC menunjukkan semakin efisien pengoperasian pembangkit. Kinerja SFC pembangkit PLN Indonesia Power dibagi menjadi SFC Batubara, Gas dan BBM. Selama tahun 2023, nilai SFC Batubara sebesar 0,6282 kg/kWh, nilai SFC Gas sebesar 0,0083 MMBTU/kWh dan nilai SFC BBM sebesar 0,2960 liter/kWh.

Power plant efficiency is indicated by Specific Fuel Consumption (SFC). SFC measures power plant efficiency and compares total fuel consumption against generated electricity (gross production) from power plants. Therefore, higher SFC indicates better power plant efficiency. The SFC at PLN Indonesia Power measures the efficiency of power plants fired by Coal, Gas, and Oil. In 2023, Coal SFC was 0.6282 kg/kWh, Gas SFC was 0.0083 MMBTU/kWh, and Oil SFC was 0.2960 liter/kWh.

SFC Batubara Coal SFC	SFC Gas Gas SFC	SFC BBM Oil SFC
0,6282 kg/kWh	0,0083 MMBTU/kWh	0,2960 liter/kWh

Kinerja Pembangkit Jasa O&M
Performance of O&M Service Power Plants

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power mengelola jasa *Operation and Maintenance* (O&M) pada 2 (dua) unit dan 1 (satu) sub unit pembangkitan.

PLN Indonesia Power manages the Operations and Maintenance (O&M) Services at two (2) power generation units and one (1) power generation sub-unit.

Daya Terpasang Pembangkit Jasa O&M
O&M Services Power Plant Installed Capacity

Daya terpasang pembangkit jasa O&M pada tahun 2023 adalah sebesar 124,00 MW.

The Installed Capacity of O&M Services power plants in 2023 was 124.00 MW.

Tabel Daya Terpasang Unit Pembangkit Jasa O&M
Installed Capacity of O&M Service Power Generation Unit

(dalam MW) (in MW)

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Daya Terpasang Installed Capacity
1.	UBP GBU Jeranjang	90,00
2.	UBP GBU Holtekamp	24,00
3.	UP GU Ulumbu	10,00
Jumlah Total		**124,00**

EAF Pembangkit Jasa O&M
EAF of O&M Service Power Plants

Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik.

- Nilai EAF Pembangkit Jasa O&M Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 97,05%, berhasil lebih tinggi 6,59% dibandingkan tahun 2022 yang menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik.
- Nilai EAF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 82,51%, lebih tinggi 10,98% dibandingkan tahun 2022.

Higher EAF score indicates better readiness of the power plant.

- The EAF of O&M Service Power Plants in Java-Bali in 2023 was 97.05%, which was 6.59% higher than in 2022. This indicates improved power plant readiness.
- In 2023, EAF of O&M Service Power Plants outside Java-Bali was 82.51%. This was 10.98% higher than in 2022.



Tabel EAF Pembangkit Jasa O&M
EAF of O&M Service Power Plants

(dalam %) (in %)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
Pembangkit Jasa O&M Jawa Bali O&M Service Power Plants in Java-Bali	89,80	89,84	91,05	-	6,59
Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Bali O&M Service Power Plants outside Java-Bali	78,61	77,80	74,35	82,51	10,98

EFOR Pembangkit Jasa O&M
EFOR of O&M Service Power Plants

Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan keandalan unit pembangkit lebih baik dan dapat mengatasi gangguan lebih cepat.

- Nilai EFOR Pembangkit Jasa O&M Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 0,93%, lebih tinggi 43,08% dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan karena gangguan yang mengakibatkan unit harus turun beban (*Forced Derating*) atau keluar dari sistem (*Forced Outage*).
- Nilai EFOR Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 4,05%, lebih rendah 78,53% dibandingkan tahun 2022.

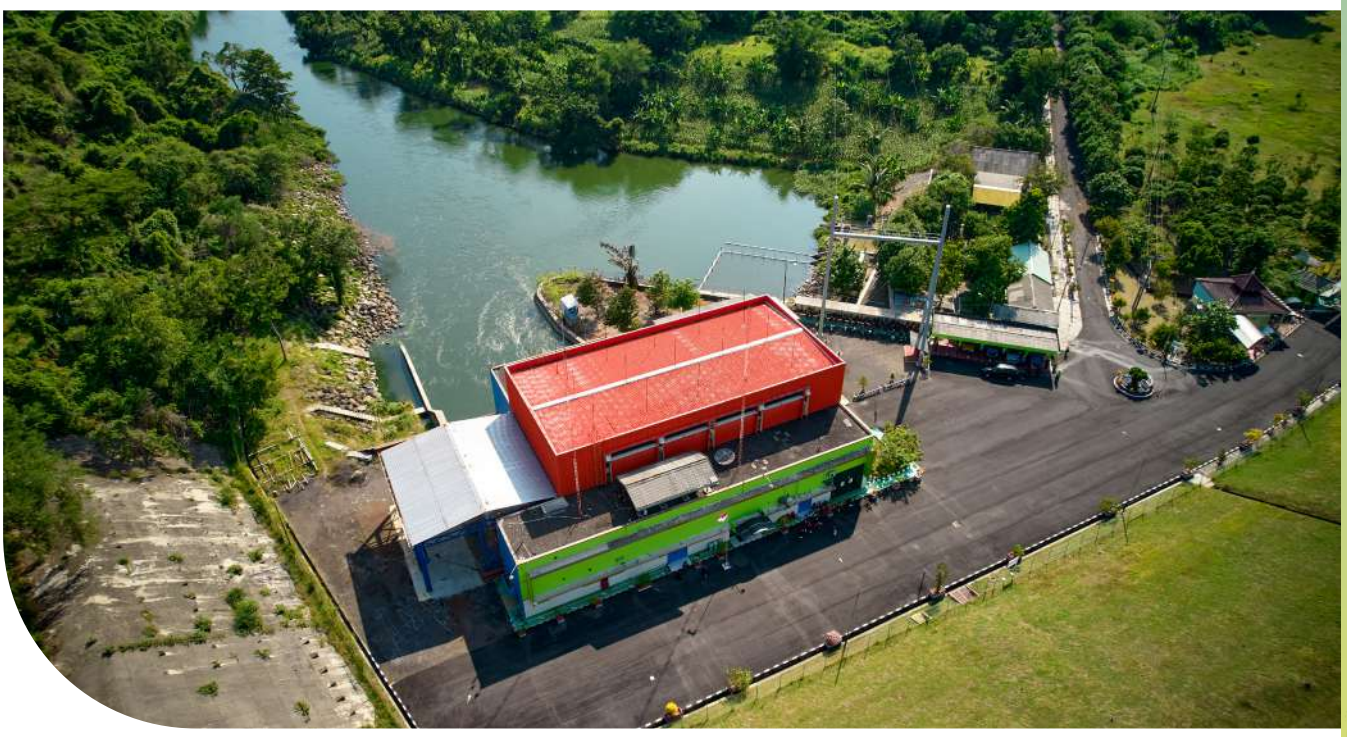
The lower EFOR, the better generation unit's reliability and the faster outages are handled.

- The EFOR of O&M Service Power Plants in Java-Bali in 2023 was 0.93%. this was 43.08% higher than in 2022 due to forced derating and forced outage.
- In 2023, EFOR of O&M Service Power Plants outside Java-Bali was 4.05%. This was 78.53% lower than in 2022.

Tabel EFOR Pembangkit Jasa O&M
EFOR of O&M Service Power Plants

(dalam %) (in %)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
Pembangkit Jasa O&M Jawa Bali O&M Service Power Plants in Java-Bali	2,69	2,10	0,65	-	43,08
Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Bali O&M Service Power Plants outside Java-Bali	6,16	3,94	18,86	4,05	(78,53)



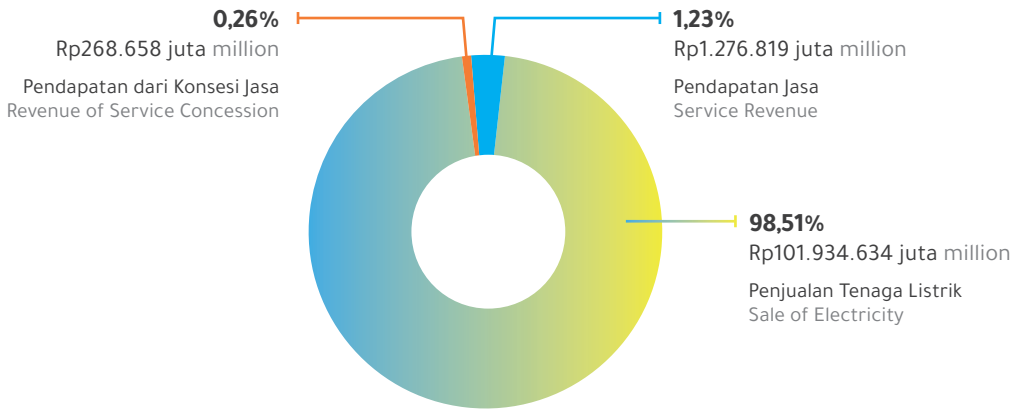
Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

Pendapatan Operasi Per Segmen
Revenue by Segment

Pendapatan usaha PLN Indonesia Power terdiri dari penjualan tenaga listrik, pendapatan dari konsesi jasa dan pendapatan jasa. Pendapatan usaha tahun 2023 adalah sebesar Rp103,48 triliun yaitu meningkat 27,61% dibandingkan tahun 2022.

PLN Indonesia Power's Revenue comprises sale of electricity, revenue of service concession, and service revenue. The Revenues in 2023 were recorded at Rp103.48 trillion, which improved 27.61% from 2022.

Komposisi Pendapatan Usaha Per Segmen Tahun 2023
Composition of Revenue by Segment in 2023



Kontribusi Kinerja Keuangan dari Anak Perusahaan
Contribution of Financial Performance from Subsidiaries

Laba komprehensif PLN Indonesia Power juga dikontribusi dari kinerja Anak Perusahaan. Berikut merupakan profitabilitas Anak Perusahaan PLN Indonesia Power tahun 2023:

The performances of PLN Indonesia Power's subsidiaries affect their comprehensive profit or loss. The followings are PLN Indonesia Power's subsidiaries profitabilities in 2023:

Tabel Laba Anak Perusahaan Tahun 2023 (dalam jutaan Rupiah)
Profit (Loss) from Subsidiaries in 2023 (in million Rupiah)

No	Nama Anak Perusahaan Name of Subsidiary	Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	Kepemilikan PLN Indonesia Power Ownership of PLN Indonesia Power	Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Terkonsolidasi Consolidated Comprehensive Income for the Year
1.	ADC: PT Artha Daya Coalindo	76.792	80,00%	61.434
2.	CDB: PT Cogindo DayaBersama	90.424	99,99%	90.415
3.	IRP: PT Indo Ridlatama Power	(24.004)	90,00%	(21.604)
4.	PLN IPRen: PT PLN Indonesia Power Renewables	847.969	99,99%	847.884

Uraian singkat mengenai kinerja Anak Perusahaan telah dijelaskan pada bab Profil Perusahaan bagian Sekilas tentang Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi dalam Laporan Tahunan ini.

The performance overview of the Subsidiaries can be found in the chapter of Company Profile, section of Performance Overview of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates in this Annual Report.

Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review

Uraian kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Akuntan Publik (AP) Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2024 mendapatkan opini **"wajar dalam semua hal yang material"**. Selanjutnya, Laporan Keuangan lengkap beserta catatannya disajikan pada bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini.

The details of the financial performance are supplied according to the Company Financial Statements prepared and presented according to the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The Financial Statements which ended on December 31, 2023 have been audited by the Public Accounting Firm KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan and Public Accountant Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA. The audit report was issued on April 05, 2024 with **"fairly, in all material respects"** opinion. Further details on the Financial Statements and their notes are presented in a separated section of this Annual Report.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Statements of Consolidated Financial Position

Posisi keuangan PLN Indonesia Power tahun 2023 terdiri dari jumlah aset yang meningkat menjadi Rp386,20 triliun, liabilitas meningkat menjadi Rp40,75 triliun dan ekuitas meningkat menjadi Rp345,46 triliun.

PLN Indonesia Power's financial position in 2023 saw some increase in total assets to Rp386.20 trillion, liabilities to Rp40.75 trillion, and equity to Rp345.46 trillion.

Tabel Posisi Keuangan
Financial Position

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Jumlah Aset Total Assets	200.011.263	193.713.794	374.409.423	386.200.863	11.791.440	3,15%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	16.067.595	15.312.157	31.387.319	40.745.537	9.358.218	29,82%
Jumlah Ekuitas Total Equity	183.943.668	178.401.637	343.022.104	345.455.326	2.433.222	0,71%

*) Disajikan kembali *) As restated

Aset
Assets

Jumlah aset PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp386,20 triliun, yaitu meningkat Rp11,79 triliun atau 3,15% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan aset tetap dan piutang usaha.

The Total Assets of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp386.20 trillion, an increase by Rp11.79 trillion or 3.15% from 2022. This was mainly contributed by the increase in Property, Plant, and Equipment and Trade Receivables.

Tabel Aset
Assets

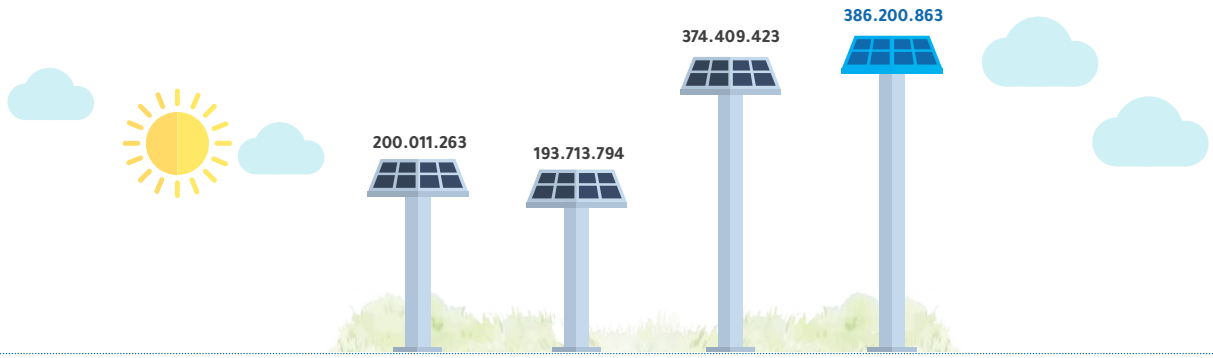
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	37.189.744	34.232.232	38.748.404	62.191.430	23.443.026	60,50%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	162.821.519	159.481.562	335.661.019	324.009.433	(11.651.586)	(3,47)%
Jumlah Aset Total Assets	**200.011.263**	**193.713.794**	**374.409.423**	**386.200.863**	**11.791.440**	**3,15%**

*) Disajikan kembali *) As restated



Grafik Aset (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Assets (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Aset Lancar
Current Assets

Aset lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp62,19 triliun, yaitu meningkat Rp23,44 triliun atau 60,50% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan piutang usaha.

The Current Assets of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp62.19 trillion, an increase by Rp23.44 trillion or 60.50% from 2022. This was mainly contributed by the increase in Trade Receivables.

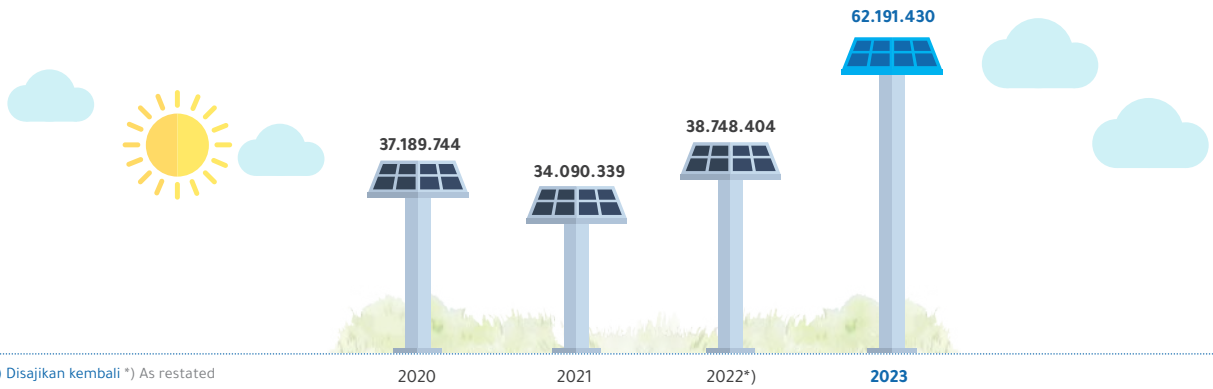
Tabel Aset Lancar
Current Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	2.650.785	2.766.128	3.682.111	3.535.896	(146.215)	(3,97)%
Piutang usaha Trade Receivables	30.775.556	25.665.554	27.868.459	52.221.587	24.353.128	87,39%
Piutang lain-lain Other Receivables	102.853	343.128	669.231	384.208	(285.023)	(42,59)%
Persediaan Inventories	1.461.003	2.663.079	4.975.336	5.283.975	308.639	6,20%
Pajak dibayar di muka Prepaid Taxes	649.771	566.327	396.009	246.043	(149.966)	(37,87)%
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid Expenses and Advances	11.343	66.638	166.212	399.882	233.670	140,59%
Aset keuangan konsesi jasa Financial Assets of Service Concession	1.538.433	2.019.485	991.046	119.839	(871.207)	(87,91)%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**37.189.744**	**34.090.339**	**38.748.404**	**62.191.430**	**23.443.026**	**60,50%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Aset Lancar (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Current Assets (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp3,54 triliun, yaitu lebih rendah Rp146,22 miliar atau 3,97% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan bank dikarenakan adanya pembayaran kepada *vendor*.

Cash and Cash Equivalents

The Cash and Cash Equivalents of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp3.54 trillion, a decline by Rp146.22 billion or 3.97% from 2022. This was mainly contributed by a decline in cash in bank due to payment to vendors.

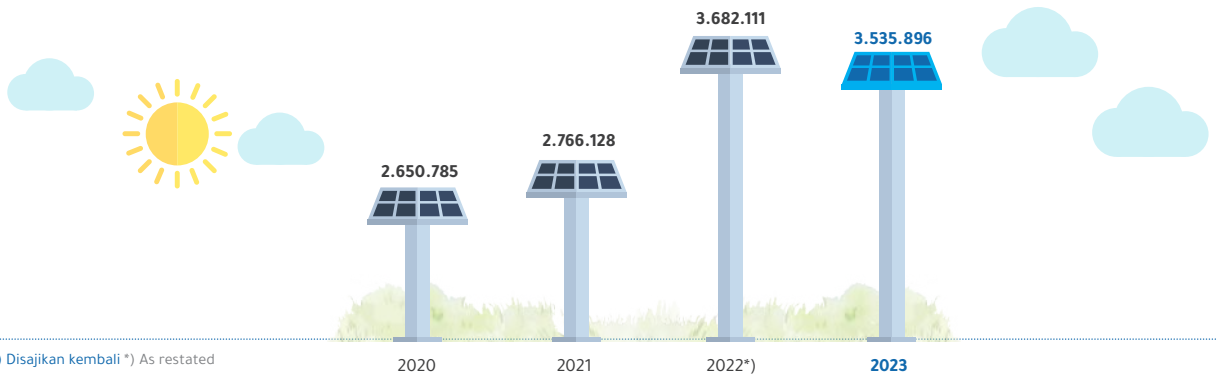
Tabel Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Kas Cash	**86**	**35**	**67**	**46**	**(21)**	**(31,34)%**
Bank:						
Pihak berelasi Related Parties	2.110.939	2.217.210	3.588.538	3.519.715	(68.823)	(1,92)%
Pihak ketiga Third Parties	1.660	1.557	54.947	10.635	(44.312)	(80,64)%
Jumlah Kas dan Bank Total Cash and Bank	**2.112.685**	**2.218.802**	**3.643.552**	**3.530.396**	**(113.156)**	**(3,11)%**
Setara Kas - Deposito Berjangka: Cash Equivalents - Term Deposits:						
Pihak berelasi Related Parties	538.100	547.326	38.559	5.500	(33.059)	(85,74)%
Jumlah Setara Kas Total Cash Equivalents	**538.100**	**547.326**	**38.559**	**5.500**	**(33.059)**	**(85,74)%**
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalents	**2.650.785**	**2.766.128**	**3.682.111**	**3.535.896**	**(146.215)**	**(3,97)%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Kas dan Setara Kas (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Cash and Cash Equivalents (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Piutang Usaha

Piutang usaha PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp52,22 triliun, yaitu meningkat Rp24,35 triliun atau 87,39% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan piutang penjualan tenaga listrik sebesar Rp23,98 triliun karena bertambahnya unit *Holding Subholding* (HSH).

Trade Receivables

The Trade Receivables of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp52.22 trillion, an increase by Rp24.35 trillion or 87.39% from 2022. This was mainly due to the increase in receivables from electricity sales of Rp23.98 trillion with the addition of Holding-Subholding (HSH) units.

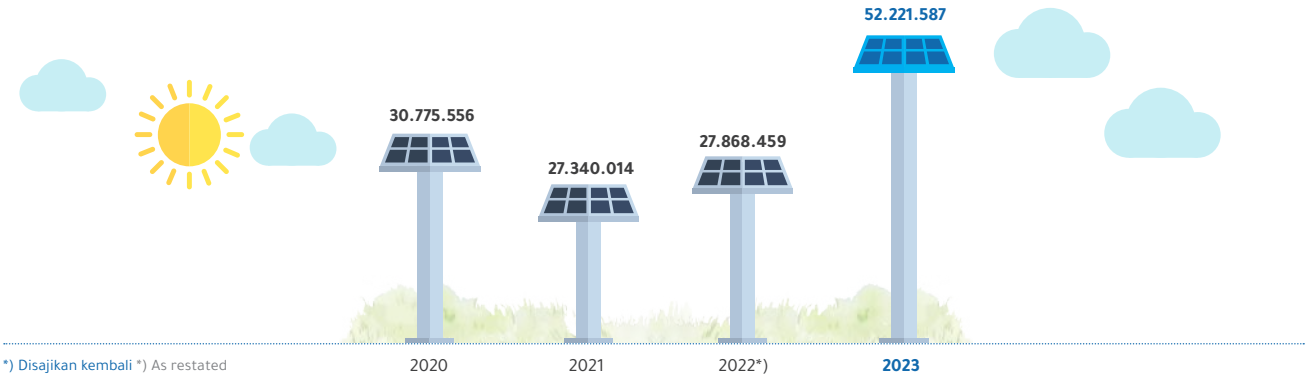
Tabel Piutang Usaha
Trade Receivables

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Pihak berelasi Related Parties	30.741.055	27.248.591	27.789.360	52.135.921	24.346.561	87,61%
Pihak ketiga Third Parties	78.152	136.474	121.167	118.793	(2.374)	(1,96)%
Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for Impairment Losses	(43.651)	(45.051)	(39.603)	(33.127)	6.476	(16,35)%
Pihak ketiga - bersih Third Parties - Net	34.501	91.423	81.564	85.666	4.102	5,03%
Jumlah Piutang Usaha Total Trade Receivables	**30.775.556**	**27.340.014**	**27.868.459**	**52.221.587**	**24.353.128**	**87,39%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Piutang Usaha (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Trade Receivables (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Piutang Lain-lain - Bagian Lancar

Piutang lain-lain - bagian lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp384,21 miliar, yaitu lebih rendah Rp285,02 miliar atau 42,59% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya pelunasan sebagian piutang.

Other Receivables - Current Portion

Other Receivables - Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp384.21 billion, a decline by Rp285.02 billion or 42.59% from 2022. This was particularly due to the partial repayment of receivables.

Persediaan

Persediaan PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp5,28 triliun, yaitu meningkat Rp308,64 miliar atau 6,20% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan persediaan bahan bakar batubara.

Inventories

The Inventories of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp5.28 trillion, an increase by Rp308.64 trillion or 6.20% from 2022. This was particularly contributed by the increase in coal fuel supply.

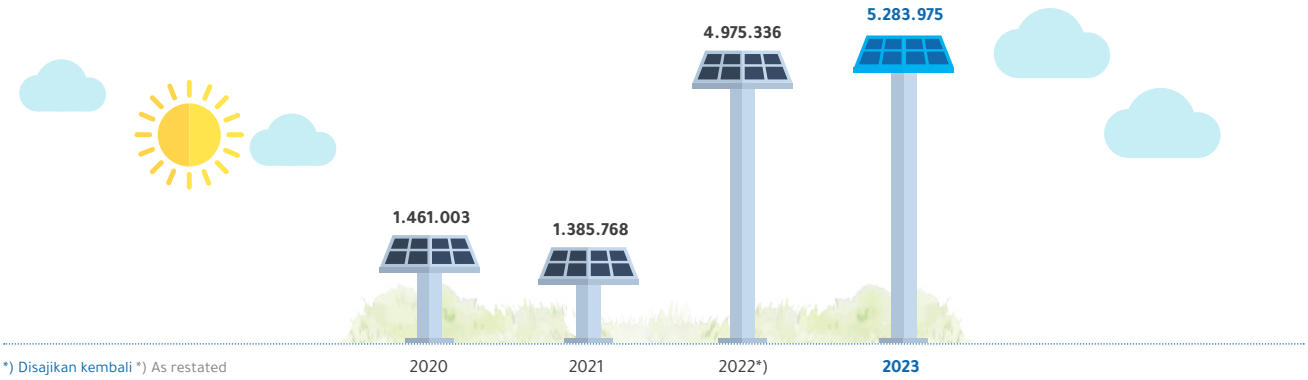
Tabel Persediaan
Inventories

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Bahan bakar dan pelumas Fuel and Lubricants	1.308.586	1.348.058	4.770.409	5.269.286	498.877	10,46%
Suku cadang Spare Parts	168.948	162.400	444.309	358.323	(85.986)	(19,35)%
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang Allowance for Decline in Value of Inventories and Inventory Obsolescence	(16.531)	(124.689)	(239.382)	(343.634)	(104.252)	43,55%
Jumlah Persediaan Total Inventories	**1.461.003**	**1.385.768**	**4.975.336**	**5.283.975**	**308.639**	**6,20%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Persediaan (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Inventories (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Pajak Dibayar di Muka - Bagian Lancar

Pajak dibayar di muka - bagian lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp246,04 miliar, yaitu lebih rendah Rp149,97 miliar atau 37,87% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan keputusan hasil pemeriksaan pajak di tahun 2023.

Prepaid Taxes - Current Portion

Prepaid Taxes - Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp246.04 billion, a decline by Rp149.97 billion or 37.87% from 2022. This was particularly due to the acceptance of tax audit result decision in 2023.

Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka - Bagian Lancar

Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp399,88 miliar, yaitu meningkat Rp233,67 miliar atau 140,59% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong atas premi asuransi aset akibat penambahan aset baru dan adanya uang muka pembelian material pembangkit.

Prepaid Expenses and Advances - Current Portion

Prepaid Taxes - Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp399.88 billion, an increase by Rp233.67 billion or 140.59% from 2022. This was particularly driven by asset insurance premiums due to the addition of new assets and advance purchase of power plant materials.

Aset Keuangan dari Proyek Konsesi - Bagian Lancar

Aset keuangan dari proyek konsesi - bagian lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp119,84 miliar, yaitu lebih rendah Rp871,21 miliar atau 87,91% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penghentian penerapan ISAK 16 - Konsesi jasa atas Perubahan perjanjian PJBTL PLTU Suralaya 1-7 dari 30 tahun menjadi 10 tahun.

Financial Assets of Concession Project - Current Portion

Financial Assets of Concession Project - Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp119.84 billion, a decline by Rp871.21 billion or 87.91% from 2022. This was mainly due to the derecognition of Service Concession (ISAK 16) as a result of the amendment to Power Purchase Agreement (PPA) of Suralaya 1-7 SPP term from 30 years to 10 years.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Aset tidak lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp324,01 triliun, yaitu lebih rendah Rp11,65 triliun atau 3,47% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh aset keuangan dari konsesi jasa yang menurun karena penghentian penerapan ISAK 16 - konsesi jasa atas Perubahan perjanjian PJBTL PLTU Suralaya 1-7 dari 30 tahun menjadi 10 tahun.

Non-Current Assets of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp324.01 trillion, a decline by Rp11.65 trillion or 3.47% from 2022. This was mainly contributed by the decline in financial assets of service concession due to the derecognition of Service Concession (ISAK 16) as a result of the amendment to Power Purchase Agreement (PPA) of Suralaya 1-7 SPP term from 30 years to 10 years.

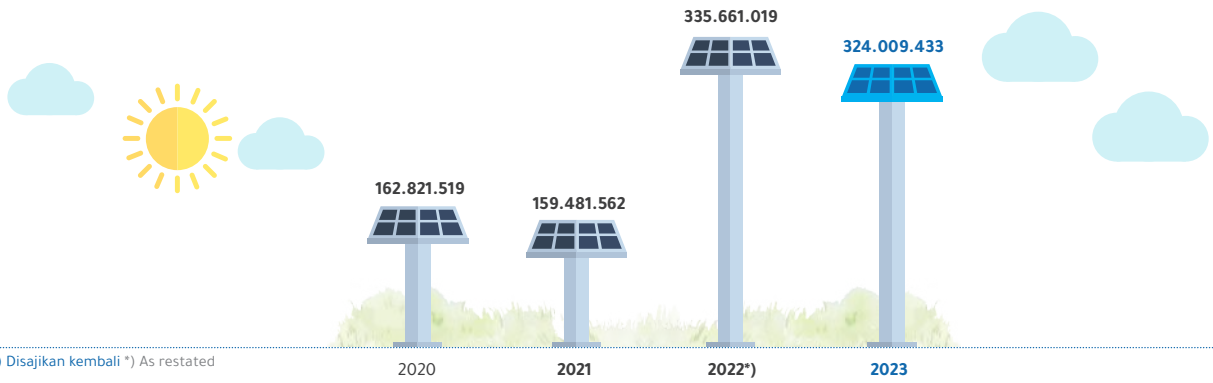
Tabel Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Aset tetap Property, Plant, and Equipment	109.098.467	107.729.655	282.537.883	307.625.776	25.087.893	8,88%
Aset hak guna Right-of-Use Assets	3.904.393	3.307.776	3.447.465	5.445.976	1.998.511	57,97%
Properti investasi Investment Properties	139.452	143.969	93.814	94.405	591	0,63%
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Investment in Associates and Joint Ventures	3.232.658	4.321.545	6.946.638	7.835.695	889.057	12,80%
Aset pajak tangguhan Deferred Tax Assets	912.713	19.493	22.150	22.240	90	0,41%
Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes	805.204	1.242.799	907.902	720.965	(186.937)	(20,59)%
Piutang lain-lain Other Receivables	553.386	516.195	531.004	915.472	384.468	72,40%
Biaya dibayar di muka Prepaid Expenses	43.962	41.411	179.863	41.563	(138.300)	(76,89)%
Aset keuangan dari konsesi jasa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Financial Assets of Service Concession - Less: Current Maturities	43.791.382	41.771.897	40.780.851	1.028.949	(39.751.902)	(97,48)%
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Restricted Cash in Banks	-	1.117	-	-	-	-
Aset tidak lancar lain Other Non-Current Assets	339.902	385.705	213.449	278.392	64.943	30,43%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**162.821.519**	**159.481.562**	**335.661.019**	**324.009.433**	**(11.651.586)**	**(3,47)%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Aset Tidak Lancar (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Non-Current Assets (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Aset Tetap

Aset tetap PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp307,63 triliun, yaitu meningkat Rp25,09 triliun atau 8,88% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan investasi, walaupun juga terdapat penyusutan normal tahun berjalan.

Property, Plant, and Equipment

The value of Property, Plant, and Equipment of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp307.63 trillion, an increase by Rp25.09 trillion or 8.88% from 2022. This was particularly due to the addition of investment, despite normal depreciation in the current year.

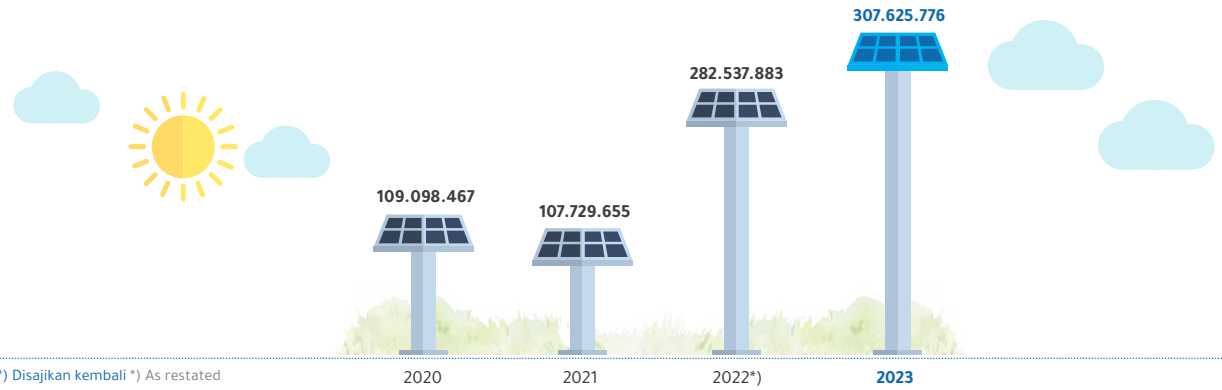
Tabel Aset Tetap
Property, Plant, and Equipment

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Tanah Land	17.237.100	17.383.151	17.449.448	17.832.992	383.544	2,20%
Bangunan, waduk, dan prasarana Buildings, Reservoir, and Infrastructure	6.748.707	6.966.675	24.745.236	24.263.835	(481.401)	(1,95)%
Instalasi dan mesin pembangkit Installations and Power Plant	75.871.836	72.315.486	224.817.615	249.946.105	25.128.490	11,18%
Peralatan transmisi Transmission Equipment	2.943.889	4.303.218	4.298.410	4.995.271	696.861	16,21%
Instalasi telekomunikasi Telecommunication Installation	108.268	94.492	143.945	155.485	11.540	8,02%
Perlengkapan umum General Equipment	403.396	343.845	716.286	708.206	(8.080)	(1,13)%
Kendaraan bermotor Motor Vehicles	24.558	16.675	102.993	98.139	(4.854)	(4,71)%
Material cadang Spare Parts	431.600	251.127	404.017	518.733	114.716	28,39%
Aset dalam pembangunan Construction in Progress	5.071.481	5,933,624	8.762.242	9.009.609	247.367	2,82%
Aset tidak digunakan dalam operasi Assets not Used in Operations	257.633	132.049	1.190.511	190.221	(1.000.290)	(84,02)%
Penyisihan untuk penurunan nilai Provision for Impairment	3,619	10,687	92.820	92.820	-	-
Jumlah Aset Tetap Total Property, Plant, and Equipment	**109.098.467**	**107.729.655**	**282.537.883**	**307.625.776**	**25.087.893**	**8,88%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Aset Tetap (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Property, Plant, and Equipment (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Aset Hak Guna

Aset hak guna PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp5,45 triliun, yaitu meningkat Rp2,00 triliun atau 57,97% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan kontrak sewa aset hak guna di tahun 2023.

Right-of-Use Assets

The value of Right-of-Use Assets of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp5.45 trillion, an increase by Rp2.00 trillion or 57.97% from 2022. This was particularly contributed by the increasing number of right-of-use assets lease contracts in 2023.

Properti Investasi

Properti investasi PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp95,41 miliar, yaitu meningkat Rp591,00 juta atau 0,63% dari tahun 2022. Hal ini sesuai dengan penilaian kembali di tahun 2023 oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Investment Properties

Investment Properties of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp95.41 billion, an increase by Rp591.00 million or 0.63% from 2022. This was in line with the re-assessment performed by the Office of Public Appraisal Services in 2023.

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp7,84 triliun, yaitu meningkat Rp889,06 miliar atau 12,80% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pengakuan laba *Joint Venture* (JV) pada PT Indo Raya Tenaga atas *revenue construction* (ISAK 16).

Investment in Associates and Joint Ventures

Investment in Associates and Joint Ventures of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp7.84 trillion, an increase by Rp889.06 billion or 12.80% from 2022. This was mainly contributed by the recognition of Joint Venture (JV) profits in PT Indo Raya Tenaga of revenue construction (ISAK 16).

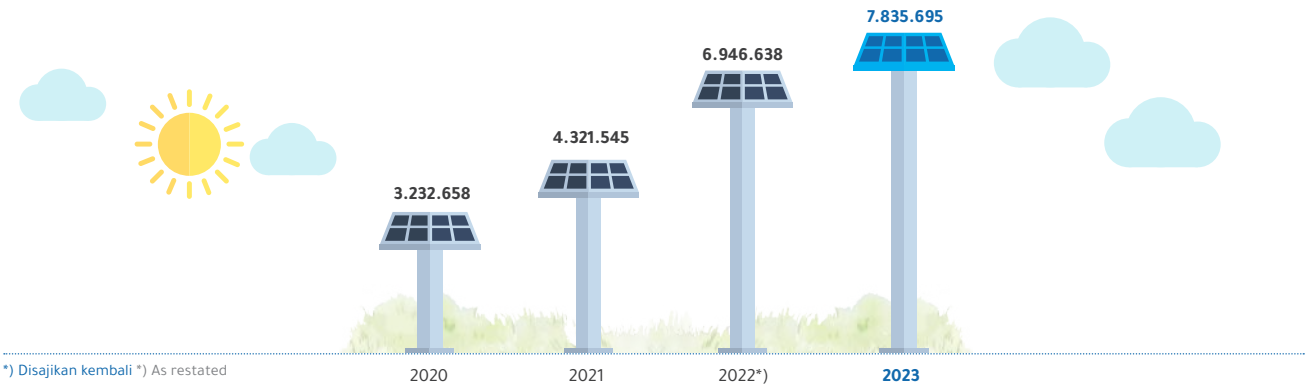
Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Investment in Associates and Joint Ventures

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Entitas Asosiasi Associates						
PT Indo Pusaka Berau	115.644	121.953	122.602	126.174	3.572	2,91%
PT Prima Layanan Suku Cadang	101.327	103.323	118.178	141.576	23.398	19,80%
Entitas Ventura Bersama Joint Ventures						
PT Rajamandala Electric Power	120.311	125.627	142.903	146.743	3.840	2,69%
PT Perta Daya Gas	40.341	55.954	62.992	79.208	16.216	25,74%
PT GCL Indotenaga	420.643	613.580	796.983	854.342	57.359	7,20%
PT Indo Raya Tenaga	2.426.336	3.292.872	5.693.459	6.444.894	751.435	13,20%
PT Maxpower Cogindo Batam	8.236	8.236	9.521	12.290	2.769	29,08%
PT Trina Mas Agra Indonesia	-	-	-	30.468	30.468	100,00%
Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Total Investment in Associates and Joint Ventures	**3.232.658**	**4.321.545**	**6.946.638**	**7.835.695**	**889.057**	**12,80%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Investment in Associates and Joint Ventures (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp22,34 miliar yaitu, meningkat Rp90,00 juta atau 0,41%% dari tahun 2022. Nilai tersebut atas perhitungan pajak tangguhan Anak Perusahaan.

Deferred Tax Assets

Deferred Tax Assets of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp22.34 billion, an increase by Rp90.00 million or 0.41% from 2022. This was due to the calculation of deferred taxes of Subsidiaries.

Pajak Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar

Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp720,97 miliar, yaitu lebih rendah Rp186,94 miliar atau 20,59% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan hasil keputusan pemeriksaan pajak di tahun 2023.

Prepaid Taxes - Non-Current Portion

Prepaid Taxes - Non-Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp720.97 billion, a decline by Rp186.94 billion or 20.59% from 2022. This was particularly due to the acceptance of tax audit result decision in 2023.

Piutang Lain-lain - Bagian Tidak Lancar

Piutang lain-lain - bagian tidak lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp915,47 miliar, yaitu meningkat Rp384,47 miliar atau 72,40% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pinjaman kepemilikan rumah untuk pegawai.

Other Receivables - Non-Current Portion

Other Receivables - Non-Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp915.47 billion, an increase by Rp384.47 billion or 72.40% from 2022. This was particularly due to the home ownership loans for employees.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp41,56 miliar, yaitu lebih rendah Rp138,30 miliar atau 76,89% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kapitalisasi proyek baru ke aset tetap.

Prepaid Expenses

Prepaid Expenses of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp41.56 billion, a decline by Rp138.30 billion or 76.89% from 2022. This was particularly due to the capitalization of new projects into property, plant, and equipment.

Aset Keuangan dari Proyek Konsesi - Bagian Tidak Lancar

Aset keuangan dari proyek konsesi - bagian tidak lancar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp1,03 triliun, yaitu lebih rendah Rp39,75 triliun atau 97,48% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penghentian penerapan ISAK 16 - konsesi jasa atas perubahan perjanjian PJBTL PLTU Suralaya 1-7 dari 30 tahun menjadi 10 tahun.

Financial Assets of Concession Project - Non-Current Portion

Financial Assets of Concession Project - Non-Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp1.03 trillion, a decline by Rp39.75 trillion or 87.91% from 2022. This was mainly due to the derecognition of Service Concession (ISAK 16) as a result of the amendment to Power Purchase Agreement (PPA) of Suralaya 1-7 SPP term from 30 years to 10 years.

Aset Tidak Lancar Lain

Aset tidak lancar lain PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp278,39 miliar, yaitu meningkat Rp64,94 miliar atau 30,43% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan biaya ditangguhkan atas proyek baru dan perangkat lunak.

Other Non-Current Assets

Other Non-Current Assets of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp278.39 billion, an increase by Rp64.94 billion or 30.43% from 2022. This was particularly contributed by the increase in deferred expense on new projects and software.

Liabilitas
Liabilitas

Jumlah liabilitas PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp40,75 triliun, yaitu meningkat Rp9,36 triliun atau 29,82% dari tahun 2022.

Total Liabilities of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp40.75 trillion, an increase by Rp9.36 trillion or 29.82% from 2022.

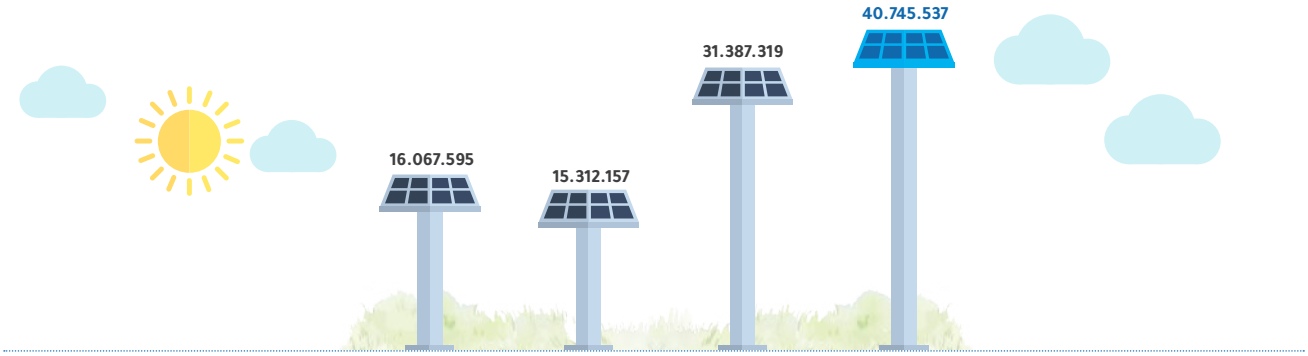
Tabel Liabilitas
Liabilities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	7.062.252	5.894.646	8.155.329	12.620.923	4.465.594	54,76%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	9.005.343	9.417.511	23.231.990	28.124.614	4.892.624	21,06%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**16.067.595**	**15.312.157**	**31.387.319**	**40.745.537**	**9.358.218**	**29,82%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Liabilitas (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Liabilities (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Liabilitas jangka pendek PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp12,62 triliun, yaitu meningkat Rp4,47 triliun atau 54,76% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan utang usaha.

Current Liabilities of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp12.62 trillion, an increase by Rp4.47 trillion or 54.76% from 2022. This was due to the increase in Trade Payables.

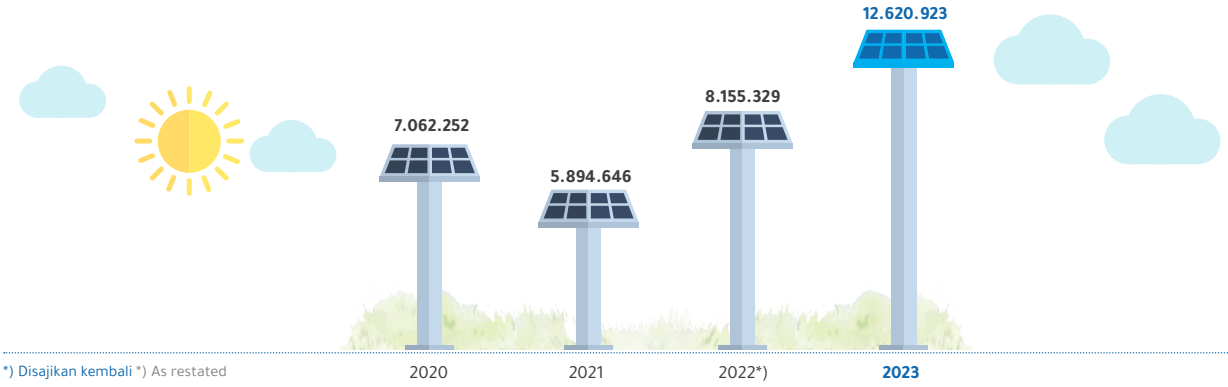
Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Utang usaha Trade Payables	4.981.366	3.608.941	5.902.626	9.661.808	3.759.182	63,69%
Utang lain-lain Other Payables	-	-	595	-	(595)	(100,00)%
Utang pajak Taxes Payable	362.874	346.773	519.307	886.643	367.336	70,74%
Utang pajak penghasilan badan Corporate Income Tax Payables	32.429	3.098	16.591	29.541	12.950	78,05%
Beban yang masih harus dibayar Accrued Expenses	843.976	319.998	279.960	479.540	199.580	71,29%
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Current Maturities of Long-term Liabilities						
Liabilitas sewa Lease Liabilities	605.038	670.239	453.709	654.594	200.885	44,28%
Pinjaman dari pemegang saham Loans from a Shareholder	-	254.347	277.929	233.007	(44.922)	(16,16)%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Short-term Employee Benefit Liabilities	236.569	691.250	704.612	675.790	(28.822)	(4,09)%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**7.062.252**	**5.894.646**	**8.155.329**	**12.620.923**	**4.465.594**	**54,76%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Liabilitas Jangka Pendek (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Current Liabilities (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Utang Usaha

Utang usaha PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp9,66 triliun, yaitu meningkat Rp3,76 triliun atau 63,69% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh akrual pekerjaan yang telah selesai di tahun 2023.

Trade Payables

Trade Payables of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp9.66 trillion, an increase by Rp3.76 trillion or 63.69% from 2022. This was particularly contributed by the completion of accrued works in 2023.

Utang Pajak

Utang pajak PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp886,64 miliar, yaitu meningkat Rp367,34 miliar atau 70,74% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh PPN wapu dan PPh 21 karyawan bulan Desember yang belum disetorkan.

Taxes Payable

The Taxes Payable of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp886.64 billion, an increase by Rp367.34 billion or 70.74% from 2022. This was particularly due to outstanding Collectable VAT and Income Tax 21 - Employee per December.

Utang Pajak Penghasilan Badan

Utang pajak penghasilan badan PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp29,54 miliar, yaitu meningkat Rp12,95 miliar atau 78,05% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pajak penghasilan badan pada Anak Perusahaan.

Corporate Income Tax Payables

The Corporate Income Tax Payables of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp29.54 billion, an increase by Rp12.95 billion or 78.05% from 2022. This was mainly due to the increase in Corporate Income Tax in Subsidiaries.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp479,54 miliar, yaitu meningkat Rp199,58 miliar atau 71,29% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh akrual pekerjaan tahun 2023 yang telah selesai.

Accrued Expenses

Accrued Expenses of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp479.54 billion, an increase by Rp199.58 billion or 71.29% from 2022. This was particularly contributed by the completion of accrued works in 2023.

Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun PLN Indonesia Power terdiri dari liabilitas sewa - bagian jangka pendek, pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek, dan liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek.

Current Maturities of Long-term Liabilities

Current Maturities of Long-term Liabilities of PLN Indonesia Power comprise Lease Liabilities - Current Portion, Loans from a Shareholder - Current Portion, and Employee Benefit Liabilities - Current Portion.

Liabilitas sewa - bagian jangka pendek PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp654,59 miliar, yaitu meningkat Rp200,89 miliar atau 44,28% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan kontrak sewa hak guna baru di tahun berjalan.

Lease Liabilities - Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp654.59 billion, an increase by Rp200.89 billion or 44.28% from 2022. This was particularly contributed by the addition of new right-of-use lease contracts in 2023.

Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp233,01 miliar, yaitu lebih rendah Rp44,92 miliar atau 16,16% dibandingkan tahun 2022.

Loans from a Shareholder - Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp233.01 billion, a decline by Rp44.92 billion or 16.16% from 2022.

Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp675,79 miliar, yaitu lebih rendah Rp28,82 miliar atau 4,09% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa asumsi dalam perhitungan aktuaria.

Employee Benefit Liabilities - Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp675.79 billion, a decline by Rp28.82 billion or 4.09% from 2022. This was mainly affected by several assumptions in actuary calculation.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp28,12 triliun yaitu meningkat Rp4,89 triliun atau 21,06% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan utang pajak tangguhan dan utang sewa hak guna jangka panjang.

Non-Current Liabilities of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp28.12 trillion, an increase by Rp4.89 trillion or 21.06% from 2022. This was mainly due to the increase in deferred tax payables and non-current right-of-use lease payables.

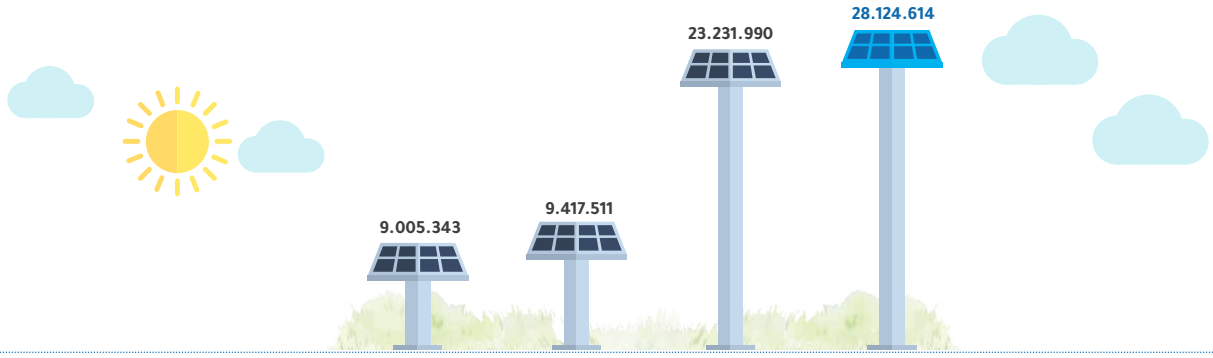
Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Liabilitas pajak tangguhan Deferred Tax Liabilities	945.199	1.776.220	15.642.571	17.904.528	2.261.957	14,46%
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Long-term Liabilities - Less: Current Maturities						
Liabilitas sewa Lease Liabilities	3.430.755	2.884.932	2.552.006	4.471.612	1.919.606	75,22%
Pinjaman dari pemegang saham Loans from a Shareholder	1.046.466	1.292.375	1.134.273	1.526.492	392.219	34,58%
Liabilitas imbalan kerja Employee Benefit Liabilities	3.582.923	3.463.984	3.903.140	4.221.982	318.842	8,17%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**9.005.343**	**9.417.511**	**23.231.990**	**28.124.614**	**4.892.624**	**21,06%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Liabilitas Jangka Panjang (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Non-Current Liabilities (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp17,90 triliun, yaitu meningkat Rp2,26 miliar atau 14,46% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh *Net Book Value* (NBV) aset fiskal dan komersial.

Deferred Tax Liabilities

Deferred Tax Liabilities of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp17.90 trillion, an increase by Rp2.26 billion or 14.46% from 2022. This was affected by the Net Book Value (NBV) of fiscal and commercial assets.



Liabilitas Jangka Panjang - setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Liabilitas Jangka Panjang - setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun PLN Indonesia Power terdiri dari liabilitas sewa - bagian jangka panjang, pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka panjang, dan liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang.

Liabilitas sewa - bagian jangka panjang PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp17,90 triliun, yaitu meningkat Rp2,26 triliun atau 14,46% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan kontrak baru atas sewa aset hak guna di tahun berjalan, terutama atas sewa lahan ke PLN *Holding* karena HSH.

Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka panjang PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp1,53 triliun, yaitu meningkat Rp392,22 miliar atau 34,58% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan pinjaman di tahun 2023. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek PLTGU tambak Lorok III. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada saat semua kewajiban pokok maupun bunga telah dibayar penuh oleh Perusahaan. Disajikan lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audit, yaitu Catatan No. 27

Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp4,22 triliun, yaitu meningkat Rp318,84 miliar atau 8,17% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh beberapa asumsi aktuaria. Disajikan lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audit, yaitu Catatan No. 17.

Long-term Liabilities - Less: Current Maturities

Long-term Liabilities - Less: Current Maturities of PLN Indonesia Power comprise Lease Liabilities - Non-Current Portion, Loans from a Shareholder - Non-Current Portion, and Employee Benefit Liabilities - Non-Current Portion.

Lease Liabilities - Non-Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp17.90 trillion, an increase by Rp2.26 trillion or 14.46% from 2022. This was particularly due to the addition of new right-of-use assets contracts in the current year, particularly for land lease to PLN Holding due to HSH scheme.

Loans from a Shareholder - Non-Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp1.53 trillion, an increase by Rp392.22 billion or 34.58% from 2022. This was mainly contributed by increased loans in 2023. The loan was appropriated for the funding of Tambak Lorok III CCPP project. The Agreement became effective since its signing, and terminates when both the principal and interests are fully paid by the Company. Presented in more details in Notes to the Audited Financial Statements, i.e. Note No. 27.

Employee Benefit Liabilities - Non-Current Portion of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp4.22 trillion, an increase by Rp318.84 billion or 8.17% from 2022. This was particularly due to some actuarial assumptions. Presented in more details in Notes to the Audited Financial Statements, i.e. Note No. 17.

Ekuitas
Equity

Jumlah ekuitas PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp345,46 triliun yaitu meningkat Rp2,43 triliun atau 0,71% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan laba di periode tahun 2023, meskipun terdapat pembayaran dividen atas tahun buku 2022 ke Pemegang Saham.

Total Equity of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp345.46 trillion, an increase by Rp2.43 trillion or 0.71% from 2022. This was particularly due to the increased profit in 2023, despite the payment of dividend for the fiscal year 2022 to Shareholders.

Tabel Ekuitas
Equity

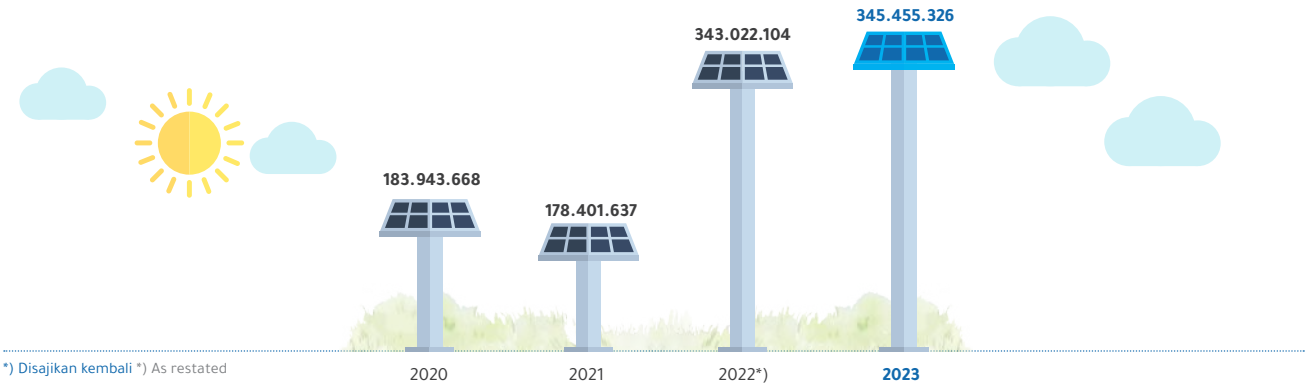
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Modal Capital						
Modal ditempatkan dan disetor Subscribed and Paid-up Capital	2.607.824	2.607.824	2.607.824	178.582.817	175.974.993	6747,96%
Tambahan modal disetor Additional Paid-in Capital	5.513.843	5.513.843	5.513.843	(119.868.272)	(125.382.115)	(2.273,95)%
Ekuitas entitas restrukturisasi Equity of Restructured Entities	-	-	2.607.824	-	(2.607.824)	(100,00)%
Saldo Laba Retained Earnings						
Ditentukan penggunaannya Appropriated	2.122.213	2.122.213	2.122.213	2.122.213	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriated	35.035.494	28.844.407	30.576.503	33.354.404	2.777.901	9,09%
Penghasilan komprehensif lain Other Comprehensive Income	138.581.169	139.227.406	251.520.430	251.168.984	(351.446)	(0,14)%

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Ekuitas yang dapat Diatribusikan Equity Attributable to						
Kepada pemilik entitas induk Owners of the Parent	183.860.543	178.315.693	342.933.691	345.360.146	2.426.455	0,71%
Kepentingan non pengendali Non-Controlling Interests	83.125	85.944	88.413	95.180	6.767	7,65%
Jumlah Ekuitas Jumlah Ekuitas	**183.943.668**	**178.401.637**	**343.022.104**	**345.455.326**	**2.433.222**	**0,71%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Equity (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp345,36, triliun, yaitu meningkat Rp2,43 triliun atau 0,71% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan laba di tahun 2023.

Equity Attributable to Owners of the Parent

The value of the Equity Attributable to Owners of the Parent of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp345.36 trillion, an increase by Rp2.43 trillion or 0.71% from 2022. This was mainly contributed by increased profit in 2023.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

Laba tahun berjalan PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp8,19 triliun, yaitu meningkat Rp3,51 triliun atau 74,85% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pendapatan usaha atas penjualan tenaga listrik, meskipun terdapat kenaikan beban usaha.

Profit for the Year of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp8.19 trillion, an increase by Rp3.51 trillion or 74.85% from 2022. This was particularly due to the increase in Revenue from electricity sales, despite an increase in Operating Expenses.

Tabel Laba Rugi
Profit and Loss

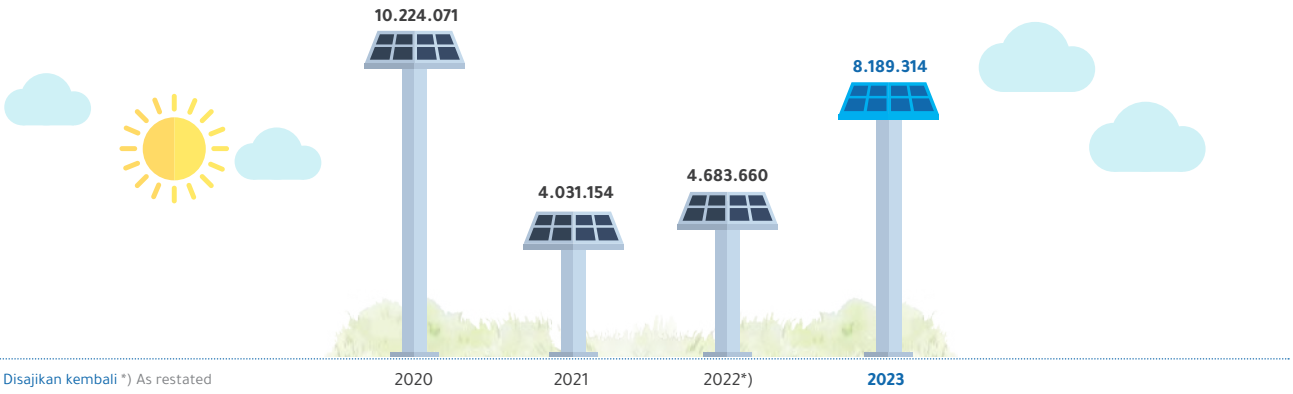
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Pendapatan usaha Revenue	38.740.449	38.519.859	81.090.566	103.480.111	22.389.545	27,61%
Beban usaha Operating Expenses	26.884.270	32.429.534	73.052.127	83.553.102	10.500.975	14,37%
Laba Usaha Operating Income	**11.856.179**	**6.090.325**	**8.038.439**	**19.927.009**	**11.888.570**	**147,90%**
Pendapatan (beban) lain-lain Other Income/(Expenses)	917.180	(181.014)	(225.941)	(9.246.023)	(9.020.082)	3.992,23%
Laba sebelum pajak Profit before Tax	**12.773.358**	**5.909.311**	**7.812.498**	**10.680.986**	**2.868.488**	**36,72%**

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
(Manfaat) beban pajak Tax (Benefit)/Expenses	(2.549.287)	(1.878.157)	(3.128.838)	(2.491.672)	637.166	20,36%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**10.224.071**	**4.031.154**	**4.683.660**	**8.189.314**	**3.505.654**	**74,85%**
Laba yang dapat diatribusikan kepada: Profit Attributable to:						
- Pemilik entitas induk Owners of the Parent	10.218.256	4.027.169	4.678.605	8.176.665	3.498.060	74,77%
- Kepentingan non pengendali Non-Controlling Interests	5.815	3.985	5.055	12.649	7.594	150,23%
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Other Comprehensive Income for the Year	(858.375)	646.237	1.226.472	9.055	(1.217.417)	(99,26)%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**9.365.696**	**4.677.391**	**5.910.132**	**8.198.369**	**2.288.237**	**38,72%**
Laba yang dapat diatribusikan kepada: Profit Attributable to:						
- Pemilik entitas induk Owners of the Parent	9.359.881	4.673.406	5.905.077	8.185.720	2.280.643	38,62%
- Kepentingan non pengendali Non-Controlling Interests	5.815	3.985	5.055	12.649	7.594	150,23%
Laba per lembar saham (Rp penuh) Basic Earnings per Share (in Rupiah full amount)	**1.959**	**773**	**13**	**23**	**10**	**76,92%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Laba Tahun Berjalan (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Profit for the Year (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Pendapatan Usaha
Revenue

Pendapatan Usaha PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp103,48 triliun, yaitu meningkat Rp22,39 triliun atau 27,61% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan penjualan tenaga listrik dan pendapatan jasa.

The Revenue of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp103.48 trillion, an increase by Rp22.39 trillion or 27.61% from 2022. This was mainly contributed by the increase in electricity sales and service revenue.

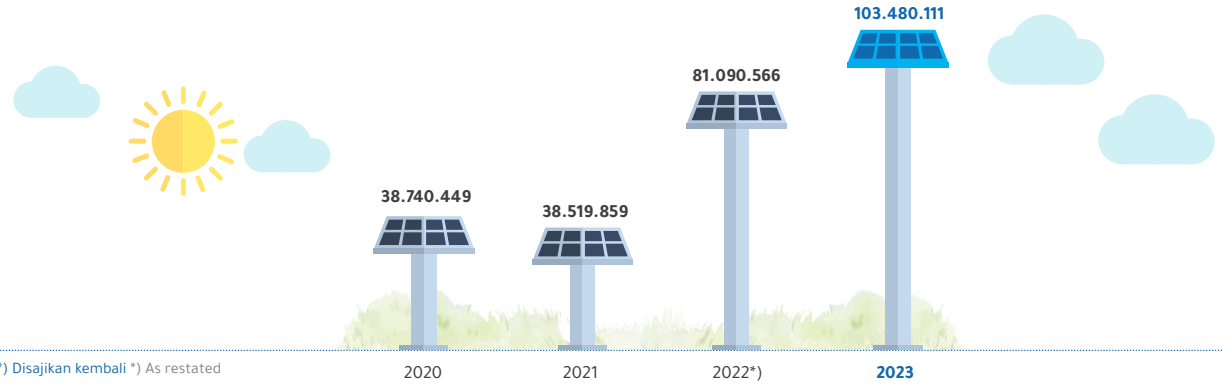
Tabel Pendapatan Usaha
Revenue

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Penjualan tenaga listrik Sales of Electricity	21.011.210	19.907.755	64.371.392	101.934.634	37.563.242	58,35%
Pendapatan dari konsesi jasa Revenue of Service Concession	14.259.159	14.656.755	15.541.932	268.658	(15.273.274)	(98,27)%
Pendapatan O&M lain-lain Pendapatan O&M lain-lain	3.470.080	3.955.349	1.177.242	1.276.819	99.577	8,46%
Jumlah Pendapatan Usaha Jumlah Pendapatan Usaha	**38.740.449**	**38.519.859**	**81.090.566**	**103.480.111**	**22.389.545**	**27,61%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Pendapatan Usaha (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Revenue (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Beban Usaha
Operating Expenses

Beban Usaha PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp83,55 triliun, yaitu meningkat Rp10,50 triliun 14,37% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penghentian penerapan ISAK 16 - Konsesi jasa atas perubahan perjanjian PJBTL PLTU Suralaya 1-7 dari 30 tahun menjadi 10 tahun, dimana beban bahan bakar atas PLTU Suralaya 1-7 tetap di buku ke beban bahan bakar, bukan di beban konsesi jasa.

Operating Expenses of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp83.55 trillion, an increase by Rp10.50 trillion or 14.37% from 2022. This was mainly due to the derecognition of Service Concession (ISAK 16) as a result of the amendment to Power Purchase Agreement (PPA) of Suralaya 1-7 SPP term from 30 years to 10 years, where the fuel expense of Suralaya 1-7 SPP remained recorded in the Fuel Expense post, instead of in the Service Concession Expense.

Tabel Laba Rugi
Operating Expenses

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

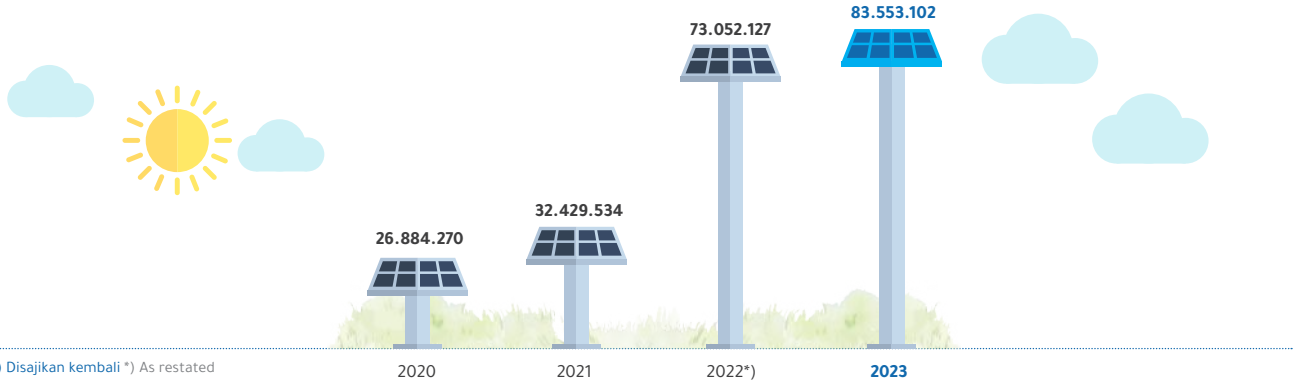
Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Konsesi jasa Service Concession	9.747.752	11.784.1157	12.850.208	244.974	(12.605.234)	(98,09)%
Bahan bakar dan pelumas Fuel and Lubricants	8.266.042	10.897.344	43.082.162	61.558.594	18.476.432	42,89%
Perbaikan dan pemeliharaan Repairs and Maintenance	2.792.776	3.172.566	3.654.670	4.567.747	913.077	24,98%
Penyusutan aset tetap Property, Plant, and Equipment Depreciation	2.871.186	2.919.112	9.284.941	10.719.996	1.435.055	15,46%
Kepegawaian Personnel	2.352.770	2.253.410	2.595.486	4.027.567	1.432.081	55,18%



Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Penyusutan aset hak guna Right-of-Use Assets Depreciation	242.179	725.525	773.739	775.807	2.068	0,27%
Pembelian tenaga listrik Purchased Electricity	238.329	208.311	221.103	910.320	689.217	311,72%
Sewa Leases	-	58.283	94.207	87.643	(6.564)	(6,97)%
Lain-lain Others	373.236	410.826	495.611	660.454	164.843	33,26%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**26.884.270**	**32.429.534**	**73.052.127**	**83.553.102**	**10.500.975**	**14,37%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Beban Usaha (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Operating Expenses (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Pendapatan (Beban) Lain-lain
Other Income/(Expenses)

Beban lain-lain PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp9,25 triliun, yaitu meningkat Rp698,68 miliar atau 309,23% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya kerugian atas penghentian aset keuangan konsesi jasa PLTU Suralaya 1-7 karena perubahan perjanjian PJBTL PLTU Suralaya 1-7 dari 30 tahun menjadi 10 tahun.

Other expenses of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp9.25 trillion, an increase by Rp698.68 billion or 309.23% from 2022. This was mainly due to the loss inflicted by the derecognition of Suralaya 1-7 SPP's financial assets of service concession, which was a result of the amendment to Power Purchase Agreement (PPA) of Suralaya 1-7 SPP from 30 years to 10 years.

Tabel Pendapatan (Beban) Lain-lain
Other Income/(Expenses)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Penghasilan keuangan Financial Income	53.889	82.196	161.821	162.383	562	0,35%
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - bersih Losses (Gains) on Foreign Exchange - Net	(9.553)	21.025	(44.064)	(19.652)	24.412	-55,40%
Beban Keuangan Finance Costs	(162.694)	(467.733)	(663.924)	(494.649)	169.275	(25,50)%
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in Net Income of Associates and Joint Ventures	203.915	445.809	790.185	1.110.846	320.661	40,58%
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi Gain on Sales of Assets not Used in Operations	1.062.610	5.444	4.519	4.228	(291)	(6,44)%
Kerugian atas penghentian aset keuangan konsesi jasa Loss on Derecognition of Financial Assets of Service Concession	-	-	-	(9.349.721)		
Lain-lain - bersih Lain-lain - bersih	(230.988)	(267.754)	(474.478)	(659.458)	(184.980)	38,99%
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Other Income/(Expenses)	**917.179**	**(181.014)**	**(225.941)**	**(9.246.23)**	**(698.682)**	**309,23%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Laba Sebelum Pajak
Profit before Tax

Laba sebelum pajak PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp10,68 triliun, yaitu meningkat 2,87 triliun atau 36,72% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pendapatan usaha atas penjualan tenaga listrik dan pendapatan jasa.

Profit before Tax of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp10.68 trillion, an increase by Rp2.87 trillion or 36.72% from 2022. This was mainly contributed by the increase in revenue from electricity sales and service revenue.

(Manfaat)/Beban Pajak
Tax (Benefit)/Expenses

Beban pajak PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp2,49 triliun, yaitu meningkat Rp637,17 miliar atau 20,36% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh perbedaan nilai buku aset fiskal dibandingkan aset komersil.

Tax Expenses of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp2.49 trillion, an increase by Rp637.17 billion or 20.36% from 2022. This was mainly due to the difference in the book value of fiscal assets compared to commercial assets.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak
Other Comprehensive Income/(Expenses) for the Year after Tax

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp9,06 triliun, yaitu lebih rendah Rp1,22 triliun atau 99,26% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan pengakuan laba komprehensif dari entitas ventura bersama, yaitu PT Indo Raya Tenaga.

Other Comprehensive Income for the Year of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp9.06 trillion, a decline by Rp1.22 trillion or 99.26% from 2022. This was particularly due to the decline in the recognition of comprehensive profit from Joint Venture PT Indo Raya Tenaga.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year

Penghasilan komprehensif tahun berjalan PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp8,20 triliun, yaitu meningkat Rp2,29 triliun atau 38,72% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pendapatan usaha.

Comprehensive Income for the Year of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp8.20 trillion, an increase by Rp2.29 trillion or 38.72% from 2022. This was particularly due to the increase in Revenue.

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statements of Cash Flows

Arus kas Perusahaan terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas pada akhir tahun PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp3,54 triliun, yaitu lebih rendah Rp146,22 miliar atau 3,97% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan bank dikarenakan adanya pembayaran kepada *vendor*.

Cash Flows comprise operating, investing, and financing activities. The Cash and Cash Equivalents at End of Year of PLN Indonesia Power in 2023 were Rp3.54 trillion, a decline by Rp146.22 billion or 3.97% from 2022. This was mainly contributed by a decline in cash in bank due to payment to vendors.



Tabel Arus Kas
Cash Flows

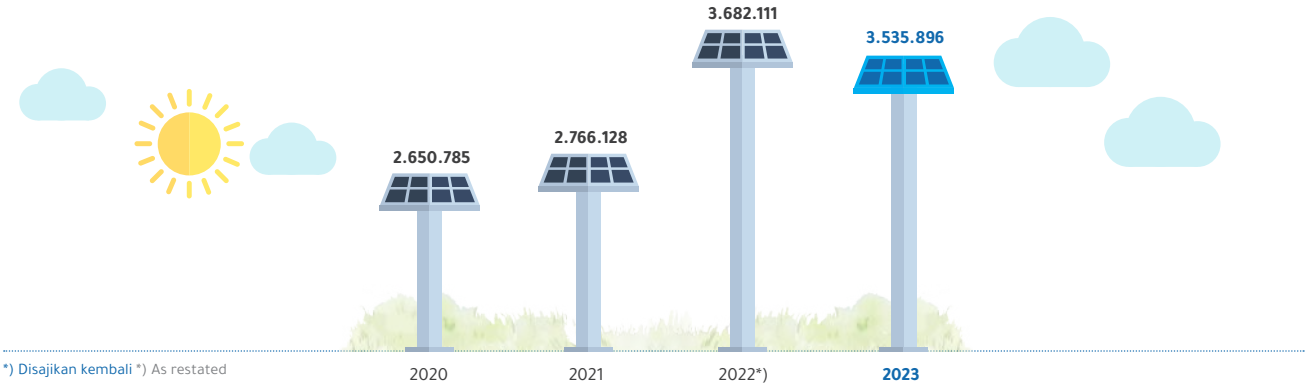
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net Cash Generated from Operating Activities	5.248.247	2.679.222	9.722.485	5.352.459	(4.370.026)	(44,95)%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net Cash Used in Investing Activities	(4.003.866)	(2.420.998)	(4.665.522)	(5.158.646)	(493.124)	10,57%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(125.693)	(150.591)	(4.179.624)**)	(339.085)	3.840.539	(91,89)%
Penurunan (Kenaikan) Bersih Kas dan Setara Kas **Net Decrease/(Increase) in Cash and Cash Equivalents**	**1.118.688**	**107.633**	**877.339**	**(145.272)**	**(1.022.611)**	**(116,56)%**
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun **Balance of Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year**	**1.518.102**	**2.650.785**	**2.766.128**	**3.682.111**	**915.983**	**33,11%**
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun **Balance of Cash and Cash Equivalents at the End of the Year**	**2.650.785**	**2.166.128**	**3.682.111**	**3.535.896**	**(146.215)**	**(3,97)%**

*) Disajikan kembali
**) Kas *pooling* untuk pendanaan umum timbul sehubungan dengan seolah-olah adanya arus kas dari pengalihan kegiatan usaha pembangkitan listrik

*) As restated
**) Cash pooling for general funding activities arise in connection with as if there was cash flows from power generation business transferred

Grafik Saldo Kas dan Setara Kas (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Balance of Cash and Cash Equivalents (in million Rupiah)



*) Disajikan kembali *) As restated

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi
Cash Flows from Operating Activities

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp5,16 triliun, yaitu meningkat Rp493,12 miliar atau 10,57% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan perolehan aset di tahun 2023.

Net Cash Generated from Operating Activities of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp5.35 trillion, a decline by Rp4.37 trillion or 44.95% from 2022. The main factor for this was the decrease in the repayment of Power Purchase Agreement receivables.

Tabel Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Cash from Operating Activities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Perolehan aset tetap Additions of Property, Plant, and Equipment	(4.090.045)	(2.580.801)	(4.808.471)	(5.238.416)	(429.945)	8,94%
Penambahan piutang pihak berelasi Additions of Receivables from Related Parties	-	-	(35.809)	(3.836)	31.973	(89,29)%
Perolehan aset tidak lancar lain Additions of Other Non-Current Assets	-	-	(20.453)	(76.213)	(55.760)	272,63%
Perolehan investasi efek beragunan aset Purchase of Investment in Asset-backed Securities	85.000	95.000	95.000	-	(95.000)	(100,00)%
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama Proceeds from Dividends of Associates and Joint Ventures	1.241	-	44.586	67.836	23.250	52,15%
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi Receipts of Loan from Related Parties	-	97.474	53.989	118.755	64.766	119,96%
Hasil penjualan tidak digunakan dalam operasi Proceeds from Sales of Assets not Used in Operations	1.901.218	5.444	4.519	4.228	(291)	(6,44)%
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya Withdrawal of Restricted Cash in Bank	-	-	1.117	-	(1.117)	(100,00)%
Penyertaan modal pada entitas ventura bersama Capital Subscription in Joint Ventures	(1.901.280)	(38.115)	-	(31.000)	(31.000)	(100,00)%
Kas bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	**(4.003.866)**	**(2.420.998)**	**(4.665.522)**	**(5.158.646)**	**(493.124)**	**10,57%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Cash Flows from Financing Activities

Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Indonesia Power tahun 2023 sebesar Rp339,09 miliar, yaitu lebih rendah Rp3,84 triliun atau 91,89% dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh tidak adanya pengeluaran atas kas pooling untuk pendanaan umum pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 terdapat kegiatan tersebut. Kas *pooling* untuk Pendanaan umum tersebut merupakan timbul sehubungan dengan seolah-olah adanya arus kas dari pengalihan kegiatan usaha pembangkitan listrik.

Net Cash Used in Financing Activities of PLN Indonesia Power in 2023 was Rp339.09 billion, a decline by Rp3.84 trillion or 91.89% from 2022. This was particularly due to zero expense of cash pooling for general funding activities in 2023, which previously existed in 2022. Cash pooling for general funding activities arise in connection with as if there was cash flows from power generation business transferred.

Tabel Kas dari Aktivitas Pendanaan
Cash from Funding Activities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023	
					Nominal	%
Pembayaran liabilitas sewa Payments of Lease Liabilities	(1.107.984)	(637.138)	(721.324)	(684.427)	36.897	(5,12)%
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham Proceeds from Loans from a Shareholder	1.043.356	739.395	-	618.262	618.262	(100,00)%
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham Loan Repayments from a Shareholder	(60.293)	(252.848)	-	(272.920)	(272.920)	100,00%
Kas *pooling* untuk pendanaan umum Cash Pooling for General Funding Activities	-	-	(3.185.415)	-	3.185.415	(100,00)%
Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash used in Financing Activities	**(125.693)**	**(150.591)**	**(4.179.624)**	**(339.085)**	**3.840.539**	**(91,89)%**

*) Disajikan kembali *) As restated



Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya

Solvency, Collectability, and Other Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang

Solvency

Penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam membayar utangnya dapat ditunjukan dengan indikator rasio solvabilitas dan likuiditas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut

The Company's ability in paying its debts is indicated by the solvency and liquidity ratios as explained below.

Rasio Solvabilitas

Solvency Ratios

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari *Debt to Total Assets Ratio* (Rasio Utang terhadap Aset) dan *Debt to Total Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Modal). Semakin kecil nilai rasionya menunjukkan semakin kecil kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan.

Solvency ratios measure the Company's ability to meet its long-term liabilities as well as its entire debts. These ratios include Debt to Total Assets Ratio and Debt to Total Equity Ratio. The smaller the ratio, the fewer the liabilities that must be met by the Company.

Tabel Solvabilitas

Solvency

(dalam %) (in %)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) Debt to Total Assets Ratio (DAR)	8,03	7,90	8,38	10,55	25,89
Rasio Utang terhadap Modal (DER) Debt to Total Equity Ratio (DER)	8,74	8,58	9,15	11,79	28,85

*) Disajikan kembali *) As restated

Rasio Utang terhadap Aset

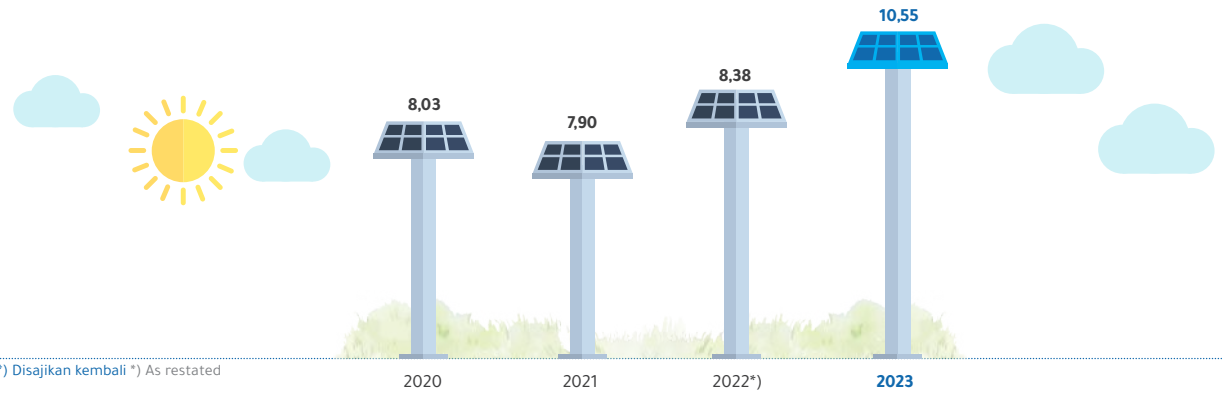
Debt to Total Assets Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aset yang digunakan dalam menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang terhadap aset Perusahaan PLN Indonesia Power adalah sebesar 10,55% yaitu, meningkat 25,89% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan liabilitas atas utang usaha, liabilitas sewa, dan liabilitas pajak tangguhan, sedangkan aset tetap tidak mengalami kenaikan yang signifikan akibat adanya penurunan atas aset keuangan atas konsesi jasa PLTU Suralaya 1-7.

This ratio is used to measure the portion of assets used to guarantee overall liabilities or debt. The Company's Debt to Total Assets Ratio was 10.55%, which was an increase by 25.89% from 2022. This was particularly due to the increase in liabilities from trade payables, lease liabilities, and deferred tax liabilities, whereas property, plant, and equipment did not make a significant improvement due to the decline in financial assets of service concession of Suralaya 1-7 SPP.

Grafik Rasio Utang terhadap Aset (dalam %)

Chart of Debt to Total Assets Ratio (in %)



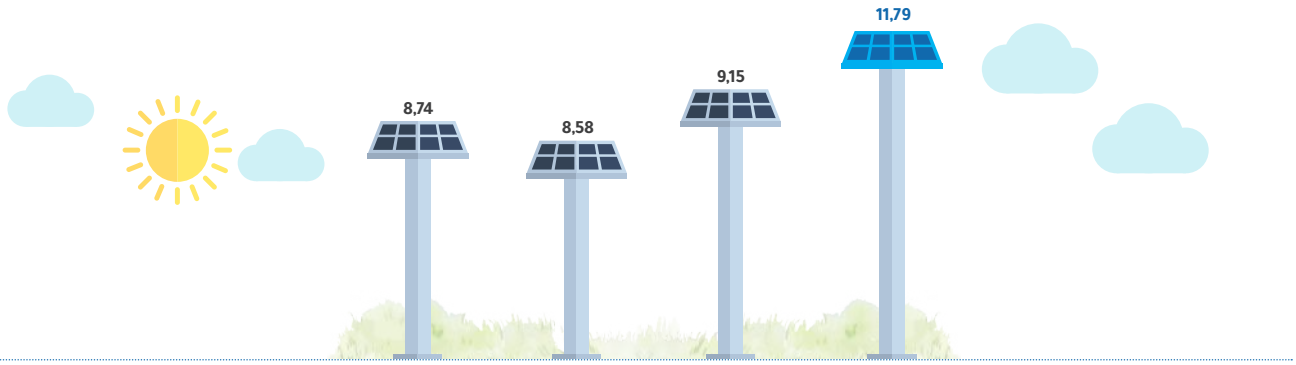
*) Disajikan kembali *) As restated

Rasio Utang terhadap Modal
Debt to Total Equity Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang terhadap modal PLN Indonesia Power lebih adalah sebesar 11,79%, yaitu meningkat 28,85% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan liabilitas atas utang usaha, liabilitas sewa, dan liabilitas pajak tangguhan, dibandingkan dengan kenaikan laba komprehensif.

This ratio is used to measure the portion of equity used to guarantee overall liabilities or debt. The Company's Debt to Total Equity Ratio was 11.79%, which was an increase by 28.85% from 2022. This was mainly contributed by the increase in liabilities from trade payables, lease liabilities, and deferred tax liabilities, compared to the increase in comprehensive income.

Grafik Rasio Utang terhadap Modal (dalam %)
Chart of Debt to Total Equity Ratio (in %)



*) Disajikan kembali *) As restated

Rasio Likuiditas
Liquidity Ratios

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang terdiri dari *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Quick Ratio* (Rasio Cepat) dan *Current Ratio* (Rasio Lancar). Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Liquidity ratios measure the Company's ability to meet its short-term liabilities. These ratios consist of Cash Ratio, Quick Ratio, and Current Ratio. Higher ratio indicates the Company's ability to pay its maturing liabilities. The Company's liquidity ratios are described in the table below.

Tabel Likuiditas
Liquidity

(dalam %) (in %)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
Rasio Kas Cash Ratio	37,53	46,93	45,15	28,02	(37,94)
Rasio Cepat Quick Ratio	505,91	557,23	414,12	450,90	8,88
Rasio Lancar Current Ratio	526,60	580,73	475,13	492,76	3,71

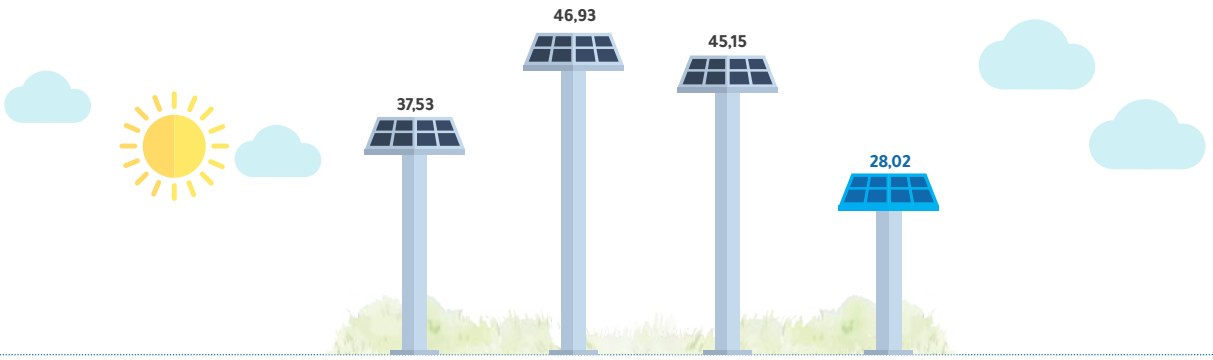
*) Disajikan kembali *) As restated

Rasio Kas
Cash Ratio

Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan kas. Nilai rasio kas PLN Indonesia Power lebih adalah sebesar 28,02%, yaitu meningkat 37,94% dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan liabilitas lancar pada pos utang usaha yang lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan kas dan setara kas.

Cash ratio is used to measure the Company's ability to meet its current liabilities using cash. The Company's Cash Ratio was 28.02%, which was an increase by 37.94% from 2022. This was contributed by the increase in current liabilities from trade payables which is more significant compared to the increase in cash and cash equivalents.

Grafik Rasio Kas (dalam %)
Chart of Cash Ratio (in %)



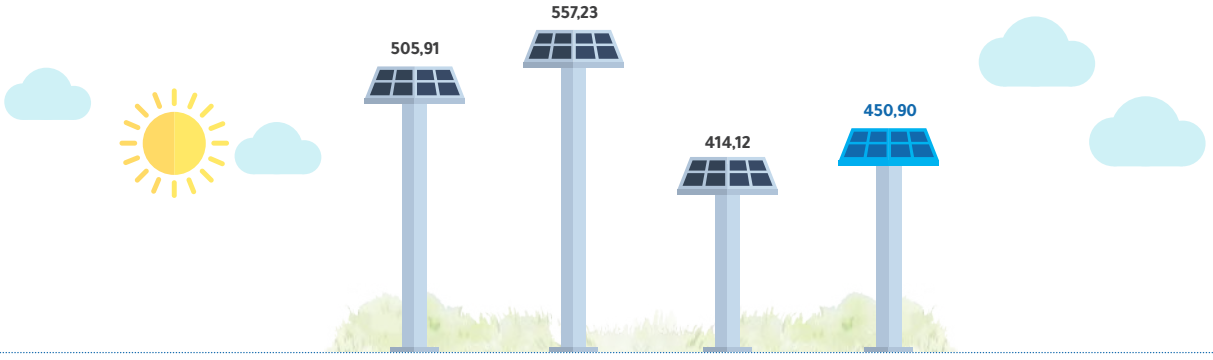
*) Disajikan kembali *) As restated

Rasio Cepat
Quick Ratio

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar Perusahaan di luar persediaan diukur menggunakan rasio cepat. Nilai rasio cepat PLN Indonesia Power lebih adalah sebesar 450,90%, yaitu meningkat 8,88% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan aset lancar di luar persediaan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan utang usaha pada liabilitas jangka pendek. Kenaikan aset lancar ini atas piutang usaha penjualan tenaga listrik.

Quick ratio is used for measuring the Company's ability to meet its current liabilities using its current assets aside of inventories. The Company's Quick Ratio was 450.90%, which was an increase by 8.88% from 2022. This was mainly due to the increase in current liabilities (apart from inventories) which is more significant compared to the increase in trade payables from current liabilities. The increase in current assets was contributed by trade receivables from the sales of electricity.

Grafik Rasio Cepat (dalam %)
Chart of Quick Ratio (in %)



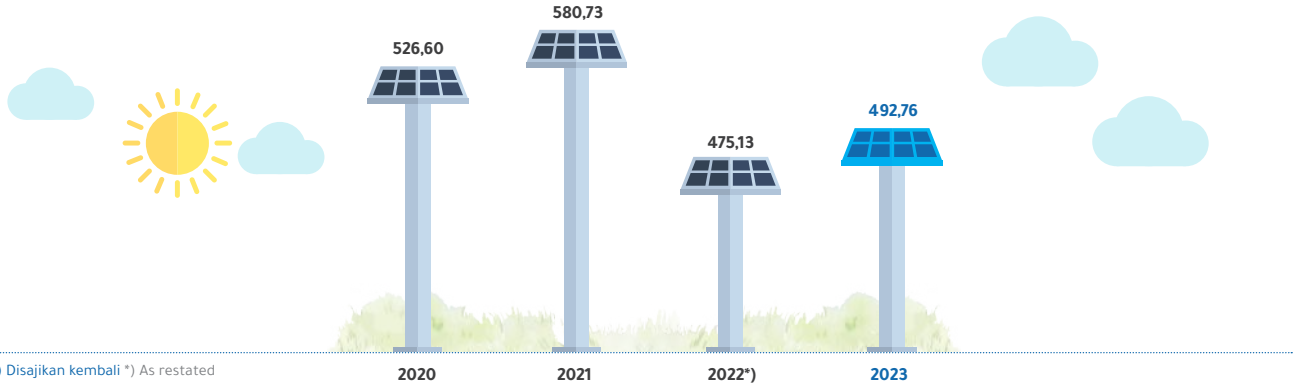
*) Disajikan kembali *) As restated

Rasio Lancar
Current Ratio

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui seluruh aset lancar yang dimilikinya diukur menggunakan rasio lancar. Nilai rasio lancar PLN Indonesia Power lebih adalah sebesar 492,76%, yaitu meningkat 3,71% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan piutang usaha yang lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan utang usaha pada liabilitas jangka pendek.

Current ratio measures the Company's ability to meet its current liabilities using all current assets at hand. The Company's Current Ratio was 492.76%, which was an increase by 3.71% from 2022. This was mainly due to the increase in trade receivables which is more significant compared to the increase in trade payables from current liabilities.

Grafik Rasio Lancar (dalam %)
Chart of Current Ratio (in %)



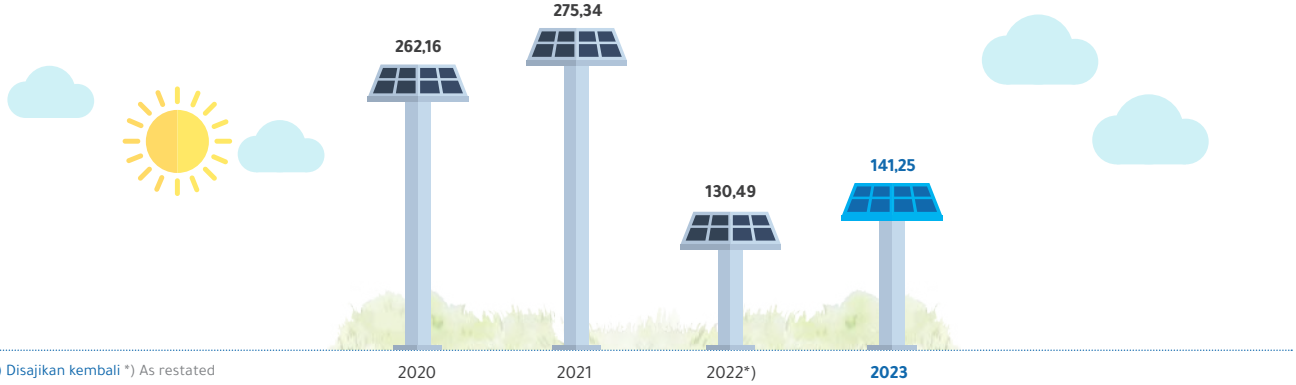
*) Disajikan kembali *) As restated

Kolektibilitas Piutang
Collectability

Tingkat kolektibilitas piutang (periode penagihan) digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Nilai periode penagihan PLN Indonesia Power lebih adalah selama 141,25 hari, yaitu lebih lama 11 hari dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh oleh kenaikan piutang usaha yang signifikan.

Collectability rate (collection period) measures the Company's ability in collecting receivables. The collection period of PLN Indonesia Power was 141.25 days, which was 11 days longer than in 2022. This was particularly due to a significant increase in trade receivables.

Grafik Periode Penagihan (dalam hari)
Chart of Collection Period (in day)



*) Disajikan kembali *) As restated

Rasio Keuangan Lainnya
Other Financial Ratios

Selain kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban dan kemampuan dalam periode penagihan piutang, terdapat rasio-rasio keuangan penting lainnya sebagai berikut:

In addition to the Company's solvency and collectability in the receivable collection period, there are other important financial ratios:

Rasio Profitabilitas
Profitability Ratios

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Equity* (Tingkat Pengembalian Modal), *Return on Investment* (Tingkat Pengembalian Investasi), *Return on Asset* (Tingkat Pengembalian Aset), *Operating Profit Margin* (Margin Operasi), dan *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih). Rasio profitabilitas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

The Company's ability to generate profit is measured using profitability ratios. These ratios include Return on Equity, Return on Investment, Return on Assets, Operating Profit Margin, and Net Profit Margin. The Company's profitability is described in the table below.

Tabel Profitabilitas
Profitability

(dalam %) (in %)

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
Margin Operasi Operating Profit Margin	30,60	15,81	9,91	19,26	94,35
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	26,39	10,47	5,78	7,91	36,85
Tingkat Pengembalian Modal Return on Equity	5,89	2,31	1,38	2,43	76,09
Tingkat Pengembalian Investasi Return on Investment	7,55	4,80	4,74	8,12	71,31
Tingkat Pengembalian Aset Return on Assets	5,11	2,08	1,25	2,12	69,60

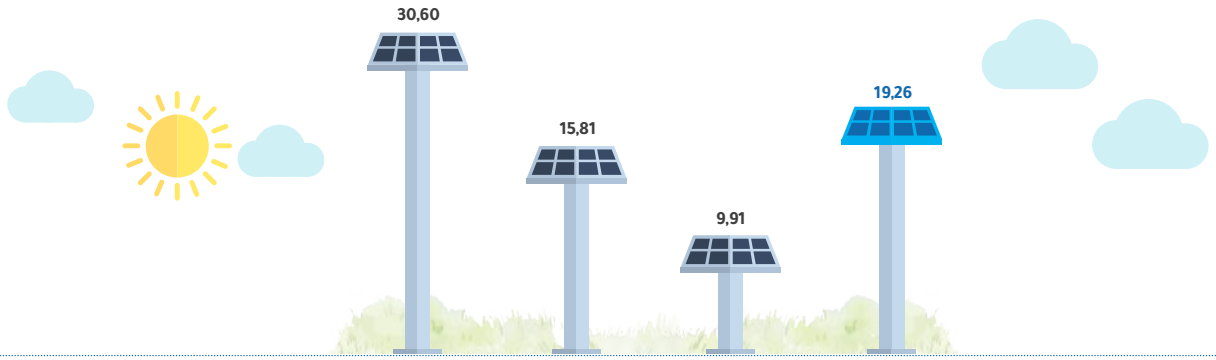
*) Disajikan kembali *) As restated

Margin Operasi
Operating Profit Margin

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi yang dihasilkan dari penjualannya. Margin operasi PLN Indonesia Power adalah sebesar 19,26%, yaitu meningkat 94,35% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba operasi akibat kenaikan pendapatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan beban usaha.

This margin measures the Company's ability in generating operating profits from sales. The Company's Operating Profit Margin was 19.26%, which was an increase by 94.35% from 2022. This was contributed by the increase in operating profit from increased revenue which was more significant than the increase in operating expenses.

Grafik Margin Operasi (dalam %)
Chart of Operating Profit Margin (in %)



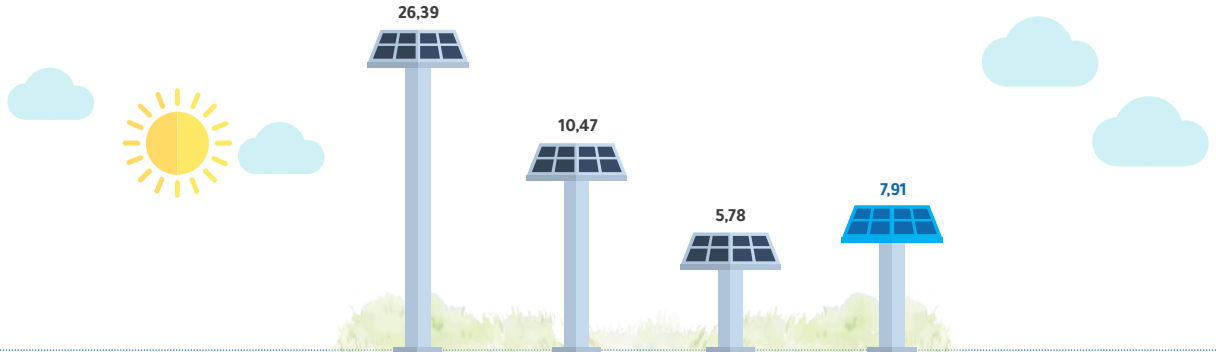
*) Disajikan kembali *) As restated

Margin Laba Bersih
Net Profit Margin

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba laba bersih yang dihasilkan dari penjualannya. Margin laba bersih PLN Indonesia Power adalah sebesar 7,91%, yaitu meningkat 36,85% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba bersih akibat kenaikan pendapatan usaha yang lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan beban usaha.

This margin measures the Company's ability in generating net profits from sales. The Company's Net Profit Margin was 7.91%, which was an increase by 36.85% from 2022. This was contributed by the increase in net profit from increased revenue which was more significant than the increase in operating expenses.

Grafik Margin Laba Bersih (dalam %)
Chart of Net Profit Margin (in %)



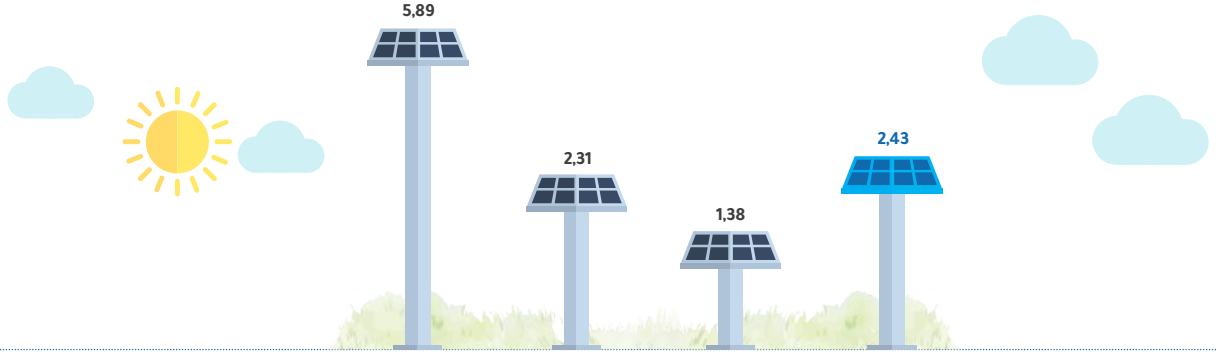
*) Disajikan kembali *) As restated

Tingkat Pengembalian Modal
Return on Equity

Rasio yang memperlihatkan sejauh manakah Perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau Pemegang Saham. Nilai tingkat pengembalian modal PLN Indonesia Power adalah sebesar 2,43%, yaitu meningkat 76,09% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan laba bersih akibat peningkatan pendapatan usaha atas penjualan tenaga listrik.

This ratio shows the extent to which the Company manages its own equity effectively, measuring return on investments made by capital owner or Shareholders. The Company's Return on Equity was 2.43%, which was an increase by 76.09% from 2022. This was particularly contributed by the increase in net profit from increased revenue from electricity sales.

Grafik Tingkat Pengembalian Modal (dalam %)
Chart of Return on Equity (in %)



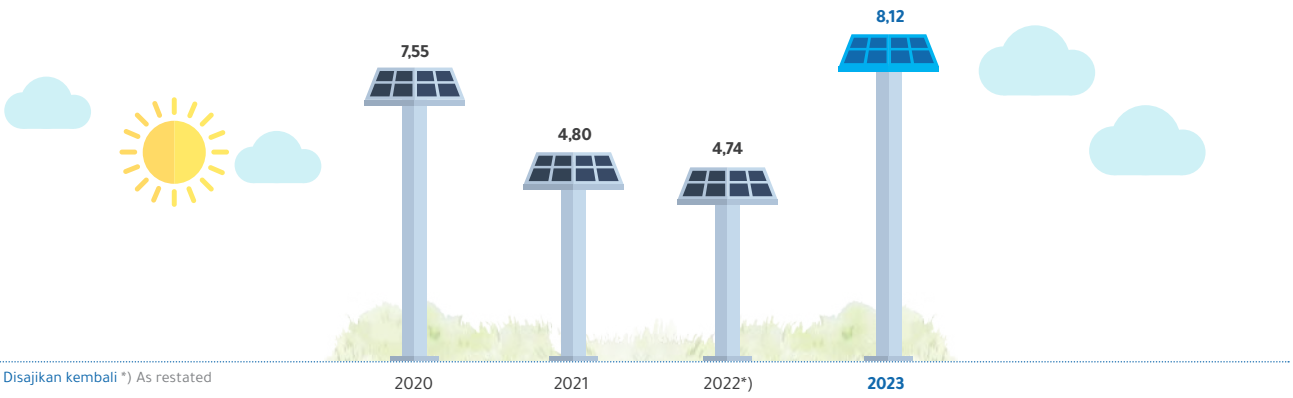
*) Disajikan kembali *) As restated

Tingkat Pengembalian Investasi
Return on Investment

Merupakan kemampuan Perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh Keuntungan dengan jumlah investasi yang tersedia di dalam Perusahaan. Nilai tingkat pengembalian investasi PLN Indonesia Power adalah sebesar 8,12%, yaitu meningkat 71,31% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba usaha dan beban penyusutan dibandingkan dengan jumlah aset di luar pekerjaan dalam pelaksanaan.

This ratio signifies the Company's overall ability in generating profits using the total investments available in the Company. The Company's Return on Investment was 8.12%, which was an increase by 71.31% from 2022. This was particularly contributed by the increase in net profit and depreciation expense compared to the total assets except for the construction in progress.

Grafik Tingkat Pengembalian Investasi (dalam %)
Chart of Return on Investment (in %)



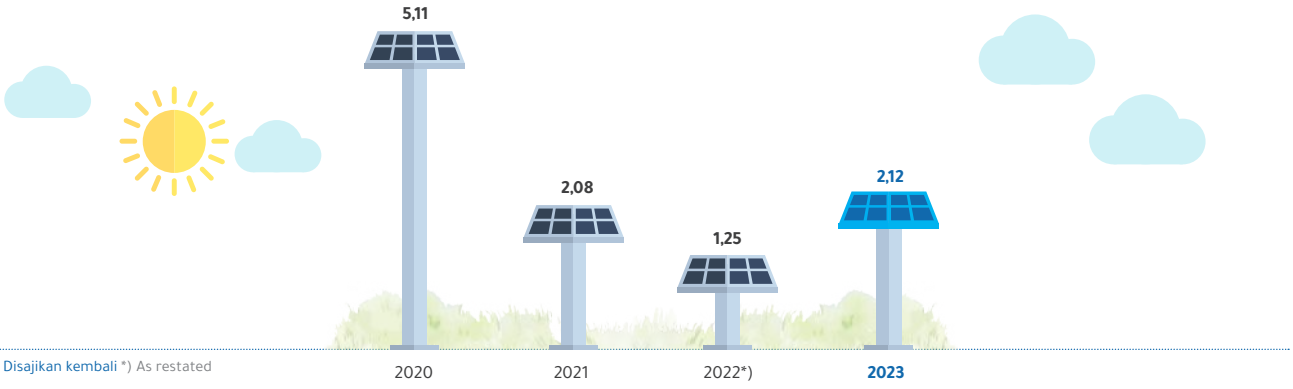
*) Disajikan kembali *) As restated

Tingkat Pengembalian Aset
Return on Assets

Merupakan kemampuan Perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh Keuntungan dengan jumlah aset yang tersedia di dalam Perusahaan. Nilai tingkat pengembalian aset PLN Indonesia Power adalah sebesar 2,12% yaitu meningkat 69,60% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba bersih.

This ratio signifies the Company's overall ability in generating profits using the total assets available in the Company. The Company's Return on Assets was 2.12%, which was an increase by 69.60% from 2022. This was particularly due to net profit increase.

Grafik Tingkat Pengembalian Aset (dalam %)
Chart of Return on Assets (in %)



*) Disajikan kembali *) As restated

Rasio Aktivitas
Activity Ratios

Merupakan rasio-rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya.

These ratios indicate the effectiveness of the Company in managing its assets.

Tabel Rasio Aktivitas
Activity Ratios

Keterangan Description	2020	2021	2022*)	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (day)	13,77	12,36	22,39	18,64	(16,75)
Perputaran Aset (%) Asset Turnover (%)	19,87	20,51	22,17	27,43	23,73

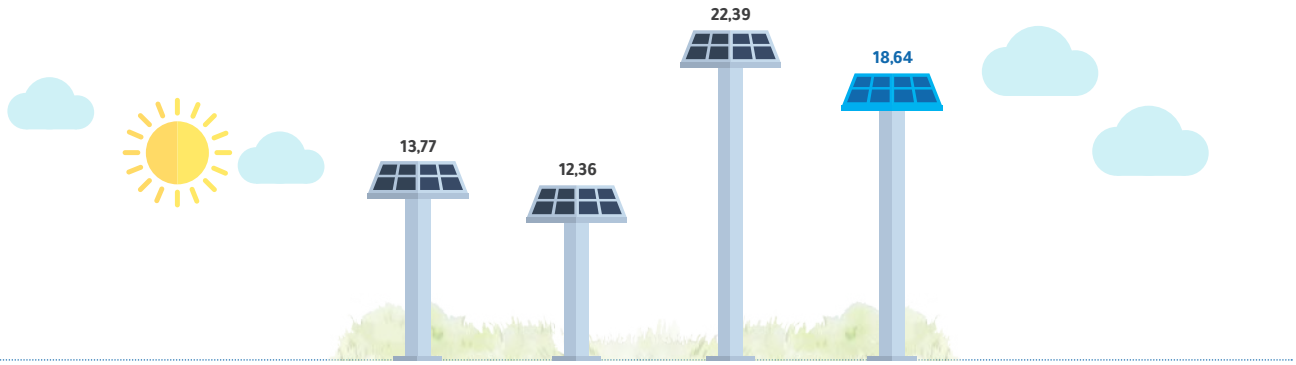
*) Disajikan kembali *) As restated

Perputaran Persediaan
Inventory Turnover

Rasio yang mengukur seberapa sering persediaan barang dagang terjual dalam waktu satu periode. Perputaran persediaan PLN Indonesia Power adalah sebesar 18,64 hari, yaitu lebih cepat 3,75 hari dari tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kegiatan pemeliharaan dan kegiatan produksi selama tahun 2023.

This ratio measures how often goods from inventory are sold within a period. The inventory turnover of PLN Indonesia Power was 18.64 days, which was 3.75 days faster than in 2022. This was particularly due to maintenance and production activities throughout 2023.

Grafik Perputaran Persediaan (dalam hari)
Chart of Inventory Turnover (in day)



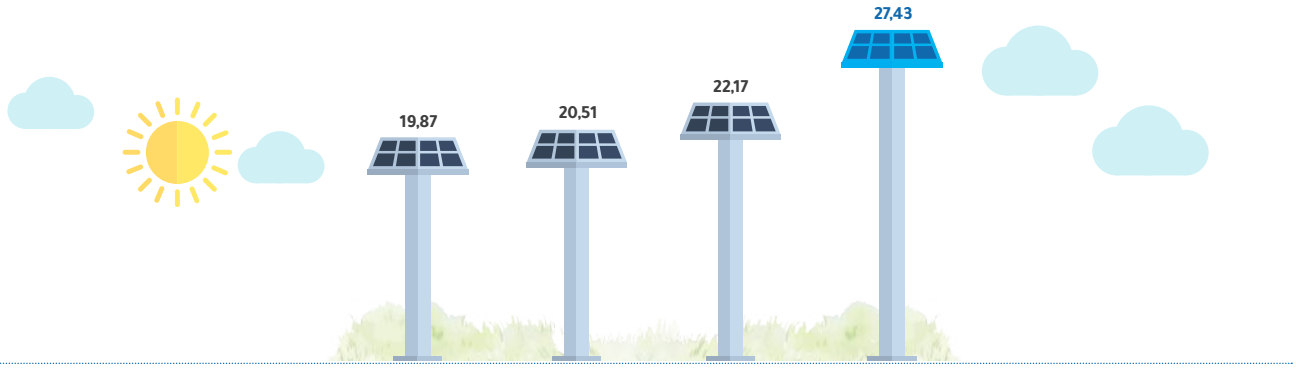
*) Disajikan kembali *) As restated

Perputaran Aset
Asset Turnover

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan, semakin cepat aset perusahaan berputar makin besar pendapatan perusahaan tersebut. Perputaran aset PLN Indonesia Power adalah sebesar 27,43%, yaitu meningkat 23,73% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pendapatan usaha yang lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan jumlah aset di luar pekerjaan dalam pelaksanaan (PDP).

This ratio measures the Company's ability to manage its assets to earn revenue. The faster the Company's assets turnover, the greater the Company's revenue. The Company's Asset Turnover was 27.43%, which was an increase by 23.73% from 2022. This was mainly due to the increase in revenue which is more significant compared to the increase in total assets except for the construction in progress.

Grafik Perputaran Aset (dalam %)
Chart of Asset Turnover (in %)



*) Disajikan kembali *) As restated

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur modal Perusahaan pada tahun 2023 terdiri dari Liabilitas sebesar Rp40,75 triliun meningkat dibandingkan tahun 2022. Adapun yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar Rp345,46 triliun meningkat dibandingkan tahun 2022.

The Company's capital structure in 2023 consisted of Liabilities amounting to Rp40.75 trillion, which increased from 2022, as well as Equity amounting to Rp345.46 trillion, which was also an increase from 2022.

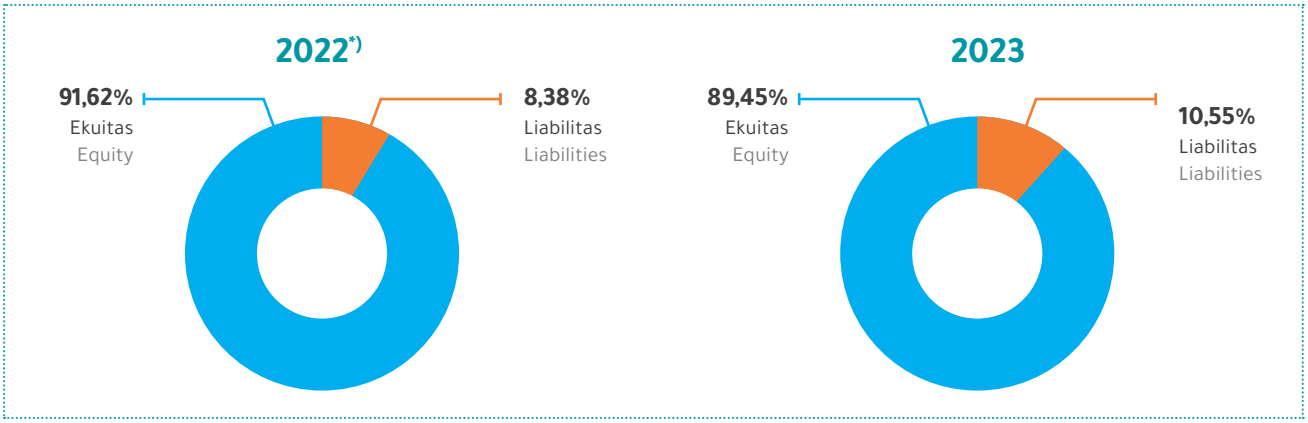
Tabel Struktur Modal
Capital Structure

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2021		2022*)		2023	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Liabilitas Liabilities	**15.312.157**	**8,07%**	**31.387.319**	**8,38%**	**40.745.537**	**10,55%**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.894.646	3,11%	8.155.329	4,12%	12.620.923	3,27%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	9.417.511	4,96%	23.231.990	11,73%	28.124.614	7,28%
Ekuitas Equity	**178.401.637**	**94,04%**	**343.022.104**	**91,62%**	**345.455.326**	**89,45%**
Jumlah Aset Total Assets	**93.713.794**	**102,11%**	**374.409.423**	**100,00%**	**386.200.863**	**100,00%**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Komposisi Struktur Modal
Chart of Capital Structure Composition



*) Disajikan kembali *) As restated

Kebijakan dan Mekanisme *Review* Struktur Modal
Capital Structure Review Policy and Mechanism

Kondisi struktur modal yang optimal dicapai dengan modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital*/WACC) yang minimal. Penggunaan utang yang bertambah akan meminimalkan WACC sebab biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Meskipun demikian, peningkatan utang yang dilakukan Perusahaan akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan mengelola penggunaan utang dan modal sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

An optimal capital structure can be achieved through minimum Weighted Average Cost of Capital (WACC). The increase in debt appropriation will decrease WACC, as the cost of debt is lower than the cost of equity. In addition, debt appropriation will reduce taxable expenses, thus cutting taxes. Nevertheless, the increase in the Company's debt will increase the cost of interest expenses, which will further decrease the overall value of the Company. Therefore, the Company manages its debt and capital appropriation to achieve an optimal condition.

Tingkat Likuiditas Perusahaan
Company Liquidity Level

PLN Indonesia Power senantiasa melakukan monitoring terhadap rasio likuiditas, rasio ini mengindikasikan kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan semakin optimal. Rasio likuiditas Perusahaan dicerminkan oleh rasio kas, rasio cepat dan rasio lancar.

PLN Indonesia Power constantly monitors the liquidity ratios that indicate its solvency in settling its current liabilities. Higher liquidity ratios means better capital structure. The Company's liquidity ratios are reflected by cash, quick, and current ratios.

Pada tahun 2023, rasio kas sebesar 28,02%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2022, rasio cepat sebesar 450,90%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, dan rasio lancar sebesar 492,76%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

In 2023, the Cash Ratio was 28.02% which was lower than in 2022, the Quick Ratio was 450.90% which was higher than in 2022, and the Current Ratio was 492.76% which was also higher than in 2022.

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the Country

Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan
Management and Control of Taxes

Setoran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tax payment is the responsibility and participation of taxpayers to directly and jointly perform their tax obligation for financing the country and supporting the national development.

PLN Indonesia Power telah menetapkan strategi pajak di tahun 2023 salah satunya memastikan pelaporan SPT PPh Badan maksimal tanggal 30 April 2024 sehingga dapat segera mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan 22, 22 Impor, dan 23. Selain itu, Perusahaan juga melakukan integrasi aplikasi perpajakan perusahaan dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sudah terintegrasi antara ERP, CMS Bank, dan aplikasi perpajakan yang terdaftar di DJP, sehingga memastikan data perpajakannya akurat dan meminimalisir resiko keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Strategi pajak ini, telah ditinjau dan disetujui oleh Manajemen Perusahaan. Peninjauan strategi pajak dilakukan secara berkala dan juga ditinjau ketika ada regulasi perpajakan terbaru.

PLN Indonesia Power has set a tax strategy in 2023, one of which ensures the reporting of Corporate Income Tax Return by April 30, 2024 so that it can immediately apply for a Certificate of Exemption from Income Tax 22, 22 Import, and 23. In addition, the company also integrates the company's tax application with the Directorate General of Taxes system, including the calculation, deposit, and reporting processes that have been integrated between ERP, Bank CMS, and tax applications registered with the DGT, thus ensuring accurate tax data and minimizing the risk of delays and inaccuracies in tax deposits and reporting. This tax strategy has been reviewed and approved by the Company's Management. The review of the tax strategy is carried out periodically and is also reviewed when there are new tax regulations.

Uraian terkait Kontribusi Pajak kepada Negara juga disajikan dalam Laporan Keberlanjutan sub bab Kontribusi bagi Negeri.

The description related to Tax Contribution to the Country is also presented in the Sustainability Report under the chapter Contribution to the State.

Setoran Pajak
Tax Payment

Setoran pajak PLN Indonesia Power pada tahun 2023 sebesar Rp4,21 triliun meningkat 121,17% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut merupakan dampak penambahan atas pengalihan bisnis dari aksi korporasi pembentukan *Holding Subholding* di PLN *Group*, dimana PLN Indonesia Power menjadi *subholding* pembangkitan.

PLN Indonesia Power's tax deposit in 2023 amounted to IDR 4.21 trillion, an increase of 121.17% compared to 2022. The increase was the additional impact of the transfer of business from the corporate action of the formation of Subholding Holding in the PLN Group, where PLN Indonesia Power became a generation subholding.

Perusahaan juga mengimplementasikan PMK No. 66 tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/ atau Kenikmatan dalam pengelolaan PPh 21. PLN Indonesia Power ditunjuk sebagai wajib pungut PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Perusahaan melaksanakan kewajiban

The company also implements PMK No. 66 of 2023 concerning Income Tax Treatment of Reimbursement or Reward in Connection with Work or Services Received or Obtained in the Form of Natura and/or Enjoyment in the management of PPh 21. PLN Indonesia Power is appointed as a VAT collector in accordance with the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 37/PMK.03/2015 concerning the Appointment of Certain Business Entities to Collect, Deposit and Report Value Added Tax or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as Procedures for Collecting, Depositing and Reporting. The Company carries out tax obligations in the form of calculating, depositing and reporting in accordance with



perpajakan berupa perhitungan, penyetoran dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku atas PPh Karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan PBB, Materai dan retribusi yang dilakukan PLN Indonesia Power.

applicable regulations on Employee Income Tax, Corporate Income Tax, Periodic VAT and PBB. PBB, stamp duty and retribution carried out by PLN Indonesia Power.

Tabel Setoran Pajak (Rp juta)
Tax Payment (Rp million)

Keterangan Description	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
PPN Pungut Collected VAT	733.256	1.165.010	1.609.866	3.469.580	115,52%
PPN Impor VAT on Import	41.622	46.770	38.412	76.739	99,78%
Bea Masuk Import Duty	24.757	14.355	11.341	46.273	308,02%
PPh 21 Income Tax 21	146.199	159.542	211.471	559.374	250,61%
PBB, Materai dan Retribusi Land and Building Tax, Stamp Duty, and Levy	93.611	85.285	31.593	56.175	77,81%
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payment	**1.039.445**	**1.470.962**	**1.902.683**	**4.208.141**	**121,17%**

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power mendapatkan fasilitas dari Pemerintah yaitu fasilitas pembebasan, pemungutan dan pemotongan pajak (PPh 22 Impor/PPN Impor/PPh 22/PPh 23) sebesar Rp893,00 miliar sesuai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh No. KET-00006/IMPOR/KPP.1903/2023, KET-00011/PPUT/KPP.1903/2023, dan KET-00010/PPUT/KPP.1903/2023, Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai No. KET-00117/PPN/KPP.1903/2023, dan fasilitas pembebasan Bea Masuk sebesar Rp12.127 juta sesuai *Certificate of Origin* No. 220418050171901205, 220580097175101905, 230013763179601605, dan 9613 untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 1/PJ/2011 jo PER - 21/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PMK.50/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, dan PMK.56/PMK.010/2022 jo. PMK 91/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia Dan Negara-Negara EFTA.

In 2023, PLN Indonesia Power received facilities from the Government, namely tax exemption, collection and withholding facilities (PPh 22 Import / VAT Import / PPh 22 / PPh 23) amounting to Rp893.00 billion according to the Certificate of Exemption (SKB) of Income Tax Withholding and / or Collection No. KET-00006/IMPOR/KPP.1903/2023, KET-00011/PPUT/KPP.1903/2023, and KET-00010/PPUT/KPP.1903/2023, Certificate of Exemption (SKB) of Value Added Tax No. KET-00117/PPN/KPP.1903/2023, and Import Duty exemption facilities amounting to Rp12,127 million according to Certificate of Origin No. 220418050171901205, 220580097175101905, 230013763179601605, and 9613 to utilize the facilities provided by the Directorate General of Taxes in accordance with the Director General of Taxes Regulation No. PER - 1/PJ/2011 jo. PER - 21/PJ/2014 concerning Procedures for Submitting Applications for Exemption from Withholding and/or Collection of Income Tax by Other Parties, Minister of Finance Regulation (PMK) No. 268/PMK.03 /2015 concerning Procedures for Granting Facilities Exempted from the Imposition of Value Added Tax on Import and/or Delivery of Certain Strategic Taxable Goods and Procedures for Payment of Value Added Tax on Certain Strategic Taxable Goods that have been Exempted and Imposition of Sanctions, Minister of Finance Regulation (PMK) No. PMK.50/PMK.010/2022 concerning Determination of Import Duty Rates in the Framework of an Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan Regarding an Economic Partnership, and PMK.56/PMK.010/2022 jo. PMK 91/PMK.010/2022 on the Determination of Import Duty Rates in the Framework of the Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States.

Tabel Pembebasan Nilai Pajak (Rp juta)
Tax Exemption (Rp million)

Keterangan Description	2020	2021	2022	2023	Peningkatan (Penurunan) 2022-2023 Increase (Decrease) 2022-2023
PPh 22 Impor Import Income Tax 22	9.485	8.690	5.985	19.463	225,20%
PPN Impor VAT on Import	201.688	1.931	403	48.235	11.868,98%
PPh 22 Income Tax 22	426.326	302.129	193.851	812.147	318,95%
PPh 23 Income Tax 23	25.509	43.842	20.403	12.262	(39,90)%
Jumlah Pembebasan Nilai Pajak Total Tax Exemption	**663.008**	**356.592**	**220.642**	**892.107**	**304,32%**

Permasalahan Pajak
Tax Issues

Selama tiga tahun terakhir, PLN Indonesia Power tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun.

For the last three years, PLN Indonesia Power has not obtained any guilty verdict from the highest tax court regarding any tax issues.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2023
Comparison of Target and Realization in 2023

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit
Comparison of Target and Realization of Power Plant Performance

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Perusahaan Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of the Company's Power Plant Performance in 2023

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja EAF Pembangkit PLN Indonesia Power Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of PLN Indonesia Power's Power Plant EAF Performance in 2023

(dalam %) (in %)

Kinerja Pembangkit Power Plant Performance	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
EAF Pembangkit di Jawa Bali EAF of Power Plants in Java-Bali			
- EAF Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EAF	86,85	85,66	98,63
- EAF Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EAF	95,86	95,09	99,20
EAF Pembangkit di Luar Jawa Bali EAF of Power Plants outside Java-Bali			
- EAF Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EAF	73,76	77,72	105,37
- EAF Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EAF	91,96	91,78	99,80

Pencapaian EAF Pembangkit PLTU Batubara di Jawa Bali tahun 2023 adalah sebesar 98,63% dan EAF Pembangkit Non PLTU Batubara di Jawa Bali sebesar 99,20%. Pencapaian EAF di tentukan dari Pelaksanaan *Outage Unit* PLTU yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

The EAF of Coal SPP in Java-Bali in 2023 was 98.63%, whereas the EAF of Non-Coal SPP in Java-Bali was 99.20%. The EAF achieved was determined according to steam power plant outages which followed the schedule and in a timely manner.

Pencapaian EAF Pembangkit PLTU Batubara di Luar Jawa Bali tahun 2023 adalah sebesar 105,37% dan EAF Pembangkit Non PLTU Batubara di Luar Jawa Bali sebesar 99,80%. Pencapaian EAF ditentukan dari Pelaksanaan *Outage* Unit Non PLTU yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

The EAF of Coal SPP outside Java-Bali in 2023 was 105.37%, whereas the EAF of Non-Coal SPP outside Java-Bali was 99.80%. The EAF achieved was determined according to non-steam power plant outages which followed the schedule and in a timely manner.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja EFOR Pembangkit PLN Indonesia Power Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of PLN Indonesia Power's Power Plant EFOR Performance in 2023

(dalam %) (in %)

Kinerja Pembangkit Power Plant Performance	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
EFOR Pembangkit di Jawa Bali EFOR of Power Plants in Java-Bali			
- EFOR Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EFOR	2,46	3,38	62,60
- EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EFOR	0,94	0,77	110,00
EFOR Pembangkit di Luar Jawa Bali EFOR of Power Plants outside Java-Bali			
- EFOR Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EFOR	14,94	13,44	110,00
- EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EFOR	5,09	5,19	98,04

Pencapaian EFOR Pembangkit PLTU Batubara di Jawa Bali tahun 2023 adalah sebesar 62,60% dan EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara di Jawa Bali sebesar 110,00%. Pencapaian EFOR ditentukan oleh perencanaan *Preventive Maintenance* (PM) Unit PLTU yang memadai dan eksekusi penanggulangan kerusakan yang terjadi.

The EFOR of Coal SPP in Java-Bali in 2023 was 62.60%, whereas the EFOR of Non-Coal SPP in Java-Bali was 110.00%. The EFOR achieved was determined according to proper steam power plant Preventive Maintenance (PM) planning and repair works.

Pencapaian EFOR Pembangkit PLTU Batubara di Luar Jawa Bali tahun 2023 adalah sebesar 110,00% dan EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara di Luar Jawa Bali sebesar 98,04%. Pencapaian EFOR ditentukan oleh perencanaan *Preventive Maintenance* (PM) Unit Non PLTU yang memadai dan eksekusi penanggulangan kerusakan yang terjadi.

The EFOR of Coal SPP outside Java-Bali in 2023 was 110.00%, whereas the EFOR of Non-Coal SPP outside Java-Bali was 105.30%. The EFOR achieved was determined according to proper non-steam power plant Preventive Maintenance (PM) planning and repair works.



Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja SFC Pembangkit PLN Indonesia Power Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of PLN Indonesia Power's Power Plant SFC Performance in 2023

Kinerja Pembangkit Power Plant Performance	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
SFC Batubara Coal (kg/kWh)	0,6466	0,6282	102,85%
SFC Gas (MMBTU/kWh)	0,0083	0,0083	100,00%
SFC BBM Oil Fuel (liter/kWh)	0,2916	0,2960	98,49%

Pencapaian SFC Pembangkit Batubara tahun 2023 adalah sebesar 62,60% dan EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara di Jawa Bali sebesar 110,00%. Pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh perencanaan dari pengadaan bahan bakar yang sesuai dengan perkiraan beban unit yang ditetapkan oleh P2B.

The SFC of Coal SPP in 2023 was 62.60%, whereas the EFOR of Non-Coal SPP in Java-Bali was 110.00%. The achievement was particularly contributed by appropriate fuel procurement planning according to estimated unit load set by P2B.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit O&M Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of O&M Power Plant Performance in 2023

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit O&M Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of O&M Power Plant Performance in 2023

Kinerja Pembangkit Power Plant Performance	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
UBP GBU Jeranjang			
EAF (%)	80,05	86,83	108,47%
EFOR (%)	5,00	4,31	110,00%
Tara Kalor Netto (kCal/kWh) Net Heat Rate (kCal/kWh)	3.627,00	4.528,83	75,14%
UBP GBU Holtekamp			
EAF (%)	63,32	55,59	87,80%
EFOR (%)	3,83	5,05	68,15%
SFC (kg/kWh)	1,2890	1,2901	99,91%

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Produksi, Penjualan serta Pemakaian Sendiri
Comparison of Target and Realization of Production, Sales, and Self-Consumption

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Produksi Energi Listrik
Comparison of Target and Realization of Electricity Production

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit O&M Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of Electricity Production in 2023

(dalam GWh kecuali dinyatakan lain (in GWh, unless otherwise stated)

	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
Jumlah Produksi Energi Listrik Total Electricity Production	78.734,67	84.199,86	106,94%

Realisasi Produksi Energi Listrik PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar 84.199,86 GWh dengan pencapaian 106,94% dari target RKAP 2023. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh peningkatan produksi di PLTU Batubara khususnya di wilayah Jawa karena kebutuhan sistem.

The realization of PLN Indonesia Power electricity production in 2023 was 84,199.86 GWh, with the achievement of 106.94% from the WP&B 2023 target. This was particularly contributed by increased production in Coal SPP, particularly in Java, due to system demands.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Penjualan Energi Listrik
Comparison of Target and Realization of Electricity Sales

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Penjualan Energi Listrik 2023
Comparison of Target and Realization of Electricity Sales in 2023

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
Jumlah Penjualan Energi Listrik Total Electricity Sales	74.403,53	79.664,84	107,07%

Realisasi Penjualan Energi Listrik PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar 79.664,84 GWh dengan pencapaian 107,07% dari target RKAP 2023. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh peningkatan produksi di PLTU Batubara khususnya di wilayah Jawa karena kebutuhan sistem.

The realization of PLN Indonesia Power electricity sales in 2023 was 79,664.84 GWh, with the achievement of 107.07% from the WP&B 2023 target. This was particularly contributed by increased production in Coal SPP, particularly in Java, due to system demands.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Pemakaian Sendiri (PS)
Comparison of Target and Realization of Self-Consumption

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi PS Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of Self-Consumption in 2023

	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target		Realisasi 2023 2023 Realization		Pencapaian Achievement
	GWh	%	GWh	%	GWh
Pemakaian Sendiri Self-Consumption	4.331,14	5,50%	4.535,02	5,39%	95,29%

Realisasi PS Energi Listrik PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar 4.535,02 GWh dengan pencapaian 95,29% dari target RKAP 2023. Hal tersebut terutama dikarenakan oleh peningkatan pemakaian sendiri di PLTU Batubara yang dikontribusi oleh peningkatan produksi.

The realization of PLN Indonesia Power self-consumption in 2023 was 4,535.02 GWh, with the achievement of 95.29% from the WP&B 2023 target. This was mainly contributed by the increase in self-consumption in Coal SPP due to increased production.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Keuangan
Comparison of Target and Realization of Financial Performance

Perbandingan antara Target dan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of Financial Position in 2023

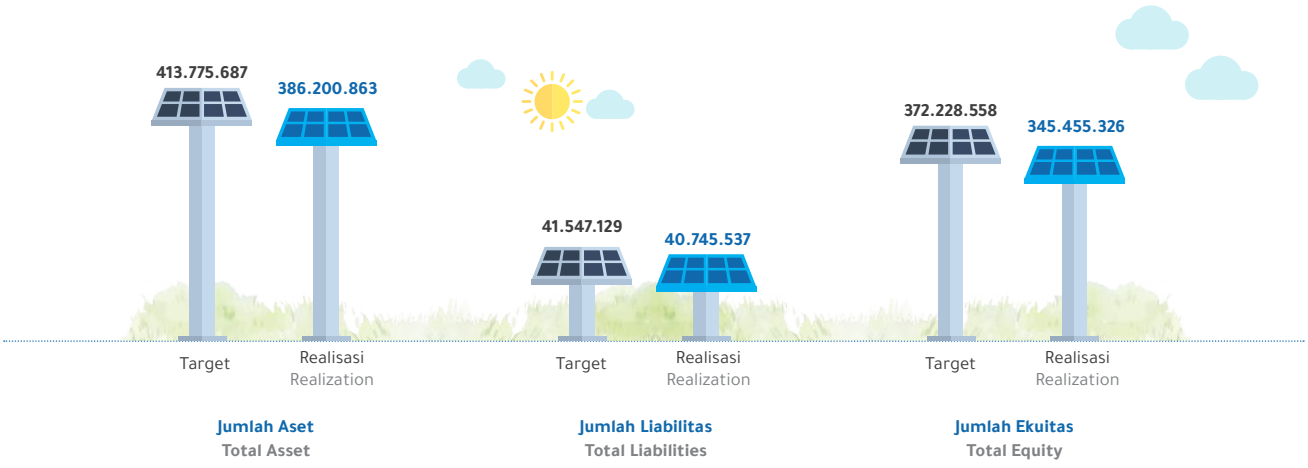
Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of Financial Position in 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
Aset Lancar Current Assets	46.924.963	62.191.430	132,53%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	366.850.724	324.009.433	88,32%
Jumlah Aset Total Assets	**413.775.687**	**386.200.863**	**93,34%**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	10.202.522	12.620.923	123,70%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	31.344.606	28.124.614	89,73%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**41.547.129**	**40.745.537**	**98,07%**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**372.228.558**	**345.455.326**	**92,81%**



Grafik Perbandingan antara Target dengan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2023 (dalam jutaan Rupiah)
Chart of Comparison of Target and Realization of Financial Position in 2023 (in million Rupiah)



Realisasi Jumlah Aset tahun 2023 adalah sebesar Rp386,20 triliun dengan pencapaian 93,34% dari target RKAP 2023. Realisasi ini terutama dipengaruhi oleh adanya beberapa project yang direncanakan COD di 2023 namun meluncur ke tahun 2024 yaitu Tambak Lorok Blok 3 dan BMPP Nusantara 1.

The actual Total Assets in 2023 was Rp386.20 trillion, with 93.34% achievement of the WP&B 2023 target. This was mainly due to the reschedule of Tambak Lorok Block 3 and BMPP Nusantara 1 CODs. Planned to be launched in 2023, both projects have just been commercially operating since 2024.

Realisasi Jumlah Liabilitas tahun 2023 adalah sebesar Rp49,75 triliun dengan pencapaian 98,07% dari target RKAP 2023. Realisasi ini terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan pada liabilitas pajak tangguhan.

The actual Total Liabilities in 2023 was Rp49.75 trillion, with 98.07% achievement of the WP&B 2023 target. This was mainly due to a decline in deferred tax liabilities.

Realisasi Jumlah Ekuitas tahun 2023 adalah sebesar Rp345,46 triliun dengan pencapaian 92,81% dari target RKAP 2023. Realisasi ini terutama dipengaruhi oleh adanya perbedaan nilai asumsi penambahan modal atas serah terima aset.

The actual Total Equity in 2023 was Rp345.46 trillion, with 92.81% achievement of the WP&B 2023 target. This was particularly affected by the difference in assumption value of capital injection from asset transfer.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Laba Rugi Tahun 2023

Comparison of Target and Realization of Profit/Loss in 2023

Perusahaan memiliki dua bentuk penyajian yaitu berdasarkan angka laporan keuangan yang diaudit dan berdasarkan angka untuk pelaporan kepada Pemegang Saham. Perbedaan penyajian ini dilatarbelakangi oleh RKAP PLN Indonesia Power yang disahkan oleh Pemegang saham sebagai program kerja dan target yang harus dicapai perusahaan tidak mengadopsi penerapan ISAK 16 Konsesi Jasa (Laporan Keuangan Audit). Hal ini dikarena PT PLN Persero Selaku pemegang saham mengadopsi POJK 6 bahwa pembelian tenaga listrik diberlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun PJBTL Suralaya 1-7 yang merupakan pembangkit kepemilikan PLN Indonesia Power mempunyai masa kontrak 30 tahun sehingga terpenuhi ISAK 16 Konsesi Jasa, dalam RKAP secara target tetap disajikan dalam penjualan tenaga listrik. Untuk mempermudah pengukuran dan evaluasi manajemen maka disajikan laporan keuangan dengan struktur penyajian seperti RKAP.

The Company's financial statements are presented in two versions, i.e. The audited financial statements and the financial statements containing the figures to be submitted to the Shareholders. Such arrangement is based on the fact that PLN Indonesia Power WP&B which was approved by the Shareholders to contain the Company's work plans and targets did not adopt ISAK 16 - Service Concession (Audited Financial Statements). PT PLN (Persero) as the shareholder adopts OJK Regulation No. 6 which states that electricity purchase is treated as power purchase. On the other hand, PJBTL Suralaya 1-7 which belonged to PLN Indonesia Power is under a 30-year contract which therefore a subject to ISAK 16 - Service Concession. In the WP&B, its target remains presented in electricity sales. For easier management evaluation and measurement, the financial statements are presented in the structure similar to the Work Plan and Budget.

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Laba Rugi Tahun 2023 berdasarkan Penyajian Laporan Keuangan Audited Konsolidasian
Comparison of Target and Realization of Profit/Loss in 2023 as Presented in Consolidated Audited Financial Statements

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Revenue	98.386.883	103.480.111	105,18%
Beban Usaha Operating Expenses	85.654.051	83.553.102	97,55%
Laba Usaha Operating Income	12.732.831	19.927.009	156,50%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	9.233.172	8.189.314	88,69%

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Laba Rugi Tahun 2023 berdasarkan Penyajian Laporan kepada Pemegang Saham
Comparison of Target and Realization of Profit/Loss in 2023 as Presented in Reports to Shareholders

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Revenue	99.255.467	103.645.151	104,42%
Beban Usaha Operating Expenses	87.580.832	84.581.791	96,58%
Laba Usaha Operating Income	11.674.635	19.063.359	163,29%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	8.106.653	14.568.366	179,71%

Penjelasan terkait realisasi laba rugi di bawah adalah uraian penyajian sesuai pelaporan kepada Pemegang Saham.

Details on profit/loss below cover the figures presented to the Shareholders.

Realisasi Pendapatan Usaha tahun 2023 adalah sebesar Rp103,65 triliun dengan pencapaian 104,42% dari target RKAP 2023. Realisasi ini terutama dipengaruhi oleh tidak tercapainya target pendapatan usaha lainnya.

The actual Revenue in 2023 was Rp103.65 trillion, with 104.42% achievement of the WP&B 2023 target. This was mainly due to the unmet target of other revenues.

Realisasi Beban Usaha tahun 2023 adalah sebesar Rp84,58 triliun dengan pencapaian 96,58% dari target RKAP 2023. Realisasi ini terutama dipengaruhi oleh adanya efisiensi pada biaya pemeliharaan dan juga biaya bahan bakar yang didukung oleh program *Value Creation*.

The actual Operating Expenses in 2023 were Rp84.58 trillion, with 96.58% achievement of the WP&B 2023 target. This was particularly due to an efficiency in maintenance cost and fuel cost as a result of the Value Creation program.

Realisasi Laba Tahun Berjalan tahun 2023 adalah sebesar Rp14,57 triliun dengan pencapaian 179,71% dari target RKAP 2023. Realisasi ini terutama didukung adanya efisiensi dari sisi biaya usaha dan adanya kenaikan produksi (GWh).

The actual Profit for the Year in 2023 was Rp14.57 trillion, with 179.71% achievement of the WP&B 2023 target. This was mainly supported by the efficiency of operating cost and increased production (GWh).

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Struktur Modal
Comparison of Target and Realization of Capital Structure

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of Capital Structure in 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target		Realisasi 2023 2023 Realization		Pencapaian Achievement
	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	
Liabilitas Liabilities	41.547.129	10,04%	40.745.537	10,55%	101,97%
Ekuitas Equity	372.228.558	89,96%	345.455.326	89,45%	107,75%
Aset Assets	413.775.687	100,00%	386.200.863	100,00%	107,14%

Pada tahun 2023 Aset yang dibiayai oleh Liabilitas sebesar 10,55%, yaitu telah mencapai target RKAP 2023 sebesar 101,97%. Sementara itu, Aset yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar 89,45%, yaitu mencapai target RKAP 2023 sebesar 107,75%.

In 2023, the Liability-backed Assets were 10.55%, which has meet the WP&B 2023 target by 101.97%. Meanwhile, the Equity-backed Assets were 89.45%, which met the WP&B 2023 target by 107.75%.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Pengembangan SDM

Comparison of Target and Realization of Human Capital Development

Terkait dengan pengembangan SDM terdapat beberapa indikator yaitu jumlah pelatihan dan biaya pelatihan.

Pertaining to HC development, several indicators are involved, i.e. Total trainings and training cost.

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of Human Capital Development in 2023

Uraian Description	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
Jumlah Pelatihan (kali) Total Trainings (time)	1.177	1177	100,00%
Biaya Pelatihan (Rp miliar) Training Cost (Rp billion)	88,54	81,94	93,00%

Realisasi jumlah pelatihan tahun 2023 sebanyak 1.177 kali pelatihan dengan pencapaian 100,00% dari target RKAP 2023. Sedangkan untuk, realisasi biaya pelatihan tahun 2023 adalah Rp81,94 miliar dengan pencapaian 93,00% dari target RKAP 2023.

The actual number of trainings participated in 2023 was 1,177 times, which met the WP&B 2023 target by 100.00%. The actual spending for trainings in 2023 was Rp81.94 billion, which met the WP&B 2023 target by 93.00%.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran

Comparison of Target and Realization of Marketing Aspect

Terkait dengan aspek pemasaran terdapat indikator yang ditentukan yaitu pangsa pasar dan survei kepuasan pelanggan.

Pertaining to the marketing aspect, several indicators are involved, i.e. market share and customer satisfaction survey.

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran Tahun 2023
Comparison of Target and Realization of Marketing Aspect in 2023

(dalam %) (in %)

Uraian Description	Target RKAP 2023 WP&B 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
Pangsa Pasar Market Share	28,48%*	26,95%**	94,63%
Survei Kepuasan Pelanggan Korporat (Skala Likert) Corporate Customer Satisfaction Survey (Likert Scale)	83%	88,34%	106,43%
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Non PLTU Batubara (Skala Likert) Customer Satisfaction Survey for Non-Coal SPP (Likert Scale)	79%	88,02%	111,42%
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Jasa O&M (Skala Likert) Customer Satisfaction Survey for O&M Service Power Plants (Likert Scale)	83,00	85,78	103,35%

* target pangsa pasar berdasarkan Rencana Operasi Tahunan (ROT) di Jawa - Bali
** realisasi pangsa pasar merupakan realisasi kontribusi produksi PLN Indonesia Power di dalam dan luar Jawa

* market share target according to Java-Bali Annual Operation Plan (ROT)
** market share realization comprises the actual production of PLN Indonesia Power in and outside Java

Realisasi pangsa pasar tahun 2023 adalah sebesar 26,95% dengan pencapaian sebesar 94,63% dari target tahun 2023.

The market share realization in 2023 was 26.95%, which is 94.63% of the 2023 target.

Realisasi Survei Kepuasan Pelanggan Korporat Tahun 2023 adalah 88,34% dengan pencapaian 106,43% dari target tahun 2023. Pencapaian ini didukung oleh Kinerja pembangkit yang dikelola oleh PLN Indonesia Power semakin meningkat serta dirasakan memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan Perusahaan, sehingga pelanggan merasa *loyal* dan *engage*.

The corporate customer satisfaction survey in 2023 resulted an actual score of 88.34% which is 106.43% of the 2023 target. Thanks to improved performance of power plants under PLN Indonesia Power's management, corporate customers received excellent services. This has helped increasing their loyalty and engagement.

Realisasi Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Jasa O&M Tahun 2023 adalah 85,78% dengan pencapaian 103,35% dari target tahun 2023. Pencapaian ini didukung oleh Kinerja pembangkit Jasa O&M yang dikelola oleh PLN Indonesia Power semakin meningkat serta mampu mencapai *Service Level Agreement* (SLA) yang dipersyaratkan pelanggan.

The O&M Services customer satisfaction survey in 2023 resulted an actual score of 85.78% which is 103.35% of the 2023 target. Thanks to improved performance of O&M Service power plants under PLN Indonesia Power's management, the Service Level Agreement (SLA) was met according to customers' requirement.



Pencapaian KPI
KPI Achievement

Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan merupakan ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menggunakan KPI sebagai cerminan dari target, *progress* dan pencapaian tujuan. KPI yang menjadi kesepakatan antara Pemegang saham dan Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam suatu Kontrak Manajemen Tahunan yang disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

The Key Performance Indicators focus on the most dominant aspects of performance in the Company, to determine its success currently and in the future. Thus, KPIs are utilized as the reflection of the achievement of the Company's targets, progresses, and goals. KPIs which have been agreed upon by the Shareholders and the Board of Commissioners and the Board of Directors are written in the Annual Management Contract executed during the General Meeting of Shareholders.

KPI tahun buku 2023 diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023, serta Kontrak Manajemen tanggal 30 Januari 2023, Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menyepakati Kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2023.

The KPI for fiscal year 2023 was decided at the General Meeting of Shareholders (GMS) on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 on January 30, 2023, as well as the Management Contract on January 30, 2023, the Company's Shareholders, Board of Commissioners and Directors agreed on the Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) for 2023.

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2023
KPI Achievements in 2023

No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Desember 2023 December, 2023			Nilai Value
				Target	Realisasi Realization	Pencapaian *) Achievement *)	
A	***Economic and Social Value***		**37**				**37,63**
1	*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA)	Rp Miliar	5	24.196,58	32.564,58	110,00%	5,50
2	Biaya Pokok Penyediaan (BPP Pembangkit) Power Plant Production Cost	Rp/kWh	4	1.162,30	1.034,65	110,00%	4,40
3	*Return on Invested Capital* (ROIC)	%	5	3,10	3,23	104,12%	5,20
4	*Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Pembangkit Jawa Bali Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Java-Bali Power Plants		5				4,31
	a. EFOR Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EFOR	%		2,46	3,38	62,60%	
	b. EFOR Pembangkit non PLTU Batubara Non-Coal SPP EFOR	%		0,94	0,77	110,00%	
5	*Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Pembangkit Luar Jawa Bali Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of outside Java-Bali Power Plants		4				4,16
	a. EFOR Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EFOR	%		14,94	13,44	110,00%	
	b. EFOR Pembangkit non PLTU Batubara Non-Coal SPP EFOR	%		5,09	5,19	98,04%	
6	*Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Jawa Bali Equivalent Availability Factor (EAF) of Java-Bali Power Plants		5				4,94
	a. EAF Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EAF	%		86,85	85,66	98,63%	
	b. EAF Pembangkit non PLTU Batubara Non-Coal-Fired Steam Power Plants EAF	%		95,86	95,08	99,20%	
7	*Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Luar Jawa Bali Equivalent Availability Factor (EAF) of outside Java-Bali Power Plants		4				4,10
	a. EAF Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EAF	%		73,76	77,72	105,37%	
	b. EAF Pembangkit non PLTU Batubara Non-Coal SPP EAF	%		91,96	91,78	99,80%	



No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Desember 2023 December, 2023			Nilai Value
				Target	Realisasi Realization	Pencapaian *) Achievement *)	
8	*Fuel Consumption and Heat Rate/ Specific Fuel Consumption* (SFC)		5				5,02
	a. Batubara Coal	kg/kWh		0,6466	0,6282	102,85%	
	b. Gas	mmbtu/kWh		0,0083	0,0083	100,00%	
	c. BBM Oil	liter/kWh		0,2916	0,2960	98,49%	
B	**Business Model Innovation**		**27**				**27,60**
1	Pemenuhan *Risk Maturity Index* (RMI) Risk Maturity Index (RMI) Compliance	Level	4	Semester I: 4,07 Semester II: 4,10	4,28	104,39%	4,17
2	Pendapatan *Beyond* kWh Revenue from Beyond kWh		6				5,53
	a. Pendapatan dari luar PLN Group Revenue from outside PLN Group	Rp Miliar		672,53	501,77	74,60%	
	b. Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri Total Business Contract Abroad	Kontrak		2,00	3,00	110,00%	
3	Sinergi Antar *Sub Holding* & Anak Perusahaan lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN) Synergy between Other Sub Holding & Subsidiaries (excluding synergy between PLN Units)	Rp Miliar	4	452,38	689,51	110,00%	4,40
4	*Share of EBT Production* (Bauran Energi/EBT) Share of NRE Production (NRE Mix)	%	4	13,39	13,39	100,00%	4,00
5	*Carbon Emission Reduction*	%	5	0,094	0,190	110,00%	5,50
6	*Strategic Partnership GenCo*	Milestone	4	Penandatanganan *Partnership* GenCo Signing of GenCo Partnership	*Consortium Agreement*	100,00%	4,00
C	***Technology Leadership***		**14**				**15,19**
1	*Digital Power Plant Implementation*	Unit (kumulatif) Unit (cumulative)	5	38 Laporan Implementasi 7 BA *Go Live* 38 Implementation Reports 7 BA Go Live	40 Laporan Implementasi 7 BA *Go Live* 40 Implementation Reports 7 BA Go Live	110,00%	5,50
2	*Value Creation*		4				4,31
	a. Efisiensi Biaya Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Maintenance Cost Efficiency	Rp Miliar Rp Billion		64,00	155,09	110,00%	
	b. Efisiensi NPHR NPHR Efficiency	Rp Miliar Rp Billion		205,00	216,32	105,52%	
3	Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara Primary Energy - Coal Supply Guarantee	Hari Operasi Operating Day	5	15-26	20,41	107,73%	5,38
D	***Energize Investment***		**14**				**14,18**
1	EPC *project completion*	%	5	100% sesuai *milestone* 100% as permilestone	95,90	95,90%	4,79
2	*Total of units with PROPER (Beyond Compliance)*	Jumlah Unit Number of Units	5	22,00	25,00	110,00%	5,50
3	Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023 Control of Investment Budget Utilization according to WP&B 2023	%	4	95%-100% sesuai penetapan RKAP 2023 95%-100% as per 2023 RKAP stipulation	92,54	97,41%	3,89

No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Desember 2023 December, 2023			Nilai Value
				Target	Realisasi Realization	Pencapaian *) Achievement *)	
E	***Unleash Talent***		**8**				**8,80**
1	Pengembangan *Talent* Pegawai Employee Talent Development		4				4,40
	a. *Talent* Milenial (≤ 42 tahun) Millennial Talent (≤ 42 y.o.)	%		9,00	40,00	110,00%	
	b. Perempuan dalam *Nominated Talent* Women in Nominated Talent	%		22,00	25,00	110,00%	
2	*Risk and Digital Talent*		4				4,40
	a. Sertifikasi Manajemen Risiko Pegawai Employee Risk Management Certification	Pegawai Employees		Semester I: 15 (Januari - Juni) Tahun 2023: 50 (Januari - Desember) Semester I: 15 (January - June) 2023: 50 (January - December)	58,00	110,00%	
	b. Program *Making Digital Talent* 'Making Digital Talent' Program	%		7,00	8,50	110,00%	
F	***Compliance***						
1	*Compliance (GCG,Safety, Security & Environment*, SPI, *Reporting)*		Max -10				**0,00**
	JUMLAH **TOTAL**		100,00				**103.40**

*) Untuk pencapaian ≥ 110,00% ditulis 110,00%

*) For achievement ≥ 110.00% written as 110.00%



Proyeksi dan Target Tahun 2024
Projection and Target for 2024

Proyeksi dan target tahun 2024 ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024.

Projections and targets for 2024 are set out in the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP).

Proyeksi dan Target Kinerja Pembangkit
Power Plant Performance Projection and Target

Proyeksi dan Target Kinerja Pembangkit PLN Indonesia Power Tahun 2024
PLN Indonesia Power's Power Plant Performance Projection and Target for 2024

Tabel Proyeksi dan Target Kinerja Pembangkit PLN Indonesia Power Tahun 2024
PLN Indonesia Power's Power Plant Performance Projection and Target for 2024

Kinerja Pembangkit Power Plant Performance	Target RKAP 2024 WP&B 2024 Target
EAF Pembangkit (%) Power Plant EAF (%)	
- EAF Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EAF	82,43
- EAF Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EAF	91,02
EFOR Pembangkit (%) Power Plant EFOR (%)	
- EAF Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EFOR	5,30
- EAF Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EFOR	1,57
SFC Pembangkit Power Plant SFC	
- SCF Pembangkit - Batubara (kg/kWh) Coal Power Plant SFC (kg/kWh)	0,6577
- SCF Pembangkit - Gas (MMBTU/kWh) Gas Power Plant SFC (MMBTU/kWh)	0,0083
- SCF Pembangkit - BBM (liter/kWh) Oil Power Plant SFC (liter/kWh)	0,3089

Pada tahun 2024, EAF Pembangkit PLTU Batubara ditargetkan sebesar 82,43% dan EAF Pembangkit Non PLTU Batubara sebesar 91,02%. Penetapan target EAF 2024 dilandaskan oleh perencanaan *outage* yang telah terjadwal pada tahun 2024.

For 2024, the EAF for Coal SPP is targeted at 82.43% while EAF for Non-Coal SPP is targeted at 91.02%. The EAF target for 2024 is determined based on the scheduled outages for the same year.

Pada tahun 2024, EFOR Pembangkit PLTU Batubara ditargetkan sebesar 5,30% dan EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara sebesar 1,57%. Penetapan target EFOR tahun 2024 dilandaskan pada penguatan pelaksanaan PM *excellent* dan pengurangan kemungkinan gangguan yang akan terjadi.

For 2024, the EFOR for Coal SPP is targeted at 5.30% while EFOR for Non-Coal SPP is targeted at 1.57%. The EFOR target for 2024 is determined based on the strengthening of excellent PM and reduction of possible outages.

Pada tahun 2024, SCF Pembangkit - Batubara ditargetkan sebesar 0,6577 kg/kWh, SCF Pembangkit - Gas ditargetkan sebesar 0,0083 MMBTU/kWh, dan SCF Pembangkit - BBM ditargetkan sebesar 0,3089 liter/kWh. Penetapan target SFC tahun 2024 dilandaskan pada target SFC yang diturunkan oleh DJK ke pada PLN.

For 2024, Coal Power Plant SFC is targeted at 0.6577 kg/kWh, Gas Power Plant SFC at 0.0083 MMBTU/kWh, and Oil Power Plant SFC at 0.3089 liter/kWh. The SFC target for 2024 is determined based on the SFC target mandated by the Directorate General of Electricity to PLN.

Proyeksi dan Target Produksi, Penjualan serta Pemakaian Sendiri
Projection and Target of Production, Sales, and Self-Consumption

Proyeksi dan Target Produksi Listrik Tahun 2024
Electricity Production Projection and Target for 2024

Target produksi energi listrik pada tahun 2024 adalah sebesar 76.797,05 GWh dengan asumsi sesuai dengan alokasi produksi yang telah disusun bersama PT PLN (Persero) dan PLN UIP2B/ P3B.

The electricity production target for 2024 is 76,797.05 GWh, under the assumption according to the production allocation prepared jointly by PT PLN (Persero) and PLN UIP2B/P3B.



Proyeksi dan Target Penjualan Listrik Tahun 2024
Electricity Sales Projection and Target for 2024

Target penjualan energi listrik pada tahun 2024 adalah sebesar 72.714,48 GWh dengan asumsi sesuai dengan alokasi produksi yang telah disusun bersama PT PLN (Persero) dan PLN UIP2B/ P3B.

The electricity sales target for 2024 is 72,714.48 GWh, under the assumption according to the production allocation prepared jointly by PT PLN (Persero) and PLN UIP2B/P3B.

Proyeksi dan Target Pemakaian Sendiri Tahun 2024
Electricity Self-Consumption Projection and Target for 2024

Target pemakaian sendiri pada tahun 2024 adalah sebesar 4.082,57 GWh dengan asumsi sesuai dengan produksi tahun 2024.

The self-consumption target for 2024 is 4,082.57 GWh, under the assumption according to 2024 production.

Proyeksi dan Target Kinerja Keuangan
Financial Projection and Target

Proyeksi dan Target Posisi Keuangan Tahun 2024
Financial Position Projection and Target for 2024

Tabel Proyeksi dan Target Tahun 2024
Projection and Target for 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2024 WP&B 2024 Target
Aset Lancar Current Assets	63.701.170
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	339.999.606
Jumlah Aset Total Assets	**403.700.775**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	9.823.966
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	33.315.234
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**43.139.200**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**360.561.575**

Target Jumlah Aset tahun 2024 adalah sebesar Rp403,70 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi terdapat beberapa *project* yang COD di 2024 diantaranya: Tambak Lorok Blok 3 dan BMPP Nusantara 1.

The Total Assets are targeted to stand at Rp403.70 trillion in 2024. The target is set according to the assumption that several projects will launch their COD in 2024. They are: Tambak Lorok Block 3 and BMPP Nusantara 1.

Target Jumlah Liabilitas tahun 2024 adalah sebesar Rp43,14 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 118% dari realisasi audited 2023 dominan disebabkan oleh kenaikan beban pajak tangguhan, sedangkan liabilitas jangka pendek menurun sebesar 78% dari realisasi *audited* 2023 dominan disebabkan oleh menurunnya utang usaha.

The Liabilities are targeted to stand at Rp43.14 trillion in 2024. The target is set under the assumption that current liabilities will increase by 118% from the realized 2023 audited target, particularly due to increase in deferred tax expenses. Meanwhile, non-current liabilities is predicted to decline by 78% from the realized 2023 audited target, particularly due to declining trade payables.

Target Jumlah Ekuitas tahun 2024 adalah sebesar Rp360,56 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi meningkatnya target laba usaha pada tahun 2024.

Total Equity is targeted to stand at Rp360.56 trillion in 2024. The target is set under the assumption of increasing operating income by 2024.



Proyeksi dan Target Laba Rugi Tahun 2024
Profit/Loss Projection and Target for 2024

Tabel Proyeksi dan Target Laba Rugi Tahun 2024
Profit/Loss Projection and Target for 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2024 WP&B 2024 Target
Pendapatan Usaha Revenue	106.368.374
Beban Usaha Operating Expenses	92.525.865
Laba Usaha Operating Income	13.842.508
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	9.484.881

Target Pendapatan Usaha tahun 2024 adalah sebesar Rp106,37 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi target penjualan (GWh) korporat sesuai alokasi neraca energi dari PT PLN (Persero), target pendapatan Jasa O&M yang dikelola pada tahun 2024 dan target *beyond* KWh korporat sesuai penetapan target dari PT PLN (Persero).

Revenue is targeted to stand at Rp106.37 trillion in 2024. The target is set under the assumption of corporate sales target (GWh) according to energy balance allocation from PT PLN (Persero), O&M Services revenue target for 2024 management, and corporate beyond kWh target according to PT PLN (Persero)'s stipulation.

Target Beban Usaha tahun 2024 adalah sebesar Rp92,53 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi kebutuhan energi primer sesuai dengan alokasi produksi dari PT PLN (Persero) dan kebutuhan untuk tetap menjaga keandalan unit pembangkit, kurs mata uang, dan harga satuan biaya bahan bakar.

Operating Expenses is targeted to stand at Rp92.53 trillion in 2024. The target is set under the assumption of primary energy needs according to production allocation from PT PLN (Persero) and the need for maintaining unit reliability, exchange rate, and fuel unit price.

Target Laba Tahun Berjalan tahun 2024 adalah sebesar Rp9,48 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi laba tahun 2024 disusun dengan strategi *Tax Planning* Perusahaan dan *Sustainability Principle*.

Profit for the Year is targeted to stand at Rp9.48 trillion in 2024. The target is set under the assumption of 2024 profit, prepared using Corporate Tax Planning and Sustainability Principles.

Proyeksi dan Target Struktur Modal
Capital Structure Projection and Target

Tabel Proyeksi dan Target Struktur Modal Tahun 2024
Capital Structure Projection and Target for 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2024 WP&B 2024 Target	
	Rp juta Rp million	%
Liabilitas Liabilities	43.139.200	10,69
Ekuitas Equity	360.561.575	89,31
Aset Assets	403.700.775	100,00

Pada tahun 2024 ditargetkan, jumlah Aset yang dibiayai oleh Liabilitas sebesar 10,69% dan Aset yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar 89,31%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi terdapat beberapa *project* yang COD di 2024 diantaranya: Tambak Lorok Blok 3, BMPP Nusantara 1, liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 101% dari realisasi *audited* 2023 dominan disebabkan oleh kenaikan beban pajak tangguhan sedangkan liabilitas jangka pendek menurun sebesar 78% dari realisasi *audited* 2023 dominan disebabkan oleh menurunnya utang usaha, meningkatkan target laba usaha pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi *audited* 2023.

For 2024, total Liability-backed Assets is targeted at 10.69%, while total Equity-backed Assets is targeted at 89.31%. The target is set according to the assumption that several projects will launch their COD in 2024. They are: Tambak Lorok Block 3, BMPP Nusantara 1, non-current liabilities increase 101% from the audited 2023 realization, particularly due to increased deferred tax expense. Meanwhile, current liabilities decline 78% from audited 2023 realization, mainly due to reduced trade payables hence increasing operating income target for 2024 when compared to audited 2023 realization.



Proyeksi dan Target Pengembangan SDM
Human Capital Development Projection and Target

Terkait dengan pengembangan SDM terdapat beberapa indikator yaitu jumlah pelatihan dan biaya pelatihan.

Pertaining to HC development, several indicators are involved, i.e. Total trainings and training cost.

Tabel Proyeksi dan Target Tahun 2024
Projection and Target for 2024

Uraian Description	Target RKAP 2024 WP&B 2024 Target
Jumlah Pelatihan (kali) Total Trainings (time)	640
Biaya Pelatihan (Rp miliar) Training Cost (Rp billion)	40,05

Target jumlah pelatihan tahun 2024 adalah 640 kali dengan jumlah biaya pelatihan sebesar Rp40,05 miliar.

For 2024, the trainings are expected to be held 640 times, at the total cost of Rp40.05 billion.

Proyeksi dan Target Aspek Pemasaran
Marketing Projection and Target

Tabel Proyeksi dan Target Aspek Pemasaran Tahun 2024
Marketing Projection and Target for 2024

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Projection
Pangsa Pasar Market Share	23,91%
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit PLTU Non Batubara (Skala *Likert*) Customer Satisfaction Survey for Non-Coal SPP (Likert Scale)	79,7%
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Jasa O&M (Skala *Likert*) Customer Satisfaction Survey for O&M Service Power Plants (Likert Scale)	83,00%

Target pangsa pasar tahun 2024 adalah 23,91% yang ditetapkan sesuai dengan ROT tahun 2024 yang disampaikan oleh PLN UIP2B, PLN P3B Sumatera, PLN P3B Kalimantan, dan PLN P3B Sulawesi.

For 2024, the market share is targeted at 23.91%, which was set according to Annual Operation Plan 2024 presented by PLN UIP2B, PLN P3B Sumatera, PLN P3B Kalimantan, and PLN P3B Sulawesi.

Target survei kepuasan pelanggan untuk pembangkit Non PLTU Batubara sebesar 79,7%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi perhitungan prognosa dari rata-rata target pencapaian per unit pembangkit baik pembangkit PLTU Batubara maupun PLTU Non Batubara.

Customer satisfaction survey targets for Non-Coal SPP which is set at 79.7%. The targets are set under the assumption of prognosis calculation of the average target achievement per power generation unit, both for Coal and Non-Coal SPP.

Target survei kepuasan pelanggan untuk pembangkit jasa O&M tahun 2024 sebesar 83,00% yang ditetapkan berdasarkan asumsi perhitungan prognosa dari rata-rata target pencapaian per unit pembangkit jasa O&M.

The customer satisfaction survey target for O&M Service power plants for 2024 is set at 83.00%, under the assumption of prognosis calculation of the average target achievement per O&M Service power plant.

Proyeksi dan Target Kebijakan Dividen Tahun 2024
Projection and Target Dividend Policy for 2024

Kebijakan dividen pada tahun 2024 ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan pertumbuhan kinerja Perusahaan.

The dividend policy in 2024 is determined through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS) by considering the Company's performance growth.



Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Kebijakan Pembagian Dividen
Dividend Sharing Policy

Kebijakan Dividen PLN Indonesia Power mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The Dividend Policy in PLN Indonesia Power refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which requires the Company to set aside a certain amount of its net income each fiscal year for allowances. Whenever the Company has positive retained earnings, the allowance shall at least be set at 20% of the total issued and paid up capital. The dividend is shared according to the General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions.

Rincian Pembagian Dividen
Details of Dividend Sharing

Tahun Buku 2023
Fiscal Year 2023

Pembagian dividen untuk tahun buku 2023 akan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024.

The dividend sharing for fiscal year 2023 will be carried out in accordance with the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in June 2024.

Tahun Buku 2022
Fiscal Year 2022

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 Juni 2023, Pemegang Saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2022 untuk dividen sebesar Rp5,76 triliun.

According to the Annual General Meeting of Shareholders dated June 13, 2023, the Shareholders had agreed upon the utilization of net profit from 2022 for dividends to the amount of Rp5.76 trillion.

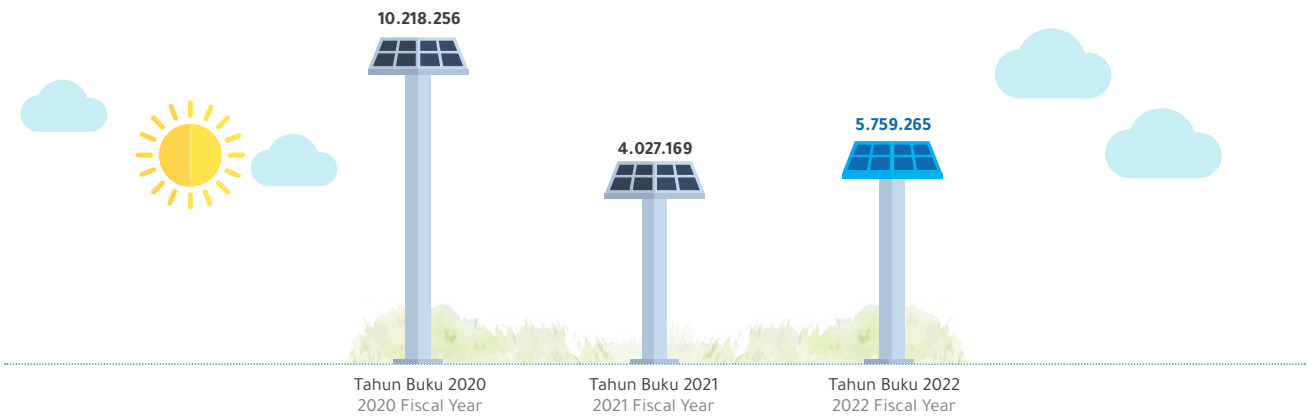
Tabel Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020-2023
Dividend Payout in Fiscal Years 2020-2023

Keterangan Description	Tahun Buku 2020 Fiscal Year 2020	Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021	Tahun Buku 2022 Fiscal Year 2022	Tahun Buku 2023 Fiscal Year 2023
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rp Juta) Profit Attributable to Owners of the Parent (Rp million)	10.218.256	4.027.169	5.759.265 **	8.176.665
Persentase Dividen (%) Dividend Percentage (%)	100	100	100	*
Dividen yang Dibagikan (Rp juta) Appropriated Dividends (Rp million)	10.218.256	4.027.169	5.759.265	*
Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	1.959	773	1.105	*
Dividend Pay Out Ratio	99,9999999808: 0,000000000192	99.9999999808: 0.000000000192	99.9999999808: 0.000000000192	*
Tanggal Pengumuman Pembayaran Date of Payment Announcement	31 Desember 2021 December 31, 2021	8 September 2022 September 08, 2022	2 Agustus 2023 August 02, 2023	*
Tanggal Realisasi Pembayaran Dividen Kas Date of Cash Dividend Payment Completed	5 Januari 2022 January 05, 2022	14 Oktober 2022 October 14, 2022	29 September 2023 September 29, 2023	*

* Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024
** Sesuai dengan nilai laba yang dibagikan (angka sebelum disajikan kembali)

* Dividend for Fiscal Year 2023 will be paid in accordance with resolutions of GMS to be held in June 2024.
** Corresponds to the value of profit distributed (figures before restatement)

Tabel Dividen yang Dibagikan (dalam jutaan Rupiah)
Dividend Shared (in million Rupiah)



Informasi Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Information on Material Commitments for Capital Investment

Dalam melakukan investasi barang modal, terdapat sejumlah perikatan material, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga.

In placing capital investment, the Company engages in material commitments with related or third parties.

Tabel Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Tahun 2023
Material Commitments for Capital Investment in 2023

Jenis Ikatan Type of Commitment	Nama Pihak yang Melakukan Ikatan Party under Commitment	Tujuan dari Ikatan Purpose of Commitment	Sumber Dana Purpose of Commitment	Mata uang yang Menjadi Denominasi Base Currency
Long Term Parts Agreement (LTPA)	General Electric (Switzerland) GmbH, General Electric Global Parts and Products GmbH, Mitsubishi Corporation, PT Power Systems Service	Kebutuhan *spare part* kapitalisir untuk *overhaul* Spare parts capitalization requirement for Overhaul	Internal	EUR, JPY
Kontrak *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract	Konsorsium GE Global Parts & Products GmbH - Marubeni Corporation - PT Hutama Karya (Persero) GE Global Parts & Products GmbH - Marubeni Corporation - PT Hutama Karya Consortium	Pekerjaan EPC PLTGU Tambak Lorok Blok 3 EPC Work at Tambak Lorok Block 3 CCPP	Internal	US$, EUR, JPY
Kontrak EPC EPC Contract	Konsorsium PT Maharani Prima - WWS Wasserkraft GmbH PT Maharani Prima - WWS Wasserkraft GmbH Consortium	Pekerjaan EPC PLTA Cileunca EPC Work at Cileunca HPP	Internal	EUR
Kontrak EPC EPC Contract	PT Hutama Karya (Persero)	Pekerjaan EPC PLTM Harjosari EPC Work at Harjosari MHPP	Internal	EUR
LTPA	General Electric (Switzerland) GmbH, General Electric Global Parts and Products GmbH, Mitsubishi Corporation, PT Power Systems Service Indonesia, PT Poeser Indonesia - PT Power Systems Service Indonesia (*joint operation*)	Kebutuhan *spare part* kapitalisir untuk *Overhaul* Spare parts capitalization requirement for overhaul	Internal	EUR, JPY

Langkah Perlindungan Risiko terhadap Posisi Mata Uang Asing
Protection against Foreign Currency Risk

Penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diundangkan per tanggal 31 Maret 2015 yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia, mengatur bahwa khusus untuk pengadaan *spare parts* impor yang telah diperjualbelikan di Indonesia, ikatan perjanjian/ kontrak Perusahaan dan *vendor* wajib menggunakan mata uang Rupiah. Dalam ikatan ini, PLN Indonesia Power menggunakan kebijakan sistem *Floating Rate* yang dihitung dengan menggunakan formula nilai Kurs Tengah Transaksi EUR - Bank Indonesia.

Rupiah is used for transaction. This complies with the Regulation of Bank Indonesia (PBI) enacted on March 31, 2015 which requires the use of Rupiah within the territory of the Republic of Indonesia. The Regulation specifically sets out that the procurement of imported spare parts traded in Indonesia, in addition to any commitments/ contracts between the Company and vendors, must be in Rupiah. In these commitments, PLN Indonesia Power uses floating rate calculated using EUR Median Exchange Rate for EUR - Bank Indonesia transactions.

Ikatan Material Tahun 2023
Material Commitments in 2023

Berikut merupakan uraian mengenai perikatan material berupa ikatan dan kontinjensi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2023.

The followings are the descriptions of the material commitments i.e. agreements and contingencies entered into by the Company in 2023.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)
Power Purchase Agreement (PPA)

Grup memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Grup sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The group has a number of PPA with PLN. Under these commitments, PLN pays for the electricity supplied by the Group in the amount determined based on the payment formula. These payments cover the components of capacity, energy, operational, and maintenance costs that are depended on the level of energy supply and other variables specified in the commitments.

Berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 0357.K/DIR/2022 tanggal 28 November 2022 tentang tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN Hukum Akhir Periode/Tahap, dan keputusan RUPS sirkuler Perusahaan tanggal 21 September 2022 dan 30 Desember 2022, terdapat perubahan dan pernyataan Kembali atas PJBTL antara Perusahaan dan PLN.

In the Decree of PLN Board of Directors No. 0357.K/DIR/2022 dated November 28, 2022 on follow-up on the establishment of PLN Hukum subholdings of End of Term/Phase, and the Company's Circular GMS Resolutions dated September 21, 2022 and December 30, 2022, there were amendments and restatements of the PPA between the Company and PLN.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani 24 amendemen dan pernyataan kembali PJBTL yang terdiri dari: 8 Buku PJBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 Buku PJBTL atas wilayah Sumatra, 6 atas Buku PJBTL atas wilayah Kalimantan, dan 3 Buku PJBTL atas wilayah Sulawesi. Amendemen dan pernyataan kembali PJBTL tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

As of December 30, 2022, PLN and the Company have signed 24 amendments and restatements of PPA, consisting of: 8 PPA Books for Java-Bali region, 7 PPA Books for Sumatra region, 6 PPA Books for Kalimantan region, and 3 PPA Books for Sulawesi region. These amendments and restatements of PPA are effective starting January 01, 2023 with the term of agreement throughout 2023-2032.



Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar
Fuel Procurement Agreement

Perjanjian Pengadaan Gas
Gas Procurement Agreement

Tabel Perjanjian Pengadaan Gas
Gas Procurement Agreement

Keterangan Description	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. Agreement	Periode Term	Satuan Unit	Jumlah yang Disepakati (satuan angka penuh) Amount Agreed (in full value)
Priok	PT Perusahaan Gas Negara (PGN)	PPJBG: 0556.PJ/EPI.01.02/010000/2019	2019 - 2030	BBTUD	30 - 36
		KGT:0042.Pj/HKM.02.02/PLNEPI0100/2023	2023 - 2024		
	BP Berau (LNG)	Perjanjian Jual dan Beli antara PT PLN (Persero) sebagai pembeli dan Tangguh PSC sebagai penjual Purchase Agreement between PT PLN (Persero) as the buyer and Tangguh PSC as the seller	2014 - 2033	Standar Kargo LNG Standard Cargo LNG	Program pengiriman tahunan Shipment program annually
	PT Pertamina (LNG)	MSPA: 1265.PJ/EPI.01.02/DITDAN/2018 Amendemen II: 1275/Amd/DAN.01.01/PLNEPI0100/2023 MSPA: 1265.PJ/EPI.01.02/DITDAN/2018 2nd Amendment: 1275/Amd/DAN.01.01/PLNEPI0100/2023	2017 - 2026	Standar Kargo LNG Standard Cargo LNG	Lampiran konfirmasi Confirmation attachment
	1. PT Pertamina 2. Eni East Sepinggan Limited 3. Neptune Energy East Sepinggan B.V. 4. PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan (LNG)	MSPA: 112.PJ/061/IP/2023 Amendemen II	2023 - 2024	Standar Kargo LNG Standard Cargo LNG	Lampiran konfirmasi Confirmation attachment
	PT Perusahaan Gas Negara (FSRU Lampung)	KB: 1010.Pj/EPI.01.02/E01010000/2022	2022 - 2024	BBTUD	s.d/up to 250
	PT Perusahaan Gas Negara (Gas)	PPJBG: 0556.PJ/EPI.01.02/010000/2019	2019 - 2030	BBTUD	30 - 36
		KGT: 0042.Pj/HKM.02.02/PLNEPI 0100/2023	2023 - 2024		
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (FSRU Lampung)	KB: 1010.Pj/EPI.01.02/E01010000/2022 Amendemen: 1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI 0100/2023	2022 - 2024	BBTUD	s.d/up to 250
	PT Pertamina (Gas JTB)	1670.Pj/EPI01.02/DIRUT/2017	2021 - 2035	BBTUD	100 (Take or Pay ("TOP") 90%)
Grati Bali	1. Medco Energi Sampang Pty Ltd 2. Singapore Petroleum Sampang Ltd 3. Cue Sampang Pty. Ltd. (Gas Sampang)	Perjanjian penjualan gas Gas Purchase Agreement	2004 - 2024	BBTUD	s.d/up to 30 (TOP 95%)
	Kangean Energy Indonesia Ltd (Gas TSB)	462.Pj AMD II/040/DIR/2010	2012 - 2028	BBTUD	20 - 50 (TOP 90%)
	PT Pertamina Gas (Pipa Gas)	0056-1.Pj/040/DIR/2014	2014 - 2033	MMSCFD	s.d/up to 100 (TOP 80)
	BP Berau (LNG)	Perjanjian Jual dan Beli antara PT PLN (Persero) sebagai pembeli dan Tangguh PSC sebagai penjual Purchase Agreement between PT PLN (Persero) as the buyer and Tangguh PSC as the seller	2014 - 2033	Standar Kargo LNG Standard Cargo LNG	Program pengiriman tahunan Annual delivery program
	PT Pertamina (LNG)	MSPA: 1265.PJ/EPI.01.02/DITDAN/2018 Amendemen II: 1275/Amd/DAN.01.01/PLNEPI0100/2023	2017 - 2026	Standar Kargo LNG Standard Cargo LNG	Lampiran konfirmasi Confirmation attachment



Keterangan Description	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. Agreement	Periode Term	Satuan Unit	Jumlah yang Disepakati (satuan angka penuh) Amount Agreed (in full value)
	1. PT Pertamina 2. Eni East Sepinggan Limited 3. Neptune Energy East Sepinggan B.V. 4. PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan (LNG)	MSPA: 112.PJ/061/IP/2023 Amendemen II: 2242.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023	2023 - 2024	Standar Kargo LNG Standard Cargo LNG	Lampiran konfirmasi Confirmation attachment
UBP Keramasan	Medco E&P Lematang & Medco E&P Indonesia	0584-1.Pj/03.02/DIRUT/2017	2017 - 2027	BBTUD	20 (TOP 90%)
	Pertamina Gas (Pertagas PEP)	0633.Pj/EPI.01.02/010303/2019 Amendemen III	2019 - 2024	MMSCFD	Minimum Disaster Recovery Center ("DRC")
	Pertamina Gas (Pertagas Medco)	719/MGT/MEDC/XII/2014 Amendemen IV	2020 - 2027	MMSCFD	Minimum DRC Indralaya 2020-2027: 6.6 Borang 2020-2027: 9.14 Keramasan 2020-2027: 1.95
UBP Mahakam	Pertamina (Persero)	KB No:0276.PJ/EPI.01.02/C01050000/2022 Amendemen KB Kedua No: 0010.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023 KB No. 0276.PJ/EPI.01.02/C01050000/2022 2nd Amendment to KB No. 0010.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023	2022 - 2024	BBTUD	2022: 8 2023: s.d/up to 11.7 (TOP 75% Annual Contract Quantity ("ACQ")) 2024: s.d/up to 18.3 (TOP 75% ACQ)
	Pertamina Gas (Pertagas)	0063.PJ/041/DIR/2013 Amendemen III 0063.PJ/041/DIR/2013 3rd Amendment	2018 - 2028	MMSCFD	2020-2028 DRC : .333

Perjanjian Pengadaan Batubara
Coal Procurement Agreement

Tabel Perjanjian Pengadaan Batubara
Coal Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. Agreement	Jumlah (Metrik Ton angka penuh) Amount (in Metric Ton, full value)	Periode Term
Suralaya 1-7	PT Bukit Asam	12.PJ/061/IP/2013	5.200.000	2013 - 2025
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jabar 2 Pelabuhan Ratu Labuhan Angin	PT Bukit Asam	303.PJ/041/DIR/2012	18.000.000	2012 - 2032
Suralaya 1-7	PT Oktasan Baruna Persada	405.PJ/061/IP/2018	2.100.000	2018 - 2026
Suralaya 1-7	PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	2.232.000	2009 - 2025
Suralaya 1-7	PT Multi Harapan Utama 373.PJ	373.PJ/061/IP/2022	1.000.000	2022 - 2026
Banten 1 Suralaya	PT Titan Infra Energy	086.PJ/123/DIRUT/2007	2.920.000	2007 - 2027
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar	Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa PT Arutmin Indonesia and PT Darma Henwa Consortium	079.PJ/123/DIRUT/2007 078.PJ/123/DIRUT/2007 211.PJ/123/DIRUT/2007	5.203.000	2007 - 2027
Asam - Asam	Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa PT Arutmin Indonesia and PT Darma Henwa Consortium	077.PJ/123/DIRUT/2007	350.000	2007 - 2027

Sektor Sector	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. Agreement	Jumlah (Metrik Ton angka penuh) Amount (in Metric Ton, full value)	Periode Term
Banten 2 Labuan Teluk Sirih Pangkalan Susu Jateng 2 Adipala	Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa PT Arutmin Indonesia and PT Darma Henwa Consortium	420.PJ/123/DIRUT/2008	2.005.000	2008 - 2027
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jateng 2 Adipala	Konsorsium PT Exploitasi Energi Indonesia dan PT Borneo Indobara PT Exploitasi Energi Indonesia and PT Borneo Indobara Consortium	0200-3.PJ/EPI.01.01/C01050000/2022	1.350.000	2022 - 2027

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp770,06 ribu dan Rp1,41 juta per ton sebelum penyesuaian spesifikasi batubara (2022: Rp727,92 ribu - Rp1,05 juta.

The coal purchase price ranges from Rp770,06 thousand to Rp1,41 million per ton before coal specification adjustment (2022: Rp727.92 thousand - Rp1.05 million.

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak
Oil Fuel Procurement Agreement

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain:

(i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari Mean Oil Platts Singapore (MOPS) ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3% sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011. Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *surveyor* independen.

The Company, through PLN and Pertamina, entered into an Umbrella Oil Fuel Procurement Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 08, 2001. The agreement was amended on May 16, 2007 with addendum, where the Company and Pertamina agreed the followings:

(i) the use of monthly fuel price shall be determined by Pertamina for the period of January 01, 2007 to April 30, 2007 and the fuel price is at 109.5% of Mean Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax (VAT) for the period of May 01, 2007 to December 31, 2007; (ii) the fuel price after December 31, 2007 shall be determined by both parties annually; (iii) the payment term and the imposition of late payment penalty shall be at the monthly interest rate of Bank Indonesia Certificate plus 1.3%; the annual interest rate of Bank Indonesia Certificate plus 1.3%, until fully paid by issuing PLN bonds no later than August 31, 2007; (iv) effective as of May 01, 2007, the outstanding debt balance on fuel purchases until April 30, 2007 shall be subjected to interest at the annual interest rate of Bank Indonesia Certificate plus 1.3% until fully paid by issuing PLN bonds no later than August 31, 2007; (v) the debt to Pertamina, including bonds to be issued shall be no more than Rp18 trillion; (vi) this agreement shall be valid for five years from January 01, 2007 to December 31, 2011. Based on the Joint Agreement dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) was assigned to be independent surveyor.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 17 Desember 2021, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada amendemen untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
b. Sehubungan dengan hal tersebut, formula harga baru akan disepakati untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 1 Januari 2022, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar dari Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp1,25 triliun, Rp576,56 miliar dan Rp1,37 triliun.

The agreement has been amended for several times. According to Addendum VII dated December 17, 2021 the agreement upon oil fuel (HSD and MFO) purchase price from January 01, 2021 to December 31, 2023 between Pertamina and the Company is as follows:

a. During the negotiation period on the dates of January 01, 2021 to December 31, 2021 the Parties will use the temporary price formula which has been agreed upon in the amendment for the dates of January 01, 2018 to December 31, 2020.
b. In relation to that matter, the new price formula will be agreed upon for the term effective from January 01, 2022 through December 31, 2023. On the dates of December 31, 2023, 2022, and January 01, 2022, the trade payables balance for the purchase of fuel from Pertamina was Rp1.25 trillion, Rp576.56 billion, and Rp1.37 trillion, respectively.



Uap Panas Bumi
Geothermal Steam

Melalui PLN, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amandemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amendemen ke lima Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PLN dan PIP. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amendemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak dan Darajat perjanjian berlaku selama 30 tahun sampai tahun 2030.

Through PLN, the Company entered into an agreement with Pertamina for the procurement of geothermal steam for Kamojang for 30 years. This agreement had expired in 2012 and passed Amendment I under the Agreement between Pertamina and PLN for Kamojang Units 1, 2 GPP, and 3. As of 2015, the Agreement remained using the 5th Amendment of the Interim Agreement among PT Pertamina Geothermal Energy, PLN, and PIP. On February 11, 2016, the master agreement was amended and reenacted. It would be effective from August 1, 2012 to December 31, 2040. The agreements for Gunung Salak and Darajat GPP are valid for 30 years, until 2030.

Komitmen
Commitments

Stand by Letter of Credit (SBLC)
Standby Letter of Credit (SBLC)

Perusahaan memiliki fasilitas *non-Cash Loan* berupa SBLC dengan Bank Negara Indonesia yang digunakan sebagai jaminan jual beli gas dengan Medco Energi Sampang Pty. Ltd dengan nominal US$4.104.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp64,99 miliar dengan jangka waktu sampai dengan 14 Januari 2025.

The Company has a Non-Cash Loan facility, i.e. SBLC with Bank Negara Indonesia. It is used as the collateral in the gas purchase activity with Medco Energy Sampang Pty. Ltd. at an amount of US$4,104,000 (full value) or equal to Rp64.99 billion, which is valid until January 14, 2025.

Investasi Barang Modal
Capital Investment

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memperoleh Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap yang telah dimiliki dengan tujuan akan memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang.

Investment is any expenses made by the Company for earning or increasing Property, Plant, and Equipment and aiming at rendering added value in the future.

Nilai investasi Barang Modal Perusahaan tahun 2023 lebih rendah 34,75% dibandingkan tahun 2023 menjadi sebesar Rp4,96 triliun. Rincian investasi barang modal tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

The Company's Capital Investment in 2023 declined 34.75% to Rp4.96 trillion compared to in 2022. The details of the capital investment in 2023 are shown in the following table:

Tabel Investasi Barang Modal Tahun 2020 - 2023 (Rp juta)
Capital Investment in 2020-2023 (Rp million)

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Investment	2020	2021	2022	2023	Kebijakan Policy	
Bangunan, waduk dan prasarana Buildings, Reservoir, and Infrastructure	288.624	7.439	185.466	182.088	**Tujuan Investasi:** Keandalan dan efisiensi pembangkit **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang**: Rupiah **Langkah Perlindungan Risiko:** Asuransi untuk bangunan pembangkit dan pemeliharaan sesuai prosedur untuk waduk dan prasarana non pembangkit	**Purpose of Investment:** Power plant reliability and efficiency **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah **Risk Protection Measure:** Insurance for power plant building and maintenance according to procedure for reservoir and non-power plant infrastructure

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Investment	2020	2021	2022	2023	Kebijakan Policy	
Instalasi dan mesin pembangkit Installations and Power Plant	2.034.919	633.849	856.245	3.135.778	**Tujuan Investasi:** Keandalan dan efisiensi pembangkit **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah dan Valas (JPY & EUR) **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit	**Purpose of Investment:** Power plant reliability and efficiency **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah and Foreign Exchanges (JPY and EUR) **Risk Protection Measure:** Maintenance according to procedure and insurance for power plant
Peralatan transmisi Transmission Equipment	375.375	2.163	141.722	74.751	**Tujuan Investasi:** Keandalan dan efisiensi pembangkit **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit	**Purpose of Investment:** Power plant reliability and efficiency **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah **Risk Protection Measure**: Maintenance according to procedure and insurance for power plant
Instalasi telekomunikasi Telecommunication Installation	28.029	-	2.546	34.248	**Tujuan Investasi:** Mendukung kinerja operasional Perusahaan **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang**: Rupiah **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemeliharaan sesuai prosedur	**Purpose of Investment:** Supporting the Company's operational performance **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah **Risk Protection Measure:** Maintenance according to procedures
Peralatan umum General Equipment	81.868	30.116	48.456	107.593	**Tujuan Investasi:** Mendukung kinerja operasional Perusahaan **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemeliharaan sesuai prosedur	**Purpose of Investment:** Supporting the Company's operational performance **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah **Risk Protection Measure:** Maintenance according to procedures
Kendaraan bermotor Motor Vehicles	11.752	-	240	20.819	**Tujuan Investasi:** Mendukung kinerja operasional Perusahaan **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemeliharaan sesuai prosedur	**Purpose of Investment:** Supporting the Company's operational performance **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah **Risk Protection Measure:** Maintenance according to procedures
Material Cadang Spare Parts	12.114	38.328	30.846	73.487	**Tujuan Investasi:** Menjamin ketersediaan material cadang **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemakaian dan penyimpanan sesuai prosedur	**Purpose of Investment:** Ensuring the availability of spare parts **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah **Risk Protection Measure:** Utilization and storage according to procedures
Lain lain Others	-	-	-	5.936	**Tujuan Investasi:** Mendukung kinerja operasional Perusahaan **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemeliharaan sesuai prosedur	**Purpose of Investment:** Supporting the Company's operational performance **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah **Risk Protection Measure:** Maintenance according to procedures



Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Investment	2020	2021	2022	2023	Kebijakan Policy	
Tanah Land	-	285	13.772	2.155	**Tujuan Investasi:** Modal utama membangun pembangkit **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemeliharaan sesuai prosedur dan kepemilikan sesuai peraturan	**Purpose of Investment:** Main capital for constructing power plants **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah **Risk Protection Measure:** Maintenance according to procedures and ownership according to regulations
Pekerjaan dalam pelaksanaan Construction in Progress	140.157	2.070.219	2.402.804	1.293.723	**Tujuan Investasi:** Modal utama membangun pembangkit **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah dan Valas (JPY, EUR & US$) **Langkah Perlindungan Risiko:** Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit	**Purpose of Investment:** Main capital for constructing power plants **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) **Currency**: Rupiah and Foreign Exchanges (JPY, EUR, and US$) **Risk Protection Measure:** Maintenance according to procedure and insurance for power plant
Penyertaan Investment	1.901.280	-	-	31.000	**Tujuan Investasi:** Menambah kapasitas pembangkit **Sumber Dana:** Anggaran Investasi (Internal) **Mata Uang:** Rupiah dan Valas (US$) **Langkah Perlindungan Risiko:** *Monitoring* Progres Pembangunan secara berkala	**Purpose of Investment:** Power plant capacity expansion **Source of Fund:** Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah and Foreign **Exchange** (US$) **Risk Protection Measure:** Periodical monitoring of development progress
Jumlah Investasi Barang Modal **Total Capital Investment**	**4.874.118**	**2.772.398**	**3.682.097**	**4.961.578**		
Arus Kas Pembayaran untuk Investasi Barang Modal **Cash Flows of Payment for Capital Investment**	**4.874.118**	**3.580.713**	**3.028.578**	**4.961.578**		

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Information on Conflict-of-Interest Transactions and/or Transactions with Affiliates/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Throughout 2023, there were no transactions containing conflicts of interest. Thus, no information can be disclosed in this area.



Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Material Transactions with Affiliates/Related Parties

Pihak-pihak Berelasi
Related Parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   viii. Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Related parties are individuals or entities that are related to the Company and its subsidiaries (reporting entity):

a. An individual or their immediate family member is related to the reporting entity if such an individual:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting party or reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of the parent of the reporting entity.
b. An entity is related to the reporting entity if meeting one of the following conditions:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that one entity's parent, subsidiary, and sub-subsidiary are related to the other entity);
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group the other entity of which is a member);
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the same third entity;
   v. The entity constitutes post-employment benefit plan for employee benefits from one of the reporting entities or entities that are related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity organizing the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
   vi. Entity controlled or jointly controlled by the individual specified in letter (a); or
   vii. The individual identified in letter (a) (i) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent of the entity),
   viii. The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

Entity related to the government is an entity controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or the Regional Government as the shareholders of the entity, or entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the shareholder's proxy.

All transactions made with related parties, whether or not made under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.



Sifat Hubungan Pihak Berelasi
Nature of Relations with Related Parties

Berikut adalah sifat hubungan pihak berelasi:
a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara.
b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
c. Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atau kontrol bersama atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci perusahaan.

The followings are the nature of relationship with related parties:
a. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PT PLN (Persero) and State-Owned Enterprises.
b. The Company is related to other SOEs jointly owned by the Minister of Finance.
c. The Company has significant influence or joint control on investments in associates or joint ventures.
d. The Board of Commissioners and the Board of Directors are the key management personnel of the Company.

Nama Pihak yang Bertransaksi
Names of Parties under Transactions

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

The following is a list of related parties transacting with the Company:

Tabel Nama Pihak Berelasi Tahun 2023
Names of Related Parties in 2023

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relation	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Pelayanan Listrik Negara (Persero) (PLN)	Pemegang saham Perusahaan Company Shareholders	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN)	Pemegang saham Perusahaan Company Shareholders	Penyertaan modal Paid-in capital
Personil Manajemen Kunci Key Management Personnel	Direktur dan Komisaris Grup Directors and Commissioners of the Group	Pembayaran gaji dan tunjangan Payment of salaries and allowances
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Syariah Indonesia (BSI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Pertamina (Persero) (Pertamina)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants
PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Nusantara Regas (NR)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (AJI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi milik Perusahaan Insurance services for Company's buildings, installations and power plants, and transmission equipment
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Sewa Lease

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relation	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Rajamandala Electric Power (REP), PT GCL Indo Tenaga (GCL) dan and PT Perta Daya Gas (PDG)	Ventura bersama Joint ventures	Investasi, pemberian pinjaman, perdagangan batubara, jasa pemeliharaan dan pengelolaan, sewa Investment, issuance of loan, trade of coals, operations and maintenance services, lease
PT Indo Pusaka Berau (IPB), PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC), PT Indo Raya Tenaga (IRT) dan and PT Maxpower Cogindo Batam (MCB)	Entitas asosiasi dan ventura bersama Associates and joint ventures	Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Investment in associates and joint ventures
PT PLN Nusantara Power (PNP)	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi lain-lain Other transactions
PT Haleyora Power (Haleyora)	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi penyediaan tenaga kerja Transfer of labour transaction
PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi penyedia layanan internet Internet service provider transaction
PLN B	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
Dana Pensiun - Perusahaan Listrik Negara (DP-PLN)	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Pengelola dana pensiun Pension fund manager
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE)	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi jasa profesional Professional services transaction
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara Fuels and coal transportation services transaction
PT PLN Energi Gas (PLN EG)	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Sewa Lease

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi
Purpose of Transactions with Related Parties

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah salah satu bentuk dukungan kepada kelancaran dan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Transactions with related parties in general serve as a form of support for streamlining and sustaining of the Company's business.

Nilai Transaksi Pihak Berelasi
Value of Transactions with Related Parties

Berikut adalah nilai transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2022 dan 2023:

The followings are the values of transactions with related parties in 2022 and 2023:

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2022 - 2023 (Rp juta)
Value of Transactions with Related Parties in 2022-2023 (Rp million)

	2022*)	2023
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents		
BNI	3.216.844	3.131.609
Bank Mandiri	195.200	338.745
BRI	86.021	106.447
BSI	27.150	50.296
Jumlah Total	**3.525.215**	**3.627.097**
Piutang usaha Trade Receivables		
PLN	52.062.808	27.744.036
GCL	55.284	41.594
PNP	9.143	-
REP	4.049	566
IPB	2.144	-
Lain-lain Others	**2.493**	**699**



	2022*)	2023
Jumlah Total	**52.135.921**	**27.786.895**
Aset keuangan dari konsesi jasa Financial assets of service concession		
PLN	1.148.788	41.771.897
Piutang pihak berelasi Receivables from Related Parties		
REP	437.855	415.493
PLN	240.839	154.594
SGPJB	195.167	168.910
GCL	58.923	70.422
PNP	55.566	-
PDG	36.387	79.733
IPB	1.411	3.402
Lain-lain Others	**93.857**	**176.145**
Jumlah Total	**1.120.005**	**1.068.699**
Utang usaha Trade payables		
PTBA	1.307.618	698.840
Pertamina	1.249.216	576.555
PLN B	1.125.171	465.361
BAG	583.636	144.164
Lain-lain Others	**1.484.206**	**810.069**
Jumlah Total	**5.749.847**	**2.694.989**
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses		
PLN	354.360	165.440
Pinjaman dari pemegang saham Loans from a shareholder		
PLN	1.759.499	1.412.202
Liabilitas sewa Lease liabilities		
PLN	1.189.674	60.228
Pelindo	1.138.102	809.497
PDG	990.143	717.449
PLN EG	483.141	-
Jumlah Total	**3.801.060**	**1.587.174**
Pendapatan konsesi jasa Revenue of service concession		
PLN	268.658	15.541.932
Penjualan tenaga listrik Sales of electricity		
PT PLN (Persero)	101.934.634	64.371.392
Pendapatan jasa Service revenue		
PLN	923.536	844.995
GCL	306.363	322.155
PNP	44.616	8.274
REP	2.304	1.818
Jumlah Total	**1.276.819**	**1.177.242**
Beban usaha Operating expenses		
PTBA	8.744.166	6.150.134
PGN	3.572.641	2.512.786
PLN B	3.291.207	2.314.842
BAG	3.225.060	2.268.318

	2022*)	2023
Pertamina	3.004.855	2.113.439
NR	594.479	418.121
Haleyora	69.317	48.754
ICON+	30.729	21.613
AJI	21.152	14.877
PLNE	17.445	12.270
PNP	5.948	4.183
Lain-lain Others	**201.367**	**141.630**
Jumlah Total	**22.778.366**	**16.020.967**

*) Disajikan kembali *) As restated

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.759.499 juta (setara US$113.964.562) (2022: Rp1.412.202 juta) (setara US$90.572.249).

As of December 31, 2023, the balance of the loan was Rp1,759,499 million (equivalent to US$113,964,562) (2022: Rp1,412,202 million) (equivalent to US$90,572,249).

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp121,38 miliar dan Rp70,37 miliar. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tersebut merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Total compensations paid to the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2023 and 2022 were Rp121.38 billion and Rp70,37 billion, respectively. All compensations to the Board of Commissioners and the Board of Directors are current employee benefits.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi
Fairness of Transactions with Related Parties

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Selain itu, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi didasarkan pada *the arm's length principle*.

The fairness of all transactions with related parties, whether or not made under terms and conditions with third parties, is disclosed in the financial statements, in accordance with PSAK 7 standard: Disclosure of Related Parties. The fairness of transactions with related parties is also assessed according to the arm's length principle.

Selama tiga tahun terakhir, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material.

During the last three years, there were no significant or material non-compliance with laws, rules and regulations relating to related party transactions.

Kebijakan dan Keterlibatan Organ Perusahaan dalam Proses *Review* Transaksi Pihak Berelasi
Policy and Involvement of Company Organs in Reviewing Transactions with Related Parties

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perusahaan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Transactions with related parties are reviewed through audit which is conducted by either internal or external auditor. During the audit process, the Company involves its Organs, which include the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, and some relevant Divisions.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Depending on the result of the audit performed by the Audit Committee, the Board of Commissioners provides directives and inputs to the Board of Directors so that the transactions with related parties are executed according to the arm's length principle.

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2023, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan pada Catatan 27.

The Board of Directors made sure that all transactions with related parties in 2023 have been performed through proper procedures and based on the generally applied business principles, as well as meeting the arm's length principle. Further details on transactions with related parties have been disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Note No. 27.



Mekanisme *Review* dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi
Mechanism of Review and Compliance with Regulations for Transactions with Related Parties

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Transactions with related parties are reviewed through audit which is conducted by either internal or external auditor. To ensure the fairness of transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, the aforementioned affiliate transaction reports have been audited by auditors. The disclosure of transactions with related parties among others aims at meeting PSAK 7: Disclosure of Related Parties.

Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and/or Restructuring

Seiring dengan terbentuknya subholding PLN, PLN Indonesia Power melakukan beberapa *corporate action* untuk mendukung kelancaran operasi Perusahaan untuk memaksimalkan kinerja operasional dan nilai Perusahaan.

With the establishment of PLN subholdings, PLN Indonesia Power performed several corporate actions that allow smooth operation of the Company while maximizing operational performance and Company value.

Informasi Investasi
Information on Investment

Terkait dengan kegiatan investasi, PLN Indonesia Power melakukan tiga jenis kegiatan investasi yaitu diantaranya adalah Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan; Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; dan Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

There are three types of investing activities performed by PLN Indonesia Power, namely Investment in Existing Plants, Business Development, and Equity Participation; Share Investment in Associates and Joint Ventures; and Share Investment in Subsidiaries. The followings are the overview of these investments:

Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan
Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation

Investasi ini dilakukan PLN Indonesia Power dengan tujuan untuk keandalan dan efisiensi pembangkit eksisting dan pengembangan pembangkit baru serta usaha terkait lainnya. PLN Indonesia Power mengatur mekanisme investasi ini dalam Keputusan Direksi (Kepdir) No. 031.K/010/IP/2020 tentang Pengelola Anggaran Perusahaan Serta Wewenang dan Tanggung Jawabnya, Kepdir No. 032.K/010/IP/2020 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Kepdir No. 033.K/010/IP/2020 tentang Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Perusahaan dan Kepdir No. 0563.K/IP/2023 perihal Pedoman Evaluasi Investasi Pengelolaan Pembangkitan dan Pengembangan di Lingkungan PT PLN Indonesia Power.

PLN Indonesia Power performs this investment with the aim of increasing the reliability and efficiency of existing plants and developing new plants and other related businesses. This investment is regulated under the Board of Directors' Decree No. 031.K/010/IP/2020 on Company Budget Managers and Their Authorities and Responsibilities, Board of Directors' Decree No. 032.K/010/IP/2020 on Policy and Procedures for Preparing Company Work Plans and Budgets, Board of Directors' Decree No. 033.K/010/IP/2020 on Policy and Procedures for Implementing Company Budgets, and Board of Directors' Decree No. 0563.K/IP/2023 on Guidelines for Evaluating Investments in Power Generation and Development Management within PT PLN Indonesia Power.

Dana yang dialokasikan untuk investasi ini menggunakan dana dari internal, maupun melalui pendanaan alternatif seperti ECA.

The allocated funds for the investments were sourced internally as well as from alternative sources such as ECA.

Realisasi disburse tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 63,83% dibanding tahun 2022 menjadi Rp4,96 triliun dikarenakan adanya penambahan pembangkit dampak dari penerapan *holding* dan *subholding* PT PLN (Persero) serta meningkatnya biaya konsultan pengembangan EBT dan adanya aksi korporasi baru di tahun 2023.

The actual disbursement in 2023 increased 63.83% from 2022 to Rp4.96 trillion, due to additions of power plants as a result of PT PLN (Persero) Holding-Subholding establishment, the increase in consultant fee for NRE development, and new corporate actions.



Realisasi investasi pada pembangkit eksisting, pengembangan usaha dan penyertaan disajikan pada tabel berikut:

The actual investments in existing plants, business development, and equity participation are presented in the following table:

Tabel Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan Tahun 2020 - 2023 (Rp juta)
Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation in 2020-2023 (Rp billion)

Unit Pembangkit Generation Unit	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan 2022-2023 Growth 2022-2023
Program Investasi Pembangkit Existing: Existing Power Plants Investment Plan:					
Program Keandalan Pembangkit Plant Reliability Program	1.133.440	1.021.572	1.078.440	3.269.777	203,20%
Program Efisiensi Pembangkit Plant Efficiency Program	2.420	-	19.997	27.688	38,46%
Program Pelestarian Lingkungan Environmental Preservation Program	34.240	24.487	25.807	90.624	251,16%
Program Sarana Fasilitas Penunjang Supporting Facilities Program	89.350	37.715	67.748	242.829	258,43%
Sub Jumlah Sub Total	**1.259.450**	**1.083.774**	**1.191.991**	**3.630.919**	**204,61%**
Program Pengembangan Usaha: Business Development Program:					
Pengembangan Pembangkit Baru New Power Plant Development	1.639.650	2.455.928	1.825.024	1.299.380	(28,80)%
Jasa Konsultan Consultant Service	25.971	2.565	11.475	279	(97,57)%
Pengembangan Usaha Lainnya Other Business Developments	1.933.895	38.446	88	31.000	(35.127,27)%
Sub Jumlah Sub Total	**3.599.516**	**2.496.939**	**1.836.587**	**1.330.659**	**(27,55)%**
Jumlah Pembangkit *Existing*, Pengembangan Usaha dan Penyertaan **Total Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation**	**4.858.966**	**3.580.713**	**3.028.578**	**4.961.578**	**63,83%**

Investasi Persentase Kepemilikan Saham pada Entitas Anak
Share Investment Percentage in Subsidiaries

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme investasi pada entitas anak yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the mechanism of investment in subsidiaries which is one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Articles.

Investasi ini dilakukan PLN Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal. Realisasi investasi saham pada entitas anak disajikan pada tabel berikut:

PLN Indonesia Power performs this investment to develop new power plants and other relevant businesses using funds from internal sources. The actual share investment in associates is presented in the following table:

Tabel Persentase Kepemilikan Saham pada Entitas Anak Tahun 2020 - 2023
Shareholding Percentage in Subsidiaries in 2020-2023

Entitas Anak Subsidiary	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Investment (%)			
			2020	2021	2022	2023
PT Cogindo DayaBersama	*Co-generation*, pemasok energi, jasa pelayanan energi dan manajemen. Co-generation, energy supply, energy and management services	1999	99,99	99,99	99,99	99,99
PT Artha Daya Coalindo	Perdagangan dan jasa pengangkutan batubara. Coal trade and transport services	1998	80,00	80,00	80,00	80,00
PT Indo Ridlatama Power	Pembangkitan tenaga listrik. Electricity generation	2018	90,00	90,00	90,00	90,00
PT PLN Indonesia Power Renewables dan entitas anak PT PLN Indonesia Power Renewables and subsidiary	Ketenagalistrikan dan energi. Electricity and energy	2016	99,99	99,99	99,99	99,99



Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Share Investment in Associates and Joint Ventures

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

Investasi ini dilakukan PLN Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal. Realisasi investasi penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada tabel berikut:

PLN Indonesia Power regulates the mechanism of investment in associates and joint ventures which is one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Articles.

PLN Indonesia Power performs this investment to develop new power plants and other relevant businesses using funds from internal sources. The actual share investment in associates and joint ventures is presented in the following table:

Tabel Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Tahun 2020 - 2023
Shareholding in Associates and Joint Ventures in 2020-2023

Nama Perusahaan Company Name	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Investment (%)			
			2020	2021	2022	2023
Entitas Asosiasi Associate						
PT Indo Pusaka Berau	Pembangkit tenaga listrik. Electricity generation	2005	46,53	46,53	46,53	46,53
PT PLN Suku Cadang	Perdagangan barang dan jasa, enjiiring *supply chain* dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan. Goods and services trade, supply chain engineering, and electricity-related consultation	2018	49,00	49,00	49,00	49,00
Ventura Bersama Joint Venture						
PT Perta Daya Gas	Transportasi, penyimpanan dan regasifikasi LNG. LNG transport, storage, and regasification	2015	35,00	35,00	35,00	35,00
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkitan tenaga listrik. Electricity generation	2019	51,00	51,00	51,00	51,00
PT GCL Indo Tenaga	Pembangkitan tenaga listrik. Electricity generation	2021	35,00	35,00	35,00	35,00
PT Indo Raya Tenaga	Pembangkitan tenaga listrik. Electricity generation	*	51,00	51,00	51,00	51,00
PT Maxpower Cogindo Batam	Pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, perdagangan mesin, suku cadang dan perlengkapannya. Power plant, electricity supporting activities, trade of machineries, spare parts, and equipment	2022	30,00	30,00	30,00	30,00
PT Trina Mas Agra Indonesia	Manufaktur Sel dan Modul Solar PV Manufacturing of solar PV cell and module	2023	-	-	-	25,00

* dalam tahap pengembangan *in development

Investasi Penyertaan Saham PT Putra Indotenaga pada Entitas Anak
PT Putra Indotenaga Share Investment in Subsidiaries

Tabel Prosentase Kepemilikan Saham PT PLN IPRen pada Entitas Anak Tahun 2020 - 2023
PT PLN IPRen Shareholding Percentage in Subsidiaries in 2020-2023

Entitas Anak Subsidiary	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Investment (%)			
			2020	2021	2022	2023
PT PLN Indonesia Geothermal	Pengembangan energi baru dan terbarukan New and renewable energy development	2020	95,45	95,45	95,81	96,04
PT Suralaya Indo Tenaga	Ketenagalistrikan dan energi Electricity and energy	2019	99,99	99,99	99,99	99,99
PT Putra Suralaya Indotenaga	Ketenagalistrikan dan energi Electricity and energy	2019	99,99	99,99	99,99	99,99

Informasi Ekspansi
Information on Expansion

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme ekspansi yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the expansion mechanism which is one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Articles.

Pada tahun 2023, tidak ada kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan ekspansi.

In 2023, there were no expansion activities. Thus, there is no information regarding the purpose, value or number of transactions, and sources of funds from the proceeds of the expansion activities.

Informasi Divestasi
Information on Divestment

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme divestasi yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the divestment mechanism which is one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Articles of Association.

Pada tahun 2023, tidak ada kegiatan divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, hasil kegiatan divestasi.

In 2023, there were no divestment activities. Thus, there is no information regarding the purpose, value or number of transactions, and sources of funds from the proceeds of the divestment activities.

Informasi Akuisisi
Information on Acquisition

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme akuisisi yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the acquisition mechanism which is one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Articles.

Pada tahun 2023, tidak ada kegiatan akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan akuisisi.

In 2023, there were no acquisition activities. Thus, there is no information regarding the purpose, value or number of transactions, and sources of funds from the proceeds of the acquisition.

Informasi Restrukturisasi Utang atau Modal
Information on Debt and/or Capital Restructuring

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme restrukturisasi yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the restructuring mechanism which is one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Articles.

Pada tahun 2023, tidak terjadi restrukturisasi hutang/modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan restrukturisasi.

In 2023, there were no Debt and/or Capital Restructuring. Thus, there is no information regarding the purpose, value or number of transactions, and sources of funds from the proceeds of the restructuring activities.



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Actual Use of Proceeds from Public Offering

Sampai dengan tahun 2023, PLN Indonesia Power belum menjadi perusahaan terbuka (*go public*) atau belum melakukan Penawaran Umum di bursa efek, sehingga tidak ada informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan penggunaan dana.

As of 2023, PLN Indonesia Power was not a publicly listed company (go public) or had not made any Public Offering on the stock exchange. Thus, there is no information related to the total proceeds, fund appropriation, details of fund appropriation, balance of funds, and the date of approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding changes in fund appropriation.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts after Accountant's Report Date

Pada tahun 2023, terdapat informasi dan fakta material atau kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan yaitu pada tanggal 31 Januari 2024, PT PLN Indonesia Power Renewables yaitu salah satu Anak Perusahaan dari PLN Indonesia Power, telah melakukan penambahan setoran modal sejumlah Rp77,50 miliar kepada PT Trina Mas Agra Indonesia.

In 2023, the Company saw material information and facts after the accountant's report date. On January 31, 2024, PLN Indonesia Power Renewables, a subsidiary of PLN Indonesia Power, made a capital injection amounting to Rp77.50 billion to PT Trina Mas Agra Indonesia.

Dampak dari fakta material tersebut adalah adanya penambahan portofolio Perusahaan.

The impact of this material fact is the addition of the Company's portfolio.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impacts on the Company

Pernyataan Kepatuhan Kebijakan Akuntansi
Statement of Compliance with Accounting Policies

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) Ikatan Akuntan Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. These include the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).



Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Perubahan Kebijakan Akuntansi PSAK dan ISAK
Changes in PSAK and ISAK Accounting Policies

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

Penerapan dari interpretasi dan amandemen terhadap standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal";
- Amendemen PSAK No. 46. "Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua"; dan
- Amendemen PSAK No. 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akad ijarah.

The adoption of the New and Revised PSAK and ISAK effective for the fiscal year started on or after January 1, 2023

The adoption of the following interpretations and amendments to accounting standards which are effective from January 01, 2023 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current";
- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies";
- Amendment to PSAK No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use";
- Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates";
- Amendment to PSAK No. 46, "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction";
- Amendment to PSAK No. 46, "Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules; and
- Amendment to PSAK No. 107, "Ijarah Accounting" about recognition, measurement, and disclosure of Ijarah contracts.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnnya
Changes in Other Accounting Policies

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi lainnya selain perubahan ISAK dan PSAK.

In 2023 there were no amendments to accounting policies other than those in ISAK and PSAK.

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi pada Perusahaan
Impacts of the Changes in Accounting Policies on the Company

Penyesuaian Perubahan Kebijakan Akuntansi PSAK dan ISAK terhadap Laporan Keuangan
Adjustment to the Changes in PSAK and ISAK Accounting Policies on Financial Statements

Penerapan dari amendemen dan revisi terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan. Implementasi dari standar-standar akuntansi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit pada Catatan atas Laporan Keuangan.

The adoption of the amendments and revision to accounting standards which are effective from January 01, 2023 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year. The adoption of the accounting standards, both qualitatively and quantitatively, can be found in the Notes to the Financial Statements of the Audited Financial Statements

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnya terhadap Perusahaan
Impacts of the Changes in Other Accounting Policies on the Company

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi lainnya selain perubahan ISAK dan PSAK.

In 2023 there were no amendments to accounting policies other than those in ISAK and PSAK.



Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Significant Regulatory Changes and Their Impacts on the Company

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi komitmen PLN Indonesia Power dalam menjalankan operasional Perusahaan. Dalam rangka upaya pemenuhan tersebut, PLN Indonesia Power senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru terbit maupun yang terjadi perubahan.

Compliance with all relevant laws and regulations becomes PLN Indonesia Power's commitment in running operations. To meet this commitment, PLN Indonesia Power constantly observes newly issued or amended laws and regulations.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Regulatory Changes

Di tahun 2023, terdapat peraturan baru dan berubah yang berpengaruh terhadap Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

There were regulatory changes in 2023 that may have impact on the Company:

No	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Change	Uraian Penyesuaian oleh PLN Indonesia Power Description of Adjustment made by PLN Indonesia Power
1.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Law No. 6 of 2023 on Job Creation	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.	1. Penyesuaian pada Perjanjian Kerja Bersama PLN Indonesia Power. 2. Penyesuaian Perizinan Berbasis Risiko (Kesesuaian Antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Darat/Laut (KKPR/L)). 3. Proses penyesuaian regulasi-regulasi internal Perusahaan (Tenaga Alih Daya, Ketenagakerjaan, dll). 1. Adjustment to the Collective Labor Agreement of PLN Indonesia Power. 2. Adjustment to Risk-Based Licensing (Suitability of Space Utilization Activities for Land/Sea (KKPR D/L)). 3. Adjustment to internal regulations (Outsourced Employees, Employment, etc.).
2.	Peraturan Menteri Perindustrian No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Minister of Industry Regulation No. 23 of 2023 on Second Amendment to Minister of Industry Regulation No. 54/M-IND/PER/3/2012 on Guidelines for the Use of Domestic Products for Electricity Infrastructure Development	Ketentuan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Perlu Mengatur Kembali Ketentuan Mengenai Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri. Provisions for Electricity Infrastructure Development, Rearrangement is Needed for the Provisions regarding Domestic Component Level.	Penetapan Peraturan Direksi No. 0099.P/DIR/2023 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan PLN Indonesia Power. Stipulation of Board of Directors' Regulation No. 0099.P/DIR/2023 on Guidelines for the Use of Domestic Products in PLN Indonesia Power.
3.	Peraturan Menteri keuangan RI No. 176 tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Minister of Finance Regulation No. 176 of 2023 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance	Pedoman Pengaturan Mengenai Pemberian Bimbingan dan Bantuan Kepada Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Pembinaan Kepada Masyarakat dalam Bentuk Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Regulatory Guidelines regarding Providing Guidance and Assistance to Entrepreneurs from Economically Vulnerable Groups and Guidance to the Community through Social and Environmental Responsibility Activities.	Penyesuaian kebijakan internal terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu Peraturan Direksi tentang CSR (finalisasi kebijakan). Adjustment of internal policies related to Corporate Social and Environmental Responsibility, i.e. Board of Directors' Regulation on CSR (policy finalization).
4.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 448.K/BN.05/MEM.S/2023 Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 448.K/BN.05/MEM.S/2023	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. PFourth Amendment to the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 77 K/90/MEM/2019 concerning National Vital Objects in Energy and Mineral Resources Sector.	Penyesuaian informasi Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Adjustment to information on National Vital Objects in Energy and Mineral Resources Sector
5.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2023 on the Use of Biomass Fuel as a Fuel Mixture in Steam Power Plants	Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa. Utilization of Biomass as Fuel.	Penyesuaian pada pelaksanaan pengembangan usaha/proyek *co-firing* biomassa. Adjustment to the implementation of biomass co-firing business/project development.

No	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Change	Uraian Penyesuaian oleh PLN Indonesia Power Description of Adjustment made by PLN Indonesia Power
6.	Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. Government Regulation No. 33 of 2023 on Energy Conservation	Perluasan cakupan pengguna energi dan pengguna sumber energi, menurunkan ambang batas konsumsi energi, pengaturan pelaksanaan konservasi energi di lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan menumbuhkembangkan usaha jasa konservasi energi. Expanding the scope of energy users and energy resource users, lowering energy consumption thresholds, regulating the implementation of energy conservation within the central government and regional governments, and developing energy conservation service businesses.	Penyelarasan Transisi Energi pada RJPP Perusahaan Energy Transition Alignment in the Company's Long-term Plan
7.	Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 2 of 2024 on Rooftop Solar Power Plants Connected to the Electricity Network of the Business Permit Holders for Providing Electricity for Public Use	Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2021. Amendment to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 26 of 2021.	Penyesuaian informasi penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atap (ketentuan mengenai batasan kapasitas, ekspor-impor energi listrik, dan biaya kapasitas (*capacity charge*), ketentuan kuota pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atap). Adjustment of information on the use of rooftop solar power plants (provisions regarding capacity limits, export-import of electricity, and capacity charges), provisions on quotas for the development of rooftop solar power plants).

Dampak Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Impacts of Regulatory Changes

Dampak dari perubahan peraturan dan pemberlakuan peraturan baru di tahun 2023, PLN Indonesia Power melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap proses bisnis Perusahaan pada setiap hal-hal yang terkena dampak adanya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud.

Due to the regulatory changes and enforcement of new regulations in 2023, PLN Indonesia Power needs to review and adjust its business processes for every matter affected by such impacts.

Informasi Keuangan yang mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Sepanjang tahun 2023, terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang berdampak signifikan pada Perusahaan yaitu sebagai berikut:

Here is the financial information containing extraordinary and rare events with their significant impacts on the Company throughout 2023:

Pembentukan Struktur *Holding Subholding*
Establishment of Holding-Subholding Structure

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. S 886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 69 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, PLN membentuk 4 (empat) *subholding* yang terdiri dari:

1. Dua *subholding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PLN Nusantara Power (PNP) (sebelumnya Pembangkitan Jawa Bali) dan Perusahaan atau disebut PLN Indonesia Power, nama merek yang digunakan;

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. S 886/MBU/12/2022 dated December 30, 2022 concerning Approval for the Establishment of PLN Holding and Subholding for the Legal End-State Period/Stage as well as Restructuring and Transfer of Assets as outlined in Notarial Deed No. 69 dated December 30, 2022 of Muhammad Hanafi, S.H., a Notary in South Jakarta, PLN has formed four (4) subholdings, which consist of:

1. Two subholdings in electricity generation sector, namely PLN Nusantara Power (PNP) (formerly Pembangkitan Jawa Bali) and the Company which is also known as PLN Indonesia Power, the brand name used;



2. Satu *subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) (sebelumnya PLN Batubara); dan
3. Satu *subholding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (*Beyond* kWh), yaitu bernama Indonesia Comnet Plus (ICON+).

Sebagai tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 77 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tentang Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan Listrik PLN kepada Perusahaan, yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dari Perusahaan yang menerima pemisahan sejak tanggal efektif pemisahan di 1 Januari 2023.

Oleh karena PLN memiliki dan memenuhi definisi 'pengendalian' atas Perusahaan, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 65, maka atas transaksi pengalihan bisnis ini dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sebagaimana diharuskan dalam PSAK No. 38, sebagai berikut:

1. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku aset bersih yang diperoleh dicatat pada akun Tambahan modal disetor dalam ekuitas Perusahaan.
2. Dampak ekuitas dari bisnis pembangkitan listrik yang dialihkan, sebelum tanggal efektif pengalihan (1 Januari 2023), disajikan sebagai Ekuitas *restructured entities* pada bagian ekuitas. Untuk menghindari keragu-raguan, akun ini setara dengan Ekuitas *merging entities* pada ilustrasi yang terdapat pada Lampiran PSAK No. 38.

Sebelum pengalihan, bisnis pembangkitan listrik adalah bagian dari unit bisnis yang tergabung dalam PLN. Ketika masih menjadi bagian dari unit bisnis PLN, transaksi kas untuk pembayaran dan penerimaan terkait aktivitas operasi dan Investasi di unit bisnis dilakukan secara terpusat melalui rekening Kantor Pusat PLN. Dampak transaksi kas dengan Kantor Pusat PLN ini dicatat sebagai Kas *pooling* untuk pendanaan umum dalam laporan arus kas.

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 38, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan sedemikian rupa seolah-olah transaksi pengalihan bisnis pembangkitan listrik ini telah efektif sejak 1 Januari 2022, yang merupakan permulaan dari periode sajian paling awal.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian telah disajikan kembali hanya untuk akun-akun yang terkena dampak atas pengalihan kegiatan usaha pembakitan listrik PLN.

2. One subholding in primary energy supply and logistics sector, namely PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) (formerly PLN Batubara); and
3. One subholding for the business activities other than electricity generation, transmission, and distribution (Beyond kWh), namely Indonesia Comnet Plus (ICON+).

As a follow-up to the establishment of the PLN subholdings, in accordance with Notarial Deed No. 77 dated December 30, 2022 of Muhammad Hanafi, S.H., a Notary in South Jakarta concerning the Separation of PLN's Electricity Generation Business Activities to the Company, which states that some of the assets and liabilities of PLN's electricity generation business activities will be legally transferred to become the rights and obligations of the Company receiving the separation from the effective date of separation on January 01, 2023.

As PLN has and meets the definition of 'control' over the Company, as regulated in PSAK No. 65, the business transfer transaction shall be recorded using the pooling of interest method as required in PSAK No. 38, as follows:

1. The difference between the amount of consideration transferred and the book value of the net assets acquired shall be recorded in the Additional paid-in capital account of the Company's Equity.
2. The impact of equity on the transferred electricity generation business, prior to the effective date of transfer (January 01, 2023), shall be presented as Equity of restructured entities in the Equity section. For the avoidance of doubt, this account is equivalent to the Equity of merging entities in the illustration contained in Attachment to PSAK No. 38.

Before the transfer, electricity generation business was a part of the business unit incorporated within PLN. When it was being a part of PLN business unit, cash transactions for payments and receipts of operating and investing activities in the business unit were carried out centrally through the PLN Head Office account. The impact of cash transactions with PLN Head Office is recorded as cash pooling for general funding in the cash flow report.

In accordance with the provisions of PSAK No. 38, the Company has restated the financial statements as if the transfer of these power generating business had been effective as of January 01, 2022, which is the beginning of the earliest period presented.

The notes to the consolidated financial statements have been restated only for those accounts impacted by the transfer of PLN's power generation business activities.

Penghentian Pencatatan ISAK 16 atas PLTU Suralaya 1-7

Derecognition of ISAK 16 of Suralaya 1-7 SPP

Pada tanggal 10 Maret 2017, Perusahaan menandatangani PJBTL atas PLTU Suralaya (SLA) unit 1-7. Jangka waktu perjanjian adalah lima tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Pada tanggal 22 Agustus 2017, perjanjian tersebut telah diamendemen dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Amendemen tersebut terutama mencakup perubahan atas jangka waktu perjanjian menjadi 30 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2046. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, manajemen berpendapat bahwa PJBTL sesuai dengan kriteria perjanjian konsesi jasa dan melakukan reklasifikasi aset tetap SLA unit 1-7 dengan jumlah tercatat sebesar Rp52,91 triliun sebagai aset keuangan dari konsesi jasa.

On March 10, 2017, the Company entered into Power Purchase Agreement (PPA) for Suralaya SPP (SLA) Units 1-7. The agreement was valid for five (5) years, effective from January 01, 2017. On August 22, 2017, it was amended and retrospectively applicable from January 01, 2017. The amendment particularly accommodates a change in the term of agreement to 30 years, effective from January 01, 2017 through December 31, 2046. In connection with the agreement, the Management was of the opinion that the PPA had met the criteria for service concession agreement and reclassified the property, plant, and equipment of SLA Units 1-7 with a carrying amount of Rp52.91 trillion as financial assets from service concession.

Pada tanggal 30 December 2022, Perusahaan dan PLN telah menandatangani kontrak perubahan dan pernyataan kembali atas PJBTL untuk SLA unit 1-7 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan akhir periode penagihan Desember 2032. Dengan ditandatanganinya perubahan dan pernyataan kembali atas PJBTL ini, maka PJBTL sebelumnya sudah tidak berlaku. Manajemen berpendapat bahwa perubahan PJBTL tersebut telah mengakhiri perjanjian konsesi jasa dengan PLN sejak 1 Januari 2023.

Atas pengakhiran perjanjian konsesi jasa dengan PLN, Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset keuangan dari konsesi jasa dengan jumlah tercatat pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp40,51 triliun. Perusahaan mengakui aset tetap SLA unit 1-7 sebesar Rp31,16 triliun yang sesuai dengan nilai wajar aset keuangan yang diserahkan. Dengan demikian, Perusahaan mengakui kerugian atas selisih jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai wajarnya sebesar Rp9,35 triliun pada laba rugi.

On December 30, 2022, the Company and PLN had signed a contract for the amendment to and restatement of the PPA for SLA Units 1-7 which would be effective on January 01, 2023 for a period of 10 years starting from the effective date until the end of the billing period in December 2032. The signing of these amendment to and restatement of the PPA would render the previous PPA no longer valid. The Management was of the opinion that the amendment to the PAA PJBTL have ended the service concession agreement with PLN as of January 01, 2023.

Upon termination of the service concession agreement with PLN, the Company derecognized the financial assets from service concession with the carrying amount of Rp40.51 trillion as pf January 01, 2023. The company recognized the property, plant, and equipment of SLA Units 1-7 amounting to Rp31.16 trillion which correspond to the fair value of the financial assets handed over. Thus, the Company recognized a loss on the difference between the carrying amount of financial assets and their fair value of Rp9.35 trillion in profit or loss.

Dampak Perubahan Harga terhadap Kinerja Perusahaan
Impact of Price Change on the Company's Performance

Pendapatan penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya. Pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan dan laba Perusahaan adalah perubahan harga energi primer.

Revenues from the sale of electricity are assessed based on the volume of electricity (kWh) supplied to PT PLN (Persero) using the tariff formulated in the power purchase agreement. The tariff formula includes the calculation of capacity price, fixed price for operations and maintenance, fuel price, energy supply level, and other variables. In the past two (2) years, change in primary energy price has been the significant factor affecting the Company's revenue and profit.

Kondisi Harga Batubara
Coal Prices

Dalam rangka memastikan ketersediaan dan kecukupan energi primer dalam kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit, PLN Indonesia Power mengupayakan diperolehnya energi primer dengan harga yang lebih kompetitif sehingga harga satuan kalor menjadi lebih rendah dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik yang dihasilkan kompetitif. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan *merit order* pembangkit sehingga dapat mendukung *sustainability* pembangkit dalam jangka panjang. Perubahan harga energi primer sangat mempengaruhi besaran BPP mengingat porsinya mencapai 60%-70% dari BPP.

In order to ensure the availability and sufficiency of primary energy to meet the qualitative and quantitative demands for power plants, PLN Indonesia Power seeks to obtain primary energy at a more competitive price. It aims at reducing energy unit price and achieving more efficient power plant production cost. It is expected to contribute to the improvement of merit order of the power plants, in order to sustain the power plants in the long run. The change in primary energy price highly affects production cost, given its portion that is 60-70% of the production cost.

Kondisi harga batubara di tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harga batubara mengalami penurunan secara signifikan sejak Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 hingga menyentuh angka US$169/Ton dan titik terendahnya yaitu pada bulan November 2023 dimana mencapai angka US$118/Ton,
2. HBA Minerba Bulan Desember 23 sebesar US$117/Ton atau setara penurunan 62% dibandingkan Harga Batubara Acuan (HBA) Januari 2023 yang sebesar US$305/Ton,
3. Penurunan harga batubara disebabkan musim dingin di negara - negara sub tropis tidak sedingin perkiraan sehingga kebutuhan atas energi menjadi menurun. Di samping itu, terjadi peningkatan produksi natural gas di Amerika Serikat (naik 17,2%) yang secara tidak langsung mempengaruhi turunnya harga batubara akibat prioritas penggunaan bahan bakar natural gas di pasar global,

The coal prices in 2023 are elaborated as follows:

1. Coal price declined significantly from January 2023 to March 2023 and reached US$169/ton, with the lowest point seen in November 2023 at US$118/ton;
2. The reference coal price (HBA) Minerba for December 2023 slid to US$117/ton or equal to 62% decrease compared to HBA for January 2023 which was to US$305/ton;
3. The decline in coal price was contributed by the winter situation in sub-tropical countries which was not as cold as expected, resulting in a decline in energy requirements. There was also a boost in natural gas production in the United States (increasing 17.2%) which indirectly contributed to the decline in coal prices as natural gas fuel utilization is prioritized by the global market;



4. Secara *forecast* harga batubara, diperkirakan pada tahun 2024 harga batubara akan meningkat pada *range* angka US$140/Ton - US$200/Ton sehubungan dengan memanasnya hubungan antar negara (AS, China, Taiwan, dsb),
5. Tinggi/rendahnya harga batubara di pasar global masih belum berpengaruh terhadap harga batubara domestik mengingat adanya *capping* harga dari Kepmen ESDM No. 267 Tahun 2022 (HBA maksimal US$70/Ton.

Adapun hal-hal yang menjadi pembentuk harga batubara PLN Indonesia Power :

1. Harga Batubara Global (Indonesia *Coal Price Index* = ICI, *Global Coal New Castle Index* = GCNC, *New Castle Export Index* = NEX, *Platts Index*) -> Berpengaruh terhadap HBA Minerba yang digunakan sebagai harga batubara domestik,
2. Kurs US$ -> Berpengaruh terhadap konversi nilai HBA Minerba dari US$ ke Rp,
3. Harga BBM Industri Pertamina -> Berpengaruh terhadap harga jasa alat angkut batubara (*Freight Cost*).

Berikut ini disajikan tren Harga Batubara pada market global periode Januari 2022 sampai dengan Januari 2024. Terlihat terjadi peningkatan signifikan pada awal 2022 disebabkan krisis energi di Eropa akibat perang Rusia - Ukraina. Kemudian harga batubara kembali turun pada awal 2023 dimana musim dingin di negara belahan bumi utara tidak terlalu dingin.

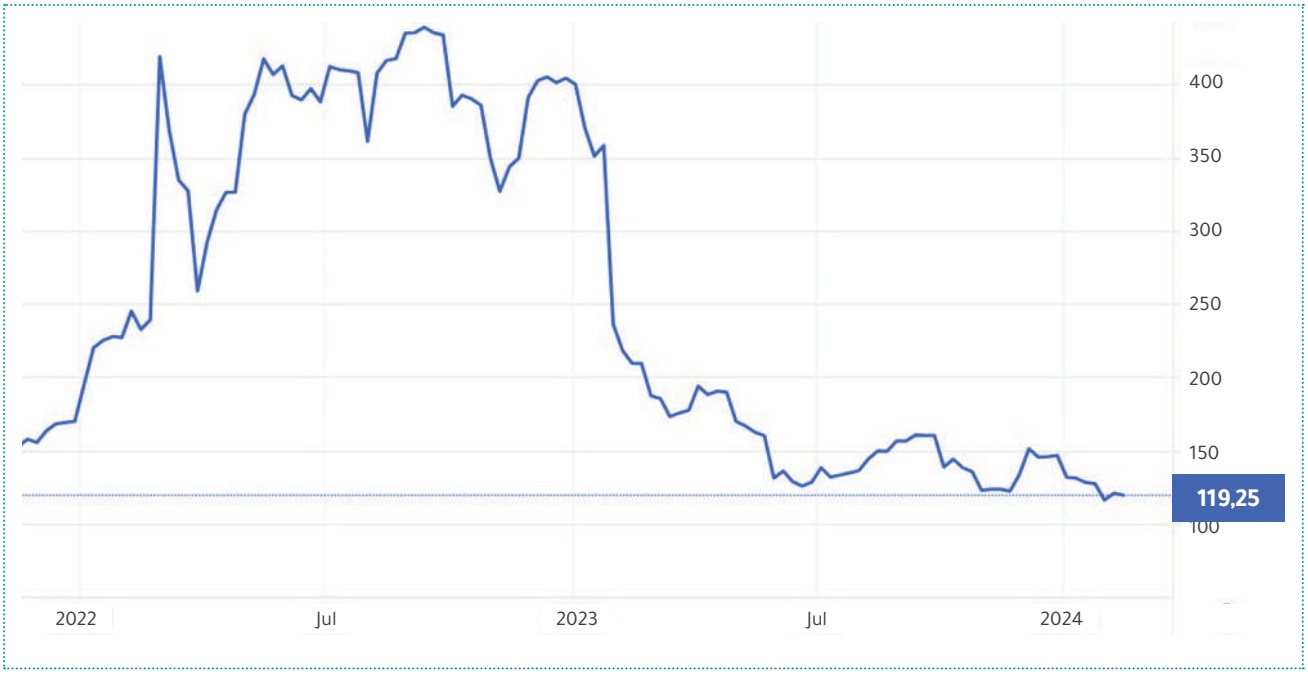
4. It is forecast that the year 2024 will see an increase in coal prices, within the range of US$140-200/ton due to increasing tension among countries (US, China, and Taiwan, among others);
5. The fluctuation of coal prices in the global market still has no effect on domestic coal prices considering the price capping from the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 267 of 2022 (maximum HBA at US$70/ton).

The factors that determine PLN Indonesia Power's coal price include:

1. Global coal price (ICI, GCNC, NEX, and Platts Index) -> Affecting HBA Minerba which is used as domestic coal price;
2. US$ exchange rate -> Affecting the HBA Minerba conversion rate from US$ to Rp;
3. Pertamina industrial oil price -> Affecting the price of coal transport services (freight cost)

The following chart shows the coal price trend in the global market from January 2022 through January 2024. A significant increase was seen at the beginning of 2022 as a result of European energy crises inflicted by Russian-Ukrainian war. Coal price further declined at the beginning of 2023 because the winter in the northern hemisphere was not too harsh.

Grafik Tren Rata-rata Harga Batubara Tahunan (US$/Ton)
Chart of Average Annual Coal Price Trend (US$/ton)



Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga batubara sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Berkoordinasi dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) untuk melakukan kontrak jangka menengah/panjang kepada pemasok tertentu mengingat harga batubara sedang rendah sehingga pasar domestik dianggap lebih menarik bagi pemasok,
2. Melakukan pengalihan pasokan antar unit PLTU untuk menjaga kehandalan operasional di seluruh PLTU PLN Indonesia Power,
3. Optimasi pasokan biomassa dimana sekaligus dapat meningkatkan produksi kWh *Green*.

To anticipate the coal price dynamics throughout 2023, PLN Indonesia Power performed the following:

1. Coordinating with PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) to enter into medium/long-term contracts with certain suppliers. Due to low price at that time, the domestic market was considered more attractive for suppliers;
2. Transferring supplies among SPP units to secure operational reliability across PLN Indonesia Power's Steam Power Plants;
3. Optimizing biomass supplies which also aimed at increasing Green kWh production.

Kondisi Harga BBM
Oil Prices

Harga Jual BBM Pertamina ke PLN Grup diatur sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (PJBBM) antara PT PLN (Persero) dan PT Pertamina Patraniaga, dimana harga tersebut diupdate setiap bulan dan dihitung berdasarkan formulas yang tertuang di PJBBM. Adapun hal-hal yang mempengaruhi harga jual BBM Pertamina ke PLN Grup adalah sebagai berikut:

1. (1+ Alpha HSD)
2. (1+ Alpha MFO)
3. MOPS Gasoil 0,25% S
4. MOPS HSFO 180 CST
5. MOPS LSFO 180 CST
6. JISDOR = Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
7. JIBOR RATE 1 Bulan
8. 158,9 = konversi dari Barrel ke Liter
9. 1.009,015 = konversi dari MT ke Liter

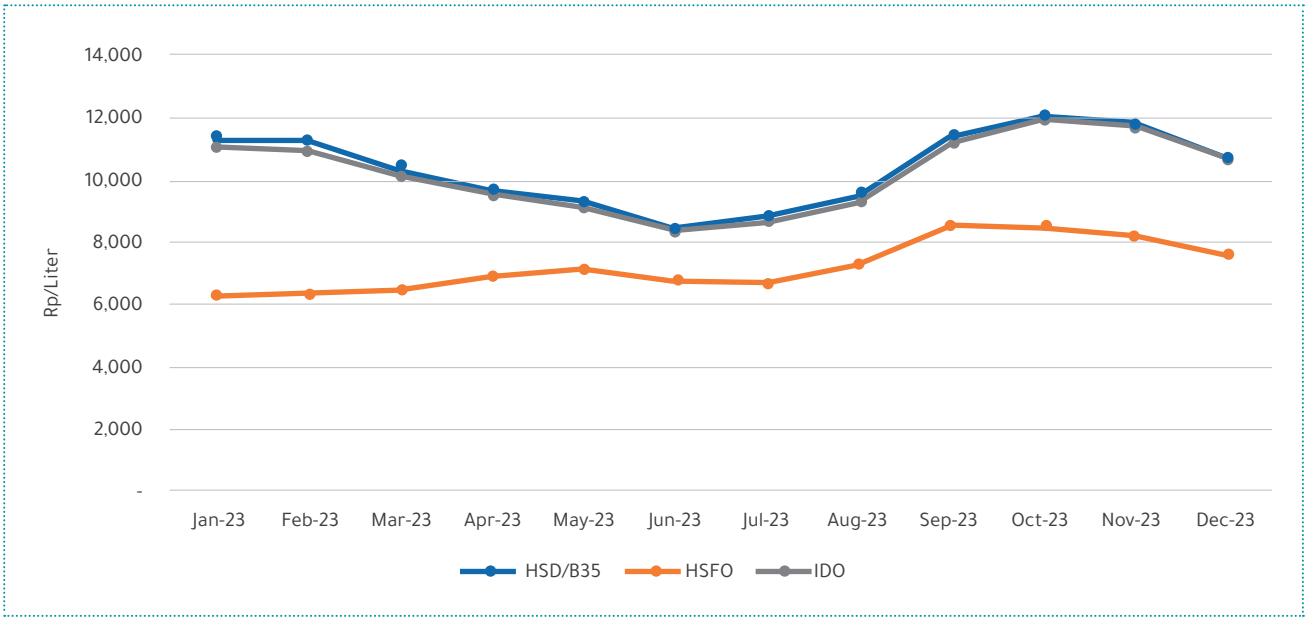
Variabel-variabel tersebut berubah setiap bulan, sehingga perlu penyesuaian harga setiap bulan. Adapun *trend* harga BBM di Tahun 2023 dapat dijelaskan berdasarkan grafik berikut:

Pertamina's oil price to PLN Group is regulated under the Oil Purchase Agreement (PJBBM) between PT PLN (Persero) and PT Pertamina Patraniaga. The price is updated on a monthly basis and calculated according to the formula stated in the PJBBM. The factors that determine Pertamina's oil price to PLN Group include:

1. (1+ Alpha HSD)
2. (1+ Alpha MFO)
3. MOPS Gas Oil 0.25% S
4. MOPS HSFO 180 CST
5. MOPS LSFO 180 CST
6. JISDOR = Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
7. JIBOR Rate 1 month
8. 158.9 = Barrel to Liter conversion
9. 1,009,015 = MT to Liter conversion

The variables change every month, which calls for monthly price adjustment. The trend of oil price in 2023 is described in the following chart:

Grafik Tren Rata-rata Harga BBM Tahunan (Rp/Liter)
Chart of Average Annual Oil Price Trend (US$/ton)



Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga BBM sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Dengan menjaga agar pemesanan BBM seoptimal mungkin sesuai kebutuhan (tidak berlebihan) apalagi disaat harga BBM sedang naik,
2. Berkoordinasi dengan PLN EPI agar titik pengambilan BBM dari TBBM terdekat dengan lokasi pembangkit sehingga menghemat ongkos angkut.

To anticipate the oil price dynamics throughout 2023, PLN Indonesia Power performed the following:

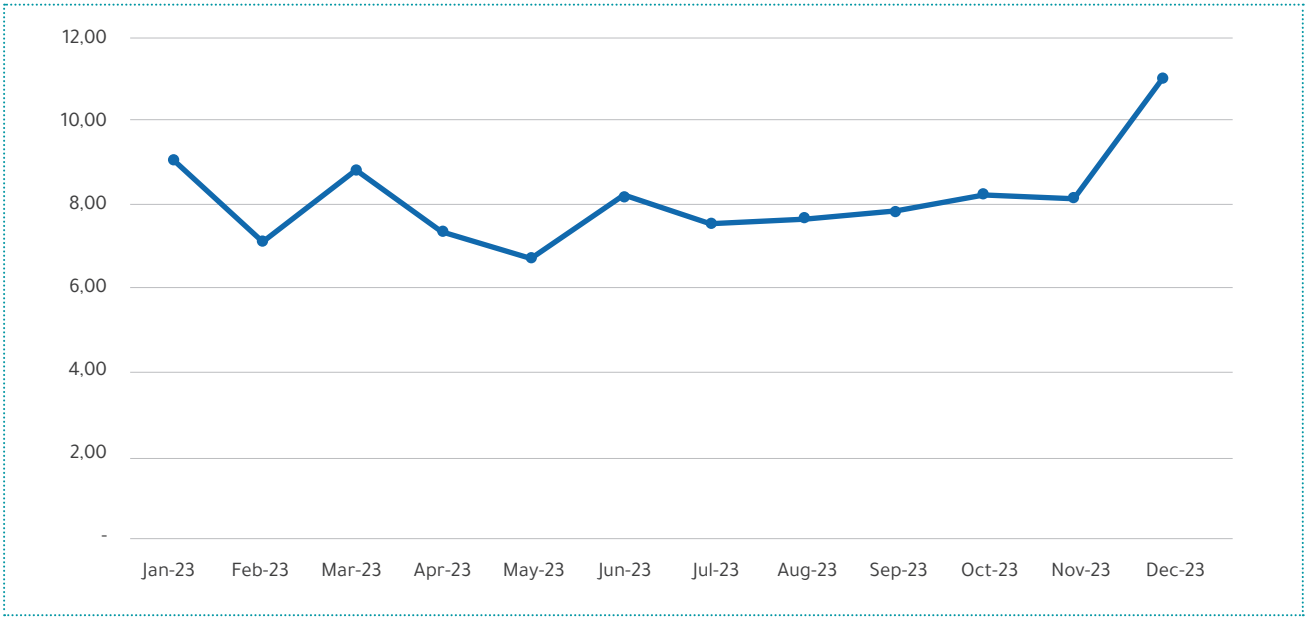
1. Maintaining oil order optimally according to needs (no redundancy), particularly during high oil price;
2. Coordinating with PLN EPI for collecting oil from the nearest Fuel Terminal (TBBM) to power plant site, in order to minimize transportation cost.

Kondisi Harga Gas
Gas Prices

Harga Gas pipa cenderung tetap atau tidak mengalami fluktuasi, mengingat harga gas tiap sumber berbeda berdasarkan keekonomian masing-masing sumur, yang ditetapkan melalui penetapan harga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tiap Perjanjian Jual Beli Gas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Selain itu sejak 30 Juni 2021 pemerintah juga menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Listrik melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Listrik, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Listrik (*Plant Gate*). Dimana Kepmen ini mengatur Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tahun 2021 s.d. 2024. Berbeda dengan harga gas pipa, untuk harga *Liquid Natural Gas* (LNG) cukup fluktuatif, yang dipengaruhi oleh harga jual minyak mentah Indonesia (*Indonesian crude price* (ICP) untuk LNG yang *uncommitted*. Sedangkan untuk LNG *Committed* menggunakan HGBT sampai dengan batasan kecukupan bagian negara terpenuhi.

Pipeline gas price tends to be stable with no fluctuations. This is because gas prices differ for each source based on the economics of each well. The price is determined based on the provision of the Minister of Energy and Mineral Resources in each Gas Purchase Agreement with the Cooperation Contract Contractor (K3S). In addition, since June 30, 2021, the Government has also set Certain Natural Gas Price (HGBT) at Power Plants under the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 on Certain Natural Gas Price at Power Plants, which was later amended by the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 dated August 02, 2021 on Amendment to the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 on Certain Natural Gas Price at Power Plants (Plant Gate). The Decree regulates Certain Natural Gas Price (HGBT) for 2021 to 2024. In contrast to pipeline gas price, the price of Liquid Natural Gas (LNG) is quite volatile, which is influenced by the Indonesian crude price (ICP) for uncommitted LNG. Meanwhile, Committed LNG uses Certain Natural Gas Price (HGBT) until the Country's share adequacy limit is met.

Grafik Tren Rata-rata Harga Gas 2023 (US$/MMBTU)
Chart of Average Gas Price Trend in 2023 (US$/MMBtu)



Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga Gas sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Berkoordinasi dengan PLN EPI untuk melakukan kontrak jangka menengah/panjang kepada pemasok,
2. Pengusulan HGBT untuk sumber-sumber pasokan yang belum diakomodir pada KepMen ESDM No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021,
3. Optimalisasi gas dengan harga yang lebih murah untuk pembangkit-pembangkit yang di-*supply* oleh beberapa sumber pasokan gas,
4. Optimasi pasokan LNG *committed cargo* dari BP Tangguh, melalui skema *breakbulking* dari Jawa Satu Power (JSP) untuk pasokan gas Bali.

To anticipate the gas price dynamics throughout 2023, PLN Indonesia Power performed the following:

1. Coordinating with PLN EPI to enter into medium/long-term contracts with suppliers;
2. Proposing Certain Natural Gas Price (HGBT) for the sources of supply not yet accommodated by the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021;
3. Optimizing lower priced-gas for power plants supplied by several gas sources;
4. Optimizing the committed LNG cargo supply from BP Tangguh through break bulking from Jawa Satu Power (JSP) for Bali gas supply.

Kondisi Harga Biomass
Biomass Prices

Dalam rangka mendorong pencapaian target bauran energi baru dan terbarukan PT PLN (Persero) sebesar 23% di tahun 2025, PT PLN Indonesia Power turut mendukung program tersebut salah satunya dengan mengimplementasikan *cofiring* dimana juga dapat memberikan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui kombinasi penggunaan batubara dengan biomassa.

In order to encourage the achievement of PT PLN (Persero)'s new and renewable energy mix target of 23% in 2025, PT PLN Indonesia Power also supports the program, one of which is by implementing cofiring which can also contribute to reducing greenhouse gas emissions through the combination of coal use with biomass.

Pelaksanaan *cofiring* di lingkungan pembangkit PLTU PT PLN (Persero) diatur dalam Peraturan Direksi (Perdir) PT PLN (Persero) No. 0004.P/DIR/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Cofiring* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara dengan Bahan Bakar Biomassa. Dalam hal penentuan harga biomassa, Perdir tersebut telah mengaturnya dengan menggunakan skema Harga Patokan Tertinggi (HPT) menggunakan konsep harga satuan energi dengan referensi harga rata-rata batubara pada periode sebelumnya.

The implementation of cofiring in the SPP plant environment of PT PLN (Persero) is regulated in the PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation (Perdir) No. 0004.P/DIR/2022 concerning Guidelines for the Implementation of Cofiring Coal-Fired Steam Power Plants with Biomass Fuel. In terms of determining the price of biomass, the Perdir has regulated it by using the Highest Benchmark Price (HPT) scheme using the concept of energy unit price with reference to the average price of coal in the previous period.

Mengingat adanya fluktuasi harga batubara yang dapat berpengaruh pada meningkatnya harga biomassa, maka bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga biomassa sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Berkoordinasi dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) untuk memilih sumber pasokan biomassa dari lokasi yang terdekat dengan PLTU tujuan sehingga dapat menekan harga ongkos transportasi biomassa.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap kargo biomassa yang masuk ke PLTU agar kualitas biomassa yang dikonsumsi benar-benar yang memiliki kualitas baik sehingga dapat meningkatkan produksi kWh *Green* dan menurunkan *Specific Fuel Consumption* (SFC) unit PLTU.

Given the fluctuations in coal prices that can affect the increase in biomass prices, PLN Indonesia Power anticipates the dynamics of biomass prices throughout 2023:

1. Coordinate with PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) to select biomass supply sources from the location closest to the destination SPP so as to reduce the price of biomass transportation costs.
2. Improve supervision of biomass cargoes entering the SPP so that the quality of biomass consumed is really of good quality so that it can increase Green kWh production and reduce the Specific Fuel Consumption (SFC) of the SPP unit.

Kondisi Harga Air
Water Prices

Untuk harga air saat ini terdapat 2 (dua) komponen yang menjadi bentuk biaya Energi Primer diantaranya adalah Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Pajak Permukaan Air (PAP) yang saat ini dikenakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

The current water price consists of two (2) components that make up the Primary Energy cost, namely Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) and Surface Water Tax (PAP), both of which are currently charged to Hydro Power Plants (HPP).

Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
Water Resources Management Service Fee (BJPSDA)

Pengenaan BJPSDA saat ini yang sudah dikenakan diantaranya adalah:

The currently applicable BJPSDA is as follows:

Pembangkit Listrik Power Plant	Harga/Tarif BJPSDA BJPSDA Price
PLTA HPP Saguling	Rp14,01 /kWh
PLTA HPP Wonogiri	Rp222 /kWh
PLTA HPP Ketenger	Rp50,06 /kWh
PLTA HPP Sempor	Rp50,06 /kWh
PLTA HPP Pejengkolan	Rp50,06 /kWh
PLTA HPP Sidorejo	Rp49,82 /kWh
PLTA HPP PB Soedirman	Rp50,06 /kWh
PLTA HPP Jelok	Rp49,82 /kWh
PLTA HPP Timo	Rp49,82 /kWh
PLTA HPP Garung	Rp50,06 /kWh
PLTA HPP Wedaslintang	Rp50,06 /kWh
PLTA HPP Kedungombo	Rp49,82 /kWh

Tarif BJPSDA untuk periode 2023 masih sama sejak tahun 2017. Untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk PLTA Wonogiri ada potensi kenaikan yang saat ini masih dalam pembahasan lintas kementerian.

The BJPSDA price for 2023 remained the same with that of 2017. BJPSDA for Bengawan Solo River for Wonogiri HPP may increase, depending on the result of the currently ongoing cross-ministerial discussion.

BJPSDA ini terdapat perjanjian antara PJT I dan PJT II dengan PT PLN Indonesia Power yang terdapat program program untuk pengelolaan SDA. Program ini harus berdampak langsung untuk Pembangkit.

BJPSDA is covered in the agreements between PJT I & PJT II and PT PLN Indonesia Power as contained in natural resource management programs. These programs must bring direct impact on power plants.

Pajak Air Permukaan (PAP)

Surface Water Tax (PAP)

Pengenaan PAP saat ini sudah dikenakan keseluruh PLTA PLN Group, Pajak air ini dibayarkan ke masing masing PEMDA sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk tarif PAP yang dikenakan ke PLTA berbeda-beda pengenaan tarif sesuai PERDA yang berlaku di daerah tersebut:

PAP has been charged to all HPP under PLN Group, which will be paid to each Regional Government according to existing regulations. The PAP price charged to each HPP differs, depending on the regulation applicable in each region.

Pembangkit Listrik Power Plant	Harga/Tarif PAP PAP Price
PLTA HPP Saguling	Rp2,73 /KWh
PLTA HPP Pleangan	Rp1,76 /KWh
PLTA HPP Lamajan	Rp1,76 /KWh
PLTA HPP Cikalong	Rp1,76 /KWh
PLTA HPP Bengkok	Rp1,76 /KWh
PLTA HPP Dago	Rp1,76 /KWh
PLTA HPP Pr. Kondang	Rp1,76 /KWh
PLTA HPP Ubruk	Rp2,76 /KWh
PLRA HPP Karacak	Rp1,76 /KWh
PLTA HPP Wonogiri	Rp5 /KWh
PLTA HPP Plumbungan	Rp5 /KWh
PLTA HPP Siteki	Rp5 /KWh
PLTA HPP Tapen	Rp5 /KWh
PLTA HPP Ketenger	Rp5 /KWh
PLTA HPP Sempor	Rp5 /KWh
PLTA HPP Pejengkolan	Rp5 /KWh
PLTA HPP Sidorejo	Rp5 /KWh
PLTA HPP PB Soedirman	Rp5 /KWh
PLTA HPP Jelok	Rp5 /KWh
PLTA HPP Timo	Rp5 /KWh
PLTA HPP Garung	Rp5 /KWh
PLTA HPP Wedaslintang	Rp5 /KWh
PLTA HPP Kedungombo	Rp5 /KWh
PLTA HPP TES	Rp9.694 /KWh
PLTA HPP Musi	Rp9.694 /KWh
PLTA HPP Singkarak	Rp7,76 /kWh
PLTA HPP Maninjau	Rp3,37 /kWh
PLTA HPP Batang Agam	Rp4,04 /kWh
PLTA HPP Ir.PM Noor	Rp15,86 /kWh

Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga air sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Berkoordinasi dengan PLN Kantor Pusat untuk mengawal regulasi yang berpotensi membuat kenaikan tarif BJPSDA dan PAP,
2. Melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap program program JPSDA agar meningkatkan efisiensi pembangkit sehingga menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP),
3. Optimasi program JPSDA agar tepat sasaran dan berdampak langsung untuk peningkatan produksi listrik PLTA.

To anticipate the water price dynamics throughout 2023, PLN Indonesia Power performed the following:

1. Coordinating with PLN Head Office to monitor regulations that may potentially increase BJPSDA and PAP prices;
2. Supervising and monitoring Water Resources Management Services (JPSDA) programs to optimize power plant efficiency, hence reducing Production Cost (BPP);
3. Optimizing Water Resources Management Services (JPSDA) programs to be right on target and bring direct impact for increasing HPP's electricity productions.

Kondisi Harga Panas Bumi
Geothermal Energy Prices

Tidak banyak dinamika yang mempengaruhi harga energi panas bumi, mengingat kontrak panas bumi merupakan kontrak jangka panjang. Hampir semua kontrak Panas Bumi diterapkan skema eskalasi harga tiap tahunnya dengan besaran yang bervariasi untuk masing-masing kontrak.

Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga energi panas bumi sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Penyusunan *Interim Agreement* terkait diskon harga uap untuk PLTP Kamojang 1-3,
2. *Monitoring* penyaluran dan penyerapan panas bumi, serta koordinasi dengan UIP2B terkait serapan panas bumi, agar tidak terkena TOP.

There are not a lot of dynamics that affect geothermal energy price, as it is commonly sold under long-term contracts. Almost all geothermal energy contracts applies annual price escalation scheme whose nominal vary for each contract.

To anticipate the geothermal energy price dynamics throughout 2023, PLN Indonesia Power performed the following:

1. Preparing interim agreement on the discount of steam price for Kamojang 1-3 GPP;
2. Monitoring the distribution and absorption of geothermal energy while coordinating with UIP2B on geothermal energy absorption to avoid TOP.



Prospek Usaha ke Depan
Business Outlook

Menjelang tahun 2024, perekonomian dunia diperkirakan masih dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi *Purchasing's Manager Index* (PMI) manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Oktober 2023

Approaching 2024, the global economy is predicted to remain shadowed by global uncertainty, including by the risk of Chinese and American economic slowdown, geopolitics of Ukraine-Russia and Palestine-Israel wars, economic fragmentation (the antithesis of economic integration), commodity price volatility, threat of climate change, global manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) contraction, and increased world oil prices.

Source: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, October 2023

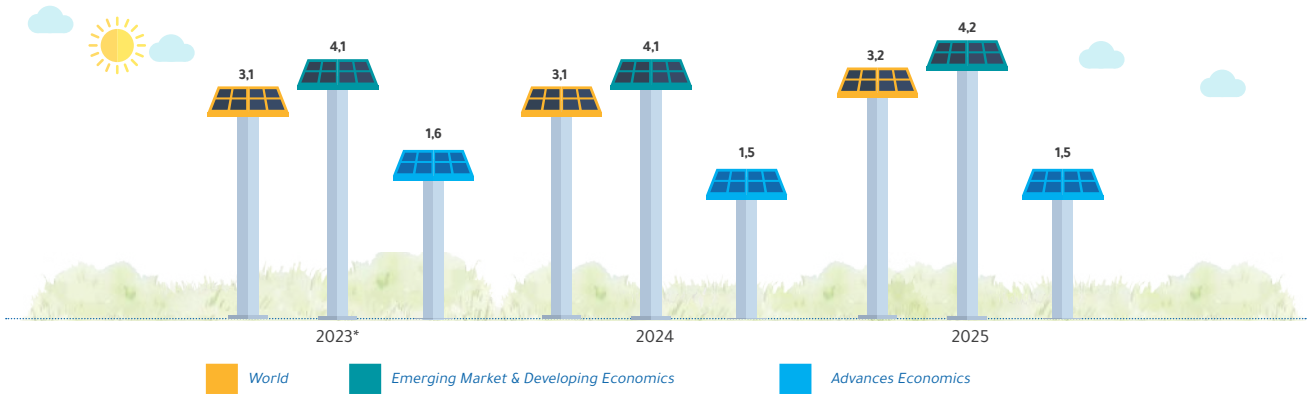
Dalam *World Economic Outlook* terbitan Januari 2024, International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan global tahun 2023 dan 2024 sebesar 3,1%. IMF juga menggambarkan proyeksi ekonomi dunia tahun 2024 dengan istilah *"resilient but slow"*, atau "tangguh meskipun lambat". Proyeksi ini juga memperhitungkan asumsi bahwa harga komoditas bahan bakar dan non-bahan bakar akan turun pada 2024-2025, dan tingkat suku bunga di negara-negara maju akan menurun.

In the World Economic Outlook, January 2024, the International Monetary Fund (IMF) predicts that the world's economy will grow 3.1% in 2023 and 2024. The IMF also describes the 2024 world economic projection as "resilient but slow". This projection assumes that the price of fuel and non-fuel commodities will decline in 2024-2025, whereas interest rates in developed countries will also decrease.

IMF memperkirakan rata-rata harga minyak bumi akan turun 2,3% pada 2024, dan harga komoditas non-bahan bakar turun 0,9%. Kemudian suku bunga bank sentral di AS, Eropa, dan Inggris diprediksi turun mulai semester kedua 2024, seiring dengan melandainya inflasi di negara-negara tersebut. Secara kumulatif, IMF memproyeksikan inflasi global akan turun dari 6,8% pada 2023, menjadi 5,8% pada 2024.

The IMF predicts that the average oil price will drop 2.3% in 2024 whereas non-fuel commodity price will decline 0.9%. Further, the interest rates of the US, European, and British central banks are predicted to start declining by the second half of 2024, along with the flattening inflation in these countries. Cumulatively, the IMF projects that the global inflation will decline from 6.8% in 2023 to 5.8% in 2024.

Tren Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Trend of World Economic Growth Outlook (%)



*estimasi
Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), Januari 2024

*estimate
Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), January 2024

Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

The global situation will certainly bring a significant impact on Indonesian economy, particularly when the Government, regulators, industry actors, and other stakeholders fail to prepare anticipatory measures.

Prospek/ *Outlook* Perekonomian Indonesia ke Depan

Indonesian Economic Outlook

Perekonomian nasional tahun 2024 tumbuh optimis dengan mencatatkan kinerja yang lebih baik dan tumbuh positif. Proyeksi dari beberapa Lembaga, sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil dikisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain *World Bank* sebesar 4,9%, *Asian Development Bank* (ADB) dan IMF sebesar 5,0% serta *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%. Kunci dari Indonesia untuk tumbuh di angka 5,2% adalah pada sektor konsumsi. Konsumsi diasumsikan bisa terealisasi di atas 5%. Konsumsi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebagai penyumbang proporsi yang tinggi dalam PDB Indonesia.

The national economy will optimistically improve in 2024 by delivering better performance and positive growth. Most agencies predict that Indonesian economic growth will remain steady at 5% by 2024. This is higher than the projected global economic growth at 2.9%. Some agencies have predicted Indonesian economic growth rate for 2024. They among others are: the World Bank predicting 4.9% growth, Asian Development Bank (ADB) and the IMF predicting 5.0% growth, and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) predicting 5.2% growth. The Indonesian Government has set a target of 5.2% for Indonesian economic growth for 2024. The achievement of this target will depend a lot on the consumption sector. Consumption alone is assumed to contribute an actual growth of 5%. Consumption is the main driver for the national economic growth because it contributes highly to the Indonesian GDP.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, selain menyiapkan langkah antisipatif atas kondisi eksternal yaitu ketidakpastian global, kita juga harus mewaspadai tantangan dari dalam negeri/domestik. Tantangan tersebut antara lain kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada investor sehingga mendorong angka investasi. disamping itu, tingkat inflasi Indonesia relatif moderat di bawah 3% menjadi modal utama menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga secara keseluruhan.

To meet the economic growth target, apart from preparing anticipatory measures for external condition that is global uncertainty, we also have to be aware of domestic challenges. These challenges include increasing domestic interest rates, national food security, and weakening rupiah exchange rate. Apart from that, the General Election (Pemilu) 2024 is expected to give confidence to investors thereby increasing investment. Indonesia's relatively moderate inflation rate of under 3% also becomes a key factor for maintaining people's purchasing power and overall price stability.

Sumber: Kementerian Keuangan dan https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3983/outlook-ekonomi-dan-keuangan-di-tahun-2024

Source: Ministry of Finance and https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3983/outlook-ekonomi-dan-keuangan-di-tahun-2024

Prospek/ *Outlook* Industri Listrik Indonesia Tahun 2024

2024 Indonesian Electricity Industry Outlook

Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, diprediksi juga akan meningkatkan tingkat konsumsi listrik di Indonesia. Salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah program hilirisasi industri yang diprediksi akan terus mendorong pertumbuhan investasi langsung dan penanaman modal tetap bruto (PMTB), antara lain melalui perluasan hilirisasi seperti gasifikasi batubara, pembangunan smelter bauksit, smelter tembaga, smelter nikel, pabrik pupuk, dan pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

The Indonesian Government has set a target of 5.2% for Indonesian economic growth for 2024. With the projected economic growth, electricity consumption in Indonesia is also predicted to increase. Industrial downstreaming is one factor affecting Indonesian economic growth which is predicted to continue promoting direct investment and gross fixed capital investment (PMTB), including through expanding downstream operations such as coal gasification, construction of bauxite smelters, copper smelters, fertilizer factories, and construction of electric vehicle battery cell factory, as well as the development of Nusantara Capital City (IKN).

Dengan adanya hal-hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia tersebut, sekaligus dapat meningkatkan konsumsi listrik di tahun 2024 dan seterusnya. Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa proyeksi kebutuhan listrik dalam negeri di tahun 2024 akan mencapai 3,6% hingga 4,2% lebih besar dari tahun 2023, yang mencapai 283,12 tWh. Selain itu, Pada tahun 2024 Pemerintah menetapkan target konsumsi listrik 1.408 kWh/kapita, dimana target tersebut naik dibandingkan realisasi konsumsi listrik pada tahun 2023 yaitu 1.285 kWh/kapita.

These factors help encouraging Indonesian economic growth as well as electricity consumption in 2024 and beyond. The Ministry of Energy and Mineral Resources revealed that domestic electricity demand in 2024 is projected to reach 3.6% to 4.2%, which is higher than in 2023, reaching 283.12 tWh. Similarly, the Government has set the electricity consumption target of 1,408 kWh/capita for 2024, which increases from the actual electricity consumption in 2023, i.e. 1,285 kWh/capita.

Hal ini merupakan peluang bagi sektor industri kelistrikan untuk dapat meningkatkan keandalan sarana dan prasarana di bidang kelistrikan yang sudah ada saat ini, maupun pengembangan pembangkit dan transmisi baru untuk memenuhi *demand* di masa mendatang.

This is an opportunity for the electricity industry to be able to improve the reliability of existing facilities and infrastructure in the electricity sector, as well as develop new generators and transmission to meet future demands.



Prospek Usaha PLN Indonesia Power

PLN Indonesia Power's Business Outlook

Dalam rangka mencapai target *Net Zero Emissions* (NZE) tahun 2060, yang dituangkan dalam *roadmap* transisi energi, pada tahun 2025 ditargetkan pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 25%. Hal ini merupakan prospek bagi PLN Indonesia Power untuk terus menjaga keandalan pembangkit EBT yang saat ini sudah dimiliki oleh Perusahaan.

In order to meet the 2060 Net Zero Emissions (NZE), which is outlined in the energy transition road map, Indonesia is targeted to reach 25% of the New and Renewable Energy (NRE) mix target by 2025. This is an opportunity for PLN Indonesia Power to continue securing the reliability of the currently existing NRE generators.

Seiring dengan *roadmap* transisi energi tersebut, potensi sumber daya EBT yang belum dimanfaatkan di Indonesia masih sangat besar. Hal ini merupakan peluang bagi PLN Indonesia Power, yang sudah memiliki pengalaman dalam O&M pembangkit EBT, untuk melakukan pengembangan pembangkit EBT. Seiring dengan hal tersebut, terdapat hal-hal yang mendukung percepatan realisasi pengembangan pembangkit EBT, antara lain biaya *Levelized Cost of Electricity* (LCOE) pembangkit EBT semakin kompetitif dibandingkan dengan pembangkit fosil, regulasi Perpres 112 Tahun 2022 yang mendukung percepatan pengembangan EBT, serta semakin banyaknya sumber pendanaan untuk pengembangan pembangkit EBT tersebut.

As indicated by the energy transition road map, Indonesia's untapped NRE resources is very large. Having a lot of years below its belt of performing O&M services for NRE plants, this is a chance for PLN Indonesia Power to finally develop NRE plants. In connection to that, there are several factors that help accelerate the development of NRE plants, including increasingly competitive Levelized Cost of Energy (LCOE) for NRE plants compared to fossil power plants, Presidential Decree No. 112 of 2022 that supports NRE development acceleration, and the increasing number of funding sources for NRE power plant development.

Namun demikian, karena biaya peralihan pembelian listrik oleh PLN dari pembangkit fosil ke EBT cukup tinggi, dan juga biaya *retirement* untuk pembangkit fosil cukup tinggi, maka prospek pembangkit batubara milik PLN Indonesia Power masih akan berlangsung cukup baik dalam beberapa waktu ke depan sebagai pembangkit yang dapat memenuhi listrik ekonomis, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah yang besar. Begitu juga dengan pembangkit gas milik PLN Indonesia Power, memiliki prospek yang baik sebagai pembangkit dengan energi bersih yang *fast respon* dalam menghadapi VRE (*Variable Renewable Energy*) untuk menjaga keamanan sistem kelistrikan di Indonesia.

Nevertheless, as switching the energy purchase from fossil generators to NRE generators is quite expensive for PLN, and retiring fossil generators is also expensive, PLN Indonesia Power's coal-fired power plants will remain to have a good standing at least for a few more years to come. They will continue providing economical and stable electricity in a large volume. Likewise, with their green energy products, PLN Indonesia Power's gas power plants have a good outlook to respond quickly to the challenges posed by Variable Renewable Energy (VRE) to secure Indonesia's electricity system.

PLN Indonesia Power sebagai Perusahaan yang memiliki SDM dengan kompetensi O&M di hampir seluruh jenis pembangkit listrik, memiliki prospek untuk mengembangkan bisnis *beyond* kWh, sekaligus untuk menangkap peluang BUMN GO GLOBAL yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, melalui kerjasama dengan s*trategic partnership.*

Having human resources with O&M competency in almost all types of power plant, PLN Indonesia Power has the chance to take advantage of strategic partnerships in order to develop beyond kWh business as well as to capture the opportunity arising from the SOEs Ministry's BUMN GO GLOBAL program.

Dasar Asumsi Kelangsungan Usaha

Basis for Business Continuity Assumptions

Kelangsungan usaha PLN Indonesia Power dipertimbangkan atas dasar faktor internal dan eksternal yang signifikan. Dari pemetaan PLN Indonesia Power berada pada posisi ***"Grow and Build"***. Hal tersebut dipengaruhi adanya tantangan baru antara lain pembentukan *Holding Subholding* di lingkungan PT PLN (Persero), dimana Perusahaan berubah menjadi *Subholding* Pembangkitan bernama PLN Indonesia Power, sehingga aset Perusahaan bertambah ±10 GW pasca peralihan aset dari PLN. Selain itu, ada pula pembentukan Transformasi 2.0 PLN dan target kinerja yang semakin menantang. Adanya agenda *sustainability*, antara lain penetapan target NZE dan juga peluang untuk semakin memperluas jaringan bisnis baik secara nasional maupun global, dengan memanfaatkan keunggulan Perusahaan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki Perusahaan.

The business continuity of PLN Indonesia Power is assessed based on significant internal and external factors. The mapping puts PLN Indonesia Power in the position of **"Grow and Build"**. This is contributed by a new challenge, namely the establishment of Holding-Subholding by PT PLN (Persero). In the new scheme, the Company has become a Generation Subholding under the name of PLN Indonesia Power, and received additional ±10 GW assets following the transfer of assets from PLN. Other contributing factors include PLN Transformation 2.0 program and increasingly challenging performance targets. There is also a sustainability agenda which establishes NZE target and presents the opportunity to expand business network nationally and globally, all of which are sought by harnessing the Company's advantages and overcoming challenges.



Governansi Perusahaan

Corporate Governance





Pendahuluan
Introduction

Perusahaan memandang praktik tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan usaha, menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, dan menumbuhkan integritas Perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan disusun sebagai acuan dalam pengelolaan bisnis PLN Indonesia Power berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi kaidah dan pedoman bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif, PLN Indonesia Power mengadopsi beberapa standar penerapan GCG antara lain Pedoman untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara BUMN, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Pedoman GCG berdasarkan Standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Tujuan implementasi GCG di PLN Indonesia Power adalah :
1. Tercapainya kesinambungan usaha dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dengan sah dan beretika;
2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian organ Perusahaan, yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Terciptanya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar;
5. Optimalisasi nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya;
6. Peningkatan daya saing Perusahaan secara nasional maupun internasional;
7. Mendorong manajemen melakukan mekanisme *check and balance* pada setiap fungsi dalam proses bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga diyakini bahwa penerapan GCG di Perusahaan sangatlah penting karena memberikan kerangka kerja yang memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan Perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan kepentingan yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas.

Selaras dengan hal tersebut, Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PLN Indonesia Power telah mengadopsi istilah "Governansi" sesuai dengan perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang diarahkan oleh Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Alasan PLN Indonesia Power menggunakan istilah Governansi adalah bahwa Perusahaan tidak hanya memusatkan perhatian pada pengurusan internal Perusahaan, melainkan juga memperhatikan pengurusan terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk hak-hak para pemegang saham dan pihak lainnya di luar lingkup pengelolaan Direksi.

The Company considers implementing Good Corporate Governance (GCG) as an effort to maintain business continuity, uphold trust of the stakeholders, and foster the Company's integrity. The Corporate Governance Guidelines is set as a reference for the management of PLN Indonesia Power business based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) which serve as the foundation and guidelines for the company managers in carrying out their business activities.

For the comprehensive implementation of GCG, PLN Indonesia Power adopts several standards of GCG implementation, including the Guidelines for State-Owned Enterprises (SOEs) issued by the Ministry of State-Owned Enterprises, namely the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 regarding the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, the General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy, and GCG Guidelines based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Standards

The objectives of GCG implementation in PLN Indonesia Power are:
1. To achieve business continuity and goals of the Company which are established legally and ethically;
2. To empower the function and independence of the Corporate organs, consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors;
3. To endorse decision-making by the Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors, which are based on high moral values and compliance with the laws and regulations;
4. To promote Corporate social awareness and responsibility toward the community and environmental sustainability;
5. To optimize the Company value for Shareholders while keeping other stakeholders in mind;
6. To increase competitive advantage of the Company nationally and internationally;
7. To encourage the management to maintain check and balance mechanism on each function in the business process based on GCG principles.

Aside from complying with regulations, the implementation of GCG within the company is essential as it provides a framework that ensures transparency, accountability, fairness, and sustainability in the management of the Company. Applying GCG principles allows the Company to ensure that decisions taken are based on ethical principles and sustainable interests for all stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the community.

In accordance with this, Corporate Governance in PLN Indonesia Power has adopted the term "Governance" aligned with the development of Corporate Governance as directed in the General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI) in 2021 issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG). PLN Indonesia Power uses the term Governance because the Company not only focuses on the internal management, but also pays attention to the management of wider extent of the stakeholders, including the rights of shareholders and others outside the scope of the management of the Board of Directors.



Komitmen Perusahaan Terhadap Penerapan Tata Kelola (Governansi) Unggul dan Berkelanjutan

Commitment to Implementing Sustainable and Good Corporate Governance

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, PLN Indonesia Power senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Prinsip tersebut diterapkan secara menyeluruh pada setiap jenjang organisasi dan kegiatan bisnis yang dijalankan

In the implementation of Corporate Governance, PLN Indonesia Power always acts based on GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. These principles are applied thoroughly to every level of organization and business activities.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Principles

Transparansi
Transparency

Perusahaan menjamin ketersediaan akses informasi yang relevan secara akurat dan tepat waktu kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The Company guarantees the availability of accurate, correct, and relevant information for all Shareholders and other stakeholders.

Akuntabilitas
Accountability

Perusahaan telah mengatur kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dari masing-masing organ Perusahaan sehingga seluruh kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat dipertanggung-jawabkan.

The Company has made clear the function, structure, system, and accountability of each Company organ, so that all business and operational activities within the Company are run effectively, efficiently, and accountably.

Responsibilitas
Responsibility

Perusahaan senantiasa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis dan operasionalnya sehari-hari guna terciptanya iklim bisnis yang sehat dan kondusif.

The Company always complies with the applicable laws and regulations in running daily business and operational activities in order to create a sound and favorable business environment.

Independensi
independency

Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan tugas, kewajiban serta wewenang dari masing-masing organ Perusahaan senantiasa berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company ensures that the execution of duties, responsibilities, and authorities of each Company organ is streamlined without intervention from any parties that do not comply with the applicable laws and regulations.

Kewajaran
Fairness

Perusahaan tidak melakukan tindakan diskriminatif, serta menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

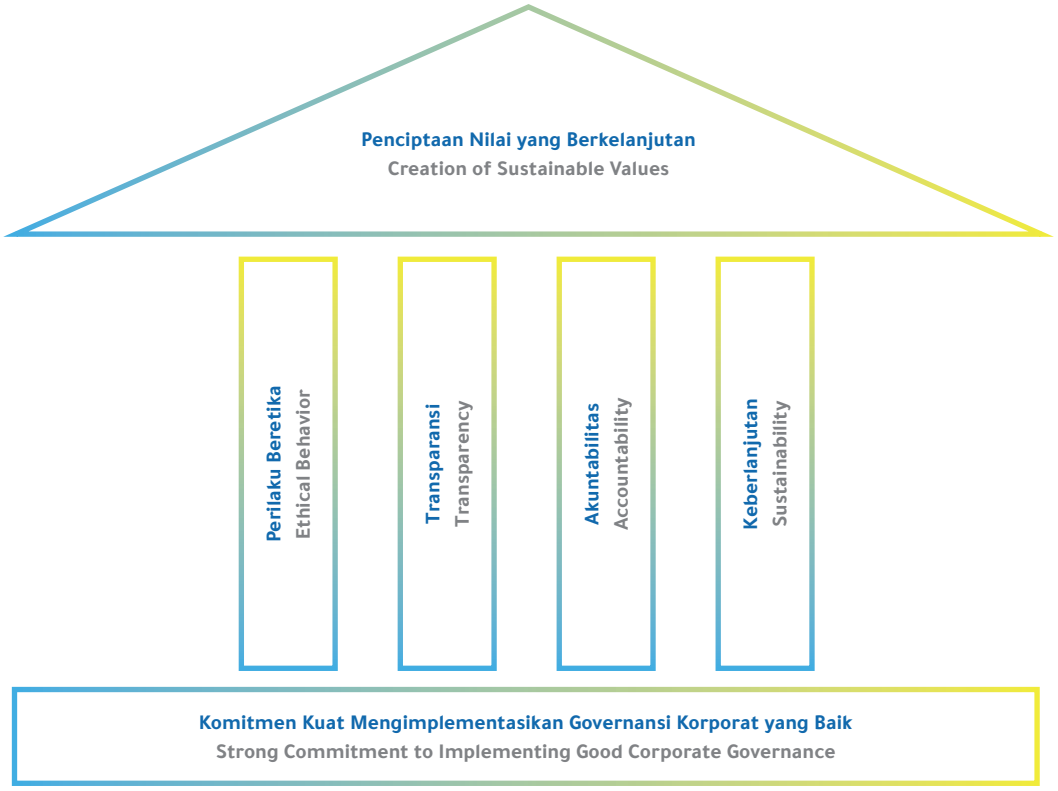
The Company does not discriminate and guarantees the protection of the rights of the Shareholders and stakeholders in compliance with the applicable laws and regulations.

Selain itu, penerapan GCG PLN Indonesia Power menerapkan prinsip-prinsip Governansi yang diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) tahun 2021 dengan empat pilar Governansi korporat atau dikenal dengan Pilar Governansi ETAK, yang meliputi Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan.

In addition, the implementation of GCG by PLN Indonesia Power settles on the principles of Governance stipulated in the General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI) in 2021. There are 4 (four) pillars of Corporate governance, also known as the ETAK Governance Pillars, which include Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability.



Empat Pilar Governansi Korporat Sebagai Landasan Prinsip-Prinsip PUG-KI 2021
Four Corporate Governance Pillars as the Foundation for PUG-KI 2021 Principles



PLN Indonesia Power menerapkan GCG melalui mekanisme yang terintegrasi dan berkesinambungan mulai dari perencanaan, penerapan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan. Seluruh organ Perusahaan memiliki tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. Berdasarkan mekanisme tersebut, RUPS memiliki kewenangan tertinggi, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi. Sedangkan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan yang sejalan dengan penerapan prinsip GCG. PLN Indonesia Power melakukan penilaian secara independen yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dan evaluasi secara internal guna mendapatkan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG.

PLN Indonesia Power implements GCG through integrated and continuous mechanisms ranging from planning, implementation, monitoring, evaluation, and reporting. All Company organs have their respective duties while implementing GCG collaboratively. This mechanism puts GMS as the highest authority, with the Board of Commissioners assuming the duty to supervise and direct the Board of Directors. The Board of Directors, on the other hand, is responsible for the Company management that is in line with the implementation of GCG principles. PLN Indonesia Power conducts independent assessments carried out by external parties and internal evaluations to get input in efforts to improve the quality of GCG implementation.

Landasan dan Kebijakan Penerapan Governansi Korporat
Foundation and Policy for Implementing Corporate Governance

Untuk memastikan implementasi GCG sesuai dengan kaidah umum yang berlaku, PLN Indonesia Power mengacu pada berbagai landasan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri, Surat Edaran dan Kebijakan Internal Perusahaan, yaitu diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

To ensure the implementation of GCG are in line with the applicable general rules, PLN Indonesia Power refers to the various legal bases set out in the laws and regulations, Ministerial Regulation, Circular Letter, and Company Internal Policy, namely:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;
2. Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption;



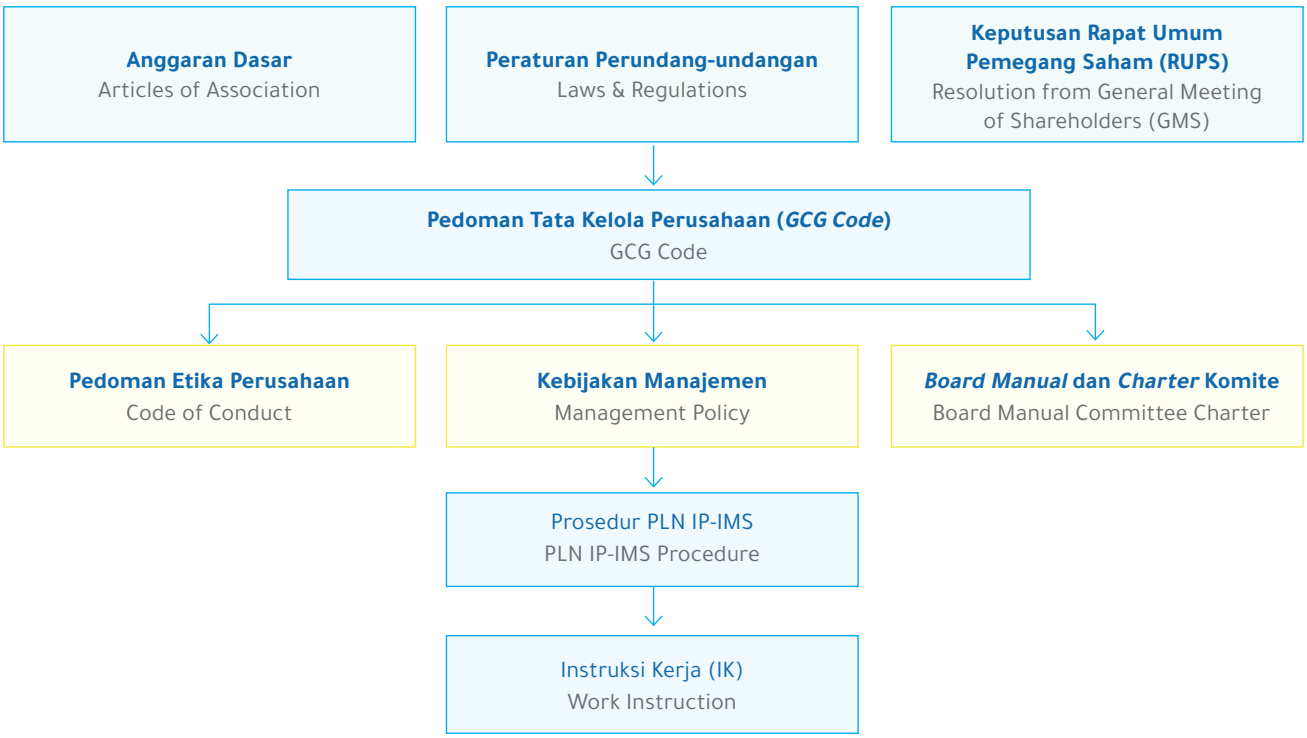
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER- 1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER- 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 Tentang tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-12/MBU/10/2021 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU. MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Surat Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 Tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BUMN;
10. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN *Capital Market Forum (*ACMF);
11. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2021;
12. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
13. Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

Perangkat kebijakan tata kelola PLN Indonesia Power terdiri dari lima level kebijakan sebagai berikut:

3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER- 1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER- 2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER- 3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
6. Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 on Core Values of the Human Resources of State-Owned Enterprises;
7. Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-12/MBU/10/2021 on Obligation to the Declaration of State Officials Wealth Report (LHKPN) within State-Owned Enterprises Environment;
8. Decree of Deputy of Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 on Technical Instructions of Composition and Qualification of the Risk Manager Organs within State-Owned Enterprises Environment;
9. Letter of the Ministry of SOEs No. S-17/S.MBU/02/2020 on ISO 37001 Certification of Anti-Bribery Management System (ABMS) in SOEs;
10. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
11. General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021;
12. Articles of Association and Decisions of General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company;
13. Company Regulations and Policies.

PLN Indonesia Power governance policy consists of 5 (five) policy levels as follows:

Hirarki Kebijakan Perusahaan
Company Policy Hierarchy



PLN Indonesia Power telah menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan, antara lain:

PLN Indonesia Power has developed and implemented various policies that are in line with the principles of corporate governance to improve the quality of governance implementation in a sustainable manner, including:

Kebijakan dan Pedoman Policy and Code	Keterangan Description	
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) GCG Code	Merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai Perusahaan, Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam mengelola Perusahaan. GCG Code pertama kali disusun pada tahun 2002, yang kemudian mengalami penyempurnaan beberapa kali, dan terakhir diperbarui pada tahun 2019 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 178.K/010/IP/2019 dan 006.SK/DEKOM-IP/2019 tanggal 26 Juni 2019.	Strategic directives from the Board of Directors and Board of Commissioners for the implementation of GCG principles, Company values, Vision, and Mission as the reference for the Company management. The GCG Code was first established in 2002, and later amended for several times, lastly in 2019 as set out in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Numbers 178.K/010/IP/2019 and 006.SK/DEKOMIP/2019 dated June 26, 2019.
Pedoman Etika Perusahaan Code of Conduct	Menjadi acuan Perusahaan dalam melakukan interaksi di antara manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan nilai dan budaya Perusahaan serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan telah menyusun Pedoman Etika Perusahaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor No. 0179.K/DIR/2023 dan No. 004.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai pemutakhiran dari Pedoman Etika Perusahaan tahun 2019	The reference for interactions between the Management, the employees, and the stakeholders according to the desired Company values and culture and the GCG principles. The Company has established the Code of Conduct as set out in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 0179.K/DIR/2023 and No. 004.SK/DK-PLNIP/2023 dated June 27, 2023 as the updated version of the Company's 2019 Code of Conduct.
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Board Manual	Seperangkat petunjuk tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 051.K/010/IP/2020 dan 005.SK/DEKOM-IP/2020 Tanggal 20 Maret 2020.	A set of procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors in implementing their respective duties and obligations. The Board Manual was ratified by the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Numbers 051.K/010/IP/2020 and 005.SK/DEKOM-IP/2020 dated March 20, 2020.
Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS) Whistleblowing System (WBS) Policy	Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dalam rangka mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Pedoman pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan mengacu pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PLN Indonesia Power No. 250.K/010/IP/2019 dan Nomor 20.SK/Dekom/IP/2019 tanggal 13 Desember 2019.	The Whistleblowing System (WBS) is adopted to prevent any fraud within the Company. Any violation shall be reported in order to promote a culture of honesty and transparency. The Whistleblowing System guidelines in the Company refer to the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power No. 250.K/010/IP/2019 and No. 20.SK/Dekom/IP/2019 dated December 13, 2019.
Pedoman Benturan Kepentingan Conflict of Interest Code	PLN Indonesia Power telah menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 018.K/010/IP/2020 tanggal 11 Februari 2020. Pedoman tersebut bertujuan agar potensi benturan kepentingan tersebut ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tetap menjunjung tinggi etika dan praktik bisnis yang sehat, mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.	PLN Indonesia Power has established the Conflict of Interest Code which was ratified by the Decree of the Board of Directors Number 018.K/010/IP/2020 dated February 11, 2020. The Code aims to address potential conflicts of interest in accordance with Good Corporate Governance principles thus maintaining ethical and sound business practices while preventing fraud and other misconducts.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control Guidelines	Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi dan gratifikasi, PLN Indonesia Power menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 0089.P/DIR/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai pemutakhiran dari Pedoman Pengendalian Gratifikasi tahun 2020.	To realize the Company's commitment to creating a clean company without corruption and gratuities, PLN Indonesia Power has established the Gratuity Control Guidelines which were ratified by the Decree of the Board of Directors No. 0089.P/DIR/2023 dated September 27, 2023 as the updated version of the 2020 Gratuity Control Guidelines.
Pedoman Penerapan Tata Kelola *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Governance, Risk, and Compliance (GRC) Guidelines	Pedoman dan acuan dalam penerapan Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan. Pedoman ini disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Peraturan Direksi Nomor 0073.P/DIR/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai pemutakhiran dari Pedoman GRC tahun 2019.	Guidelines for Governance, Risk, and Compliance that aim at improving the effectiveness, efficiency, growth, and sustainability of the Company. These guidelines were ratified by the Decree of the Board of Directors No. 0073.P/DIR/2023 dated June 27, 2023 as the updated version of the 2019 GRC Guidelines.
Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Officials Wealth Report (LHKPN) Submission Guidelines	Pemenuhan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel salah satunya diwujudkan melalui kewajiban wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 112.K/010/IP/2021 tanggal 24 November 2021.	The implementation of transparent and accountable corporate governance is among others fulfilled through the obligation to submit the State Officials Wealth Report (LHKPN). The policy on compliance with mandatory LHKPN submission was ratified by the Decree of the Board of Directors No. 112.K/010/IP/2021 dated November 24, 2021.

Kebijakan dan Pedoman Policy and Code	Keterangan Description	
Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Policy on ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation	Komitmen Perusahaan untuk menjalankan usaha dengan berintegritas, jujur, beretika dan tidak memberikan toleransi pada korupsi dan suap mengacu kepada Pemenuhan Klausul dalam SNI ISO 37001:2016. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power melakukan pembaharuan pada Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 0098.P/DIR/2023 dan No.007. SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Anti Penyuapan.	The Company's commitment to running a business with integrity, honesty, ethics, and zero tolerance to corruption and bribery refers to the fulfillment of the clauses in SNI ISO 37001:2016. The implementation of transparent and accountable corporate governance is among others fulfilled through the obligation to submit State Officials Wealth Report (LHKPN). The policy on compliance with mandatory LHKPN submission was ratified by the Board of Directors Decree No. 112.K/010/IP/2021 dated November 24, 2021.
Kebijakan Anti *Fraud* Fraud Control Policy	Sebagai tindak lanjut arahan PT PLN (Persero) dalam membangun sistem manajemen anti *fraud*, Perusahaan sebagai entitas anak PT PLN (Persero) turut mendukung program tersebut melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 0085.P/DIR/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai pemutakhiran dari Kebijakan Anti *Fraud* tahun 2020.	To follow up on the directives from PT PLN (Persero) in building an anti-fraud management system, the Company as a subsidiary of PT PLN (Persero) has established the Fraud Control Policy which was ratified by the policy set out in the Regulations of Board of Directors No. 0085.P/DIR/2023 dated September 20, 2023 as the updated version of the 2020 Anti-Fraud Policy.

Perusahaan melakukan evaluasi dan pemutakhiran atas perangkat kebijakan yang dimiliki secara berkala, agar terus memiliki relevansinya, baik terhadap perkembangan Perusahaan maupun perkembangan regulasi yang berlaku.

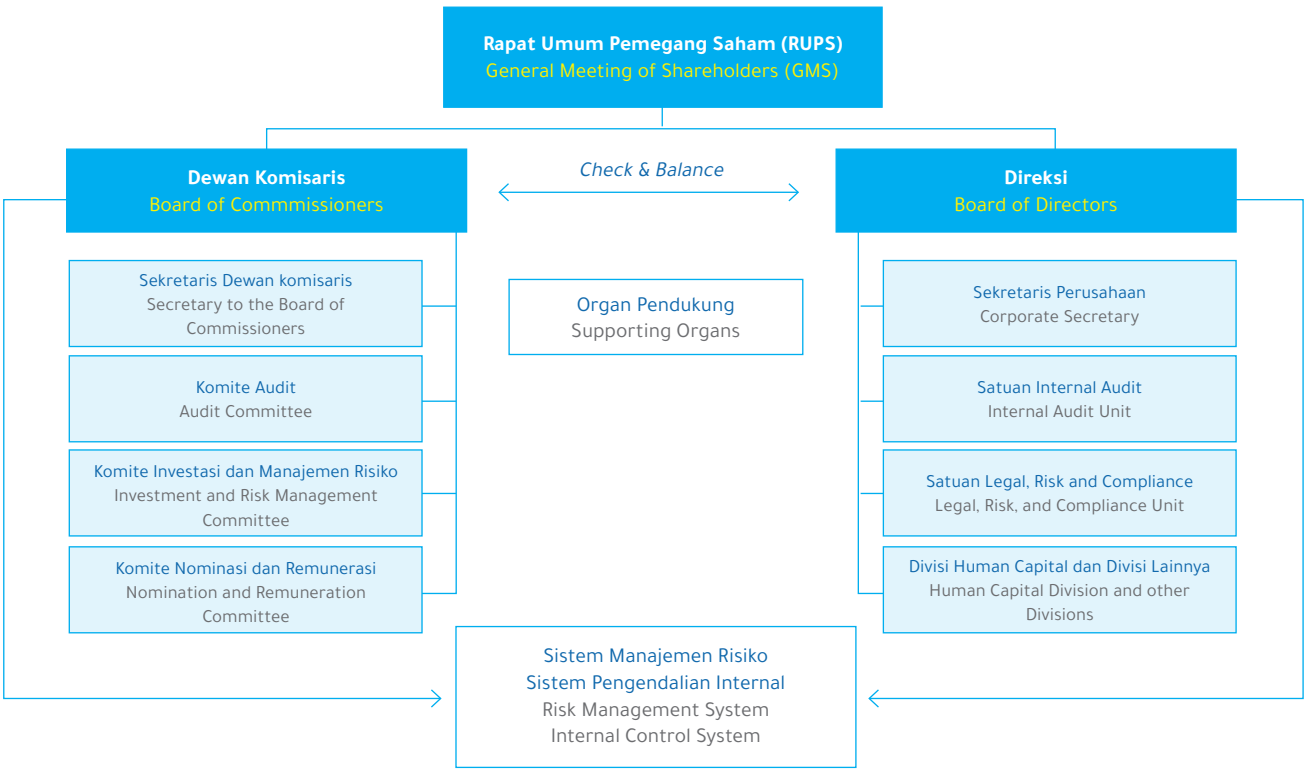
The Company periodically evaluates and updates its policy tools to maintain their relevance to the Company's development and currently applicable regulations.

Struktur Organ Governansi Korporat
Corporate Governance Organ Structure

Penerapan tata kelola Perusahaan telah didukung dengan struktur organ dengan pembagian wewenang yang jelas secara efektif. Struktur organ tata kelola Perusahaan PLN Indonesia Power terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam kegiatan operasional, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk organ pendukung untuk membantu kelancaran tugasnya.

The implementation of corporate governance is supported by organ structure with effective distribution of authority. PLN Indonesia Power's corporate governance organ structure consists of Main and Supporting Organs. The Main Organs include General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. In the Company's operations, the Board of Commissioners and the Board of Directors establish supporting organs to help streamlining their duties.

Struktur Organ Tata Kelola PLN Indonesia Power
PLN Indonesia Power Governance Organ Structure



Strategi Perusahaan Dalam Memperkuat Governansi Korporat yang Berkelanjutan

Company Strategy for Consolidating Sustainable Corporate Governance

PLN Indonesia Power senantiasa melakukan berbagai program kerja dalam mendukung implementasi tata kelola Perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas Perusahaan agar mampu secara konsisten menerapkan governansi Perusahaan yang berkelanjutan. Berikut beberapa program yang dilakukan selama tahun 2023:

PLN Indonesia Power continues to carry out various work programs in supporting the implementation of good corporate governance in every company activity in order to be able to consistently implement sustainable corporate governance. Here are some of the programs that were implemented in 2023:

Penyempurnaan Pedoman Governansi Korporat

Improvement of the Corporate Governance Guidelines

Sebagai alat pendukung dalam implementasi Governansi Korporat, kebijakan dan pedoman GCG yang dimiliki oleh Perusahaan secara berkala dilakukan peninjauan dan pemutakhiran, agar tetap relevan dengan perkembangan Perusahaan serta perkembangan regulasi yang berlaku. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power telah melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan pendukung tata kelola perusahaan, yaitu:

1. Pedoman Etika Perusahaan;
2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
3. Pedoman Penerapan Tata Kelola *Governance, Risk and Compliance* (GRC);
4. Kebijakan Umum Tata Kelola Anti Penyuapan;
5. Kebijakan Anti *Fraud*.

As a supporting tool in the implementation of Corporate Governance, the Company's GCG policies and guidelines are periodically reviewed and updated, so that they remain relevant with Company's development and currently applicable regulations. In 2023, PLN Indonesia Power has updated various policies supporting corporate governance, including:

1. Code of Conduct;
2. Gratuity Control Guidelines;
3. Governance, Risk, and Compliance (GRC) Guidelines;
4. General Policy of Anti-Bribery Governance;
5. Anti-Fraud Policy.

Penandatanganan Komitmen 4T, 4No's dan SMAP oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Seluruh Senior Leader tanggal 16 Februari 2023.

Signing of 4T Commitments, 4No's, and ABMS by the Board of Directors, Board of Commissioners, and all Senior Leaders dated February 16, 2023.

Penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen Bebas Benturan Kepentingan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Senior Leader di Perusahaan tahun 2023.

Signing of Integrity Pact and Commitment to be Free from Conflict of Interest by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Senior Leaders in the Company in 2023.

100% Pelaporan e-LHKPN secara tepat waktu oleh 883 Wajib Lapor yang terdiri dari Jenjang Penyelia Atas Struktural Tahap 1-2 dan Eksekutif sampai dengan Eksekutif Utama.

100% timely e-LHKPN Submission by 883 Mandatory Reporters consisting of Structural Senior Supervisor levels on Phase 1-2 and Executive up to the Chief Executive level.

Penandatangan Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan oleh seluruh pegawai mencapai 100%.

Signing of Integrity Pact and Compliance Commitment Statement to the Company's Code of Conduct by all employees reached 100% completion rate.

Sosialisasi Penerapan Governansi Korporat

Dissemination of Corporate Governance Implementation

PLN Indonesia Power terus mendorong pengetahuan dan kepedulian seluruh Insan Perusahaan serta para pemangku kepentingan termasuk Mitra Kerja terkait implementasi tata kelola perusahaan yang baik dengan melakukan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen 4T, 4No's dan SMAP di Forum *Senior Leader* PLN Indonesia Power tanggal 16 Februari 2023.
2. Sosialisasi pada *Vendor Gathering* tanggal 8 Desember 2023.
3. Sosialisasi Himbauan Gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Idul Adha.
4. Himbauan Pengisian LHKPN melalui *email* maupun sosialisasi Video LHKPN di IPKU tanggal 24 Januari sampai 31 Maret 2023.

PLN Indonesia Power strives to encourage the recognition and awareness of all Company personnel and stakeholders, including Partners, of the implementation of good Corporate governance by conducting disseminations in face-to-face settings and through printed and electronic media. These are carried out through the following activities:

1. Dissemination and Signing of 4T Commitments, 4No's, and ABMS at PLN Indonesia Power Senior Leaders Forum dated February 16, 2023.
2. Dissemination at the Vendor Gathering on December 8, 2023.
3. Dissemination of the Prohibition against Gratuities ahead of Eid al-Fitr, Christmas, and Eid al-Adha.
4. Reminder on LHKPN Completion by email and dissemination of LHKPN via Video at IPKU from January 24 to March 31, 2023.



5. Penandatanganan Pakta Integritas Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan Pasangan di bulan Januari sampai dengan Maret 2023.
6. Melakukan identifikasi *Fraud Risk Profile* Perusahaan di bulan Maret 2023.
7. Sosialisasi Penilaian Pengurangan Kepatuhan KKU Unit tanggal 17 Maret 2023.
8. Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Berbasis ISO 19600 *Certified Compliance Professional* atau setara di bulan Mei sampai dengan Juni 2023.
9. Pemetaan serta Pengumpulan Potensi Gratifikasi melalui Aplikasi COS dan/atau ProGCG yang dilaksanakan oleh Seluruh Pegawai Tanggal 10 setiap Bulan.
10. Melakukan Identifikasi/ *Coaching* Dokumen Kepatuhan *Conflict of Interest* pada setiap GRC yang dilakukan setiap adanya Usulan Keputusan GRC.
11. Melakukan Identifikasi dan/atau *Coaching* Dokumen Kepatuhan *Fraud Risk Assessment, Conflict of Interest, Compliance to Regulation, Corruption Impact Assessment* pada setiap Usulan Keputusan yang dilakukan setiap adanya Usulan Keputusan GRC.

5. Signing of Integrity Pact by the Board of Directors, Board of Commissioners, Employees and their Spouses from January through March 2023.
6. Identifying the Company's Fraud Risk Profile in March 2023.
7. Dissemination of Unit KKU Compliance Reduction Assessment on March 17, 2023.
8. Certification of Compliance Competence Based on ISO 19600 Certified Compliance Professional or its equivalent from May through June 2023.
9. Mapping and Collecting Potential Gratuities through the COS and/or ProGCG application by All Employees on the 10th of every month.
10. Identifying/Coaching of Conflict of Interest Compliance Documents on any GRC conducted following every GRC Decision Proposal.
11. Identifying and/or Coaching of the Documents of Fraud Risk Assessment Compliance, Conflict of Interest, Compliance to Regulation, Corruption Impact Assessment on any Decision Proposal made following every GRC Decision Proposal.

Program Penerapan Anti Korupsi dan Anti Suap
Anti-Corruption and Anti-Bribery Implementation Program

PLN Indonesia Power selalu berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang bersih dari praktik korupsi dengan melakukan berbagai program diantaranya melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengelolaan pengendalian gratifikasi pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Negara) dan Pelatihan Anti Korupsi.

PLN Indonesia Power has always been committed to improving corporate governance which is free from corruption by conducting various programs, including the implementation of Anti-Bribery Management system (ABMS), management of gratuity control, submission of LHKPN (State Officials Wealth Report), and Anti-Corruption Training.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Anti-Bribery Management System (ABMS)

PLN Indonesia Power menjadi perusahaan pertama di bidang ketenagalistrikan yang memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 sejak tahun 2020, dan pada tahun 2022, PLN Indonesia Power berhasil mempertahankan Sertifikasi SMAP Berbasis ISO 37001:2016 yang diperoleh pada tahun 2020. Prestasi ini mencerminkan komitmen yang kokoh dalam memperkuat penerapan kebijakan anti-korupsi di seluruh lingkungan Perusahaan.

Since 2020, PLN Indonesia Power became the first company in the industry of electrical power generation to obtain Certificate of ISO 37001:2016 since 2020, and in 2022, PLN Indonesia Power managed to maintain Certification of ABMS based on ISO 37001:2016 obtained in 2020. This achievement reflects a strong commitment in strengthening the implementation of anti-corruption policies throughout the Company.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
Gratuity Control Management

Pengelolaan pengendalian gratifikasi di Perusahaan dilakukan sejalan dengan komitmen dan upaya Perusahaan untuk menjunjung tinggi integritas dan kejujuran serta mendukung Perusahaan mempertahankan budaya usaha yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Secara rutin, PLN Indonesia Power melakukan sosialisasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Manajemen, Pegawai, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, serta Mitra Kerja Perusahaan.

Management of gratuity control in the Company is carried out in line with the Company's commitment and efforts to uphold integrity and honesty and support the Company in maintaining a business culture free from Corruption, Collusion, and Nepotism. On a regular basis, PLN Indonesia Power conducts dissemination on control policy to the Management, Employees, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as Corporate Partners.

Pelaporan LHKPN
State Officials Wealth Report (LHKPN) Submission

PLN Indonesia Power juga secara berkala melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Satuan Legal, Risk and Compliance melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada para wajib lapor melalui pendistribusian dokumen dan sosialisasi e-lhkpn *online*. Pada tahun 2023, seluruh pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN (100%) atau sebanyak 883 orang telah melaporkan harta kekayaannya untuk tahun 2022 yang disampaikan kepada KPK secara tepat waktu.

PLN Indonesia Power also periodically submit the State Official Wealth Report (LHKPN). The Legal, Risk, and Compliance Unit disseminated and provided technical guidance on LHKPN to mandatory reporters by distributing documents and the introducing the online portal, e-lhkpn. In 2023, all officials who were required to report LHKPN (100%) or amounted to 883 people have reported their wealth for 2022 which was delivered to KPK in a timely manner.

Pelatihan Anti Korupsi
Anti-Corruption Training

Dalam rangka melawan praktik korupsi yang berpotensi terjadi di setiap Proses Bisnis Perusahaan, Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power juga menyelenggarakan sejumlah program pelatihan terkait anti korupsi yang diberikan kepada 889 orang pegawai di seluruh jenjang jabatan dan unit bisnis Perusahaan mengikuti pelatihan anti korupsi. Jumlah ini mewakili 19% dari total pegawai Perusahaan yang berjumlah 4.581 orang.

In order to eliminate any potential corruption in every Business Process of the Company, in 2023, PLN Indonesia Power also organized a number of anti-corruption training programs for 889 employees at all levels of office and business units of the Company. This number represents 19% of the total company employees of 4,581 people.

Penjelasan lebih lanjut terkait penerapan SMAP, program pengendalian, pelaporan LHKPN dan Pelatihan anti korupsi dijelaskan pada masing-masing bab dalam Laporan Tahunan ini.

Further details on the implementation of ABMS, control programs, LHKPN submission, and anti-corruption training are described in each chapter of this annual report.

Survei Pemahaman Integritas
Integrity Understanding Survey

PLN Indonesia Power melaksanakan survei pemahaman Integritas yang dilakukan setiap semester atau 2 (dua) kali dalam satu tahun. Survei Pemahaman integritas semester 1 dan 2 Tahun 2023 telah dilakukan dengan partisipasi 100% pegawai mengisi survei. Pelaksanaan survei pemahaman Integritas Semester 1 Tahun 2023 telah dilaksanakan pada 5 - 16 Juni 2023 dan survei pemahaman integritas semester 2 Tahun 2023 telah dilaksanakan pada 4 - 11 Desember 2023. Rata-rata pencapaian skor pemahaman pegawai atas survei pemahaman integritas di tahun 2023 mencapai 93,28%. Skor rata-rata tahunan survei pemahaman integritas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

PLN Indonesia Power conducts Integrity Understanding Survey every semester or 2 (two) times a year. Integrity Understanding Survey in both semesters in 2023 had 100% participation rate. The 2023 Integrity Understanding Survey of Semester 1 was carried out on 5 - 16 June 2023 and Semester 2 was carried out on 4 - 11 December 2023. The average score for employee understanding on the 2023 Integrity Understanding Survey reached 93.28%. The average annual score of this Survey has improved from the previous year.

Sinergi Perusahaan Bersama Unit dan Anak Perusahaan dalam Penerapan Governansi Korporat
Synergy between Company and its Units and Subsidiaries in the Implementation of Corporate Governance

PLN Indonesia Power melakukan kegiatan penyelarasan terhadap kebijakan, pedoman dan perangkat GCG sebagai wujud sinergi dengan Anak Perusahaan untuk memperkuat penerapan Governansi di lingkup Perusahaan. PLN Indonesia Power pada tahun 2023, telah melaksanakan inisiasi berupa proses pendampingan Perluasan Lingkup Sertifikasi SMAP ke 9 (Sembilan) unit pembangkit PLN Indonesia Power antara lain: UBP Priok, UBP Suralaya, UBP Mrica, UBP Semarang, UBP Grati, UBP Bali, UBP Saguling, UBP Kamojang, dan Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH). Adapun tahapan yang dilakukan antara lain *Training* dan Pendalaman kepada para PIC, Initial *review*, Pendampingan Penyesuaian Dokumen, Asistensi Identifikasi Risiko, Asistensi Audit Internal, Asistensi Tinjauan FKAP, Tinjauan Manajemen dan Dewan Pengarah serta Pendampingan Penyiapan Dokumen Sertifikasi.

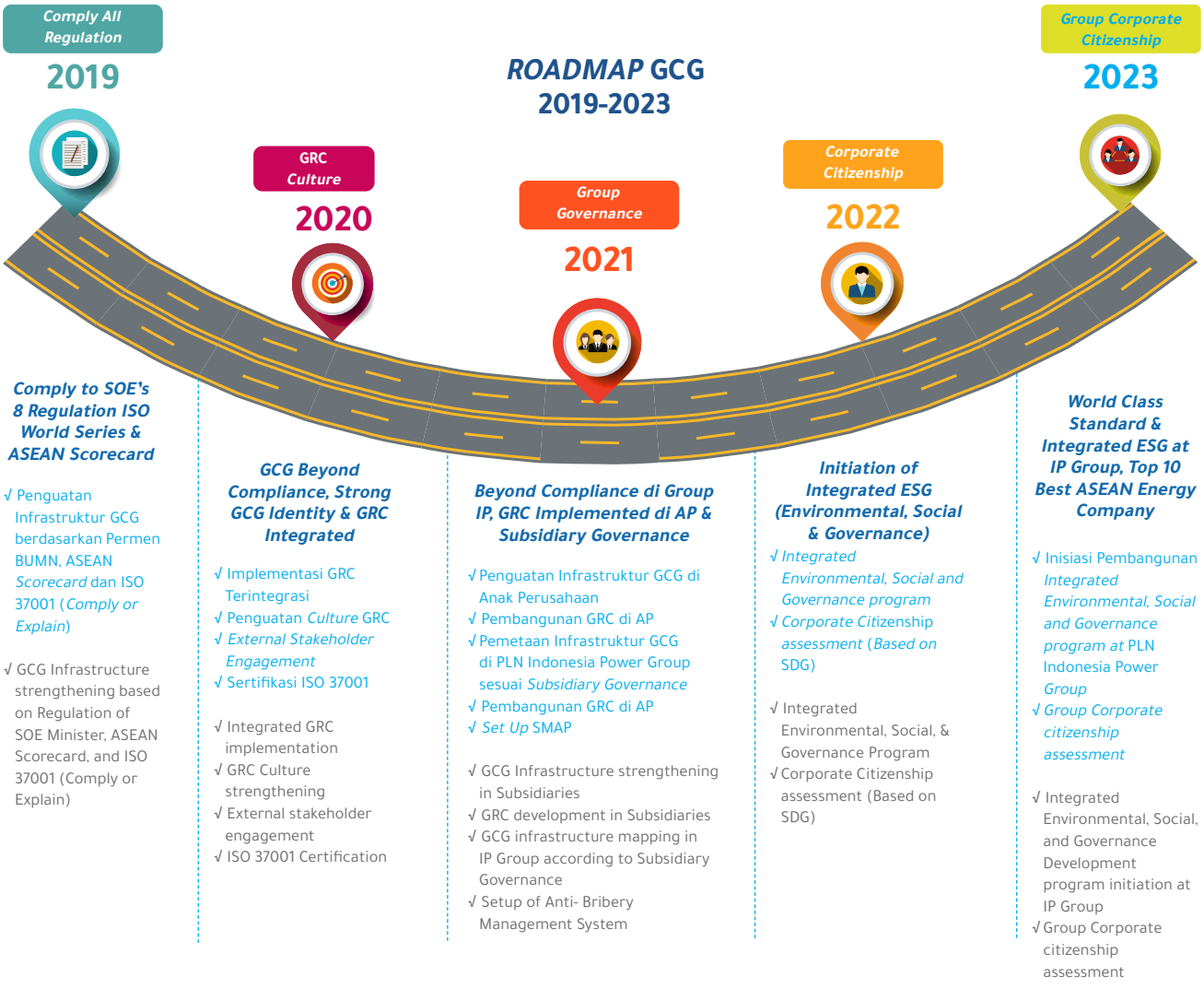
PLN Indonesia Power aligns the GCG policies, guidelines, and tools in a effort to create a synergy with its Subsidiaries in order to strengthen the implementation of Governance within the company. In 2023, PLN Indonesia Power initiated an assistance program to Expand the Scope of ABMS Certification to 9 (nine) Units of PLN Indonesia Power plant, namely: UBP Priok, UBP Suralaya, UBP Mrica, UBP Semarang, UBP Grati, UBP Bali, UBP Saguling, UBP Kamojang, and the Maintenance Business Unit (UBH). The stages of this program included Training and Further Learning for PICs, Initial review, Assistance on Document Adjustment, Assistance on Risk Identification, Assistance on Internal Audit, Assistance on FKAP Review, Management and Steering Board Review, and Assistance on Certification Document Preparation.

Pencapaian *Roadmap* Penerapan GCG
Achievement of GCG Implementation Roadmap

PLN Indonesia Power menyusun *grand strategy* implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam bentuk *Roadmap* GCG 2019-2023 yang diselaraskan dengan perencanaan strategis Perusahaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan. *Roadmap* GCG 2019-2023 disusun dalam rangka mendorong keberlanjutan dan meningkatkan kualitas penerapan GCG secara efektif. Tahapan *Roadmap* GCG ini menjadi panduan bagi penerapan GCG di Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan menuju pencapaian PLN Indonesia Power menjadi *Group Corporate Citizenship* di tahun 2023. *Roadmap* tata kelola PLN Indonesia Power 2019 - 2023 adalah sebagai berikut

PLN Indonesia Power laid out a grand strategy of implementing good corporate governance into the 2019-2023 GCG Roadmap aligned with the company's strategic planning in supporting the achievement of the Company's vision and mission. The 2019-2023 GCG Roadmap is established in order to promote sustainability and improve the quality of effective implementation of GCG. The GCG Roadmap helps guiding consistent and sustainable GCG implementation in the Company, towards Group Corporate Citizenship by 2023. 2019-2023 Governance Roadmap of PLN Indonesia Power is as follows:





Sepanjang tahun 2023, PLN Indonesia Power telah berhasil merealisasikan *roadmap* tata kelola yang telah disusun. Ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan penguatan infrastruktur GCG di Perusahaan maupun di Anak Perusahaan, dengan tujuan mencapai standar "*World Class*" dan integrasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) terbaik sebagai salah satu dari 10 Perusahaan Energi Terbaik di ASEAN. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan termasuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Perusahaan.
2. Menguatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian risiko secara sistematis.
3. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM dalam penerapan prinsip-prinsip GCG.
4. Mendorong keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan strategis.
5. Meningkatkan pelaporan ESG secara terintegrasi dan terukur.

Selaras dengan *re-branding* Perusahaan dari Indonesia Power menjadi PLN Indonesia Power, serta perubahan status dari Anak Perusahaan menjadi *sub-holding* perusahaan PT PLN (Persero) pada tahun 2023, PLN Indonesia Power saat ini sedang menyusun *roadmap* baru dalam rangka mendukung transformasi lebih lanjut.

Throughout 2023, PLN Indonesia Power has successfully realized the set out governance roadmap. This is accomplished through a number of GCG infrastructure-strengthening activities in the Company and its subsidiaries, which aim to achieve "World Class" standards and the best ESG (Environmental, Social, and Governance) integration as one of the Top 10 Energy Companies in ASEAN. Some of them include:

1. Increasing transparency and accountability in financial management of the Company.
2. Strengthening systematic risk control and control mechanisms.
3. Improving HR capacity and skills in implementing GCG principles.
4. Encouraging stakeholders' engagement in strategic decision-making processes.
5. Improving ESG reporting in an integrated and scalable manner.

In line with the re-branding of the Company from Indonesia Power to PLN Indonesia Power, as well as the change of status from a Subsidiary to a sub-holding company of PT PLN (Persero) in 2023, PLN Indonesia Power is currently drafting a new roadmap in order to support further transformation.

Penilaian dan Evaluasi Penerapan Governansi Korporat
Assessment and Evaluation of Corporate Governance Implementation

Penerapan Governansi di lingkungan PLN Indonesia Power terus ditingkatkan diantaranya dengan melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG baik oleh pihak internal maupun eksternal dengan menggunakan beberapa parameter yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Pada tahun 2023, penilaian dan evaluasi penerapan Governansi di PLN Indonesia Power dilakukan melalui 4 (empat) parameter utama, yaitu:

1. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan SK-16/S-MBU/2012;
2. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
3. Evaluasi Tata Kelola Berdasarkan Standar Otoritas Jasa Keuangan;
4. Evaluasi Penerapan GCG Berdasarkan PUG-KI.

Penjelasan lebih lanjut terkait Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG dijelaskan di masing-masing bab pada bab Governansi Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The implementation of governance in PLN Indonesia Power environment continues to improve by conducting periodic assessment and evaluation of the implementation of GCG principles both by internal and external parties using some applicable parameters, both nationally and internationally. In 2023, the assessment and evaluation of the Governance implementation in PLN Indonesia Power were conducted through 4 (four) main parameters, namely:

1. Assessment of Corporate Governance Implementation According to SK-16/S-MBU/2012
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
3. Evaluation of Governance According to Financial Services Authority Standards
4. Evaluation of GCG Implementation According to PUG-KI.

Further explanations of the Assessment and Evaluation of GCG Implementation are described in each of the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola PLN Indonesia Power yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

It is the highest organ in the PLN Indonesia Power Corporate Governance structure as a tool for the shareholders to execute their rights and obligations. The GMS has its own authority, separate from the ones given to the Board of Directors and Board of Commissioners, within the limit as stipulated by the laws and/or Articles of Association.

Hak Pemegang Saham
Shareholders' Rights

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
4. Diperlakukan setara yang didukung aturan dan prosedur Perusahaan, atau hak untuk menerima pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.

1. To be present and to cast a vote in GMS, specifically for the Company's shareholders under the provision that 1 (one) share will give the owner the right to cast one vote.
2. To obtain material information related to the Company in timely manner, measured, and periodically.
3. To receive a share of Company's profit designated for each shareholder/capital owner in a form dividend, and the remaining liquid assets worth to the number of share/capital that they owned.
4. To be treated equal according to the Company's regulations and procedure, or have the right to receive information related to such regulations and procedures and information on capital structure and regulations that enable certain shareholder to have influence or control that is disproportionate with their share.

Jenis-Jenis Pelaksanaan RUPS
Types of GMS Arrangements

Sesuai dengan penyelenggaraannya, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan terkait Pengesahan RKAP dan Persetujuan Laporan Tahunan, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang waktu penyelenggaraannya bisa terjadi di luar waktu RUPST. Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

General Meeting of Shareholders are divided based on its arrangements which includes Annual GMS that discusses the Work Plan and Budget and Approval on Annual Report; and Extraordinary GMS that can be held on a separate date from the Annual GMS. The GMS arrangement shall refer to the provisions of the laws and the Articles of Association that regulates Planning and Arrangement for GMS.

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 22, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan tata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan.

In accordance with Article 22 of Articles of Association, summons for GMS should be done within a maximum of 14 days from the date of the request to hold the GMS is received. Summons for GMS is given through registered letter that contains the date, time, venue, and etiquette of the meeting, along with the notification that the discussion material for the incoming GMS is available at the Company's office.

Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS Melalui Surat Tercatat (Undangan)
Summon for GMS via Registered Letter (Invitation)

Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Pelaksanaan RUPS, tanpa memperhitungkan tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan.

At least 14 (fourteen) days prior the GMS date, without consideration to the date of GMS and date of summon.

Pelaksanaan RUPS
GMS Implementation

Sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

According to schedule.

Hasil RUPS
GMS Result

Hasil RUPS dituangkan dalam Risalah RUPS dan Akta Notaris.

GMS result will be recorded in a Minute of GMS and Notarial Deed.

Tata Tertib RUPS Tahun Buku 2023
Rules of the Annual GMS 2023

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
2. Rapat dipimpin oleh Kuasa Pemegang Saham Mayoritas
3. Hanya Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat
4. Undangan atas permintaan Pimpinan Rapat dapat memberikan sumbangan pikiran namun masukan hanya untuk bahan pertimbangan Pemegang Saham dan masukan tersebut tidak dimuat dalam Risalah Rapat
5. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat
6. Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan kepada Undangan Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan kepada Perusahaan
7. Pertanyaan-pertanyaan hanya yang berhubungan dengan Agenda Rapat
8. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat diajukan secara lisan
9. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat berdasarkan persetujuan Pemegang Saham.

1. The meeting will be held in Indonesian
2. The meeting is chaired by the Power of the Majority Shareholders
3. Only Shareholders obtain the right to express their opinions and cast their votes in the Meeting
4. The Chairman may invite attendees to share their inputs, however, these are for Shareholders consideration only and will not be recorded in the Minutes of Meeting
5. Shareholders may raise questions or express opinions
6. The Chairman may give opportunity to the invitee to raise questions and/or to state their opinions and/or suggestions for the Company
7. Questions must be related to Meeting Agenda
8. Every question and/or opinions must be raised verbally during the meeting
9. Matters that are not regulated under this Rules will be stipulated later by the Chairman based on the Shareholders' approval.

Mekanisme Pemungutan Suara
Voting Mechanism

Selaras dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 24 ayat 1 kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan, maka semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan suara terbanyak biasa, dan apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan ditolak, kecuali apabila mengenai diri orang, maka ditentukan kemudian.

In accordance with Article 24 paragraph 1 of the Articles of Association that states unless stipulated under this Articles of Association, every decision in the General Meeting of Shareholders will be made based on the majority ordinary vote, and if the votes agreeing and disagreeing are of the same number, the suggestion will be rejected, unless it is related to a person, which will be decided later.



Penyelenggaraan RUPS Tahun 2023
GMS Implementation in 2023

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan tanggal 13 Juni 2023 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan RKAP tanggal 30 Januari 2023 dan dengan penjelasan sebagai berikut:

Throughout 2023, PLN Indonesia Power held 2 (two) Annual GMS. The first one was Annual GMS on Approval of Annual Report that was held on June 13, 2023; and the second one was Annual GMS on Work Plan and Budget Approval that was held on January 30, 2023, with the following discussions:

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022
GMS on Approval and Ratification of Annual Report 2022

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Summons	30 Mei 2023 May 30, 2023
Tanggal & Waktu RUPS Date & Time of the GMS	13 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB June 13, 2023, at 08:00 WIB
Lokasi Location	Jakarta, Indonesia.
Peserta RUPS GMS Participants	Perwakilan Pemegang Saham Mayoritas, Perwakilan Pemegang Saham Minoritas, Dewan Komisaris, Direksi PT PLN Indonesia Power Representative of Major Shareholders, Representative of Minor Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors of PT PLN Indonesia Power
Pimpinan RUPST Chairperson of Annual GMS	Wiluyo Kusdwiharto selaku Komisaris Utama Wiluyo Kusdwiharto as President Commissioner
Kuorum Meeting Quorum	Dihadiri dan diwakili sebanyak 357.165.633.598 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan) lembar saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perusahaan dengan hak suara yang sah. Attended and represented by 357,165,633,598 (Three Hundred Fifty-Seven Billion One Hundred Sixty-Five Million Six Hundred Thirty-Three Thousand and Five Hundred Ninety-Eight) shares, which is the entire number of shares in the Company with valid voting rights.
Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance	Seluruh Dewan Komisaris All Board of Commissioners
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	Seluruh Direksi All Board of Directors
Pihak Independen Independent Party	Shahreza Annaz, SH. M. KN. sebagai Notaris Shahreza Annaz, SH. M. KN. as the Notary

Agenda, Keputusan dan Tindak Lanjut atau Realisasi atas Pelaksanaan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022
Agenda, Resolution and Follow Up or Realization of the Annual GMS on Annual Report for FY 2022.

Agenda dan Keputusan RUPS Laporan Tahunan tanggal 13 Juni 2023 Agenda and Resolution of GMS on Annual Report on June 13, 2023		Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow Up
Agenda Pertama Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022	**First Agenda** Approval and Ratification of Annual Report 2022, including Report of Board of Commissioners Supervisory Implementation 2022 and the granting of full release to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Management and Supervision performed throughout FY 2022	Laporan Tahunan yang terdiri dari atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan selama tahun 2022 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung. Shareholders ratified the Annual Report that comprised of Financial Report, Performance Evaluation Report, and Compliance Report 2022 during GMS.
Keputusan 1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama tahun buku 2022 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan serta menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 2. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dalam laporannya.	**Resolutions** 1. The GMS approved and accepted the Annual Report regarding the Company's performance during fiscal year 2022 that comprise of Financial Report, Performance Evaluation Report and Compliance Report, and approved and accepted the Board of Commissioners Supervisory Duty Report throughout FY 2021. 2. The GMS ratified the Financial Report of Fiscal Year 2022, which was audited by Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with "qualified" opinion as contained in the report.	



Agenda dan Keputusan RUPS Laporan Tahunan tanggal 13 Juni 2023 Agenda and Resolution of GMS on Annual Report on June 13, 2023		Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow Up
3. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan sesuai tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.	3. The GMS granted full discharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision according to the responsibilities and actions in their respective fields run throughout FY 2022, provided that the actions did not contradict the applicable laws and regulations and contained in the Financial Statements audited by Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.	
Agenda Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022. **Keputusan** RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022.	**Second Agenda** Determination of the Utilization of Net Profit from FY 2022 **Resolutions** The GMS authorized Major Shareholder to determine the utilization of net profit from FY 2022.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 melalui surat PLN No. 42946/MNJ.01.02/F01000000/2023-R tanggal 2 Agustus 2023. PT PLN (Persero) as the Major Shareholder determined the utilization of net profit from FY 2022 in the Letter of PLN No. 42946/MNJ.01.02/F01000000/2023-R dated August 02, 2023.
Agenda Ketiga Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2022. **Keputusan** RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan Tahun Buku 2022.	**Third Agenda** Determination of Tantiem for FY 2022 and Remuneration for FY 2023 for the Board of Directors and the Board of Commissioners and Employee Bonus for FY 2022. **Resolutions** The GMS authorized Major Shareholder to determine the tantiem for FY 2022 and remuneration for FY 2023 for the Board of Directors and the Board of Commissioners and employee bonus for FY 2022.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan besaran tantiem tahun 2022 dan penghasilan 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan melalui Surat PLN No. 42946/MNJ.01.02/F01000000/2023-R tanggal 2 Agustus 2023 dan menetapkan besaran bonus pegawai tahun 2022 melalui Surat PLN No. 34147/SDM.06.01/F01080000/2023-R tanggal 21 Juni 2023. PT PLN (Persero) as the Major Shareholder stipulated the amount of tantiem for 2022 and salary for FY 2023 for the Board Directors and the Board of Commissioners in the Letter of PLN No. 42946/MNJ.01.02/F01000000/2023-R on August 2, 2023 and determine employee bonus for FY 2022 in the Letter of PLN No. 34147/SDM.06.01/F01080000/2023-R dated June 21, 2023.
Agenda Keempat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perusahaan Tahun Buku 2023. **Keputusan** RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk tahun buku 2023.	**Fourth Agenda** Determination of Public Accounting Firm to Audit the Company's Reports/Statements for FY 2023 **Resolutions** The GMS authorized Major Shareholder to determine the appointment of Public Accounting Firm as the auditor of the Company's Financial Statements, Performance Assessment Report, and Compliance Report for FY 2023.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 melalui Surat PLN No. 39023/KEU.02.04/F01070400/2023 tanggal 13 Juli 2023. PT PLN (Persero) as the Major Shareholder has appointed the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to audit PT PLN (Persero) Financial Report for FY 2023 in the PLN Letter No. 39023/KEU.02.04/F01070400/2023 on July 13, 2023

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023

GMS on Ratification of Work Plan and Budget (WP&B) 2023

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Summons	3 Januari 2023 January 03, 2023
Tanggal & Waktu RUPS Date & Time of the GMS	30 Januari 2023, Pukul 08.00 WIB January 30, 2023, at 08:00 WIB
Lokasi Location	Jakarta, Indonesia.
Peserta RUPS Chairperson of GMS	Perwakilan Pemegang Saham Mayoritas, Perwakilan Pemegang Saham Minoritas, Dewan Komisaris, Direksi PT PLN Indonesia Power Representative of Major Shareholders, Representative of Minor Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors of PT PLN Indonesia Power
Pimpinan RUPS Chairperson of GMS	Wiluyo Kusdwiharto selaku Komisaris Utama Wiluyo Kusdwiharto as President Commissioner
Kuorum Meeting Quorum	Dihadiri dan diwakili sebanyak 357.165.633.598 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan) lembar saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perusahaan dengan hak suara yang sah. Attended and represented by 357,165,633,598 (Three Hundred Fifty-Seven Billion One Hundred Sixty-Five Million Six Hundred Thirty-Three Thousand and Five Hundred Ninety-Eight) shares, which is the entire number of shares in the Company with valid voting rights.

Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance	Seluruh Dewan Komisaris All Board of Commissioners
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	Seluruh Direksi All Board of Directors
Pihak Independen Independent Party	Muhammad Hanafi, SH. sebagai Notaris Muhammad Hanafi, SH. as the Notary
Mekanisme Perhitungan Suara Vote Counting Mechanism	Perhitungan suara dalam setiap mata acara rapat dilakukan oleh Notaris Vote counting for each meeting agenda is conducted by the Notary

Adapun untuk agenda dan keputusan atas pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The following are the agenda and resolutions of GMS on Work Plan & Budget for 2023:

Agenda dan Keputusan RUPS RKAP tanggal 30 Januari 2023 Agenda and Resolutions of GMS on WP&B on January 30, 2023		Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow Up
Agenda Pertama Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.	**First Agenda** Approval and Ratification of Work Plan and Budget (WP&B) 2023	RKAP Tahun 2023 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung The Work Plan and Budget 2023 was ratified during the GMS
Keputusan RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023	**Resolutions** The GMS approved and ratified the Work Plan Budget (WP&B) 2023	
Agenda Kedua Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicator* Tahun 2023	**Second Agenda** Approval and Ratification of the Management Contract, Key Performance Indicators 2023	Kontrak Manajemen / *Key Performance Indicator* Tahun 2023 telah disahkan pada saat RUPS. Management Contract/Key Performance Indicator 2023 was ratified during GMS.
Keputusan RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen / *Key Performance Indicator* Tahun 2023	**Resolutions** The GMS approved and ratified the Management Contract/Key Performance Indicator 2023	

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2023

Extraordinary GMS Implementation in 2023

Sepanjang tahun 2023, Pemegang Saham telah menerbitkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sebanyak 15 (lima belas) Keputusan, meliputi:

Throughout 2023, the Shareholders had issued 15 (fifteen) Circular Shareholders Decree for PLN Indonesia Power, which include:

Tanggal RUPS Date GMS	Perihal Subject
10 Januari 2023 January 10, 2023	Persetujuan Konsolidasi Pengadaan Asuransi Perusahaan dengan PLN Periode 2023-2024 Approval for Company's Insurance Procurement Consolidation with PLN for 2023-2034 period
21 Maret 2023 March 21, 2023	Pengalokasian/ Pembagian Daftar Pengembangan Proyek Pembangkit pada RUPTL 2021-2030 kepada Perusahaan Allocation/Division of Power Plant Project Development List on PLN Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2023 to the Company
29 Maret 2023 March 29, 2023	Persetujuan Penugasan Pekerjaan Pembangunan *Upscale* Bahan Bakar Jumputan Padat (BBPJ) *Plant* Bagendung Cilegon Approval for the Development Work Assignment for the Upscale of Refused Derived Fuel (RDF) at Bagendung Plant, Cilegon
6 April 2023 April 6, 2023	Perubahan Nama *Subholding* PT PLN Indonesia Power menjadi PT PLN Indonesia Power Subholding Name Change from PT PLN Indonesia Power to PT PLN Indonesia Power
4 Mei 2023 May 4, 2023	Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi Umur Ekonomis di atas Lima Tahun Disposing Non-operating Fixed Assets with Economic Life more than Five Years
10 Mei 2023 May 10, 2023	Persetujuan Penugasan Sebagai *Mandatory Partner* dalam Proyek IPP PLTA Kalimantan Selatan Tengah Timur Utara (Kuota) Tersebar 200 MW pada Sistem Interkoneksi Kalimantan Approval for Assignment as Mandatory Partner in Distributed PLTA Kalimantan Selatan Tengah Timur Utara (Quota) 200 MW IPP Project at Kalimantan Inter-Connection System.
19 Mei 2023 May 19, 2023	Persetujuan Penugasan Sebagai *Mandatory Partner* dalam Proyek IPP PLTB Timor (Kuota) Tersebar 2x11 MW (22MW) Approval for Assignment as Mandatory Partner in Distributed PLTB Timor (Quota) 2x11 MW (22MW) IPP Project
19 Mei 2023 May 19, 2023	Persetujuan Penugasan Sebagai *Mandatory Partner* dalam Proyek IPP PLTA Hidro Sumatera (Kuota) Tersebar 90 MW pada Sistem Sumatera Approval for Assignment as Mandatory Partner in Distributed Sumatera HPP (Quota) 90 MW IPP Project in the Sumatra System
24 Juli 2023 July 24, 2023	Penugasan ke Perusahaan Sebagai *Mandatory Partner* (Mitra Wajib) dengan Kepemilikan Saham Perusahaan Sebesar 35% dalam Perusahaan Patungan dengan Pemenang Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTB Sulbagsel (Kuota) Tersebar 60 MW dengan *Battery Energy Storage System* (BESS) 13 MW/ 13 MWh Assignment to the Company as Mandatory Partner with Company's Shareholding of 35% in a Joint Venture with the Winner of Tender for Power Purchase of Distributed PLTB Sulbagsel (Quota) 60 MW IPP using Battery Energy Storage System (BESS) 13 MW/13 MWh



Tanggal RUPS Date GMS	Perihal Subject
4 Agustus 2023 August 4, 2023	Persetujuan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Potensi Panas Bumi Lainnya melalui Investment Company yang Dibentuk oleh PT PLN Indonesia Power Approval for Geothermal and Other Potential Geothermal Energy Power Plant Development through Company Investment made by PT PLN Indonesia Power
29 Agustus 2023 August 29, 2023	Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati *Power Generation* and O&M Services Unit (POMU) Milik PT PLN Indonesia Power Disposal of Non-Operating Fixed Assets (NOFA) at CCPP Grati Power Generation and O&M Services Unit (POMU) owned by PT PLN Indonesia Power
19 September 2023 September 19, 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Dismissal and Appointment of the Board of Directors Members
7 November 2023 November 7, 2023	Persetujuan Penugasan *Mandatory Partner* Dalam Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (Termasuk Penyimpanan Baterai) Isolated Tersebar Tahap I *Hybrid* dengan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PLN dalam Rangka Dieselisasi PLTD untuk Klaster II Sulawesi Maluku Nusa Tenggara Approval for Assignment as Mandatory Partner in Power Purchase for Distributed Isolated Solar Power Plant (Including Battery Storage) Project Stage 1 that was implemented in hybrid with the Operating of Diesel Power Plant (DPP) in order to equip diesel to DPP engines for Cluster II Sulawesi Maluku Nusa Tenggara
17 November 2023 November 17, 2023	Persetujuan Penugasan dengan Opsi Keikutsertaan Perusahaan Sebagai *Partner* dalam Proyek IPP PLTA Hidro Sumatera (Kuota) Tersebar 250 MW pada Sistem Sumatera Approval for Assignment with the Option for Company's Participation as a Partner in Distributed HPP Hidro Sumatera (Quota) 250 MW IPP Project in the Sumatra System
11 Desember 2023 November 11, 2023	Persetujuan Pengusulan Wakil Perusahaan pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan Perusahaan Approval for the Proposal of Company's Representative for Subsidiary and/or Joint Venture

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham RUPS Tahun 2023

Follow Up on the Shareholders' Directives During GMS 2023

Pelaksanaan RUPS tahun 2023 menghasilkan beberapa arahan dari Pemegang Saham dan telah direalisasikan oleh Perusahaan, sebagaimana tabel berikut:

The GMS 2023 implementation resulted in several directives from the Shareholders and have been realized by the Company as presented in the following table.

Arahan RUPS 2023 dan Tindak Lanjutnya
GMS 2023 Directives and Their Follow-ups

RUPS GMS	Jumlah Arahan Pemegang Saham Number Shareholders' Directives	Status		
		Realisasi Hasil RUPS Realization of GMS Results	Persentase Progres Progress Percentage	Alasan Keputusan RUPS yang Belum Direalisasikan Reason for Unrealized GMS Resolutions
RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report 2022	29	29	100%	-
RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 GMS on Ratification of Work Plan and Budget (WP&B) 2023	43	43	100%	-

Keputusan RUPS Sebelumnya dan Tindak Lanjutnya

Previous GMS Resolutions and Their Follow-ups

PLN Indonesia Power terus memantau tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS secara berkelanjutan dan melaporkan progres tindak lanjutnya kepada Pemegang Saham dalam bentuk penyajian Laporan Manajemen setiap triwulan.

PLN Indonesia Power continues to monitor every follow-up and status of the realization of GMS resolutions and directives, and report the progress to the Shareholders in quarterly Management Report.

Seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS tahun buku 2021 yang diselenggarakan tahun 2022 telah dilaksanakan. Berikut Keputusan RUPS tahun Tahun 2022 dan tindak lanjutnya:

All recommendations stated in the Resolution of GMS 2021 that was held in 2022 was fully implemented. Following are GMS Resolution FY 2022 and their follow-ups:



Keputusan RUPS Tahun 2022 GMS Resolutions 2022	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow Up
RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama tahun buku 2021 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan serta menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 The GMS approved and accepted the Annual Report on company's existence and operations throughout FY 2021 that comprised of Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report, and approved and accepted the Board of Commissioners Supervisory Duty Report throughout FY 2021.	Laporan Tahunan yang terdiri dari atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan selama tahun 2021 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung. The Annual Report which consisted of the Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report throughout 2021 was ratified by the Shareholders during GMS.
RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021. The GMS authorized Major Shareholder to determine the utilization of net profit from FY 2021.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 melalui surat PLN No.52263/ MNJ.01.02/D01000000/2022-R tanggal 8 September 2022. PT PLN (Persero) as the Major Shareholder determined the utilization of net profit from FY 2022 in the Letter of PLN No.52263/ MNJ.01.02/ D01000000/2022-R on September 8, 2022.52263/ MNJ.01.02/D01000000/2022-R tanggal 8 September 2022.
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan Tahun Buku 2021. The GMS authorized Major Shareholder to determine the tantiem for FY 2021 and remuneration for FY 2022 for the Board of Directors and the Board of Commissioners and employee bonus for FY 2021.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan besaran gaji, honorarium, tunjangan fasilitas dan insentif bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2022 melalui Surat PLN No. 52263/ MNJ.01.02/D01000000/2022-R tanggal 8 September 2022 dan menetapkan besaran bonus pegawai tahun 2021 melalui Surat PLN No. 41153/ SDM.06.01/ D01050000/2022-R tanggal 21 Juli 2022. PT PLN (Persero) as the Major Shareholder has stipulated the amount of salary, honorarium, facility allowance, and incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2022 through the Letter of PLN No. 52263/ MNJ.01.02/D01000000/2022-R on September 8, 2022, and stipulated the amount of employee bonus for 2021 through the Letter of PLN No. 41153/ SDM.06.01/D01050000/2022-R on July 21, 2022.
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk tahun buku 2022. The GMS authorized Major Shareholder to determine the Appointment of Public Accounting Firm as the Auditor of the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for FY 2022.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 melalui Surat PLN No. 46375/ KEU.02.04/D01060400/2022 tanggal 12 Agustus 2022. PT PLN (Persero) as the Major Shareholder has appointed the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to audit the Financial Statements of FY 2022 through the Letter of PLN No. 46375/ KEU.02.04/ D01060400/ 2022 on August 12, 2022.

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ pengelola Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung Jawab Kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip GCG.

The Board of Directors is an organ authorized and responsible for the management of the Company. In performing their duties, the Board of Directors answers to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the GMS represents the accountability of the Company's management, in line with the provisions of Article of Association and GCG principles.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
The Appointment and Dismissal of The Board of Directors

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, serta Salinan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023 dan Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS.

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed through the GMS with reference to the Company's Article of Association, as well as the Copy of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of SOEs dated March 20, 2023 and the Guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Directors stipulated by Shareholders/GMS.

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: (a) penjaringan atau nominasi calon Anggota Direksi; (b) penilaian bagi calon Anggota Direksi.

Appointment and dismissal guidelines, including those concerning: (a) scouting or nomination of prospective Members of the Board of Directors; (b) assessment for prospective members of the Board of Directors.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Direksi dengan mencakup semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Perusahaan (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan). Proses penilaian calon Direksi didukung dengan Berita Acara Penilaian.

Shareholders/GMS carry out an assessment of the prospective Board of Directors taking into account all the assessment criteria set out in the provisions of law of the Company (assessment of the requirements of integrity, dedication, understanding management problems, and having adequate knowledge of corporate business). The process of assessment of the Board of Directors candidates is supported by Minutes of Assessment.

Pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
1. Meninggal dunia,
2. Masa jabatannya berakhir,
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS, dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

The dismissal of the Board of Directors is carried out by the GMS. The position of the Board of Directors members shall end when:
1. They pass away,
2. Their term of office is over,
3. They are dismissed by GMS, and/or
4. They no longer meet the requirements as a member of the Board of Directors according to the Article of Association and other laws and regulations.

Rencana pemberhentian Anggota Direksi diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan dan tertulis oleh Pemegang Saham.

The dismissal plan of a director is notified to the relevant members verbally and in writing by the Shareholders.

Komposisi Direksi
Board of Directors Composition

Pada tahun 2023, terdapat pergantian Direksi yaitu dengan adanya pengangkatan Sdr. M. Hanafi Nur Rifai menggantikan Sdr. Rachmad Handoko sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara berdasarkan RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 19 September 2023, sehingga komposisi Direksi PLN Indonesia Power per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

In 2023, there was a change of Board of Directors, with the appointment of M. Hanafi Nur Rifai who replaced Rachmad Handoko as the Director of Coal Power Plant Operations based on Circular Shareholder GMS dated September 19, 2023, so the composition of the Board of Directors of PLN Indonesia Power as per December 31, 2023 is as follows:

Komposisi Anggota Direksi per 31 Desember 2023
Members Composition as per December 31, 2023

Nama Nama	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022	2022-2026
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 19 September 2023 Circular Shareholder GMS dated September 19, 2023	2023-2027
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022	2022-2026
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022	2022-2026
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 25 November 2021 Circular Shareholder GMS dated November 25, 2021	2021-2025
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular Shareholder GMS dated September 21, 2022	2022-2026

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi serta rencana strategis Perusahaan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

The composition and number of members of the Board of Directors is determined with regard to the vision and mission and strategic plan of the Company, so that decision-making can be done effectively, precisely, and quickly, while upholding independence and the Company's sole best interest.

Masa Jabatan Direksi
Tenure of the Board of Directors

Sejalan dengan *Board Manual* Perusahaan, masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

In line with the Company's Board Manual, the term of office of the Board of Directors is set at 4 (four) years and can be re-appointed for 1 (one) period of term.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Guidelines of the Works, Duties, and Responsibilities of the Board of Directors

Pedoman Kerja Direksi PLN Indonesia Power mengacu pada *Board Manual* yang disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Maret 2020. Dalam *Board Manual* tersebut, menjelaskan secara terperinci aspek-aspek pedoman kerja Direksi, antara lain terkait:

1. Pengertian dan Persyaratan Direksi;
2. Komposisi Direksi;
3. Pengaturan Rangkap Jabatan;
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi;
5. Masa Jabatan Direksi ;
6. Program Pengenalan dan Pelatihan;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;
8. Tugas Direksi;
9. Wewenang Direksi;
10. Kewajiban Direksi;
11. Tanggung Jawab Direksi;
12. Rapat Direksi;
13. Pelaporan Pertanggungjawaban Direksi;
14. Remunerasi Direksi;
15. Organ Pendukung Direksi.

The Board of Directors of PLN Indonesia Power shall ground on the Board Manual which was passed through a Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners on March 20, 2020. The Board Manual provides detailed account on aspects of the Board of Directors' work guidelines, including those related to:

1. Definition and Requirements of the Board of Directors;
2. Board of Directors Composition;
3. Provision on Concurrent Positions;
4. The Appointment and Dismissal of The Board of Directors;
5. The Board of Directors Term of Office;
6. Orientation and Training Programs;
7. Work Plan and Budget (WP&B) of the Board of Directors;
8. Duties of the Board of Directors;
9. Authorities of the Board of Directors;
10. Liabilities of the Board of Directors;
11. Responsibilities of the Board of Directors;
12. Board of Directors Meetings;
13. The Board of Directors Accountability Reporting;
14. Remuneration for the Board of Directors;
15. Board of Directors Supporting Organs;

Tugas dan tanggung Jawab Direksi
Duties and responsibilities of the Board of Directors

Sejalan dengan *Board Manual*, Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi meliputi:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Menyusun RKAP dan RJPP.
3. Memberikan arahan terkait kebijakan operasional dan Standar Operasional baku (SOP), manajemen risiko, sistem pengendalian intern, informasi Perusahaan kepada *stakeholders*, pemenuhan target kinerja, teknologi informasi, mutu produk dan pelayanan, tanggung jawab sosial perusahaan, sumber daya manusia, Anak Perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau Perusahaan Patungan, pengendalian operasional dan keuangan, pengurusan Perusahaan, hubungan dengan *stakeholder*, potensi benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan Komunikasi, pengadaan barang dan jasa.
4. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

In line with the Board Manual, the duties and responsibilities of the Board of Directors include:

1. In performing their duties, the Board of Directors holds full responsibility for the Company management for the interest and goals of the Company, while representing the Company inside and outside the courtroom. The management shall be performed by each member of the Board of Directors in good faith and with full responsibility.
2. Develops WP&B and Company Long-Term Plan.
3. Provides direction related to operational policies and official Standard of Operations (SOP), risk management, internal control system, company information to stakeholders, compliance with performance targets, information technology, product and service quality, corporate social responsibility, human resources, subsidiaries (subsidiary governance) and/or joint ventures, operational and financial controls, corporate management, stakeholders relations, potential conflicts of interest, transparency of Information and Communication, procurement of goods and services.
4. Every member of the Board of Directors holds personal responsibility for the Company's losses in the event where such a member is mistakenly or negligently implementing his/her duties. In the case where the Board of Directors consists of two or more members, the responsibility shall be jointly taken by all Board of Directors members.



5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
   c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak mengurangi hak Anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perusahaan;
7. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana;
8. Dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi Anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
9. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perusahaan apabila dapat membuktikan:
   a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan
10. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi Direksi dari Perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Sedangkan wewenang yang dimiliki Direksi, meliputi:
1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditujukan untuk itu;
3. Mengatur kebijakan kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan;
6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

5. The Board of Directors members shall hold no accountability for the Company's losses, if they are able to prove that:
   a. The loss is not resulted from their mistake or negligence.
   b. They have performed the supervisory duty in good faith and cautiously for the interest and according to the intents and purposes of the Company.
   c. They do not have personal interest both directly and indirectly for the loss-inflicting managerial actions.
   d. They have taken the measures to prevent the occurrence or the continuation of the loss.
6. The provision of point 4 does not waive the rights of the other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to file a lawsuit on behalf of the Company;
7. Provision on the Board of Directors' responsibility for its mistake and negligence specified in the law does not waive the provisions set in the penal code;
8. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Directors and the Company's wealth is insufficient to settle the entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Directors shall jointly take responsibility for the outstanding liabilities arising from such bankruptcy. The liabilities shall also apply to the mistaken or negligent members of the Board of Directors who have served their position within the period of five (5) years prior to the declaration of bankruptcy;
9. The Board of Directors' Members shall hold no accountability for the bankruptcy of the Company if it they are able to prove that:
   a. The bankruptcy is not resulted from their mistake or negligence.
   b. They have performed the supervisory duty in good faith, with caution and full responsibility for the interest and according to the intents and purposes of the Company.
   c. They do not have personal interest both directly and indirectly for the bankruptcy-inflicting managerial actions.
   d. They have taken the measures to prevent such a bankruptcy.
10. The provision also applies to the Board of Directors of the Company which is declared for bankruptcy based on a third party lawsuit.

The Board of Directors has the following authorities:
1. Determining the Company managerial policy;
2. Arranging the delegation of Board of Directors authority to represent the Company inside and outside the courtroom to one or several members of the Board of Directors specially appointed for such purpose;
3. Arranging the policy for personnel, including the determination of salary, retirement, or old-age security and other incomes for the employees according to applicable laws and regulations;
4. Appointing and dismissing employees according to applicable laws and regulations;
5. Appointing a Corporate Secretary;
6. Performing all actions and other activities pertaining to Company management, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the courtroom concerning all matters and events as set in the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions;

7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan. Adapun yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
8. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
9. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

7. A member of the Board of Directors has no authority to represent the Company in the event where the Company and the relevant Board of Directors member are against each other in the courtroom, or the relevant member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company. The persons reserving the right to represent the Company are other members of the Board of Directors who have no conflict of interest with the Company; the Board of Commissioners in the case where all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; other parties appointed by the GMS in case all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
8. The Board of Directors do not have the right to apply for bankruptcy for the Company to the Commercial Court prior to obtaining approval from GMS, without prejudice to the provisions set in the bankruptcy law and postponement of payment obligations;
9. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Directors and the Company's wealth is insufficient to settle the entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Directors shall jointly take responsibility for the outstanding liabilities arising from such bankruptcy.

Ruang Lingkup Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of Each Director

Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jabatan masing-masing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi melalui Keputusan Direksi Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power tanggal 9 Desember 2022.

Description of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is determined based on their respective position as determined in their appointment by the GMS. Furthermore, the Board of Directors determines the description of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors through the Decree of the Board of Directors Number 139.K/010/IP/2022 dated December 9, 2022.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi
Delegation of Duties and Responsibilities of Each Director

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Description of Duties	
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	Memimpin, membina dan mengelola Perusahaan sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan termasuk memastikan pengelolaan pengawasan internal Perusahaan, manajemen rantai pasok, manajemen proyek Perusahaan, pengembangan teknologi dan strategi manajemen aset, pengelolaan hukum, risiko dan kepatuhan, serta selalu meningkatkan kinerja Perusahaan dalam mencapai visi, misi serta menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan Perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP.	Leading, guiding, and managing the Company according to its Purpose and Objectives including ensuring the management of internal control, supply chain management, corporate project management, technology development and asset management strategies, legal management, risk and compliance, and continuously improving the Company's performance in achieving its vision and mission, as well as mastering, maintaining, and managing corporate wealth in accordance with GCG principles and in compliance with ABMS.
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	Memastikan pengelolaan pembangkit yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan pada seluruh Unit Pembangkit di bawah kewenangan Direktorat Operasi Pembangkit Batubara yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya perencanaan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan keandalan pembangkit, perencanaan dan pengendalian energi primer, serta operasi sistem dan pengendalian kontrak jasa O&M yang dapat menunjang kinerja operasional Perusahaan yang sesuai dengan strategi Perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal.	Ensuring plant management which includes planning and control of operations and maintenance in all Power Generation Unit under the authority of the relevant Directorate of Coal Power Plants Operations, including planning and evaluation of plant operations and maintenance reliability, planning and control of primary energy, as well as the operation of the system and control of O&M service contracts in support of the Company's operational performance in accordance with its strategy within the scope of GCG principles and in compliance with ABMS and coordinating those operations with internal and external parties according to the main functions.

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Description of Duties	
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	Memastikan pengelolaan pembangkit termasuk pembangkit energi baru terbarukan yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan pada seluruh Unit Pembangkit dan Maintenance Services Unit di bawah kewenangan Direktorat Operasi Pembangkit Gas yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya perencanaan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan keandalan pembangkit, perencanaan dan pengendalian energi primer, serta operasi sistem dan pengendalian kontrak jasa O&M dan Jasa Pemeliharaan yang dapat menunjang kinerja operasional Perusahaan yang sesuai dengan strategi Perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal.	Ensuring plant management, including new and renewable energy power plant, which covers planning and control of operations and maintenance in all Power Generation Unit and Maintenance Services Unit under the authority of the relevant Directorate of Gas Power Plants Operations, including planning and evaluation of plant operations and maintenance reliability, planning and control of primary energy, as well as the operation of the system and control of O&M service contracts and Maintenance Service in support of the Company's operational performance in accordance with its strategy within the scope of GCG principles and in compliance with ABMS and coordinating those operations with internal and external parties in accordance with the main functions.
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Memastikan berjalannya penetapan strategi korporat serta keberlanjutannya, pelaksanaan manajemen kinerja perusahaan, Anak Perusahaan, perusahaan afiliasi dan asosiasi, serta pengembangan bisnis baik bisnis ketenagalistrikan termasuk energi baru terbarukan maupun turunannya yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP.	Ensuring the establishment of corporate strategy and its sustainability, the implementation of the performance management of the company, its subsidiaries, affiliated and associate companies, and the business development of both the electrical power generation business, including new and renewable energy and its derivatives in accordance with GCG principles and in compliance with ABMS.
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	Memastikan berjalannya pelayanan dan pengelolaan anggaran, keuangan, pendanaan, akuntansi dan fungsi teknologi informasi sesuai RJPP, RKAP, kaidah dan strategi korporat, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan Asosiasi yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP.	Ensuring the effective implementation of services and management of budget, finance, funding, accounting, and information technology functions in accordance with the Company Long-Term Plan, WP&B, corporate rules and strategies, Subsidiaries, Affiliated and Associate Companies in accordance with GCG principles and in compliance with ABMS.
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Memastikan kegiatan pengembangan human capital secara kapasitas dan kapabilitas, yang meliputi sistem SDM dan organisasi, pengembangan talenta, budaya Perusahaan, remunerasi, hubungan industrial, *performance management*, tenaga alih daya *non core*, sistem informasi SDM, manajemen pembelajaran, K3 dan Lingkungan serta memastikan kegiatan pengelolaan pelayanan umum (General Affairs) yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP.	Ensuring the development activities of human capital extend to its full capacity and capability, which include systems of HR and organization, talent development, Corporate culture, remuneration, industrial relations, performance management, non-core outsourcing, HR information systems, learning management, SHE (Safety, Health, and Environment) and ensuring that General Affairs activities are carried out in accordance with GCG principles and in compliance with ABMS.

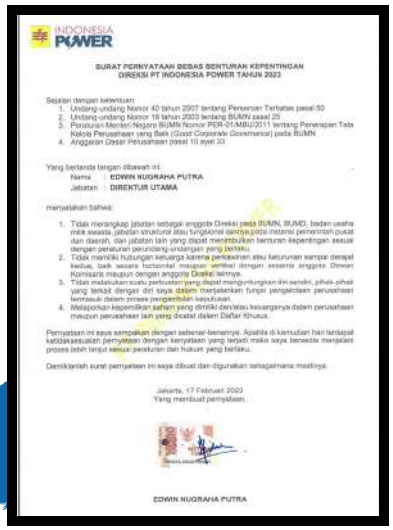
Independensi Direksi
Independence of the Board of Directors

Perusahaan menilai faktor independensi Direksi merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga agar seluruh anggota Direksi senantiasa bertindak maksimal demi kepentingan Perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan ketentuan bahwa selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan intervensi atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan. Setiap anggota Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Selain itu, setiap anggota Direksi juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2023 telah menyatakan independensinya dalam surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

For the Company, independence of the Board of Directors is of paramount matter that must be maintained allowing all members of the Board of Directors to work optimally for the Company's interest. Thus, the Company has stipulated a provision that any other parties except the Board of Directors are prohibited from intervening or interfering in the management of the Company. Each member of the Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflict of interest and free from any pressure from any party. In addition, each member of the Board of Directors is also prohibited from carrying out activities that can interfere with their independence in managing the Company.

All members of the Board of Directors serving in 2023 had declared their independence in a statement of free from conflict of interest signed prior to their appointment and renewed at the beginning of each year.



Direktur Utama
President Director



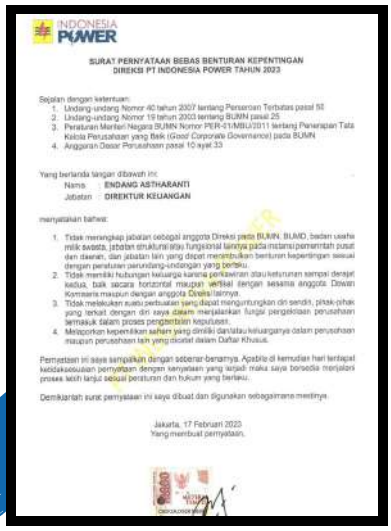
Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Coal Power Plant Operations



Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations



Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce



Direktur Keuangan
Director of Finance



Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Benturan Kepentingan Direksi
Board of Directors' Conflicts of Interest

Selama tahun 2023, seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perusahaan. Direksi memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

During 2023, all members of the Board of Directors did not have any conflicts of interest or potential conflicts of interest against the Company. The Board of Directors commits to avoid potential conflicts of interest or to always put themselves in no situation of any potential conflict of interest.

Kebijakan benturan kepentingan Direksi PLN Indonesia Power diatur dalam *Board Manual*. Mekanisme pengawasan atas penerapan kebijakan benturan kepentingan oleh Direksi dilakukan dengan:

1. Menyusun surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.

The conflict of interest policy applicable to the Board of Directors of PLN Indonesia Power is regulated in the Board Manual. The supervisory mechanism for the implementation of conflict of interest policy by the Board of Directors is carried out by:

1. Drafting a statement of free from conflict of interest at the beginning of the appointment and renewed at every beginning of the year.

2. Membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
3. Melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain dalam Daftar Khusus kepada Sekretaris Perusahaan.

2. Preparing Integrity Pact attached to the proposed action of the Board of Directors that needs to be recommended by the Board of Commissioners and approved by the GMS.
3. Reporting information on shareholding of them and their families in the company and other Companies on a Special Register to the Corporate Secretary.

Rangkap Jabatan Direksi
Concurrent Position by the Board of Directors

Rangkap jabatan Direksi PLN Indonesia mengacu pada *Board Manual* Perusahaan. Sejalan dengan pedoman tersebut, Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Perusahaan
2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

The Board Manual regulates the policy regarding concurrent position by the Board of Directors. Under the manual, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent position as:
1. Member of the Board of Commissioners and/or Supervisory Board of the Company
2. Other structural and functional positions in Central and/or Regional Government agency/institution
3. Other position in accordance with the provisions in Laws and Regulations, political party official, and/or political party and/or legislative candidate/member and/or regional head/deputy regional head and/or regional/deputy regional head; and/or
4. Other position that may lead to conflict of interest.

Pada tahun 2023, seluruh anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan maupun perusahaan lain. Informasi lebih lanjut terkait rangkap Jabatan Direksi telah diuraikan Pada Bab Profil Perusahaan di bagian sub bab Profil Direksi dalam Laporan tahunan ini.

In 2023, all members of the Board of Directors did not serve any concurrent positions at Company or other companies. Further information of concurrent position by the Board of Directors is presented in the Company Profile Chapter in the Board of Directors Profile subchapter in this Annual Report.

Kepemilikan Saham Direksi
Shareholding by the Board of Directors

Kepemilikan saham anggota Direksi senantiasa diungkapkan secara berkala melalui Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Daftar Khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Direksi beserta keluarganya. Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) orang Anggota Direksi yang tercatat memiliki saham di perusahaan lain. Rincian Kepemilikan Saham masing-masing anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

Shareholding of the members of the Board of Directors is regularly disclosed through a Special Register prepared by Corporate Secretary. The Special Register contains information on shareholding of members of the Board of Directors and their families. In 2023, 2 (two) members of the Board of Commissioners were listed as having shares in other companies. Following are details of Shareholding of each member of the Board of Directors:

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Keluarga Tahun 2023
Shareholding by the Board of Directors and their Family Members in 2023

Keterangan Description	Kepemilikan Saham Shareholding							
	Pribadi Pada Perusahaan Personal in the Company		Keluarga pada Perusahaan Family in the Company		Pribadi Pada Perusahaan Lain Personal in Other Companies		Keluarga pada Perusahaan Lain Family in Other Companies	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Edwin Nugraha Putra	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Rachmad Handoko*	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	175 lembar saham 175 shares	175 lembar saham 175 shares	Nihil N/A	Nihil N/A
M. Hanafi Nur Rifai**	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A				
Djoko Mulyono	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Bernadus Sudarmanta	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A

Keterangan Description	Kepemilikan Saham Shareholding							
	Pribadi Pada Perusahaan Personal in the Company		Keluarga pada Perusahaan Family in the Company		Pribadi Pada Perusahaan Lain Personal in Other Companies		Keluarga pada Perusahaan Lain Family in Other Companies	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Endang Astharanti	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	235.000 lembar saham 235,000 shares	242.400 lembar saham 242,400 shares	Nihil	Nihil
Wisnoe Satrijono	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A

Keterangan:
* berhenti menjabat sejak 19 September 2023
** mulai menjabat sejak 19 September 2023

Remarks:
* leaving the role on September 19, 2023.
** assuming the role since September 19, 2023.

Pelaksanaan Tugas Direksi
Implementation of Duties of the Board of Directors

Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

Kebijakan rapat Direksi terkait tata tertib dan frekuensi rapat baik rapat internal Direksi maupun rapat gabungan bersama Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* Perusahaan, yaitu Rapat Direksi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Rapat gabungan diselenggarakan jika dipandang perlu oleh salah satu organ dan bila dianggap perlu.

Frekuensi rapat selain diatur dalam *Board Manual*, diatur juga dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Direksi. Berikut adalah rencana rapat Direksi selama tahun buku 2023:

The policy of the Board of Directors meetings, both internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners, that governs its procedures and frequency refers to the Board Manual. It is established that the Board of Directors holds an internal meeting at least every 1 (one) month, in which the Board of Directors is allowed to invite the Board of Commissioners. A joint meeting is held when deemed necessary in general and as such by one of the organs.

In addition to being set in the Board Manual, the meeting frequency is also regulated in the Annual Work Program & Budget of the Board of Directors. Here are the meeting plans of the Board of Directors during the fiscal year of 2023:

Rapat Internal Direksi Board of Directors Internal Meeting	Rapat Gabungan Direksi Joint Meetings with the Board of Directors	Rapat dengan Pemegang Saham Meetings with the Shareholders
23	12	2

Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

The Board of Directors meetings can be held at any time when:
a. Required by one or more members of the Board of Directors
b. There is a written request from one or more members of the Board of Commissioners
c. There is a written request from 1 (one) person or more shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights.

The Board of Directors meeting is valid and reserves the right to make a binding resolutions when attended by more than 1/2 (half) of the number of members of the Board of Directors or their authorized representatives with due regard to the provisions. In the case where the number of affirmative and negative votes is equal, the Meeting Chair will make the decision by observing the provision on accountability. In the event that the proposal consists of more than two alternatives and none of them has received more than ½ (half) of the number of votes cast, then there shall be second round of vote of the top two options of ½ (half) of the number of votes cast.



Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2023

Frequency of the Board of Directors Meetings in 2023

Selama tahun 2023, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 33 kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Direksi sebanyak 23 kali rapat dan rapat gabungan sebanyak 12 kali rapat dengan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

During 2023, the Board of Directors held 33 meetings, consisting of 23 internal meetings and 12 joint meetings with the following attendance rate of the Board of Directors:

Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan Direksi Tahun 2023

Board of Directors Attendance in Internal Meetings and Joint Meetings in 2023

Nama Nama	Jabatan Position	Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi Board of Directors Attendance in Internal Meetings			Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris) Board of Directors Attendance in Joint Meetings (Board of Directors and Board of Commissioners)		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendees	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendees	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	23	20	87%	12	12	100%
Rachmad Handoko*	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	18	16	89	8	8	100%
M. Hanafi Nur Rifai**	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	18	16	89	4	4	100%
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	18	16	89	12	11	92%
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	18	16	89	12	11	92%
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	18	16	89	12	9	75%
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	18	16	89	12	12	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi Average Attendance of Board of Directors				**87%**			**93%**

Keterangan:
* berhenti menjabat sejak 19 September 2023
** mulai menjabat sejak 19 September 2023

Remarks:
* leaving the role on September 19, 2023.
** assuming the role since September 19, 2023.

Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS Tahunan

Board of Directors Members Attendance in Annual GMS

Pada tahun 2023, seluruh anggota Direksi Perusahaan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2023, all members of the Board of Directors of the Company were present in the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), as shown in the following table:

Tanggal Date	Agenda	Nama Direksi Name of Director					
		Edwin Nugraha Putra	Rachmad Handoko *	Djoko Mulyono	Bernadus Sudarmanta	Endang Astharanti	Wisnoe Satrijono
3 Januari 2023 January 3, 2023	RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 GMS on Ratification of Work Plan and Budget (WP&B) 2023	√	√	√	√	√	√
30 Mei 2023 May 30, 2023	RUPS Persetujuan Laporan Tahunan (LPT) Tahun Buku 2022 GMS on Approval of Annual Report for Fiscal Year 2022	√	√	√	√	√	√

* berhenti menjabat sejak 19 September 2023

* leaving the role on September 19, 2023.

Kehadiran penuh ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan tugas serta memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemegang saham.

This full attendance demonstrates the Board of Directors' commitment in carrying out their duties and ensuring transparency and accountability to the shareholders.

Ketepatan Penyampaian Undangan Rapat Direksi

Timely Invitation Procedures of the Board of Directors Meetings

Penyampaian undangan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam *Board Manual* adalah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Selama tahun 2023 tidak terdapat keterlambatan penyampaian undangan rapat kepada peserta rapat Direksi.

The invitation to the Board of Directors meetings has been delivered in accordance with the policy set forth in the Board Manual, which is at least 3 (three) days prior to the meeting is held or in a shorter time for urgent situation, which will not take into account the date of the invitation and the meeting. During 2023, there was no delay in the delivery of meeting invitations to the participants of the Board of Directors meeting.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2024

Board of Directors Meeting Plan in 2024

Sejalan dengan *Board Manual*/Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Direksi akan merencanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dengan memfokuskan pada agenda umum yang mencakup evaluasi kinerja, strategi perusahaan, serta keputusan strategis untuk mencapai keunggulan bersama.

In line with Board Manual/Work Guidelines for Board of Directors and Board of Commissioners, the Board of Directors will plan a meeting at least 1 (one) time in a month while focusing on a general agenda that includes performance evaluation, corporate strategy, and strategic decisions to achieve mutual excellence.

Program Pengenalan Bagi Direksi Baru

Orientation Program for New Directors

Kebijakan program pengenalan Direksi baru mengacu pada *Board Manual*. Selaras dengan kebijakan tersebut Program Pengenalan mengenai Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya.

The policy of orientation program for new member of the Board of Directors refers to the Board Manual. Under the policy, the Orientation Program on the Company must be given to the members of the Board of Directors appointed for the first time.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Orientation programs can include presentations, meetings, company visits, and reviews of documents or other programs that are considered appropriate to the Company in which the program is implemented. The responsibility to hold this Orientation Program is on the Corporate Secretary or anyone acting as such.

Materi Program Pengenalan meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Orientation Program Material includes:
1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. Description of the Company relating to the objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information about the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors and what violates them.

Pada tahun 2023, terdapat pengangkatan Direksi baru yaitu Sdr. M. Hanafi Nur Rifai sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara dan telah dilakukan program pengenalan pada tanggal 24 Oktober 2023 melalui pertemuan tatap muka langsung.

In 2023, there was the appointment of a new member of the Board of Directors, namely M. Hanafi Nur Rifai as Director of Coal Power Plant Operations. An orientation program was conducted on October 24, 2023 through a face-to-face meeting.



Program Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi

Training Program and/or Competence Expansion of the Board of Directors

Kebijakan pengembangan kompetensi Direksi PLN Indonesia Power mengacu pada *Board Manual*. Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi Direksi dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan *update knowledge* tersebut, maka Anggota Direksi perlu untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan, yang dikombinasikan dalam *self-study* dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dan atas beban Perusahaan.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Direksi dan termasuk dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi.

The competence Development Policy of the Board of Directors of PLN Indonesia Power refers to the Board Manual. The Competence Development/Upgrade of the Board of Directors is designed to facilitate knowledge update. In order to achieve this, the Board of Directors needs to pursue higher education, combined with self-study and participation in special learning, training, workshops, seminars, conferences, which can be useful in improving the effectiveness of the functions of the Board of Commissioners. The pursuit to higher education can be carried out at home country and abroad, and at the expense of the Company.

The implementation of competence development for members of the Board of Directors is realized in accordance with the Annual Work Plan of the Board of Directors and included in the key performance indicators (KPI) of the Board of Directors.

Pelaksanaan Pelatihan Direksi Tahun 2023

Training Implementation of the Board of Directors in 2023

Direksi Board of Directors	Nama *Workshop*/Seminar Name Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Edwin Nugraha Putra	*Project Mentorship* PLN IP HIJAUNESIA	PT PLN (PERSERO)	4 Juli 2023 July 4, 2023	Jakarta
	Self Learning E-Foundation Award Asset Management Training	PT PLN (PERSERO)	27 Juli - 31 Agustus 2023 july 27 - August 31, 2023	Jakarta
	Pra Assessment Program Business Development And Investment Decision Making	PT PLN (PERSERO)	8 Agustus 2023 August 8, 2023	Jakarta
	Training & Sertifikasi QRGP QRGP Training and Certification	CRMS & LSP MKS	19 - 21 September 2023 September 19-21, 2023	Jakarta
Rachmad Handoko*	*Training* & Sertifikasi QRGP QRGP Training and Certification	CRMS & LSP MKS	19 - 21 September 2023 September 19-21, 2023	Jakarta
Bernadus Sudarmanta	*Project Mentorship* PLN IP HIJAUNESIA	PT PLN (PERSERO)	4 Juli 2023 July 4, 2023	Jakarta
	Pra Assessment Program Business Development And Investment Decision Making	PT PLN (PERSERO)	8 Agustus 2023 August 8, 2023	Jakarta
	Training & Sertifikasi QRGP QRGP Training and Certification	CRMS & LSP MKS	19 - 21 September 2023 September 19-21, 2023	Jakarta
Endang Astharanti	*Pra Assessment Program Business Development And Investment Decision Making*	PT PLN (PERSERO)	8 Agustus 2023 August 8, 2023	Jakarta
	Training & Sertifikasi QRGP QRGP Training and Certification	CRMS & LSP MKS	19 - 21 September 2023 September 19-21, 2023	Jakarta
Wisnoe Satrijono	*Training* & Sertifikasi QRGP QRGP Training and Certification	CRMS & LSP MKS	19 - 21 September 2023 September 19-21, 2023	Jakarta

Keterangan:
* berhenti menjabat sejak 19 September 2023
** mulai menjabat sejak 19 September 2023

Remarks:
* leaving the role on September 19, 2023.
** assuming the role since September 19, 2023.

Kegiatan Direksi Direksi Tahun 2023

Activities of Board of Directors in 2023

1. Menyusun Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2023 dan telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023
2. Memaksimalkan Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2023 dengan mencapai target 103,40% dari target 100%
3. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko, Pengendalian Internal, Teknologi Informasi, Mutu Produk dan Pelayanan, CSR, SDM sudah tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Perusahaan.

1. Preparing the Company's 2023 Budget Plan. It was approved by the Shareholders through the 2023 WP&B Attestation in GMS, dated January 30, 2023.
2. Optimizing the achievement of key performance indicator (KPI) in 2023 by meeting the target of 103,40% dari target 100%.
3. Ensuring the implementation of Risk Management, Internal Control, Information Technology, Product and Service Quality, CSR, HR system is appropriate and effective, as it is aligned with the vision, mission, objectives, goals, and strategy of the Company.

4. Memastikan pelaksanaan pengelolaan Anak Perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan Perusahaan diantaranya dengan melakukan monitoring atas kinerja Anak Perusahaan, pengangkatan dan pemberhentian calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta penetapan Remunerasi Anak Perusahaan.
5. Memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perusahaan dengan memberikan sertifikasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan.
6. Melakukan penandatangan surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, kepemilikan saham, komitmen kepatuhan *Code of Conduct* (CoC) dan pakta integritas.

4. Ensuring the implementation of Subsidiary management is carried out in accordance with the Company's policies including monitoring the performance of Subsidiaries, the appointment and dismissal of prospective Board of Directors and Commissioners in the Subsidiaries, and the determination of Remuneration of Subsidiaries.
5. Ensuring the integrity of accounting and corporate financial reporting systems by providing certification to Annual Financial Statements.
6. Signing the statement of free from conflict of interest, shareholding, compliance commitment to the Code of Conduct (CoC) and integrity pact.

Penilaian Atas Kinerja Komite Di Bawah Direksi
Assessment of the Performance of Committees under the Board of Directors

Sampai dengan tahun 2023, PLN Indonesia Power tidak memiliki Komite di bawah Direksi, sehingga tidak ada informasi terkait Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh organ fungsional yang dipimpin oleh Kepala Satuan. Masing-masing Unit Kerja tersebut mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Direksi sesuai dengan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan sebagai target kinerja yang perlu dicapai.

Until 2023, PLN Indonesia Power did not have any Committees under the Board of Directors, and therefore there are no information on the assessment of the performance of such Committees. However, the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is supported by functional organs led by the Head of Unit. Each of Work Unit answers its performance to the Board of Directors in accordance with the Key Performance Indicators set as the mandatory performance targets.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

As a Company organ, the Board of Commissioners assumes the collective duties and responsibilities to supervise and advise the Board of Directors, while ensuring that GCG is implemented at all organizational levels in the Company.

Dewan Komisaris, sebagai tulang punggung utama dalam struktur tata kelola perusahaan, memainkan peran sentral dalam mengarahkan perusahaan menuju visi keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Dengan memegang kendali atas kebijakan strategis, mengevaluasi kinerja manajemen, dan menjamin kepatuhan terhadap standar etika, Dewan Komisaris menjadi landasan kokoh yang mendorong integrasi, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan, sehingga membentuk fondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan Perusahaan.

The Board of Commissioners, as the main backbone in the corporate governance structure, plays a central role in directing the Company toward a vision of sustainability and long-term success. By taking control of strategic policy, evaluating management performance, and ensuring compliance with ethical standards, the Board of Commissioners is a solid foundation that encourages integration, accountability, and sustainability, thus forming a strong foundation for the Company's sustainable growth.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, serta Salinan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023 dan Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed through the GMS with reference to the Company's Article of Association, as well as the Copy of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of SOEs dated March 20, 2023 and the Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners stipulated by Shareholders/GMS.

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: (a) penjaringan atau nominasi calon Anggota Dewan Komisaris; (b) penilaian bagi calon Anggota Dewan Komisaris.

The appointment and dismissal guidelines include those concerning: (a) Scouting or nomination of prospective members of the Board of Commissioners; (b) Assessment of prospective Board of Commissioners members.



Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Dewan Komisaris dengan mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Perusahaan (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris didukung dengan Berita Acara Penilaian.

Shareholders/GMS carry out an assessment of the prospective Board of Commissioners by taking into account all the assessment criteria set out in the provisions of law of the Company (assessment of the requirements of integrity, dedication, understanding management problems, and having adequate knowledge of corporate business). The process of assessment of the Board of Commissioners candidates is supported by Minutes of Assessment.

Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

The dismissal of the Board of Commissioners is determined by the GMS. The Position of Board of Commissioners Members shall terminate when:
1. they pass away.
2. their term of office is over.
3. they are dismissed by GMS.
4. they no longer meet the requirements as a member of the Board of Commissioners according to the Article of Association and other laws and regulations.

Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan dan tertulis oleh Pemegang Saham.

The dismissal plan of a commissioner is notified to the relevant members verbally and in writing by the Shareholders.

Komposisi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Composition

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi serta rencana strategis Perusahaan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

The composition and number of members of the Board of Commissioners is determined with regard to the vision and mission and strategic plan of the Company, so that decision-making can be done effectively, precisely, and quickly, while upholding independence and the Company's sole best interest.

Komposisi Anggota Dewan Komisaris PLN Indonesia Power per 31 Desember 2023 terdiri dari 7 (tujuh) orang termasuk Komisaris Utama dengan susunan dan komposisi sebagai berikut:

The Composition of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power as per December 31, 2023 consists of 7 (seven) members including the President Commissioner with the following structure:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term Position
Wiluyo Kusdwiharto	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular GMS dated September 21, 2022	2022-2026
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 9 Februari 2021 Circular GMS dated February 09, 2021	2021-2025
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 6 Juli 2021 Circular GMS dated July 06, 2021	2021-2025
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular GMS dated September 21, 2022	2022-2026
Haryanto W.S.	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular GMS dated September 21, 2022	2022-2026
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 18 November 2022 Circular GMS of Shareholders dated November 18, 2022	2022-2026
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Circular GMS dated September 21, 2022	2022-2026

Masa Jabatan Dewan Komisaris
Tenure of the Board of Commissioners

Sejalan dengan *Board Manual* Perusahaan, masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

In line with the Company's Board Manual, the term of office of the Board of Commissioners is set at 4 (four) years and can be re-appointed for 1 (one) period of term.



Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Guidelines of the Works, Duties, and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah dilengkapi Pedoman Kerja Komisaris (*Board Manual*) yang disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Maret 2020.

In carrying out their duties, the Board of Commissioners shall ground on Code of Conduct of Commissioners (Board Manual) which was passed through a Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners on March 20, 2020.

Dalam *Board Manual* tersebut, menjelaskan secara terperinci aspek-aspek pedoman kerja Dewan Komisaris, antara lain terkait:

1. Etika Jabatan
2. Pengertian dan Persyaratan Dewan Komisaris
3. Komposisi Dewan Komisaris
4. Pengaturan Rangkap Jabatan
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
6. Masa Jabatan Dewan Komisaris
7. Program Pengenalan dan Pelatihan
8. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
9. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris
10. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
11. Tugas Dewan Komisaris
12. Wewenang Dewan Komisaris
13. Pendelegasian Wewenang Di Antara Anggota Dewan Komisaris
14. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
15. Rapat Dewan Komisaris
16. Penetapan Kebijakan Pengawasan Perusahaan
17. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
18. Remunerasi Dewan Komisaris
19. Organ Pendukung Dewan Komisaris.
20. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

The Board Manual provides detailed account on aspects of the Board of Commissioners' work guidelines, including those related to:

1. Ethics of Position
2. Definition and Requirements of the Board of Commissioners
3. Board of Commissioners Composition
4. Provision on Concurrent Positions
5. Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners
6. Tenure of the Board of Commissioners
7. Orientation and Training Programs
8. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners
9. Performance Achievement Indicators of the Board of Commissioners
10. Board of Commissioners Performance Evaluation
11. Duties of the Board of Commissioners
12. Authorities of the Board of Commissioners
13. Delegation of Authority Among Members of the Board of Commissioners
14. Responsibilities of the Board of Commissioners
15. Board of Commissioners Meetings
16. Determination of Company Supervisory Policy
17. Reporting and Responsibilities of the Board of Commissioners
18. Remuneration for the Board of Commissioners
19. Supporting Organs for the Board of Commissioners
20. Work Relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Sejalan dengan *Board Manual*, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In line with the Board Manual, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

Tugas Dewan Komisaris

Duties of the Board of Commissioners

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.

1. In carrying out their duties, the Board of Commissioners must comply with the laws and regulations and/or Article of Association.
2. The Board of Commissioners conducts supervision over management policy, the course of management in general, both with regards to the Company and its business, and provides advice the Board of Directors. The supervision and advice are provided as intended for the best interest of the Company and in accordance with the purpose of the Company.
3. The Board of Commissioners shall not participate in making operational decisions. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. The duty of the President Commissioner as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Commissioners.
4. As a Company organ, the Board of Commissioners assumes the collective duties and responsibilities to supervise and advise the Board of Directors, while ensuring that GCG is implemented at all organizational levels in the Company.



5. Memberikan persetujuan RKAP dan RJPP.
6. Memberikan arahan terkait Perubahan lingkungan bisnis, hubungan dengan *stakeholder*, Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Sistem Teknologi Informasi, Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir, kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan pengadaan, kebijakan mutu dan pelayanan.
7. Melakukan Pengawasan terhadap kepatuhan Direksi sesuai RKAP/RJPP, RKAT Dewan Komisaris, kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, pengawasan terkait gejala menurunnya kinerja Perusahaan, kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan, pengawasan terkait persetujuan atas transaksi, pengawasan terkait pengajuan calon auditor eksternal serta pengawasan efektivitas audit internal dan audit eksternal.
8. Mengusulkan Calon Anggota Direksi Kepada Pemegang Saham, Penilaian Kinerja Direksi (Individu dan Kolegial) dan Pengajuan Usulan Tantiem/Insentif Kinerja Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Mempertimbangkan Kinerja Direksi.
9. Memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Approves RKAP and RJPP.
6. Provides direction related to changes in the business environment, related to the stakeholders, Internal Control System, Risk Management, Information Technology System, Policies and implementation of career development, accounting policies and preparation of financial statements, procurement policies, quality and service policies.
7. Monitors the compliance of the Board of Directors in accordance with RKAP/RJPP, RKAT Board of Commissioners, the compliance of the Board of Directors in implementing the laws and regulations, monitors the declining performance of the Company, Subsidiary/ Joint Ventures management policies, monitors the approval of transactions, monitors the nomination of prospective external auditors, and monitors the effectiveness of internal and external audits.
8. Nominates the Members of Board of Directors to the Shareholders, Performance Assessment of Directors (Individually and Collegially) and Proposes Tantiem/Performance Incentive in accordance with the Applicable Terms while taking into account the performance of the Board of Directors.
9. Monitors and ensures that Good Corporate Governance (GCG) practices have been applied effectively and sustainably.

Tanggung jawab Dewan Komisaris

Responsibilities of the Board of Commissioners

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 3 apabila dapat membuktikan: (a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; (b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Atas nama Perusahaan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan ke pengadilan negeri.
7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

1. The Board of Commissioners is responsible for the supervision of the Company.
2. Every member of the Board of Commissioners shall, in good faith, with caution and responsibility, implement the supervisory and advisory duties for the Board of Directors for the interest and according to the intents and purposes of the Company.
3. Every member of the Board of Commissioners holds personal responsibility for the Company's losses in the event where such a member is mistakenly or negligently implementing his/her duties.
4. In the case where the Board of Commissioners consists of two or more members, the responsibility as specified in point 3 shall be jointly taken by all Board of Commissioners members.
5. The Board of Commissioners members shall hold no accountability for the losses as specified in point 3, if they are able to prove that: (a) They have performed the supervision in good faith and cautiously for the interest and according to the intents and purposes of the Company; (b) They do not have personal interest both directly and indirectly for the loss-inflicting management of the Board of Directors; (c) They have provided the advice for the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of the losses.
6. On behalf of the Company, the shareholder which represents at least 1/10 (one-tenth) of the entire shares with voting right may contest the Board of Commissioners which, due to its mistake or negligence, inflicts loss to the Company to the District Court.
7. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Commissioners in performing the supervisory duty of the management by the Board of Directors and the Company's wealth is insufficient to settle the entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall jointly take responsibility for the outstanding liabilities.



8. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1 berlaku juga bagi Anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 apabila dapat membuktikan: (a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; (c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan (d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
10. Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana.

Sedangkan hal-hal yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
13. Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya.

8. The liabilities as specified in point 1 shall also apply to the members of the Board of Commissioners who are no longer serving their position up to five (5) years prior to the announcement of bankruptcy.
9. The Board of Commissioners members shall hold no accountability for the Company's bankruptcy as specified in point 1, if they are able to prove that: (a) The bankruptcy is not resulted from their mistake or negligence; (b) They have performed the supervisory duty in good faith and cautiously for the interest and according to the intents and purposes of the Company; (c) They do not have personal interest both directly and indirectly for the bankruptcy-inflicting managerial actions performed by the Board of Directors; (d) They have provided the advice for the Board of Directors to prevent the bankruptcy.
10. Provision on the Board of Commissioners' responsibility for its mistake and negligence specified in the law does not waive the provisions set in the penal code.

Whereas the matters under the Board of Commissioners' authority include:

1. Reviewing books, letters, and other documents; checking cash for verification; and checking other securities and Company's wealth.
2. Entering the yards, buildings, and offices used by the Company.
3. Asking for explanation from the Board of Directors and/or other officials pertaining to every issue on the Company management.
4. Acknowledging all policies and actions performed or to be performed by the Board of Directors.
5. Requesting the presence of the Board of Directors and/or other officials under and with the acknowledgment of the Board of Directors, in the Board of Commissioners meetings.
6. Appointing and dismissing the Secretary to the Board of Commissioners, if considered necessary.
7. Suspending members of the Board of Directors in accordance with the provision of the Articles of Association.
8. Establishing other committees apart from the Audit Committee, if considered necessary, by taking into account the Company's capability.
9. Using experts/specialists for certain issues in a certain period at the expense of the Company, if deemed necessary.
10. Performing Company management in a certain condition for a certain period in accordance with the provisions of the Articles of Association.
11. Attending Board of Directors meetings and providing inputs on the matters discussed.
12. Performing other supervisory authorities provided that they do not conflict with the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.
13. The Board of Commissioners has access to the Company's information proportional to its authority.



Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris
Types of Decision Requiring the Approval of the Board of Commissioners

Sejalan dengan *Board Manual*, usulan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengagunkan Aktiva Tetap Untuk Penarikan Kredit Jangka Pendek.
2. Mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha atau Pihak Lain
3. Menerima atau Memberikan Pinjaman Jangka Menengah/Panjang.
4. Menghapuskan dari Pembukuan Piutang Macet dan Persediaan Barang Mati.
5. Melepaskan Aktiva Tetap Bergerak dengan Umur Ekonomis yang Lazim Berlaku dalam Industri pada Umumnya sampai dengan 5 (lima) Tahun.
6. Menetapkan Struktur Organisasi dan penempatan pegawai jabatan 1 (satu) Tingkat Di Bawah Direksi.

In line with the Board Manual, the proposals of the Board of Directors that require written approval from the Board of Commissioners are as follows:

1. Using property, plant, and equipment (fixed assets) for short-term loan collateral.
2. Establishing cooperation with other entities or parties.
3. Receiving or providing long/medium term loans.
4. Writing-off bad debt and debt stock from the Company's account.
5. Disposing movable fixed assets with the economic life of up to 5 (five) years old as generally applied in the industry.
6. Establishing organizational structure and assignment up to one level below the Board of Directors.

Pembagian Tugas Pengawasan Masing-Masing Dewan Komisaris
Delegation of Supervisory Duties for the Board of Commissioners

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengarahan dan penasehatan, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris. Pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris tahun 2023 ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 20 Desember 2022 dengan pembagian tugas sebagai berikut:

In order to improve the effectiveness and success of the implementation of the supervisory, briefing and advisory functions, the Board of Commissioners delegates the duties among members of the Board of Commissioners. The delegation of duties among members of the Board of Commissioners in 2023 was stipulated in the Decree of the Board of Commissioners dated December 20, 2022 with the following duties:

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Delegation of Supervisory Duties for the Board of Commissioners

Nama Nama	Jabatan Position	Pembagian Tugas Description of Duties
Wiluyo Kusdwiharto	Komisaris Utama President Commissioner	• Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris • Memimpin rapat Dewan Komisaris • Memimpin rapat RUPS • Melaksanakan penugasan sebagai Ketua Komite Audit • Coordinating the activities of the Board of Commissioners • Leading Board of Commissioners meetings • Leading GMS meetings • Performing the assignment as the Chairman of the Audit Committee
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	Manajemen Risiko, SMAP Risk Management, ABMS
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	Audit, GCG, *Whistle Blowing*, SMAP Audit, GCG, Whistleblowing, ABMS
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	Manajemen Risiko, SMAP Risk Management, ABMS
Haryanto W.S.	Komisaris Commissioner	Nominasi & Remunerasi, SDM & Organisasi Nomination & Remuneration, HR & Organization
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	Nominasi & Remunerasi, SDM & Organisasi Nomination & Remuneration, HR & Organization
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit, GCG, *Whistle Blowing*, SMAP Audit, GCG, Whistleblowing, ABMS

Pembagian tugas tersebut telah mencakup seluruh bidang tugas Direksi, termasuk penugasan Anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/wakil/Anggota Komite Dewan Komisaris. Fokus bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengacu pada pembagian peran sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

The delegation of duties has covered all areas of the Board of Directors duties, including the assignment of members of the Board of Commissioners as Chairman/Deputy/Members of the Board of Commissioners Committee. The focus of the area of supervision for each Commissioner refers to the description of duties according to their competencies and experiences.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sejalan dengan *Board Manual*, keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

In line with Board Manual, Independent Commissioner is established to ensure that the supervisory mechanism is running effectively and in accordance with the laws and regulation as well as to provide a balance between the interests of majority and minority shareholders.

Anggota Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Independent Commissioner Committee is composed of the Members of Board of Commissioners who have met the independence aspect, i.e. no financial, managerial, shareholding, and/or familial relation with the other Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or controlling shareholders, or any kind of relationships with the Company which may influence their capacity to act independently.

Jumlah Komisaris Independen
Number of Independent Commissioners

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen yang dijabat oleh Sdr. Lukmanul Hakim dan telah memiliki kompetensi di bidang audit, keuangan dan akuntansi sebagaimana dijelaskan pada Profil Dewan Komisaris. Penetapan Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 21 September 2022. Jumlah tersebut mewakili 14% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Pada Februari 2024, jumlah Komisaris Independen PLN Indonesia Power menjadi 43% dengan adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Sirkuler tanggal 29 Februari 2024. Komisaris Independen PLN Indonesia Power berjumlah 3 (tiga) orang yang di jabat oleh Sdr. Iskandar Simorangkir, Sdr. Haryanto WS dan Sdr. Lukmanul Hakim.

In 2023, PLN Indonesia Power has 1 (one) Independent Commissioner, Lukmanul Hakim, who qualify in the expertise of auditing, finance and accounting as described in the profile of the Board of Commissioners. The Independent Commissioner was established according to the GMS Resolutions on September 21, 2022. This represented 14% of all 7 (seven) members of the Board of Commissioners. In February 2024, the number of Independent Commissioners of PLN Indonesia Power grew to 43% with the change of nomenclature based on the Resolutions of Shareholders outside the General Meeting of Shareholders (GMS) in Circular dated February 29, 2024. The Independent Commissioner of PLN Indonesia Power amounts to 3 (three) members including: Iskandar Simorangkir, Haryanto WS, and Lukmanul Hakim.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pemenuhannya
The Criteria for the Determination of Independent Commissioners and Its Implementation

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perusahaan mencakup:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha Perusahaan
3. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan
4. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan yang bersangkutan.

Independent Commissioners are appointed to ensure that the supervisory mechanism runs effectively and in accordance with the laws and regulations. The criteria for the determination of Company's Independent Commissioners are:

1. Not having any affiliation with the Company, Commissioners, Directors or Major/Controlling Shareholders of the Company.
2. Not having any direct or indirect business commitments that pertain to the Company's business.
3. Not holding any shares, either directly or indirectly, in the Company.
4. Not holding concurrent position as a Director at the Company's affiliates.

Pernyataan Tentang Independensi Komisaris
Statement of the Independence of the Commissioners

Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi dan telah dinyatakan oleh Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan independensi yang diperbarui secara berkala. Pernyataan independensinya Dewan Komisaris dinyatakan surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

The Company's Independent Commissioners have met independence criteria and have declared their independence by signing a statement of independence which is updated regularly. The independence of the Board of Commissioners is declared in the statement of free from conflict of interest signed at the beginning of the appointment and renewed at every beginning of the year.



Berikut pernyataan independensi Sdr. Lukmanul Hakim sebagai Komisaris Independen Perusahaan tahun 2023.

Below is the statement of independence from Lukmanul Hakim as Independent Commissioner of the Company in 2023.



INDONESIA POWER

SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA POWER
(RE-BRANDING PLN INDONESIA POWER) TAHUN 2023

Sejalan dengan ketentuan:
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 50
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 25
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
4. Anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 ayat 33

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : LUKMANUL HAKIM
Jabatan : KOMISARIS INDEPENDEN

menyatakan bahwa:

1. Independen dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dengan kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi lainnya.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dengan diri saya dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
4. Melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki dan/atau keluarganya dalam perusahaan maupun perusahaan lain yang diuraikan dalam Daftar Khusus.

Pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian pernyataan dengan kenyataan yang terjadi maka saya bersedia menjalani proses lebih lanjut sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

LUKMANUL HAKIM

Berdasarkan surat pernyataan di atas, Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Based on the statement above, the Company's Independent Commissioner has met the independence requirements in accordance with the stipulated provisions.

Independensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Independence

Seluruh Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya guna menjamin independensi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat rangkap jabatan maupun adanya perubahan kepemilikan saham baik pribadi maupun keluarga di Perusahaan dan/atau Perusahaan lain. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan.

All Board of Commissioners members have signed the statement of free from conflict of interest which clarifies the absence of affiliation with any members of either the Board of Directors or the Board of Commissioners to guarantee their independence. Members of the Board of Commissioners must also report should there be any changes in status that affects their independence, including should there be any concurrent positions or changes in shareholding, either personal or their family in the Company and/or other Companies. Throughout 2023, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners in decision-making.



INDONESIA POWER

SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA POWER
(RE-BRANDING PLN INDONESIA POWER) TAHUN 2023

Sejalan dengan ketentuan:
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 50
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 25
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
4. Anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 ayat 33

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : WILUYO KUSDWIHARTO
Jabatan : KOMISARIS UTAMA

menyatakan bahwa:

1. Independen dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dengan kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi lainnya.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dengan diri saya dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
4. Melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki dan/atau keluarganya dalam perusahaan maupun perusahaan lain yang diuraikan dalam Daftar Khusus.

Pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian pernyataan dengan kenyataan yang terjadi maka saya bersedia menjalani proses lebih lanjut sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

WILUYO KUSDWIHARTO

Wiluyo Kusdwiharto



INDONESIA POWER

SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA POWER
(RE-BRANDING PLN INDONESIA POWER) TAHUN 2023

Sejalan dengan ketentuan:
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 50
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 25
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
4. Anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 ayat 33

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : DJOKO SISWANTO
Jabatan : KOMISARIS

menyatakan bahwa:

1. Independen dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dengan kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi lainnya.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dengan diri saya dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
4. Melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki dan/atau keluarganya dalam perusahaan maupun perusahaan lain yang diuraikan dalam Daftar Khusus.

Pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian pernyataan dengan kenyataan yang terjadi maka saya bersedia menjalani proses lebih lanjut sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

DJOKO SISWANTO

Djoko Siswanto



INDONESIA POWER

SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA POWER
(RE-BRANDING PLN INDONESIA POWER) TAHUN 2023

Sejalan dengan ketentuan:
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 50
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 25
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
4. Anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 ayat 33

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ISKANDAR SIMORANGKIR
Jabatan : KOMISARIS

menyatakan bahwa:

1. Independen dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dengan kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi lainnya.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dengan diri saya dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
4. Melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki dan/atau keluarganya dalam perusahaan maupun perusahaan lain yang diuraikan dalam Daftar Khusus.

Pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian pernyataan dengan kenyataan yang terjadi maka saya bersedia menjalani proses lebih lanjut sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

ISKANDAR SIMORANGKIR

Iskandar Simorangkir


SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA POWER
(RE-BRANDING PLN INDONESIA POWER) TAHUN 2023

Nama : M.P. DWINUGROHO
Jabatan : KOMISARIS

M.P. DWINUGROHO

M.P. Dwinugroho


SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA POWER
(RE-BRANDING PLN INDONESIA POWER) TAHUN 2023

Nama : HARYANTO WS
Jabatan : KOMISARIS

HARYANTO WS

Haryanto W.S.


SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA POWER
(RE-BRANDING PLN INDONESIA POWER) TAHUN 2023

Nama : ARIEF BUDIMAN
Jabatan : KOMISARIS

ARIEF BUDIMAN

Arief Budiman

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Selama tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perusahaan. Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

Kebijakan benturan kepentingan Dewan Komisaris PLN Indonesia Power diatur dalam *Board Manual*. Mekanisme pengawasan atas penerapan kebijakan benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan:

1. Menyusun surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
3. Melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain dalam Daftar Khusus kepada Sekretaris Perusahaan.

During 2023, all members of the Board of Commissioners did not have any conflicts of interest or potential conflicts of interest against the Company. The Board of Commissioners commits to avoid potential conflicts of interest or to always put themselves in no situation of any potential conflict of interest.

The conflict of interest policy applicable to the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power is regulated in the Board Manual. The supervisory mechanism for the implementation of conflict of interest policy by the Board of Commissioners is carried out by:

1. Drafting a statement of free from conflict of interest at the beginning of the appointment and renewed at every beginning of the year.
2. Preparing Integrity Pact attached to the proposed action of the Board of Directors that needs to be recommended by the Board of Commissioners and approved by the GMS.
3. Reporting information on shareholding of them and their families in the Company and other companies on a Special Register to the Corporate Secretary.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Concurrent Position by the Board of Commissioners

Rangkap jabatan Dewan Komisaris PLN Indonesia mengacu pada *Board Manual* Perusahaan. Sejalan dengan pedoman tersebut, Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

The Board Manual regulates the policy regarding concurrent position by the Board of Commissioners. Under the manual, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent position as:

1. Member of the Board of Directors in Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises;
2. Other position in accordance with the provisions in laws and regulations, political party official and/or legislative candidate/member and/or Regional head/Deputy regional head candidate; and/or
3. Other position that may lead to conflict of interest.

Pada tahun 2023, terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan. Namun dapat dipastikan rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan. Informasi rangkap jabatan Dewan Komisaris disajikan di Bab Profil Perusahaan pada sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

In 2023, there were several members of the Board of Commissioners who held concurrent positions. However, it can be ascertained that such concurrent positions complied with the laws and regulations. The information of concurrent position by the Board of Commissioners is presented in the Company Profile Chapter in the Board of Commissioners Profile subchapter in this Annual Report.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
Shareholding by Board of Commissioners Members

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris senantiasa diungkapkan secara berkala melalui Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Daftar Khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya. Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris yang tercatat memiliki saham di perusahaan lain. Rincian Kepemilikan Saham masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut:

Shareholding of the members of the Board of Commissioners is regularly disclosed through a Special Register prepared by Corporate Secretary. The Special Register contains information on shareholding of members of the Board of Commissioners and their families. In 2023, 1 (one) member of the Board of Commissioners was listed as having shares in other companies. Following are details of Shareholding of each member of the Board of Commissioners:

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Tahun 2023
List of Board of Commissioners Shareholding in 2023

Keterangan Description	Kepemilikan Saham Shareholding							
	Pribadi Pada Perusahaan Personal in the Company		Keluarga pada Perusahaan Family in the Company		Pribadi pada Perusahaan Lain Personal in Other Companies		Keluarga pada Perusahaan Lain Family in Other Companies	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Wiluyo Kusdwiharto	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	243.000 lembar saham 243.000 shares	243.000 lembar saham 243.000 shares	Nihil N/A	Nihil N/A
Iskandar Simorangkir	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Djoko Siswanto	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
M.P. Dwinugroho	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Haryanto W.S.	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Arief Budiman	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Lukmanul Hakim	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Report of Supervisory Duties Report the Board of Commissioners

Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

Kebijakan rapat Dewan Komisaris terkait tata tertib rapat dan frekuensi rapat Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* dan Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu Dewan Komisaris mengadakan rapat internal Dewan Komisaris paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi (rapat gabungan). Rapat gabungan diselenggarakan jika dipandang perlu oleh salah satu organ dan bila dianggap perlu.

The policy of the Board of Commissioners Meetings that governs its procedures and frequency refers to the Board Manual and the Company's Article of Association. It is established that the Board of Commissioners hold an internal meeting at least every 1 (one) month, in which the Board of Commissioners is allowed to invite the Board of Directors (joint meeting). A joint meeting is held when deemed necessary in general and as such by one of the organs.

Frekuensi rapat selain diatur dalam *Board Manual*, diatur juga dalam Program Kerja Dewan Komisaris. Berikut adalah rencana rapat Dewan Komisaris selama tahun buku 2023:

In addition to being set in the Board Manual, the meeting frequency is also regulated in the Work Program of the Board of Commissioners. Here are the meeting plans of the Board of Commissioners during the fiscal year of 2023:

Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meetings	Rapat Gabungan Bersama Direksi Joint Meetings with the Board of Directors	Rapat dengan Pemegang Saham Meetings with the Shareholders
5	12	2

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12.10 bahwa kuorum kehadiran Rapat Direksi adalah 1/2 dari jumlah anggota, dan dalam Pasal 16.13 kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris adalah 1/2 dari jumlah anggota.

Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan Rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.

Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Keputusan dapat diambil di luar rapat Dewan Komisaris melalui cara sirkuler sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

The Board of Commissioners may hold a meeting at any time upon request of 1 (one) or multiple members of the Board of Commissioners, upon request of the Board of Directors, or upon written request of 1 (one) or multiple shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) the number of shares with voting rights, mentioning matters to be discussed.

According to the Company's Article of Association, Chapter 12.10 states that the quorum the Board of Directors meeting is 1/2 of the total number of members, and Chapter 16.13 states that the quorum of the Board of Commissioners meeting is 1/2 of the total number of members.

All resolutions in all Board of Commissioners meetings are made through deliberation and consensus. In the event that a consensus cannot be reached, the resolutions of the Board of Commissioners meeting will be made by the usual majority of votes. In the case where the number of affirmative and negative votes is equal, the Meeting Chair will make the decision by observing the provision on accountability, except when it relates to individual; in this case, the decision will be made through a private voting. The abstention vote is considered as an approval to the proposal submitted in the meeting.

In the event that the proposal consists of more than two alternatives and none of them has received more than ½ (half) of the number of votes cast, then there shall be second round of vote of the top two options until one of them receives more than ½ (half) of the number of votes cast. Resolutions may be made outside the meeting of the Board of Commissioners through a circular as long as all members of the Board of Commissioners agree on the method and matters.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023
Frequency of the Board of Commissioners Meetings in 2023

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 15 kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali rapat dan rapat gabungan sebanyak 12 kali rapat dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagai berikut:

During 2023, the Board of Commissioners held 15 meetings, consisting of 3 (three) internal meetings and 12 joint meetings with the following attendance rate of the Board of Commissioners:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Tahun 2023
Board of Commissioners Attendance in Internal Meetings and Joint Meetings in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance in Internal Meetings			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dan Direksi) Board of Commissioners Attendance in Joint Meetings (Board of Commissioners and Board of Directors)		
		Total Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency	Total Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Wiluyo Kusdwiharto	Komisaris Utama President Commissioner	3	3	100%	12	11	92%
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	3	3	100%	12	12	100%
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	3	3	100%	12	12	100%



Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance in Internal Meetings			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dan Direksi) Board of Commissioners Attendance in Joint Meetings (Board of Commissioners and Board of Directors)		
		Total Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency	Total Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	3	3	100%	12	10	83%
Haryanto W.S.	Komisaris Commissioner	3	3	100%	12	12	100%
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	3	3	100%	12	12	100%
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	3	3	100%	12	12	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris **Average Attendance of Board of Commissioners**				**100%**			**96%**

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan

Board of Commissioners Members Attendance in Annual GMS

Pada tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2023, all members of the Board of Commissioners of the Company were present in the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), as shown in the following table:

Tanggal Date	Agenda	Nama Dewan Komisaris Name of Director						
		Wiluyo Kusdwiharto	Djoko Siswanto	Iskandar Simorangkir	M.P. Dwinugroho	Haryanto W.S.	Arief Budiman	Lukmanul Hakim
3 Januari 2023 January 3, 2023	RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 GMS on Ratification of Work Plan and Budget (WP&B) 2023	√	√	√	√	√	√	√
30 Mei 2023 May 30, 2023	RUPS Persetujuan Laporan Tahunan (LPT) Tahun Buku 2022 GMS on Approval of Annual Report for Fiscal Year 2022	√	√	√	√	√	√	√

Kehadiran penuh ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas serta memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemegang saham.

This full attendance demonstrates the Board of Commissioners' commitment in carrying out their duties and ensuring transparency and accountability to the shareholders.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting Agenda

Agenda rapat internal Dewan Komisaris tahun 2023 diantaranya membahas terkait dengan isu-isu strategis Perusahaan dan Pergantian organ pendukung Dewan Komisaris sesuai ketentuan Surat Pemegang Saham. Adapun agenda rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi membahas diantaranya terkait usulan korporasi, usulan RKAP 2024-2025, persiapan penyertaan modal, pembahasan rancangan RJPP 2024-2028.

The Board of Commissioners' internal meeting agenda in 2023 among others covered the strategic issues in the Company and the changes of the Board of Commissioners' supporting organs as provided by the Letter of the Shareholders. The Board of Commissioners and the Board of Directors' joint meeting agenda among others covered corporate proposals, WP&B 2024-2025 proposal, investment preparation, and discussion of draft Company Long-Term Plan 2024-2028.

Ketepatan Penyampaian Undangan Rapat Internal dan Gabungan Dewan Komisaris

Timely Invitation Procedures of Internal Meetings and Join Meetings of the Board of Commissioners

Penyampaian undangan rapat Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam *Board Manual* adalah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Selama tahun 2023 tidak terdapat keterlambatan penyampaian undangan rapat kepada peserta rapat Dewan Komisaris.

The invitation to the Board of Commissioners meetings has been delivered in accordance with the policy set forth in the Board Manual, which is at least 3 (three) days prior to the meeting is held or in a shorter time for urgent situation, which will not take into account the date of the invitation and the meeting. During 2023, there was no delay in the delivery of meeting invitations to the participants of the Board of Commissioners meeting.

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Board of Commissioners Meeting Plan in 2024

Sejalan dengan Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2024 akan merencanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dengan memfokuskan pada agenda umum yang mencakup evaluasi kinerja, strategi Perusahaan, serta keputusan strategis untuk mencapai keunggulan bersama.

According to the Board of Commissioners Work Plan 2024, the meetings will be held at least once (1) a month by focusing on the general agenda that covers performance evaluation, Corporate strategy, and strategic decisions to gain shared excellence.

Pengawasan, Rekomendasi, Arahan dan Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2023

Supervision, Recommendation, Direction, and Resolution of the Board of Commissioners in 2023

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya yang sebagian diantaranya dituangkan dalam bentuk surat keputusan dan surat lainnya yang bersifat pengawasan dan persetujuan, antara lain:

1. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Usulan RKAP dan Investasi Murni Tahun 2023
2. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Usulan Manajemen Atas dan Manajemen Menengah PLN Indonesia Power
3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Pejabat Struktural Manajemen Menengah
4. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Persetujuan Penetapan Pejabat Struktural Manajemen Atas PLN Indonesia Power
5. Rekomendasi Persetujuan Dewan Komisaris Hasil *Talent Committee Meeting* Direksi PLN Indonesia Power 2023
6. Rekomendasi Dewan Komisaris Atas Persetujuan Harga Batubara untuk PLTU Suralaya dari PT Oktasan Baruna Persada Tahun 2023
7. Rekomendasi Dewan Komisaris Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu PJBG Oyong Sampai Dengan Tahun 2031 Untuk Memenuhi Kebutuhan Gas PLTGU Grati
8. Rekomendasi Usulan Pemberian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Pegawai Tahun 2022, serta Penyesuaian Honorarium Direksi & Dewan Komisaris Tahun 2023
9. Rekomendasi Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PLN Indonesia Power dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023
10. Rekomendasi Pembagian Laba Tahun 2022
11. Persetujuan Dewan Komisaris atas Persetujuan Usulan Manajemen Atas, Manajemen Menengah, dan Direksi APPA di PLN Indonesia Power
12. Tinjauan Dewan Pengarah Tentang Kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PLN Indonesia Power
13. Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Atas Usulan Revisi Program Anggaran Investasi Tahun 2023
14. Rekomendasi Dewan Komisaris Atas Persetujuan Harga dan Volume Batubara untuk PLTU Suralaya dari PT Bukit Asam Tahun 2022 - 2023.
15. Rekomendasi Dewan Komisaris Atas Persetujuan Permohonan Penugasan Pemegang Saham Untuk Pengembangan Proyek-Proyek PLTS PLN Indonesia Power (PLTS Terapung Jatigede, PLTS Terapung Kedungombo, PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Pasuruan dan PLTS Banyuwangi).
16. Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi dan Komisaris APPA serta Pejabat Struktural Manajemen Menengah PLN Indonesia Power.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has performed its functions, duties, and responsibilities, some of which are expressed in decree and other letters that are supervisory and require approval in nature, including:

1. Recommendation of the Board of Commissioners on RKAP Proposal and Pure Investment in 2023
2. Recommendation of the Board of Commissioners on Proposal of Upper-Level and Mid-Level Management of PT PLN Indonesia Power
3. Approval of the Board of Commissioners on Structural Officer on Mid-Level Management
4. Recommendation of the Board of Commissioners on the Approval of the Appointment of Upper-Level Management Structural Officer of PT PLN Indonesia Power
5. Approval Recommendation of the Board of Commissioners of the Talent Results Committee of 2023 PLN Indonesia Power's Board of Directors Meeting
6. Recommendation of the Board of Commissioners on Coal Price for Suralaya SPP from PT Okhatan Baruna Persada in 2023
7. Recommendation of the Board of Commissioners on Term Extension of PJBG Oyong until 2031 to Meet the Gas Needs of Grati CCPP
8. Recommendation on proposed Provision of Tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as employee Bonus for 2022 as well as adjustments to the Honorarium for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2023
9. Recommendation of KAP designation for Audit of Financial Statements of PLN Indonesia Power and its Subsidiary of Fiscal Year 2023
10. Recommendation on Proposed Profit Sharing in 2022
11. Approval of the Board of Commissioners on Approval of the Proposed Upper-Level Management, Intermediate Management, and APPA Board of Directors at PLN Indonesia Power
12. Director Council Review on Anti-Bribery Management System (ABMS) Activities of PLN Indonesia Power
13. Approval and Recommendation of the Board of Commissioners on the Proposed Revision of the Investment Budget Program in 2023
14. Recommendation of the Board of Commissioners on Approval of Coal Price and Volume for Suralaya SPP from PT Bukit Asam in 2022-2023.
15. Recommendation of the Board of Commissioners on Approval of the Assignment Request of Shareholders for the Development of PLTS projects of PLN Indonesia Power (Terapung Jatigede SoPP, Terapung Kedungombo SoPP, Terapung Gajah Mungkur SoPP, Pasuruan SoPP, and Banyuwangi SoPP).
16. Approval of the Board of Commissioners on the Proposal of the Board of Directors and Commissioners of APPA as well as the Structural Officer of Mid-Level Management of PLN Indonesia Power



17. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rancangan Rencana Jangka Panjang PLN Indonesia Power Tahun 2024 - 2028.
18. Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Manajemen Atas, Manajemen Menengah, dan Pimpinan Unit di PLN Indonesia Power (tanggal surat Direksi 3 November 2023).
19. Rekomendasi Dewan Komisaris Atas Persetujuan Setoran Modal PLN Indonesia Power ke PLN Indonesia Power Renewables dalam rangka Pengembangan Proyek PLTA Poigar-2 (2 x 15 MW).
20. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Perubahan Anggaran Dasar PLN Indonesia Power.

17. Approval of the Board of Commissioners on Long-Term Plans of PT PLN Indonesia Power from 2024 to 2028
18. Approval of the Board of Commissioners on Proposal of Upper-Level Management, Mid-Level Management, and Unit Leader at PT PLN Indonesia Power (Director Decree on Nov 3, 2023)
19. Recommendation of the Board of Commissioners on Approval of PLN Indonesia Power Capital Deposit to PLN Indonesia Power Renewables for Poigar-2 HPP (2 x 15 MW) Project Development
20. Recommendation of the Board of Commissioners on Changes in the Article of Association of PT PLN Indonesia Power

Program Pengenalan Bagi Komisaris Baru
Orientation Program for New Commissioners

Kebijakan program pengenalan Dewan Komisaris baru mengacu pada *Board Manual*. Selaras dengan kebijakan tersebut Program Pengenalan mengenai Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi Program Pengenalan meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pelaksanaan program pengenalan Dewan Komisaris dikarenakan tidak terdapat pengangkatan Dewan Komisaris di lingkungan PLN Indonesia Power.

The policy of orientation program for new member of the Board of Commissioners refers to the Board Manual. Under the policy, the Orientation Program on the Company must be given to the members of the Board of Commissioners who was appointed for the first time.

Orientation programs can include presentations, meetings, company visits, and reviews of documents or other programs that are considered appropriate to the Company in which the program is implemented. The responsibility to hold this Orientation Program is on the Corporate Secretary or anyone acting as such.

Orientation Program Material includes:
1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. Description of the Company relating to the objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information about the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors and what violates them.

Throughout 2023, there was no implementation of the orientation program of the Board of Commissioners because there was no appointment of the new member of the Board of Commissioners in the PLN Indonesia Power environment.

Program Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris
Training Program and/or Competence Expansion of the Board of Commissioners

Kebijakan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power mengacu pada *Board Manual*. Pengembangan/ Pemutakhiran Kompetensi Dewan Komisaris dirancang untuk meningkatkan kompetensi bidang pengawasan, pengarahan dan penasehatan. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan termasuk dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris.

The competence Development Policy of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power refers to the Board Manual. The Competence Development/Upgrade of the Board of Commissioners is designed to improve the competence of the field of supervision, briefing and supervision. The implementation of competence development for members of the Board of Commissioners is realized in accordance with the working plan of the Board of Commissioners and included in the key performance indicators (KPI) of the Board of Commissioners.



Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2023

Training Implementation of the Board of Commissioners in 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioner	Nama *Workshop*/Seminar Name Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Date
Wiluyo Kusdwiharto	*In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta
Djoko Siswanto	Pelatihan Metodologi dan *Quality Assurance* Internal Audit dalam rangka mendukung dan menambah value HSH PT PLN Indonesia Power Training on Internal Audit Methodology and Quality Assurance in order to support and add value to HSH of PT PLN Indonesia Power	PT PLN Indonesia Power	3 s.d 5 Mei 2023 May 03-05, 2023	Semarang
	In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta
	Konferensi Nasional 2023 Ikatan Komite Audit Indonesia 2023 National Conference of Indonesian Audit Committee Association	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association	19 Oktober 2023 October 19, 2023	Jakarta
	Training Leadership And Management Skill Aspire	Aspire Leadership	13-17 Juni 2023 June 13-17, 2023	London
Iskandar Simorangkir	Konferensi Nasional Profesi Manajemen Risiko IX dan Wisuda Sertifikasi National Conference of Risk Management Professions IX and Graduation Certification	LSP Manajemen Risiko	14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023	Yogyakarta
M.P. Dwinugroho	*Utility Working Conference and Vendor Technology Expo* (UWC 2023) Tema: *Building Resiliency in a Rapidly Changing World* Utility Working Conference and Vendor Technology Expo (UWC 2023) Theme: Building Resiliency in a Rapidly Changing World.	American Nuclear Society	6-9 Agustus 2023 August 06-09, 2023	Amerika
	In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta
Haryanto W.S.	Pelatihan Metodologi dan *Quality Assurance Internal Audit* dalam rangka mendukung dan menambah *value* HSH PT PLN Indonesia Power Training on Internal Audit Methodology and Quality Assurance in order to support and add value to HSH of PT PLN Indonesia Power	PT PLN Indonesia Power	3 s.d 5 Mei 2023 May 03-05, 2023	Semarang
	Utility Working Conference and Vendor Technology Expo (UWC 2023) Tema: *Building Resiliency in a Rapidly Changing World* Utility Working Conference and Vendor Technology Expo (UWC 2023) Theme: Building Resiliency in a Rapidly Changing World	American Nuclear Society	6-9 Agustus 2023 August 06-09, 2023	Amerika
	World Hydropower Congress 2023	World Hydropower Congress	31 Oktober 2023 -2 November 2023 October 31-November 02, 2023	Bali

Dewan Komisaris Board of Commissioner	Nama *Workshop*/Seminar Name Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Date
	In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta
Arief Budiman	Pelatihan Metodologi dan *Quality Assurance Internal Audit* dalam rangka mendukung dan menambah *value* HSH PT PLN Indonesia Power Training on Internal Audit Methodology and Quality Assurance in order to support and add value to HSH of PT PLN Indonesia Power	PT PLN Indonesia Power	3 s.d 5 Mei 2023 May 03-05, 2023	Semarang
	World Hydropower Congress 2023	World Hydropower Congress	31 Oktober 2023 -2 November 2023 October 31-November 02, 2023	Bali
	In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta
	Training Leadership and management skill aspire	Aspire Leadership	13-17 Juni June 13-17	London
Lukmanul Hakim	*In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Performance Assessment

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perusahaan. Hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris. Sesuai yang diatur dalam *Board Manual*, kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui:

1. Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris; dan
2. Penilaian kinerja hasil *assessment* GCG *part* Dewan Komisaris

The performance of the Board of Commissioners is evaluated by shareholders in the GMS based on the performance of the Company. The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners members are taken into consideration in providing direction to improve the effectiveness of the Board of Commissioners performance. As set out in the Board Manual, the criteria for the performance assessment of the Board of Commissioners are carried out through:

1. Assessment of the collegial performance of the Board of Commissioners; and
2. Assessment of performance results of GCG from the Board of Commissioners' part

Kriteria Penilaian kinerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

Penilaian kinerja Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris;
   a. *Review* dan tanggapan Rencana Perusahaan
   b. *Review* dan tanggapan Kinerja Perusahaan
   c. *Review* tindak lanjut hasil/ temuan Audit Internal/ Eksternal
   d. Memberi tanggapan tertulis/ persetujuan/ nasehat/ saran/ teguran/ kepada Direksi

The performance assessment of the Board of Commissioners uses the following criteria:

1. Criteria for the Collegial Performance Assessment of the Board of Commissioners;
   a. Review of and Response to Company Plan
   b. Review and Response of Company Performance
   c. Review of follow-up on Internal/External Audit results/findings
   d. Provision of written response/approval/advice/input/reprimand to Board of Directors

e. Menyampaikan Program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan
f. Menyampaikan pendapat/ usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/ RUPS
g. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris
h. RUPS
i. Rapat Dewan Komisaris
j. Pengenalan/Induksi/peningkatan kompetensi
k. Pengelolaan GCG

2. Penilaian kinerja hasil *assessment* GCG parameter Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 Aspek Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan
b. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisari.
c. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
d. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
e. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
f. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
g. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi
h. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
i. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
j. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
k. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.
l. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.

e. Submission of Annual Board of Commissioners Work Program and KPI
f. Submission of opinion/proposal of Board of Commissioners to Shareholders/GMS
g. Submission of report on Board of Commissioners supervisory duty
h. GMS
i. Board of Commissioners Meetings
j. Introduction/induction/competency development
k. GCG Management

2. Assessment of performance results of GCG assessment parameters in Decree of Secretary of the Ministry State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 06, 2012 on Board of Commissioners Aspects

a. Board of Commissioners conducts sustainable training/ education program.
b. Board of Commissioners makes clear description of their duties, authorities, and responsibilities and determines the factors necessary to support the implementation of the Board of Commissioners' duties.
c. Board of Commissioners gives approval for draft Company Long Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (WP&B) submitted by the Board of Directors.
d. Board of Commissioners gives directives to the Board of Directors on the implementation of Company plans and policies.
e. Board of Commissioners supervises the Board of Directors in the implementation of Company plans and policies.
f. Board of Commissioners supervises the implementation of subsidiary/joint venture management policy.
g. Board of Commissioners is involved in the candidacy of the Board of Directors members, assesses the Board of Directors' performance (individually and collegially), and proposes tantiem/ performance incentives according to applicable provisions while taking into account the Board of Directors' performance.
h. Board of Commissioners takes the measures that address any potential conflicts of interest pertaining to themselves.
i. Board of Commissioners monitors and ensures that Good Corporate Governance (GCG) practices have been applied effectively and sustainably.
j. Board of Commissioners holds effective Board of Commissioners meetings and attends the meetings according to applicable laws and regulations.
k. Board of Commissioners owns a Secretary to the Board of Commissioners to support its secretarial duties.
l. Board of Commissioners owns effective Board of Commissioners/ Supervisory Board Committees.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Performance Assessment Results

Berikut hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2023:

Here are the results of the 2023 Board of Commissioners performance assessment:

Penilaian Kinerja Kolegial Collegial Performance Assessment	Penilaian Kinerja Hasil *Assessment* GCG GCG Performance Results Assessment
92% dari target 100%. 92% of the target, 100%.	95,031 (Sangat Baik) dari target 80% (Sangat Baik) 95.031 (Very Good) of the target, 80% (Very Good)

Penilaian Kinerja Direksi
Board of Directors Performance Assessment

Secara berkala Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap Kinerja Direksi untuk dilaporkan kepada Pemegang Saham sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi. Sesuai yang diatur dalam *Board Manual*, kriteria penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui:

1. Penilaian kinerja kolegial Direksi;
2. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Direksi; dan
3. Penilaian kinerja hasil *assessment* GCG *part* Direksi.

The Board of Commissioners periodically conducts an assessment of the performance of the Board of Directors to be reported to shareholders as a performance evaluation of the Board of Directors as well as to hold them accountable for the implementation of the duties of the Board of Directors. As set out in the Board Manual, the criteria for the performance assessment of the Board of Directors are carried out through:

1. Board of Directors Collegial Performance Assessment
2. Individual performance assessments of each member of the Board of Directors; and
3. Assessment of performance results of GCG from the Board of Directors' part

Kriteria Penilaian kinerja Direksi
Board of Directors Performance Assessment Criteria

Kriteria penilaian kinerja Direksi, baik secara kolegial maupun masing-masing individu, menggunakan kriteria yang diatur dalam KPI 2023 Direksi sebagai berikut:

The Board of Directors performance assessment, both collegial and individual, uses the criteria set out in the 2023 Board of Directors' KPI as follows:

Jabatan Position	Kriteria Penilaian Criteria Assessment	
Kolegial Direksi dan Direktur Utama **Board of Directors and President Director Collegially**	**A. *Economic and Social Value* meliputi indikator:** EBITDA; Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkit Pembangkit; ROIC; *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) PLTU dan Non PLTU Pembangkit Jawa Bali; *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) PLTU dan Non PLTU Pembangkit Luar Jawa Bali; *Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU dan Non PLTU Pembangkit Jawa Bali; *Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU dan Non PLTU Pembangkit Luar Jawa Bali; dan *Specific Fuel Consumption* (SFC)	A. Economic and Social Value includes below indicators: EBITDA; Power Plant Production Cost; ROIC; Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Steam Power Plants and Non-Steam Power Plants in Java-Bali; Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Steam Power Plants and Non-Steam Power Plants outside Java-Bali; Equivalent Availability Factor (EAF) of Steam Power Plants and Non-Steam Power Plants in Java-Bali; Equivalent Availability Factor (EAF) of Steam Power Plants and Non-Steam Power Plants outside Java-Bali; and Specific Fuel Consumption (SFC)
	B. *Business Model Innovation* meliputi indikator: Pemenuhan *Risk Maturity Index* (RMI); Pendapatan *Beyond* kWh (Pendapatan dari Luar PLN *Group* dan Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri); Sinergi Antar *Sub Holding* & Anak Perusahaan lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN); *Share of* EBT *Production* (Bauran Energi EBT); *Carbon Emission Reduction*; dan *Strategic Partnership* GenCo.	**B. Business Model Innovation includes below indicators:** Risk Maturity Index (RMI) Compliance; Earnings from Beyond kWh (Earnings from Beyond PLN Group and Number of Business Contracts Abroad); Synergy among Sub-holdings and other Subsidiaries (excluding synergy among PLN Units); Share of NRE Production (NRE Mix); Carbon Emission Reduction; and GenCo Strategic Partnerships.
	C. *Technology Leadership* meliputi indikator: *Digital Power Plant Implementation; Value Creation* (Efisiensi Biaya Pemeliharaan dan Efisiensi *Net Plant Heat Rate*); dan Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara	**C. Technology Leadership includes below indicators:** Digital Power Plant Implementation; Value Creation (Efficiencies of Maintenance Cost and Net Plant Heat Rate); and Guarantee of Coal Supply as Primary Energy
	D. *Energize Investment* meliputi indikator: EPC *project completion; Total of units with* PROPER (*Beyond Compliance*); dan Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023	**D. Energize Investment includes below indicators:** EPC project completion; Total of units with PROPER (Beyond Compliance); and Control of Investment Budget Utilization according to WP&B 2023
	E. *Unleash Talent* meliputi indikator: Pengembangan Talenta Pegawai (*Talent* Milenial dan Perempuan dalam *Nominated Talent*); dan *Risk and Digital Talent* (Sertifikasi Manajemen Risiko Pegawai dan Program *Making digital talent*)	**E. Unleash Talent includes below indicators:** Employee Talent Development (Millennial and Female Talents in Nominated Talents); and Risk and Digital Talents (Employee Risk Management Certification and "Making Digital Talent" Program)
	F. *Compliance* meliputi indikator: *Compliance* (GCG, *Safety, Security & Environment*, SPI,*Reporting*)	**F. Compliance includes below indicators:** Compliance (GCG, Safety, Security & Environment, Internal Control Unit, Reporting)

Jabatan Position	Kriteria Penilaian Criteria Assessment	
Direktur Operasi Pembangkit Batubara **Director of Coal Power Plant Operations**	**A. *Economic and Social Value* meliputi indikator:** EBITDA; BPP PLTU Batubara; ROIC; *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Pembangkit PLTU Batubara Jawa Bali dan Luar Jawa Bali; *Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit PLTU Batubara Jawa Bali dan Luar Jawa Bali; dan SFC Batubara **B. *Business Model Innovation* meliputi indikator:** *Maturity Level* ERM; Sinergi Antar *Sub Holding* & Anak Perusahaan lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN); *Carbon Emission Reduction*; dan Pendapatan dari Luar PLN Group **C. *Technology Leadership* meliputi indikator:** *Digital Power Plant Implementation; Value Creation* (Efisiensi Biaya Pemeliharaan dan Efisiensi *Net Plant Heat Rate*); Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara; *Cofiring* 100% di Unit Sanggau dan Sintang **D. *Energize Investment* meliputi indikator:** Tingkat Proper unit (*Beyond Compliance*); dan Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023 **E. *Unleash Talent*:** #NA **F. *Compliance* meliputi indikator:** Kepatuhan (GCG, CSR, *Safety, Security & Environment*, SPI, *Reporting*)	**A. Economic and Social Value includes below indicators:** EBITDA; Coal SPP Production Cost; ROIC; Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Coal SPP in and outside Java-Bali; Equivalent Availability Factor (EAF) of Coal SPP in and outside Java-Bali; and Coal SFC **B. Business Model Innovation includes below indicators:** ERM Maturity Level; Synergy among Sub-holdings and other Subsidiaries (excluding synergy among PLN Units); Carbon Emission Reduction; and Earnings from Beyond PLN Group **C. Technology Leadership includes below indicators:** Digital Power Plant Implementation; Value Creation (Efficiencies of Maintenance Cost and Net Plant Heat Rate); Guarantee of Coal Supply as Primary Energy; 100% Cofiring in Sanggau and Sintang Units **D. Energize Investment includes below indicators:** Unit Proper Rating (Beyond Compliance); and Control of Investment Budget Utilization according to WP&B 2023 **E. Unleash Talent:** #NA **F. Compliance includes below indicators:** Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Control Unit, Reporting)
Direktur Operasi Pembangkit Gas **Director of Gas Power Plant Operations**	**A. *Economic and Social Value* meliputi indikator:** EBITDA; BPP Non PLTU Batubara; ROIC; *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Pembangkit Non PLTU Batubara Jawa Bali dan Luar Jawa Bali; *Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Non PLTU Batubara Jawa Bali dan Luar Jawa Bali; SFC Gas dan SFC BBM **B. *Business Model Innovation* meliputi indikator:** *Maturity Level* ERM; Sinergi Antar *Subholding* & Anak Perusahaan lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN); *Share of* EBT *Production* (Bauran Energi EBT); dan Pendapatan dari Luar PLN Group **C. *Technology Leadership* meliputi indikator:** *Digital Power Plant Implementation; Value Creation* Efisiensi Biaya Pemeliharaan Pembangkit; dan *Cofiring* Hidrogen *20%* **D. *Energize Investment* meliputi indikator:** Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023; dan *Total of units with* PROPER (*Beyond Compliance*) **E. *Unleash Talent*:** #NA **F. *Compliance* meliputi indikator:** Kepatuhan (GCG, CSR, *Safety, Security & Environment*, SPI, *Reporting*)	**A. Economic and Social Value includes below indicators:** EBITDA; Non-Coal SPP Production Cost; ROIC; Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Non-Coal SPP in and outside Java and Bali; Equivalent Availability Factor (EAF) of Non-Coal SPP in and outside Java and Bali; and Gas and Oil SFC **B. Business Model Innovation includes below indicators:** ERM Maturity Level; Synergy among Subholdings and other Subsidiaries (excluding synergy among PLN Units); Share of NRE Production (NRE Mix); and Earnings from Beyond PLN Group **C. Technology Leadership includes below indicators:** Digital Power Plant Implementation; Value Creation (Efficiency of Power Plant Maintenance Cost); and 20% Hydrogen Cofiring **D. Energize Investment includes below indicators:** Control of Investment Budget Utilization according to WP&B 2023Pen; and Total of Units with PROPER (Beyond Compliance) **E. Unleash Talent:** #NA **F. Compliance includes below indicators:** Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Control Unit, Reporting)
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga **Director of Business Development and Commerce**	**A. *Economic and Social Value* meliputi indikator:** EBITDA; dan ROIC **B. *Business Model Innovation* meliputi indikator:** *Maturity Level* ERM; Pendapatan *Beyond* kWh (Pendapatan dari luar PLN *Group*; Jumlah Kontrak Bisnis di luar Negeri; Jumlah Kontrak Non PLN *Group*); Sinergi Antar *Sub Holding* & Anak Perusahaan lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN); *Strategic Partnership* GenCo; dan Manufaktur *Solar* PV Untuk Pemenuhan TKDN **C. *Technology Leadership* meliputi indikator:** #NA **D. *Energize Investment* meliputi indikator:** Inisiatif Pengembangan Pembangkit EBT; dan Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023 **E. *Unleash Talent*:** #NA **F. *Compliance* meliputi indikator:** Kepatuhan (GCG, CSR, *Safety, Security & Environment*, SPI, *Reporting*)	**A. Economic and Social Value includes below indicators:** EBITDA; and ROIC **B. Business Model Innovation includes below indicators:** ERM Maturity Level; Earnings from Beyond kWh (Earnings from Beyond PLN Group; Number of Business Contracts Abroad; Number of Non-PLN Group Contracts); Synergy among Sub-holdings and other Subsidiaries (excluding synergy among PLN Units); GenCo Strategic Partnerships; and Solar PV Manufacture for TKDN Compliance **C. Technology Leadership includes below indicators:** #NA **D. Energize Investment includes below indicators:** NRE Development Initiatives; and Control of Investment Budget Utilization according to WP&B 2023 **E. Unleash Talent** #NA **F. Compliance includes below indicators:** Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Control Unit, Reporting)

Jabatan Position	Kriteria Penilaian Criteria Assessment	
Direktur Keuangan Director of Finance	**A. *Economic and Social Value* meliputi indikator:** EBITDA; BPP Korporat; dan ROIC **B. *Business Model Innovation* meliputi indikator:** *Maturity Level* ERM; Pendapatan *Beyond* kWh (Pendapatan dari Luar PLN *Group* dan Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri); dan Sinergi Antar *Subholding* & Anak Perusahaan lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN) **C. *Technology Leadership* meliputi indikator:** *Value Creation* Efisiensi Biaya Pemeliharaan Pembangkit; dan *Digital Power Plant Implementation* **D. *Energize Investment* meliputi indikator:** Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023 **E. *Unleash Talent*:** #NA **F. *Compliance* meliputi indikator:** Kepatuhan (GCG, CSR, *Safety, Security & Environment*, SPI, *Reporting*)	**A. Economic and Social Value includes below indicators:** EBITDA; Corporate Production Cost; and ROIC **B. Business Model Innovation includes below indicators:** ERM Maturity Level; Earnings from Beyond kWh (Earnings from Beyond PLN Group and Number of Business Contracts Abroad); and Synergy among Sub-holdings and other Subsidiaries (excluding synergy among PLN Units) **C. Technology Leadership includes below indicators:** Value Creation (Efficiency of Power Plant Maintenance Cost); and Digital Power Plant Implementation **D. Energize Investment includes below indicators:** Control of Investment Budget Utilization according to WP&B 2023 **E. Unleash Talent** #NA **F. Compliance includes below indicators:** Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Control Unit, Reporting)
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	**A. *Economic and Social Value* meliputi indikator:** EBITDA; EFOR Pembangkit Korporat; Efektivitas Biaya Kepegawaian; dan Efektivitas Biaya Administrasi **B. *Business Model Innovation* meliputi indikator:** *Maturity Level* ERM; *Carbon Emission Reduction*; dan Sinergi Antar *Subholding* & Anak Perusahaan Lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN) **C. *Technology Leadership* meliputi indikator:** #NA **D. *Energize Investment* meliputi indikator:** Tingkat Proper unit (*Beyond Compliance*); dan Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023 **E. *Unleash Talent*:** *Human Capital Readiness; Organization Capital readiness*; Pengembangan Talenta Pegawai (*Talent* Milenial dan Perempuan dalam *Nominated Talent*); dan *Risk and Digital Talent* (sertifikasi Manajemen Risiko Pegawai dan Program *Making Digital Talent*) **F. *Compliance* meliputi indikator:** Kepatuhan (GCG, CSR, *Safety, Security & Environment*, SPI, *Reporting*)	**A. Economic and Social Value includes below indicators:** EBITDA; EFOR of Corporate Power Plants; Effectiveness of Employment Cost; and Effectiveness of Administration Cost **B. Business Model Innovation includes below indicators:** ERM Maturity Level; Carbon Emission Reduction; and Synergy among Sub-holdings and other Subsidiaries (excluding synergy among PLN Units) **C. Technology Leadership** #NA **D. Energize Investment includes below indicators:** Unit Proper Rating (Beyond Compliance); and Control of Investment Budget Utilization according to WP&B 2023 **E. Unleash Talent includes below indicators:** Human Capital Readiness; Organization Capital Readiness; Employee Talent Development (Millennial and Female Talents in Nominated Talents); and Risk and Digital Talents (Employee Risk Management Certification and "Making Digital Talent" Program) **F. Compliance includes below indicators:** Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Control Unit, Reporting)

Penilaian kinerja hasil *assessment* GCG parameter Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 Aspek Direksi

1. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas
3. Direksi menyusun perencanaan perusahaan.
4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.
5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
6. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholders*.
8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
9. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
10. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Assessment of performance results of GCG assessment parameters in Decree of Secretary of the Ministry State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 06, 2012 on Board of Directors Aspects

1. Board of Directors conducts sustainable training/education program.
2. Board of Directors makes clear description of their duties, authorities, and responsibilities.
3. Board of Directors performs the Company planning.
4. Board of Directors is involved in meeting the Company's performance target.
5. Board of Directors performs operational and financial control over the implementation of Company plans and policies.
6. Board of Directors manages the Company in accordance with applicable laws and regulations and the Articles of Association.
7. Board of Directors establishes relations that bring added value for the Company and the stakeholders.
8. Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest between Board of Directors members and the Management under the Board of Directors.
9 Board of Directors makes sure that the Company performs the disclosure of information and communication in accordance with applicable laws and regulations and delivers information to the Board of Commissioners and the Shareholders in timely manners.
10. Board of Directors holds Board of Directors meetings and attends Board of Commissioners meetings according to the laws and regulations.



11. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
12. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.
13. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Board of Directors has the obligation to run a quality and effective internal supervision.
12. Board of Directors runs a quality and effective corporate secretary function.
13. Board of Directors holds Annual GMS and other GMS according to the laws and regulations.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi
Board of Directors Performance Assessment Results

Berikut hasil penilaian kinerja Direksi tahun 2023:

Here are the results of the 2023 Board of Directors performance assessment:

Penilaian Kinerja Kolegial Collegial Performance Assessment	Penilaian Kinerja Hasil *Assessment* GCG GCG Performance Results Assessment
103,40% dari target 100%.	96,882% (Sangat Baik) dari Target 94,991% (Sangat Baik) 96,882% (Very Good) dari Target 94,991% (Very Good)

Adapun hasil penilaian kinerja Direksi secara individual adalah sebagai berikut:

The results of the Board of Directors performance assessment individually are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Skor Pencapaian KPI KPI Achievement Score
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	103,40 dari target 100 103.40 out of 100 target
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	100,09 dari Target 100 100.09 out of 100 target
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	103,09 dari Target 100 103.09 out of 100 target
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	99,66 dari Target 100 99.66 out of 100 target
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	105,24 dari Target 100 105.24 out of 100 target
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	104,93 dari Target 100 104.93 out of 100 target

Penilaian Kinerja Masing-Masing Komite Dewan Komisaris
Performance Assessment of Each Committee under the Board of Commissioners

Salah satu tugas Dewan Komisaris berdasarkan *Board Manual* PLN Indonesia Power, Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite dan Program Kerja Komite. Kinerja Komite Dewan Komisaris dievaluasi oleh Dewan Komisaris yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite dengan parameter penilaian sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim
2. Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim
4. Kerjasama dalam Tim
5. Mutu dan Kualitas Konsep

Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada uraian bagian Komite di Bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

According to the PLN Indonesia Power Manual Board, one of the duties of the Board of Commissioners is to conduct a performance assessment of the Board of Commissioners Committees. This assessment is determined based on the duties and responsibilities contained in the Committee Charter and Committee Work Program. The performances of the Board of Commissioners Committees are evaluated by the Board of Commissioners quarterly based on the actual and completed work programs as contained in the Committees' Work Plan and Budget, using the following assessment parameters:

1. Contribution to Team target achievement
2. Number of Reviews, Analyses, and Recommendations
3. Team Engagement
4. Team Collaboration
5. Quality of Concept

Further explanation regarding the performance assessment of Committees under the Board of Commissioners can be seen in the description in the Committees Under the Board of Commissioners section in this Annual Report.



Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Work Relations Between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan Perusahaan yang baik adalah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi agar masing-masing organ Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik Perusahaan.

One of the keys to good Company management is a close working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. That way, each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners has a close, open, constructive, professional and mutually trusting working relationship for the Company's best interests.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi PLN Indonesia Power diatur dalam *Board Manual* Perusahaan. Ruang lingkup hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam *Board Manual*, mencakup:

1. Perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
2. Perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;
3. Pertemuan formal dan informal Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Komunikasi formal dan informal Dewan Komisaris dan Direksi.

The work relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors are arranged in the Board Manual. The scope of work relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors has been accommodated in the Board Manual, as follows:

1. Board of Directors' actions requiring written approval from the Board of Commissioners;
2. Board of Directors' actions requiring written response from the Board of Commissioners and GMS approval;
3. Formal and informal meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
4. Formal and informal communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi
Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam prinsip GCG.

Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors is the responsibility of the Nomination and Remuneration Committee for regenerating and maintaining leadership continuity in the future. To deliver a transparent, accountable, and responsible process and mechanism of Board of Directors and Board of Commissioners' selection and replacement, professionalism, as set out in GCG principles, must be adhered to during appointment and dismissal of Board members.

Dengan pendekatan yang cermat dan berbasis pada prinsip-prinsip GCG, proses ini bukan hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga menjadi wujud komitmen perusahaan untuk mengelola kepemimpinan dengan bijaksana, memastikan adanya inovasi dan keberlanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan.

With a thorough approached based on GCG principles, this process is a formal instrument as well as the Company's commitment to manage leadership in a thoughtful manner. It also ensures innovation and sustainability in addition to provide positive contribution towards corporate values in overall.

Kebijakan dasar terkait Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris di lingkup Perusahaan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan serta Salinan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023. Adapun mekanisme suksesi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, yaitu PT PLN (Persero). Untuk memastikan integritas dan profesionalisme di bidangnya, seluruh calon Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Direksi terpilih diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

This nomination is performed in accordance with the Articles of Association and Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Capital of SOEs dated March 20, 2023. The succession of the Board of Directors and Board of Commissioners is sought according to the provisions set out by PT PLN (Persero) as the Shareholder. To ensure integrity and professionalism in each of their areas, all Director candidates must take fit and proper test as stipulated by applicable laws and regulations. Subsequently, selected Directors are appointed by the Shareholders during GMS.

Berikut proses alur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PLN Indonesia Power:

The appointment procedure of the Board of Directors and Board of Commissioners members are outlined as follows:



Pemegang Saham (Direktur Human Capital dan Management)

Melakukan pengajuan calon BOD-BOC kepada *Talent Committee* PT PLN (Persero)

Shareholder (Director of Human Capital and Management)

Proposing BOD-BOC candidates to the Talent Committee of PT PLN (Persero)

***Talent Committee* PT PLN (Persero)**

melakukan Seleksi Calon Direksi/Komisaris AP dan menyampaikan Berita Acara Hasil Selekasi (*Long list & short list* calon Direksi/Komisaris Anak Perusahaan kepada Direktur Human Capital dan Management

Talent Committee of PT PLN (Persero)

Screening the candidates and prepare the Selection Result Minutes (long-listed & short-listed candidates) to the Director of Human Capital and Management

Direktur Human Capital dan Management

menyampaikan laporan hasil seleksi *Long list & short list* calon Direksi/komisaris Anak Perusahaan (AP) kepada Direktur Utama PT PLN (Persero)

Director of Human Capital and Management

Presenting reports of long-listed & short-listed selection result to the President Director of PT PLN (Persero)

Direktur Utama PT PLN (Persero)

mengajukan hasil calon terpilih kepada Dewan Komisaris PT PLN (Persero)melalui surat pengajuan Direksi/ Komisaris AP

President Director of PT PLN (Persero)

Proposing the selected candidates to the Board of Commissioners through the proposal letter of the Board of Directors and Board of Commissioners

Dewan Komisaris

Meninjau dan memberikan persetujuan calon terpilih dengan menyampaikan surat persetujuan kepada Direktur Utama

Board of Commissioners

Reviewing and approving the selected candidates through the letter of approval to the President Director

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Kebijakan Pemegang Saham;
3. Surat PT PLN (Persero) No.4296/MNJ.01.02/F01000000/2023-R tanggal 2 agustus 2023 perihal penetapan penggunaan laba bersih tahun 2022, penetapan tantiem 2022 dan penghasilan 2023; dan
4. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023.

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors conforms to:

1. Articles of Association;
2. Shareholder Policy;
3. Letter of PT PLN (Persero) No. 4296/MNJ.01.02/F01000000/2023-R dated August 2, 2023 on the stipulation of 2022 net profit appropriation, 2022 tantiem, and 2023 revenue; and
4. Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Capital of SOEs dated March 20, 2023.

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Procedures and Mechanisms of Proposal up to the Determination of Remuneration of BOC and BOD

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023 dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh Pemegang Saham serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana yang tercantum pada Surat Dewan Komisaris No.0048/451/DK-PLNIP/2023-R tanggal 10 Juni 2023 perihal rekomendasi usulan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus pegawai dan penyesuaian honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023.

Remuneration for BOC and BOD in 2023 is based on the formula set out by the Shareholders and has been reviewed by the BOC as outlined in the Letter of BOC No. 0048/451/DK-PLNIP/2023-R dated June 10, 2023 on the recommendation of tantiem proposal for BOC and BOD, bonus for employees, and honorarium adjustment for BOC and BOD in 2023.

Kajian remunerasi telah berdasarkan pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan sebagaimana tercantum pada Sidang Komite Evaluasi Usulan Tantiem bonus dan remunerasi. Dan terdapat kajian yang dilakukan oleh Pihak Eksternal yaitu Korn Ferry terkait tantiem Dewan Komisaris dan Direksi disesuaikan pada persentil p15 sampai p25 market.

The review of the remuneration was performed based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee as discussed in the Committee Meeting on the Evaluation of Tantiem, Bonus, and Remuneration Proposal. There was also a review by Korn Ferry as the External Party related to the tantiem for BOC and BOD, where it was adjusted to the market percentile of p15 to p25.

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Berikut prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi:

The amount of remuneration for BOC and BOD is set out by the Shareholders at the GMS. The procedure of determination of remuneration for BOC and BOD is outlined as follows:



Pengusulan Remunerasi

Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi kemudian mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris.

Remuneration Proposal

BOC sends a request to the third party (consultant) to review the remuneration, then submits the remuneration proposal to the BOC.

Kajian Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kajian dan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal usulan remunerasi yang diajukan Direksi.

Remuneration Review

The Nomination and Remuneration Committee reviews and makes recommendation to the BOC on the remuneration proposed by the BOD.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya diusulkan kepada RUPS

Board of Commissioners Recommendations

Board of Commissioners reviews the Nomination and Remuneration Committee's recommendation to be proposed to GMS

Penetapan Remunerasi

RUPS memberikan pengesahan atas ketetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Remuneration Determination

GMS ratifies the remuneration Board of Commissioners and Board of Directors

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indicators for Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sejalan dengan Surat PT PLN (Persero) No.4296/MNJ.01.02/F01000000/2023-R tanggal 2 agustus 2023 perihal penetapan penggunaan laba bersih tahun 2022, penetapan tantiem 2022 dan penghasilan 2023, penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan faktor (indikator) pencapaian target, tingkat kesehatan, *salary survey* dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*) yang berlaku umum dalam industri sejenis dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

In accordance with the Letter of PLN (Persero) No.4296/MNJ.01.02/F01000000/2023-R dated August 2, 2023 on the stipulation of 2022 net profit appropriation, 2022 tantiem, and 2023 revenue, the stipulation of the remuneration for BOC and BOD has taken into account the target achievement, soundness level, salary survey, financial capability, and other relevant factors (merit system) generally applicable in the similar industry, in line with the Company's long-term interest and sustainable value creation.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Structure of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan berdasarkan Surat PT PLN (Persero) No.4296/MNJ.01.02/F01000000/2023-R tanggal 2 Agustus 2023 perihal penetapan penggunaan laba bersih tahun 2022, penetapan tantiem 2022 dan penghasilan 2023, dengan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

Remuneration for every member of BOC and BOD is provided based on the Letter of PT PLN (Persero) No. 4296/MNJ.01.02/F01000000/2023-R dated August 2, 2023 on the stipulation of 2022 net profit appropriation, 2022 tantiem, 2023 revenue, with the following remuneration structure:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Table of Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

Jabatan Position	Keterangan Description	
Dewan Komisaris Board of Commissioner	**STRUKTUR REMUNERASI JANGKA PENDEK** 1. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Direktur Utama sedangkan Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Komisaris Utama. 2. Tunjangan yang terdiri dari: - Tunjangan Transportasi sebesar 20% dari honorarium. - Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari Honorarium dalam satu tahun. - Tunjangan Hari Raya. 3. Fasilitas yang terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, yaitu Rawat jalan dan obat, rawat inap, obat-obatan dan *general check up* 1 kali setahun termasuk kepada seorang istri / suami dan maksimal 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau biaya pengobatan. - Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.	**SHORT-TERM REMUNERATION STRUCTURE** 1. The honorarium for the President Commissioner amounts to 45% of President Director's honorarium, while the honorarium for the Commissioners amounts to 90% of President Commissioner's honorarium. 2. The allowances include: - Transport allowance amounting to 20% of the honorarium. - Post-employment insurance amounting to maximum 25% of 1-year worth honorarium. - Religious Holiday Allowance 3. The facilities include: - Health care facilities, i.e. outpatient care, inpatient care, medications, and general check-up once in a year, including for one spouse and maximum 3 unemployed and unmarried children under 25 years old. Provided as health care insurance or medical expenses. - Legal assistance, for the actions/performances for and on behalf of their position that pertain to the intents and purposes and business activities of the Company.

Jabatan Position	Keterangan Description	
	4. Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran untuk Komisaris Utama yaitu 45% dari Direktur Utama dan Anggota bagi anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama. **STRUKTUR REMUNERASI JANGKA PANJANG** Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power belum menerapkan skema kompensasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan dalam jangka Panjang.	4. The tantiem is determined by the Shareholders. For the President Commissioner, the amount is 45% of President Director's honorarium. For the Commissioners, the amount is 90% of President Commissioner's honorarium. **LONG-TERM REMUNERATION STRUCTURE** In 2023, PLN Indonesia Power hasn't applied the compensation scheme to the Board of Commissioners for the long term.
Direksi Board of Director	**STRUKTUR REMUNERASI JANGKA PENDEK** 1. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp251.000.000 per bulan. Gaji Anggota Direktur Lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama. 2. Tunjangan, terdiri dari: - Tunjangan Perumahan yang diberikan dalam bentuk rumah jabatan. - Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari gaji dalam satu tahun. - Tunjangan Hari Raya. 3. Fasilitas, terdiri dari: - Fasilitas Kendaraan Dinas 1 (satu) Unit Mobil beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan - Fasilitas Kesehatan, yaitu Rawat jalan dan obat, rawat inap, obat-obatan dan *general check up 1* (satu) kali setahun termasuk kepada seorang istri / suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau biaya pengobatan. - Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. 4. Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran Anggota Direktur Lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama. **STRUKTUR REMUNERASI JANGKA PANJANG** Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power belum menerapkan skema kompensasi kepada Direksi Perusahaan dalam jangka panjang.	Short-Term Remuneration Structure 1. The salary for the President Director is Rp251,000,000 per month. The salary for the other directors is 85% of such a number. 2. The allowances include: - Housing allowance in the form of official residence. - Post-employment insurance amounting to maximum 25% of 1-year worth salary. - Religious Holiday Allowance 3. The facilities include: - 1 (one) unit of Official Vehicle, completed with the maintenance and operational expenses by taking into account the financial status of the Company. - Health care facilities, i.e. outpatient care, inpatient care, medications, and general check-up once in a year, including for one spouse and maximum 3 unemployed and unmarried children under 25 years old. Provided as health care insurance or medical expenses. - Legal assistance, for the actions/performances for and on behalf of their position that pertain to the intents and purposes and business activities of the Company. 4. The tantiem is determined by the Shareholders, i.e. 85% of the tantiem for the President Director. **LONG-TERM REMUNERATION STRUCTURE** In 2023, PLN Indonesia Power hasn't applied the compensation scheme to the Board of Directors for the long term.

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Components of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Board of Commissioners Member	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun (Rupiah) Amount Received in 1 Year (Rupiah)
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS		
Honorarium	6	8.782.992.000
Tantiem	6	2.300.399.999
Tunjangan Allowance	6	423.562.500
Jumlah Total	**6**	**11.506.954.449**
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		
Honorarium	6	16.143.000.000
Tantiem	6	5.174.545.453
Tunjangan Allowance	6	1.317.750.000
Jumlah Total	**6**	**22.635.295.453**
Total Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 2023 **Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023**	**12**	**34.142.249.952**



Jumlah Remunerasi yang Diterima Dewan Komisaris Tahun 2023
Total Remuneration Received by the Board of Commissioners in 2023

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	2023
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	
Di Atas 1 miliar Above Rp1 billion	6
Di antara 500 juta s/d 1 miliar Between Rp500 million and Rp1 billion	-
Di Bawah 500 juta Under Rp500 million	-
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
Di Atas 1 miliar Above Rp1 billion	6
Di antara 500 juta s/d 1 miliar Between Rp500 million and Rp1 billion	-
Di Bawah 500 juta Under Rp500 million	-

Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Tahun 2023
Remuneration for Each Member of the Board of Commissioners in 2023

Nama Dewan Komisaris Name of Commissioner	Jabatan Position	Honor per Bulan Monthly Salary	Tunjangan Transport Transport Allowance	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem	THR Religious Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan di 2023 Tenure in 2023
Wiluyo Kusdwiharto	Komisaris Utama President Commissioner	*	*	*	*	*	*	12
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	101.655.000	20.331.000	121.986.000	777.600.000	101.655.000	**2.343.087.000**	12
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	101.655.000	20.331.000	121.986.000	777.600.000	101.655.000	**2.343.087.000**	12
Muhammad Priharto Dwinugroho	Komisaris Commissioner	101.655.000	20.331.000	121.986.000	217.963.636	59.298.750	**1.741.094.386**	12
Haryanto W.S.	Komisaris Commissioner	101.655.000	20.331.000	121.986.000	217.963.636	59.298.750	**1.741.094.386**	12
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	101.655.000	20.331.000	121.986.000	91.309.091	42.356.250	**1.597.497.341**	12
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	101.655.000	20.331.000	121.986.000	217.963.636	59.298.750	**1.741.094.386**	12

Keterangan:
* Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tanggal 21 Oktober 2022 menetapkan bahwa untuk menjaga *fiduciary liabilities*, Anggota Dewan Komisaris Perusahaan juga merangkap sebagai Direksi PT PLN (Persero) tidak diberikan Penghasilan kecuali Fasilitas Bantuan Hukum.

Remarks:
* In accordance with the resolutions in lieu of general meetings of shareholders (Circular) of PT PLN Indonesia Power dated October 21, 2022, to maintain fiduciary liabilities, Commissioners holding concurrent position as a Director at PT PLN (Persero) are not provided with any payment, but Legal Assistance only.

Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi Tahun 2023
Remuneration for Each Member of the Board of Directors in 2023

Nama Direksi Name of Director	Jabatan Position	Gaji per Bulan Monthly Salary	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem	THR Religious Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan di 2023 Tenure in 2023
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	251.000.000	27.500.000[1]	278.500.000	538.181.818	251.000.000	**4.131.181.818**	12
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal-Fired Power Plant Operations	213.350.000	[2]	213.350.000	1.174.545.455	[3]	**1.814.595.455**	3

Nama Direksi Name of Director	Jabatan Position	Gaji per Bulan Monthly Salary	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem	THR Religious Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan di 2023 Tenure in 2023
Rachmad Handoko	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	213.350.000	[2]	213.350.000	457.454.545	213.350.000	**2.590.954.545**	9
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	213.350.000	[2]	213.350.000	457.454.545	213.350.000	**3.231.004.545**	12
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	213.350.000	[2]	213.350.000	457.454.545	213.350.000	**3.231.004.545**	12
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	213.350.000	[2]	213.350.000	1.632.000.000	213.350.000	**4.405.550.000**	12
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	213.350.000	[2]	213.350.000	457.454.545	213.350.000	**3.231.004.545**	12

Keterangan:
1 Sdr. Edwin Nugraha Putra mendapatkan tunjangan perumahan dikarenakan beliau tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas.
2 Mendapatkan fasilitas rumah dinas
3 Mulai menjabat sejak 19 September 2023

Remarks:
1 Mr. Edwin Nugraha Putra received housing allowance as he is not provided with official house facility.
2 Received official house facility
3 Assuming the role since September 19, 2023

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham
Non-Performance Bonus and Stock Option

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat Bonus Non Kinerja dan penawaran Opsi Saham yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PLN Indonesia Power.

Until the reporting period, there were no Non-Performance Bonus provided for and Stock Option offered to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Executives of PLN Indonesia Power.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Policy on Provision of Long-Term Compensation Based on Performance

Sampai akhir tahun 2023, PT PLN Indonesia Power belum menerapkan skema kompensasi berbasis kinerja jangka Panjang untuk manajemen dan karyawan karena saham PT PLN Indonesia Power sebanyak 99,99% dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN. Oleh karena itu, PLN Indonesia Power tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan tidak ada kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/ MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/ atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

Until the end of 2023, PT PLN Indonesia Power has not yet implemented a long-term performance-based compensation scheme for the Management and employees considering that the Company's shares are 99.99% owned by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and 0.01% are owned by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN. Therefore, there are no stocks held by the employees through the Employee Stock Option Plan (ESOP) or by the Management through the Management Stock Option Plan (MSOP) in PLN Indonesia Power. In addition, there is no information on the number of ESOP/MSOP shares and their realization, terms, employee and/or management eligibility requirements, and exercise price.



Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Compositions

Komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang ditunjuk RUPS memiliki keberagaman dari segi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Selaras dengan peraturan tersebut, penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PLN Indonesia Power dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan kepada semua orang yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras dan agama.

Berikut merupakan ringkasan keberagaman anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan tahun 2023.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed by the GMS is diverse in terms of age, gender, educational background, and experience necessary to support the implementation of duties and responsibilities of each member. The requirements for appointing the members of these Boards have taken into consideration the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/06/2020 on Human Resource Organs at SOEs.

In line with the regulation, the stipulation of the Board of Commissioners and Board of Directors at PLN Indonesia Power takes into account the Company's needs and complexity. The Company provides opportunities for all qualified parties to become the members of the Board of Commissioners and Board of Directors regardless of their gender, race, and religion.

The following table summarizes the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power Tahun 2023
Diversity of PLN Indonesia Power Board of Commissioners Composition in 2023

Jabatan **Position**	Terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen 1 (one) Independent Commissioner
Usia **Age**	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang cukup produktif dan tingkat kematangan (*mature*), yaitu 49 tahun - 64 tahun. Within productive and mature age of 49-64 years old.
Pendidikan **Education**	Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris meliputi tingkat Sarjana, Magister dan doktor dengan berbagai bidang pendidikan seperti Ekonomi, Teknik, Manajemen bisnis, Hubungan Internasional serta Listrik dan Kimia. Ranging from Bachelor's, Master's, and Doctorate degrees in Economics, Engineering, Business Management, International Relationship, Electrics, and Chemistry.
Pengalaman Kerja **Work Experience**	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain menjadi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Ketenagalistrikan, Pembangkit, Asuransi, Minyak dan Gas Bumi, Energi dan SDM, Keagamaan dan Politik. Various professional history, i.e. Members of Board of Commissioners and/or Board of Directors, Officers, and/or Senior Executives in Finance, Electricity, Power Generation, Insurance, Oil and Gas, Energy, Human Resource, Religious Affairs, and Politics.

Keberagaman Komposisi Direksi PLN Indonesia Power Tahun 2023
Diversity of PLN Indonesia Power Board of Directors Composition in 2023

Usia **Age**	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang cukup produktif dan tingkat kematangan (*mature*), yaitu 47 tahun - 56 tahun. Within productive age of 47-56 years old.
Jenis Kelamin **Gender**	Terdapat 1 (satu) orang Direksi yang berjenis kelamin wanita dari total 6 (enam) orang anggota Direksi. 1 (one) female member out of 6 (six) members.
Pendidikan **Education**	Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana dan Magister dengan berbagai bidang Teknik seperti Elektro Teknik Mesin, Ekonomi Akuntansi, Psikolog Magister Teknologi Informasi, Teknik, Manajemen Bisnis, SDM, Psikologi, Ekonomi dan Manajemen Bidang Lainnya Ranging from Bachelor's and Master's degrees in Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Accounting, Psychology, IT, Business Management, Human Resource, and other managerial fields.
Pengalaman Kerja **Work Experience**	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain menjadi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pejabat atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Ketenagalistrikan, Manajemen Risiko, Pembangkit, Manajemen Mutu dan Kinerja, Pemasaran, SDM, Operasi dan Lainnya. Various professional history, i.e. Members of Board of Commissioners and/or Board of Directors, Officers, and/or Senior Executives or other key positions in Finance, Electricity, Power Generation, Risk Management, Power Generation, Quality and Performance Management, Marketing, Human Resource, Operation, and many more.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Under the Board of Commissioners

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan Sebagai wujud kepatuhan PLN Indonesia Power terhadap Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/3 /2023 tentang Organ Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 23 Maret 2023, PLN Indonesia Power telah memiliki 3 (tiga) Komite Dewan Komisaris yang terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)
3. Komite Lainnya yaitu Komite Investasi dan Manajemen Risiko (Komite IMR)

Dengan pembentukan komite-komite ini, Perusahaan diharapkan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih efisien dan transparan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

In order to establish a good corporate governance while complying with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/3/2023 on Human Resource Organs at SOEs dated March 23, 2023, PLN Indonesia Power has established three Committees under the Board of Commissioners, namely:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Another Committee, i.e. Investment and Risk Management Committee.

The establishment of these Committees is hoped to help the Company running its activities more efficiently and transparently according to good corporate governance principles.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan integritas laporan keuangan Perusahaan, melaksanakan audit, dan memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlalu dan serta tercapainya tata kelola Perusahaan yang baik.

Audit Committee is established by the Board of Commissioners to improve the effectiveness of the implementation of supervisory duties and function on matters pertaining to the integrity of financial statements, audit function implementation, and compliance with applicable laws and regulations supervision, as well as good Corporate governance implementation.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit
Appointment and Dismissal of Audit Committee

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Anggota Komite Audit dapat berasal dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan atau dari luar Perusahaan yang bersangkutan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.

Pengangkatan Anggota Komite Audit PLN Indonesia Power telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan yang bersangkutan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. Syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

Selain itu, salah satu anggota Komite Audit PLN Indonesia Power juga telah memiliki latar belakang independen dan memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, memahami industri/bisnis Perusahaan yang bersangkutan, hukum dan akuntan publik sebagaimana dijelaskan pada Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan ini.

Pemberhentian Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya atau diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The Head and members of Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners of the Company. Members of the Audit Committee may be the members of the Board of Commissioners of the Company or from outside the relevant Company. The appointment and dismissal of the Audit Committee members shall be reported to the GMS.

The appointment of the Audit Committee Members has complied with the requirements on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023. These requirements include:

1. Having good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/examination;
2. Not having any personal interests/relationships that may have a negative impact and cause conflict of interest on against the Company;
3. Able to communicate effectively;
4. Able to allocate sufficient time to complete the task; and
5. Other requirements set forth in the Audit Committee charter.

In addition, one of the members of the PLN Indonesia Power's Audit Committee has also had an independent background and has expertise in accounting or finance, understanding the industry/business of the relevant Company, laws and public accounting as described in the Profiles of Audit Committee Members in this Annual Report.

An Audit Committee member can be dismissed when their term of office expires, and according to the Board of Commissioners Decree, being dismissed for the inability to meet the specified performance target and/or being incompetent of performing their duties.



Susunan dan Komposisi Komite Audit
Composition of Audit Committee

Selama tahun 2023, tidak terdapat pergantian Komite Audit. Berikut susunan dan komposisi Komite Audit PLN Indonesia Per per 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power:

Throughout 2023, there was no change on the composition of Audit Committee. The following is the composition of the Audit Committee of PLN Indonesia as of December 31, 2023 based on Board of Commissioners Decree No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 21, 2023 on the establishment of Audit Committee in the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Wiluyo Kusdwiharto	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite* Head of Committee*	kedua second	1 tahun 1 year
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua I Deputy Head I	kedua second	1 tahun 1 year
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua II Deputy Head II	kedua second	1 tahun 1 year
Linda Agustina	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris Komite merangkap Anggota Member and Secretary to the Committee	kedua second	1 tahun 1 year
Leonardus Sitinjak	Pihak Independen Independent Party	Anggota Komite Committee Member	kedua second	1 tahun 1 year
Afif Farihin	Pihak Independen Independent Party	Anggota Komite Ang Committee Member gota Komite	kedua second	1 tahun 1 year

* Komisaris Utama mendapatkan penugasan sebagai Ketua Komite Audit didasarkan atas pertimbangan kompetensi yang dimiliki oleh Sdr. Wiluyo Kusdwiharto.

* President Commissioner is assigned as the Head of Audit Committee in consideration of the competence of Wiluyo Kusdwiharto.

Profil Anggota Komite Audit
Profiles of Audit Committee Members

Berikut profil anggota Komite Audit PLN Indonesia Power per 31 Desember 2023:

Here are the profiles of PLN Indonesia Power's Audit Committee members as of December 31, 2023:



Wiluyo Kusdwiharto
Ketua Komite
Head of Committee

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 Tanggal 21 Desember 2023

Appointed as the Head of Audit Committee of PLN Indonesia Power by Board of Commissioners Decree No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 21, 2023

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Further information on age, nationality, educational background, work experience/service history, and concurrent position are described in the chapter of Board of Commissioners Profile in this Annual Report.



Lukmanul Hakim
Wakil Ketua I
Deputy Head I

Diangkat sebagai Wakil Ketua I Komite Audit PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 Tanggal 21 Desember 2023

Appointed as the Deputy Head I of Audit Committee of PLN Indonesia Power by Board of Commissioners Decree No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 21, 2023

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Further information on age, nationality, educational background, work experience/service history, and concurrent position are described in the chapter of Board of Commissioners Profile in this Annual Report.



Djoko Siswanto

Wakil Ketua II
Deputy Head II

Diangkat sebagai Wakil Ketua II Komite Audit PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 Tanggal 21 Desember 2023

Appointed as the Deputy Head II of Audit Committee of PLN Indonesia Power by Board of Commissioners Decree No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 21, 2023

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Further information on age, nationality, educational background, work experience/service history, and concurrent position are described in the chapter of Board of Commissioners Profile in this Annual Report.



Linda Agustina

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	44 tahun per 31 Desember 2023	44 years old as of December 31, 2023
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang	Tangerang
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada (2003)	Bachelor's Degree in Laws of Parahyangan Catholic University (2003).
Sertifikasi Certifications	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum (2016-2022), Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (2015-2016), dan Kepala Subbagian Petimbangan Hukum (di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2012-2015).	Prior to serving as the Secretary to the Audit Committee, she had served as the Head of the Legal Division (2016-2022), Head of Drafting of the Laws and Regulations Subdivision (2015-2016), and Head of the Legal Considerations Subdivision (at the Ministry of Energy and Mineral Resources (2012-2015).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 Tanggal 21 Desember 2023	Decree of the Board of Commissioners No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 21, 2023
Periode Jabatan Term of Office	Periode kedua	Second term
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Pengendali	She has no affiliation with member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.
Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power Concurrent Position in PLN Indonesia Power	Tidak Ada	N/A
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	Analis Hukum Ahli Madya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Associate Legal Analyst at the Ministry of Energy and Mineral Resources.



Leonardus Sitinjak

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	55 tahun per 31 Desember 2023	55 years old as of December 31, 2023
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana mesin dari Institut Teknologi Bandung (1993). • Magister Bidang Mesin dari Curtin University Of Teknologi (2007).	• Bachelor's Degree in Engineering of Bandung Institute of Technology (1993). • Master's Degree in Mechanical Engineering of Curtin University of Technology (2007).
Sertifikasi Certifications	• *Qualified Risk Management Professional* (QRMP) • *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	• Qualified Risk Management Professional (QRMP) • Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PLN Indonesia Power, beliau pernah menjabat sebagai Vice President Pengelolaan Pembangkit Regional di PT PLN (Persero) (2019-2021), Senior Manager Enjiniring Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (2018-2019) dan Manajer Enjiniring Pada PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B (2018).	Prior to serving as a Member of the Audit Committee at PLN Indonesia Power, he had served as the Vice President of Regional Power Plant Management at PT PLN (Persero) (2019-2021), Engineering Senior Manager at PT PLN (Persero) Parent Unit of Tanjung Jati B Power Plant (2018-2019) and Engineering Manager at PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Power Plant (2018).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 Tanggal 21 Desember 2023	Decree of the Board of Commissioners No. 011.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 21, 2023
Periode Jabatan Term of Office	Periode Kedua	Second Term
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali.	He has no affiliation with member of the Board of Commissioners and Board of Directors, but he is affiliated to the Major/Controlling Shareholder.
Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power Concurrent Position in PLN Indonesia Power	Tidak Ada	N/A
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	Vice President Pengelolaan Pembangkit Regional di PT PLN (Persero)	Vice President of Regional Power Plant Management at PT PLN (Persero)



Afif Farihin

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	44 tahun per 31 Desember 2023	44 years old as of December 31, 2023
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Industri di Universitas Veteran Surabaya (2005).	Bachelor's Degree in Industrial Engineering of UPN "Veteran" East Java (2005).
Sertifikasi Certifications	• *Certified GRC Professional* (GRCP), • PECB *Certified* ISO 31000 *Lead Risk Manager* • *Certified* GRC *Audit* (GRCA). • *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	• Certified GRC Professional (GRCP), • PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager • Certified GRC Audit (GRCA). • Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Audit, beliau juga pernah menjabat sebagai Senior Manager Keuangan dan SDM di PT PLN (Persero) (2020- 2021), Senior Specialist II Kinerja di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (2019-2021), Manager Pengelolaan Pegawai Kantor Pusat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-2019)	Prior to serving as a Member of the Audit Committee, he had served as the Senior Manager of Finance and HR at PT PLN (Persero) (2020-2021), Senior Specialist II of Performance at PT PLN (Persero) Development Parent Unit of North Sulawesi (2019-2021), Manager of Head Office Employee Management at PT PLN (Persero) Head Office (2018-2019).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003.SK/DK-PLNIP/2022 Tanggal 17 Oktober 2022.	Decree of the Board of Commissioners Number 003. SK/020/PLNIP/2022 dated October 17, 2022.
Periode Jabatan Term of Office	Periode kedua	Second term
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali.	He has no affiliation with member of the Board of Commissioners and Board of Directors, but he is affiliated to the Major/Controlling Shareholder.
Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power Concurrent Position in PLN Indonesia Power	Tidak Ada	N/A
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	Vice President Risiko Strategis dan Keuangan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat	Vice President of Strategic Risk and Finance at PT PLN (Persero) Head Office

Masa Jabatan Komite Audit
Audit Committee Term of Office

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, masa jabatan Ketua Komite Audit dipilih oleh Dewan Komisaris dari Anggota Komisaris Independen dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Masa kerja Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

In line with the Audit Committee Charter, the Head of Audit Committee is appointed from the Independent Commissioner Members by the Board of Commissioners for a tenure of one (1) year. They can be reappointed for the next term, as many as 2 (two) consecutive terms of office. The Deputy Head and Members of Audit Committee are appointed for a tenure of 1 (one) year and can be re-appointed for the subsequent term of office.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit
Statement of Independence of Audit Committee Members

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Audit Committee have met all criteria of independence and are able to carry out their duties independently, uphold the best interest of the Company and shall not be influenced by any party.

Tabel Independensi Komite Audit Tahun 2023
Table of Audit Committee Independence in 2023

Aspek Independensi Independence Aspect	Wiluyo Kusdwiharto	Lukmanul Hakim	Linda Agustina	Afif Farihin	Leonardus Sitinjak
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. Not a person in any Public Accounting Firm, Legal Consultant Service, or any other Parties providing audit services, non-audit services, and/or other forms of consultancy services for the Company within the last six (6) months prior to being appointed by the Board of Commissioners	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit No familial relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Not holding any shares, either directly or indirectly, in the Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relations with the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Not serving as the member of a political party management or as regional government official	√	√	√	√	√

Keterangan: √ : Independen ×: Tidak Independen

Remarks: √ : Independent ×: Non-independent

Pedoman Kerja Komite Audit
Audit Committee Work Guidelines

Pedoman Kerja Komite Audit diatur dalam Program Kerja Komite Audit dan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power No.12.SK/DK-PLNIP/2022 tentang Piagam Komite Audit tanggal 23 Desember 2022 sebagai pembaharuan Piagam Komite Audit PT PLN Indonesia Power tanggal 10 Desember 2019.

The Audit Committee Work Guidelines are set out in the Audit Committee Work Program and Charter which are established by the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power No. 12.SK/DK-PLNIP/2022 on the Audit Committee Charter dated December 23, 2022 as an update to the Audit Committee Charter of PT PLN Indonesia Power dated December 10, 2019.

Ruang Lingkup Piagam Komite Audit PLN Indonesia Power terdiri dari:

The Scope of the Audit Committee Charter of PLN Indonesia Power consists of:

Bab I Chapter I	Pendahuluan	Introduction
Bab II Chapter II	Maksud dan Tujuan	Purpose and Objectives
Bab III Chapter III	Fungsi dan Tugas Komite Audit	Functions and Duties of Audit Committee
Bab IV Chapter IV	Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit	Obligations, Responsibilities, and Authority of Audit Committee
Bab V Chapter V	Anggota dan Organisasi Komite Audit	Members and Organizational Structure of Audit Committee
Bab VI Chapter VI	Kode Etik Komite Audit	Code of Ethics of Audit Committee
Bab VII Chapter VII	Rapat	Meetings
Bab VIII Chapter VIII	Penilaian Kinerja	Performance Assessment
Bab IX Chapter IX	Honorarium dan Pembebanan Biaya	Honorarium and Expenses
Bab X Chapter X	Penutup	Conclusion

Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit
Duties, Obligations, Responsibilities, and Authority of Audit Committee

Tugas Pokok Komite Audit
Principal Duties of Audit Committee

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah berfungsi secara efektif dan efisien, termasuk pengendalian implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

Audit Committee shall assist the Board of Commissioners in ensuring that the Company's internal control system has been functioning effectively and efficiently, including the control of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

Tugas pokok dan fungsi Komite Audit meliputi:

1. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi, dan *system auditing* perusahaan.
2. Melakukan analisa, memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal.
3. Bersama komite lainnya melakukan analisa dan memberikan masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas :
   a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan;
   b. RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan);
   c. RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan);
   d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja Bulanan;
   e. GCG (*Good Corporate Governance*);
   f. KPI Perusahaan (*Key Performance Indicator*);
   g. KPI Dewan Komisaris;

The principal duties and functions of Audit Committee include:

1. Conducting analysis, providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, guidelines, strategies, and auditing systems of the company.
2. Conducting analysis, providing inputs to the Board of Commissioners on the implementation of activities and audit results carried out by the Internal Supervisory Unit and External Auditor.
3. Together with the other Committees, conducting analysis and providing inputs according to the field the committee covers to the Board of Commissioners regarding:
   a. Implementation of the Company's Article of Association and Board Manual;
   b. Company's Long-term Plans (RJPP);
   c. Work Plan and Budget (WP&B);
   d. Annual Reports, Quarterly Reports, and Monthly Performance Reports;
   e. Good Corporate Governance;
   f. Company's KPI (Key Performance Indicator);
   g. Board of Commissioners' KPI.

4. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan, antara lain kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
   a. *Three Lines of Defense*;
   b. Manajemen pengelolaan perizinan berusaha;
   c. Pengelolaan aset dan tingkat maturitas manajemen aset;
   d. Kapasitas, kapabilitas, dan budaya SDM dalam menghadapi tantangan bisnis perusahaan;
   e. Kebijakan Sistem IT; dan
   f. Realisasi AI/AKI.
5. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen dan Kinerja Keuangan yang disusun oleh Direksi.
6. Melakukan analisa dan memantau atas PKAT (Program Kerja Audit Tahunan) yang dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawasan Intern) serta memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan perusahaan.
7. Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Perusahaan meliputi pengendalian mutu, pengendalian aset, dan keuangan perusahaan.
8. Melakukan analisa dan memastikan telah terdapat prosedur dan peraturan perusahaan yang menjamin ketaatan terhadap GCG (*Good Corporate Governance*) serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaannya.
9. Melakukan pemantauan dan memastikan arahan, tanggapan, penugasan, dan hasil-hasil RUPS telah terlaksana serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris langkah-langkah perbaikan dan penyelesaiannya.
10. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Audit, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
11. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite.
12. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

4. Conducting analysis, providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners, especially on the policy and/or activities implementation as follows:
   a. Three Lines of Defense;
   b. Business permit management;
   c. Asset and asset maturity level management;
   d. HR capacity, capability, and culture in facing business challenges of the company;
   e. IT System Policy; and
   f. Realization of AI/AKI.
5. Studying, evaluating, and providing inputs on Management and Financial Performance Reports prepared by the Board of Directors.
6. Conducting analysis and monitoring of Annual Audit Work Plan (AAWP) performed by Internal Supervision Unit (ISU) and giving recommendations to the Board of Commissioners for company improvement.
7. Conducting analysis and providing recommendations on the improvement and implementation of the Company Management Control System including quality control, asset control, and corporate finance.
8. Conducting analysis and ensuring that there are procedures and regulations of the company in place to ensure compliance with GCG (Good Corporate Governance) and providing recommendations to the Board of Commissioners on step-by-step correction measures and further improvement.
9. Conducting monitoring and ensuring that the direction, response, assignment, and results of the GMS have been carried out and providing recommendations to the Board of Commissioners on step-by-step correction measures and its completion.
10. Organizing activities and budget plan of the Audit Committee, arranging committee meetings, keeping minutes of meetings, and delivering reports on the implementation of duties periodically to the Board of Commissioners.
11. Identifying matters requiring attention and carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the scope of duties and responsibilities of the Committee.
12. Maintaining the confidentiality of company data and information in accordance with the provisions applicable to the Board of Commissioners.

Kewajiban dan Wewenang Komite Audit
Obligations and Authority of Audit Committee

1. Rapat rutin Internal Komite Audit sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat koordinasi Komite Audit dengan Department of Audit PT PLN Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dan Rapat dilaksanakan di Kantor pusat PLN Indonesia Power atau di *Power Generation Unit* (PGU), atau *Power Generation and O&M Service Unit* (POMU), atau *Operation and Maintenance Service Unit* (OMU) jika diperlukan;
3. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengundang jajaran Manajemen dan/ atau Satuan Internal Audit PLN Indonesia Power untuk memberikan informasi yang diperlukan;
4. Rapat Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Pelaksanaan GCG antara Komite Audit, Dewan Komisaris PLN Indonesia Power, dengan Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

1. Regular Audit Committee internal meetings at least once in a month;
2. Coordination meetings between the Audit Committee and the Audit Department of PT PLN Indonesia Power at least once a month. The meetings can be held at PLN Indonesia Power Head Office or at Power Generation Unit (PGU)/Power Generation and O&M Service Unit (POMU)/Operations and Maintenance Service Unit (OMU) whenever necessary;
3. If necessary, Audit Committee may invite the Management and/or the Internal Audit Unit PLN Indonesia Power to provide required information;
4. GCG implementation and Company performance evaluation meetings between the Audit Committee, Board of Commissioners, and Corporate Secretary of PLN Indonesia Power at least once every quarter;



5. Peninjauan ke *Power Generation Unit* (PGU), atau *Power Generation and O&M Service Unit* (POMU), atau Operation and Maintenance Service Unit (OMU) jika diperlukan;
7. Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Department of Audit mengenai rencana pemeriksaan tahunan dan hasil Audit rutin/khusus KAP di lingkungan PLN Indonesia Power.

5. Visitation to Power Generation Unit (PGU)/Power Generation and O&M Service Unit (POMU)/Operations and Maintenance Service Unit (OMU) whenever necessary;
6. Meetings with Public Accountant Firm and Department of Audit on annual audit plan and result of the firm's regular/special audit in the PLN Indonesia Power.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit
Audit Committee Activity Implementation Report

Selain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan, Komite Audit berkewajiban membuat laporan berkala, yaitu laporan triwulan, semester dan tahunan yang berisi hal-hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun, antara lain:

In addition to reviewing financial information to be published by the Company, the Audit Committee has the responsibility to make periodical reports, i.e. Quarterly, biannual, and annual reports containing activities performed by the Audit Committee. Throughout 2023, the Audit Committee has implemented the following activities according to its work program:

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meetings

Kebijakan Rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Sejalan dengan kebijakan tersebut, frekuensi pertemuan/rapat berkala dapat diberlakukan sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
2. Melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Internal Audit dan Audit Eksternal pada saat terdapat jadwal pemeriksaan (audit engagement), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
3. Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
4. Dalam pelaksanaan rapat, Komite Audit dapat mengundang Manajemen Eksekutif melalui Satuan Internal Audit untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Audit Committee Meetings Policy is governed by the Audit Committee Charter. Under the policy, the frequency of periodic meetings can be enforced as follows:

1. Audit Committee meetings is held at least once a month.
2. Meetings with the parties from Internal Audit Unit and External Audit when there is an audit engagement schedule, at least once a month.
3. Periodic meetings with the Board of Commissioners at least once in 2 (two) months.
4. In the meetings, the Audit Committee may invite the Executive Management via the Internal Audit Unit to provide the necessary information.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit
Frequency of Audit Committee Meetings

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite Audit, rapat dengan Satuan Internal Audit, Eksternal Audit, Direksi dan Dewan Komisaris.

Throughout 2023, the Audit Committee had held 14 meetings consisting of internal Audit Committee meetings, meetings with Internal Audit Unit, External Audit, Board of Directors, and Board of Commissioners.

Kehadiran Komite Audit dalam Rapat
Meeting Attendance of Audit Committee

Berikut kehadiran Komite Audit dalam Rapat selama tahun 2023:

The meeting attendance rate of the Audit Committee in 2023 is as below:

Nama Name	Rapat Internal Komite Audit Internal Audit Committee Meetings		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Wiluyo Kusdwiharto	14	-	0%
Lukmanul Hakim	14	7	50%
Djoko Siswanto	14	11	79%
Linda Agustina	14	10	71%
Leonardus Sitinjak	14	13	93%
Afif Farihin	14	14	100%

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Audit 2023
Training and Competence Improvement of Audit Committee in 2023

Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit, pelatihan Komite Audit dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi maupun konferensi/seminar. Selama tahun 2023, Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris telah melakukan pelatihan sebagai berikut:

The training and improvement of the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter. These can be done through trainings, certifications, or conferences/seminars. Throughout 2023, the Committee Members (outside the members of the Board of Commissioners) have conducted the following trainings:

Nama Name	Nama Workshop/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Djoko Siswanto	Konferensi Nasional 2023 Ikatan Komite Audit Indonesia 2023 National Conference of Indonesian Audit Committee Association	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association	19 Oktober 2023 October 19, 2023	Jakarta
Leonardus	Konferensi Nasional 2023 Ikatan Komite Audit Indonesia 2023 National Conference of Indonesian Audit Committee Association	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association	19 Oktober 2023 October 19, 2023	Jakarta
	In House Training & Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) In-House Training & Certification of Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Lembaga Pelatihan *Center of Risk Management & Sustainability* (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta
Afif Farihin	Konferensi Nasional 2023 Ikatan Komite Audit Indonesia 2023 National Conference of Indonesian Audit Committee Association	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association	19 Oktober 2023 October 19, 2023	Jakarta
Lina Agustina	*In House Training* & Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) In-House Training & Certification of Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Lembaga Pelatihan *Center of Risk Management & Sustainability* (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta

Kunjungan Komite Audit
Visitations by Audit Committee

Guna memberikan motivasi kepada seluruh unit Perusahaan dan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan gambaran atas kemajuan/ perkembangan serta permasalahan yang dihadapi unit, komite melakukan kunjungan atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, Komite Audit telah melakukan kunjungan 1 (satu) kali ke UPDK Tello, Makasar tanggal 4-5 Desember 2023 dengan agenda Pembahasan PKAT.

In order to motivate all Company units and to obtain information, clarification, and overview of progress/development and problems faced by the unit, the Committee conduct visitations upon the approval of the Board of Commissioners. Throughout 2023, Audit Committee had made 1 (one) visit to Tello GCIU, Makassar on December 4-5, 2023 with the agenda of AAWP discussion.

Aktivitas Komite Audit
Audit Committee Activities

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja Komite;
2. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal serta melakukan rapat koordinasi/ pertemuan dengan Satuan Internal Audit untuk mengawasi progress tindak lanjut atas temuan audit;
3. Rapat internal Komite Audit dengan Komite Manajemen Risiko;
4. Rapat evaluasi kinerja Perusahaan dan monitoring pelaksanaan GCG bersama dengan Corporate Secretary;
5. Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Internal Audit mengenai rencana pemeriksaan tahunan dan hasil audit rutin atau khusus KAP di lingkungan PLN Indonesia Power;
6. SMAP
7. Meninjau piagam komite
8. Peninjauan ke Unit

Throughout 2023, the Audit Committee had also carried out the following activities:

1. Preparing and evaluating Committee Work Program;
2. Analyzing the Internal Audit Result Report and holding coordination meetings with the Internal Audit Unit to monitor the progress of follow-up on the audit findings;
3. Holding internal meetings with the Risk Management Committee;
4. Holding meetings to evaluate Company performance and monitor GCG implementation with the Corporate Secretary;
5. Holding meetings with Public Accountant Firm and Internal Audit Unit to discuss annual audit plan and result of the firm's regular/ special audit in PLN Indonesia Power;
6. Implementing Anti-Bribery Management System (ABMS);
7. Reviewing the committee's charter;
8. Making review visitation to Units.



Penilaian Kinerja Komite Audit
Audit Committee Performance Assessment

Penilaian kinerja Komite didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara triwulanan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

The Committee's performance assessment is based on the rules set by the Board of Commissioners, taking into account applicable provisions. The performance of the Audit Committee is evaluated by the Board of Commissioners on a quarterly basis based on the actual and completed work programs as contained in the Audit Committee Work Plan and Budget. The assessment result serves as a consideration material for the Board of Commissioners to re-appoint and/or dismiss the Audit Committee members for the subsequent term of office.

Penilaian Kinerja Anggota Komite Audit Tahun 2023
Audit Committee Performance Assessment in 2023

Parameter Penilaian Assessment Parameter	Nama Name		
	Linda Agustin	Leonardus Sitinjak	Afif Farihin
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim Contribution to Team target achievement	3	4	4
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of Reviews, Analyses, and Recommendations	3	4	4
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Team Engagement	3	4	4
Kerjasama dalam Tim Team Collaboration	3	4	4
Mutu dan Kualitas Konsep Quality of Concept	3	4	4

Keterangan skor penilaian: 1 = Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan.

Description of score: 1 = Unsatisfactory; 2= Improvement Needed; 3= Meets Expectations; 4= Exceeds Expectations



Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja mereka, serta menyusun kebijakan remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah berdasarkan pada SK Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 21 desember 2023 sebagai pembaharuan dari SK Dewan Komisaris No.012.SK/DEKOM-PLNIP/2022 tanggal 20 Desember 2022.

Nomination and Remuneration Committee is responsible for recommending prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors, evaluating their performance, and drafting a remuneration policy. The formation of the Nomination and Remuneration Committee was based on Board of Commissioners Decree No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 on the establishment of the Nomination and Remuneration Committee dated December 21, 2023 as an update to the Decree of the Board of Commissioners No. 012.SK/ DEKOM-PLNIP/2022 dated December 20, 2022.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi
Appointment and Dismissal of Nomination and Remuneration Committee

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

The Nomination and Remuneration Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners for a tenure of one (1) year. They can be reappointed for the subsequent term of office.

Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PLN Indonesia Power telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 yaitu:

1. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi;
2. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan yang bersangkutan;
3. mampu berkomunikasi secara efektif;
4. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, jika diperlukan.

The appointment of the Nomination and Remuneration Committee Members has complied with the requirements on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023. These requirements include:

1. having good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration;
2. not having any personal interests/relationships that may have a negative impact and cause conflict of interest on against the Company;
3. able to communicate effectively;
4. able to allocate sufficient time to complete the task; and
5. other requirements set forth in the Nomination and Remuneration Committee charter or other nomenclature with the same function, if necessary.

Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya atau diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

A Nomination and Remuneration Committee member can be dismissed when their term of office expires, and according to the Board of Commissioners Decree, being dismissed for the inability to meet the specified performance target and/or being incompetent of performing their duties.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition of Nomination and Remuneration Committee Members

Selama tahun 2023, tidak terdapat pergantian Komite Nominasi dan Remunerasi. Berikut susunan dan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi PLN Indonesia Per per 31 Desember 2023 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 21 Desember 2023:

Throughout 2023, there was no change on the composition of Nomination and Remuneration Committee. The following is the composition of Nomination and Remuneration Committee of PLN Indonesia as of December 31, 2023 based on Board of Commissioners Decree No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 on the establishment of the Nomination and Remuneration Committee dated December 21, 2023:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Position in Committee	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Haryanto W.S	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	Kedua Second	1 Tahun 1 Year
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head	Kedua Second	1 Tahun 1 Year
Mundhakir	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris Komite merangkap Anggota Member and Secretary to the Committee	Kedua Second	1 Tahun 1 Year
Alvin Nur Widjajanti	Pihak Independen Independent Party	Anggota Komite Committee Member	Kedua Second	1 Tahun 1 Year

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profiles of Nomination and Remuneration Committee Members



Haryanto W.S.

Ketua Komite
Head of Committee

Diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 21 Desember 2023.

Appointed as Head of Nomination and Remuneration Committee of PLN Indonesia Power by Board of Commissioners Decree No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 on the establishment of the Nomination and Remuneration Committee dated December 21, 2023.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Further information on age, nationality, educational background, work experience/service history, and concurrent position are described in the chapter of Board of Commissioners Profile in this Annual Report.



Arief Budiman

Wakil Ketua Komite
Deputy Head

Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 21 Desember 2023.

Appointed as Deputy Head of Nomination and Remuneration Committee of PLN Indonesia Power by Board of Commissioners Decree No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 on the establishment of the Nomination and Remuneration Committee dated December 21, 2023.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Further information related to age, nationality, education background, work experience/service history and concurrent position are described in the chapter of Board of Commissioners Profile in this Annual Report.



Mundhakir

Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
Secretary to Nomination and Remuneration Committee

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	53 tahun per 31 Desember 2023 / Boyolali 14 juli 1970	53 years old as of December 31, 2023/Boyolali, July 14, 1970
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Manajemen Perusahaan dari STIE Tarakan (1996). • Magister Bidang Manajemen Lainnya dari STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (2022).	• Bachelor's Degree in Enterprise Management of STIE Tarakan (1996). • Master's Degree in Management (Other Field) of STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (2022).
Sertifikasi Certifications	Sertifikasi HC *Development*	HC Development Certification
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Selain menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi, beliau pernah menjabat sebagai VICE President Pengembangan Talenta Area 9 Pada Divisi Pengembangan Talenta Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2021-2022), Senior Manager SDM Dan Umum di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Dan Sulawesi Barat (2020-2021), Senior Specialist Ii Quality Assurance Dan Kinerja (PLT Senior Manager SDM Dan Umum) di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan,Sulawesi Tenggara Dan Sulawesi Barat (2019-2020)	Prior to serving as the Secretary to Nomination and Remuneration Committee, he had served as Vice President of Regional Talent Development for Area 9 in Talent Development Division of the Directorate of Human Resource Management at PT PLN (Persero) Head Office (2021-2022), Senior Manager of HR and General Affairs at PT PLN (Persero) Parent Unit of South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and West Sulawesi Region (2020-2021), Senior Specialist II of Quality Assurance and Performance (Acting Senior Manager of HR and General Affairs) at PT PLN (Persero) Parent Unit of South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and West Sulawesi Region (2019-2020).

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan komite NR tanggal 21 Desember 2023.	Board of Commissioners Decree No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 on the establishment of the NR Committee dated December 21, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	Periode Kedua	Second Term
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	He has no affiliation with member of the Board of Commissioners and Board of Directors, but he is affiliated to the Major/Controlling Shareholder.
Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power Concurrent Position in PLN Indonesia Power	Tidak Ada	N/A
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	Vice President Pengembangan Talenta Eksekutif Pada Bidang Pengembangan Talenta Eksekutif Divisi Pengembangan Talenta Direktorat Legal Dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Kantor Pusat.	Vice President of Executive Talent Development in Talent Development Division of the Directorate of Legal and Human Capital Management at PT PLN (Persero) Head Office.



Alvin Nur Widjajanti

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Member

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	53 tahun per 31 Desember 2023 / Jakarta 5 November 1969	53 years old as of December 31, 2023/Jakarta, November 5, 1969
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Bekasi	Bekasi
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti-Jakarta (1995) • Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta (1997).	• Bachelor's Degree in Civil Engineering of Trisakti University-Jakarta (1995) • Master's Degree of Management of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997).
Sertifikasi Certifications	Sertifikasi *Qualified Risk Management* Professional	Certification of Qualified Risk Management Professional
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Selain menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Riset BUMN II (2019-2020), Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Ia-1 (2015-2019), Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIa (2014-2015).	Prior to serving as Nomination and Remuneration Committee Member, she had served as the Head of Research Subdivision II of SOEs (2019-2020), Head of Financial Services, Survey, and Consultant Business Subdivision IA-1 (2015-2019), Head of Banking and Insurance Business Subdivision IIa (2014-2015).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan komite NR tanggal 21 Desember 2023.	Board of Commissioners Decree No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 on the establishment of the NR Committee dated December 21, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	Periode kedua	Second term
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	She has no affiliation with member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.
Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power Concurrent Position in PLN Indonesia Power	Tidak Ada	N/A
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung	New State-Owned Enterprise Governance Manager to the Deputy Assistant of Tourism Services and Support

Pernyataan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Statement of Independence of Nomination and Remuneration Committee Members

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan menyatakan independensinya untuk senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

All members of the Nomination and Remuneration Committee declared their independence to work in professional, independent, and objective manners at all times and free of interventions or any other things that may potentially give rise to conflict of interest.



Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023
Table of Nomination and Remuneration Committee Independence in 2023

Aspek Independensi Aspect of Independence	Haryanto W.S.	Arief Budiman	Mundhakir	Alvin Nur Widjajanti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relations with the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepemilikan saham di Perusahaan No shareholding in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi No familial relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat Pemerintah Daerah Not serving as the member of a political party management or as regional government official	√	√	√	√

Keterangan: √ : Independen ×: Tidak Independen
Remarks: √ : Independent ×: Non-independent

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Work Guidelines

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 21 desember 2023.

Ruang Lingkup Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain mengatur terkait:
1. Fungsi dan tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Kewajiban, tanggung jawab dan wewenang
3. Keanggotaan dan organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Kode etik Komite Nominasi dan Remunerasi
5. Rapat
6. Penilaian Kinerja
7. Honorarium dan pembebanan biaya

The Nomination and Remuneration Committee has developed the work guidelines for the Committee and it has passed through by the Board of Commissioners Decree No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 on the establishment of the Nomination and Remuneration Committee dated December 21, 2023.

The Scope of Work Guidelines for Nomination and Remuneration Committee includes the following:
1. Principal functions and duties of Nomination and Remuneration Committee
2. Obligations, responsibilities, and authority
3. Membership and organizational structure of Nomination and Remuneration Committee
4. Code of Ethics of Nomination and Remuneration Committee
5. Meetings
6. Performance Assessment
7. Honorarium and expenses

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

Sejalan dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 21 Desember 2023, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya adalah:
1. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi, dan sistem SDM termasuk didalamnya melakukan review secara berkala atas pengelolaan Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*), melakukan *monitoring*, evaluasi terhadap sistem dan prosedur termasuk pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*).

According to the Board of Commissioners Decree No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 on the establishment of the Nomination and Remuneration Committee dated December 21, 2023, the duties and responsibilities of the Committee include:
1. Conducting analysis, providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners on policies, guidelines, strategies, and HR systems including conducting periodic reviews of the Talent Management system, conducting monitoring, evaluation of systems and procedures, as well as its implementation.
2. Evaluating Talent Classification system and procedures performed by the Board of Directors.
3. Validating and calibrating Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/Supervisory Board (Selected Talent), to create a list of talents to be nominated by the Board of Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Minister (Nominated Talent).

4. Melakukan analisa memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan Organisasi yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.
7. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS.
8. Bersama Komite lainnya melakukan analisa dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas:
   a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan;
   b. RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan);
   c. RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan);
   d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan;
   e. GCG (*Good Corporate Governance*);
   f. KPI (*Key Performance Indicator*) Perusahaan;
   g. KPI Dewan Komisaris.
9. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan :
   a. KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dan *Malcolm Baldrige*
   b. Pengembangan Teknologi Informasi
10. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi.
11. Melakukan analisa memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam :
    a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi dalam mendukung *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR)
    b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi
    c. Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi
12. Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan LK3 (Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan.
13. Melakukan analisa dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Perusahaan serta integrasi pengelolaannya.
14. Melakukan analisa dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan budaya perusahaan, hubungan industrial serta pelaksanaan *reward and punishment* pegawai serta menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan sistem nominasi dan remunerasi PT PLN (Persero) yang mengacu kepada *best practice*.

4. Conducting analysis, providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners on the implementation of HR and organizational management activities carried out by the company.
5. Preparing a development program proposal for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
6. Evaluating the remuneration policy for employees who need approval/response from the Board of Commissioners.
7. Conducting evaluation of the prospective Company's Representative to be proposed as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners of the subsidiary Company, before submitted to the GMS.
8. Together with the other Committees, conducting analysis and providing inputs according to the field the committee covers to the Board of Commissioners regarding:
   a. Implementation of the Company's Article of Association and Board Manual;
   b. Company's Long-term Plans (RJPP);
   c. Work Plan and Budget (WP&B);
   d. Annual Reports, Quarterly Reports, and Monthly Performance Reports;
   e. GCG (Good Corporate Governance);
   f. Company's KPI (Key Performance Indicator);
   g. Board of Commissioners' KPI.
9. Conducting analysis, providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners, especially on the policy and implementation of below activities:
   a. Excellent Performance Assessment Criteria (EPAC) and Malcolm Baldrige
   b. Information Technology Developments
10. Studying, evaluating, and providing inputs on HR and Organizational Performance Management Reports and SHE (Safety, Health, and Environment) reports prepared by the Board of Directors.
11. Conducting analysis, providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners upon the Board of Directors' proposals in:
    a. HR and Organizational Development Program in support of Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR)
    b. Nominations of the officer positions of one level below Board of Directors
    c. Board of Commissioners and Board of Directors Remunerations
12. Conducting analysis and providing recommendations to the Board of Commissioners on the policies, strategies, and implementation of SHE (Safety, Health, and Environment) management of the Company.
13. Conducting analysis and providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, strategies, and implementation of management of the Company's information system and integration of management.
14. Conducting analysis and providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, strategies, and implementation of the management of company culture, industrial relations, and the implementation of employee reward and punishment as well as reviewing and monitoring to ensure that the Board of Directors has implemented a nomination and remuneration system in PT PLN (Persero) according to the best practice.



15. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
16. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban komite Dewan Komisaris.
17. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.
18. Menjalankan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah tertera pada *Board Manual* PLN Indonesia Power.

15. Organizing activities and budget plan of the Nomination and Remuneration Committee, arranging committee meetings, keeping minutes of meetings, and delivering reports on the implementation of duties periodically to the Board of Commissioners.
16. Identifying matters requiring attention, ensuring completion and carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the scope of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
17. Maintaining the confidentiality of company data and information in accordance with the provisions applicable to the Board of Commissioners.
18. Performing the duties of Nomination and Remuneration Committee listed on the Board Manual of PLN Indonesia Power.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Activity Implementation Report

Selama tahun 2023, komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, antara lain:

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee has performed the following duties and responsibilities according to its work program:

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meetings

Kebijakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, Pelaksanaan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang terdiri dari rapat dengan Direktur Management Human Capital, Sekretaris Perusahaan, dan *Business Process Owner* (BPO) terkait.

The policy of the Nomination and Remuneration Committee refers to the Committee's Work Program. It is established that the Committee holds meetings at least once in a month, including meetings with Human Capital Management Director, Corporate Secretary, and relevant Business Process Owner (BPO).

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Frequency of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 17 kali rapat yang terdiri dari rapat internal sebanyak 6 (enam) kali rapat, rapat dengan DIRMHC sebanyak 9 (sembilan) kali rapat dan rapat dengan BPO sebanyak 1 (satu) kali rapat.

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee had held 17 meetings, consisting of 6 (six) internal meetings, 9 (nine) meetings with Human Capital Management Director, and 1 (one) meeting with BPO.

Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi
Meeting Attendance of Nomination and Remuneration Committee

Berikut kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat selama tahun 2023:

The meeting attendance rate of the Nomination and Remuneration Committee in 2023 is as below:

Nama Name	Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Internal Meetings		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Haryanto WS	17	17	100%
Arief Budiman	17	17	100%
Mundhakir	17	17	100%
Alvin Nur Widjajanti	17	17	100%

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Training and Competence Improvement of Nomination and Remuneration Committee

Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023.

The training and improvement of the Nomination and Remuneration Committee refers to the Committee's Work Program in 2023.

Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023 dijelaskan pada bagian Governansi Perusahaan di bab Dewan Komisaris (Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2023) dalam Laporan Tahunan ini.

The training for the Nomination and Remuneration Committee in 2023 are detailed in the chapter of Corporate Governance, in the section of the Board of Commissioners (Training for the Board of Commissioners in 2023) of this Annual Report.

Kunjungan Komite Nominasi dan Remunerasi
Visitations by Nomination and Remuneration Committee

Guna memberikan motivasi kepada seluruh unit Perusahaan dan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi unit, komite melakukan kunjungan atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Berikut daftar kunjungan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2023:

In order to motivate all Company units and to obtain information, clarification, and overview of progress/development and problems faced by the unit, the Committee conduct visitations upon the approval of the Board of Commissioners. Here is the list of Nomination and Remuneration Committee visits during 2023:

Nama Name	Agenda	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Arief Budiman dan Mundakhir Arief Budiman and Mundakhir	*Performance* SDM dan Pengelolaan BKO/Tugas Karya di UPDK Keramasan Performance of HR and Management of BKO/Secondment in UPDK Keramasan	17-18 Mei 2023 May 17-18, 2023	UPDK Keramasan
Seluruh Komite The Entire Committee	Penutupan Kongres ke-IX PP-IP The closing of the 9th PP-IP Congress	30 Agustus 2023 August 30,, 2023	Solo
Seluruh Komite The Entire Committee	Pembahasan Pengelolaan HC di Lingkungan PT PLN Indonesia Power Discussion of HC Management in PT PLN Indonesia Power	10-11 Oktober 2023 October 10-11, 2023	Surabaya

Aktivitas Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Activities

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melakukan beberapa kegiatan dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya mencakup tentang:

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Nominasi dan Remunerasi
2. RJP dan RKAP PLN Indonesia Power.
3. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
4. Laporan Kinerja dan Manajemen Perusahaan.
5. Evaluasi Dokumen Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan oleh Direksi dalam pengajuan program Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6. KPI Manajemen PLN Indonesia Power di bidang SDM, yaitu mengenai *Human Capital Readiness* (HCR), *Organization Capital Readiness* (OCR) dan *Information Capital Readiness* (ICR).

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee had also carried out several activities and provided several recommendations regarding:

1. Implementation of Nomination and Remuneration Policy
2. PLN Indonesia Power's Long-term Plan (RJP) and WP&B
3. Evaluating Talent Classification system and procedures performed by the Board of Directors.
4. Company's Performance and Management Reports.
5. Evaluation of the Nomination and Remuneration Documents submitted by the Board of Directors in the proposal of Company programs that require approval from the Board of Commissioners.
6. PLN Indonesia Power Management's KPI in Human Capital area, which include Human Capital Readiness (HCR), Organization Capital Readiness (OCR), and Information Capital Readiness (ICR).

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment

Penilaian kinerja Komite didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara triwulanan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode jabatan berikutnya.

The Committee's performance assessment is based on the rules set by the Board of Commissioners, taking into account applicable provisions. The performance of the Nomination and Remuneration Committee is evaluated by the Board of Commissioners on a quarterly basis based on the actual and completed work programs as contained in the Committee's Work Plan and Budget. The assessment result serves as the consideration for the Board of Commissioners to re-appoint and/or dismiss the Nomination and Remuneration Committee members for the subsequent term of office.



Penilaian Kinerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023
Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment in 2023

Parameter Penilaian Assessment Parameter	Nama Name	
	Mundhakir	Alvin Nur Widjajanti
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim Contribution to Team target achievement	4	4
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of Reviews, Analyses, and Recommendations	4	4
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Team Engagement	4	4
Kerjasama dalam Tim Team Collaboration	4	4
Mutu dan Kualitas Konsep Quality of Concept	4	4

Keterangan skor penilaian: 1 = Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan.

Description of score: 1 = Unsatisfactory; 2= Improvement Needed; 3= Meets Expectations

Komite Lain
Other Committees

Hingga akhir tahun 2023, Komite Lain yang dimiliki PLN Indonesia Power adalah Komite Investasi dan Manajemen Risiko sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN tanggal 3 Maret 2023 Komite lain dibentuk jika diperlukan.

Selanjutnya, selaras dengan ditetapkan Perusahaan menjadi *Subholding* PT PLN (Persero) melalui Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tanggal 21 September 2022, nomenklatur Komite Manajemen Risiko mengalami penyesuaian menjadi Komite Investasi dan Manajemen Risiko sejak tanggal 17 Oktober 2022, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power nomor 002. SK/DK-PLNIP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Resiko pada Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan pada aspek investasi dan manajemen risiko.

As of the end of 2023, PLN Indonesia Power also has Investment and Risk Management Committee, established according to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs dated March 3, 2023. Other Committees shall be formed if necessary.

The Company has now become a subholding of PT PLN (Persero) as stipulated in the resolution in lieu of general meetings of shareholders (Circular) dated September 21, 2022. Thus, Risk Management Committee was then changed to Investment and Risk Management Committee commencing October 17, 2022. This is set forth by the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power No. 002. SK/DK-PLNIP/2022 dated October 17, 2022 on the establishment of Investment and Risk Management Committee in the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power. This adjustment was made for a more effective supervision of investment and risk management.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee

Dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap mengawasi kebijakan investasi, manajemen portofolio, serta menilai dan mengelola risiko yang dihadapi Perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

In order to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over investment policy, portfolio management, as well as assessing and managing the risks imposed upon the Company, the Board of Commissioners established the Investment and Risk Management Committee by the Board of Commissioners Decree Number: 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023 on the Establishment of Investment and Risk Management Committee.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Appointment and Dismissal of Investment and Risk Management Committee

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pemberhentian Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya atau diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya tata kelola yang sehat.

Pemberhentian Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya atau diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The Investment and Risk Management Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners for a tenure of one (1) year. They can be reappointed for the subsequent term of office. Investment and Risk Management Committee members can be dismissed when their tenure expires, and according to the Board of Commissioners Decree, being dismissed for the inability to meet the specified performance target and/or being incompetent of performing their duties.

All Committee members are highly committed, possessing high level of integrity, capabilities, and expertise according to their relevant field, in order to deliver a sound governance.

Investment and Risk Management Committee members can be dismissed when their tenure expires, and according to the Board of Commissioners Decree, being dismissed for the inability to meet the specified performance target and/or being incompetent of performing their duties.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Composition of Investment and Risk Management Committee Members

Selama tahun 2023, terdapat perubahan susunan dan komposisi Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Berikut susunan dan komposisi Komite Investasi Manajemen Risiko PLN Indonesia per 31 Desember 2023:

Throughout 2023, there was a change in the composition of the Investment and Risk Management Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number: 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023 on the Establishment of Investment and Risk Management Committee. The following is the composition of Investment and Risk Management Committee of PLN Indonesia as of December 31, 2023:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Position in Committee	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Iskandar Simorangkir	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	Kedua Second	1 Tahun 1 Year
M.Priharto Dwinugroho	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head	Kedua Second	1 Tahun 1 Year
Dewanto	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Member and Secretary to the Committee	Kedua Second	1 Tahun 1 Year
Robiatna Agus Fanhar	-	Anggota Member	Pertama First	1 Tahun 1 Year
Ferry Triansyah	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	Pertama First	1 Tahun 1 Year

Profil Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Profiles of Investment and Risk Management Committee Members



Iskandar Simorangkir
Ketua Komite
Head of Committee

Diangkat sebagai Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023

Appointed as the Head of Investment and Risk Management Committee of PLN Indonesia Power by Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Further information on age, nationality, educational background, work experience/service history, and concurrent position are described in the chapter of Board of Commissioners Profile in this Annual Report.



M.Priharto Dwinugroho
Wakil Ketua
Deputy Head

Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023

Appointed as the Deputy Head of Investment and Risk Management Committee of PLN Indonesia Power by Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Further information on age, nationality, educational background, work experience/service history, and concurrent position are described in the chapter of Board of Commissioners Profile in this Annual Report.



Dewanto
Sekretaris merangkap Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member and Secretary to the Investment and Risk Management Committee

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	50 tahun per 31 Desember 2023/	50 years old as of December 31, 2023/
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Kimia di Universitas Wahid Hasyim Semarang (2016)	Bachelor's Degree in Chemical Engineering of Wahid Hasyim University, Semarang (2016)
Sertifikasi Certifications	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	QRGP
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Selain menjabat sebagai Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko, beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Aneka Energi PT PLN (Persero) (2018 - 2021), Deputi Manajer Energi Alternatif PT PLN (Persero) (2017 - 2018), Deputi Manajer Energi Primer dan Pelabuhan Unit 3-4 PT PLN (Persero) (2012 - 2017).	Prior to serving as a Member of the Investment and Risk Management Committee, he had served as the Manager of Various Energy at PT PLN (Persero) (2018 - 2021), Deputy Manager of Alternative Energy at PT PLN (Persero) (2017 - 2018), Deputy Manager of Primary Energy and Port Unit 3-4 at PT PLN (Persero) (2012 - 2017).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023	Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	Periode Kedua	Second Term
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	He has no affiliation with member of the Board of Commissioners and Board of Directors, but he is affiliated to the Major/Controlling Shareholder.
Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power Concurrent Position in PLN Indonesia Power	Tidak Ada	N/A
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	Vice President Aneka Energi PT PLN (Persero)	Vice President of Various Energy at PT PLN (Persero)



Robiatna Agus Fanhar

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member of Investment and Risk Management Committee

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	37 Tahun Per 31 Desember 2023/ Depok, 14 Agustus 1986	37 years old as of December 31, 2023/Depok, August 14, 1986
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Depok	Depok
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila (2008) • Magister Bidang Hukum (Notariat) Universitas Pancasila (2016)	• Bachelor's Degree in Laws of University of Pancasila (2008) • Master's Degree in Laws (Notarial) of University of Pancasila (2016)
Sertifikasi Certifications	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Sebelum menjabat sebagai anggota komite investasi dan manajemen risiko, jabatan yang pernah dipegang 3 (tiga) tahun terakhir adalah Manager Legal Business Partner Perencanaan, Pengadaan EPC dan EBT pada Bidang Legal Business Partner Mega Project Divisi Kontrak Dan Legal Business Partner Sub Direktorat Hukum, Kebijakan, Dan Kepatuhan Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2022), Manager Kontrak Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Pada Bidang Kontrak Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Subdivisi Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Divisi Hukum Korporat Direktorat Human Capital dan Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2021), Manager Kontrak Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Pada Bidang Kontrak Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Sub Divisi Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Divisi Hukum Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2020) dan Analyst Kontrak (Plt Manager Kontrak Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) Pada Bidang Kontrak Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Sub Divisi Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Divisi Hukum Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2019).	Prior to serving as a member of the investment and risk management committee, in the last 3 (three) years, he had served as the Manager of Legal Business Partner of Planning, Procurement of EPC, and New and Renewable Energy (NRE) in Legal Business Partner of Mega Project in Contract Division and Legal Business Partner of Sub-Directorate of Laws, Policy, and Compliance of Directorate of Human Resource Management at PT PLN (Persero) Head Office (2022). A year prior, he held the Contract Manager role of Java, Bali, and Nusa Tenggara on Contracts of Java, Bali, and Nusa Tenggara in the Subdivision of Java, Bali, and Nusa Tenggara in Corporate Law Division of Directorate of Human Capital and Management at PT PLN (Persero) Head Office (2021). He also served as the Contract Manager of Java, Bali, and Nusa Tenggara on Contracts of Java, Bali, and Nusa Tenggara in the Subdivision of Java, Bali, and Nusa Tenggara in Corporate Law Division at PT PLN (Persero) Head Office (2020) and as the Contract Analyst (Acting Contract Manager of Java, Bali, and Nusa Tenggara) on Contracts of Java, Bali, and Nusa Tenggara in the Subdivision of Java, Bali, and Nusa Tenggara in Corporate Law Division at PT PLN (Persero) Head Office (2019).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023	Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	Periode Pertama	First Term
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	He has no affiliation with member of the Board of Commissioners and Board of Directors, but he is affiliated to the Major/Controlling Shareholder.
Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power Concurrent Position in PLN Indonesia Power	Tidak Ada	N/A
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	Vice President Legal Business Partner Keuangan dan Manajemen Human Capital Pada Bidang Legal Business Partner Keuangan dan Manajemen Human Capital Divisi Korporasi dan Legal Business Partner Sub Direktorat Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan Direktorat Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero)	Vice President of Legal Business Partner of Finance and Human Capital Management in Legal Business Partner of Finance and Human Capital Management of Company Division and Legal Business Partner of Sub-Directorate of Laws, Policy, and Compliance of Directorate of Legal and Human Capital Management at PT PLN (Persero)



Ferry Triansyah

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member of Investment and Risk Management Committee

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	55 tahun Per 31 Desember 2023/Medan, 20 Januari 1968	55 years old as of December 31, 2023/Medan, January 20, 1968
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Mesin di Universitas Sumatera Selatan (1992) • Magister Teknik Elektro di Politeknik Negeri Jakarta (2022)	• Bachelor's Degree in Mechanical Engineering of Universitas Sumatera Selatan (1992) • Master's Degree in Electrical Engineering of Jakarta State Polytechnics (2022)
Sertifikasi Certifications	Sertifikasi Kompetensi, Asesor Kompetensi Utama Pembangkit Tenaga (DJK)	Competence Certification, Assessor of the Core Competence of Power Plants (DJK)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Sebelum menjabat sebagai Komite Investasi dan Manajemen Risiko, beliau juga pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya selaku Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2022), Analis Kebijakan Madya selaku Koordinator Harga Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2021), Kasubdit Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2019), dan Kasubdit Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2016)	Prior to serving as the Investment and Risk Management Committee, he had served as a Associate Policy Analyst as the Coordinator of Electrical Power Generation Business Services at the Directorate General of Electrical Power Generation (2022), Associate Policy Analyst as the Coordinator of Electricity price Directorate General of Electricity Power Prices (2021), Head of Setup of Electrical Power Generation Business Subdivision at the Directorate General of Electrical Power (2019), and Head of the Electrical Power Generation Engineering Subdivision at the Directorate General of Electrical Power (2016).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023	Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	Periode Pertama	First Term
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	He has no affiliation with member of the Board of Commissioners and Board of Directors, but he has an affiliation with Major/Controlling Shareholders.
Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power Concurrent Position in PLN Indonesia Power	Tidak Ada	N/A
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	Analis Kebijakan Madya selaku Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagakerjaan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Associate Policy Analyst as Coordinator of Employment Business Services at the Directorate General of Electrical Power Generation since 2022

Pernyataan Independensi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Statement of Independence of Investment and Risk Management Committee Members

Seluruh anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko Perusahaan menyatakan independensinya untuk senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Independensi anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, serta kepemilikan saham di PLN Indonesia Power dan perusahaan lainnya sebagaimana tabel berikut:

All members of the Investment and Risk Management Committee declared their independence to work in professional, independent, and objective manners at all times and free of interventions or any other things that may potentially give rise to conflict of interest. The independence of the Investment and Risk Management Committee members is indicated by the familial, financial, managerial, and shareholding relationships at PLN Indonesia Power and other companies, as shown below:

Tabel Independensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Table of Investment and Risk Management Committee Independence in 2023

Aspek Independensi Independence Aspect	Iskandar Simorangkir	M.P Dwinugroho	Dewanto	Robiatna Agus Fanhar	Ferry Triansyah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relations with the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepengurusan di PLN Indonesia Power, Anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi No managerial relationship at PLN Indonesia Power, its Subsidiaries, or Affiliates	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepemilikan saham di Perusahaan No shareholding in the Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko No familial relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Investment and Risk Management Committee	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat Pemerintah Daerah Not serving as the member of a political party management or as regional government official	√	√	√	√	√

Keterangan: √ : Independen ×: Tidak Independen

Remarks: √ : Independent ×: Non-independent

Pedoman Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee Work Guidelines

Pedoman kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko masih mengacu pada Piagam Komite Manajemen Risiko, mengingat perubahan Komite Manajemen Risiko menjadi Komite Investasi dan Manajemen Risiko baru dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2022. Piagam Komite Manajemen Risiko disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Nomor 242.K/010/IP/2019 dan Nomor 018.SK/DEKOM-IP/2019 Tentang Piagam Komite Manajemen Risiko PT PLN Indonesia Power tanggal 10 Desember 2019.

Piagam tersebut memuat aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Manajemen Risiko, antara lain fungsi dan tugas pokok Komite Manajemen Risiko, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang, anggota dan organisasi Komite Manajemen Risiko, Kode etik, rapat Komite Manajemen Risiko, Penilaian kinerja dan honorarium dan pembebanan biaya Komite Manajemen Risiko.

The Investment and Risk Management Committee Work Guidelines grounds on the Risk Management Committee Charter, considering that Risk Management Committee was changed to Investment and Risk Management Committee of on October 17, 2022. The Charter was stipulated by the Board of Commissioners under Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 242.K/010/IP/2019 and 018.SK/DEKOM-IP/2019 on PT PLN Indonesia Power Risk Management Committee Charter dated December 10, 2019.

The Charter provides the aspects concerning the implementation of duties and responsibilities of each of the Risk Management Committee members, such as the core functions and duties, obligations, responsibilities and authorities, membership and organization, Code of Ethics, meetings, performance assessment, and honorarium and expenses of the Risk Management Committee.

Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Duties of Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan terhadap Kajian Risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Manajemen Perusahaan; dan termasuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan di Bidang Nominasi & Remunerasi; dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko serta Kajian Risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan pada:
   a. Kegiatan perencanaan strategis Perusahaan
   b. Kegiatan investasi Perusahaan
   c. Kegiatan operasi Perusahaan

Investment and Risk Management Committee assists the Board of Commissioners in performing its supervisory duties by reviewing the Risk Assessment of the feasibility of the activities planned by the Management, including reviewing the Investment and Risk Management policies. The principal duties are as follows:

1. Providing inputs to the Board of Commissioners by reviewing the Risk Management and Risk Assessment implementation by the Management regarding:
   a. Strategic planning activities of the Company
   b. Investment activities of the Company
   c. Operational activities of the Company



d. Kegiatan menganalisis dan menilai risiko keberlangsungan bisnis perusahaan, antara lain menghadapi perkembangan *Disruptive Technology*
e. Kegiatan menganalisis dan menilai risiko pengembangan usaha perusahaan utamanya dalam bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)

2. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam RJP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko.
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Investasi dan Manajemen Risiko, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko.
6. Membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris.
7. Pengawasan Kebijakan Mutu, Pelayanan dan Kepatuhan kegiatan bisnis PLN Indonesia Power
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Analysis and assessment activities on the risk of business continuity of the Company, i.e. facing the development of disruptive technology
e. Analysis and assessment activities on the risk of the company's main business development, particularly in new and renewable energy (NRE)

2. Monitoring and ensuring that all activities within the Long-Term Plan (LTP) and Work Plan and Budget (WP&B) have complied with the Risk Management principles.
3. Providing inputs to the Board of Commissioners concerning the follow-up on evaluation findings, particularly on policies with significant financial impacts.
4. Providing recommendations to the Management via the Board of Commissioners in designing and implementing Investment and Risk Management policies, including matters that may enhance the smoothness and effectiveness of the risk assessment process.
5. Providing inputs to the Board of Commissioners on the changes and improvements of Investment and Risk Management Committee Charter;
6. Preparing written reports to the Board of Commissioners;
7. Supervising Quality, Service and Compliance Policy of business activities PLN Indonesia Power
8. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners under the Board of Commissioners' scope of duties and responsibilities, in accordance with the applicable laws and regulations.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee Activity Implementation Report

Selama tahun 2023, komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, antara lain:

Throughout 2023, the Investment and Risk Management Committee has performed the following duties and responsibilities according to its work program:

Rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee Meetings

Kebijakan Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan Rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Komite Manajemen Risiko dapat mengadakan rapat, baik secara internal maupun rapat koordinasi dengan Direksi dan Unit/Departemen di Perusahaan.

The implementation policy of the Committee meetings is governed by the Risk Management Committee Charter. It is established that the Committee holds meetings at least once in a month. Risk Management Committee can hold a meeting, either internal meeting or coordination meeting with the Board of Directors and Department Unit of the Company.

Pelaksanaan Frekuensi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2023, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 22 kali rapat yang dilakukan secara internal maupun rapat mengundang Direksi dan Unit Departemen di Perusahaan.

Frequency of Investment and Risk Management Committee Meetings

Throughout 2023, the Investment and Risk Management Committee had held 22 meetings, both internally and meetings inviting Board of Directors and Department Units of the company.



Kehadiran Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Meeting Attendance of Investment and Risk Management Committee

Berikut kehadiran Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam Rapat selama tahun 2023:

The meeting attendance rate of the Investment and Risk Management Committee in 2023 is as below:

Nama Name	Rapat Internal Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee Internal Meetings		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Iskandar Simorangkir	15	15	100%
M.P Dwinugroho	15	12	100%
Helen Magdalena *	17	17	100%
Havidh Nazif*	17	14	82%
Dewanto	22	21	95%
Robiatna Agus Fanhar*	5	5	100%
Ferry Triansyah*	5	3	60%

Keterangan:
* berhenti menjabat 18 Oktober 2023
** menjabat 18 Oktober 2023

Remarks:
*leaving the role since October 18, 2023.
** serving the role since October 18, 2023

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Training and Competence Improvement of Investment and Risk Management Committee

Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko mengacu pada Program Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko tahun 2023, Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris telah melakukan pelatihan sebagai berikut:

The training and improvement of the Investment and Risk Management Committee refers to the Committee's Work Program in 2023. The Committee Members (outside the members of the Board of Commissioners) have conducted the following trainings:

Nama Name	Nama *Workshop*/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Dewanto	*In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta
Helen Magdalena	*In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta
Havidh Nazif	*In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Lembaga Pelatihan Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Institute of Center of Risk Management & Sustainability (CRMS)	11- 13 September 2023 September 11-13, 2023	Jakarta

Kunjungan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Visitations by Investment and Risk Management Committee

Guna memberikan motivasi kepada seluruh unit Perusahaan dan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi unit, komite melakukan kunjungan atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Pada tahun 2023, Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko melakukan kunjungan ke Semarang PGU pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan agenda *Business Opportunities* Dalam Mendukung Pengembangan Manufaktur *Solar* PV di Indonesia.

In order to motivate all Company units and to obtain information, clarification, and overview of progress/development and problems faced by the unit, the Committee conduct visitations upon the approval of the Board of Commissioners. In 2023, the Investment and Risk Management Committee visited Semarang PGU on August 15, 2023 with the agenda of discussing Business Opportunities in Supporting the Development of Solar PV Manufacturing in Indonesia.



Aktivitas Pengawasan Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee Supervisory Activities

Selama tahun 2023, Komite Investasi dan Manajemen Risiko juga telah melakukan beberapa kegiatan dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya mencakup tentang:

1. RJPP dan RKAP PLN Indonesia Power.
2. Analisa Risiko Korporat dan Profil Risiko Korporat.
3. Usulan RKAP dan Investasi Murni
4. Laporan Kinerja dan Manajemen Perusahaan.
5. Evaluasi Dokumen Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Direksi dalam pengajuan program Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Kegiatan kegiatan lain yang menjadi perhatian Dewan Komisaris. pada topik-topik strategis Perusahaan Tahun 2023 yang perlu diperhatikan oleh Manajemen Perusahaan.

Throughout 2023, the Investment and Risk Management Committee also carried out several activities and provided several recommendations regarding:

1. PT PLN Indonesia Power's Long-term Plan (RJPP) and WP&B
2. Analysis of the Corporate Risk and Corporate Risk Profile.
3. WP&B Proposal and Pure Investment.
4. Company's Performance and Management Reports.
5. Evaluation of the Risk Management Documents submitted by the Board of Directors in the proposal of Company programs that require approval from the Board of Commissioners.
6. Other activities requiring attention from the Board of Commissioners, and those on the strategic topics of the Company in 2023 requiring attention from the Company Management.

Penilaian Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee Performance Assessment

Evaluasi kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan setiap triwulanan berdasarkan realisasi atas penyelesaian program kerja dan anggaran Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Hasil penilaian kinerja tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk periode jabatan berikutnya. Berikut hasil penilaian kinerja anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko tahun 2023.

The Investment and Risk Management Committee's performance is evaluated every quarter by the Board of Commissioners based on the actual completion of the Risk Management Committee's work programs and budget. The performance assessment result serves as the consideration for the Board of Commissioners to re-appoint and/or dismiss the Investment and Risk Management Committee members for the subsequent term of office. Below is the result of performance assessment of the Investment and Risk Management Committee members in 2023.

Penilaian Kinerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023
Investment and Risk Management Committee Performance Assessment in 2023

Parameter Penilaian Assessment Parameter	Nama Name		
	Dewanto	Robiatna Agus Fanhar	Ferry Triansyah
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim Contribution to Team target achievement	4	4	3
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of Reviews, Analyses, and Recommendations	4	4	3
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Team Engagement	4	4	3
Kerjasama dalam Tim Team Collaboration	3	4	3
Mutu dan Kualitas Konsep Quality of Concept	3	4	3

Keterangan skor penilaian: 1 = Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan.

Description of score: 1 = Unsatisfactory; 2= Improvement Needed; 3= Meets Expectations; 4= Exceeds Expectations

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris telah berdasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dipersyaratkan Perusahaan. Saat ini Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdr. Kishartanto Purnomo Putro berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No 001.SK/DKPLNIP/2022 Tanggal 17 Oktober 2022.

The Secretary to the Board of Commissioners has administrative and secretariat duties and functions that pertain to the Board of Commissioners' supervisory duties. The Secretary answers directly to the Board of Commissioners. They also have a crucial role in ensuring that the Board of Commissioners implements the GCG principles according to the best practices and applicable laws and regulations.

The appointment of the Secretary to the Board of Commissioners has complied with the requirements on educational background and work experience. The position is currently held by Kishartanto Purnomo Putro as set out by the Decree of the Board of Commissioners No. 001.SK/DKPLNIP/2022 dated October 17, 2022.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of Secretary to the Board of Commissioners



Kishartanto Purnomo Putro
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place and Date of Birth	42 tahun per 31 Desember 2023/11 Juli 1980	42 years old as of December 31, 2023/July 11, 1980
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang Selatan	South Tangerang
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Informatika dari Universitas Dian Nuswantoro (2002).	Bachelor's Degree in Informatics of Universitas Dian Nuswantoro (2002).
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris di PT PLN Indonesia Power sejak Oktober 2022, saat ini beliau juga masih aktif di PT PLN (Persero) sebagai VP Eksekutif Direksi pada Direktorat Manajemen Proyek & EBT, serta terdapat beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah sebagai Corporate Secretary pada Pelayanan Listrik Batam (2020-2021), Senior Manager SDM dan Umum pada PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat (2019-2020), Manajer Area Lubuk Pakam pada PT PLN Wilayah Sumatera Utara (2018-2019), Manajer Area Sibolga pada PT PLN Wilayah Sumatera Utara (2016-2018), dan Deputy Manager IT pada PT PLN Distribusi Banten (Jan-Nov 2016)	Having served as the Secretary to the Board of Commissioners at PT PLN Indonesia Power since October 2022, he is currently also active in PT PLN (Persero) as Executive VP of the Board of Directors of Directorate of Project Management & NRE. Other roles he previously held include Corporate Secretary in Batam Electrical Services (2020-2021), Senior Manager of Human Resources and General Affairs at PT PLN Parent Unit of West Sumatra Region (2019-2020), Manager of Lubuk Pakam Area at PT PLN North Sumatra Region (2018-2019), Sibolga Area Manager at PT PLN North Sumatra Region (2016-2018), and Deputy IT Manager at PT PLN Distribution of Banten (Jan-Nov 2016).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001.SK/DK-PLNIP/2022 Tanggal 17 Oktober 2022.	Board of Commissioners Decree No. 001.SK/DK-PLNIP/2022 dated October 17, 2022.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Work Guidelines for the Secretary to the Board of Commissioners

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual*. Tugas dan tanggung jawab utama Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu kelancaran pekerjaan dan memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mencakup:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/ pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
   b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/ kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan;
   c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

In assuming their duties and responsibilities, the Secretary to the Board of Commissioners refers to the Board Manual. The main duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners are to give assistance for streamlined works and provide support for the Board of Commissioners in performing its duty and responsibility, which include:

1. Carrying out secretariat administrative work within the Board of Commissioners;
2. Holding Board of Commissioners meetings and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, Board of Directors, and other relevant parties;
3. Providing data/information necessary for the Board of Commissioners and committees under the Board of Commissioners, with regard to:
   a. The monitoring of the follow-up on the resolutions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners;
   b. Administrative materials containing the reports/activities of the Board of Directors in managing the Company;
   c. Administrative support for and monitoring of any matter that requires approval or recommendation from the Board of Commissioners in relation to Company management by the Board of Directors.
4. Collecting technical data from committees and specialists of the Board of Commissioners to be used by the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Implementation of the Duties of the Secretary to the Board of Commissioners

Selama tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris;
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan;
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat;
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Mengadministrasikan Surat Keluar Masuk Dewan Komisaris, selama tahun 2023 terdapat 130 Surat Masuk kepada Dewan Komisaris dan 194 Surat Keluar dari Dewan Komisaris;
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahunan 2023.

Throughout 2023, the Secretary to the Board of Commissioners has carried out the following activities:

1. Carrying out secretarial activities within the Board of Commissioners;
2. Coordinating the provision of information necessary for the Board of Commissioners, such as periodical report from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, Internal Control Unit Audit Finding Report) and other reports/ information on the Company;
3. Arranging Board of Commissioners meetings, including but not limited to preparing and sending summons, delivering meeting materials, and creating minutes of meetings;
4. Documenting minutes of meeting and other Board of Commissioners' documents, as well as delivering meeting resolutions to relevant parties;
5. Documenting incoming and outgoing mails in the Board of Commissioners. In 2023, the Board of Commissioners received 130 incoming mails and delivered 194 outgoing mails;
6. Preparing 2023 Annual Report of Implementation of the Duties of the Secretary to the Board of Commissioners.



Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan adalah dua aspek penting yang senantiasa difokuskan oleh Perusahaan untuk memastikan kesuksesan jangka panjang Perusahaan. Sebagai salah satu organ pendukung Direksi dalam pelaksanaan tata kelola, Sekretaris Perusahaan turut berperan penting dalam memastikan Perusahaan beroperasi dengan cara yang transparan dan etis serta melindungi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

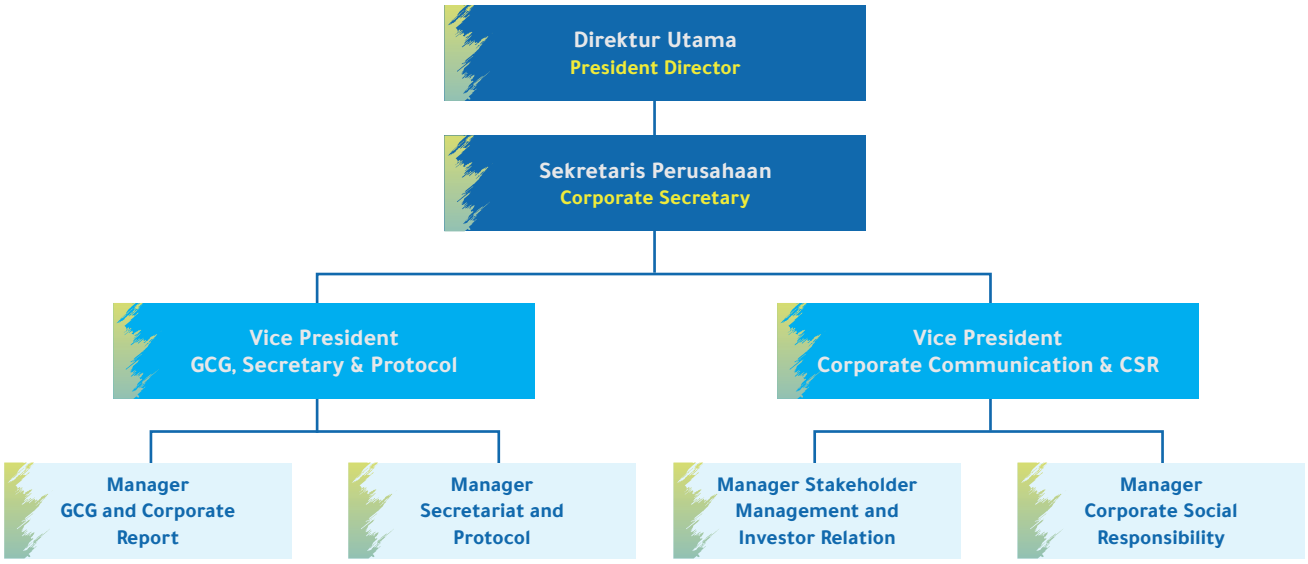
Managing relations with stakeholders and corporate governance are two crucial aspects under the Company's focus in order to ensure long-term success. As a supporting organ for the Board of Directors in carrying out governance, Corporate Secretary plays an important role in ensuring that the Company operates in transparent and ethical ways while protecting the interests of the shareholders and other stakeholders.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Organizational Structure

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan membawahi beberapa fungsi dan bidang, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 246.K/010/IP/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Bagan Susunan Jabatan, *Position Grade* dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan.

The Corporate Secretary stands one level under the Board of Directors, is appointed and dismissed by the Board of Directors, and reports directly to the President Director. The Corporate Secretary supervises several functions and areas, as contained in the Decree of the Board of Directors No. 246.K/010/IP/2022 dated December 27, 2022 on the Structural Chart, Position Grade, and Workforce Formation of the Corporate Secretary.

Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Structure



Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Agung Siswanto yang ditunjuk Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 613.K/020/IP/2022 tanggal 16 Februari 2022. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

The current Corporate Secretary is Agung Siswanto, who was appointed by the Board of Directors under the Decree of the Board of Directors No. 613.K/020/IP/2022 dated February 16, 2022. The appointment has obtained the approval from the Board of Commissioners and taken into account the relevant education, work experience, and competencies required for the Company's business.



Agung Siswanto
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia.
Kelahiran Surabaya, 5 Juli 1973.
Berusia 50 tahun.
Berdomisili di Jakarta, Indonesia.

An Indonesian Citizen, born in Surabaya, July 05, 1973.
50 years old.
Domiciled in Jakarta, Indonesia.

Periode Jabatan Term of Office	2022 sampai sekarang.	2022-present.
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 613.K/020/IP/2022 tanggal 16 Februari 2022.	Decree of the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power No. 613.K/020/IP/2022 dated February 16, 2022.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Tahun 1996 dan Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Tahun 1999.	He is the holder of the Bachelor of Law from Airlangga University (1996) and Master of Management from PPM College of Management (1999).
Riwayat Jabatan Service History	Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power, Beliau pernah menjabat di beberapa Perusahaan dengan berbagai jabatan sebagai berikut: • Manajer SDM dan Humas UBP Suralaya (2010-2013); • Kepala Divisi Administrasi SDM & Hubungan Industrial tahun (2013-2014); • Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta (2014-2017); • Kepala Divisi Talenta (2017-2018); dan • Eksekutif Senior Bidang SDM Kantor Pusat Tugas Karya PT PLN (Persero) (2017-2018).	Prior to serving as the Corporate Secretary of PLN Indonesia Power, he served a number of companies under the following positions: • Manager of Human Capital and Public Relations at GBU Suralaya (2010-2013); • Head of Human Capital Administration & Industrial Relations Division (2013-2014); • Head of Human Capital and Talent Development (2014-2017); • Head of Talent Division (2017-2018); and • Senior Executive of Human Capital at the Head Office, Secondee at PT PLN (Persero) (2017-2018).
Pelatihan yang Diikuti Tahun 2023 Trainings Received in 2023	• Pembekalan *Ranger Leader* PLN Indonesia Power Tahun 2023; • *Capacity Building* & *Workshop* Kehumasan Unit Migrasi pada tanggal 21-23 Februari 2023; • *Workshop* Pengelolaan Komunikasi dan Manajemen Krisis PLN Indonesia Power pada tanggal 6-8 November 2023.	• Briefing for PLN Indonesia Power Ranger Leaders (2023); • Capacity Building & Workshop on PR of Migration Unit (February 21-23, 2023); • Workshop on Communication Management and Crisis Management at PLN Indonesia Power (November 06-08, 2023).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik di Perusahaan maupun perusahaan lainnya.	He does not serve any other position, neither in the Company nor in other companies.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham.	He is not affiliated to any members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or the Shareholders.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Work Guidelines

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*) serta uraian tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi terkait pembentukan organ Sekretaris Perusahaan. Pedoman tersebut mencakup tugas pokok Sekretaris Perusahaan, uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, serta pedoman komunikasi Perusahaan dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Fungsi Sekretaris Perusahaan.

The implementation of the Corporate Secretary's function and duties refers to the Board Manual and the elaboration of its duties and responsibilities contained in the Board of Directors Decree on the establishment of Corporate Secretary organ. These guidelines cover the core duties, elaboration of the duties and responsibilities, and Corporate communication guidelines for the Corporate Secretary as well as other matters pertaining to the implementation of the Corporate Secretary Function's tasks.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Sebagai organ penting pendukung Direksi, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengkaji strategi jangka Panjang, kebijakan, proses bisnis dan proses Sekretaris Perusahaan;
2. Menyusun dan mengendalikan program kerja dan anggaran sesuai fungsi utama Sekretaris Perusahaan untuk mendukung RJPP dan RKAP;
3. Menyusun kajian risiko dan mengelola mitigasinya atas kegiatan di lingkungan Sekretaris Perusahaan;
4. Menyusun usulan dan perencanaan pengadaan Sekretaris Perusahaan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, desain dan strategi komunikasi internal termasuk pengelolaan media sosial, kegiatan Perusahaan dan protokoler;
6. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan komunikasi eksternal, pengelolaan *website*, *media relation* dan *sponsorship* termasuk komunikasi dengan lembaga negara dan lembaga pembuat kebijakan ketenagalistrikan;
7. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan CSR;
8. Melaksanakan pembinaan kegiatan aneka usaha non pembangkit yang ada di lingkungan Perusahaan;
9. Menyusun dan mengendalikan laporan korporat (Laporan Manajemen, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan), rapat korporat, laporan statistik Perusahaan, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Prosedur serta Surat Keputusan terkait informasi korporat;
10. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan GCG;
11. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi RKAP administrasi korporat dan administrasi Anak Perusahaan konsolidasi;
12. Menyusun laporan daan mengendalikan realisasi Tenaga Kerja *outsourcing* di luar struktur organisasi Perusahaan;
13. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan fasilitas Perusahaan dan kesekretariatan;
14. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyediaan fasilitas Perusahaan dan kesekretariatan;
15. Mengelola dan mengendalikan aset dan properti Perusahaan;
16. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan *general cleaning* pada area kerja fasilitas, sarana gedung dan bangunan di lingkungan Perusahaan;
17. Membuat dan mengevaluasi laporan Sekretaris Perusahaan, baik laporan rutin maupun non rutin;
18. Melakukan pembinaan kegiatan terkait bidang kerja kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Perusahaan.

As a vital organ that supports the Board of Directors, the Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. Prepare and analyze long-term strategies, policies, business processes, and procedures of the Corporate Secretary;
2. Prepare and control work program and budget according to the Corporate Secretary's main function to support Company Long-term Plan and WP&B;
3. Prepare risk analysis and manage risk mitigation for activities within the Corporate Secretary;
4. Develop procurement proposal and planning for the Corporate Secretary;
5. Develop, execute, and control internal communication activities, design, and strategy, which include the management of the Company's social media, activities, and protocol;
6. Plan, execute, and control external communication activities, website, media relation, and sponsorship, which include communication with State Agencies and energy policy makers;
7. Plan, execute, and control CSR activities;
8. Provides guidance on beyond kWh business activities within the Company;
9. Develop and control corporate reports (Management Report, Performance Report, Annual Report), corporate meetings, Company statistical report, Public Information Disclosure (KIP) and Procedures, as well as Decrees related to corporate information;
10. Prepare and evaluate GCG activities;
11. Plan, monitor, and evaluate WP&B of corporate administration and consolidated subsidiary administration;
12. Report and control the implemented outsourcing beyond the Company's organizational structure;
13. Prepare and evaluate Company and secretariat facility management policy;
14. Plan, execute, and control the provision of Company and secretariat facilities;
15. Manage and control the Company's assets and properties;
16. Execute and control general cleaning at facility work areas, building facilities, and premises within the Company;
17. Prepare and evaluate Corporate Secretary's regular and non-regular reports;
18. Manage area-specific activities in all Work Units of the Company.

Pengembangan Kompetensi
Competency Development

Untuk meningkatkan kompetensi dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa program pelatihan dan seminar/*workshop* yang dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain sebagai berikut.

For developing competencies that support their duties, the Corporate Secretary has participated in some trainings/seminars/workshops in 2023, as follows:



Nama Diklat Name of Education and Training	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Capacity Building & Workshop Kehumasan Unit Migrasi Capacity Building & Workshop on PR of Migration Unit	PLN Indonesia Power	21-23 Februari 2023 February 21-23, 2023	Jakarta
Pembekalan *Ranger Leader* PLN Indonesia Power Tahun 2023 Briefing for PLN Indonesia Power Ranger Leaders 2023	PT Kubik Kreasi Sisi Lain	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Jakarta
Workshop Pengelolaan Komunikasi dan Manajemen Krisis PLN Indonesia Power Workshop on Communication Management and Crisis Management at PLN Indonesia Power	PLN Indonesia Power	6-8 November 2023 November 6-8, 2023	Jakarta

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Implementation of Corporate Secretary's Duties in 2023

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran, desain dan strategi komunikasi internal, termasuk pengelolaan media sosial, kegiatan Perusahaan dan protokoler;
2. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran dan strategi komunikasi eksternal, pengelolaan *website*, *media relation* dan *sponsorship* termasuk komunikasi dengan lembaga negara dan lembaga pembuat kebijakan ketenagalistrikan;
3. Menyusun dan mengelola sasaran dan strategi serta kegiatan *corporate social responsibility* guna mendukung pencapaian sasaran kerja Perusahaan;
4. Melaksanakan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal sebagai berikut:
   a. Optimalisasi hubungan dua arah dengan *stakeholder* internal dan eksternal melalui media PLN Indonesia Power *Daily New Share* (IDEA), InPower *Weekly News* (IPWN), Buku Pedoman *Strategic Awareness*, *Wallpaper Desktop*, TV *Wall*, *Videotron*, *Standing Banner*, Intranet dan Media sosial.
   b. Kegiatan pengelolaan hubungan dengan *stakeholders*:
      - Hubungan dengan pegawai dilaksanakan melalui kegiatan *Coffee Morning*, BOD Menyapa Unit, Seminar, Halal Bihalal, *Culture Festival* PLN;
      - Hubungan dengan Pelanggan (P2B dan PLN Distribusi) dilakukan melalui Koordinasi rutin yang dilakukan oleh Divisi Niaga dan Settlement setiap bulannya;
      - Hubungan dengan *stakeholder* lainnya dilakukan melalui kegiatan *Media Gathering*, RUPS, Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Kerjasama/*Memorandum of Understanding* (MoU).
5. Mengelola rapat korporat mencakup RUPS, Rapat Direksi, Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi dengan rincian sebagai berikut:
   a. Selama tahun 2023, PLN Indonesia Power telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan telah menerima 15 keputusan RUPS secara sirkuler
   b. Selama tahun 2023, Direksi telah mengadakan rapat internal Direksi sebanyak 23 kali rapat dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 10 kali rapat.
6. Menyusun dan mengelola implementasi kebijakan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan sasaran kerja Perusahaan;

The Corporate Secretary's duties in 2023 are detailed as follows:

1. Develop and control internal communication policy, target, design, and strategy, which include the management of the Company's social media, activities, and protocol;
2. Develop and control external communication policy, target, and strategy, website management, media relations, and sponsorship, which include communication with State Agencies and power policy makers;
3. Develop and manage Corporate Social Responsibility target, strategy, and activities to help achieving the Company's work targets;
4. Establish communication with internal and external parties:
   a. Optimize two-way relations with internal and external stakeholders via PLN Indonesia Power Daily News Share (IDEA), InPower Weekly News (IPWN), Strategic Awareness Guidebook, Desktop Wallpaper, TV Wall, Videotron, Standing Banner, Intranet, and Social Media.
   b. Carry out stakeholder relations management:
      - Maintain relations with Employees through Coffee Morning, "BOD Menyapa Unit" (BOD Greets Units), Seminars, Halal Bihalal, PLN Culture Festival.
      - Maintain relations with Customers (P2B and PLN Distribusi) through regular coordination carried out by the Division of Commerce and Settlement on monthly basis.
      - Maintain relations with other stakeholders via Media Gathering, GMS, Coordination Meetings, and MOU/ Cooperation Signing.
5. Manage corporate meetings that include the GMS, Board of Directors meetings, Board of Commissioners Meetings, ALCO meetings, and coordination meetings as follows:
   a. In 2023, PLN Indonesia Power had held two (2) Annual GMS and received 15 (thirteen) Circular GMS Resolutions;
   b. Throughout 2023, the Board of Directors had held 23 internal meetings and 10 joint meetings with the Board of Commissioners.
6. Develop and manage the implementation of corporate governance policy according to the Company's work objectives;

7. Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
   Sekretaris Perusahaan melaksanakan *self assessment* atas implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2023 yang dilakukan oleh Asesor Internal didampingi oleh Konsultan Independen Parameter SK16/MBU/2012. *Self Assessment* GCG tahun 2023 memperoleh skor 94,76 dan pengukuran GCG menggunakan parameter ASEAN CG *Scorecard* memperoleh skor 96,32.
8. *Monitoring* pencapaian tindak lanjut rekomendasi hasil *self assessment* GCG Tahun 2022 berupa 29 rekomendasi telah selesai 100% ditindaklanjuti;
9. Mengelola kegiatan kesekretariatan untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan dan kegiatan protokoler untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Direksi selama tahun 2023.

7. Assess the implementation of Good Corporate Governance.
   Corporate Secretary carries out self-assessment of the Good Corporate Governance implemented in 2023, by Internal Assessor with assistance from Independent Consultant using the parameters set out in SK16/MBU/2012. The GCG self-assessment in 2023 resulted in a score of 94.76, whereas GCG assessment using ASEAN GC Scorecard resulted in a score of 96.32.
8. The monitoring showed that all 29 recommendations from the GCG self-assessment 2022 findings have completely followed-up;
9. Manage secretariat activities to support the Company's operations and protocols that assist the Board of Directors' activities throughout 2023.

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Performance Evaluation

Penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi secara berkala setiap semester berdasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian didasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, hasil penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan tahun 2023 pada semester 1 mencapai skor sebesar 109,28% dan semester 2 mencapai skor sebesar 104,91% dari target 100%.

The evaluation of Corporate Secretary's performance is carried out by the Board of Directors every semester based on the Key Performance Indicators (KPIs). The evaluation criteria are based on the implementation of the Corporate Secretary's duties and responsibilities throughout 2023. From the evaluation, the Corporate Secretary's performance scored 109.28% in the first semester and 104.91% in the second semester, out of the 100% target.

Internal Audit
Internal Audit

PLN Indonesia Power telah memiliki Satuan Internal Audit yang membantu Direksi untuk mengelola Perusahaan dengan lebih baik serta meningkatkan operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis. Satuan Internal Audit memberikan keyakinan yang independen untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perusahaan serta menyediakan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional Perusahaan.

PLN Indonesia Power has the Internal Audit Unit which helps the Board of Directors to better manage the Company and enhance Company operations through systematic approach. The Internal Audit Unit provides independent assurance to evaluate the adequacy and effectiveness of the Company's governance, risk management, and internal control system while being open for consultations that add value to and enhance the Company's operations.

Untuk mendukung peran Satuan Internal Audit yang independen dan objektif, Satuan Internal Audit memiliki akses tak terbatas ke seluruh area kerja, aset, dan dokumentasi milik Perusahaan, serta dapat langsung berkomunikasi dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Satuan Internal Audit berpedoman pada kebijakan, piagam, pedoman dan prosedur audit internal yang berlaku.

To allow independent and objective works, the Internal Audit Unit is provided with unlimited access to all work areas, assets, and documentations in the Company, as well as direct communication with the Board of Commissioners or via the Audit Committee. In its operations, the Unit is guided by the applicable internal audit policies, charters, guidelines, and procedures.



Struktur dan Kedudukan Internal Audit di Perusahaan

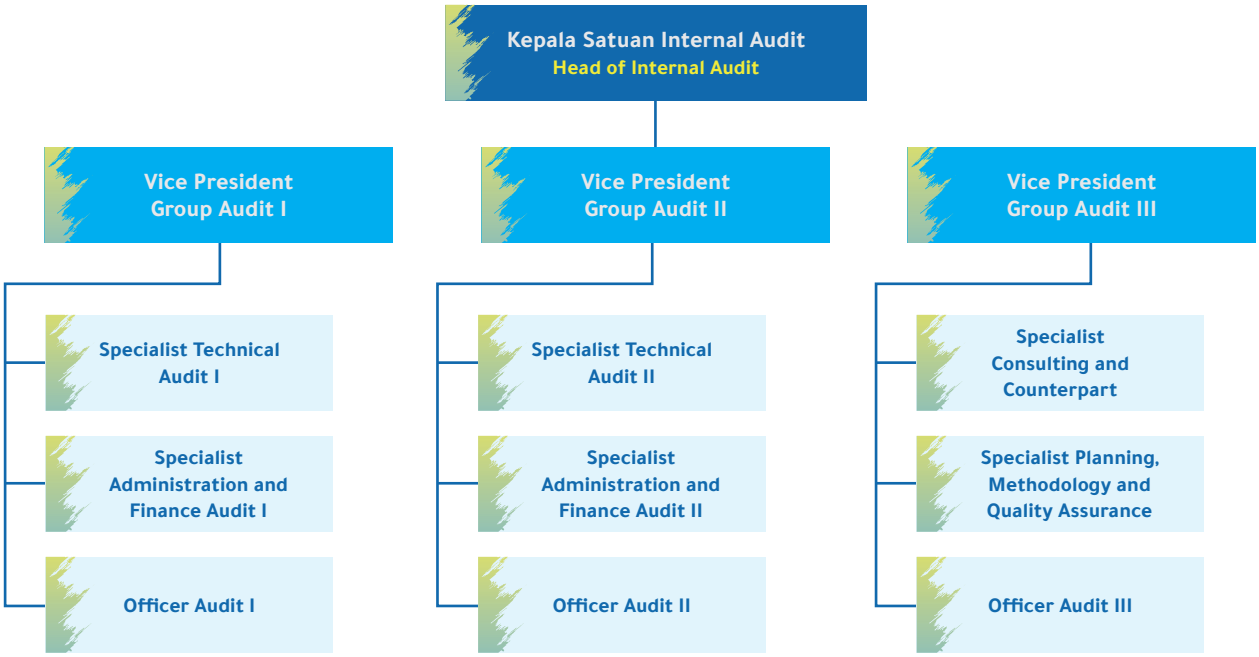
Structure and Position of Internal Audit in the Company

Fungsi audit internal di Perusahaan saat ini dijalankan oleh Satuan Internal Audit yang berkedudukan satu tingkat di bawah Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi langsung ke Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta bertindak independen atau bebas dari campur tangan pihak lain dalam bentuk apapun.

The internal audit function at the Company is currently handled by the Internal Audit Unit which reports directly to President Director and communicates with the Board of Commissioners through Audit Committee. It acts independently without any interference from any parties.

Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 0058.P/DIR/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Bagan Susunan Jabatan, *Position Grade* dan Formasi Tenaga Kerja Satuan Internal Audit PT PLN Indonesia Power, struktur organisasi Satuan Internal Audit tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Internal Audit Unit's organization structure according to the Decree of the Board of Directors No. 0058.P/DIR/2023 dated June 07, 2023 on the Structural Chart, Position Grade, and Workforce Formation of the Internal Audit Unit is as follows:



Profil Kepala Satuan Internal Audit

Profile of the Head of Internal Audit Unit

Satuan Internal Audit dipimpin oleh Kepala Satuan Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Satuan Internal Audit saat ini dijabat oleh Sdr. Suparlan yang diangkat oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 3825.K/020/IP/2022. Pengangkatan Kepala Satuan Internal Audit ini telah melalui persetujuan Dewan Komisaris dan memenuhi kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi yang ditetapkan oleh Perusahaan.

The head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval from the Board of Commissioners. The current Head of Internal Audit Unit is Mr. Suparlan who was appointed by the Board of Directors under the Decree of the Board of Directors No. 3825.K/020/IP/2022. This appointment had been approved by the Board of Commissioners and satisfied the qualifications for such a position, among others educational background, work experience, and the competencies required by the Company.



Suparlan

Kepala Satuan Internal Audit
Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, kelahiran Madiun, 13 Februari 1969.
Berusia 54 tahun, berdomisili di Jakarta, Indonesia.

An Indonesian Citizen, born in Madiun, February 13, 1969.
54 years old, domiciled in Jakarta, Indonesia.

Periode Jabatan Term of Office	2023 sampai saat ini.	2023-present.
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi Nomor 3825.K/020/IP/2022 tanggal 28 Desember 2022.	Decree of the Board of Directors Number 3825.K/020/IP/2022 dated December 28, 2022.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin di STT PLN tahun 2000.	He is the holder of Bachelor of Mechanical Engineering from STT PLN (2000).
Riwayat Jabatan Service History:	Sebelum menjabat sebagai Kepala Satuan Internal Audit PLN Indonesia Power, Beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Operasi UBP Perak Grati (2010-2012); GM UBP Mrica (2012-2014); GM UBP Perak Grati (2015-2017); GM Semarang PGU (2017-2019); GM Priok POMU (2019-2021); serta EVP Riset, Inovasi & Engineering (2021-2022).	Prior to serving as the Head of Internal Audit Unit in PLN Indonesia Power, he was serving as: Operation Manager at GBU Perak Grati (2010-2012); GM of GBU Mrica (2012-2014); GM of GBU Perak Grati (2015-2017); GM of Semarang PGU (2017-2019); GM of Priok POMU (2019-2021); and EVP of Research, Innovation, and Engineering (2021-2022).
Sertifikasi Profesi Internal Audit Internal Audit Professional Certifications:	Beliau telah memperoleh sertifikasi *Certified Internal Audit Executive* (CIAE).	He is a Certified Internal Audit Executive (CIAE).
Pelatihan yang Diikuti Tahun 2023 Trainings in 2023	• *E-Learning Certified Internal Audit Executive* • *Leadership Awards* PT PLN Persero Tahun 2023 • Pembekalan *Ranger Leader* PT PLN Indonesia Power Tahun 2023	• E-Learning on Certified Internal Audit Executive • PT PLN Persero Leadership Awards 2023 • Briefing for PT PLN Indonesia Power Ranger Leaders 2023
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan lain, baik di Perusahaan maupun di perusahaan lainnya.	He does not hold any other position, either in the Company or in any other company.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham.	He is not affiliated to any members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or the Shareholders.

Piagam Audit Internal

Internal Audit Charter

Mengacu pada berbagai perkembangan terkait efektivitas audit internal, pada tahun 2023 Satuan Internal Audit telah melakukan pemutakhiran atas Piagam Audit Internal. Piagam ini disusun untuk mengatur prosedur audit internal Perusahaan, memastikan kepatuhan Satuan Internal Audit terhadap prinsip-prinsip pengaturan dan pelaksanaan audit internal, dan menentukan ruang lingkup tugas dan prosedur pengendalian untuk menjamin dan meningkatkan kualitas audit internal.

Piagam Audit Internal telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 0121.K/DIR/2023 dan Nomor 003.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Piagam Audit Internal Terintegrasi (*Integrated Internal Audit Charter*) PT PLN Indonesia Power.

Piagam tersebut memuat pengaturan, antara lain tentang:
1. Struktur organisasi Satuan Internal Audit;
2. Tugas dan tanggung jawab serta lingkup pekerjaan;
3. Wewenang;
4. Pelaporan;
5. Audit Internal terintegrasi;
6. Penggunaan jasa eksternal untuk mendukung tugas Audit Internal;
7. Komunikasi audit;

Taking into account the developments in internal audit's activities, the Internal Audit Unit updated the Internal Audit Charter in 2023. The Charter is prepared to guide internal audit procedures in the Company, ensure the Unit's compliance with internal audit principles and operations, and determine the scope of work and controlling procedures -- all to ensure and enhance the internal audit quality.

The Internal Audit Charter was stipulated under the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 0121.K/DIR/2023 and No. 003.SK/DK-PLNIP/2023 dated June 15, 2023 on Integrated Internal Audit Charter of PT PLN Indonesia Power.

The Charter covers the following issues:
1. Organizational structure of Internal Audit Unit;
2. Duties and responsibilities and scope of work;
3. Authorities;
4. Reporting;
5. Integrated internal audit;
6. Utilization of external services to support internal audit's duties;
7. Audit communication;



8. Standar pelaksanaan tugas Audit Internal, kode etik dan program *quality assurance*; serta
9. Pertanggungjawaban Satuan Internal Audit.

Selain Piagam Audit, pelaksanaan tugas Satuan Internal Audit juga mengacu pada Pedoman Audit Internal Perusahaan Nomor 0070.P/DIR/2023 tanggal 16 Juni 2023, Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan prosedur lainnya yang diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko.

8. Internal audit duty implementation standard, code of conduct, and quality assurance program; and
9. Responsibilities of Internal Audit Unit.

In addition to the Internal Audit Charter, the Internal Audit Unit also works according to the Company's Internal Audit Guidelines No. 0070.P/010/DIR/2023 dated June 16, 2023, Annual Audit Work Program (AAWP), and other procedures that are integrated into risk management implementation.



Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal
Duties and Responsibilities of Internal Audit

Satuan Internal Audit bertanggung jawab untuk melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek di Perusahaan. Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Satuan Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan audit internal, kebijakan audit, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit Perusahaan sesuai dengan arahan dari PT PLN (Persero), termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas audit Perusahaan;
2. Melaksanakan dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan bidang tugas internal audit yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan milik Perusahaan dan PT PLN (Persero);

The Internal Audit Unit is responsible for performing risk-based audit that covers all areas in the Company. In accordance with the Internal Audit Charter, below are the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit:

1. Aligning the planning, implementation and evaluation of internal audit management policies and strategies, audit policies, audit standards, audit methodology, systems, and audit information technology in accordance with PT PLN (Persero)'s directives, including improving the quality of the Company's audits;
2. Carrying out and adopting internal audit strategies and policies under its responsibility by taking into account the vision, strategies, and policies of the Company and PT PLN (Persero);

3. Menjalankan peran sebagai *third line of defense* dalam melakukan kegiatan pengendalian internal melalui pelaksanaan audit berdasarkan hasil inputan dari *first line of defense* dan *second line of defense* pengendalian internal perusahaan berjalan dengan optimal;
4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program audit internal/audit eksternal (BPK dan KAP)/audit khusus (investigasi/ *fraud*) yang berbasis risiko di seluruh lingkup Perusahaan, termasuk di dalamnya berperan sebagai *counterpart* audit eksternal dan memberikan rekomendasi hasil audit internal serta memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap usulan atau kebijakan mengenai sistem dan prosedur untuk memastikan sistem dan prosedur tersebut memiliki aspek-aspek pengendalian internal;
6. Mengelola hubungan kerja dengan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik, dan/atau instansi lain) dan tindak lanjut hasil audit eksternal;
7. Memastikan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab internal audit serta laporan hasil audit, temuan audit maupun rekomendasi tindak lanjut kepada pihak internal dan eksternal;
8. Memastikan perencanaan audit investigasi sesuai dengan penugasan dari Direksi/Dewan Komisaris serta melaksanakan audit investigasi, penyusunan rekomendasi saran perbaikan atas hasil pelaksanaan audit investigasi kepada Direktur Utama;
9. Memastikan penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) sebagai masukan bagi auditee dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan proses pengendalian internal manajemen risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan Perusahaan;
10. Menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin terselenggaranya evaluasi dan peran aktif Internal Audit dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal, *Risk Management* dan *Governance Process* secara berkesinambungan berkaitan dengan operasional Perusahaan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Manajemen;
11. Melakukan evaluasi kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh *auditee* untuk mengurangi temuan auditor internal dan eksternal;
12. Memastikan penyusunan, pemantauan dan pelaporan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT); serta
13. Melaksanakan kegiatan konsultasi dan pemberian saran secara independen dan objektif atas proses bisnis yang sedang dijalankan Manajemen.

3. Serving as the third line of defense in performing internal controls through audits based on the inputs from the first and second lines of defense to ensure optimal internal control in the Company;
4. Establishing the planning, implementation, and evaluation of risk-based internal audit, external audit (Indonesian Audit Board (BPK) and Public Accounting Firm), and/or special audit (investigation/ fraud) throughout the Company. This includes acting as external audit counterpart, providing recommendations on internal audit results, and monitoring the follow-up to completion;
5. Providing recommendations based on the results of analysis and evaluation of proposals or policies regarding systems and procedures to ensure that they accommodate internal control aspects;
6. Managing work relations with external auditors (Indonesian Audit Board, Public Accounting Firm, and/or other agencies) and follow up on external audit results;
7. Making sure that the implementation of internal audit duties and responsibilities as well as audit results, audit findings and follow-up recommendations are reported to internal and external parties;
8. Making sure that investigative audit planning is in accordance with assignments from the Board of Directors/Board of Commissioners, carrying out investigative audits, and preparing recommendations for improvements based on the investigative audit results to the President Director;
9. Making sure that the preparation of the Audit Result Report (LHA) provides input for the auditee(s) in order to increase the effectiveness of risk management internal control and Good Corporate Governance (GCG) implementations while adding value to achieving the Company's objectives;
10. Carrying out supervisory function to make sure that Internal Audit evaluations and active roles help continuously improving the effectiveness of Internal Control System, Risk Management, and Governance Process for the Company's operations so that the targets set by Management can be met;
11. Evaluating the adequacy of the implementation of follow-up improvements performed by the auditee(s) in order to reduce the number of findings by internal and external auditors;
12. Establishing the preparation, monitoring and reporting of the Annual Audit Work Program (PKAT); and
13. Providing independent and objective consultancy and recommendations for business processes implemented by the Management.

Kode Etik dan Pernyataan Independensi Auditor Internal

Code of Conduct and Statement of Independence of Internal Auditors

Satuan Internal Audit memiliki kode etik yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Kode etik ini disusun dengan mengacu pada Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Audit (IIA). Semua auditor internal wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip dalam kode etik, sebagai berikut:

The Internal Audit Unit has a code of conduct whose application is mandatory for every operational activity. The Code of Conduct was prepared by referring to the International Standard for Internal Audit Professional Practices issued by the Institute of Internal Audit (IIA). All internal auditors must apply and enforce the following principles within the code:



Integritas
1. Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, profesional dan tanggung jawab;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di Perusahaan;
3. Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi Auditor; dan
4. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan Perusahaan.

Objektivitas
1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian Auditor;
2. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan
3. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan Perusahaan.

Kerahasiaan
1. Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan; dan
2. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan diri sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak berjalan dengan tujuan hukum dan etika di Perusahaan.

Kompetensi
1. Melakukan audit pada objek yang sesuai keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit;
2. Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Internal Perusahaan yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal; dan
3. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.

Untuk menjaga objektivitas dan independensinya, setiap tahun auditor internal wajib menandatangani *Conflict of Interest Statement* untuk memastikan bahwa masing-masing auditor dalam Satuan Internal Audit tidak memiliki potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penandatanganan dilakukan oleh Senior Leader Satuan Internal Audit.

Integrity
1. Performing internal audit tasks in honest, productive, professional, and responsible manners;
2. Complying with the laws and regulations and applicable internal regulations;
3. Refraining from participating in illegal conducts or activities prohibited for an auditor; and
4. Respecting and contributing to the legal objectives and ethics stipulated by the Company.

Objectivity
1. Refraining from participating in activities that may affect an auditor's assessment;
2. Refraining from receiving anything in any form that may compromise their professional judgment; and
3. Disclosing all important facts in their possessions for the implementation of their duties and for avoiding any loss to the Company.

Confidentiality
1. Acting wisely in utilizing and protecting information obtained in their tasks; and
2. Refraining from using the information obtained in their tasks for personal interest through illegal means or non-compliance with the objectives of the law and the Company's ethics.

Competency
1. Conducting audits according to their skills, knowledge, expertise, and experience;
2. Conducting audits according to the Company's Internal Audit Charter and Guidelines that are in accordance with the Internal Auditor Professional Standard; and
3. Enhancing competency through continuous professional education that improves work quality and efficiency.

To maintain objectiveness and independence, internal auditors must sign the Conflict of Interest Statement on an annual basis. This is required to ensure that every auditor in the Internal Audit Unit does not have any potential conflict of interest in their course of duties and responsibilities. The signing of the Statement is represented by the Senior Leaders of the Internal Audit Unit.

Jumlah, Kualifikasi dan Sertifikasi Audit Internal
Quantity, Qualifications, and Certification of Internal Audit Unit

Sampai dengan akhir tahun 2023, Satuan Internal Audit memiliki 35 orang personil dengan berbagai latar belakang pendidikan dan telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Perusahaan serta yang tercantum dalam Piagam Audit Internal.

Berikut kualifikasi pendidikan yang dimiliki pegawai Satuan Internal Audit Perusahaan tahun 2023.

By the end of 2023, the Internal Audit Unit consisted of 35 people with different educational backgrounds. They have met the qualification and competency requirements as specified in the Internal Audit Charter.

The details of their educational qualifications are elaborated as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Latar Belakang Pendidikan Educational Background
Suparlan	Kepala Satuan Internal Audit Head of Internal Audit Unit	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Bayu Husodho	Vice President	Magister Teknik Informatika Master of Informatics Engineering
Yudi Mulyadi	Vice President	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
Setyo Harsono	Specialist Technical	Magister Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering
Suwarna	Specialist Technical	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Robert Sunarijanto	Specialist Technical	STM Elektro Technical High School of Electrical Engineering
Ganjar Prihartanto	Specialist Technical	D3 Mesin Associate (D3) of Mechanical Engineering
Choirul Anam	Specialist Technical	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Hasan Basori	Specialist Technical	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Harpendi	Specialist Technical	Sarjana Bachelor
Leo Rinaldi Hastasani	Specialist Technical	Sarjana Bachelor
Yovinus Jean Steven	Specialist Technical	Sarjana Bachelor
Zainal Abidin	Specialist Technical	Magister Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering
Hery Suryansyah	Specialist Administration and Finance	Sarjana Ilmu Ekonomi Bachelor of Economics
Dana Wisastra	Specialist Administration and Finance	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
Ika Ramalia Sukhairani	Specialist Administration and Finance	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
Adek Hendriana	Specialist Administration and Finance	Magister Bidang Manajemen Master of Management
Agung Wicaksana	Specialist Administration and Finance	Magister Teknologi Informasi Master of Information Technology
Agnes Isti	Specialist Administration and Finance	Magister Bisnis Konsentrasi Keuangan Master of Business, Majoring in Finance
Arief Hidayat	Specialist Planning, Methodology and QA	Magister HR & Organizational Studies Master of HR & Organizational Studies
Retno Wulandari	Specialist Planning, Methodology and QA	Magister Manajemen Pemasaran & Keuangan Master of Marketing & Financial Management
Purwo Adiwiyanto	Specialist Consulting and Counterpart	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
Marpodho	Specialist Consulting and Counterpart	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Sentot Kristanto	Specialist Consulting and Counterpart	Magister Manajemen Master of Management
Musyawir	Specialist Consulting and Counterpart	Sarjana Elektro/Listrik Bachelor of Electrical Engineering
Betrecia Nurhelena Triaryani	Officer Audit	Sarjana Psikologi Bachelor of Psychology
M. Hisyam Lanang	Officer Audit	Sarjana Teknik Fisika Bachelor of Physics Engineering
Sopian Al Rasyid	Officer Audit	Sarjana Teknik Elektro Bachelor of Electrical Engineering
Tomy Afrilianto	Officer Audit	Sarjana Teknik Industri Bachelor of Industrial Engineering
Bastian Edward Trijayanto	Officer Audit	Sarjana Teknik Industri Bachelor of Industrial Engineering
Putri Muqodimatul Wahyu Inayah	Officer Audit	Sarjana Teknik Industri Bachelor of Industrial Engineering
Andreas Novier	Officer Audit	Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering
Resta Purnita	Officer Audit	Sarjana Ekonomi Manajemen Bachelor of Economics and Management
Nurma Amalia	Junior Officer of Human Capital Development Assigned to Audit III	D3 Jurusan Akuntansi Associate (D3) of Accounting



Seluruh personil audit juga memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi internal audit sebagai berikut:

All audit personnel also hold the following internal audit professional certifications and qualifications:

Nama Sertifikasi Name of Certification	Jumlah Sertifikasi Number of Certification
Certified Internal Audit Executive (CIAE)	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	2
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	4
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	17
Professional Internal Auditor (PIA)	1
Qualified Internal Auditor (QIA)	25
Audit Intern Tingkat Lanjutan Advanced Internal Audit	7

Program Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Competency Development Programs for Internal Audit Unit

Selama tahun 2023, Satuan Internal Audit telah mengikuti berbagai program untuk mengembangkan kompetensi profesional auditor, sebagai berikut:

In 2023, the Internal Audit Unit has sent its auditors to enroll in the following programs to develop their professional competency:

Nama Diklat Name of Training	Peserta Participant	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation	Lokasi Location
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Dasar E-Learning on Basic Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	• Specialist Administration and Finance Audit I • Specialist Technical Audit II	13 s.d. 27 Februari 2023 February 13-27, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Dasar E-Learning on Basic Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	• Specialist Technical Audit II	13 s.d. 27 Februari 2023 February 13-27, 2023	*Online*
ICT *Awareness & Internal Audit Course* ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Batch* 1	• Specialist Administration and Finance Audit I • Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Consulting and Counterpart • Specialist Technical Audit II • Specialist Technical Audit I • Specialist Planning, Methodology and QA • Officer Audit I • Officer Audit III	14 s.d. 16 Februari 2023 February 14-16, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* Tingkat Manajerial E-Learning on Managerial-Level Qualified Internal Auditor Certification	Junior Officer of Human Capital Development Assigned to Audit III	6 s.d.15 Maret 2023 March 06-15, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* Tingkat Lanjutan E-Learning on Advanced Qualified Internal Auditor Certification	Specialist Technical Audit I	6 s.d.18 Maret 23 March 06-18, 2023	*Online*
ICT *Implementing* ISO 30414:2018 *Batch* 1	• Specialist Technical Audit I • Officer Audit III	27 s.d. 28 Maret 2023 March 27-28, 2023	*Online*
E-Learning Fraud Auditing 1	• Specialist Technical Audit II • Officer Audit I • Officer Audit III	3 s.d. 6 April 2023 April 03-06, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* Tingkat Manajerial E-Learning on Managerial-Level Qualified Internal Auditor Certification	• Specialist Technical Audit I • Specialist Administration and Finance Audit I • Specialist Consulting and Counterpart • Specialist Planning, Methodology and QA • Officer Audit III	3 s.d.12 April 2023 April 03-12, 2023	*Online*
E-Learning Certified Internal Audit Executive	Kepala Satuan Internal Audit Head of Internal Audit Unit	14 s.d. 28 Juli 2023 July 14-28, 2023	*Online*
E-Learning ISO 37301:2021 *Compliance Management System Batch* 2	• Specialist Administration and Finance Audit I • Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Consulting and Counterpart • Specialist Technical Audit II • Specialist Planning, Methodology and QA	17 s.d.18 April 2023 April 17-18, 2023	*Online*

Nama Diklat Name of Training	Peserta Participant	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation	Lokasi Location
ICT ISO 37301:2021 C*ertified Compliance Professional* (CCP)	• Specialist Administration and Finance Audit I • Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Consulting and Counterpart • Specialist Technical Audit II	2 s.d. 5 Mei 2023 May 02-05, 2023	*Online*
ICT Metodologi dan *Quality Assurance Internal Audit* ICT - Internal Audit Methodology and Quality Assurance	Seluruh pegawai Satuan Internal Audit All employees of the Internal Audit Unit	3 s.d. 5 Mei 2023 May 03-05, 2023	Semarang
E-Learning Pelatihan *Fraud Auditing* 2 E-Learning on Fraud Auditing 2	Officer Audit I	11 s.d. 14 Juli 2023 July 11-14, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Dasar E-Learning on Basic Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	Specialist Technical Audit II	17 s.d. 31 Juli 2023 July 17-31, 2023	*Online*
E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi BUMN E-Learning on Increasing Understanding on Gratuities in BUMN	• Specialist Administration and Finance Audit I • Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Consulting and Counterpart • Specialist Technical Audit II • Specialist Planning, Methodology and QA	3 s.d. 4 Agustus 2023 August 03-04, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Lanjutan E-Learning on Advanced Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	Specialist Technical Audit II	7 s.d. 21 Agustus 2023 August 07-21, 2023	*Online*
E-Learning Pelatihan *Fraud Auditing* 2 E-Learning on Fraud Auditing 2	Officer Audit III	12 s.d 15 September 2023 September 12-15, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* Lanjutan E-Learning on Advanced Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	• Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Technical Audit II • Specialist Planning, Methodology and QA	18 September s.d. 2 Oktober 2023 September 18-October 02, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* Lanjutan E-Learning on Advanced Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	• Vice President Group Audit I • Specialist Administration and Finance Audit I	16 s.d. 28 Oktober 2023 October 16-28, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* Lanjutan E-Learning on Advanced Qualified Auditor Certification	Specialist Administration and Finance Audit I	17 s.d. 31 Juli 2023 July 17-31, 2023	*Online*
E-Learning Training Financial Modeling	• Specialist Technical Audit I • Officer Audit I	17 s.d.18 Juli 2023 July 17-18, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified* Internal Auditor Manajerial E-Learning on Managerial-Level Qualified Internal Auditor Certification	• Specialist Technical Audit II • Specialist Consulting and Counterpart	16 s.d. 25 Oktober 2023 October 16-25, 2023	*Online*
E-Learning Sertifikasi *Qualified* Internal Auditor Manajerial E-Learning on Managerial-Level Qualified Internal Auditor Certification	Specialist Consulting and Counterpart	21 s.d.30 Agustus 2023 August 21-30, 2023	*Online*
ICT Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Skema Pengelolaan Keamanan Informasi ICT - BNSP Training and Certification of Information Security Management Scheme	Specialist Administration and Finance Audit I	6 s.d. 8 November 2023 November 06-08, 2023	*Online*
ICT Pembelajaran (Penugasan) Audit Kinerja ICT - Learning (Assignment) on Performance Audit	• Specialist Technical Audit I • Specialist Consulting and Counterpart • Officer Audit II • Officer Audit III	8 s.d.11 Mei 2023 May 08-11, 2023	*Online*
ICT Seminar Nasional dan Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal ICT - National Seminar and Inauguration of Internal Auditor Competency Title	• Vice President Group Audit II • Specialist Consulting and Counterpart • Specialist Planning, Methodology and QA	9 s.d.10 November 2023 November 9-10, 2023	*Online*
Internal Audit ISO 30414:2018	• Specialist Technical Audit I • Officer Audit III	15 s.d. 16 Mei 2023 May 15-16, 2023	*Online*
Leadership Awards PT PLN Persero Tahun 2023 PT PLN (Persero) Leadership Awards 2023	• Kepala Satuan Internal Audit • Specialist Technical Audit II	5 Oktober 2023 October 05, 2023	PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Nama Diklat Name of Training	Peserta Participant	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation	Lokasi Location
Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) Qualified Risk Management Officer (QRMO) Training and Certification	• Officer Audit I • Officer Audit II • Junior Officer of Human Capital Development Assigned to Audit III	9 s.d.11 Oktober 2023 October 09-11, 2023	*Online*
Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) Qualified Risk Management Officer (QRMO) Training and Certification	• Specialist Technical Audit I • Specialist Technical Audit II • Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Consulting and Counterpart • Officer Audit II • Officer Audit III	11 s.d. 13 Oktober 2023 October 11-13, 2023	*Online*
Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) Qualified Risk Management Officer (QRMO) Training and Certification	• Specialist Technical Audit I • Specialist Technical Audit II • Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Consulting and Counterpart	22 s.d. 24 November 2023 November 22-24, 2023	*Online*
Pembekalan *Ranger Leader* PT PLN Indonesia Power Tahun 2023 Briefing for PT PLN Indonesia Power Ranger Leaders 2023	• Kepala Satuan Internal Audit • Vice President Group Audit I • Vice President Group Audit II	10 Agustus 2023 August 10, 2023	*Online*
Pengukuhan Calon Wisudawan QIA Konferensi Auditor Internal Inauguration of QIA Graduates - Internal Auditors' Conference	• Specialist Technical Audit I • Specialist Administration and Finance Audit I • Specialist Consulting and Counterpart • Specialist Planning, Methodology and QA • Officer Audit III	5 s.d. 6 Juli 2023 July 05-06, 2023	Yogyakarta
Pengukuhan Wisudawan QIA dan Seminar Nasional Internal Audit Inauguration of QIA Graduates and Internal Audit National Seminar	• Specialist Technical Audit II • Specialist Consulting and Counterpart	6 s.d. 7 Desember 2023 December 06-07, 2023	Bali
Self Learning Cyber Security Series : Intro to IT *Risk Management*	Junior Officer of Human Capital Development Assigned to Audit II	5 Juni 2023 June 05, 2023	*Online*
Sertifikas*i Qualified Internal Auditor* (QIA) Dasar Basic Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	• Vice President Group Audit I • Specialist Technical Audit II • Specialist Administration and Finance Audit I • Specialist Administration and Finance Audit II • Specialist Planning, Methodology and QA	21 Agustus - 2 September 2023 August 21-September 02, 2023	*Online*
Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Lanjutan Advanced Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	Specialist Consulting and Counterpart	21 Agustus - 2 September 2023 August 21-September 02, 2023	*Online*
Training dan Sertifikasi QRMP QRMP Training and Certification	Vice President Group Audit II	8 s.d. 12 Mei 2023 May 08-12, 2023	*Online*
Webinar Literasi Digital KOMINFO Webinar on Digital Literation by Ministry of Communication and Information Technology	• Specialist Administration and Finance Audit I • Junior Officer of Human Capital Development Assigned to Audit III	31 Mei 2023 May 31, 2023	*Online*
Workshop Peningkatan Peran *Change Agent:* Tahap Pendampingan & *Passionate Ranger* Workshop on Enhancing the Role of Change Agent - Assistance Stage & Passionate Ranger	Officer Audit III	13 s.d 14 Juli 2023 July 13-14, 2023	*Online*

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Audit Internal

Internal Audit Unit's Work Plan Implementation Report

Satuan Internal Audit menyampaikan hasil kerjanya secara berkala dalam bentuk Laporan Hasil Audit kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada tahun 2023, Satuan Internal Audit telah melakukan kegiatan sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang telah disusun berdasarkan pendekatan *Risk Based Internal Audit*, sebagai berikut.

Regularly, the Internal Audit Unit presents its outcome in an Audit Result Report to the Board of Directors and the Board of Commissioners through Audit Committee. In 2023, the Internal Audit Unit performed the following activities in accordance with the Annual Audit Work Plan (AAWP) prepared based on the Risk-Based Internal Audit.

1. **Kegiatan Audit Operasional**
   Kegiatan audit operasional dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direksi. Selama tahun 2023, Satuan Internal Audit telah melakukan Audit Operasional Unit pada 22 objek audit dan Audit Operasional Kantor Pusat sebanyak 3 (tiga) objek audit/Departemen.

2. **Kegiatan Konsultasi dan Kepatuhan**
   Selama tahun 2023, Satuan Internal Audit telah melaksanakan kegiatan konsultasi yang dilakukan pada kantor pusat dan unit. Adapun kegiatan konsultasi yang dilakukan terkait konsultasi portfolio dan *subsidiaries management* kantor pusat serta konsultasi program kerja persiapan pemeliharaan pembangkit di unit.

   Selain kegiatan konsultasi, pada tahun 2023 Satuan Internal Audit juga melakukan kegiatan atau tinjauan atas kepatuhan Perusahaan yang mencakup tinjauan atas pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) di Perusahaan, Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perusahaan serta pengawasan terhadap penyimpangan internal yang mungkin dilakukan oleh pegawai di Perusahaan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan menghindari tindakan penyimpangan atau kecurangan di lingkungan Perusahaan. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, selama tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan yang bersifat kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan.

   Satuan Internal Audit juga melakukan berbagai kegiatan pendukung lainnya, antara lain audit tematik terkait *capital maintenance*, digitalisasi pembangkit dan pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), serta kegiatan *joint audit* dengan SPI PT PLN (Persero) pada Suralaya Power Generation Unit.

3. Kegiatan Pendukung Audit Lainnya
   Sepanjang tahun 2023, Satuan Internal Audit juga melakukan kegiatan pendukung audit lainnya, antara lain:
   - Audit *Adhoc* Energi Primer pada Suralaya Power Generation Unit;
   - Audit *Review* Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Primer Pembangkit;
   - Audit *Review* Proses *Assessment Maturity Level Asset Management*;
   - Audit Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) pada Saguling POMU, Suralaya PGU, dan Banten 1 Suralaya PGU;
   - Melaksanakan Pendampingan Audit Operasional pada PT PLN Indonesia Power Grati PGU dan PT PLN Indonesia Power Priok PGU oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero);
   - Melaksanakan pendampingan Pemeriksaan atas Kepatuhan yang dilakukan oleh BPK RI;
   - Melaksanakan pendampingan Audit Kinerja dan audit teknologi informasi pada PT PLN Indonesia Power oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero);
   - Melaksanakan pendampingan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
   - Melaksanakan pendampingan audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) antara lain terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) dan implementasi pemanfaatan limbah FABA, dan audit subsidi listrik.

1. **Operational Audit Activities**
   The operational audit activities are performed according to the audit work plan approved by the Board of Directors. In 2023, the Internal Audit Unit has assessed 22 audit objects during Unit Operational Audit and three (3) audit objects/Departments during Head Office Operational Audit.

2. **Consulting and Compliance Activities**
   Consulting activities were also carried out at the Head Office and Units. They cover consultancies about portfolio and subsidiary management at the Head Office and consultancies about the work plan for power plant maintenance preparation at Units.

   In addition to consultancies, in 2023, the Internal Audit Unit also reviewed the Company's compliance with the Whistleblowing System (WBS), Gratuity Control, and Anti-Bribery Management System enforcement, while supervising potential fraudulent activities by the Company's employees. This was carried out to prevent and avoid unlawful acts or frauds in the Company. The supervision verified that there were no frauds committed by the Company's employees throughout 2023.

   Other supporting activities carried out include thematic audit concerning capital maintenance, power plant digitalization, and NRE-based power plant development, as well as joint audit with the Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) in Suralaya Power Generation Unit.

3. **Other Audit-Supporting Activities**
   Throughout 2023, the Internal Audit Unit carried out other audit supporting activities, among others:
   - Ad hoc audit of primary energy in Suralaya Power Generation Unit;
   - Review audit of biomass utilization for power plant primary energy;
   - Review audit of asset management maturity level assessment process;
   - Audit of Non-Operating Fixed Assets in Saguling POMU, Suralaya PGU, and Banten 1 Suralaya PGU;
   - Assistance for operational audit performed by PT PLN (Persero) Internal Audit Unit at PT PLN Indonesia Power Grati PGU and PT PLN Indonesia Power Priok PGU;
   - Assistance for compliance audit performed by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI);
   - Assistance for performance audit and IT audit by PT PLN (Persero) Internal Audit Unit at PT PLN Indonesia Power;
   - Assistance for audit by the Inspectorate General of the Ministry of Finance;
   - Assistance for audit by PT PLN (Persero) Internal Audit Unit concerning new and renewable energy (NRE) and FABA utilization, and for audit of electricity subsidies.



4. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

Satuan Internal Audit telah melakukan proses pemantauan penyelesaian temuan audit yang ada. Seluruh temuan audit telah diinformasikan kepada masing-masing Unit/Departemen terkait. Hasil dari tindak lanjut atau perbaikan yang telah dilakukan oleh *Auditee* dilaporkan secara berkala melalui aplikasi ProRBA.

Per 31 Desember 2023, terdapat 490 rekomendasi hasil audit internal dan seluruhnya atau sebesar 100% telah selesai ditindaklanjuti, sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:

4. Monitoring Follow-Up on Audit Findings

The Internal Audit Unit performed the monitoring of the follow-ups on the audit findings. All of these findings have been reported to each relevant Unit/Department. Repairs or improvements resulted from the follow-ups by the auditee(s) are periodically reported in ProRBA application.

As of December 31, 2023, there were 490 internal audit recommendations, all followed up as elaborated in the table below:

Keterangan Description	Batas Penyelesaian Tindak Lanjut Pada Semester I Max. Completion of the Follow-Ups Semester 1			Batas Penyelesaian Tindak Lanjut Pada Semester II Max. Completion of the Follow-Ups Semester 2		
	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Rekomendasi ditindaklanjuti Recommendation followed up	Status *monitor* Monitoring status	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Rekomendasi ditindaklanjuti Recommendation followed up	Status *monitor* Monitoring status
Head Office	0	0	0	17	17	0
Power Generation Unit & Power Generation and O&M Services Unit (PGU &POMU)	69	69	0	248	248	0
Maintenance Services Unit (MSU)	0	0	0	21	21	0
Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan & Unit Pelaksana Pembangkitan (UPDK & UPK) Generation Control Implementation Unit (PGCIU) & Generation Implementation Unit (PGIU)	0	0	0	135	135	0
Jumlah Total	**69**	**69**	**0**	**421**	**421**	**0**

Satuan Internal Audit juga menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil temuan/rekomendasi audit eksternal yang dilakukan oleh BPKP, BPK RI dan Kantor Akuntan Publik (KAP), sebagaimana tabel berikut:

The Internal Audit Unit also followed-up on every finding and recommendation from external audit findings/recommendations by BPK RI and Public Accounting Firm as follows:

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPKP Tahun 2023

Monitoring of Follow-ups on Audit Findings from BPKP in 2023

No.	Pemeriksaan BPKP Audit by BPKP	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Status	
			Sudah Ditindaklanjuti Followed up	Belum Ditindaklanjuti No follow-up
1.	Pengawasan P3DN P3DN Supervision	7	7	0

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2023

Monitoring of Follow-ups on Audit Findings from BPK RI in 2023

No.	Pemeriksaan BPK RI Audit by BPK RI	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Status	
			Sudah Ditindaklanjuti Followed up	Belum Ditindaklanjuti No follow-up
1.	Tidak ada N/A	-	-	-

Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit KAP Tahun 2023

Monitoring of Follow-ups on Audit Findings from Public Accounting Firms (KAP) of 2023

No.	Pemeriksaan KAP Audit by Public Accounting Firm	Jumlah Temuan Number of Findings	Status	
			Sudah Ditindaklanjuti Followed up	Belum Ditindaklanjuti No follow-up
1.	Tidak ada N/A	-	-	-

5. Kebijakan dan Frekuensi Rapat Audit Internal Bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Satuan Internal Audit melakukan komunikasi dengan Direksi dan Komite Audit dengan mengadakan rapat secara berkala mengenai rencana strategis Perusahaan, penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan perkembangan rencana audit tahunan, serta kinerja Satuan Internal Audit yang terdiri atas laporan hasil audit dan status implementasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Satuan Internal Audit dapat hadir dalam rapat Direksi dan rapat yang diselenggarakan atas inisiasi Satuan Internal Audit maupun atas permintaan Komite Audit.

Sepanjang tahun 2023, Satuan Internal Audit telah mengikuti rapat bersama Direksi sebanyak 12 kali dan rapat bersama Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali rapat.

5. Policies and Frequency of Internal Audit Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

The Internal Audit Unit communicates with the Board of Directors and Audit Committee through periodical meetings that discuss about the Company's strategic plan, Annual Audit Performance Program preparation, progress of annual audit plan, and Internal Audit Unit performance. The latter topic covers report of audit results and the status of implemented follow-ups. The Internal Audit Unit may attend the meetings organized by the Board of Directors, the Internal Audit Unit, and/or the Audit Committee.

In 2023, this Unit has attended 12 meetings with the Board of Directors and five (5) meetings with the Audit Committee.

Keterangan Description	Rapat Satuan Internal Audit dengan: Internal Audit Unit's Meeting with	
	Direksi Board of Directors	Komite Audit Audit Committee
Jumlah Rapat Number of Meetings	12	5
Kehadiran Attendance	12	5

Evaluasi Kinerja Audit Internal
Evaluation of Internal Audit Performance

Penilaian kinerja Satuan Internal Audit dilakukan melalui pengukuran pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahunan yang telah disepakati antara Kepala Satuan Internal Audit dengan Direktur Utama. Kriteria penilaian didasarkan pada beberapa aspek yang menjadi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Internal Audit yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan *Auditee*;
2. Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja, yang terdiri atas pelaksanaan konsultasi dan saran atas proses bisnis yang dijalankan Manajemen serta efektivitas pelaksanaan program kerja dan audit tahunan;
3. Audit terintegrasi dengan PT PLN (Persero);
4. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal;
5. Pelaksanaan Pengendalian Mutu (*Quality Assurance*) Audit;
6. Skor GCG perihal Audit;
7. Laporan pengawalan pencapaian program strategis Korporat;
8. Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan RUPS, Keputusan Rapat Direksi, dan Arahan Dewan Komisaris;
9. Membuat atau meng*update* kebijakan/strategi terkait Divisi;
10. Penyelesaian Proses Bisnis Perusahaan; serta
11. *Compliance*.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, hasil penilaian kinerja Satuan Internal Audit tahun 2023 mencapai skor sebesar 100,79% dari target 100% (melebihi dari target yang ditetapkan).

Internal Audit Unit's performance assessment takes into account the annual Key Performance Indicator (KPI) achievement agreed upon by the Head of Internal Audit Unit and President Director. The assessment criteria cover several aspects performed in 2023 under the Internal Audit Unit's duties and responsibilities:

1. Auditee satisfaction survey;
2. Effectiveness of Work Plan execution, covering implementation of consultancy and advices on the business processes conducted by the Management and the effectiveness of annual Work Plan and Audit implementation;
3. Integrated audit with PT PLN (Persero);
4. Completion of follow-ups on external audit findings;
5. Implementation of audit quality assurance;
6. GCG score for audit performance;
7. Corporate strategic program achievement monitoring report;
8. Completion of follow-ups on GMS directives, BOD meeting resolutions, and BOC directives;
9. Preparation or update of Divisional policies/strategies;
10. Completion of Company's business process; and
11. Compliance.

The Internal Audit Unit scored 100.79% for its performance throughout 2023. This exceeded the assessment score target of 100%.

Manajemen Risiko
Risk Management

Sistem manajemen risiko yang diterapkan PLN Indonesia Power saat ini telah diintegrasikan ke dalam proses bisnis Perusahaan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis risiko yang efektif untuk mencapai tujuan strategis dan operasional Perusahaan. Perusahaan berupaya memetakan seluruh risiko yang muncul, yang terdiri dari risiko baru atau yang telah diketahui sebelumnya serta risiko yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi terkait kecenderungan, tingkat keparahan, dan probabilitas terjadinya, sekaligus menyusun rencana mitigasi yang harus dilakukan.

The currently applied risk management system at PLN Indonesia Power has been integrated into the Company's business processes, serving as the foundation for effective risk-based decision making for meeting the Company's strategic and operational goals The Company seeks to map all emerging risks, which include new or previously known risks and risks with high level of uncertainty regarding trend, severity, and probability of occurrence, as well as to plan the mitigation activities for implementation.

PLN Indonesia Power meyakini bahwa Manajemen risiko sangat penting dalam menjalankan bisnis dan mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan, melindungi dan meningkatkan nilai, reputasi serta aset Perusahaan. Sebagai perusahaan yang turut memegang peranan strategis dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia, PLN Indonesia Power memahami bahwa risiko secara inherent melekat pada seluruh fungsi yang dijalankan Perusahaan dan pada inisiatif-inisiatif strategis yang akan ditempuh oleh Perusahaan. Untuk itu, diperlukan Sistem Manajemen Risiko yang efektif yang didukung oleh tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC), serta keterlibatan seluruh pihak di Perusahaan untuk mengelola dan mengawasi penerapan kebijakan dan implementasi manajemen risiko di Perusahaan.

PLN Indonesia Power believes that risk management is crucial in running business and supporting the achievement of Company's strategic goals, while protecting and enhancing its values, reputation, and assets. As a company with a strategic role in Indonesia's power sector, PT PLN Indonesia Power understands that there are inherent risks in all the functions the Company operates as well as in the strategic initiatives to be taken by the Company. This is why an effective Risk Management System is required, along with governance, risk and compliance (GRC) support and involvement of all Company personnel in order to manage and supervise risk management implementation and policies in the Company.

Manajemen risiko yang diterapkan saat ini didasarkan pada pandangan ke depan, independensi, komitmen terhadap tujuan Perusahaan, serta keterlibatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Direksi bersama Dewan Komisaris Perusahaan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk membangun sistem manajemen risiko yang dapat memastikan pengelolaan yang komprehensif dan konsisten atas seluruh risiko.

The risk management currently implemented is based on foresight, independence, commitment to the Company's goals, and the engagement of the Board of Commissioners and Directors. The Board of Directors together with the Board of Commissioners have overall responsibility for building a risk management system that ensures comprehensive and consistent management of all risks.

Kebijakan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan
Risk Management System Policy

Sistem manajemen risiko Perusahaan yang ada saat ini telah diintegrasikan ke dalam proses bisnis Perusahaan dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis risiko yang efektif di berbagai tingkat organisasi untuk mencapai tujuan strategis dan operasional.

The Company's existing risk management system has now been integrated into its business processes, enabling effective risk-based decision-making at various organization levels to achieve its strategic and operational objectives.

PLN Indonesia Power secara khusus menetapkan pedoman manajemen risiko di Perusahaan, sejalan dengan kerangka manajemen risiko yang diterapkan. Berbagai pedoman tersebut antara lain:

PLN Indonesia Power specifically established risk management guidelines that are aligned with the risk management framework applied. These guidelines include:



1. Surat Keputusan Direksi Nomor 138.K./010/IP/2021 Tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Indonesia Power tanggal 30 Desember 2021;
2. Peraturan Direksi Nomor 0073.P/DIR/2023 Tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/ *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Terintegrasi;
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 030.K/010/IP/2019 tentang Peningkatan *Risk Awareness & Risk Culture* di Lingkungan Perusahaan;
4. Surat Edaran Direksi Nomor 12.E/012/IP/2021 tentang Taksonomi Risiko Perusahaan; serta
5. Surat Edaran Direksi Nomor 0005.E/DIR/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan *Fraud Risk Assessment*.

Berbagai pedoman ini dijadikan panduan untuk menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen risiko sekaligus memastikan kejelasan *governance structure* manajemen risiko sudah terintegrasi sepenuhnya dengan sistem yang ada di Perusahaan.

1. Decree of the Board of Directors No. 138.K/010/IP/2021 on Guidelines for Integrated Risk Management at PT PLN Indonesia Power dated December 30, 2021;
2. Board of Directors Regulation No. 0073.P/DIR/2023 on General Policy on the Implementation of Integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC);
3. Decree of the Board of Directors No. 030.K/010/IP/2019 on Enhancing Risk Awareness and Risk Culture in the Company;
4. Circular of the Board of Directors No. 12.E/012/IP/2021 on Company's Risk Taxonomy;
5. Circular of the Board of Directors No. 0005.E/DIR/2023 dated September 15, 2023 on Guidelines for Implementing Fraud Risk Assessment.

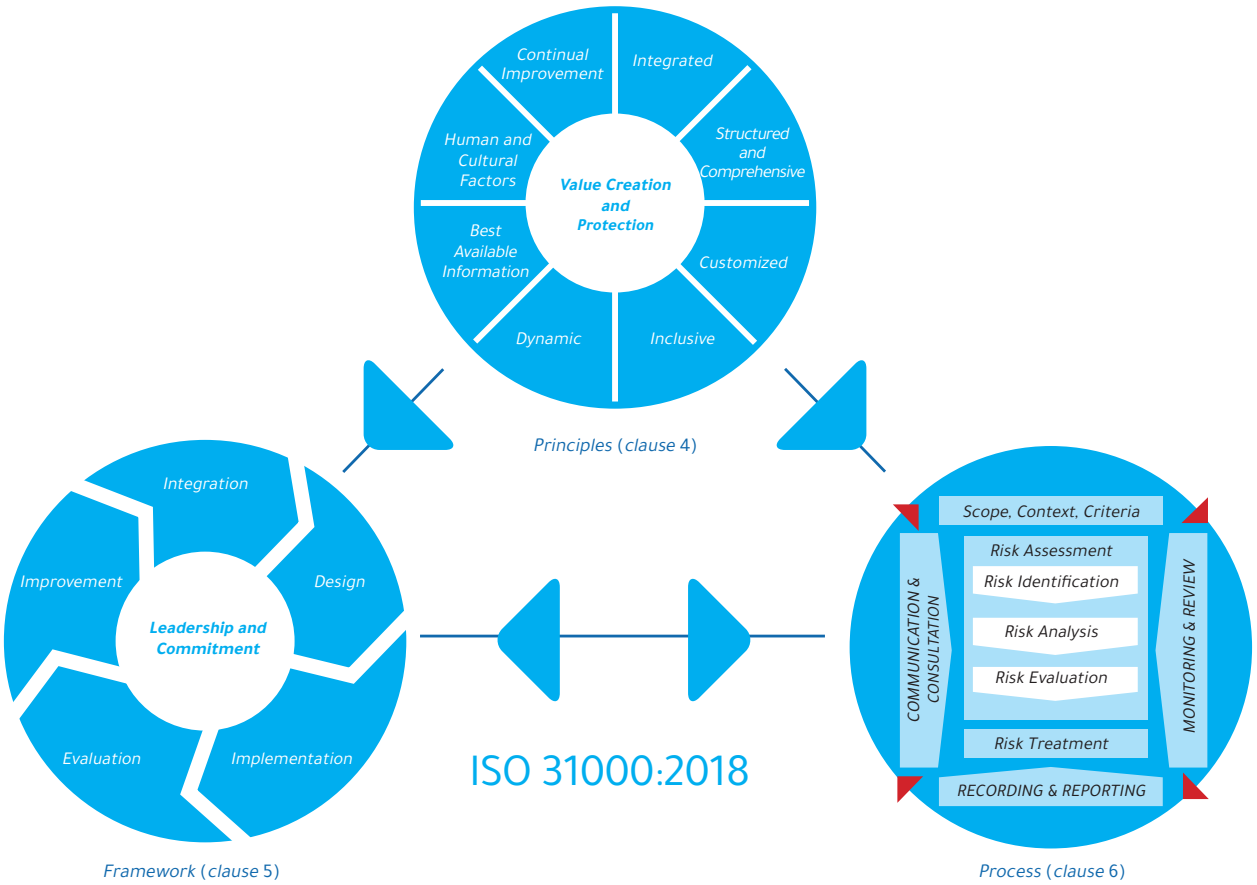
They are used as the guides to implement and develop risk management system while ensuring that risk management governance is fully integrated into the Company's existing system.

Kerangka Manajemen Risiko
Risk Management Framework

Manajemen risiko Perusahaan disusun berdasarkan *line of defense model*, yang bertujuan untuk memastikan tata kelola yang kuat dan kontrol yang efisien. Model ini didasarkan pada kerangka kerja *Enterprise Risk Management* yang telah dikembangkan sesuai standar global SNI ISO 31000:2009 dan Kebijakan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power. Proses manajemen risiko Perusahaan mempertimbangkan risiko saat ini mencakup risiko operasional dan non operasional, risiko bisnis, dan risiko yang akan datang.

Prepared based on the line of defense model, the Company's risk management aims at ensuring strong governance and efficient control. The model is based on the Enterprise Risk Management framework which was developed according to the global standard SNI ISO 31000:2009 and PLN Indonesia Power's Risk Management Policy. The Company's risk management takes into account operational and non-operational, business, and future risks.

Penerapan SNI ISO 31000:2018 Manajemen Risiko
Implementation of SNI ISO 31000:2018 Risk Management



Profil dan Peta Risiko
Risk Profile and Map

Penentuan risiko utama Perusahaan dilakukan berdasarkan pada sasaran, faktor internal dan eksternal serta fokus Perusahaan yang telah diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2023. Identifikasi risiko dan analisis evaluasi risiko pada *Risk Register* dari risiko utama Perusahaan tahun 2023 ditetapkan setelah dilakukannya pengendalian atau eksisting kontrol dengan *Residual Risk Mapping* sebagai berikut:

The Company's key risks were determined based on their goals, internal and external factors, and the Company's focus. They had been aligned with the Company's Long-Term Plan 2023. The risk identification and evaluation of the Company's Key Risk Register of 2023 were determined after control was put in place or according to the existing control with Residual Risk Mapping as follows:

Tingkat Kemungkinan / Possibility			1 Tidak Signifikan / Insignificant	2 Minor	3 Medium	4 Signifikan / Significant	5 Malapetaka / Disastrous
	Sangat Besar / Very High Possibility	E	Moderat / Moderate	Moderat / Moderate	Tinggi / High	Sangat Tinggi / Very High	Ekstrim / Extreme
	Besar / High Possibility	D	Rendah / Low	Moderat / Moderate	Tinggi / High	2-5 Sangat Tinggi / Very High	Ekstrim / Extreme
	Sedang / Medium Possibility	C	Rendah / Low	2-3 Moderat / Moderate	9-10 Tinggi / High	6-8 Tinggi / High	1 Sangat Tinggi / Very High
	Kecil / Low Possibility	B	Rendah / Low	5 10 Rendah / Low	1 4 6 Moderat / Moderate 7 8 9	Tinggi / High	Sangat Tinggi / Very High
	Sangat Kecil / Very Low Possibility	A	Rendah / Low	Rendah / Low	Moderat / Moderate	Tinggi / High	Tinggi / High
					Tingkat Dampak / Impact Level		

Risiko Residu / Residual Risk

Risiko Target / Target Risk

No.	ID Risiko / Risk ID	Kelompok Risiko / Risk Group
1	O.5	Keandalan dan Ketersediaan Pembangkit (EAF & EFOR) Power Plant Reliability and Availability (EAF and EFOR)
2	O.5.7.1	Efisiensi Pembangkit (NPHR) Power Plant Efficiency (NPHR)
3	O.14.1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Health, Safety, & Environment (HSE)
4	O.14.2	Lingkungan Environment
5	O.4	Kontinuitas Pasokan Energi Primer Primary Energy Supply Continuity
6	S.3.6.1	Inisiasi Pengembangan Pembangkit *Low Carbon* Low Carbon Power Plant Development Initiation
7	S.3.6.2	Inisiasi Bisnis *Beyond* KWH dan Pembangkit *Thermal* Beyond KWh & Thermal Power Plant Initiation
8	O.13	Teknologi Informasi Information Technology
9	P.8	Waktu Penyelesaian Pekerjaan Work Completion
10	O.11	Kapasitas, Kapabilitas dan Budaya SDM Human Capital Capacity, Capability, & Culture

Jenis Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Mitigasinya

Types of Risks Exposed to the Company and Their Mitigation

Dari hasil identifikasi risiko, diperoleh 10 risiko utama Perusahaan dan telah melaksanakan pengelolaan risiko-risiko tersebut, termasuk melakukan mitigasi risiko, sebagai berikut:

The Company has identified 10 key risks and managed them, including through risk mitigation, as detailed below:

ID Risk	Deskripsi Risiko Risk Description	Mitigasi Mitigation
O.5	Terjadi *Force Outages* atau *Derating* Akibat Ketidaksiapan dan Gangguan Peralatan Pembangkit menjadikan target operasional pembangkit tidak tercapai Forced outages or derating due to unpreparedness and disturbances of power plant equipment resulted in the failure to achieve power generator operational target.	Program Revitalisasi, Retrofit, Rehabilitasi dan modifikasi peralatan pembangkit. Revitalizing, retrofitting, rehabilitating, and modifying power plant equipment
		Program *upgrading* & penggantian part kritikal pada peralatan utama. Upgrading and replacing critical parts in main equipment
		Asesmen pada peralatan utama pembangkit. Assessing power plant main equipment
		Kapitalisir *Overhaul* Unit Pembangkit. Capitalizing power plant unit overhaul
		Retubing Boiler PLTU Conducting steam power plant boiler retubing
		Pengadaan *strategic parts* peralatan - peralatan kritikal. Procuring strategic parts for critical equipment
		Pengadaan material, *tools* dan jasa *overhaul* tahun 2022 Procuring materials, tools, and overhaul services in 2022
		Pelaksanaan *Overhaul* sesuai prinsip 5ON Executing overhaul according to 5ON principles
		Penggantian peralatan utama yang telah *obsolence*. Replacing obsolete main equipment
O.5.7.1	Penurunan Efisiensi Pembangkit yang berdampak pada peningkatan BPP Perusahaan Declining efficiency of power plants resulted in the increased power generation supply cost of the Company.	Penambahan *Dome Coal Storage* Adding dome coal storage
		Online leak sealing feedwater system, steam line dan *valve* Online leak sealing of feedwater system, steam line, and valve
		Revitalisasi *Soot Blower System* Revitalizing sootblower system
		Pengadaan *Oxygen Analyzer* Procuring oxygen analyzer
		Penggantian *Valve Spray Area Boiler* Replacing boiler area spray valve
		Pengadaan Elemen *Water Heater* Procuring water heater elements
		Pengadaan material dan jasa perbaikan peralatan *boiler* dan *furnace*. Procuring materials and repair of boiler & furnace equipment
		Penggantian *Valve* dan Pipa *drain* area *Boiler* dan Turbin PLTU. Replacing valves and drain pipes in boiler area and SPP turbine
		Optimasi pemakaian sendiri. Optimizing self-consumption
O.14.1	Terjadi Kecelakaan Kerja, Pandemi Penyakit serta Implementasi K2 & K3 belum optimal There were occupational accidents and a pandemic. The implementation of HSE principles was not optimal.	Perbaikan, Revitalisasi, Pengadaan *Part/Material Fire fighting* sesuai standar NFPA. Repairing, revitalizing, and procuring firefighting parts/materials according to NFPA standards
		Revitalisasi *Fire Alarm and Detection System* Revitalizing fire alarm and detection system
		Rencana Tindak Darurat & Simulasi RTD Bendungan Saguling Preparing emergency action plan and RTD simulation in Saguling Dam
		Revitalisasi Pompa Diesel PMK Revitalizing PMK diesel pump
		Upgrade Peralatan LOTO Upgrading LOTO equipment
		Pencegahan dan *monitoring* pandemi COVID-19. Preventing and monitoring COVID-19
		Menyediakan APD sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan. Providing personal protective equipment according to Company standard
		Sertifikasi dan resertifikasi peralatan pembangkit. Procuring certification and recertification of power plant equipment
		Sertifikasi dan perpanjangan sertifikat personil yang berkegiatan di lingkungan Perusahaan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Procuring certification and certification extension for personnel working within the Company according to applicable regulations and provisions
		Monitoring & supporting pelaksanaan Program CSMS. Conducting monitoring and providing support for CSMS implementation
		Tindak lanjut *Risk Rating, Risk Survey & Underwriting Survey*. Conducting follow-up on risk rating, risk survey, and underwriting survey



ID Risk	Deskripsi Risiko Risk Description	Mitigasi Mitigation
O.14.2	Pengelolaan Lingkungan untuk mendukung pemenuhan Regulasi pemerintah yang belum Optimal berdampak pada tidak tercapainya target PROPER Perusahaan Environmental Management to support the Regulatory compliance was not optimal, causing the failure to achieve the Company's PROPER target.	Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan standar yang berlaku Implementing Environmental Management System according to applicable standards
		Revitalisasi, Kalibrasi, Pemeliharaan & Pengadaan *Consumable* CEMS Revitalizing, calibrating, maintaining, and procuring consumable CEMS
		Pemasangan Instalasi Pembuangan Air Limbah Menuju Badan Air Laut (IPAL) Installing Wastewater Treatment Plant (WWTP)
		Pemasangan NO_x *burner*/peralatan sejenis untuk mengurangi emisi NO_x yang dikeluarkan oleh pembangkit Installing NO_x burner/similar equipment for reducing power plants' NO_x emission
		Jasa Stabilisasi Tanah dan Pengangkutan FABA Conducting soil stabilization and FABA transport services
		Melakukan Kontrak Kerja dengan Pengangkut yang Berizin, dan menyerahkan Limbah B3 ke pihak yang berizin dan memiliki rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Executing work contract with licensed transporter and handover of hazardous & toxic waste to licensed party with recommendation from the Minister of Environment and Forestry
		Melakukan pengelolaan *carbon trading* tahun 2023 Managing 2023 carbon trading
		Pemantauan dan memastikan Dokumen Hijau (*Beyond Compliance*) seluruh unit peserta PROPER sesuai dengan kriteria. Monitoring and making sure that Green Documents are beyond compliance at all PROPER-participating Units according to criteria
		Memastikan Pemenuhan Ketentuan Teknis Pengelolaan Lingkungan di seluruh Unit Pembangkit Making sure that the technical provisions for environmental management are met in all Generation Units
		Jasa Pendampingan PROPER PROPER mentoring services
		Pengadaan Material dan Jasa perbaikan Fasilitas Limbah Cair (Domestik, WWTP), TPS Limbah B3 dan Non B3, Gudang B3. Procuring materials and repair services of Liquid Waste Facility (Domestic, WWTP), Hazardous & Toxic and Non-Hazardous & Toxic Waste Center, Hazardous & Toxic Material Warehouse
		Jasa Pengujian Emisi dan Limbah FABA Conducting FABA emission and waste testing services
O.4	Kualitas & Kontinuitas Pasokan Energi Primer ke Pembangkit terganggu menjadikan Ketersedian Energi Primer berkurang berdampak pada penurunan produksi dan kinerja pembangkit Primary energy quality and supply continuity to power plants were disrupted, causing the declining continuity of primary energy and consequently, the decreased production and performance of power plants.	Berkoordinasi dengan kantor pusat dan unit lain untuk opsi pengalihan pasokan batubara Coordinating with Head Office and other Units for options to transfer coal supplies
		Membuat surat peminjaman *stock* batubara Unit 4 (stok unit 1 - 4) dan melakukan pengalihan tongkang dari PLTU lain (misal : suralaya 8, labuan) Preparing Unit 4 coal stock lending contract (Units 1-4 stocks) and transfer of barge from other steam power plants (e.g. SPP Suralaya 8 Labuan)
		Koordinasi Kantor Pusat dan *Supplier* Gas apabila gas turun pada batas bawah (30 BBTUD) Preparing coordination between Head Office and gas supplier when gas declined below the threshold of 30 BBTUD
		Melakukan pembayaran BJPSDA Making Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) payments
		Mengeluarkan rekomendasi kepada pengadaanEnergi Primer Kantor Pusat untuk memberikan surat teguran kepada pemasok biomass Providing recommendation to Primary Energy Procurement team at the Head Office to send written reprimand to biomass supplier
		Pekerjaan analisa Gas dengan Lab Independen sebagai pembanding Conducting gas analysis with independent lab for comparison
		Melakukan kalibrasi alat ukur Hidroklimatologi Calibrating hydroclimatology measuring instruments
		Replacement Part Ship Unloader
		Replacement Part Alat Berat Replacing heavy machinery parts
		Pengadaan *Belt Conveyor* Producing conveyor belt
		Dredging di PLTU dan PLTA Executing dredging works in SPP and HPP
S.3.6.2	Pengembangan Pembangkit *Low Carbon* belum optimal dalam mendukung *Net zero emission* Development of low carbon power plant was not optimal in supporting net zero emission goal.	Melakukan pengembangan pembangkit EBT antara lain : (1) PLTA Kalimantan Kuota Tersebar (*Mandatory Partner* 35%); (2) PLTH Konsep *Minigrids* Maluku; (3) PLTA Tanjung Sakti; (4) PLTA *Pump Storage* Jatiluhur; (5) PLTS Terapung Jatiluhur; (6) PLTA Poigar, (7) PLTS Mrica, PLTS Kepri (LSPV) Ekspor Singapore, PLTB Banyuwangi, PLTA Woyla, PLTS Bali-1 (Celukan Bawang/Pulaki/Buleleng), PLTS Indramayu 2, PLTB Sulut Developing new and renewable energy-based power plants, as follows: (1) HPP in Kalimantan with spread quota (mandatory partner 35%); (2) MHPP in Maluku; (3) Tanjung Sakti HPP; (4) Pump Storage Jatiluhur HPP; (5) Terapung Jatiluhur SoPP; (6) Poigar HPP; (7) Mrica SoPP, Kepri SoPP (LSPV) Export to Singapore, Banyuwangi WPP, Woyla HPP, Bali-1 SoPP (Celukan Bawang/Pulaki/Buleleng), Indramayu 2 SoPP, Sulut WPP
		Pengembangan EBT Skema *Mandatory Partner* 51% NRE development, with mandatory partner quota 51%
		Pengembangan EBT Skema *Mandatory Partner* 35% NRE development, with mandatory partner quota 35%

ID Risk	Deskripsi Risiko Risk Description	Mitigasi Mitigation
S.3.6.2	Pengembangan Portofolio Bisnis *Beyond* KWH & Pembangkit Thermal belum optimal The development of Beyond kWh business portfolio & thermal power plant was not optimal	Melakukan pengembangan Bisnis *Beyond* KWH & Pembangkit Thermal antara lain : (1) Pengembangan Bisnis Manufaktur *Cell*/Baterai dan Module Surya di Indonesia; (2) Pengembangan Pembangkit MPP Belitung (Ex-Natuna) 20 MW; (3) Pengembangan Pembangkit PLTU MT Jambi-1 (2x300 MW); (4) Pengembangan Pembangkit BMPP Sulselbar unit 2 kapasitas 60 MW; (5) Pengembangan Pembangkit BMPP Sambelia (30 MW); (6) Pengembangan PLTMG MPP Timika Pomako 40 MW; (7) Pengembangan PLTS dengan mengikut tender di Pemerintah Daerah Conducting the development of Beyond kWh business portfolio & thermal power plant: 1) Developing cell/battery and solar module manufacturing business in Indonesia; 2) Developing power plant for MPP Belitung (Ex-Natuna) 20 MW; 3) Developing power plant for MT Jambi-1 SPP (2x300 MW); 4) Developing power plant for BMPP Sulselbar Unit 2 60 MW; 5) Developing power plant for BMPP Sambelia (30 MW); 6)Developing MPP Timika Pomako GEPP 40 MW; 7) Developing SoPP by participating in Local Government's tender
		Marketing Produk *Beyond* KWH PLN Indonesia Power Grup ke pasar Non PLN Grup IP Group's Beyond kWh products marketing to non-PLN Group
		Koordinasi intensif dan rutin pembahasan Bisnis *Beyond* Kwh dengan Anak Perusahaan Intensive coordination and periodical discussion of Beyond kWh business with Subsidiaries
		Memperkuat koordinasi dan komunikasi untuk mendukung pencapaian realisasi pekerjaan Jasa O&M, MRO dan ODP ke Pasar Potensial (IPP, Pembangkit *Captive*, dan lainnya) Strengthening coordination and communication to meet O&M, MRO, and ODP service works to potential markets (IPP, Captive power plants, etc.)
		Penyusunan dan implementasi Migrasi Tegangan PLTU Suralaya dari 500 Kv ke 150 Kv Preparing and implementing the voltage migration for Suralaya SPP, from 500 Kv to 150 Kv
O.13	Infrastruktur Teknologi Informasi Belum Memenuhi Kebutuhan Perusahaan Information Technology Infrastructure failed to satisfy the Company's requirements	Pengadaan *server* dan *storage system*. Procuring server and storage system
		Pengadaan Perangkat Firewall dan Sistem Jaringan Wireless LAN Kantor Pusat Procuring firewall equipment and wireless LAN system for the Head Office
		Pengadaan *License* dan Perangkat Jaringan dan *Security* Procuring license and network & security equipment
		Renewal warranty peralatan utama jaringan data Renewing the warranty of data network's primary equipment
		Perbaikan & Peningkatan Layanan infrastruktur IT dan Keamanan sistem IT Repairing and improving IT infrastructure system and IT system security
		Pemenuhan *covered* jaringan internet, CCTV, *Thermography Camera*, *Telephone* dan pemeliharaan jaringan Covering the Internet network, CCTV, thermography camera, telephone, and network maintenance
P.8	Waktu Penyelesaian Proyek & Pemeliharaan Pembangkit Terlambat Delayed completion time of projects and power plant Maintenance	Koordinasi dengan internal Perusahaan (BDV, PBP, Auditor, Legal dll) terkait respon pengajuan TOC Kontraktor. Coordination with internal divisions in the Company (BDV, PBP, Auditor, Legal, etc.) concerning response to Contractor TOC application
		Meminta kontraktor untuk melakukan *update design engineering* yang komprehensif sesuai aktual di lapangan, Meminta Konsultan untuk melakukan *review* dan justifikasi teknis, Meminta penyelesaian tuntas semua *discrepancy* & *opsi payment deduction* jika masih ada *discrepancy*. Requesting contractor to update engineering design comprehensively according to actual condition; Requesting consultant to perform technical review and justification; Requesting completion of all discrepancies and payment deduction, if any discrepancies still exists
		Mengingatkan HK untuk penyelesaian desain *penstock* sesuai IPPKH, Penambahan *sounder boring* di area *penstock* sesuai IPPKH & Pembahasan Lanjutan *Klaim Penstock* PLTM Harjosari. Reminding HK to complete penstock design according to IPPKH; Adding sounder boring in penstock area according to IPPKH; and Conducting follow-up discussion on Harjosari MHPP penstock claim
		Koordinasi dengan PLN agar dapat segera menyelesaikan konstruksi GIS dan SKTT PLTGU Tambak Lorok Blok 3 Coordinating with PLN for the completion of GIS and SKTT construction at Tambak Lorok Block 3 CCPP
		Melakukan upaya percepatan Proyek BMPP Kolaka antara lain: Koordinasi dengan PAL, PLN dan Pihak Terkait lainnya terkait *update* penyelesaian pekerjaan Final *Jetty* di Ambon - BMPP Kolaka 1; Melakukan Pembahasan & verifikasi terkait pengajuan Klaim EOT Kontraktor serta Mengoptimalkan biaya pengelolaan BMPP selama sandar sementara (swakelola item pekerjaan yang bisa dilakukan Perusahaan); Membuat BA Kesepakatan material yang akan diimpor, Baskom dan tata laksana impor (*Custom Clearance)* - BMPP Kolaka 2 Accelerating BMPP Kolaka project by: Coordinating with PAL, PLN, and other relevant parties for the update of final jetty completion in Ambon - BMPP Kolaka 1 Conducting discussion and verification of Contractor EOT Claim application; Optimizing BMPP maintenance cost during temporary docking (work item self-management by the Company); Preparing Agreement Report for materials to be imported, and import procedure (Custom Clearance) - BMPP Kolaka 2
		Investasi pengadaan *tools* sesuai kebutuhan di lapangan, Melakukan penguatan *data base personnel & tools* unit-unit MSU Investment for tool procurement required on site; Conducting data enhancement of base personnel and tools at MSU Units



ID Risk	Deskripsi Risiko Risk Description	Mitigasi Mitigation
		Pengadaan Peralatan *Assessment Condensor, Generator & Trafo* Procuring as generator & transformer, condenser assessment equipment
		Mengoptimalisasikan Kontrak Tahunan yang telah terbit Optimizing issued annual contracts
		Melakukan *mapping* STO *Overhaul* per triwulan antara RPH I dan RPH II secara berkelanjutan Conducting mapping for STO Overhaul on quarterly basis between RPH I and RPH II on an ongoing basis
O.11	Kapasitas, Kapabilitas & Budaya SDM belum Optimal dalam mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Human capital capacity, capability, and culture was not optimal in supporting the Company's business development	Pengembangan aplikasi STAR integrasi dengan aplikasi lain Integrating STAR app with other applications
		Penyusunan kuesioner asesmen dengan konsultan ahli Preparing assessment questionnaire with expert consultant
		Penyusunan dan Implementasi Program HSH Budaya Perusahaan berdasarkan pemetaan potensi risiko dan opsi mitigasi Preparing and implementing Corporate Culture HSH program according to risk potential map and mitigation option
		Pengajuan ijin rekrutmen ke HCM, *Job posting* diperluas sampai ke lingkungan PLN *Group* Applying for recruitment permission to HCM; Expanding job posting to PLN Group
		Pengusulan kesetaraan jenjang jabatan ke HCM bidang organisasi Perusahaan Proposing the equality of position level in the Company organization
		Penerbitan usulan kajian proses bisnis, organisasi dan penambahan personil, Penyusunan dan verifikasi LRM pada setiap kompetensi Issuing proposal for reviewing business process, organization and personnel addition; Preparing and verifying LRM in each competency
		Program Internalisasi Perilaku 4.0 sesuai dengan INDI 4.0 pilar 2: Orang dan Budaya Behavior Internalization Program 4.0 according to INDI 4.0 pillar 2: People and Culture
		Pengembangan modul LMS - *Acquiring Learning Solution* Peningkatan kapabilitas *Leadership* dengan *Leadership Development Program* untuk *talent* dan *top talent*, Pengembangan media pembelajaran penunjang *e-learning/digital learning*, Agen Perubahan (*Workshop Sponsor, Leader*, Pengelola Budaya, *Ranger*) Developing LMS - Acquiring Learning Solution module; Increasing Leadership capability with Leadership Development Program for talents and top talents; developing learning media to support e-learning/digital learning, Change Agent (Workshop for Sponsors, Leaders, Culture Management, Rangers)
		Koordinasi dengan komite untuk akurasi penyusunan *business concern* dan *business issue* berdasarkan *data analytic*. Coordinating with Committees for business concern and business issue accuracy based on data analytics

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

Secara periodik PLN Indonesia Power melakukan evaluasi atas efektivitas dan kinerja pengelolaan sistem manajemen risiko dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan risiko (*risk maturity index*) yang dilakukan oleh pihak independen. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk:

1. Mengevaluasi pemenuhan kaidah, kebijakan dan ketentuan pengelolaan risiko;
2. Mengukur efektivitas sistem pengelolaan risiko;
3. Evaluasi Manajemen dalam mengintegrasikan sistem manajemen risiko Perusahaan sebagai *enabler* dari kegiatan-kegiatan Perusahaan; serta
4. Identifikasi langkah-langkah perbaikan secara bertahap pemantauan dan peninjauan tersebut dilakukan melalui optimalisasi penggunaan aplikasi IRMA (*Integrated Risk Management Application*).

PLN Indonesia Power evaluates the risk management system's performance periodically by measuring the risk maturity index, with the help from independent party. This aims to:

1. Evaluate the compliance of risk management rules, policies and requirements;
2. Measure the effectiveness of risk management system;
3. Evaluate the Management in integrating the Company's risk management system as the enabler of the Company's activities; and
4. Identify the step-by-step correction measures of the monitoring and review, as they are implemented by optimizing the use of IRMA (Integrated Risk Management Application).

Pada tahun 2023, penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko (*assessment maturity level*) dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku induk Perusahaan. Penilaian dilakukan berdasarkan pada 5 (lima) kategori penilaian, yaitu:

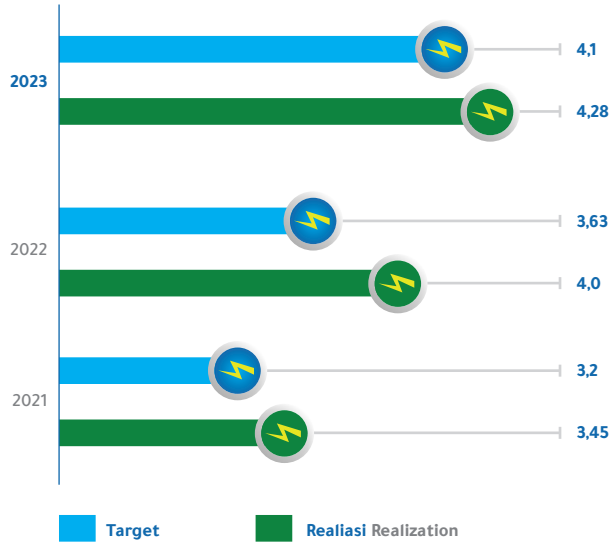
1. Kepemimpinan;
2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko;
3. Budaya;
4. Proses Manajemen Risiko;
5. Penciptaan & Perlindungan Nilai.

In 2023, the risk management maturity level assessment was performed by PT PLN (Persero) as the Holding Company. It was conducted based on five (5) categories:

1. Leadership;
2. Framework;
3. Culture;
4. Risk Management Process;
5. Value Creation & Protection.

Berikut capaian skor indeks *maturity level* dalam tiga tahun terakhir.

The followings are the maturity level indexes within the last three years.



Pencapaian Nilai *Maturity Level* ERM (*Risk Maturity Index*) Tahun 2023 PT PLN Indonesia Power melebihi dari yang telah ditargetkan dalam nilai kinerja organisasi korporat.

The Risk Maturity Indexes of PT PLN Indonesia Power in 2023 has exceeded the target set in the corporate performance index.

Berdasarkan hasil penilaian di atas, maturitas pengelolaan risiko Perusahaan pada tahun 2023 memperoleh skor 4,28 dari skala 5 dengan kategori "*Managed*" yang menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diterapkan secara efektif dalam semua proses bisnis Perusahaan serta didukung dengan strategi dan kebijakan pengendalian risiko yang telah terintegrasi.

According to the above assessment, the Company's risk management maturity index in 2023 was 4.28 out of the full index of 5, which belonged to "Managed" category. This indicates that risk management has been effectively adopted in all business processes with support from integrated risk control strategies and policies.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Management Statement on the Adequacy of Risk Management System

Direksi bertanggung jawab atas kebijakan dan implementasi sistem manajemen risiko di Perusahaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, Direksi telah melakukan penilaian sistematis atas efektivitas manajemen risiko. Direksi menilai bahwa, Perusahaan telah menggunakan sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang material pada tahap awal dan secara konsisten menyusun mitigasi atas masing-masing risiko. Perusahaan telah memiliki infrastruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang cukup memadai dan mampu mendukung fungsi manajemen risiko secara menyeluruh.

The Board of Directors (BOD) is responsible for the policy and implementation of risk management system in the Company. In assuming the responsibility, BOD has conducted systematic assessment of the risk management effectiveness. The Board of Directors considers that the Company has leveraged integrated risk management system to identify and evaluate material risks during earlier stages and consistently preparing mitigation for each risk. The Company has the infrastructure to identify, measure, monitor, and control risks. It is also supported by an adequate management information system, enabling the comprehensive risk management functions.



Di sisi lain, Dewan Komisaris dibantu oleh organ Komite bertanggung jawab untuk memantau efektivitas sistem manajemen risiko. Dewan Komisaris meninjau laporan risiko secara berkala, yang mencakup pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan risiko disertai dengan peta risiko utama yang telah diperbaharui yang disampaikan oleh Direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan telah memadai dan memungkinkan identifikasi risiko yang tepat atau sebagai *Early Warning System* yang dapat meminimalkan dampak risiko dalam pengambilan suatu keputusan.

Meanwhile, the Board of Commissioners with assistance from Committees is responsible to monitor the effectiveness of the risk management system. The Board of Commissioners reviews risk report regularly, including monitoring the compliance with risk policy along with the updated key risk map from the Board of Directors. The Board of Commissioners considers that the risk management system implemented by the Company has been adequate and able to identify the correct risk. It serves as an effective early warning system that minimizes the impact of risks during decision making.

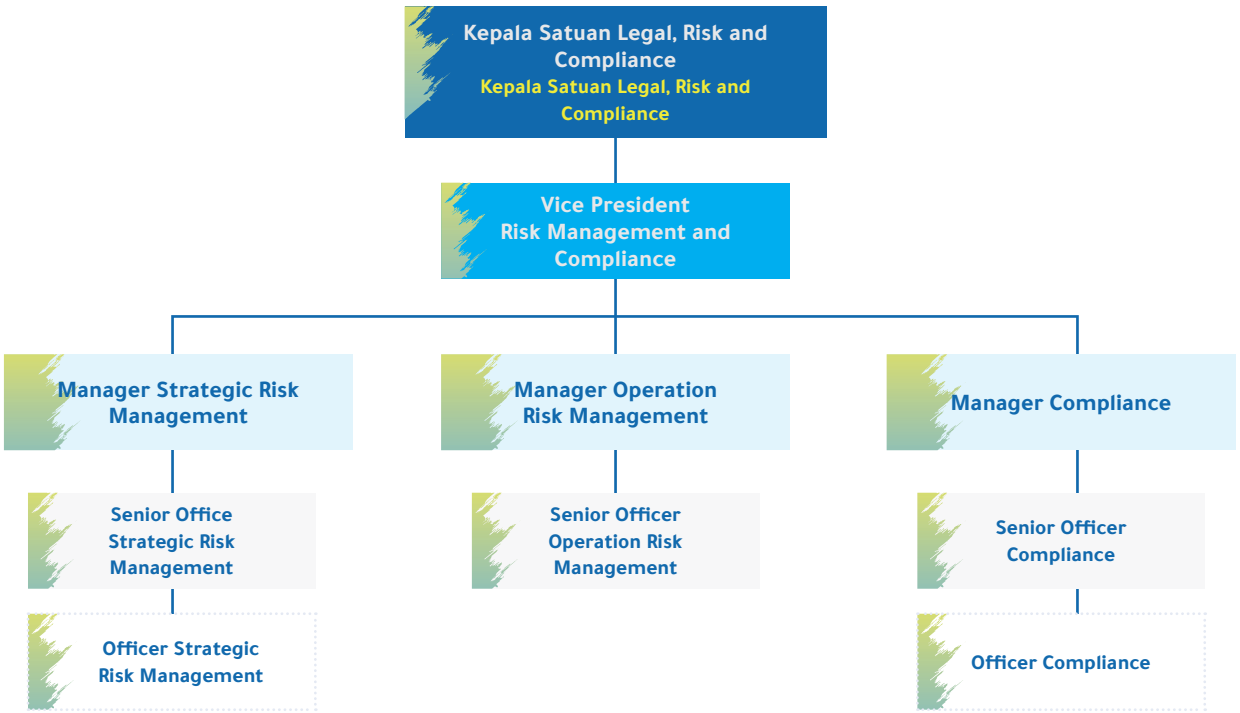
Secara berkesinambungan, Direksi serta Dewan Komisaris melakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengelolaan risiko di Perusahaan. Evaluasi tersebut terutama terkait dengan Kebijakan Manajemen Risiko, dasar penerapan, hingga aktivitas penerapannya.

On an ongoing basis, the Board of Directors and the Board of Commissioners carry out evaluations aimed at learning about the effectiveness of the Company's risk management activities. These evaluations are primarily related to the Risk Management Policy, its implementation basis, and the activities it applies to.

Pengelola Manajemen Risiko Perusahaan
Risk Management Manager

Dengan adanya proses transformasi yang dilakukan oleh PLN *Group*, saat ini pelaksana fungsi Manajemen Risiko Perusahaan dikelola oleh Satuan Legal, Risk and Compliance. Struktur Organisasi Bidang Risk Management & Compliance berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 060.P/DIR/2023 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 247.K/010/IP/2022 tentang Bagan Susunan Jabatan, *Position Grade* dan Formasi Tenaga Kerja Satuan Legal, Risk and Compliance.

With PLN Group's transformation, the Company's Risk Management is currently handled by the Legal, Risk, and Compliance Unit. The organizational structure of the Risk Management and Compliance Department refers to the Board of Directors Regulation No. 060.P/DIR/2023 on Amendment to the Board of Directors Regulation No. 247.K/010/IP/2022 on Structural Chart, Position Grade, and Workforce Formation of the Legal, Risk and Compliance Unit.



Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of Risk Management Manager

Pengelolaan risiko dilaksanakan di seluruh lini proses dan kegiatan Perusahaan oleh pemilik program atau pemilik proses sebagai pemilik risiko (*risk owner*). Pengelola Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai kebijakan dan ketentuan, serta selalu mengikuti acuan *best practice*. Bidang Manajemen Risiko memberikan *coaching* dan *mentoring* terhadap penyusunan Profil Risiko dan Dokumen Manajemen Risiko (meliputi: Kajian Kelayakan Operasi, Kajian Kelayakan Lingkungan, Kajian Hukum, Kajian Kelayakan Finansial dan Kajian Risiko) yang dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) baik di kantor pusat maupun unit, serta melakukan verifikasi atas dokumen tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur melalui Keputusan Direksi.

Risk management is carried out in all process lines and activities in the Company by program owner or process owner as the risk owner. Risk Management Manager is responsible to ensure that risk management has been implemented in accordance with the specified policy and provision, and aligned with the best practice reference. The Risk Management Department provides coaching and mentoring for risk profiling and risk management documentation (covering: Operational Feasibility Analysis, Environmental Feasibility Analysis, Legal Analysis, Financial Feasibility Analysis, and Risk Analysis) conducted by Work Units, Divisions, and Units, as well as verifies these documents according to their authorities set out in the BOD Decree.

Selain melaksanakan pendampingan dan verifikasi untuk penyusunan profil risiko dan dokumen manajemen risiko program/proyek kegiatan di tingkat *risk owner*, Bidang Manajemen Risiko juga melaksanakan berbagai pendampingan *coaching* dan *mentoring* atas penyusunan kajian risiko strategis dalam mendukung pengambilan keputusan Direksi dan proses permohonan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Dengan pendekatan ini, maka seluruh Keputusan yang diambil telah berbasis risiko.

In addition to providing assistance and verification of Risk Profiling and risk management document preparation for program/project at risk owner level, Risk Management Department also conducted various coaching and mentoring for the preparation of strategic risk analysis to support decision-making process by the Board of Directors and approval request process from the Board of Commissioners or GMS. Using this approach, all Decrees had been made in consideration of the risk.

Penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab utama pengelolaan risiko di setiap level organisasi mulai dari pemilik risiko sampai dengan Dewan Komisaris beserta Komite telah tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 138.K/010/IP/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi, sebagai berikut:

The elaboration of the key duties and responsibilities of risk management in every organizational level, from risk owner to Board of Commissioners and Committees, is provided in the Board of Directors Decree No. 138.K/010/IP/2021 on Integrated Risk Management Guidelines, as follows:

Pihak/Pengelola Party/Manager	**Pokok dan Tanggung Jawab Utama** Key Duties and Responsibilities	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. 2. Memastikan adanya upaya pengawasan yang efektif, proaktif dan berkesinambungan atas berlangsungnya pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat.	1. Supervises implementation of risk management at corporate level. 2. Ensures effective, proactive, and continuous supervision of risk management implementation at corporate level.
Dewan Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Mengawasi penerapan manajemen risiko korporat secara efektif, sesuai dengan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Korporat yang berlaku.	Supervises corporate risk management implementation effectively, in accordance with the prevailing Corporate Risk Management Implementation Policy.
Direksi Board of Directors	1. Memastikan terbangunnya sistem pengelolaan manajemen risiko korporat. 2. Memastikan tersedianya profil risiko korporat. 3. Penanggung jawab utama pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. 4. Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan secara efektif, proaktif dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku serta elemen tata kelola Manajemen Risiko Korporat (kriteria dampak dan kemungkinan, format peta risiko, standar respon risiko, kebijakan Manajemen Risiko). 5. Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko (SDM, finansial serta infrastruktur pendukung lainnya) 6. Sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan risiko di tingkat korporat.	1. Ensures the establishment of corporate risk management system. 2. Ensures the availability of corporate risk profile. 3. Acts as the main party in charge of implementation of risk management at corporate level. 4. Ensures sustainability of corporate risk management implementation in an effective, proactive, and continuous manner in accordance with the applicable Regulations, Policies, and Corporate Risk Management governance elements (impact and possibility criteria, risk map format, risk response standards, Risk Management policy). 5. Ensures the availability of resources that are required for risk management implementation (HC, finance, and other supporting infrastructure). 6. Acts as the decision maker in risk management implementation at corporate level.

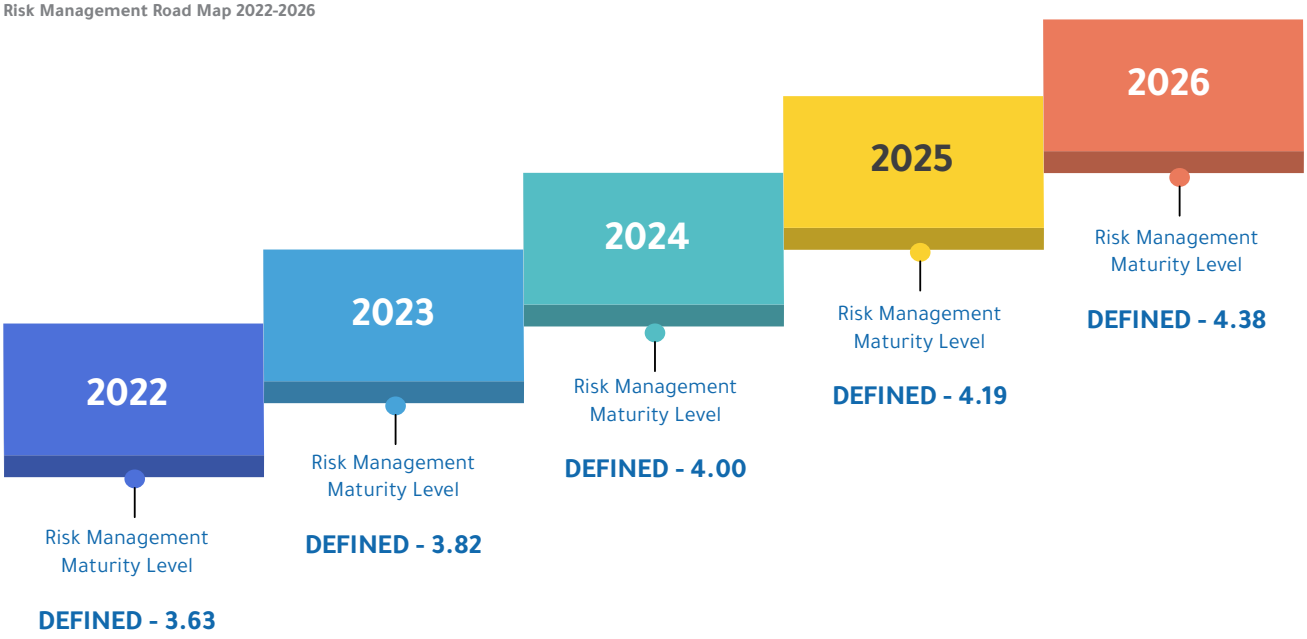
Pihak/Pengelola Party/Manager	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Key Duties and Responsibilities	
Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) Risk Management Governing Director	1. Berperan sebagai anggota Direksi pemegang mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan pengelolaan risiko Perusahaan 2. Berperan sebagai pembina Satuan Kerja Manajemen Risiko di Kantor Pusat maupun Fungsi Manajemen Risiko di Unit Induk/ Pusat.	1. Acts as a member of the Board of Directors who holds the mandate from the General Meeting of Shareholders (GMS) to implement the Company's Risk Management. 2. Provides coaching for the Head Office's Risk Management Work Unit as well as the Risk Management Function at the Parent Unit/ Centers.
Bidang Manajemen Risiko Risk Management Department	1. Sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai dengan desain kerangka kerja dan tata kelola Risiko, beserta upaya pengembangannya. 2. Sebagai pendamping, *reviewer*, dan *approval* sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut risiko Perusahaan 3. Sebagai pemberi masukan terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko yang dijalankan oleh *Risk Leader* dan *Risk Champion* di Unit Kerja dan Kantor Pusat. 4. Melakukan *update* dan perbaikan *tools*, aplikasi, *dashboard* Manajemen Risiko.	1. Takes the main charge to implement the Company's Integrated Risk Management according to the framework design and risk governance, as well as its improvement. 2. Provides assistance and acts as the Checker/Reviewer, and Approver in accordance with the mechanism of authority delegation of Risk assessment and Risk follow-up of the Company. 3. Provides feedback for Risk assessment and Risk follow-up conducted by Risk Leader and Risk Champion in Work Units and Head Office. 4. Updates and improves tools, applications, and Risk Management dashboard.
Risk Officer	1. Mengoordinasikan dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko Terintegrasi (identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pendokumentasian, pemantauan dan pelaporan) yang dilakukan *Risk Leader* pada bidang kerjanya 2. Berperan sebagai penghubung dalam proses komunikasi dan konsultasi dengan Bidang Manajemen Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.	1. Coordinates and facilitates the process of Integrated Risk Management (identification, analysis, evaluation, execution, documentation, monitoring, and reporting) conducted by the Risk Leader in their work department. 2. Acts as a liaison throughout the communication and consulting process with Risk Management Department in implementing the Integrated Risk Management.
Pemilik Risiko Risk Owner	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) secara efektif, proaktif dan berkesinambungan pada area tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka melakukan suatu upaya pemastian atas pencapaian sasaran perusahaan di tingkatnya masing-masing. 2. Melakukan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) yang dikelola secara efektif, proaktif dan berkesinambungan.	1. Takes responsibility of risk management implementation (and the reporting) in an effective, proactive, and continuous manner in their respective duty and responsibility area, to ensure achievement of Company's goal at their respective level. 2. Carries out risk management (and its reporting) in an effective, proactive, and continuous manner.
Departemen Audit Internal (Dept. IAD) Internal Audit Department (IAD)	1. Berperan dalam melaksanakan fungsi audit internal PLN Indonesia Power 2. Sebagai *reviewer* terhadap pelaksanaan penerapan manajemen Risiko terintegrasi dan praktik pengelolaan risiko Perusahaan.	1. Performs the internal audit at PLN Indonesia Power. 2. Acts as the reviewer of the implementation of Integrated Risk Management and Risk management practices in the Company.
Risk Leader	1. Sebagai *reviewer* dan *approver* atas: - Penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal; - Penilaian dan tindak lanjut Profil Risiko pada Unit Kerja dan Kantor Pusat; dan 2. *Risk Leader* Kantor Pusat dan Unit Kerja bertanggung jawab kepada Direksi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pengendalian internal pada entitas kerjanya	1. Acts as the reviewer and approver of: - The assessment and follow-up of Risk Analysis in critical decision-making process. - The assessment and follow-up of Risk Profile in Work Units and Head Office. 2. A Risk Leader of the Head Office and Work Units reports to the Board of Directors to ensure the effective implementation of Integrated Risk Management and internal control at their work entity.
Risk Champion	1. Berperan sebagai *Marker* atas: - Penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal. - Penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko pada Unit Kerja; dan - Pelaporan risiko kepada *Risk Leader*. 2. *Risk Champion* bertanggung jawab kepada *Risk Leader* masing-masing atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pengendalian internal pada Unit Kerja.	1. Acts as the Marker of: - the assessment and follow-up of Risk Analysis in critical decision-making process; - the assessment and follow-up of Risk Analysis in Work Units; and - the Risk reporting to Risk Leader. 2. A Risk Champion reports to their respective Risk Leader to ensure the effective implementation of Integrated Risk Management and internal control at the Work Units.

Roadmap Manajemen Risiko
Risk Management Road Map

Dalam rangka mewujudkan *Enterprise Risk Management* (ERM), Perusahaan telah menyusun *Roadmap* Manajemen Risiko tahun 2022-2026 sebagai pedoman dalam implementasi dan penilaian atas pencapaian sasaran Manajemen Risiko Perusahaan.

To realize Enterprise Risk Management (ERM), the Company has prepared the Risk Management Road Map 2022-2026 to guide the implementation and assessment of risk management target achievements.

***Roadmap* Manajemen Risiko Tahun 2022-2026**
Risk Management Road Map 2022-2026



Roadmap manajemen risiko di atas dijadikan pedoman dan acuan Pengelola Manajemen Risiko Perusahaan yang difokuskan pada capaian *Risk Management Maturity Level*. Pada tahun 2023, maturitas pengelolaan risiko Perusahaan pada tahun 2023 memperoleh skor 4,28 dari skala 5 dengan kategori "*Managed*". Hasil ini menunjukkan tercapainya tingkat *Maturity Level* yang ditargetkan dalam *Roadmap* Manajemen Risiko tahun 2022-2026.

The Risk Management Road Map becomes a reference and guide for Risk Management Manager, with focus on Risk Management Maturity Level achievement. The Company's risk management maturity index in 2023 was 4.28 out of the full index of 5, which belonged to "Managed" category. This indicates that the targeted maturity level has been achieved.

Pengembangan Manajemen Risiko Perusahaan
Development of Company Risk Management

Sejak tahun 2016, PLN Indonesia Power telah mengembangkan aplikasi IRMA (*Integrated Risk Management Application*) sebagai infrastruktur manajemen risiko dan budaya risiko di Perusahaan. Aplikasi ini dirancang untuk memaksimalkan efektivitas pengelolaan risiko, terutama dalam penyusunan kajian manajemen risiko di Perusahaan. Berbagai kemudahan yang didapat dalam menggunakan aplikasi ini antara lain sebagai berikut:

Since 2016, PLN Indonesia Power has been developing the Integrated Risk Management Application (IRMA) as risk management and culture infrastructure. The application is designed to optimize risk management effectiveness, including in preparing risk analysis. The conveniences of using the application are as follows:

Kemudahan dalam menggunakan aplikasi IRMA **Practicality of IRMA**	1. Taksonomi risiko Taksonomi risiko memungkinkan keseragaman dalam pengungkapan deskripsi risiko. Taksonomi risiko bersifat fleksibel karena memberikan ruang untuk menuangkan penyebab dari risiko yang mungkin berbeda-beda; 2. Pembuatan Profil Risiko (Kajian Risiko) Seluruh Risiko yang dihadapi oleh Perusahaan yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya sasaran Perusahaan dipetakan oleh setiap pemilik risiko/*risk owner*. Setiap pemilik risiko menetapkan risikonya masing masing dan melakukan analisis risiko sampai dengan rencana mitigasi risiko. Rencana mitigasi risiko ini merupakan aksi nyata program kerja di tahun berikutnya. Seluruh kegiatan pembuatan profil risiko dilakukan di aplikasi IRMA dan dimonitor secara berkelanjutan *progress* mitigasinya; 3. Pembuatan Dokumen Manajemen Risiko (Kajian Kelayakan Proyek dan Kajian Risiko) Seluruh perencanaan program kerja Unit maupun Korporat dituangkan dalam DMR secara *online* sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing divisi. Proses pembuatan DMR menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam pelaksanaan *monitoring* dan menjamin keamanan data yang ada sekaligus sebagai salah satu program *paperless* dari sebelumnya menggunakan dokumen fisik. 4. *Monitoring* dan *Update* Opsi Rencana Mitigasi *Risk Owner* dapat melakukan *monitoring* dan *update* perkembangan program kerja di Opsi Rencana Mitigasi langsung di aplikasi IRMA. 5. Pelaporan *Risk Event Unit* Secara berkala *Risk Event* dapat dilaporkan melalui sistem yang ada di aplikasi IRMA dan *Risk Event* dapat dimonitor perkembangannya melalui aplikasi IRMA. 6. Penyusunan *Key Risk Indicator* Di dalam Aplikasi IRMA dapat pula disusun *Key Risk Indicator* sebagai instrumen untuk memonitor nilai batas dari suatu kinerja peralatan. 7. *Early Warning System (EWS)* Suatu peringatan yang ditujukan langsung kepada *Risk Owner*. Secara sistem, EWS dikirimkan melalui *email blasting* dengan data yang diinputkan sesuai dengan nilai KRI di aplikasi IRMA. 8. *Dashboard Integrated Risk* Sebagai data visual dan *data analytic* kejadian risiko serta *loss event*.	1. Risk Taxonomy Risk taxonomy enables uniformity in the disclosure of risk description. Risk Taxonomy is flexible as it gives room for elaboration of different causes of risk. 2. Risk Profiling (Risk Analysis) All Risks exposed to the Company, which may prevent the attainment of Company objectives, are mapped by every risk owner. Every risk owner determines their respective risk and conducts risk analysis, including risk mitigation plan. Risk mitigation plan is a real action for work program in the subsequent year. All risk profiling activities are carried out in IRMA and mitigation progress is monitored continuously. 3. Risk Management Document Preparation (Project Eligibility Analysis and Risk Analysis) All work program planning at Work Unit and Corporate levels are put forth online in the Risk Management Document according to the duties and responsibilities of each division. Risk management document preparation utilizes an application that helps in monitoring and guarantees data security, which also becomes a paperless program to replace paper document. 4. Mitigation Plan Options Monitoring and Update Risk Owner is able to monitor and update the progress of work program from Mitigation Plan Options directly in IRMA. 5. Risk Event Unit Reporting Risk Event can be regularly reported through the existing system in IRMA. The progress of Risk Event can also be monitored through IRMA. 6. Key Risk Indicator (KRI) Development Key Risk Indicators (KRIs) can be developed within IRMA as an instrument to monitor the performance threshold of equipment. 7. Early Warning System (EWS) A warning addressed directly to the Risk Owner. EWS is sent through email blasting of the data recorded based on KRI values in IRMA. 8. Integrated Risk Dashboard It serves as a visual representation and analytics of the risk events and loss event.

Jumlah, Kualifikasi dan Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Headcount, Qualification, and Certification

Sampai dengan akhir tahun 2023, SDM manajemen risiko berjumlah 11 orang dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagai fungsi pengelola manajemen risiko. Sebanyak 8 (delapan) orang personel manajemen risiko telah memiliki sertifikat profesi, sebagaimana tabel berikut:

By the end of 2023, there are 18 risk management personnel who are fully qualified and competent to serve their roles in risk management function. A total of 14 risk management personnel have obtained their professional certifications, as described below:

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Jumlah Personel Manajemen Risiko yang Tersertifikasi Number of Certified Risk Management Personnel
1.	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP/CRGP)	1
2.	*Enterprise Risk Management Associate Professional* (ERMAP)	1
3.	*Qualified Risk Management Analyst* (QRMA)	1
4.	*Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	1
5.	*Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	4
Total		**8**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko
Risk Management Activity Implementation Report

Sepanjang tahun 2023, Fungsi Manajemen Risiko telah melakukan sejumlah program dan kegiatan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mempertahankan keandalan sistem manajemen risiko di Perusahaan sebagai berikut:

1. Melakukan *Review* Risiko terkait *Governance, Risk and Compliance* (GRC);
2. Melakukan forum manajemen risiko dan sosialisasi kebijakan, profil risiko serta *risk talk* untuk unit *Holding Subholding* dan Anak Perusahaan PLN Indonesia Power tahun 2023;
3. *Review Roadmap* Manajemen Risiko PLN Indonesia Power yang mencakup akselerasi pencapaian sasaran disertai latar belakang perubahan;
4. Melakukan *review* dan *update* Dokumen *Business Continuity Management Systems* (BCMS) Tahun 2023;
5. Melakukan *review* dan verifikasi *Risk Appetite Statement* PLN Indonesia Power tahun 2024;
6. Melakukan *review* Probis Pengelolaan Manajemen Risiko Korporat;
7. Melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko (QRMP, QRMO serta QRGP/CRGP);
8. Pengembangan Aplikasi IRMA (*existing*) serta pengembangan Aplikasi *Risk Business Intelligent* PLN Indonesia Power;
9. Melakukan *Set up* Aplikasi IRMA untuk Unit *Holding Subholding;*
10. Melakukan *Set up Business Continuity Management Systems* (BCMS) Unit *Holding Subholding;*
11. Penetapan metode dan mekanisme penilaian pengelolaan risiko;
12. Melakukan *workshop* penyusunan Profil Risiko Investasi tahun 2024;
13. Melaksanakan *self assessment* dan mengikuti *assessment Risk Maturity Index* (RMI) Korporat PLN Indonesia Power pada tahun 2023;
14. Melaksanakan *assessment Risk Maturity Index* kepada Unit Kerja di lingkungan PLN Indonesia Power;
15. Melaksanakan *assessment Risk Maturity Index* kepada Anak Perusahaan PLN Indonesia Power;
16. Menyusun Profil Risiko PLN Indonesia Power tahun 2024;
17. Melakukan Integrasi Aplikasi SMARTER PT PLN (Persero); serta
18. Mengikuti PLN *Risk Award* tahun 2023: Kategori *Risk Innovation and Risk Implementer.*

The Risk Management function has carried out the following activities and programs that develop, enhance, and maintain risk management system's reliability throughout 2023:

1. Reviewing the risks related to Governance, Risk, and Compliance (GRC);
2. Organizing risk management forum and socialization of policy, risk profile, and risk task for Holding-Subholding units and Subsidiaries of PLN Indonesia Power;
3. Reviewing PLN Indonesia Power Risk Management Road Map, including the acceleration of target achievement along with the background of the changes;
4. Reviewing and updating the Business Continuity Management System (BCMS) 2023;
5. Reviewing and verifying PLN Indonesia Power Risk Appetite Statement 2024;
6. Reviewing the business process of Corporate Risk Management;
7. Obtaining Risk Management Competency Certifications (QRMP, QRMO, and QRGP/CRGP);
8. Developing IRMA (existing) and Risk Business Intelligent application of PLN Indonesia Power;
9. Setting up IRMA for Holding-Subholding Units;
10. Setting up Business Continuity Management Systems (BCMS) at Holding-Subholding Units;
11. Establishing risk management assessment method and procedures;
12. Organizing Investment Risk Profiling workshop for 2024;
13. Performing self-assessment and participating in the assessment of Corporate Risk Maturity Index (RMI) of PLN Indonesia Power in 2023;
14. Performing Risk Maturity Index assessment at Work Units in PLN Indonesia Power;
15. Performing Risk Maturity Index assessment at Subsidiaries of PLN Indonesia Power;
16. Conducting risk profiling for PLN Indonesia Power for 2024;
17. Building integration of PT PLN (Persero)'s SMARTER app; and
18. Attending PLN Risk Awards 2023: Risk Innovation and Risk Implementer Category.

Penilaian atas Kinerja Bidang Manajemen Risiko
Risk Management Department Performance Assessment

Penilaian kinerja Pengelola Manajemen Risiko dilakukan oleh Direksi secara berkala setiap semester berdasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI). Kriteria penilaian didasarkan pada indikator penilaian kinerja yang tertuang dalam KPI Manajemen Risiko, sebagai berikut:

1. Fokus Pelanggan, yang terdiri dari Waktu Penyelesaian Review DMR dan Profil Risiko Korporat dan Survei Kepuasan Pelanggan GRO CRM;
2. Efektivitas Produk dan Proses, terdiri dari *Maturity Level* ERM, Pengembangan *Dashboard* ERM, dan Pengelolaan BCMS;
3. Keuangan dan Pasar yaitu Pengendalian Anggaran Departemen;
4. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan, yang terdiri dari Tindak Lanjut Temuan Auditor, Arahan RUPS dan Risalah Rapat Direksi serta Pemutakhiran *Enterprise Architecture* Divisi.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, hasil penilaian kinerja Pengelola Manajemen Risiko tahun 2023 mencapai skor sebesar 102,94% dari target 100%.

The performance of Risk Management Manager is assessed every six months by BOD based on the Key Performance Indicators (KPIs). The assessment is based on the Risk Management KPIs as follows:

1. Customer-Focused, which consists of the RMD Review Completion Time, Corporate Risk Profile, and GRO CRM Customer Satisfaction Survey.
2. Product Effectiveness and Process, which consists of ERM Maturity Level, ERM Dashboard Development, and BCMS Management.
3. Finance and Market, which includes the Department Budget Control.
4. Leadership, Governance and Corporate Social Responsibility, which consists of the Follow-up Actions of Auditor Findings, GMS Instructions, Minutes of the Meetings of Board of Directors, and Upgrades on Divisional Enterprise Architecture.

According to the assessment, the Risk Management Manager scored 102.94% out of the target of 100% for 2023.



Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

PLN Indonesia Power menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan proses bisnis dan operasional pada seluruh tingkatan manajemen di Perusahaan. Sistem pengendalian internal diintegrasikan ke dalam proses tata kelola perusahaan dan diarahkan untuk mencapai tujuan terkait dengan pelaporan keuangan yang akurat dan efisiensi operasional serta pengendalian kepatuhan Perusahaan.

PLN Indonesia Power implements internal control system effectively over business processes and operations implemented at all of the Company's management levels. Internal Control System is integrated into the corporate governance process and directed to meet the objectives that pertain to accurate financial reporting and operational efficiency, as well as compliance control.

Melalui sistem pengendalian internal, PLN Indonesia Power berkomitmen untuk melindungi dan meningkatkan reputasi dan aset Perusahaan, sekaligus mengamankan kepentingan Pemegang Saham. Perusahaan terus memonitor efektivitas proses pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya.

With such a system, PLN Indonesia Power is committed to preserving and building up its reputation and assets as well as serving the interest of the shareholders. The Company supervises the internal control process to ensure its effectiveness and purposes.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dan Kerangka COSO (*Internal Control Framework*)
Suitability of Internal Control System with COSO Framework (Internal Control Framework)

Penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan didasarkan pada kerangka kerja yang dikeluarkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang menempatkan 5 (lima) unsur pengendalian internal.

The internal control system is implemented based on the framework established by Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), with 5 (five) components of internal control system.

Kerangka Pengendalian Internal
Internal Control Framework

Komponen Component	Penerapan Implementation	
Penilaian Risiko: Dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh Perusahaan. **Control Environment**: A set of standards, processes, and structures as the basis to conduct internal control.	Dalam menjalankan operasional bisnisnya, PLN Indonesia Power memiliki potensi risiko yang perlu terus diidentifikasi dan diukur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Penilaian risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Maturity Level Assessment* manajemen risiko di Kantor Pusat dan Unit untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dikelola dengan baik dengan tindakan mitigasi yang diperlukan.	Enforcement of the PLN Indonesia Power's of Conduct and development of organizational culture. Implementation of Authority Delegation Matrix to manage the transaction approval degree and appropriate duty separation. Distribution of functions, duties, and authorities by taking account the Board Manual, Internal Audit Charter, and Charter of Committees under the Board of Commissioners. Establishment of Internal Control Unit to ensure compliance and effective internal control system.
Aktivitas Pengendalian: Tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan telah dilakukan. **Control Activity**: Measures specified through policies and procedures to ensure the performance of managerial directives to reduce the risks against the purpose.	Aktivitas sistem pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, melalui: 1. Pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan fungsi dari masing-masing unit organisasi; 2. Mempersiapkan sistem pencatatan data dan penyimpanan dokumen Perusahaan yang baik; 3. Mempersiapkan sistem pengamanan data dan dokumen Perusahaan dengan baik; 4. Manajemen SDM berbasis kompetensi; 5. Komitmen penerapan manajemen risiko yang mengarah pada budaya sadar risiko; 6. Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kinerja Perusahaan oleh pihak independen seperti oleh Kantor Akuntan Publik; serta 7. Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) secara konsisten dan efektif.	Control system activity is a policy and procedure made by the Management to fulfill the specified purpose through: 1. Distribution of duty, responsibility, and authority in accordance with the function of each organizational unit; 2. Preparation of proper recording and storage system for Company data and documents; 3. Preparation of proper protection system for Company data and documents; 4. Competency-based HR management; 5. Commitment towards risk management implementation that leads to risk awareness culture; 6. Implementation of Company performance assessment or audit by independent parties, such as Public Accounting Firm; and 7. Consistent and effective implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).



Komponen Component	Penerapan Implementation	
Informasi dan Komunikasi: Informasi yang diperlukan Perusahaan adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik, yang berasal dari proses komunikasi antara pihak internal maupun eksternal. **Information and Communication:** Information required by the Company are relevant and qualified information sourced from the communication between internal or external parties.	Salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya sistem pengendalian internal yang efektif adalah pelaksanaan informasi dan komunikasi melalui berbagai forum komunikasi internal yaitu: (1) Sistem pelaporan formal; (2) Aplikasi sistem teknologi informasi, dan (3) Program komunikasi manajemen antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta melalui pelaksanaan *coffee morning*.	One of the important elements in supporting the attainment of effective internal control system is the provision of information and communication through various internal communication forums, such as: (1) Formal reporting system; (2) Information technology system application, and (3) Management communication program through Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee meetings, and Coffee Morning sessions.
Kegiatan Pemantauan: Kegiatan evaluasi yang digunakan untuk memastikan masing-masing dari kelima komponen ada dan berfungsi. **Monitoring Activity**: Evaluation measures to secure the presence and performance of the five components.	Perusahaan terus meningkatkan evaluasi atas implementasi sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian keuangan maupun pengendalian operasional secara berkala. Evaluasi berkelanjutan dilakukan oleh Satuan Internal Audit dan fungsi pengawasan lain di Perusahaan. Pelibatan auditor eksternal dan *assessor* independen lain secara berkala.	The Company continues to improve the evaluation of internal control system implementation, which includes regular financial and operational controls. Continuous evaluation is performed by the Internal Audit Unit and other supervisory functions within the Company. The engagement of external auditors and other independent assessors regularly.

Sistem pengendalian Perusahaan dilakukan secara kolektif untuk seluruh fungsi operasi dengan mekanisme pengawasan berjenjang (*three lines of defense*). Pada lini pertama, yaitu *Business Process Owner* bertugas menjalankan sistem pengendalian internal dan pengawasan Perusahaan yang memadai. Pada lini berikutnya, terdapat fungsi pengendali, termasuk Satuan Legal, Risk and Compliance, yang menerapkan *framework* ISO 31000 dalam pelaksanaan identifikasi risiko, pengendalian risiko, penilaian tingkat risiko dan mitigasi risiko. Fungsi ERM melakukan pendampingan penyusunan *risk register*, serta melakukan validasi atas kesesuaiannya, guna memastikan bahwa seluruh potensi risiko telah diidentifikasi dan ditentukan pengendalian dan rencana mitigasinya oleh business *process owner*.

The control system of the Company is carried out collectively for all operational functions, using tiered supervision mechanism (three lines of defense). Business Process Owner as the first line of defense is responsible in carrying out the Company's internal control system and supervision adequately. In the next line, there are controlling functions, including Legal, Risk and Compliance Unit, accountable in the implementation of ISO 31000 framework in risk identification, risk control, risk assessment, and risk mitigation. ERM function assists in the preparation of risk register and validates its compliance to ensure that all potential risks are identified and the controls and mitigation plan are determined by the business process owner.

Pada lini ketiga, Satuan Internal Audit memastikan efektivitas dan koordinasi yang baik antara fungsi-fungsi pengendalian Perusahaan, termasuk pengendalian keuangan dan operasional. Satuan Internal Audit membantu para pemangku kepentingan dengan memberikan jasa asurans dan konsultansi dengan menerapkan pendekatan risiko (*risk-based approach*) yang relevan dan signifikan. Selain itu, Satuan Internal Audit juga memiliki proses *Quality Assurance* yang bertujuan untuk melakukan kajian dan memberikan keyakinan, bahwa audit yang dilakukan dalam lingkungan Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

The Internal Audit Unit is placed in the third line to secure the effective and proper coordination between the Company's control functions, including financial and operational controls. This unit assists the stakeholders by providing insurance and consultation services through relevant and significant risk-based approach. It also runs Quality Assurance process to conduct review and assures that the audit within the Company's environment has been carried out according to the applicable professional standards.

Pengendalian Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Financial and Operational Controls, and Compliance with the Laws and Regulations

Kerangka kerja pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan operasional di Perusahaan didasarkan pada Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO *Framework*, serta sistem manajemen risiko yang mengacu pada *Enterprise Risk Management Framework* yang telah dikembangkan sesuai standar ISO 31000:2009. Kerangka kerja ini diatur oleh Manajemen Perusahaan dan diimplementasikan melalui pendekatan *top-down*, berbasis risiko di seluruh unit kerja dan area bisnis Perusahaan.

The framework of the internal control over financial and operational reporting in the Company refers to COSO Framework, as well as the risk management system that refers to Enterprise Risk Management Framework which has been developed according to ISO 31000:2009 standards. This framework was established the Company Management and implemented top-down, based on risks across the Company's work units and business areas.



Pengendalian internal Perusahaan atas pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan IFRS. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, Direksi bertanggung jawab memastikan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dengan memberikan sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan.

The internal control of the Company over the financial reporting is designed to provide adequate assurance on the reliability of financial reporting and preparation according to the generally applied accounting principles. The Company is responsible in the preparation and presentation of unqualified consolidated financial statement pursuant to the IFRS. In preparing consolidated financial statements, the Board of Directors must ensure that no material misstatement is found, both intentional and accidental, by providing certification for the annual financial statement.

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 174.K/010/IP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Kebijakan Implementasi *Internal Control over Financial Reporting*/ICoFR. Implementasi ICoFR di Perusahaan meliputi pengendalian tingkat transaksional yang terdiri dari segmen Pendapatan, Biaya Operasi, Aset tetap, Persediaan, Pengembangan Proyek, Perbendaharaan, Perpajakan dan Pelaporan Keuangan. Pelaporan *Control Self Assessment* (CSA) telah dilakukan secara periodik melalui aplikasi *online* sejak 2016.

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) of the Company refers to Decree of the Board of Directors No. 174.K/010/IP/2016 dated August 12, 2016 on the Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Implementation Policy. ICoFR implementation in the Company includes transaction level control, which consists of Revenues from the Sale of Electricity; Operating Cost; Property, Plant, and Equipment, Inventories, Project Development, Treasury, Taxes, and Financial Reporting. Control Self-Assessment (CSA) reporting has been made periodically using online application since 2016.

Selain aspek keuangan dan operasional, Perusahaan juga memberikan jaminan yang memadai akan tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. PLN Indonesia Power secara terus menerus memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan tidak pernah mendapatkan sanksi atas sangkaan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Aside from the financial and operational aspects, the Company also ensures the efficiency and effectiveness of operational activities as well as compliance with the regulations. PLN Indonesia Power continuously observes the compliance with the laws and regulations to avoid legal violation. By the end of the reporting period, no sanction was imposed on the Company due to the absence of legal non-compliance allegation.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Review of Internal Control System Effectiveness

Perusahaan meninjau efektivitas sistem pengendalian berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Internal Audit dan Audit Eksternal. Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif serta memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi. Evaluasi atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan atas pelaporan keuangan didasarkan pada Kerangka Kerja *Internal Control-Integrated Framework* yang yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).

The Company reviews the effectiveness of the internal control system based on the supervision by Internal Audit and External Audit Units. The management is in charge in establishing reliable and effective Internal Control System. It also ensures that such a system is set up in each organizational level. The evaluation of the Company's ICoFR is based on the Internal Control-Integrated Framework established by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Selain itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan. Hasil evaluasi disampaikan kepada Manajemen sebagai acuan untuk perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih efektif sehingga mendukung upaya pencapaian target-target usaha. Evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal telah cukup memadai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

Moreover, the Board of Commissioners represented by the Audit Committee conducts regular evaluation to assess the ICoFR as well. The result is presented to the Management as the reference to improve the system and policies to be more effective in achieving the business targets. The implementation of this evaluation is then followed up and supervised to assure the adequacy of the Internal Control System in supporting the Company's purpose and target.



Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Internal Control System Adequacy

Dalam upaya memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan rapat dengan Satuan Internal Audit dan Audit Eksternal secara berkala. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah dijalankan secara memadai yang diturunkan mulai dari kode etik, kebijakan, prosedur hingga Instruksi Kerja yang disinergikan dengan penerapan penilaian *Key Performance Indicator* (KPI).

To establish effective internal control system, the Company's Boards represented by the Audit Committee hold a regular meeting with the Internal Audit and External Audit Units. Based on the evaluation by Audit Committee, the Board of Directors and the Board of Commissioners evaluate whether the internal control system has been performed adequately, from the Code of Conduct, policies, procedures, to Work Instructions, in a synergy with the Key Performance Indicator (KPI) assessment.

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi

Legal Disputes Faced by the Company, Subsidiaries, Board of Commissioners, and Board of Directors

PLN Indonesia Power mewajibkan seluruh insan Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi serta entitas anak untuk mematuhi kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan telah membentuk Satuan Legal, Risk and Compliance yang berfungsi untuk menangani kepentingan Perusahaan dari sisi hukum dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PLN Indonesia Power requires all of its personnel, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, and all subsidiaries to comply with the Company's policies and applicable laws and regulations. For such a purpose, the Legal, Risk, and Compliance Unit was established to handle legal matters and ensure the Company's compliance with the laws and regulations.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak terjadi pelanggaran hukum yang mencakup lingkup perdata, pidana, kepailitan, perpajakan, tata usaha negara, maupun perkara yang terdapat dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, serta entitas Anak Perusahaan.

Until the end of the reporting period, there were no legal violations involving civil, criminal, bankruptcy, taxation, state administration issues or any cases under the Indonesian National Arbitration Board involving the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as well as its subsidiaries.

Selain itu, pada tahun 2023 Perusahaan juga tidak terlibat dalam pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan atau ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, komersial atau persaingan usaha dan lingkungan.

In addition, the Company in 2023 was also not involved in any legal violations relating to labor or employment, consumer, bankruptcy, commercial, or business competition and environmental issues.

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2023

Legal Issues Faced by the Company in 2023

Pada tahun 2023, Perusahaan menghadapi 1 (satu) perkara hukum perdata yang saat ini masih dalam proses penyelesaian, sebagai berikut:

In 2023, the Company faced one (1) legal dispute which is currently in proceeding, as follows:



Pihak yang Berperkara Disputing Parties	Pokok Permasalahan Issue	Status Penyelesaian Settlement Status	Nilai Nominal Tuntutan/ Gugatan Nominal Amount of Claim/Suit	Sanksi Sanction	Risiko yang Dihadapi Perusahaan Risk Exposed to the Company
Perkara Perdata Nomor 168.Pdt.G/2023/Pn.Srg. 1. David Wibowo, beralamat di Link. Sumampir Timur RT/RW 002/004 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, (selaku Penggugat); 2. Senimin, sebagai Komisaris PT Cahaya Tri Putra, (selaku Tergugat I); 3. Jeriyanto, sebagai Direktur PT Cahaya Tri Putra, (selaku Tergugat II); 4. Elis Nasirotun Nisa, sebagai Sekretaris PT Cahaya Tri Putra, (selaku Tergugat III); 5. PT PLN Indonesia Power cq. PT PLN Indonesia Power Jabar 2 Pelabuhan Ratu PGU, (selaku Tergugat IV). Civil Case No. 168. Pdt.G/2023/Pn.Srg. 1. David Wibowo, domiciled at Link. Sumampir Timur RT/RW 002/004 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, (as the Plaintiff); 2. Senimin, Commissioner of PT Cahaya Tri Putra, (as Defendant I); 3. Jeriyanto, Director of PT Cahaya Tri Putra, (as Defendant II); 4. Elis Nasirotun Nisa, Secretary at PT Cahaya Tri Putra, (as Defendant III); 5. PT PLN Indonesia Power cq. PT PLN Indonesia Power Jabar 2 Pelabuhan Ratu PGU, (as Defendant IV).	1. Bahwa surat panggilan relas sidang atas perkara No. 169/Pdt.G/2023/Pn.Srg tanggal 6 November 2023 kami terima pada tanggal 8 November 2023; 2. Bahwa dalam surat tersebut menyebutkan Agenda Persidangan perkara No. 168/Pdt.G/2023/PN.Serang pada 22 November 2023 di Ruang Sidang CAKRA PN Serang sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh David Wibowo "penggugat" melawan Senimin "Tergugat" Dkk; 3. Bahwa diketahui gugatan wanprestasi antara Penggugat dan para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I, II, III adalah bagian dari PT Cahaya Tri Putra (penyedia barang/jasa di PLTU Jabar 2 Pelabuhan ratu), dan tergugat IV PLTU Jabar 2 Pelabuhan Ratu dengan permasalahan Kerjasama permodalan atas pekerjaan PT Cahaya Tri Putra - Penggugat pada PLTU Jabar 2 Pelabuhan Ratu. 1. Whereas the summons for trial court in case No. 169/Pdt.G/2023/Pn.Srg dated November 06, 2023 was received on November 08, 2023; 2. Whereas the letter states the Trial Agenda for case No. 168/Pdt.G/2023/PN.Serang on November 22, 2023 in CAKRA Courtroom of Serang District Court in connection with the lawsuit filed by David Wibowo (the Plaintiff) against Senimin et al. (the Defendants); 3. Whereas it is known that the lawsuit for breach of contract between the Plaintiff and the Defendants, in this case Defendants I, II, III are part of PT Cahaya Tri Putra (supplier of goods/services at Jabar 2 Pelabuhan Ratu SPP), and defendant IV is Jabar 2 Pelabuhan Ratu SPP with the Issue of capital cooperation regarding the work of PT Cahaya Tri Putra (the Plaintiff) at Jabar 2 Pelabuhan Ratu SPP.	1. Pelaksanaan proses beracara di Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 6 November 2023 dan saat ini telah masuk dalam tahap pelaksanaan sidang mediasi para pihak sesuai hukum acara perdata; 2. Telah disampaikan dalam Surat No. 6879/HKM.05.01/PLNIP 010800/2023 tanggal 26 November 2023 perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan Tergugat IV kepada Majelis Hakim Perkara Perdata, untuk mengeluarkan PLN IP sebagai pihak mengingat, antara Penggugat dan PLN IP tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan; 1. The proceeding at Serang District Court has been carried out since November 6, 2023 and is currently in the stage of mediation hearings between parties in accordance with civil procedure law; 2. It has been conveyed in Letter No. 6879/HKM.05.01/PLNIP 010800/2023 dated November 26, 2023 regarding Defendant IV's Statement of Objections and Appeal to the Panel of Civil Case Judges, to exclude PLN IP as a party, considering that the Plaintiff and PLN IP have no legal relationship with the disputed case;	1. Tuntutan ganti rugi materil kepada Tergugat I sebesar Rp229.479.921 dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.500.000.000; 2. Tuntutan ganti rugi immateril kepada Tergugat II sebesar Rp300.000.000; 3. Tuntutan ganti rugi immateril kepada Tergugat III Rp200.000.000; 4. Tuntutan ganti rugi materil dan immaterill kepada Tergugat IV sebesar Rp500.000.000. 1. Claim for material compensation amounting to Rp229,479,921 and immaterial compensation amounting to Rp1,500,000,000 to Defendant I; 2. Claim for immaterial compensation amounting to Rp300,000,000 to Defendant II; 3. Claim for material and immaterial compensations amounting to Rp200,000,000 to Defendant III; 4. Claim for material and immaterial compensations amounting to Rp500,000,000 to Defendant IV.	Tidak Ada N/A	Mengikuti proses beracara di pengadilan Negeri Serang dikarenakan menjadi Tergugat IV dalam perkara tersebut. Following court proceedings in Serang District Court as Defendant IV of the case.

Sanksi Administratif
Administrative Sanctions

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan terhadap pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, selama tahun 2023 PLN Indonesia Power tidak mendapatkan teguran ataupun sanksi administratif dari instansi/lembaga yang berwenang di bidang usaha Perusahaan.

Proving its commitment to complying with the laws and regulations, PLN Indonesia Power has never received any administrative reprimands or sanctions from any corporate regulatory bodies.

Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct

PLN Indonesia Power mengharapkan seluruh insan Perusahaan untuk berkomitmen terhadap Pedoman Etika yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dalam Pedoman Etika Perusahaan berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja untuk Perusahaan. Untuk itu, setiap pegawai di seluruh level organisasi di Perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai Perusahaan, serta memasukkan hal-hal yang tertuang dalam Pedoman Etika ke dalam kehidupan mereka dan mendorong rekan kerja mereka untuk melakukan hal yang sama.

"PLN Indonesia Power expects all personnel to commit to the established Code of Conduct. The principles in the Code of Conduct apply to all employees working for the Company. For this reason, every employee at all organizational levels is responsible for implementing the Company's values, as well as incorporating the matters contained in the Code of Conduct into their lives and encouraging their colleagues to do the same."

Kode Etik Perusahaan merupakan bagian dari sistem tata kelola dan keberlanjutan Perusahaan yang disusun untuk memberikan panduan etika perilaku dan etika bisnis Insan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan telah melakukan pembaharuan terhadap kode etik Perusahaan dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 0179.K/DIR/2023 dan No. 004.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Etika Perusahaan.

Seperangkat aturan yang dituangkan dalam Pedoman Etika Perusahaan dipandang sebagai komitmen PLN Indonesia Power untuk menjunjung tinggi praktik bisnis yang etis dengan tetap memperhatikan nilai-nilai **AKHLAK** (**A**manah, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif dan **K**olaboratif) sebagai budaya Perusahaan.

The Code of Conduct is a part of the Company's governance and sustainability system which was prepared to provide guidance on the ethical behavior and business ethics of Company Personnel with stakeholders. The Company has updated the Code of Conduct which was stipulated by the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 0179.K/DIR/2023 and No. 004.SK/DK-PLNIP/2023 dated June 27, 2023 concerning the Company Code of Conduct.

The set of rules outlined in the Code of Conduct is seen as PLN Indonesia Power's commitment to upholding ethical business practices while still paying attention to the values of **AKHLAK** (***A**manah*/Trustworthy, ***K**ompeten*/Competent, ***H**armonis*/Harmonious, **L**oyal, ***A**daptif*/Adaptive, and ***K**olaboratif*/Collaborative) as the Company's culture.

Nilai dan Budaya Perusahaan
Company Values and Culture



Amanah	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif	Kolaboratif
Trustworthy	Competent	Harmonious	Loyal	Adaptive	Collaborative



Pokok-Pokok Isi Kode Etik Perusahaan

Cores of the Code of Conduct

Pedoman Etika Perusahaan mengatur prinsip-prinsip dan perilaku yang harus diterapkan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Pokok-pokok isi Pedoman Etika Perusahaan mencakup hal-hal antara lain:

The Code of Conduct establishes the principles and behavior that must be adopted in interacting with stakeholders. The cores of the Company's Code of Ethics include, among others:

BAB 01 **CHAPTER 01**	Pernyataan Komitmen Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power	Statement of Joint Commitment of PT PLN Indonesia Board of Directors and Board of Commissioners
BAB 02 **CHAPTER 02**	Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Visi dan Misi Perusahaan 3. Tata Nilai Perusahaan 4. Tujuan Pedoman Etika Perusahaan 5. Pihak yang wajib mematuhi Pedoman Etika Perusahaan 6. Tanggung Jawab Pegawai PLN Indonesia Power 7. Tanggung Jawab Para Pimpinan PLN Indonesia Power	Introduction 1. Background 2. Vision and Mission 3. Corporate Values 4. Purpose of the Code of Conduct 5. Parties with Mandatory Compliance with the Code of Conduct 6. Responsibility of PLN Indonesia Power Employees 7. Responsibility of PLN Indonesia Power Leaders
BAB 03 **CHAPTER 03**	Pedoman Etika dan Perilaku Pegawai 1. Etika terkait Hubungan dengan *Stakeholder*/Pemegang Kepentingan Perusahaan 2. Perilaku Etis terhadap sesama Pegawai 3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan 4. Benturan Kepentingan 5. Memberi dan Menerima Gratifikasi 6. Pembayaran Tidak Wajar (Imbalan), Partisipasi Politik dan Organisasi Profesi 7. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja 8. Integritas Laporan Keuangan 9. Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan 10. Kerahasiaan Informasi dan Media Komunikasi 11. Sistem Teknologi Informasi 12. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 13. Aktivitas Sosial Perusahaan dan Pegawai	Policy on the Code of Conduct 1. Ethics concerning Shareholder/Stakeholder Relations 2. Ethical Conduct among Employees 3. Compliance with Company Laws and Regulations 4. Conflict of Interest 5. Giving and Receiving Gratuities 6. Improper Payments, Political Participation, and Professional Organizations 7. Occupational Health, Safety, and Environment 8. Integrity of Financial Statements 9. Supervision and Utilization of Company Assets 10. Information Confidentiality and Communication Media 11. Information Technology System 12. Intellectual Property Rights 13. Social Activities of Company and Employees
BAB 04 **CHAPTER 04**	Petunjuk Pelaksanaan 1. Konsultasi berhubungan dengan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) 2. Pelanggaran Etika Perusahaan 3. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) 4. Penghargaan dan Sanksi 5. Pernyataan Komitmen 6. Sosialisasi Pedoman Etika Perusahaan	Statement of Practice 1. Consultation related to the Code of Conduct 2. Violation of the Code of Conduct 3. Violation Reporting (Whistleblowing System) 4. Rewards and Sanctions 5. Statement of Commitment 6. Dissemination of the Code of Conduct

Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi

Enforcement of the Code of Conduct to All Organizational Levels

PLN Indonesia Power mengharapkan seluruh insan Perusahaan untuk berkomitmen terhadap Pedoman Etika yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dalam Pedoman Etika Perusahaan berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja untuk Perusahaan. Untuk itu, setiap pegawai di seluruh level organisasi di Perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai Perusahaan, serta memasukkan hal-hal yang tertuang dalam Pedoman Etika ke dalam kehidupan mereka dan mendorong rekan kerja mereka untuk melakukan hal yang sama.

PLN Indonesia Power expects all personnel to commit to the established Code of Conduct. The principles in the Code of Conduct apply to all employees working for the Company. For this reason, every employee at all organizational levels is responsible for implementing the Company's values, as well as incorporating the matters contained in the Code of Conduct into their lives and encouraging their colleagues to do the same.



Sosialisasi dan Penegakkan Kode Etik Perusahaan

Dissemination and Enforcement of the Code of Conduct

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki tanggung jawab menegakkan Pedoman Etika dan memperkuat budaya serta nilai-nilai yang dianut Perusahaan. PLN Indonesia Power mendorong dan menyediakan forum bagi para pegawai untuk mendiskusikan nilai-nilai dan kode etik Perusahaan. Hal ini termasuk dengan melakukan sosialisasi atas Tujuan, Nilai, dan Pedoman Etika Perusahaan secara berkala.

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible to uphold the Code of Conduct and strengthen the culture and values adhered to by the Company. PLN Indonesia Power encourages and provides a forum for employees to discuss the Company's values and Code of Conduct. This includes regularly disseminating the Company's Goals, Values, and Code of Conduct.

Secara khusus, Perusahaan telah menetapkan fungsi/unit kerja sebagai pelaksana dalam sosialisasi dan upaya penegakkan terhadap Pedoman Etika Perusahaan.

In particular, the Company has established a function/work unit that is responsible for disseminating and enforcing the Code of Conduct.

Fungsi Sekretariat Perusahaan:
Menyusun dan menyediakan Pedoman Etika Perusahaan.

Functions of the Company Secretariat:
Prepare and provide the Code of Conduct.

Bidang Human Capital Services
Mencatat dan menindaklanjuti setiap laporan atas pelanggaran terhadap Pedoman Etika di Perusahaan.

Human Capital Services Department
Record and follow up on any reports of violations against the Code of Conduct.

Implementasi:
Kolaborasi antara kedua fungsi tersebut untuk menanamkan dan mensosialisasikan Pedoman Etika serta nilai-nilai Perusahaan.

Implementation:
Collaboration between the two functions to nurture and disseminate the Code of Conduct and Company Values.

Pada tahun 2023, sosialisasi atas Pedoman Etika Perusahaan dilakukan melalui penandatanganan Pernyataan Komitmen atas kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan oleh seluruh pegawai, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan survei pemahaman terhadap Pedoman Etika Perusahaan serta penyebarluasan materi terkait Pedoman Etika Perusahaan berupa *E-book* dalam IPWN bulan Desember 2023 dan melalui berbagai media Perusahaan lainnya.

In 2023, the Code of Conduct was disseminated through the signing of the Statement of Commitment to complying with the Code of Conduct by all employees, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company also conducted a survey to measure the comprehension on the Code of Conduct as well as distributing the Code of Conduct e-book in IPWN in December 2023 and through other Company media.

Dalam hal penegakan Pedoman Etika Perusahaan, PLN Indonesia Power memberlakukan sistem pemberian sanksi yang diberlakukan kepada seluruh pegawai. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan akan dikenakan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: 258.K/010/IP/2017 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, sebagai berikut:

For enforcing the Code of Conduct, PLN Indonesia Power applies a system of sanction that applies to all employees. Any violation against the Code of Conduct will be subject to the disciplinary provisions applicable in the Company.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Sanction of Code of Conduct Violation

Pelanggaran Ringan
Minor Violation

- Sanksi tertulis selama tiga bulan;
- Sanksi tertulis selama enam bulan.
- Written Sanction, applicable for 3 months;
- Written Sanction, applicable for 6 months.

Pelanggaran Sedang
Moderate Violation

- Sanksi tertulis selama sembilan bulan;
- Sanksi tertulis selama 12 bulan.
- Written Sanction, applicable for 9 months;
- Written Sanction, applicable for 12 months.

Pelanggaran Berat
Major Violation

- Demosi pada jenjang jabatan satu tingkat di bawahnya, dan diturunkan minimum satu *grade* di bawahnya;
- Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demotion to one lower level of position, and reduction to minimum one lower grade;
- Dishonorable termination of employment, which will be implemented according to the applicable laws and regulations.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Lanjutnya
Number of Code of Conduct Violations and Their Follow-up

PLN Indonesia Power telah menyediakan sarana pelaporan atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan setiap insan Perusahaan terkait Pedoman Etika Perusahaan. Setiap pelaporan dapat disampaikan secara langsung kepada pimpinan atau atasan serta fungsi/unit kerja yang telah ditunjuk Perusahaan. Laporan atas pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan juga dapat disampaikan melalui media *Whistle Blowing System* (WBS) yang telah disediakan Perusahaan. Setiap laporan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti sepanjang disertai dengan bukti yang kuat.

PLN Indonesia Power has provided the reporting facilities for indicated violations against the Code of Conduct committed by any Company personnel. Each report can be submitted directly to the leaders or superiors and the function/work unit appointed by the Company. The Code of Conduct violation report can also be submitted via the Whistleblowing System (WBS). Every incoming report will be processed and followed up as long as accompanied by solid evidence.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 4 (empat) pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan, yang terdiri dari 2 (dua) pelanggaran ringan dan 2 (dua) pelanggaran sedang. Seluruh pelanggaran tersebut telah selesai ditindaklanjuti oleh Perusahaan dengan memberikan sanksi tertulis sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Throughout 2023, there were four (4) violations of the Code of Conduct, consisting of two (2) minor violations and two (2) moderate violations. All violations have been followed up by the Company through the imposition of written sanctions according to the type of the committed violation.

Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Suap
Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy



KOMITMEN MANAJEMEN PT PLN INDONESIA POWER
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan PT PLN Indonesia Power yang *lean*, dengan ini Manajemen PT PLN Indonesia Power berkomitmen :

1. Menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada pedoman *Good Corporate Governance* (GCG), **Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*)** dan **Komitmen 4T yaitu :**
   a. **Tidak Suap;**
   b. **Tidak Gratifikasi;**
   c. **Tidak Fraud;**
   d. **Tidak Luxurious Hospitality.**
2. Serta prinsip **4 NO's** yaitu :
   a. ***No Bribery*** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
   b. ***No Kickback*** (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
   c. ***No Gift*** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
   d. ***No Luxurious Hospitality*** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
3. Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan.
4. Menjalankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Tidak memperkenankan Insan PLN IP dan *stakeholder* perusahaan untuk melanggar kode etik perusahaan dan Komitmen 4T serta prinsip 4 NO's yang berkaitan dengan tugasnya di PT PLN Indonesia Power.
6. Menghindari konflik kepentingan dan mendeklarasikan setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko *fraud*.
7. Mengajak Insan PLN IP dan *stakeholder* untuk selalu menerapkan Komitmen 4T serta prinsip 4 NO's dan pembangunan bisnis yang berintegritas di PT PLN Indonesia Power.
8. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.

Demikian Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini ditandatangani dengan penuh tanggung jawab.

Surakarta, 16 Februari 2023

DIREKTUR UTAMA EDWIN NUGRAHA PUTRA			KOMISARIS UTAMA WILUYO KUSDWIHARTO		
DIREKTUR OPERASI PEMBANGKIT BATUBARA RACHMAD HANDOKO	DIREKTUR OPERASI PEMBANGKIT GAS DJOKO MULYONO		KOMISARIS HARYANTO W.S	KOMISARIS ISKANDAR SIMORANGKIR	KOMISARIS DJOKO SISWANTO
DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS DAN NIAGA BERNADUS SUDARMANTA	DIREKTUR KEUANGAN ENDANG ASTHARANTI	DIREKTUR MANAJEMEN HUMAN CAPITAL DAN ADMINISTRASI WISNOE SATRIJONO	KOMISARIS M.P DWINUGROHO	KOMISARIS ARIEF BUDIMAN	KOMISARIS INDEPENDEN LUKMANUL HAKIM

Melanjutkan komitmen Perusahaan untuk berkontribusi dalam perang global melawan korupsi, setiap tahun Dewan Komisaris dan Direksi PLN Indonesia Power menandatangani pernyataan **Komitmen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.**
Continuing the Company's commitment to contributing to the global war against corruption, every year PLN Indonesia Power Board of Commissioners and Board of Directors sign the statement of **Commitment to Implementing Anti-Bribery Management System.**

PLN Indonesia Power menjunjung tinggi prinsip-prinsip menjalankan bisnis secara etis dan berintegritas, dan Perusahaan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. PLN Indonesia Power menerapkan pendekatan "Tanpa Toleransi" terhadap korupsi. Komitmen PLN Indonesia Power terhadap kepatuhan anti korupsi diwujudkan dalam sejumlah kebijakan dan program kerja yang dirancang untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sejalan dengan agenda Pemerintah Indonesia dalam Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju.

PLN Indonesia Power upholds the principles of conducting business with ethics and integrity, and complies with all applicable laws and regulations. PLN Indonesia Power has zero tolerance toward corruption. The Company's commitment to upholding anti-corruption principle is manifested in a number of policies and work programs designed to fulfill the requirements of Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crimes, and is in line with the agenda of the Indonesian Government in "Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju" (Synergy to Eradicate Corruption, for Advanced Indonesia).

Kebijakan anti korupsi di PLN Indonesia Power tertuang dalam sejumlah kebijakan yang menjadi panduan seluruh Insan Perusahaan dalam mencegah dan menangani tindakan korupsi. Kebijakan tersebut telah tertuang secara khusus dalam beberapa peraturan, antara lain sebagai berikut:

The anti-corruption policy at PLN Indonesia Power is contained in a number of policies which guide all Company Personnel in preventing and handling the acts of corruption. The policy has been specifically stated in several regulations, including the following:



PLN Indonesia Power akan terus mempertahankan kebijakan anti-korupsi yang bertujuan untuk mencegah kerugian materiil dan immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan Perusahaan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pedoman Etika Perusahaan serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan usaha.

PLN Indonesia Power will continue to maintain the anti-corruption policies which aim to prevent material and immaterial losses that may disrupt the continuity of its business. This is done by increasing the compliance and discipline with the law, applicable laws and regulations, and the Company's Code of Conduct while supporting Government programs to build awareness of a highly ethical culture in carrying out business activities.



Program Penerapan Anti Korupsi
Anti-Corruption Program Implementation

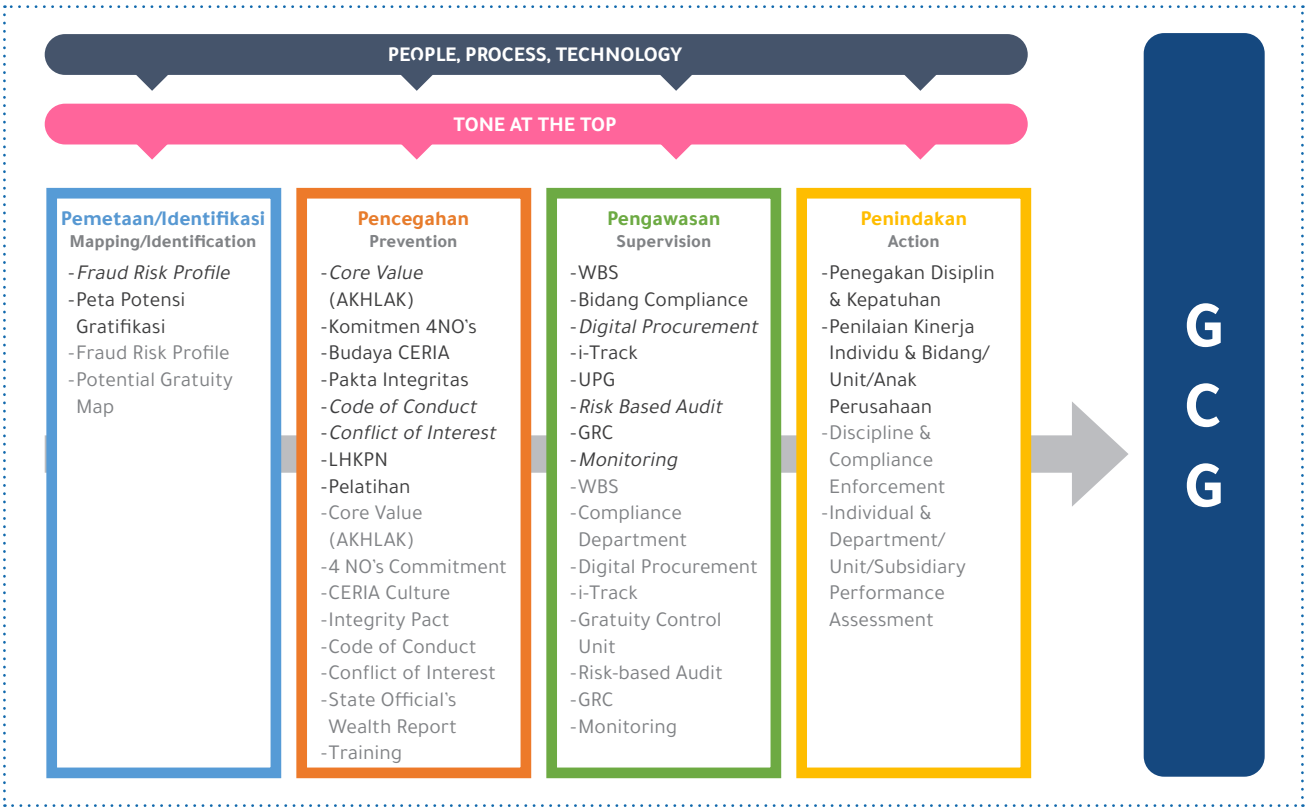
Program Anti-korupsi di PLN Indonesia Power merupakan upaya untuk melawan praktik korupsi yang berpotensi terjadi di setiap Proses Bisnis Perusahaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai lini mulai dari *People, Process* dan *Technology* yang ada di perusahaan dan didukung dengan adanya *Tone From The Top* oleh Pimpinan dan Manajemen PLN Indonesia Power melalui Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Program Anti Korupsi meliputi 4 (empat) tahapan yaitu Pemetaan / Identifikasi, Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan, sehingga diharapkan dengan penerapan program ini maka tata kelola PLN Indonesia Power menjadi lebih bersih, transparan dan mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ke depannya, Perusahaan berfokus pada perluasan implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ke seluruh unit dan Anak Perusahaan melalui penerapan Manajemen kepatuhan pada setiap proses bisnis.

PLN Indonesia Power Anti-Corruption Program is an endeavor to fight the practice of corruption that could occur in every business process. This can be carried out in many areas, including People, Process, and Technology, through the tone at the top by the Leaders and Management by committing to implementing Anti-Bribery Management System (ABMS).

The Anti-Corruption Program covers four (4) stages, namely Mapping/ Identification, Prevention, Supervision, and Action. The implementation of this program is expected to deliver cleaner and more transparent operations at PLN Indonesia Power that promote good corporate governance. In the future, the Company is focused on expanding the program implementation and Anti-Bribery Management System (ABMS) Certification to all units and subsidiaries through compliance management in every business process.

Program Anti Korupsi di PT PLN Indonesia Power
PT PLN Indonesia Power Anti-Corruption Program



Sepanjang tahun 2023, PLN Indonesia Power telah mengimplementasikan program anti korupsi secara terintegrasi, antara lain sebagai berikut.

Throughout 2023, PLN Indonesia Power carried out integrated anti-corruption programs as elaborated below.

Program	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Penandatanganan Pakta Integritas Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan Pasangan The signing of Integrity Pact by Directors, Commissioners, Employees, and their Spouses	Bulan Januari sampai dengan Maret 2023 January to March 2023
Himbauan Pengisian LHKPN melalui Email maupun sosialisasi Video LHKPN di IPKU The distribution of e-mail and video advising to submit LHKPN at IPKU	24 Januari sampai 31 Maret 2023 January 24 to March 31, 2023
Melakukan Identifikasi *Fraud Risk Profile* Perusahaan Identification of the Company's Fraud Risk Profile	Maret 2023 March 2023
Sosialisasi Penilaian Pengurangan Kepatuhan KKU Unit Dissemination of Unit KKU Compliance Reduction Assessment	17 Maret 2023 March 17, 2023
Perluasan atas Lingkup Penerapan dan Sertifikasi SMAP 9 (sembilan) unit eksisting Expansion of ABMS Implementation Scope and Certification to nine (9) existing units	21 Maret 2023 March 21, 2023
Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Berbasis ISO 19600 *Certified Compliance Professional* atau Setara ISO 19600-based Compliance Competency Certification for Compliance Professionals or Equivalent	Bulan Mei sampai dengan Juni 2023 May to June 2023
Pemetaan serta Pengumpulan Potensi Gratifikasi melalui Aplikasi COS dan/atau ProGCG yang dilaksanakan oleh Seluruh Pegawai Mapping and collection of potential gratuities via COS and/or ProGCG app by all employees	Tanggal 10 setiap Bulan The 10th of every month
Melakukan Identifikasi/ *Coaching* Dokumen Kepatuhan *Conflict of Interest* pada setiap GRC Identification/Coaching of Compliance Document concerning Conflict of Interest in every GRC	Dilakukan setiap adanya Usulan Keputusan GRC Every time GRC decree is proposed
Melakukan Identifikasi dan/atau *Coaching* Dokumen Kepatuhan *Fraud Risk Assessment, Conflict of Interest, Compliance to Regulation, Corruption Impact Assessment* pada setiap Usulan Keputusan Identification and/or Coaching of Compliance Document concerning Fraud Risk Assessment, Conflict of Interest, Compliance to Regulation, Corruption Impact Assessment in every Decree Proposal	Dilakukan setiap adanya Usulan Keputusan GRC Every time GRC decree is proposed
Menindaklanjuti Pelaporan *Whistle Blowing System* di Perusahaan Follow-up on Whistleblowing System reports in the Company	Dilakukan setiap ada laporan WBS diterima Every time WBS report is received
Penandatanganan Komitmen PLN Indonesia Power Berintegritas dalam mencapai *Supply Chain Management Excellence* pada *Vendor Gathering*. Signing of PLN Indonesia Power's integrity commitment to achieving Supply Chain Management Excellence at Vendor Gathering	8 Desember 2023 December 08, 2023

Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Sebagai upaya menghindari terjadinya praktik korupsi di lingkungan Perusahaan, PLN Indonesia Power memiliki sertifikasi khusus terkait praktik anti-penyuapan berupa ISO 37001 - SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang berlaku sampai dengan 18 April 2026 dengan No. ABMS-029 dengan harapan kredibilitas dan reputasi Perusahaan di tingkat nasional, regional, maupun internasional dapat terus terjaga serta terciptanya budaya anti suap di sektor ketenagalistrikan.

As an effort to avoid corruption practices, PLN Indonesia Power has a special certification related to anti-bribery practices in the form of ISO 37001 - Anti-Bribery Management System (ABMS), valid until April 18, 2026, with No. ABMS-029. This is aimed at maintaining the company's credibility and reputation at national, regional, and international levels, as well as fostering an anti-bribery culture in the electricity sector.

Pada tahun 2023 PLN Indonesia Power telah melakukan perluasan Lingkup Sertifikasi SMAP ke 9 (sembilan) Unit Pembangkit yaitu: UBP Priok, UBP Suralaya, UBP Mrica, UBP Semarang, UBP Grati, UBP Bali, UBP Saguling, UBP Kamojang, dan Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH). Dengan adanya perluasan Lingkup sertifikasi SMAP ke unit-unit maka semakin memperkuat Komitmen PLN Indonesia Power dalam penerapan dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

In 2023, PLN Indonesia Power has expanded the Scope of the ABMS Certification to nine (9) Power Generation Units, namely: Priok GBU, Suralaya GBU, Mrica GBU, Semarang GBU, Grati GBU, Bali GBU, Saguling GBU, Kamojang GBU, and Maintenance Services Unit (MSU). The expansion further strengthens PLN Indonesia Power's commitment to adopting the Anti-Bribery Management System.

Pelatihan Anti Korupsi Tahun 2023
Anti-Corruption Trainings in 2023

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power telah menyelenggarakan sejumlah program pelatihan terkait anti korupsi yang diberikan kepada 889 orang pegawai di seluruh jenjang jabatan dan unit bisnis Perusahaan mengikuti pelatihan anti korupsi. Jumlah ini mewakili 19% dari total pegawai Perusahaan yang berjumlah 4.581 orang.

In 2023, PLN Indonesia Power has participated in several anti-corruption trainings which was represented by 889 employees at all position levels and Business Units. This covers 19% of the Company's total employees of 4,581 people.



Berikut rincian program pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan pada tahun 2023.

The following are details of the anti-corruption trainings participated in 2023.

Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
Awareness Internal Audit Course ISO 37001:2016 *Anti Bribery Management System* dan *Fraud Risk Assessment* Internal Audit Awareness Course - ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems and Fraud Risk Assessment	PT PLN (Persero) dan Mutu Agung
E-Learning ISO 3730:2021 *Compliance Management System*	Proxsis
Self Learning Pemahaman Gratifikasi BUMN Self-Learning - Understanding BUMN Gratuities	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Corruption Eradication Commission (KPK)
E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas E-Learning - Basic Anti-Corruption Knowledge and Integrity	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Corruption Eradication Commission (KPK)

Selanjutnya, untuk mengurangi potensi risiko terkait dengan keterlibatan mitra kerja atau pemasok, Perusahaan melakukan evaluasi atas posisi bisnis, integritas, dan solvabilitas dari para calon rekanan potensial. Untuk mencegah pengadaan yang salah dan memaksimalkan perolehan nilai, proses pengadaan dilakukan dengan menerapkan persyaratan kualifikasi, yaitu persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap pemasok menandatangani Pakta Integritas yang berisi klausul atau pernyataan anti-korupsi.

To further mitigate the potential risks arising from engagement with work partners or suppliers, the Company evaluates the business position, integrity and solvency of such potential partners. To prevent inaccurate procurement, maximize value and carry out relevant activities, the procurement process must meet some minimum requirements. Each supplier signs an Integrity Pact which contains anti -corruption clauses or statements.

Sosialisasi Program Anti Korupsi
Anti-Corruption Program Socialization

Sosialisasi atas komitmen dan kebijakan Perusahaan terhadap praktik anti korupsi juga secara berkala dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan, termasuk kepada mitra/pemasok lokal. Atas berbagai upaya pencegahan tindakan anti korupsi yang dilakukan, hingga akhir 31 Desember 2023, tidak terdapat insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberhentikan atau dihukum karena korupsi serta insiden korupsi yang terbukti dan mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi.

The socialization of the Company's commitment to and policies on anti-corruption practices is also carried out regularly to all stakeholders, including local partners/suppliers. Thanks to various anti-corruption prevention programs carried out, as of the end of December 31 2023, there were no proven corruption incidents that resulted in any employees being dismissed or punished for corruption. There were also no proven corruption incidents that resulted in the termination or non-renewal of contracts with business partners due to corruption-related defaults.



Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
Gratuity Control Management

Pengelolaan pengendalian gratifikasi di Perusahaan dilakukan sejalan dengan komitmen dan upaya Perusahaan untuk menjunjung tinggi integritas dan kejujuran serta mendukung Perusahaan mempertahankan budaya usaha yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Secara rutin, PLN Indonesia Power melakukan sosialisasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi yang berlaku di Perusahaan, baik kepada Manajemen, pegawai, Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi, serta mitra kerja Perusahaan.

Gratification control management in the Company is carried out in line with the Company's commitment and efforts to uphold integrity and honesty and support the Company in maintaining a business culture that is free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). Routinely, PLN Indonesia Power carries out socialization of the gratification control policies that apply in the Company, both to Management, employees, subsidiaries and affiliated companies, as well as the Company's work partners.



Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
Gratuity Control Policy

PLN Indonesia Power telah mengatur ketentuan mengenai pengelolaan gratifikasi dalam Peraturan Direksi No. 0089.P/DIR/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi, yang menegaskan bahwa insan Perusahaan tidak diperkenankan untuk menerima gratifikasi dari pihak lain dalam bentuk apapun. Setiap individu di Perusahaan dan/atau keluarganya dilarang menerima atau meminta gratifikasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di kemudian hari, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PLN Indonesia Power has established policy on gratuity management in the Regulation of the Board of Directors No. 0089.P/DIR/2023 dated September 27, 2023 on Gratuity Control, which confirms that Company Personnel are not permitted to accept any form of gratuities from any parties. Every individual in the Company and/or their family is prohibited from accepting or requesting gratuity that could give rise to future conflict of interest, either directly or indirectly.

Pelaporan Gratifikasi
Gratuity Reporting

Pada 2023, Perusahaan telah mencatat adanya 13 laporan gratifikasi yang terdiri atas 7 (tujuh) laporan penolakan dan 6 (enam) laporan penerimaan yang disampaikan melalui aplikasi ProGCG. Laporan penerimaan yang disampaikan yaitu terkait pemberian hadiah kecil yang diberikan kepada pegawai dan bukan merupakan pelanggaran gratifikasi yang dapat merugikan Perusahaan atau pihak lain, serta telah diserahkan kepada UPG.

In 2023, the Company has recorded 13 gratuity reports, consisting of seven (7) rejection reports and six (6) acceptance reports submitted via ProGCG app. The acceptance reports concerned about small gifts given to employees. These gifts were not considered as gratuities that could endanger the Company or other parties and have been submitted to the Gratuity Control Unit.

Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Policy on State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Selain sebagai komitmen akuntabilitas dan transparansi, LHKPN merupakan wujud kepatuhan dan dukungan Perusahaan terhadap program pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa KPK berwenang mengambil langkah atau upaya pencegahan terhadap tindak korupsi melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

PLN Indonesia Power secara konsisten mengarahkan manajemen untuk mengedepankan integritas dan transparansi dalam setiap aktivitas bisnisnya. Setiap tahun Perusahaan mengarahkan dan mengkoordinasikan para pejabat yang menjadi wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN dengan tepat waktu.

Kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 112.K/010/IP/2021 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Indonesia Power. Sesuai dengan pedoman tersebut, pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN mencakup:

1. Dewan Komisaris Perusahaan, dimana dalam pengelolaannya mengikuti pengelolaan pada instansi asal;
2. Direksi Perusahaan;
3. Pegawai pada jenjang jabatan Eksekutif Utama, Eksekutif Senior dan Eksekutif pada jenis jabatan struktural dan fungsional;
4. Pegawai yang memangku jabatan struktural pada jenjang jabatan penyelia atas;
5. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan; serta
6. Pegawai Organik Jenjang Supervisor/Penyelia Atas, Eksekutif dan Eksekutif Senior pada Anak Perusahaan.

State Officials' Wealth Report (LHKPN) embodies the Company's commitment to accountability and transparency as well as support for the Government's effort to prevent and eradicate corruption, collusion, and nepotism in state governance. This is in line with Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), which confirms that the institution has the authority to take the measures for preventing acts of corruption through registration and examination of State Officials' Wealth Reports (LHKPN).

PLN Indonesia Power consistently directs the Management to prioritize integrity and transparency in all its business activities. Every year, the Company requires all mandatory officials to submit LHKPN without delay.

The compliance with LHKPN submission is provided in the Decree of the Board of Directors No. 112.K/010/IP/2021 on Guidelines for State Officials' Wealth Report (LHKPN) in Indonesia Power. According to these guidelines, mandatory officials include:

1. The Company's Board of Commissioners, whose management follows the management of the originating agency;
2. The Company's Board of Directors;
3. Employees at Chief Executive, Senior Executive, and Executive levels in structural and functional positions;
4. Employees in structural positions at Senior Supervisor level;
5. Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries; and
6. Permanent Employees at Supervisor/Senior Supervisor, Executive, and Senior Executive levels in Subsidiaries.

Prosedur dan Pelaksanaan Laporan LHKPN Tahun 2023

LHKPN Submission Procedures in 2023

LHKPN disampaikan satu (1) kali dalam setahun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara elektronik melalui aplikasi berbasis web e-LHKPN. Prosedur penyampaian LHKPN di Perusahaan mengacu pada Peraturan KPK Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

LHKPN is submitted once (1) every year to the Corruption Eradication Commission (KPK) via e-LHKPN which is available online. The Company's LHKPN submission procedures refer to KPK Regulation No. 02 of 2020 on Amendment to KPK Regulation No. 07 of 2016 on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Assets.

- LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
  LHKPN shall be submitted within no later than three (3) months since the first appointment/end of term/retirement/re-appointment following the end of a term, or retirement from the State Official position.
- LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan dan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
  During their term of office, incumbent State Officials shall submit LHKPN once a year by detailing their wealth as of December 31 of the reporting year. The report shall be submitted no later than on March 31 of the next year.



Dalam mendorong pemenuhan kepatuhan para pejabat yang menjadi wajib lapor di Perusahaan untuk melaporkan LHKPN secara tepat waktu, penanggung jawab pelaporan LHKPN yaitu Satuan Legal, Risk and Compliance telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada para wajib lapor melalui pendistribusian dokumen dan sosialisasi e-lhkpn *online*.

To encourage the mandatory Officials submitting LHKPN without delay, the unit in charge of LHKPN management, i.e. the Legal, Risk, and Compliance Unit, gave socialization and technical guidance regarding LHKPN to these mandatory parties via physical document and online information in e-LHKPN.

100%

Pada tahun 2023 seluruh pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN (100%) atau sebanyak 883 orang telah melaporkan harta kekayaannya untuk tahun buku 2022 yang disampaikan kepada KPK secara tepat waktu.

In 2023, 883 mandatory Officials have all (100%) reported their wealth for fiscal year 2022 in LHKPN submitted to KPK in timely manner.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

PLN Indonesia Power menjalankan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai program saluran pengaduan yang dibentuk untuk segera menanggapi laporan tentang ketidakpatuhan, kecurangan atau penggelapan, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan standar etika atau aturan perilaku yang dilakukan oleh pegawai. Seluruh insan PLN Indonesia Power, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan setiap tindakan aktual atau potensial yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi terhadap Perusahaan.

PLN Indonesia Power operates a Whistleblowing System (WBS) as a tipoff channel. The medium was established to immediately respond to tipoff of non-compliance, fraud or embezzlement, and violations of Company policies, code of conducts, and other rules regarding employee conducts. All PLN Indonesia Power personnel, shareholders, and other stakeholders can report any actual or potential actions that may inflict financial or reputational loss to the Company.

WBS diterapkan secara konsisten, dengan baik dan benar sebagai bagian dari lingkungan pengendalian internal Perusahaan, khususnya dalam mengurangi risiko ketidakpatuhan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

WBS is implemented consistently, properly, and correctly as part of the Company's internal control, especially in reducing the risk of legal non-compliance and abuse of authority.

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System Policy

Perusahaan memiliki Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power No. 250.K/010/IP/2019 dan No. 20.SK/Dekom/IP/2019 tentang Kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS). Kebijakan ini disusun untuk mendorong pegawai dan pihak lainnya agar melaporkan kekhawatiran, menjelaskan proses pelaporan, melakukan investigasi, dan memperbaiki serta menjelaskan bahwa Perusahaan senantiasa memberikan perlindungan bagi pelapor, terlepas dari apakah kekhawatiran yang dilaporkan pada akhirnya terbukti.

The policy concerning the Whistleblowing System is provided in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power No. 250.K/010/IP/2019 and No. 20.SK/Dekom/IP/2019 on Policy for Whistleblowing System (WBS) Violation Report Management. This policy was prepared to encourage employees and other parties to report their concerns, explain the reporting process, conduct investigations, and improve and explain that the Company always provides protection for whistleblowers, regardless of whether the reported concerns are ultimately proven.

Dalam kebijakan WBS, Perusahaan telah menetapkan lingkup pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh tim pengelola WBS, mencakup:

1. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial seperti tidak jujur, curang atau korupsi, gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan perusahaan termasuk suap atau kegiatan lainnya;
2. Aktivitas ilegal, seperti pencurian, penjualan, kekerasan, pelecehan, diskriminasi atau intimidasi, kerusakan pidana pada aset Perusahaan;

In the policy, the Company stipulates the scope of tipoffs that can be followed up by the WBS management team, including:

1. Any actions that may result in financial and non-financial losses, such as dishonesty, fraud, corruption, or gratuity that violate the Company's provisions, including bribery and other activities;
2. Illegal activities, such as theft, sale, violence, abuse, discrimination, intimidation, or criminal damage to Company's assets;



3. Tidak etis atau melanggar kebijakan Perusahaan, seperti mengubah catatan atau data Perusahaan secara tidak jujur, mengadopsi praktik akuntansi yang tidak baik atau dengan sengaja melanggar Pedoman Etika Perusahaan atau prosedur lain;
4. Berpotensi merugikan atau membahayakan Perusahaan, Pegawai Perusahaan atau pihak ketiga yang menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan atau merusak reputasi. seperti praktik kerja yang tidak aman, kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, atau penyalahgunaan aset atau sumber daya Perusahaan;
5. Penyalahgunaan wewenang;
6. Melakukan segala bentuk ketidakwajaran dan pelanggaran etika lainnya yang berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan WBS di Perusahaan, kebijakan WBS ini disosialisasikan kepada seluruh pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris Perusahaan serta pemangku kepentingan yang terkait secara berkala. Pada tahun 2023, sosialisasi pedoman dan kebijakan WBS dilakukan melalui *email*, khususnya pada saat pelaksanaan survei pemahaman terhadap WBS. Sosialisasi juga dilakukan kepada Pihak Eksternal, yaitu Mitra Kerja Perusahaan yang dilakukan pada saat pelaksanaan *vendor gathering*. Pedoman WBS juga dapat diakses melalui *website* Perusahaan bagian Tata Kelola (https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx).

3. Ethical misconduct or violation against Company policy, such as fraudulently modifying Company records or data, adopting bad accounting practices, or purposefully violating the Company's Code of Conduct or other procedures;
4. Potential damage or danger to the Company, Employees, or third parties which results in financial loss or reputational damage to the Company, such as unsafe work practice, environmental damage, health risk, or abuse of Company assets or resources;
5. Abuse of authority;
6. Any forms of impropriety other ethical misconduct which may potentially damage the Company's reputation.

To increase the effectiveness of WBS implementation, the policy is regularly re-introduced to all employees, Directors, Commissioners, and relevant stakeholders. For 2023, the WBS Guidelines and Policy were distributed via email, particularly during the WBS comprehension survey. The dissemination also reached external parties, i.e. business partners, during Vendor Gathering. WBS Guidelines are accessible through the Company website in the section of Governance (https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx).

Perlindungan Bagi Pelapor
Whistleblower Protection

Seluruh laporan yang dikirimkan melalui saluran WBS dan memiliki bukti awal yang valid mengenai terjadinya tindak pelanggaran akan segera ditindak lanjuti dengan pelaksanaan investigasi mendalam. Prinsip-prinsip utama yang mendasari penerapan sistem WBS di Perusahaan meliputi privasi data yang terjamin bagi para pelapor, serta identifikasi secara tepat waktu dan tidak bias terhadap semua laporan.

All tipoffs submitted with valid initial evidence of the relevant violation will be immediately followed up with an in-depth investigation. The key principles underlying WBS implementation in the Company include guaranteed data privacy for whistleblowers, as well as timely and unbiased identification of all reports.

PLN Indonesia Power memastikan bahwa setiap pelapor terlindungi dari segala bentuk ancaman, gangguan, serta aksi balas dendam. Perusahaan tidak akan melakukan pembalasan dalam keadaan apapun terhadap pegawai yang menyampaikan kekhawatiran melalui saluran WBS, yang berarti bahwa tidak ada tindakan disipliner atau sanksi akan diambil (pemecatan, penurunan pangkat, penangguhan bonus, dan lainnya). Pelapor dapat mengadukan apabila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan balasan lain yang dialaminya. Pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perusahaan, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas biaya Perusahaan.

PLN Indonesia Power makes sure that every whistleblower is protected from any forms of threat, harassment, and retaliation. The Company will not retaliate under any circumstances against employees who raise concerns through WBS channels, meaning that no disciplinary action or sanctions will be imposed (dismissal, demotion, bonus suspension, etc.). Whistleblower can report any retaliation in the form of pressure, threat, or any other actions they receive. The tipoff shall be submitted to the Whistleblowing Management Team using the available procedure. Whenever a case cannot be solved internally, the whistleblower's right is guaranteed for an escalation to an independent agency outside the Company, such as Indonesia Witness and Victim Protection Agency (LPSK) at the Company's expense.

Apabila hasil investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur dengan itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, terdapat unsur kedengkian, serta tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor tersebut dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga memberikan sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa teguran, peringatan tertulis, penurunan kelas jabatan, hingga pemecatan. Adapun sanksi bagi Mitra Kerja yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu berupa pemutusan kontrak kerjasama.

In the event where an investigation finds a tipoff is made in bad faith, provide false evidence, contain hate, and without a clear ground, the whistleblower will be subject to counterclaim or imposition of sanction pursuant to the applicable provisions. The Company also give sanctions to any employee who is proven of committing violation, which includes reprimand, written warning, demotion, and dismissal. A Business Partner found to have committed any violation will be subject to termination of cooperation contract.



Sarana dan Media Pelaporan Pelanggaran
Tipoff Submission Means and Media

Berbagai sarana dan media penyampaian laporan pengaduan telah disediakan oleh Perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan. Adapun jenis pengaduan yang dapat dilaporkan pada WBS, yaitu terkait:
- Praktik bisnis yang melanggar hukum dan peraturan Perusahaan;
- Pelanggaran etika pegawai;
- Praktik korupsi, penerimaan permintaan gratifikasi dan suap;
- Penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta kejadian benturan kepentingan.

Setiap laporan yang masuk melalui saluran ini akan diperiksa kebenarannya dan diproses sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Various means and media for submitting tipoff are provided by the Company to be used by internal and external parties. The WBS receives tipoffs concerning:
- Business practices that violate Company laws and regulations;
- Violation of employee ethics;
- Corrupt practices, accepting requests of gratuities and bribes;
- Abuse of authority and position and any conflicts of interest.

Any tipoff submitted to the channels will be checked for veracity and processed according to applicable policies.



Pihak yang Mengelola Pengaduan
Whistleblowing Management Team

Perusahaan telah membentuk dan menetapkan pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola dan menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk melalui saluran WBS. Dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 053.K/020/IP/2023 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dan Tim Investigasi Pengaduan pelanggaran, Perusahaan telah menetapkan hierarki kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran sebagai berikut:

1. Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pengaduan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai, sebagai berikut:

The Company has established and appointed the parties with authority to manage and follow up on all tipoffs submitted to the WBS channels. The Decree of the Board of Directors No. 060.K/020/IP/2020 concerning the Composition of Whistleblowing Management Team and Whistleblowing Investigation Team has established the following hierarchy of authority for handling the tipoffs:

1. The authority of the Board of Directors and Whistleblowing Management Team for the violation allegedly committed by Employee is as follows:

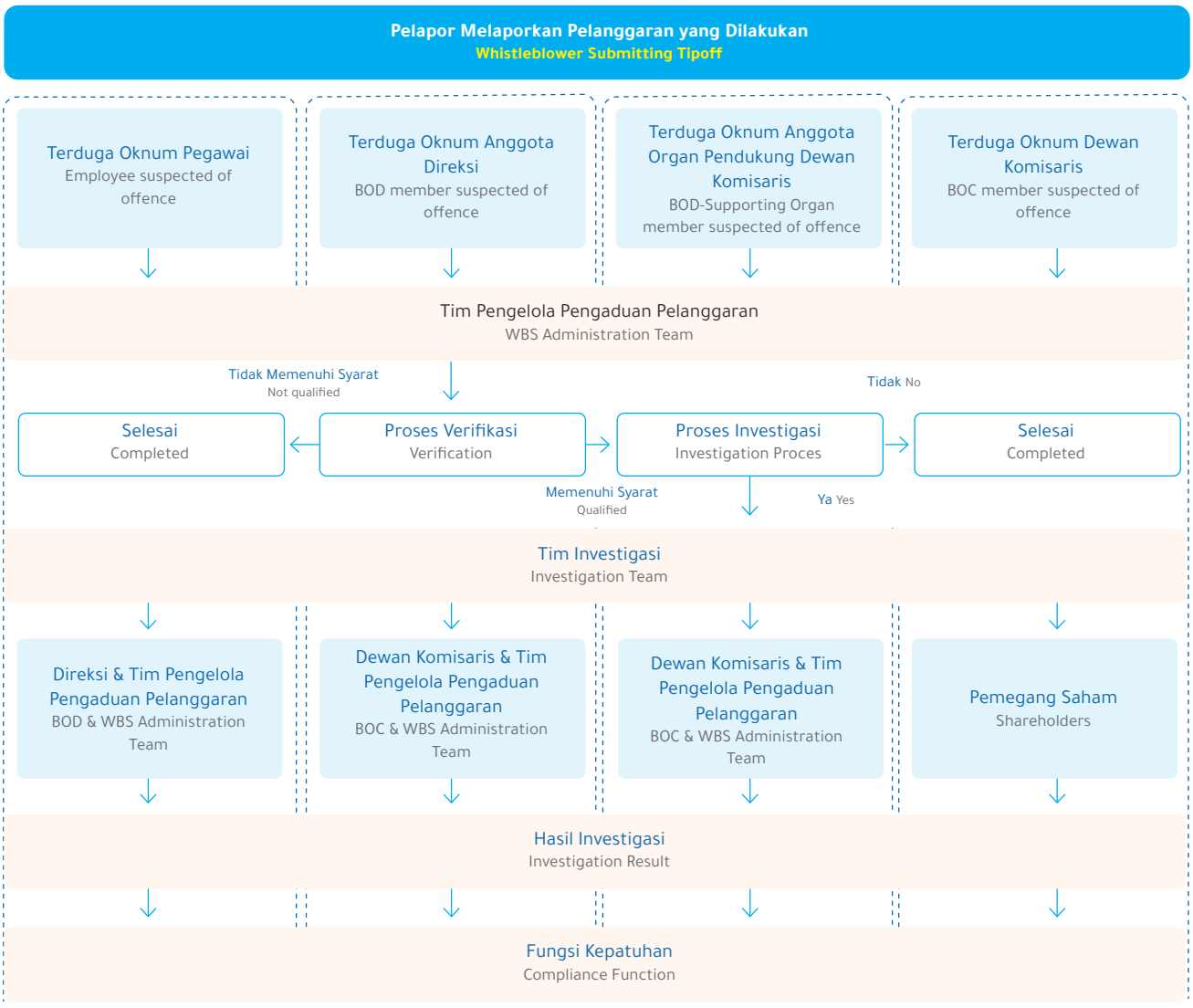
Terduga Pelaku Pelanggaran (Terlapor) Suspected Offender (Reportee)	Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Whistle-Blowing Management Team	Ketua Tim Pengelola Pelanggaran Head of Whistle-Blowing Management Team
Pegawai jenjang Eksekutif Utama Chief Executive-level Employee	Direksi Board of Directors	Direktur Utama President Director
Pegawai Jenjang Eksekutif Senior, Eksekutif, Penyelia dan Pelaksana Senior Executive-level employee, Executive-level employee, Supervisor, and Acting employee	Tim Pengaduan Pelanggaran dan Kepala Divisi Terkait Whistle-Blowing Team and relevant Head of Division	Kepala Satuan Legal, Risk and Compliance Head of Legal, Risk and Compliance Unit

2. Kewenangan Dewan Komisaris dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan sehubungan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan organ penunjang Dewan Komisaris, sebagai berikut:

2. The authority of the Board of Directors and the establishment of Whistleblowing Management Team for the violation allegedly committed by a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or BOC Supporting Organs, is as follows:

Terduga Pelaku Pelanggaran (Terlapor) Suspected Offender (Reportee)	Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Whistle-Blowing Management Team	Ketua Tim Pengelola Pelanggaran Head of Whistle-Blowing Management Team
Anggota Direksi Member of Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Organ Penunjang Dewan Komisaris Member of Supporting Organs for the Board of Commissioners	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Dewan Komisaris Member of Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders	Pemegang Saham Shareholders

Alur Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran
Flow of the Whistleblowing Process

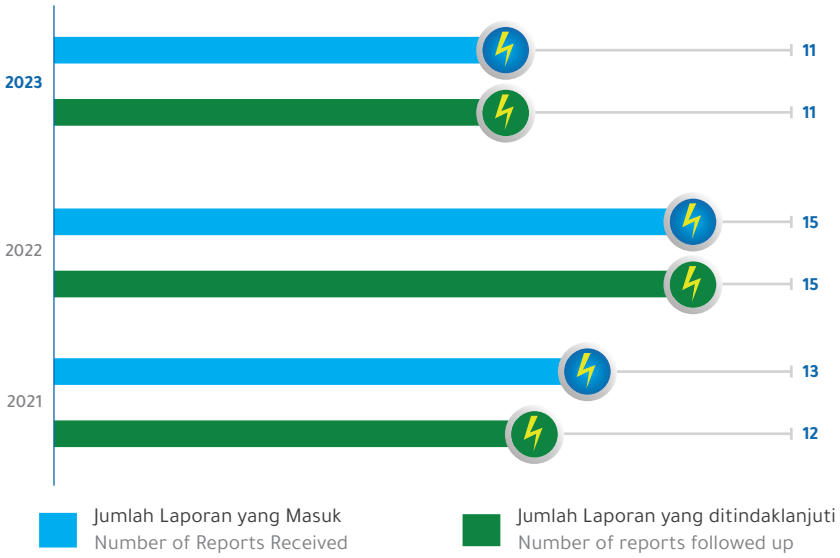


Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Number of Tipoffs and Follow-ups

Selama tahun 2023, terdapat 11 laporan pengaduan yang masuk melalui sarana pelaporan WBS dan seluruhnya (100%) telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2023. Berikut grafik pelaporan yang masuk melalui sarana WBS selama tiga tahun terakhir.

Throughout 2023, there were 10 tipoffs submitted to the WBS channels, all of which were completely followed up. Here is the chart detailing tipoffs submitted to WBS channels for the past three years.



Berikut rincian pelaporan pelanggaran yang masuk pada tahun 2023.

Here are the details of tipoff submitted in 2023.

Tanggal Laporan Report Date	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Tipoff Category	Mekanisme Penyelesaian Settlement Procedures
12 Desember 2022 12 Desember 2022	Eksternal External	Penyalahgunaan Wewenang Abuse of authority	Tim Pengelola WBS telah menyusun tanggapan atas pengaduan. Namun, Tim Pengelola WBS tidak dapat mengirimkan tindak lanjut dikarenakan pelapor tidak mencantumkan alamat lengkap. The WBS Management Team has drafted a response to the complaint. However, the WBS Management Team could not able to send a follow-up because the complainant did not include a complete address.
15 Maret 2023 March 15, 2023	Anonim Anonymous	Penyalahgunaan Wewenang Abuse of authority	Tim Pengelola Pengaduan WBS melakukan pertemuan untuk memverifikasi dan meminta klarifikasi/ penjelasan kepada pihak - pihak terkait pada tanggal 5 April 2023 dan 12 April 2023. Selanjutnya menyampaikan verifikasi kepada Pelapor tanggal 16 Mei 2023 melalui *Email* pengaduan. WBS Management Team conducted meetings to verify and ask for clarification from relevant parties on April 05, 2023 and April 12, 2023. Followed by reporting the verification to whistleblower on May 16, 2023 via Whistleblowing's email address.
23 Mei 2023 May 23, 2023	Anonim Anonymous	Penyalahgunaan Aset Asset Misappropriation	Tim Pengelola Pengaduan WBS melakukan pertemuan untuk memverifikasi dan meminta klarifikasi/ penjelasan kepada pihak - pihak terkait pada tanggal 31 Juli 2023 dan 14 Agustus 2023. Selanjutnya, melakukan verifikasi ke Pihak Terkait pada tanggal 29 Agustus 2023 dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelapor tanggal 20 Agustus 2023 melalui *Email* pengaduan. WBS Management Team conducted meetings to verify and ask for clarification from relevant parties on July 31, 2023 and August 14, 2023. Followed by verifying to relevant party on August 29, 2023 and presenting verification result to whistleblower on August 20, 2023 via Whistleblowing's email address.
22 Juni 2023 June 22, 2023	Internal	Penyalahgunaan Wewenang Abuse of authority	Tim Pengelola Pengaduan WBS melakukan pertemuan untuk memverifikasi dan meminta klarifikasi/ penjelasan kepada pihak - pihak terkait pada tanggal 31 Juli 2023 dan 14 Agustus 2023. Selanjutnya, melakukan verifikasi ke Pihak Terkait pada tanggal 21 Agustus 2023 dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelapor tanggal 22 Agustus 2023 melalui *Whatsapp* pengaduan. WBS Management Team conducted meetings to verify and ask for clarification from relevant parties on July 31, 2023 and August 14, 2023. Followed by verifying to relevant party on August 21, 2023 and presenting verification result to whistleblower on August 22, 2023 via Whistleblowing's WhatsApp account.

Tanggal Laporan Report Date	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Tipoff Category	Mekanisme Penyelesaian Settlement Procedures
11 September 2023 September 11, 2023	Internal	Aktivitas Ilegal Illegal activities	Hasil verifikasi menyatakan bahwa pengaduan sudah masuk proses KP2DP Unit, untuk selanjutnya diteruskan kepada Divisi HCS dan Unit melalui surat permohonan tanggal 19 September 2023. Hasil verifikasi disampaikan kepada pelapor tanggal 20 September 2023 melalui *Email* Pengaduan. Verification result indicated that tipoff has been processed by the Whistleblowing Investigation Team, to be further escalated to HCS Division and Unit under letter of application dated September 19, 2023. Followed by presenting verification result to whistleblower on September 20, 2023 via Whistleblowing's email address.
18 September 2023 September 18, 2023	Internal	Non WBS	Laporan pengaduan diteruskan kepada Divisi HCS dan Unit melalui surat permohonan tanggal 22 September 2023. Selanjutnya melakukan verifikasi kepada pelapor tanggal 22 September 2023 melalui *Whatsapp* Pengaduan. Tipoff was escalated to HCS Division and Unit under letter of application dated September 22, 2023. Followed by verifying to whistleblower on September 22, 2023 via Whistleblowing's WhatsApp account.
17 Oktober 2023 October 17, 2023	Anonim Anonymous	Aktivitas Ilegal Illegal Activity	Hasil verifikasi menyatakan bahwa pengaduan diusulkan untuk proses KP2DP, untuk selanjutnya diteruskan kepada Divisi HCS dan Unit melalui surat permohonan tanggal 20 Oktober 2023 perihal Penyampaian Hasil Tim Pengelola Pengaduan WBS. Verification result indicated that tipoff was proposed to be processed by the Whistleblowing Investigation Team, to be further escalated to HCS Division and Unit under letter of application dated October 20, 2023 on Submission of WBS Management Team Results.
20 November 2023 November 20, 2023	Anonim Anonymous	Non WBS	Meneruskan surat ke Unit tanggal 28 Desember 2023 Escalating letter to Unit on December 28, 2023.
6 Desember 2023 December 6, 2023	Anonim Anonymous	Penyalahgunaan Wewenang Abuse of authority	Meneruskan surat ke GAF dan HST tanggal 20 Desember 2023. Selanjutnya menyampaikan surat ke PKP PT PLN (Persero) terkait hasil Evaluasi SPPD dengan sistem *lumpsum* di PLN Indonesia Power. Escalating letter to GAF and HST on December 20, 2023. Followed by presenting letter to PKP PT PLN (Persero) regarding result of SPPD Evaluation in lump sum in PLN Indonesia Power.

Dari pengaduan yang masuk tersebut, tidak terdapat pemberian sanksi kepada pegawai yang berasal dari pengaduan pelanggaran WBS. Sepanjang tahun 2023, Tim Pengelola WBS juga tidak menerima laporan apa pun yang diklasifikasikan sebagai praktik korupsi.

None of the submitted tipoffs resulted in the imposition of sanctions to employees due to WBS policy violations. Throughout 2023, the WBS Management Team did not receive any tipoff of activities that could be considered as corrupt practices.

Akses Informasi dan Komunikasi bagi Para Pemangku Kepentingan

Access to Information and Communication for Stakeholders

PLN Indonesia Power mendukung keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan yang transparan dan konstruktif untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan jangka panjang. Perusahaan senantiasa berupaya menjaga kredibilitas dan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan melalui transparansi penyampaian informasi yang tepat waktu, terkini, akurat dan memadai mengenai perkembangan bisnis, strategi dan kondisi Perusahaan. Selain itu, PLN Indonesia Power juga membina hubungan yang harmonis dengan segenap pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan secara aktif melakukan pertemuan/dialog dengan para pemangku kepentingan untuk mengetahui harapan terkini para pemangku kepentingan dan menyelesaikannya dengan program-program kerja dan strategi bisnis Perusahaan.

PLN Indonesia Power promotes transparent and constructive engagement and consultation with the stakeholders in order to build trust and long-term relationship. The Company always protects its credibility and strengthens the trust of shareholders and stakeholders by transparently providing timely, up-to-date, accurate, and adequate information regarding its business developments, strategies and conditions. Also, to maintain good relationship with all internal and external stakeholders, PLN Indonesia Power actively arranges meetings with stakeholders to discover their current expectations and align them with the Company's work programs and business strategies.

Akses Informasi dan Komunikasi Bagi Pemegang Saham

Access to Information and Communication for Shareholders

Dengan kondisi dimana mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power senantiasa berupaya menjaga kredibilitas dan memperkuat kepercayaan pemegang saham melalui transparansi penyampaian informasi yang tepat waktu, terkini, akurat dan memadai mengenai perkembangan bisnis, strategi dan keuangan Perusahaan. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power mengungkapkan informasi kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

With the majority of its shares held by PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power constantly maintains its credibility and shareholders' trust through the delivery of transparent, current, accurate, and sufficient information on business, strategic, and financial development in the Company. PLN Indonesia Power's disclosure of information to the shareholders for 2023 has met the provision of the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.

Pelibatan Langsung

PLN Indonesia Power secara langsung melibatkan pemegang saham untuk mendiskusikan strategi dan tata kelola Perusahaan agar Perusahaan selalu mengetahui harapan/aspirasi dari Pemegang Saham. Secara berkala, Perusahaan juga melakukan meeting untuk membahas rancangan RKAP dan RJPP melalui pelaksanaan pra-RUPS.

Direct Engagement

PLN Indonesia Power directly engages with shareholders to discuss the Company's strategies and governance in order to learn about their expectations and aspirations. The Company also arranges meeting periodically to discuss draft Work Plan & Budget and Long Term Plan during pre-GMS.

Website Perusahaan

Semua informasi tata kelola perusahaan yang relevan, termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PLN Indonesia Power tersedia di situs *web* Perusahaan di www.plnindonesiapower.co.id. tata kelola Perusahaan agar Perusahaan selalu mengetahui harapan/aspirasi dari Pemegang Saham. Secara berkala, Perusahaan juga melakukan meeting untuk membahas rancangan RKAP dan RJPP melalui pelaksanaan pra-RUPS.

Website Perusahaan

All relevant information on corporate governance, including PLN Indonesia Power's Annual Report and Sustainability Report are available in the Company's website at www.plnindonesiapower.co.id.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PLN Indonesia Power memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk mendengar penjelasan tentang kinerja Perusahaan dan mengajukan pertanyaan sekaligus berinteraksi dengan Dewan Komisaris dan Direksi melalui pelaksanaan RUPS Tahunan. Sebelum RUPST, para pemegang saham diberikan seluruh informasi material

General Meeting of Shareholders (GMS)

PLN Indonesia Power gives opportunity to all shareholders to hear an explanation of the Company's performance, ask questions to, and interact with the Board of Commissioners and Board of Directors through Annual GMS. Before the Annual GMS is held, the shareholders are supplied with all material information held by the Company, provided that they are relevant to the meeting agenda.

Penyampaian Laporan Berkala

Secara berkala, Perusahaan juga menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham, baik mayoritas maupun minoritas terkait Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan, Laporan Keuangan serta laporan lainnya.

Submission of Periodical Reports

Periodically, the Company submits reports to both majority and minority shareholders. They include Annual Report, Sustainability Report, Quarterly and Annual, Management Report, Financial Statements, and other reports.



Akses Informasi dan Komunikasi Bagi Internal Perusahaan

Access to Information and Communication for Company Personnel

PLN Indonesia Power memfasilitasi internal Perusahaan dalam sebuah forum komunikasi dua arah antara pegawai dan manajemen yang dilakukan melalui kegiatan *Coffee Morning* dan *Team Briefing*. Forum ini merupakan saluran tatap muka langsung antara Manajemen dan pegawai yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali, dimana dalam forum tersebut Manajemen dapat menyampaikan arahan strategis Perusahaan. PLN Indonesia Power juga menerbitkan *e-buletin* mingguan yaitu Indonesia Power *Weekly News* (IPWN) yang memuat beragam aktivitas Perusahaan. Selain itu masih terdapat saluran informasi Internal lainnya seperti *Visual Management*, *Email*, *Whatsapp Group*, PIP Radio.

PLN Indonesia Power provides two-way communication forums between the employees and the Management, i.e. Coffee Morning and Team Briefing. Hosted on a monthly basis, these forums provide the opportunity for the Management and employees to meet face-to-face in order to give and receive the Company's strategic directives. PLN Indonesia Power also publishes weekly e-bulletin, Indonesia Power Weekly News (IPWN), which covers various activities held in the Company. Other internal channels for information include Visual Management, E-mail, WhatsApp Group, and PIP Radio.

Komunikasi dan Akses informasi Bagi Dewan Komisaris

Access to Information and Communication for the Board of Commissioners

Direksi memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris juga sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. Forum komunikasi Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui rapat rutin yang dilakukan bersama Direksi. Dalam rapat ini, Direksi menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris melalui organ Komite juga dapat mengundang Manajemen Perusahaan untuk melakukan rapat atau pertemuan yang membahas hal-hal yang termasuk pada pengawasan Dewan Komisaris. Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris, yaitu Laporan Manajemen, Laporan Tahunan, Laporan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Audit secara berkala serta Laporan lainnya apabila diminta oleh Dewan Komisaris.

The Board of Directors (BOD) makes sure that accurate, relevant, and timely information are accessible for the Board of Commissioners (BOC). The Board of Commissioners may, at any time, require the Board of Directors to provide additional information. Communication with the Board of Commissioners can be sought via regular meetings with the Board of Directors. During such meetings, the Board of Directors prevents the data and information that are relevant to the implementation of the Board of Commissioners' duties, as specified in the Articles of Association. The Board of Commissioners, via its Committees, may also invite the Management to hold a meeting for discussing various issues, including on the Board of Commissioners' supervision. The Board of Directors submits periodical reports to the Board of Commissioners, which include Management Report, Annual Report, Risk Management Report, Audit Report, and other reports whenever required by the Board of Commissioners.

Saat ini Perusahaan telah memiliki Aplikasi C-MoM yang digunakan untuk mencatat dan memonitor hasil rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Melalui aplikasi ini, Dewan Komisaris dapat memonitor tindak lanjut rapat dengan hak akses terbatas. Adapun modul Rapat Dewan Komisaris dalam aplikasi C-MOM ini digunakan untuk mengelola Tanggapan Dewan Komisaris pada rapat dengan menu sebagai berikut:

The Company currently owns C-MoM application for recording and monitoring the results of the Board of Directors and the Board of Commissioners' meetings. With restricted access right, the Board of Commissioners can monitor the follow up on meeting results. The Board of Commissioners' meeting modules available in the application are used to manage the Commissioners' responses during the meeting, with the following menu:

Melakukan penjadwalan Rapat Dewan Komisaris, Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Tanggapan Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.	Preparing Board of Commissioners (BOC) meeting schedule, BOC meeting agenda, and BOC responses in BOC meetings.
Memantau tindak lanjut atas Tanggapan Dewan Komisaris yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris.	Monitoring follow-up on BOC's responses provided during BOC meetings.

Akses dan Informasi Perusahaan Bagi Publik

Access to Company Information for the Public

PLN Indonesia Power terlibat dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati serta memahami harapan dan aspirasi mereka. Dalam hal keterbukaan informasi publik, Perusahaan telah mengesahkan Kebijakan terkait keterbukaan informasi melalui Keputusan Direksi Nomor 37.K/010/IP/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pedoman Komunikasi Perusahaan dan Keputusan Direksi No. 246.K/010/IP/2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini memberikan panduan bagi Sekretaris Perusahaan sebagai pengelola informasi dan dokumen Perusahaan untuk berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengaturan terkait keterbukaan informasi dan informasi rahasia.

PLN Indonesia Power engages with relevant stakeholders to build strong, respectful relationships while understanding their hopes and aspirations. The Company's policies on the transparency of information are regulated by the Decree of the Board of Directors No. 37.K/010/IP/2012 dated March 21, 2012 on Corporate Communication Guidelines and Decree of the Board of Directors No. 246.K/010/IP/2017 dated December 31, 2017 on Service, Disclosure, and Transparency of Public Information. These policies guide the Corporate Secretary, who manages the Company's information and documentation, in communicating with all stakeholders, including in managing information disclosure and confidential information.

Website Perusahaan
Company Website

Seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi Perusahaan situs web Perusahaan di www.plnindonesiapower.co.id yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal-hal yang dipublikasikan dalam situs web Perusahaan antara lain pengungkapan material terkait Perusahaan, kinerja operasional Perusahaan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan juga telah menyediakan forum komunikasi dan publikasi informasi publik melalui media sosial yang dimiliki Perusahaan.

All stakeholders can access the Company's data and information at the website www.plnindonesiapower.co.id which available in Indonesian and English. Matters published in the Company website include material disclosures of the Company, Company operational performance, Annual Reports, and Sustainability Reports, all which can be accessed by stakeholders. The Company also provides communication forums and public information publication via social media.

Kontak Perusahaan
Company Contacts

Untuk keperluan informasi lebih lanjut mengenai PLN Indonesia Power, publik juga dapat menghubungi Perusahaan melalui:

To receive more details on PLN Indonesia Power, the public can contact the Company via:

PLN Indonesia Power
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan, Indonesia
(+62-21) 5267666
(+62-21) 5252623

PLN Indonesia Power juga berpartisipasi dalam berbagai inisiatif eksternal yang mendukung komitmen Perusahaan dalam program keberlanjutan yang telah diuraikan dalam Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

PLN Indonesia Power also participates in a number of external initiatives to support its commitment to succeeding the sustainability program as detailed in the Corporate Social and Environmental Responsibility of this Annual Report.



Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa
Supply Chain Management and Goods & Services Procurement

Untuk mencapai misi Perusahaan dalam "Menyediakan Solusi Energi yang Hijau, Inovatif dan Terjangkau, yang Melampau Harapan Pelanggan", memasok produk berkualitas dan layanan yang andal merupakan kunci strategis bagi bisnis Perusahaan. PLN Indonesia Power percaya bahwa rantai nilai Perusahaan memiliki pengaruh langsung terhadap dampak yang Perusahaan timbulkan terhadap ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Oleh karenanya, PLN Indonesia Power memberikan perhatian besar kepada seluruh mitra kerja pemasok agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

To embody the mission of "Delivering Green, Innovative, and Affordable Energy Solutions that Go Beyond Customer Expectation", supplying quality products and reliable services is a strategic key to the Company's business. PLN Indonesia Power believes that its value chain has a direct impact towards the economy, environment and society. Therefore, the Company pays great attention to all partnering vendors so that they can deliver the best service that supports all of the Company's operational activities.

Perusahaan berkomitmen untuk membantu memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan pemasok lokal. Pada akhir tahun 2023, jumlah pemasok Perusahaan terdiri dari 2.267 pemasok dan sebanyak 2.253 atau sebesar 99,38% merupakan pemasok lokal dengan total nilai pengadaan mencapai Rp75,24 miliar.

The Company is committed to helping strengthen the economy of the people surrounding the Company's operations, including by collaborating with local vendors. At the end of 2023, the Company has been cooperating with 2,267 vendors, where 2,253 or 99.38% of them were locals with a total procurement value of Rp75.24 billion.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Goods and Services Procurement Policy

Kebijakan pengadaan barang dan jasa ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN Indonesia Power. Kebijakan ini mengatur ketentuan mengenai Organisasi pengadaan barang dan jasa, Pengelolaan perencanaan pengadaan, Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Manajemen penyedia barang dan jasa, *E-Procurement* serta Pengendalian pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan, baik di kantor pusat maupun unit kerja.

The goods and services procurement policy is specified by the Decree of the Board of Directors No. 218.K/010/IP/2016 dated November 01, 2016 on the Guidelines for the Procurement of Goods and Services in Indonesia Power. The policy concerns about: Goods and services procurement organization; Procurement planning management; Goods and services procurement management; Goods and services provision management; E-Procurement; and Goods and services procurement control. The procurement work is assumed by the Division of Supply Chain Management and Procurement.

Perusahaan telah menetapkan bahwa proses pengadaan harus didasarkan pada konsep *Value for Money* (nilai beli yang sepadan), yaitu kombinasi optimum dari 6 (enam) *rights* (6 Rs) yaitu tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan harga, yang memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan opsi harga awal paling murah (*lowest initial price option*), tetapi merupakan kembalian tertinggi (*best return*) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan. Dalam konsep 6 Rs, tepat harga merupakan paling akhir karena tergantung pada 5 Rs lainnya, sedangkan tujuan sosial ekonomi ini dapat berupa tujuan sosial, lingkungan, dan tujuan strategis lain, seperti mendorong penggunaan produk dalam negeri.

The Company has determined that procurement must be based on Value for Money, which is the optimum combination of six rights (6 Rs), i.e. right quality, right quantity, right time, right place, right socio-economic objectives, and right price, to meet the needs of the user. It is not always the lowest initial price option, but rather the best return from investment with consideration to the predetermined evaluation criteria. In 6 Rs principle, price is placed in the last position because it depends on the other 5 Rs, whereas socio-economic goals may cover social, environmental, and other strategic goals, such as encouraging domestic product consumption.

Selain itu, menegaskan komitmen Perusahaan dalam pemberantasan praktik anti korupsi, pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan juga telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini diterapkan untuk menciptakan iklim pengadaan barang dan jasa yang bersih dan memperkuat sistem pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa termasuk persyaratan pendaftaran calon pemasok. Para Penyedia juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditujukan agar seluruh proses bisnis dan operasional dapat berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Also, to confirm the commitment to eradicating corruption, the Company's goods and services procurement has also implemented ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. The implementation of Anti-Bribery Management System aims to create a clean procurement climate and strengthen a system that prevents any corruption, collusion, and nepotism in every goods/services procurement stage, including the requirements for vendor candidate's registration. The vendors are also required to sign mandatory Integrity Pact regarding goods and services procurement. This aims to keep all business and operational processes running objectively and in line with the applicable provisions.



Seleksi Penyedia Barang dan Jasa
Selection of Goods and Services Providers

PLN Indonesia Power mengambil pendekatan yang bertanggung jawab dalam seleksi penyedia barang/jasa, dengan memprioritaskan mitra yang mematuhi dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan beretika. Untuk itu, Perusahaan memastikan seluruh pemasok telah memenuhi dan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Pedoman Etika Perusahaan, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, serta kontrak tertulis yang telah disepakati.

PLN Indonesia Power takes a responsible approach in selecting goods/service providers, by prioritizing partners who comply with applicable laws and regulations and are committed to running their business in responsible and ethical manners. For this reason, the Company ensures that all vendors have fulfilled and complied with the terms and conditions stated in the Company's Code of Conduct, Goods and Services Procurement Guidelines, and written contracts that have been agreed upon.

Guna mendapatkan penyedia barang/jasa sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan, PLN Indonesia Power menerapkan persyaratan kualifikasi, dimana persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk pekerjaan yang risiko teknis dan komersialnya tinggi atau pekerjaan kompleks dapat ditambahkan persyaratan yang lebih spesifik dan khusus, baik yang berkaitan dengan peralatan, tenaga ahli dan pengalamannya.

In order to find goods/service vendors that meet its needs, PLN Indonesia Power always set certain qualifications as the minimum requirements for activity implementation. For works with high technical and commercial risks or complexity, more detailed and specific requirements may be added, either in relation to equipment, experts, or relevant experience.

Untuk mendorong dan memastikan pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan, Perusahaan juga menetapkan bahwa Penyedia harus terdaftar dan memiliki sertifikat CSMS (*Contractor Safety Management System*) dan menyampaikan dokumen rencana K3L atau HSSE *Plan*. Dalam salah satu klausul kontrak, Perusahaan telah menetapkan hak dan kewajiban Penyedia untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia. Selain itu, di beberapa proses pengadaan, Perusahaan juga mewajibkan penyedia untuk menjamin terpenuhinya hak ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

To encourage and make sure that vendors have adopted sustainable business policies and procedures, the Company also requires them to be registered and own the Contractor Safety Management System (CSMS) certificate as well as submit the HSSE Plan. In one clause of contract, the Company has stipulated the vendors' rights and obligations to take measures to protect the environment, both inside and outside work site, and limit the damage and impact/disruption of pollution, noise, and other factors resulted from Vendors' activities on the community and their properties. In several procurement processes, the Company also requires vendors to guarantee the fulfillment of employment rights in accordance with applicable laws and regulations.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Procedures

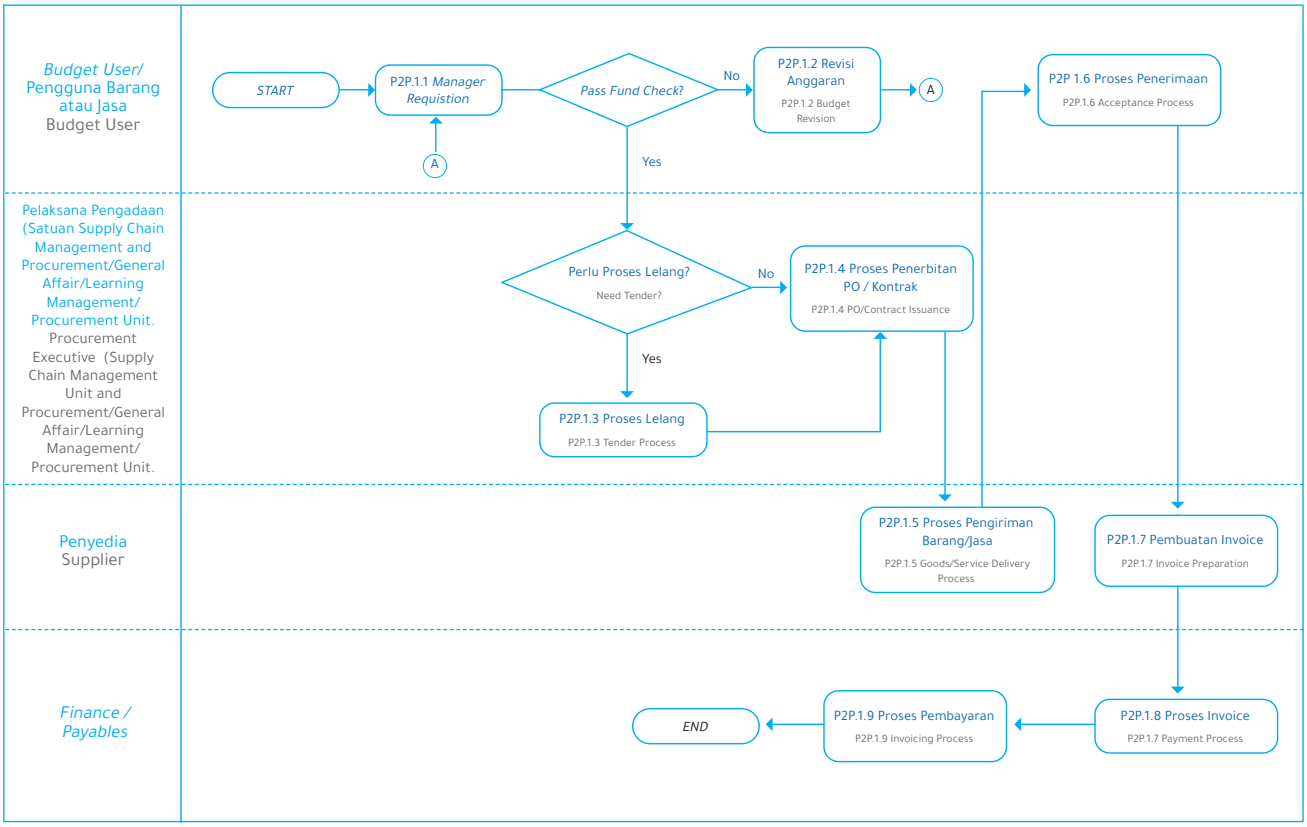
PLN Indonesia Power memberikan kesempatan yang sama kepada bagi perusahaan besar, usaha besar, menengah dan kecil untuk menjadi mitra kerja/pemasok di Perusahaan. Untuk memaksimalkan efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan, kegiatan pengadaan barang/jasa di Perusahaan dilakukan melalui sistem otomatis. PLN Indonesia Power telah memiliki aplikasi *Supply Chain Management* (SCM) yang dapat diakses pada *website* Perusahaan https://scm.plnindonesiapower.co.id. Melalui aplikasi ini, Supplier dapat mengakses beberapa informasi termasuk berita terbaru tentang kegiatan *Supply Chain Management* di Perusahaan, seperti informasi pengadaan, kebijakan pengadaan dan informasi terkait lainnya. Supplier juga dapat masuk dan mendaftar secara *online* untuk menjadi *vendor* terdaftar di Perusahaan.

PLN Indonesia Power provides equal opportunity for large companies as well as large, medium, and small businesses to become its business partners/vendors. For optimal effectiveness and transparency, the goods/services procurement is process automatically via system. PLN Indonesia Power also owns Supply Chain Management (SCM) application which can be accessed on the Company's website at https://scm.plnindonesiapower.co.id. Using the application, vendors can access some information, including updates on Supply Chain Management activities in the Company, such as information on procurement, procurement policy, and other relevant information. Vendors can also log in and register online to be enlisted as the Company's registered vendors.



Secara umum mekanisme proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan digambarkan sebagai berikut:

In general, the Company's goods and services procurement process is illustrated below:



Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Activities

Sepanjang tahun 2023, kegiatan pengadaan barang dan jasa, antara lain sebagai berikut:

1. *Value Generation* pada Proses Pengadaan
   Melalui pelaksanaan proses pengadaan dengan *optimal based purchasing strategy*, PLN Indonesia Power telah berhasil mendapatkan penghematan biaya (*cost saving*) pada tahun 2023 sebesar Rp434,7 miliar dengan pencapaian *Procurement Return of Investment* sebesar 2.588%.

2. *Vendor Gathering*
   Merupakan sarana meningkatkan komunikasi antara Perusahaan dengan para mitra kerja dalam hal penyampaian program-program dan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Perusahaan, mendengar masukan dari mitra kerja untuk meningkatkan kinerja dalam hubungan kemitraan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, serta memberikan umpan balik atas kinerja pemasok. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power mengundang seluruh pemasok melalui acara *vendor gathering* yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2023.

In 2023, the following procurement activities were performed:

1. Value Generation in Procurement Process
   With optimal-based procurement strategy, in 2023 PLN Indonesia Power has successfully saved Rp434.7 billion of costs, resulting in 2,588% procurement Return on Investment.

2. Vendor Gathering
   A forum for encouraging communication between the Company and its business partners to introduce the Company's goods/services procurement programs and policies, receive feedbacks from business partners for better partnership in goods/services procurement, and provide feedbacks on vendors' performance. PLN Indonesia Power invited all vendors to Vendor Gathering which was held on December 08, 2023.

Dalam acara *vendor gathering* tersebut, PLN Indonesia Power juga memberikan penghargaan kepada beberapa vendor sebagaimana tabel berikut:

During the event, PLN Indonesia Power also awarded some vendors in the following categories:

Vendor	Kategori Category	Penilaian Assessment
PT Control Systems Arena Para Nusa	Penyedia Barang/Jasa Terbaik Best Goods/Services Vendor	Terbaik Best
PT Riza Utama Teknik	Penyedia Konstruksi Terbaik Best Construction Vendor	Terbaik Best
PT Wartsila Indonesia	Penyedia Barang Terbaik Best Goods Vendor	Terbaik Best
PT Berca Hardayaperkasa	Penyedia Teknologi Informasi Terbaik Best Information Technology Vendor	Terbaik Best
PT Bando Indonesia	Industri yang Aktif Mengembangkan Produk Dalam Negeri Industry Active in Developing Domestic Products	Terbaik Best

3. Evaluasi Kinerja Pemasok
   Untuk membantu Perusahaan mengukur efektivitas dan efisiensi hubungan dengan *vendor*, Perusahaan juga melakukan penilaian/evaluasi kinerja pemasok yang dilakukan setelah proses pekerjaan selesai untuk menilai seberapa baik *vendor* memenuhi kewajiban dalam kontrak dan ekspektasi kinerja yang telah disepakati.

   Pada tahun 2023, Perusahaan telah memberikan penilaian atas kinerja masing-masing *vendor*. Dari jumlah *vendor* yang dinilai, terdapat 4 (empat) vendor yang berada dalam kategori terbaik. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut disampaikan kepada *vendor* sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

3. Vendor Performance Evaluation
   To help measuring the effectiveness and efficiency of its relations with vendors, the Company also carries out vendor performance evaluation following the completion of a work to know how well the vendors fulfill their contractual obligations and meet the agreed-upon performance expectations.

   In 2023, the Company has evaluated the performance of every vendor. Among them, four (4) vendors stood out. Following the completion of evaluation, vendors were provided with the result so that they can reflect on which areas they need to improve.

4. Survei Perilaku Etis
   Merupakan penilaian dari pemasok terhadap PLN Indonesia Power atas etika dan kepuasan dari aspek perencanaan pengadaan, proses pengadaan, implementasi kontrak dan pembayaran yang dilakukan setiap bulan oleh Perusahaan. Proses penilaian dilakukan secara independen tanpa intervensi dari PLN Indonesia Power yang dilakukan oleh LPT UI.

4. Ethical Behavior Survey
   An assessment performed by vendors on PLN Indonesia Power's ethics and satisfaction of procurement planning, procurement process, contract implementation, and monthly payment by the Company. The assessment is performed by LPT UI independently, without intervention from PLN Indonesia Power.

Pada tahun 2023 skor survei perilaku etis di PLN Indonesia Power mencapai 96%. Hasil survei ini menunjukan bahwa perilaku etis di Perusahaan sudah berada dalam kategori *High*.

In 2023, PLN Indonesia Power scored 96% for the survey. The result demonstrates that the Company's ethical behavior belongs to High category.

Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Kreditur
Policy on the Protection of Creditors' Rights

Kebijakan hubungan dengan kreditur secara umum diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan yang di dalamnya diatur mengenai berbagai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Policies regarding relations with creditors are generally regulated in the Corporate Code of Ethics which governs various permissible and impermissible actions, including but not limited to:



The Do's

- Pemilihan berdasarkan kreditur/investor dilakukan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- Menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara akuntabel untuk menjaga kepercayaan kreditur/investor;
- Kreditur dan investor mematuhi ketentuan yang berlaku;
- Komitmen untuk memenuhi setiap kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur/investor;
- Syarat perjanjian mengedepankan prinsip transparansi dan kewajaran (*fairness*) sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

- The selection of creditor/investor shall consider credibility and reliability, be accountable, and be in accordance with the prevailing procedures and mechanism;
- Financial and non-financial information shall be delivered in an accountable manner to maintain creditor/investor's trust;
- The creditor and investor shall comply with the applicable provisions;
- The commitment shall be made to perform all agreements entered into with the creditor/investor;
- The terms of agreement shall prioritize transparency and fairness principles to avoid damage to either party.

The Dont's

- Pembukuan ganda untuk kepentingan kreditur/investor;
- Pelanggaran kontrak/ perjanjian;
- Syarat perjanjian yang tidak transparan dan wajar.

- Double bookkeeping for the interest of the creditor/investor;
- Breach of contract/agreement;
- Non-transparent and unreasonable terms of agreement.

Sejak 12 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT PLN (Persero) yang digunakan untuk mendanai proyek PLTGU Tambak Lorok Blok III. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada saat seluruh kewajiban pokok maupun bunga telah dibayar penuh oleh Perusahaan.

Since November 12, 2018, the Company has signed a loan agreement with PT PLN (Persero) to fund the Tambak Lorok Blok III CCPP. The agreement is effective from the date of signing and will terminate upon full payment of both principal and interest obligations by the Company.

Dalam ketentuan *Indenture Global Bond* yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero), bahwa PLN Indonesia Power sebagai Anak Perusahaan harus mematuhi *Indenture Global Bond* PT PLN (Persero) dimana adanya pembatasan untuk melakukan penambahan utang baru "*limitation on additional indebtedness*", sehingga selama tahun 2023, PLN Indonesia Power tidak memiliki kreditur eksternal selain pinjaman kepada pemegang saham.

In the provisions of the Global Bond Indenture issued by PT PLN (Persero), it states that PLN Indonesia Power, as a subsidiary, must comply with PT PLN (Persero)'s Global Bond Indenture, which includes restrictions on additional indebtedness ("limitation on additional indebtedness"). Therefore, during the year 2023, PLN Indonesia Power does not have any external creditors apart from loans from shareholders.

Kebijakan untuk Mencegah *Insider Trading*
Insider Trading Prevention Policy

Kebijakan *insider trading* merupakan upaya dan/atau aturan yang jelas mengenai perdagangan apapun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.

Insider trading policy comprises clear provisions regarding any trading in corporate shares carried out by the Board of Directors, Board of Commissioners and any insiders to make sure that nobody can benefit directly or indirectly from the information that is not/not yet available in the market.

Saat ini, PLN Indonesia Power belum menyusun kebijakan terkait insider trading dikarenakan sampai dengan saat ini, Perusahaan belum berstatus sebagai perusahaan terbuka (emiten) yang sahamnya diperjualbelikan ke publik. Namun Perusahaan telah memiliki

PLN Indonesia Power has not yet developed insider trading policy, since its stocks are not currently available for trading. Nevertheless, the Company has arrangements regarding the dissemination of Company information as stated in its Code of Conduct. Every employee

pengaturan terkait penyebaran informasi Perusahaan yang tercantum dalam Pedoman Etika Perusahaan. Setiap pegawai diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi non-publik mengenai Perusahaan, serta yang berkaitan dengan mitra kerja maupun pihak lainnya. Pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang dilakukan.

is required to maintain the confidentiality of non-public information regarding the Company, as well as relating to work partners and other parties. Disclosure of confidential information to unauthorized parties is prohibited.

Sepanjang tahun 2023, PLN Indonesia Power tidak pernah menerima pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik oleh internal Perusahaan untuk kepentingan pihak tertentu (*insider trading*).

Throughout 2023, PLN Indonesia Power has never received complaints regarding alleged dissemination of non-public information by the Company's insiders for the benefit of certain parties.

Pernyataan Tidak Melakukan Praktik *Bad Corporate Governance*

Statement of Good Corporate Governance Practices

PLN Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mematuhi seluruh regulasi terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan maupun regulasi lainnya, termasuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power beserta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, tidak terlibat dalam praktik *bad corporate governance*, terkait dengan pencemaran lingkungan, pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, pelanggaran terhadap hak-hak pegawai serta ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku. Sampai dengan saat laporan tahunan ini dibuat, PLN Indonesia Power tidak menerima sanksi apa pun dari regulator, baik sanksi yang bersifat material maupun administratif.

PLN Indonesia Power is always committed to implementing good corporate governance by complying with all regulations governing the Company's business activities and other regulations, including properly fulfilling its obligation. In 2023, PLN Indonesia Power and its Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any bad corporate governance practices pertaining to environmental pollution, breach of law, noncompliance with tax obligation, violation of employees' rights, and noncompliance with applicable regulations in financial reporting. As of the preparation of this Annual Report, PLN Indonesia Power has never received any sanctions from the regulator, both material and administrative.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan SK-16/S-MBU/2012

Corporate Governance Implementation Assessment Based on Decree No. SK-16/S-MBU/2012

Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power kembali melakukan penilaian dan evaluasi penerapan GCG berdasarkan keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 6 Juni 2012. Metode penilaian dan evaluasi ini menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan (7,00);
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal (9,00);
3. Dewan Komisaris (35,00);
4. Direksi (35,00);
5. Pengungkapan informasi dan transparansi (9,00);
6. Aspek lainnya (5,00).

In 2023, PLN Indonesia Power assessed and evaluated GCG implementation based on the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises. The measuring instruments consisted of 6 (six) aspects with the specified aspects and corresponding weights as follows:

1. Commitment to sustainable Good Corporate Governance implementation (7.00);
2. Shareholders and GMS/Capital Owners (9.00);
3. Board of Commissioners (35.00);
4. Board of Directors (35.00);
5. Disclosure of information and transparency (9.00);
6. Other aspects (5.00).



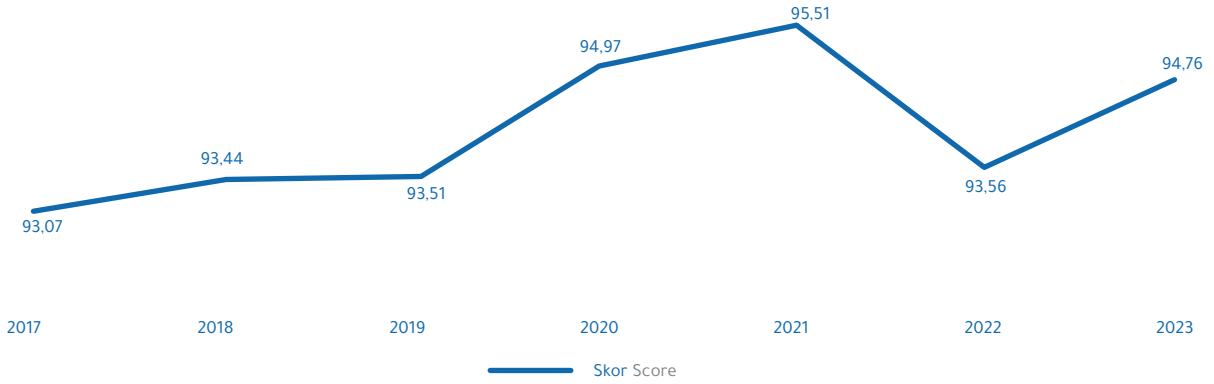
Hasil skor *assessment* GCG tahun buku 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu dari 93,56 (Sangat Baik) menjadi 94,76 (Sangat Baik), sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

The GCG assessment score for the fiscal year 2023 was better than in 2022, from 93.56 (Very Good) to 94.76 (Very Good), as detailed in the following table:

Aspek Governance Governance Aspect	Bobot Weight	Capaian Achievement		Penjelasan Description
		Skor Score	%	
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Corporate Governance Implementation	7,00	6,860	98,007	Sangat Baik Very Good
II. Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	7,735	85,940	Sangat Baik Very Good
III. Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	33,261	95,031	Sangat Baik Very Good
IV. Direksi Board of Directors	35,00	33,196	94,845	Sangat Baik Very Good
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9,00	8,714	96,882	Sangat Baik Very Good
VI. Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	5,000	100,000	Sangat Baik Very Good
Total	**5,00**	**94,766**	**94,766**	**Sangat Baik Very Good**

Berikut perbandingan penilaian GCG berdasarkan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 dalam 7 (tujuh) tahun terakhir PLN Indonesia Power:

The GCG assessment scores for PLN Indonesia Power according to the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 within the past seven (7) years is compared below:



Tahun Year	Skor *Assessment* GCG Score	Kualitas Quality	Pelaksana Penilai Assessor
2023	94.76	Sangat Baik Very Good	*Self Assessment* dengan didampingi Pihak Independen Self-assessed assisted by an Independent Party
2022	93.56	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) of DKI Jakarta
2021	95.51	Sangat Baik Very Good	*Self Assessment* oleh Tim Auditor Internal Self-assessed by the internal auditor team
2020	94,97	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) of DKI Jakarta
2019	93.51	Sangat Baik Very Good	*Self Assessment* oleh Tim Auditor Internal Self-assessed by the internal auditor team
2018	93.44	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) of DKI Jakarta
2017	93.07	Sangat Baik Very Good	*Self Assessment* oleh Tim Auditor Internal Self-assessed by the internal auditor team

Penilaian atas penerapan GCG Tahun Buku 2023 menghasilkan 60 (enam puluh) rekomendasi dengan area perbaikan/penyempurnaan *Area of Improvement* (AoI) yang terdiri dari:

The 2023 GCG assessment resulted in 60 (sixty) recommendations consisting the following areas of improvement:

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendations	
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to sustainable Good Corporate Governance implementation	1. Mengesahkan *draft* GCG *Code* hasil *review* yang telah mengacu kepada ketentuan Permen BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023; 2. Menambahkan muatan CoC dengan ketentuan terkait kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi; 3. Melakukan survei pemahaman GCG *Code* dan CoC kepada organ pendukung Dewan Komisaris.	1. Ratification of reviewed draft GCG Code by referring to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023; 2. Addition of CoC principles with the provision related to the equal opportunity to secure jobs and promotions; 3. Conducting a knowledge survey on GCG Code and CoC for the supporting organs for the Board of Commissioners.
II. Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	1. Mendokumentasikan daftar bakal calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon Direksi; 2. Mendokumentasikan *evidence* undangan tim undangan tertulis oleh tim UKK dan dokumen UKK calon Direksi; 3. Mendokumentasikan *evidence* penetapan hasil akhir UKK calon Direksi dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN; 4. Mendokumentasikan *evidence* UKK calon Direksi; 5. Mendokumentasikan *evidence* anggota Direksi telah tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim; 6. Mengatur secara khusus pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap anggota Direksi, paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan; 7. Mendokumentasikan eviden rencana pemberhentian anggota Direksi yang diinformasikan yang bersangkutan secara lisan atau tertulis; 8. Mencantumkan dalam keputusan RUPS pemberhentian anggota direksi terkait alasan pemberhentian; 9. Mendokumentasikan eviden Pemegang Saham/RUPS mencari usulan calon Anggota Dewan Komisaris; 10. Mendokumentasikan eviden Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris; 11. Mendokumentasikan eviden bahwa penilaian telah mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN; 12. Mendokumentasikan eviden Penetapan Dewan Komisaris telah terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian; 13. Menetapkan komposisi jumlah Dewan Komisaris maksimal sama dengan jumlah direksi serta jumlah Komisaris Independen paling sedikit 20%; 14. Mengatur dan menetapkan dalam Anggaran Dasar/Peraturan lainnya, jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang Anggota Dewan Komisaris; 15. Memberikan persetujuan pemegang saham maksimal 7 hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan lengkap diterima; 16. Mengesahkan target KPI individu Direksi, melakukan penilaian KPI individu direksi dan mengungkapkan dalam risalah RUPS penilaian Pemegang Saham terkait pencapaian KPI individu Direksi; 17. Mengesahkan target KPI Komisaris, melakukan penilaian KPI Komisaris dan mengungkapkan dalam risalah RUPS penilaian Pemegang Saham terkait pencapaian KPI Komisaris; 18. Pemegang Saham menindaklanjuti *Area of Improvement* yang dihasilkan dari *assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan;	1. Documenting the list of candidates approved by the State Minister of SOEs, containing names of candidates obtained from the Board of Directors member selection process; 2. Documenting the written summon from the skill competency test team and skill competency test papers of the Board of Directors candidates; 3. Documenting the final result of skill competency test of the Board of Directors candidates and team evaluation to be submitted to the State Minister of SOEs; 4. Documenting the skill competency test of the Board of Directors candidates; 5. Documenting the list of the Board of Directors candidate listed in the skill competency test result and evaluation presented by the team; 6. Specifically regulates the arrangement/mechanism of resignation from the concurrent position held by the members of the Board of Directors in no later than 30 days after the concurrent position occurs; 7. Documenting the plan of dismissing the members of the Board of Directors submitting their resignation in writing or verbally; 8. Listing the reason of dismissal of the members of the Board of Directors in the GMS decisions; 9. Documenting the search for members of the Board of Commissioners candidates by the Shareholders/GMS; 10. Documenting the assessment of the Board of Commissioners candidates by the Shareholders/GMS; 11. Documenting evidences that the assessment has covered all assessment criteria of the Board of Commissioners specified in the regulations on SOEs; 12. Documenting evidences about the Commissioners elected based on the final result; 13. Stipulating the numbers of Commissioners which at most equals to the numbers of Directors with Independent Commissioners of at least 20%; 14. Regulating and stipulating in the Articles of Association the maximum concurrent position may be held by a Commissioner; 15. Approving the shareholders of assets write-off no later than 7 days after the receipt of proposal and complete details; 16. Ratifying and assessing the individual KPI targets of the Directors and reporting the achievement of such targets in the GMS minutes; 17. Ratifying and assessing the KPI targets of the Commissioners and reporting the achievement of such targets in the GMS minutes; 18. Shareholders following up the area of improvements from the GCG implementation assessment;



Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendations	
III. Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Laporan hasil pelatihan yang dibuat agar ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang telah mengikuti pelatihan;	1. Preparing reports about training result to be signed by the Commissioners participating in the corresponding training;
	2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya (KPI Dewan Komisaris) yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;	2. Annual Work Plan and Budget of the Board of Commissioners shall contain the KPI and targets of the Board that reflect their measures of the supervisory and advisory functions to the Board of Directors;
	3. Mendokumentasikan keterlibatan perangkat Dewan Komisaris (komite) pada proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;	3. Documenting the involvement of the Board of Commissioners organs (committees) in preparing Annual Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
	4. Mencantumkan rencana per kegiatan dan anggaran Dewan Komisaris dalam RKAP;	4. Listing plans of activities and budgets of the Board of Commissioners in their Work Plan and Budget;
	5. Menyampaikan secara formal kepada Pemegang Saham terkait permohonan pengesahan RKAT Dewan Komisaris;	5. Formally presenting the proposal of the Work Plan and Budget to ratify to the Shareholders;
	6. Menuangkan kesimpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP dalam tanggapan Dewan Komisaris terhadap RKAP;	6. Declaring whether the draft Work Plan and Budget conforms with the Company Long-Term Plan by taking into account the response of the Board of Commissioners towards the Work Plan and Budget;
	7. Mendokumentasikan penyampaian pelaporan hasil pemantauan kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga kepada RUPS dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Semesteran;	7. Documenting the monitoring report of the Board of Directors compliance with the legal regulations and agreements with the third parties to be presented in the GMS through Half-Yearly Report of the Board of Commissioners Monitoring Duty.
	8. Memberikan otorisasi atau rekomendasi Dewan Komisaris paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris;	8. Providing authorization or recommendation to the Board of Commissioners no later than 14 days after the complete proposal or documents received by the Board of Commissioners;
	9. Menyampaikan kepada RUPS terkait usulan besaran honorarium/imbal jasa eksternal auditor dalam surat rekomendasi penunjukan KAP;	9. Proposing the honorarium/payment for the external auditor through the recommendation letter of public accountant office to the GMS;
	10. Memuat penilaian kinerja individu Direksi dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran;	10. Presenting the individual performance of the directors in the half-yearly report of the Board of Commissioners monitoring duty;
	11. Menindaklanjuti *area of improvement assessment/review* GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris;	11. Following up the area of improvement from the GCG assessment/review;
	12. Menyampaikan usulan pengesahan indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya (KPI Dewan Komisaris) kepada Pemegang Saham;	12. Proposing the ratification of KPI and targets of the Board of Commissioners to the Shareholders;
	13. Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris dan Komite serta dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris;	13. Outlining the evaluation of individual performance achievement of every Commissioner and Committee in the Board of Commissioners Meetings minutes;
	14. Memutakhirkan Piagam Komite IMR dan Piagam Komite Audit mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku;	14. Updating the Investment and Risk Management Committee Charter and Audit Committee Charter in accordance with the current regulation changes;
	15. Memutakhirkan muatan Piagam Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	15. Updating the Committee Charter according to the prevailing regulations;
	16. Program kerja Komite audit memuat *Self-assessment* kinerja Komite Audit;	16. The Audit Committee Work Program shall contain self-assessment of the Audit Committee performance;
	17. Program kerja Komite IMR dan KNR memuat *Self-assessment* Komite IMR dan KNR.	17. The Investment and Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee work programs shall contain the self-assessment of these committees.

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendations	
IV. Direksi Board of Directors	1. Direksi agar: a) Memisahkan Anggaran Pelatihan Dewan Komisaris & Direksi dan mendetailkan Rencana Program Pelatihan Direksi; b) Realisasi sesuai dengan Rencana; 2. Menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian terhadap prosedur atas hasil Audit SMT dalam rapat Tinjauan Manajemen; 3. Menyampaikan Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas penyempurnaan SOP secara berkala; 4. Menyampaikan surat rancangan RKAP ke Dewan Komisaris secara tepat waktu (sebelum 15 September 2023); 5. Menetapkan mekanisme untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada "*Board Manual* - Bab Direksi"; 6. Menyampaikan dokumentasi pembahasan dengan dewan komisaris terkait perubahan lingkungan bisnis pada RJPP 2024 - 2028; 7. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris/RUPS agar tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar; 8. Menindaklanjuti kelemahan pada jaringan internet sistem keamanan IT; 9. Menyampaikan laporan hasil audit SMT dan tindak lanjutnya; 10. Mengevaluasi/kajian terkait kajian perkembangan peraturan perundangan yang akan berlaku; 11. Menyelesaikan permasalahan kasus non litigasi; 12. Memastikan tidak terjadi *mismatch* dalam penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang; 13. Memastikan agar Perusahaan memberikan informasi yang akurat pada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu; 14. Memastikan agar tidak terdapat keterlambatan/penundaan pembayaran pinjaman kepada bank dan kreditur; 15. Menyiapkan dokumen masukan pegawai atas rancangan PKB tahun 2024-2025; 16. Menyiapkan Berita Acara Forum Bipartit tahun 2023; 17. Menyusun Rencana Rapat Direksi dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris termasuk agenda yang dibahas; 18. Membuat rencana Rapat Direksi yang ditetapkan dalam RKAT sehingga dapat dibandingkan dengan realisasinya; 19. Menghadiri Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris di atas 85%; 20. Direksi agar: a) Menyusun risalah rapat dengan mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi (ada maupun tidak); b) Direksi agar melakukan monitoring proses validasi setelah rapat Direksi tepat waktu.	1. The Board of Directors should: a) Separate the training budget for the Board of Commissioners and Board of Directors and detail the Training Work Plan for the Board of Directors; b) Perform as planned; 2. Follow up findings on the noncompliance with procedures against the integrated management system audit result in the Management Review meetings; 3. Present in the Management Review meetings that regularly discuss SOP improvements; 4. Submit the draft Work Plan and Budget to the Board of Commissioners in a timely manner (prior to September 15, 2023); 5. Establish mechanisms to at any moment promptly discuss current issues related to changes in business environment and matters that significantly related to the "Board Manual - Board of Directors"; 6. Present documents about discussion with the Board of Commissioners on changes in business environment related to the Company Long-Term Plan for 2024-2028; 7. Decision-making by the Board of Commissioners/GMS should be made in a timely manner according to the terms in the Articles of Association; 8. Respond to the defect in the Internet network of the IT security system; 9. Present the audit result report of the integrated management system and the follow-ups; 10. Evaluate/review the legal regulations about to take effect; 11. Ensure the settlement of non-litigation cases; 12. Ensure zero mismatch in the use and provision of funding from the operational income to pay for the interest and long-term principal outstanding; 13. Ensure the Company provide accurate and complete information to the creditor according to the agreement in a timely manner; 14. Ensure no delayed/late payment of loan to the bank and creditor; 15. Prepare documents on feedbacks from employees about 2024-2025 Collective Labor Agreement; 16. Prepare the Minutes of 2023 Bipartite Forum; 17. Plan for the Board of Directors meetings and joint meetings with the Board of Commissioners and the agenda; 18. Plan for the Board of Directors meetings stipulated in the Work Plan and Budget to be compared with the actual performance; 19. Attend the joint meetings with the Board of Commissioners with at least 85% of attendance; 20. The Board of Directors should: a) Prepare meeting minutes containing dissenting opinions and any decisions made in the Board of Directors meetings; b) Monitor the validation process in a timely manner after the Board of Directors meeting.
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	1. Mempublikasikan kebijakan dan informasi penting dalam *website* antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*), Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*/CoC) dan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi; 2. Mengungkapkan informasi yang dapat di *download* di aplikasi *website* seperti: Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*), Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*/CoC) dan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.	1. Publicize policies and important information in the website, among others the GCG Code, Code of Conduct, and Gratuity Control Policy; 2. Disclose download-able information in the website, namely: GCG Code, Code of Conduct, and Gratuity Control Policy.
VI. Aspek Lainnya Other Aspects	Tidak ada rekomendasi	No recommendation

Tindak Lanjut Rekomendasi *Assessment* GCG Perusahaan Tahun Buku 2022
Follow Ups on 2022 GCG Assessment Recommendation

PLN Indonesia Power telah menindaklanjuti hasil GCG *Assessment* tahun buku 2022 sesuai rekomendasi yang diberikan oleh pihak independen. Status tindak lanjut sesuai rekomendasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PLN Indonesia Power has followed up the 2022 GCG as recommended by the independent party. Below is details on the status of the follow ups as per December 31, 2023:

Aspek Aspect	Jumlah AoI Number of AoI	Penyelesaian AoI Completion of AoI	Persentase Percentage
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to sustainable Good Corporate Governance implementation	0	0	0
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	11	1	9%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	10	8	80%
Direksi Board of Directors	8	8	100%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	0	0	0
Total	**29**	**17**	**58,62%**

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
ASEAN Corporate Governance Scorecard

PLN Indonesia Power menyadari pentingnya kredibilitas dan reputasi agar perusahaan dikenal sebagai entitas terpercaya (*well-governed corporation*) baik di tingkat nasional, ASEAN, maupun internasional. Salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik adalah dengan mengadopsi praktik terbaik melalui standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Kriteria penilaian ACGS terdiri dari 2 Level dengan rincian sebagai berikut:

1. Level 1 terdiri dari:
   A. Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham
   C. Keberlanjutan dan Ketahanan
   D. Transparansi dan Pengungkapan
   E. Tanggung Jawab Dewan
2. Level 2 Terdiri dari:
   A. Bonus
   B. Pinalti

Penilaian penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN CG *Scorecard* dilakukan oleh pihak independen yaitu KIM Consultant. Hasil analisa dan pengukuran yang diperoleh menunjukan pencapaian yang sangat baik, yaitu 96,32 poin dengan predikat "*Very Good*". Berikut rincian hasil penilaian berdasarkan ASEAN CG *Scorecard*:

PLN Indonesia Power also realizes the importance of credibility and reputation to brand itself as a well-governed corporation in the national, regional (ASEAN), and international scale. To enhance the good corporate governance quality, the Company seeks various efforts, including by adopting the best implementation practices based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). The ACGS consists of two (2) levels, as detailed below:

1. Level 1 comprises:
   A. Rights of and Equal Treatment to Shareholders
   B. Sustainability and Resiliency
   C. Transparency and Disclosure
   D. Boards' Responsibilities
2. Level 2 comprises:
   A. Bonus
   B. Penalty

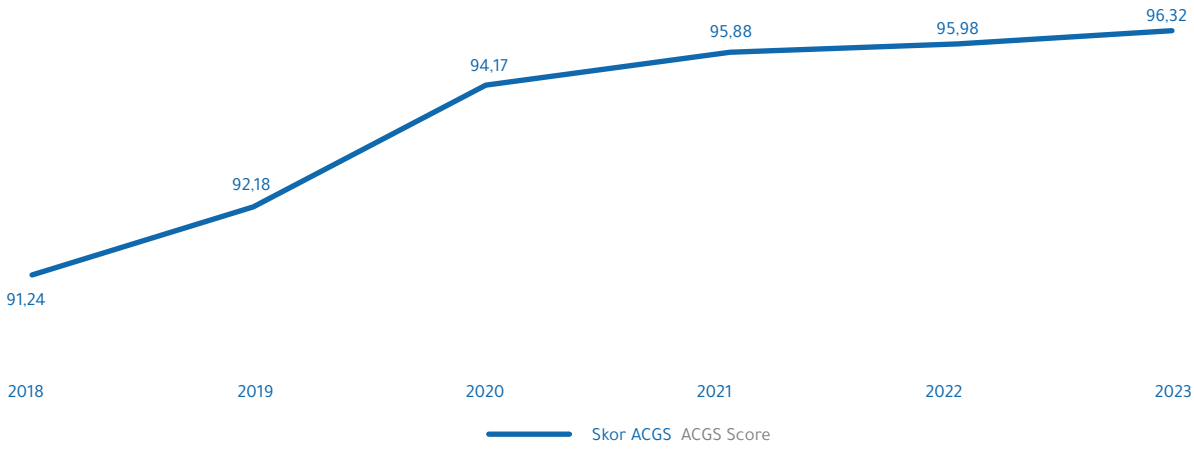
The assessment of corporate governance implementation based on the ASEAN CG Scorecard is performed by an independent party, KIM Consultant. It resulted in an impressive score of 96.32, with "Very Good" predicate. The result of the assessment based on ASEAN CG Scorecard is detailed below:



LEVEL 1 Part	Number of Questions (excluded N/A)	Number of comply	Score
A. *Rights and Equitable Treatment of Shareholders*	27	14	10,37
B. *Sustainability and Resilience*	22	22	15,00
C. *Disclosure and transparency*	31	25	20,16
D. *Responsibility of the Board*	61	50	32,79
SUB TOTAL	**141**	**111**	**78,32**
LEVEL 2 ***Part***			
Bonus	18	10	20,00
Penalty	26	1	(2,00)
SUB TOTAL	**44**		**18,00**
TOTAL LEVEL 1 + LEVEL 2	**185**		**96,32**

Pencapaian skor ACGS tahun 2023 meningkat dibandingkan pencapaian tahun 2022 yang sebesar 95,98. Hasil tersebut menunjukan bahwa Perusahaan sudah mampu memenuhi standar internasional melalui penerapan praktik-praktik ASEAN CG. Berikut hasil *assessment* GCG dengan menggunakan kriteria ACGS dalam 7 (tujuh) tahun terakhir:

The ACGS-based assessment score in 2023 was bigger than the score in 2022 at 95.98. This indicates that the Company has successfully met the international standards set by the ASEAN CG Scorecard. The following is details of GCG assessment with ACGS criteria for the past seven (7) years:



Rekomendasi Hasil Penilaian ACGS Perusahaan Tahun 2023

Recommendations from the Company's ACGS Assessment Results in 2023

Penilaian penerapan praktik-praktik ASEAN CG *Scorecard* tahun 2023 menghasilkan 16 (enam belas) rekomendasi diantaranya adalah:

1. Memasukkan dokumen lengkap pelaksanaan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dalam *Website*
2. Mengunggah Materi *Media Gathering* pada *Website*
3. Mengunggah Laporan Keuangan Triwulanan pada *Website*
4. Mempublikasikan Alamat *Investor Relation* pada *Website* dan/atau Laporan Tahunan
5. Jasa Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan tidak hanya *audit fee*, namun juga jasa *non audit fee*
6. Penerbitan Laporan Tahunan tidak lebih dari 120 hari
7. Mengunggah Anggaran Dasar pada *Website*
8. Jumlah Komisaris Independen disarankan lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris

The assessment of the ASEAN CG Scorecard practices implementation in 2023 resulted in 16 (sixteen) recommendations:

1. A comprehensive documentation of Annual and Extraordinary GMS implementation should be posted on the website
2. Media Gathering materials should be posted on the website
3. Quarterly Financial Statements should be posted on the website
4. The address of Investor Relations should be posted on the website and/or included in the Annual Report
5. The Audit Services disclosed in the Annual Report should include details on audit fees and non-audit fees
6. The Annual Report should be published no longer than 120 days
7. The Articles of Association should be posted on the website
8. The number of Independent Commissioners, if possible, should be over 50% of the total number of Board of Commissioners members



9. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mayoritas harus independen
10. Seluruh Ketua Komite Dewan Komisaris disarankan Komisaris Independen
11. Menyusun Jadwal dan Agenda Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris sebelum tahun buku dimulai dan dipublikasikan pada *Website*
12. Minimum kuorum Rapat Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris adalah 2/3 dari jumlah anggota
13. Materi rapat yang akan dibahas dalam Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris telah dikirimkan kepada peserta Rapat paling lambat 5 hari kerja sebelum Rapat dimulai
14. Dalam melakukan seleksi calon Direktur/Komisaris sebaiknya melalui Lembaga independen (*Headhunter*)
15. Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, dan Komisaris Independen berjumlah 2 orang atau lebih maka salah satu dari mereka disarankan ditunjuk sebagai *Leader/Senior* Komisaris Independen
16. Disarankan Komite Manajemen Risiko berdiri sendiri dan tidak digabung dengan Komite lainnya seperti Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

9. The majority of the Nomination and Remuneration Committee members should come from independent parties
10. All Heads of Board of Commissioners' Committees, if possible, should be Independent Commissioners
11. The Board of Directors and Board of Commissioners' meeting schedule and agenda should be prepared prior to the start of fiscal year, to be published on the website
12. The quorum of the Board of Directors and Board of Commissioners' meetings should be 2/3 of the total Board members
13. The meeting materials to be discussed in the Board of Directors and Board of Commissioners' meetings should be delivered to meeting participants no later than five (5) working days prior to the start of the meetings
14. The selection of Director/Commissioner candidates, if possible, should be performed by an independent agency (headhunter)
15. When the President Commissioner is not an Independent Commissioner, and there are two (2) Independent Commissioners in the company, one of them should be appointed as a Leader/Senior Independent Commissioner, if possible
16. The Risk Management Committee, if possible, should be established as a separate committee, instead of merged with other Committee(s), e.g. Into Investment and Risk Management Committee.

Evaluasi Tata Kelola Berdasarkan Standar Otoritas Jasa Keuangan

Evaluation of Governance According to Financial Services Authority Standards

Hingga 31 Desember 2023, PLN Indonesia Power belum berstatus terbuka, namun Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan GCG berstandar Perusahaan terbuka. Untuk itu pada tahun 2022, PLN Indonesia Power mulai melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang terdiri dari penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 rekomendasi.

As of December 31, 2023, PLN Indonesia Power has not been a public company. Nevertheless, the Company is committed to implementing GCG at public company standard. Therefore, starting 2022, PLN Indonesia Power performs self-assessment based on OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Guidelines for Governance in Public Companies and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Governance in Public Companies, which cover the implementation of five (5) aspects, eight (8) good corporate governance principles, and 25 recommendations.

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat 19 status "*Comply*" dan 6 (enam) status "*Explain*" dengan rincian sebagai berikut:

From the assessment, 19 recommendations received the status "Comply" while the remaining six (6) received the status "Explain" as follows:

Aspek Aspect	Keterangan Description	Rekomendasi Recommendations	Status	
			Terpenuhi Apply	Belum Terpenuhi Explain
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Relations between Public Company and Shareholders in Guaranteeing Shareholders' Rights	2	5	4	1
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Function and Roles of the Board of Commissioners	2	6	5	1
C. Fungsi dan Peran Direksi Function and Roles of the Board of Directors	2	6	3	3

Aspek Aspect	Keterangan Description	Rekomendasi Recommendations	Status	
			Terpenuhi Apply	Belum Terpenuhi Explain
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	1	6	5	1
E. Keterbukaan Informasi Transparency of Information	1	2	2	0
TOTAL	**8**	**25**	**19**	**6**

Status "*Explain*" dari hasil evaluasi penerapan tata kelola berdasarkan OJK tahun buku 2023 diantaranya terkait Pemungutan suara dalam RUPS melalui Mekanisme *Voting*, Kebijakan Pengunduran Diri Dewan Komisaris, *Self Assessment* Kinerja Direksi dan Ketentuan Pemberian Insentif Jangka Panjang bagi Direksi dan Karyawan.

The statuses "Explain" from the 2023 governance implementation evaluation based on OJK Regulation were given to recommendations on Voting Mechanism, Policy on Resignation of the Board of Commissioners, Self-Assessment of Board of Directors Performance, and Provision of Long-Term Incentives for the Directors and Employees.

Evaluasi Penerapan GCG Berdasarkan PUG-KI
Evaluation of GCG Implementation According to PUG-KI

Sebagai wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2021, PLN Indonesia Power kembali melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) tanggal 22 Desember 2021, yang terdiri dari 8 (delapan) prinsip Governansi Korporat serta 80 rekomendasi.

As a manifestation of the Company's compliance with the General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021, PLN Indonesia Power again carried out a self-assessment based on the General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia (PUG-KI) on December 22, 2021, which covered eight (8) Corporate Governance principles and 80 recommendations.

Dari aspek, prinsip dan rekomendasi yang dipetakan atas penerapan Pedoman PUG-KI pada PLN Indonesia Power Tahun Buku 2023, terdapat 55 status "*Apply*" dan 25 status "*Explain*" dengan rincian sebagai berikut:

Out of the aspects, principles, and recommendations mapped from the PUG-KI at PLN Indonesia Power in fiscal year 2023, 55 elements received the status "Apply" and 25 elements received the status "Explain" with the following details:

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status	
			Terpenuhi Apply	Belum Terpenuhi Explain
1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	7	31	25	6
2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	2	11	4	7
3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Work Relations between the Board of Directors and Board of Commissioners	3	5	5	0
4. Perilaku Etis dan Bertanggung jawab Ethical Behavior and Responsibilities	3	4	4	0
5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance	4	6	6	0
6. Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	3	8	5	3
7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection to Shareholders' Rights	3	11	2	9
8. Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Rewards for Stakeholders	3	4	4	0
TOTAL	**28**	**80**	**55**	**25**



Status "*Explain*" atas rekomendasi hasil Penilaian Penerapan GCG berdasarkan PUG-KI adalah sebagai berikut:

The statuses "Explain" for the recommendations from GCG Implementation Assessment according to PUG-KI were given to the following:

Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides		*Explain*
1	1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. 1.1.4 Board of Directors shall verify the integrity of corporate accounting and financial reporting as well as timely and accurate disclosure of all corporate material information.	1.1.4.3 Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. 1.1.4.3 Board of Directors shall submit a report that comments on the Quarterly Financial Statements, to be published together with the Quarterly Financial Statements, for assisting investors and analysts in reviewing the corporate financial performance and fundamentals.	Koreksi terhadap laporan keuangan langsung dilakukan perbaikan pada laporan tersebut sebelum disampaikan ke Pemegang Saham Correction to financial statements was directly performed on the statements before submitted to shareholders.
	1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. 1.1.7 For corporate running business under the sharia principle, Board of Directors shall ensure that the authority and the supporting instruments are sufficient, helping the Sharia Supervisory Board effectively performing its duties.		PLN Indonesia Power bukan menjalankan usaha dengan prinsip syariah PLN Indonesia Power does not operate under the sharia principle
	1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. 1.1.8 Board of Directors Charter shall be reviewed periodically. The Charter shall contain the division of duty for respective Directors; such a division can be accommodated in the Board of Directors Charter or Board of Directors Decree.		Pembagian tugas diatur dalam dalam Surat Keputusan Organisasi bukan dalam bentuk Piagam Direksi yang secara periodik ditinjau The division of duties is stipulated in the Organizational Decree, not through the periodically reviewed Board of Directors Charter
	1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. 1.2.1 Board of Commissioners shall perform formal annual evaluation in objective and independent manners to verify the effectiveness of the Board of Directors and each Director.	1.2.1.3 Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. 1.2.1.3 Remuneration scheme that offers stocks to Directors, Commissioners, and employees shall obtain shareholders' approval.	PLN Indonesia Power bukan perusahaan tbk sehingga tidak terdapat skema remunerasi berupa saham PLN Indonesia Power is not a public company, and therefore does not offer stocks in the remuneration scheme.
		1.2.1.4 Perpanjangan masa jabatan Direktur berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. 1.2.1.4 Directors' term of office shall be extended if their contributions are proven satisfactory by their performance evaluation.	Belum terdapat mekanisme evaluasi kinerja Direksi secara individu oleh Pemegang Saham There are no procedures for evaluating individual Director performance by Shareholders.
	1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.		Proses pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris masih menjadi ranah PT PLN (Persero) selaku pemegang saham The appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners remains the privilege of PT PLN (Persero) as the shareholder

Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides		*Explain*
	1.3.3 By considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, Board of Commissioners shall provide a proposal to, which should be determined by, the GMS regarding the appointment and/or dismissal of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In such a proposal, the Board of Commissioners shall take into account diversity, non-discriminatory elements, and allow equal opportunity regardless of ethnicity, religion, race, group, and gender. The Board of Commissioners shall make sure that the nomination and selection of the Directors and Commissioners are performed formally and transparently.		
	1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. 1.3.4 Board of Commissioners or the Committee running the nomination function shall prepare the policy on succession during the nomination the members of the Board of Directors. On an annual basis, the Board of Commissioners shall review the report of the development and succession plan implementation submitted by the President Director.		Proses pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris masih menjadi ranah PT PLN (Persero) selaku pemegang saham The appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners remains the privilege of PT PLN (Persero) as the shareholder
	1.3.12 Komisaris Independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. 1.3.12 Independent Commissioners are highly expected to contribute in an honest, objective, active, and constructive discussion during Board of Commissioners meetings.	1.3.12.3 Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas Komisaris Independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. 1.3.12.3 Corporate shall disclose the reasons for the end of an Independent Commissioner's tenure if it is concluded before the specified term of office.	Tidak ada pergantian Komisaris Independen selama tahun 2023 There was no change in the Independent Commissioner's composition in 2023.
	1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. 1.3.13 President Commissioner shall act as the coordinator of the Board of Commissioners and verify their effectiveness. The President Commissioner shall encourage a culture of transparency and constructive dialog which make it possible to share different views, including to properly coordinate the establishment of Board meeting agenda and ensure that sufficient time is allocated to discuss all agenda. There shall also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	1.3.13.3 Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris Utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama /anggota Direksi perlu menjadi Komisaris Utama, maka Dewan Komisaris memberikan arahan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. 1.3.13.3 Former President Director and Board of Directors members appointed as Board of Commissioners members shall not be directly established as the President Commissioner. There shall be a pause of two (2) years so that they can be re-appointed and established as the President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director/Board of Directors member is required to assume the President Commissioner position, the Board of Commissioners shall provide directives and explanation for such in the Annual Report.	Tidak ada Mantan Direktur Utama dan Anggota Direksi yang menjadi Dewan Komisaris There are no former President Director and Board of Directors members serving as Board of Commissioners members.



Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides		*Explain*
	1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu Komisaris. 1.5.1 Board of Commissioners shall perform formal annual evaluation in objective manner to verify the effectiveness of the Board, its committees, and each Commissioner.	1.5.1.3 Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya 1.5.1.3 Commissioners` term of office shall be extended if their contributions are proven satisfactory by their performance evaluation.	Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris menjadi ranah dari PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham The appointment and dismissal of the Board of Commissioners shall be the privilege of the shareholder, PT PLN (Persero).
2	2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. 2.1.1 In determining Director candidates, the Board of Commissioners via Nomination and Remuneration Committee shall not rely solely on the recommendations from the Board of Commissioners, Management, or majority shareholder. The Board of Commissioners via Nomination and Remuneration Committee may use independent sources to determine eligible candidates.	2.1.2.1 Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs *web* Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi : a. Identitas calon dan alasan pengangkatan; b. Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; c. Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; d. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; e. Lama masa jabatan; f. Kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan g. Setiap kepemilikan saham dalam korporasi 2.1.2.1 Information regarding Director candidates shall be disclosed during selection/re-selection process and made available from the date of GMS summons to the implementation of GMS, and can be downloaded on the public company's website and/or e-GMS, which covers: a. Identity of candidate and basis for appointment; b. Core competencies, qualifications, and professional background; c. Current position in other company(es), and significant role in non-profit/charity organizations; d. Factors affecting independence, including relations with controlling shareholder; e. Tenure; f. Attendance in Board of Directors meetings (not applicable for new Directors); and g. Each shareholding in the company.	Proses penentuan kandidat calon Direktur menjadi ranah dari PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas The determination of the candidates for director shall be the privilege of the majority shareholder, PT PLN (Persero).
	2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. 2.1.2 Board of Commissioners shall ensure that the criteria for selecting Board of Directors members must at least cover knowledge, capability, and skills necessary for accurately performing the Board of Directors` roles while taking into account Directors` diversity.	2.1.2.5 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut. 2.1.2.5 The Director that supervises accounting and financial sectors shall have accounting skill and/or knowledge, as proven by professional certifications issued by government-acknowledged professional accounting association(s) as well as registered in such professional association(s).	Direktur Keuangan tidak memiliki sertifikasi profesi akuntan yang berlaku saat ini The incumbent Director of Finance does not hold any valid professional accounting certifications

Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides		*Explain*
	2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. 2.1.4 Board of Commissioners shall verify that the policy and procedures for selecting and nominating Commissioners are clear and transparent, in order to establish satisfactory Board composition. The Board of Commissioners shall use independent sources to determine eligible candidates.	2.1.4.1 Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs *web* Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: a. Identitas calon dan alasan pengangkatan; b. Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; c. Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; d. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; e. Lama masa jabatan; f. Kehadiran dalam rapat Komisaris (kecuali untuk Komisaris baru); dan g. Setiap kepemilikan saham dalam korporasi 2.1.4.1 Information regarding Commissioner candidates shall be disclosed during selection/re-selection process and made available from the date of GMS summons to the implementation of GMS, and can be downloaded on the public company's website and/or e-GMS, which covers: a. Identity of candidate and basis for appointment; b. Core competencies, qualifications, and professional background; c. Current position in other company(es), and significant role in non-profit/charity organizations; d. Factors affecting independence, including relations with controlling shareholder; e. Tenure; f. Attendance in Board of Commissioners meetings (not applicable for new Commissioners); and g. Each shareholding in the company.	Proses Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Komisaris menjadi kewenangan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham mayoritas The nomination and appointment of the Board of Commissioners shall be the privilege of the majority shareholder, PT PLN (Persero).
	2.1.5. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. 2.1.5 Board of Commissioners or the Committee running the nomination function shall devise nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners skill matrix which has been approved by the Board of Commissioners, as well as ensuring that the candidate's profile meets the requirements set in the skill matrix and nomination criteria.		Proses pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris masih menjadi ranah PT PLN (Persero) selaku pemegang saham The appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners remains the privilege of PT PLN (Persero) as the shareholder
	2.1.8. Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 2.1.8. For effective facilitation for Board of Directors and Board of Commissioners functions as well as for increased trust on the part of the investors and stakeholders, the Nomination and Remuneration Committee shall make sure that the nomination and appointment of Directors and Commissioners are performed formally, meticulously, and transparently.	2.1.8.1 Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada : a. menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: i. Dalam penunjukan Komisaris Utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan. Termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya diluar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada dewan komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya.	Proses Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Komisaris menjadi kewenangan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham mayoritas The nomination and appointment of the Board of Commissioners shall be the privilege of the majority shareholder, PT PLN (Persero).



Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides	*Explain*
	ii. Dalam penunjukan anggota Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota Komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat Penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya diluar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut. 2.1.8.1 Responsibilities and roles of Nomination and Remuneration Committee shall include, but not limited to: a. preparing guidelines to make sure that all Commissioners allocate adequate time to corporate to perform their responsibilities effectively. The guidelines among others shall cover the following: i. In nominating the President Commissioner, the Nomination and Remuneration Committee shall prepare the job specification in detail. This shall include the expected time commitment which takes into account the requirement for time commitment during a crisis. Other significant, non-corporate commitments shall be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment and disclosed in the Annual Report. A change in commitment shall be immediately reported to the Board of Commissioners along with the explanation of its impact in the next Annual Report. ii. In nominating Board of Commissioners members, the Nomination and Remuneration Committee shall establish the terms and conditions for appointing such members. These terms and conditions are available for evaluation. The expected time commitment shall be written in the Letter of Appointment of the members of the Board of Commissioners, and the Commissioners shall allocate adequate time to meet the expected time commitment. Other significant, non-corporate commitments shall be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment, along with the expected time commitment. The Board of Commissioners shall be notified whenever changes are made to the commitments.	
2.2.1. Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. 2.2.1. The policy on Board of Directors' remuneration shall include a remuneration structure that leads to a sustainable corporate development and supports long-term objective achievement. The Board of Directors' remuneration shall be proposed, may be through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners, to be determined by the GMS. The amount of the remuneration proposed to the GMS shall be determined by taking into account the role of each Director, economic situation, and corporate performance.	2.2.1.2 Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). 2.2.1.2 Corporate shall establish a policy on remuneration for the Board of Directors based on performance. The policy shall also be aligned with the achievement of corporate long-term interest, which include the following performance indicators: stock option, deferred bonus, and clawback.	Tidak ada kebijakan remunerasi yang mengatur remunerasi Direksi dalam bentuk kepemilikan saham dan bonus yang ditangguhkan There is no remuneration policy that specifies the remuneration for the Board of Directors in the forms of stock option and deferred bonus.

Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides		*Explain*
	2.2.2. Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris harus mencakup struktur remunerasi yang mengarah pada pengembangan perusahaan yang berkesinambungan dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Besaran remunerasi yang diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS ditetapkan dengan memperhatikan peran masing-masing anggota Dewan Komisaris, situasi perekonomian dan kinerja perusahaan. Remunerasi tersebut juga mempertimbangkan jabatan sebagai Presiden Komisaris serta kepemimpinan dan keanggotaannya dalam komite-komite. 2.2.2. The policy on Board of Commissioners' remuneration shall include a remuneration structure that leads to a sustainable corporate development and supports long-term objective achievement. The amount of the remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS shall be determined by taking into account the role of each Commissioner, economic situation, and corporate performance. The remuneration shall also take into account the position as President Commissioner as well as leadership and membership in Committees.	2.2.2.1 Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi 2.2.2.1 Remuneration for the Board of Commissioners shall be in fixed amount. If Board of Commissioners members are provided with remuneration based on their performance, the basis for such a provision shall be related to corporate long-term development and different from the Board of Directors members.	Tidak terdapat ketentuan mengatur remunerasi kinerja Dewan Komisaris terkait kinerja There is no policy specifying performance-based remuneration for the Board of Commissioners.
		2.2.2.2 Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. 2.2.2.2 Independent Commissioners shall not receive stock option, performance-based stock, or bonus.	Korporasi tidak memberlakukan opsi pemberian saham dalam remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris) The Company does not offer stock options in the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.
6	6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. 6.2.2 Audit Committee shall verify the quality of financial statements audit performed by external auditor. This shall include providing recommendation for the appointment, re-appointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditor.	6.2.2.2 Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausa yang dapat mengganggu independensi atau kompetisi auditor dalam melaksanakan audit Laporan Keuangan. 6.2.2.2 Audit Committee shall ensure that any contracts with auditor does not contain clauses that may interfere with the auditor's independence or competency in performing audit on Financial Statements.	Proses pengadaan Auditor Eksternal dilaksanakan secara pengadaan bersama oleh Pemegang Saham) The procurement of external auditors is carried out as joint procurement by Shareholders.
		6.2.2.5 Komite Audit merevieu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. 6.2.2.5 Audit Committee shall review each non-audit service provided by external auditor and its affiliate(s) along with relevant costs, so as to make sure that such service does not interfere with auditor's independence.	Proses pengadaan Auditor Eksternal dilaksanakan secara pengadaan bersama oleh Pemegang Saham The procurement of external auditors is carried out as joint procurement by Shareholders.
	6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna 6.3.1 The information distribution channels shall be equally accessible, timely, and relatively affordable for providing relevant information for users.	6.3.1.1 Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. 6.3.1.1 Corporate shall meet with financial analysts on a periodical basis.	Bukan merupakan perusahaan terbuka. Not a public company.
	7.1.1 Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. 7.1.1 Corporate shall establish a communication policy that facilitates and encourages the engagement of the shareholders or investors.	7.1.1.4 Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. 7.1.1.4 Corporate shall disclose to the public any new, material facts made available for financial analysts and other similar parties.	Bukan merupakan Perusahan terbuka. Not a public company.
	7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	7.1.3.2 Taktik yang mencegah pengambil alihan (*anti-take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. 7.1.3.2 Anti-take-over devices shall not be used to protect the Management and the Board of Commissioners from accountability.	Bukan merupakan Perusahan terbuka. Not a public company.

Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides		*Explain*
	7.1.3 Corporate shall establish rules and procedures for acquisition, takeover, and extraordinary transactions such as merger and substantial corporate asset sale, so as to make sure that transactions are performed transparently and in a fair condition, while protecting the rights of all shareholders according to their class/ tranche.		
	7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan (a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, (b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. 7.2.1 Corporate shall establish the rules and procedures to verify that (a) all shareholders of the same series in one tranche/class shall receive equal treatment, (b) such rules and procedures shall be disclosed, along with any capital structure and arrangements that allow certain shareholders to exert influence or control that is non-proportional with their shareholding.	7.2.1.1 Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. 7.2.1.1 To ensure transparency of shareholders' rights in receiving the portion of profit, the corporation shall disclose the policy on measured dividends, e.g. dividend payout ratio target/dividend per share.	Penetapan Dividen menjadi ranah PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas The determination of dividends shall be the privilege of the majority shareholder, PT PLN (Persero).
		7.2.1.2 Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. 7.2.1.2 The investors shall obtain information on all rights attached to all series or tranches of stock before making a purchase. Every change in stock economical value or voting right shall obtain approval from the negatively-affected tranche/class.	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Not a public company.
		7.2.1.3 Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). 7.2.1.3 So that shareholders are aware of the beneficial owner of a corporation with significant shareholding, the corporation shall disclose such beneficial owner in its shareholding by providing details on the major and controlling shareholder as well as the beneficial owner in 5% (five percent) shareholding.	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Not a public company.
		7.2.1.4 Korporasi mengungkapkan : a) perjanjian antar pemegang saham, b) *Voting Cap*, c) *Multiple Voting Rights*, d) perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. 7.2.1.4 Corporate shall disclose: a) agreement among shareholders, b) voting cap, c) multiple voting rights, d) other engagements that make it possible for certain shareholders to have voting rights over their ownership in the corporation.	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Not a public company.
		7.2.1.5 Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan 7.2.1.5 Corporate shall establish the mechanism/ procedures that allow shareholders to receive effective compensation for the violation of their rights as stipulated by applicable laws and regulations, at reasonable costs and without any unnecessary delay.	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Not a public company.

Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides		*Explain*
	7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. 7.3.1 Corporate shall deliver the GMS summons containing GMS agenda and materials as complete and early as possible (no later than 28 days prior to holding the GMS) to allow sufficient time and materials for the shareholders for properly learning the meeting agenda. The GMS summons and all GMS information shall be delivered electronically, such as via corporate website.		Sesuai *Board Manual*, pemanggilan RUPS dilakukan 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS According to Board Manual, the GMS summons is delivered 15 days prior to holding the GMS
	7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. 7.3.2 Corporate shall establish and disclose the rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voicing their aspiration effectively during GMS.	7.3.2.5 Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: a. lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham b. pemungutan suara tertutup (*poll-voting*) dan bukan dengan mengacungkan tangan (*show of hands*) c. memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. 7.3.2.5 Corporate shall establish a technical procedure for voting that promotes independence and prioritizes shareholders, i.e.: a. GMS venue shall be accessible for the majority of shareholders b. poll-voting shall be carried out instead of show of hands c. no GMS procedures and requirements shall prevent the shareholders from contributing to decision making.	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Not a public company.
		7.3.2.6 Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. 7.3.2.6 Corporate shall arrange e-voting and take the measure to establish an infrastructure that allows e-voting or to leverage existing infrastructure in the voting ecosystem.	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Not a public company.
		7.3.2.7 Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (*bundling*) 7.3.2.7 Each voting in the GMS shall be addressed to one resolution, instead of bundling several resolutions into one voting.	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Not a public company.
		7.3.2.8 Korporasi menunjuk pihak independen (pengawasan/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS 7.3.2.8 Corporate shall appoint an independent party (supervisor/inspector) to count and/or validate the votes in the GMS, and disclose such in the minutes of GMS.	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Not a public company.
		7.3.2.9 Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham non pengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham non pengendali, yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali	Bukan merupakan Perusahaan terbuka Bukan merupakan Perusahaan terbuka



Prinsip Principle	Rekomendasi dan Panduan Recommendations and Guides		*Explain*
		7.3.2.9 When the resolutions approved by the controlling shareholder contradict the majority of votes cast by non-controlling shareholders, following the GMS, corporate shall disclose any action to understand and respond to the non-controlling shareholders' concerns, what makes their votes contradict the controlling shareholder.	
	7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 7.3.3 Shareholders shall actively participate in the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	7.3.3.1 Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada Pemegang Saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. 7.3.3.1 Board of Commissioners via Nomination and Remuneration Committee shall perform in-depth assessment to Director and Commissioner candidates and present all relevant and material information on such candidates to the Shareholders during Board member selection. The information to be disclosed shall cover the position of the candidates in other corporations and whether they are considered independent from a corporate perspective.	Penunjukan Anggota Direksi masih menjadi ranah PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas The appointment of the Board of Directors members shall remain the privilege of the majority shareholder, PT PLN (Persero).
		7.3.3.2 Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. 7.3.3.2 Directors and Commissioners are nominated for selection at least every three years, or every five years for a corporation that implements five-year tenure. It is better to carry out the nomination once a year.	Penunjukan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris masih menjadi ranah PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas The appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners members shall remain the privilege of the majority shareholder, PT PLN (Persero).
		7.3.3.3 Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. 7.3.3.3 Shareholders shall require separate votes for each Director and Commissioner candidate.	Penunjukan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris masih menjadi ranah PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas The appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners members shall remain the privilege of the majority shareholder, PT PLN (Persero).
	7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. 7.3.4 Corporate shall ensure the transparency and accountability of external auditors in the GMS.	7.3.4.2 Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan 7.3.4.2 Corporate shall ensure that an external auditor is present in the GMS and answers every query from the shareholders regarding the audit on the financial statements.	Auditor Eksternal tidak dihadirkan dalam RUPS External auditor was not present in the GMS.
	7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya 7.3.5 The comprehensive result of the votes and GMS minutes shall be announced to the public at the next working day.	7.3.5.2 Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab 7.3.5.2 GMS minutes shall record any queries from the shareholders along with the responses provided by the meeting chair or the responding party.	Risalah RUPS hanya memuat Arahan Pemegang Saham, belum menampilkan Dinamika RUPS GMS minutes only records Shareholders' Directives and leaves out GMS dynamics.
		7.3.5.3 Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. 7.3.5.3 The GMS implementation, along with all meeting materials, reports, and relevant documents containing annual reports and voting results, including the relevant meeting agenda, shall be uploaded on the corporate's official communication media digitally and made available for a minimum of 10 (ten) years.	Bukan merupakan Perusahaan Terbuka, Penyampaian Materi dan Dokumen terkait disampaikan langsung ke Pemegang Saham melalui surat dan email Not a public company; relevant materials and documents are delivered directly to shareholders via e-mail and postal mail.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environment Responsibility




INDONESIA POWER
MRICA PGU

Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategies

Tata kelola keberlanjutan yang didukung dengan kinerja lingkungan dan investasi sosial merupakan elemen utama dalam membangun pondasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mencipatakan manfaat bersama di masa depan. PLN Indonesia Power berupaya mewujudkan hal tersebut dengan komitmen terhadap implemetasi Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

Sustainability governance supported by environmental performance and social investment serves as a primary element in building foundations to support sustainable development and provide mutual benefits ahead. PLN Indonesia Power embodies such a purpose by committing to implementing Corporate social and environmental responsibility.



Meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan isu perubahan iklim yang dapat berdampak pada kehidupan manusia mendorong masyarakat untuk beralih kepada energi bersih dan ramah lingkungan. Transisi energi menjadi salah satu upaya strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Industri ketenagalistrikan memiliki peranan penting dalam mendukung upaya transisi energi tersebut mengingat energi listrik cukup mendominasi dalam menopang setiap aspek kehidupan masyarakat.

The increasing awareness of environmental sustainability and climate changes that may impact mankind encourages people to convert to clean and green energy. Energy transition becomes one strategic campaign in facing climate change. Electricity industry plays a significant role in such a transition considering its domination in every aspect of life.

Peresmian *Legal End State Holding Subholding* PT PLN (Persero) dan perubahan identitas PT Indonesia Power menjadi PT PLN Indonesia Power pada awal tahun 2023 mempertegas posisi Perusahaan dalam industri ketenagalistrikan Indonesia. Sehingga, PLN Indonesia Power dapat memainkan peran dalam mendukung percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. PLN Indonesia Power telah menyusun program keberlanjutan yang menjadi bagian dari *Strategic Initiatives* (SI) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020 - 2024.

The inauguration of PT PLN (Persero) Legal End State Holding-Subholding and the change from PT Indonesia Power into PT PLN Indonesia Power in the early 2023 affirms the Company's position in Indonesia's electricity industry landscape. Thus, PLN Indonesia Power may contribute to accelerating the transition to clean and sustainable energy. PLN Indonesia Power had prepared the sustainability program as a part of Strategic Initiatives within the Company Long Term Plan 2020-2024.

Landasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Foundation for Social and Environmental Responsibility Implementation

Pelaksanaan tanggung jawab sosial PLN Indonesia Power berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, PLN Indonesia Power menetapkan pedoman internal berlandaskan ISO 26000 melalui Keputusan Direksi Nomor 25.K/010/IP/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Keputusan Direksi Nomor 26.K/010/IP/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan InPower *Care* di Lingkungan PT Indonesia Power, Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman *Green Power Plant*, Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 tentang Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian Lingkungan dalam Menjaga Keberlanjutan *Planet*, Keputusan Direksi Nomor 180.K/010/IP/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Komitmen *Community Development* melalui Program Inspirasi Perempuan dan Keputusan Direksi Nomor 56.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Program Ungulan *Community Development* sebagai wujud kesungguhan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.

The Company's social and environmental responsibility is implemented based on article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility. Furthermore, PLN Indonesia Power has set out its internal guidelines based on ISO 26000 under the Board of Directors Decree No. 25.K/010/IP/2014 dated February 11, 2014 on Corporate Social and Environmental Responsibility, Board of Directors Decree No. 26.K/010/IP/2014 dated February 11, 2014 on the Guidelines for Implementation of InPower Care in PT Indonesia Power, Board of Directors Decree No. 249.K/010/IP/2015 on Guidelines for Green Power Plant, Board of Directors Decree No. 211.K/010/IP/2016 on the Commitment to Preserving Ecosystem and Environment to Maintain the Planet's Sustainability, Board of Directors Decree No. 180.K/010/IP/2018 dated November 22, 2018 on the Community Development Commitment through Women's Inspiration Program and Board of Directors Decree No. 56.K/010/IP/2019 on the Management of Community Development's Excellent Programs as the implementation of CSR.



Perumusan Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Formulation of Social and Environmental Responsibility Scope

Aspek keberlanjutan menjadi komponen utama dalam menyusun kebijakan dan program strategis Perusahaan. Indonesia Power melakukan pemetaan isu strategis dalam penyusunan rencana jangka panjang serta melakukan evaluasi secara berkala atas rencana strategis tersebut. Program strategis Perusahaan juga mencakup implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Indonesia Power. Perumusan lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Indonesia Power harus dapat mendukung upaya peningkatan kinerja dari segi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu pekerja, pelanggan, *vendor*, masyarakat sekitar dan Negara. Pendekatan dalam merumuskan lingkup tanggung jawab sosial PLN Indonesia Power didasarkan pada prinsip keseimbangan kehidupan sosial (*people*); kelestarian lingkungan (*planet*); kemakmuran atau kemandirian ekonomi (*prosperity*); kedamaian atau kerukunan (*peace*) dan kemitraan (*partnership*).

Sustainability is the primary component for the Company in formulating policies and strategic programs. In preparing long-term plans, PLN Indonesia Power maps the strategic issues and conducts periodic evaluation over such plans. The strategic programs also include the implementation of the social and environmental responsibility. In formulating the scope of CSR, PLN Indonesia Power must take into account the capability to improve the quality or performance of environment and socio-economic life. By so, the Company may present greater benefit for a more extensive shareholders and stakeholders, i.e. employees, customers, vendors, local community, and the Country. In articulating the scope of CSR, PLN Indonesia Power relies on several principles, namely people, planet, prosperity, peace, and partnership.

Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Principles of Social and Environmental Responsibility

People

Komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan pada masyarakat sekitar pembangkit atau unit Kerja melalui program IPPintar, dan SehatIP.

A commitment to local community around the power plants and or work units through various programs, namely IPPintar and SehatIP.

Planet

Komitmen menjaga ekosistem lingkungan melalui program pemenuhan ketaatan aturan lingkungan (PROPER), dan Hijaunesia Power.

A commitment to preserving environmental ecosystem through the compliance with the environmental regulations (PROPER), and Hijaunesia Power.

Prosperity

Komitmen untuk menciptakan kemakmuran atau kemandirian ekonomi masyarakat sekitar pembangkit atau unit kerja melalui kegiatan *community empowerment* dengan program IPreneur dan Inspirasi Perempuan.

A commitment to creating prosperity or economic well-being of the local community surrounding the power plants or work units through community empowerment programs, namely IPreneur and Women's Inspiration.

Peace

Komitmen untuk menciptakan kedamaian atau kerukunan dengan masyarakat sekitar pembangkit atau unit kerja melalui kegiatan *community relation* (komunikasi sosial, forum warga, partisipasi hari besar keagamaan dan nasional, dan partisipasi kegiatan masyarakat).

A commitment to keeping the peace or harmony among the local community neighboring the power plants or work units through community relation activities (social communication, community forum, participation in religious festive days and national days and contribution to the community activities).

Partnership

Komitmen untuk menjalankan program CSR yang berbasis kemitraan antara perusahaan, pemerintah, swasta dan masyarakat.

A commitment to executing partnership-based CSR programs between the Company, government, private sectors and community.

Dukungan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Support to Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang disingkat TPB (SDGs) merupakan genda pembangunan global yang gagas oleh Perserikantan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk perdamaian dan kesejahteraan manusia serta melindungi planet bumi, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Pemerintah Indonesia turut berpartisipasi pada agenda tersebut dan mendorong dunia bisnis untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagai entitas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan fungsi "agen pembangunan", PLN Indonesia Power berkomitmen untuk turut serta mendukung upaya tersebut. PLN Indonesia Power bermitra dengan Pemerintah setempat untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan serta mendorong pegawai, pemasok dan mitra strategis lain untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi pada SDGs sesuai dengan kemampuan dan relevansinya masing-masing. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi salah satu gagasan utama dalam perumusan lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan.

Sustainable Development Goals (SDGs) are the global development agenda initiated by the United Nations for peace and welfare of mankind as well as protection for the planet. They consist of 17 goals to achieve by 2030. The Indonesian government also participates in this agenda and encourages businesses to support these goals. As a State-Owned Entity that serves as the agent of development, PLN Indonesia Power is committed to taking part in this campaign. Not only establishing partnership with local governments to contribute to SDGs, PLN Indonesia Power encourages its employees, suppliers and other strategic partners to run business responsibly and contribute to SDGs according to their respective skills and relevances. SDGs are one of the fundamental beliefs in formulating the scope of social and environmental responsibility as a part of corporate sustainability strategies.



Visi Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Vision and Missions of Social and Environmental Responsibility

Visi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Vision of Social and Environmental Responsibility

"Bersahabat dengan lingkungan dan menjadikan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan yang baik".

"To be environmentally-friendly and view corporate social responsibility as a part of good corporate governance."

Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Missions of Social and Environmental Responsibility

1. Meningkatakan reputasi Perusahaan di kalangan pemangku kepentingan.
2. Membangun sinergi Perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk keberlanjutan Operasional Perusahaan.
3. Berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui potensi yang dimiliki sesuai kemampuan Perusahaan.
5. Berkontribusi dalam pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.

1. To improve the Company reputation before the stakeholders.
2. To create synergy between the Company and the stakeholders, thus maintaining operational sustainability.
3. To contribute to improving the quality of education.
4. To improve the life quality of community through their existing potential in accordance with the Company's ability.
5. To contribute to the achievement of sustainable development goals.

Perumusan Strategi dan Program Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Formulation of Corporate Social and Environmental Responsibility Strategy and Work Program

PLN Indonesia Power merumuskan strategi dan program kerja agar upaya pencapaian visi tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan lebih jelas dan terukur, sehingga pencapaian visi keberlanjutan Perusahaan lebih efektif sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Langkah yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk merumuskan program keberlanjutan PLN Indonesia Power adalah dengan melakukan uji tuntas (*due diligence*) tanggung jawab sosial dan lingkungan atas dampak risiko yang timbul dari aktivitas Perusahaan serta mempersiapkan mekanisme penanganan keluhan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan berjalan efektif. Metode dan lingkup uji tuntas terhadap dampak dari aktivitas operasional Perusahaan antara lain:

1. Menetapkan dan meninjau secara berkala kebijakan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dampak dari kegiatan operasional yang dijalankan Perusahaan.
2. Melakukan kajian Pemetaan Sosial dan Pemangku Kepentingan (*Social and Stakeholder Mapping*) untuk mengidentifikasi siapa saja *stakeholder* yang terdampak ataupun memberi dampak bagi operasi Perusahaan dari segi sosial, ekonomi dan Lingkungan; mengetahui hubungan/derajat hubungan antar *stakeholder*; mengetahui potensi serta masalah yang ada sehingga program yang akan dilaksanakan tepat sasaran sesuai ekspektasi para *stakeholder* dan menyusun rencana program CSR.

PLN Indonesia Power formulates the social and environmental responsibility strategy and work program for a more detailed and measurable outcome to achieve the sustainability vision more effectively according to the long-term plans. The most underlying measures for this formulation comprise due diligence on the impact of risks arising from the Company operation and preparation of handling complaint mechanism with the following methods and scopes:

1. Establishing and regularly reviewing CSR policy in relation to such impact.
2. Reviewing the Social and Stakeholder Mapping to identify stakeholders affected by and affecting Company operations from social, economy and environmental aspects, recognizing the correlation/relationship degree between stakeholders, acknowledging existing potentials and issues so that the programs to be implemented are executed accurately according to stakeholder expectation, and planning CSR programs.

3. Mengintegrasikan pengelolaan dampak tersebut ke dalam budaya Perusahaan dan sistem manajemen dengan melibatkan dan membangun kesadaran kepada masing-masing individu pada setiap level jabatan yang ada di Perusahaan mulai dari Direksi sebagai manajemen puncak serta Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi pengawasan akan pentingnya pengelolaan dampak risiko dari aktivitas Perusahaan.
4. Menetapkan indikator kinerja, melaporkan kinerja pelaksanaan, serta mengevaluasi indikator dan capaian kinerja tanggung jawab sosial Perusahaan.

3. Integrating impact management with Corporate Culture and management system by taking into account and building awareness of all personnel in every position level within the Company; from the Board of Directors at the top of the Management to the Board of Commissioners as the supervisor of the Company's risk management.
4. Setting out performance indicators, reporting implementation performance, and evaluating CSR indicators and performance achievement.

Tahapan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Stages of the Company's Social and Environmental Responsibility Implementation

Strategi dan program kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan diimplementasi melalui beberapa tahapan mulai dari perumusan, penetapan dan peninjauan kembali kebijakan; *baseline study*; serta penyusunan rencana, implementasi, monitoring, evaluasi Program sebagai berikut :

The implementation consists of several stages, namely formulation, policy establishment and review, baseline study, planning, implementation, monitoring, and evaluation as outlined below.

Tahapan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Stages of the Social and Environmental Responsibility Implementation



Strategi dan Program Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Corporate Social and Environmental Responsibility Strategy and Work Program

Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), visi dan misi, pemetaan sosial serta survei persepsi menjadi dasar PLN Indonesia Power dalam menyusun strategi dan program kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan. PLN Indonesia Power juga melibatkan *Stakeholders* merumuskan strategi keberlanjutan Perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Strategi tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan merupakan upaya menciptakan manfaat bersama bagi Perusahaan, Stakeholders dan pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat meningkatkan *Stakeholders Engagement* dan nilai tambah bagi *Stakeholders* dan *Shareholder*. Strategi dan program kerja yang akan dilaksanakan disusun dalam bentuk *Sustainability Commitment* yang mengakomodir tiga *Strategic Results* dalam upaya mencapai visi dan misi PLN Indonesia Power.

The principles of Social and Environmental Responsibility, SDGs, vision and missions, social mapping, and perception survey are the bases for the Company to formulate strategies and work programs on social and environmental responsibility. For this matter, stakeholders are also involved. This strategy is proposed to obtain mutual benefit for the Company, Stakeholders, and sustainable development, thus improving Stakeholder Engagement and the added value for Stakeholders and Shareholders. The output of this action is sustainability commitment that accommodates three strategic results to later realize the vision and missions of the Company.



Sustainability Commitment

Visi Vision

Menjadi Perusahaan Energi Terbaik yang Tumbuh Berkelanjutan

To be the Best Energy Company with Sustainable Growth

Misi Mission

Menyediakan Solusi Energi yang Andal, Inovatif, Ramah Lingkungan dan Melampaui Harapan Pelanggan

Providing Energy Solutions that are Reliable, Innovative, Environmentally-Friendly, and Exceeding Customer Expectation

STRATEGIC RESULTS

- 20 *Senior Leaders meet* BUMN *Qualification*
  10 *Experts in International Level*
- *Safe-Clean-Green-Reliable & Efficient Power Generation*
- *Triple Size in Total Installed & Operated Capacity*
  30% *of New & Renewable Installed Capacity*
  3X *Non Electricity Revenues within* 10 *years* (since 2018)

STRATEGIC THEMES

- ***Operation & Maintenance Excellence* (OME)**
- ***Low-carbon Energy Development* (LCE)**
- ***Beyond KWH Business Development* (BBD)**

Indonesia Power Care — Community Assistance Relation Empowerment

Community Assistance

1. Bantuan Sarana dan Prasarana
2. Bantuan Pelayanan Kesehatan
3. Bantuan Pelayanan Pendidikan
4. Bantuan Bencana Alam
1. Facilities and Infrastructure Assistance
2. Health Service Assistance
3. Education Service Assistance
4. Natural Disaster Relief

Community Relation

1. Komunikasi Sosial
2. Partisipasi Peringatan Hari Besar
3. Partisipasi Kegiatan Masyarakat
1. Social Communication
2. Participation in National Holiday Commemoration
3. Participation in Community Activities

Community Empowerment

1. Bantuan Pengembangan modal usaha
2. Bantuan Peningkatan Keterampilan
3. Bantuan Pemasaran Produk
4. Riset dan Pengembangan
1. Business Capital Development Assistance
2. Skill Development Assistance
3. Product Marketing Assistance
4. Research and Development

IP PINTAR — Program Internship Asesmen dan Sertifikasi

Sehati

iPreneur

Kawan Hijaunesia Power

inspiraSI Perempuan

1 No Poverty · 2 Zero Hunger · 3 Good Health and Well Being · 4 Quality Education · 5 Gender Equality · 6 Clean Water and Sanitation · 7 Affordable and Clean Energy · 8 Decent Work and Economic Growth · 9 Industry, Innovat and Infrastructure · 10 Reduced Inequalities · 13 Climate Action · 14 Life Below Water · 15 Life on Land · 17 Partnerships for the Goals

Tata Nilai: AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), GCG, ISO 26000, dan Kebijakan Perundangan

Values: AKHLAK (*Amanah* (Trustworthy), *Kompeten* (Competent), *Harmonis* (Harmonious), Loyal, *Adaptif* (Adaptable), *Kolaboratif* (Collaborative)). GCG, ISO 26000, and Laws and Policies

Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

Tata kelola keberlanjutan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan bisnis jangka panjang di tengah kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial. Tata kelola keberlanjutan merujuk pada praktik dan kebijakan yang Perusahaan terapkan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan dapat berkelanjutan khususnya dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal tersebut mencakup upaya untuk mengelola dampak lingkungan dari operasi Perusahaan, memastikan keadilan sosial dalam rantai pasokan dan kegiatan bisnis, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Sustainability governance is an integral part of the long-term business plan amidst the awareness of environmental and social issues. It refers to the practices and policies applied by the Company to ensure the environmental, social, and economy sustainability of its operation. This is carried out by, among others, managing the environmental impact from operations, ensuring social justice in supply chain and business activities, and maintaining sustainable long-term economic growth.

PLN Indonesia Power mengevaluasi risiko yang terkait dengan keberlanjutan, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan pasokan bahan baku, atau perubahan regulasi, serta mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan dan standar operasional internal juga disusun mendorong praktik-praktik yang berkelanjutan. PLN Indonesia Power melibatkan berbagai pihak, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat lokal dalam tahapan proses pengambilan keputusan dan pengembangan inisiatif keberlanjutan. Pelatihan kepada karyawan juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu keberlanjutan dan bagaimana berkontribusi pada upaya keberlanjutan Perusahaan.

PLN Indonesia Power also evaluates the risks related to sustainability, such as climate change, instability of raw materials supplies, or changes of regulations, and identifying opportunities for innovation and sustainable growth. The Company also prepares internal policies and operational standards to promote sustainable practices. Numerous parties are involved, i.e. Employees, customers, business partners, and local communities in making decisions and undertaking sustainability initiatives. Trainings are also provided for employees to broaden the understanding about sustainability issues and contributions they may give to those initiatives.

Monitoring, evaluasi dan transparansi juga menjadi aspek penting dalam tata kelola keberlanjutan. Sebagai upaya untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan keberlanjutan, PLN Indonesia Power berupaya mengimplementasikan sistem pemantauan yang efektif dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik yang ada. PLN Indonesia Power berupaya secara terbuka melaporkan kinerja khususnya terkait keberlanjutan melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan secara berkala setiap tahun, baik kepada pemegang saham, pemerintah, pelanggan, mitra bisnis maupun masyarakat secara umum.

Other significant aspects in sustainability governance include monitoring, evaluation, and transparency. To measure how the sustainability goals progress, PLN Indonesia Power implements an effective monitoring system and evaluation of the current policies and practices. The Company also prepares a performance report openly, specifically related to the sustainability through Sustainability Report. This report is published annually for the stakeholders, government, customers, business partners, and public.

Penanggung Jawab Penerapan Program Keberlanjutan
Party in Charge of Sustainability Program Implementation

Sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang, program keberlanjutan memerlukan komitmen dari seluruh pihak khususnya di internal Perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penanggung jawab program yang berperan sebagai pemimpin dalam mempromosikan budaya keberlanjutan di seluruh organisasi, serta dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelanggan, investor, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Sehingga Direksi yang dipimpin Direktur Utama bertanggung jawab secara kolegial pada pencapaian kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial.

As a part of long-term business strategy, the sustainability program requires commitments from all parties, particularly within the Company. Therefore, a party in charge of the program is vital in taking part as a leader that promotes sustainability culture in the Company and to the stakeholders, such as customers, investors, business partners, and public. The Board of Directors is fully authorized and responsible for managing the Company for the interest and in accordance with the intention and purpose of the Company. Therefore, the Board of the Directors, chaired by the President Director, assumes the responsibility collegially for the achievement of the performance in economic, environmental, and social aspects.

Direksi dapat melakukan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada beberapa Eksekutif Senior terkait dengan aspek keberlanjutan dalam kegiatan operasional Perusahaan di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial. Kemudian, Eksekutif senior yang dimaksud dapat melakukan pendelegasian kembali kepada sub-ordinasi

In this case, the Board of Directors may delegate the authority in decision-making to selected Senior Executives, who may re-delegate the assignment to their subordinates. Therefore, the corresponding units report directly to their supervisors, including the Board of Directors. PLN Indonesia Power appointed several Divisions/Departments to



di bawahnya, sehingga unit-unit dimaksud bertanggung jawab secara langsung kepada atasannya termasuk pada Direksi. Adapun Divisi/ Departemen khusus yang dimiliki PLN Indonesia Power untuk menangani isu-isu terkait topik ekonomi, lingkungan dan sosial diantaranya yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi, Division of Health, Safety and Environment, Bidang Komunikasi yang berada di bawah Corporate Secretary, dan Bidang *Power Generation Technology and Renewable Energy Research*.

manage the economic, environmental, and social issues, namely the Directorate of Human Capital and Administration, Division of Health, Safety and Environment, Communication Division under the Corporate Secretary, and Power Generation Technology and Renewable Energy Research Division.

Program tanggung jawab sosial Perusahaan yang juga menyentuh isu-isu terkait aspek ekonomi dan lingkungan dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan Unit Pembangkitan. Di Kantor Pusat, program tanggung jawab sosial Perusahaan dikelola oleh Bidang Corporate Communication and CSR yang berada di bawah Corporate Secretary, sedangkan di Unit Pembangkitan dikelola oleh Bidang Administrasi, Keuangan dan Umum serta Bidang SDM dan Humas. Selain itu, terdapat Komite CSR yang bertindak sebagai koordinator setiap subyek inti dalam ISO 26000 yang meliputi tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, Lingkungan, praktek operasi yang adil, isu-isu konsumen serta pelibatan dan pengembangan komunitas. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan PLN Indonesia Power melibatkan setiap level organisasi di lingkungan Perusahaan dan dilakukan secara terintegrasi.

CSR programs on economic and environmental matters are also carried out by the Head Office (represented by the Corporate Communication and CSR team under the Corporate Secretary) and Power Generation Units (represented by Administration, Finance, and General Affairs Division and Human Capital & Public Relations Division). Furthermore, the Company has established CSR Committee as the coordinator of each core subject in ISO 26000 that includes organization governance, human rights, employment, environment, fair operations, consumer issues and community engagement and development. The CSR is carried out in an integrated manner by involving each and every level of organization within the Company.

Pengembangan Kompetensi Terkait Aspek Kelanjutan
Competency Development on Sustainability

Pengembangan kompetensi terkait aspek keberlanjutan merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa setiap individu dalam Perusahaan dapat mengelola, memahami, dan berkontribusi pada isu-isu dan program keberlanjutan secara efektif. Upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberlanjutan dapat melalui kegiatan pelatihan, seminar, dan kampanye internal. Dengan demikian setiap individu dapat menjadi agen perubahan dalam menerapkan praktik berkelanjutan. Pada tahun 2023, Direksi Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi yang menyangkut topik keberlanjutan, sebagai berikut:

Competency development on sustainability is a significant aspect to ensure each individual in the Company is capable to manage, understand, and contribute to the sustainability issues and program effectively. For this purpose, they are provided with trainings, seminars, and internal campaigns. Thus, they are expected to be an agent of change in sustainability. In 2023, the Board of Directors participated in the following competency development program on sustainability as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Manajemen Organ Tata Kelola
Competency Development Program for Governance Organ

Nama Diklat Name of Education and Training	Lembaga Penyelenggara Host	Tanggal Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Project Mentorship PLN IP HIJAUNESIA	PT PLN (Persero)	4 Juli 2023 July 04, 2023	Jakarta
Pra Assessment Program Business Development And Investment Decision Making	PT PLN (Persero)	8 Agustus 2023 August 08, 2023	Jakarta
Utility Working Conference and Vendor Technology Expo (UWC 2023) Tema: *Building Resiliency in a Rapidly Changing World.*	American Nuclear Society	6-9 Agustus 2023 August 06-09, 2023	Amerika Serikat
In House Training & Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Lembaga Pelatihan *Center of Risk Management & Sustainability* (CRMS) dan LSP MKS Center of Risk Management & Sustainability (CRMS) Training Center and MKS Professional Certification Body	11- 13 dan 19 - 21 September 2023 September 11-13 and 19-21, 2023	Jakarta
World Hydropower Congress 2023	*World Hydropower Congress*	31 Oktober 2023 -2 November 2023 October 31-November 2, 2023	Bali
Konferensi Nasional Profesi Manajemen Risiko IX dan Wisuda Sertifikasi National Conference of Risk Management Profession IX and Certification Award	LSP Manajemen Risiko Risk Management Professional Certification Body	14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023	Yogyakarta

Penilaian Risiko atas Penerapan Aspek Keberlanjutan

Risk Assessment on the Implementation of Sustainability Aspect

Penilaian risiko merupakan upaya untuk memahami dampak potensial dari praktik bisnis sehingga Perusahaan dapat mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan penerapan aspek keberlanjutan dalam operasi bisnis yang dijalankan, dalam rangka meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Penilaian risiko atas penerapan aspek keberlanjutan menjadi bagian dari proses manajemen risiko PLN Indonesia Power.

Risk assessment is a means to understand the potential impacts of the business practice. It is implemented to identify, mitigate, and manage the risks related to the implementation of sustainability in business practice to improve the success of sustainability goals. The risk assessment of the sustainability aspect is a part of risk management by the Company,

PLN Indonesia Power menerapkan kerangka kerja *Enterprise Risk Management* sesuai dengan framework ISO 31000:2018 dalam proses manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko PLN Indonesia Power tertuang dalam Peraturan Direksi No.0073.P/DIR/2023 Tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/*Governance, Risk and Compliance* (GRC) Terintegrasi, Keputusan Direksi Nomor 138.K./010/IP/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT Indonesia Power tanggal 30 Desember 2021, Keputusan Direksi Nomor 030.K/010/IP/2019 tentang Peningkatan *Risk Awareness* & *Risk Culture* di Lingkungan PT Indonesia Power, serta Surat Edaran Direksi Nomor 12.E/012/IP/2021 Tentang Taksonomi Risiko PT Indonesia Power. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan telah dilengkapi dengan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) untuk memastikan efektivitas manajemen risiko pada masing-masing pemilik program atau pemilik proses sebagai pihak pemilik risiko (*risk owner*). DMR berisi berbagai kajian mengenai topik ekonomi, lingkungan dan sosial yakni Kajian Kelayakan Operasi, Kajian Kelayakan Lingkungan, Kajian Hukum, Kajian Kelayakan Finansial dan Kajian Risiko.

Taking into account the Enterprise Risk Management based on ISO 31000:2018 framework. This risk management is governed in the Board of Directors Regulation No. 0073.P/DIR/2023 on the General Policy of the Integrated Governance, Risk, and Compliance Implementation, the Board of Directors Regulation No. 138.K./010/IP/2021 on the General Guideline of PT Indonesia Power Integrated Risk Management dated December 30, 2021, the Board of Directors Regulation No. 030.K/010/IP/2019 on Risk Awareness & Risk Culture at PT Indonesia Power, and the Circular of the Board of Directors No. 12.E/012/IP/2021 on PT Indonesia Power Risk Taxonomy. The Risk Management in the Company has been complemented with the Risk Management Document to ensure the effectiveness of risk management of each program or process owner as the risk owner. This document includes several reviews on economic, environmental, and social matters, such as Review on Operational Feasibility, Review on Environmental Feasibility, Review on Legal Matters, Review on Financial Feasibility, and Review on Risks.

Direksi dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko memastikan pengelolaan risiko secara khusus telah didukung oleh Satuan Legal, Risk and Compliance. Pengawasan penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dukungan dari Komite Manajemen Risiko yang bertugas melakukan peninjauan efektivitas Direksi dalam mengidentifikasi, menilai dan memitigasi risiko Perusahaan yang disertai dengan pemberian nasihat kepada Direksi tentang isu-isu manajemen risiko dan kepatuhan yang potensial seperti topik ekonomi, lingkungan dan sosial.

In assuming its managerial responsibility, the Board of Directors has performed regular review and monitor the effectiveness of risk management processes supported by Legal, Risk Management, and Compliance Unit. The risk management implementation is supervised by the Board of Commissioners assisted by the Risk Management Committee. They review the effectiveness of the Board of Directors in identifying, assessing, and mitigating risks, as well as advising the Board on risk management and potential compliance issues, among others economic, environmental, and social matters.

Perusahaan menentukan risiko utama korporat berdasarkan pada sasaran, faktor internal dan eksternal serta fokus Perusahaan dan telah diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Berdasarkan hasil Identifikasi Risiko dan Analisa Evaluasi Risiko pada *Risk Register* Risiko utama korporat Tahun 2023, Perusahaan telah menetapkan pemetaan risiko setelah dilakukannya pengendalian (eksisting kontrol) dengan *Risk Mapping*. Informasi rinci mengenai manajemen risiko Perusahaan telah dijelaskan pada bagian Governansi Perusahaan terkait uraian Manajemen Risiko.

The Company's key risks were determined based on their goals, internal and external factors, and the Company's focus. They had been aligned with the Company's Long-Term Plans. Based on the Risk Identification and Risk Evaluation Analysis on the Risk Register of the corporate key risk of 2023, the Company has established the risk mapping after the existing control. The detailed information of the Company risk Management is outlined in the Risk Management part in Corporate Governance section.



Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
Stakeholder Relations

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam rangka mendukung efektivitas pencapaian tujuan keberlanjutan. PLN Indonesia Power membangun kemitraan strategis dengan pemasok, pelanggan, dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Perusahaan dapat mengetahui ekspektasi dan masukan dari Pemangku Kepentingan terhadap Perusahaan dan menyelaraskannya dengan strategi bisnis dan program kerja Perusahaan. Pelibatan pemangku kepentingan juga bertujuan mengidentifikasi dampak aktual dan potensial terhadap aktivitas bisnis Perusahaan dan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial yang selanjutnya digunakan untuk menentukan tindakan pencegahan dan mitigasi untuk potensi dampak negatif. Kemitraan ini dapat memperluas dampak positif dan meningkatkan efektivitas upaya keberlanjutan.

Collaboration with the stakeholders is a key in supporting effective sustainability goal achievement. PLN Indonesia Power builds a strategic partnership with the suppliers, customers, government, and other stakeholders displaying the commitment to sustainability. The Company may collect the expectations and feedbacks from the stakeholders and align them with its business strategies and work programs. The involvement of stakeholders also aims to identify the actual and potential impacts of the Company's business activities on economy, environment, and social life. They are then used to determine the preventive and mitigation measures against the potential negative impacts. This partnership may extend the positive impacts and improve the effectiveness of the sustainability campaign.

Kajian pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders mapping*) dilakukan untuk mengidentifikasi kategori pemangku kepentingan yang terdampak maupun yang memberi dampak bagi operasi Perusahaan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui hubungan antar pemangku kepentingan dengan Perusahaan, mengetahui potensi serta masalah yang ada sehingga program yang akan dilaksanakan tepat sasaran sesuai ekspektasi para stakeholders dan menyusun rencana program. Berdasarkan hasil identifikasi, PLN Indonesia Power telah mengkategorikan pemangku kepentingan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu Pemegang Saham; Pemerintah; Pegawai; Pelanggan; Pemasok; dan Komunitas.

Review on stakeholder mapping is performed to identify their categories into parties impacting and parties impacted by the Company in terms of economic, environmental, and social aspects. This mapping is performed to identify the stakeholder relationship with the Company as well as actual and potential issues that hinder the program implementation as expected by the stakeholders, and to plan the program accordingly. Based on the identification, PLN Indonesia Power categorized the stakeholders into 6 (six) groups, namely shareholders, government, employees, customers, suppliers, and public.

Pelibatan Pemangku Kepentingan Perusahaan
Stakeholder Engagement

Kategori Pemangku Kepentingan Category	Pendekatan/Metode Pelibatan Engagement Approach/Method	
Pemegang Saham Shareholder	1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. *Executive Board Meeting*. 3. BoD *Retreat*.	1. General Meeting of Shareholders (GMS). 2. Executive Board Meeting. 3. BoD Retreat.
Pemerintah (Pusat dan Daerah) Government (Central and Regional)	1. Pelaporan terkait pengelolaan lingkungan, kepegawaian, perizinan usaha pembangkitan dan proyek. 2. Melakukan kerjasama *project*. 3. Sosialisasi dan diskusi ketentuan teknis pengelolaan lingkungan. 4. Audit Sistem Manajemen K3 (Internal dan Eksternal).	1. Reporting on environmental management, employment, power generation business licensing, and projects. 2. Launching of collaborative projects. 3. Dissemination of information about and discussing the technical terms on environmental management. 4. HSE System Audit (Internal and External).
Pegawai Employee	1. *Coffee morning*. 2. Pertemuan periodik. 3. *Employee* dan *Family Gathering*. 3. Perayaan Hari Ulang Tahun Perusahaan. 4. Survei EES dan CHI. 5. Simulasi Tanggap Darurat Bencana di Unit dan Kantor Pusat. 6. Partisipasi diklat.	1. Coffee morning. 2. Regular meeting. 3. Employee and Family Gathering. 3. Company Anniversary Celebration. 4. EES and CHI surveys. 5. Disaster Response Simulation at Units and Head Office. 6. Participation in training.
Pelanggan Customer	1. Program mendengarkan suara pelanggan/Forum Komunikasi Pelanggan/*Customer Gathering*. 2. Rapat Alokasi Energi. 3. Kunjungan Pelanggan. 4. Aplikasi Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit (HDKP). 5. Rapat Koordinasi Sistem Jawa Bali. 6. Survei Kepuasan Pelanggan. 7. *Workshop* Manajemen Komplain Pelanggan dan Penyusunan *Action Plan* OFI kepuasan Pelanggan.	1. Listening to the voice of the customer/Customer Communication Forum/Customer Gathering Program. 2. Energy Allocation Meeting. 3. Customer Visit. 4. Power Plant Unreadiness Daily Declaration (HKDP) Application. 5. Java-Bali System Coordination Meeting. 6. Customer satisfaction survey. 7. Workshop on Customer Complaint Management and Preparation of OFI Action Plan for Customer Satisfaction.

Kategori Pemangku Kepentingan Category	Pendekatan/Metode Pelibatan Engagement Approach/Method	
Penyedia/Pemasok Vendor/Supplier	1. *Vendor Gathering.* 2. *Business Review Meeting.* 3. Survei Perilaku Etis atau survei lainnya. 3. *Sales Engineering Support* berupa *Assessment, Inspection, Consultation.* 5. Sosialisasi anti korupsi (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).	1. Vendor Gathering. 2. Business Review Meeting. 3. Ethical Behavior Survey or other surveys. 3. Sales Engineering Support, covering Assessment, Inspection, and Consultation. 5. Dissemination of anti-corruption Policy (Anti-Bribery Management System).
Komunitas Penduduk Sekitar Pembangkit: • Masyarakat di Wilayah Binaan • LSM Lokal & Internasional • Tokoh Masyarakat • Institusi/Lembaga Profesi • Media Local Community surrounding the Power Plants: • Community in the Foster Areas • Local and International NGOs • Public Figures • Institution/Professional Association • Media	1. Forum Kemitraan Polisi, TNI dan Masyarakat. 2. Program CSR dan COMDEV yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. 3. Kerjasama *project* dan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan atau pengelolaan sampah (3R sampah) dan penanaman pohon. 4. Kegiatan CSR (*Charity*). 5. Forum Warga. 6. Forum *Multi Stakeholder.*	1. Police, National Army, and Public Partnership Forum. 2. CSR and COMDEV programs focused on community empowerment. 3. Project cooperation and community involvement in waste utilization or management (3R) and tree planting. 4. CSR activity (Charity). 5. Community Members' Forum. 6. Multi-Stakeholder Forum.

Tantangan Terhadap Pengelolaan Aspek Keberlanjutan
Challenges in Sustainability Management

Peresmian *Legal End State Holding Subholding* PT PLN (Persero) dan perubahan identitas PT Indonesia Power menjadi PT PLN Indonesia Power pada awal tahun 2023 yang memerlukan penyesuaian dan transisi merupakan peluang sekaligus menjadi tantangan bagi PLN Indonesia Power. Perusahaan melakukan penyelarasan proses *value chain* secara *end to end* tidak terbatas pada *financing* termasuk juga proses pengembangan usaha pada masa transisi sehingga dapat menyiapkan *core competencies* dan *technical skills* yang baru untuk menghadapi tantangan pengembangan usaha di masa depan termasuk menyiapkan proses bisnis dan sumber daya manusia pada fase operasional menuju masa transisi tersebut.

PLN Indonesia Power dihadapkan pada tantangan utama terkait aspek keberlanjutan diantaranya yaitu persaingan di industri yang semakin ketat salah satunya dengan semakin berkembangnya pembangkit dengan teknologi yang lebih efisien dan berkapasitas besar, pengendalian perubahan iklim, bisnis di era digital, pengetatan standar baku mutu emisi dan mendorong transisi energi melalui percepatan pengembangan EBT sebagai energi masa depan. Implementasi teknologi dan inovasi baru dalam rangka mencapai keberlanjutan seringkali dihadapkan pada tantangan teknis seperti biaya tinggi, ketidakmatangan teknologi, atau risiko implementasi. Selain itu, kesadaran dan pemahaman yang rendah tentang pentingnya keberlanjutan di lingkungan bisnis dan masyarakat secara umum. Pendidikan dan kesadaran yang lebih baik diperlukan untuk mengubah sikap dan perilaku menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

The inauguration of Legal End State Holding Subholding PT PLN (Persero) and the change from PT Indonesia Power into PT PLN Indonesia Power in early 2023 that requires adjustment and transition serves as an opportunity as well as challenge by PLN Indonesia Power. The Company aligned the value chain process in an end-to-end manner on the financing and business development during the transition. Therefore, the Company may prepare new core competencies and technical skills to face business development in the future. This is performed among others by preparing business and human capital processes in the operational phase during the transition.

PLN Indonesia Power had to deal with a major challenge related with the sustainability aspect, such as industrial competition in the presence of power generators with higher efficiency and larger capacity, climate change control, digitalization, emission quality standard, and energy transition acceleration to new and renewable energy as the energy for future. The implementation of new technology and innovation for sustainability is often faced with technical issues, namely high cost, technology immaturity, or implementation risks. In addition, there is a lack of awareness and understanding about the significance of sustainability in business communities and public. Education and better awareness are needed to shift the attitude and behavior into a more sustainable manner.



Perusahaan menyadari bahwa tantangan keberlanjutan yang ada saat ini harus direspon dengan menyiapkan langkah strategis demi keberlanjutan bisnis. Strategi tersebut terangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Melakukan kajian pemanfaatan dan melakukan pengembangan pembangkit berbahan bakar EBT dan bahan bakar lainnya yang rendah emisi karbon;
2. Melakukan pengembangan bisnis *beyond* kWh yang merupakan turunan dari bisnis pembangkitan, khususnya dengan target pasar di luar PLN group dan juga di mancanegara;
3. Melakukan penguatan pada bisnis pembangkitan melalui peningkatan implementasi digitalisasi pembangkit;
4. Memperkuat proses bisnis, kebijakan, kapabilitas dan kapasitas SDM dan organisasi, serta menjadi Perusahaan yang berorientasi pada penurunan tingkat risiko ESG.

The Company realizes that the current challenge in sustainability must be acknowledged strategically for business continuity. These strategies are elaborated below:

1. Conducting utilization review and developing generators fueled with new and renewable energy and other low-carbon fuels;
2. Developing beyond-kWh business as a derivative of the power generation business, specifically targeting markets outside PLN group and overseas;
3. Strengthening power generation business through generator digitalization;
4. Reinforcing business process, policies, capabilities, and human capital capability and capacity, and striving to minimize ESG risks.

Membangun Budaya Keberlanjutan
Developing Cultural Sustainability

Komitmen, kesadaran, dan partisipasi dari semua individu pada setiap tingkatan organisasi sangat diperlukan dalam membangun budaya keberlanjutan. PLN Indonesia Power membangun budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan menginspirasi tindakan yang berkelanjutan di semua jenjang jabatan yang ada di Perusahaan. Komitmen membangun budaya keberlanjutan diantaranya dengan memberikan keteladanan pemimpin terkait aspek keberlanjutan baik organ utama tata kelola sampai dengan ke jenjang unit terkecil. Pimpinan memberi kesempatan dan meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai untuk berkontribusi dengan gagasan, proyek, atau tindakan yang mendukung keberlanjutan.

Commitments, awareness, and participation of all individuals in every organizational levels are paramount in developing cultural sustainability. PLN Indonesia Power builds a culture that integrates sustainability values and inspires sustainable actions in all positions within the Company. As an instance, leaders in the governance organs up to the smallest units are expected to model leadership in terms of sustainability. They are encouraged to cultivate opportunities, motivation, and commitment for the employees to contribute with ideas, projects, or actions that supports sustainability.

PLN Indonesia Power telah mengimplementasikan GRC *Culture* pada setiap kegiatan dan proses bisnis Perusahaan. Dasar penerapan GRC di PLN Indonesia Power telah diatur dalam Peraturan Direksi PLN Indonesia Power No.0073.P/DIR/2023 Tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan / *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Terintegrasi. Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) sangat penting bagi perusahaan untuk mengantisipasi dan menghadapi risiko serta tantangan global. Penerapan GRC yang efektif akan membantu perusahaan mengatasi berbagai masalah sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. GRC *Ecosystem* terdiri dari:

1. *Governance*, melingkupi:
   a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*);
   b. Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*);
   c. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*);
   d. Kebijakan Strategis Pimpinan (*Strategic Leadership*).
2. *Risk*, melingkupi:
   a. Budaya Sadar Risiko (*Risk Awareness & Risk Culture*);
   b. Manajemen Keberlanjutan (*Business Continuity Management System*);
   c. Manajemen Risiko Terintegrasi;
   d. Implementasi 4 *Eyes Principle*.

PLN Indonesia Power has implemented GRC Culture in its business activities and processes. The basis of implementation for GRC is regulated in PLN Indonesia Power Board of Directors Regulation No. 0073.P/DIR/2023 on the General Policy of Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC) Implementation. This implementation is significant for the Company to anticipate and manage global risks, Issues, and challenges. The GRC Ecosystem comprises:

1. Governance:
   a. GCG Code;
   b. Code of Conduct;
   c. Board Manual;
   d. Strategic Leadership.
2. Risk:
   a. Risk Awareness & Risk Culture;
   b. Business Continuity Management System;
   c. Integrated Risk Management;
   d. 4 Eyes Principles Implementation.



3. *Compliance*, melingkupi:
   a. Pengendalian melalui *Self Assessment* (*Control Self Assessment*);
   b. Manajemen Kepatuhan (*Compliance Management*);
   c. Manajemen Anti *Fraud*;
   d. Pedoman Dasar Perusahaan (Anggaran Dasar Perusahaan)

Budaya keberlanjutan harus diintegrasikan ke dalam semua aspek operasional Perusahaan, termasuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kinerja. Hal tersebut guna memastikan bahwa keberlanjutan menjadi bagian integral dari budaya organisasi, bukan sekadar inisiatif yang bersifat parsial.

3. Compliance:
a. Control Self-Assessment;
b. Compliance Management;
c. Anti-fraud Management
d. Articles of Association.

Cultural sustainability must be integrated to all operational aspects of the Company, including strategic planning, decision making, resource management, and performance evaluation. It is necessary to ensure that sustainability is integral to the corporate culture, not merely a partial initiative.

Kinerja Ekonomi
Economic Performance

Konteks kinerja keberlanjutan Perusahaan dalam aspek ekonomi mendorong Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan untuk dapat bertahan dalam jangka panjang. Kinerja keberlanjutan aspek ekonomi mempertimbangkan keseimbangan antara mencapai tujuan keuangan jangka pendek dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang berkelanjutan secara ekonomi harus menerapkan praktik bisnis yang efisien dalam penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan bahan baku lainnya.

With the spirit of sustainable economy, the Company is encouraged to be sustainably profitable in the long run. The sustainability in the economic performance takes into account the balance between short-term financial goals and the long-term impacts towards environments and the community. Economically sustainable companies need to adopt efficient business practices in using energy, water, and other resources.

Perusahaan berupaya meningkatkan kinerja ekonomi dengan berinovasi dalam produk dan layanan, serta melakukan diversifikasi portofolio produk. PLN Indonesia Power mempertimbangkan dampak ekonomi pada komunitas lokal di mana Perusahaan beroperasi termasuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, membayar pajak dengan adil, dan mendukung inisiatif pembangunan ekonomi lokal.

The Company strives to improve the economy through innovation in the products and services as well as diversifying its product portfolio. PLN Indonesia Power is aware of its economic impacts on the local communities where the Company operates, such as opening job opportunities for locals, paying taxes fairly, and supporting local economic development initiatives.

Kinerja Produksi dan Keuangan
Production and Financial Performance

PLN Indonesia Power mampu menjaga kinerja produksi dan keuangan ditengah momentum transformasi *Holding Subholding* PT PLN (Persero) dimana identitas PT Indonesia Power menjadi PT PLN Indonesia Power Kinerja Operasional PLN Indonesia Power tahun 2023 diukur dari indikator produksi dan penjualan tenaga listrik berhasil mencapai target yang ditetapkan. Perusahaan mencatatkan realisasi produksi energi listrik sebesar 84.199,86 GWh dengan pencapaian 106,94% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu sebesar 78.734,67 GWh. Realisasi penjualan energi listrik juga mencatatkan hasil yang baik, yaitu sebesar 79.664,84 GWh dengan pencapaian 107,07% dari target RKAP yaitu sebesar 74.403,53 GWh.

PLN Indonesia Power successfully maintains the production and financial performances amidst the transformation of Holding-Subholding PT PLN (Persero), where PT Indonesia Power became PT PLN Indonesia Power. The operational performance of PLN Indonesia Power in 2023 was measured by observing two indicators, namely production and sale of electricity, which were both on target. The Company produced 84,199.86 GWh of electricity, which equals to 106.94% of the Company's WP&B target at 78,734.67 GWh. Whereas, 79,664.84 GWh of electricity were sold, equivalent to 107.07% of WP&B target, i.e.74,403.53 GWh.

Kinerja operasi yang optimal mampu mendukung kinerja keuangan dimana PLN Indonesia Power juga berhasil mencatatkan realisasi laba tahun berjalan sesuai dengan target kinerja keuangan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp103.480.111 juta dengan pencapaian 104,26% dari target RKAP yaitu sebesar Rp99.255.467 juta. Sementara, laba tahun berjalan yang diperoleh Perusahaan tahun 2023 sebesar Rp8.189.314 juta dengan pencapaian 101,02% dari target RKAP yaitu sebesar Rp8.106.653 juta.

This optimum operational performance supported the financial position with on-target profit realization for the year. The revenue made in 2023 was Rp103,480,111 million with 104.26% achievement from the WP&B target at Rp99,255,467 million. For the income for the year, the Company made Rp8,189,314 million with 101,02% achievement from the WP&B target at Rp8,106,653 million.



Perbandingan Target dan Kinerja Produksi dan Keuangan
Comparison of Target and Performance on Production and Finance

Indikator Indicator	2021		Pencapaian Achievement	2022		Pencapaian Achievement	2023		Pencapaian Achievement
	Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi* Realization*		Target	Realisasi Realization	
Produksi Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	30.963,38	39.230,81	126,70%	31.550,74	37.510,12	118,89%	78.734,67	84.199,86	106,94%
Penjualan Listrik (GWh) Sale of Electricity (GWh)	29.502,31	37.590,11	127,41%	30.115,04	35.935,34	119,33%	74.403,53	79.664,84	107,07%
Pendapatan (Rp Juta) Revenue (Rp Million)	39.734.703	38.519.859	96,94%	42.250.460	81.090.566	191,93%	99.255.467	103.480.111	104,26%
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) Income for the Year (Rp Million)	3.454.082	4.031.154	116,71%	4.099.309	4.683.660	114,25%	8.106.653	8.189.314	101,02%

* Disajikan kembali karena terdapat *restatement* laporan keuangan *audited* PLN Indonesia Power yang disebabkan adanya pengalihan aset beberapa pembangkit PLN ke *Subholding* PLN Indonesia Power.

* Restated due to the restatement of PLN Indonesia Power's audited financial statements due to the transfer of assets of several power plants owned by PLN to PLN Indonesia Power Subholding.

PLN Indonesia Power merealisasikan produksi energi listrik pembangkit EBT tahun 2023 sebesar 10.061,05 GWh dengan pencapaian 92,24% dari target RKAP. Realisasi penjualan energi listrik pembangkit EBT tahun 2023 sebesar 9.754,26 GWh dengan pencapaian 92,19% dari target RKAP.

Throughout 2023, PLN Indonesia Power produced 10,061.05 GWh electricity at the new and renewable power plants, or 92.24% of the WP&B target. The realization of electricity sale at the new and renewable power plants in 2023 was 9,754.26 GWh, or 92.19% of the WP&B target.

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan
Comparison of Target and Performance on Sustainable Finance

Indikator Indicator	2021		Pencapaian Achievement	2022		Pencapaian Achievement	2023		Pencapaian Achievement
	Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization	
Produksi Energi Listrik Pembangkit EBT (GWh) Electricity Production at New and Renewable Energy Power Plants (GWh)	5.881,23	6.614,01	112,46%	6.530,10	7.453,11	114,13%	10.907,46	10.061,05	92,24%
Penjualan Energi Listrik Pembangkit EBT (GWh) Electricity Sales at New and Renewable Energy Power Plants (GWh)	5.736,21	6.447,07	112,39%	6.337,35	7.279,93	114,87%	10.580,48	9.754,26	92,19%

Kontribusi Ekonomi Tidak Langsung
Indirect Economic Contribution

Perusahaan mendorong inovasi untuk menciptakan diversifikasi portofolio produk dalam mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas atau berbahaya bagi lingkungan. PLN Indonesia Power berupaya mewujudkan peningkatan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan di antara berbagai kelompok masyarakat, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau tertinggal dalam proses pembangunan.

The Company promotes innovation to create diversified product portfolio to decrease the dependence on resources limited in numbers or harmful for the environment. PLN Indonesia Power makes effort to improve the living standards and equal distribution of welfare among community groups to prevent marginalized or underdeveloped groups in the development processes.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan kapasitas dan penciptaan peluang usaha masyarakat sekitar, peningkatan pelibatan penyedia lokal dan penggunaan tenaga kerja lokal merupakan dampak ekonomi tidak langsung yang terus dikelola dan dihadirkan PLN Indonesia Power bagi pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berpengaruh pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya akibat dari berlangsungnya operasi Perusahaan.

There were indirect economic impacts made and managed by PLN Indonesia Power for its stakeholders, namely sustainable infrastructure development, capacity reinforcement, business opportunity establishment for local communities, as well as higher engagement of local supplier and manpower. The aim is to promote the economic development that encourage self-dependence and well-being of the community and other stakeholders from and during the Company operation.



Pembangunan Infrastruktur PLN Indonesia Power Tahun 2023

Infrastructure Development of PLN Indonesia Power in 2023

No	Program	Wilayah Operasi Operational Area	Nilai Investasi (Rp Juta) Value of Investment (Rp Million)	Sifat Type	Dampak Impact	
1	PLTM Cileunca	Jawa Barat West Java	83.283	Komersial Commercial	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Memperkuat sistem kelistrikan • Penambahan pembangkit EBT dalam rangka pencapaian sasaran bauran energi nasional yang mendorong laju transformasi energi hijau dan mendukung Pemerintah dalam mencapai target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam energi nasional • Mempermudah mobilitas karyawan dan masyarakat sekitar	• Promoting national infrastructure development • Reinforcing electricity system • Adding more NRE power plants to achieve the national target of energy mix to support green energy transformation and help the Government achieve the NRE mix target of the national energy • Facilitating the mobility of employees and local community
2	Rehabilitasi Jalan hantar *Power House* PLTA Saguling Rehabilitation of the Connecting Line of PLTA Saguling Power House	Saguling	2.989	Non Komersial Non-Commercial		
3	Pembangunan *Building Tools Center* MSU di Area II.1 Lontar Dan Penambahan Ruang Tools di Gudang *Tools* KS Tubun Construction of Building Tools Center MSU in Area II.1 of Lontar and More Tools Room at KS Tubun Tools Warehouse	Lontar dan Ks Tubun Lontar and Ks Tubun	2.732	Non Komersial Non-Commercial	• Memudahkan inventaris *tools* dan membuat perusahaan lebih produktif	• Simplifying tool inventory and improving productivity
4	Pembangunan dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Establishment and renovation of inhabitable housing	Lombok Barat, Pangkalan Susu, Bali, Cilegon, Cilacap, Banten	136	Non Komersial Non-Commercial	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan rumah • Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas	• Promoting national infrastructure development • Enhancing self-sufficiency in housing improvement • Improving welfare and productivity
5	Pembangunan dan perbaikan sarana fasilitas umum Establishment and renovation of public infrastructure	Serang, Grati, Barru, Saguling, Kamojang, Madura, Cilegon, Pangkalan Susu, Pasuruan, Bali, Purwokerto, Jawa Barat, Semarang, Labuan, Palabuhan Ratu, Cilacap, Sintang, Makasar, Priok, Barru, Kepulauan Riau,	1.097	Non Komersial Non-Commercial	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan aksesibilitas • Stimulasi pertumbuhan ekonomi lokal	• Promoting national infrastructure development • Improving accessibility • Stimulating local economy
6	Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah Establishment and renovation of places of worship	Barru, Cilegon, Suralaya, Tanjung Priok, Kamojang, Bogor, Cilacap, Pasuruan, Bali, Jember, Cioray, Semarang, Labuan, Lontar, Barru, Koya Timur, Palabuhan Ratu, NTB, Pangkalan Susu, Sintang, Semarang, Sintang, Labuhan Angin, Jakarta Pusat, Lombok	799	Non Komersial Non-Commercial	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan kualitas sarana ibadah • Meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial	• Promoting national infrastructure development • Improving qualities of the place of worship • Improving emotional and social welfare



No	Program	Wilayah Operasi Operational Area	Nilai Investasi (Rp Juta) Value of Investment (Rp Million)	Sifat Type	Dampak Impact	
7	Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan Establishment and renovation of educational facilities	Kamojang, NTB, Cilegon, Pasuruan, Labuan, Serang, Kebumen, Pangkalan Susu, Bali, Semarang, Palabuhan Ratu, Priok, Bandung, Jakarta, Cilacap, Grati, Mrica, Saguling, Lontar, Sintang, Sanggau	1.594	Non Komersial Non-Commercial	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan	• Promoting national infrastructure development • Improving educational quality and access
8	Pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi Establishment and renovation of sanitation facilities	Cilegon, Labuan, Jawa Tengah, Cianjur, Tanjung Priok, Kamojang, Bali, Saguling, Jakarta, Bukittinggi, Singkawang, Makassar	666	Non Komersial Non-Commercial	• Mendukung program Desa Sehat Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) • Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat • Mengurangi biaya pengobatan dan beban penyakit masyarakat	• Supporting the program of Healthy Village Free from Open Defecation • Improving public health quality • Reducing medical cost and public burden of disease

PLN Indonesia Power selama tahun 2023 juga bekerja sama dengan 2.253 Penyedia Nasional (99,38% dari total Penyedia) dengan nilai pengadaan Penyedia Nasional sebesar Rp74.935.302,52 juta (87,45% dari total nilai pengadaan). Jumlah pelibatan Penyedia Nasional tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang menandakan bahwa PLN Indonesia Power semakin mengoptimalkan pelibatan pemasok/penyedia lokal dalam rantai pasokan Perusahaan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Throughout 2023, PLN Indonesia Power cooperated with 2,253 National Suppliers (99.38% of the total Supplier), making up the National Supplier procurement value of Rp74,935,302.52 million (87.45% of the total procurement value). The use of National Suppliers in 2023 increased compared to 2022, signifying higher utilization of local suppliers in the Company's supply chain to support national economic development.

Kinerja Lingkungan Hidup
Environmental Performance

PLN Indonesia Power mengelola dampak atau pengaruh yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari kegiatan operasional yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja lingkungan merupakan bagian penting dari praktik keberlanjutan dan mencerminkan tanggung jawab Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan termasuk masyarakat. Dengan memperhatikan kinerja lingkungan, PLN Indonesia Power dapat meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan untuk mendukung keseimbangan ekologi serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

PLN Indonesia Power managed both direct and indirect impacts toward environment that were caused by its operations. Environment performance is a crucial part of sustainability practices and it reflects the Company's responsibility toward environmental sustainability, including the community. By taking environment performance into consideration, PLN Indonesia Power is able to minimize negative impact toward the environment and promote sustainable practices to support ecological balance as well as creating long-term value for stakeholders.

Kebijakan internal terkait tanggung jawab Perusahaan aspek lingkungan hidup yang ditetapkan PLN Indonesia Power mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi Nomor 57.K/010/IP/2010 tentang Manajemen pembangkit yang di dalamnya terdapat pengelolaan energi yaitu Manajemen efisiensi.

The following are list of internal policies regulating the Company's responsibility for the environment which were issued based on the Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 22 of 2021 on Implementation of Environmental Protection and Management.

1. Decree of the Board of Directors Number 57.K/010/IP/2010 on the Power plant management that regulates energy management which is called Efficiency management.



2. Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power.
3. Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman Penerapan Green Power Plant di Lingkungan PT Indonesia Power.
4. Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 tentang Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian dalam Menjaga Keberlanjutan Planet di PT Indonesia Power.
5. Keputusan Direksi Nomor 191.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Limbah di Lingkungan PT Indonesia Power.
6. Edaran Direksi Nomor 10.E/012/IP/2021 tentang Pedoman Manajemen Efisiensi Listrik Pembangkit Thermal di Lingkungan PT Indonesia Power.
7. Kebijakan *Integrated Management System* (IMS) PT PLN Indonesia Power.

PLN Indonesia Power telah mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan sesuai standar nasional dan internasional (SNI ISO 14001:2015) serta mematuhi peraturan dan ketentuan Rencana Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Daerah yang harus dipenuhi oleh masing-masing Unit dalam kegiatan operasional yang dijalankan. Perusahaan juga telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin-izin pengelolaan lingkungan. Implementasi manajemen risiko juga dilakukan secara integral dan menyeluruh untuk semua proses bisnis termasuk terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim.

2. Decree of the Board of Directors No. 41.K/010/IP/2012 on Occupational and Environmental Safety and Health Policy in PT Indonesia Power.
3. Decree of the Board of Directors No. 249.K/010/IP/2015 on Green Power Plant Implementation Guideline in PT Indonesia Power.
4. Decree of the Board of Directors No. 211.K/010/IP/2016 on the Commitment to Preserving Ecosystem and Environment to Maintain the Planet's Sustainability in PT Indonesia Power.
5. Decree of the Board of Directors No. 191.K/010/IP/2019 on Waste Management in PT Indonesia Power.
6. Circular Letter of the Board of Directors No. 10.E/012/IP/2021 on Guideline for Management of Thermal Power Plant Electricity Efficiency in PT Indonesia Power.
7. Integrated Management System (IMS) policy of PT PLN Indonesia Power.

At PLN Indonesia Power, each unit has implemented environmental management system according to national and international standards (SNI ISO 14001:2015) and complied with Environment Management/ Monitoring Plan (RKL/RPL) developed by the Ministry of Environment (KLH) as well as Provincial and Regional Environmental Office (DLH) in its operational activities. Also, the Company has prepared environmental impact analysis document (AMDAL) and secured environmental management licenses. Risk management is also performed in integrated and exhaustive manner against all business processes, including those related to environmental and climate change issues.

Kegiatan Tanggung Jawab Lingkungan
Activities Related to Environmental Responsibility

Penurunan dampak kerusakan dan risiko lingkungan diupayakan melalui kegiatan tanggung jawab lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan PLN Indonesia Power dengan melakukan penghematan pemakaian sumber daya energi dan sumber daya alam lainnya; memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan dan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi terkait Lingkungan. Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap upaya PLN Indonesia Power terkait perlindungan lingkungan, seperti kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, investasi dalam teknologi hijau, dan keterlibatan dalam inisiatif lingkungan untuk mengidentifikasi area di mana Perusahaan dapat melakukan perbaikan lebih lanjut.

The company's efforts to mitigate the impacts of environmental damage and risks are reflected on its activities related to environment responsibility. PLN Indonesia Power shows its commitment through minimizing energy resources consumption and saving other natural resources; improving environmental quality in a sustainable manner, and complying to regulations related to Environment. Evaluation is regularly conducted against PLN Indonesia Power efforts to protect the environment, such as its compliance to environmental regulation, investment in green technology, and participation in environment initiatives to identify areas where the Company may improve.

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

Kegiatan pendampingan dan pemantauan secara rutin untuk memastikan kepatuhan PLN Indonesia Power terhadap pengelolaan lingkungan dikemas kedalam Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan dengan rencana dan realisasi kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

Regular assisting and monitoring program to ensure PLN Indonesia Power's compliance with environmental management is done through Environmental Management Compliance Program with activity plans and realization for 2023 as follows:

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

Rencana Plan	Realisasi Realization	
Monitoring dan Pemenuhan Kepatuhan terhadap Regulasi Monitoring and Compliance with Regulations	- Melakukan monitoring pengelolaan lingkungan hidup melalui *Video Conference* progres kemajuan Penaatan Pengelolaan Lingkungan hidup dan PROPER yang dilakukan tiap bulan. - Melakukan pendampingan dan penyelesaian ketidaksesuaian hasil Pengawasan *Stakeholder*.	- Monitoring the environmental management through monthly Video Conference that discusses the progress of Environmental Management Arrangement and PROPER. - Providing assistance when noncompliance occurs based on Stakeholder Monitoring result and resolve the issues.

Rencana Plan	Realisasi Realization	
Capacity Building dan Evaluasi Kepatuhan Regulasi Capacity Building and Regulatory Compliance Evaluation	- Review pemenuhan Kepatuhan Pelaporan Lingkungan Hidup dan *Self Assessment* pemenuhan Ketentuan Teknis Lingkungan Hidup di Lapangan. - Melakukan *workshop* pelatihan dan sertifikasi lingkungan.	- Conducting review on the Compliance with Environmental Reporting and Self-Assessment for the Compliance with Environmental Technical Provisions in the field. - Organizing environmental training workshop and certification.
Monitoring PROPER *Beyond Compliance*	- Melakukan *monitoring Video Conference progress* kemajuan PROPER *Beyond Compliance* (Per Bulan).	- Organizing Video Conference to monitor progress of PROPER Beyond Compliance (Per Month).
Capacity Building dan Evaluasi *Beyond Compliance* Capacity Building and Beyond Compliance Evaluation	- Workshop Evaluasi pencapaian PROPER 2022 dan penyusunan strategi Tahun 2023. - Penyusunan Dokumen *Life Cycle Assessment* (LCA) dan penerbitan *Environmental Product Declaration.* - Penyusunan Dokumen PROPER *Beyond Compliance*. - Pelaksanaan *Benchmarking* dan Penyusunan Buku ISBN Data Kinerja Pengelolaan Lingkungan.	- Conducting Evaluation workshop for PROPER 2022 and draft strategies for 2023. - Drafting Life Cycle Assessment (LCA) and release the Environmental Product Declaration. - Drafting PROPER Beyond Compliance document. - Benchmarking and Drafting a Book that comes complete with its ISBN about Data on Environmental Management Performance.
Digitalisasi *monitoring* Pengelolaan dan Ketaatan Lingkungan Seluruh Unit serta Sentralisasi *database* pengelolaan Lingkungan Korporat Digitalization of the monitoring of Environmental Management and Compliance in All Units as well as Centralization of Corporate Environmental management database	- Pengembangan Aplikasi "*Environment Data Monitoring System* (EDMOS)" untuk *monitoring* Data dan Dokumen Lingkungan.	- Development of "Environment Data Monitoring System (EDMOS)" Application to monitor data and documents about the environment.
Pengelolaan Limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) Managing integrated Fly Ash and Bottom Ash	- Pemanfaatan FABA secara masif sebagai Limbah Non B3 terdaftar untuk internal dan eksternal. - Pengajuan Perubahan Persetujuan Lingkungan untuk integrasi Dokumen Rincian Teknis FABA sebagai Limbah Non B3 Terdaftar.	- Massive utilization of FABA as registered Non-Hazardous and Non-Toxic Waste for internal and external purposes. - Submission of Changes to Environmental Approval for integration of FABA Technical Details Document as Registered Non-Hazardous and Non-Toxic Waste.
Penyelesaian Sanksi Administrasi Administrative Sanction Completion	- Melakukan *monitoring* progress penyelesaian sanksi administrasi bagi unit pembangkit yang memiliki kewajiban melalui *video conference* yang dilakukan tiap bulan dan pendampingan kunjungan lapangan.	- Monitoring the completion progress of administrative sanctions imposed on certain power plant through monthly video conference, and through field assistance.
Keikutsertaan dalam Nilai Ekonomi Karbon Participation in Carbon Economy Value	- Perdagangan Karbon PLTU PLN IP yang diikuti oleh 10 PLTU ≥100 MW. - Pengajuan Sertifikat Pengurangan Emisi di SRN KLHK.	- Trading of carbon produced by PLN IP Steam Power Plants (SPPs), which includes 10 steam power plants ≥ 100 MW - Submission of request for Emission Reduction Certificate at the National Registration System of Ministry of Environment and Forestry.

Sistem Manajemen Lingkungan

Implementation of Environmental Management System

Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan salah satunya dilakukan dengan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada ISO 14001:2015 dan terintegrasi dengan PLN Indonesia Power *Integrated Management System* (PLN IP-IMS). PLN Indonesia Power telah melakukan upaya peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan selama tahun 2023 dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan dan persyaratan pelanggan serta standar nasional dan internasional yang berlaku serta berkaitan dengan proses bisnis Perusahaan.
2. Menerapkan dan melaksanakan secara konsisten serta sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan standar ISO 14001:2015.
3. Melakukan *monitoring*, evaluasi dan audit internal Sistem Manajemen Lingkungan secara periodik.
4. Melakukan audit eksternal ISO 14001:2015 terkait Sistem Manajemen Lingkungan yang terintegrasi dengan Audit eksternal PLN IP-IMS.
5. Menjadikan kebijakan lingkungan sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

One of the ways to improve environmental management performance is through Environmental Management System (SML) based on ISO 14001:2015 that is integrated with PLN Indonesia Power's Integrated Management System (PLN IP-IMS). PLN Indonesia Power has put in efforts to improve environmental management throughout 2023 through following activities:

1. Complying with the regulations on environment and customer requirements, as well as the applicable national and international standards related to the Company's business processes.
2. Consistently applying, implementing, and acquiring certification of Environment Management System in accordance with ISO 14001:2015 standards.
3. Monitoring, evaluating, and internally auditing the Environment Management System on a regular basis.
4. Conducting external audit for ISO 14001:2015 related to Environmental Management System integrated with External Audit of PLN IP-IMS.
5. Setting environment policies as the ground for determining goals and objectives of environmental management.



6. Mencegah pencemaran terhadap air, tanah dan udara, mendorong adanya sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dengan mengutamakan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), mendorong program kepedulian dan pengembangan masyarakat sekitar (*Community Development*/CSR) dan melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati.
7. Memberikan pemahaman/kepedulian dan pelatihan mengenai lingkungan secara terus menerus kepada seluruh pegawai baik organik maupun mitra kerja.
8. Meningkatkan peran aktif dan menanamkan kepedulian pegawai terhadap lingkungan.
9. Memelihara dan mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait Sistem Manajemen Lingkungan.
10. Mengkomunikasikan kebijakan lingkungan kepada seluruh kontraktor/*supplier* atau mitra kerja untuk dapat mengikuti kebijakan serta mengkomunikasikan kepada masyarakat setempat.
11. Melakukan perbaikan berkelanjutan, penyempurnaan dan peningkatan secara terus menerus terhadap sasaran organisasi pada setiap proses bisnis masing-masing bidang.

6. Preventing water, land and air pollution, promoting effective environmental management which focuses on Reduce, Reuse, Recycle (3R) concept, promoting community development/CSR program and protecting biodiversity.
7. Continuously sharing knowledge/awareness of and giving trainings on environment to all employees and work partners.
8. Increasing employee's active participation and awareness of environment.
9. Maintaining and archiving relevant documents related to Environment Management System.
10. Communicating environmental policies to all contractors/suppliers or partners and local community.
11. Creating continuous improvement towards the organization's objectives in every business process of each area.

Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*)

Implementation of Green Power Plant Program

PLN Indonesia Power berupaya untuk dapat beroperasi secara andal, aman dan ramah lingkungan serta berhasil meningkatkan benefit, baik terhadap ekonomi, sosial maupun lingkungan guna mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang melalui *Green Power Plant* sebagai salah satu program strategis penanggulangan perubahan iklim. Selama tahun 2023, program yang telah dilakukan dalam mewujudkan *Green Power Plant* adalah sebagai berikut:

1. Memantau, mengaudit, mengevaluasi dan membimbing pengelolaan lingkungan hidup di seluruh unit produksi.
2. Mendukung, mengawasi dan mengoordinasikan penyusunan pemenuhan kepatuhan lingkungan hidup dan dokumen *Beyond Compliance*.
3. Pelatihan dan sertifikasi di bidang lingkungan hidup untuk meningkatkan kompetensi personil lingkungan dan pemenuhan kepatuhan lingkungan hidup serta PROPER.
4. Melakukan penghijauan di lingkungan Unit Pembangkit dengan menanam berbagai jenis pohon endemik yang berdampak untuk mereduksi emisi dan meningkatkan indeks keanekaragaman hayati.
5. Memberikan penghargaan prestasi pengelolaan lingkungan pada Unit yang telah berhasil dalam pencapaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan.
6. Melakukan uji coba *co-firing* 100% dan *co-firing woodchip* di PLTU Sintang.
7. Melakukan uji coba teknologi BBJP (Bahan Bakar Jumputan Padat) untuk bahan campuran *co-firing* PLTU.
8. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal yang terkait dengan bidang lingkungan hidup.
9. Melakukan pengajuan SPE (Sertifikat Pengurangan Emisi) bagi unit pembangkit *renewable energy* PLTM Gunung Wugul dan ikut serta pada perdagangan karbon PTBAE-PU PLTU.
10. Melakukan Pengajuan dan Penerbitan *Eco-Label* tipe 3, *Environmental Product Declaration* (EPD) atas dokumen Penilaian Daur Hidup PLTGU Grati.
11. Memperoleh Sertifikasi *Green Building* untuk Unit PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Jeranjang, dan PLTGU Grati.

PLN Indonesia Power is committed to conduct reliable, safe, and environmentally-friendly operations while improving the benefits, in the aspect of economy, social and environmental in order to support business' long-term sustainability through Green Power Plant as one of strategic programs to manage climate change. Over the course of 2023, it was manifested through:

1. Monitoring, auditing, evaluating and assisting the environmental management in all production units.
2. Supporting, supervising, and coordinating environmental compliance and Beyond Compliance documents.
3. Training and certification related to environmental field to improve environment personnel's competence and to comply with the environmental regulation and PROPER.
4. Executing greening program in the Power Plant environment by planting endemic trees to reduce emissions and increase biodiversity index.
5. Rewarding Units succeeding in achieving Environmental Management Performance.
6. Conducting co-firing 100% and co-firing wood chip tests at Sintang SPP.
7. Conducting Solid Recovered Fuel technology test as a mixture for steam power plant co-firing.
8. Coordinating with external stakeholders related to environment.
9. Submitting a request for Emission Reduction Certificate for NRE-based power plant of Gunung Wugul MHPP, and participating in carbon trading for PTBAE-PU SPP.
10. Submitting and Releasing Eco-Label Type 3, Environmental Product Declaration (EPD) for Grati CCPP Life Cycle Assessment document.
11. Obtaining Green Building Certification for Banten 1 Suralaya SPP, Jeranjang SPP, and Grati CCPP.



Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan
New & Renewable Energy Power Plant Development

Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan *green energy* yang bersumber dari air, panas bumi, tenaga surya, gelombang air laut, biomassa, biofuel, hingga yang berasal dari sampah, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Sejak tahun 1995, PLN Indonesia Power telah memiliki pembangkit-pembangkit bertenaga EBT. Sampai dengan akhir tahun 2023, telah beroperasi 4 (empat) jenis pembangkit yang menggunakan EBT sebagai sumber energi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas sebesar 2.257,12 MW. PLN Indonesia Power juga terus melakukan pengembangan pembangkit EBT yang terdiri dari PLTA, PLTM, PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sepanjang tahun 2023 dengan total kapasitas 1204.9 MW.

New & renewable energy is a green energy originating from water, geothermal, solar energy, sea waves, biomass, biofuel, up to trash. They have the potential to be turned into electricity. Therefore, since 1995, PLN Indonesia Power has managed new & renewable energy-sourced power plants. Until 2023, four types of this plant were operational, namely Hydro Power Plants (HPP), Mini Hydro Power Plants (MHPP), Geothermal Power Plants (GPP), and Solar Power Plant (SoPP) with total capacity of 2,257.12 MW. PLN Indonesia Power also continues to develop EBT plants consisting of HPP, MHPP, SoPP, and Wind Power Plants (WPP) throughout 2023 with a total capacity of 1204.9 MW.

Efisiensi Energi
Energy Efficiency

Kegiatan produksi PLN Indonesia Power menggunakan energi primer sebagai bahan baku (material) yang berasal dari energi fosil dan energi baru terbarukan. Peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari mesin-mesin pembangkit, dan efisiensi dari bangunan diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

PLN Indonesia Power's production activities make use of primary energy as the raw material which sources from fossil fuel and new & renewable energy. The improvement of energy efficiency and supporting utilities, greener process, power plant engines' efficiency, and building efficiency are expected to contribute to emission reduction and cleaner environment.

Pengelolaan Energi
Energy Management

PLN Indonesia Power menghitung intensitas energi yang bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan energi Perusahaan. Rasio intensitas energi Perusahaan menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto pembangkit unit eksisting dan pembelian tenaga listrik sebagai faktor yang paling relevan. Pada tahun 2023, rasio intensitas energi Perusahaan sebesar 14.398,42 GJ/GWh, meningkat 14,78% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 12.544,82 GJ/GWh.

PLN Indonesia Power calculates energy intensity which aims to see the level of efficiency of the Company's energy use. The Company's energy intensity ratio uses the denominator of the amount of gross electricity production of existing unit generators and purchased electricity as the most relevant factor. In 2023, the Company's energy intensity ratio was 14,398.42 GJ/GWh, an increase of 14.78% compared to 2022 which amounted to 12,544.82 GJ/GWh.

Penggunaan energi fosil selama tahun 2023, sebesar 1.170.861.398 Gigajoule yang mengalami peningkatan 164,24% dari tahun 2022 yaitu sebesar 443.097.913 Gigajoule. Sedangkan jumlah konsumsi energi terbarukan di tahun 2023 adalah sebesar 41.561.705 Gigajoule yang mengalami peningkatan 51,35% dari tahun sebelumnya 27.459.781 Gigajoule. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pengalihan aset beberapa pembangkit PLN ke *subholding* PLN Indonesia Power sehingga meningkatkan jumlah konsumsi energi Perusahaan untuk memproduksi tenaga listrik.

The use of fossil energy during 2023, amounted to 1,170,861,398 Gigajoules which increased 164.24% from 2022 which amounted to 443,097,913 Gigajoules. While the amount of renewable energy consumption in 2023 amounted to 41,561,705 Gigajoules which increased 51.35% from the previous year of 27,459,781 Gigajoules. This increase was caused by the transfer of assets of several PLN power plants to the PLN Indonesia Power subholding, thus increasing the amount of energy consumption of the Company to produce electricity.

Program Peningkatan dan Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi (PPME)
Energy Efficiency Management Improvement and Fostering (PPME)

Perusahaan meningkatkan dan membudayakan *Energy Efficiency Excellence* yang diintegrasikan ke dalam IP *Transformation Strategy* melalui Program PPME atau Program *Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence* (5E) yang diintegrasikan ke dalam IP *Transformation Strategy* di seluruh Unit Pembangkit Perusahaan. Selama tahun 2023, PLN Indonesia Power berhasil melakukan efisiensi energi melalui Program PPME sebesar 4.899.725,65 Gigajoule, meningkat signifikan sebesar 39,13% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 3.521.720,41 Gigajoule, dan berhasil menghemat biaya sebesar Rp894 miliar/tahun.

The Company increases and nurtures Energy Efficiency Excellence through the Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence (5Es) Program of the PPME Program that is integrated into its IP Transformation Strategy across its Power Plant Units. Throughout 2023, PLN Indonesia Power has successfully consumed energy efficiently through PPME Program which amounts to 4,899,725.65 Gigajoule. This is a significant increase of 39,13% from 3,521,720.41. In 2022. Gigajoule, and it successfully saved an expense of Rp894 billion/year.



Pengelolaan Sumber Daya Air
Water Resources Management

Setiap unit PLN Indonesia Power melakukan upaya untuk konservasi air dengan mendaur ulang air yang telah dipakai untuk keperluan lain serta mendaur ulang air limbah dengan instalasi pengolah air agar hasilnya dapat dipakai kembali ke dalam proses. Total penggunaan air oleh Perusahaan selama tahun 2023 sebanyak 408.340.334,73 m^3, menurun 45,85% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 754.154.145,20 m^3. Selain itu, rasio intensitas air Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 0,005 m^3/kWh, menurun 46,56% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,009 m^3/kWh. Penurunan ini dapat terjadi karena terdapat program minimasi penggunaan air oleh PLN Indonesia Power akibat dari kebijakan *Holding-Subholding* PT PLN (Persero), sehingga jumlah penggunaan air Perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi bruto pembangkit yang dikelolanya. Selain itu, telah dilakukan konservasi air selama tahun 2023 sebanyak 71.642.681,34 m^3 atau 17,54% dengan pelaksanaan program daur ulang air limbah diantaranya yaitu optimalisasi *Water Treatment Plant* dengan penggantian resin Anion dan Kation, pemanfaatan air produk *Sampling Balance of Plant* untuk perkantoran dan pemadam kebakaran, optimalisasi pemakaian *Air Make Up* dengan mencegah kebocoran dan program lainnya.

Each unit in PLN Indonesia Power takes part in conserving water by recycling used water for other purposes and recycling waste water with water treatment facility to be reused in various processes. The Company's total water usage in 2023 was 408,340,334.73 m^3, decreasing 45.85% compared to 754,154,145.20 m^3 in 2022. Furthermore, the Company's water intensity ratio in 2023 amounted to 0.005 m^3/kWh, a decrease of 46.56% compared to 2022 which amounted to 0.009 m^3/kWh. This decrease was due to water usage minimizing program managed by PLN Indonesia Power, resulting from Holding-Subholding PT PLN (Limited Company) Policy where it requires the company to use more water to increase gross production of its power plants. Apart from that, water conservation was implemented over the course of 2023 and it was able to conserve 71,642,681.34 m^3 of water or 17.54% water through waste water recycle programs, including Water Treatment Plant by replacing Anion and Cation resin, utilizing water produced by Sampling Balance of Plant for offices and fire extinguishers, optimizing Make Up Water utilization by preventing leaks, and other programs.

Pengelolaan Emisi Udara
Air Emission Management

Pemantauan, pengukuran serta pengendalian pencemaran udara dilakukan secara konsisten agar seluruh emisi gas buang yang dikeluarkan oleh Unit Pembangkitan yang dikelola PLN Indonesia Power memenuhi baku mutu Lingkungan. Pengelolaan emisi udara meliputi kegiatan inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), program verifikasi dan sertifikasi data *base line* emisi GRK, inventarisasi emisi gas buang, program inisiatif penurunan emisi dan bahan perusak ozon, dan mekanisme pembangunan bersih.

Air pollution monitoring, measurement, and management are conducted consistently to ensure exhaust gas emissions of all Power Generation Units managed by PLN Indonesia Power meets environmental quality standard. Air emission management includes inventory of Greenhouse Gas Emissions (GGE), GGE base line data verification and certification program, inventory of exhaust gas emissions, emission and ozone-depleting substance (ODS) reduction initiative, and clean development mechanism.

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Inventory of Greenhouse Gas Emissions (GGE)

Inventarisasi emisi gas rumah kaca dilakukan secara rutin, terdiri dari *scope* 1 dan *scope* 2 yang meliputi seluruh emisi CO_2, CH_4, dan N_2O dari sumber konsumsi bahan bakar operasional pembangkit, bahan bakar untuk genset dan kendaraan operasional, serta konsumsi listrik oleh semua bangunan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan yang berasal dari luar pembangkit. Terkait inventarisasi emisi GRK *scope* 3 yang merupakan perhitungan emisi tidak langsung, pada tahun 2023 PLN Indonesia Power telah melakukan inventarisasi secara parsial, yakni untuk kategori "*upstream transportation and distribution*" yang dihitung dari transportasi bahan bakar yang dibeli. Selain itu, dalam rangka pengembangan inventarisasi GRK *scope* 3 akan dilakukan dengan bekerjasama dan koordinasi bersama bidang terkait dalam memperoleh kelengkapan data yang dibutuhkan oleh perhitungan emisi tersebut, serta penentuan *pilot project* verifikasi emisi untuk memastikan kesesuaian hasil inventarisasi yang telah dilakukan. Hasil penghitungan inventarisasi gas rumah kaca pada tahun 2023 adalah 69.394.393,61 ton CO_2e, menurun 5,14% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 73.152.622,84 ton CO_2e.

A regular inventory of greenhouse gas emissions is conducted, including scope 1 and scope 2 that covers all CO_2, CH_4 and N_2O emissions from generator's operational fuel consumption, generator set and operational vehicle fuel, and electricity consumption for all buildings owned and managed by the Company sourced from outside power plant. For inventory of GGE scope 3, which is an indirect emission calculation, PLN Indonesia Power in 2023 has conducted partial inventory for "upstream transportation and distribution" category that was calculated from the purchased fuel for transportation. Moreover, to develop inventory of GGE scope 3 will be conducted in collaboration and coordinating with related fields to obtain data required for such emission calculation, and determination of emission verification pilot project to ensure consistency of inventory results. The greenhouse gas emission of 2023 was measured at 69,394,393.61 tons CO_2e or 5.14% lower than that of 2022 which was at 73,152,622.84 tons CO_2e.



Program Verifikasi dan Sertifikasi Data *Base Line* Emisi GRK

GGE Base Line Data Verification and Certification Program

Program Verifikasi dan Sertifikasi Data *Base Line* Emisi GRK dilakukan dengan menghitung rasio intensitas emisi GRK menggunakan denominator total produksi bruto pembangkit thermal sebagai faktor yang paling relevan dan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar perhitungannya. Intensitas emisi GRK merupakan parameter untuk mengetahui total beban emisi GRK untuk setiap produksi tenaga listrik, agar diketahui tingkat reduksi emisi GRK. Jenis kegiatan yang termasuk dalam perhitungan timbulan emisi GRK terdiri dari *scope* 1, *scope* 2, dan *scope* 3 yang meliputi gas rumah kaca CO_2, CH_4 dan N_2O. Rasio intensitas emisi GRK Perusahaan tahun 2023 sebesar 0,817 ton CO_2e/MWh, menurun 5,22% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,862 ton CO_2e/MWh. Penurunan nilai emisi GRK, terutama pada *scope* 1, dapat terjadi karena implementasi *co-firing* untuk substitusi bahan bakar, serta perubahan pola operasi pada unit yang dikelola oleh PLN Indonesia Power dikarenakan kebutuhan unit dan sistem. Pada timbulan emisi GRK *scope* 2 terjadi peningkatan karena terdapat penambahan jumlah unit pembangkit yang dikelola oleh PLN Indonesia Power akibat dari kebijakan *Holding-Subholding* PT PLN (Persero). Pada tahun 2023 terdapat penambahan lingkup inventarisasi sehingga terjadi peningkatan pada *scope* lainnya.

This program is conducted by calculating the intensity ratio of GGE using the denominator of total gross production of all thermal power plants as the most relevant factor with 2012 as the base year of calculation. GGE intensity is a parameter used to show the total GGE for every power generation, allowing the Company to keep track of GGE reduction levels. Activities that are included in GGE calculation consist of activities in scope 1, scope 2, and scope 3 that cover greenhouse gas of CO_2, CH_4 and N_2O. In 2023, the Company's GGE intensity was measured at 0.817 tons CO_2e/MWh, 5.22% lower than that of 2022, which was 0.862 tons CO_2e/MWh. The decline of GGE value, especially in scope 1 was due to the implementation of co-firing for fuel substitution, and due to operational pattern changes in the units managed by PLN Indonesia Power to adjust with unit and system's requirements. GGE produced under scope 2 experienced an increase due to additional power plant units managed by PLN Indonesia Power resulting from Holding-Subholding PT PLN (Limited Company) policy. Inventory scope was increased in 2023, causing other scopes to follow suit.

Inventarisasi dan Intensitas Emisi Gas Buang

Inventory and Intensity of Exhaust Gas Emissions

PLN Indonesia Power telah konsisten melakukan upaya penurunan emisi melalui coal blending, implementasi Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (IPPU), pengendalian operasi, melakukan riset dan pengembangan untuk teknologi baru yang lebih bersih dan efisien, serta melakukan monitoring kualitas pengendalian emisi melalui Pemasangan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) yang terintegrasi ke Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Emisi gas buang yang dihasilkan PLN Indonesia Power pada tahun 2023 adalah sebesar 458.956.390,30 kg/tahun, meningkat 13,31% dibandingkan tahun 2022 sebesar 405.032.215,32 kg/tahun.

PLN Indonesia Power is consistently put in efforts to reduce emissions through coal blending, Air Pollution Control Installation (APCI), operational control, research on and development of new, cleaner, and more efficient technology, and monitoring emission control quality through the Installation of Continuous Emission Monitoring System (CEMS) integrated to the Continuous Industrial Emission Monitoring Information System (CIEMIC) of Ministry of Environment and Forestry (KLHK). In 2023, PLN Indonesia Power emitted 458,956,390.30 kg/year of exhaust gas, increasing by 13.31% from 405,032,215.32 kg/year in 2022.

Penghitungan intensitas beban emisi gas buang menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto seluruh pembangkit thermal sebagai faktor yang paling relevan juga dilakukan untuk melihat tingkat kontribusi beban emisi gas buang yang dihasilkan dari pembangkit Perusahaan. Jenis emisi yang termasuk dalam perhitungan terdiri dari CO, SO_2, dan NO_x. Rasio intensitas emisi gas buang PLN Indonesia Power tahun 2023 sebesar 0,0054 kg/kWh, meningkat 12,50% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,0048 kg/kWh. Peningkatan ini terjadi karena terdapat penambahan jumlah unit pembangkit yang dikelola oleh PLN Indonesia Power akibat dari kebijakan *Holding-Subholding* PT PLN (Persero), sehingga jumlah timbulan emisi gas buang Perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi bruto pembangkit yang dikelolanya.

Calculating the exhaust gas emission intensity load where the denominator is the gross electricity production of all thermal power plants as the most relevant factor is also conducted to determine the level of exhaust gas emission load contributed by the Company's power plants. The emissions measured consist of CO, SO_2 and NO_x. PLN Indonesia Power's exhaust gas emission intensity ratio in 2023 was 0,0054 kg/kWh, increasing/decreasing by 12,50% from 0.0048 kg/kWh in 2022. This increase was due to the increasing number of power plant units managed by PLN Indonesia Power, as a result of Holding-Subholding PT PLN (Limited Company) Policy. Therefore, the increasing gross production of power plant units, will also increase Company's exhaust gas emission.

Program Inisiatif Penurunan Emisi dan Bahan Perusak Ozon

Emission and Ozone-Depleting Substance (ODS) Reduction Initiative

Program inisiatif penurunan emisi juga dilakukan dimana PLN Indonesia Power berhasil mencatatkan penurunan pencemaran udara sebesar 9.543.482,66 ton CO_2e di tahun 2023, meningkat 132,48% dari tahun 2022 yaitu sebesar 4.105.087,04 ton CO_2e. Program inisiatif penurunan emisi tahun 2023 diantaranya:

- peningkatan implementasi *Co-firing* di Unit pembangkit PLTU PLN Indonesia Power.

The initiative program was also implemented by PLN Indonesia Power and it had successfully managed to reduce air pollution by 6,404,578.32 tons CO_2e over the course of 2023, increasing by 56.09% from 4,103,245.21 tons CO_2e in the previous year. The 2023 emission reduction initiative program includes:

- Improving the co-firing implementation at steam power plant Units managed by PLN Indonesia Power.



- Pengajuan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) unit PLTM Gunung Wugul berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam upaya menghadapi Nilai Ekonomi Karbon.
- Peningkatan Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLTA, PLTS, PLTMH, PLTB, PLTBio dan Pembangkit *Hybrid*.
- Implementasi program efisiensi energi.
- Program inovasi penurunan emisi lainnya.

Selain itu, PLN Indonesia Power mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam Protokol Montreal untuk melakukan perlindungan lapisan ozon (penghapusan BPO) dengan melakukan upaya dalam mengurangi emisi Bahan Perusak Ozon (BPO) antara lain :

- Tidak menggunakan bahan yang mengandung BPO/ODP pada *chiller* dengan menggunakan alternatif bahan Non CFC dan mengganti *refrigerant* AC dari R-22 yang memiliki ODP dan GWP tinggi menjadi R-32 yang lebih ramah lingkungan;
- Penetapan kebijakan dalam kontrak kerjasama dengan *vendor* untuk pemakaian pendingin ruangan dengan tidak menggunakan bahan *refrigerant* dan AC yang mengandung BPO; dan
- Penetapan kebijakan dalam penyediaan peralatan pemadam kebakaran yang bebas dari kandungan bahan perusak ozon (BPO).

- Submitting the request for Emission Reduction Certificate for MHPP Gunung Wugul Unit based on the criteria set for Carbon Economy Value.
- Increasing the New and Renewable Energy Mix through the development of HPP, SoPP, MHPP, WPP, BPP, and Hybrid Power Plant.
- Implementing the energy efficiency program.
- Other emission reduction innovation programs.

Moreover, to support the commitment of the Government of Indonesia to the Montreal Protocol which aims to protect the ozone layer (phasing out ODS), PLN Indonesia Power performs several actions such as:

- Avoiding the use of ODS in its chiller and replacing it with alternative Non-CFC substances, and switching its AC refrigerant from R-22, which is high in ODS and GWP, to R-32, which is more environmentally-friendly;
- Inserting terms and conditions that prevent the use air conditioner with refrigerant and ODS in vendor contracts; and
- Issuing policy on providing fire extinguishers that are free of ozone-depleting substances (ODS).

Mekanisme Pembangunan Bersih
Clean Development Mechanism (CDM)

Mekanisme Pembangunan Bersih atau *Clean Development Mechanism* (CDM) pada dasarnya merupakan perdagangan karbon, dimana negara berkembang dapat menjual kredit penurunan emisi kepada negara yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi.

Pada tahun 1994, sebanyak dua unit pembangkit listrik di PLTP Gunung Salak mulai beroperasi dengan kapasitas 2 x 55 MW. Tiga tahun kemudian satu unit tambahan lagi dapat dioperasikan dengan kapasitas yang sama. Pada tahun 2004, kapasitas pembangkit dinaikkan masing-masing 5 MW sehingga kapasitas menjadi 3 x 60 MW melalui program *Capacity Upgrade*, sehingga produk yang dihasilkan berupa energi listrik disalurkan ke sistem ketenagalistrikan Jawa Madura Bali dengan kapasitas total sebesar 180 MW. Proyek *capacity upgrade* Unit PLTP Gunung Salak ini diikutsertakan dalam proyek CDM melalui Program *Carbon Credit Verified Carbon Standard* (VCS). Validasi dan verifikasi pertama proyek ini selesai pada tahun 2009 dan hingga sekarang Unit PLTP Gunung Salak telah menghasilkan kredit karbon sebesar 1,603,460.00 ton VCUs.

Basically, Clean Development Mechanism (CDM) is a carbon trade, where developing countries can sell emission reduction credits to countries having the obligation to reduce emissions.

Two power generation units at Gunung Salak GPP began operating with the capacity of 2 x 55 MW in 1994. Three years afterwards, another unit with the similar capacity was added into operation. In 2004, the capacity of the plant was increased 5 times to 3 x 60 MW through the Capacity Upgrade program. By this means, the electricity produced was then tapped into the Java-Bali-Madura electricity system, resulting in a total capacity of 180 MW. This upgrade program was incorporated into CDM project through Carbon Credit Verified Carbon Standard (VCS) Program. The verification and validation of this project was completed in 2009 and to date, Gunung Salak GPP has produced carbon credits of 1,603,460.00 tons VCU.

Carbon Trading
Carbon Trading

Pada tahun 2023, 10 (sepuluh) Unit PLTU PLN Indonesia Power yang memiliki kapasitas di atas 100 MW turut ikut serta dalam program perdagangan karbon yang dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Unit peserta perdagangan karbon tersebut adalah PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Banten 2 Labuan, PLTU Banten 3 Lontar, PLTU Jabar2 Pelabuhan Ratu, PLTU Jateng 2 Adipala, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Labuhan Angin, PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih. Acuan hukum perdagangan karbon ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM no 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Dalam sistem perdagangan karbon ini,di awal tahun setiap unit peserta perdagangan karbon mendapatkan kuota emisi yang disebut dengan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi

In 2023, 10 (ten) PLN Indonesia Power SPP units with a capacity above 100 MW participated in the carbon trading program coordinated by the Directorate General of Electricity (DJK) of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). The carbon trading participating units are Suralaya SPP, Banten 1 Suralaya SPP, Banten 2 Labuan SPP, Banten 3 Lontar SPP, Jabar 2 Pelabuhan Ratu SPP, Jateng 2 Adipala SPP, Pangkalan Susu SPP, Labuhan Angin SPP, Ombilin SPP and Teluk Sirih SPP. The legal reference for carbon trading refers to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2022 concerning Procedures for Implementing Carbon Economic Value in the Electric Power Plant Subsector. In this carbon trading system, at the beginning of the year, each unit participating in carbon trading gets an emission quota called the Technical Approval of Business Actor Emission Upper Limit (PTBAE



Pelaku Usaha (PTBAE PU) yang berlaku selama setahun. Pada akhir tahun kuota emisi dibandingkan dengan realisasi emisinya, jika kuota surplus maka kuota tersebut bisa dijual, sementara yang defisit harus membeli kepada peserta yang surplus.

PU) which is valid for a year. At the end of the year, the emission quota is compared with the actual emission, if the quota is surplus, the quota can be sold, while the deficit must buy from the surplus participants.

Pembangkit PLN Indonesia Power sudah melakukan transaksi jual beli karbon sebanyak 2.428.203 ton CO_2e senilai Rp24.282.030.000,00. Dari hasil verifikasi perhitungan emisi yang dilaksanakan oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) Independen yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), secara korporat PLN Indonesia Power surplus PTBAE PU sebanyak 379.400 ton CO_2e.

The PLN Indonesia Power plant has made carbon purchase transactions of 2,428,203 tons of CO_2e worth Rp24,282,030,000.00. From the results of verification of emission calculations carried out by the Independent Validation and Verification (LVV) Institute accredited by the National Accreditation Committee (KAN), corporately PLN Indonesia Power surplus PTBAE PU as much as 379,400 tons of CO_2e.

Pengelolaan Limbah dan Efluen
Waste and Effluent Management

Limbah dan efluen menjadi salah satu output sampingan dari kegiatan produksi PLN Indonesia Power yang memiliki potensi dampak pencemaran lingkungan. Limbah yang ditimbulkan dari kegiatan pembangkit dikategorikan menjadi tiga, yaitu limbah B3 (limbah bahan beracun berbahaya), limbah non-B3 (non-bahan beracun berbahaya) dan limbah cair (efluen). Limbah tersebut kemudian dikelola dengan menerapkan sistem 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*).

Waste and effluent are one of PLN Indonesia Power operational by-products that are potentially pollute the environment. This waste is classified into three categories, namely hazardous and toxic waste, non-hazardous and non-toxic waste, and liquid waste (effluent). They are managed through 3R (Reuse, Reduce and Recycle) system.

Pengelolaan limbah B3
Hazardous and Toxic (B3) Waste Management

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi listrik dan pemeliharaan pembangkit terdiri dari pelumas bekas, aki bekas, *sludge* IPAL, resin bekas, limbah terkontaminasi B3, majun bekas dan Limbah B3 lainnya (*sludge oil*, kemasan bekas B3, filter Oil bekas, Bahan Kimia kadaluarsa, Lampu TL Bekas, Limbah Klinis). Proses dan waktu penyimpanan Limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan izin yang dimiliki oleh masing-masing unit. Pengangkutan Limbah B3 bekerja sama dengan pihak ketiga pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin, kerjasama dan sesuai ketentuan. Limbah B3 dikirim ke Pemanfaat limbah B3 yang memiliki izin dan kerjasama bersama dengan pengangkut Limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan secara internal terbatas hanya pada Unit yang telah memiliki Izin Pemanfaatan. Untuk Unit yang tidak memiliki Izin, limbah B3 dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang memiliki izin dan kerjasama.

Power generation activities and maintenance of the generators produce hazardous and toxic (B3) waste including used lubricants, used battery, installation of sludge wastewater treatment (sludge IPAL), used resins, B3 contaminated waste, used cotton waste and other B3 waste (sludge oil, B3 packaging, used Oil filter, expired Chemical Substances, Used Tube Lamp, Clinical Waste). How B3 waste is processed and how long it is stored depend on the regulations and licenses of each unit. To transport this type of waste, the Company works with a third party, a licensed waste transporter that can comply with the cooperative terms and conditions. The waste is sent to a licensed party undertaking the activity of utilizing B3 waste who works with the waste transporter. B3 waste is utilized for limited internal purposes, restricted to the Units holding Utilization Permit. For Units with no license, B3 waste is sent to a licensed party with which the Company cooperates.

Untuk limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan sendiri, dikeluarkan dari Unit Pembangkit dengan dikirim atau diangkut kepada pihak ketiga dan dikirimkan ke pengumpul atau pemanfaat limbah B3 yang memiliki izin dari KLHK untuk mengelola Limbah B3. Sisa limbah B3 yang belum terangkut atau dikeluarkan, disimpan di TPS limbah B3 dengan batas waktu penyimpanan sesuai ketentuan yang ada pada izin dan peraturan. Limbah B3 yang telah dikelola oleh pengumpul atau pemanfaat eksternal, tidak masuk dalam lingkup pemantauan Perusahaan terhadap jenis dan operasional pengolahannya.

If unable to be utilized internally, B3 waste is discharged from the Plant Units to be sent to or collected by a third party and sent to the collector or party undertaking the activity of utilizing B3 waste who possesses licenses from KLHK to manage B3 waste. The remaining waste is kept in Temporary Disposal Area (TPS) for B3 waste for a period of time pursuant to the terms stated in the license and regulations. After transfer to the collector or other external parties, the Company has no obligations to monitor what and how B3 waste is processed.

Selama tahun 2023, jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas Perusahaan sebanyak 13.322,29 ton, meningkat dari tahun 2022 yaitu sebanyak 780,84 ton dan tidak terdapat limbah B3 yang diimpor/diekspor maupun dikirim secara internasional. Peningkatan ini terjadi karena terdapat penambahan jumlah unit pembangkit yang dikelola oleh PLN Indonesia Power akibat dari kebijakan *Holding-Subholding* PT PLN (Persero), sehingga jumlah biaya pengelolaan lingkungan turut meningkat.

Throughout 2023, the amount of B3 waste produced from Company's activities was 13,322.29 tons, an increase by 780.84 tons from 2022, and there were no imported/exported or internationally delivered B3 waste. This increase was due to the increasing number of power plant units managed by PLN Indonesia Power, as a result of Holding-Subholding PT PLN (Limited Company) Policy. Therefore, the environmental management cost also increased.



Dikarenakan PLN Indonesia Power saat ini belum memiliki izin pemanfaatan Limbah B3, maka pengurangan timbulan Limbah B3 dapat dilakukan melalui reduksi penggunaan B3 dengan syarat tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2023, unit-unit Perusahaan telah melakukan pengurangan timbulan limbah B3 dengan total limbah B3 yang telah berhasil direduksi sebanyak 1.508,26 ton atau 11,32% dari total limbah B3 yang dihasilkan.

To date, PLN Indonesia Power is yet to obtain a license to utilize B3 Waste. Therefore, B2 Waste can be reduced by reducing the use of hazardous and toxic materials with the provision that the Company must comply with the applicable terms and does not pollute the environment. In 2023, the Company's units had reduced B3 Waste with the total of 1,508.26 tons of waste reduced or 11.32% of the total B3 Waste produced.

Pengelolaan Limbah Non B3 Terdaftar

Registered Non-Hazardous and Non-Toxic (Non-B3) Waste Management

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan termuat dalam Lampiran XIV bahwa limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) dari Proses pembakaran Batubara pada fasilitas PLTU tercantum sebagai Limbah Non B3 terdaftar. Hal ini menyebabkan pengelolaan FABA dapat dilakukan sebagai Limbah non B3 terdaftar dengan terlebih dahulu melakukan pengajuan Dokumen Rincian Teknis (DRT) Penyimpanan dan Pemanfaatan FABA ke KLHK yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Kemudian, DRT FABA tersebut diintegrasikan ke Dokumen Persetujuan Lingkungan.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 on Environment Protection and Management, and as stated in the Attachment XIV that Fly Ash and Bottom Ash (FABA) waste from Coal burning process at steam power plant facilities are classified as registered Non-B3 Waste. This caused FABA are managed as registered non-B2 Waste by previously submitting Technical Details Documents (DRT) for FABA Storing and Utilization to KLHK. This process was done in 2022. Further, such document is integrated into Environmental Approval Document.

Dikarenakan FABA PLTU PLN Indonesia Power telah berstatus Limbah Non B3 terdaftar, maka pemanfaatan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dengan syarat tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2023, unit-unit PLTU PLN Indonesia Power telah melakukan pemanfaatan limbah FABA secara masif baik untuk di internal maupun di luar unit melalui kerjasama dengan pihak eksternal. Adapun produk pemanfaatan FABA di Tahun 2023 sebagai berikut Paving, Batako, Genteng Beton, Kansteen, U-Ditch, Bata Merah, Bata Ringan, Hebel dan sejenisnya, *Subgrade* (Stabilisasi timbunan pilihan), *Subbase* (Lapisan pondasi bawah), Perkerasan Beton *(Ready Mix*), Beton Cor Struktur, Beton Cor non Struktur, Mortar / Perekat, Bahan Pupuk, Substitusi Bahan Baku Semen, Jalan Beton, *Tetrapod*, *Reuse* BA, Penetralisir Air Asam Tambang, dengan total limbah FABA yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.772.864,37 ton atau 116,72% dari total limbah FABA yang dihasilkan, dan meningkat signifikan 1.548,18% dari tahun 2022 yaitu sebanyak 107.564,89 ton. Peningkatan pemanfaatan terjadi karena terdapat penambahan jumlah unit pembangkit yang dikelola oleh PLN Indonesia Power akibat dari kebijakan *Holding-Subholding* PT PLN (Persero) dan pemanfaatan deposit FABA pada TPS tahun sebelumnya.

As a registered Non-B3 Waste, FABA produced by PLN Indonesia Power steam power plants can be utilized internally and externally provided that such utilization must comply with the applicable terms and it does not pollute the environment. In 2023, steam power plants managed by PLN Indonesia Power have massively utilized FABA waste both internally and externally in collaboration with external parties. The FABA utilization in 2023 has produced paving blocks, bricks, concrete roof tiles, curbing, U-ditch, red clay brick, lightweight brick, aircrete blocks and other similar types, Subgrade (selected embankment stabilizer), sub-base (base course layer), concrete pavement (ready mix), structural concrete, non-structural concrete, mortar, material for fertilizers, substitution for concrete raw material, concrete road, tetrapod, reused BA, Mining Acid water neutralizers, with the total of utilized FABA amounted to 1,772,864.37 tons or 116,72% of the total FABA produced. This number also saw significant increase by 1,548.18% compared to 107,564.89 tons in 2022. This utilization increase was due to the increasing number of power plant units managed by PLN Indonesia Power, as a result of Holding-Subholding PT PLN (Limited Company) Policy and the utilization of FABA stored at the temporary disposal area (TPS) from the previous year.

Pengelolaan Limbah Non B3

Non-Hazardous and Non-Toxic (Non-B3) Waste Management

Limbah non B3 dari kegiatan operasional Perusahaan meliputi sampah organik dan non-organik. PLN Indonesia Power melakukan pemisahan sampah organik dan non-organik, dimana sampah organik akan dilanjutkan ke proses pengomposan dan sampah non organik dikirim ke pihak ketiga atau mitra Perusahaan untuk diolah menjadi cinderamata atau kerajinan tangan yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Untuk limbah non B3 yang sudah tidak dapat diolah atau dimanfaatkan, selanjutnya dikelola melalui kerjasama dengan Dinas Kebersihan setempat untuk di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Non-B3 Waste produced from Company's operations include organic and non-organic waste. PLN Indonesia Power separates organic waste from inorganic one and sends the organic waste for composting process and the inorganic waste to the third party or partners to be recycled into souvenirs or handcraft that offer economic benefits for the community. On the other hand, non-B3 residual waste that is difficult to be processed or utilized is managed together with the local Sanitary Agency before being disposed in the Final Processing Place (TPA).



Selain itu, jumlah limbah pada non B3 yang dihasilkan dari aktivitas Perusahaan sebanyak 1.052,80 ton, berhasil menurun 70,79% dari tahun 2022 yaitu sebanyak 3.604,45 ton. Dari limbah yang dihasilkan tersebut, PLN Indonesia Power berhasil melakukan daur ulang sampah organik untuk pembuatan kompos dan daur ulang sampah non organik untuk kerajinan tangan sebanyak 239,67 ton atau 22,77% dari total limbah padat non B3.

Moreover, the amount of non-B3 waste generated from the Company's activities was 1,052.80 tons, successfully decreasing 70.79% from 2022 which was 3,604.45 tons. From the said waste produced, PLN Indonesia Power also successfully recycled organic waste for compost and inorganic waste for handcrafts with a total of 239.67 tons or 22.77% of the total solid non-B3 waste.

Pengelolaan Efluen (Air Limbah)

Effluent (Liquid Waste) Management

Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikelola dan dianalisa secara periodik untuk memastikan pemenuhan ketaatan terhadap baku mutu pengelolaan limbah cair sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga *Thermal* dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pada tahun 2023, hasil pengukuran kualitas air limbah PLN Indonesia Power menunjukan bahwa seluruh unit 100% telah memenuhi baku mutu kualitas air limbah dari seluruh parameter yang diukur. Total volume air limbah PLN Indonesia Power selama tahun 2023 sebanyak 3.337.606.990,00 m^3, meningkat 66,33% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 2.006.636.075,00 m^3. Peningkatan ini terjadi karena terdapat penambahan jumlah unit pembangkit yang dikelola oleh PLN Indonesia Power akibat dari kebijakan *Holding-Subholding* PT PLN (Persero), sehingga jumlah timbulan air limbah PT PLN Indonesia Power meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi bruto pembangkit yang dikelolanya.

The liquid waste from production activities is periodically managed and analyzed to ensure compliance with the quality standard of liquid waste management as stipulated in Minister of Environment Regulation Number 8 of 2009 on Waste Water Quality Standard for Business or Thermal Power Plants and Minister of Environment Regulation Number 68 of 2016 on Domestic Liquid Waste Quality Standard. In 2023, assessment results showed that all of the Company's units met 100% parameters of measurement for waste water quality standard. PLN Indonesia Power's total waste water in 2023 was 3,337,606,990.00 m^3, a 66,33% increase compared to 2,006,636,075.00 m^3 in 2022. This was due to the increasing number of power plant units managed by PLN Indonesia Power, as a result of Holding-Subholding PT PLN (Limited Company) Policy. Therefore, the increasing gross production of power plant units, will also increase waste water produced by the Company.

Penanganan Tumpahan

Spill Management

Bahan bakar batubara yang digunakan PLN Indonesia Power dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diangkut menggunakan jasa pihak ketiga. PLN Indonesia Power mensyaratkan kepada pihak ketiga pemilik kapal agar kapal tersebut dilengkapi dengan alat/tempat penampungan tumpahan (*spillage plate*) pada tepi kapal. Tercatat tidak terjadi tumpahan batubara maupun minyak selama tahun 2023.

PLN Indonesia Power uses coal as a fuel source to operate Steam Power Plants. The coals are transported by a third party. PLN Indonesia Power required the third party who owns the ship to install a spillage plate on the edge of the ship. Over the course 2023 there was no spillage of coal or oil recorded.

Selain itu, PLN Indonesia Power melakukan pengendalian kualitas siklus uap air pembangkit, pengolahan air baku dan pengolahan air limbah juga menggunakan bahan kimia diantaranya NaOH, HCl, *Chlorin*, *Hidrazine* dan *Phospat*/TSP. PLN Indonesia Power melakukan prosedur pengelolaan bahan kimia sebagai upaya pencegahan atas bahaya dan pencemaran lingkungan yang dapat terjadi. Dalam penggunaan bahan kimia telah dilengkapi dengan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) yang diantaranya berisi keterangan identifikasi dan komposisi; pengenalan bahaya; tata cara penanggulangan kebakaran dan tumpahan; penanganan dan penyimpanan dan tata cara perlindungan diri. Selama tahun 2023, tercatat tidak terjadi tumpahan bahan kimia yang digunakan di seluruh unit pembangkit Perusahaan.

Moreover, PLN Indonesia Power controls the steam cycle quality for the power plants, and the standard water processing as well as waste water management also used chemical substances such as NaOH, HCl, Chlorine, Hydrazine and Phosphate/TSP. PLN Indonesia Power applies procedures to manage chemical substances in order to prevent the hazard and risk of polluting the environment. Prior to using chemical substances, the Company refers to Material Safety Data Sheet (MSDS) that contains information on identification and ingredients; hazard introduction; how to manage fire and spill; management and storing as well as self-protection procedure. In 2023, the was no record of any spillage of chemical substances used in all company's power plants.

Pelestarian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Preservation of the Environment and Biodiversity

Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan bagian tanggung jawab Perusahaan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan. PLN Indonesia Power berupaya mengambil peran yang signifikan dalam menjaga dan melindungi lingkungan serta keanekaragaman hayati. Perusahaan melakukan beberapa program diantaranya *Eco-office*, program Hijaunesia Power dan program Kawan Hijaunesia Power dalam upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

This is the Company's commitment to realize sustainability. PLN Indonesia Power have put in efforts to take significant role in protecting and preserving the environment and biodiversity. The Company executed several programs including Eco-office, Hijaunesia Power program, and Kawan Hijaunesia Power program to preserve the environment and biodiversity.



Eco-office

Eco-office

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML), PLN Indonesia Power melaksanakan Program *Eco-office*, atau kantor peduli lingkungan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Kegiatan *Eco-office*, diantaranya pengelolaan sampah, penggunaan aplikasi untuk penghematan kertas, pemasangan *eco-sign* pada saklar lampu, keran air, lokasi strategis dan ruang publik lainnya di sekitar lingkungan dan Unit Pembangkitan.

As a part of Environmental Management System (SML) implementation, PLN Indonesia Power executed an Eco-office program, which was an environmentally friendly office that supports the effort to create a clean, comfortable working environment. The activities comprise waste management, use of digital applications to save papers, eco-sign installation on light switches, water taps, strategic locations and other public spaces around the office and Power Generation Units.

Implementasi *Eco-office* di Unit Pembangkit PLN Indonesia Power

Implementation of Eco-office at Power Generation Units

Pengelolaan sampah yang terpilah sesuai dengan jenis sampahnya.

Reduksi limbah yang tidak dapat didaur ulang, seperti dengan program reduksi limbah kemasan kantin dengan penggunaan kemasan/alat makan yang dapat digunakan kembali.

Sort waste according to their classifications.

Reduce waste that can't be recycled, such as through canteen packaging waste reduction by utilizing packages/utensils that are reusable.

Digitalisasi kegiatan yang sebelumnya membutuhkan kertas untuk penghematan kertas.

Digitisation of activities that previously required paper for paper savings.

Pemasangan *eco-sign* untuk penghematan tisu di toilet dan pengehematan air pada saklar lampu, keran air, lokasi strategis dan ruang publik lainnya di sekitar lingkungan sebagai bentuk dan ajakan kepedulian terhadap lingkungan.

Install eco-sign to save tissues in the toilet and save water on light switches, water taps, other strategic locations and public spaces around the office as a form of invitation to care for the environment.

Transformasi kendaraan operasional berbahan bakar fuel menjadi kendaraan berbahan bakar listrik.

Transform operational vehicles from the ones using fossil fuel to electric transportation.

Hijaunesia Power

Hijaunesia Power

Inisiatif dalam mendukung pelestarian lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia direalisasikan melalui program Hijaunesia Power. PLN Indonesia Power melalui Unit Pembangkit bersama dengan Balai Konservasi, Taman Nasional, Dinas Lingkungan Hidup atau instansi setempat dan terkait melakukan konservasi dan restorasi untuk menjaga populasi flora dan fauna yang dilindungi.

This is an initiative to support the preservation of environment and conservation of biodiversity in Indonesia. PLN Indonesia Power through its Power Generation Unit in collaboration with Conservation Center, National Park, Environmental Service or local and relevant agencies implement conservation and restoration activities to manage the population of protected plants and animals.

Metodologi, wilayah/kawasan dan sumber daya konservasi dikoordinasikan serta ditetapkan bersama dengan pihak terkait yang telah dilakukan kerjasama dalam konservasi KEHATI. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 5 (lima) unit bisnis Perusahaan yang berdekatan dengan kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, yaitu PLTP Gunung Salak - UBP Kamojang, PLTG Gilimanuk - UBP Bali, UBP Banten 2 Labuan, UBP Grati, dan PLTP Lahendong - UBP Kamojang. Dari lima unit bisnis

Conservation methodology, area, and resources are coordinated and determined together with related parties participated in KEHATI conservation cooperation program. To the end of 2023, there were 5 (five) business units adjacent to protected areas or areas with high biodiversity value, and these are Gunung Salak GPP - Kamojang Power GBU, Gilimanuk GTPP - Bali GBU, Banten 2 Labuan GBU, Grati GBU, and Lahendong GPP - Kamojang GBU. One of those five business units, Gunung Salak GPP - Kamojang GBU is located within Gunung

tersebut, salah satu diantaranya yakni PLTP Gunung Salak - UBP Kamojang berada di dalam kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi yaitu di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. PLN Indonesia Power melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Balai Konservasi, Taman Nasional, Dinas Lingkungan Hidup atau instansi setempat yang terkait dalam melakukan konservasi dan restorasi KEHATI yang menjadi program masing masing unit pembangkit dengan total luas area konservasi yang dilakukan PLN Indonesia Power mencapai 357.958 ha.

Halimun Salak National Park, which is a protected area or area with high biodiversity value. PLN Indonesia Power through its respective power generation unit work together in partnership with Conservation Center, National Park, Environmental Services or related local agencies in implementing KEHATI conservation and restoration with the total conservation area of 357,958 ha.

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN Indonesia Power telah melakukan perlindungan dan konservasi guna memberikan dampak peningkatan populasi flora dan fauna endemik di sekitar pembangkit. PLN Indonesia Power telah mengonservasi 41 ekor Elang Jawa, dimana jumlah tersebut sebanyak 5,85% dari total populasi yang ada di Indonesia dan mengonservasi 80 ekor Badak Jawa (100% dari total populasi). Dari program perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh seluruh unit pembangkit Perusahaan, memberikan dampak signifikan positif dengan menghasilkan indeks keanekaragaman hayati sebesar 2,77 di tahun 2023.

To the end of 2023, PLN Indonesia Power had implemented protection and conservation activities in order to support the impact of the increasing endemic plants and animals' population around power generation unit. PLN Indonesia Power has conserved 41 Java Eagle, which is 5.85% of the total population in Indonesia and conserved 80 Javan Rhinoceros (100% of the total population). Through its protection and conservation of biodiversity program that is implement by all power generation units, the Company provided significant positive impact resulting in biodiversity index value of 2.77 in 2023.

KaWan Hijaunesia Power

KaWan Hijaunesia Power

PLN Indonesia Power bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gerakan Pramuka bersinergi dalam Program KaWan Hijaunesia Power sebagai upaya menjaga dan melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup. Program ini merupakan penggabungan program KaWan GAUL (Saka Kalpataru Wanabakti Gerakan Aksi untuk Lingkungan) dan program Hijaunesia Power.

Together with the Ministry of Environment and Forestry and Gerakan Pramuka, along with Kawan Hijaunesia Power Program, PLN Indonesia Power realize their effort to protect and preserve the ecosystem and environment. It was an incorporation of KaWan GAUL (Saka Kalpataru Wanabakti Gerakan Aksi untuk Lingkungan/Kalpataru and Wanabakti Work Units in Action for Environment) program and Hijaunesia Power program.

Inisiasi program ini dilakukan dalam rangka memengaruhi kaum muda dan masyarakat umum dalam berpartisipasi secara progresif dan kreatif dalam kegiatan kepramukaan khususnya di bidang lingkungan melalui penanaman pohon di sekitar Unit Pembangkit Perusahaan. Selama tahun 2023, PLN Indonesia Power melaksanakan Program KaWan Hijaunesia Power dengan melakukan penanaman pohon sebanyak 56.441 pohon. Berdasarkan Canada's National *Environmental Agency*, rata-rata produksi oksigen per-pohon adalah 260 *pound* atau 130 kg/tahun, sehingga dengan penanaman pohon yang dilakukan, PLN Indonesia Power berhasil menghasilkan Oksigen (O_2) sebesar 7.337.330 kg/tahun.

This program was initiated to influence young generation and public to progressively and creatively participate in scout activities, mainly in environment through tree planting around the Company's Power Plants area. Over the course of 2023, PLN Indonesia Power had implemented KaWan Hijaunesia Power Program through planting 56,441 trees. According to Canada's National Environmental Agency, the average oxygen production per tree is 260 pound or 130 kg/year, and thus by planting new trees PLN Indonesia Power managed to produce 7,337,330 kg of oxygen per year.

Manfaat Pengelolaan Lingkungan bagi *Stakeholder*, Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Environmental Management Benefits for Stakeholders, Company, and Sustainable Development

Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan manfaat bersama bagi *Stakeholders* dan Perusahaan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Corporate social responsibility for environment serves as a means to create mutual benefits for stakeholders and the Company, and support sustainable development.

1. **Manfaat Pengelolaan Lingkungan untuk Perusahaan**
   a. Mengurangi dampak lingkungan dari rantai pasokan atau mengembangkan standar industri yang berkelanjutan
   b. Mengurangi deposit FABA yang dihasilkan proses pembangkit sesuai dengan regulasi dan peraturan perusahaan PLN (Persero)
   c. Menciptakan hubungan positif dengan media yang dapat membantu menyampaikan pencapaian dan komitmen perusahaan terhadap keanekaragaman hayati kepada audiens yang lebih luas.
   d. Pencapaian kinerja pengelolaan Lingkungan dengan perolehan PROPER Emas dan PROPER Hijau, serta penghargaan *Green Company* memberikan bukti bahwa komitmen Pengelolaan Lingkungan PLN Indonesia Power sangat serius dan sejalan dengan Misi perusahaan yang selalu bersahabat dengan Lingkungan.
   e. Melalui pengelolaan Lingkungan yang benar dan efektif, secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap peningkatan program efisiensi perusahaan.

2. **Manfaat Pengelolaan Lingkungan bagi *Stakeholders***
   a. Menjadi kontribusi dalam upaya *sustainable* menjaga kelestarian lingkungan dan menuju *green power plant* bagi pemerintah dan Indonesia.
   b. Program CSR turut menjadi tolak ukur dalam meningkatkan *skill* masyarakat serta mampu memberikan peluang lapangan kerja di unit pembangkit sekitar.
   c. Program pemanfaatan FABA sebagai bahan baku bangunan mampu menghasilkan produk dengan kualitas baik untuk membantu pertumbuhan pembangunan daerah sekitar.
   d. Program pemanfaatan FABA sebagai campuran pupuk organik membantu masyarakat tani di sekitar pembangkit dalam penyediaan pupuk.

3. **Manfaat Pengelolaan Lingkungan pada Pembangunan Keberlanjutan**
   a. Program Efisiensi Energi melalui implementasi PPME dan penggunaan EBT sebagai upaya Peningkatan Manajemen Energi untuk mendukung SDGs No.7 (energi bersih), No.8 (pekerjaan layak) dan No.13 (perubahan Iklim).
   b. Pengurangan Emisi dengan Uji coba Biomassa, konversi bahan bakar, penggantian bahan perusak ozon dan program CDM mendukung dalam mengatasi dampak perubahan iklim sesuai SDGs No.13 (perubahan Iklim) dan SDGs No.3 (Kesehatan yang baik).
   c. Upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya air melalui program 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*) untuk melindungi sumberdaya air sesuai SDGs No.6 (Akses Air bersih).
   d. Pengelolaan Limbah Cair, Limbah B3 dan Limbah Non B3 melalui program pemanfaatan atau 3R merupakan langkah mitigasi terhadap dampak pencemaran ekosistem Air (SDGs No.14), pencemaran ekosistem darat (SDGs No.15) kesehatan dan keselamatan (SDGs No.3).
   e. Program perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui program Kawan Hijaunesia Power, konservasi flora dan fauna endemik, memberikan manfaat dalam melindungi serta meningkatkan ekosistem Air (SDGs No.14) dan Ekosistem Darat (SDGs No.15).

1. **Benefits of Environmental Management for the Company**
   a. Reducing the environmental impact from supply chain or developing a sustainable industrial standard.
   b. Reducing FABA deposits from power plant activities through PLN (limited company) regulations.
   c. Developing positive relations with media that helps with communicating company's achievement and commitments on preserving biodiversity to wider audience.
   d. Through its environmental management practice, PLN Indonesia Power received PROPER Gold and PROPER Green rating, and it also received Green Company award. This represents company's serious commitment to environment management and mission to preserve the environment.
   e. Improvement in the Company's efficiency due to proper and effective environmental management, either directly or indirectly.

2. **Benefits of Environmental Management for Stakeholders**
   a. Contributes to the sustainability effort in preserving the environment and in achieving green power plant for government and Indonesia.
   b. The CSR Program becomes a benchmark in improving community's skills and capacity, and it helps create job opportunities around the power plant areas.
   c. FABA utilization program helps create high quality raw material for constructions that contributes to the development of areas around power plants.
   d. FABA utilization program provides material for making organic fertilizers, which helps local farmers around power plant areas.

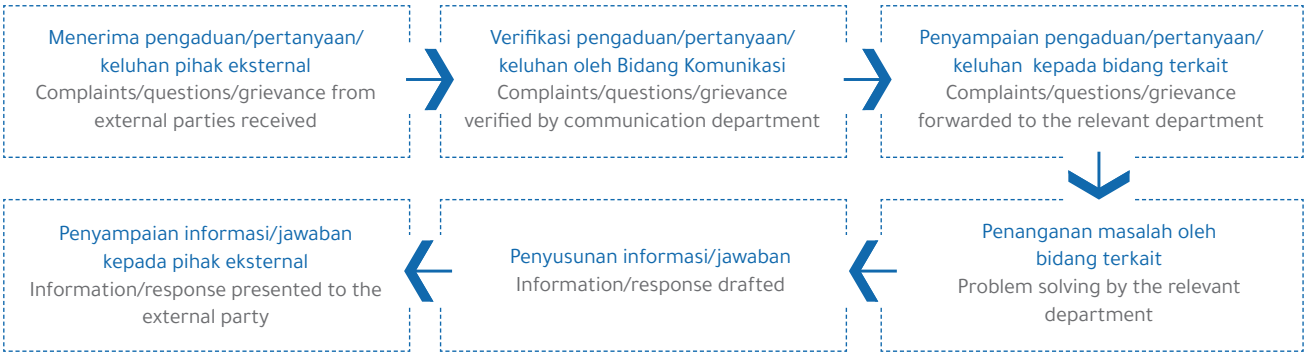
3. **Benefits of Environmental Management for Sustainability Development**
   a. Energy Efficiency Program through implementation of PPME and utilization of new & renewable energy sources aims at Improving Management of Energy and promoting SDGs No.7 (clean energy), No.8 (decent work) and No.13 (climate change).
   b. Reduced Emission through Biomass trial, fuel conversion, replacement of ODS and implementation of CDM program to help tackle climate change impacts in accordance with SDGs No. 13 (Climate Change) and SDGs No.3 (Good Health and Well-being).
   c. Water resources management and conservation through 3R (reduce, reuse, recycle) program to protect water resources in accordance with SDGs No.6 (Access to Clean Water).
   d. Liquid Waste, B3 Waste and Non-B3 Waste Management through utilization or 3R program to mitigate the impacts of pollution in the aquatic ecosystem (SDGs No.14) and land ecosystem (SDGs No.15), and ensure health and safety (SDGs No.3).
   e. Biodiversity protection and conservation program through Kawan Hijaunesia Power and conservation of endemic plants and animals to protect and improve Aquatic Ecosystem (SDGs No.14) and Land Ecosystem (SDGs No.15).



Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan
Mechanism of Complaint about Environmental Issue

Pengaduan terkait masalah lingkungan yang mungkin timbul sebagai dampak dari kegiatan operasional Perusahaan dapat disampaikan kepada Unit Pembangkit terkait yang ditujukan kepada General Manager masing-masing unit sesuai dengan mekanisme pelaporan pengaduan dan penanganan konflik sebagai berikut:

Complaints related to environmental issues that may occur as consequences of Company's operations can be directed to the related Power Generation Unit addressed to the General Manager of respective unit, in accordance with complaint report and conflict management procedure as follows:



Selama tahun 2023, PLN Indonesia Power tidak menerima pengaduan terkait lingkungan dari masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lainnya sehingga Perusahaan tidak menerima denda ataupun sanksi non moneter yang berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

PLN Indonesia Power did not receive any complaint throughout 2023 related to environmental issues from the communities and other stakeholders, thus the Company did not get any fine or non-monetary sanction related to non-compliance with the laws and regulations regarding environment.

Biaya Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Expense

PLN Indonesia Power merealisasikan biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan tahun 2023 sebesar Rp219.229 juta, yang terdiri dari biaya pengendalian pencemaran air Rp21.819 juta, biaya pengendalian pencemaran udara Rp43.160 juta, biaya pengelolaan limbah B3 Rp27.056 juta, biaya pengelolaan limbah Non B3 Rp117.743 juta, dan biaya pelestarian KEHATI Rp9.448 juta.

PLN Indonesia Power spent Rp219,229 million for environmental management and preservation expenses. This expenses include water pollution management expenses of Rp21,819 million, air pollution management expenses of Rp43,160 million, hazardous and toxic (B3) waste management expenses of 27,056 million, non-hazardous and toxic (non-B3) waste management of Rp117,743 million, and KEHATI preservation expenses of Rp9,448 million.

Kinerja Sosial Aspek Pelanggan
Social Performance Related to Customers

Perusahaan berupaya untuk senantiasa memenuhi harapan pelanggan serta berinteraksi secara etis dan bertanggung jawab tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata namun juga memastikan terbagunnya hubungan baik dan terciptanya manfaat bersama dalam jangka panjang. Energi listrik yang dihasilkan Perusahaan pada dasarnya tidak disalurkan secara langsung kepada pengguna akhir, melainkan melalui jaringan transmisi kepada PT PLN (Persero). Sehingga dapat dikatakan bahwa PT PLN (Persero) merupakan pembeli tunggal daya listrik yang diproduksi oleh PLN Indonesia Power.

The Company strives to fulfill customer's expectation and interact with them in an ethical and responsible manner not only for profit but also to ensure the positive relationship and mutual benefit in the long run. The electricity that PLN Indonesia Power produces does not channel directly to the customer, but goes through the transmission lines of PT PLN (Persero). In other words, PT PLN (Persero) is the sole buyer of the Company.

Investasi sosial salah satunya diimplementasikan melalui inisiatif program tanggung jawab sosial terkait aspek pelanggan. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen implementasi kebijakan fokus pelanggan dalam upaya mendukung PT PLN (Persero) untuk menjaga kualitas; menjalankan tanggung Jawab pengembangan produk berkelanjutan; perlindungan pelanggan serta memberikan layanan yang setara kepada pelanggan. Sebagai salah satu upaya dalam mendukung komitmen tersebut, PLN Indonesia Power telah merumuskan kebijakan internal Perusahaan terkait pelanggan antara lain Keputusan Direksi Nomor 053.K/010/IP/2021 tentang Kebijakan Fokus Pelanggan PT Indonesia Power.

The Company's social investment is implemented through the CSR program on customers. It is a part of the customer-focused policy to support PT PLN (Persero) to maintain quality, assume the responsibility of developing sustainable products, protect the customers, and provide equal service for the customers. To support such commitments, the Company established the internal policy related to customers, i.e. Decree the Board of Directors No. 053.K/010/IP/2021 on Customer-Focused Policy of PT Indonesia Power.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Aspek Pelanggan

Corporate Social Responsibility Related to Customers

Kolaborasi dengan pelanggan merupakan upaya menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan produk, pengambilan keputusan, atau inisiatif keberlanjutan dapat memperkuat hubungan antara Perusahaan dan pelanggan. Lingkup kegiatan PLN Indonesia Power terkait tanggung jawab sosial aspek pelanggan mencakup upaya mendengarkan suara pelanggan di unit pembangkit serta memenuhi ekspektasi pelanggan melalui kegiatan Forum *Sharing* Pembangkit; *Customer Gathering*; Survei Kepuasan Pelanggan; serta penyediaan informasi produk dan sarana komunikasi pelanggan.

Collaboration with customers is a way to give added value for both parties. By involving customers in product development, decision making, or sustainability initiative can reinforce the relationship between the Company and customers. The scope of Company in this matter covers listening to the voice of the customer in the power generation units and meeting their expectation through Sharing forum on power generation unit, Customer gathering, Customer satisfaction survey, provision of information about products and customer relations communication media.

Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2022 dan Menyusun *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan 2023

Evaluation of 2022 Customer Satisfaction Survey Results and Preparation of OFI Action Plan for 2023 Customer Satisfaction.

Workshop Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan pada 13 - 15 Maret 2023 secara secara *offline* di Gedung Dago Inspirasi, PLTA Bengkok dengan peserta dari seluruh Unit Pembangkit PT PLN Indonesia Power, baik PGU, POMU, OMU, MSU dan Divisi terkait di Head Office serta mengundang perwakilan Pelanggan dari PLN (Persero) UIP2B JAMALI, PLN (Persero) UIP3B Sumatera, PLN (Persero) UIP3B Kalimantan, dan PLN (Persero) Sulawesi dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2022;
2. Penyusunan *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan oleh masing-masing Unit terhadap prioritas perbaikan;
3. Informasi dari pelanggan terkait kinerja Pembangkitan PLN Indonesia Power dalam mensuplai sistem kelistrikan di Indonesia;
4. Penandatanganan Komitmen Bersama *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan Tahun 2023 oleh seluruh perwakilan Unit, Divisi di *Head Office* yang terkait dan perwakilan pihak Pelanggan.

The Evaluation Customer Satisfaction Survey Results was presented on an offline workshop held on March 13-15, 2023 in Gedung Dago Inspirasi, Bengkok HPP. The attendees came from all Power Generation Units of PT PLN Indonesia Power, including PGU, POMU, OMU, MSU, and corresponding Divisions of the Head Office. Other parties invited were the customers from PLN (Persero) UIP2B JAMALI, PLN (Persero) UIP3B Sumatera, PLN (Persero) UIP3B Kalimantan, and PLN (Persero) Sulawesi. Below are the details of the event:

1. Evaluation of 2022 Customer Satisfaction Survey Results;
2. Preparation of the OFI Action Plan for Customer Satisfaction by each Unit towards priority improvements;
3. Information from the customers related to the power generation performance of PLN Indonesia Power in supplying the national system of electricity;
4. Signing of the Joint Commitment on OFI Action Plan for Customer Satisfaction in 2023 by all Unit representatives, relevant Divisions at the Head Office and the Customers.

Action Plan OFI Kepuasan Pelanggan setiap Unit dengan KPI per item selanjutnya akan dievaluasi oleh DIVCMR I dan DIVCMR II untuk di*update* secara rutin dalam Aplikasi Pengelolaan Pelanggan (APPGAN) setiap triwulan.

OFI Action Plan for Customer Satisfaction of every unit with the KPI per item will late be evaluated by DIVCMR I and DIVCMR II to be updated quarterly in the Customer Management Application (APPGAN).

Program Mendengarkan Suara Pelanggan di Unit Pembangkit

Listening to Voice of Customers in the Power Generation Unit

Program mendengarkan suara pelanggan di unit pembangkit sepanjang tahun 2023 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Forum *Sharing* Pembangkit, yang diselenggarakan secara *virtual* oleh beberapa Unit PLN Indonesia Power diantaranya :

Listening to voice of customers in the power generation unit program throughout 2023 was performed through the following activities:

1. Forum Sharing Pembangkit, held virtually by several Power Generation Units:



a. Priok PGU dengan PLN UP2B Jakarta & Banten tanggal 18 Januari 2023;
b. Mrica PGU dengan PLN UP2B Jateng & DIY tanggal 04 April 2023; dan
c. Grati PGU dengan PLN UP2B Jatim dan PLN UIP2B JAMALI tanggal 18 Agustus 2023.

2. Kunjungan dan Sosialisasi ke Pelanggan oleh beberapa Unit diantaranya :
   a. Bali PGU bersama dengan PLN UP2B Bali tanggal 18 Januari 2023; dan
   b. Semarang PGU dengan PLN UP2B Jateng & DIY tanggal 28 Juli 2023.
3. *Customer Gathering*, yang diselenggarakan oleh beberapa Unit, diantaranya :
   a. Adipala PGU bersama dengan PLN UIP2B JAMALI tanggal 10 - 11 Juni 2023; dan
   b. Mrica PGU berkolaborasi dengan Semarang PGU bersama dengan PLN UP2B Jateng & DIY tanggal 14 - 15 Juli 2023.
4. Olahraga dan latih tanding sepakbola bersama pelanggan yang dilaksanakan oleh Semarang PGU dengan PLN UP2B Jateng & DIY tanggal 21 Februari 2023, 09 Mei 2023, dan 13 Juni 2023.

a. Priok PGU and PLN UP2B Jakarta & Banten on January 18, 2023;
b. Mrica PGU with PLN UP2B Central Java & Yogyakarta Special Region on April 04, 2023;
c. Grati PGU and PLN UP2B East Java and PLN UIP2B Jamali on August 18, 2023.

2. Visitation and information dissemination to the customers by the following units:
   a. Bali PGU with PLN UP2B Bali on January 18, 2023; and
   b. Semarang PGU with PLN UP2B Central Java & Yogyakarta Special Region on July 28, 2023.
3. Customer Gathering held by the following units:
   a. Adipala PGU with PLN UIP2B JAMALI on January 10-11, 2023; and
   b. Mrica PGU in collaboration with Semarang PGU and PLN UP2B Central Java & Yogyakarta Special Region on July 14-15, 2023.
4. Sports events and football sparring with the customers by Semarang PGU and PLN UP2B Central Java & Yogyakarta Special Region on February 21, 2023, May 9, 2023, and June 13, 2023.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2023

Implementation of 2023 Customer Satisfaction Survey

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2023 telah dilakukan pada tanggal 1 September - 13 Oktober 2023 kepada seluruh Pelanggan PT PLN Indonesia Power yang dilakukan oleh pihak Surveyor Independen. Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan dengan 2 (dua) metode Survei, yaitu:

1. Metode Kuantitatif, melalui kuesioner yang sifatnya *close* dan *open question*.
2. Metode Kualitatif, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Indepth Interview*.

Nilai indeks kepuasan pelanggan untuk pembangkit eksisting tahun 2023 diperoleh sebesar 88,34% meningkat 1,11% dari tahun sebelumnya dengan nilai indeks sebesar 87,23% dengan tingkat pencapaian target sebesar 106%. Sedangkan untuk nilai indeks kepuasan pelanggan dari pembangkit Jasa O&M IP tahun 2023 sebesar 85,78% meningkat 3,31% dari tahun sebelumnya dengan nilai indeks sebesar 82,47%% dengan tingkat pencapaian target sebesar 103%. Nilai Kepuasan Pelanggan baik pelanggan eksisting maupun jasa O&M, keduanya termasuk dalam kategori sangat memuaskan.

2023 Customer Satisfaction Survey was carried out on September 1-October 13, 2023 for all customers of the Company by an independent surveyor. The survey was completed using 2 (two) methods, namely:

1. Quantitative Method, through a questionnaire comprising closed- and open-ended questions.
2. Qualitative Method, through Focus Group Discussion (FGD) and In-Depth Interview.

The customer satisfaction index for the existing power plant in 2023 was 88.34%, increasing by 1.11% compared to the previous year (87.23%) with the target achievement rate of 106%. As for the customer satisfaction index for the IP O&M Service power plant in 2023 was 85.78%, increasing by 3.31% compared to the previous year (82.47%) with the target achievement rate of 103%. Those indexes fall under the category of 'very good'.

Workshop Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2023

Workshop on Presentation of 2023 Customer Satisfaction Survey Results

Workshop Penyampaian Hasil *Survey* Kepuasan, Ketidakpuasan dan Keterikatan Pelanggan PT PLN Indonesia Power Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 7 - 9 November 2023 yang berlokasi PLTA Bengkok, Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Pembangkit PLN IP (PGU, POMU, OMU, MSU serta UPDK/UPK) dan dari *Head Office* serta dari pihak surveyor independen (PT Sucofindo), dengan jumlah peserta sekitar 70 orang. Pada agenda ini juga disampaikan bahwa hasil Nilai Keterikatan Pelanggan sebesar 94,90% lebih baik dari tahun sebelumnya.

The 2023 Customer Satisfaction Survey Results was presented in a workshop on November 07-09, 2023 in Bengkok HPP, Bandung. The event was attended by 70 people, comprising all representatives of Power Generation Units of PLN IP (PGU, POMU, OMU, MSU and PGCIU/PGIU), Head Office, and the independent surveyor (PT Sucofindo). The Customer Engagement Score was 94.90% which increased compared with the previous year.

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk yang Setara kepada Pelanggan

Commitment to Providing Equal Products for the Customers

Komitmen PLN Indonesia Power untuk memberikan layanan atas produk yang setara kepada pelanggan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan. Perusahaan berupaya memenuhi hak dan harapan pelanggan melalui program dukungan pelanggan serta menyediakan akses dan menjamin keakuratan informasi produk yang ditawarkan. Untuk menjaga kualitas dan mutu produk yang ditawarkan, Perusahaan selalu menerima saran dan masukan untuk peningkatan mutu serta memperhatikan dan menanggapi dengan baik keluhan pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Company is committed to provide equal products for the Customers as a part of CSR. It strives to ensure the rights and meet the expectations of the customers through customer support program and provides access and accurate information of the products offered. Therefore, the Company is open to all suggestions and feedbacks for quality improvement as well as receives and responds to complaints accordingly in compliance with the applicable provisions.

Upaya Perusahaan dalam Memenuhi Hak dan Harapan Pelanggan

Company's Measure in Ensuring Customers' Rights and Meeting Their Expectations

PLN Indonesia Power telah menyusun langkah-langkah terkait dukungan pelanggan sebagai bagian dari upaya memenuhi ekspektasi serta hak-hak pelanggan sebagai berikut:

PLN Indonesia Power prepared measures related to customer support as a part to ensure customers' rights and meet their expectations as follows:

Upaya Memenuhi Hak dan Harapan Pelanggan
Measures in Ensuring Customers' Rights and Meeting Their Expectations

Uraian Description			Proses Memenuhi Dukungan Pelanggan Process of Fulfilling Customer's Support	Proses Menyebarluaskan Persyaratan Dukungan Pelanggan ke Pihak Terkait Process of Disseminating Terms of Customer's Support to Related Parties
Energi Listrik Electrical Energy	*Grid* (550 kV dan 150 kV) Grid (550 kV and 150 kV)	Kesiapan 24 Jam *Operator Control Room* dan ETMC 24 Hours Readiness of Control Room Operator and ETMC	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
		Optimalisasi penggunaan aplikasi *realtime* kesiapan pembangkit Optimization of application utilization on generator's realtime readiness	- Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan *response time* mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for each application in accordance with their job description. - Determining Response Time accordingly to Standard Operation Procedure. - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure
	Embedded (20 kV)	Kesiapan *Operator Control Room* Readiness of Control Room Operator	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control



Uraian Description		Proses Memenuhi Dukungan Pelanggan Process of Fulfilling Customer's Support	Proses Menyebarluaskan Persyaratan Dukungan Pelanggan ke Pihak Terkait Process of Disseminating Terms of Customer's Support to Related Parties
Jasa O&M O&M Service	Kesiapan *Operator Control Room* dan ETMC Readiness of Control Room Operator and ETMC	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
	Optimalisasi penggunaan aplikasi *realtime* kesiapan pembangkit Optimization of application utilization on generator's realtime readiness	- Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan r*esponse time* mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for each application in accordance with their job description. - Determining Response Time accordingly to Standard Operation Procedure. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure

Informasi Produk dan Sarana Komunikasi Pelanggan

Product Information and Customer Relations Communication Media

Ketersediaan dan kemudahan akses informasi terkait produk bagi pelanggan sangat penting dalam menarik minat pelanggan dan membangun kepercayaan. Informasi Produk dapat diakses melalui *website* PLN Indonesia Power dengan alamat www.plnindonesiapower.co.id dan laporan tahunan. Selain itu, pelanggan dapat berinteraksi secara langsung untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran/masukan dan tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh PLN Indonesia Power. Media komunikasi hubungan dengan pelanggan yang digunakan oleh PLN Indonesia Power adalah sebagai berikut :

The availability and accessibility of product information are important to grow the customers' interest and build trust. Product information is available in the PLN Indonesia Power website (www.plnindonesiapower.co.id) and annual report. Customers can also interact directly to submit any complaints, questions, suggestions/input and remark of satisfaction on products and services provided by the Company. Below are the customer relations communication media used by PLN Indonesia Power:

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
PLN melalui PLN UI P2B (Energi Listrik 500kV dan 150kV) **PLN via PLN UI P2B (500 kV and 150 kV electricity)**		
Telepon/WhatsApp • 021-526 7666 • Ext. 2222/3333: Operasional *Realtime* (ETMC) • Ext. 2222/3333: Realisasi Kinerja Pembangkit **HDKP (Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit)** • WA *Group*-ROM P2B-IP: komunikasi ROM • *Handphone* ETMC 0811 937 740 : Kondisi Pembangkit dan Operasional • *Hotline* Unit Pembangkit : Naik turun beban, *Start-Stop* Pembangkit, Kondisi Pembangkit **Phone/WhatsApp Number** • 021-526 7666 • Ext. 2222/3333: Real-time Operations (ETMC) • Ext. 2222/3333: Power Plant Performance reali-zation **HDKP (Power Plant Unreadiness Daily Declaration)** • WA Group-ROM P2B-IP: ROM communication • ETMC phone number 0811937740: Power Plant Condition and Operations • Power Generation Unit Hotline: Load fluctuation, power plant start-stop, plant conditions	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan respon time. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for phone calls. - Setting up response time. - Establishing etiquette to receive and answer calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	- Menetapkan instruksi kerja (IPM, IK). - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction (IPM, IK). - Disseminating relevant information to the related employees.

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
***Website*/Aplikasi** • Aplikasi HDKS (Rapsodi): Naik turun beban dan *Start-Stop* Pembangkit • Aplikasi HDKP IKP: Ketidaksiapan Pembangkit • Aplikasi GAIS: Kinerja Pembangkit. • Aplikasi JBOS Plan: Perencanaan Pembangkit • Aplikasi ProNIA: kondisi *realtime* sistem pembangkitan • Aplikasi Neraca Energi: kWh Energi **Website/Application** • HDKS app (Rapsodi): Load fluctuation and Plant Start-Stop • HDKP IKP app: Power Plant Unreadiness • GAIS app: Power Plant Performance • JBOS Plan app: Power Plant Planning • ProNIA app: the real-time status of the genera-tion system • Neraca Energi app: Energy kWh	- Menetapkan PIC untuk aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan respon time mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for every application in line with job descriptions - Determining response time referring to procedures - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	- Menetapkan instruksi kerja (IPM, IK). - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction (IPM, IK). - Disseminating relevant information to related employees.
E-mail etmc@plnindonesiapower.co.id Perencanaan Operasi, Operasional *Realtime* **E-mail** etmc@plnindonesiapower.co.id Operation Plan, Real-time Operations	- Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH). - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining plant readiness (ROB, ROM, and ROH). - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	- Menetapkan instruksi kerja (IPM, IK). - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant in-formation to related employees.
Surat PT PLN Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, 12950 *Settlement*/Kontrak **Mail** PT PLN Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, 12950 Settlement/Contract	- Menetapkan kontrak *Single Price*. - Menetapkan JTF. - Menetapkan perencanaan penjualan. - Menetapkan kondisi status pembangkit. - Determining Single Price contract. - Determining JTF. - Determining sales plan. - Determining power plant status.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
Rapat Rapat Alokasi Energi (RAE) dan Rapat koordinasi pembahasan Kontrak dan Settlement **Meeting** Energy Allocation Meeting (RAE) and coordination meeting to discuss Contract and Settlement	- Menetapkan hasil evaluasi energi bulan yang lalu dan perencanaan bulan depan. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining the results of pre-ceding months` energy evaluation and planning for the following month - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant in-formation to related employees.
PLN melalui PLN Distribusi (energi listrik ≤20kV) PLN Via PLN Distribusi (electricity ≤20 kV)		
Telepon • 021-526 7666 • Handphone ETMC: 0811 937 740 • Telepon *direct* ETMC: 021-522 9813 **Phone** • 021-526 7666 • ETMC Cellular phone: 0811 937 740 • Direct call to ETMC: 021-522 9813	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan respon *time*. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Determining PIC for phone calls. - Setting up response time. - Establishing etiquette to receive and answer calls.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
E-mail *E-mail* kepada Bidang CMR II/ personal *E-mail* : *Settlement*/ kontrak **E-mail** E-mail to DIV CMR I/personal e-mail: Settlement/Contract	- Menetapkan kesiapan pembangkit. - Determining plant readiness.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
Surat PT PLN Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, 12950 *Settlement*/Kontrak **Mail** PT PLN Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, 12950 Settlement/Contract	- Menetapkan kontrak *Single Price*. - Menetapkan JTF. - Menetapkan kondisi status pembangkit. - Determining Single Price contract. - Determining JTF. - Determining power plant status.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant in-formation to related employees.
Rapat Rapat koordinasi pembahasan kontrak dan *settlement* **Meeting** Coordination meeting to discuss contract and settlement	- Menetapkan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kontrak/*settlement*. - Determining planning and evaluation of contract/settlement implementation.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
PLN Pelanggan Jasa O&M PLN via O&M Services Customers		
Telepon • 021-526 7666 : Koordinasi, Progres, Kajian • Telepon personal : Koordinasi, Progres, Kajian **Phone** • 021-526 7666: Coordination, Progress, Review • Personal phone: Coordination, Progress, Review	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan respon *time*. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Determining PIC for phone calls. - Setting up response time. - Establishing etiquette to receive and answer calls.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan rapat internal Jasa O&M. - Determining work instruction. - Holding internal O&M Services meeting.
E-mail *E-mail* ke Bidang CMR I dan Bidang CMR II / *personal e-mail* **E-mail** E-mail to Division CMR I and Division CMR II /personal e-mail	- Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH). - Determining plant readiness (ROB, ROM, and ROH).	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan rapat internal Jasa O&M. - Determining work instruction. - Holding internal O&M Services meeting.
Rapat Rapat Jasa O&M **Meeting** O&M Service Meeting	- Melakukan hasil evaluasi kontrak yang masih berjalan. - Conducting evaluation of ongoing contract.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan rapat internal Jasa O&M. - Determining work instruction. - Holding internal O&M Services meeting.

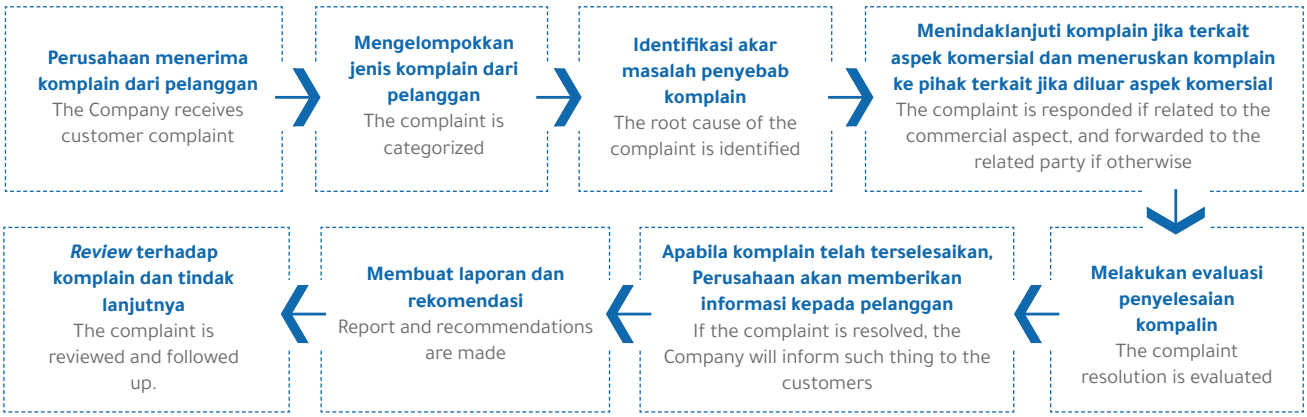
Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Pelanggan

Customer Complaint Filing and Handling Mechanism

PLN Indonesia Power telah menyiapkan perangkat penunjang pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan dengan menyediakan mekanisme penanganan pengaduan pelanggan sebagai upaya perlindungan pelanggan dan pemberian layanan yang optimal.

PLN Indonesia Power has prepared an instrument to support the Company in assuming its responsibility, i.e. the customer complaint handling as a form of customer protection and optimum service for them.

Upaya Memenuhi Hak dan Harapan Pelanggan
Upaya Memenuhi Hak dan Harapan Pelanggan



Selama tahun 2023, tidak terdapat pengaduan pelanggan baik dari aspek kesehatan dan keselamatan terkait dengan pendistribusian listrik kepada pelanggan dan pengaduan mengenai privasi pelanggan maupun aspek ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran.

In 2023, no customer complaints were made about the health and safety aspects related to power distribution to customers, their privacy, or noncompliance with relevant regulations on provision of product information and marketing communications.

Penanganan pengaduan pelanggan dikelola dan dilaksanakan oleh Divisi di *Head Office* PLN Indonesia Power, yaitu Bidang Contract Management and Customer Relations I (CMR I) untuk Pelanggan Unit Pembangkit di bawah Direktorat Operasi Pembangkit Batubara dan Bidang Contract Management and Customer Relations II (CMR II) Pelanggan Unit Pembangkit di bawah Direktorat Operasi Pembangkit Gas, serta dimonitor secara otomatis dalam Aplikasi Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit (HDKP) oleh operator ETMC. Hasilnya dikompilasi dan dievaluasi oleh Vice President of Contract Management and Customer Relations I dan Vice President of Contract Management and Customer Relations II serta Unit Pembangkit/Divisi di *Head Office* yang terkait, untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan kemudian ditindaklanjuti.

At the Head Office, customer complaints are handled by the Division of Contract Management and Customer Relations I (CMR I) for Generation Unit Customers under Coal-Fired Generator Operation Directorate and the Division of Contract Management and Customer Relations II (CMR II) for Generation Unit Customers under Gas-Fired Generator Operation Directorate. They are automatically monitored by Power Plant Unreadiness Daily Declaration (HDKP) application by ETMC operator. The result is compiled and evaluated by the Vice President of Contract Management and Customer Relations I and Vice President of Contract Management and Customer Relations II as well as Power Generation Unit/Division at the corresponding Head Office to come up with solutions and be followed up.

Tanggung Jawab Pengembangan Produk Berkelanjutan
Developmental Responsibility of Sustainable Products

Perusahaan terus melakukan pengembangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan listrik serta meningkatkan kualitas layanan. PLN Indonesia Power berupaya memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan berkelanjutan melalui produksi yang bertanggung jawab serta upaya dalam memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan dan berkelanjutan. Selain itu dalam jangka panjang, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan Perusahaan serta secara khusus mendukung kebijakan Fokus Pelanggan PLN (Persero).

The Company supports development to maintain the availability of electricity and improve service quality. PLN Indonesia Power strives to present direct and indirect positive impacts on sustainable development through responsible production and ensuring access to affordable, reliable, and sustainable energy. Moreover, in the long run, the CSR implementation is expected to be able to maintain the Company's sustainability and specifically uphold the customer-focused policy.

Pengembangan dan Inovasi Produk Berkelanjutan
Development and Innovation of Sustainable products

Pengembangan produk berkelanjutan terus dilakukan PLN Indonesia Power untuk mendukung kualitas pelayanan PT PLN (Persero). Pengembangan dan inovasi produk berkelanjutan serta pengembangan pelayanan pelanggan yang dilakukan PLN Indonesia Power pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PLN Indonesia Power always strives to develop sustainable products for the sake of service quality. Below are the developments and innovations of sustainable product and service related to customer service by PLN Indonesia Power in 2023:



1. Menambahkan media komunikasi pelanggan dengan aplikasi messenger sebagai media komunikasi privat dengan Pelanggan serta sarana untuk menginformasikan laporan-laporan terkait kinerja unit pembangkit listrik perusahaan secara rutin.
2. Menambahkan media Komunikasi berupa JWOT sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan yang dapat merekam suara pembicaraan yang terjadi saat itu.
3. Menambahkan aplikasi niaga sebagai sarana untuk *monitoring* kinerja pembangkit Perusahaan secara *realtime* yang dapat diakses oleh pelanggan berbasis *web bases*.
4. Membuat aplikasi pengelolaan pelanggan yang menyimpan database pelanggan PLN Indonesia Power.

1. Addition of messenger application as a private communication medium with customers as well as a means to inform reports on the performance of the Company's power plant units on a regular basis.
2. Adding JWOT communication medium as a means of communication with customers. This service features voice recording of ongoing conversations.
3. Adding a web-based commercial application for real-time monitoring of the Company's power plants.
4. Creating customer management application containing database of PLN Indonesia Power's customers.

Dampak dan Keamanan Produk bagi Pelanggan
Impacts and Security of Products for Customers

Kualitas layanan termasuk keandalan pasokan listrik, waktu pemulihan dalam kasus gangguan atau pemadaman listrik serta tingkat stabilitas tegangan akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat atau pengguna akhir terhadap kinerja PT PLN (Persero). Secara umum, baik langsung maupun tidak langsung produk yang dihasilkan Perusahaan cukup berdampak pada ketersediaan akses terhadap energi listrik bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, seperti penerangan dan pengoperasian mesin dan perangkat elektronik lainnya. Gangguan dalam pasokan listrik atau penggunaan peralatan listrik yang buruk dapat meningkatkan risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera lainnya bagi masyarakat atau pengguna akhir. Namun disisi lain, Pasokan listrik yang stabil dan terjangkau dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendukung kegiatan industri, komersial, dan rumah tangga, serta memfasilitasi investasi dan inovasi teknologi.

The reliability of electricity supply, recovery time in moments of outage or blackout, voltage stability or other service qualities will directly impact the customer satisfaction or end-users with PT PLN (Persero). In general, the Company's products is quite impactful directly and indirectly on the accessibility to electricity for public in their daily life, such as lighting and machinery/other electronic device operation. Electricity outage or poor use of electrical equipment may increase the risk of fire, electric shock, or other injuries suffered by people or end users. On the other side, stable and affordable electricity may drive the economic growth as it will support industrial, commercial, and household activities as well as facilitate investment and technology innovation.

Risiko keselamatan dan kesehatan bagi pelanggan PLN Indonesia Power relatif kecil mengingat PT PLN (Persero) merupakan pembeli tunggal daya listrik yang diproduksi oleh PLN Indonesia Power karena energi listrik yang dihasilkan Perusahaan pada dasarnya tidak disalurkan secara langsung kepada pengguna akhir, melainkan melalui jaringan transmisi kepada PT PLN (Persero). Sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya. Namun demikian, PLN Indonesia Power senantiasa memastikan kegiatan operasionalnya sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan terkait keselamatan dan kesehatan pelanggan. PLN Indonesia Power telah memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang salah satu aspek utamanya terkait *Customer Focus* sebagai bentuk komitmen Perusahaan terhadap pelanggan. Untuk senantiasa mengelola dampak atas produk dan layanan Perusahaan, PLN Indonesia Power berkomitmen untuk senantiasa memberikan perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan pelanggan atas produk dan layanan Perusahaan. PLN Indonesia Power juga berkomitmen untuk senantiasa menunjukkan transparansi atas penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran. Komitmen ini diwujudkan dengan memastikan bahwa:

Safety and health risks faced by the customer is relatively small considering that PT PLN (Persero) is the sole buyer of the electricity that PLN Indonesia Power produces. Therefore, it does not channel directly to the customer, but goes through the transmission lines of PT PLN (Persero). As a result, there is no information about the recalled products and the underlying reason. However, the Company always ensures that its operation aligns with the procedure standards and regulations related to safety and health. PLN Indonesia Power currently holds ISO 9001:2015 whose main aspects among others include Customer Focus as a fulfillment of the Company's commitment to customers. To manage the impact of its products and services, the Company is committed to always providing protection for the health, safety and security of the customer from such products and services. The Company also intend to promote transparency about the product information and marketing communication by ensuring that:

1. Seratus persen (100%) unit pembangkit PLN Indonesia Power telah memenuhi kepatuhan (*compliance*) dan melampaui kepatuhan (*beyond compliance*) pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
2. Seratus persen (100%) atau seluruh unit pembangkit PLN Indonesia Power berhasil tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh pegawai Perusahaan maupun kontraktor/mitra (*zero accident*) di seluruh unit Perusahaan;

1. All power generation units of PLN Indonesia Power have obtained 'compliance' and 'beyond compliance' ranks in Assessment Program of Corporate Performance Rank in Environmental Management (PROPER) from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK);
2. All power generation units of PLN Indonesia PLN Indonesia Power have achieved zero accident as there is no occupational accident taking place involving employees or contractors/partners;



3. Dalam memastikan operasi unit pembangkit berjalan dengan aman dan andal, setiap unit pembangkit PLN Indonesia Power telah memenuhi Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan; serta
4. Melakukan evaluasi atas kinerja pembangkit Perusahaan secara berkala.

3. To ensure safe and reliable operation of the Company's power generation units, each of them has obtained Certification of Operational Eligibility (SLO) as referred to in the Energy and Human Resource Minister Regulation Number 38 of 2018 on the Procedure of Accreditation and Electricity Certification; and
4. Performance evaluation on every generator is performed regularly.

Biaya Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pelanggan
Cost of Corporate Social Responsibility Related to Customers

PLN Indonesia Power telah merealisasikan biaya tanggung jawab sosial pelanggan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp830,31 Juta yang meliputi program mendengarkan suara pelanggan di unit pembangkit serta rangkaian kegiatan Survei Pelanggan mulai dari evaluasi, pelaksanaan dan tindak lanjutnya.

PLN Indonesia Power has realized Rp830.31 million for CSR related to customers throughout 2023, among others for listening to voice of customers in the power generation units and a series of customer survey, from evaluation, implementation, and follow-ups.

Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan
Social Performance Related to Employment

Keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi penting untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan karir untuk menopang estafet pengelolaan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, PLN Indonesia Power perlu memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial melalui upah yang adil dan layak; kesetaraan *gender* dan kesempatan bagi semua golongan masyarakat untuk berkarir di Perusahaan; perlindungan kesehatan dan keselamatan yang memadai; serta sistem pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar tenaga kerja dapat terus mengembangkan keterampilan.

Work-life balance is a key to maintain productivity and career for a long-term business management. Therefore, PLN Indonesia Power needs to ensure social welfare and justice through fair and decent wage, gender equality and equal opportunity for everyone to work in the Company, adequate health and safety protection and continuous education and training system for the employees to develop their skills.

Perusahaan telah memiliki kerangka kebijakan untuk mendukung pelaksanaan inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan yang mengacu diantaranya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Inisiatif keberlanjutan PLN Indonesia Power terkait aspek ketenagakerjaan merupakan komitmen Perusahaan untuk kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, dukungan atas partisipasi kerja kaum perempuan; pemenuhan hak pegawai atas fasilitas sosial khusus; mewujudkan *zero accident*, membangun kesiagaan tanggap bencana di seluruh unit pembangkit, menciptakan unit kerja (pembangkit dan non-pembangkit) yang bersih guna mengurangi potensi kecelakaan kerja serta patuh terhadap hukum dan regulasi.

The Company has set out a policy framework to support sustainability on employment by referring to Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety and Law No. 13 of 2013 on Employment. This initiative is a commitment to uphold equal opportunity without discrimination, women empowerment, fulfillment of special social facilities, zero accident, disaster response preparedness in all power generation units, clean work unit (plants and non-plants) to minimize occupational accident potential, and to comply with legal and regulatory requirements.

Bagi PLN Indonesia Power pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan manfaat bersama bagi Perusahaan, pegawai dan *stakeholder* lainnya; dalam jangka panjang dapat menjaga keberlanjutan Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham; kepatuhan pada aspek ketenagakerjaan serta efisiensi dengan penurunan biaya pengelolaan ketenagakerjaan. Manfaat kegiatan tanggung jawab perusahaan terhadap Ketenagakerjaan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepuasan dan *Engagement* Pegawai.
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

For PLN Indonesia Power, CSR on employment is a means to provide mutual benefits for the Company, employees, and other stakeholders. Ultimately, it will maintain sustainability as a corporate accountability to the shareholders, compliance with the employment aspect, and efficiency of employment management cost. The benefits of corporate responsibility activities to employment include the following:

1. Increased employee satisfaction and engagement.
2. Compliance with employment regulations.



3. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai, tamu, dan mitra kerja.
4. Terlindunginya aset produksi dari kerusakan yang merugikan perusahaan.
5. Mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Selain itu, kegiatan tanggung jawab sosial ketenagakerjaan diharapkan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan berkelanjutan melalui produksi yang bertanggung jawab, kesetaraan *gender* dan lapangan pekerjaan yang layak.

3. Safe and healthy work environment for employees, guests, and business partners.
4. Protection of production assets from damages that harm the Company,
5. Minimum loss due to occupational accidents or diseases.

Furthermore, the CSR activities related to employment are expected to have both direct and indirect positive impacts for sustainable development through responsible production, gender equality, and decent work.

Kesetaraan dan Kesempatan Kerja
Equality and Equal Job Opportunity

Perusahaan menjunjung prinsip kesetaraan dan kesempatan kerja dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan maju dalam karir tanpa diskriminasi berdasarkan pada ras, jenis kelamin, agama, suku, atau faktor lainnya yang tidak relevan dengan kemampuan atau kinerja kerja. PLN Indonesia Power berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi yang dimiliki sepenuhnya. Proses pengelolaan ketenagakerjaan, mulai dari komposisi pegawai, proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir hingga pada pemenuhan remunerasi/kesejahteraan dan hak-hak pegawai lainnya haru mengedepankan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama kepada semua pegawai.

The Company upholds equality to ensure fair access and equal job opportunity for everyone to secure a job and move forward in career without discrimination based on race, gender, religion, ethnicity, or other factors irrelevant with work skill or performance. PLN Indonesia Power tries to promote an inclusive and supportive work environment for everyone to develop and unlock their full potential. The employment management, e.g. Employee composition, recruitment, competency development, performance review, career development, remuneration/ wellbeing, and other employee rights must prioritize equality and fairness principle for all employees.

PLN Indonesia Power mewujudkan prinsip kesetaraan dan kesempatan kerja salah satunya dengan memberikan dukungan atas partisipasi kerja kaum perempuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2023 beserta amandemennya, Pasal 82 terkait Cuti Bersalin, Pasal 84 terkait Cuti Haid dan Pasal 86 tentang Ijin Karena Kepentingan didukung juga dengan Surat Keputusan Direksi No. 229.K/010/IP/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai. Selain itu, Perusahaan juga memberikan fasilitas sosial khusus sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2023 beserta amandemennya pasal 92 terkait sarana pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ruang laktasi bagi Ibu menyusui serta pasal 100 terkait alat rehabilitasi diantaranya berupa alat bantu dengar, alat penyangga cacat tubuh, kacamata dan alat pengganti penunjang fungsi anggota badan manusia (*Prothesa*) yang merupakan wujud komitmen PLN Indonesia Power dalam memenuhi hak Pegawai.

PLN Indonesia Power embodies the principle of equality and employment opportunities, one of which is by providing support for women's work participation which is regulated in the 2022-2023 Collective Labor Agreement (PKB) and its amendments, Article 82 related to Maternity Leave, Article 84 related to Menstrual Leave and Article 86 concerning Permits Due to Interests supported also by the Decree of the Board of Directors No. 229.K/010/IP/2022 dated December 15, 2022 concerning Employee Reward Management System. In addition, the Company also provides special social facilities as stipulated in the 2022-2023 Collective Labor Agreement (PKB) and its amendments article 92 related to health care facilities including the provision of lactation rooms for breastfeeding mothers and article 100 related to rehabilitation tools including hearing aids, body disability support devices, glasses and replacement tools to support the function of human limbs (Prothesa) which are a form of PLN Indonesia Power's commitment in fulfilling employee rights.

Diskriminasi merupakan pelanggaran atas kode etik Perusahaan. Selama tahun 2023, tidak terdapat laporan mengenai perlakukan diskriminasi yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal di seluruh operasional Perusahaan terkait suku, ras, *gender*, agama, opini politik, latar belakang sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya.

Discrimination is a violation against the Company's code of conduct. Throughout 2023, no reports were made on discrimination in any form that involved internal or external stakeholders in all Company's operation.



Pemenuhan Ketentuan Terkait Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa
Commitment on Child Labor and Forced Labor

Pekerja anak dan kerja paksa menjadi masih menjadi masalah sosial yang serius dan telah menjadi isu global tak terkecuali di Indonesia. Pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja pada kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut sehingga membahayakan anak, melukai anak, mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan. Kerja paksa merupakan semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk orang tersebut tidak mengajukan diri secara sukarela.

Child labor and forced labor remain serious social problems and have become a global issue, including in Indonesia. Child labor includes all children who work in conditions accompanying or inherent to the work that harm the child, injure the child, exploit the child, or deprive the child of education. Forced labor is any work or service that is imposed on any person under the menace of any penalty and for which the person has not volunteered.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Perusahaan dilarang mempekerjakan anak dan tenaga kerja paksa. PLN Indonesia Power berkomitmen untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan terkait dengan pekerja anak dan kerja paksa dalam melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mematuhi semua Undang-undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan dan HAM. Pada tahun 2023, tidak terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan Perusahaan seperti perburuhan, kebebasan berserikat, pekerja anak dan kerja paksa.

As stated in the law on employment, those types of labor are prohibited. PLN Indonesia Power is committed to complying with the applicable regulations related to child labor and forced labor to protect human rights and conforming to all laws and regulation related to employment and human rights. In 2023, there were no violations related to employment and human rights, such as labor, freedom of association, child labor, and forced labor.

Pemenuhan atas Upah Minimum Regional
Fulfillment of regional minimum wages

PLN Indonesia Power memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial dapat terpenuhi melalui upah yang adil dan layak. Remunerasi diberikan berupa kompensasi dan manfaat pegawai sesuai dengan kebijakan terkait sistem remunerasi yang tercantum di dalam PKB 2022-2023 beserta amandemennya Bab VI Pasal 55 tentang Dasar Penghargaan. PLN Indonesia Power telah memenuhi ketentuan terkait upah minimum regional dengan rata-rata rasio gaji pegawai baru dibandingkan upah minimum regional wilayah operasional Perusahaan sebesar 3,67 dengan rasio terkecil sebesar 1,98 untuk pegawai tetap, rata-rata rasio sebesar 2,32 dengan rasio terkecil sebesar 1,31 untuk pegawai tidak tetap serta rata-rata rasio sebesar 1,24 dengan rasio terkecil sebesar 1,00 untuk pegawai alih daya.

PLN Indonesia Power ensures social welfare and justice through fair and decent wage. Remuneration for employees is provided by means of compensations and benefits as stated in the remuneration system elaborated in 2022-2023 CLA and the amendment thereto, Chapter VI Article 55 on the Basis of Reward PLN Indonesia Power has fulfilled the provision on regional minimum wage with the average ratio of new employee's salary to minimum wage of 3.67 with the smallest ratio of 1.98 for permanent employees, an average ratio of 2.32 with the smallest ratio of 1.31 for non-permanent employees and an average ratio of 1.24 with the smallest ratio of 1.00 for outsourced employees.

Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development

Keberlanjutan Perusahaan sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Pegawai merupakan agen perubahan di tingkat operasional yang memiliki dampak langsung pada kinerja keberlanjutan Perusahaan. Sehingga perlu memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip keberlanjutan dan kemampuan untuk menjalankan operasional secara optimal. Program pengembangan bagi pegawai PLN Indonesia Power dikelola IP Academy. Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 terkait pengembangan kompetensi pegawai meliputi Program Pembelajaran Prajabatan, Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi, Program Pembelajaran Kepemimpinan, Program Pembelajaran Inisiatif Stratejik Korporat, Program Pembelajaran Penunjang dan Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti. Uraian lebih rinci terkait pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai dijelaskan dalam Bab Tinjauan Pendukung Bisnis pada Laporan Tahunan ini.

Corporate sustainability depends heavily on the human capital. Employees are the agent of change at the operational level, directly impacting the corporate sustainability performance. Therefore, a comprehension of sustainability and operability principles is required. The employee development program at the Company is managed by IP Academy. Throughout 2023, the program related to this matter comprised Pre-service Learning Program, Professional and Certification Learning Program, Leadership Learning Program, Corporate Strategic Initiative Learning Program, Supporting Learning Program and Post-Employment Preparation Education and Training. Detailed information on these programs is elaborated on Business Support Review section.



Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Occupational Health and Safety Program

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan bagian penting dari upaya organisasi untuk mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. PLN Indonesia Power memiliki kebijakan resmi yang sebagai komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan, menyediakan pelatihan, dan melindungi karyawan dari bahaya potensial. Program strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Occupational health and safety program is a key campaign by the Company to create a convenient and safe work environment. PLN Indonesia Power is committed to this by complying with the regulation, providing trainings, and protecting employees from potential hazard. The following strategic program were held in 2023:

Program Strategis Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Strategic Program on Occupational Health and Safety.

Rencana Kegiatan Plan	Realisasi Kegiatan Realization	Dampak Kegiatan (dampak kuantitatif) Impact (quantitative impact)
***Review* Kebijakan K3** **HSE Policy Review**	Kebijakan K3 Korporat di*review* atau ditambahkan guna mendukung program strategis K3 perusahaan dan pelaksanaan aturan pemerintah berupa: 1. Peraturan Direksi No. 0004.P/DIR/2023 tentang Implementasi Transformasi Budaya K3. 2. Peraturan Direksi No. 0069.P/DIR/2023 tentang Implementasi *Safety Observation* dan Kewenangan *Stop Work Authority* (SWA). 3. Peraturan Direksi No. 0094.P/DIR/2023 tentang Pedoman Penggunaan Alat Pelindung Diri. 4. Keputusan Direksi No. 0576.K/DIR/2023 tentang Struktur Organisasi SMK2 (Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan). The Company's HSE policy is reviewed or complemented to support the strategic HSE program and implementation of the following regulation: 1. The Board of Directors Regulation No. 0004.P/DIR/2023 on the Implementation of HSE Culture Transformation. 2. The Board of Directors Regulation No. 0069.P/DIR/2023 on the Implementation o Safety Observation and Stop Work Authority (SWA). 3. The Board of Directors Regulation No. 0094.P/DIR/2023 on the Guidelines on the Use of Personal Protective Equipment (PPE). 4. Decree of the Board of Directors No. 0576.K/DIR/2023 on HSE Management System Organizational Structure.	1. Mendukung tercapainya *Zero Accident* perusahaan pada tahun 2023. 2. Standarisasi penggunaan APD di perusahaan. 3. Mendukung Implementasi SMK2 pada masing-masing unit kerja. 1. Zero accident was achieved in 2023. 2. PPE use was standardized in the Company. 3. HSE management system was implemented in each work unit.
Kegiatan Bulan K3 Nasional **National HSE Month Activities**	Peringatan Bulan K3 Nasional dilaksanakan dari tanggal 12 Januari - 12 Februari 2023 dengan rangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan *awareness* terkait K3 baik di tingkat unit kerja maupun kantor pusat. National HSE Month event was held from January 12-February 12, 2023 with activities that promote HSE awareness by employees and partners in the work units and head office.	Rangkaian kegiatan Bulan K3 Nasional dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan *awareness* pegawai maupun mitra kerja terhadap K3 sehingga budaya K3 dapat terbentuk yang pada akhirnya membantu tercapainya *zero accident*. It was expected that HSE culture could be established, which eventually contribute to zero accident.
***Monitoring* dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Maximo HSE** **Monitoring and Evaluation of Maximo HSE Application**	Penggunaan Aplikasi Maximo HSE di-*monitoring* dan dievaluasi secara triwulan melalui *Video Conference* Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. The use of Maximo HSE application was monitored and evaluated quarterly via video conference in the Quarterly Evaluation of HSE Management Performance.	Modul Program Manajemen K3 (PMK3) dalam Aplikasi Maximo HSE memudahkan dalam me*monitoring* dan disposisi pelaksanaan program kerja K3 baik di sisi pelaksana maupun atasan. Modul *Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining* (HIRADC) dalam Aplikasi Maximo HSE memudahkan dalam penyusunan dan *review* dokumen HIRADC karena sudah memiliki tampilan dan format yang *user friendly* serta memudahkan koordinasi antar bidang sebagai user area yang bertanggung jawab dalam pengisian dokumen HIRADC areanya. Modul Program Manajemen K3 (PMK3) dalam Aplikasi Maximo HSE Management Program (PMK3) module in Maximo HSE application facilitates the executors and supervisors in monitoring and disposition of HSE work plan implementation. HIRADC module in Maximo HSE application enables preparation and review of HIRADC documents with its user-friendly display and format. It also simplifies coordination across fields as the area user in charge of filling HIRADC documents in their respective area.

Rencana Kegiatan Plan	Realisasi Kegiatan Realization	Dampak Kegiatan (dampak kuantitatif) Impact (quantitative impact)
***Monitoring* dan Evaluasi Pelaporan Aplikasi Nearmiss** **Monitoring and Evaluation of Nearmiss Application Report**	Pelaporan Aplikasi Nearmiss di-*monitoring* dan dievaluasi secara triwulan melalui *Video Conference* Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan dan Rapat Safety Committee. The use of Nearmiss application was monitored and evaluated quarterly via video conference in the Quarterly Evaluation of HSE Management Performance and Safety Committee Meetings.	Pelaporan Temuan K3 dalam Aplikasi Nearmiss digunakan untuk memitigasi potensi kecelakaan kerja baik yang disebabkan oleh Unsafe Action maupun *Unsafe Condition*. HSE Finding Report in Nearmiss Application is used to mitigate potential occupational accident due to unsafe action or unsafe condition.
Pengembangan Aplikasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) dan *Work Permit* **Development of CSMS and Work Permit Application**	Aplikasi CSMS dan *Work Permit* dibangun berkolaborasi dengan Divisi ITE, UBP Lontar, serta mitra kerja pengembang Aplikasi. Aplikasi di *launching* pada tanggal 15 Desember 2023. CSMS and Work Permit Application was developed in collaboration with the ITE division, Lontar Power Generation Business Unit, and the application developing partner. This app was launched on December 15, 2023.	Digitalisasi proses CSMS dan *Work Permit* memudahkan koordinasi antar bidang dan kepada mitra kerja karena setiap tahapan dapat dilakukan secara *online*. SCMS and Work Permit digitalization facilitates coordination across fields and for business partner as it now supports online capability for each stage.
***Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Industrial Cleaning Service** **Monitoring and Evaluation of Industrial Cleaning Service Performance**	Kinerja *Industrial Cleaning Service* (ICS) di-*monitoring* dan dievaluasi secara triwulan melalui *Video Conference* Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. Industrial Cleaning Service (ICS) performance was monitored and evaluated quarterly via video conference in the Quarterly Evaluation of HSE Management Performance.	Evaluasi kinerja *Industrial Cleaning Service* (ICS) dilakukan dalam rangka memberi masukan kepada pelaksana pekerjaan ICS di unit kerja sehingga kinerja kebersihan unit dapat terus ditingkatkan. This is required to provide feedbacks for the ICS task executor at the work unit to improve unit cleanliness.
***Monitoring* dan Evaluasi Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS)** **Monitoring and Evaluation of CSMS Implementation**	Implementasi CSMS di-*monitoring* dan dievaluasi secara triwulan melalui *Video Conference* Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. CSMS Implementation was monitored and evaluated quarterly via video conference in the Quarterly Evaluation of HSE Management Performance.	Implementasi CSMS dilakukan guna memastikan setiap unit sudah melaksanakan proses CSMS siklus penuh untuk setiap pekerjaan di lingkungan unitnya sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh mitra kerja dapat dipastikan telah memenuhi kaidah K3. This is performed to ensure full cycle of CSMS process for every job at the unit which ultimately guarantee HSE principles implementation by the business partner.
***Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Transformasi Budaya K3** **Monitoring and Evaluation of HSE Culture Transformation Implementation**	Implementasi Transformasi Budaya K3 di-monitoring dan dievaluasi secara triwulan melalui *Video Conference* Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. HSE Culture Transformation Implementation was monitored and evaluated quarterly via video conference in the Quarterly Evaluation of HSE Management Performance.	Program Transformasi Budaya K3 yang saat ini dijalankan di perusahaan dalam rangka membentuk budaya K3 di seluruh insan PLN Indonesia Power adalah: 1. *Safety Contact*; 2. *Management Walkdown*; 3. *Safety Observation*; 4. Pelaporan Aplikasi Nearmiss. Below is the current HSE Culture Transformation Program carried out in the Company to establish HSE culture internally: 1. Safety Contact; 2. Walkdown Management; 3. Safety Observation; 4. Nearmiss Application Reporting.
Forum K3 **HSE Forum**	Forum K3 secara korporat dilaksanakan pada semester 1 pada tanggal 8-10 Maret 2023 dan semester 2 pada tanggal 13-15 Desember 2023. Corporate-wide HSE Forum was held on March 08-10, 2023 for the first semester and December 13-15, 2023 for the second semester.	Dalam Forum K3 dibahas terkait pengenalan program atau peraturan terbaru K3, *lesson learned* kejadian yang pernah terjadi, kendala teknis yang dihadapi pengelola K3 dan arahan strategis dari manajemen kantor pusat kepada unit kerja. In this event, the latest HSE program or regulation, lesson learned, current events, technical challenges faced by the HSE administrator, and strategic directives from the head office to work units were presented.
Pelatihan dan Sertifikasi K3 Korporat **Corporate HSE Training and Certification**	Pelatihan dan Sertifikasi K3 Korporat 2023: 1. Pelatihan dan Sertifikasi CSMS; 2. Pelatihan SMK2; 3. Pelatihan Manajemen Dasar Bencana; 4. IHT (*Inhouse Training*) *Basic Safety Awareness*; 5. IHT (*Inhouse Training*) *Process Safety Management*; 2023 Corporate HSE Training and Certification: 1. CSMS Training and Certification; 2. HSE Management System Training; 3. Basic Management Training on Disaster; 4. Basic Safety Awareness In-House Training; 5. Process Safety Management In-House Training;	Pelatihan dan Sertifikasi K3 diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan perannya sesuai dengan jabatan yang dimiliki. HSE Training and Certification are expected to increase employee competence in playing their respective roles.
***Video Conference* Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan** **Quarterly Evaluation of HSE Management Performance via Video Conference**	Pengelolaan K3 unit kerja yang dilaporkan setiap bulan dievaluasi melalui *Video Conference* setiap triwulan. HSE management by the work unit reported monthly is evaluated quarterly via video conference.	Evaluasi pengelolaan K3 dilakukan dalam rangka memberi masukan kepada pengelola K3 di unit kerja sehingga kinerja K3 unit dapat terus ditingkatkan. This is required to provide feedbacks for the HSE administrator at the work unit to improve HSE at the unit level.

Rencana Kegiatan Plan	Realisasi Kegiatan Realization	Dampak Kegiatan (dampak kuantitatif) Impact (quantitative impact)
Pelaksanaan Rapat *Safety Committee* Safety Committee Meeting	Rapat *Safety Committee* setiap bulan untuk membahas statistik pelaporan aplikasi Nearmiss dan *Lesson Learned* kejadian K3 dengan melibatkan Direktorat Operasi (ketua), VP HSE (sekretaris) dan seluruh pimpinan unit kerja (anggota). Safety Committee Meeting is held every month to discuss the statistics from Nearmiss application reporting and Lesson Learned related to HSE by involving the Operational Director (chairperson) VP HSE (secretary), and all work unit heads (members).	*Safety Committee* menjadi wadah seluruh pimpinan unit kerja berdiskusi dan berbagi pengetahuan terkait isu-isu K3 yang terjadi di unit kerjanya serta wadah bagi Direktur Operasi terkait memberi arahan dan masukan kepada unit-unit kerja di bawahnya. Safety Committee meeting is a forum for all work unit heads to discuss and share knowledge about HSE occurring at the work unit. In this occasion, the Operational Director may provide directives and feedbacks to the work units.
Penilaian Kinerja *Maturity Level* K3 HSE Maturity Level Assessment	Pengelolaan K3 unit kerja yang dilaporkan setiap bulan dievaluasi melalui *Video Conference* setiap tiwulan. HSE management of Work unit reported monthly is evaluated through Video Conference every quarter.	Evaluasi pengelolaan K3 dilakukan dalam rangka memberi masukan kepada pengelola K3 di unit kerja sehingga kinerja K3 unit dapat terus ditingkatkan. Evaluation of HSE management is carried out in order to provide input to HSE managers in the work unit so that the unit's HSE performance can be continuously improved.
Pengadaan Apresiasi *Zero Accident* Zero Accident Appreciation	Apresiasi diberikan setiap tahun sebagai bentuk *reward* kepada pegawai yang telah mendukung tercapainya *Zero Accident*. Appreciation is provided as a reward for employees that support the achievement of Zero Accident.	Pemberian apresiasi kepada pegawai diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam membantu meraih *zero accident* di tahun-tahun selanjutnya. This program is expected to motivate the employees so that Zero Accident can be maintained in the future.
Pendampingan Audit Internal dan Eksternal SMK3 Assistance for HSE Management System Internal and External Audit	Dalam rangka memastikan kesiapan sistem manajemen K3 pada setiap unit kerja maka dilakukan pendampingan oleh Bidang K3 dan Bidang *Integrated Management System* Kantor Pusat. To ensure HSE management system readiness of each work unit, assistance on HSE and Integrated Management System is provided at the Head Office.	Audit SMK3 digunakan untuk mengukur kesiapan unit kerja dalam pengelolaan Sistem Manajemen K3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. The audit on this system is performed in compliance with the Government Regulation No. 50 of 2012 for continuous improvement.

PLN Indonesia Power juga melaksanakan kegiatan pendukung dalam rangka peningkatan keselamatan kerja sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:

Throughout 2023, PLN Indonesia Power carried out the following supporting activities to improve occupational safety:

Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Occupational Health and Safety Improvement Program

Program Peningkatan Kesehatan Kerja Occupational Health Improvement Program	Program Peningkatan Keselamatan Kerja Occupational Safety Improvement Program
• *Medical check up* secara berkala. • Melakukan *health risk assessment* di masing-masing area kerja sesuai potensi bahayanya terhadap kesehatan. • Memastikan ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri yang benar dan standar. • Pelaksanaan lomba yang mendukung peningkatan kesehatan seperti *event running*. • Sertifikasi *hygiene* kantin • Adanya himbauan kepada seluruh unit dalam penempatan pegawai mempertimbangkan faktor fisik dan mental pegawai yang dinyatakan sehat dalam bekerja berdasarkan riwayat kesehatan pegawai. • Memberikan *extra fooding* • Memberikan sosialisasi/penyuluhan kesehatan kerja. • Kunjungan dokter Perusahaan ke pegawai • Pengukuran lingkungan kerja secara berkala • Program olahraga • Menyediakan *fitness center* • Sertifikasi P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) • Menyediakan kotak dan isi P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• *Safety Briefing*. • *Safety Patrol*. • *Management Walkthrough/Gemba Walk*. • *Review* Prosedur dan Instruksi Kerja. • Sosialisasi, Pelatihan dan Sertifikasi K3. • Inspeksi Rutin Peralatan. • Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan *Fire Fighting* dan Alat Pelindung Diri (APD). • Simulasi Tanggap Darurat. • Penyusunan dan *review* dokumen *Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control* (HIRADC) melalui Aplikasi Maximo HSE. • *Awareness* dan Kampanye Budaya K3 dan Sadar *Safety* kepada Seluruh Pegawai. • Audit SMK3. • Sosialisasi penerapan SMK2. • Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) melalui Aplikasi IPSafe. • Implementasi *Industrial Cleaning*. • Transformasi Budaya K3. • *Upgrade* Infrastruktur K3. • *Assessment* kebersihan dan kesiapan *Fire Fighting System*. • Pelaporan *unsafe action, unsafe condition* dan *nearmiss* melalui Aplikasi Nearmiss yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

Program Peningkatan Kesehatan Kerja Occupational Health Improvement Program	Program Peningkatan Keselamatan Kerja Occupational Safety Improvement Program
• Periodical medical check-up. • Conducting health risk assessment in each work area by taking into account the corresponding potential threat to health; • Ensuring the availability and use of proper and standard personal protective equipment. • Holding competitions that promote health, e.g. running events. • Cafeteria hygiene certification. • Appealing all units to consider employee's physical and mental factors as declared in their health history for their work placement. • Providing extra fooding. • Dissemination of information/counseling about occupational safety. • Company doctor's visit to employee. • Periodic assessment of the work environment. • Sports program • Providing fitness center • First Aid Certification • Providing first aid kit in accordance with applicable laws and regulations.	• Safety Briefing. • Safety Patrol. • Walk-trough/Gemba Walk Management. • Procedure and Work Instruction Review. • HSE Dissemination, Training, and Certification. • Routine Inspection of the Equipment. • Provision and Maintenance of Fire Fighting Equipment and Personal Protective Equipment (PPE). • Emergency Response Simulation • Preparation and review of Hazard Identification, Risk Assessment, and Determine Control (HIRADC) documents via Maximo HSE application. • HSE Awareness and Culture Campaigns to All Employees. • Audit of HSE Management System. • Dissemination of HSE Management System implementation. • Contractor Safety Management System (CSMS) Implementation through IPSafe Application. • Industrial Cleaning Implementation. • HSE Culture Transformation. • HSE Infrastructure Upgrade. • Assessment of Power Generation Units' cleanliness and Fire Fighting System readiness. • Reporting of unsafe actions, unsafe conditions, and near-miss events via Nearmiss Application accessible by all employees.

Penyediaan Sarana Keselamatan Kerja dan Penanganan Keadaan Darurat
Occupational Safety Equipment Provision and Emergency Response

PLN Indonesia Power selalu berupaya untuk menyediakan tempat kerja dan fasilitas yang aman bagi pegawai dan mitra kerja agar dapat bekerja dengan baik, menjamin keselamatan dan terhindar dari kejadian berbahaya. Area operasional Perusahaan telah dilengkapi dengan berbagai perangkat keselamatan kerja untuk memastikan keselamatan kerja pegawai dalam menunjang kinerja Pegawai.

PLN Indonesia Power always strives to provide safe work place and facilities for employees and business partner Therefore, the operational areas of the Company have been equipped with various occupational safety equipment so that they can work safely and free from dangers.

Sarana Keselamatan Kerja
Occupational Safety Equipment

Sarana Keselamatan Kerja Occupational Safety Equipment	Kegunaan Sarana Keselamatan Kerja Function	Tempat Penggunaan Place of Use
Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protective Equipment (PPE)	Melindungi sebagian atau seluruh badan personil dari potensi bahaya yang jenisnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di area kerjanya. Protects parts or entire body of the personnels from potential hazards, which type is adjusted with potential hazards in the corresponding work area.	Sebagian atau seluruh bagian tubuh personil. Part or entire body of the personnel.
Rambu-Rambu K3 (*Safety Sign*) HSE Signs (Safety Signs)	Menunjukkan adanya potensi bahaya di area kerja, mengingatkan personil untuk berperilaku aman, menunjukkan lokasi peralatan pemadam dan tanggap darurat, dan memberikan arahan/petunjuk saat keadaan darurat. Indicates potential hazards in the work area, warns personnels to operate safely, indicates the location of fire extinguishers and emergency response, and provides direction/guidance for emergencies.	Ditempatkan di area yang strategis/mudah terlihat dan sesuai risiko yang ditimbulkan Conveniently located/clearly visible and corresponding to the potential risk

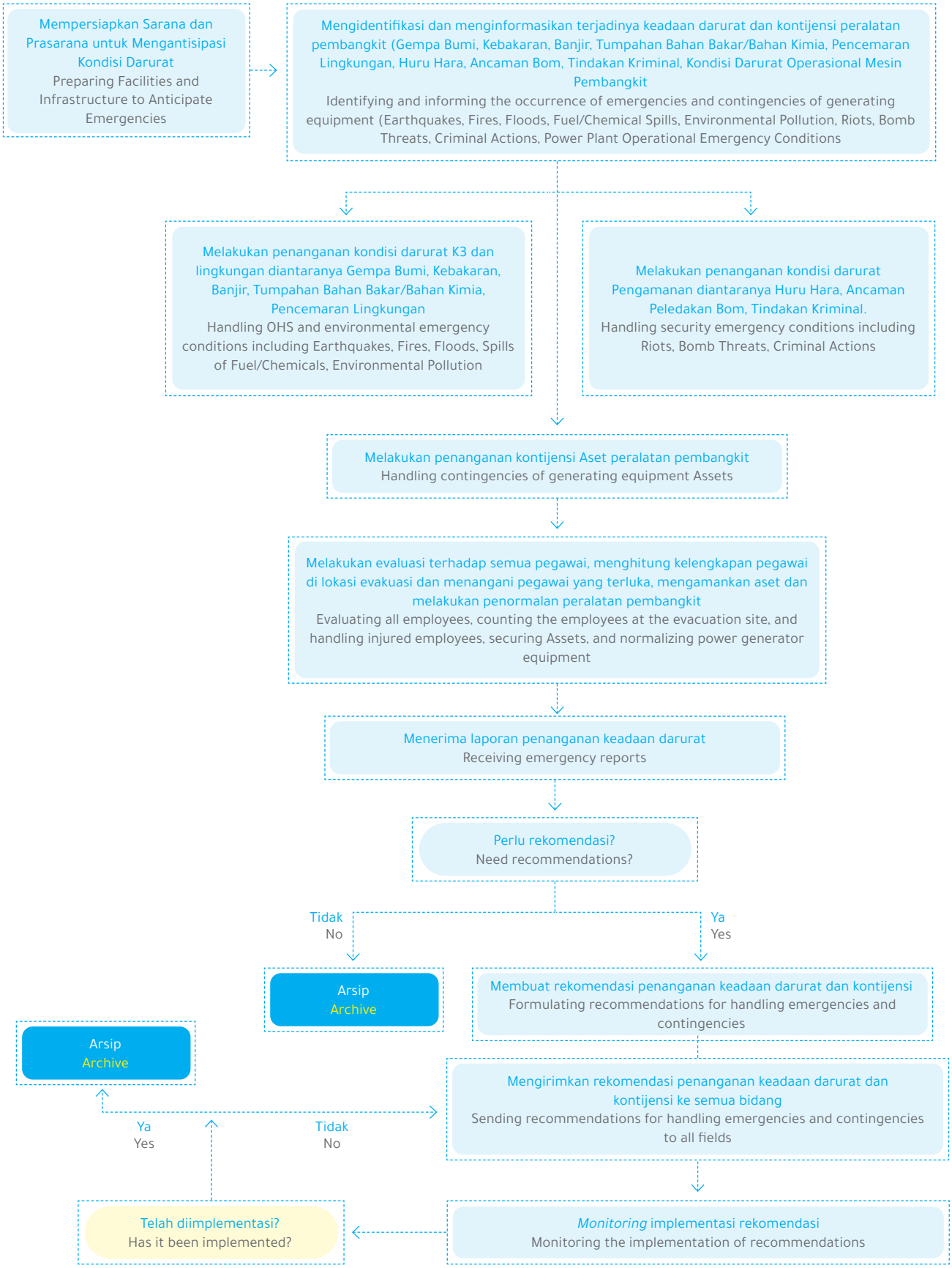


Sarana Keselamatan Kerja Occupational Safety Equipment	Kegunaan Sarana Keselamatan Kerja Function	Tempat Penggunaan Place of Use
Sistem Proteksi Kebakaran (Manual & Automatis): 1) APAR 2) *Hydrant* 3) APAT 4) Mobil Damkar 5) Pompa *Fire Fighting* 6) *Deluge Sprinkler System* 7) *Fire Alarm System* 8) *Low Pressure* CO_2 *System* 9) *Foam System* 10) *Wet sprinkler system* Fire Protection System (Manual & Automatic): 1) Fire Extinguishers 2) Hydrants 3) Conventional Firefighting Equipment 4) Firefighting Vehicles 5) Firefighting Pumps 6) Deluge Sprinkler System 7) Fire Alarm System 8) Low Pressure CO_2 System 9) Foam System 10) Wet Sprinkler System	Untuk mengendalikan potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi di area pembangkit listrik. To control potential fire hazard that may occur in the power generation unit.	Seluruh area pembangkit listrik. All power generation areas.
Fasilitas Tanggap Darurat: 1) Tim Tanggap Darurat 2) *Ambulance* 3) Kotak P3K 4) Perlengkapan tanggap darurat lainnya (Tandu, *Breathing Apparatus*, dll) Emergency response facilities: 1) Emergency Response Team 2) Ambulance 3) First Aid Kit 4) Other emergency response equipment (Stretcher, Breathing Apparatus, etc.)	Tersedianya perlengkapan tanggap darurat pada kondisi *emergency*. Availability of emergency response equipment in emergency situations.	Area terdampak kondisi *emergency*. Areas impacted by emergency condition
Vacuum truck	Kendaraan penghisap debu melalui pipa saluran dengan koneksi dari pipa *vacuum* ke dalam *truck* menggunakan mesin. A vacuum-cleaning truck with suction machine and pipe attached to the tank.	Area *transfer tower* dan *bunker* Transfer tower area and bunker

Simulasi tanggap darurat dilakukan secara berkala terkait kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan perlindungan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Mekanisme penanganan keadaan darurat di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut.

Emergency response simulation related to occupational health and safety is performed regularly in accordance with the applicable regulation to provide protection for the employees so that they may work effectively. Below is the handling mechanism for the emergency situation around the Company.

Mekanisme Penanganan Keadaan Darurat
Emergency response mechanism



Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pengaduan serta Konflik Terkait Ketenagakerjaan

Report and Handing Mechanism of Complaint and Conflicts Related to Employment

PLN Indonesia Power telah menyiapkan perangkat penunjang untuk mendukung pemenuhan aspek keberlanjutan terkait sosial ketenagakerjaan dengan menyediakan mekanisme penanganan keluhan dan keadaan darurat terkait keselamatan kerja serta konflik terkait aspek ketenagakerjaan. Mekanisme penanganan keluhan dan konflik pegawai terkait ketenagakerjaan serta keadaan darurat terkait keselamatan kerja sejalan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2023 beserta amandemennya Bab VIII Hubungan Industrial Pasal 133 tentang Keluh Kesah Pegawai dan Pasal 134 tentang Penyelesaian Keluh Kesah Pegawai. Mekanisme penyampaian keluhan pegawai dapat dilihat pada *Flow chart* sebagai berikut:

To support the fulfillment of sustainability aspect related to employment, PLN Indonesia Power has prepared the report and handing mechanism of complaint and emergencies related to occupational safety and conflicts about employment This mechanism is set out based on the 2022-2023 CLA, Chapter VIII Industrial Relations, article 133 on employee complaints and article 134 on complaints resolution. The following flow chart outlines the mechanism of complaints resolution:

Penyelesaian Keluh Kesah Pegawai
Employee Complaints Resolution

Atasan Langsung
Direct Supervisor

Keluh kesah Pegawai pertama-tama disampaikan dan diselesaikan dengan atasan langsung Pegawai yang bersangkutan.
Initially, employee complaints are resolved directly with the corresponding direct supervisor.

Atasan dari Atasan Langsung
Manager of Direct Supervisor

Apabila penyelesaian keluh kesah dengan atasan langsung tidak dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka dengan sepengetahuan atasan langsungnya, Pegawai tersebut dapat menyampaikan keluh kesahnya secara tertulis kepada atasan dari atasan langsung Pegawai yang bersangkutan secara berjenjang sampai ke tingkat Pejabat Struktural di atasnya untuk diadakan penyelesaian secara musyawarah dan tindasannya disampaikan kepada Pengurus PP Tingkat Unit setempat.
If unresolved in 14 (four-teen) calendar days, with the acknowledgment of the direct supervisor, the Employee may escalate the matter in written to the manager of the direct supervisor hierarchically up to the Structural Officer above to be resolved in a deliberative manner. The follow-up action is then informed to the labor union management of the relevant unit.

Manajemen dan General Manager Unit/Pejabat Manajemen dan Management and General Manager of the Unit/Officer

Apabila dengan Atasan dari Atasan Langsung, telah ditempuh dan belum selesai dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka atasan tersebut dapat menyelesaikan bersama Manajemen di Bidang Kepegawaian dan General Manager Unit/Pejabat setingkat Manajemen Menengah yang menangani Hubungan Industrial beserta Pengurus Organisasi PP-IP di unit setempat.
If the matter remains unre-solved in 14 (fourteen) calendar days, the direct supervisor may take action to resolve this with the Employment Manager and General Manager of the Unit/Middle Management Level Officials in charge of industrial relations, also with Indonesia Power Labor Union management at the corresponding unit.

LKS Bipartit
Bipartite Social Dialog

Apabila dengan cara penyelesaian keluh kesah bersama Manajemen di Bidang Kepegawaian dan General Manager Unit/Pejabat setingkat Manajemen Menengah yang menangani Hubungan Industrial beserta Pengurus Organisasi PP-IP di unit setempat, masih belum dapat diselesaikan juga, maka permasalahan tersebut diajukan ke LKB untuk mendapatkan saran.
If the Management in the Employment and General Manager Unit/ Middle Management level officials who handles Industrial Relations, with the local PP-IP Management, still cannot settle the complaints within fourteen (14) calendar days, the problem shall be submitted to the Cooperation Institution to obtain advice.

Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
Prevailing Employment Laws

Apabila penyelesaian melalui LKS Bipartit belum mencapai mufakat maka permasalahannya akan diselesaikan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan ketenagakeriaan yang berlaku.
If the problem is not settled amicable by the assistance of Bipartite Cooperation Institution, then the problem will be resolved in accordance with prevailing labor laws and regulations.

Selama tahun 2023, tidak terdapat pengaduan terkait pelanggaran praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi, insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat dan insiden kerja paksa yang dialami pegawai Perusahaan yang sampaikan pegawai kepada Perusahaan.

During 2023, no complaints were filed on employment and human rights, such as discrimination, violation against freedom of association, and forced labor, by the employee to the Company.

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Ketenagakerjaan
Total spending for employment activities

Biaya pengelolaan ketenagakerjaan PLN IP selama tahun 2023, diluar gaji, *Pay For Performance* (P3), dan Bonus/Insentif adalah sebagai berikut:

Below is PLN Indonesia Power's spending for employment management during 2023, excluding salary, Pay for Performance (P3), and Bonus/ Incentive:

Biaya Pengelolaan Ketenagakerjaan Employment Management Expense	Jumlah Biaya (Rp miliar) Total Expense (Rp billion)
Manfaat Pegawai Employee Benefits	1.162,20
Pengembangan Kompetensi Competency Development	81,94
Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja Management of Occupational Health and Safety	82,79

Kinerja Sosial Aspek Masyarakat
Social Performance Related to Public

Tanggung jawab sosial Perusahaan mendorong Perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mencakup sikap dan tindakan yang mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan dan aktivitas yang diambil, serta upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Tanggung jawab sosial Perusahaan dapat menjadi media untuk membangun hubungan baik untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan dan keberlangsungan jangka panjang. Hubungan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk partisipasi dalam aktivitas sosial, dukungan sosial, serta kemampuan untuk memahami dan mengikuti norma dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

The CSR initiative promotes the Company to operate in an ethical manner and contributive to people's welfare. This includes the consideration for social impacts from the performed activities and actions, also means to improve the social condition, environment, and economy. CSR may become an approach to develop a harmonious relationship to support the operation and long-term success of the Company. This relationship covers various aspects, including the participation on social activities, social support, and the capability to comprehend and conform to the social norms and values in the society.

PLN Indonesia Power melaksanakan program Tanggung jawab sosial Perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi landasan pelaksanaan tanggung jawab sosial, yang menjadi dasar menetapkan kebijakan internal sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi No.26.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan InPower CARE di Lingkungan PT Indonesia Power tanggal 11 Februari 2014.
2. Keputusan Direksi Nomor 218.K/010/IP/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Indonesia Power Bab VIII Pendayagunaan Produk Dalam Negeri.
3. Keputusan Direksi Nomor 180.K/010/IP/2018 tentang Komitmen *Community Development* melalui Program Inspirasi Perempuan, tanggal 22 November 2018.

The CSR implementation refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility. Both serve as the basis for the following internal policies:

1. Decree of the Board of Directors No.26.K/010/IP/2014 on the Guideline for InPower CARE Implementation at PT Indonesia Power, dated February 11, 2014.
2. Decree of the Board of Directors No. 218.K/010/IP/2016 regarding Goods/Service Procurement Guideline of PT Indonesia Power, Chapter VIII about Domestic Product Utilization.
3. Decree of the Board of Directors No. 180.K/010/IP/2018 on Commitment to Community Development through Inspirasi Perempuan (Women's Inspiration) Program, dated November 22, 2018.



4. Keputusan Direksi Nomor 56.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Program Unggulan *Community Development* di Lingkungan PT Indonesia Power, tanggal 28 Mei 2019.
5. Keputusan Direksi Nomor 24.K/010/IP/2022 tentang Pedoman *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis ISO 26000:2013.
6. Edaran Direksi Nomor 07.E/012/IP/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Perusahaan.
7. Edaran Direksi Nomor 46.E/012/IP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dalam Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Masyarakat.

4. Decree of the Board of Directors No. 56.K/010/IP/2019 on the Management of Community Development Flagship Program at PT Indonesia Power, dated May 28, 2019.
5. Decree of the Board of Directors No. 24.K/010/IP/2022 on CSR Guideline based on ISO 26000:2013.
6. Circular of the Board of Directors No. 07.E/012/IP/2014 on the Implementation Guideline of Corporate Social Aid.
7. Circular of the Board of Directors No. 46.E/012/IP/2019 on the Educational Financial Aid Program for Public.

Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar
Operational Impact Towards Local Communities

PLN Indonesia Power berupaya melakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi dampak negatif operasi Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Analisis dampak dan risiko dari kegiatan Perusahaan secara rutin dilaksanakan setiap tahun dalam memastikan kecukupan kebijakan dan penerapan tanggung jawab Perusahaan. PLN Indonesia Power juga berupaya menyerap ekspektasi stakeholders yang terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan.

PLN Indonesia Power tries to minimize the direct and indirect negative impact of the Company's operation towards communities. The analysis of impacts and risks of the Company's operation is regularly conducted annually to ensure the adequacy of the policy and implementation of CSR. PLN Indonesia Power also aspires to collect the stakeholders' expectation related to social aspect.

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan
Analysis of Impacts, Risks, and Countermeasures

Potensi Dampak Teridentifikasi Identified Potential Impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Sedikitnya Lapangan Pekerjaan Lack of Job Opportunities	• Kemiskinan • Pengangguran • Meningkatnya tindak kejahatan • Poverty • Unemployment • Crime rise	• Membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kemiraan. • Meningkatkan mitra kerja dengan tenaga kerja lokal. • Assisting and developing Small and Medium Business through the Partnership Program. • Consolidating partnership with local manpower.
Kerusakan Lingkungan Environmental Damage	• Berkurangnya ketersediaan air bersih. • Menghilangnya sumber mata pencaharian masyarakat. • Gangguan kesehatan masyarakat dan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Bencana Alam • Lack of clean water. • Loss of people's livelihoods. • Community and employee health issue at the power plant environment. • Natural Disaster	• Pengendalian operasi dan pengelolaan limbah cair. • Pengendalian operasi dan Pengendalian baku mutu emisi. • Pemantauan emisi gas buang secara continue melalui CEMS (*Continuous Emission Monitoring System*) dan periodik melalui pemantauan laboratorium. • Operation control and liquid waste management. • Operation and emission quality standard controls. • Exhaust gas emission monitoring continuously via CEMS (Continuous Emission Monitoring System) and periodically through lab monitoring.
Minimnya Akses dan Infrastruktur Pendidikan Lack of Access to Education and Its Infrastructure	• Meningkatnya anak putus sekolah. • Rendahnya mutu pendidikan. • Rendahnya kompetensi masyarakat. • Meningkatnya pengangguran. • Rising dropout rate. • Poor education quality. • Poor community competency. • Rising unemployment.	• Bantuan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. • Program kerja sama bidang pendidikan. • Bantuan Biaya Pendidikan. • Educational facilities and infrastructures aid and renovation. • Cooperation programs on education. • Educational Financial aid.
Kesehatan, Sosial dan Keagamaan Health, Social, and Religion	• Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. • Hilangnya kearifan lokal. • Tempat tinggal tidak layak. • Sarana ibadah tidak layak. • Poor public health quality. • Loss of local wisdom. • Inadequate housing. • Inadequate place of worship.	• Bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis. • Bantuan sosial bencana alam dan non alam. • Partisipasi peringatan hari besar dan kegiatan adat. • Bantuan renovasi rumah. • Bantuan perbaikan sarana ibadah. • Free medical checkup and medication. • Natural and non-natural disasters social relief. • Participation in the celebration of festive days and cultural activities. • Home renovation aid. • Place of worship renovation aid.
Hubungan dengan *Stakeholder* Stakeholder relations	• Kredibilitas Perusahaan. • Perilaku Menyimpang. • Corporate Credibility. • Deviant Behaviors.	• Komitmen pada penerapan pedoman etika Perusahaan. • Forum diskusi dengan *stakeholders*. • Commitment to the implementation of the Company's code of ethics. • Discussion forum with the stakeholders.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility Activities

Program InPower CARE (Indonesia Power - *Community Assistance, Relation and Empowerment*) merupakan wujud tanggung jawab sosial Perusahaan yang mencakup tiga program utama, yaitu: Pelayanan Masyarakat (*Community Assistance*), Pembinaan Hubungan (*Community Relation*) dan Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*).

InPower CARE (Indonesia Power - Community Assistance, Relation and Empowerment) program is the CSR activity that comprise three main program, namely: Community Service, Community Assistance, and Community Empowerment.

PLN Indonesia Power melaksanakan pembinaan dengan unit yang dilakukan melalui rapat secara tatap muka ataupun *video conference*, tidak hanya itu pembinaan juga dilakukan melalui media komunikasi *email* dan whatsapp *group* untuk dapat mempermudah komunikasi dengan unit. Adapun pembinaan yang telah dilakukan dengan unit diantaranya sebagai berikut:

1. *Review Gap Analysis* Dokumen Proper Aspek Comdev dengan Sodec UGM.
2. *Review* Materi PPT Proper Emas dengan Ketua Dewan Pertimbangan Proper.
3. *Review* Materi *Awarding* bidang CSR.
4. *Review* Materi Dokumen SROI dengan Tim Teknis UNPAD.
5. Pembinaan Presentasi GM/SM/M peserta kandidat PROPER Emas.
6. *Review* dan pembinaan program comdev dengan Dewan Pertimbangan PROPER.
7. Pembinaan dan Pelatihan Mitra Binaan Unit-unit.
8. Melaksanakan pemasaran produk mitra binaan kepada *stakeholder* perusahaan.

The Company assists the corresponding units through direct communication, video conference, email, and WhatsApp group to facilitate communication with them, among others to:

1. Review the gap analysis of the Proper document on community development aspect with SODEC, Gadjah Mada University.
2. Review the presentation slides of PROPER Gold with the Proper Advisory Council chairperson.
3. Review the Awarding materials on CSR.
4. Review the SROI documents with the Technical Team of Padjadjaran University.
5. Assist GM/SM/M presentation as the candidates for PROPER Gold.
6. Review and assist for the community development program with the PROPER Advisory Council.
7. Provide assistance and training for the Units' foster partners.
8. Market the products made by the foster partners to the Company stakeholders

Pelayanan Masyarakat (*Community Assistance*)

Community Service

PLN Indonesia Power menjalankan Program Pelayanan Masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Program Pemberdayaan masyarakat merupakan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan terkait pengentasan kemiskinan dan kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan serta penanganan perubahan iklim. melalui kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 dalam bentuk:

1. Bantuan pembangunan/perbaikan tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, fasilitas umum dan sosial dengan jumlah sebanyak 344 bangunan di sekitar unit pembangkit.
2. Bantuan Program kesehatan sebanyak 67 kegiatan terdiri dari sosialisasi atau penyuluhan kesehatan. Selain itu juga terdapat bantuan kepada 15.906 jiwa melalui kegiatan pemberian makanan tambahan kepada balita/lansia serta pengobatan gratis, serta 37 kali bantuan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan di bidang kesehatan.
3. Bantuan kegiatan pendidikan sebanyak 159 kegiatan seperti bantuan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya, selain itu juga adanya bantuan 69 sarana dan prasarana belajar seperti alat tulis, seragam sekolah, tas sekolah, laptop dll, serta bantuan pendidikan kepada 1.195 anak.
4. Bantuan bencana alam di 53 lokasi bencana alam di Indonesia selama bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
5. Bantuan 68 sarana prasarana bidang lingkungan dan sosial budaya, serta bantuan kegiatan di bidang lingkungan maupun sosial sebanyak 108 kegiatan.
6. Bantuan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi untuk membantu masyarakat membutuhkan sebanyak 600 jiwa.

PLN Indonesia Power develops the Community Service Program to support the improvement of the community's life quality through collaboration with the local government. By empowering the community, the Company contributed to the sustainable development in relation to the poverty and hunger eradication, healthy and prosper life, quality education, industry, innovation and infrastructures, disparity reduction and climate change response through the following activities in 2023.

1. Construction/renovation aid for a total of 344 places of worship, educational infrastructure, health infrastructure, public and social facilities surrounding the power plants.
2. Health aid with a total of 67 programs, including dissemination or counseling related to health, aid provision for 15,906 people through supplementary feeding program for toddlers/elderlies, free medication, and 37 times of infrastructure aid provision to support health-related activities.
3. Educational aids by means of 159 educational activities (teaching and learning, etc.), provision of 69 educational facilities, such as stationary, school uniform, school bags, laptop, etc., and educational aid for 1,195 children.
4. Natural disaster aid in 53 locations throughout Indonesia during 2023.
5. Provision of 68 environmental and socio-cultural aids, and 108 activities in similar fields.
6. Economic-assistance activities for 600 people in need.

Pembinaan Hubungan (*Community Assistance*)
Community Assistance

Pembinaan Hubungan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang dilakukan untuk memfasilitasi tumbuhnya pemahaman bersama dan mewujudkan komitmen bersama di antara para *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama, mendorong lahirnya sikap positif komunitas terhadap Perusahaan serta memperbaiki dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang kondusif terhadap keberlangsungan bisnis Perusahaan. Program Pemberdayaan masyarakat merupakan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan terkait perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh serta kemitraan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 dalam bentuk:

1. Program Komunikasi sosial terselenggara sebanyak 47 kegiatan untuk menciptakan hubungan baik dengan para *stakeholder*.
2. Program Forum warga terselenggara sebanyak 19 kegiatan melalui kegiatan FGD dengan lembaga daerah/ budaya setempat di setiap masing-masing unit atau pertemuan dengan mitra binaan serta 97 kegiatan publikasi seperti pembuatan buku, katalog produk CSR, video, serta peliputan media.
3. Partisipasi peringatan hari besar nasional/ agama sebanyak 561 kegiatan.
4. Partisipasi kegiatan masyarakat berjumlah 1.089 kegiatan seperti seminar nasional, kompetisi olahraga lokal dan nasional, kegiatan kebudayaan, acara keagamaan, dan lani sebagainya.

This is a program that promotes two-way communication to facilitate mutual understanding and commitment among stakeholders to achieve shared goals, foster positive viewpoint towards the Company, and develop and encourage conducive public policies that support the Company's business sustainability. This program contributes to the sustainable development related to peace, justice, solid institution and partnership to achieve the goals. Below are the program activities performed throughout 2023:

1. 47 social communication activities to maintain a harmonious relationship with the stakeholders.
2. 19 Townhall Forum through FGD with the regional/local culture institutions in each unit or meetings with the foster partners, and 97 publication activities, such as book writing, CSR product cataloging, video making, and media coverage.
3. 561 participations in national/religious festive days.
4. 1,089 public activities, such as national seminar, local and national sport competition, cultural events, religious events, etc.

Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)
Community Empowerment

Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan terkait pengentasan kemiskinan dan kelaparan; kesetaraan *gender*; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kemitraan untuk mencapai tujuan serta penanganan perubahan iklim. Program pemberdayaan masyarakat tahun 2023 dilaksanakan dalam bentuk:

1. Bantuan pengembangan dan modal usaha bagi 293 kelompok usaha mikro.
2. Bantuan peningkatan keterampilan kepada 636 kelompok dan 400 orang masyarakat disekitar Unit Pembangkit dan Kantor Pusat.
3. Bantuan untuk pemasaran produk kepada 145 kelompok usaha.
4. Riset dan pengembangan sebanyak 121 kegiatan.

Community Empowerment program is a contribution to the sustainable development on poverty and hunger eradication, gender equality, decent works and economic growth, industry, innovation and infrastructures, disparity reduction, partnership to achieve the goals and climate change response Below are the programs carried out in 2023:

1. Development aid and business funding for 293 micro-businesses.
2. Skill improvement aid for 636 groups and 400 people of local communities around the Power Plants and Head Office.
3. Product marketing aid for 145 business groups.
4. 121 research and development activities.

Manfaat Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan
Benefits of Corporate Social Responsibility Activities

PLN Indonesia Power tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis secara luas. Menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi berbagai pihak termasuk Perusahaan, masyarakat, dan Pemegang Saham menjadi dasar yang mendorong pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Other than profits, PLN Indonesia Power also pursues the extensive reach of the social and environmental impacts from its operation. It strives to create sustainable values for all parties, including the Company, community, shareholders through CSR activities.

Program tanggung jawab sosial memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan keterampilan dan perekonomian masyarakat, mendorong pembangunan infrastruktur nasional, mendorong keswadayaan dalam menciptakan tempat tinggal yang

The benefits include improving the quality of public health, improving the community skills and economy, driving the development of national infrastructures, improving self-sufficiency in creating decent housings, enhancing the quality of educational facilities, and improving the quality of the place of worship facilities. For the Company, the benefits



layak, meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana ibadah. Selain itu, Manfaat program tanggung jawab sosial untuk Perusahaan diantaranya menjaga reputasi brand image Perusahaan, mendapatkan *Social License to Operate*, mereduksi biaya dan risiko Perusahaan, memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*, indeks kepuasan masyarakat untuk unit-unit yang ada di PLN Indonesia Power berada pada kategori baik dan sangat baik dan mendapatkan penghargaan di bidang CSR.

cover maintaining its brand image reputation, obtaining Social License to operate, reduction of the Company's cost and risk, improving the relations with stakeholders, maintaining the good and very good categories it falls under in the community satisfaction index for the existing units in PLN Indonesia Power, and receiving recognition in CSR field.

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Konflik Sosial Kemasyarakatan
Mechanisms for Complaint Handling and Social Conflict

PLN Indonesia Power menyiapkan perangkat penunjang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan dengan menyediakan mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan, keadaan darurat dan konflik sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak kegiatan operasional Perusahaan menjadi salah satu hal penting yang menjadi prioritas PLN Indonesia Power. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pengaduan dan konflik sosial kemasyarakatan berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

PLN Indonesia Power prepares mechanisms for complaint handling, emergency situations, and social conflict according to the prevailing regulations to facilitate the CSR. Protection for communities from the Company operation's impact is a priority for PLN Indonesia Power. Throughout 2023, there was no complaints nor social conflict related to the operation.

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Konflik Sosial Kemasyarakatan
Mechanisms for Complaint Handling and Social Conflict



Biaya Program Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan
Social Responsibility Program Expense

Kegiatan InPower-Care tahun 2023 telah direalisasikan dengan dana sebesar Rp52.760 juta untuk program pelayanan masyarakat, pembinaan hubungan, dan pemberdayaan masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Rp52,760 million was allocated for InPower-Care program in 2023 for community service, community assistance, and community empowerment with the following details:

Program	Jumlah Biaya (Rp Juta) Expense (Rp Million)
Bakti Pelayanan Masyarakat Community Service	13.557
Bakti Pembinaan Hubungan Community Assistance	11.932
Bakti Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	27.271
Total	**52.760**

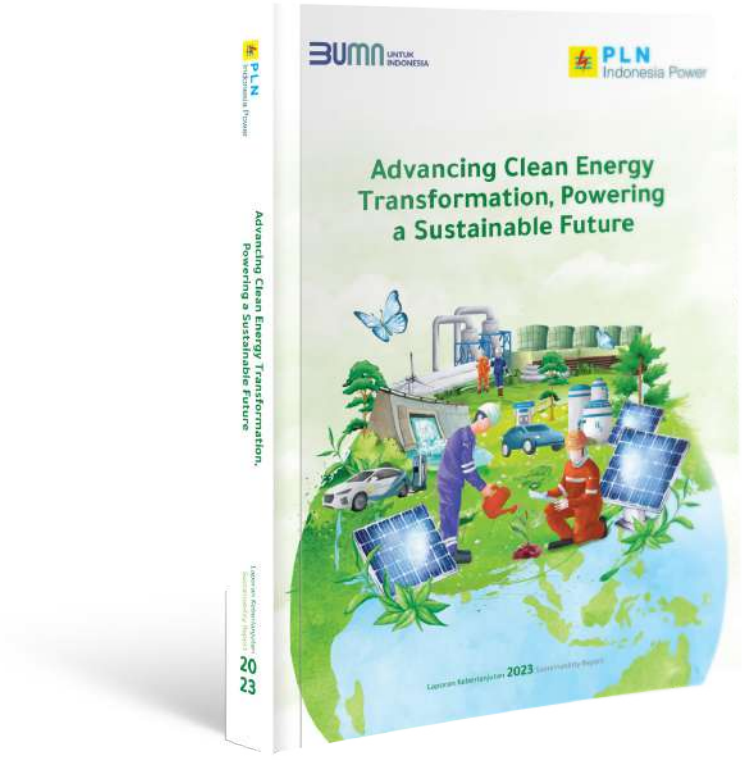
Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

PLN Indonesia Power menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) untuk mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak Perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan Perusahaan tentang praktik bisnis yang dijalankan, serta komitmen terhadap keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal tersebut termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Indonesia Power dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan Perusahaan mengacu kepada GRI *Standards*, dimana PLN Indonesia Power telah melaporkan sesuai (*in accordance*) dengan GRI *Standards* untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2023, dan menyertakan Pengungkapan Sektor Utilitas Listrik (*Electric Utilities Sector Disclosures*); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; *The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability related Financial Information dan IFRS S2: Climate-related Disclosures and Industry-based Guidance on implementing Climate-related Disclosures (Electric Utilities & Power Generators))*; serta *The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards - Infrastructure Sector: Electric Utilities & Power Generators*.

PLN Indonesia Power prepares Sustainability Reports to present its sustainability performance in terms of economic, environmental, and social aspects. This report elaborates a comprehensive overview on the Company's impacts on various stakeholders and measures taken to improve sustainability. With the report, the Company provides transparency about the business practice and commitment to the economic, environmental, and social aspects. This means represents the corporate social and environmental responsibilities of PLN Indonesia Power to uphold the sustainable development goals.

PLN Indonesia Power prepared the report in accordance with GRI Standards for the period of January 01 through December 31, 2023, encompassing Electric Utilities Sector Disclosures; Financial Service Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies; Circular of Financial Service Authority Regulation Number 16/SEOJK.04/2021 on the Format and Content of Annual Reports by Issuers or Public Companies; The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability related Financial Information and IFRS S2: Climate-related Disclosures and Industry-based Guidance on implementing Climate-related Disclosures (Electric Utilities & Power Generators)); and The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards - Infrastructure Sector: Electric Utilities & Power Generators.



Laporan Keuangan Audit 2023

Audited Financial Statements 2023




LN
donesia Power

**PT PLN INDONESIA POWER (dahulu/*formerly*
PT INDONESIA POWER)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES***

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

**31 DESEMBER 2023/
*31 DECEMBER 2023***



PLN Indonesia Power
HEAD OFFICE

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2023 AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned*:

1.	Nama/ *Name*	: Edwin Nugraha Putra
	Alamat kantor/ *Office address*	: Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, 12950
	Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card*	: Bukit Cimanggu City Blok E No.16, RT 001/RW 011 Cibadak, Tanah Sareal, Bogor
	Nomor telepon/*Phone number*	: 081339337994
	Jabatan/ *Position*	: Direktur Utama/*President Director*
2.	Nama/ *Name*	: Endang Astharanti
	Alamat kantor/ *Office address*	: Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, 12950
	Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card*	: Jl. AMD VIII No. 17, RT 010/RW 001, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan
	Nomor telepon/*Phone number*	: 08158063410
	Jabatan/ *Position*	: Direktur Keuangan/*Director of Finance*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

state that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;*
2. *The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the Consolidated Financial statements is complete and correct;*
   b. *The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
4. *We are responsible for the internal control system of the Company and subsidiaries.*

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 5 April 2024



Edwin Nugraha Putra
Direktur Utama/
President Director

Endang Astharanti
Direktur Keuangan/
Finance Director

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PLN INDONESIA POWER

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PLN Indonesia Power dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PLN Indonesia Power and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00574/2.1025/AU.1/02/0241-4/1/IV/2024



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

00574/2.1025/AU.1/02/0241-4/1/IV/2024

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
5 April 2024

Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0241

00574/2.1025/AU.1/02/0241-4/1/IV/2024

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	7	3,535,896	3,682,111	2,766,128	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	8				*Trade receivables*
Pihak berelasi		52,135,921	27,786,895	25,574,131	*Related parties*
Pihak ketiga		85,666	81,564	91,423	*Third parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak berelasi	11	336,533	572,931	314,267	*Related parties*
Pihak ketiga		47,675	96,300	28,861	*Third parties*
Persediaan	9	5,283,975	4,975,336	2,663,079	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	26a	246,043	396,009	566,327	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka dan uang muka		399,882	166,212	66,638	*Prepaid expenses and advances*
Aset keuangan dari konsesi jasa jatuh tempo dalam satu tahun	10	119,839	991,046	2,019,485	*Current maturities of financial assets of service concession*
Jumlah Aset Lancar		**62,191,430**	**38,748,404**	**34,090,339**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	12	307,625,776	282,537,883	287,657,429	*Property, plant and equipment*
Aset hak guna	13	5,445,976	3,447,465	4,406,685	*Right-of-use assets*
Properti investasi		94,405	93,814	143,969	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	14	7,835,695	6,946,638	4,321,545	*Investments in associates and joint ventures*
Aset pajak tangguhan	26d	22,240	22,150	19,493	*Deferred tax assets*
Pajak dibayar di muka	26a	720,965	907,902	1,242,799	*Prepaid taxes*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak berelasi	11	734,753	447,049	468,080	*Related parties*
Pihak ketiga		180,719	83,955	78,517	*Third parties*
Biaya dibayar di muka dan uang muka		41,563	179,863	41,411	*Prepaid expenses and advances*
Aset keuangan dari konsesi jasa setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	10	1,028,949	40,780,851	41,771,897	*Financial assets of service concession - net of current portion*
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya		-	-	1,117	*Restricted cash in banks*
Aset tidak lancar lain		278,392	213,449	419,192	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**324,009,433**	**335,661,019**	**340,572,134**	***Total Non-current Assets***
JUMLAH ASET		**386,200,863**	**374,409,423**	**374,662,473**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	15				*Trade payables*
Pihak berelasi		5,749,847	2,694,989	3,248,677	*Related parties*
Pihak ketiga		3,911,961	3,207,637	4,012,373	*Third parties*
Utang lain-lain		-	595	327	*Other payable*
Utang pajak	26b	886,643	519,307	346,773	*Taxes payable*
Utang pajak penghasilan badan		29,541	16,591	3,098	*Corporate income tax payables*
Beban yang masih harus dibayar		479,540	279,960	429,296	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					*Current maturities of long-term liabilities*
Liabilitas sewa	16	654,594	453,709	681,052	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	27	233,007	277,929	254,347	*Loans from a shareholder*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17	675,790	704,612	691,250	*Short-term employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**12,620,923**	**8,155,329**	**9,667,193**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	26d	17,904,528	15,642,571	12,817,992	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					*Long-term liabilities - net of current portion*
Liabilitas sewa	16	4,471,612	2,552,006	2,921,322	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	27	1,526,492	1,134,273	1,292,375	*Loans from a shareholder*
Liabilitas imbalan kerja	17	4,221,982	3,903,140	3,463,984	*Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**28,124,614**	**23,231,990**	**20,495,673**	***Total Non-current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**40,745,537**	**31,387,319**	**30,162,866**	***TOTAL LIABILITIES***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 1.428.662.534.400 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 357.165.633.600 saham (31 Desember dan 1 Januari 2022: nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.215.647.600 saham)	18	178,582,817	2,607,824	2,607,824	*Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share Authorised - 1,428,662,534,400 shares Subscribed and paid-up - 357,165,633,600 shares (31 December and 1 January 2022: par value of Rp500 (full amount) per share Authorised- 20,000,000,000 shares Subscribed and paid-up - 5,215,647,600 shares)*
Tambahan modal disetor	19	(119,868,272)	5,513,843	5,513,843	*Additional paid-in capital*
Ekuitas entitas restrukturisasi	6	-	50,592,878	55,031,418	*Equity of restructured entities*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		2,122,213	2,122,213	2,122,213	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		33,354,404	30,576,503	28,844,407	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		251,168,984	251,520,430	250,293,958	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		345,360,146	342,933,691	344,413,663	*Equity attributable to owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		95,180	88,413	85,944	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**345,455,326**	**343,022,104**	**344,499,607**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**386,200,863**	**374,409,423**	**374,662,473**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ *Notes*	2022*)	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUE***
Penjualan tenaga listrik	101,934,634	21	64,371,392	*Sales of electricity*
Pendapatan dari konsesi jasa	268,658	10	15,541,932	*Revenue from service concession*
Pendapatan jasa	1,276,819	22	1,177,242	*Service revenue*
Jumlah pendapatan usaha	103,480,111		81,090,566	***Total revenue***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban bahan bakar dan pelumas	61,558,594	23	43,082,162	*Fuel and lubricants expenses*
Penyusutan aset tetap	10,719,996	12	9,284,941	*Property, plant and equipment depreciation*
Perbaikan dan pemeliharaan	4,567,747	24	3,654,670	*Repairs and maintenance*
Beban kepegawaian	4,027,567	25	2,595,486	*Employee costs*
Pembelian tenaga listrik	910,320		221,103	*Purchased electricity*
Penyusutan aset hak guna	775,807	13	773,739	*Right-of-use assets depreciation*
Konsesi jasa	244,974	10	12,850,208	*Service concession*
Sewa	87,643	16	94,207	*Rental*
Lain-lain	660,454		495,611	*Others*
Jumlah beban usaha	83,553,102		73,052,127	***Total operating expenses***
LABA USAHA	**19,927,009**		**8,038,439**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan keuangan	162,383		161,821	*Finance income*
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(19,652)		(44,064)	*Loss on foreign exchange - net*
Beban keuangan	(494,649)		(663,924)	*Finance costs*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	1,110,846	14	790,185	*Share in net income of associates and joint ventures*
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	4,228	12	4,519	*Gain on sale of assets not used in operations*
Kerugian atas penghentian aset keuangan konsesi jasa	(9,349,721)	10	-	*Loss on derecognition of financial assets of service concession*
Beban lain-lain - bersih	(659,458)		(474,478)	*Other expenses - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**10,680,986**		**7,812,498**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	(2,491,672)	26c	(3,128,838)	*Income tax expense*
LABA TAHUN BERJALAN	**8,189,314**		**4,683,660**	***PROFIT FOR THE YEAR***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ *Notes*	2022*)	
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive (loss)/ income for the year***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Bagian (rugi)/penghasilan komprehensif lain dari entitas ventura bersama	(198,317)	14	1,953,192	*Share in other comprehensive (loss)/income from joint ventures*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan	(8,342)	17	(468,924)	*Remeasurements of employee benefit obligations*
Revaluasi atas aset tetap	274,203	12	(462,768)	*Revaluation of property, plant and equipment*
(Beban)/manfaat pajak terkait	(58,489)	26d	204,972	*Related income tax (expenses)/benefits*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	**9,055**		**1,226,472**	***Other comprehensive income for the year, net of tax***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**8,198,369**		**5,910,132**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Profit for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk	8,176,665		4,678,605	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	12,649		5,055	*Non-controlling interests*
Jumlah	**8,189,314**		**4,683,660**	***Total***
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk	8,185,720		5,905,077	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	12,649		5,055	*Non-controlling interests*
Jumlah	**8,198,369**		**5,910,132**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent entity*												
							Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*							
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Ekuitas entitas restrukturisasi/ *Equity of restructured entities*	Saldo laba/*Retained earnings* Sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo laba/*Retained earnings* Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property plant and equipment revaluation surplus*	Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan/ *Remeasurements of employee benefit obligations*	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share in other comprehensive income from associates and joint ventures*	Jumlah penghasilan komprehensif lain/ *Total other comprehensive income*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022 (seperti yang dilaporkan sebelumnya)		2,607,824	5,513,843	-	2,122,213	28,844,407	138,801,763	(4,584)	430,227	139,227,406	178,315,693	85,944	178,401,637	*Balance as at 1 January 2022 (as previously reported)*
Dampak penerapan PSAK No.38	6	-	-	55,031,418	-	-	111,066,552	-	-	111,066,552	166,097,970	-	166,097,970	*Impact from SFAS No.38 implementation*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022[*)] (setelah penyajian kembali)		**2,607,824**	**5,513,843**	**55,031,418**	**2,122,213**	**28,844,407**	**249,868,315**	**(4,584)**	**430,227**	**250,293,958**	**344,413,663**	**85,944**	**344,499,607**	***Balance as at 1 January 2022[*)] (after restatement)***
Dividen	20	-	-		-	(4,027,169)	-	-	-	-	(4,027,169)	(2,586)	(4,029,755)	*Dividends*
Penyesuaian *merging entities*		-	-	(3,357,880)	-	-	-	-	-	-	(3,357,880)	-	(3,357,880)	*Adjustment of merging entities*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	(1,080,660)	-	5,759,265	(360,959)	(365,761)	1,953,192	1,226,472	5,905,077	5,055	5,910,132	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022[*)]		**2,607,824**	**5,513,843**	**50,592,878**	**2,122,213**	**30,576,503**	**249,507,356**	**(370,345)**	**2,383,419**	**251,520,430**	**342,933,691**	**88,413**	**343,022,104**	***Balance as at 31 December 2022[*)]***
Dividen	20	-	-	-	-	(5,759,265)	-	-	-	-	(5,759,265)	(5,882)	(5,765,147)	*Dividends*
Dampak dari restrukturisasi entitas sepengendali	6	175,974,993	(125,382,115)	(50,592,878)	-		-	-	-	-	-	-	-	*Impact from restructuring entities under common control*
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	12	-	-	-	-	360,501	(360,501)	-	-	(360,501)	-	-	-	*Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	8,176,665	213,879	(6,507)	(198,317)	9,055	8,185,720	12,649	8,198,369	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**178,582,817**	**(119,868,272)**	**-**	**2,122,213**	**33,354,404**	**249,360,734**	**(376,852)**	**2,185,102**	**251,168,984**	**345,360,146**	**95,180**	**345,455,326**	***Balance as at 31 December 2023***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/1 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	55,977,194	71,403,731	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(50,515,338)	(61,416,940)	*Cash paid to suppliers, employees and others*
Penerimaan restitusi pajak	554,537	749,293	*Tax restitution received*
Penerimaan bunga	145,593	102,257	*Interest received*
Pembayaran bunga	(567,431)	(760,979)	*Interest paid*
Pembayaran pajak penghasilan	(191,974)	(304,473)	*Income tax paid*
Pembayaran surat ketetapan pajak	(50,122)	(50,404)	*Payments of tax assessment letter*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**5,352,459**	**9,722,485**	***Net cash generated from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(5,238,416)	(4,808,471)	*Additions of property, plant and equipment*
Penambahan piutang lain-lain pihak berelasi	(3,836)	(35,809)	*Additions of other receivables from related parties*
Perolehan aset tidak lancar lain	(76,213)	(20,453)	*Additions of other non-current assets*
Penerimaan investasi efek beragunan aset	-	95,000	*Receipts of investment in asset-backed securities*
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	67,836	44,586	*Proceeds from dividends of associates and joint ventures*
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	118,755	53,989	*Receipts of loan from related parties*
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	4,228	4,519	*Proceeds from sale of assets not used in operations*
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya	-	1,117	*Withdrawal of restricted cash in bank*
Penyertaan modal pada entitas ventura bersama	(31,000)	-	*Capital subscription in joint ventures*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(5,158,646)**	**(4,665,522)**	***Net cash used in investing activities***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Lihat Catatan 30 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 30 for the presentation of the Group's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/2 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa	(684,427)	(721,324)	*Payments of lease liabilities*
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	618,262	-	*Proceeds from loan from a shareholder*
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(272,920)	(272,885)	*Loan repayments from a shareholder*
Kas *pooling* untuk pendanaan umum	-	(3,185,415)**)	*Cash pooling for general funding activities*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(339,085)**	**(4,179,624)**	***Net cash used in financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(145,272)**	**877,339**	***NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(943)	38,644	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**3,682,111**	**2,766,128**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**3,535,896**	**3,682,111**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

**) Kas pooling untuk pendanaan umum timbul sehubungan dengan seolah-olah adanya arus kas dari pengalihan kegiatan usaha pembangkitan listrik

**) *Cash pooling for general funding activities arise in connection with as if there was cash flows from power generation business transferred*

Lihat Catatan 30 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 30 for the presentation of the Group's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/1 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Indonesia Power (dahulu PT Indonesia Power) ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan akta No. 15 tanggal 3 Oktober 1995 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-12496. HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9249 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 89.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 16 tanggal 13 April 2023 dari Notaris Shahreza Annaz S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dalam rangka perubahan nama dan struktur organisasi Perusahaan akibat pembentukan *Subholding* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0022811.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor atau satuan-satuan usaha yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Indonesia Power, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan kepatutan serta etika bisnis pada Perseroan Terbatas, yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Pembangkitan tenaga listrik

ii. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:

- Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis;
- Jasa investigasi, desain, operasi, dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan;
- Konstruksi bangunan elektrikal;

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Indonesia Power (previously PT Indonesia Power) (the "Company") was established in Jakarta based on notarial deed No. 15 dated 3 October 1995 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-12496. HT.01.01.Th.95 dated 3 October 1995, and was published in the State Gazette No. 9249 dated 7 November 1995, Supplement No. 89.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by notarial deed No. 16 dated 13 April 2023 of Shahreza Annaz S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta in order to change the Company's name and organizational structure due to formation of the Subholding of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0022811.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 17 April 2023.

The Company is domiciled in Jakarta, with offices or business units spread all over Indonesia. The Company's head office is located in Gedung Indonesia Power, Jenderal Gatot Subroto Street Kav. 18, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to conduct electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of a Limited Liability Company and carrying out the assignment of the Majority Shareholder in order to support the business activities of the Shareholders by applying the principles of good corporate governance and propriety and business ethics in limited liability companies, which include the following business activities:

i. Power generation

ii. Business related to supply of electricity which includes the following:

- *Engineering and technical consultation activities;*
- *Investigation, design, operation and maintenance services as well as the generation of equipment rental income;*
- *Electrical building construction;*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/2 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan kepatutan serta etika bisnis pada Perseroan Terbatas, yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut: (lanjutan)

ii. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi: (lanjutan)

- Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- Pendidikan teknik swasta;
- Produksi, perbaikan dan perdagangan peralatan tenaga listrik;
- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas;
- Pertambangan batubara;
- Industri produk dari batubara;
- Produksi pengolahan, pengangkutan, dan perdagangan gambut, biomas dan gas alam;
- Pengusahaan tenaga panas bumi;
- Kogenerasi; dan
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air.

iii. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan dapat melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") suatu perusahaan yang berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya (secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") masing-masing sebanyak 8.430 (tidak diaudit) dan 7.150 (tidak diaudit).

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and general information** (continued)*

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to conduct electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of a Limited Liability Company and carrying out the assignment of the Majority Shareholder in order to support the business activities of the Shareholders by applying the principles of good corporate governance and propriety and business ethics in Limited Liability Company, which include the following business activities: (continued)

ii. Business related to supply of electricity which includes the following: (continued)

- *Installation of industrial machines and equipment;*
- *Private engineering education;*
- *Production, repairs, and trade of electric power equipment;*
- *Large-scale trade in solid, liquid and gas fuels products;*
- *Coal mining;*
- *Coal products industry;*
- *Production of processing, transportation, and trade in peat, biomass and natural gas;*
- *Exploitation of geothermal power;*
- *Cogeneration; and*
- *Construction of water resources infrastructure buildings.*

iii. In addition to the business activities referred to above, the Company can conduct trading and/or supporting business activities in the context of optimising the use of resources owned by the Company, including assigning Subsidiaries.

The Company is one of the group of companies owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"), a company domiciled in Jakarta, Indonesia.

As at 31 December 2023 and 2022, the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had a total of 8,430 (unaudited) and 7,150 (unaudited) employees, respectively.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/3 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Pembentukan struktur subholding

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No.S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 69 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, PLN membentuk empat subholding yang terdiri dari:

1. Dua subholding di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PLN Nusantara Power ("PNP") (sebelumnya Pembangkitan Jawa Bali) dan Perusahaan atau disebut PLN Indonesia Power, nama merek yang digunakan;
2. Satu *subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (sebelumnya PLN Batubara); dan
3. Satu *subholding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (*Beyond kWh*), yaitu bernama Indonesia Comnet Plus ("ICON+").

Sebagai tindak lanjut pembentukan subholding PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 77 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tentang Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan Listrik PLN kepada Perusahaan, yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dari Perusahaan yang menerima pemisahan sejak tanggal efektif pemisahan di 1 Januari 2023.

c. Susunan pengurus dan informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Komisaris Utama	Wiluyo Kusdwiharto	Wiluyo Kusdwiharto	*President Commissioner*
Komisaris	Djoko Siswanto	Djoko Siswanto	*Commissioner*
Komisaris	M. Priharto Dwinugroho	M. Priharto Dwinugroho	*Commissioner*
Komisaris	Iskandar Simorangkir	Iskandar Simorangkir	*Commissioner*
Komisaris	Haryanto WS	Haryanto WS	*Commissioner*
Komisaris	Arif Budiman	-	*Commissioner*
Komisaris Independen	Lukmanul Hakim	Lukmanul Hakim	*Independent Commissioner*

1. *GENERAL* *(continued)*

b. Establishment of subholding structures

Based on the Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises ("SOE") of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated 30 December 2022 regarding the Approval for the Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 69, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in South Jakarta, PLN established four subholdings, consisting of:

1. *Two subholdings in the power generation sector, namely PLN Nusantara Power ("PNP") (formerly Pembangkitan Jawa Bali) and the Company or namely PLN Indonesia Power, the branding name used;*
2. *One subholding in the primary energy procurement and logistics sector, namely PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (formerly PLN Batubara); and*
3. *One subholding for business activities outside of power generation, transmission, and distribution (Beyond kWh), namely Indonesia Comnet Plus ("ICON+").*

As a follow-up to the establishment of the PLN subholding in accordance with Notary Deed No. 77 dated 30 December 2022 from Muhammad Hanafi, S.H., Notary in South Jakarta regarding Separation of PLN's Power Generation Business Activities to the Company, it was stated that several assets and liabilities of PLN's power generation business activities will legally be transferred to become the rights and obligations of the Company that received the separation from the effective date of the separation on 1 January 2023.

c. Management and other information

As at 31 December 2023 and 2022, the composition of the Company's management was as follows:

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/4 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan informasi lain (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. *GENERAL* *(continued)*

c. Management and other information *(continued)*

As at 31 December 2023 and 2022, the composition of the Company's management was as follows: (continued)

	2023	**2022**	
Direktur Utama	Edwin Nugraha Putra	Edwin Nugraha Putra	*President Director*
Direktur Operasional Pembangkit Batubara	M. Hanafi Nur Rifai	Rachmad Handoko	*Coal Power plant Operational Director*
Direktur Operasional Pembangkit Gas	Djoko Mulyono	Djoko Mulyono	*Gas Power plant Operational Director*
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Wisnoe Satrijono	Wisnoe Satrijono	*Human Capital Management and Administration Director*
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga	Bernadus Sudarmanta	Bernadus Sudarmanta	*Business Development and Commercial Director*
Direktur Keuangan	Endang Ashtaranti	Endang Ashtaranti	*Finance Director*

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2023 and 2022 was as follows:

Ketua	Wiluyo Kusdwiharto	*Chairman*
Wakil ketua 1	Lukmanul Hakim	*Vice chairman 1*
Wakil ketua 2	Djoko Siswanto	*Vice chairman 2*
Sekretaris/Anggota	Linda Agustina	*Secretary/Members*
Anggota	Afif Farihin	*Members*
Anggota	Leonardus Sitinjak	*Members*

2. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

2. *SUBSIDIARIES*

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ ***Subsidiaries***	**Domisili/** ***Domicile***	**Jenis usaha/** ***Nature of business***	**Persentase pemilikan/** ***Percentage of ownership*** **2023**	**2022**	**Tahun operasi komersial/** ***Year of commercial operations***	**Jumlah aset sebelum eliminasi/** ***Total assets before elimination*** **2023**	**2022**
PT Cogindo Daya Bersama ("CDB")	Jakarta	Cogeneration, pemasok energi, jasa pelayanan energi dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy services and management*	99.99	99.99	1999	1,095,475	1,197,938
PT Artha Daya Coalindo ("ADC")	Jakarta	Perdagangan dan jasa pengangkutan batu bara/*Trade and coal transportation services*	80.00	80.00	1998	742,381	667,885
PT Indo Ridlatama Power ("IRP")	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	90.00	90.00	2018	1,538,507	1,548,881
PT PLN Indonesia Power Renewables ("IPRen") (dahulu/*formerly* PT Putra Indotenaga ("PIT")) dan entitas anak /*and its subsidiaries*	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ *Investment in electricity*	99.99	99.99	2016	8,190,409	7,257,014
PT PLN Indonesia Geothermal ("IGeo") (dahulu/*formerly* PT Indo Tenaga Hijau ("ITH") *)	Jakarta	Pengembangan energi baru dan *terbarukan/Development of new and renewable energy*	96.04	95.81	2019	202,708	92,174
PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") dan entitas anak /*and its subsidiary* *)	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ *Investment in electricity*	99.99	99.99	-	6,444,347	5,693,557
PT Putra Suralaya Indotenaga ("PSI") *)	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ *Investment in electricity*	99.99	99.99	-	6,444,942	5,693,508

*) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/5 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, AMENDEMEN DAN REVISI SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

Penerapan dari amendemen dan revisi terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal";
- Amendemen PSAK No. 46. "Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua"; dan
- Amendemen PSAK No. 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akad ijarah.

Standar baru dan amendemen yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- PSAK No. 74 "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amendemen PSAK No. 2, "Laporan Arus Kas";
- Amendemen PSAK No. 10, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran;
- PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" tentang liabilitas Sewa pada transaksi jual dan sewa-balik; dan
- Amendemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - informasi komparatif.

3. NEW, AMENDMENTS AND REVISIONS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS")

The adoption of the following amendments and revisions to accounting standards which are effective from 1 January 2023 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- *Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current";*
- *Amendment Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies";*
- *Amendment to SFAS No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use";*
- *Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates";*
- *Amendments to SFAS No. 46, "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction";*
- *Amendment to SFAS No. 46, "Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules; and*
- *Amendments to SFAS No. 107, "Ijarah Accounting" about recognition, measurement, and disclosure of Ijarah contracts.*

New standards and amendments issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2024, but early adoption is permitted, are as follows:

- *The amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current";*
- *SFAS No. 74 "Insurance Contracts";*
- *Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Non-Current Liabilities with Covenants";*
- *Amendment to SFAS No. 2, "Cash Flow Statements";*
- *Amendment to SFAS No. 10, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" about lack of exchangeability;*
- *SFAS No. 60, "Financial Instruments - Disclosures" about supplier finance arrangements;*
- *The amendment to SFAS No. 73, "Leases" about lease liability in a sale and leaseback; and*
- *Amendment to SFAS No. 74, "Insurance Contracts" regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - comparative information.*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/6 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, AMENDEMEN DAN REVISI SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru dan amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali untuk PSAK No. 74, Amendemen PSAK No. 10 dan Amendemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia.

3. NEW, AMENDMENTS AND REVISIONS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS") *(continued)*

The above new standard and amendments are effective beginning 1 January 2024, except for SFAS No. 74, Amendment to SFAS No. 10 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and IFAS will be changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/7 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan di Catatan 5.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements *(continued)*

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 5.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/8 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

i. Subsidiaries *(continued)*

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred is the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/9 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

i. Subsidiaries *(continued)*

i.2. Acquisition *(continued)*

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/10 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

- **Akuisisi**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

- ***Acquisitions***

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/11 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Equity method of accounting***

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/12 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas** (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- **Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp" atau "IDR"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Equity method of accounting*** *(continued)*

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- ***Disposal***

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate or joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss, where appropriate.

d. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency").

The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp" or "IDR"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/13 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Foreign currency translation *(continued)*

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions.

As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the exchange rates prevailing at the date of consolidated statement of financial position published by Bank Indonesia, were as follows:

	2023 **Kurs tengah/** ***Middle rate**)***	**2022 Kurs tengah/** ***Middle rate**)***	***2021*** **Kurs tengah/** ***Middle rate**)***	
Yen Jepang ("JPY")	109	118	124	*Japanese Yen ("JPY")*
Dolar Amerika ("US$")	15,439	15,592	14,269	*US Dollars ("US$")*
Euro ("EUR")	17,086	16,713	16,127	*Euro ("EUR")*
Dolar Kuwait ("KWD")	50,220	51,350	47,146	*Kuwait Dollars ("KWD")*

*) dalam nilai penuh

*in full amount *)*

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
(ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
(iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7, "Related Parties Disclosures", as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

(i) Has control or joint control over the reporting entity;

(ii) Has significant influence over the reporting entity; or
(iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/14 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
(ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
(viii) entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

e. Transactions with related parties *(continued)*

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:

(i) The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member);
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
(vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
(viii) the entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/15 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut ini:

(i) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
(ii) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal:

(i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis "dimiliki untuk mendapatkan arus kas" dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

4. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

e. *Transactions with related parties* *(continued)*

Government related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. *Financial assets*

i. *Classification, recognition and measurement*

The Group classifies its financial assets into the following categories:

(i) financial assets measured at amortised cost; and
(ii) financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other means.

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition:

(i) Financial assets measured at amortised cost

This classification applies to debt instruments which are held under a "hold to collect" business model and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/16 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal. (lanjutan)

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

4. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition. (continued)

(ii) Financial assets measured at FVTPL

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed in profit or loss:

- *Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or FVOCI. Subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.*
- *Equity investments that are held for trading or where FVOCI election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.*
- *Derivatives that are not designated as a hedging instrument. All subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.*
- *Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.*

(iii) Financial assets measured at FVOCI

This classification applies to the following financial assets:

- *Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the SPPI criteria.*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/17 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal. (lanjutan)

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini: (lanjutan)

- Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- Investasi ekuitas di mana Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

- Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition. (continued)

(iii) Financial assets measured at FVOCI (continued)

This classification applies to the following financial assets: (continued)

- *All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses that are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.*

- *Equity investments where the Group has irrevocably elected to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income.*

- *The election can be made for each individual investment, however, it is not applicable to equity investments held for trading. Fair value gains or losses on the revaluation of such equity investments, including any foreign exchange component, are recognised in other comprehensive income. When the equity investment is derecognised, there is no reclassification of fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income to profit or loss. Dividends are recognised in profit or loss when the right to receive payment is established.*

The Group reclassifies debt investments, if, and only if, the business model for managing those assets changes.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/18 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tahun pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tahun pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan umum dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan. Kerugian kredit ekspektasian dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit ekspektasian disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu *default* (kerugian kredit ekspektasian seumur hidup).

4. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

iii. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses ("ECL"). To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition

The Group applies a general approach to calculating the ECL for financial assets. ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in the credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for the credit losses that are expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/19 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

iv. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

h. Piutang

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang lain-lain merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 4f untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

4. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

iv. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

h. Receivables

Trade receivables are amounts due from customers in the ordinary course of business. Other receivables are amounts arising from transactions outside of the ordinary course of business. If the collection of the receivables is expected within one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets in the consolidated statements of financial position.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less loss allowance.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 4f for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/20 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Persediaan

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan pada masa mendatang. Persediaan bahan pemeliharaan dibebankan ke beban perbaikan dan pemeliharaan pada periode penggunaan bahan tersebut.

j. Aset keuangan dari jasa konsesi

Piutang yang timbul dari proyek konsesi merupakan jasa yang diberikan sehubungan dengan pengaturan konsesi jasa dimana minimum pembayaran terjamin telah disepakati terlepas dari jumlah pemakaian. Karena panjangnya rencana pembayaran, piutang dicatat sebesar nilai kini dari penerimaan kas yang dijamin dan didiskontokan dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Bunga piutang yang diakumulasikan setiap tahun dicatat sebagai pendapatan keuangan dari pengaturan konsesi jasa dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pembayaran akan dibagi menjadi bagian yang akan dikurangkan dari piutang dan bunga atas jumlah yang belum dibayar.

k. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

4. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

i. Inventories

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage. Supplies of maintenance materials are charged to repair and maintenance expense in the period in which they are used.

j. Financial assets of service concession

Receivables due from the concession project represent services provided in connection with a service concession arrangement for which guaranteed minimum payments have been agreed upon irrespective of the extent of use. Due to the length of the payment plans, receivables are the present value of future guaranteed cash receipts discounted using a certain interest rate. The annual accumulation of interest on these receivables is presented as finance income from the service concession arrangement using the effective interest method. Payments will be divided into a portion to be deducted from the receivables and interest on the unpaid amounts.

k. Property, plant and equipment

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of its land rights so that it accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the right to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 73, "Leases". If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16, "Property, plant and equipment" under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/21 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Setelah pengakuan awal, kelas-kelas aset berikut ini diukur menggunakan metode revaluasi:

- Tanah dan hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadangan utama.

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Tanah dan hak atas tanah tidak didepresiasi. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap tiga tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

k. Property, plant and equipment *(continued)*

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial recognition, the following classes of assets are measured using the revaluation method:

- *Land and land rights;*
- *Buildings, reservoirs and infrastructure;*
- *Installations and power plant;*
- *Transmission equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

The classes of asset above are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the Financial Services Authority ("FSA"). The valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Assets that do not change significantly in fair value must be re-evaluated at least every three years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/22 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

k. Property, plant and equipment *(continued)*

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use the revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to profit or loss.

Property, plant and equipment are depreciated to their residual value using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10 - 50	*Buildings, reservoirs, and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	40	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	10 - 40	*Major spare parts*

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 4l).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 4l).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/23 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Jika aset yang direvaluasi dihapuskan, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan dihapuskan, aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer dan aset tetap yang sedang diperbaiki. Aset tetap ini disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

k. Property, plant and equipment *(continued)*

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs incurred to add, replace part of, or service an item of property, plant and equipment are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

For property, plant and equipment that can no longer be utilised or sold, the carrying amounts are eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

When revalued assets are disposed, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be disposed, property, plant and equipment that will be relocated/ transferred, and property, plant and equipment that will be repaired. These assets are depreciated using the straight-line method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

Construction in progress represents the costs that are directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, the depreciation of property, plant and equipment that is used in the construction and the cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/24 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

m. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai merupakan sewa operasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

l. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill - are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill is recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date of which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

m. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is classified as an operating lease.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/25 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Pendapatan sewa dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu, yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari 2 hingga 40 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian awal sewa, kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The Group as a lessor *(continued)*

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial statements based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment, for which the rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 40 years but may have extension options. A contract may contain both lease and non lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *Fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;*
- *Variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *The exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *Payment of penalties for early termination of the lease, unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/26 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap tahun.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- *where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by Group, which does not have recent third-party financing; and*
- *makes adjustments specific to the lease, e.g. term, country, currency and security.*

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each year.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/27 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 4l).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi perpanjangan dan terminasi

Opsi perpanjangan dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

***4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***m. Leases** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 4l).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of the extension and termination options that are held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if:

- *the modification increase the scope of lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/28 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran Kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau sepenuhnya sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Lease modification (continued)

For lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective data of the lease modification, the Group:

- *allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease; and*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.*

For lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the remeasurement of the lease liability by:

- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.*
- *making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

n. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/29 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama tahun berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

o. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the year, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

p. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/30 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pinjaman (lanjutan)

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak diselesaikan, dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Dampak reformasi acuan suku bunga

Kebijakan praktis berlaku untuk pinjaman. Panduan praktis ini hanya berlaku untuk perubahan yang diperlukan oleh reformasi acuan tingkat suku bunga, yang terjadi jika, dan hanya jika, modifikasi diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga dan dasar baru untuk menentukan arus kas kontraktual yang secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya (yaitu, dasar yang mendahului perubahan).

Jika sebagian atau seluruh perubahan dalam dasar penentuan arus kas kontraktual liabilitas keuangan tidak memenuhi kriteria di atas, panduan praktis di atas pertama-tama diterapkan pada perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan tingkat suku bunga, termasuk memperbarui instrumen suku bunga efektif. Setiap perubahan tambahan dicatat dengan cara normal (yaitu, dinilai untuk modifikasi atau penghentian pengakuan, dengan keuntungan/kerugian modifikasian langsung diakui dalam laba rugi jika instrumen tidak dihentikan pengakuannya).

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Borrowings *(continued)*

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Interbank Offered Rate ("IBOR") reform impact

A practical guidance applies to borrowings. This practical guidance only applies to changes required by interest rate benchmark reform, which occur if, and only if, the modification is required as a direct result of the interest rate benchmark reform and a new basis for determining contractual cash flows that is economically equivalent to the previous basis (that is, the basis that precedes change).

If some or all of the changes in the basis for determining the contractual cash flows of financial liabilities do not meet the above criteria, the above practical guidance is first applied to the changes required by the interest rate benchmark reform, including updating the effective interest rate instrument. Any additional changes are recorded in the normal manner (i.e., assessed for modification or derecognition, with modification gains/losses recognised immediately in profit or loss if the instrument is not derecognised).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/31 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pinjaman (lanjutan)

Dampak reformasi acuan suku bunga (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah menerapkan panduan praktis yang diberikan dalam reformasi acuan suku bunga - tahap 2 terhadap pinjaman pemegang saham. Grup menyimpulkan bahwa dasar baru yang digunakan untuk menentukan arus kas kontraktual secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya.

q. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program imbalan pasti.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Borrowings *(continued)*

IBOR reform impact *(continued)*

For the year ended 31 December 2023, the Group has applied the practical guidance provided in the interest rate benchmark reform - stage 2 to its shareholder loan. The Group concluded that the new basis for determining contractual cash flows is economically equivalent to the previous basis.

q. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Regulations or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Manpower Regulations sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulations or the CLA represent defined benefit plans.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/32 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Employee benefits *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the year in which they arise.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to public or private pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/33 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Grup menyediakan imbalan pemeliharaan kesehatan untuk karyawan yang berhak atas imbalan tersebut. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan pada karyawan aktif dan pensiunan yang memenuhi masa kerja minimum tertentu atau berhenti bekerja karena cacat atau meninggal dunia. Perkiraan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan yang digunakan untuk program pensiun imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode saat terjadinya.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB Grup.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris apabila karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dinas. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Employee benefits *(continued)*

Health care benefits

The Group provides health care benefits to its employees who are entitled to these benefits. The entitlement to these benefits is usually granted to both active and retired employees who have fulfilled the minimum service period or cease working due to disability or death. The expected costs of these benefits are accrued over the years of employment using the same accounting method as used for defined benefit pension plans. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period they arise.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefit. The benefit is paid based on the Group's CLA.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least six years continuously. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The long-term employee benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/34 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

r. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Employee benefits *(continued)*

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that are within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involve the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

r. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provision is measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/35 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

t. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah penilaian sebagai berikut:

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin; dan
v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

s. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

t. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

u. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition has to fulfil five steps of assessment as follows:

i. Identify contract(s) with a customer;
ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct items of goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and
v. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to the customer (which is when the customer obtains control of the goods or services).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/36 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Dalam hal kontrak harga tetap, pelanggan membayar jumlah tetap berdasarkan jadwal pembayaran. Jika jasa yang diberikan oleh Grup melebihi pembayaran, maka aset kontrak diakui. Jika pembayaran melebihi jasa yang diberikan, liabilitas kontrak diakui.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu ketika listrik dikonsumsi oleh PLN.

Aset keuangan dari konsesi jasa

Grup mengadakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBTL") dengan PLN. PJBTL antara PLN dan Grup memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi dan Grup bertindak sebagai operator. Grup setuju untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik ("infrastruktur") dan menyerahkan listrik yang dihasilkan kepada PLN dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam PJBTL.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

u. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue recognition *(continued)*

Revenue from contracts with customers (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

In the case of fixed-price contracts, the customer pays the fixed amount based on a payment schedule. If the services rendered by the Group exceed the payment, a contract asset is recognised. If the payments exceed the services rendered, a contract liability is recognised.

Sales of electricity

Revenue from sales of electricity is recognised based on electricity usage (kWh) to PLN using the tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes the calculation of the capacity component, the fixed cost for operations and maintenance components, the fuel costs, power supply levels and other variables.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

Financial assets from service concession

The Group entered into a Power Purchase Agreement ("PPA") with PLN. The PPA between PLN and the Group meets the definition of a service concession arrangement where PLN acts as a grantor and the Group acts as the operator. The Group agrees to design, finance, construct, own and operate a power generation facility ("infrastructure") and to deliver the generated electricity to PLN in accordance with terms and conditions as agreed in the PPA.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/37 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Aset keuangan dari konsesi jasa (lanjutan)

Infrastruktur digunakan selama masa manfaatnya untuk tujuan pengaturan konsesi jasa. Grup tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap tetapi mengakuinya sebagai aset keuangan, karena Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menerima uang tunai dari PLN melalui pembayaran kapasitas berdasarkan PJBTL. Aset keuangan dicatat sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi" sesuai dengan PSAK No. 71.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi untuk pembangkit tenaga listrik

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi pembangkit tenaga listrik diakui atas dasar pekerjaan yang diselesaikan dalam sepanjang - waktu pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan.

Komponen pembiayaan

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

u. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue recognition *(continued)*

Revenue from contracts with customers (continued)

Financial assets from service concession (continued)

The infrastructure is used for its entire useful life for the purpose of the service concession arrangement. Under service concession accounting, the Group does not recognise the infrastructure as property, plant and equipment but recognises it as a financial asset, as the Group has an unconditional right to receive cash from PLN through the capacity payments under the PPA. The financial asset is accounted for as "financial assets held at amortised cost" in accordance with SFAS No. 71.

Rendering of services on maintenance and operation for power plant

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Group can reasonably measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs that have been incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Group recognises revenue only to the extent of the costs that have been incurred until such a time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Revenue from services on maintenance and operation and power plant is recognised on the basis of the work completed over time as the services are rendered to the customers.

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expense recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/38 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

v. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rate and laws that has been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/39 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas dalam dalam ventura bersama dan asosiasi dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

w. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dimana selisih jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun "Tambahan modal disetor" di ekuitas.

Berdasarkan PSAK No. 38, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali yang terjadi pada tahun berjalan dijelaskan di Catatan 6.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

v. Income tax *(continued)*

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in joint ventures and associates where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

w. Business combination of entities under common control

Business combination transactions between entities under common control are accounted for in accordance with SFAS No. 38 "Business Combination of Entities Under Common Control" where the differences between the purchase consideration and the carrying value of net assets acquired is recorded as part of the "Additional paid-in-capital" account in equity.

In accordance with SFAS No. 38, the financial statement items of the combined entities, for the period in which the business combination under common control occurred and for any comparative period, shall be presented as if the combination had occurred from the beginning of the period for which the combined entities were under common control.

Business combination of entities under common control occurring in the current year is described in Note 6.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/40 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 4, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau Grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

5. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 4, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, the Group considers all of the facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the Group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/41 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut.

Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah; dan
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  - persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, lihat Catatan 14 untuk daftar ventura bersama tersebut. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

***5. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES** (continued)*

***Critical judgements in applying accounting policies** (continued)*

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement.

Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle; and*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  - *the legal form of the separate vehicle;*
  - *the terms of the contractual arrangement; and*
  - *other facts and circumstances (when relevant).*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, see Note 14 for the list of joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/42 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Penentuan kombinasi bisnis atas transaksi pengalihan unit pembangkit dari PLN ke Perusahaan

Pada tanggal 1 Januari 2023, sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dari Perusahaan.

Berdasarkan PSAK No. 38, Perusahaan menentukan apakah transaksi pengalihan aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik ke Perusahaan merupakan suatu kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam PSAK No. 22 yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih merupakan suatu bisnis sebelum Perusahaan dapat menerapkan PSAK No. 38. Suatu bisnis terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut yang berkontribusi terhadap kemampuan untuk menghasilkan output.

Pertimbangan diperlukan dalam menentukan apakah pengalihan aset dan liabilitas usaha pembangkitan tenaga listrik kepada Perusahaan memenuhi definisi kombinasi bisnis dalam PSAK No. 22, Perusahaan telah mempertimbangkan aset-aset yang dialihkan dan aktivitas usaha pembangkitan listrik yang diperoleh terdiri dari input dan proses substantif yang bersama-sama memberikan kontribusi signifikan kemampuan untuk memproduksi output yaitu listrik.

Penentuan informasi keuangan bisnis atas transaksi pengalihan unit pembangkit

Penerapan PSAK No. 38 mensyaratkan untuk melakukan penyajian kembali laporan keuangan seolah-olah penggabungan bisnis telah dilakukan dari periode sebelumnya. Mempertimbangkan bahwa informasi keuangan bisnis unit pembangkit listrik yang dialihkan tidak tersedia secara terpisah, maka manajemen menyusun informasi keuangan tersebut dengan menggunakan pendekatan berdasarkan identifikasi langsung atas aktivitas operasional seperti penjualan dan produksi yang berkaitan dengan area bisnis unit pembangkit listrik yang dialihkan dan alokasi beban berdasarkan *cost driver* terkait.

5. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgements in applying accounting policies *(continued)*

Determination of the business combination for the transfer of power plant unit from PLN to the Company

As at 1 January 2023, several assets and liabilities of PLN's power generation business activities were legally transferred to become the rights and obligations of the Company.

Based on SFAS No. 38, the Company shall determine whether the transfer of assets and liabilities of power generation business to the Company is a business combination by applying the definition in the SFAS No. 22 which requires that the assets acquired and liabilities assumed constitute a business before the Company can apply the SFAS No. 38. A business consists of inputs and processes applied to those inputs that have the ability to contribute to the creation of outputs.

Judgement is required to determine whether the transfer of assets and liabilities of power generation business to the Company meets the definition of business combination under SFAS No. 22, the Company has considered the assets transferred and power generation activities acquired consists of an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to produce output, i.e. electricity.

Determination of financial information of the transfer of power plant unit

The implementation of SFAS No. 38 requires restatement of the financial statements as if the business combination had been carried out from the previous period. Considering that the financial information of the transferred power plant unit business is not available separately, management prepared the financial information using an approach based on direct identification of operational activities such as sales and production related to the transferred power plant generating unit business area and allocation of expenses based on the related cost drivers.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/43 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap, Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

***5. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES** (continued)*

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Provision for ECL of trade receivables and other financial assets

The Group uses a provision matrix to calculate ECL for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g. by geography, product type, customer type and/or rating and other matters).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECL is a significant estimate. The amount of ECL is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

Estimated useful lifes of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant, and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/44 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap (lanjutan)

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

***5. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES** (continued)*

***Sources of estimation uncertainty** (continued)*

Estimated useful lifes of property, plant and equipment (continued)

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and the expected remaining service periods of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities, can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/45 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Sewa – estimasi suku bunga pinjaman inkremental

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

6. PENGALIHAN BISNIS PEMBANGKITAN LISTRIK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN HOLDING SUBHOLDING

Pada tanggal 21 September 2022, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) resmi meluncurkan Holding Subholding PLN. Perusahaan merupakan salah satu anak perusahaan PLN yang bertransformasi menjadi subholding PLN sebagai Generation Company 2.

Pengalihan ini diformalkan melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Republik Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban Perusahaan.

5. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Income taxes (continued)

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

Leases – estimating the incremental borrowing rate

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

6. TRANSFER OF POWER GENERATING BUSINESS RELATED TO FORMATION OF HOLDING SUBHOLDING

On 21 September 2022, the Ministry of State-Owned Enterprises ("SOE") of Indonesia officially launched the Holding Subholding of PLN. The Company is one of the subsidiaries of PLN which was transformed into PLN Subholding as Generation Company 2.

This transfer was formalised through a Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise ("SOE") of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated 30 December 2022, regarding the Approval for The Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 70, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in South Jakarta, which states that some of the assets and liabilities of PLN's power generation business activities will legally transfer to the rights and obligations of the Company.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/46 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENGALIHAN BISNIS PEMBANGKITAN LISTRIK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN HOLDING SUBHOLDING (lanjutan)

Oleh karena PLN memiliki dan memenuhi definisi 'pengendalian' atas Perusahaan, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 65, maka atas transaksi pengalihan bisnis ini dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sebagaimana diharuskan dalam PSAK No. 38, sebagai berikut:

- Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku aset bersih yang diperoleh dicatat pada akun "Tambahan modal disetor" dalam ekuitas Perusahaan.

- Dampak ekuitas dari bisnis pembangkitan listrik yang dialihkan, sebelum tanggal efektif pengalihan (1 Januari 2023), disajikan sebagai "Ekuitas restructured entities" pada bagian ekuitas. Untuk menghindari keragu-raguan, akun ini setara dengan "Ekuitas merging entities" pada ilustrasi yang terdapat pada Lampiran PSAK No.38.

Sebelum pengalihan, bisnis pembangkitan listrik adalah bagian dari unit bisnis yang tergabung dalam PLN. Ketika masih menjadi bagian dari unit bisnis PLN, transaksi kas untuk pembayaran dan penerimaan terkait aktivitas operasi dan investasi di unit bisnis dilakukan secara terpusat melalui rekening Kantor Pusat PLN. Dampak transaksi kas dengan Kantor Pusat PLN ini dicatat sebagai "Kas *pooling* untuk pendanaan umum" dalam laporan arus kas.

Perhitungan tambahan modal disetor pada tanggal pengalihan adalah sebagai berikut:

6. *TRANSFER OF POWER GENERATING BUSINESS RELATED TO FORMATION OF HOLDING SUBHOLDING* *(continued)*

Considering PLN has and fulfills the definition of 'control' over the Company, in accordance with SFAS No. 65, then the transfer of business was accounted for using the pooling-of-interests method as required under SFAS No. 38, as follows:

- *The difference between the purchase considerations and the book value of net assets acquired is recorded in the "Additional paid-in capital" account in the Company's equity.*

- *Equity impact of the power generating business transferred, prior to the effective date of transfer (1 January 2023), is presented as "Equity of restructured entities" in the equity section. For avoidance of doubt, this account is equivalent to the 'Equity of merging entities' in the illustration stipulated within the Appendix of SFAS No.38.*

Prior to the transfer, power generating businesses were parts of the business unit under PLN's. When they were still parts of PLN's business unit, cash transaction for payments and receipts related to the operating and investing activities in the business unit were conducted centrally through the accounts of PLN's Head Office. The impact of cash transactions with PLN's Head Office is recorded as "Cash pooling for general funding activities" in the statement of cash flows.

Calculation of additional paid-in capital at the date of transfer is as follows:

	1 Januari/ *January* 2023	
Imbalan yang dialihkan PLN kepada Perusahaan melalui penerbitan saham	(175,974,993)	*Considerations transferred by PLN to the Company through issuance of shares*
Nilai buku aset bersih yang diperoleh	50,592,878	*Book value of net assets acquired*
Selisih transaksi restrukturisasi Entitas sepengendali	**(125,382,115)**	***Difference in value from restructuring transaction of entities under common control***

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/47 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENGALIHAN BISNIS PEMBANGKITAN LISTRIK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN HOLDING SUBHOLDING (lanjutan)

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 38, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan sedemikian rupa seolah-olah transaksi pengalihan bisnis pembangkitan listrik ini telah efektif sejak 1 Januari 2022, yang merupakan permulaan dari periode sajian paling awal.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian telah disajikan kembali hanya untuk akun-akun yang terkena dampak atas pengalihan kegiatan usaha pembakitan listrik PLN.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari 2022 telah disajikan kembali sebagai berikut:

6. TRANSFER OF POWER GENERATING BUSINESS RELATED TO FORMATION OF HOLDING SUBHOLDING *(continued)*

In accordance with the requirements of SFAS No. 38, the Company has restated the financial statements as if the transfer of these power generating business had been effective as of 1 January 2022, which is the beginning of the earliest period presented.

The notes to the consolidated financial statements has been restated only for those accounts impacted by the transfer of PLN's power generation business activities.

The Company's financial statements as at 31 December and 1 January 2022 have been restated as follows:

	31 Desember/*December* 2022					
	Disajikan sebelumnya/ *Previously presented*	*Carve Out*	Jumlah/ *Total*	Eliminasi/ *Elimination*	Disajikan kembali/ *As restated*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN						***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak berelasi	30,029,968	-	30,029,968	(2,243,073)	27,786,895	*Related parties*
Persediaan	2,704,341	2,270,995	4,975,336	-	4,975,336	*Inventories*
Piutang lain-lain						*Other receivables -*
Pihak berelasi	163,221	409,710	572,931	-	572,931	*Related parties*
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	107,358,638	175,179,245	282,537,883	-	282,537,883	*Property, plant and equipment*
Aset hak guna	2,683,714	763,751	3,447,465	-	3,447,465	*Right-of-use assets*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak ketiga	54,582	29,373	83,955	-	83,955	*Third parties*
Aset tidak lancar lain	212,735	714	213,449	-	213,449	*Other non-current assets*
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak berelasi	1,257,833	(805,917)	451,916	2,243,073	2,694,989	*Related parties*
Pihak ketiga	2,458,475	749,162	3,207,637	-	3,207,637	*Third parties*
Utang lain-lain	-	595	595	-	595	*Other payable*
Beban masih harus dibayar	263,584	16,376	279,960	-	279,960	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						*Current maturities of long-term liabilities*
Liabilitas sewa	444,170	9,539	453,709	-	453,709	*Lease liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	3,131,725	12,510,846	15,642,571	-	15,642,571	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun						*Long-term liabilities - net of current portion*
Liabilitas sewa	2,524,395	27,611	2,552,006	-	2,552,006	*Lease liabilities*
EKUITAS						***EQUITY***
Ekuitas entitas restrukturisasi	-	50,592,878	50,592,878	-	50,592,878	*Equity of restructured entities*
Penghasilan komprehensif lain	140,453,878	111,066,552	251,520,430	-	251,520,430	*Other comprehensive income*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/48 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENGALIHAN BISNIS PEMBANGKITAN LISTRIK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN HOLDING SUBHOLDING (lanjutan)

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari 2022 telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

6. TRANSFER OF POWER GENERATING BUSINESS RELATED TO FORMATION OF HOLDING SUBHOLDING *(continued)*

The Company's financial statements as at 31 December and 1 January 2022 have been restated as follows: (continued)

	31 Desember/*December* 2022					
	Disajikan sebelumnya/ *Previously presented*	*Carve Out*	Jumlah/ *Total*	Eliminasi/ *Elimination*	Disajikan kembali/ *As restated*	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
PENDAPATAN USAHA						***REVENUE***
Penjualan tenaga listrik	20,405,875	43,965,517	64,371,392	-	64,371,392	*Sales of electricity*
Pendapatan jasa	4,561,302	-	4,561,302	(3,384,060)	1,177,242	*Service revenue*
BEBAN USAHA						***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	10,837,396	32,244,766	43,082,162	-	43,082,162	*Fuel and lubricants expenses*
Perbaikan dan pemeliharaan	3,331,770	3,706,960	7,038,730	(3,384,060)	3,654,670	*Repairs and Maintenance*
Penyusutan aset tetap	2,916,264	6,368,677	9,284,941	-	9,284,941	*Property, plant and equipment depreciation*
Kepegawaian	2,119,510	475,976	2,595,486	-	2,595,486	*Employee costs*
Penyusutan aset hak guna	730,321	43,418	773,739	-	773,739	*Right-of-use assets depreciation*
Sewa	51,985	42,222	94,207	-	94,207	*Rental*
Lain-lain	398,686	96,925	495,611	-	495,611	*Others*
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing - bersih	65,436	(109,500)	(44,064)	-	(44,064)	*(Losses)/gains on foreign exchange – net*
Beban keuangan	(333,305)	(330,619)	(663,924)	-	(663,924)	*Finance costs*
Beban lain-lain - bersih	(316,439)	(158,039)	(474,478)	-	(474,478)	*Other expense – net*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1,659,764)	(1,469,074)	(3,128,838)	-	(3,128,838)	***INCOME TAX EXPENSES***

	31 Desember/*December 2022*			
	Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Setelah penyajian kembali// *After restatement*	
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENT OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	30,253,662	41,150,069	71,403,731	Cash receipts *from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok, Karyawan, dan lainnya	(25,682,024)	(35,734,916)	(61,416,940)	Cash paid *to suppliers, employees, and others*
Pembayaran bunga	(433,890)	(327,089)	(760,979)	*Interest paid*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(2,903,104)	(1,905,367)	(4,808,471)	*Additions of property, plant and equipment*
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	37,166	16,816	53,982	*Receipts of loan from related parties*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa	(707,226)	(14,098)	(721,324)	*Payments of lease liabilities*
Kas *pooling* untuk pendanaan umum**)	-	(3,185,415)	(3,185,415)	*Cash pooling for general funding activities**)*

**) Kas *pooling* untuk pendanaan umum yang timbul sehubungan dengan seolah-olah adanya arus kas dari transaksi pengalihan aset dan liabilitas

***) Cash pooling for general funding activities arise in connection with as if there was cash flows from transfer assets and liabilities transactions*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/49 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENGALIHAN BISNIS PEMBANGKITAN LISTRIK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN HOLDING SUBHOLDING (lanjutan)

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari 2022 telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

6. TRANSFER OF POWER GENERATING BUSINESS RELATED TO FORMATION OF HOLDING SUBHOLDING (continued)

The Company's financial statements as at 31 December and 1 January 2022 have been restated as follows: (continued)

	1 Januari/*January* 2022					
	Disajikan sebelumnya/ *Previously presented*	*Carve Out*	Jumlah/ *Total*	Eliminasi/ *Elimination*	Disajikan kembali/ *As restated*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN						***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak berelasi	27,248,591	-	27,248,591	(1,674,460)	25,574,131	*Related parties*
Persediaan	1,385,768	1,277,311	2,663,079	-	2,663,079	*Inventories*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak berelasi	59,011	255,256	314,267	-	314,267	*Related parties*
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	107,729,655	179,927,774	287,657,429	-	287,657,429	*Property, plant and equipment*
Aset hak guna	3,307,776	1,098,909	4,406,685	-	4,406,685	*Right-of-use assets*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak ketiga	48,115	30,402	78,517	-	78,517	*Third parties*
Aset tidak lancar lain	385,705	33,487	419,192	-	419,192	*Other non-current assets*
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha						*Trade receivable*
Pihak berelasi	1,268,661	3,654,476	4,923,137	(1,674,460)	3,248,677	*Related parties*
Pihak ketiga	2,340,280	1,672,093	4,012,373	-	4,012,373	*Third parties*
Utang lain-lain	-	327	327	-	327	*Other payable*
Beban masih harus dibayar	319,998	109,298	429,296	-	429,296	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						*Current maturities of long-term liabilities*
Liabilitas sewa	670,239	10,813	681,052	-	681,052	*Lease liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	1,776,220	11,041,772	12,817,992	-	12,817,992	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun						*Long-term liabilities - net of current portion*
Liabilitas sewa	2,884,932	36,390	2,921,322	-	2,921,322	*Lease liabilities*
EKUITAS						***EQUITY***
Ekuitas entitas restrukturisasi	-	55,031,418	55,031,418	-	55,031,418	*Equity of restructured entities*
Penghasilan komprehensif lain	139,227,406	111,066,552	250,293,958	-	250,293,958	*Other comprehensive income*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/50 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. KAS DAN SETARA KAS / *CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2023	2022	
Kas	46	67	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
Rupiah	3,125,320	2,761,846	*Rupiah*
US$	89,024	334,304	*US$*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")*
Rupiah	162,865	263,602	*Rupiah*
US$	14,722	65,223	*US$*
EUR	14,607	6,913	*EUR*
JPY	6	7	*JPY*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*
Rupiah	86,021	106,347	*Rupiah*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")*
Rupiah	27,150	50,296	*Rupiah*
Subjumlah	3,519,715	3,588,538	*Subtotal*
Pihak ketiga			*Third parties*
The National Bank of Kuwait			*The National Bank of Kuwait*
KWD	10,357	52,815	*KWD*
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")			*PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")*
US$	169	2,091	*US$*
Rupiah	109	41	*Rupiah*
Subjumlah	10,635	54,947	*Subtotal*
Jumlah	**3,530,396**	**3,643,552**	***Total***
Setara kas - deposito berjangka			*Cash equivalents - time deposits*
Pihak berelasi			*Related parties*
BNI	2,500	35,459	*BNI*
Bank Mandiri	3,000	3,000	*Bank Mandiri*
BRI	-	100	*BRI*
Subjumlah	5,500	38,559	*Subtotal*
Jumlah	**3,535,896**	**3,682,111**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun - Rupiah	2.25% - 2.75%	2.75% - 3.25%	*Interest rates per annum on time deposits - Rupiah*

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information about the transactions and balances with related parties

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/51 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA / *8. TRADE RECEIVABLES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Pihak berelasi	52,138,602	27,789,360	25,574,131	*Related parties*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian Pihak berelasi	(2,681)	(2,465)	-	*Allowance for ECL Related parties*
Jumlah, bersih - pihak berelasi	**52,135,921**	**27,786,895**	**25,574,131**	***Total, net - related parties***
Pihak ketiga	118,793	121,167	136,474	*Third parties*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian Pihak ketiga	(33,127)	(39,603)	(45,051)	*Allowance for ECL Third parties*
Jumlah, bersih - pihak ketiga	**85,666**	**81,564**	**91,423**	***Total, net - third parties***
Jumlah, bersih	**52,221,587**	**27,868,459**	**25,665,554**	***Total, net***

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade receivables is as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Belum jatuh tempo	6,910,456	3,458,957	3,517,804	*Not yet due*
Sudah jatuh tempo				*Past Due*
1 s/d 30 hari	8,482,146	3,198,233	3,042,927	*1 to 30 days*
31 s/d 60 hari	8,838,556	3,009,191	3,208,829	*31 to 60 days*
61 s/d 90 hari	8,864,957	3,157,725	1,012,287	*61 to 90 days*
91 s/d 120 hari	7,593,944	3,155,779	3,078,952	*91 to 120 days*
> 120 hari	11,567,336	11,930,642	11,849,806	*> 120 days*
Jumlah	**52,257,395**	**27,910,527**	**25,710,605**	***Total***

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut: / *The movement of the allowance for ECL is as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Saldo awal tahun	42,068	45,051	43,651	*Balance at beginning of year*
Penambahan	-	2,466	1,400	*Additions*
Pengurangan	(6,260)	(5,449)	-	*Deductions*
Saldo akhir tahun	**35,808**	**42,068**	**45,051**	***Balance at end of year***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6 / *) *As restated, see Note 6*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 1 Januari 2022 adalah cukup untuk menutupi kerugian kredit ekspektasian nilai dari piutang usaha.

Management believes that the allowance for ECL for trade receivables as at 31 December 2023, 2022, dan 1 January 2022 is sufficient to cover the ECL of trade receivables.

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information about the transactions and balances with related parties.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/52 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERSEDIAAN / *9. INVENTORIES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Bahan bakar dan pelumas	5,269,286	4,770,409	2,400,447	*Fuel and lubricants*
Suku cadang	358,323	444,309	400,728	*Spare parts*
Jumlah	5,627,609	5,214,718	2,801,175	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(343,634)	(239,382)	(138,096)	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Jumlah, bersih	**5,283,975**	**4,975,336**	**2,663,079**	***Total, net***

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Saldo awal tahun	239,382	138,096	16,531	*Balance at beginning of year*
Penambahan	104,252	101,286	121,565	*Additions*
Saldo akhir tahun	**343,634**	**239,382**	**138,096**	***Balance at end of year***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan dan persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 1 Januari 2022.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2023, 2022, dan 1 January 2022.

Grup tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

The Group does not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

Jumlah pemakaian persediaan yang diakui sebagai beban usaha dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk bahan bakar dan pelumas adalah masing-masing sebesar Rp61.507.563 dan Rp43.083.162 (Catatan 23), dan pemakaian suku cadang adalah masing-masing sebesar Rp1.041.900 dan Rp586.247 (Catatan 24).

The total amount of inventories used recognised as operating expenses in profit or loss for the years ended 31 December 2023 and 2022 for fuel and lubricants amounting to Rp61,507,563 and Rp43,083,162, respectively (Note 23), and for spare parts used amounting to Rp1,041,900 and Rp586,247, respectively (Note 24).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/53 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA / *10. FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION*

Akun ini merupakan tagihan jangka panjang dari PLN sehubungan dengan pembayaran kapasitas minimum di masa depan yang ditetapkan dalam PJBTL yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai akibat dari adopsi ISAK No.16.

This account represents long-term receivables from PLN in relation to the future minimum capacity payments set forth in PPA that have been classified as financial assets as a result of adoption of ISFAS No. 16.

	2023	2022	
Pembayaran minimum kapasitas di masa depan			*Future minimum capacity payments*
Tidak lebih dari satu tahun	201,523	3,187,470	*Not later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	793,834	12,749,879	*Later than a year but not later than five years*
Lebih dari lima tahun	781,554	57,703,806	*Later than five years*
Jumlah pembayaran minimum kapasitas di masa depan	1,776,911	73,641,155	*Total future minimum capacity payments*
Dikurangi: penghasilan keuangan yang belum diterima	(628,123)	(31,869,258)	*Less: unearned financial revenue*
Nilai kini pembayaran minimum kapasitas di masa depan	1,148,788	41,771,897	*Present value of future capacity payments*
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	**(119,839)**	**(991,046)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**1,028,949**	**40,780,851**	***Non-current portion***

a. Perusahaan / *a. The Company*

Pada tanggal 10 Maret 2017, Perusahaan menandatangani PJBTL atas pembangkit listrik tenaga uap Suralaya ("SLA") unit 1-7. Jangka waktu perjanjian adalah lima tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Pada tanggal 22 Agustus 2017, perjanjian tersebut telah diamendemen dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Amendemen tersebut terutama mencakup perubahan atas jangka waktu perjanjian menjadi 30 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2046. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, manajemen berpendapat bahwa PJBTL sesuai dengan kriteria perjanjian konsesi jasa dan melakukan reklasifikasi aset tetap SLA unit 1-7 dengan jumlah tercatat sebesar Rp52.909.454 sebagai aset keuangan dari konsesi jasa.

On 10 March 2017, the Company entered into a PPA for Suralaya steam power plant ("SLA") units 1-7. The term of the agreement is five years, effective from 1 January 2017. On 22 August 2017, the agreement was amended and applied retroactively since 1 January 2017. The amendment primarily covers changes to the terms of the agreement to 30 years, effective from 1 January 2017 until 31 December 2046. Based on the agreement, management believes that PPA meets the criteria of service concession arrangement and reclassified its property, plant and equipment SLA unit 1-7 with carrying value of Rp52,909,454 as financial assets of service concession.

Pada tanggal 30 December 2022, Perusahaan dan PLN telah menandatangani kontrak perubahan dan pernyataan kembali atas PJBTL untuk SLA unit 1-7 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan akhir periode penagihan Desember 2032 (Catatan 28a). Dengan ditandatanganinya perubahan dan pernyataan kembali atas PJBTL ini, maka PJBTL sebelumnya sudah tidak berlaku. Manajemen berpendapat bahwa perubahan PJBTL tersebut telah mengakhiri perjanjian konsesi jasa dengan PLN sejak 1 Januari 2023.

On 30 December 2022, the Company and PLN have signed a contract of amendment and restatement of the PPA for SLA units 1-7 which became effective on 1 January 2023 with a term of 10 years from the effective date until the end of the December 2032 billing period (Note 28a). With the signing of the amendment and restatement of this PPA, therefore the previous PPA is no longer valid. Management believes that the changes to the PPA have ended the service concession agreement with PLN since 1 January 2023.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/54 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA (lanjutan)

a. Perusahaan (lanjutan)

Atas pengakhiran perjanjian konsesi jasa dengan PLN, Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset keuangan dari konsesi jasa dengan jumlah tercatat pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp40.511.862.

Perusahaan mengakui aset tetap SLA unit 1-7 sebesar Rp31.162.141 yang sesuai dengan nilai wajar aset keuangan yang diserahkan. Dengan demikian, Perusahaan mengakui kerugian atas selisih jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai wajarnya sebesar Rp9.349.721 pada laba rugi.

b. IRP

Pada tanggal 30 Oktober 2007, IRP mengadakan PJBTL dengan PLN untuk jangka waktu 30 tahun setelah tanggal operasi komersial yaitu pada tanggal 30 November 2018. Dalam PJBTL tersebut PLN akan membayar pasokan tenaga listrik yang akan disediakan oleh IRP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup beberapa komponen yaitu biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam PJBTL.

Manajemen berpendapat bahwa PJBTL sesuai dengan kriteria perjanjian konsesi jasa.

Grup mengakui pendapatan dari konsesi jasa sebagai berikut:

	2023	2022	
Bahan bakar dan pemeliharaan	178,383	13,189,468	*Fuel and maintenance*
Pendapatan keuangan	90,275	2,352,464	*Finance income*
Jumlah	**268,658**	**15,541,932**	***Total***

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Beban konsesi jasa yang diakui pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Bahan bakar dan pemeliharaan	244,974	12,850,208	*Fuel and maintenance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian tidak material sehingga penyisihan dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

10. *FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION* *(continued)*

a. The Company *(continued)*

Due to the termination of service concession agreement with PLN, the Company has derecognised the financial assets from service concession with the carrying amount on 1 January 2023 amounting to Rp40,511,862.

The Company recognised property, plant and equipment of SLA unit 1-7 amounting to Rp31,162,141 which is equal to the fair value of the financial assets given up. As such, the Company recognised loss on the difference between the carrying amount of financial assets and its fair value amounting to Rp9,349,721 in profit or loss.

b. IRP

On 30 October 2007, IRP entered into a PPA with PLN for a period of 30 years after the Commercial Operation Date ("COD") on 30 November 2018. Based on the PPA, PLN will pay for the power supply electricity to be provided by IRP in the amount that is determined by the formula of payment. The payments cover several components, that is capacity, energy, operational and maintenance costs depending on the energy supply level and other variables specified in the PPA.

Management believes that PPA meets the criteria of service concession arrangements.

The Group recognised revenue of service concession as follows:

Refer to Note 27 for information about the transactions and balances with related parties.

Service concession expenses recognised during the years were as follows:

The Group's management opinion is that the provision for ECL is not material, therefore, it is not considered necessary as at 31 December 2023 and 2022.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/55 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI / *11. OTHER RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	437,855	415,493	358,699	*PT Rajamandala Electric Power ("REP")*
PLN	240,839	154,594	145,446	*PLN*
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	195,167	168,910	6,795	*PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")*
PT GCL Indotenaga ("GCL")	58,923	70,422	-	*PT GCL Indotenaga ("GCL")*
PNP	55,566	-	-	*PNP*
PT Perta Daya Gas ("PDG")	36,387	79,733	114,012	*PT Perta Daya Gas ("PDG")*
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	1,411	3,402	243	*PT Indo Pusaka Berau ("IPB")*
Lain-lain	93,857	176,145	157,152	*Other*
Subjumlah	1,120,005	1,068,699	782,347	*Subtotal*
Dikurangi: Cadangan kerugian kredit ekspektasian Pihak berelasi	(48,719)	(48,719)	-	*Less: Allowance for ECL Related parties*
Jumlah	1,071,286	1,019,980	782,347	*Total*
Dikurangi: bagian jangka pendek	**(336,533)**	**(572,931)**	**(314,267)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**734,753**	**447,049**	**468,080**	***Long-term portion***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for ECL is as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Saldo awal tahun	48,719	-	-	*Balance at beginning of year*
Penambahan	-	48,719	-	*Additions*
Saldo akhir tahun	**48,719**	**48,719**	**-**	***Balance at end of year***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo pihak berelasi

Refer to Note 27 for information on the details of transactions and balance with related parties.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah cukup untuk menutupi kerugian kredit ekspektasian nilai dari piutang lain-lain pihak berelasi.

Management believes that the allowance for ECL for other receivables from related parties as at 31 December 2023 and 2022 is sufficient to cover the ECL of other receivables from related parties.

REP

Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$9.399.962 kepada REP untuk membiayai proyek 46,6 Megawatt di Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Sungai Citarum di Cianjur, Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan bunga 10,00% per tahun dengan jangka waktu 17,5 tahun setelah grace period selama pembangunan.

REP

On 4 July 2014, the Company provided a long-term loan of US$9,399,962 to REP for the financing of the 46.6 Megawatt project in Hydroelectric Power Plant ("HPP") Citarum River at Cianjur, West Java. This loan bears interest of 10.00% per annum with a 17.5 years term of repayment after a grace period during construction.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/56 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI (lanjutan)

REP (lanjutan)

Tanggal operasi komersial PLTA telah diamendemen, terakhir kali melalui Amendemen Pertama atas PJBTL tertanggal 10 Agustus 2017, menjadi 57 bulan setelah tanggal pendanaan. Pada tanggal 12 Mei 2019, PLTA Rajamandala 1 x 47 MW telah beroperasi secara komersial berdasarkan sertifikat tanggal operasi komersial No. 188.BA/159/REP/2019. Pokok pinjaman akan ditagihkan dan terutang setiap enam bulan sejak tanggal operasi komersial.

Pada tanggal 23 November 2016, Perusahaan memberikan tambahan pinjaman sebesar US$5.724.490 kepada REP dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pinjaman sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pokok pinjaman Perusahaan kepada REP masing-masing adalah sebesar US$15.124.452 (setara dengan Rp233.507) dan US$15.124.452 (setara dengan Rp235.820) dan piutang bunga masing-masing sebesar US$12.999.560 (setara dengan Rp200.700) dan US$11.487.115 (setara dengan Rp179.107). Piutang lainnya sebesar Rp3,648 (2022: Rp566) merupakan biaya relokasi pegawai.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penghasilan bunga masing-masing adalah sebesar US$1.512.445 (setara dengan Rp23.011) dan US$1.512.445 (setara dengan Rp22.565) yang disajikan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan oleh REP. Perusahaan tidak berhak untuk meminta pembayaran kembali atas pokok pinjaman yang diberikan kepada REP sebelum Tanggal Pembebasan Fasilitas Senior, namun untuk pembayaran bunga yang dilakukan oleh REP harus memenuhi syarat dan kondisi yang tertuang dalam perjanjian pemegang saham sebagai berikut:
- Uang yang ada pada kredit dari Rekening Distribusi; atau
- Sumber - sumber lain yang dapat disetujui secara tertulis oleh Agen Antar Kreditur.

PLN

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang lain-lain pihak berelasi dari PLN merupakan piutang penggunaan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp95.393 (2022: Rp9.148) dan penggantian terkait biaya pembebasan lahan sebesar Rp145.446 (31 Desember 2022: Rp145.446 dan 1 Januari 2022: Rp145.446).

***11. OTHER RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES** (continued)*

REP (continued)

The COD has been amended, most recently through the First Amendment of PPA dated 10 August 2017, 57 months after the financial close date. On 12 May 2019, the Rajamandala 1 x 47 MW HPP was commercially operated based on COD certificate No. 188.BA/159/REP/2019. The principal shall be invoiced and due every six months starting on COD.

On 23 November 2016, the Company provided additional loans of US$5,724,490 to REP with similar terms and conditions to the previous loan.

As at 31 December 2023 and 2022, the Company's principal outstanding loan balance to REP was US$15,124,452 (equivalent to Rp233,507) and US$15,124,452 (equivalent to Rp235,820), respectively, and interest receivables amounting to US$12,999,560 (equivalent to Rp200,700) and US$11,487,115 (equivalent to Rp179,107) respectively. Other receivables of Rp3,648 (2022: Rp566) represent costs of employee relocation.

For the years ended 31 December 2023 and 2022, interest income amounting to US$1,512,445 (equivalent to Rp23,011) and US$1,512,445 (equivalent to Rp22,565) which is presented in profit or loss.

As at 31 December 2023 and 2022, there was no repayment of the loan principal and interest paid by REP. The Company is not entitled to request repayment of principal loan provided to REP before the Senior Facility Release Date, while interest paid by REP should fulfil several terms and conditions as stated in the shareholder agreement as follows:
- *The monies standing to the credit of the Distribution Accounts; or*
- *Other sources as may be approved in writing by the Intercreditor Agent.*

PLN

As of 31 December 2023, other receivables from PLN represent receivables from usage of fuel and lubricants amounting to Rp95,393 (2022: Rp9,148) and reimbursements related to land acquisitions cost amounting to Rp145,446 (31 December 2022: Rp145,446 and 1 January 2022: Rp145,446).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/57 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG LAIN-LAIN DARI PIHAK - PIHAK BERELASI (lanjutan)

SGPJB

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang lain-lain pihak berelasi dengan SGPJB merupakan piutang atas penggunaan batubara oleh SGPJB sebesar Rp195.167 (31 Desember 2022: Rp168.910 dan 1 Januari 2022: Rp6.795).

GCL

Pada tanggal 27 Juni 2023, GCL melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 005/GMS-GCLIT/2023 telah mengumumkan dividen kepada IPRen sebesar US$3.500.000 atau setara dengan Rp52.591 (Catatan 14).

Selama tahun 2023, GCL telah membayar IPRen atas sisa saldo piutang dividen 2022 yang belum dibayar sebesar US$4.200.000 setara dengan Rp64.090.

Sehingga sisa saldo piutang dividen yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US$3.816.530 (2022: US$4.516.530) atau setara dengan Rp58.923 (2022: Rp70.422).

PNP

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang lain-lain pihak berelasi dengan PNP merupakan piutang atas penggunaan gas oleh PNP sebesar Rp55.566.

PDG

Pada tanggal 12 Juni 2013, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang kepada PDG, ventura bersama, sebesar US$18.837.112 untuk membiayai Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, perjanjian ini telah diamendemen yang merubah jumlah pinjaman menjadi US$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan dana sampai dengan tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 Desember 2023. Pada tanggal 27 November 2020, perjanjian ini telah diamendemen yang merubah tanggal jatuh tempo pinjaman ini menjadi 1 Desember 2024. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,50% per tahun.

***11. OTHER RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES** (continued)*

SGPJB

As of 31 December 2023, other receivables from SGPJB are receivables for the use of coal by SGPJB amounting to Rp195,167 (31 December 2022: Rp168,910 and 1 January 2022: Rp6,795).

GCL

On 27 June 2023, GCL through the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 005/GMS-GCLIT/2023 has declared its dividends to IPRen amounting to US$3,500,000 or equivalent to Rp52,591 (Note 14).

During 2023, GCL has paid IPRen the remaining amount of the dividend receivable that has not been paid in 2022 amounted to US$4,200,000 or equivalent to Rp64,090.

Therefore remaining amount of the dividend receivables that has not been paid as of 31 December 2023 amounting to US$3,816,530 (2022: to US$4,516,530) or equivalent to Rp58,923 (2022: Rp70,422).

PNP

As of 31 December 2023, other receivables from related parties with PNP represent receivables for gas use by PNP amounting to Rp55,566.

PDG

On 12 June 2013, the Company provided a long-term loan to PDG, a joint venture, amounting to US$18,837,112, for financing the Tambak Lorok Steam Power Plant, Semarang. On 30 November 2015, this agreement has been amended which resulted in the revision of the total loan provided by the Company to US$18,191,529, in accordance with the funds transferred up to 9 January 2014 and the maturity date of the loan is 1 December 2023. On 27 November 2020, this agreement has been amended to change the maturity of the loan to 1 December 2024. This loan bears an interest rate of 6.50% per annum.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/58 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG LAIN-LAIN DARI PIHAK - PIHAK BERELASI (lanjutan)

PDG (lanjutan)

Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap enam bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pokok pinjaman Perusahaan dari PDG masing-masing adalah sebesar US$2.273.941 (setara dengan Rp35.107) dan US$4.547.882 (setara dengan Rp70.911) dan piutang bunga sebesar US$34.077 (setara dengan Rp526) dan US$459.361 (setara dengan Rp7.162).

Pada tahun 2023, PDG melakukan pembayaran pinjaman atas pokok sebesar US$2.273.941 (setara dengan Rp34.681) dan bunga sebesar US$680.250 (setara dengan Rp10.361) (2022: pokok US$2.273.941 (setara dengan Rp34.644) dan bunga sebesar US$828.877 (setara dengan Rp12.614)).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penghasilan bunga masing-masing adalah sebesar US$254.966 (setara dengan Rp3.873) dan US$405.235 (setara dengan Rp6.318) yang disajikan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang lainnya sebesar Rp754 dan Rp1.660, merupakan piutang biaya pegawai.

IPB

Pada tanggal 25 Oktober 2023, IPB melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") telah mengumumkan dividen kepada Grup sebesar Rp1.881 (Catatan 14).

Selama tahun 2023, IPB telah membayar Perusahaan atas sisa saldo piutang dividen 2022 yang belum dibayar sebesar Rp3.276 dan pembayaran dividen 2023 sebesar Rp470.

Sehingga sisa saldo piutang dividen yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.411 (2022: Rp3.276).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang lainnya sebesar nil dan Rp126, merupakan piutang biaya pegawai.

***11. OTHER RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES** (continued)*

PDG (continued)

The total interest on the principal during the construction of the project is effective from the date of cash withdrawal until 30 May 2014 and paid in full on 1 June 2016. The principal shall be collected every six months from 1 June 2016 until 1 December 2024.

As at 31 December 2023 and 2022, the Company's principal outstanding loan balance from PDG was US$2,273,941 (equivalent to Rp35,107) and US$4,547,882 (equivalent to Rp70,911), respectively, and interest receivables amounting to US$34,077 (equivalent to Rp526) and US$459,361 (equivalent to Rp7,162), respectively.

In 2023, PDG has made loan payments of principal amounting to US$2,273,941 (equivalent to Rp34,681) and interest amounting to US$680,250 (equivalent to Rp10,361) (2022: principal US$2,273,941 (equivalent to Rp34,644) and interest amounting to US$828,877 (equivalent to Rp12,614)).

For the years ended 31 December 2023 and 2022, interest income amounting to US$254,966 (equivalent to Rp3,873) and US$405,235 (equivalent to Rp6,318) which is presented in profit or loss.

As at 31 December 2023 and 2022, other receivables amounting to Rp754 and Rp1,660, respectively, represent receivable of employee costs.

IPB

On 25 October 2023, IPB through the General Meeting of Shareholders ("GMS") declared its dividends to the Group, amounted to Rp1,881 (Note 14).

During 2023, IPB has paid the Company the remaining amount of the dividend receivable that has not been paid in 2022 amounted to Rp3,276 and payment for 2023 dividend amounted to Rp470.

Therefore remaining amount of the dividend receivables that has not been paid as of 31 December 2023 amounting to Rp1,411 (2022: Rp3,276)

As at 31 December 2023 and 2022, other receivables amounting to nil and Rp126 respectively, represent receivable of employee costs.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/59 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP / *12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*

	31 Desember/*December* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ penyesuaian *Reclassifications/ adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	17,449,448	380,784	-	2,760	17,832,992	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	25,545,547	185,700	(1,176)	144,344	25,874,415	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	232,870,498	30,410,700	(571,319)	4,291,239	267,001,118	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	4,426,539	1,134,365	(1,762)	38,658	5,597,800	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	174,248	12,559	-	26,983	213,790	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	4,806,773	270,292	-	28,664	5,105,729	*General equipment*
Kendaraan bermotor	609,089	54,743	-	(10,941)	652,891	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	419,002	135,610	-	(5,569)	549,043	*Major spare parts*
Subjumlah	286,301,144	32,584,753	(574,257)	4,516,138	322,827,778	*Subtotal*
Aset dalam pembangunan	8,762,242	3,878,893	-	(3,631,526)	9,009,609	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	2,942,791	-	(60,381)	(860,670)	2,021,740	*Assets not used in operations*
Jumlah	298,006,177	36,463,646	(634,638)	23,942	333,859,127	*Total*
Akumulasi penyusutan/						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	800,311	810,405	(63)	(73)	1,610,580	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	8,052,883	9,004,464	(33,640)	31,306	17,055,013	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	128,129	475,109	(209)	(500)	602,529	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	30,303	28,088	-	(86)	58,305	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	4,090,487	325,851	-	(18,815)	4,397,523	*General equipment*
Kendaraan bermotor	506,096	60,329	-	(11,673)	554,752	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	14,985	15,750	-	(425)	30,310	*Major spare parts*
Subjumlah	13,623,194	10,719,996	(33,912)	(266)	24,309,012	*Subtotal*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,752,280	139,354	(60,381)	266	1,831,519	*Assets not used in operations*
Jumlah	15,375,474	10,859,350	(94,293)	-	26,140,531	*Total*
Penyisihan untuk penurunan nilai	92,820	-	-	-	92,820	*Provision for impairment*
Jumlah tercatat bersih	**282,537,883**				**307,625,776**	***Net carrying value***

	31 Desember/*December* 2022[*)]					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ penyesuaian *Reclassifications/ adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	17,383,151	238	-	66,059	17,449,448	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	25,209,499	120,974	(8,346)	223,420	25,545,547	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	231,567,829	1,372,097	(336,415)	266,987	232,870,498	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	4,303,218	19,727	(3,439)	107,033	4,426,539	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	171,619	4,153	(4,084)	2,560	174,248	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	4,743,203	70,434	(6,383)	(481)	4,806,773	*General equipment*
Kendaraan bermotor	601,573	7,278	-	238	609,089	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	391,489	26,077	(30)	1,466	419,002	*Major spare parts*
Subjumlah	284,371,581	1,620,978	(358,697)	667,282	286,301,144	*Subtotal*
Aset dalam pembangunan	7,445,844	3,336,173	(257)	(2,019,518)	8,762,242	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,776,858	18,008	(338,924)	1,486,849	2,942,791	*Assets not used in operations*
Jumlah	293,594,283	4,975,159	(697,878)	134,613	298,006,177	*Total*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/60 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

	31 Desember/*December* 2022*)					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ penyesuaian *Reclassifications/ adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Akumulasi penyusutan/						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	810,062	(1,674)	(8,077)	800,311	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	7,921,409	(64,985)	196,459	8,052,883	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	-	131,039	(2,974)	64	128,129	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	31,596	(1,767)	474	30,303	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	3,783,403	313,319	(4,212)	(2,023)	4,090,487	*General equipment*
Kendaraan bermotor	442,311	62,626	-	1,159	506,096	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	-	14,890	(1)	96	14,985	*Major spare parts*
Subjumlah	4,225,714	9,284,941	(75,613)	188,152	13,623,194	*Subtotal*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,619,859	101,300	(292,206)	323,327	1,752,280	*Assets not used in operations*
Jumlah	5,845,573	9,386,241	(367,819)	511,479	15,375,474	*Total*
Penyisihan untuk penurunan nilai	91,281	-	-	1,539	92,820	*Provision for impairment*
Jumlah tercatat bersih	**287,657,429**				**282,537,883**	***Net carrying value***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6 / *) *As restated, see Note 6*

Beban penyusutan disajikan sebagai bagian dari beban usaha dan beban lain-lain - bersih dan dicatat dalam laba rugi masing-masing sebesar Rp10.719.996 dan Rp139.354 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: Rp9.284.941 dan Rp101.300).

Depreciation expense was presented as part of operating expenses and other expenses - net are recognised in profit or loss and amounting to Rp10,719,996 and Rp139,354 for the year ended 31 December 2023 (2022: Rp9,284,941 and Rp101,300).

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Grup jatuh tempo antara tahun 2026 sampai dengan 2052, tetapi dapat diperpanjang. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2026 to 2052, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Group.

Instalasi mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi diasuransikan kepada perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Central Asia (2022: PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("AJI"), pihak berelasi dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama) terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$12.426.927.100 (setara dengan Rp191.859.327) pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: US$5.168.046.209 (setara dengan Rp80.580.176). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Power plant installations and transmission equipment were insured with insurance company against fire and other possible risks with PT Asuransi Central Asia (2022: PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("AJI"), a related party and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama) against the risk of fire and other possible risks with insurance coverage of US$12,426,927,100 (equivalent to Rp191,859,327) as at 31 December 2023 (2022: US$5,168,046,209 (equivalent to Rp80,580,176). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/61 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sebesar Rp4.343.178, Rp3.508.519 dan Rp3.438.373.

Pada tahun 2023 dan 2022, manajemen mengkategorikan beberapa aset tetap menjadi aset tidak digunakan dalam operasi berdasarkan pertimbangan tingkat efisiensi dan keekonomisan aset tersebut. Nilai aset tersebut telah disesuaikan ke nilai terpulihkan. Penyesuaian tersebut diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00112/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, penilai Independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Manajemen melakukan revaluasi terhadap aset tetap setiap tiga tahun sekali. Manajemen tidak mengidentifikasi adanya perubahan signifikan yang mengharuskan dilakukannya revaluasi untuk tahun 2023.

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hirarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68 berdasarkan valuasi tanggal 31 Desember 2021. Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

***12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (continued)*

As at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022, the gross carrying amount of property, plant and equipment that had been fully depreciated but was still in use amounted to Rp4,343,178, Rp3,508,519 and Rp3,438,373, respectively.

In 2023 and 2022, management categorised several items of property, plant and equipment into assets not used in operations based on the consideration of the efficiency and the economy of the assets. The amount of the assets is adjusted to their recoverable amount. The adjustment is recognised in profit or loss.

As at 31 December 2021, the Group performed a revaluation of the fair value of its property, plant and equipment which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Partners ("KJPP RHR"), an independent valuer registered in the Ministry of Finance and OJK, in report No. 00112/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 dated 30 March 2022.

Management performs revaluation on the property, plant and equipment every three years. Management did not identify any significant changes in circumstances which would require a revaluation exercise to be performed for 2023.

The table below analyses the property, plant and equipment that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 68 based on valuation as at 31 December 2021. The different levels of fair value are defined as follows:

	Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2021 menggunakan/ *Fair value measurement at 31 December 2021 by level*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*	
Pengukuran nilai wajar berulang					***Recurring fair value measurement***
Tanah	-	189,192	17,193,959	17,383,151	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	76,234	25,133,265	25,209,499	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	231,567,829	231,567,829	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	-	-	4,303,218	4,303,218	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	171,619	171,619	*Telecommunication and data processing equipment*
Material cadang utama	-	-	391,489	391,489	*Major spare parts*
Jumlah	**-**	**265,426**	**278,761,379**	**279,026,805**	***Total***

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/62 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:
- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dan hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:
a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Tingkat depresiasi;
g. Biaya operasional;
h. Keuntungan pengembangan; dan
i. Indeks kemahalan konstruksi.

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, dan lainnya.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

***12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (continued)*

The different levels of fair value are defined as follows:
- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

There were no property, plant and equipment which could be classified as Level 1 fair value.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the years.

The Level 2 fair value of land and land rights is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of the following:
a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalisation rate;
e. Replacement cost new per square metre;
f. Depreciation rate;
g. Operational expense;
h. Developers margin; and
i. Construction cost index.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants and others.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shape and specification, land rights and other comparison elements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/63 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan) / *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021/ *Fair value as at 31 December 2021*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable inputs*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Tanah	17,193,959	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ *The income approach with the land development method*	- Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	60.00% - 80.00%*	-Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the KLB, the higher the fair value*	***Land***
			- Data luas dan aspek legal/ *Land area and legal aspects*		-Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ *Certified land will have higher fair value*	
			- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes*		-Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ *Zoning of neighbouring land might have higher fair value*	
Bangunan						***Buildings***
Bangunan umum	20,695,467	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	0.45 - 5.46	-Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the index coefficient, the higher the fair value*	*General buildings*
			- Volume bangunan/ *Building volumes*	60.00% - 70.00%*	-Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the building volumes, the higher the fair value*	
Waduk dan prasarana	4,402,813	Trending/ *Trending*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1.00 - 2.27	-Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the index coefficient, the higher the fair value*	*Reservoirs and infrastructure*
Jalan dan sepur samping	34,985	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1,00 - 2,35	-Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the index coefficient, the higher the fair value*	*Roads and rails side*
Instalasi dan mesin pembangkit	231,567,829	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat kemunduran fungsional/ *Functional obsolescence rate*	1.00% - 30.00%	-Semakin besar tingkat penyusutan maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher the depreciation rate, the lower the fair value*	***Installations and power plants***
			-Tingkat kemunduran ekonomis/ *Economical obsolescence rate*	1.00% - 3.00%	-Semakin besar tingkat penyusutan maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher the depreciation rate, the lower the fair value*	
			- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 2.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	
Perlengkapan transmisi	4,303,218	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the PPI index rate, the higher the fair value*	***Transmission equipment***
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	171,619	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.01 - 1.02	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the PPI index rate, the higher fair value*	***Telecommunication and data processing equipment***
Material cadang utama	391,489	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the PPI index rate, the higher the fair value*	***Major spare parts***

*) kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi/*the range of weights of the unobservable input*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/64 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan) / **12. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*** *(continued)*

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan final dan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

The revaluation surplus, less final income and related deferred tax income, has been credited to other comprehensive income and is presented as a revaluation surplus of property, plant and equipment in the consolidated statement of changes in equity.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus which are presented in the consolidated statement of changes in equity are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Saldo awal tahun	249,507,356	249,868,315	138,801,763	*Balance at beginning of year*
Dampak penerapan PSAK No. 38 (Catatan 6)	-	-	111,066,552	*Impact from SFAS No. 38 implementation (Note 6)*
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba	(360,501)	-	-	*Reclassification of revaluation surplus to retained earnings*
Penurunan surplus revaluasi atas aset tetap yang dilakukan penarikan parsial	-	(140,039)	-	*Decrease on revaluation surplus of property, plant and equipments which are partially disposed*
Reklasifikasi surplus revaluasi ke akumulasi depresiasi atas aset tidak digunakan dalam operasi	274,203	(322,729)	-	*Reclassification of revaluation surplus to accumulated depreciation from assets not used in operations*
Manfaat pajak terkait (Catatan 26d)	(60,324)	101,809	-	*Related income tax benefit (Note 26d)*
Saldo akhir tahun	**249,360,734**	**249,507,356**	**249,868,315**	***Balance at end of year***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6 / *) *As restated, see Note 6*

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya, selain aset yang menggunakan model revaluasi.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of property, plant and equipment other than assets that have applied the revaluation model.

Aset dalam pembangunan / ***Construction in progress***

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan sarana kelistrikan dan perbaikan/renovasi utama pembangkit-pembangkit, sebagai berikut:

This account represents costs incurred in relation to the construction of power supply facilities and major repairs/renovation, as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Pembangkit tenaga:				*Power plants:*
Tenaga Gas/uap	5,727,753	5,570,492	4,733,608	*Gas/steam power*
Tenaga Gas	1,849,704	1,798,919	1,528,658	*Gas power*
Tenaga Uap	574,300	558,532	474,621	*Steam power*
Tenaga Air	339,316	330,000	280,422	*Hydro power*
Tenaga Panas Bumi	70,098	68,173	57,931	*Geothermal power*
Tenaga Diesel	20,872	20,299	17,249	*Diesel power*
Lain-lain	427,566	415,827	353,355	*Others*
Jumlah	**9,009,609**	**8,762,242**	**7,445,844**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6 / *) *As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/65 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan) / *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

Setelah penyelesaian suatu proyek, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima sertifikat laik operasi.

After completion of a project, there are still a number of tests that need to be performed before the projects are certified for operations.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sebesar Rp88.999 dan Rp35.403.

As at 31 December 2023 and 2022, the borrowing costs that were capitalised to construction in progress were Rp88,999 and Rp35,403, respectively.

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum adalah sebesar 5,53% pada tahun 2023 (2022: 1,85%).

Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of general borrowings of 5.53% in 2023 (2022: 1.85%).

Aset tidak digunakan dalam operasi / ***Assets not used in operations***

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang akan direlokasi, yang sementara belum digunakan dalam operasi, aset tetap akan diperbaiki, dan aset tetap yang akan dihapus.

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment to be relocated, those temporarily not in used in operations, assets to be repaired, and assets to be disposed of.

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual dengan harga jual bersih Rp4.228 (2022: Rp4.519), dengan keuntungan penjualan aset tersebut sebesar Rp4.228 dan Rp4.519 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Certain assets not used in operations were sold with net selling price Rp4,228 (2022: Rp4,519), with gain on sales of assets amounting to Rp4,228 and Rp4,519 for the years ended 31 December 2023 and 2022.

Berdasarkan penelaahan manajemen, kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan aset tetap Grup adalah cukup untuk mencerminkan jumlah terpulihkannya.

Based on management's assessment, the impairment loss recognised in the consolidated financial statements in respect of the Group's property, plant and equipment is adequate to reflect its recoverable amount.

13. ASET HAK GUNA / *RIGHT-OF-USE ASSETS*

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	790,560	1,645,370	-	2,435,930	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	92,711	-	(10,879)	81,832	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	4,650,919	1,041,112	(904,055)	4,787,976	*Installations and power plants*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	213	14	(227)	-	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	2,924	860	-	3,784	*General equipment*
Kendaraan bermotor	234,725	117,562	(51,139)	301,148	*Motor vehicles*
Jumlah	5,772,052	2,804,918	(966,300)	7,610,670	*Total*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Tanah	64,038	154,706	-	218,744	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	36,518	20,613	(218)	56,913	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	2,103,783	505,180	(888,254)	1,720,709	*Installations and power plants*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	71	78	(149)	-	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	1,971	639	-	2,610	*General equipment*
Kendaraan bermotor	118,206	94,591	(47,079)	165,718	*Motor vehicles*
Jumlah	2,324,587	775,807	(935,700)	2,164,694	*Total*
Jumlah tercatat bersih	**3,447,465**			**5,445,976**	***Net carrying value***

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/66 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET HAK GUNA (lanjutan) / *13. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

	31 Desember/*December* 2022*)				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	769,440	21,120	-	790,560	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	95,496	100	(2,885)	92,711	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	5,042,854	2,448	(394,383)	4,650,919	*Installations and power plants*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	213	-	213	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	2,924	-	-	2,924	*General equipment*
Kendaraan bermotor	206,033	99,884	(71,192)	234,725	*Motor vehicles*
Jumlah	6,116,747	123,765	(468,460)	5,772,052	*Total*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Tanah	42,290	21,748	-	64,038	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	21,083	18,320	(2,885)	36,518	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	1,555,995	648,027	(100,239)	2,103,783	*Installations and power plants*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	71	-	71	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	1,495	476	-	1,971	*General equipment*
Kendaraan bermotor	89,199	85,097	(56,090)	118,206	*Motor vehicles*
Jumlah	1,710,062	773,739	(159,214)	2,324,587	*Total*
Jumlah tercatat bersih	**4,406,685**			**3,447,465**	***Net carrying value***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Beban penyusutan untuk aset hak guna disajikan sebagai bagian dari beban usaha dan dicatat dalam laba rugi sebesar Rp775.807 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 (2022: Rp773.739).

Depreciation expense for right-of-use assets was presented as part of operating expenses and is recognised in profit or loss amounting to Rp775,807 for the year ended 31 December 2023 (2022: Rp773,739).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah mereklasifikasi aset hak guna ke aset tetap sebesar Rp21.414 (Catatan 12).

As of 31 December 2023, the Group has reclassified the right-of-use assets to property, plant and equipment amounted to Rp21,414 (Note 12).

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai Aset Hak Guna secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 1 Januari 2022.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances that indicate a significant decline in the value of the right-of-use assets on 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/67 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Rincian bagian partisipasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of interests in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/*Entity*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi/ *Commercial Operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2023	2022
Entitas asosiasi/*Associates*					
IPB	Berau	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2005	46.53	46.53
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLNSC")	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjinering supply chain dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan/ *Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector*	2018	49.00	49.00
Ventura bersama/*Joint ventures*					
REP	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2019	51.00	51.00
PDG	Jakarta	Transportasi, penyimpanan dan regasifikasi LNG/ *Transportation, storage and regasification of LNG*	2015	35.00	35.00
GCL	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2021	35.00	35.00
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51.00	51.00
PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, perdagangan mesin, suku cadang dan perlengkapannya/ *Electricity supplier, electrical support activities, sale of machinery, spare parts and accessories*	2022	30.00	30.00
PT Trina Mas Agra Indonesia ("TMAI")	Kendal	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	25.00	-

*) Dalam tahap pengembangan

*) *In development stage*

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar kuotasian yang tersedia untuk sahamnya.

All associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan atau risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

As at 31 December 2023 and 2022, management believes that there is no restriction or significant risk regarding the investments in associates and joint ventures.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/68 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The movements in investments in associates and joint ventures were as follows:

	2023						
	Jumlah tercatat/ *Carrying amount* 1 Januari/ *January 2023*	Penambahan/ *Additions*	Bagian atas laba bersih/ *Share in net income*	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income*	Dividen/ *Dividends*	Jumlah tercatat/ *Carrying amount* 31 Desember/ *December 2023*	
Enititas asosiasi							***Associates***
IPB	122,602	-	5,453	-	(1,881)	126,174	*IPB*
PLNSC	118,178	-	23,398	-	-	141,576	*PLNSC*
Subjumlah	240,780	-	28,851	-	(1,881)	267,750	*Subtotal*
Ventura bersama							***Joint ventures***
REP	142,903	-	5,180	(1,340)	-	146,743	*REP*
PDG	62,992	-	16,216	-	-	79,208	*PDG*
GCL	796,983	-	117,796	(7,846)	(52,591)	854,342	*GCL*
IRT	5,693,459	-	940,566	(189,131)	-	6,444,894	*IRT*
MCB	9,521	-	2,769	-	-	12,290	*MCB*
TMAI	-	31,000	(532)	-	-	30,468	*TMAI*
Subjumlah	6,705,858	31,000	1,081,995	(198,317)	(52,591)	7,567,945	*Subtotal*
Jumlah	**6,946,638**	**31,000**	**1,110,846**	**(198,317)**	**(54,472)**	**7,835,695**	***Total***

	2022						
	Jumlah tercatat/ *Carrying amount* 1 Januari/ *January 2022*	Penambahan/ *Additions*	Bagian atas laba bersih/ *Share in net income*	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income*	Dividen/ *Dividends*	Jumlah tercatat/ *Carrying amount* 31 Desember/ *December 2022*	
Entitas asosiasi							***Associates***
IPB	121,953	-	5,166	-	(4,517)	122,602	*IPB*
PLNSC	103,323	-	14,855	-	-	118,178	*PLNSC*
Subjumlah	225,276	-	20,021	-	(4,517)	240,780	*Subtotal*
Ventura bersama							***Joint ventures***
REP	125,627	-	5,367	11,909	-	142,903	*REP*
PDG	55,954	-	9,792	-	(2,754)	62,992	*PDG*
GCL	613,580	-	221,727	72,689	(111,013)	796,983	*GCL*
IRT	3,292,872	-	533,159	1,867,428	-	5,693,459	*IRT*
MCB	8,236	-	119	1,166	-	9,521	*MCB*
Subjumlah	4,096,269	-	770,164	1,953,192	(113,767)	6,705,858	*Subtotal*
Jumlah	**4,321,545**	**-**	**790,185**	**1,953,192**	**(118,284)**	**6,946,638**	***Total***

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/69 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

***14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES** (continued)*

The following tables contain the summarised financial information for associates and joint ventures accounted for using the equity method as at 31 December 2023 dan 2022:

Entitas Asosiasi / ***Associates***

	31 Desember/*December 2023*			
	IPB	**PLNSC**	**Jumlah/*Total***	
Kas dan setara kas	2,346	178,649	180,995	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	53,408	731,680	785,088	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	55,754	910,329	966,083	*Total current assets*
Aset tidak lancar	228,047	15,135	243,182	*Non-current assets*
Utang usaha	7,744	402,084	409,828	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	-	232,234	232,234	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	7,744	634,318	642,062	*Total current liabilities*
Liabilitas keuangan	4,890	-	4,890	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	-	2,216	2,216	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	4,890	2,216	7,106	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	271,167	288,930	560,097	*Net assets*
% kepemilikan	46.53%	49.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih entitas asosiasi	**126,174**	**141,576**	**267,750**	***The Group's share of the net assets of associates***
Pendapatan	100,609	864,119	964,728	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	-	(748,203)	(748,203)	*Cost of revenue*
Beban usaha	(85,459)	(42,137)	(127,596)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan	153	475	628	*Finance income*
Beban keuangan	(149)	-	(149)	*Finance costs*
Beban lain-lain, bersih	(131)	(12,202)	(12,333)	*Other expenses, net*
Beban pajak penghasilan	(3,304)	(14,302)	(17,606)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	11,719	47,750	59,469	*Profit for the year*
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi	**5,453**	**23,398**	**28,851**	*Share in net income of associates*
Dividen yang diterima dari entitas asosiasi	**(1,881)**	**-**	**(1,881)**	***Dividends received from associates***

	31 Desember/*December 2022*			
	IPB	**PLNSC**	**Jumlah/*Total***	
Kas dan setara kas	11,850	117,764	129,614	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	20,345	383,513	403,858	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	32,195	501,277	533,472	*Total current assets*
Aset tidak lancar	277,551	12,739	290,290	*Non-current assets*
Utang usaha	6,757	196,872	203,629	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	9,026	75,224	84,250	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	15,783	272,096	287,879	*Total current liabilities*
Liabilitas keuangan	6,378	-	6,378	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	24,094	741	24,835	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	30,472	741	31,213	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	263,491	241,179	504,670	*Net assets*
% kepemilikan	46.53%	49.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	**122,602**	**118,178**	**240,780**	***The Group's share of the net assets of associates***

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/70 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas: (lanjutan)

***14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES** (continued)*

The following tables contain the summarised financial information for associates and joint ventures accounted for using the equity method as at 31 December 2023 dan 2022: (continued)

Entitas Asosiasi (lanjutan) / ***Associates** (continued)*

	31 Desember/*December* 2023			
	IPB	**PLNSC**	**Jumlah/*Total***	
Pendapatan	103,797	508,199	611,996	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	-	(427,834)	(427,834)	*Cost of revenue*
Beban usaha	(88,936)	(34,951)	(123,887)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan	273	915	1,188	*Finance income*
Beban keuangan	(542)	-	(542)	*Finance costs*
Beban lain-lain, bersih	(357)	(6,518)	(6,875)	*Other expenses, net*
Beban pajak penghasilan	(3,132)	(9,493)	(12,625)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	11,103	30,318	41,421	*Profit for the year*
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi	**5,166**	**14,855**	**20,021**	*Share in net income of associates*
Dividen yang diterima dari entitas asosiasi	**4,517**	**-**	**4,517**	***Dividends received from associates***

Ventura bersama / ***Joint ventures***

	31 Desember/*December* 2023							
	REP	**PDG**	**GCL**	**IRT**	**MCB**	**TMAI**	**Jumlah/*Total***	
Kas dan setara kas	49,536	27,253	418,394	509,503	4,002	118,203	1,126,891	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	104,431	86,541	1,317,750	28,287	28,520	1,727	1,567,256	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	153,967	113,794	1,736,144	537,790	32,522	119,930	2,694,147	*Total current assets*
Aset tidak lancar	2,331,286	283,279	4,797,380	45,536,418	403,380	1,973	53,353,716	*Non-current assets*
Utang usaha	544	104,216	126,344	136,834	1,829	-	369,767	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	117,907	60,989	910,981	1,199,739	26,939	31	2,316,586	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	118,451	165,205	1,037,325	1,336,573	28,768	31	2,686,353	*Total current liabilities*
Liabilitas keuangan	1,569,379	360	2,887,608	29,992,545	293,232	-	34,743,124	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	509,692	5,199	167,614	2,108,043	72,934	-	2,863,482	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	2,079,071	5,559	3,055,222	32,100,588	366,166	-	37,606,606	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	287,731	226,309	2,440,977	12,637,047	40,968	121,872	15,754,904	*Net assets*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	25.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	**146,743**	**79,208**	**854,342**	**6,444,894**	**12,290**	**30,468**	**7,567,945**	***The Group's share in the net assets of joint ventures***
Pendapatan	200,962	214,098	1,670,718	11,016,251	63,507	-	13,165,536	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(41,328)	(88,333)	(965,577)	(7,077,375)	(9,765)	-	(8,182,378)	*Cost of revenue*
Beban usaha	-	(55,167)	(44,086)	(36,031)	(5,179)	(2,141)	(142,604)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan	-	704	6,976	913,980	44	13	921,717	*Finance income*
Beban keuangan	(134,003)	(10,939)	(296,758)	(2,589,953)	(39,238)	(1)	(3,070,892)	*Finance costs*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(66)	5,927	(3,794)	19,212	2,416	-	23,695	*Other income/(expenses), net*
Beban pajak penghasilan	(15,409)	(19,958)	(30,918)	(401,836)	(2,554)	-	(470,675)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	10,156	46,332	336,561	1,844,248	9,231	(2,129)	2,244,399	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	25.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/ (kerugian) bersih ventura bersama	**5,180**	**16,216**	**117,796**	**940,566**	**2,769**	**(532)**	**1,081,995**	***The Group's share in income/ (loss) of joint ventures***
Laba komprehensif lainnya	(2,627)	-	(22,416)	(370,845)	-	-	(395,888)	*Other comprehensive income*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	25.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba komprehensif lainnya ventura bersama	**(1,340)**	**-**	**(7,846)**	**(189,131)**	**-**	**-**	**(198,317)**	***The Group's share of other comprehensive income of joint ventures***
Dividen yang diterima dari entitas ventura bersama	**-**	**-**	**(52,591)**	**-**	**-**	**-**	**(52,591)**	***Dividends received from joint ventures***



PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/71 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas: (lanjutan)

Ventura bersama (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

The following tables contain the summarised financial information for associates and joint ventures accounted for using the equity method as at 31 December 2023 dan 2022: (continued)

***Joint ventures** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022						
	REP	PDG	GCL	IRT	MCB	*Jumlah*/Total	
Kas dan setara kas	20,474	13,443	532,583	230,682	25,431	822,613	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	104,699	92,571	373,430	72,211	20,687	663,598	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	125,173	106,014	906,013	302,893	46,118	1,486,211	*Total current assets*
Aset tidak lancar	2,408,470	360,519	5,905,202	35,678,691	418,589	44,771,471	*Non-current assets*
Utang usaha	556	115,819	126,264	8,313	4,169	255,121	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	111,945	47,255	977,671	2,014,502	25,952	3,177,325	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	112,501	163,074	1,103,935	2,022,815	30,121	3,432,446	*Total current liabilities*
Liabilitas keuangan	1,705,619	116,970	3,292,511	20,898,567	279,830	26,293,497	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	435,322	6,511	137,674	1,896,556	123,021	2,599,084	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	2,140,941	123,481	3,430,185	22,795,123	402,851	28,892,581	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	280,201	179,978	2,277,095	11,163,646	31,735	13,932,655	*Net assets*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	**142,903**	**62,992**	**796,983**	**5,693,459**	**9,521**	**6,705,858**	***The Group's share in the net assets of joint ventures***
Pendapatan	199,350	206,281	1,580,342	14,227,566	54,195	16,267,734	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	-	(69,197)	(874,692)	(11,747,487)	(27,194)	(12,718,570)	*Cost of revenue*
Beban usaha	(38,289)	(54,145)	(47,950)	(41,795)	(1,892)	(184,071)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan	-	685	7,568	265	2	8,520	*Finance income*
Beban keuangan	(134,728)	(17,939)	(236,387)	(1,185,383)	(20,385)	(1,594,822)	*Finance costs*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	1,200	(26,078)	(21,177)	174,639	(1,829)	126,755	*Other income/(expenses), net*
Beban pajak penghasilan	(17,009)	(11,629)	(37,158)	(382,394)	(2,501)	(450,691)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	10,524	27,978	370,546	1,045,411	396	1,454,855	*Profit for the year*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama	**5,367**	**9,792**	**129,691**	**533,159**	**119**	**678,128**	***The Group's share in income of joint ventures***
Penyesuaian laba	-	-	92,036	-	-	92,036	*Profit adjustments*
Bagian grup atas laba bersih entitas ventura bersama, setelah penyesuaian	**5,367**	**9,792**	**221,727**	**533,159**	**119**	**770,164**	***The Group's share in income of joint ventures, after adjustments***
Laba komprehensif lainnya	23,350	-	207,683	3,661,625	3,888	3,896,546	*Other comprehensive income*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba komprehensif lainnya ventura bersama	**11,909**	**-**	**72,689**	**1,867,428**	**1,166**	**1,953,192**	***The Group's share of other comprehensive income of joint ventures***
Dividen yang diterima dari entitas ventura bersama	**-**	**2,754**	**111,013**	**-**	**-**	**113,767**	***Dividends received from joint ventures***

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there is no indication of impairment.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/72 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA / *TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan utang pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa lainnya.

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, other goods and services.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Pihak berelasi	5,749,847	2,694,989	3,248,677	*Related parties*
Pihak ketiga	3,911,961	3,207,637	4,012,373	*Third parties*
Jumlah	**9,661,808**	**5,902,626**	**7,261,050**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions and balances with related parties.

16. LIABILITAS SEWA / *LEASE LIABILITIES*

Nilai tunai pembayaran minimum atas liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for the lease liabilities as at 31 December 2023, 2022, and 1 January 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Pembayaran sewa minimum yang jatuh tempo dalam waktu:				*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	1,103,872	705,573	986,883	*Not later than a year*
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	3,481,210	2,107,358	2,443,863	*More than one year and not later than five years*
Lebih dari lima tahun	5,000,419	2,614,131	2,870,335	*More than five years*
Jumlah pembayaran minimum sewa	9,585,501	5,427,062	6,301,081	*Total minimum lease payments*
Dikurangi: bunga	(4,459,295)	(2,421,347)	(2,698,707)	*Less: interest*
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	5,126,206	3,005,715	3,602,374	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**(654,594)**	**(453,709)**	**(681,052)**	***Less: current maturities***
Bagian jangka panjang	**4,471,612**	**2,552,006**	**2,921,322**	***Long-term maturities***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/73 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

***16. LEASE LIABILITIES** (continued)*

Arus kas keluar untuk seluruh sewa pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.265.450 dan Rp1.128.725.

The cash outflows for all leases in 2023 and 2022 were Rp1,265,450 and Rp1,128,725, respectively.

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Pihak berelasi				*Related parties*
PLN	1,189,674	60,228	77,090	*PLN*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	1,138,102	809,497	1,116,388	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")*
PDG	990,143	717,449	793,539	*PDG*
PT PLN Energi Gas ("PLN EG")	483,141	-	-	*PT PLN Energi Gas ("PLN EG")*
Subjumlah	3,801,060	1,587,174	1,987,017	*Subtotal*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Benoa Gas Terminal	741,444	887,719	1,061,829	*PT Benoa Gas Terminal*
PT Sumber Petrindo Perkasa	356,416	380,816	421,214	*PT Sumber Petrindo Perkasa*
Lain-lain	227,286	150,006	132,314	*Others*
Subjumlah	1,325,146	1,418,541	1,615,357	*Subtotal*
Jumlah	**5,126,206**	**3,005,715**	**3,602,374**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

**) As restated, see Note 6*

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions and balances with related parties.

Laporan laba rugi dan pengjasilan komprehensif lain konsolidasi grup termasuk menyajikan jumlah berkaitan dengan sewa:

The Group's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income include the following amounts related to leases:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	
Biaya bunga (disajikan sebagai bagian dari biaya keuangan)	493,380	313,194	*Interest expense (presented as part of finance costs)*
Biaya yang berkaitan dengan pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam kewajiban sewa (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	17,286	3,509	*Expenses related to variable leases which are not included as lease liabilities (presented as part of operating expenses)*
Biaya terkait sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	36,447	62,080	*Expenses related to short-term leases (presented as part of operating expenses)*
Biaya yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah yang bukan merupakan sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	33,910	28,618	*Expenses related to low value assets which are not classified as short-term leases (presented as part of operating expenses)*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

**) As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/74 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2023	2022	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian:			***Liabilities recognised in the consolidated statements of financial position:***
Program pensiun manfaat pasti	-	41,726	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	1,658,356	1,463,033	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2,713,585	2,519,040	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	72,793	65,730	*Other long-term benefits*
Jumlah	4,444,734	4,089,529	*Total*
Jumlah bagian jangka panjang	**(4,221,982)**	**(3,903,140)**	***Total non-current portion***
Bagian jangka pendek:			*Current portion:*
Gaji dan upah	453,038	518,223	*Salaries and wages*
Liabilitas imbalan kerja	222,752	186,389	*Employee benefits*
Jumlah bagian jangka pendek	**675,790**	**704,612**	***Total current portion***
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 25)			***Expenses recognised in profit or loss: (Note 25)***
Program pensiun manfaat pasti	13,499	12,482	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	210,536	3,925	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	281,003	212,103	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	53,318	(48,100)	*Other long-term benefits*
Jumlah	**558,356**	**180,410**	***Total***
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehensif lain: (Catatan 26d)			***Remeasurement on defined benefit recognised in other comprehensive income: (Note 26d)***
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun manfaat pasti	(36,181)	(68,147)	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	62,244	(42,359)	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	(17,721)	579,430	*Health care benefits*
Jumlah	**8,342**	**468,924**	***Total***

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan

Program pensiun manfaat pasti

Dana Pensiun - Perusahaan Listrik Negara ("DP-PLN") telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Grup dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 19,45% dari penghasilan dasar pensiun (2022: 6,00% dan 18,94%).

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Post-employment benefits obligations

Defined benefit pension program

Dana Pensiun - Perusahaan Listrik Negara ("DP-PLN") has obtained an approval from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-20/NB.1/2017 dated 26 April 2017 in relation to the increase in pension benefits provided by the Group's pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer, which are 6.00% and 19.45% from basic pension income, respectively (2022: 6.00% and 18.94%).

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/75 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja.

Perhitungan aktuaria atas imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dihitung oleh kantor konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dalam laporannya masing-masing tertanggal 2 April 2024 dan 21 Maret 2023.

Asumsi aktuaria utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

Tabel mortalitas	CSO-58	
Usia pensiun normal	56 tahun	

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Perusahaan dan anak Perusahaan. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tahun 2020, Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan kajian, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011 dan TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup memutuskan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

***17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

***Post-employment benefits obligations** (continued)*

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for its pensioners and their eligible dependents.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefits and loyalty benefits.

The actuarial calculations of pension benefits, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended 31 December 2023 and 2022 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan based on its reports dated 2 April 2024 and 21 March 2023.

The principal actuarial assumptions used in the calculations of post employment benefits obligations

Mortality table	CSO-58	
Normal retirement age	56 *years old*	

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which is applied in calculating the other long-term benefits liability recognised in the consolidated statement of financial position.

In 2020, the Group conducted a study to determine which mortality tables were best suited to the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In conducting the study, the Group considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011 and TMI-2019. Based on the study, the Group decided that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group employees and pensioners was CSO-58.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/76 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefits obligations*** *(continued)*

i. Program pensiun manfaat pasti / ***i. Defined benefit pension program***

Jumlah liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The liabilities recognised in the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023 and 2022 were determined as follows:

	2023	2022	
Nilai kini kewajiban yang didanai	1,001,624	968,530	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(1,050,815)	(926,804)	*Fair value of plan assets*
Jumlah	(49,191)	41,726	*Total*
Dampak pembatasan aset	49,191	-	*Impact of asset restrictions*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**-**	**41,726**	***Liability in the consolidated statement of financial position***

Mutasi kewajiban program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit pension program during the years were as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	968,530	955,794	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	17,533	17,360	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(6,174)	*Past service cost*
Biaya bunga	66,814	63,230	*Interest expense*
	84,347	74,416	
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan:			*Actuarial (gains)/losses from changes in:*
Asumsi demografik	-	799	*Demographic assumptions*
Asumsi keuangan	7,289	(8,020)	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	-	46	*Other assumptions*
Penyesuaian atas Pengalaman	9,590	11,993	*Experience adjustments*
	16,879	4,818	
Pembayaran manfaat	(68,132)	(66,498)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**1,001,624**	**968,530**	***Ending balance***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2023	2022	
Tingkat diskonto	6.37% - 7.10%	5.52% - 7.44%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	*Salary increase rate per annum*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/77 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefits obligations** (continued)*

i. Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***i. Defined benefit pension program** (continued)*

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *Movements of fair value of plan assets during the years were as follows:*

	2023	2022	
Pada awal tahun	926,804	842,351	*At beginning of the year*
Dikreditkan ke laba rugi:			*Credited to profit or loss:*
Iuran pekerja	6,118	5,367	*Employees' contributions*
Imbal hasil atas aset program	64,730	56,567	*Return on plan assets*
	70,848	61,934	
Keuntungan aktuaria dari:			*Actuarial gains from changes in:*
Pengukuran kembali imbal hasil atas aset	102,251	72,965	*Remeasurement of return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	19,044	16,052	*Employer's contributions*
Pembayaran manfaat	(68,132)	(66,498)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**1,050,815**	**926,804**	***At the end of the year***

Mutasi program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut: / *Movements in the defined benefits pension program are as follows:*

	2023	2022	
Pada awal tahun	41,726	113,443	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	17,533	17,360	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(6,174)	*Past service cost*
Biaya bunga	66,814	63,230	*Interest expense*
Iuran pekerja	(6,118)	(5,367)	*Employee's contributions*
Imbal hasil atas aset program	(64,730)	(56,567)	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	(19,044)	(16,052)	*Employer's contributions*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan:			*Actuarial (gains)/losses from changes in:*
Asumsi demografik	-	799	*Demographic assumptions*
Asumsi keuangan	7,289	(8,020)	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	-	46	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	9,590	11,993	*Experience adjustments*
Pengukuran kembali imbal hasil atas aset	(102,251)	(72,965)	*Remeasurement of return on plan assets*
Dampak pembatasan aset	49,191	-	*Impact of asset restrictions*
Pada akhir tahun	**-**	**41,726**	***At the end of the year***

Aset program terdiri dari: / ***Plan assets comprise the following:***

	2023		2022		
	Jumlah/ *Total*	%	Jumlah/ *Total*	%	
Instrumen utang	582,265	55.41%	574,440	61.98%	*Debt instruments*
Instrumen ekuitas	217,078	20.66%	151,015	16.30%	*Equity instruments*
Properti	114,460	10.89%	106,710	11.51%	*Properties*
Kas dan setara kas	107,876	10.27%	36,501	3.94%	*Cash and cash equivalents*
Lain-lain	29,136	2.77%	58,138	6.27%	*Other*
Jumlah	**1,050,815**	**100.00%**	**926,804**	**100.00%**	***Total***

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/78 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefits obligations** (continued)*

i. Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***i. Defined benefit pension program** (continued)*

Sensitivitas dari kewajiban program pensiun manfaat pasti untuk program pensiun terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit pension program obligations to changes in the principle actuarial assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban program pensiun manfaat pasti/ *Impact on defined benefit pension program obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(21,952)	24,461	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	24,699	(22,369)	*Salary increase rate*

ii. Imbalan pascakerja lainnya / ***ii. Other post-employment benefits***

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit obligation during the years were as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	1,463,033	1,562,976	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa lalu-*vested*	-	(30,731)	*Past service cost-vested*
Biaya jasa kini	105,732	105,034	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(182,061)	*Past service cost*
Biaya bunga	104,804	111,683	*Interest expense*
	210,536	3,925	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan:			*Actuarial (gains)/losses from changes in:*
Asumsi demografik	-	2,615	*Demographic assumptions*
Asumsi keuangan	70,650	(29,713)	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	-	843	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(8,406)	(16,104)	*Experience adjustments*
	62,244	(42,359)	
Pembayaran manfaat	(77,457)	(61,509)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**1,658,356**	**1,463,033**	***Ending balance***

Asumsi aktuaria utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2023	2022	
Tingkat diskonto	6.37% - 7.10%	5.52% - 7.44%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	5.00% - 7.12%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other post-employment benefits obligations to changes in the principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pascakerja lainnya/ *Impact on other post-employment benefits obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(150,709)	175,548	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	178,618	(156,087)	*Salary increase rate*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/79 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefits obligations*** *(continued)*

iii. Imbalan pemeliharaan kesehatan / ***iii. Health care benefits***

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema imbalan pensiun.

The Group has several post-employment health care benefit schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for pension benefit schemes.

Mutasi kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements of health care benefits obligations during the years were as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	2,519,040	1,787,090	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya bunga atas kewajiban	188,835	133,555	*Interest expense on liabilities*
Biaya jasa kini	92,168	78,548	*Current service cost*
	281,003	212,103	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan:			*Actuarial (gains)/losses from changes in:*
Asumsi demografik	-	639,329	*Demographic assumptions*
Asumsi keuangan	167,416	14,307	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	-	1,088	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(185,137)	(75,294)	*Experience adjustments*
	(17,721)	579,430	
Pembayaran manfaat	(68,737)	(59,583)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**2,713,585**	**2,519,040**	***Ending balance***

Asumsi aktuaria utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2023	2022	
Tingkat diskonto	6.37% - 7.10%	5.52% - 7.44%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	5.35%	5.35%	*Long-term increase rate in health cost*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan untuk pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefit obligations to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan/ *Impact on health care benefit obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(372,282)	478,354	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1.00%	481,616	(380,464)	*Increase in health cost rate*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/80 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefits obligations** (continued)*

iv. Imbalan kerja jangka panjang lainnya / *iv. Other long-term benefits*

Mutasi kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the other long-term benefit obligations during the year were as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	65,730	139,323	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	18,327	33,612	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(79,507)	*Past service cost*
Biaya bunga	2,729	6,230	*Interest expense*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan:			*Actuarial (gains)/losses from changes in:*
Asumsi demografik	-	346	*Demographic assumptions*
Asumsi keuangan	416	(1,924)	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	-	(14)	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	31,846	(6,843)	*Experience adjustments*
	53,318	(48,100)	
Pembayaran manfaat	(46,255)	(25,493)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**72,793**	**65,730**	***Ending balance***

Asumsi aktuaria utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2023	2022	
Tingkat diskonto	6.37% - 7.10%	5.52% - 7.44%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.12%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long-term benefit obligations to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term benefits obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(1,279)	2,998	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	3,126	(1,438)	*Salary increase rate*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/81 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Kewajiban dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve* ("*IGSYC*"). Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Grup menempatkan investasi aset program pada beragam jenis aset investasi agar dapat terdiversifikasi dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak kinerja buruk dari satu aset terhadap seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Grup juga berinvestasi pada instrumen ekuitas, properti, reksadana dan kas. Grup meyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari kewajiban manfaat pasti menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas manfaat karyawan.

Rata-rata durasi adalah masing-masing 10,68 tahun untuk program pensiun manfaat pasti, 13,43-26,54 tahun untuk imbalan pascakerja lainnya, 22,32 tahun untuk imbalan pemeliharaan kesehatan dan 3,13-6,13 tahun untuk imbalan jangka panjang lainnya.

Manajemen Grup berpendapat bahwa estimasi liabilitas imbalan pasca kerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau PKB.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and health care benefits. The most significant risks are as follows:

Assets volatility

The liabilities are calculated using a discount rate set with reference to the Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve ("IGSYC"). If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

The Group places its investment plan assets in various types of investment assets so that it can be properly diversified to minimise the impact of the poor performance of one asset on all asset groups. The largest proportion of assets investment is invested in debt instruments, although the Group also invests in equity instruments, property, mutual funds and cash. The Group believes that debt instruments offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Life expectancy

The majority of the defined benefits obligations are to provide benefits for the life of the members, so increases in life expectancy will result in an increase in the employee benefit liabilities.

The weighted average durations are 10.68 years for defined benefit pension program, 13.43-26.54 years for other post-employment benefits, 22.32 years for health care benefits, and 3.13-6.13 years for other long-term benefits, respectively.

The management of the Group believes that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover the requirements of the manpower regulations or CLA.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	1 - 2 tahun/ *Between 1 - 2 years*	2 - 5 tahun/ *Between 2 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/*Total*	
Program pensiun manfaat pasti	70,368	75,538	257,355	1,145,238	1,548,499	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	131,175	156,518	558,606	12,210,291	13,056,590	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	91,419	99,867	349,604	34,603,835	35,144,725	*Health care benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	15,917	21,765	83,288	79,201	200,171	*Other long-term benefits*
Jumlah	**308,879**	**353,688**	**1,248,853**	**48,038,565**	**49,949,985**	***Total***

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/82 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM / *CAPITAL STOCK*

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 Tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00025.AH.02.02.TAHUN 2023, terdapat perubahan modal saham Perusahaan atas dampak pembentukan struktur *subholding* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 (Catatan 1b).

Based on Notary Deed No. 16 dated 13 April 2023 concerning Amendments to the Articles of Association of PT PLN Indonesia Power which obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-00025.AH.02.02.TAHUN 2023, there is a change in the Company's share capital impacted from the formation of a subholding structure which effective on 1 January 2023 (Note 1b).

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023, setelah transaksi diatas, adalah sebagai berikut:

The shareholders composition of the Company as at 31 December 2023, after the above transactions, is as follows:

Pemegang saham/ *Shareholders*	Jumlah Saham/ *Number of Shares*)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-in capital*
PLN	357,165,633,599	100.00%	178,582,817
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN ("YPK PLN")	1	-	-
Jumlah/*Total*	**357,165,633,600**	**100.00%**	**178,582,817**

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders as at 31 December 2022 and 1 January 2022 were as follows:

Pemegang saham/ *Shareholders*	Jumlah Saham/ *Number of shares*)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-in capital*
PLN	5,215,647,599	100.00%	2,607,824
YPK PLN	1	-	-
Jumlah/*Total*	**5,215,647,600**	**100.00%**	**2,607,824**

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Under Indonesian Limited Liability Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of this reserve. As at 31 December 2023 and 2022, the Company had not yet established its general reserve in accordance with the Limited Liability Company Law.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/83 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	2023	2022	
Saldo awal	5,513,843	5,513,843	*Beginning balance*
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 6)	(125,382,115)	-	*Difference in value from restructuring transaction of entities under common control (Note 6)*
Jumlah	**(119,868,272)**	**5,513,843**	***Total***

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, aset tidak lancar lainnya dan material cadang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN, pemegang saham dari perusahaan adalah sebesar Rp5.503.599.

Additional paid-in capital represents property, plant and equipment, non-current assets and spare parts transferred by PLN, a shareholder, to the Company during 1996 to 2000 amounting to Rp5,503,599.

Pada tahun 2016, tambahan modal disetor berasal dari partisipasi Grup dalam Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp10.244

In 2016, Additional paid-in capital arising from the Group' participation in Tax Amnesty was amounted to Rp10,244.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali di tahun 2023 berasal dari selisih antara nilai imbalan yang dialihkan PLN kepada Perusahaan melalui penerbitan saham sebesar Rp175.974.993 berdasarkan laporan penilai independen dengan nilai buku aset bersih yang diperoleh sebesar Rp50.592.878(Catatan 6).

Difference in value from restructuring transactions of entities under common control in 2023 arises from the difference between consideration transferred by PLN to the Company through issuance shares Rp175,974,993 based on an independent valuer's report and the book value of net assets acquired amounting to Rp50,592,878(Note 6).

20. DIVIDEN / *20. DIVIDENDS*

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 Juni 2023, Perusahaan mengumumkan total dividen final sebesar Rp5,759,265 (Rp1,104 per lembar saham - nilai penuh) untuk tahun 2022. Dividen tersebut telah dibayarkan pada tanggal 29 September 2023.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 13 June 2023, the Company declared total final dividend of Rp5,759,265 (Rp1,104 per share - full amount) for the financial year of 2022. The dividend was paid on 29 September 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2022, Perusahaan mengumumkan total dividen final sebesar Rp4,027,169 (Rp772 per lembar saham - nilai penuh) untuk tahun 2021. Dividen tersebut telah dibayarkan pada tanggal 14 Oktober 2022.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 29 June 2022, the Company declared total final dividend of Rp4,027,169 (Rp772 per share - full amount) for the financial year of 2021. The dividend was paid on 14 October 2022.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan mengumumkan total dividen final sebesar Rp10,218,256 (Rp1,959 per lembar saham - nilai penuh) untuk tahun 2020. Dividen tersebut telah dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2022.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 29 June 2021, the Company declared total final dividend of Rp10,218,256 (Rp1,959 per share - full amount) for the financial year of 2020. The dividend was paid on 5 January 2022.

Pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan cara saling hapus terhadap piutang usaha dari PLN. Lihat Catatan 30a untuk informasi transaksi non-kas.

The dividends payments to PLN were made through offsetting against the trade receivables from PLN. Refer to Note 30a for information of non-cash transactions.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/84 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENJUALAN TENAGA LISTRIK / *21. SALES OF ELECTRICITY*

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PLN.

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dengan pihak berelasi.

This account represents electricity sales to PLN.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions with related parties.

22. PENDAPATAN JASA / *22. SERVICE REVENUE*

Akun ini sebagian terdiri atas pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit yang diperoleh dari PLN.

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dengan pihak berelasi.

This account mainly consists of income from operation and maintenance services received from PLN.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions with related parties.

23. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS / *23. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSES*

	2023	2022*)	
Bahan bakar minyak			*Fuel*
Solar High Speed Diesel	3,745,149	2,434,518	*Solar High Speed Diesel*
Residu	370,734	574,800	*Residue*
Subjumlah	4,115,883	3,009,318	*Subtotal*
Bahan bakar nonminyak			*Non-fuel*
Batu bara	33,832,319	14,829,165	*Coal*
Gas alam	19,126,959	19,218,211	*Natural gas*
Panas bumi	4,167,342	5,745,523	*Geothermal*
Air	84,171	173,319	*Water*
Subjumlah	57,210,791	39,966,218	*Subtotal*
Minyak pelumas dan lain-lain	231,920	106,626	*Lubricants and others*
Jumlah	**61,558,594**	**43,082,162**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

24. PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN / *24. REPAIRS AND MAINTENANCE*

	2023	2022*)	
Jasa kontraktor	3,525,847	3,068,423	*Contractor services*
Pemakaian suku cadang	1,041,900	586,247	*Spare parts used*
Jumlah	**4,567,747**	**3,654,670**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

25. BEBAN KEPEGAWAIAN / *25. EMPLOYEE COSTS*

	2023	2022*)	
Tunjangan karyawan	2,543,727	1,759,525	*Employee allowances*
Gaji	772,202	577,701	*Salaries*
Penyisihan imbalan kerja (Catatan 17)	558,356	180,410	*Provision for employee benefits (Note 17)*
Tunjangan kesehatan	153,282	77,850	*Health care benefits*
Jumlah	**4,027,567**	**2,595,486**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/85 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERPAJAKAN / *26. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2023	2022	
Kelebihan pembayaran atas Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan")			*Overpayments of Corporate Income Tax ("CIT")*
2023	135,262	-	*2023*
2022	217,360	217,360	*2022*
2021	-	300,445	*2021*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	252,077	171,832	*Value Added Tax ("VAT")*
Pembayaran di muka atas Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Catatan 26e)	362,309	614,274	*Prepayment of Tax Assessment Letters of Underpayment (Note 26e)*
Jumlah	**967,008**	**1,303,911**	***Total***
Dikurangi: bagian lancar	**(246,043)**	**(396,009)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**720,965**	**907,902**	***Non-current portion***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2023	2022	
PPN	412,896	328,619	*VAT*
Pajak penghasilan ("PPh")			*Income taxes :*
Pasal 21	363,012	126,019	*Article 21*
Pasal 23 dan 26	61,579	18,455	*Article 23 and 26*
Pasal 4 (2)	36,272	6,206	*Article 4 (2)*
Pasal 22	9,127	38,075	*Article 22*
Pasal 15	3,757	1,933	*Article 15*
Jumlah	**886,643**	**519,307**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	2023	2022*)	
Beban pajak kini:			*Current tax expense:*
Perusahaan			*The Company*
Tahun berjalan	-	-	*Current year*
Tahun sebelumnya	218,632	-	*Prior year*
Subjumlah	218,632	-	*Subtotal*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Tahun berjalan	69,662	100,606	*Current year*
Tahun sebelumnya	-	1,338	*Prior year*
Subjumlah	69,662	101,944	*Subtotal*
Beban pajak tangguhan:			*Deferred tax expense:*
Perusahaan	2,207,141	3,029,058	*The Company*
Entitas anak	(3,763)	(2,164)	*Subsidiaries*
Subjumlah	2,203,378	3,026,894	*Subtotal*
Beban pajak penghasilan konsolidasi	**2,491,672**	**3,128,838**	***Consolidated income tax expense***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/86 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pada tahun 2023, penyesuaian terkait pajak penghasilan tahun sebelumnya merupakan penghapusan jumlah pajak dibayar di muka Pajak Penghasilan Badan tahun 2021.

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak penghasilan dan hasil perkaitan laba sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

***26. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expense** (continued)*

In 2023, adjustment in respect of the previous year income tax represents write-off prepaid amount of Corporate Income Tax for period 2021.

A reconciliation between the total income tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to the profit before tax is as follows:

	2023	2022*)	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	10,680,986	7,812,498	*Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak menggunakan tarif pajak yang berlaku 22%	2,349,817	1,718,750	*Income tax expense calculated at the prevailing tax rate of 22%*
Imbalan kerja	25,694	66,579	*Employee benefits*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(244,836)	(173,841)	*Share in net income of associates and joint ventures*
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	10,499	182,081	*Other non-deductible expenses*
Pemanfaatan rugi pajak tahun berjalan	-	(1,993)	*Utilisation of tax loss carry forward in current year*
Pajak tangguhan atas rugi pajak ke depan yang belum diakui	152,482	1,350,106	*Unrecognised deferred tax on tax losses carry forward*
Hasil pajak tahun sebelumnya	218,632	1,338	*Prior year tax result*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(20,616)	(14,182)	*Finance income subject to final tax*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**2,491,672**	**3,128,838**	***Consolidated income tax expense***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*



PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/87 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERPAJAKAN (lanjutan) / *26. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan / *d. Deferred tax*

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group deferred tax assets and liabilities are as follows:

	31 Desember/*December* 2023				
	1 Januari/ *January 2023*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 2023*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Liabilitas imbalan kerja	7,558	735	140	8,433	*Employee benefits liabilities*
Bonus	15,959	(8,999)	-	6,960	*Bonus*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	4,350	(1,481)	-	2,869	*Allowance for ECL of trade receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	17	5	-	22	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Aset tetap	(5,825)	9,619	-	3,794	*Property, plant and equipment*
Liabilitas sewa	91	71	-	162	*Lease liabilities*
Aset pajak tangguhan akhir tahun	**22,150**	**(50)**	**140**	**22,240**	***Deferred tax assets at the end of the year***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	892,140	73,812	1,695	967,647	*Employee benefits liabilities*
Bonus	97,258	893	-	98,151	*Bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	28,629	47,133	-	75,762	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Aset tetap	(16,946,459)	(1,952,669)	(60,324)	(18,959,452)	*Property, plant and equipment*
Aset keuangan dari konsesi jasa	382,308	(399,383)	-	(17,075)	*Financial assets of service concession*
Liabilitas sewa	(96,447)	26,886	-	(69,561)	*Lease liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	**(15,642,571)**	**(2,203,328)**	**(58,629)**	**(17,904,528)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
Beban pajak tangguhan		**(2,203,378)**	**(58,489)**		***Deferred tax expense***

	31 Desember/*December* 2022*				
	1 Januari/ *January 2022*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 2022*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Liabilitas imbalan kerja	12,968	(4,851)	(559)	7,558	*Employee benefits liabilities*
Bonus	13,856	2,103	-	15,959	*Bonus*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	4,965	(615)	-	4,350	*Allowance for ECL of trade receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	18	(1)	-	17	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Aset tetap	(12,464)	6,639	-	(5,825)	*Property, plant and equipment*
Liabilitas sewa	150	(59)	-	91	*Lease liabilities*
Aset pajak tangguhan akhir tahun	**19,493**	**3,216**	**(559)**	**22,150**	***Deferred tax assets at the end of the year***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/88 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***26. TAXATION** (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax** (continued)*

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of the Group's deferred tax assets and liabilities are as follows: (continued)

	31 Desember/*December* 2022 *)				
	1 Januari/ *January 2022*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 2022*	
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	779,655	8,763	103,722	892,140	*Employee benefits liabilities*
Bonus	107,671	(10,413)	-	97,258	*Bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan *persediaan usang*	27,412	1,217	-	28,629	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Aset tetap	(13,907,543)	(3,140,725)	101,809	(16,946,459)	*Property, plant and equipment*
Aset keuangan dari konsesi jasa	351,086	31,222	-	382,308	*Financial assets of service concession*
Liabilitas sewa	(176,273)	79,826	-	(96,447)	*Lease liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	**(12,817,992)**	**(3,030,110)**	**205,531**	**(15,642,571)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
Beban pajak tangguhan		**(3,026,894)**	**204,972**		***Deferred tax expense***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6 / *) *As restated, see Note 6*

Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan/(kerugian) komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The income tax relating to other comprehensive income/(loss) during the year was as follows:

	31 Desember/*December* 2023			
	Sebelum pajak/ *Before tax*	Kredit pajak/ *Tax credit*	Setelah pajak/ *Net of tax*	
Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan	(8,342)	1,835	(6,507)	*Remeasurements of employee benefits obligations*
Revaluasi aset tetap	274,203	(60,324)	213,879	*Revaluation of property, plant and equipment*
Jumlah	**265,861**	**(58,489)**	**207,372**	***Total***

	31 Desember/*December* 2022			
	Sebelum pajak/ *Before tax*	Kredit pajak/ *Tax credit*	Setelah pajak/ *Net of tax*	
Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan	(468,924)	103,163	(365,761)	*Remeasurements of employee benefits obligations*
Revaluasi aset tetap	(462,768)	101,809	(360,959)	*Revaluation of property, plant and equipment*
Jumlah	**(931,692)**	**204,972**	**(726,720)**	***Total***

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/89 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

Manajemen berpendapat jika aset pajak tangguhan dapat dipulihkan sesuai dengan periode realisasi yang diekspektasikan.

Analisis aset/(liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

***26. INCOME TAX** (continued)*

***d. Deferred tax** (continued)*

Management believes that the deferred tax assets could be recovered within the expected realisation period

The analysis of deferred tax assets/(liabilities) is as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022*)	1 Januari/ *January* 2022*)	
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	105,111	512,671	121,527	*Deferred tax assets to be recovered within 12 months*
(Liabilitas) pajak tangguhan yang akan diselesaikan setelah 12 bulan	(17,987,399)	(16,133,192)	(12,920,026)	*Deferred tax (liabilities) to be settled after 12 months*
Jumlah	**(17,882,288)**	**(15,620,521)**	**(12,798,499)**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

e. Surat ketetapan pajak

Tabel dibawah ini menunjukkan Surat Ketetapan Pajak Grup yang masih dalam proses keberatan dan/atau banding:

e. Tax assessment letters

The below table shows the Group's tax assessment letters which are still in the process of objection and/or appeal:

Jenis pajak/*Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Entitas/ *Entity*	2023	2022	Status
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2016	PIP	-	161,344	Selesai/*Completed*
PPh 23/*Income Tax Art 23*	2016	PIP	-	75,775	Selesai/*Completed*
PPh Badan/*CIT*	2016	CDB	16,094	16,094	Keberatan/*Objection*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2017	PIP	-	46,372	Selesai/*Completed*
PPh 23/*Income Tax Art 23*	2018	PIP	19,925	19,925	Banding/*Appeal*
PPh 4 ayat (2)/*Income Tax Art 4 (2)*	2018	PIP	136,071	136,071	Banding/*Appeal*
PPh 22/Income Tax Art 22	2019	PIP	108,289	108,289	Banding/*Appeal*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2020	PIP	31,808	50,404	Keberatan/*Objection*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2021	PIP	50,122	-	Keberatan/*Objection*
			362,309	**614,274**	

Perusahaan

Selama tahun 2023, Perusahaan menerima pengembalian dari hasil keberatan atas kurang bayar PPh 22 dan PPh 23 untuk tahun fiskal 2016, 2017 dan 2020 sebesar Rp225.345 dan Rp75.775 dan telah membebankan sisa pengembalian atas PPh 22 tahun fiskal 2016 sebesar Rp967 dalam laporan laba rugi.

The Company

During 2023, the Company received a refund of the proceeds from the objections for underpayment of PPh 22 and PPh 23 for fiscal year 2016, 2017 and 2020 amounting to Rp225,345 and Rp75,775 and has charged the remaining refund for PPh 22 for fiscal year 2016 amounting Rp967 in profit or loss.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/90 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Selama tahun 2023, Perusahaan juga menerima hasil keputusan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas PPN Pemungut dan PPh 23 untuk tahun fiskal 2021 dan telah membebankan sebesar Rp460 sebagai bagian dari beban lain-lain - bersih dan dicatat dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

f. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP menetapkan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

g. Administrasi

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

***26. INCOME TAX** (continued)*

***e. Tax assessment letters** (continued)*

During 2023, the Company also received the results of the objection decisions on Notice of Tax Underpayment Assessment ("SKPKB") of VAT Collecter and PPh 23 for fiscal year 2021 and have charged amounting to Rp460 as part of other expenses-net is recognised in profit or loss for the year ended 31 December 2023.

f. Tax rates

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law stipulates that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

g. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Transactions with related parties

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PLN	Pemegang saham Perusahaan/ *Shareholder of the Company*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
YPK PLN	Pemegang saham Perusahaan/ *Shareholder of the Company*	Penyertaan modal/ *Paid-in capital*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Direktur dan Komisaris grup/ *Directors and Commissioners of the Group*	Pembayaran gaji dan tunjangan/ *Payment of salaries and allowances*
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents and short-term investment*
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents and short-term investment*
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents and short-term investment*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/91 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan: (lanjutan)

27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Transactions with related parties *(continued)*

Below is the list of related parties with which the Company has transactions: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents and short-term investment*
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Nusantara Regas ("NR")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
AJI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi milik Perusahaan/ *Insurance services for Company's buildings, installations and power plants, and transmission equipment*
Pelindo	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Sewa/ *Lease*
REP, GCL dan/*and* PDG	Ventura bersama/ *Joint ventures*	Investasi, pemberian pinjaman, perdagangan batu bara, jasa pemeliharaan dan pengelolaan, sewa/ *Investment, issuance of loan, trade of coals, operations and maintenance services, lease*
IPB, PLNSC, IRT dan/*and* MCB	Entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Associates and joint ventures*	Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Investment in associates and joint ventures*
PNP	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi lain-lain/ *Other transactions*
PT Haleyora Power ("Haleyora")	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi penyediaan tenaga kerja/ *Transfer of labour transaction*
ICON+	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi penyedia layanan internet/ *Internet service provider transaction*
PLN B	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
DP-PLN	Pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pengelola dana pensiun/ *Pension fund manager*
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi jasa profesional/ *Professional services transaction*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG")	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara/ *Fuels and coal transportation services transaction*
PLN EG	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Sewa/ *Lease*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/92 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES** (continued)*

Saldo dengan pihak berelasi

Balances with related parties

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 2023* Rp	%**)	31 Desember/ *December 2022** Rp	%**)	1 Januari/ *January 2022** Rp	%**)	
Kas dan setara kas	7							***Cash and cash equivalents***
BNI		3,216,844	0.83%	3,131,609	0.84%	2,362,689	0.68%	*BNI*
Bank Mandiri		195,200	0.05%	338,745	0.09%	312,825	0.09%	*Bank Mandiri*
BRI		86,021	0.02%	106,447	0.03%	89,022	0.03%	*BRI*
BSI		27,150	0.01%	50,296	0.01%	-	0.00%	*BSI*
Jumlah		**3,525,215**	**0.91%**	**3,627,097**	**0.97%**	**2,764,536**	**0.80%**	***Total***
Piutang usaha	8							***Trade receivables***
PLN		52,062,808	13.48%	27,744,036	7.41%	25,409,072	7.37%	*PLN*
GCL		55,284	0.01%	41,594	0.01%	165,059	0.05%	*GCL*
PNP		9,143	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	*PNP*
REP		4,049	0.00%	566	0.00%	-	0.00%	*REP*
IPB		2,144	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	*IPB*
Lain-lain		2,493	0.00%	699	0.00%	-	0.00%	*Other*
Jumlah		**52,135,921**	**13.49%**	**27,786,895**	**7.42%**	**25,574,131**	**7.42%**	***Total***
Aset keuangan dari konsesi jasa	10							***Financial assets of service concession***
PLN		1,148,788	0.30%	41,771,897	11.16%	43,791,382	13%	*PLN*
Piutang pihak berelasi	11							***Receivables from related parties***
REP		437,855	0.11%	415,493	0.21%	358,699	0.10%	*REP*
PLN		240,839	0.06%	154,594	0.08%	145,446	0.04%	*PLN*
SGPJB		195,167	0.05%	168,910	0.09%	6,795	0.00%	*SGPJB*
GCL		58,923	0.02%	70,422	0.04%	-	0.00%	*GCL*
PNP		55,566	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	*PNP*
PDG		36,387	0.01%	79,733	0.04%	114,012	0.04%	*PDG*
IPB		1,411	0.00%	3,402	0.00%	243	0.00%	*IPB*
Lain-lain		93,857	0.02%	176,145	0.09%	157,152	0.05%	*Other*
Jumlah		**1,120,005**	**0.28%**	**1,068,699**	**0.55%**	**782,347**	**0.23%**	***Total***
Utang usaha	15							***Trade payables***
PTBA		1,307,618	3.21%	698,840	4.20%	309,899	2.03%	*PTBA*
Pertamina		1,249,216	3.07%	576,555	3.47%	1,366,545	8.97%	*Pertamina*
PLN B		1,125,171	2.76%	465,361	2.80%	870,432	5.72%	*PLN B*
BAG		583,636	1.43%	144,164	0.87%	61,944	0.41%	*BAG*
Lain-lain		1,484,206	3.65%	810,069	4.87%	639,857	4.20%	*Other*
Jumlah		**5,749,847**	**14.12%**	**2,694,989**	**16.21%**	**3,248,677**	**21.33%**	***Total***
Beban yang masih harus dibayar								***Accrued expenses***
PLN		354,360	0.42%	165,440	0.99%	152,593	0.51%	*PLN*
Pinjaman dari pemegang saham								***Loans from a shareholder***
PLN	27	1,759,499	4.32%	1,412,202	8.49%	1,546,722	5.13%	*PLN*
Liabilitas sewa	16							***Lease liabilities***
PLN		1,189,674	2.92%	60,228	0.00%	77,090	0.50%	*PLN*
Pelindo		1,138,102	2.80%	809,497	3.00%	1,116,388	7.29%	*Pelindo*
PDG		990,143	2.43%	717,449	2.00%	793,539	5.18%	*PDG*
PLN EG		483,141	1.19%	-	0.00%	-	0.00%	*PDG*
Jumlah		**3,801,060**	**9.34%**	**1,587,174**	**9.53%**	**1,987,017**	**12.97%**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

**) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan.

*) *As restated, see Note 6*

**) *Percentage of related total assets/liabilities/revenues/ expenses.*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/93 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

	Catatan/ Notes	2023 Rp	2023 % **)	2022* Rp	2022* % **)	
Pendapatan konsesi jasa	10					***Revenue of service concession***
PLN		268,658	0.26%	15,541,932	19.17%	*PLN*
Penjualan tenaga listrik	21					***Sales of electricity***
PLN		101,934,634	98.50%	64,371,392	79.38%	PLN
Pendapatan jasa	22					***Service revenue***
PLN		923,536	0.89%	844,995	1.04%	*PLN*
GCL		306,363	0.29%	322,155	0.40%	*GCL*
PNP		44,616	0.04%	8,274	0.01%	*PNP*
REP		2,304	0.00%	1,818	0.00%	*REP*
Jumlah		**1,276,819**	**1.22%**	**1,177,242**	**1.45%**	**Total**
Beban usaha						***Operating expenses***
PTBA		8,744,166	10.34%	6,150,134	14.28%	*PTBA*
PGN		3,572,641	4.22%	2,512,786	5.83%	*PGN*
PLN B		3,291,207	3.89%	2,314,842	5.37%	*PLNB*
BAG		3,225,060	3.81%	2,268,318	5.27%	*BAG*
Pertamina		3,004,855	3.55%	2,113,439	4.91%	*Pertamina*
NR		594,479	0.70%	418,121	0.97%	*NR*
PT Haleyora Power		69,317	0.08%	48,754	0.11%	*PT Haleyora Power*
ICON+		30,729	0.04%	21,613	0.05%	*ICON+*
AJI		21,152	0.03%	14,877	0.03%	*AJI*
PLNE		17,445	0.02%	12,270	0.03%	*PLNE*
PNP		5,948	0.01%	4,183	0.01%	*PNP*
Lain-lain		201,367	0.24%	141,630	0.33%	*Other*
Jumlah		**22,778,366**	**26.93%**	**16,020,967**	**37.19%**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

**) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/ beban yang bersangkutan.

**) *Percentage of related total assets/liabilities/revenues/ expenses.*

a. Pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 12 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar US$213.901.481 dengan tingkat bunga LIBOR dengan *margin* 0,70% per tahun. Lalu pada tanggal 30 Desember 2022, terdapat amandemen kontrak untuk merubah referensi angka bunga pinjaman menjadi bunga SOFR dengan *spread adjustment* 0,42826% dengan *margin* 0,70% per tahun. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek PLTGU Tambak Lorok Blok III. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada saat semua kewajiban pokok maupun bunga telah dibayar penuh oleh Perusahaan.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.759.499 (setara US$113.964.562) (2022: Rp1.412.202 (setara US$90.572.249).

a. Loans from a shareholder

On 12 November 2018, the Company entered into a loan agreement with PLN amounting to US$213,901,481 with interest rates of LIBOR with a margin of 0.70% per annum. On 30 December 2022, there was a contract amendment to change the loan interest rate reference to interest rates of SOFR with a spread adjustment of 0.42826% with a margin of 0.70% per year.This loan will be used to fund the add-on project of PLTGU Tambak Lorok Blok III. The term of this agreement was effective when the loan was signed and ends when all the outstanding principal and interest has been fully paid by the Company.

The outstanding balance of these loans as at 31 December 2023 amounting to Rp1,759,499 (equivalent to US$113,964,562) (2022: Rp1,412,202 (equivalent to US$90,572,249).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/94 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp121.384 dan Rp70.365. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tersebut merupakan imbalan kerja jangka pendek.

***27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Key management compensation

Total remuneration paid to the Company's Boards of Commissioners and Directors in 2023 and 2022 amounting to Rp121,384 and Rp70,365, respectively. All the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors represents short-term employee benefits.

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. PJBTL

Grup memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Grup sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 0357.K/DIR/2022 tanggal 28 November 2022 tentang tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN Hukum Akhir Periode/Tahap, dan keputusan RUPS sirkuler Perusahaan tanggal 21 September 2022 dan 30 Desember 2022, terdapat perubahan dan pernyataan Kembali atas PJBTL antara Perusahaan dan PLN.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani 24 amendemen dan pernyataan kembali PJBTL yang terdiri dari: 8 Buku PJBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 Buku PJBTL atas wilayah Sumatra, 6 atas Buku PJBTL atas wilayah Kalimantan, dan 3 Buku PJBTL atas wilayah Sulawesi. Amendemen dan pernyataan kembali PJBTL tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As at 31 December 2023, the Group has significant commitments and contingencies, as follows:

a. PPA

The Group has various PPAs with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Group for the supply of electricity at an amount determined in accordance with the payment formula. Such payment formula includes cost of capacity, energy, as well as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Based on the Decree of the Board of Directors of PLN No. 0357.K/DIR/2022 dated 28 November 2022 regarding the follow-up to the establishment of the Subholding of PLN Legal-End of Period/Phase, and the Company's circular GMS on 21 September 2022 and 30 December 2022, there are amendments and restatements of the PPA between the Company and PLN.

On 30 December 2022, PLN and the Company have signed 24 amendments and restatements of the PPA consisting of: 8 books of PPA for the Java-Bali area, 7 books of PPA for the Sumatra area, 6 books of PPA for the Kalimantan area, and 3 books of PPA for the Sulawesi area. The amendments and restatements of these PPA will become effective on 1 January 2023 with a contract period from 2023 up to 2032.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/95 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar

b. Fuel supply agreements

(i) Gas

(i) Gas

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Suppliers*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Periode/ *Duration*	Satuan/ *Unit of measure*	Jumlah yang disepakati/ *Agreed quantity*)*
Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Gas)	PPJBG: 0556.PJ/EPI.01.02/010000/2019 KGT:0042.Pj/HKM.02.02/PLNEPI0100/2023	2019 - 2030 2023 – 2024	BBTUD	30 - 36
	BP Berau (LNG)	Perjanjian Jual dan Beli antara PT PLN (Persero) sebagai pembeli dan Tangguh PSC sebagai penjual/*LNG Sale and Purchase Agreement between PT PLN (Persero) as Buyer and the Tangguh PSC Contract Parties as Sellers*	2014 - 2033	Standar Kargo LNG/*Cargo LNG Standard*	Program pengiriman tahunan/ *Annual Delivery Program (ADP)*
	PT Pertamina (LNG)	MSPA: 1265.PJ/EPI.01.02/DITDAN/2018 Amendemen II: 1275/Amd/DAN.01.01/ PLNEPI0100/2023	2017 - 2026	Standar Kargo LNG/*Cargo LNG Standard*	Lampiran konfirmasi/ *Confirmation Notice*
	1. PT Pertamina 2. Eni East Sepinggan Limited 3. Neptune Energy East Sepinggan B.V. 4. PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan (LNG)	MSPA: 112.PJ/061/IP/2023 Amendemen II/*Amendment II*: 2242.Amd/ EPI.01.02/PLNEPI0100/2023	2023 - 2024	Standar Kargo LNG/*Cargo LNG Standard*	Lampiran konfirmasi/ *Confirmation Notice*
	PT Perusahaan Gas Negara (FSRU Lampung)	KB: 1010.Pj/EPI.01.02/E01010000/2022	2022 - 2024	BBTUD	s.d/*up to* 250
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Gas)	PPJBG: 0556.PJ/EPI.01.02/010000/2019 KGT: 0042.Pj/HKM.02.02/PLNEPI 0100/2023	2019 - 2030 2023 - 2024	BBTUD	30 - 36
	PT Perusahaan Gas Negara (FSRU Lampung)	KB: 1010.Pj/EPI.01.02/E01010000/2022 Amendemen: 1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI 0100/2023	2022 - 2024	BBTUD	s.d/*up to* 250
	PT Pertamina (Gas JTB)	1670.Pj/EPI01.02/DIRUT/2017	2021 - 2035	BBTUD	100 (*Take or Pay* ("TOP") 90%)
Grati	1. Medco Energi Sampang Pty Ltd 2. Singapore Petroleum Sampang Ltd 3. Cue Sampang Pty.Ltd. (Gas Sampang)	Perjanjian penjualan gas/*Gas Sales Agreement*	2004 - 2024	BBTUD	s.d/*up to* 30 (TOP 95%)
	Kangean Energy Indonesia Ltd (Gas TSB)	462.Pj AMD II/040/DIR/2010	2012 - 2028	BBTUD	20 - 50 (TOP 90%)
	PT Pertamina Gas (Pipa Gas)	0056-1.Pj/040/DIR/2014	2014 - 2033	MMSCFD	s.d/*up to* 100 (TOP 80)
	BP Berau (LNG)	Perjanjian Jual dan Beli antara PT PLN (Persero) sebagai pembeli dan Tangguh PSC sebagai penjual/*LNG Sale and Purchase Agreement Between PT PLN (Persero) as Buyer and the Tangguh PSC Contract Parties as Sellers*	2014 - 2033	Standar Kargo LNG/*Cargo LNG Standard*	Program pengiriman tahunan/ *Annual Delivery Program (ADP)*
	PT Pertamina (LNG)	MSPA: 1265.PJ/EPI.01.02/DITDAN/2018 Amendemen II: 1275/Amd/DAN.01.01/ PLNEPI0100/2023	2017 - 2026	Standar Kargo LNG/*Cargo LNG Standard*	Lampiran konfirmasi/ *Confirmation Notice*
Bali	1. PT Pertamina 2. Eni East Sepinggan Limited 3. Neptune Energy East Sepinggan B.V. 4. PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan (LNG)	MSPA: 112.PJ/061/IP/2023 Amendemen II: 2242.Amd/EPI.01.02/ PLNEPI0100/2023	2023 - 2024	Standar Kargo LNG/*Cargo LNG Standard*	Lampiran konfirmasi/ *Confirmation Notice*

*) Dalam angka penuh

*In full amount *)*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/96 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

28. *SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

b. *Fuel supply agreements* *(continued)*

(i) Gas (lanjutan)

(i) *Gas (continued)*

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Suppliers*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Periode/ *Duration*	Satuan/ *Unit of measure*	Jumlah yang disepakati/ *Agreed quantity*)*
UBP Keramasan	Medco E&P Lematang & Medco E&P Indonesia	0584-1.Pj/03.02/DIRUT/2017	2017 - 2027	BBTUD	20 (TOP 90%)
	Pertamina Gas (Pertagas PEP)	0633.Pj/EPI.01.02/010303/2019 Amendemen III	2019 - 2024	MMSCFD	*Minimum Disaster Recovery Center* ("DRC") 2019- 2020 :11 2020-2021 :6.94 2022: 6.82 2023-2024: 2.23
	Pertamina Gas (Pertagas Medco)	719/MGT/MEDC/XII/2014 Amendemen IV	2020 - 2027	MMSCFD	*Minimum DRC* Indralaya 2020- 2027: 6.6 Borang 2020-2027: 9.14 Keramasan 2020-2027: 1.95
UBP Mahakam	Pertamina (Persero)	KB No:0276.PJ/EPI.01.02/ C01050000/2022 Amendemen KB Kedua No: 0010.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023	2022 - 2024	BBTUD	*2022: 8 2023:* s.d/*up to 11.7 (TOP 75% Annual Contract Quantity* ("ACQ")) *2024:* s.d/*up to 18.3 (TOP 75% ACQ)*
	Pertamina Gas (Pertagas)	0063.PJ/041/DIR/2013 Amendemen III	2018 - 2028	MMSCFD	*2020-2028 DRC : 5.333*

*) Dalam angka penuh

*In full amount *)*

(ii) Batubara

(ii) *Coal*

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Jumlah dalam metrik ton/ *Total in metric tons*)*	Periode/ *Period*
Suralaya 1-7	PT Bukit Asam	12.PJ/061/IP/2013	5,200,000	2013 - 2025
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jabar 2 Pelabuhan Ratu Labuhan Angin	PT Bukit Asam	303.PJ/041/DIR/2012	18,000,000	2012 - 2032
Suralaya 1-7	PT Oktasan Baruna Persada	405.PJ/061/IP/2018	2,100,000	2018 - 2026
Suralaya 1-7	PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	2,232,000	2009 - 2025
Suralaya 1-7	PT Multi Harapan Utama	373.PJ/061/IP/2022	1,000,000	2022 - 2026
Banten 1 Suralaya	PT Titan Infra Energy	086.PJ/123/DIRUT/2007	2,920,000	2007 - 2027
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar	Konsorsium PT. Arutmin Indonesia dan PT. Darma Henwa	079.PJ/123/DIRUT/2007 078.PJ/123/DIRUT/2007 211.PJ/123/DIRUT/2007	5,203,000	2007 - 2027
Asam - Asam	Konsorsium PT. Arutmin Indonesia dan PT. Darma Henwa	077.PJ/123/DIRUT/2007	350,000	2007 - 2027
Banten 2 Labuan Teluk Sirih Pangkalan Susu Jateng 2 Adipala	Konsorsium PT. Arutmin Indonesia dan PT. Darma Henwa	420.PJ/123/DIRUT/2008	2,005,000	2008 - 2027
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jateng 2 Adipala	Konsorsium PT Exploitasi Energi Indonesia dan PT Borneo Indobara	0200-3.PJ/EPI.01.01/C01050000/ 2022	1,350,000	2022 - 2027

*) Dalam angka penuh

*In full amount *)*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/97 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

(ii) Batubara (lanjutan)

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp770.062 (angka penuh) dan Rp1.405.666 (angka penuh) per ton sebelum penyesuaian spesifikasi batubara (2022: Rp Rp727.931 - Rp1.054.435 (angka penuh).

(iii) Bahan Bakar Minyak

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;

Harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3% sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011. Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai surveyor independen.

28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Fuel supply agreements *(continued)*

(ii) Batubara (continued)

The purchase price of coal ranges from Rp770,062 (full amount) to Rp1,405,666 (full amount) per ton, which is adjusted against coal specification (2022: Rp727,931 - Rp1,054,435 (full amount).

(iii) Fuel

The Company, through PLN and Pertamina, entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated 8 October 2001. This agreement was amended on 16 May 2007, whereby the Company and Pertamina agreed among others, that: (i) the monthly fuel price to be used for the period 1 January until 30 April 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore ("MOPS") plus VAT for the period 1 May 2007 until 31 December 2007;

The fuel price subsequent to 31 December 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; until it is resolved by issuing PLN bonds no later than 31 August 2007; (iv) effective on 1 May 2007, the unpaid balance of payables for the purchases of fuel until 30 April 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than 31 August 2007; (v) the maximum payable to Pertamina includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from 1 January 2007 until 31 December 2011. Based on the Joint Deal Letter dated 16 May 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/98 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

(iii) Bahan Bakar Minyak (lanjutan)

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 17 Desember 2021, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak ("HSD dan MFO") sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada amendemen untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
b. Sehubungan dengan hal tersebut, formula harga baru akan disepakati untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 1 Januari 2022, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar dari Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp 1.249.216, Rp576.555 dan Rp1.366.545.

(iv) Uap panas bumi

Melalui PLN, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amandemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amendemen ke lima Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PLN dan PIP. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amendemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak dan Darajat perjanjian berlaku selama 30 tahun sampai tahun 2030.

28. *SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

b. Fuel supply agreements *(continued)*

(iii) Fuel (continued)

The agreement has been amended several times. Based on Amendment VIII dated 17 December 2021, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from 1 January 2021 to 31 December 2023 between Pertamina and the Company is as follows:

a. During the negotiation period, the new price formula for the period of 1 January 2021 to 31 December 2021, using the provisional price formula was agreed in the amendment for the period of 1 January 2018 to 31 December 2020.
b. Based on the above situation, a new price formula will be agreed for the period starting from 1 January 2022 to 31 December 2023.

As at 31 December 2023, 2022, and 1 January 2022, the trade payables outstanding for purchase of fuel from Pertamina amounting to Rp1,249,216, Rp576,555 and Rp1,366,545 respectively.

(iv) Geothermal steam

The Company, through PLN, entered into a geothermal procurement agreement with Pertamina to purchase Geothermal Steam for Kamojang area for 30 years until 2012 and the agreement has been amended under amendment I between Pertamina and PLN PLTP Unit 1,2,3 in Kamojang. Until 2015, the agreement was still using the Fifth amendment of the Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PLN and PIP. On 11 February 2016, the main agreement was wholly amended and restated, which is valid from 1 August 2012 to 31 December 2040. For PLTP Gunung Salak and Darajat, the agreement is valid for 30 years until 2030.



PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/99 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Komitmen

Stand by Letter of Credit ("SBLC")

Perusahaan memiliki fasilitas *non-Cash Loan* berupa SBLC dengan Bank Negara Indonesia yang digunakan sebagai jaminan jual beli gas dengan Medco Energi Sampang Pty. Ltd dengan nominal US$4.104.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp64.990 dengan jangka waktu sampai dengan 14 Januari 2025.

28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Commitments

Stand by Letter of Credit ("SBLC")

The Company has a non-Cash Loan facility of SBLC with Bank Rakyat Indonesia and Bank Negara Indonesia, which is used as a gas purchase guarantee from Medco Energi Sampang Pty. Ltd amounting to US$4,104,000 (full amount) or equivalent to Rp64,990 with a maturity date of 14 January 2025.

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan dari konsesi jasa sebesar Rp58.205.951 (31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022: Rp74.522.702 dan Rp73.113.906) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mengklasifikasikan utang usaha, pinjaman dari pemegang saham, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas sewa, sebesar Rp17.027.053 (31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022: Rp10.600.503 dan Rp12.839.442) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Grup membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan ("DIVMRK") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Grup. DIVMRK bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

As at 31 December 2023, the Group classified its cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and financial assets of service concession amounting to Rp58,205,951 (31 December 2022 and 1 January 2022: Rp74,522,702 and Rp73,113,906) as financial assets at amortised cost.

As at 31 December 2023, the Group classified its trade payables, loans from a shareholder, accrued expenses and lease liabilities amounting to Rp17,027,053 (31 December 2022 and 1 January 2022: Rp10,600,503 and Rp12,839,442) as financial liabilities carried at amortised cost.

b. Financial risk management objectives and policies

The Group's overall financial risk management and policies aim to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing its exposure to financial risk, which is market risk (including foreign currency risk and interest rate risk) credit risk and liquidity risk. The Group operates within defined policies that are approved by the Board of Directors.

In managing those risks, the Group established a Risk Management and Compliance Division ("DIVMRK") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Group's management. DIVMRK is accountable to the Development and Commercial Director.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/100 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Grup telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Grup mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

Dalam kaitannya dengan risiko keuangan, manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Grup. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Grup adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima. Grup mencadangkan jumlah mata uang asing pada saat nilai tukar rupiah menguat dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

The Group has established a risk taxonomy by dividing risk into five categories, which are strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Group considers prioritisation based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Related to the financial risk, management evaluates and establishes policies for managing each of these risks. The Group applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial risks on the Group's financial performance. The summary of the financial risk management policies is as follows:

i. Foreign currency risk management

The Group undertakes many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits. The Group reserves the foreign currency amount at times the Rupiah strengthens, with amounts as needed.

Foreign currency sensitivity

The following table details the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in the Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonable possible change in foreign exchange rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis only includes net of tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/101 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

Analisa sensitivitas ini tidak memperhitungkan dampak dan perubahan kurs mata uang asing yang dapat dikapitalisasi sebagai aset pekerjaan dalam penyelesaian sesuai dengan PSAK No. 26, "Biaya Pinjaman".

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

i. Foreign currency risk management *(continued)*

Foreign currency sensitivity *(continued)*

This sensitivity analysis does not consider the potential changes to the amount of foreign exchange differences that can be capitalised as construction in progress assets in accordance with SFAS No. 26, "Borrowing Costs".

Dampak terhadap laba setelah pajak/*Effect on profit net of tax*
31 Desember/*31 December 2023*

	US$		EUR		Other		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan setara kas	8,105	(8,105)	1,139	(1,139)	808	(808)	*Cash and cash equivalent*
Piutang lain-lain pihak berelasi	36,647	(36,647)	-	-	-	-	*Other receivables from related parties*
Subjumlah	44,752	(44,752)	1,139	(1,139)	808	(808)	*Subtotal*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Utang usaha	36,114	(36,114)	120	(120)	95	(95)	*Trade payables*
Pinjaman pemegang saham	140,232	(140,232)	-	-	-	-	*Loans from shareholders*
Subjumlah	176,346	(176,346)	120	(120)	95	(95)	*Subtotal*
Jumlah	**(131,594)**	**131,594**	**1,019**	**(1,019)**	**713**	**(713)**	***Total***

Dampak terhadap laba setelah pajak/*Effect on profit net of tax*
31 Desember/*31 December 2022**

	US$		EUR		Other		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan setara kas	31,326	(31,326)	539	(539)	4,121	(4,121)	*Cash and cash equivalent*
Piutang lain-lain pihak berelasi	38,454	(38,454)	-	-	-	-	*Other Receivables from related parties*
Subjumlah	69,780	(69,780)	539	(539)	4,121	(4,121)	*Subtotal*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Utang usaha	27,136	(27,136)	183	(183)	228	(228)	*Trade payables*
Pinjaman pemegang saham	88,473	(88,473)	-	-	-	-	*Loans from shareholders*
Subjumlah	115,609	(115,609)	183	(183)	228	(228)	*Subtotal*
Jumlah	**(45,829)**	**45,829**	**356**	**(356)**	**3,893**	**(3,893)**	***Total***

Dampak terhadap laba setelah pajak/*Effect on profit net of tax*
31 Desember/*31 December 2021**

	US$		EUR		Other		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan setara kas	60,295	(60,295)	1,226	(1,226)	3	(3)	*Cash and cash equivalent*
Piutang lain-lain pihak berelasi	36,510	(36,510)	-	-	-	-	*Other Receivables from related parties*
Subjumlah	96,805	(96,805)	1,226	(1,226)	3	(3)	*Subtotal*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Utang usaha	10,106	(10,106)	1,843	(1,843)	566	(566)	*Trade payables*
Pinjaman pemegang saham	120,644	(120,644)	-	-	-	-	*Loans from shareholders*
Subjumlah	130,750	(130,750)	1,843	(1,843)	566	(566)	*Subtotal*
Jumlah	**(33,945)**	**33,945**	**(617)**	**617**	**(563)**	**563**	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

**) As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/102 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Grup hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat suku bunga yang relevan dengan variabel lainnya dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan/penurunan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan lebih tinggi/rendah masing-masing Rp9.181 dan Rp10.825.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

ii. Interest rate risk management

As at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022, management believes that the exposure from interest rate risk is minimal because the Group is exposed interest rate risk only from cash in banks and loans from a shareholder.

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments net of tax at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the reporting period end date was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 50 basis points increase or decrease represents the management's assessment of reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

As at 31 December 2023 and 2022, if interest rate increased/decreased by 50 basis points, with all other variables constant, the profit net of tax for the current year would increase/decrease by Rp9,181 and Rp10,825, respectively.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/103 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Eksposur risiko kredit Grup timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas di bank dan deposito berjangka, Grup mengelola rekening pada beberapa bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Grup menempatkan dana pada beberapa Bank yang kredibel (Catatan 7).

Jumlah tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2023, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp58.205.905 (2022: Rp74.377.189) yang terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan dari konsesi jasa.

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank asing dan lokal yang memiliki reputasi.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

Pelanggan utama Grup adalah PLN. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, PLN memberikan kontribusi 99,65% dan 95,59% dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit PLN rendah dimana Grup telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN untuk penjualan listrik dan pelaksanaan jasa lainnya.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iii. Credit risk management

Credit risk arises from the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Group. The Group exposures to credit risk mainly arise from receivables from its customers. For other financial assets such as cash in banks and time deposits, in order to minimise the credit risk and to avoid significant concentration of cash with one institution, the Group places the funds in several credible banks (Note 7).

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for ECL, represents the Group's exposure to credit risk. As at 31 December 2023, the total maximum exposure from credit risk was Rp58,205,905 (2022: Rp74,377,189), which consists of cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables and financial assets of service concession.

All the cash in banks and time deposits are placed in reputable foreign and local banks.

The Group's objective is to seek continual revenue growth while minimising losses incurred due to increase of credit risk exposure.

The Group's main customer is PLN. For the years ended 31 December 2023 and 2022, the sales from PLN make up 99.65% and 95.59% of the total net revenues. Management believes that the credit risk is limited because the credit default of PLN is low, since the Group has a legally binding agreement with PLN for electricity sales transactions and other services.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/104 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai penyisihan *ECL* untuk semua piutang. Grup telah mencatat pengurangan atas penyisihan kerugian kredit sebesar Rp6.260 pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: penambahan atas penyisihan kerugian kredit sebesar Rp45.736). Tidak ada pergerakan lain dalam penyisihan kerugian kredit.

Seluruh saldo terutang dari piutang usaha dan piutang lainnya di atas terutama berasal dari pelanggan/pihak ketiga/pihak berelasi yang sudah bertransaksi dengan Grup lebih dari 12 bulan dan tidak memiliki sejarah wanprestasi.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mendapatkan fasilitas *non-cash loan* dari beberapa bank khususnya untuk pembukaan L/C dan Bank Garansi.

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja berkelangsungan dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iii. Credit risk management *(continued)*

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, the impairment loss should be applied individually.

At the end of each reporting period, the Group is required to assess an allowance for ECLs for all receivables. The Group has recorded deduction of credit loss allowance amounting to Rp6,260 as of 31 December 2023 (2022: additions of credit loss allowance amounting to Rp45,736). There are no other movements within the credit loss allowance.

The entire outstanding balances from trade receivables and other receivables are mostly derived from customers/third parties/related parties which have transacted with the Group for more than 12 months and do not have any history of default.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management is in the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group obtained non-cash loan facilities from several banks, in particular for opening L/C and Bank Guarantee.

Furthermore, the Group maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital needs by maintaining adequate amounts of cash and cash equivalents that can be easily converted into cash when experiencing unexpected disruptions from cash collection.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/105 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat suku bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva tingkat suku bunga pada akhir periode. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar.

Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan termasuk estimasi pembayaran bunga:

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iv. Liquidity risk management *(continued)*

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment periods as at 31 December 2023 and 2022. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Group is required to pay. To the extend that interest flows are floating rate, the undiscounted cash flow is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	31 Desember/*31 December* 2023					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha	9,610,778	-	-	-	9,610,778	*Trade payables*
Beban yang masih harus dibayar	479,540	-	-	-	479,540	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	1,103,872	2,042,018	1,439,192	5,000,419	9,585,501	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	325,034	564,805	514,442	877,034	2,281,315	*Loan from a shareholder*
	11,519,224	**2,606,823**	**1,953,634**	**5,877,453**	**21,957,134**	

	31 Desember/*31 December* 2022*)					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha	5,902,626	-	-	-	5,902,626	*Trade payables*
Utang lain-lain	595	-	-	-	595	*Others payables*
Beban yang masih harus dibayar	279,960	-	-	-	279,960	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	705,753	1,232,848	874,510	2,614,131	5,427,242	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	335,291	340,967	319,335	704,320	1,699,913	*Loan from a shareholder*
	7,224,225	**1,573,815**	**1,193,845**	**3,318,451**	**13,310,336**	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/106 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan termasuk estimasi pembayaran bunga: (lanjutan)

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iv. Liquidity risk management *(continued)*

The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments: (continued)

	1 Januari/*1 January* 2022*)					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha	7,261,050	-	-	-	7,261,050	*Trade payables*
Utang lain-lain	327	-	-	-	327	*Others payables*
Beban yang masih harus dibayar	429,296	-	-	-	429,296	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	986,883	1,429,711	1,014,152	2,870,335	6,301,081	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	335,291	340,967	319,335	704,320	1,699,913	*Loan from a shareholder*
	9,012,847	**1,770,678**	**1,333,487**	**3,574,655**	**15,691,667**	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

c. Manajemen modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

c. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

The Board of Directors of the Group periodically reviews capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Group seeks to minimise the cost of capital, in order to maximise its value. Therefore, the Group's policy is to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.

d. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

d. Fair value estimation

The fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

The fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/107 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

e. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

PSAK No. 68, "Pengukuran nilai wajar", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

f. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas keuangan berikut ini tunduk kepada saling hapus, tunduk pada pengaturan induk untuk penyelesaian secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT** (continued)*

***e. Fair value estimation** (continued)*

SFAS No. 68, "Fair value measurement", requires disclosure of fair value measurements through the following fair value measurement hierarchy:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

f. Offsetting financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position where the Group currently has a legally enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The following financial assets and liabilities are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements as at 31 December 2023 and 2022:

	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui/ *Gross amounts of recognised financial instruments*	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui disalinghapuskan di laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Gross amounts of recognised financial instruments offset in the consolidated statement of financial position*	Jumlah bersih/ *Net amount*	
31 Desember 2023				***31 December 2023***
Aset keuangan				***Financial assets***
Piutang usaha	53,055,391	(833,804)	52,221,587	*Trade receivables*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	10,495,612	(833,804)	9,661,808	*Trade payables*
31 Desember 2022				***31 December 2022***
Aset keuangan				***Financial assets***
Piutang usaha	28,581,761	(713,302)	27,868,459	*Trade receivables*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	6,615,928	(713,302)	5,902,626	*Trade payable*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/108 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI ARUS KAS / *30. CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi nonkas / *a. Non-cash transactions*

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi nonkas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the years as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			***Non-cash activities:***
Selisih dari kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali sehubungan dengan pengalihan bisnis pembangkit listrik ke Perusahaan melalui penerbitan saham Perusahaan (Catatan 6)	175,974,993	-	*Difference from business combination with entities under common control in connection with the transfer of the power generation business to the Company through the issuance of shares (Note 6)*
Pengurangan aset keuangan dari konsesi jasa atas pengakhiran konsesi jasa	40,511,862	-	*Decrease of financial assets of service concessions due to termination of service concessions*
Perolehan aset tetap dari pengakhiran konsesi jasa	31,162,141	-	*Additions of property, plant and equipment from termination of service concessions*
Pengurangan piutang usaha melalui utang usaha	17,486,501	5,479,229	*Decrease of trade receivables from deduction trade payables*
Pembayaran dividen melalui pengurangan piutang usaha dari pihak berelasi	5,759,265	4,027,169	*Dividend payments through deducting trade receivables from related parties*
Perolehan aset hak guna melalui liabilitas sewa	2,804,918	123,765	*Additions of right-of-use assets through lease liabilities*
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	247,465	273,375	*Additions of property, plant and equipment through to trade payables*
Penambahan aset tetap dari kapitalisasi bunga pinjaman	88,999	35,403	*Additions of property, plant and equipment from loan interest capitalisation*
Penambahan piutang lain-lain pihak berelasi atas piutang dividen	54,327	73,698	*Additions of other receivables from related parties from dividend receivable*
Penambahan piutang lain-lain pihak berelasi dari kapitalisasi bunga	26,884	72,178	*Additions of other receivables from related parties through interest capitalisation*
Penambahan aset tetap dari aset tidak lancar lain	-	82,388	*Additions of property, plant and equipment from other non-current assets*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/109 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI ARUS KAS / *CASH FLOW INFORMATION*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan / *Reconciliation of liabilities arising from financing activities*

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The below tables set out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cash flows*	Perubahan transaksi nonkas/ *Non-cash changes* Penambahan/ *Additions*	Perubahan mata uang asing/ *Changes in foreign exchange rate*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2023						***31 December 2023***
Pinjaman dari pemegang saham	1,412,202	(272,920)	618,262	1,955	1,759,499	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	3,005,715	(684,427)	2,804,918	-	5,126,206	*Lease liabilities*
31 Desember 2022*						***31 December 2022***
Pinjaman dari pemegang saham	1,546,722	(272,885)	-	138,365	1,412,202	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	3,603,274	(721,324)	123,765	-	3,005,715	*Lease liabilities*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 6

*) *As restated, see Note 6*

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA / *EVENTS AFTER BALANCE SHEET DATE*

Pada tanggal 31 Januari 2024, IPRen salah satu anak Perusahaan dari Grup, telah melakukan penambahan setoran modal sejumlah Rp77.500 kepada TMAI.

On 31 January 2024, IPRen one of the Group's subsidiaries, has made additional capital injection amounting to Rp77,500 to TMAI.

32. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / *MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan laporan tersebut telah disetujui oleh Dewan Direksi untuk diterbitkan pada 5 April 2024.

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were responsibilities of the management and the statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 5 April 2024.

Expanding Sustainable Business to be the Leader in the Energy Solutions Industry

PLN Indonesia Power

PT PLN Indonesia Power

Kantor Pusat Head Office
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12950
Indonesia

(021) 5267666
(021) 5251923, 5252623
kontak-ip@plnindonesiapower.co.id
www.plnindonesiapower.co.id